BUMN UNTUK INDONESIA

INDONESIA POWER



RAISING FUTURE ENERGY, STRENGTHENING SUSTAINABILITY

Laporan Tahunan
Annual Report
2021



HENDRA YUDISAPUTRO
(PLTU SPP Pelabuhan Ratu OMU)

Berhasil menggagas Pembudayaan dan Peningkatan Manajemen Efisiensi di PT PLN KIT Sumbagsel dan Indonesia Power (Penghargaan Presiden Satya Lencana)
Pioneering Efficiency Management Enculturation and Enhancement at PT PLN KIT Sumbagsel and Indonesia Power (Satyalancana Medal from the President of the Republic of Indonesia)

ANDI TAUFIK SAPUTRA
(PLTU SPP Pelabuhan Ratu OMU)

Berhasil Meningkatkan Efisiensi Pembangkit Melalui Pembangunan Aplikasi Nemesys (Penghargaan Presiden Satya Lencana)
Enhancing Power Plant Efficiency through Nemesys App Development (Satyalancana Medal from the President of the Republic of Indonesia)

NUR KHOIRIYAH
(PLTU SPP Banten 1 Suralaya OMU)

Juara 2 PLTU Suralaya Unit 8 Kategori C: Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik Subkategori *Seller* Untuk PLTU Non MT di atas 400 MW (Penghargaan Subroto Award)
2nd place for SPP Suralaya Unit 8 Category C: Emission Reduction and Trade in Power Generation Sector, Subcategory: Seller for Non-Mine Mouth SPP above 400 MW (Subroto Award)

DWI ANANTO PRAMUDYO
(Kantor Pusat Head Office)

Inovasi *Automatic Failure Detection* (Asian Power Award - *Information Technology Project of The Year*)
Innovation on Automatic Failure Detection (Asian Power Award - Information Technology Project of The Year)

RAISING FUTURE ENERGY, STRENGTHENING SUSTAINABILITY

Indonesia power terus meningkatkan komitmen mengelola pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan. Melalui pilar strategi *Low - Carbon Energy Development* (LCE), Kami berupaya mendorong tercapainya transisi energi bagi pengembangan pembangkit EBT menggantikan pembangkit fosil. Hal tersebut sejalan dengan *Grand* Strategi Energi Nasional untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025 dan menuju *net zero emission* atau karbon netral di tahun 2060.

Kami terus melakukan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit *Hybrid*, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan meningkatkan produksi EBT bauran energi di tahun 2021. *Co-firing* PLTU dengan biomassa juga terus digencarkan untuk berkontribusi optimal dalam peningkatan bauran energi, menekan emisi karbon, sekaligus berdampak positif menumbuhkan ekonomi masyarakat. Pengembangan usaha *beyond boundaries* juga telah menunjukkan hasil positif dengan adanya kerjasama dengan sejumlah negara di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah.

Raihan kinerja keuangan maupun operasional di tahun 2021 menjadi tonggak penting Indonesia Power mencapai aspirasi menjadi *industry leader*. Dengan semangat inovasi tiada henti untuk menghadirkan produk dan jasa yang berorientasi pada solusi energi ramah lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Indonesia Power optimis mewujudkan energi masa depan berbasis EBT, menyediakan solusi energi sesuai kebutuhan pelanggan dalam rangka melayani penyediaan listrik berkualitas bagi masyarakat dan mencapai kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Indonesia Power strengthens the commitment to delivering a sustainable New and Renewable Energy-based power plant management. With Low-Carbon Energy (LCE) development, we aim to expedite energy transition for developing NRE-based power plants in lieu of fossil fuel-fired power plants. This is in conformity with the Grand National Energy Strategy to achieve NRE mix target of 23% by 2025 towards net-zero emission (carbon neutrality) by 2060.

We continued developing Hydro Power Plants (HPPs), Solar Power Plants (SoPPs), Hybrid Power Power Plants, Mini Hydro Power Plants (MHPPs), and Wind Power Plants (WPPs) as well as increasing the production of NRE mix in 2021. The cofiring of Steam Power Plants (SPP) and biomass was also aggressively sought in order to contribute optimally to the increase in energy mix, suppressing carbon emission, and promoting community's economy. The development of beyond boundary businesses has also demonstrated positive outcomes with the establishment of cooperation with a number of Southeast Asian and Middle Eastern countries.

The financial and operational performance recorded in 2021 was a milestone for Indonesia Power in realizing the aspiration to be the industry leader. With the spirit of never-ending innovations, we aim to deliver products and services based on green energy solutions for a better future. Indonesia Power is optimistic to realizing an NRE-based future energy, providing energy solutions that meet customers' demands while delivering quality electricity for the public, and achieving business continuity in the long run.

DAFTAR ISI
CONTENTS

Raising Future Energy, Strengthening Sustainability	3
Daftar Isi Contents	4
Kesinambungan Tema Theme Continuity	8
Mekanisme Distribusi Listrik ke Pelanggan Mechanism of Power Distribution to Customers	10



KILAS KINERJA UTAMA 2021
KEY PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2021

Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights	14
Ringkasan Kinerja Utama Tahun 2021 Key Performance Highlights 2021	32
Meningkatkan Komitmen Energi Bersih, Memperkuat Bisnis Berkelanjutan Raising Future Energy, Strengthening Sustainability	34
Peristiwa Penting Tahun 2021 Important Events in 2021	38



LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
REPORT TO SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS

Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners	42
Laporan Direksi Report from the Board of Directors	56
Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2021 PT Indonesia Power Statement from the Board of Commissioners and the Board of Directors on the Accountability for PT Indonesia Power Annual Report 2021	76



PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

Identitas Perusahaan Company Identity	80
Riwayat Singkat Indonesia Power Indonesia Power at a Glance	82
Perubahan Nama Perusahaan Company Name Change	84
Penghargaan dan Sertifikasi Tahun 2021 Awards and Certificates in 2021	86
Visi, Misi, Motto dan Kompetensi Inti Perusahaan Vision, Mission, Motto, and Core Competencies	101
Tata Nilai dan Budaya Perusahaan Company Values and Culture	104
Bidang Usaha Line of Business	110
Produk dan Jasa Products and Services	112
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholder Structure and Composition	116
Struktur Organisasi Organizational Structure	118
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	120
Profil Direksi Board of Directors Profile	126
Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Unit Manajemen Risiko Education and Training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit Unit, and Risk Management Unit	134
Komposisi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai Employee Composition and Competency Development	138
Struktur Grup Perusahaan Corporate Group Structure	159
Daftar Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi List of Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates	164
Sekilas Kinerja Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi Performance Overview of Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates	170

Wilayah Operasi Operational Areas 182

Daftar Alamat Unit Unit Address List 184

Lembaga Profesi Penunjang Perusahaan
Company-Supporting Professional Institutions 185

Kronologis Pencatatan Saham
Share Listing Chronology 188

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology 189

Informasi *Website* Perusahaan
Information on Company Website 194



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
BUSINESS SUPPORT REVIEW

Sumber Daya Manusia
Human Capital 198

Teknologi Informasi (TI)
Information Technology 224

Sistem Manajemen Terintegrasi Indonesia Power (IP-IMS)
Indonesia Power - Integrated Management System (IP-IMS) 238

Riset dan Inovasi Teknologi Pembangkitan
Development and Innovation of Power Generation Technology 242

Aset Pembangkit
Power Generation Assets 250



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Tinjauan Industri
Industry Overview 256

Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
Marketing Aspect and Market Share 263

Tinjauan Kinerja Operasi Per Segmen
Operational Performance Overview by Segment 264

Profitabilitas Per Segmen
Profitability by Segment 294

Tinjauan Kinerja Keuangan
Financial Performance Overview 295

Kemampuan Membayar Utang, Kolektibilitas Piutang dan Rasio Keuangan Lainnya
Solvency, Collectibility, and Other Financial Ratios 318

Struktur Modal
Capital Structure 327

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the Country 329

Perbandingan antara Target 2021, Realisasi 2021, dan Proyeksi 2022
Comparison between 2021 Target, 2021 Realization, and 2022 Projection 331

Tingkat Kesehatan Perusahaan dan Pencapaian KPI
Company Soundness Level and KPI Achievement 342

Kebijakan Dividen
Dividend Policy 346

Informasi Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
Information on Material Commitments for Capital Investment 347

Investasi Barang Modal
Capital Investment 354

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi
Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliates/ Related Parties 357

Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi
Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and/or Restructuring 363

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Actual Use of Proceeds from Public Offering 367

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/ atau Manajemen (MSOP/ESOP)
Employment and/or Management Stock Option Plans (ESOP/MSOP) 367

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts after Accountant's Report Date 367

DAFTAR ISI
CONTENTS

Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Perusahaan 368
Changes in Accounting Policies and Their Impacts on the Company

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Signifikan dan Dampaknya terhadap Perusahaan 370
Significant Regulatory Changes and Their Impacts on the Company

Informasi Material yang Luar Biasa dan Jarang Terjadi 374
Material Information Containing Extraordinary and Rare Events

Dampak Perubahan Harga Terhadap Kinerja Perusahaan 375
Impact of Price Change on the Company's Performance

Informasi Kelangsungan Usaha 378
Information on Business Continuity

Prospek Usaha 379
Business Outlook



TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Komitmen Perusahaan Dalam Penerapan Praktik Terbaik *Corporate Governane* 386
Commitment to Implementing The Best Corporate Governance Practices

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Di Lingkup Perusahaan 390
Development Of Corporate Governance Implementation In The Company

Struktur, Kebijakan Dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 398
Corporate Governance Structure, Policy, And Mechanism

Informasi tentang Pemegang saham Utama dan Pengendali 403
Information on Major and Controlling Shareholder

Rapat Umum Pemegang Saham 404
General Meeting of Shareholders

Dewan Komisaris Board of Commissioners 409

Direksi Board of Directors 420

Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi 430
Work Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors

Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali 431
Affiliation between Members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 433
Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi 450
Evaluation of Board of Commissioners and Board of Directors' Performance

Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris 463
Committees Under The Board Of Commissioners

Komite Audit Audit Committee 464

Komite Manajemen Risiko 473
Risk Management Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi 480
Nomination and Remuneration Committee

Sekretaris Dewan Komisaris 485
Secretary to the Board of Commissioners

Sekretaris Perusahaan 487
Corporate Secretary

Audit Internal 497
Internal Audit

Sistem Pengendalian Internal 518
Internal Control System

Manajemen Risiko 526
Risk Management

Akuntan Publik 550
Public Accountant

***Whistleblowing System* (WBS)** 554
Whistleblowing System (WBS)

Code of Conduct 564
Code of Conduct

Perkara Penting yang Dihadapi oleh Perusahaan 572
Important Cases Faced by The Company

Akses Informasi dan Data Perusahaan 576
Access to Company Information and Data

Pengadaan Barang dan Jasa 587
Goods and Services Procurement

Kebijakan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur
Policy on The Fulfillment Of Creditor's Rights — 597

Pengendalian dan Penanganan Benturan Kepentingan
Control and Management of Conflicts of Interest — 598

Program Anti Korupsi Indonesia Power
Anti-Corruption Program At Indonesia Power — 601

Pernyataan Tidak Melakukan Praktik *Bad Corporate Governance*
Statement Of Good Corporate Governance Practices — 614



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Komitmen Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power
Commitment to Implementing Social Responsibility at Indonesia Power — 618

Perumusan Program Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power
Formulation of Social Responsibility Programs at Indonesia Power — 626

Perencanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Program Planning — 631

Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi yang Adil
Corporate Social Responsibility and Fair Operations — 640

Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi Manusia
Corporate Social Responsibility for Human Right — 650

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility for Environment — 659

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibility for Employment And Occupational Health and Safety — 689

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pelanggan
Corporate Social Responsibility Related to Customers — 724

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility for Social and Community Development — 740



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN *AUDITED* 2021
AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2021

Laporan Keuangan Tahunan *Audited* 2021
Audited Financial Statements 2021 — 777



REFERENSI KRITERIA *ANNUAL REPORT AWARD*
REFERENCE FOR ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Referensi Kriteria *Annual Report Award*
Reference For Annual Report Award Criteria — 899

KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY

2021

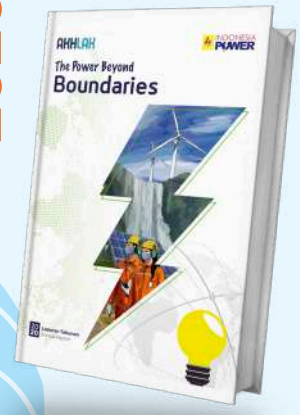


RAISING FUTURE ENERGY, STRENGTHENING SUSTAINABILITY

Indonesia Power berkomitmen mendorong tercapainya transisi energi bagi pengembangan pembangkit yang lebih ramah lingkungan. Berbagai upaya dalam meningkatkan bauran energi pun terus dilakukan guna mencapai kelangsungan bisnis Perusahaan dalam jangka panjang.

Indonesia Power is committed to promoting energy transition for developing greener power plants. A number of efforts in expanding energy mix were sought for ensuring the Company's long-term business continuity.

2020



THE POWER BEYOND BOUNDARIES

Tahun 2020 menjadi tonggak penting Indonesia Power membawa aspirasi dan harapan baru. Sejalan dengan aspirasi transformasi PLN – *Power Beyond Generation*, Indonesia Power menetapkan pilar strategi untuk melangkah lebih jauh dan melompat lebih tinggi, untuk menjadi perusahaan penyedia solusi energi tepercaya, tidak hanya di dalam negeri, namun juga di mancanegara. Dengan semangat "Power Beyond Boundaries", Indonesia Power siap melakukan pengembangan usaha menembus batas bumi nusantara.

2020 was a milestone for Indonesia Power with a new spirit and hope. Going along with the spirit of PLN transformation – Power Beyond Generation, Indonesia Power defines the strategic pillars to step farther and jump higher, aiming at being a reliable provider of energy solutions, not only domestically but also internationally. With the new spirit of "Power Beyond Boundaries", Indonesia Power is ready to perform business expansion, beyond our country's borders.

2019

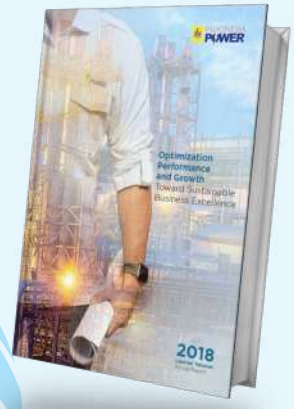
OPTIMIZATION EMBRACING SUSTAINABLE GROWTH THROUGH RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AND DIGITALIZATION

Kami terus berupaya menciptakan pertumbuhan bisnis berkelanjutan melalui strategi dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan energi untuk memperoleh hasil terbaik. Pengembangan sumber energi terbarukan dan digitalisasi menjadi fokus strategi kami di tahun 2019. Tujuannya tidak lain untuk memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta mendukung ketahanan energi nasional.

We ceaselessly make the effort to create sustainable business growth through proper strategies and policies in the power management to obtain the best results. Renewable energy development and digitalization are our strategic focus for 2019. It aims at none other than meeting the expectation of our stakeholders and supporting the national energy security.



2018



OPTIMIZATION PERFORMANCE AND GROWTH TOWARD SUSTAINABLE BUSINESS EXCELLENCE

Kami berkomitmen untuk mencapai aspirasi Go90 (*Go Ninety*) untuk menjadi perusahaan pembangkit yang aman, bersih & hijau, andal serta efisien. Untuk itulah, Indonesia Power fokus melakukan eksekusi strategi dan kebijakan yang mendukung tercapainya pertumbuhan kinerja berkelanjutan.

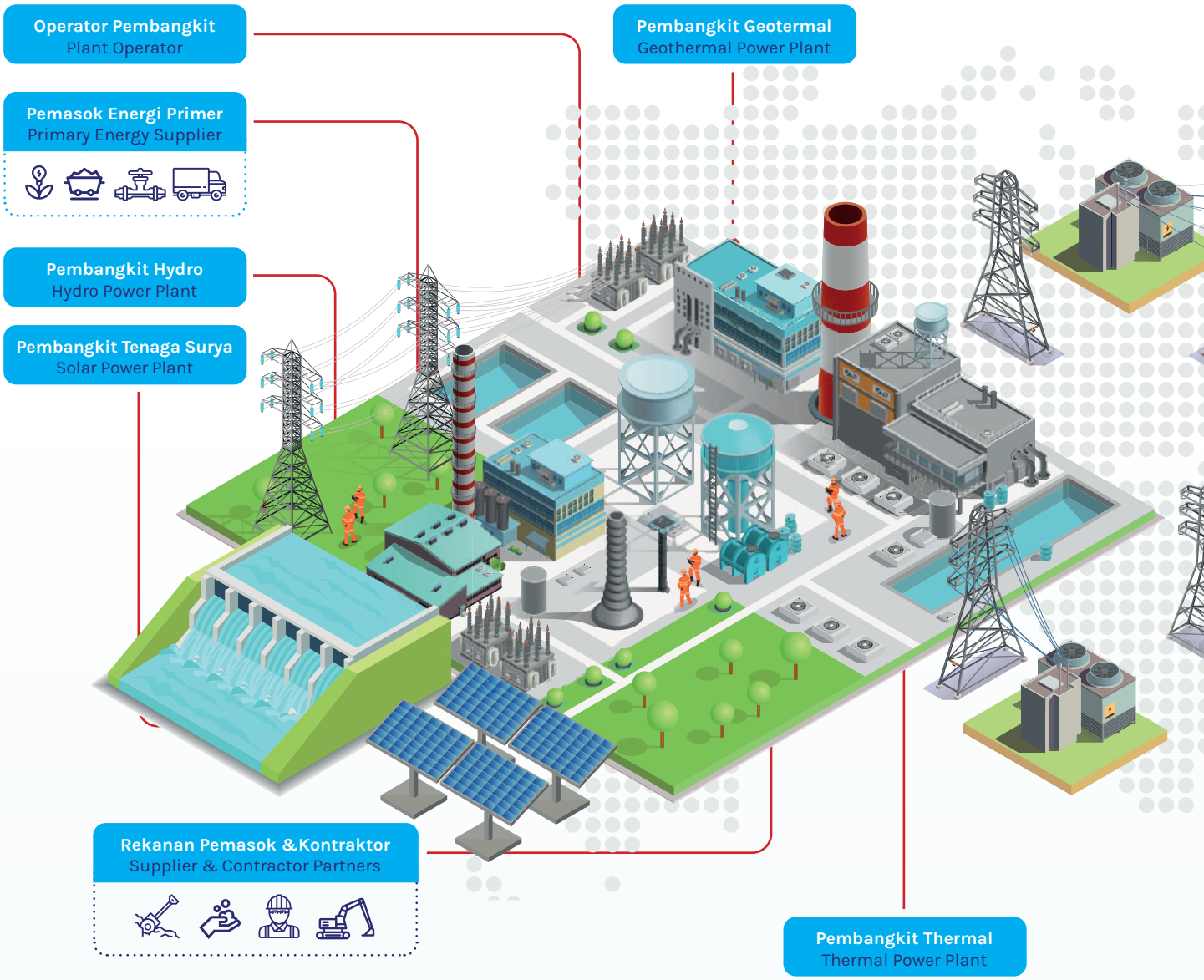
We are committed to achieving the Go90 (Go Ninety) aspiration to become a safe, clean, green, reliable, and efficient power generating company. To that reason, Indonesia Power focuses on executing the strategies and policies that support the achievement of sustainable performance growth.

MEKANISME DISTRIBUSI LISTRIK KE PELANGGAN

MECHANISM OF POWER DISTRIBUTION TO CUSTOMERS

Pada dasarnya, bisnis penyediaan tenaga listrik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, pertama pembangkitan, kedua transmisi, dan ketiga distribusi. Tenaga listrik yang diperlukan konsumen akhir dihasilkan oleh suatu pembangkit, disalurkan melalui sistem penyaluran (transmisi) dan didistribusikan melalui jaringan distribusi.

Fundamentally, the Company's electricity supply business is divided into three parts, i.e. power generation, transmission, and distribution. The electricity needed by our end users is delivered through our transmission system and circulated through our distribution network.

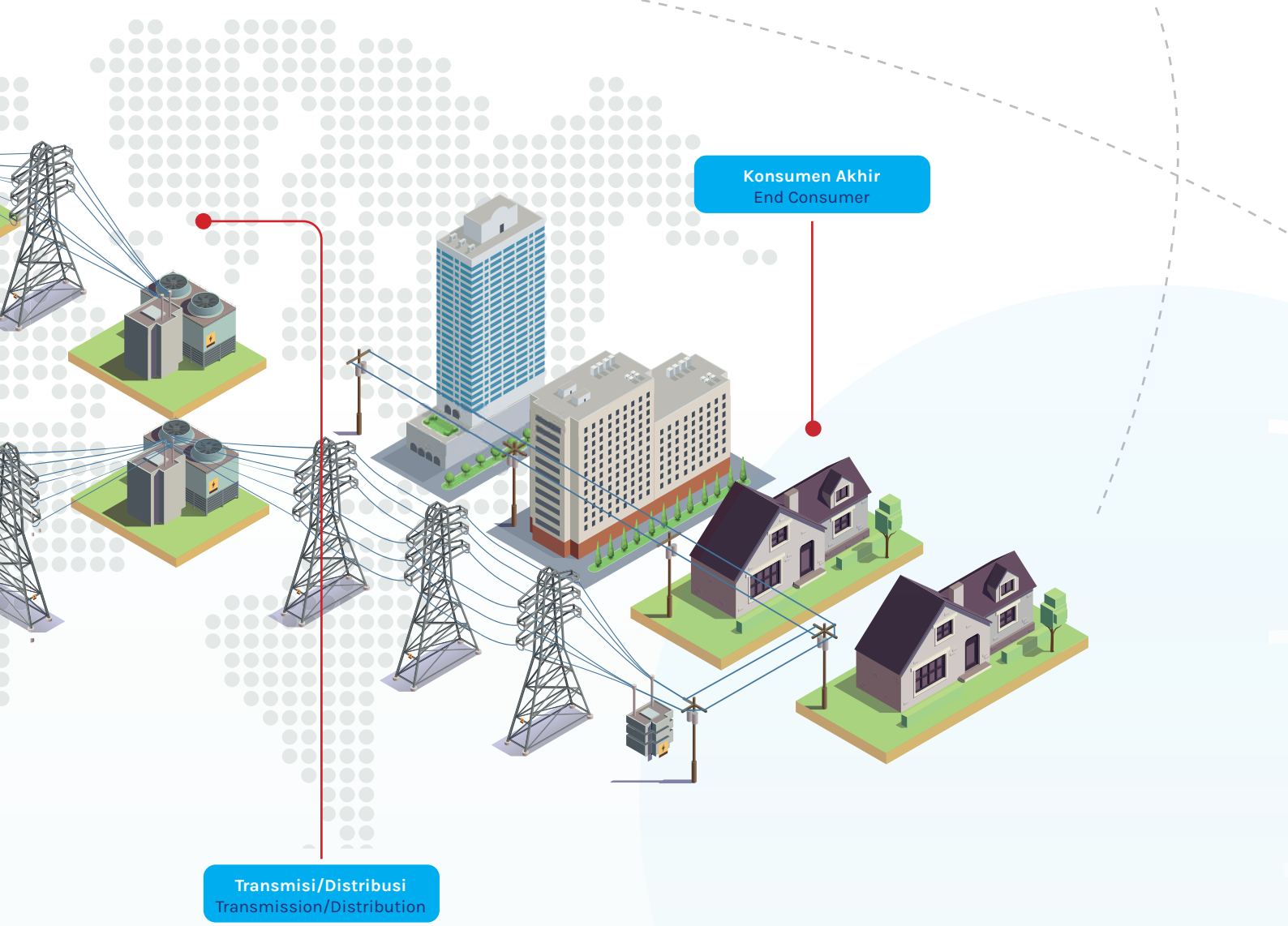


Jumlah kapasitas terpasang Indonesia Power di Jawa-Bali menjadi sebesar 9.124,72 MW yang dioperasikan atas permintaan PLN Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (PLN P2B JB) untuk memenuhi kebutuhan sistem Jawa-Bali.

Energi yang dihasilkan Unit Pembangkit tersebut disalurkan melalui Sistem Interkoneksi Jawa – Bali yang dikelola oleh PLN dan didistribusikan kepada pelanggan *retail*.

Indonesia Power's total installed capacity in Java-Bali Grid which increased to 9,124.72 MW is operated upon request from PLN Pusat Pengatur Beban Jawa Bali (PLN P2B JB) to meet the demand of Java-Bali system.

The energy generated by this Power Generation Unit is distributed through Java-Bali Interconnecting System, which is managed by PLN and distributed to retail customers.




INDONESIA
POWER



KILAS KINERJA UTAMA 2021

Key Performance Highlights 2021

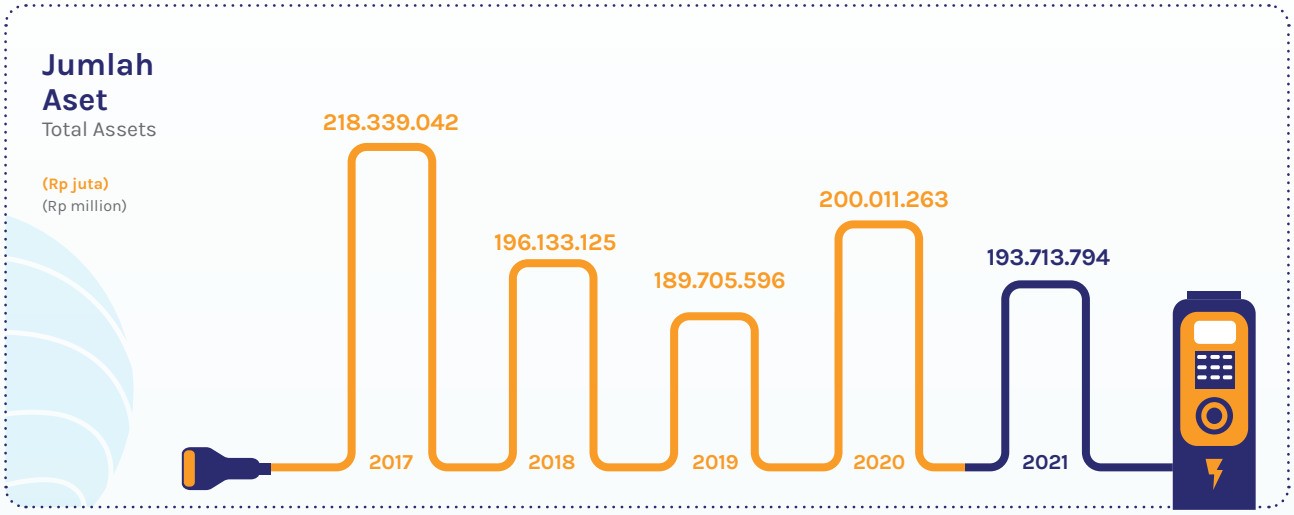
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights

(Rp juta) (Rp million)

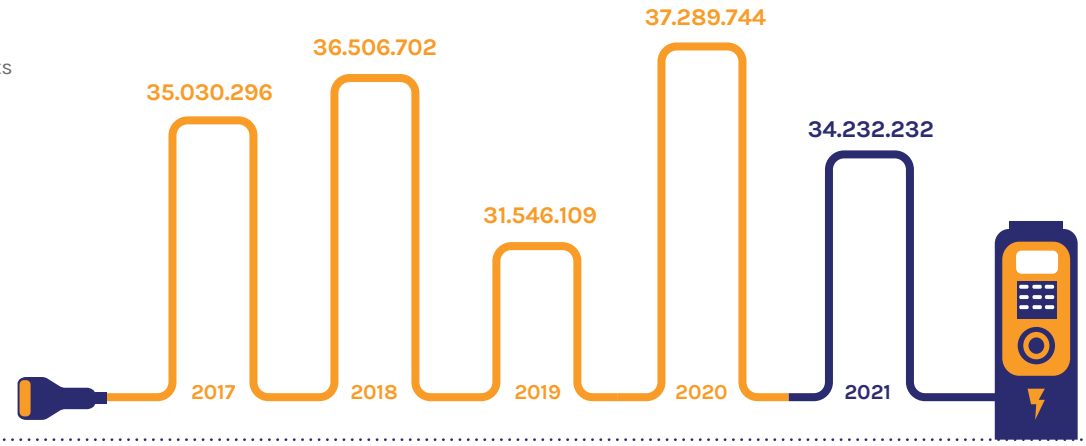
Posisi Keuangan Financial Positions	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Aset **Total Assets**	**218.339.042**	**196.133.125**	**189.705.596**	**200.011.263**	**193.713.794**
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	183.308.746	159.626.423	158.159.487	162.821.519	159.481.562
Aset Lancar Current Assets	35.030.296	36.506.702	31.546.109	37.189.744	34.232.232
Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	618.394	757.725	1.309.620	3.232.658	4.321.545
Entitas Asosiasi Associates	185.527	193.934	197.046	216.971	225.276
Ventura Bersama Joint Ventures	432.867	563.791	1.112.574	3.015.687	4.096.269
Jumlah Liabilitas **Total Liabilities**	**9.208.877**	**8.095.689**	**7.712.397**	**16.067.595**	**15.312.157**
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	3.673.564	2.839.499	2.955.576	8.753.333*	9.417.511
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.535.313	5.256.190	4.756.821	7.314.262*	5.894.646
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**209.130.165**	**188.037.436**	**181.993.199**	**183.943.668**	**178.401.637**
Modal Kerja bersih Net Working Capital	29.494.983	31.250.512	26.789.288	29.875.482	28.337.592

*) Direklasifikasikan kembali
*) Reclassification



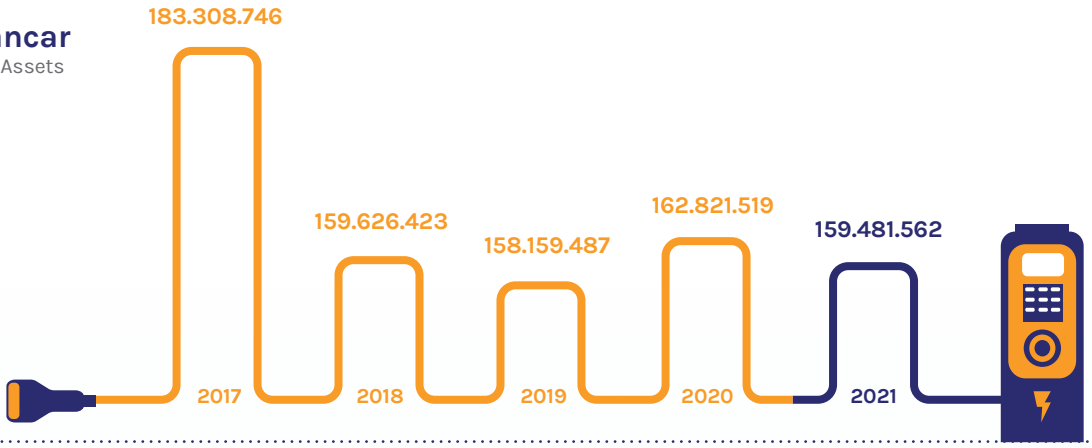
Aset Lancar
Current Assets

(Rp juta)
(Rp million)



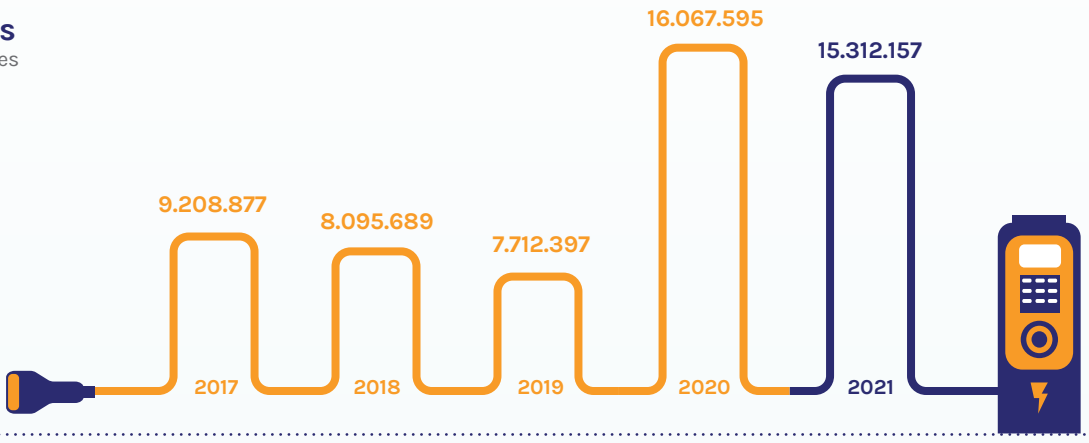
Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

(Rp juta)
(Rp million)



Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

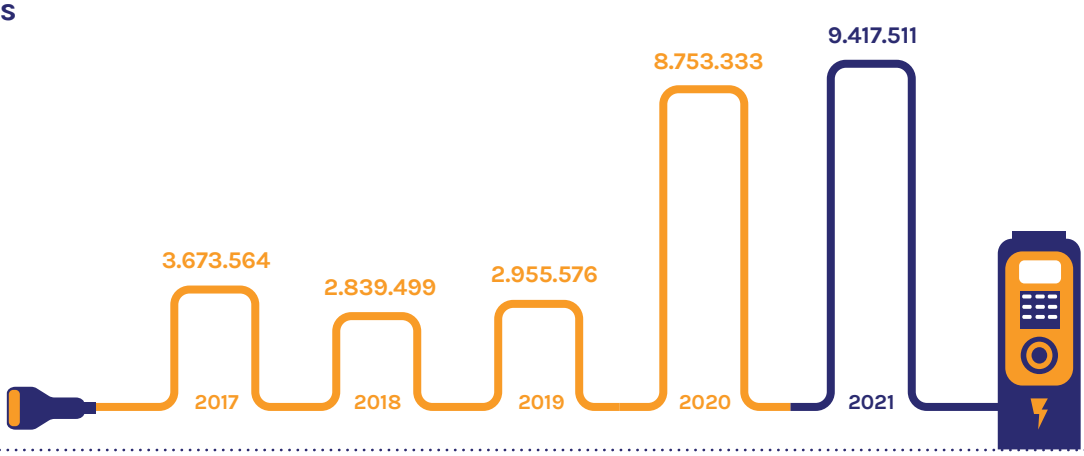
(Rp juta)
(Rp million)



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

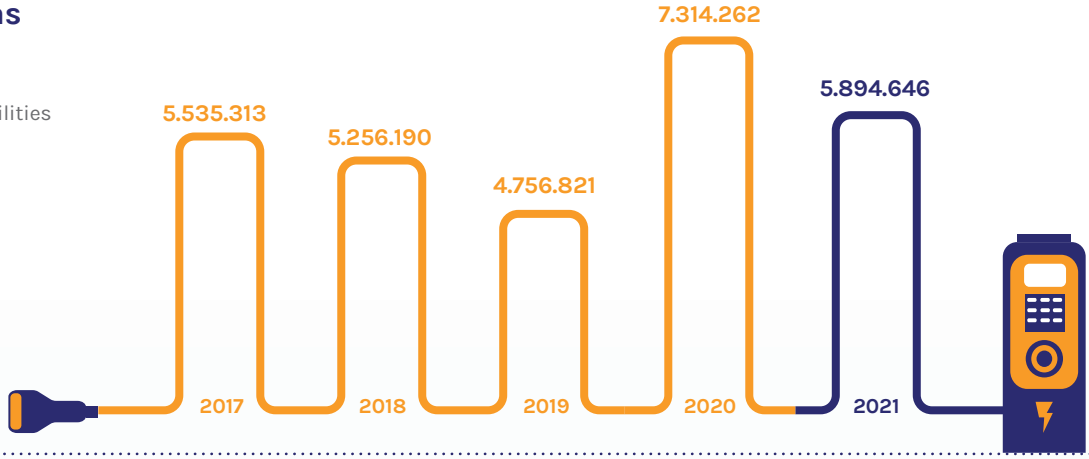
Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

(Rp juta)
(Rp million)



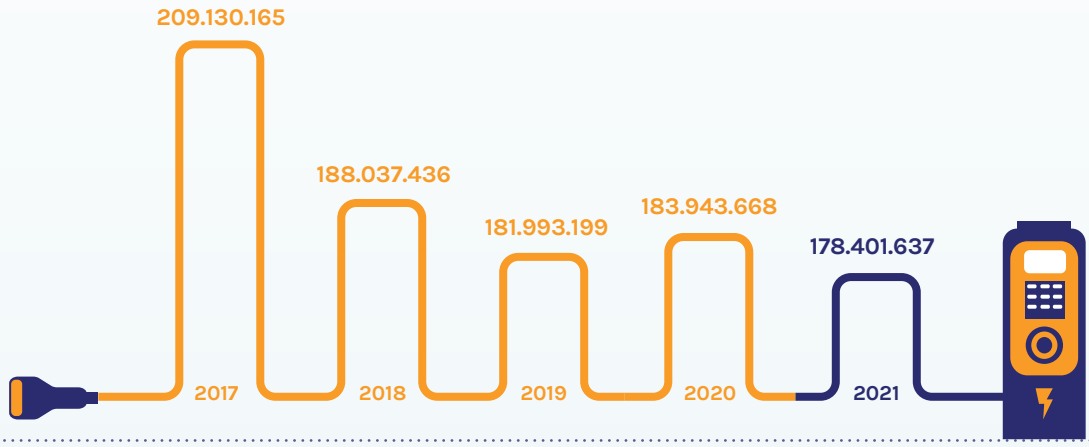
Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

(Rp juta)
(Rp million)



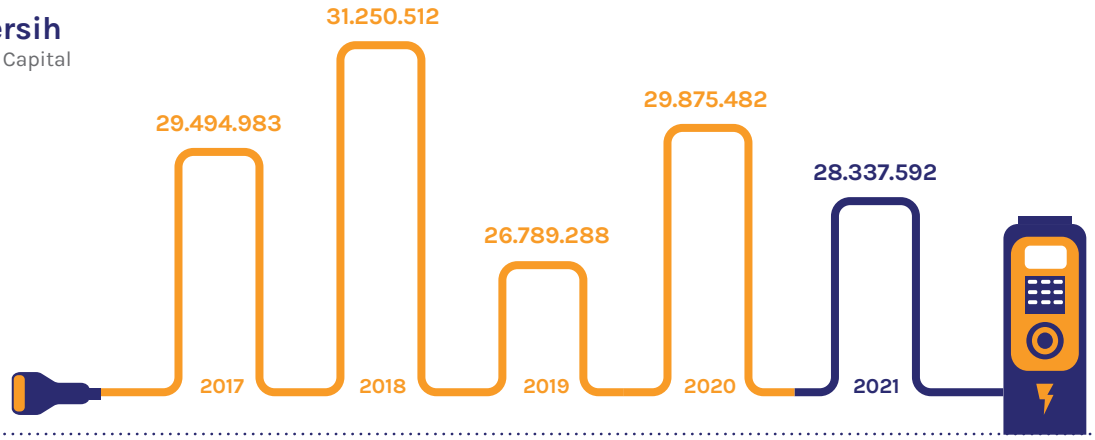
Jumlah Ekuitas
Total Equity

(Rp juta)
(Rp million)



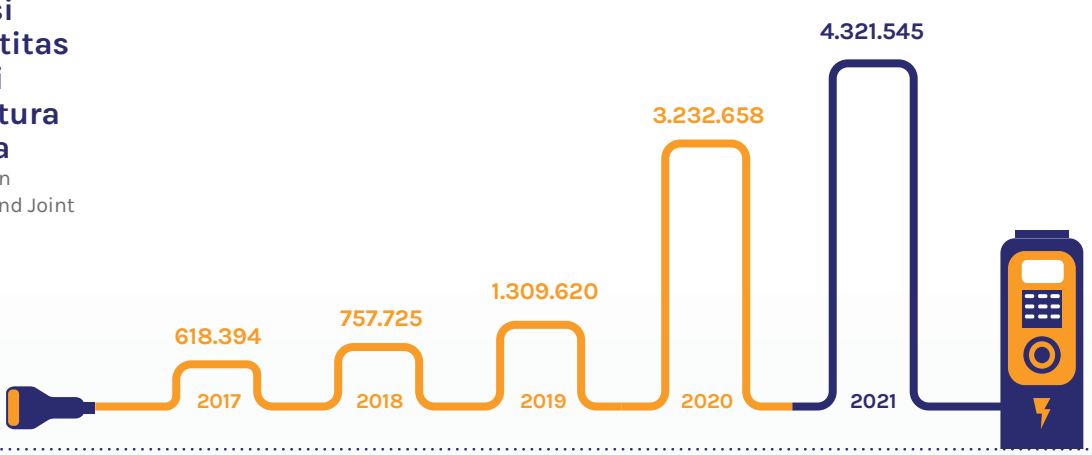
Modal Kerja bersih
Net Working Capital

(Rp juta)
(Rp million)



Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
Investment in Associates and Joint Ventures

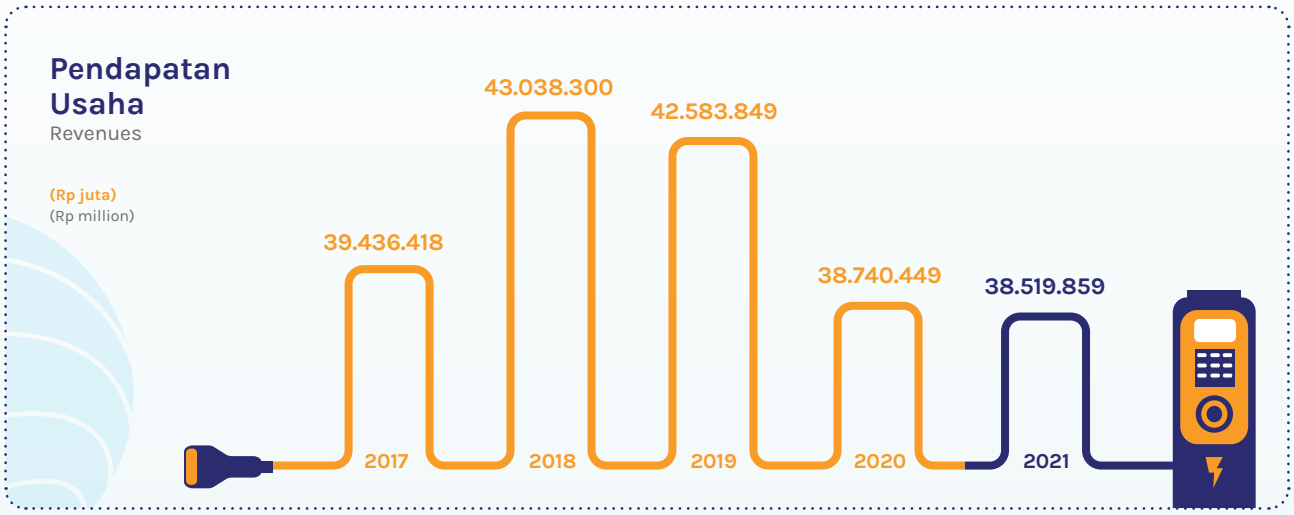
(Rp juta)
(Rp million)



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

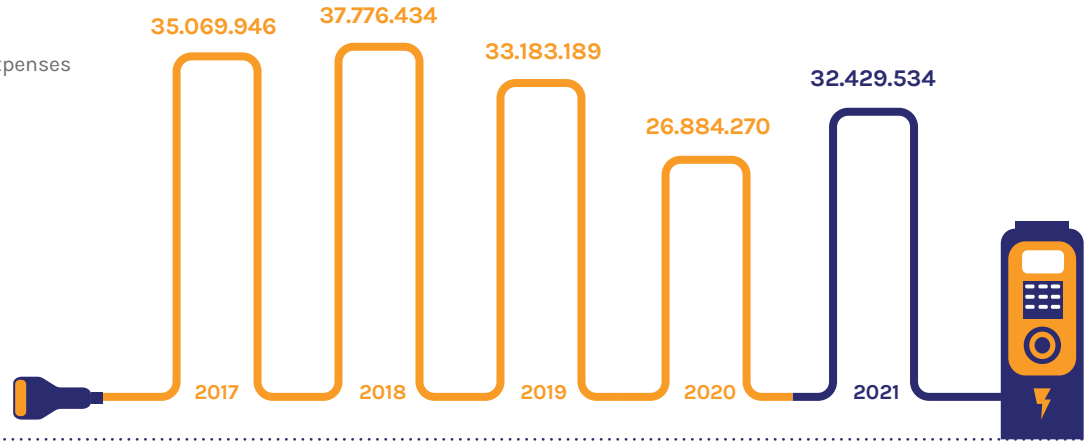
(Rp juta) (Rp million)

Laba Rugi Profit or Loss	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Usaha Revenues	39.436.418	43.038.300	42.583.849	38.740.449	38.519.859
Penjualan Tenaga Listrik Sale of Electricity	20.974.180	23.781.265	23.970.771	21.011.210	19.907.755
Pendapatan dari Konsesi Jasa Revenue of Service Concession	15.592.752	15.292.014	14.860.732	14.259.159	14.656.755
Pendapatan Jasa Service Revenues	2.869.486	3.965.021	3.752.346	3.470.080	3.955.349
Beban Usaha Operating Expenses	35.069.946	37.776.434	33.183.189	26.884.270	32.429.534
Laba Usaha Operating Income	**4.366.472**	**5.261.866**	**9.400.660**	**11.856.179**	**6.090.325**
Laba Sebelum Pajak Income before Tax	3.730.407	5.132.820	10.053.333	12.773.358	5.909.311
Manfaat/Beban Pajak Tax Benefit/Expense	(498.084)	(1.631.196)	(2.683.024)	(2.549.287)	(1.878.157)
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	**3.232.323**	**3.501.624**	**7.370.309**	**10.224.071**	**4.031.154**
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk attributable to Owners of the Parent	3.220.175	3.499.463	7.365.289	10.218.256	4.027.169
diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali attributable to Non-Controlling Interest	12.148	2.161	5.020	5.815	3.985
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak **Other Comprehensive Income for the Year after Tax**	**-**	**(21.373.076)**	**(675.038)**	**(858.375)**	**646.237**
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan setelah pajak **Comprehensive Income for the Year after Tax**	**3.232.323**	**(17.871.452)**	**6.695.271**	**9.365.696**	**4.677.391**
diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk attributable to Owners of the Parent	3.220.175	(17.873.613)	6.690.251	9.359.881	4.673.406
diatribusikan kepada Kepentingan Non-Pengendali attributable to Non-Controlling Interest	12.148	2.161	5.020	5.815	3.985
Laba per Saham (Rp penuh) **Basic Earnings per Share (in Rupiah full amount)**	**617**	**671**	**1.413**	**1.959**	**773**



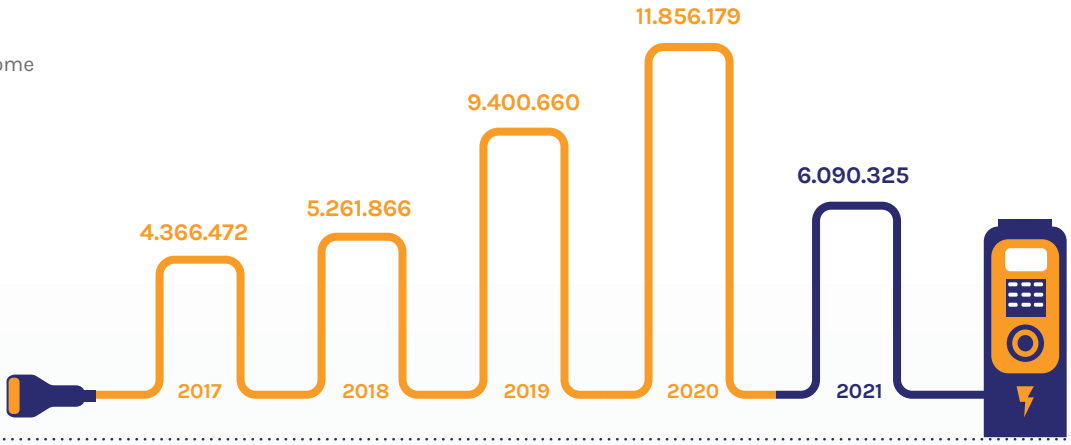
Beban Usaha
Operating Expenses

(Rp juta)
(Rp million)



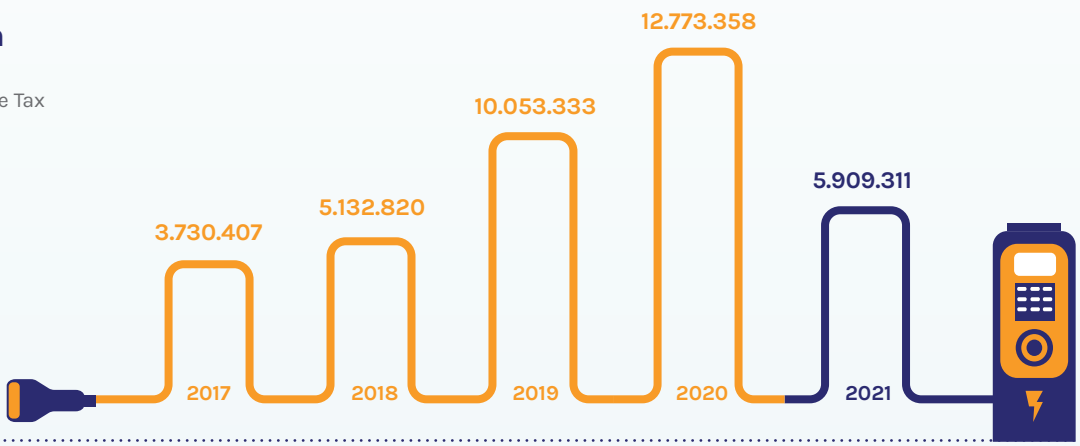
Laba Usaha
Operating Income

(Rp juta)
(Rp million)



Laba Sebelum Pajak
Income before Tax

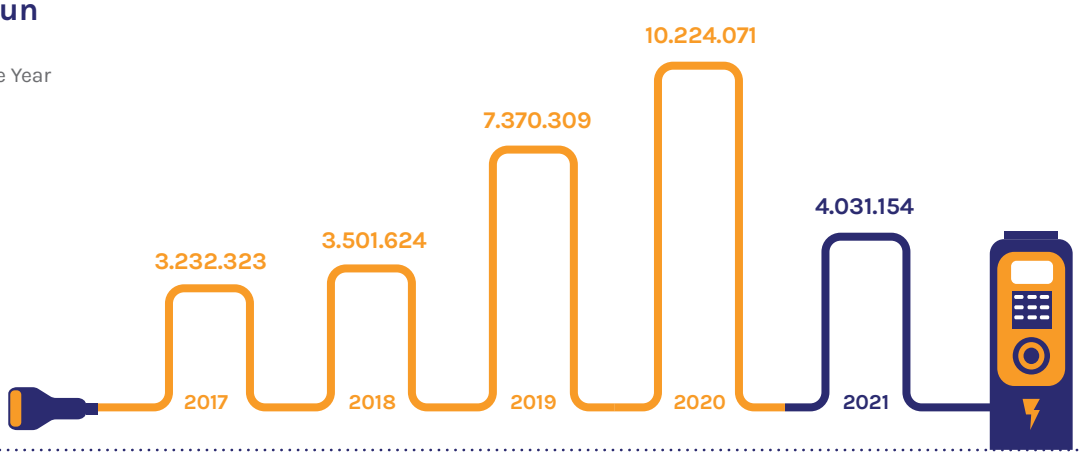
(Rp juta)
(Rp million)



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

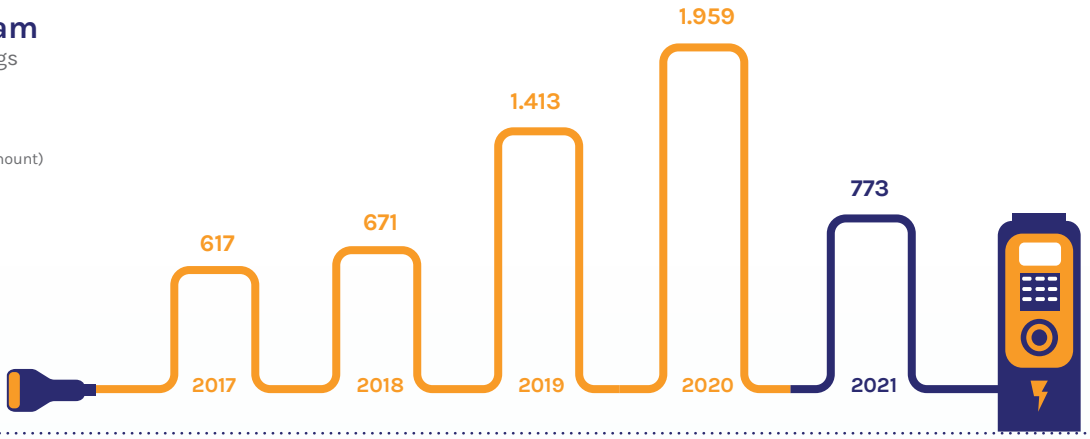
Laba Tahun Berjalan
Income for the Year

(Rp juta)
(Rp million)

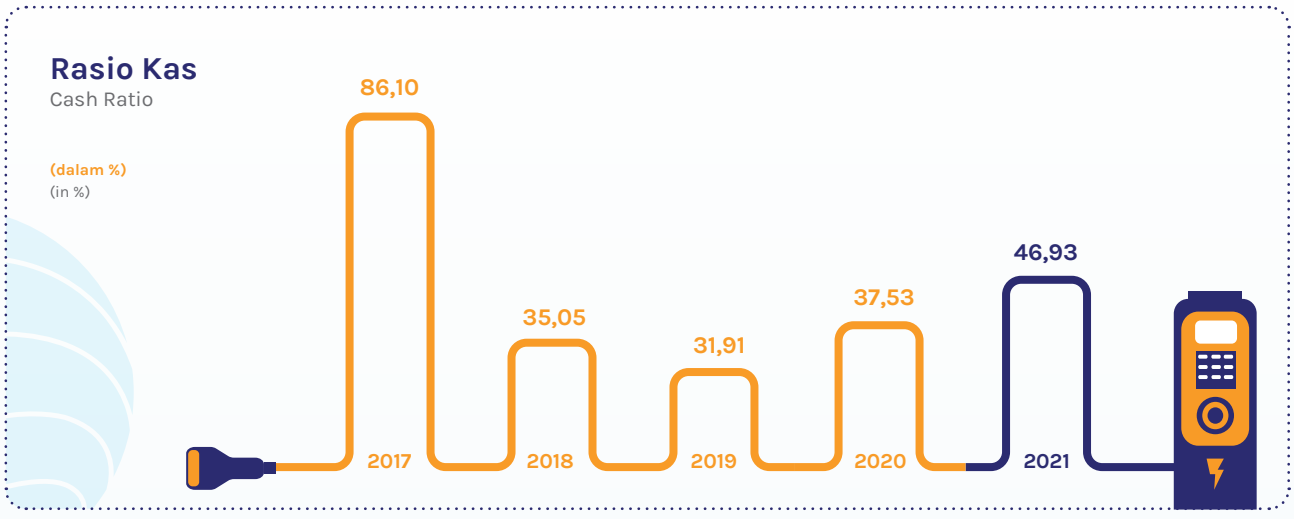


Laba per Saham
Basic Earnings per Share

(Rp penuh)
(in Rupiah full amount)



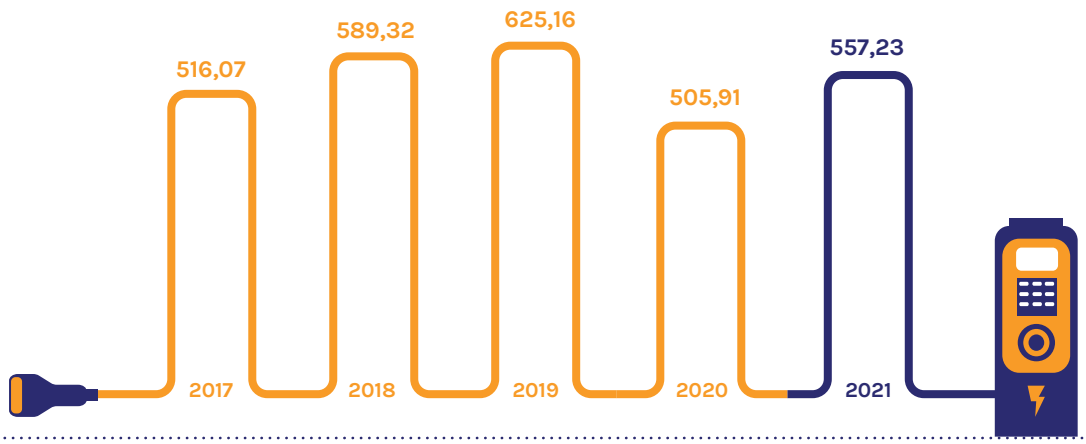
Rasio Keuangan Financial Ratios	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios					
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	86,10	35,05	31,91	37,53	46,93
Rasio Cepat (%) Quick Ratio (%)	516,07	589,32	625,16	505,91	557,23
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	609,21	694,55	663,18	526,60	580,73
Rasio Profitabilitas Profitability Ratios					
Margin Operasi (%) Operating Profit Margin (%)	13,19	12,23	22,08	30,60	15,81
Margin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	8,20	8,14	17,31	26,39	10,47
Tingkat Pengembalian Modal (%) Return on Equity (%)	1,57	1,90	4,22	5,89	2,31
Tingkat Pengembalian Investasi (%) Return on Investment (%)	4,79	4,39	6,60	7,55	4,80
Rasio Solvabilitas Solvency Ratios					
Rasio Utang terhadap Aset (%) Debt to Total Assets Ratio (%)	4,22	4,13	4,07	8,03	7,90
Rasio Utang Terhadap Modal (%) Debt to Total Equity Ratio (%)	3,47	4,31	4,24	8,74	8,58
Rasio Aktivitas Activity Ratios					
Perputaran Persediaan (kali) Inventory Turnover (time)	2,46	3,66	3,28	3,29	4,27
Periode Penagihan (hari) Collection Period (day)	225,18	247,08	231,46	262,16	274,56
Perputaran Aset (%) Asset Turnover (%)	23,46	4,39	23,04	19,87	20,51
Rasio Modal terhadap Aset (%) Total Equity to Assets Ratio (%)	95,78	95,87	95,93	91,97	92,10



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

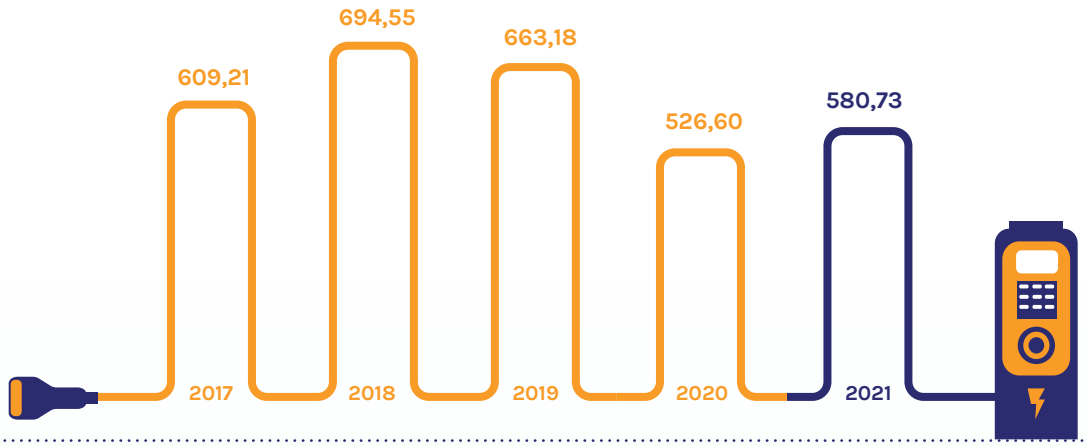
Rasio Cepat
Quick Ratio

(dalam %)
(in %)



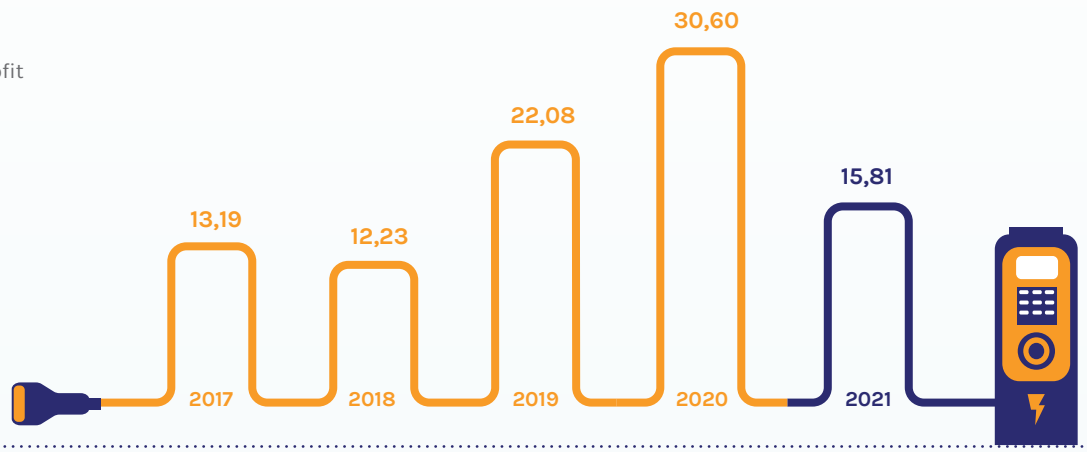
Rasio Lancar
Current Ratio

(dalam %)
(in %)



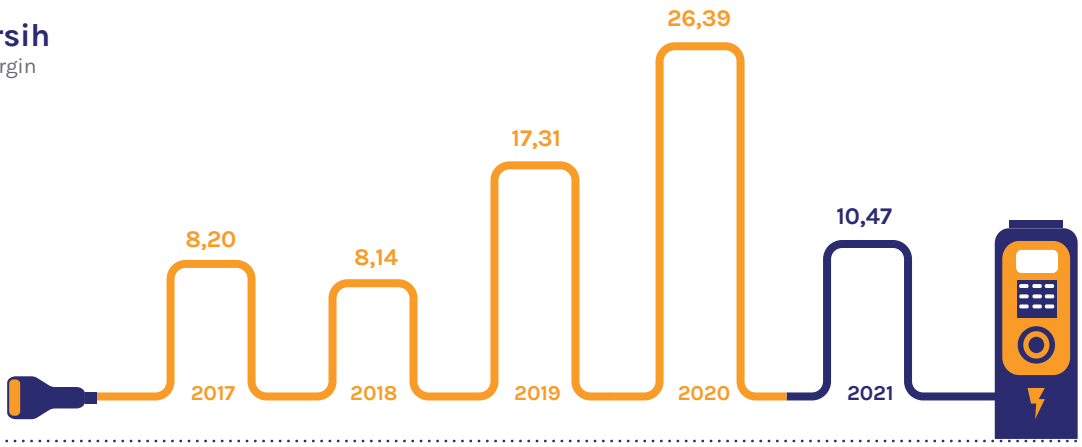
Margin Operasi
Operating Profit Margin

(dalam %)
(in %)



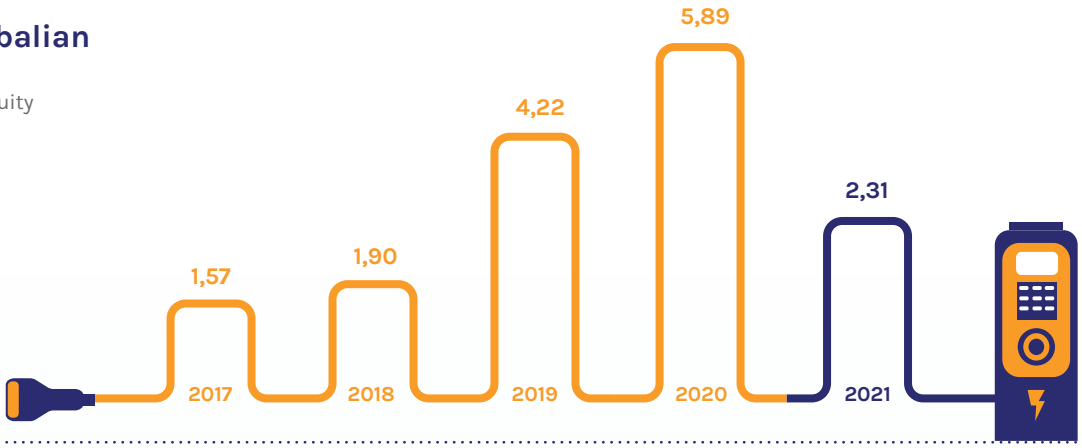
Margin Laba Bersih
Net Profit Margin

(dalam %)
(in %)



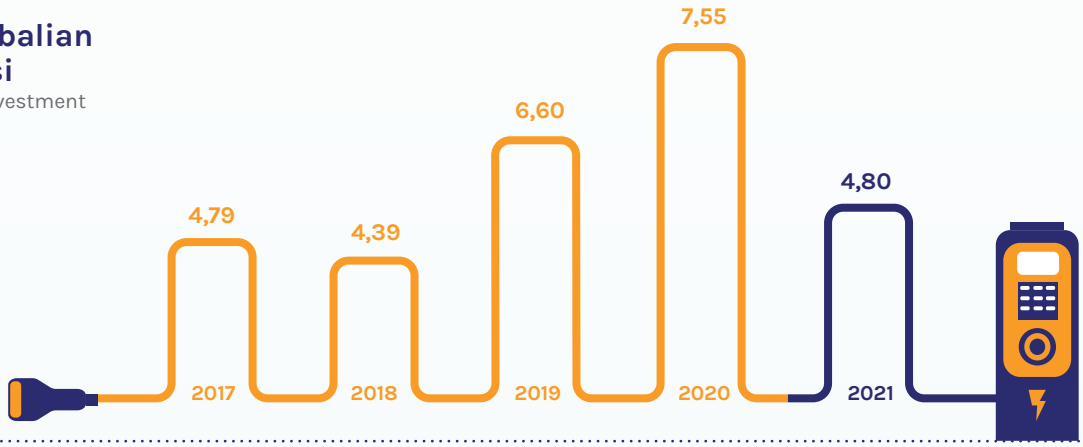
Tingkat Pengembalian Modal
Return on Equity

(dalam %)
(in %)



Tingkat Pengembalian Investasi
Return on Investment

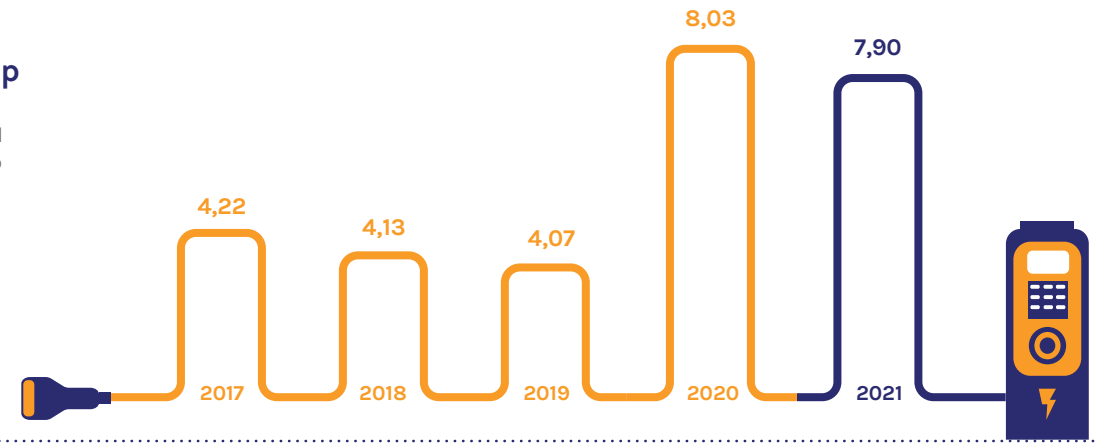
(dalam %)
(in %)



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

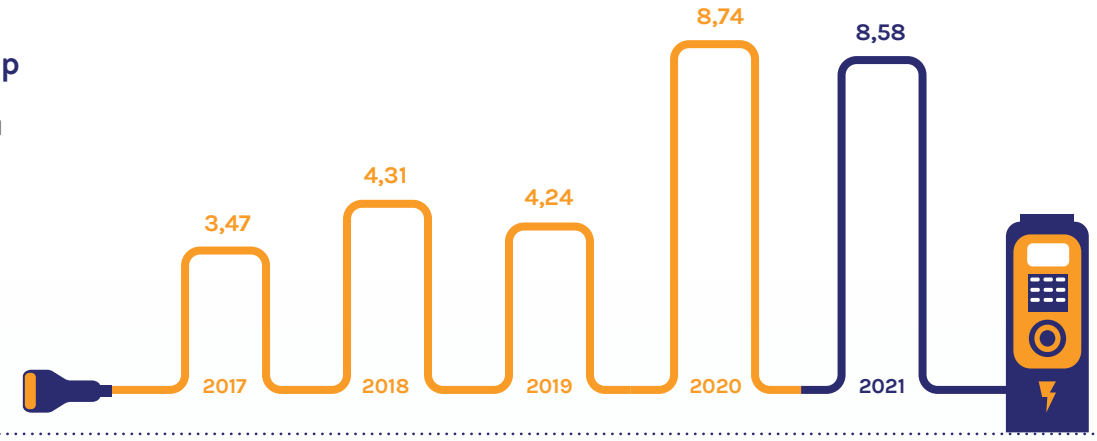
Rasio Utang terhadap Aset
Debt to Total Assets Ratio

(dalam %)
(in %)



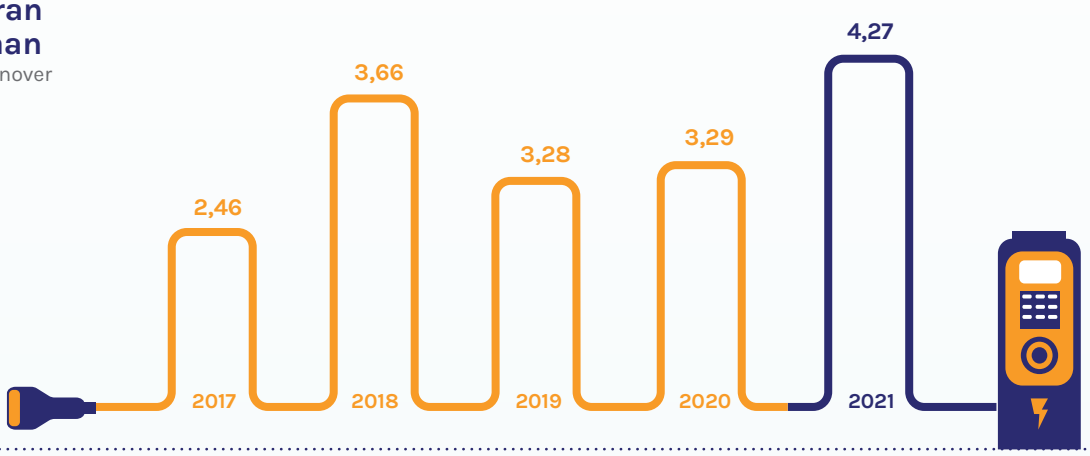
Rasio Utang terhadap Modal
Debt to Total Equity Ratio

(dalam %)
(in %)



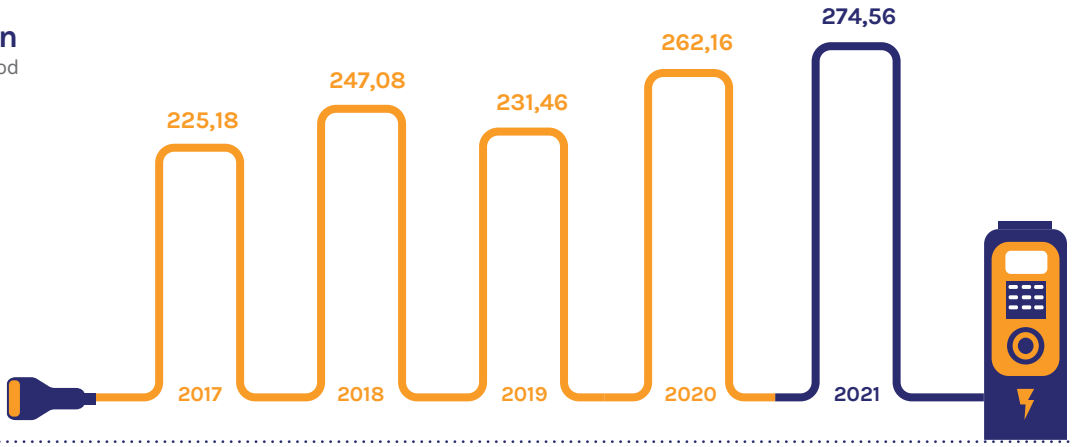
Perputaran Persediaan
Inventory Turnover

(kali)
(time)



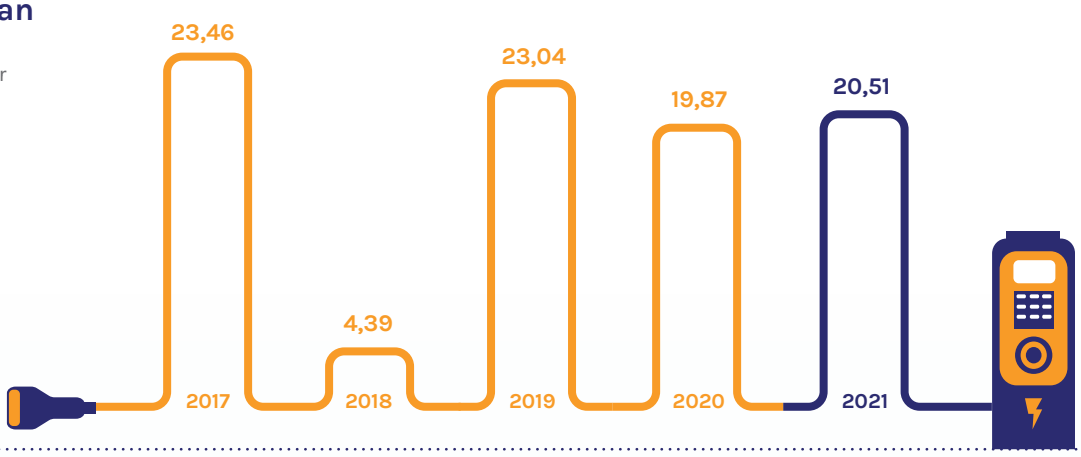
Periode Penagihan
Collection Period

(hari)
(day)



Perputaran Aset
Asset Turnover

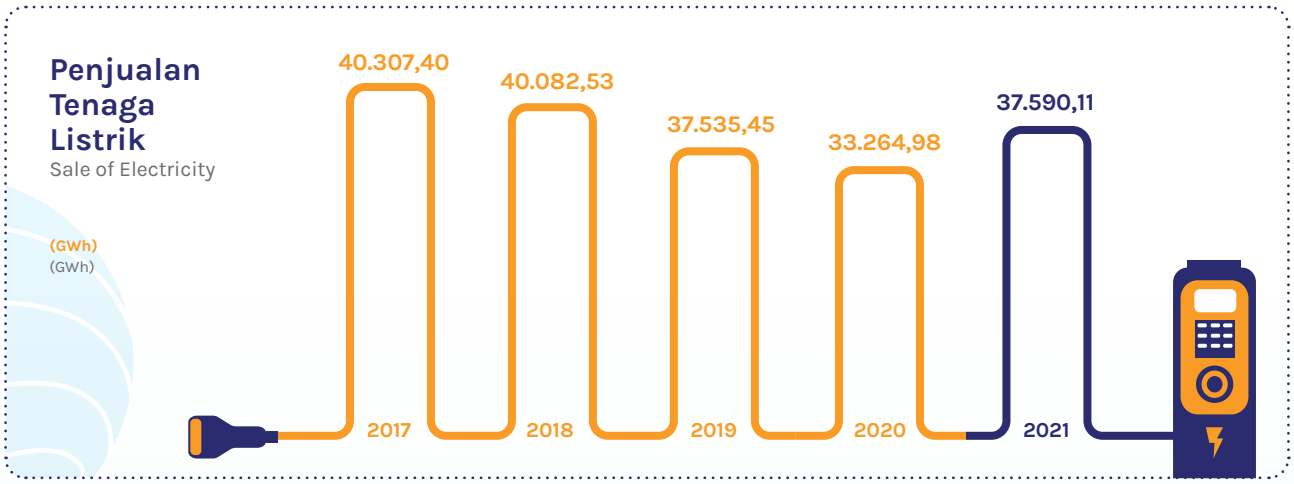
(dalam %)
(in %)

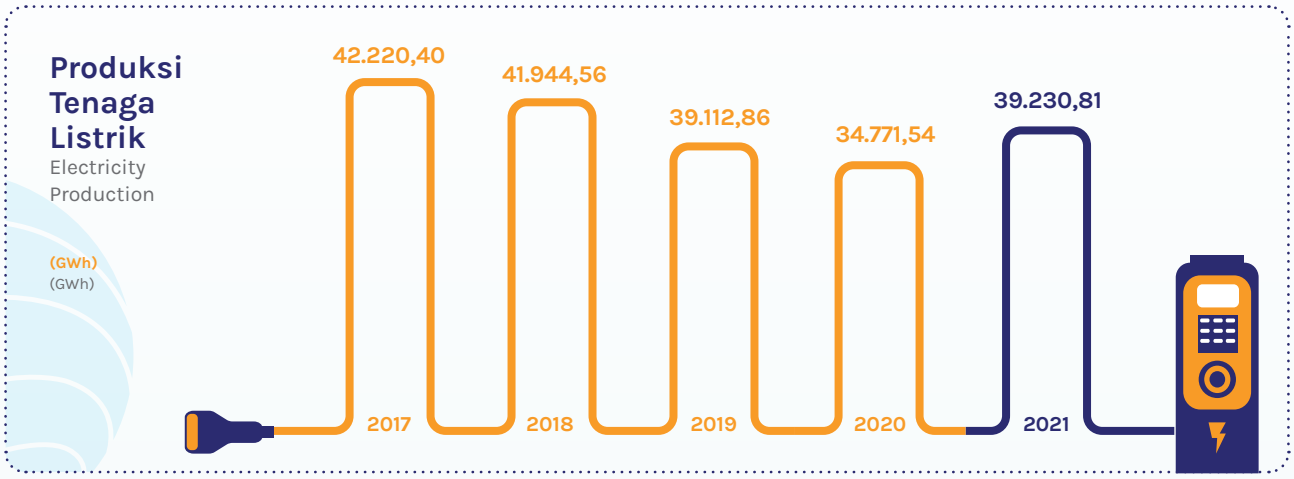


IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

Ikhtisar Operasional
Operational Highlights

Kinerja Pembangkit *Existing* Performance of Existing Power Plants	2017	2018	2019	2020	2021
Penjualan Tenaga Listrik (GWh) Sale of Electricity (GWh)	40.307,40	40.082,53	37.535,45	33.264,98	37.590,11
Produksi Tenaga Listrik (GWh) Electricity Production (GWh)	42.220,40	41.944,56	39.112,86	34.771,54	39.230,81
Daya Terpasang Pembangkit *Existing* (MW) Installed Capacity of Existing Plants (MW)	8.783,00	8.622,97	8.954,29	9.093,13	9.124,72
CF Pembangkit *Existing* (%) CF of Existing Power Plants (%)	58,54	57,07	52,82	45,80	51,82
EAF Pembangkit *Existing* (%) EAF of Existing Power Plants (%)	92,07	87,94	90,52	94,10	93,04
EFOR Pembangkit *Existing* (%) EFOR of Existing Power Plants (%)	2,75	7,35	1,61	1,96	1,31
Tara Kalor Netto Pembangkit Milik Sendiri (kCal/kWh) Net Heat Rate of Existing Power Plants (kCal/kWh)	2.609,80	2.594,05	2.524,55	2.544,82	2.563,12

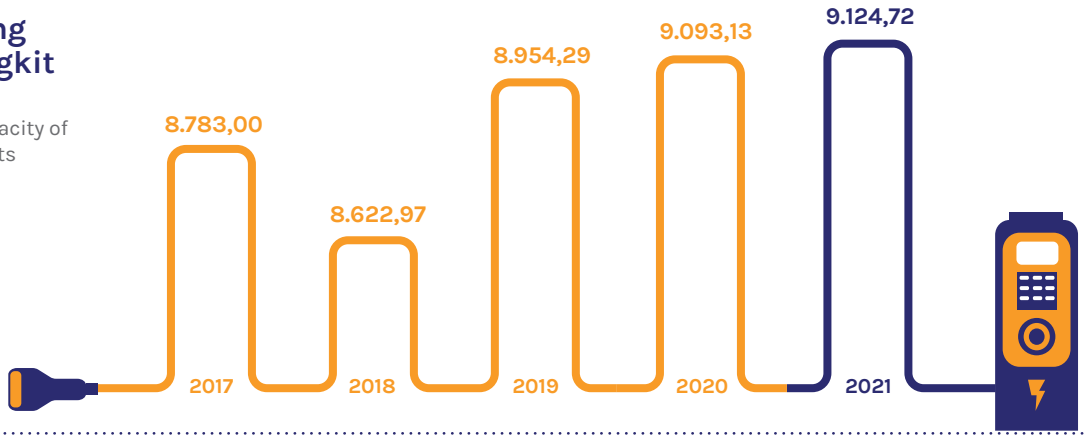




Daya Terpasang Pembangkit *Existing*

Installed Capacity of Existing Plants

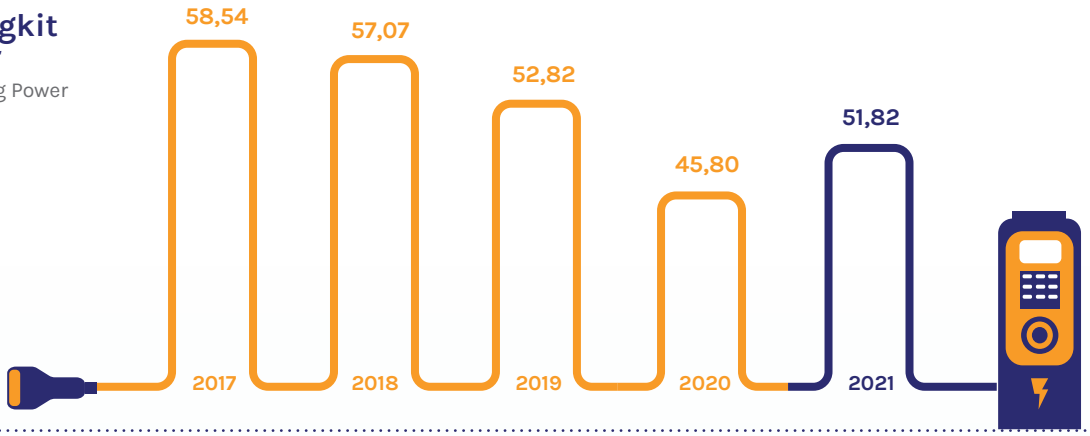
(MW)
(MW)



CF Pembangkit *Existing*

CF of Existing Power Plants

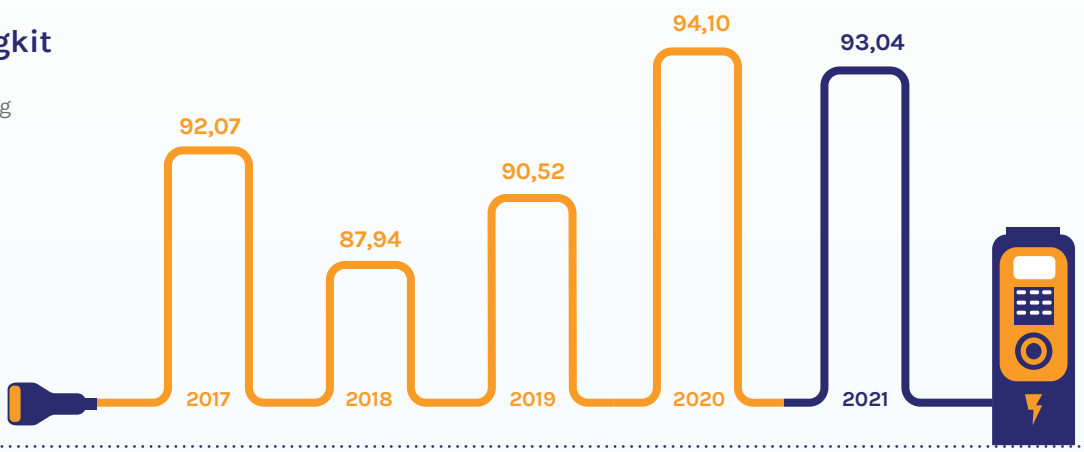
(%)
(%)



EAF Pembangkit *Existing*

EAF of Existing Power Plants

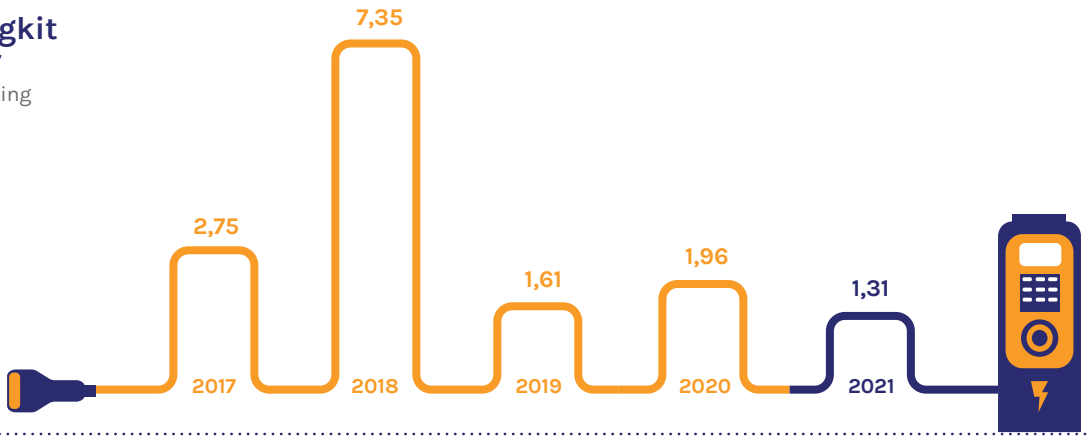
(%)
(%)



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS

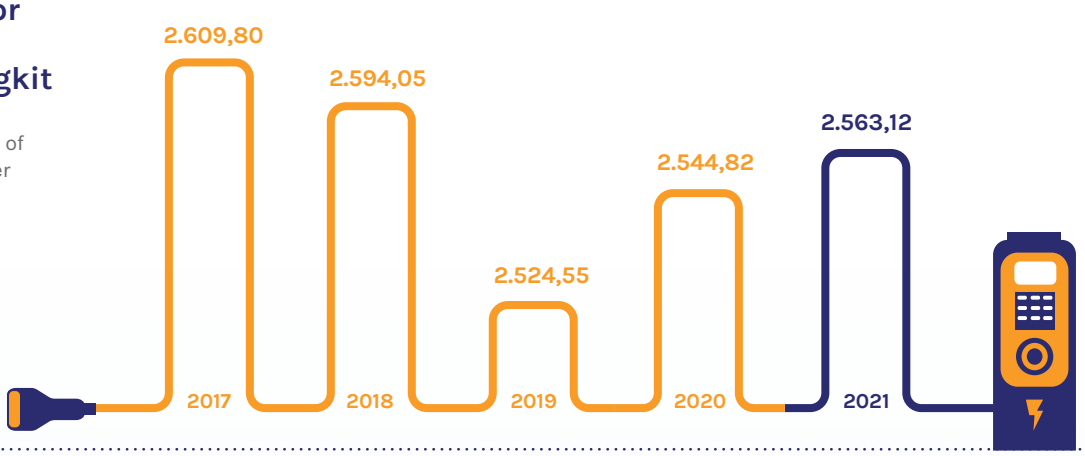
EFOR Pembangkit *Existing*
EFOR of Existing Power Plants

(%)
(%)



Tara Kalor Netto Pembangkit *Existing*
Net Heat Rate of Existing Power Plants

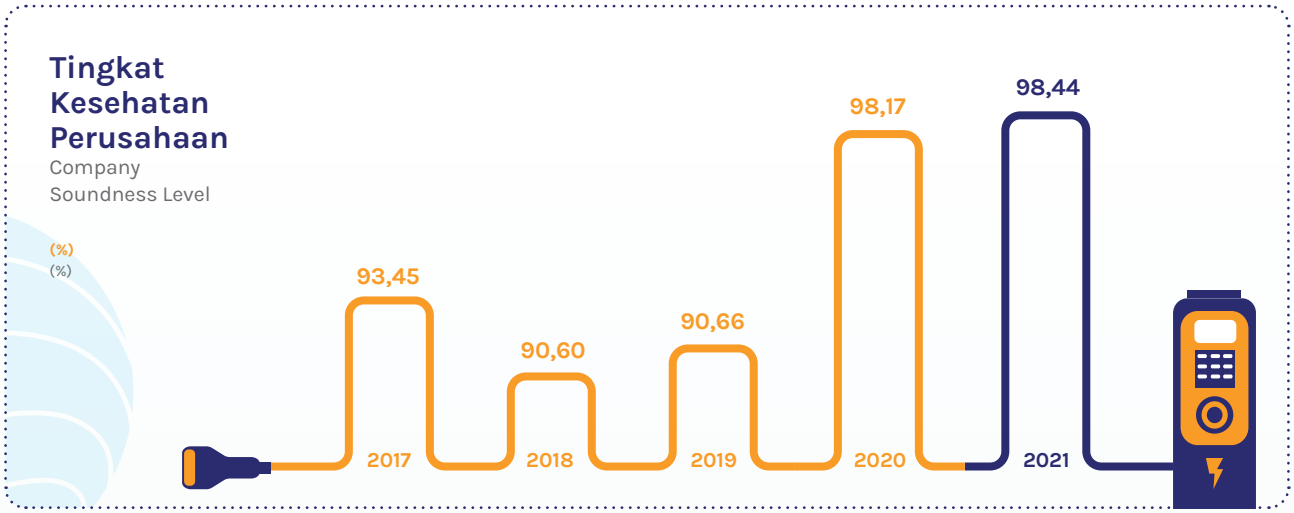
(kCal/kWh)
(kCal/kWh)



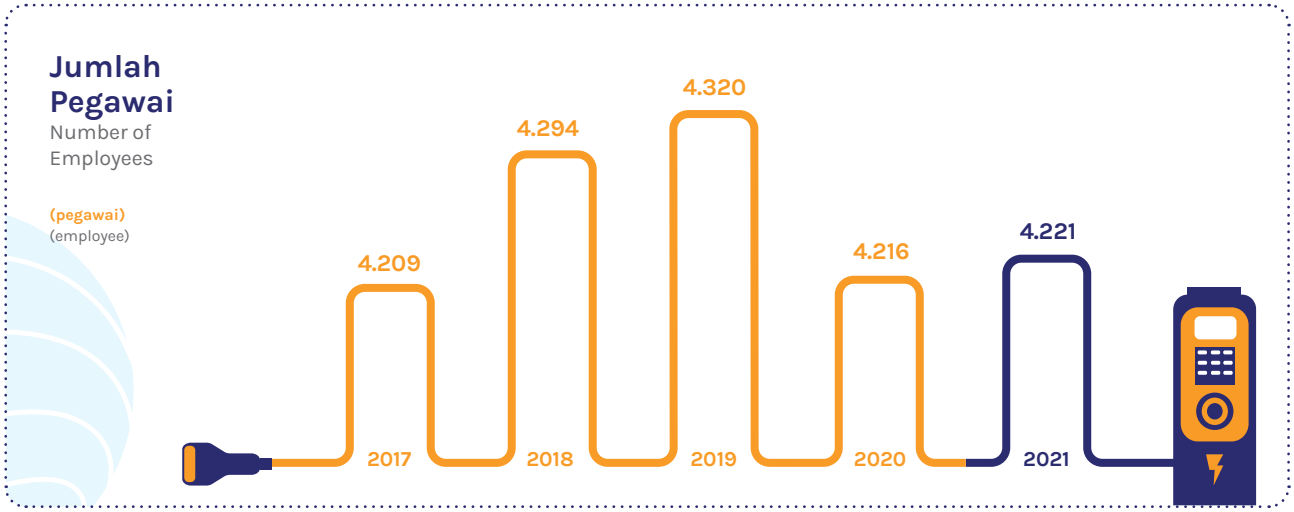
Kinerja jasa O&M Jawa Performance of O&M Service Power Plants in Java	2017	2018	2019	2020	2021
Daya Terpasang Pembangkit Jasa O&M Jawa (MW) Installed Capacity of O&M Service Power Plants in Java (MW)	5.359,00	6.262,00	6.431,00	6.782,70	6.782,70
CF Jasa O&M Jawa (%) CF of O&M Service in Java (%)	60,38	63,70	62,38	58,15	51,98
EAF Jasa O&M Jawa (%) EAF of O&M Service in Java (%)	77,76	78,70	84,72	89,80	89,84
EFOR Jasa O&M Jawa (%) EFOR of O&M Service in Java (%)	10,52	7,62	6,81	2,69	2,10
Tara Kalor Netto Jasa O&M Jawa (kCal/kWh) Net Heat Rate of O&M Service in Java (kCal/kWh)	2.494,50	2.522,93	2.358,78	2.494,81	2.638,12

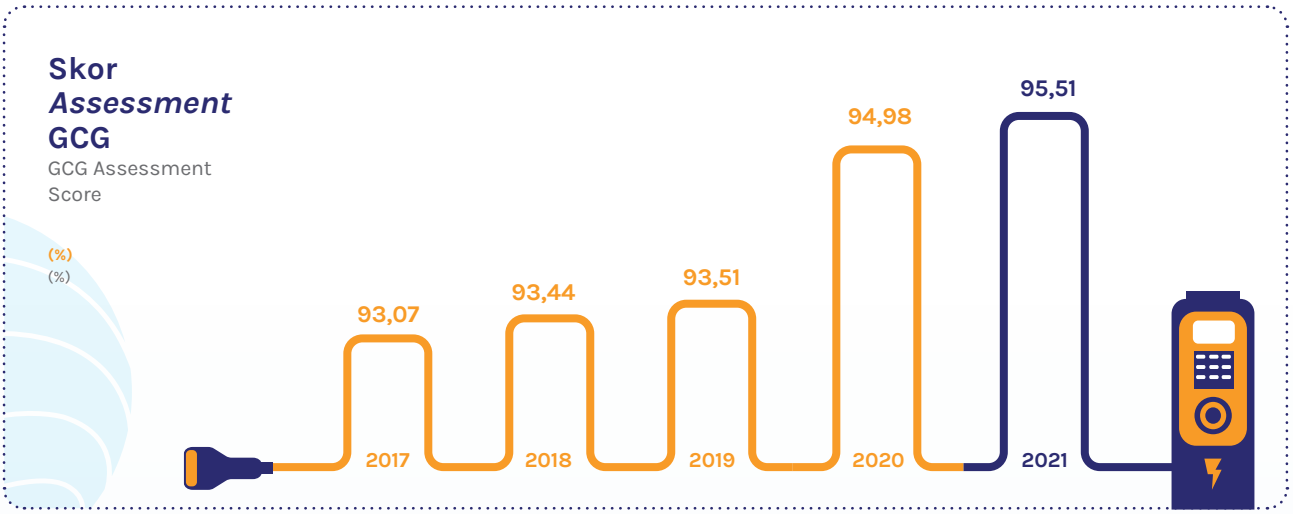
Kinerja Jasa O&M Luar Jawa Performance of O&M Service Power Plants Outside Java	2017	2018	2019	2020	2021
Daya Terpasang Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa (MW) Installed Capacity of O&M Service Power Plants outside Java (MW)	679,60	698,00	678,00	695,00	1.165,00
CF Jasa O&M Luar Jawa (%) CF of O&M Service outside Java (%)	34,09	35,09	43,12	55,75	56,85
EAF Jasa O&M Luar Jawa (%) EAF of O&M Service outside Java (%)	71,07	60,74	50,98	78,61	77,80
EFOR Jasa O&M Luar Jawa (%) EFOR of O&M Service outside Java (%)	8,20	20,65	28,67	6,16	3,94
Tara Kalor Netto Jasa O&M Luar Jawa (kCal/kWh) Net Heat Rate of O&M Service outside Java (kCal/kWh)	4.698,58	5.016,32	4.936,11	4.904,33	3.951,63

Kinerja Perusahaan Lainnya Other Company Performances	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kesehatan Perusahaan (%) Company Soundness Level (%)	93,45	90,60	90,66	98,17	98,44
Jumlah Pegawai (pegawai) Number of Employees (employee)	4.209	4.294	4.320	4.216	4.221
Skor *Assessment* GCG (%) GCG Assessment Score (%)	93,07	93,44	93,51	94,98	95,51



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
KEY FINANCIAL HIGHLIGHTS





Ikhtisar Saham
Share Overview

Sampai dengan akhir tahun 2021, Indonesia Power tidak melakukan perdagangan saham sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan serta volume saham yang diperdagangkan.

Until the end of 2021, Indonesia Power had not had its shares listed and traded and therefore no information is available regarding the number of shares, market capitalization, highest share prices, lowest share prices, closing share prices, and volume of shares traded.

Ikhtisar Obligasi
Bonds Overview

Sampai dengan akhir tahun 2021, Indonesia Power tidak menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi sehingga tidak ada informasi terkait dengan jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat obligasi/sukuk.

Until the end of 2021, Indonesia Power had not issued any bonds, sukuk, and convertible bonds and therefore no information is available pertaining to the total bonds/sukuks/convertible bonds issued, interest rate/yield, maturity date, and ratings of the bonds/sukuks.



RINGKASAN KINERJA UTAMA TAHUN 2021

KEY PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2021

***Destination statement* tahun 2021 sebagian besar telah tercapai untuk sebagian indikator utama, antara lain menjadi *industry leader* dengan perolehan skor kinerja ekselen, kinerja EFOR pembangkit PLTU batubara eksisting, BPP pembangkit eksisting serta pengembangan bisnis *beyond boundaries* ke Vietnam dan Kuwait menjadi inisiatif strategis yang akan terus ditingkatkan pencapaiannya secara berkelanjutan.**

Most destination statements for 2021 were met for some key indicators, such as becoming industry leader with excellence performance score, EFOR performance for existing coal-fired SPP, existing power plant production cost, business expansion beyond boundaries to Vietnam and Kuwait. These are strategic initiatives whose achievements are sought to improve on an ongoing basis.

3 Pembangkit Commercial Operation Date (COD)

Commercial Operation Date (COD) for 3 Power Plants

- PLTU SPP Kalbar 1 2x100 MW
- PLTM MHPP Gunung Wugul 3 MW
- PLTS SoPP Landbase Grati 1,5 MWp



Dukung PON XX Papua 2021 dengan pembangkit di wilayah timur Indonesia

Supporting PON XX Papua 2021 with Power Plant Development in Eastern Indonesia

- MPP MPP Papua 120 MW
- PLTU SPP Holtekamp 24 MW

PON XX PEKAN OLAHRAGA NASIONAL PAPUA 2021

Produksi Listrik

Electricity Productions

39.230,81 GWh



▲ 12,82%

Penjualan listrik

Electricity Sales

37.590,11 GWh



▲ 13,00%

Pendapatan Usaha

Revenues

Rp38.519.859
Juta Million



▼ 0,57%

Beban Usaha

Operating Expenses

Rp32.429.534
Juta Million



▲ 20,63%

EBITDA
EBITDA

Rp12.171.368,61
Juta Million

▼ 22,75%

Pengembangan Bisnis *Beyond Boundaries* ke Asia Tenggara dan Timur Tengah
Business Expansion Beyond Boundaries to Southeast Asia and Middle East

Sertifikasi Kompetensi Direksi Ahli Pembangun Integritas (API) dukung ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Komitmen 4T "Tidak Suap, Tidak Gratifikasi, Tidak *Fraud* dan Tidak *Luxurious Hospitality*"

Board of Directors Competency Certification of Integrity Builder Expert (API) supports ISO 37001:2015 Anti-Bribery Management System (ABMS) and 4T Commitment of "No Bribery, No Gratification, No Fraud, and No Luxurious Hospitality"

4 PROPER Emas
Gold PROPER

13 PROPER Hijau
Green PROPER

3 PROPER Biru
Blue PROPER

Skor GCG - Predikat Sangat Baik
GCG Score - Very Good Predicate

95,51
Assessment BUMN

95,88
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Prestasi dan Penghargaan
Achievements and Awards

- **Asian Power Awards**
  Raih 5 penghargaan
  Received 5 awards
- **Asean Coal Awards**
  Raih *Winner & First Runner Up*
  Became the Winner and & First Runner-Up
- **TOP GRC Awards 2021**
  TOP GRC Level #5 Star, TOP Leader The Most Commitment GRC Leader 2021, The high Performing Board of Commissioners on GRC 2021, and Special Appreciation on Application to Support GRC Implementation
- **TOP CSR Awards 2021**
- **Business Performance Excellence Awards 2021**
  Raih *Industry Leader*
  Earned Recognition as Industry Leader
- **Penghargaan K3 Tahun 2021**
  OHS Awards 2021
  Zero Accident untuk 20 Unit, SMK3 untuk 4 Unit, Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV (P2HIV) untuk 8 Unit dan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 untuk 13 Unit
  Zero Accident Awards for 20 Units, OHS Management System (SMK3) Awards for 4 Units, HIV Prevention and Control Program (P2HIV) Awards for 8 Units, and COVID-19 Prevention and Control Program Awards for 13 Units
- **Indonesian SDG'S Awards (ISDA) 2021**

MENINGKATKAN KOMITMEN ENERGI BERSIH, MEMPERKUAT BISNIS BERKELANJUTAN

RAISING FUTURE ENERGY, STRENGTHENING SUSTAINABILITY

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MENUJU TRANSISI ENERGI DI MASA DEPAN

Research and Development towards Future Energy Transition

Transisi energi merupakan proses panjang yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menekan emisi karbon yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Kesepakatan dalam transisi energi bertujuan untuk menuju ke titik yang sama yaitu pemanfaatan energi bersih yang terus meningkat.

Energy transition is a long process that must be taken part in by all stakeholders in order to reduce the climate-changing carbon emission. Our energy transition shares the same goal, i.e. Continuously improving clean energy utilization.



Sektor energi merupakan kontributor perubahan iklim yang paling dominan, yang menyumbang emisi CO_2 secara global. Di Indonesia, sektor energi merupakan kontributor emisi terbesar kedua setelah sektor lahan dan hutan. Diproyeksikan sektor energi akan menjadi kontributor utama apabila laju pertumbuhan emisi tidak diintervensi. Oleh karena itu, transisi energi perlu segera dilakukan untuk mengurangi kontribusi emisi dari sektor energi.

Sejalan dengan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Indonesia Power terus melakukan penelitian dan pengembangan menuju transisi energi melalui Program *Sustainable Research and Development*, yang meliputi aksi dan kegiatan: (1) *Co-firing* PLTU dengan biomassa; (2) *Pilot Plant* Bahan Bakar Jumputan Padat; (3) *Mini Plant* Garam dari *Brine Water Desalination Plant* dan (4) produksi O_2 dari H_2 *Plant*. Untuk selanjutnya hasil penelitian dan pengembangan tersebut ditindaklanjuti dengan program inovasi teknologi pembangkitan yang bersifat komersil. Disadari sepenuhnya bahwa transisi energi bukan hanya tentang perubahan teknologi pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan tetapi juga terkait dengan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

The energy sector is the most dominant contributor to climate change, adding to the CO_2 emissions globally. In Indonesia, energy sector is the second largest emission contributor following the land and forestry sector. The energy sector is predicted to take over and become the main emission contributor if no intervention is performed. This is why energy transition needs to be immediately carried out in order to mitigate emission contribution from the energy sector.

In line with the Presidential Regulation on National Energy Master Plan (RUEN) and the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 4 of 2020 on Utilization of Renewable Energy Resource for Electricity Supply, Indonesia Power continues performing research and development towards energy transition under Sustainable Research and Development Program that covers the following actions and activities: (1) SPP cofiring with biomass; (2) Solid Recovered Fuel (SRF) pilot plant; (3) Mini salt plant from Brine Water Desalination Plant; and (4) O_2 production from H_2 plant. Further, the results of such research and development are followed-up by commercial power generation technology innovations. It is fully realized that energy transition concerns not only about the technology shift from the utilization of fossil fuel to renewable energy, but also about its relevance with social, economic, and environmental aspects.

RESILIENSI INDONESIA POWER MENGHADAPI TANTANGAN
Indonesia Power's Resilience against Challenges

Pengembangan Pembangkit EBT
Development of NRE-fired Power Plants

"Persentase kapasitas pembangkit EBT IP tahun 2028 sebesar 30%"
"the percentage of IP's NRE power plant capacity in 2028 is 30%"

Pembangkit EBT yang sudah Beroperasi
NRE-fired power plants in operation

PLTA Rajamandala Rajamandala HPP	47 MW Kapasitas Capacity	2020 Tahun COD COD year
PLTM Gunung Wagul Gunung Wagul MHPP	2x1,5 MW Kapasitas Capacity	2021 Tahun COD COD year
PLTS Landbase Grati Landbase Grati SoPP	1,5 MWp Kapasitas Capacity	2021 Tahun COD COD year

Pembangkit EBT ditargetkan Beroperasi
NRE-fired power plants targeted to operate

PLTM Harjosari Harjosari MHPP	3x3,3 MW Kapasitas Capacity	2023 Rencana COD COD plan
PLTM Lambur Lambur MHPP	2x4 MW Kapasitas Capacity	2022 Rencana COD COD plan
PLTM Cileunca Cileunca MHPP	2x0,5 MW Kapasitas Capacity	2022 Rencana COD COD plan

Pengembangan Pembangkit EBT Pada Pembangkit Eksisting
NRE-fired Power Plant Development in Existing Power Plants

Pemasangan PLTS Atap pada Pembangkit eksisting
Rooftop SoPP Installation in Existing Power Plants

PLTS Atap pada PLTDG Pesanggaran
Rooftop SoPP in DGPP Pesanggaran



131,32 kWp
Total Kapasitas
Total Capacity

PLTS Atap PV pada PLTG Pemaron
PV Rooftop SoPP in GTPP Pemaron



96,48 kWp
Total Kapasitas
Total Capacity

Melalui Anak Perusahaan, Indonesia Power melanjutkan pengembangan PLTS Atap di sejumlah lokasi unit pembangkit dengan total kapasitas yang direncanakan sebesar 7.200 kWp.
Under its subsidiaries, Indonesia Power continues the development of Rooftop SoPP in a number of power generation unit sites, targeting a total capacity of 7,200 kWp.

MENINGKATKAN KOMITMEN ENERGI BERSIH, MEMPERKUAT BISNIS BERKELANJUTAN
RAISING FUTURE ENERGY, STRENGTHENING SUSTAINABILITY

PENGEMBANGAN PEMBANGKIT EBT, TINGKATKAN BAURAN ENERGI PRIMER

NRE-fired Power Plant Development, Increasing Primary Energy Mix

Pengembangan dan pembangunan pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) telah menjadi prioritas utama bagi segenap pihak, terutama bagi pelaku usaha di bidang penyediaan energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi di masa depan. Dalam pengembangan pembangkit EBT, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain memperhitungkan keseimbangan antara *supply* dan *demand*, kesiapan sistem, nilai keekonomian, serta kemampuan dalam skala nasional untuk memproduksi industri EBT. Indonesia Power terus berpartisipasi mendorong terwujudnya kolaborasi yang inovatif untuk mengakselerasi transisi energi, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan menuju *Net Zero Emission* (NZE). Perlahan namun pasti, Kami berhasil meningkatkan bauran energi primer menjadi sebesar 6.616,45 GWh dari tahun lalu sebesar 6.473,20 GWh.

The development and construction of new and renewable energy (NRE)-fired power plants have become the main priority of a number of parties, particularly power providers, to maintain energy security in the future. The development of NRE-fired power plants has several affecting factors, among others the balance between supply and demand, system readiness, economic value, and national-scaled capability to produce NRE industry.
Indonesia Power continues participating to encourage innovative collaboration to accelerate energy transition, cooperating with various stakeholders towards Net-Zero Emission (NZE). Slowly but sure, we have managed to improve the primary energy mix to 6,616.45 GWh, from 6,473.20 GWh in the previous year.



PLTS SoPP Landbase Grati

PLTS Landbase Grati merupakan wujud inisiatif pengembangan pembangkit EBT untuk mendukung tercapainya target bauran EBT sebesar 23% di tahun 2025 menuju karbon netral (*Net Zero Emission*/NZE) di tahun 2060. PLTS Landbase Grati berkapasitas 1,5 MWp ini dibangun di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan telah dinyatakan layak operasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kehadiran PLTS Landbase Grati membantu memenuhi kebutuhan energi sendiri sehingga meningkatkan efisiensi unit dan mulai beroperasi pada tanggal 6 September 2021.
SoPP Landbase Grati is the materialization of NRE-fired power plant development initiative that supports the achievement of 23% NRE energy mix by 2025 towards Net-Zero Emission by 2060. SoPP Landbase Grati 1.5 MWp is constructed in Wates Village, Lekok Sub-District, Pasuruan Regency, East Java and declared for its operational feasibility by the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. SoPP Landbase Grati has helped meeting self-energy demands as well as increased unit efficiency. This power plant commenced its operation on September 06, 2021.



PLTM MHPP Gunung Wugul

PLTM Gunung Wugul berkapasitas 3 MW berada di wilayah operasi Pasuruan, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp11.379 juta dan telah beroperasi secara komersial pada tanggal 3 Desember 2021. Hadirnya PLTM Gunung Wugul memiliki *multiplier effect*, selain juga berdampak memperkuat sistem kelistrikan Jawa Bali dan mendorong pembangunan infrastruktur nasional serta untuk mendukung tercapainya transisi energi.
MHPP Gunung Wugul 3 MW is located in Pasuruan, East Java operational area, with investment value of Rp11,379 million. It has been commercially operating since December 03, 2021. MHPP Gunung Wugul has brought multiplier effect; while strengthening the electricity system in Java and Bali, it also encourages the national infrastructure development and supports energy transition.

KOMERSIALISASI *CO-FIRING* DI 11 PLTU BATUBARA
Coal-fired SPPs Co-firing Commercialization

Indonesia Power terus memantapkan langkah untuk melakukan komersialisasi *co-firing* PLTU batubara ke seluruh PLTU batubara eksisting sesuai *roadmap* tahun 2025. Yakni dengan melakukan substitusi sebagian bahan bakar di PLTU eksisting dengan EBT. Sampai dengan akhir tahun 2021, *co-firing* PLTU batubara telah berhasil dilakukan di PLTU Suralaya 1-4 (10 Desember 2020), PLTU Jeranjang (10 Desember 2020), PLTU Sanggau (10 Desember 2020), PLTU Suralaya 8 (14 Oktober 2021), PLTU Sintang (25 Oktober 2021), PLTU Suralaya 5-7 (26 April 2021), PLTU Lontar (26 April 2021), PLTU Labuan (26 April 2021), PLTU Barru (3 Mei 2021), PLTU Adipala (28 Mei 2021), dan PLTU Pelabuhanratu (28 Mei 2021). Hal ini membuktikan keseriusan Indonesia Power dalam menghijaukan PLTU untuk mendukung program Pemerintah dalam mencapai target EBT dalam bauran energi di tahun 2025.

Indonesia Power strengthens its endeavor to perform cofiring in all existing Coal-fired SPPs in accordance with the roadmap 2025. This is performed by substituting some fuel used in existing SPPs with NRE-based fuel. As of the end of 2021, the Coal-fired SPP cofiring has been implemented in SPP Suralaya 1-4 (December 10, 2020), SPP Jeranjang (December 10, 2020), SPP Sanggau (December 10, 2020), SPP Suralaya 8 (October 14, 2021), SPP Sintang (October 25, 2021), SPP Suralaya 5-7 (April 26, 2021), SPP Lontar (April 26, 2021), SPP Labuan (April 26, 2021), SPP Barru (May 03, 2021), SPP Adipala (May 28, 2021), and SPP Palabuhanratu (May 28, 2021). This demonstrates Indonesia Power's sincerity in SPP greening in order to support the achievement of the Government's NRE target in the energy mix 2025.

Dampak positif sudah dapat dilihat walaupun capaian bauran EBT sampai dengan akhir tahun 2021 baru sebesar 11% merupakan jalan panjang untuk sampai pada target bauran EBT nasional 23% di tahun 2025 tanpa investasi yang besar. Penggunaan batubara ke depan akan terus ditekan, sambil menunggu teknologi dan kombinasi pengunaan *co-firing* yang tepat.

Although the NRE mix at the end of 2021 still stood at 11%, positive impacts have started to show. It is indeed a long journey to achieve the 23% of national NRE mix by 2025 without substantial amount of investment. In the future, coal consumption will continue to be reduced, while awaiting the appropriate technology and combination for cofiring utilization.

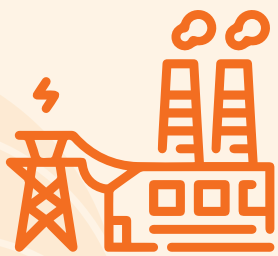
Pencapaian implementasi *co-firing* telah melebihi target dalam *Roadmap* Implementasi *co-firing* 2020-2024, yakni:
The co-firing implementation has exceeded the target set in Co-firing Implementation Roadmap 2020-2024, i.e.:

2021

- *Co-firing biomass* di 10 PLTU – 70,24 MW
- Pengembangan sumber *biomass*/SRF baru
- *Joint research* peningkatan kualitas *biomass*/SRF
- Biomass cofiring in 10 SPPs – 70.24 MW
- New SRF/biomass resource development
- Joint research for biomass/SRF quality improvement



KONSISTENSI MENJAGA LEVEL BPP LISTRIK PEMBANGKIT EKSISTING
Consistency in Controlling Existing Power Plant Production Cost



Tahun 2021, Indonesia Power berhasil menjaga penurunan BPP Pembangkit eksisting lebih baik dari tahun sebelumnya, yakni di level Rp805,71,- dari target sebesar Rp859,87,-. Konsistensi penurunan BPP pembangkit dalam tiga tahun terakhir menjadi hasil kerja dan keberhasilan pengelolaan efisiensi thermal pembangkit yang semakin baik.

In 2021, Indonesia Power has had put better control on the production cost of existing power plants compared to the previous year, which amounting to Rp805.71 from the target of Rp859.87. Consistent decline in power plant production cost for the past three years proves the success and improvement of the power plant thermal efficiency management.

PERISTIWA PENTING TAHUN 2021
IMPORTANT EVENTS IN 2021

19 Februari 2021
February 2021



Penandatanganan Nota Kesepahaman PT Indonesia Power dengan PT Sang Hyang Seri tentang Penyediaan Biomasa untuk uji coba *Co-firing* PLTU
Signing of Memorandum of Understanding between PT Indonesia Power and PT Sang Hyang Seri on Provision of Biomass for SPP Cofiring Trial

26 Februari 2021
February 2021



Peluncuran *Dual Fuel Barge Mounted Power Plant* (BMPP) 60MW Kolaka 1
Launching of Dual Fuel Barge Mounted Power Plant (BMPP) 60 MW Kolaka 1

15 Maret 2021
March 2021



Launching Anti Corruption Center of Excellence
Launching of Anti-Corruption Center of Excellence

23 April 2021
April 2021



Penandatanganan kerjasama antara Indonesia Power dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait penyediaan bahan bakar jumputan padat untuk *co-firing* PLTU
Signing of cooperation between Indonesia Power and Tangerang City Government on Provision of Solid Recovered Fuel (SRF) for SPP Cofiring

26 April 2021
April 2021



Komersialisasi *Co-firing* PLTU Suralaya 5-7, PLTU Banten 2 Labuan dan PLTU Banten 3 Lontar
Co-firing Commercialization SPP Suralaya 5-7, SPP Banten 2 Labuan, and SPP Banten 3 Lontar

28 April 2021
April 2021



Indonesia Power Berhasil Melakukan Sinkronisasi PLTU Kalbar 1 #Unit 2
Synchronizing SPP West Kalimantan 1 #Unit 2

28 **Mei 2021**
May 2021



Go Live *Co-firing* PLTU Adipala dan PLTU Pelabuhan Ratu
SPP Adipala and SPP Pelabuhan Ratu Co-firing Go Live

17 **Juni 2021**
June 2021



Launching* Indonesia Power FABA *Information Center
Launching of Indonesia Power FABA Information Center

25 **Juni 2021**
June 2021



Beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*/COD) PLTU Kalbar 1 2x100 MW
Commercial Operation Date (COD) of SPP West Kalimantan 1 2x100 MW

29 **September 2021**
September 2021



Penandatanganan Kerjasama antara Indonesia Power, Tuas *Power* dan EDF *Renewables* tentang Kerjasama Impor Tenaga Surya ke Singapura
Signing of Cooperation between Indonesia Power, Tuas Power, and EDF Renewables on Cooperation on Solar Power Import to Singapore

19 **Oktober 2021**
October 2021



Penandatanganan Kerjasama Indonesia Power & BSSN RI tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektornik di Lingkungan Indonesia Power
The Signing of Cooperation between IP and the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) RI for Utilization of Electronic Certificates in Electronic Systems within Indonesia Power

1 **Desember 2021**
December 2021



***Launching* BBJP (Bahan Bakar Jumputan Padat) TPSA Bagendung Cilegon**
Launching of Solid Recovered Fuel at Bagendung Cilegon Landfill

3 **Desember 2021**
December 2021



Beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*/COD) PLTM Gunung Wugul 3 MW
Commercial Operation Date (COD) of MHPP Gunung Wugul 3 MW

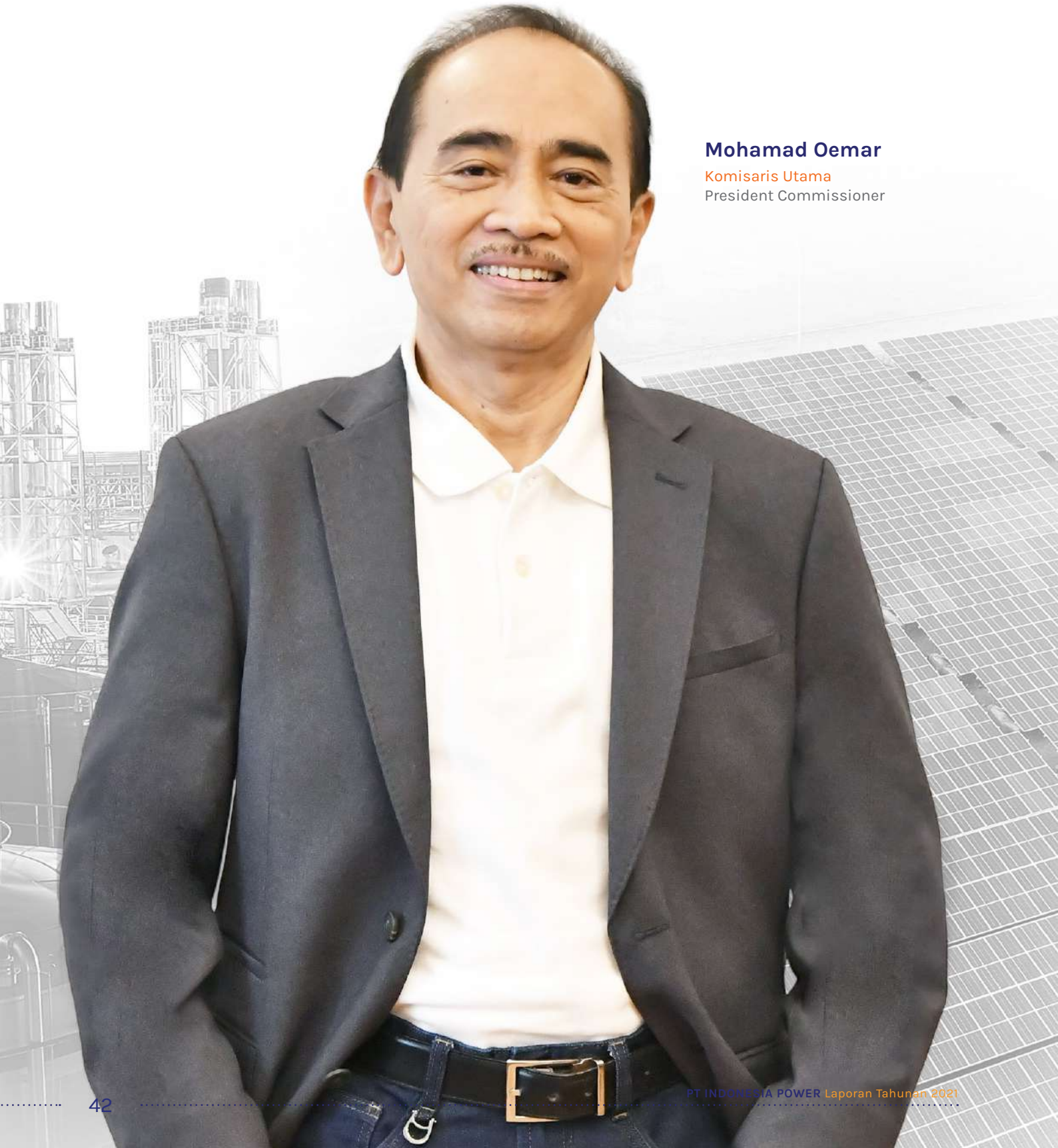

A
PLTGU TANJUNG PRIOK
SERVICE / FIRE WATER TANK
3160 KL



LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Report to Shareholder and Stakeholder

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS



Mohamad Oemar
Komisaris Utama
President Commissioner

Dewan Komisaris optimis bahwa kedepannya Indonesia Power mampu menangkap dan mengoptimalkan peluang serta mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) secara berkelanjutan dan terukur, Indonesia Power yakin dapat menjadi pemain utama dalam transisi energi menuju karbon netral (*Net Zero Emission*).”

“The Board of Commissioners is positive that going forward, Indonesia Power will be able to capture and optimize opportunities, while addressing challenges. With sustainable and measured development of New and Renewable Energy power plants, Indonesia Power is optimistic to become the main player in the transaction towards Net Zero Emission.”

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Our Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Indonesia Power dapat melalui tahun 2021 sebagai tahun kedua pandemi Covid-19 dengan kinerja yang baik. Bersyukur atas berbagai pencapaian penting Indonesia Power yang telah diraih di tengah tantangan pandemi Covid-19 dengan munculnya varian baru. Kami, Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan kepada Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan atas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk tahun buku 2021 di dalam Laporan Tahunan.

Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini mencakup aspek pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), penilaian atas kinerja Direksi dan dasar penilaiannya, serta isu strategis yang sedang dihadapi Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga akan menyampaikan penilaian kami terhadap kinerja Direksi dalam upaya merespon tantangan yang ada untuk tetap bertumbuh. Kami juga akan memberikan pandangan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik termasuk implementasi *Whistle Blowing System* (WBS), dan perubahan komposisi Dewan Komisaris selama tahun 2021 serta prospek usaha Indonesia Power pada masa mendatang.

All praise and thanks be to the One Almighty God, who has granted upon us His blessings and grace, so that Indonesia Power can successfully pass 2021, the second year of the COVID-19 pandemic, with positive performance. We are thankful for numerous achievements we have successfully grabbed amid the emergence of new COVID-19 variants. We are using this opportunity to report to the Shareholders and all stakeholders the implementation of our supervisory and advisory duties to the Board of Directors throughout the fiscal year 2021 in an Annual Report.

The supervisory duty report of the Board of Commissioners in this Annual Report covers the aspects of supervision over the implementation of the Company’s Work Plan and Budget (WP&B) and Company’s Long-Term Plan (RJPP), assessment of the Board of Directors’ performance and the basis for the assessment, as well as the strategic issues faced by the Company. We will also report our assessment of the Board of Directors’ performance to respond to existing challenges in order to keep growing. Additionally, we will share our opinion on the implementation of good corporate governance, including the implementation of the Whistleblowing System (WBS), the changes in Board of Commissioners’ composition throughout 2021, and Indonesia Power’s business outlook.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Tinjauan Makroekonomi 2021
2021 Macroeconomic Review

Tahun 2021 merupakan masa pemulihan bagi perekonomian global maupun domestik sejak terjadi pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi global mengalami ketidakpastian dan terkontraksi di tahun tersebut. Hadirnya vaksin di awal tahun 2021 menjadi titik terang dan harapan akan pemulihan pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat pertumbuhan ekonomi global mencapai 5,9% jauh lebih tinggi dari kontraksi 3,2% di tahun 2020. Perkembangan tersebut didorong oleh akselerasi tingkat vaksinasi, stimulus kebijakan, dan pemulihan kegiatan ekonomi secara bertahap tidak hanya di Amerika Serikat dan Tiongkok, serta juga di negara-negara Eropa dan Asia lainnya.

The year 2021 was a recovery period for the global and domestic economies since the outbreak of COVID-19 pandemic in early 2020. The global economic growth faced uncertainties and contracted in said year. The discovery of vaccine at the beginning of 2021 has shown a glimmer of hope for recoveries post-COVID-19. The International Monetary Fund's data demonstrated that the global economic growth stood at 5.9%, which was higher than the 3.2% contraction in 2020. This development was encouraged by accelerated vaccination, stimulus policy, and gradual recovery of economic activities not only in the United States and China, but also in other European and Asian countries.

Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) menyampaikan perekonomian Indonesia sepanjang 2021 berhasil tumbuh 3,69% dibandingkan dengan kontraksi 2,07% di tahun 2020, didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, belanja fiskal dan investasi non bangunan, peningkatan mobilitas seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, serta peningkatan stimulus bantuan sosial oleh Pemerintah. Membaiknya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak positif pada perbaikan dan pertumbunan ekonom yakni adanya kenaikan permintaan listrik sebesar 4,97% pada tahun 2021, dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada pada posisi minus 12,58% di Sistem Jawa Bali. Kenaikan permintaan tersebut diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan target rasio elektrifikasi 100% di tahun 2022 oleh Kementerian ESDM, dimana rasio elektrifikasi hingga Maret 2021 adalah 99,28%. Untuk itulah, Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi perlu terus mengembangkan strategi dan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan peluang dan menjaga usaha Perusahaan berkelanjutan.

Statistics Indonesia (BPS) recorded Indonesia's economic growth at 3.69% throughout 2021, compared to the 2.07% contraction in 2020, which was contributed by the improvement in exports, fiscal spending and non-construction investment, increase in mobility along with accelerated vaccinations and health protocols implementation, and increased provision of social aid stimuli by the Government. The improvement of COVID-19 pandemic control in Indonesia has brought positive impact with economic recovery and growth due to increased electricity demands by 4.97% in 2021. This was an improvement from Java-Bali System's portfolio which was reduced to minus 12.58% in 2020. The increase in demands is estimated to continue along with the electrification ratio target of 100% by 2022 set by the Ministry of Energy and Mineral Resources. As of March 2021, the electrification ratio was 99.28%. Therefore, the Board of Commissioners considers that the Board of Directors needs to continue developing the strategies and policies that optimize opportunities and maintain businesses in the long run.

Penilaian Atas Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya
Assessment of the Board of Directors' Performance and the Basis of Assessment

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi dalam pengelolaan Perusahaan telah berjalan dengan baik. Direksi mampu menerjemahkan tantangan yang dihadapi dengan mengantisipasinya melalui beragam strategi, kebijakan, dan inisiatif yang mampu meningkatkan kinerja Perusahaan. Dewan Komisaris berpendapat bahwa kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan, salah satunya dapat dilihat dari tingkat kesehatan Perusahaan yang dicapai tahun 2021 berada pada level "AAA" dan termasuk dalam klasifikasi "SEHAT" dengan skor 98,44 meningkat dari capaian skor tahun sebelumnya. Penilaian tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sebagai KPI Perusahaan yang ditetapkan Pemegang Saham.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors' has performed well in managing the Company in 2021. The Board of Directors was capable of translating the challenges faced by anticipating them with a number of strategies, policies, and initiatives that improve the Company's performance. It was also demonstrated that the Board of Directors has successfully managed the Company, as indicated by the Company's 2021 soundness level of "AAA" or "SOUND", with the score of 98.44 which was an improvement from the previous year. The assessment refers to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on the Assessment of Soundness Level in SOEs as the Company's KPIs set out by the Shareholders.

Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi telah menjalankan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan Kontrak Manajemen, target kinerja utama Perusahaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan oleh Pemegang Saham setiap tahun dan juga selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Penilaian Dewan Komisaris meliputi penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi dari ketiga hal tersebut. Eksekusi program strategis 2021 yang telah disusun oleh Direksi tentunya diharapkan dapat mendukung resiliensi Indonesia Power dalam menghadapi tantangan yang terjadi. Yaitu menjaga keandalan pembangkit di Sistem Jawa Bali, memproduksi listrik dengan biaya rendah, berkontribusi dalam *fuel mix* EBT, transformasi digital dan inovasi secara berkelanjutan, pengembangan bisnis *beyond* kWh dan meningkatkan kapasitas organisasi dan kapabilitas SDM. Tentunya keseluruhan program strategis tersebut sejalan dengan strategi SOLID PLN Group. Yaitu mencakup *Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increasing Profit Contribution, Developing New Age* dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan periode tahun 2020-2024 guna mendukung pertumbuhan kinerja Perusahaan berkelanjutan.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has performed the Company's management in accordance with the Management Contract, the Company's key performance targets in the Work Plan and Budget stipulated by the Shareholders on an annual basis, while in alignment with the Company Long-Term Plan. The assessment performed by the Board of Commissioners covers the measurement of quantitative and qualitative aspects of the realization of the three factors. The execution of the 2021 strategic programs devised by the Board of Directors was certainly hoped to enhance Indonesia Power's resilience in facing ongoing challenges. These among others include maintaining power plant reliability in Java-Bali System, producing low-cost electricity, contributing in NRE fuel mix, carrying out sustainable digital transformation and innovations, seeking beyond kWh business expansion, and developing organizational capacities and human capital capabilities. These strategic programs certainly go in line with PLN Group's SOLID strategies: Securing Business Sustainability, Optimizing Cost Efficiency, Leading Industry Capabilities, Increasing Profit Contribution, and Developing New Age in the Company Long-Term Plan 2020-2024 in order to strengthen the Company's sustainable performance growth.

Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan merupakan indikator kinerja utama yang menjadi target tahun 2021 sebanyak 21 indikator mencapai target dan 7 indikator belum mencapai target. Indikator KPI Perusahaan 2021 yang mencapai target antara lain adalah (1) kinerja gangguan EFOR PLTU Batubara Eksisting dan PLTU batubara AMC Jawa Bali; (2) Umur Persediaan Batubara Eksisting dan AMC Jawa Bali; (3) laba rugi tahun berjalan; (4) Jumlah unit pembangkit yang mengimplementasikan teknologi digital, (5) BPP pembangkit eksisting, (6) *co-firing* biomass, (7) sinergi dengan Anak Perusahaan lain dan Pusharlis, (8) produktivitas pegawai, (9) pemenuhan *talent pool* dan *talent mobility* serta (10) tingkat Proper Unit (Hijau/Emas). Dewan Komisaris menilai bahwa program strategi dan langkah Direksi Indonesia Power dalam mengelola kinerja-kinerja di atas sudah tepat, sehingga perlu terus dijaga konsistensinya di masa mendatang. Adapun terkait indikator kinerja yang belum mencapai target, yakni EFOR pembangkit non PLTU batubara, EAF pembangkit baik PLTU batubara eksisting, PLTU batubara AMC Jawa Bali dan pembangkit non PLTU batubara, penambahan kapasitas pembangkit EBT, dan BPP pembangkit AMC Jawa Bali, Dewan Komisaris meminta kepada Direksi ke depannya dapat melakukan strategi yang lebih tepat sasaran guna mencapai seluruh target yang ditetapkan.

The Company's Key Performance Indicators (KPIs) were the targets to meet by 2021. In actuality, 21 indicators have met the targets set, while the remaining 7 have not. The KPIs meeting the targets set for 2021 among others were (1) EFOR of existing Coal-fired SPPs and AMC Java-Bali Coal-fired SPP; (2) Age of coal supply in existing and AMC Java-Bali power plants; (3) Net Profit (Loss) for the Year; (4) Total Power Plant Units Implementing Digital Technology; (5) Existing Power Plant Production Cost; (6) Biomass Cofiring; (7) Synergy with Other Subsidiaries and Electricity Maintenance Center; (8) Employee Productivity; (9) Talent Pool & Talent Mobility Compliance; and (10) Unit Proper Rating (Green/Gold). The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has accurately and properly applied the programs, strategies, and measures in managing the above performances, whose consistencies must be continuously maintained in the future. For the KPIs not meeting the targets, i.e. Non-Coal-Fired SPP EFOR; Existing Coal-Fired SPP EAF, AMC Java-Bali Coal-Fired SPP EAF, Non-Coal-Fired SPP EAF, NRE Power Plant Capacity Expansion, and AMC Java-Bali Power Plant Production Cost, the Board of Commissioners advises the Board of Directors that in the future, more appropriate strategies need to be found to achieve all the targets set.

Realisasi produksi energi listrik tahun 2021 meningkat 12,82% menjadi sebesar 39.230,81 GWh dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 34.771,54 GWh atau 126,70% dari target RKAP 2021 sebesar 30.963,38 GWh. Peningkatan produksi listrik tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan *Capacity Factor* (CF) PLTGU Priok Blok 1-2 dan PLTU Suralaya 1-7 sesuai dengan

The actual electricity production in 2021 increased 12.82% to 39,230.81 GWh from the actual production in 2020 at 34,771.54 GWh, which covered 126.70% of the WP&B 2021 target of 30,963.38 GWh. This was mainly contributed by the increase in the Capacity Factor (CF) of CCPP Priok Blocks 1-2 and SPP Suralaya 1-7 according to system demands and gas supply recovery in CCPP Tambak

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

kebutuhan sistem serta pulihnya kondisi pasokan gas PLTGU Tambak Lorok di akhir tahun 2020 pasca gangguan pasokan gas di serta penambahan pasokan gas Tambak Lorok.

Di tengah kondisi pertumbuhan listrik tahun 2021 yang positif sebsar 5,78% dari tahun lalu dan pasokan bahan bakar batubara di tahun 2021 Indonesia Power tetap mampu mencatat peningkatan penjualan energi listrik dan melebihi target RKAP 2021 menjadi sebesar 37.590,11 GWh. Realisasi penjualan energi listrik tahun 2021 meningkat 13% mencapai sebesar 37.590,11 GWh dibandingkan tahun 2020 sebesar 33.264,98 GWh atau 127,41% dari target RKAP 2021 sebesar 29.502,31 GWh. Hal tersebut terutama didorong oleh peningkatan produksi di PLTGU Priok, PLTU Suralaya 1-7 dan PLTGU Grati Blok 2 sesuai dengan kebutuhan sistem serta dengan pulihnya pasokan gas PLTGU Tambak Lorok. Selain itu, Indonesia Power juga berhasil menjaga penurunan BPP pembangkit eksisting pada level Rp805,71,- dari target Rp859,87. Untuk itulah, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi perlu terus menjaga serta meningkatkan kinerja produksi maupun penjualan energi listrik secara berkelanjutan.

Perolehan pendapatan usaha tahun 2021 sebesar Rp38.519.859 juta yang masih didominasi oleh pendapatan penjualan tenaga listrik sebesar 54,24%, diikuti oleh pendapatan konsesi jasa sebesar 38,03% dan pendapatan jasa O&M sebesar 10,28%. Adapun beban usaha tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 20,63% menjadi sebesar Rp32.429.534 juta dibanding tahun lalu terutama disebabkan oleh peningkatan *volume* pemakaian batu bara dan gas. Meskipun terjadi peningkatan biaya terutama pada unsur energi primer, namun Perusahaan masih mampu melampaui target laba yang telah ditetapkan pemegang saham pada RKAP tahun 2021.

Adapun kinerja operasi pembangkit antara lain tercermin dari indikator faktor keandalan (*Equivalent Availability Factor*/EAF) dan faktor gangguan (*Equivalent Forced Outage Rate*/EFOR). Nilai EAF pembangkit eksisting tahun 2021 mencapai sebesar 93,04% atau 102,24% dari target dan lebih rendah 1,13% dibanding tahun 2020 sebesar 94,10%. Untuk kinerja EFOR pembangkit eksisting mencapai sebesar 1,31% atau 160,18% dari target dan lebih baik dibanding tahun 2020 sebesar 1,96%. Dewan Komisaris memandang bahwa upaya penanganan gangguan pembangkit perlu dilakukan secara lebih komprehensif.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah menuju karbon netral atau *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060, Dewan Komisaris berpendapat bahwa berbagai strategi dan langkah Indonesia Power dalam transisi energi dengan tema strategi "*Low - Carbon Energy Development* atau LCE" melalui pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) menggantikan

Lorok at the end of 2020 following gas supply shortage and Tambak Lorok gas supply addition.

With the increase in electricity performance by 5.78% from the previous year and coal supply situation in 2021, Indonesia Power was capable of increasing its electricity sales, exceeding the WP&B 2021 target, to 37,590.11 GWh. The actual electricity sales in 2021 increased 13% to 37,590.11 GWh from the actual sales in 2020 at 33,264.98 GWh, which covered 127.41% of the WP&B 2021 target of 29,502.31 GWh. This was particularly contributed by the increase of productions in CCPP Priok, SPP Suralaya 1-7, and SPP Grati Block 2 in accordance with system demands, as well as recovered gas supply in CCPP Tambak Lorok. Indonesia Power also managed to reduce existing power plant production cost to Rp805.71, from the target Rp859.87. The Board of Commissioners therefore expects the Board of Directors to continue improving the production and sale of electricity on a sustainable basis.

Revenues in 2021 amounting at Rp38,519,859 million were still dominated by electricity sales by 54.24%, followed by revenue from service concession by 38.03% and revenue from O&M services by 10.28%. Meanwhile, operating expenses in 2021 increased 20.63% to Rp32,429,534 million compared to the previous year, particularly due to the increase in coal and gas consumption. Albeit an increase in cost, particularly for primary energy utilization, the Company still managed to exceed the target of profit set out in WP&B 2021 by the shareholders.

The operational performance of power plants is among others indicated by Equivalent Availability Factor (EAF) and Equivalent Forced Outage Rate (EFOR). The existing power plant EAF in 2021 stood at 93.04% or 102.24% of the target, which was 1.13% lower than in 2020 at 94.10%. The existing power plant EFOR stood at 1.31% or 160.18% of the target, which was an improvement than in 2020 at 1.96%. The Board of Commissioners comprehends that outages must be addressed more comprehensively.

In supporting the Government's program towards Net-Zero Emission (NZE) by 2060, the Board of Commissioners considers that Indonesia Power has been on the right path with its Low-Carbon Energy (LCE) Development, carrying out various energy transition strategies and measures by developing new & renewable energy-fired (NRE) power plants and replacing fossil

pembangkit fosil, telah berada pada jalur yang tepat. Hal tersebut dibuktikan dengan pengembangan pembangkit EBT hingga akhir tahun 2021, antara lain meliputi PLTA Poigar 2, PLTM Gunung Wugul, PLTM Harjosari, PLTM Cileunca, PLTM Lambur, dan PLTS Landbase Grati. Dewan Komisaris mengapresiasi kebijakan dan strategi yang dijalankan Direksi, walaupun di tengah berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi, Indonesia Power terus berupaya memperkuat segmen EBT sebagai *second curve of business* Perusahaan. Disamping itu, Dewan Komisaris juga meminta Direksi untuk secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan *Co-firing* PLTU batubara, program pengendalian dan reduksi emisi, implementasi *carbon cap* dan *carbon trade* antar pembangkit, serta menjamin ketersediaan pasokan *biomass* sehingga mendukung tercapainya pembangkit hijau dan bersih, yang menjadi kontribusi Indonesia Power mencapai bauran energi Nasional di tahun 2025 dan transisi energi.

fuel-fired power plants. It is evidenced by the development of NRE-fired power plants until the end of 2021, which among others include HPP Poigar 2, MHPP Gunung Wugul, MHPP Harjosari, MHPP Cileunca, MHPP Lambur, and SoPP Landbase Grati. The Board of Commissioners appreciates the policies implemented and strategies taken by the Board of Directors. In spite of all obstacles and challenges, Indonesia Power has maintained the endeavor of strengthening the NRE segment as its second curve of business. We also encourage the Board of Directors to consistently and continuously carry out the coal-fired SPP cofiring, emission control and reduction program, carbon cap and carbon trade among power plants, while giving assurance for the biomass supply to support green and clean power plant establishment. These are among Indonesia Power's contribution to the national energy mix by 2025 and energy transition.

Terkait pengembangan produk dan layanan, Dewan Komisaris mendukung upaya Direksi yang berhasil meluncurkan produk *beyond* kWh, yang menjadi hasil inovasi strategis tiada henti menjadi salah satu unggulannya, yang ditargetkan menjadi sumber pendapatan di luar penjualan tenaga listrik. Selain juga melakukan transformasi digital untuk kemudahan untuk meningkatkan efisiensi pembangkit dan monitoring secara online dan real time. Dewan Komisaris mengapresiasi pengembangan usaha beyond boundaries yang kian menunjukkan hasil positif, yakni adanya kerjasama di bidang operasi, pemeliharaan dan peralatan pembangkit dengan perusahaan asal Vietnam dan Kuwait.

Pertaining to product and service development, the Board of Commissioners supports the Board of Directors' endeavor in launching the flagship beyond kWh lines as a result of never-ending strategic innovations. In addition to electricity sales, these lines are expected to generate profit. Digital transformation is also sought for convenience and in enhancing power plant efficiency as well as online and real-time monitoring. The Board of Commissioners appreciates the business expansion beyond boundaries which has shown increasingly favorable performance with collaboration in power plant operations and maintenance services and equipment with Vietnamese and Kuwait companies.

Untuk mendukung kelangsungan operasional Indonesia Power di tengah pandemi yang masih berlangsung, Dewan Komisaris mendukung berbagai kebijakan Direksi dalam mengimplementasikan protokol kesehatan di lingkungan kerja termasuk kebijakan *Work from Home* (WFH) dan *Work from Office* (WFO).

To maintain Indonesia Power's operational continuity amid the still ongoing pandemic, the Board of Commissioners supports the Board of Directors' policies in implementing health protocols in the work environment, which include Work from Home (WFH) and Work from Office (WFO) policies.

Berbagai program strategis Direksi dalam menyikapi kondisi ekonomi dan persaingan di industri energi listrik perlu terus ditingkatkan dengan kualitas dan cakupan strategi yang lebih jelas dan terukur sehingga dapat membawa Indonesia Power terus tumbuh berkelanjutan. Dewan Komisaris terus me*monitor* Direksi dalam mempertahankan *revenue stream* dari pembangkit eksisting dan pengembangan bisnis solusi energi serta produk *beyond* kWh agar dapat mempertahankan growth revenue Perusahaan, dengan tetap mengedepankan aspek pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kehati-hatian maupun prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The Board of Directors' strategic programs for addressing economic situation and energy industry competition need to be improved with clearer and measured quality and scopes. That way, we can bring Indonesia Power to grow continuously. The Board of Commissioners continues the monitoring over the Board of Directors in maintaining revenue stream from existing power plants and developing energy solution businesses and beyond kWh lines that help securing the Company's growth revenue. These, indeed, are sought by implementing risk management, as well as complying with applicable regulations, prudential principle, and good corporate governance principles.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pandangan Atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Opinion on the Business Outlook Prepared by the Board of Directors

Perekonomian global di tahun 2022 diperkirakan masih akan mengalami kontraksi dengan kemunculan varian baru Covid-19 mengingat sejumlah negara kembali menerapkan kebijakan pembatasan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 berada di kisaran 4,4% yoy, atau lebih rendah 0,5% dari perkiraan pada Oktober 2021. Normalisasi kebijakan moneter di sejumlah negara berkembang mempengaruhi stabilitas keuangan, menyebabkan hengkangnya dana asing.

By 2022, the global economy is expected to remain contracting due to the emergence of new COVID-19 variants, bearing in mind that a number of countries has re-enforced their restriction policies. The projected global economic growth for 2022 stands at 4.4% yoy, which is 0.5% lower than the October 2021 estimation. The monetary policy normalization in a number of developing countries has affected financial stability, rendering foreign investors pulling out of the country.

Proses pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 diprakirakan masih berlanjut. Sejumlah indikator ekonomi hingga Februari 2022 tercatat tetap baik, antara lain tercermin dari penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur, di tengah perbaikan mobilitas masyarakat yang membaik. Dengan perkembangan itu, perekonomian nasional diprakirakan tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7-5,5% pada tahun 2022.

The national economic recovery is expected to continue in 2022. As of February 2022, a number of economic indicators such as retail sales, consumer expectation, and Manufacture Purchasing Managers' Index (PMI) are well maintained amid the improvement in the public mobility improvement. Based on the development, the national economy is estimated to grow higher, to 4.7%-5.5% in 2022.

Energi listrik sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat maupun pelaku industri, tentunya keberadaannya mempunyai arti penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Pulihnya mobilitas masyarakat mendorong konsumsi listrik, terutama di sektor industri dan retail. Optimisme pemulihan ekonomi di sektor pelanggan bisnis dan industri tercermin dari asumsi masuknya potensi pelanggan besar di kelompok pelanggan industri dan retail. Proyeksi kebutuhan tenaga listrik berdasarkan RUPTL 2021-2030 adalah sebesar 266 TWh atau dengan rata-rata pertumbuhan 4,91% per tahun. Sedangkan proyeksi jumlah pelanggan Indonesia di tahun 2022 adalah 83.426 ribu pelanggan dengan rata-rata pertumbuhan 2,9% per tahun. Hal ini menjadi peluang sekaligus prospek positif bagi Indonesia Power dalam mencapai target elektrifikasi nasional di tahun 2022 sebesar 100%. Untuk itulah, Dewan Komisaris berpandangan bahwa Indonesia Power perlu terus mengambil peran dan kontribusi yang semakin besar dengan mengoptimalkan peluang-peluang tersebut.

Electricity, as one of the key requirements for the public and industry owners, is crucial in supporting the national energy security. Recovered public mobility has encouraged electricity consumptions, particularly in industry and retail sectors. The optimism of economic recovery in business and industry customers is reflected by the assumption of incoming potential large customers in industry and retail sectors. In accordance with Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021-2030, electricity demands are estimated to be at 266 TWh, with average growth of 4.91% per annum. Meanwhile, the number of customers is predicted to be at 83,426 thousand by 2022, with average growth of 2.9% per annum. This presents opportunities and positive outlook for Indonesia Power in meeting the national electrification target by 2022 at 100%. Therefore, the Board of Commissioners considers that Indonesia Power needs to increase its roles and contributions in optimizing these opportunities.

Tantangan yang dihadapi industri energi listrik yang mengalami disrupsi saat ini karena berkembangnya tren 3DIE (*Decarbonization, Decentralization, Digitalization and Electrification*), maka setiap perusahaan energi pembangkit listrik dalam memproduksi listriknya diarahkan menggunakan sumber energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan. Sejumlah kerjasama dengan negara Vietnam dan Kuwait serta potensi ekspor kWh ke Singapura yang dilakukan melalui Anak Perusahaan menjadi pengembangan usaha *beyond boundaries* yang perlu terus ditingkatkan di masa mendatang.

Today's electricity industry is disrupted by the 3DIE (Decarbonization, Decentralization, Digitalization, and Electrification) trend. This encourages every power company to produce electricity using greener new and renewable energy (NRE). A number of collaboration with Vietnam and Kuwait and potential kWh export to Singapore via subsidiaries become a part of business expansion beyond boundaries that needs to be improved in the future.

Secara keseluruhan Dewan Komisaris menilai pada masa mendatang, Indonesia Power optimis peluang pertumbuhan masih terbuka. Untuk itu, Indonesia Power akan terus memperkuat pondasi, pengembangan bisnis *renewable energy* dan strategi inovasi produk *beyond* kWh berkelanjutan. Sejalan untuk memenuhi target bauran energi nasional EBT 23% pada tahun 2025, Dewan Komisaris berpandangan bahwa uraian prospek usaha tahun 2022 perlu dikaji lebih lanjut mengingat kondisi ekonomi dan industri energi listrik masih dalam tekanan. Direksi perlu mempersiapkan rumusan program unggulan yang lebih terukur dan menjadi solusi eksistensi Indonesia Power dalam menghadapi *new era* di masa depan.

As a whole, the Board of Commissioners is optimistic that Indonesia Power has a lot of opportunities going forward. Indonesia Power, therefore, will continue strengthening its foundation, sustainably developing renewable energy business and beyond kWh lines innovation strategy. In relation to meeting 23% national NRE energy mix target by 2025, the Board of Commissioners believes that further review must be performed to the business outlook 2022, considering that the economic situation and electricity industry are currently under pressure. The Board of Directors will need to carefully formulate flagship programs as a solution for Indonesia Power's existence in facing the new era.

Pengawasan Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Supervision over Corporate Governance Implementation

Dewan Komisaris berpendapat bahwa implementasi tata kelola perusahaan di Indonesia Power harus terus ditingkatkan untuk mencapai standar praktik terbaik. Hal tersebut didasari keyakinan bahwa hasil dari penerapan GCG kelak dalam jangka panjang berdampak terhadap pertumbuhan kinerja Indonesia Power secara berkesinambungan.

The Board of Commissioners believes that corporate governance implementation needs to be improved to achieve the best practice standard. This is founded on the belief that the result of GCG implementation will bring long-term impact towards Indonesia Power's performance growth.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi telah dengan baik berupaya meningkatkan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan. Penilaian implementasi GCG dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan parameter *Asean Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Hasil penilaian GCG tahun 2021 berdasarkan parameter di atas mendapat skor sebesar 95,51 dari total nilai maksimal sebesar 100,00 yang setara dengan 95,51% sehingga secara *overall* hasil *assessment* GCG mendapatkan predikat "Sangat Baik". Sedangkan hasil penilaian GCG berdasarkan parameter ACGS mencapai skor 95,88 termasuk dalam kategori *very good*. Upaya peningkatan dan perbaikan GCG perlu terus dilakukan dalam rangka menyempurnakan kebijakan dan memastikan penerapan GCG sejalan dengan dinamika bisnis Perusahaan, termasuk bekerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk memperoleh masukan yang membangun dalam meningkatkan kualitas penerapan GCG. Peningkatan kualitas GCG tidak terbatas di lingkungan Perusahaan namun juga dalam konteks Indonesia Power group maupun lingkungan PLN group.

The Board of Commissioners also considers that the Board of Directors has been working optimally to improve the quality of GCG implementation on a sustainable basis. The assessment of GCG implementation in the Company refers to the Decree of the Secretary to the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 06, 2012 on Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises and the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) parameter. According to these parameters, the Company's GCG assessment in 2021 scored 95.51 out of the maximum score of 100.00. This is equivalent to 95.51%, making the overall GCG assessment outcome falls into "Very Good" category. On the other hand, the result of GCG assessment using ACGS parameters scored 95.88, which falls into the "Very Good" category. The efforts to improve GCG are continuously sought for perfecting the policies and ensuring that GCG implementation is in line with the Company's business dynamics, including collaborating with relevant agencies to collect constructive inputs for bettering the quality of GCG implementation. Improvement of GCG quality is sought not only in Indonesia Power Group, but also in PLN Group.

Proses dan mekanisme GCG terkait aspek manajemen risiko dan sistem pengendalian internal juga menjadi fokus pengawasan Dewan Komisaris. *Roadmap* Manajemen Risiko tahun 2020-2024 menjadi pedoman penting penerapan manajemen risiko berbasis *governance*. Proses implementasi manajemen risiko

The process and mechanism of GCG in relation to risk management and internal control system also become the concern of the Board of Commissioners' supervision. The Risk Management Roadmap 2020-2024 is vital for guiding the governance-based risk management implementation. There are three (3) key aspects of risk management

yang terbagi menjadi 3 aspek penting, yakni aspek struktural, aspek operasional dan aspek perawatan yang menjangkau berbagai jenis risiko, aktivitas dan proses bisnis di Indonesia Power mengacu pada ISO 31000:2018. Untuk mengetahui tingkat penerapan manajemen risiko saat ini, Indonesia Power melakukan *assessment maturity level* manajemen risiko secara berkala, yang hasilnya semakin baik dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2021 hasil *assessment maturity level* manajemen risiko mendapatkan capaian skor sebesar 3,45 dengan skor maksimum 5 dari target 3,20 atau lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 3,43. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan manajemen risiko untuk aspek *leadership, people, process* dan *result*.

implementation, namely structural, operational, and maintenance aspects. They cover various types of risks, activities, and business process at Indonesia Power in reference to ISO 31000:2018. To observe the current level of risk management implementation, Indonesia Power performs periodical risk management maturity level assessment, whose results are improving year by year. For 2021, the risk management maturity level assessment score was 3.45 out of the maximum score of 5. This exceeded the 2020 target of 3.20 and was an improvement from the previous year's score of 3.43. The result indicates that improvements are necessary for the risk management implementation, particularly in the aspects of leadership, people, process, and result.

Implementasi *Business Continuity Management System* (BCMS) oleh Direksi sebagai strategi penanganan risiko apabila terjadi krisis terhadap aktivitas penyediaan energi listrik Indonesia Power, Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung hal tersebut dan perlu terus ditingkatkan penerapannya. Adapun pembagian tugas yang jelas antar anggota Dewan Komisaris, dimana salah seorang anggota Dewan Komisaris menjadi penanggung jawab dalam pengawasan implementasi GCG diharapkan dapat memberikan fokus pengawasan yang lebih baik lagi.

The Business Continuity Management System (BCMS) is implemented by the Board of Directors as risk management strategy in the face of electricity supply crisis at Indonesia Power. The Board of Commissioners is in full support of this strategy and encourages the improvement of its implementation. Clear job division among Commissioners, where a member of the Board of Commissioners is responsible for the supervision of the GCG implementation, is expected to establish better focus in terms of supervision.

Tahun 2021, Indonesia Power melakukan surveillance pertama terhadap sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai upaya implementasi tata kelola perusahaan berkelanjutan yang bersih. **Komitmen 4T "Tidak Suap, Tidak Gratifikasi, Tidak *Fraud* dan Tidak *Luxirious Hospitality*"** menjadi kelanjutan implementasi SMAP sehingga Indonesia Power dapat terus melakukan perbaikan proses bisnis di segenap bidang baik keuangan, pengadaan barang dan jasa maupun bidang-bidang lainnya.

In 2021, Indonesia Power carried out the first surveillance over the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) certificate as a part of clean and sustainable corporate governance implementation. **The 4T Commitment of "No Bribery, No Gratification, No Fraud, and No Luxurious Hospitality"** become the continuation of the ABMS implementation, so that Indonesia Power can continue improving its business process across all fields, including finance, goods and services procurement, and other fields.

Dewan komisaris juga memegang peranan yang penting dalam penerapan GRC (GCG, *Risk & Compliance*) di Perusahaan, hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh dalam *Top GRC Award tahun 2021 yaitu TOP GRC 2021 Level #5 Stars, TOP Leader The Most Commitment GRC Leader 2021, The high Performing Board of Commissioners on GRC 2021 dan Special Appreciation on Application to Support GRC Implementation.*

The Board of Commissioners also holds a vital role in GRC (GCG, Risk & Compliance) implementation in the Company, as evidenced by the awards obtained during Top GRC Award 2021, i.e. TOP GRC 2021 Level #5 Stars, TOP Leader The Most Commitment GRC Leader 2021, The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021, and Special Appreciation on Application to Support GRC Implementation.

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Frequency of and Procedures for Advice-giving to the Board of Directors

Fungsi pengawasan dan penasihatan Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal dalam Rapat, maupun secara informal serta melalui kunjungan lapangan ke unit bisnis bersama dengan Komite Pendukung Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Dewan komisaris telah mengadakan rapat internal Dewan Komisaris dan rapat dengan mengundang

The Board of Commissioners' supervision and advices to the Board of Directors are provided either formally through meetings, or informally through site visits to business units with the Board of Commissioners' Supporting Committees. Throughout 2021 the Board of Commissioners had held several internal meetings and 13 (thirteen) joint meetings with the Board of Directors. The

Direktur bidang yang terkait dalam rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali. Dewan Komisaris membahas berbagai hal, diantaranya tindak lanjut atas keputusan atau rekomendasi dalam rapat Dewan Komisaris sebelumnya, laporan kinerja keuangan Perusahaan, laporan perkembangan proyek EBT dan proyek strategis lainnya serta laporan komite Dewan Komisaris.

Board of Commissioners discussed several matters, among others the follow-up on resolutions or recommendations made during the previous Board of Commissioners meetings, the financial performance statements, NRE project and other strategic projects progress reports, and BOC committee reports.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Board of Commissioners Committee Performance Assessment

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang fungsi dan tanggung jawabnya dengan piagam komite masing-masing. Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko berdasarkan realisasi penyelesaian program kerja dan anggaran komite yang disusun setiap tahun ke dalam Laporan Komite termasuk jumlah rapat yang dilakukan dengan memuat saran, rekomendasi dan masukan terkait dengan pelaksanaan tugas komite masing-masing.

In performing its duties, the Board of Commissioners receives assistance from the Audit Committee and Risk Management Committee whose functions and responsibilities are accommodated in their respective committee charters. The Board of Commissioners has evaluated the performances of the Audit Committee and the Risk Management Committee in accordance with the realization of work plan completion and annually prepared committee budget as reported in the Committee Reports, including the frequency of meetings conducted that contain the advices, recommendations, and inputs pertaining to the implementation of the committees' duties.

Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas audit internal maupun audit eksternal serta mengawasi penerapan GCG. Selama tahun 2021 Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali sesuai program kerja antara lain membahas telaah atas informasi keuangan Perusahaan, menelaah program kerja audit tahunan, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal, efektivitas audit internal maupun eksternal serta pengelolaan penerapan GCG.

Audit Committee has the duty to assess the internal control system and internal and external audit duties, in addition to supervising the GCG implementation. The Audit Committee had held six (6) meetings in 2021 according to its work program. The meeting agendas among others include review of the Company's financial information and annual audit work program as well as the evaluation of internal control system policy and implementation, the effectiveness of internal and external audits, and GCG implementation management.

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko termasuk monitoring risiko Perusahaan serta menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi. Sepanjang tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 5 (lima) kali rapat sesuai program kerja yang ditetapkan antara lain melakukan monitoring risiko korporat, pengelolaan risiko proyek gasifikasi dan EBT, evaluasi pelaksanaan manajemen risiko tahun 2020, evaluasi organisasi, sistem, prosedur dan kebijakan SDM, serta melakukan telaah Usulan Remunerasi Direksi. Dengan demikian maka pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko.

Risk Management Committee assists the Board of Commissioners in implementing risk management, including monitoring Company risks and performing the nomination and remuneration function. Throughout 2021, the Risk Management Committee had held five (5) meetings according to its work programs, including monitoring corporate risk, managing risks in gasification and NRE projects, evaluating risk management implementation in 2020, evaluating HC organization, system, procedures, and policies, and reviewing proposed remuneration for the Board of Directors. Therefore, the Nomination and Remuneration function is currently assumed by the Risk Management Committee.

Pandangan Atas Pengelolaan Kebijakan *Whistleblowing System*

Opinion on Whistleblowing System Policy Management

Implementasi Kebijakan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*/WBS) untuk menjadi sarana dan jalur komunikasi bagi pegawai, pelanggan, mitra dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan adanya indikasi pelanggaran kode etik, pelanggaran kebijakan maupun tindakan fraud yang melibatkan segenap jajaran Indonesia Power. Kebijakan WBS ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.250.K/010/IP/2019 dan Nomor 020.SK/DEKOM-IP/2019 serta Surat Keputusan No.060.K/020/IP/2020 tentang Susunan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing*) dan Tim Investigasi Pengaduan pelanggaran. Pengelola pengaduan pelanggaran di Indonesia Power dilakukan secara berjenjang sesuai dengan terduga pelaku pelanggaran yang dilaporkan. Dengan telah diperolehnya sertifikasi ISO 37001:2016 terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), maka implementasi WBS menurut pandangan Dewan Komisaris perlu dikembangkan sedemikian rupa agar dapat mendukung dan menguatkan penerapan SMAP.

The Whistleblowing System (WBS) policy is implemented as a means and medium for the employees, customers, partners, and other stakeholders to deliver any indications of violation against the code of conducts and policies, as well as any frauds that involve all Indonesia Power personnel. The WBS policy was stipulated under Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors Numbers 250.K/010/IP/2019 and 020.SK/DEKOM-IP/2019 and Decree No. 060.K/020/IP/2020 on the Structure of Whistleblowing Management Team and Whistleblowing Investigation Team. Reports submitted to Indonesia Power are managed into tiers according to the level of the suspected offender. Following the acceptance of ISO 37001:2016 certification on Anti-Bribery Management System (ABMS), the Board of Commissioners considers that the WBS needs to be developed so that it helps supporting and strengthening the ABMS implementation.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengawasi efektivitas pelaksanaan WBS melalui pembahasan dalam rapat bersama dengan Departemen of Internal Audit & Group of GCG and Corporate Information, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris memberikan masukan/arahan terkait laporan WBS yang masuk. Selama tahun 2021, terdapat 13 (tiga belas) pengaduan yang masuk melalui jalur WBS dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjut. Adapun kategori pelanggaran yang disampaikan terkait dengan pelanggaran etika, proses pengadaan dan lahan.

The Board of Commissioners via the Audit Committee supervises the effectiveness of WBS implementation through discussions in joint meetings with the Department of Internal Audit & Group of GCG and Corporate Information, where the Board of Commissioners provides recommendations pertaining to submitted grievances. In 2021, there were 13 (thirteen) tip-offs submitted via WBS. Follow-ups have been sought for all of them. The submitted tip-offs pertained to the code of conduct, procurement process, and land.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in Board of Commissioners Composition

Di tahun 2021 Dewan Komisaris Indonesia Power mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu berdasarkan RUPS Sirkuler tanggal 9 Februari 2021 dan RUPS Sirkuler tanggal 6 Juli 2021. Sampai dengan akhir Tahun 2021, jumlah Dewan Komisaris Indonesia Power adalah 6 (enam) orang dan salah satunya merupakan Komisaris Independen. RUPS Sirkuler tanggal 9 Februari 2021 mengangkat Sdr. Iskandar Simorangkir sebagai anggota Komisaris baru. Adapun RUPS Sirkuler tanggal 6 Juli 2021 memutuskan untuk menyetujui pemberhentian Sdr. F.X. Sutijastoto dan menetapkan Sdr. Djoko Siswanto sebagai Komisaris baru.

Indonesia Power's Board of Commissioners saw two (2) changes throughout 2021 which were stipulated during the Circular GMS on February 09, 2021 and Circular GMS on July 6, 2021. As of the end of 2021, the Board of Commissioners consisted of six (6) members, one of which is an Independent Commissioner. The Circular GMS held on February 09, 2021 appointed Mr. Iskandar Simorangkir as a new Commissioner. Meanwhile, the Circular GMS held on July 06, 2021 decided to approve the dismissal of Mr. F.X. Sutijastoto and assigned Mr. Djoko Siswanto as a new Commissioner.

Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir atas kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris Indonesia Power. Kami, Dewan Komisaris mengucapkan selamat bergabung kepada para anggota Dewan Komisaris baru. Dengan komposisi yang baru, Dewan Komisaris dapat terus meningkatkan fungsi pengawasannya dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan kinerja Indonesia Power secara berkelanjutan.

We express our gratitude and appreciation to former members of the Board of Commissioners for their contributions and dedications during their tenures. We welcome the new Commissioners on board. This new composition is expected to help improving the Board of Commissioners' supervisory function while nurturing the growth of the Company's performance sustainably.

Apresiasi
Acknowledgment

Mewakili anggota Dewan Komisaris, Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi serta segenap jajaran Manajemen dan Pegawai Indonesia Power atas kerja kerasnya dalam pencapaian kinerja saat ini. Selain itu, kepada para Pemegang Saham, Pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan, atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama ini.

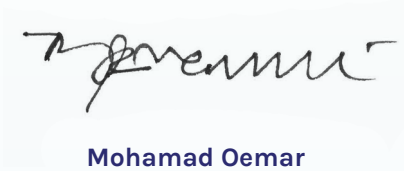
On behalf of the Board of Commissioners, I express our greatest gratitude to the Board of Directors, the Management, and Employees of Indonesia Power for the hard work in achieving the current performance. I would also like to thank our Shareholders, Customers, and all shareholders for the never-ending trust and support.

Dewan Komisaris optimis bahwa Indonesia Power akan mampu untuk meningkatkan kinerja dengan terus bekerja keras serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara konsisten. Demikianlah laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ini kami sampaikan. Ke depannya, Dewan Komisaris akan terus berupaya memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi guna meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan kinerja Indonesia Power di masa depan.

The Board of Commissioners remains optimistic that Indonesia Power will succeed in improving our performance through hard work and consistent implementation of good corporate governance principles. Last but not least, we would like to share our expectation. In the future, the Board of Commissioners will continue delivering the best in our supervisory and advisory functions to the Board of Directors, in order to enhance Indonesia Power's performance growth and sustainability in the long run.

Jakarta, 18 April 2022
Jakarta, April 18, 2022

Atas Nama Dewan Komisaris PT Indonesia Power
On behalf of PT Indonesia Power Board of Commissioners



Mohamad Oemar
Komisaris Utama
President Commissioner



Djoko Siswanto
Komisaris
Commissioner

Ulil Abshar
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Mohamad Oemar
Komisaris Utama
President Commissioner



Iskandar Simorangkir
Komisaris
Commissioner

Munir Ahmad
Komisaris
Commissioner

Miftahul Jannah
Komisaris
Commissioner

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS



M. Ahsin Sidqi
Direktur Utama
President Director

Indonesia Power optimis dapat mewujudkan aspirasi menjadi *benchmark leader* di tahun 2023 dengan pencapaian skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) tahun 2021 sebesar 682,75 termasuk dalam kategori *Band Industry Leader*. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan melalui implementasi *Action for Improvement* secara terukur dan terarah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam peningkatan kapasitas produksi EBT di tahun 2021, tercatat meningkat 2,21% menjadi sebesar 6.616,45 GWh dari tahun lalu. Namun demikian, Kami terus berupaya meningkatkan pengembangan pembangkit EBT hingga dapat berproduksi secara komersial atau *Commercial Operation Date* (COD). Selama tahun 2021 pembangkit EBT yang telah selesai dan mulai beroperasi adalah PLTM Gunung Wugul, dan PLTS Landbase Grati menjadi wujud nyata Indonesia Power dalam meningkatkan bauran EBT dalam penyediaan listrik nasional.

Indonesia Power is positive to be able to realize the aspiration of becoming the benchmark leader by 2023 with Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) score of 682.75 in 2021, which belonged to Band Industry Leader category. We are committed to continue improving business process on an ongoing basis through measured and directed Actions for Improvement. Although facing numerous challenges, the NRE production capacity expansion in 2021 increased 2.21% to 6,616.45 GWh compared to the previous year. Nevertheless, we continue the endeavor of developing NRE-fired power plants until their Commercial Operation Date (COD). As of 2021, the completion and operation of NRE-fired power plants, MHPP Gunung Wugul and SoPP Landbase Grati, have become the evidence for Indonesia Power in its journey of increasing NRE mix in the national electricity supply.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat

Our Esteemed Shareholders and Stakeholders,

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Indonesia Power mampu melalui tantangan tahun 2021 dengan berbagai hal positif. Laporan Tahunan 2021 ini, Indonesia Power menetapkan tema "***Raising Future Energy, Strengthening Sustainability***". Direksi memandang bahwa walaupun di tengah berbagai keterbatasan di masa pandemi yang belum usai dan munculnya varian baru, Kami terus mendorong pengembangan energi hijau dan bersih sebagai energi masa depan yang akan mendorong terwujudnya aspirasi Visi Indonesia Power untuk menjadi Perusahaan Energi Terbaik yang tumbuh berkelanjutan.

Praise and thanks be to God Almighty, who has granted upon us His blessings and grace, so that Indonesia Power has managed to overcome the challenges in 2021 with many positive outcomes. This Annual Report 2021 bearing the theme of **"Raising Future Energy, Strengthening Sustainability".** While facing limitations during the ongoing pandemic and the emergence of new COVID-19 variants, the Board of Directors continued encouraging the development of green and clean energy for the future, in order to realize Indonesia Power's Vision to be the Best Energy Company with Sustainable Growth.

Selama pandemi berlangsung, Indonesia Power tetap mengedepankan aspek kesehatan dalam bekerja melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten. Yaitu melanjutkan penerapan strategi mitigasi Covid-19, baik di Unit, Anak Perusahaan dan Indonesia Power sendiri dengan menerapkan prosedur *screening* masuk dengan *barcode* Aplikasi Peduli Lindungi, tetap meningkatkan kewaspadaan dalam menjalankan protokol kesehatan, membatasi mobilisasi dengan penundaan perjalanan internasional, menyegerakan vaksinasi sebagai upaya memutus mata rantai Covid-19 serta mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meminimalisir risiko yang berpotensi dapat mempengaruhi keberlanjutan bisnis Indonesia Power di era normal baru.

During the pandemic, Indonesia Power has been prioritizing the health aspect at work by implementing strict and consistent health protocols. These include implementing COVID-19 mitigation strategies at Units, Subsidiaries, and Indonesia Power itself by screening people using PeduliLindungi application, adhering with health protocols, limiting mobilization by delaying international travels, accelerating vaccination to break COVID-19 chain, and taking strategic measures necessary to minimize risks that may potentially disrupt Indonesia Power's business sustainability in the new normal period.

Atas nama Direksi, dengan ini kami menyampaikan Laporan Tahunan Indonesia Power tahun buku 2021 yang menguraikan pelaksanaan strategi yang dijalankan Direksi dalam merespon berbagai tantangan yang terjadi, analisis pencapaian kinerja Perusahaan, prospek usaha di masa depan, perkembangan penerapan tata kelola Perusahaan, serta perubahan komposisi Direksi dan alasan perubahannya.

On behalf of the Board of Directors, I am presenting Indonesia Power Annual Report 2021 which contains the implementation of strategies to answer many challenges, the analysis of Company performance, business outlook, progress of corporate governance implementation, and changes in the Board of Directors and background of such changes.

Kondisi Makroekonomi 2021
Macroeconomic Condition in 2021

Secara umum, perekonomian global dan nasional sepanjang tahun 2021 masih menghadapi hambatan dalam hal rantai pasokan dan peningkatan inflasi akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Hal ini turut memperlambat pertumbuhan industri, menekan daya beli konsumen, dan menyebabkan terbatasnya ruang gerak ekonomi.

In general, the global and national economies in 2021 were still faced by supply chain issues and increased inflation due to the ongoing COVID-19 pandemic. This has created a slowdown in economic growth, reduced consumers' purchasing power, and limited economic mobility.

Perekonomian global tercatat tumbuh 5,9% jauh lebih tinggi dari tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 3,5% menurut Dana Moneter Internasional (IMF), yang dipengaruhi oleh akselerasi tingkat vaksinasi, stimulus kebijakan, dan pemulihan kegiatan ekonomi secara bertahap di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta di negara-negara Eropa dan Asia lainnya yang menghadapi tantangan multidimensi mulai dari penurunan pertumbuhan lapangan kerjakerawanan pangan, perubahan iklim, hingga ruang gerak yang terbatas. Namun demikian, pemulihan ekonomi global terus berlanjut meskipun dinamika pandemi masih terjadi dengan adanya ancaman varian virus baru (Omicron).

According to International Monetary Fund (IMF), global economy grew 5.9%, which was higher than in 2020 which contracted to 3.5%. This was due to accelerated vaccination, stimulus policy, and gradual recovery of economic activities United States and China as well as in other European and Asian countries which faced multidimensional challenges from declining employment rate, food insecurity, climate change, to limited mobility. Despite all, the global economic recovery still continued while facing the emergence of new COVID-19 variant, the Omicron.

Adapun pertumbuhan ekonomi nasional semakin membaik seiring terkendalinya penanganan Covid-19 dan meningkatnya mobilitas. Sepanjang 2021 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) perekonomian Indonesia tumbuh 3,69% dibandingkan dengan tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 2,07%, terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, belanja fiskal, percepatan program vaksinasi, serta peningkatan stimulus bantuan

The national economic growth has improved along with successful control of COVID-19 and increased mobility. Throughout 2021, according to the data from Statistics Indonesia (BPS), Indonesia's economy grew 3.69% compared to in 2020 which contracted to 2.07%. This was particularly contributed by increased exports, fiscal spending, accelerated vaccination, and social assistance stimulus by the Government. The Rupiah

sosial oleh Pemerintah. Nilai tukar Rupiah terjaga, dan adanya kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

exchange rate was maintained thanks to accommodating monetary policy and synergy between Bank Indonesia and the Government in recovering the national economy.

Membaiknya penanganan pandemi Covid-19 juga berdampak positif, antara lain adanya kenaikan permintaan listrik sebesar 4,97% pada tahun 2021, dibandingkan tahun 2020 yang berada pada posisi minus 12,58% di Sistem Jawa Bali. Kenaikan permintaan tersebut diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan target rasio elektrifikasi 100% oleh Kementerian ESDM di tahun 2022.

The improvement of COVID-19 pandemic control in Indonesia has also brought positive impact, among others with the increase in electricity demands by 4.97% in 2021. This was an improvement from Java-Bali System's portfolio which was reduced to minus 12.58% in 2020. The increase in demands is estimated to continue along with the electrification ratio target of 100% by 2022 set by the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Analisis Kinerja Perusahaan 2021
Analysis of Company Performance in 2021

Strategi dan Kebijakan
Strategies and Policies

Dengan melihat kondisi lingkungan eksternal dan internal, Indonesia Power telah menetapkan strategi Perusahaan 5 (lima) tahun ke depan dalam Rencana Jangka Panjang Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 guna mendukung tercapainya portofolio SOLID PLN Grup. Di tahun 2021, Indonesia Power menetapkan 3 (tiga) *strategic theme*, *Operation & Maintenance Excellence* (OME); *Low-Carbon Energy Development* (LCE) dan *Beyond* kWh *Business Development* (BBD) dengan target kinerja utama (1) EAF, (2) BPP, (3) kapasitas pembangkit Indonesia Power, dan (4) pendapatan *beyond* kWh. Indonesia Power fokus pada bisnis penyediaan tenaga listrik dan secara berkelanjutan mengembangkan bisnis *beyond* kWh, yang potensial di luar PLN Grup dan juga bahkan di luar negeri untuk mendorong peningkatan pendapatan Perusahaan. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), hadirnya beragam produk *Beyond* kWh *business development* yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta *Operation and Maintenance Excellence* menjadi *second curve of business* Perusahaan untuk bisnis berkelanjutan.

Taking into account the external and internal situations, Indonesia Power has defined the Company strategies for the next five (5) years in the Long-term Plan 2020-2024 and Company Work Plan and Budget 2021 in order to support PLN Group's SOLID portfolio. For 2021, Indonesia Power established three (3) strategic themes, i.e. Operations and Maintenance Excellence (OME), Low-Carbon Energy Development (LCE), and Beyond kWh Business Development (BBD) with the primary performance targets of (1) EAF, (2) Production Cost, (3) Indonesia Power Power Plant Capacity, and (4) Beyond kWh Revenues. Indonesia Power focuses on electricity supply business and sustainably develop beyond kWh businesses that are potential outside the PLN Group, even beyond country boundary, to increase Company's revenues. New and Renewable Energy (NRE) development, various beyond kWh products that meet customers' needs, and Operations and Maintenance Excellence are the Company's second curve of sustainable business.

Indonesia power memiliki *corporate strategy overview* yang meliputi: (1) peningkatan kinerja dan daya saing pembangkit; (2) optimalisasi PLTU Suralaya; (3) pengembangan pembangkit *low carbon*; (4) pengembangan bisnis *beyond* kWh; (5) peningkatan tata kelola pembangkit; (6) peningkatan keamanan pasokan energi primer; (7) peningkatan *engineering* dan inovasi; (8) *community* & HSE excellence; (9) *supply chain management excellence*; (10) peningkatan riset dan inovasi bisnis; (11) *organizational & human capital excellence*; (12) *technology & digitalization advancement* dan (13) *new horizon competency excellence*.

Indonesia Power has the following corporate strategy overview: (1)Power plant performance and competitiveness enhancement; (2) SPP Suralaya optimization; (3) Low-carbon power plants development; (4) Beyond kWh business expansion; (5) Power plant governance enhancement; (6) Primary energy supply security enhancement; (7) Engineering and innovations enhancement; (8) Community & HSE excellence; (9) Supply chain management excellence; (10) Business innovations and research enhancement; (11) Organizational and human capital excellence; (12) Technology and digitalization advancement; and (13) New horizon competency excellence.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Kami terus berupaya untuk menjaga kesiapan dan keandalan pembangkit terutama di tengah krisis kelistrikan pada sistem Jawa Bali yang disebabkan oleh gangguan pembangkit dan kelangkaan pasokan batubara dengan meningkatkan pengelolaan tingkat utilisasi pembangkit pada indikator *Capacity Factor* (CF). Untuk menghadapi tantangan target *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060 dan target bauran EBT nasional 23% di tahun 2025, Indonesia Power terus berkomitmen melakukan pengembangan pembangkit EBT baru maupun pada pembangkit eksisting dengan pemasangan PLTS Atap yang ditargetkan memiliki total kapasitas sebesar 7.200 kWp. *Co-firing* pada PLTU batubara secara bertahap juga terus dilakukan, bahkan di*monitor* dengan *dashboard* kinerja dan termasuk implementasi program *coal switching* guna meningkatkan daya saing penjualan energi listrik.

We continuously aimed to secure power plant readiness and excellence, particularly amid the electricity crisis in Java-Bali System due to outages and coal supply shortage. This is sought by enhancing the management of power plant utilization for Capacity Factor (CF) indicator. Being challenged of meeting the Net-Zero Emission target by 2060 and 23% national NRE mix target by 2025, Indonesia Power remains committed to developing NRE-fired power plants, both in new locations and at existing power plants, which is sought by the installation of Rooftop SoPP with a total capacity targeted at 7,200 kWp. Coal-fired SPP cofiring is also gradually carried out, even monitored with performance dashboard. This is also a part of the coal switching program, aiming at increasing electricity sale competitiveness.

Berbagai inisiatif dalam pengembangan bisnis *beyond* kWh dilakukan antara lain melalui penyempurnaan organisasi yang optimal, optimalisasi manajemen aset, kerjasama bidang operasi, pemeliharaan, perbaikan peralatan pembangkit dengan perusahaan Vietnam dan Kuwait dan lain sebagainya. Kami terus melakukan inovasi baik di bidang pembangkitan, pelayanan terhadap pelanggan dan sebagainya agar dapat mendorong pertumbuhan pendapatan di luar penjualan tenaga listrik yang terus meningkat dari setiap tahun.

In terms of beyond kWh business, a number of initiatives were taken, including organizational optimization, asset management optimization, operational cooperation, maintenance, power plant equipment repair in cooperation with Vietnam- and Kuwait-based companies, as well as other endeavors. We innovate in power generation, customer services, and other areas in order to secure more revenues outside electricity sales which increase annually.

Secara berkelanjutan Indonesia Power telah melakukan transformasi digital pada pembangkit maupun non pembangkit, sehingga memudahkan monitoring secara *online* dan real time, antara lain dengan aplikasi REOC (*Reliability Efficiency Optimization Center*) pada pembangkit, aplikasi SIMS (Smart *Inventory Management System*), SWEMS (*Smart Work Execution Management System*) dan IP-*ProInventory* dalam mendukung penerapan manajemen aset yang terintegrasi, dan aplikasi Pro PMO untuk memantau kemajuan proyek pengembangan pembangkit berbasis proses bisnis. Indonesia Power terus mengembangkan ekosistem digital yang mendukung proses bisnis dapat dijalankan lebih efisien dan efektif untuk melayani kebutuhan pelanggan.

Indonesia Power has been steadily performing power generation and non-power generation digital transformation to streamline online and real-time monitoring, among others using Reliability Efficiency Optimization Center (REOC) app in power plants, Smart Inventory Management System (SIMS) app, Smart Work Execution Management System (SWEMS) and IP-ProInventory apps for integrated asset management, and Pro PMO app that monitors the progress of business process-based power plant development project. Indonesia Power also develops a digital ecosystem that improves the efficiency and effectiveness of our business process for meeting customers' demands.

Menyadari sepenuhnya bahwa kompetensi inti Indonesia Power adalah operasi dan pemeliharaan pembangkit maka peningkatan kapasitas organisasi dan kapabilitas SDM menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Selain itu, kompetensi inti Perusahaan yang baru, yakni sebagai pengembang bisnis solusi energi juga memerlukan eksekusi strategi yang tepat dalam pencapaiannya.

We fully realize that Indonesia Power's core competency lies in power plant operations and maintenance. Therefore, enhancing organizational capacity and HC capability is a must. In addition, the new core competency, i.e. The Company as energy solution business developer, also needs proper strategies.

Direksi berperan aktif untuk memastikan bahwa seluruh bagian organisasi memahami serta menerapkan strategi Indonesia Power secara konsisten pada masing-masing fungsi dan unit bisnisnya. Secara berkala, Direksi bersama jajaran senior leaders melakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan kebijakan Perusahaan serta implementasinya di seluruh level organisasi untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang dijalankan telah berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan.

The Board of Directors is actively involved to ensure that the entire organization understands and execute these strategies consistently at their respective functions and business units. On a periodical basis, the Board of Directors and Senior Leaders evaluate the Company's strategies and policies as well as their implementation across all organizational levels to ensure they are run properly according to the objectives and targets.

Tantangan dan Antisipasi yang Dilakukan
Challenges and Their Anticipatory Measures

Indonesia Power dihadapkan pada tantangan, baik yang berasal dari eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal. Pandemi Covid-19 telah berdampak pada penurunan konsumsi energi listrik di tahun 2020 akibat dari pembatasan aktivitas ekonomi dan lainnya. Namun demikian, kondisi tersebut telah membaik di tahun 2021 dimana pertumbuhan permintaan listrik menjadi positif 4,97% atau konsumsi listrik telah pulih dan melampaui tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Indonesia Power is faced with both external and internal challenges. Externally, the COVID-19 pandemic adversely affected the electricity consumption in 2020 due to restrictions of economic activities and other causes. Nevertheless, the situation has improved in 2021, where electricity demands turned positive to 4.97%. Such a recovery even exceeded the performance in 2019, a time before the pandemic.

Tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia Power dalam produksi energi listrik adalah terkait dengan keamanan pasokan energi primer yang sangat berdampak bagi keberlangsungan operasional pembangkit. Terganggunya pasokan energi primer dalam jangka panjang, akan mengakibatkan risiko aset pembangkit menjadi tidak produktif. Untuk itulah, Indonesia Power bersama dengan pemangku kepentingan terkait melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memperbaiki sistem logistik dan infrastuktur untuk memastikan kebutuhan batu bara terpenuhi dan mencari solusi permanen agar krisis pasokan batubara tidak terjadi lagi. Sesuai arahan Presiden RI yang telah menekankan komitmen bersama untuk menggantikan batu bara dengan energi baru terbarukan, maka Indonesia Power juga telah menyiapkan *road map* pengembangan pembangkit hijau, *renewable energy* dan transisi energi.

Indonesia Power's biggest challenge in electricity production pertains to primary energy supply security which eventually will affect the sustainability of power plant operations. Long-term disruption to primary energy supply will render power plants non-productive. This is why, Indonesia Power along with our stakeholders are communicating and coordinating to improve the logistics and infrastructure system that ensures sufficient coal supply while seeking for a permanent solution to prevent the coal supply crisis from happening again. As mandated by the President of the Republic of Indonesia to share a commitment to replacing coal with new and renewable energy, Indonesia Power has prepared the roadmap of green power plant development, renewable energy, and energy transition.

Disamping itu, segenap jajaran insan Indonesia Power terus berupaya melakukan berbagai inovasi untuk menjadikan operasional pembangkit lebih andal dan efisien. Dengan demikian maka pembangkit dapat memproduksi kWh listrik yang lebih besar dengan biaya pokok produksi (BPP) yang lebih rendah.

In addition, all Indonesia Power personnel must continue making innovations to gain more reliable and more efficient power plant operations. That way, power plants can produce more kWh with lower production cost.

Realisasi bauran energi primer EBT nasional tahun 2021 baru mencapai 11,5% dan masih jauh daripada target yang telah ditetapkan, yakni 23% berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pengembangan pembangkit EBT tidak terlepas dari berbagai

According to the data released by the Directorate General of New and Renewable Energy and Energy Conservation, by 2021, the NRE portion in the national primary energy mix is currently at 11.5%, which is far below the target set of 23%. The development of NRE-fired power plants also has its own challenges such as licensing, land availability, feed-in tariff, primary energy

tantangan, antara lain seperti permasalahan perizinan, ketersediaan lahan, *feed-in tariff*, ketersediaan energi primer, teknologi, dan pendanaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia Power melakukan berbagai strategi dan kebijakan, antara lain terkait masalah perizinan dengan melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Pemerintah Daerah setempat, Kementerian Lingkungan Hidup, PT PLN (Persero) dan *stakeholder* lainnya serta menyampaikan permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada Perhutani. Terkait masalah ketersediaan energi primer dengan melakukan pengembangan disain teknologi yang lebih efisien dalam memanfaatkan sumber energi untuk pembangkit EBT serta berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan untuk menjaga ketersediaan energi primer alam sehingga tidak rusak dan tetap optimal.

availability, technology, and funding. To address these challenges, Indonesia Power has taken a number of strategies and measures pertaining to licensing issue by coordinating with relevant stakeholders such as local Government, the Ministry of Environment and Forestry, PT PLN (Persero), and other stakeholders, and submitting the request for Forest Area Borrow-to-Use Permit to Perhutani. To address the issue on primary energy availability, the Company seeks to develop more efficient design of technology for the utilization of NRE source for power plants while actively involved in maintaining and preserving the environment, hence preserving the availability and integrity of natural primary energy.

Tantangan lainnya terkait dengan peningkatan sumber daya manusia yang sejalan dengan kompetensi inti yang ditargetkan Indonesia Power saat Ini dan mendatang, yakni sebagai pengembang bisnis solusi energi. Implementasi *Human Capital Excellence* (HCE) menjadi solusi atas tantangan ini, dimana Indonesia Power optimis dapat mencapai target tersedianya puluhan ahli pembangkitan bertaraf internasional dan *Senior Leaders* yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

Another challenge relevant to the core competency is the development of human capital as the developer of energy solution business today and in the future. Human Capital Excellence (HCE) implementation becomes the solution for this challenge. Indonesia Power is optimistic to be able to meet the target of providing dozens of power generation experts with international standards and Senior Leaders who meet the qualifications set.

Atas semua tantangan tersebut di atas, kami mulai merumuskan kembali mengenai tantangan, kendala, dan risiko-risiko yang dihadapi selanjutnya agar dapat menentukan keberlanjutan bisnis dan organisasi di masa depan. Indonesia Power percaya bahwa segala perubahan yang berlangsung cepat ini tidak hanya berpengaruh negatif, namun dapat juga pengaruh positif. Untuk itulah, kami menggunakan manajemen risiko sebagai *early warning system* yang dapat menjadi *leading indicator* bagi organisasi agar mampu melewati kondisi ini dengan baik.

We start to reformulate the strategies that address the challenges, obstacles, and risks so as to determine our business and organizational continuity in the long run. Indonesia Power believes that such a rapid change brings not only negative but also positive impacts. This is why we exploit risk management as an early warning system that also serve as a leading indicator for our organization for better performance.

Perbandingan Hasil Kinerja dengan Target 2021
Comparison of Actual Performance and 2021 Targets

Tahun 2021 Indonesia Power berhasil mencatat kinerja yang positif, baik dalam aspek keuangan maupun operasional, dimana sebagian besar target RKAP 2021 telah tercapai. KPI Perusahaan 2021 yang menjadi kesepakatan antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham mencapai skor 98,44 dimana sebagian besar mencapai target, berada pada level "AAA" termasuk dalam kategori "Sehat". Indikator kinerja yang mencapai target meliputi: (1) kinerja gangguan EFOR Pembangkit PLTU batubara eksisting dan PLTU batubara AMC Jawa Bali, (2) umur persediaan batubara eksisting dan AMC Jawa Bali; (3) *purchasing effectiveness*, (4) jumlah unit *Power Plant* yang sudah mengimplementasikan teknologi digital, (5) *Co-firing Biomass*, (6) indeks HCR dan OCR; (7) produktifitas

Indonesia Power has shown positive performance in 2021, both in financial and operational aspects, as evidenced by the achievement of most of the WP&B 2021 targets. The Company's KPIs for 2021 agreed upon by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders scored 98.44 with most indicators meeting the targets. The score belongs to "AAA" level, "Sound" category. The performance indicators meeting the targets were: (1) EFOR of existing Coal-fired SPPs and AMC Java-Bali Coal-fired SPP; (2) Age of coal supply in existing and AMC Java-Bali power plants; (3) Purchasing effectiveness; (4) Number of power plant units implementing digital technology; (5) Biomass cofiring; (6) HCR and OCR indexes; (7) Employee productivity; (8) Talent pool and talent mobility compliance;

pegawai; (8) pemenuhan *talent pool* dan *talent mobility*; (9) BPP pembangkit eksisting; (10) laba tahun berjalan; (11) EBITDA; (12) sinergi dengan Anak Perusahaan lain dan Pusharlis; (13) skor GCG; (14) maturity level IT dan ERM; (15) Tingkat Proper Unit (*beyond compliance*) dan (16) penyelesaian temuan audit internal maupun eksternal.

(9) Existing power plant production cost; (10) Net profit/loss for the year; (11) EBITDA; (12) Synergy with other subsidiaries and Electricity Maintenance Center; (13) GCG score; (14) IT and ERM maturity level; (15) Unit PROPER rating (beyond compliance); and (16) Settlement of internal and external audit findings.

Indikator kinerja yang belum mencapai target terkait dengan dengan kinerja keandalan EAF pembangkit di PLTU batubara eksisting, PLTU batubara AMC Jawa Bali non PLTU batubara, kinerja gangguan EFOR Pembangkit non PLTU batubara, penambahan kapasitas pembangkit EBT dan BPP pembangkit AMC Jawa Bali, Direksi dan segenap jajaran manajemen akan terus berupaya mengembangkan strategi dan eksekusi yang tepat.

The performance indicators not meeting the targets include the EAF of existing Coal-fired SPPs, AMC Java-Bali coal-fired SPPs, and non-coal-fired SPPs; EFOR of non-coal-fired SPPs; NRE power plant capacity expansion; and AMC Java-Bali power plant production cost. The Board of Directors and the Management will continue developing the right strategies and measures.

Selain itu, Indonesia Power berhasil meraih *Band Industry Leader* berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan capaian skor 682,75 dan sejalan dengan aspirasi kami menjadi benchmark leader di tahun 2023. Adapun prestasi tertinggi dalam bidang kinerja pengelolaan lingkungan, yakni PROPER Emas berhasil diperoleh sebanyak 4 (empat) PROPER Emas, yang meliputi Bali PGU, Grati POMU, Priok POMU, dan Kamojang POMU atau meningkat dari tahun lalu hanya sebanyak 2 (dua) Unit.

According to the Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) score of 682.75, Indonesia Power has earned the title of Band Industry Leader. This goes along with our goal to be the benchmark leader by 2023. This year, four units (Bali PGU, Grati POMU, Priok POMU, and Kamojang POMU) received the highest accolade in the environmental management field, i.e. PROPER Gold. The number increased from two (2) units in the previous years.

Keberhasilan dalam mengendalikan BPP pembangkit eksisting sehingga pencapaian tahun 2021 lebih rendah 6% dari target yang ditetapkan pemegang saham, peningkatan produksi dan penjualan energi listrik masing masing sebesar 12,82% dan 13% dibanding tahun lalu, meskipun beban usaha mengalami kenaikan akibat peningkatan volume pemakaian batu bara dan gas yang dipengaruhi oleh peningkatan produksi.

The success in controlling existing power plant production cost rendering the 2021 achievement was 6% below the shareholders' target, the increase in electricity production and sales were respectively at 12.82% 13% compared to the previous year, albeit an increase in operating expenses due to increased coal and gas consumption for production.

Realisasi produksi energi listrik tahun 2021 menjadi sebesar 39.230,81 GWh atau 126,70% dari target RKAP 2021 sebesar 30.963,38 GWh, meningkat 12,82% dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 34.771,54 GWh. Peningkatan produksi listrik tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan *Capacity Factor* (CF) PLTGU Priok Blok 1-2 dan PLTU Suralaya 1-7 sesuai dengan kebutuhan sistem serta pulihnya kondisi pasokan gas PLTGU Tambak Lorok di akhir tahun 2020 pasca gangguan pasokan gas di serta penambahan pasokan gas Tambak Lorok. Adapun realisasi penjualan energi listrik tahun 2021 mencapai sebesar 37.590,11 GWh atau 127,41% dari target RKAP 2021 sebesar 29.502,31 GWh, meningkat 13% dibandingkan tahun 2020 sebesar 33.264,98 GWh. Realisasi ini melebihi target terutama didukung oleh peningkatan produksi di PLTGU Priok, PLTU Suralaya 1-7 dan PLTGU Grati Blok 2 sesuai dengan kebutuhan sistem serta dengan pulihnya pasokan gas PLTGU Tambak Lorok.

The actual electricity production in 2021 stood at 39,230.81 GWh, or 126.70% from the WP&B 2021 target at 30,963.38 GWh. This was an increase by 12.82% from the actual electricity production in 2020 at 34,771.54 GWh. This was mainly contributed by the increase in the Capacity Factor (CF) of CCPP Priok Blocks 1-2 and SPP Suralaya 1-7 according to system demands and gas supply recovery in CCPP Tambak Lorok at the end of 2020 following gas supply shortage and Tambak Lorok gas supply addition. The actual sale of electricity in 2021 was 37,590.11 GWh or 127.41% from the WP&B 2021 target at 29,502.31 GWh. It was an increase by 13% from the actual sale of electricity in 2020 at 33,264.98 GWh. This exceeded the target, which was particularly contributed by the increase of productions in CCPP Priok, SPP Suralaya 1-7, and CCPP Grati Block 2 in accordance with system demands, as well as recovered gas supply in CCPP Tambak Lorok.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Tahun 2021, Indonesia Power berhasil menjaga penurunan BPP Pembangkit eksisting pada level Rp805,71,- dari target RKAP 2021 sebesar Rp859,87,- merupakan hasil kerja seluruh pihak yang terlibat dan mendukung penyediaan tenaga listrik yang semakin terjangkau bagi masyarakat luas. Sedangkan BPP Pembangkit AMC yang belum mencapai target yakni berada pada level Rp806,71,- dari target sebesar Rp804,05,-. Kami akan terus berupaya melakukan strategi fuel mix bahan bakar pembangkit listrik agar konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat terus dikurangi dan digantikan dengan gas maupun EBT.

In 2021, Indonesia Power had managed to reduce existing power plant production cost to Rp805.71 out of the WP&B 2021 target of Rp859.87. It is a result of the hard work of and support from all relevant parties in providing electricity for the larger community. On the other hand, the production cost for AMC power plants was below the target set, i.e. at Rp806.71 from of the target of Rp804.05. We will continue pursuing the fuel mix strategy in order to reduce the consumption of oil-based fuel and to increase the portion of NRE-based fuel.

Indonesia Power juga terus berupaya memperkuat lini EBT sebagai komitmen dalam meningkatkan bauran energi primer secara nasional sekaligus *second curve business* Perusahaan. Walaupun penambahan kapasitas EBT di tahun 2021 baru sebesar 7,49 MW dari target sebesar 11 MW, namun berhasil meningkatkan produksi EBT pada bauran energi Perusahaan sebesar 2,21% menjadi sebesar 6.616,45 GWh dari tahun lalu sebesar 6.473,20 GWh. Pada tahun 2021, Indonesia Power telah berhasil meningkatkan produksi EBT, dengan komposisi terdiri dari 55,24% bersumber dari tenaga air, 43,66% dari panas bumi, 1,07% dari *biomass* dan 0,04% dari *biofame*. Pembangkit EBT yang telah *Commercial Operation Date* (COD) sampai dengan akhir tahun 2021 adalah PLTM Gunung Wugul, dan PLTS Landbase Grati. Program komersialisasi *co-firing* telah berhasil dilakukan di 11 (sebelas) PLTU, yakni di PLTU Suralaya 1-4, PLTU Suralaya 5-7, PLTU Suralaya 8, PLTU Labuan, PLTU Lontar, PLTU Palabuhan Ratu, PLTU Adipala, PLTU Sanggau, PLTU Sintang, PLTU Jeranjang dan PLTU Barru. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia Power dalam mendukung program pemerintah mencapai target bauran EBT 23% di tahun 2025 sekaligus upaya menghijaukan PLTU lain yang dimilikinya. Ke depannya, kami terus berupaya meningkatkan penggunaan EBT dalam mendukung peningkatan produksi energi bersih, penurunan emisi gas rumah kaca dan tersedianya akses energi yang berkelanjutan di masa mendatang.

Indonesia Power continues the commitment to strengthening new and renewable energy (NRE) line in enhancing the national primary energy mix as well as the Company's second curve of business. Although the NRE capacity in 2021 was a mere 7.49 MW out of the target 11 MW, it managed to increase NRE production in the Company's energy mix by 2.21%, rendering a total of 6,616.45 GWh from 6,473.20 GWh in the previous year. The increase in the Company's NRE production in 2021 consisted of 55.24% hydro power, 43.66% geothermal energy, 1.07% biomass, and 0.04% biofame. As of the end of 2021, two NRE power plants have been commercially operating, i.e. MHPP Gunung Wugul and SoPP Landbase Grati. Cofiring commercialization have been carried out in 11 (eleven) SPPs, i.e. SPP Suralaya 1-4, SPP Suralaya 5-7, SPP Suralaya 8, SPP Labuan, SPP Lontar, SPP Palabuhanratu, SPP Adipala, SPP Sanggau, SPP Sintang, SPP Jeranjang, and SPP Barru. This is an evidence of Indonesia Power's commitment to supporting the Government in meeting the target of 23% NRE mix by 2025 as well as greening other existing SPPs. In the future, we will continue improving the utilization of NRE in supporting clean energy production optimization, greenhouse gas emission reduction, and access to sustainable energy in the future.

Adapun kinerja keuangan 2021 dilihat dari sisi perolehan pendapatan usaha tercatat lebih rendah 0,57% dibanding tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp38.519.859 juta atau 96,94% dari target, yang terdiri dari penjualan tenaga listrik sebesar Rp19.907.755 juta atau 54,24%, pendapatan dari konsesi jasa sebesar Rp14.656.755 juta atau 38,03% dan pendapatan O&M dan lain-lain sebesar Rp3.955.349 juta atau 10,28%. Namun mampu melampaui penetapan target dari pemegang saham tahun 2021 sebesar 103%.

In terms of revenues, the financial performance in 2021 was 0.57% lower than the previous year, amounting at Rp38,519,859 million or 96.94% of the target, comprising electricity sales by Rp19,907,755 million or 54.24%, revenue of service concession by Rp14,656,755 million or 38.03%, and revenue from O&M services and others by Rp3,955,349 million or 10.28%. However, the shareholders' target was exceeded, which stood at 103%.

Adapun beban usaha mengalami kenaikan 20,63% menjadi sebesar Rp32.429.534 juta dibanding tahun lalu atau 94,74% dari RKAP 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan volume pemakaian batubara dan gas, serta peningkatan biaya unsur konsesi jasa. Peningkatan volume pemakaian batu bara dan gas sebagai dampak dari peningkatan produksi dan bauran energi.

Meanwhile, operating expenses increased 20.63% to Rp32,429,534 million compared to the previous year, or 94.74% of the WP&B 2021 target. This was mainly due to the increase in coal and gas consumption as well as the service concession cost. The increase in coal and gas consumption as a result of increased production and energy mix.

Kami akan terus berupaya melakukan *cost leadership program* untuk menjaga beban usaha tersebut berada pada level yang ditargetkan terutama pada komponen beban energi primer dan pelumas serta konsesi jasa. Dilihat dari sisi jumlah aset yang Indonesia Power kelola sepanjang tahun 2021 mengalami penurunan lebih rendah 3,15% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp193.713.791 juta di tahun 2021 terutama dipengaruhi adanya proses depresiasi aset tetap, dan membaiknya *collection periode* piutang usaha yang tercatat pada aset lancar.

We will continue carrying out cost leadership program to maintain the operating expense at the targeted level, particularly for primary energy cost and lubricants, and service concession posts. The amount of assets managed by Indonesia Power throughout 2021 declined, which was 3.15% lower than in 2020, to Rp193,713,791 million in 2021. This was contributed by property, plant, and equipment depreciation and improved collection period for trade receivables recorded in the current assets.

Kami senantiasa berkomitmen menjaga keandalan pembangkit dan meminimalisir faktor gangguan pembangkit melalui implementasi *corporate strategy overview* Perusahaan. Dilihat dari pencapaian kinerja operasional dibandingkan dengan target RKAP 2021, maka faktor keandalan pembangkit yang ditunjukkan dengan realisasi EAF PLTU batubara eksisting, EAF pembangkit PLTU batubara AMC Jawa Bali dan EAF pembangkit non PLTU batubara. Realisasi EAF PLTU batubara eksisting mencapai 89,49% atau 98,66% dari target, EAF pembangkit PLTU batubara AMC Jawa Bali mencapai 84,94% atau 94,66% dari target dan EAF pembangkit non PLTU batubara mencapai 95,73% atau 99,27% dari target. Adapun faktor gangguan yang tercermin dari indikator EFOR pembangkit PLTU batubara eksisting dan EFOR pembangkit PLTU batubara AMC Jawa Bali, masing-masing mencapai 1,74% dan 3,58% lebih baik dari target masing-masing sebesar 2,55% dan 3,85%. Sedangkan realisasi EFOR pembangkit non PLTU batubara sebesar 0,55% atau 38,23% dari target. Direksi dan segenap jajaran manajemen di bawahnya akan terus berupaya melakukan penanganan gangguan pembangkit secara lebih baik lagi.

We are committed to always maintaining the reliability of power plants and minimize outages by implementing corporate strategy overview. Comparing the actual operational performance with the WP&B 2021 target, the reliability factor of power plants is indicated by the actual performance of existing coal-fired SPP EAF, AMC Java-Bali coal-fired SPP EAF, and non-coal-fired SPP EAF. In actuality, existing coal-fired SPP EAF was 89.49% or 98.66% from the target, AMC Java-Bali coal-fired SPP EAF was 84.94% or 94.66% from the target, and non-coal-fired SPP EAF was 95.73% or 99.27% from the target. The outage factor, on the other hand, is indicated by the EFOR of existing coal-fired SPPs and EFOR of AMC Java-Bali coal-fired SPPs at respectively 1.74% and 3.58%. These figures exceeded the targets set at respectively 2.55% and 3.85%. In addition, the EFOR of non-coal-fired SPPs was 0.55% or 38.23% of the target. The Board of Directors and the Management will enhance the outage management for better outcome.

Dalam hal pengembangan produk dan layanan, Direksi berkomitmen terus mengembangkan produk *beyond* kWh yang ditargetkan menjadi sumber pendapatan di luar penjualan tenaga listrik dalam jangka panjang. Tahun 2021, Indonesia Power berhasil meningkatkan perolehan pendapatan usaha dari segmen produk *beyond* kWh, yang dilakukan oleh Anak Perusahaan melalui kerjasama di bidang operasi, pemeliharaan dan peralatan pembangkit dengan perusahaan asal Vietnam dan Kuwait. Transformasi digital di bidang pembangkit maupun non pembangkit juga terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, memberikan kemudahan dan monitoring secara online dan real time. Peran dan kontribusi kami dalam mendukung ketahanan energi nasional dilakukan dengan sukses mendukung PON XX Papua 2021 melalui kesiapan pembangkit proyek MPP Papua 120 MW dan PLTU Holtekamp 24 MW, serta beroperasi secara komersil (*Commercial Operation Date*/COD) PLTU Kalbar 1 2x100 MW dan PLTM Gunung Wugul 3 MW.

In terms of product and service development, the Board of Directors is committed to always developing beyond kWh lines which, in the long run, are targeted to be the source of revenue apart from the sales of electricity. In 2021, Indonesia Power increased its revenues from beyond kWh lines. This was sought by its subsidiaries via cooperation in power plant operations, maintenance, and equipment with Vietnam- and Kuwait-based companies. Power generation and non-power generation digital transformation were also performed to enhance efficiency, provide convenience, and assist in online and real-time monitoring. Our role and contribution in supporting the national energy security was evidenced by our involvement in PON XX Papua 2021, through power plant readiness in MPP Papua 120 MW and SPP Holtekamp 24 MW as well as the commercial operations of SPP West Kalimantan 1 2x100 MW and MHPP Gunung Wugul 3 MW.

Analisis Terhadap Prospek Usaha
Business Outlook Analysis

Kami optimis dengan prospek usaha Indonesia Power di masa depan. Pada dasarnya prospek usaha Indonesia Power dapat dilihat dari dua faktor, yaitu kondisi makroekonomi, termasuk industri kelistrikan nasional secara umum dan kondisi internal Perusahaan.

We are optimistic about Indonesia Power business outlook in the future. Essentially, business outlook for Indonesia Power can be seen from two factors, i.e. Macroeconomic condition, which include national electricity industry in general, and the Company's internal situation.

Makroekonomi pada masa mendatang diprediksikan akan melanjutkan pemulihan ke arah yang lebih positif. Berdasarkan APBN 2022, kurs dolar AS dibandingkan dengan Rupiah diasumsikan sekitar Rp14.350/USD, inflasi tetap rendah kisaran 3,0%, harga minyak (ICP) sekitar USD63/barel. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 berada pada kisaran 4,4% yoy, atau lebih rendah 0,5% dari perkiraan pada Oktober 2021. Normalisasi kebijakan moneter di sejumlah negara berkembang mempengaruhi stabilitas keuangan, menyebabkan hengkangnya dana asing. Dengan perkiraan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprediksikan tumbuh lebih tinggi menjadi mencapai 4,7-5,5%.

In the future, the macroeconomic situation is expected to continue recovered towards more positive direction. The State Budget 2022 assumes the Rupiah exchange rate at Rp14,350/US$, inflation remaining at a low level of around 3.0%, and oil price (ICP) at US$63/barrel. The projected global economic growth for 2022 stands at 4.4% yoy, which is 0.5% lower than the October 2021 estimation. The monetary policy normalization in a number of developing countries has affected financial stability, rendering foreign investors pulling out of the country. Based on these assumptions, Indonesia's economic growth in 2022 is predicted to grow higher to 4.7-5.5%.

Menghadapi kondisi makroekonomi tersebut, dari sisi bisnis, pada tahun 2022 Indonesia Power akan fokus pada pengembangan produk beyond kWh, pengembangan pembangkit EBT yang bekerjasama dengan berbagai mitra strategis yang potensial, serta melakukan komersialisasi *co-firing* untuk meningkatkan produksi EBT dalam bauran energi. Indonesia Power juga akan melakukan perluasan pengembangan usaha *beyond boundaries* ke mancanegara, baik yang dilakukan oleh Perusahaan maupun Anak Perusahaan.

Facing the macroeconomic condition, from the business side, for 2022 Indonesia Power will focus on developing beyond kWh lines, developing NRE power plants in cooperation with potential strategic partners, and carrying out cofiring commercialization to increase NRE production in the energy mix. Indonesia Power will also expand its business beyond boundaries to international setting, both on its own and by its subsidiaries.

Pulihnya mobilitas masyarakat mendorong konsumsi listrik, terutama di sektor industri dan retail. Optimisme pemulihan ekonomi di sektor pelanggan bisnis maupun pelanggan industri tercermin dari asumsi masuknya potensi pelanggan besar di kelompok pelanggan industri dan retail. Proyeksi kebutuhan tenaga listrik sesuai RUPTL 2021-2030 adalah sebesar 266 TWh atau dengan rata-rata pertumbuhan 4,91% per tahun. Sedangkan proyeksi jumlah pelanggan tahun 2022 adalah 83.426 ribu pelanggan dengan rata-rata pertumbuhan 2,9% per tahun. Hal ini menjadi peluang sekaligus prospek positif bagi Indonesia Power dalam mencapai target elektrifikasi nasional di tahun 2022 sebesar 100%. Untuk itulah Indonesia Power akan terus mengambil peran dan kontribusi yang semakin besar.

Recovered public mobility has encouraged electricity consumptions, particularly in industry and retail sectors. The optimism of economic recovery in business and industry customers is reflected by the assumption of incoming potential large customers in industry and retail sectors. In accordance with Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2021-2030, electricity demands are estimated to be at 266 TWh, with average growth of 4.91% per annum. Meanwhile, the number of customers is predicted to be at 83,426 thousand by 2022, with average growth of 2.9% per annum. This presents opportunities and positive outlook for Indonesia Power in meeting the national electrification target by 2022 at 100%. Therefore, Indonesia Power will continue to increase its roles and contributions.

Tantangan berikutnya adalah disrupsi yang terjadi pada industri kelistrikan dengan adanya tren 3DIE (*Decarbonization, Decentralization, Digitalization and Electrification*) dimana produksi energi listrik diarahkan pada penggunaan pembangkit yang bersumber dari yang lebih ramah lingkungan. Direksi

The next challenge would be a disruption in the electricity industry due to 3D1E (Digitalization, Decarbonization, Decentralization, and Electrification) trend that urges the utilization of greener energy to fuel power plants. The Board of Directors and the management continues developing environmentally-friendly

dan segenap jajaran manajemen di bawahnya terus berupaya mengembangkan program inovasi teknologi pembangkitan yang ramah lingkungan dan pengembangan bisnis *Beyond* kWh agar Indonesia Power dapat memanfaatkannya menjadi peluang positif. Kerjasama mancanegara dengan negara Vietnam dan Kuwait serta potensi ekspor kWh ke Singapura yang dilakukan di tahun 2021 melalui Anak Perusahaan akan terus ditingkatkan kualitas dan cakupannya sebagai pengembangan usaha beyond boundaries dalam jangka panjang.

power plant technology innovations as well as 'Beyond kWh' lines, so that Indonesia Power can turn them into positive opportunities. International collaboration with Vietnam and Kuwait and potential kWh export to Singapore in 2021 via subsidiaries will continue to be improved in terms of quality and scope, as a part of business expansion beyond boundaries in the long run.

Dengan portofolio pembangkit yang beragam, menjadi salah satu modal penting Indonesia Power dalam meraih berbagai peluang di masa depan. Keunggulan tersebut tentunya akan terus dikelola dengan menerapkan strategi yang tepat agar dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat di industri kelistrikan nasional. Kami terus berupaya melakukan pengembangan pembangkit EBT yang aman dan bersih.

Diverse power plant portfolio construes Indonesia Power's crucial asset in grabbing various future opportunities. These advantages will be continuously managed along with the implementation of proper strategies to face challenges and stricter competition in the national electricity industry. We also make never-ending efforts to develop our power plants using clean and safe NRE.

Membangun *Human Capital Excellence*

Building Human Capital Excellence

Akselerasi pengembangan kapabilitas SDM, dalam pengembangan bisnis *beyond* kWh menjadi fokus dan salah satu isu penting untuk mampu menjawab tantangan di era revolusi industri keempat ini. Pengembangan kompetensi pegawai yang kuat serta penyediaan tenaga ahli terutama di bidang efisiensi dan *reliability management* pembangkit secara berkesinambungan menjadi kuncinya. Selain itu, *knowledge management* akan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam menghasilkan berbagai inovasi di tengah lingkungan bisnis yang terus berubah.

The acceleration of human capital capability development in beyond kWh business expansion becomes the focus and main issue to answer the challenges in this fourth industrial revolution era. Strong employee competency development and provision of specialists particularly in power plant efficiency and reliability management on sustainable basis are crucial. Additionally, knowledge management will continue to be performed to increase the performance in producing innovations amid the dynamic business environment.

Roadmap Human Capital Excellence Tahun 2020-2024, menjelaskan bahwa tahun 2021 Indonesia Power fokus untuk mendorong terciptanya *Outstanding Execution* yang mencakup aspek *organization, leadership, expertise, culture, technology* dan *knowledge management*.

The Human Capital Excellence Roadmap 2020-2024 defines that for 2021, Indonesia Power focuses on encouraging Outstanding Execution that covers the aspects of organization, leadership, expertise, culture, technology, and knowledge management.

Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh pegawai serta mencegah penyebaran Covid-19, Indonesia Power terus melakukan berbagai upaya pencegahan, penanganan, maupun komunikasi diantaranya membentuk satuan gugus tugas Covid-19, menerapkan *business continuity management*, menerapkan kebijakan *work from home* (WFH) untuk unit kerja tertentu, guna memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan normal. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas hidup pegawai dan menjamin seluruh hak-hak pegawai, termasuk memperoleh remunerasi yang layak, serta memberikan kesempatan pengembangan karir secara profesional.

To keep all employees secure and healthy as well as to prevent the spread of the COVID-19, Indonesia Power has been carrying out prevention and control measures as well as maintaining communication, among others by establishing COVID-19 task force, implementing business continuity management, enforcing Work from Home (WFH) policy for select work units, in order to ensure normal customer service. We continue making the efforts to increase the employees' quality of life and assure all employees' rights, including receiving proper remuneration and opportunity to pursue their career, as well as developing themselves professionally.

Indeks *Human Capital Readiness* (HCR) yang menunjukkan tingkat kesiapan SDM berdasarkan aspek kompetensi dan pemenuhan SDM dalam menjalankan strategi Perusahaan, di tahun 2021 mencapai level 4,56 meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,51. Adapun indeks OCR yang menunjukkan kesiapan organisasi berdasarkan 4 (empat) aspek, yaitu budaya kerja, kepemimpinan, *alignment* dan *teamwork* mencapai level 4,56 meningkat dibandingkan tahun 2020 di level 4,51.

The Human Capital Readiness (HCR) index indicating the readiness of human capital based on the aspect of competency as well as HC provision for implementing Company strategy, scored 4.56 in 2021, which was an improvement from 4.51 in 2020. The OCR index indicates organizational readiness based on four aspects, namely work culture, leadership, alignment, and teamwork. The index reached 4.56 in 2021, which was an improvement from 2020 at 4.51.

Untuk menjaga tingkat kepuasan pegawai terhadap kebijakan SDM, setiap tahun Indonesia Power melakukan Survei *Human Resources Satisfaction Engagement* (HRSE). Untuk tahun 2021 tingkat kepuasan pegawai dalam indeks *Employee Satisfaction Index* (ESI) mencapai sebesar 83,30% atau lebih rendah 0,95% dibandingkan tahun 2020 sebesar 84,10% dan tingkat keterikatan pegawai dalam indeks *Employee Engagement Index* (EEI), lebih rendah 2,00% menjadi sebesar 88,00% dibandingkan tahun sebelumnya 90,00%. Direksi dan segenap jajaran manajemen Indonesia Power berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi dan kebijakan pengelolaan SDM yang mendorong terciptannya talenta yang mampu beradaptasi dengan perubahan di tengah tantangan industri kelistrikan yang semakin kompetitif. Meskipun mengalami penurunan dalam indeks keterikatan maupun kepuasan pegawai, namun masih dalam kategori baik dan lebih baik dari rata-rata industri.

In order to maintain employee satisfaction level over HC policy, Indonesia Power carries out Human Resources Satisfaction Engagement (HRSE) Survey every year. The employee satisfaction level in 2021 as indicated by the Employee Satisfaction Index (ESI) stood at 83.30%, which was a decline by 0.95% from 84.10% in 2020. Meanwhile, the employee engagement as indicated by the Employee Engagement Index (EEI) decreased by 2.00% to 88.00% from 90.00% in the previous year. The Board of Directors and Indonesia Power Management are committed to developing HC management strategies and policies that create talents who are adaptable to changes amid the increasingly competitive power industry. Despite the decline in the employee engagement and satisfaction indexes, the figures still belonged to good category and were above the industry average.

Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko
Corporate Governance and Risk Management

Kami terus berupaya untuk menjadi Perusahaan dengan penerapan tata kelola perusahaan terbaik. Indonesia Power meyakini bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, dan menumbuhkan integritas Perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itulah, peningkatan kualitas implementasi tata kelola menjadi hal penting yang perlu terus dilakukan melalui berbagai inisiatif program GCG agar tata kelola menjadi bagian dari budaya Perusahaan. Mekanisme kerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan atas dasar prinsip saling menghormati dan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Anggaran Dasar Perusahaan.

We always strive to become a company with the best corporate governance implementation. Indonesia Power believes that good corporate governance practice is a means of maintaining business continuity, improving stakeholder trust, and nurturing Company integrity in the long run. To that reason, the improvement of governance implementation quality is vital to perform through a number of GCG program initiatives. It is sought for internalizing the governance into the Corporate Culture. The work mechanism of the Board of Directors and Board of Commissioners is established under the principle of mutual respect, by understanding the duties, responsibilities, and authorities of each party, as set out in the applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Tahun 2021, Indonesia Power telah melakukan surveillance pertama sertifikasi ISO 37001:2016 sebagai upaya penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara berkelanjutan. Penerapan SMAP bersertifikat ISO 37001:2016 diharapkan dapat mendukung terwujudnya iklim yang kondusif dalam perbaikan proses bisnis keuangan serta proses bisnis pengadaan barang

In 2021, Indonesia Power carried out the first surveillance over the ISO 37001:2016 certificate as a part of sustainable Anti-Bribery Management System (ABMS) implementation. The implementation of ABMS with ISO 37001:2016 certification is hoped to create a climate that is favorable for the improvement of financial business process and goods and services

dan jasa yang sejalan dengan **Komitmen 4T "Tidak Suap, Tidak Gratifikasi, Tidak *Fraud* dan Tidak *Luxurious Hospitality*"**. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia Power telah memiliki Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Kebijakan *Fraud* serta memutakhirkan *soft-structure* GCG lainnya seperti *Board Manual*, Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS), Pedoman Benturan Kepentingan dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang sejalan dengan SMAP. Selain itu, satu upaya yang dilakukan Perusahaan dalam penanaman nilai integritas bagi seluruh insan IP adalah melalui pembelajaran secara bertahap dan berkelanjutan di COE Anti Corruption dimana pada tahun 2021 sudah dilaksanakan 3 kelas dan akan berlanjut diadakan kelas-kelas berikutnya di tahun 2022 dan seterusnya.

procurement business that go along with the 4T Commitment of "No Bribery, No Gratification, No Fraud, No Luxurious Hospitality". In line with these, Indonesia Power has Anti-Bribery Management System Guidelines and Fraud Control Policy in place and has updated other GCG soft structure, such as the Board Manual, Whistleblowing System (WBS) Policy, Conflict of Interest Code, and Gratification Control Guidelines that are consistent with the ABMS. In addition, to instill integrity in all IP personnel, the Company provides continuous and gradual learning in COE Anti-Corruption. In 2021, the COE has opened three (3) classes, which will be continued with subsequent classes in 2022 and subsequent years.

Disamping itu, untuk mengetahui tingkat implementasi GCG yang dilakukan, Indonesia Power melakukan penilaian GCG secara berkala minimal setahun sekali melalui kegiatan assessment GCG yang menjadi salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012. Hasil assessment GCG tahun 2021 memperoleh skor sebesar 98,51 dari total nilai maksimal sebesar 100,00 mendapatkan predikat 'Sangat Baik'. Sebagai Perusahaan yang telah melakukan sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA), setiap tahun Indonesia Power juga melakukan penilaian GCG dengan parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) oleh pihak independen, untuk tahun 2021 mencapai skor 95,88 yang mencakup aspek 1) hak-hak pemegang saham, 2) perlakuan yang setara terhadap pemegang saham, 3) peran pemangku kepentingan, 4) pengungkapan dan transparansi serta 5) tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Komitmen kami dalam penerapan GCG sepanjang tahun 2021, telah berhasil mendapatkan apresiasi dalam ajang *Top GRC Awards 2021* sebagai *Top GRC 2021 Level #5 Star, TOP Leader The Most Commitment GRC Leader 2021; The high Performing Board of Commissioners on GRC 2021* dan *Special Appreciation on Application to Support GRC Implementation*.

To observe the level of GCG implementation, Indonesia Power performs periodical GCG assessment at least once a year based on the Company's Key Performance Indicators that are stipulated by the Decree of the Secretary to the Minister of SOEs Number SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012. The GCG assessment in 2021 resulted in the score of 98.51 out of the maximum score of 100.00, which fell into 'Very Good' category. Indonesia Power has performed the securitization of Asset-Backed Security (EBA), and therefore annually organizes GCG assessment using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) which is performed by independent party. For 2021, the assessment scored 95.88 for the aspects of (1) Rights of Shareholders, (2) Equitable Treatment to Shareholders, (3) Role of Stakeholders, (4) Disclosure and Transparency, and (5) Responsibilities of the Board. Our commitment to implementing GCG throughout 2021 has been appreciated during the Top GRC Awards 2021, where we brought home the following accolades: Top GRC 2021 Level #5 Star, TOP Leader The Most Commitment GRC Leader 2021, The high Performing Board of Commissioners on GRC 2021, and Special Appreciation Application to Support GRC Implementation.

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan (LHKPN) secara berkala dengan tepat waktu sesuai ketentuan. Penerapan Kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS) juga dipandang cukup efektif dalam mengantisipasi adanya potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan yang lebih besar. Selama tahun 2021, terdapat 13 (tiga belas) pengaduan yang masuk, dimana seluruh pengaduan telah selesai ditindaklanjut dengan kategori pelanggaran terkait dengan pelanggaran etika dan proses pengadaan.

All members of the Board of Directors and Board of Commissioners have submitted their State Officials Wealth Report (LHKPN) regularly and in timely manner as provided. The implementation of Whistleblowing System (WBS) Policy is also considered to be effective in anticipating potential violations that may result in larger loss for the Company. We received 13 (thirteen) incoming tip-offs pertaining to the violation of ethics and procurement process, all of which have been followed-up completely.

Penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 dilakukan dengan mengacu pada Roadmap Manajemen Risiko 2020-2024, yakni berdasarkan governance dan tingkat *maturity level* manajemen risiko. Risiko utama Indonesia Power adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak tersedianya energi listrik. Berdasarkan peta risiko tahun 2021 terdapat 20 risiko utama yang dihadapi dan mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja Perusahaan. Untuk itulah, Indonesia Power menerapkan *Business Continuity Management System* (BCMS) dengan standar ISO 22301 sebagai upaya mitigasi risiko apabila terjadi krisis terhadap aktivitas utama Indonesia Power sebagai penyedia energi listrik. Pengelolaan risiko diarahkan pada 4 (empat) aspek utama yang mempengaruhi pencapaian kinerja Indonesia Power, yaitu (a) keandalan pembangkit, (b) keamanan dan ketersediaan pasokan energi, (c) pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM sesuai kebutuhan Perusahaan serta (d) transformasi proses bisnis berjalan tidak optimal.

The implementation of risk management based on ISO 31000:2018 refers to Risk Management Roadmap 2020-2024, i.e. based on risk management governance and maturity level. Indonesia Power's main risks concern about all matters that may result in the unavailability of electricity. According to risk map 2021, there were 20 main risks faced by and affecting the achievement of the Company's performance target. To that reason, Indonesia Power implements Business Continuity Management System (BCMS) according to ISO 22301 standard to mitigate any risks in the face of crisis to Indonesia Power's main activity as power provider. Risk management is directed to four (4) major aspects that affect Indonesia Power's performance, i.e. (a) power plant reliability, (b) energy supply security and availability, (c) fulfillment of the number and competency of human capital according to the Company's requirements, and (d) non-optimal implementation of business transformation.

Hasil pengukuran *maturity level* manajemen risiko tahun 2021 mencapai skor sebesar 3,45 dengan skor maksimum 5 atau lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar 3,43. Untuk itulah, Direksi dan segenap jajaran manajemen di bawahnya akan terus melakukan perbaikan manajemen risiko yang diperlukan untuk aspek *leadership*, *people*, *process* dan juga *result*. Secara berkala, Direksi beserta jajaran di bawahnya senantiasa melaksanakan seluruh proses pengelolaan risiko mulai dari identifikasi risiko signifikan, pengukuran risiko dengan metode yang memadai, *monitoring* dan pengendalian, serta pelaporan risiko secara berkesinambungan.

The risk management maturity level assessment score in 2021 was 3.45 out of the maximum score of 5. This was an improvement from the previous year's score of 3.43. Therefore, the Board of Directors and the management will continue improving the risk management that is vital for the aspects of leadership, people, process, and result. On periodical basis, the Board of Directors and the management continuously perform the entire risk management process, from the identification of significant risk; risk assessment using proper method; monitoring and control, to continuous reporting.

Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility Commitment

Sebagai produsen listrik yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan, Indonesia Power terus berupaya menghasilkan produk dan jasa yang aman serta mengelola dampak lingkungan guna menjaga kelestarian alam. Untuk itulah Indonesia Power terus mengembangkan sinergi dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, memenuhi aspek ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kepatuhan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, tanggung jawab terhadap pelanggan serta pengembangan sosial kemasyarakatan untuk mendorong kualitas kehidupan dan lingkungan yang lebih baik.

As a power producer with direct impact towards the community and environment, Indonesia Power continues the effort to generate safe products and services and manage the environmental impact for the purpose of preserving the nature. Accordingly, Indonesia Power continues developing synergy in environmental management, meeting employment aspect according to applicable laws and regulations, complying with occupational health and safety regulations and procedures, showing responsibility to customers, and implementing socio-community development in order to encourage better quality of life and environment.

Di tengah tantangan keberlanjutan dan isu revolusi industri generasi keempat (4.0), kami terus berupaya merumuskan rencana dan strategi yang tepat holistik guna mendorong penciptaan nilai positif bagi seluruh pemangku kepentingan. Secara berkala, Indonesia Power melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) terlebih dahulu dalam menyusun rencana CSR untuk mengidentifikasi wilayah yang terdampak langsung dengan kegiatan operasional Perusahaan sekaligus menjadi bentuk pelibatan pemangku kepentingan.

Facing the sustainability challenge and the industrial revolution (industry 4.0), we continue to formulate effective and holistic plans that encourage the creation of positive value for all stakeholders. Periodically, Indonesia Power performs social mapping prior to formulating CSR plans in order to identify areas receiving direct impact from the Company's operations and engage stakeholders.

Tahun 2021 Indonesia Power memperoleh predikat *Platinum Rank Sustainability Report* 2020 dalam ajang *Asia Sustainability Report Rating* (ASRRAT) 2021 yang menjadi penghargaan tertinggi Laporan Berkelanjutan dalam pengungkapan informasi kepada pemangku kepentingan yang mencakup aspek *triple bottom line* (ekonomi, sosial, dan lingkungan), termasuk dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas Perusahaan, serta pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada ajang *Top CSR Awards* 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah TopBusiness bekerjasama dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Indonesia Power mendapatkan 3 penghargaan, yaitu *Top CSR Awards #Star 5*, *TOP Leader on CSR Commitment* 2021 kepada Direktur Utama Indonesia Power dan Kategori Khusus Program CSR Bidang Ekonomi & Lingkungan. Dalam ajang Indonesian SDG'S Awards (ISDA) 2021, Priok POMU, Bali PGU dan Kamojang POMU memperoleh penghargaan kategori Gold untuk masing-masing program CSR unggulan yang telah dilakukan. Kedua ajang penghargaan tersebut menjadi upaya Indonesia Power dalam menciptakan sinergi pertumbuhan bisnis, yang selaras dengan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Seluruh pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi, kolaborasi dan dukungan dari segenap pemangku kepentingan.

For 2021, Indonesia Power received the Platinum Rank Sustainability Report 2020 at the Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2021. It is the highest accolade for a sustainability report for the disclosure of information to stakeholders. In sustainability report, the disclosure covers triple bottom line (profit, people, planet), including the environmental and social impacts of the Company's activities as well as the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). During Top CSR Awards 2021 hosted by TopBusiness Magazine in collaboration with the National Committee of Governance Policy (KNKG), Indonesia Power received three (3) accolades, i.e., Top CSR Awards #Star 5, TOP Leader on CSR Commitment 2021 to Indonesia Power President Director and Special Category of Economic and Environmental CSR Program. During the Indonesian SDG's Awards (ISDA) 2021, Priok POMU, Bali PGU, and Kamojang POMU received Gold awards for their respective CSR flagship programs. Both awards demonstrate Indonesia Power's effort in creating synergy in business growth, in line with the implementation of environmental and social responsibilities that support the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). These achievements were the result of synergy, collaboration, and support from all stakeholders.

Tanggung jawab sosial di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui program InPower-Care yang merupakan komitmen Indonesia Power untuk memperluas akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik agar lebih berdaya dan mandiri dengan kualitas dan kesejahteraan yang semakin baik. Tiga pilar utama InPower-Care memiliki fokus dan tujuan masing-masing, mencakup Bakti Pelayanan Masyarakat (*Community Assistance*), Bakti Pembinaan Hubungan (*Community Relation*) dan Bakti Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*).

Social responsibility in the social and community development area was carried out through InPower-Care that embodies Indonesia Power's commitment to expanding public access to achieving better social, economic, and cultural conditions, to empowering and improving their independence, by bettering their life quality and well-being. Three (3) main pillars of InPower-Care have each focus and objective, namely Community Assistance, Community Relation, and Community Empowerment.

Di bidang edukasi, Indonesia Power menyelenggarakan Program IP-PINTAR sejak tahun 2017 yang merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan tenaga kerja lokal yang kompeten di bidang pembangkitan dan ketenagalistrikan. Para lulusan IP PINTAR diharapkan memiliki nilai tambah untuk memasuki industri ketenagalistrikan. Di tahun 2021, tidak terdapat penerimaan tenaga kerja lokal dikarenakan adanya *freeze* rekrutmen.

In the field of education, Indonesia Power has been running IP-PINTAR program since 2017. This is also an endeavor to generate competent local workforce in power generation and electricity. IP-PINTAR graduates are expected to have added values when they work in power industry. There was no local workforce recruitment in 2021 due to the program being frozen.

Adapun kegiatan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dijalankan melalui program Hijaunesia Power. Komitmen Indonesia Power dalam menjaga kinerja lingkungan sesuai dengan regulasi yang berlaku dilaksanakan dengan keikutsertaan dalam Program Penilaian Kinerja Industri dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup setiap tahun. Di penghujung tahun 2021, Indonesia Power meraih 20 PROPER sebagai bukti keberhasilan inovasi pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan yang terdiri dari 4 PROPER Emas, 13 PROPER Hijau dan 3 PROPER Biru. Program konservasi lingkungan di sekitar pembangkit pun terus dilakukan.

The environmental biodiversity preservation activities, meanwhile, were performed under Hijaunesia Power program. Indonesia Power's commitment to maintaining environmental performance according to applicable regulation is realized through annual participation in the Industry Performance Assessment Program in environmental management (PROPER) held by the Ministry of Environment. At the end of 2021, Indonesia Power received 20 PROPER awards which proves the success of the sustainable environmental management innovation, consisting of 4 PROPER Gold, 13 PROPER Green, and 3 PROPER Blue. Environmental conservation programs in the areas around the power plants are also continued to be implemented.

Perubahan Komposisi Direksi
Changes in Board of Directors Composition

Sepanjang tahun 2021 terjadi 1 (satu) kali perubahan komposisi Direksi Indonesia Power yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler tanggal 25 November 2021, yang menyetujui pemberhentian Sdr. Khusnul Mubien selaku Direktur Keuangan dan menetapkan Sdri. Endang Astharanti sebagai Direktur Keuangan yang baru. Dengan demikian maka jumlah Direksi Indonesia Power tetap 6 (enam) orang yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi I, Direktur Operasi II, Direktur Pengembangan dan Niaga, Direktur Keuangan, serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi.

The Board of Directors saw a change to our composition in 2021, which was determined by Circular Decree of Shareholders dated November 25, 2021, which approved the dismissal of Mr. Khusnul Mubien from the Director of Finance position and appointed Ms. Endang Astharanti as the new Director of Finance. With the change, Indonesia Power Board of Directors composition comprises six (6) members, i.e. President Director, Director of Operations I, Director of Operations II, Director of Development and Commerce, Director of Finance, and Director of Human Capital and Administration.

Seluruh anggota Direksi beserta segenap Insan Indonesia Power mengucapkan terima kasih dan penghargaan tertinggi atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan oleh Sdr. Khusnul Mubien selama menjabat di Indonesia Power. Seluruh jajaran Direksi juga mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja kepada anggota Direksi yang baru, yakni Sdri. Endang Astharanti, kami optimis perubahan susunan anggota Direksi akan mampu memberikan kontribusi positif dan menjawab tantangan ke depan dengan lebih baik. Dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki jajaran komposisi Direksi saat ini, diharapkan dapat memberikan warna baru dalam dinamika bisnis Perusahaan, dapat terus solid dan mampu berkontribusi maksimal dalam meningkatkan kinerja Indonesia Power di masa depan.

All members of the Board of Directors and Indonesia Power personnel express our gratitude and highest appreciation for the contributions and dedications shown by Mr. Khusnul Mubien during his tenure in Indonesia Power. The Board of Directors also welcomes the new Director, Ms. Endang Astharanti. We are positive that this composition change will bring a positive contribution and provide better answer for future challenges. With the current capacities and capabilities, the current composition of the Board of Directors is expected to give a fresh perspective in the Company's business dynamics, to maintain our solidity, and to optimally contribute to the improvement of Indonesia Power's future performances.

Apresiasi
Acknowledgment

Atas nama seluruh jajaran Direksi, kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas arahan yang diberikan serta Dewan Komisaris atas segala nasihat, arahan dan saran yang diberikan sepanjang tahun 2021. Termasuk juga kepada seluruh pegawai yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, rekanan dan mitra bisnis atas dukungan, kepercayaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Dengan doa, dukungan, dan bantuan semua pihak, kami yakin bahwa, Indonesia Power akan dapat terus mengoptimalkan setiap peluang yang ada di masa mendatang.

On behalf of the Board of Directors, I would like to express our appreciation and gratitude to the Shareholders for the directives given and the Board of Commissioners for the advices, directives, and inputs provided throughout 2021. We are also thankful for all employees who have been working dedicatedly and for our business partners for the never-ending support, trust, and collaboration. With prayers, supports, and assistances from all parties, we believe that Indonesia Power will be able to continue optimizing every future opportunity.

Jakarta, 18 April 2022
Jakarta, April 18, 2022

Atas Nama Direksi PT Indonesia Power
On behalf of the Board of Directors

M. Ansin Sidqi
Direktur Utama
President Director



Harlen
Direktur Pengembangan
dan Niaga
Director of Development and Commerce

M. Hanafi Nur Rifai
Direktur Operasi I
Director of Operations I

Endang Astharanti
Direktur Keuangan
Director of Finance



R. Bambang Anggono
Direktur Operasi II
Director of Operations II

M. Ahsin Sidqi
Direktur Utama
President Director

Bagus Setiawan
Direktur SDM dan Administrasi
Director of Human Capital and Administration

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT INDONESIA POWER

STATEMENT FROM BOARD OF COMMISSIONERS ON ACCOUNTABILITY OVER ANNUAL REPORT 2021 PT INDONESIA POWER

Laporan Tahunan 2021 PT Indonesia Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dewan Komisaris PT Indonesia Power menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2021 PT Indonesia Power.

PT Indonesia Power Annual Report 2021 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2021, and other information relevant and significant for the stakeholders.

We, the undersigned, the entire Board of Commissioners of PT Indonesia Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT Indonesia Power Annual Report 2021.

Jakarta, 18 April 2022
Jakarta, April 18, 2022

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Mohamad Oemar
Komisaris Utama
President Commissioner



Iskandar Simorangkir
Komisaris
Commissioner



Djoko Siswanto
Komisaris
Commissioner



Miftahul Jannah
Komisaris
Commissioner



Munir Ahmad
Komisaris
Commissioner



Ulil Abshar
Komisaris Independen
Independent Commissioner

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021 PT INDONESIA POWER

STATEMENT FROM BOARD OF DIRECTORS ON ACCOUNTABILITY OVER ANNUAL REPORT 2021 PT INDONESIA POWER

Laporan Tahunan 2021 PT Indonesia Power menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

PT Indonesia Power Annual Report 2020 presents information on the Company's performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ended on December 31, 2021, and other information relevant and significant for the stakeholders.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi PT Indonesia Power menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan 2021 PT Indonesia Power.

We, the undersigned, the entire Board of Directors of PT Indonesia Power, declare full accountability for the accuracy of the content of PT Indonesia Power Annual Report 2021.

Jakarta, 18 April 2022
Jakarta, April 18, 2022

Direksi
Board of Directors

M. Ahsin Sidqi
Direktur Utama
President Director

M. Hanafi Nur Rifai
Direktur Operasi I
Operation Director I

Endang Astharanti
Direktur Keuangan
Financial Director

R. Bambang Anggono
Direktur Operasi II
Operation Director II

Harlen
Direktur Pengembangan dan Niaga
Development and Commerce Director

Bagus Setiawan
Direktur SDM dan Administrasi
Human Resources and Administration Director





PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

IDENTITAS PERUSAHAAN
COMPANY IDENTITY

Indonesia Power optimis bahwa pengembangan Bisnis *Beyond* Kwh akan terus tumbuh menjadi sumber pendapatan di luar pendapatan penjualan tenaga listrik. Selain, pengembangan usaha *beyond boundaries* yang kian menunjukkan kinerja positif dengan adanya kerjasama di bidang operasi, pemeliharaan dan peralatan pembangkit dengan perusahaan asal Vietnam dan Kuwait.

Indonesia Power is optimistic that our Beyond kWh lines will continue expanding as the source of income outside of electricity sales. In addition to beyond boundaries businesses show increasingly favorable performance with collaboration in power plant operations and maintenance services and equipment with Vietnamese and Kuwait companies.

Nama Perusahaan
Company Name

PT Indonesia Power

Kantor Pusat
Head Office

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18
Jakarta Selatan, Kode Pos 12950
Telp: (62-21) 526 7666 (Hunting)
Fax: (62-21) 525 1923, 525 2623

Status Perusahaan
Company Status

Anak Perusahaan PT PLN (Persero)
Subsidiary of PT PLN (Persero)

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

3 Oktober 1995
October 03, 1995

Jumlah Pegawai
Employee Base

4.221 orang personnel

Website

www.indonesiapower.co.id

Bidang Usaha
Line of Business

1. **Pembangkitan Tenaga Listrik;**
2. **Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik, antara lain jasa investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta persewaan peralatan pembangkitan; konstruksi bangunan elektrikal dan lain-lain.**
3. **Melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.**

1. Electricity power generation;
2. Electricity-supply related businesses, e.g.: investigation, design, operations & maintenance, and power generation equipment rental practices; electrical building construction; etc.
3 Conducting trades and/or supporting business activities for optimizing the utilization of resources at hand, including giving assignments to Subsidiaries.

Modal Dasar
Authorized Capital

Rp10.000.000.000.000,-
(sepuluh triliun Rupiah)
Rp10,000,000,000,000
(ten trillion Rupiah)

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis for Establishment

1. **Akta Pendirian PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) tanggal 3 Oktober 1995**
2. **Akta Perubahan Nama Perusahaan menjadi PT Indonesia Power tanggal 3 Agustus 2000, dibuat dihadapan Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH dengan Akta Nomor 8 tanggal 3 Agustus 2000**

1. Deed of Establishment of PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I (PT PLN PJB I) dated October 3, 1995
2. Deed of Change of Name to PT Indonesia Power dated August 3, 2000, made before Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, SH under Deed Number 8 dated August 3, 2000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Paid-up Capital

Rp2.607.823.800.000,-
(dua triliun enam ratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah)
Rp2,607,823,800,000
(two trillion six hundred seven billion eight hundred twenty-three million eight hundred thousand Rupiah)

Pemegang Saham — Shareholders

1. **PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 1 dan 5.215.647.598 lembar Saham Seri 2**
2. **Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 2**

1. PT PLN (Persero), holding 1 Series 1 share and 5,215,647,598 Series 2 shares
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), holding 1 Series 2 share

Wilayah Kerja Operasional
Operational Work Areas

1. 4 (empat) PGU (*Power Generation Unit*)
2. 4 (empat) POMU (*Power Generation and O&M Service Unit*)
3. 13 (tiga belas) OMU (*Operation and Maintenance Service Unit*)
4. 1 (satu) MSU (*Maintenance Service Unit*)
5. 1 (satu) PRU (*Project Unit*) sebagai penyedia fungsi perencanaan dan pengendalian proyek pembangkit

1. 4 (four) Power Generation Units (PGU)
2. 4 (four) Power Generation and O&M Service Units (POMU)
3. 13 (thirteen) Operations and Maintenance Service Units (OMU)
4. 1 (one) Maintenance Service Unit (MSU)
5. 1 (one) Project Unit (PRU) to perform planning and controlling of power plant projects

Email

kontak-ip@indonesiapower.co.id

Contact Center

: indonesiapower
: @pt.indonesiapower
: pt indonesia power official

Anak Perusahaan
Subsidiaries

1. PT Cogindo DayaBersama (99,9%), bergerak di bidang: energi ketenagalistrikan, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik serta co-generation,.
2. PT Artha Daya Coalindo (80%), bergerak di bidang: perdagangan, pengangkutan, bongkar muat, pemasaran dan keagenan batubara.
3. PT Indo Ridlatama Power (90%), bergerak di bidang: pembangkit tenaga listrik.
4. PT Putra Indotenaga (99,9%), bergerak di bidang: pembiayaan proyek dan *participating interest.*

1. PT Cogindo DayaBersama (99.9%), engaging in: electricity energy, and power plant operations and maintenance, and co-generation.
2. PT Artha Daya Coalindo (80%), engaging in: coal trade, transport, loading/unloading, marketing, and agency.
3. PT Indo Ridlatama Power (90%), engaging in: power generation.
4. PT Putra Indotenaga (99.9%), engaging in: project financing and participating interest.



RIWAYAT SINGKAT INDONESIA POWER

INDONESIA POWER AT A GLANCE

Dalam rangka mewujudkan aspirasi Visi Indonesia Power untuk menjadi Perusahaan energi terbaik yang tumbuh berkelanjutan, Kami terus meningkatkan peran dan kontribusi dalam menerangi segenap penjuru tanah air. Dengan mengambil peran strategis yang kelak dapat menggerakkan perekonomian daerah setempat.

Jejak Langkah

Milestones

1995

Pendirian PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB I).

Establishment of PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB I)

1996 - 2000

- Perubahan Nama PT PJB I menjadi Indonesia Power (3 Agustus 2000);
- Pendirian Anak Perusahaan:
  - PT Artha Daya Coalindo (ADC) (1997)
  - PT Cogindo Dayabersama (CDB) (1998)
  - PT Rekadaya Elektrika (RE) (2000).
- Change of name from PT PJB I to Indonesia Power (August 3, 2000)
- Establishment of Subsidiaries:
  - PT Artha Daya Coalindo (ADC) (1997)
  - PT Cogindo DayaBersama (CDB) (1998)
  - PT Rekadaya Elektrika (RE) (2000)

2001 - 2005

- Pendirian Anak Perusahaan PT Indo Pusaka Berau (IPB) (2005).
- Establishment of Subsidiary PT Indo Pusaka Berau (IPB) (2005)

2006 - 2010

- Pendirian Anak Perusahaan PT Indo Ridlatama Power (IRP) (2007);
- Pengembangan usaha di bidang penyediaan Jasa *Operation & Maintenance* (O&M) (2009);
- Pembentukan UJP (Unit Jasa Pembangkitan) Banten 2 Labuan (2010).
- Establishment of Subsidiary PT Indo Ridlatama Power (IRP) (2007)
- Business development in Operations and Maintenance (O&M) Service provision (2009)
- Establishment of Banten 2 Labuan (2010) Operations and Maintenance Service Unit (OMU)

2021



- Sukses mendukung PON XX PAPUA 2021 dengan *Mobile Power Plant* (MPP) Papua 120 MW dan PLTU Holtekamp 24 MW
- COD PLTU Kalbar 1 2x100 MW
- COD PLTM Gunung Wugul 3 MW di Jawa Tengah
- Success in supporting PON XX PAPUA 2021 with Mobile Power Plant (MPP) Papua 120 MW and SPP Holtekamp 24 MW
- Operation of SPP West Kalimantan 1 2x100 MW
- Operation of MHPP Gunung Wugul 3 MW in Central Java

To deliver Indonesia Power's Vision To be The Best Sustainable Energy Company, we continue improving the roles and contributions in spreading light to every corner of our country. Going forward, by taking this strategic role, we aspire to drive the economy of the locals.

2011 - 2013

- Pendirian Anak Perusahaan PT Putra Indotenaga (2013);
- Penerapan Indonesia Power-*Integrated Management System* (InPower IMS), sinergi standar: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 28001, SMP, SMK3, PAS 55 dan Kriteria *Baldrige* (2013).
- Establishment of Subsidiary PT Putra Indotenaga (2013)
- Implementation of Indonesia Power-Integrated Management System (InPower IMS), standards for synergy: ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 28001, SMP, SMK3, PAS 55, and Baldrige criteria (2013)

2014 - 2016

- Pembentukan UJP Pangkalan Susu, UPJP Priok, UPJP Kamojang dan UPJP Bali (2014)
- Pengoperasian PLTDG Pesanggaran 200 MW, Bali (2015)
- Pembentukan UJP PLTGU Cilegon (2016)
- Sertifikasi ISO 55001, ISO 26000 dan ISO 50001 (2015-2016)
- Pendirian Afiliasi dari Anak Perusahaan PT GCL Indo Tenaga (2016)
- Establishment of Pangkalan Susu OMU, and Priok Power Generation and O&M Service Units (POMU), Kamojang POMU, Bali POMU (2014)
- Operation of DGPP Pesanggaran 200 MW, Bali (2015)
- Establishment of CCPP Cilegon (2016)
- ISO 55001, ISO 26000 and ISO 50001 Certification (2015-2016)
- Establishment of Affiliates of Subsidiaries, PT Indo Raya Tenaga (IRT) and PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC).

2017 - 2020

- Pendirian afiliasi anak perusahaan PT Indo Raya Tenaga (IRT) dan PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC) (2017)
- Pencatatan Perdana sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) Danareksa Indonesia Power PLN1 (2017)
- *Launching* IP Academy
- COD PLTU Muara Jawa 2x27,5 MW, PLTA Rajamandala 47 MW dan PLTD Senayan 101 MW, serta PLTGU *Add On* Grati 183 MW (2018-2020)
- Beroperasinya proyek MPP Papua 120 MW (MPP Biak 2, MPP Merauke, MPP Sorong, MPP Nabire, dan MPP Manokwari (2019-2020)
- Sertifikasi ISO 27001 dan ISO 22301 (2017) serta sertifikasi ISO 37001:2016 (2020)
- Establishment of Affiliates of Subsidiaries, PT Indo Raya Tenaga (IRT) and PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLN SC)
- First listing of Asset-Backed Security (EBA) of Indonesia Power Mutual Funds PLN1 (Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power PLN1)
- Launching of IP Academy
- COD of SPP Muara Jawa 2x27,5 MW, HPP Rajamandala 47 MW dan DPP Senayan 101 MW, serta CCPP Add On Grati 183 MW (2018-2020)
- Operation of projects MPP Papua 120 MW (MPP Biak 2, MPP Merauke, MPP Sorong, MPP Nabire, dan MPP Manokwari) (2019-2020)
- ISO 27001, ISO 22301 (2017) and ISO 37001:2016 Certification (2020)

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN
COMPANY NAME CHANGE

Pada tanggal 3 Agustus 2000, nama PLN PJB I secara resmi berubah menjadi Indonesia Power berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 3 Agustus oleh Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH.

As of August 3, 2000, the name PLN PJB I was officially changed into Indonesia Power, as attested by Deed Number 8 dated August 3, 2000 made before Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, SH.

Indonesia Power terus berupaya melebarkan sayap ke seluruh Indonesia sejak tahun 2012 dengan mengembangkan portofolio pengembangan usaha jasa *Operation & Maintenance* (O&M) di luar sistem Jawa dan Bali. Sebagai produsen energi listrik, Indonesia Power mengelola pembangkit *existing* dan pembangkit milik PLN yang tersebar dari pulau Sumatera sampai dengan Papua. Dalam mendukung proses pengelolaan pembangkit, Perusahaan membentuk terdiri dari 4 (empat) PGU (*Power Generation Unit*) dengan fungsi operasional penyediaan tenaga listrik, 4 (empat) POMU (*Operation and Maintenance Service Unit*) yang menjalankan fungsi operasional penyediaan tenaga listrik serta pengelolaan Jasa O&M, 13 (tiga belas) OMU (*Operation and Maintenance Service Unit*) yang melakukan fungsi pengelolaan Jasa O&M, 1 (satu) MSU (*Maintenance & Services Unit*) yang berfungsi melakukan fungsi pemeliharaan pembangkit dan 1 (satu) PRU (Project Unit) yang menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian proyek pembangkit.

Since 2012, Indonesia Power has been expanding its influence throughout Indonesia by growing its portfolio, developing the Operations and Maintenance (O&M) Service business outside the Java-Bali system. As an electricity producer, Indonesia Power's managing existing power plants and PLN-owned power plants are distributed from Sumatra to Papua. To support power plant management process, the Company had established four (4) Power Generation Units (PGU) which run the electricity supply operations, four (4) Power Generation and O&M Service Units (POMU) which run the electricity supply operations and perform O&M Service management, thirteen (13) Operations and Maintenance Service Units (OMU) which perform the O&M Service management, and one (1) Maintenance & Services Unit (MSU) which provides the maintenance services and power plant maintenance and one (1) Project Unit (PRU) assuming planning and controlling of power plant projects.

Total daya terpasang pembangkit yang dimiliki dan dikelola Indonesia Power saat ini meningkat 501 MW menjadi 17.072 MW dari tahun sebelumnya sebesar 16.571 MW, yang diantaranya disebabkan oleh mulai beroperasi secara komersial PLTU Jeranjang Unit 2 (30 MW), PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 (2x220 MW) dan PLTM Gunung Wugul 3 MW. Selain mengelola Unit Pembangkit, Indonesia Power juga memiliki 4 (empat) Anak Perusahaan, 1 (satu) Perusahaan Patungan, 2 (dua) Perusahaan Asosiasi serta 6 (enam) Perusahaan Afiliasi dari Anak Perusahaan, yang keberadaannya untuk mendukung strategi dan proses bisnis Indonesia Power.

Total installed capacity of power plants owned and managed by Indonesia Power increased by 501 MW to 17,072 MW from 16,571 MW in the previous year which among others was contributed by the Commercial Operation Dates of SPP Jeranjang Unit 2 (30 MW), SPP Pangkalan Susu Units 3 and 4 (2x220 MW), and MHPP Gunung Wugul 3 MW). In addition to managing Power Generation Units, Indonesia Power also owns four (4) Subsidiaries, one (1) Joint Venture, two (2) Associates, and six (6) Affiliates of Subsidiaries to support the Company's strategies and business processes.

Indonesia Power terus berkomitmen menyempurnakan proses bisnis berdasarkan standar terbaik. Implementasi *IP Integrated Management System* (IP-IMS), yaitu integrasi berbagai standar manajemen yang terdiri dari ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen K3), ISO 28000:2007 (Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok), SMK3 (Sistem Manajemen K3) berbasis PP Nomor 50 Tahun 2012, ISO 55001:2014 (Sistem

Indonesia Power is always committed to perfecting business process based on the best standards. The implementation of IP Integrated Management System (IP-IMS) integrates a number of management standards, including ISO 14001:2015 (Environment Management System), ISO 9001:2015 (Quality Management System), ISO 45001:2018 (Internationally-applied HSE Management System), ISO 28000:2007 (Supply Chain Security Management System), SMK3 (Indonesian HSE

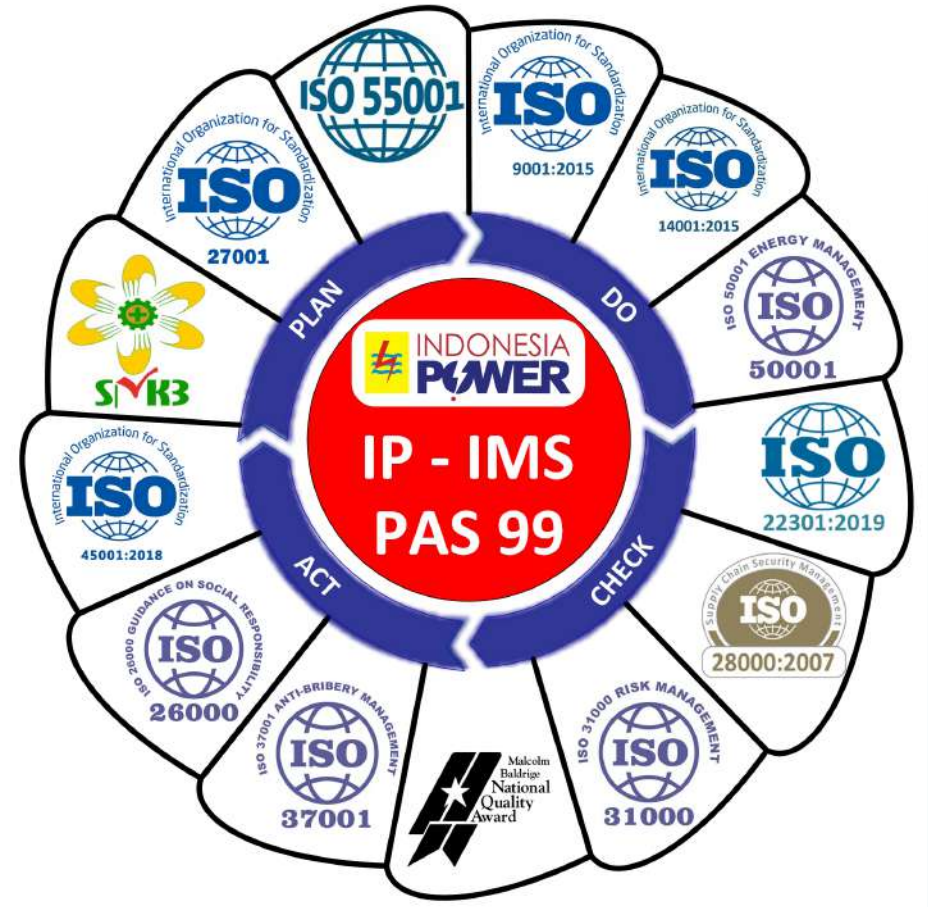
Manajemen Aset), ISO 50001:2018 (Sistem Manajemen Energi), ISO 26000 (*Guideline on Social Responsibility*), ISO 31000:2018 (*Risk Management-Principles and Guidelines*), Kriteria Baldrige, ISO 27001:2013 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi), ISO 22301:2019 (Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis) dan ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) dan Kriteria Baldrige.

Tahun 2021, Indonesia Power melakukan perbaikan proses bisnis dalam rangka mengintegrasikan seluruh proses dengan membangun *Enterprise Architecture* (EA) sebagai cetak biru organisasi yang menyelaraskan *business architecture* dengan teknologi informasi dalam perspektif data *architecture*, *application architecture* dan *technology architecture*, berupa dokumen elektronik (*softfile*) yang dibuat dan dikelola dengan menggunakan *software* Sparx.

Management System) based on Government Regulation No. 50 of 2012, ISO 55001:2018 (Asset Management System), ISO 50001:2011 (Energy Management System), ISO 26000 (Guidance on Social Responsibility), ISO 31000:2018 (Risk Management Principles and Guidelines), Baldrige Criteria, ISO 27001:2013 (Information Security Management System), ISO 22301:2019 (Business Continuity Management System) and ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System) and Baldrige Criteria.

In 2021, in order to integrate all processes, Indonesia Power performed enhancement of its business process by developing Enterprise Architecture (EA) as an organizational blueprint that aligns business architecture with information technology in the perspectives of data architecture, application architecture, and technology architecture. The blueprint came as an electronic document made and managed using Sparx software.

Skema Sistem Manajemen Terintegrasi IP – IMS
Scheme of IP-IMS Integrated Management System



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021
AWARDS AND CERTIFICATES IN 2021

Penghargaan
Awards

"Penghargaan menjadi bentuk pengakuan pihak eksternal terhadap eksistensi Indonesia Power di berbagai bidang. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa kami siap menjadi *Industry Leader* di tengah iklim usaha kelistrikan nasional yang kian kompetitif."

"Awards are evidence of external parties' acknowledgment of Indonesia Power's existence in diverse areas. They also serve as an indicator that we are ready to become an Industry leader amidst the increasingly competitive national power industry."

Berikut daftar penghargaan yang diperoleh selama periode tahun 2021:

The following awards were received in 2021:

No	Nama Penghargaan Name of Award	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
TINGKAT INTERNASIONAL INTERNATIONAL			
1	**Vision Award 2020** 1. Penghargaan untuk *Annual Report* 2020 a. *Gold Award* b. *Top 50 Reports Asia Pacific Region ranking at 42* 2. Penghargaan untuk *Sustainability Report* 2020 a. *Gold Award* b. *Top 50 Reports Asia Pacific Region ranking at 42* 1. Awards for Annual Report 2020 a. Gold Award b. Top 50 Reports Asia Pacific Region ranked 42 2. Awards for Sustainability Report 2020 a. Gold Award b. Top 50 Reports Asia Pacific Region ranked 42	Agustus 2021 August 2021	League of American Communications Professionals LLC (LACP)
2	***Asean Coal Awards* 2021** **WINNER** *Clean Coal & Technology Utilisation Power Generation Medium Scale Category* (PLTU Banten 3 Lontar OMU) Clean Coal & Technology Utilization Power Generation Medium Scale Category (SPP Banten 3 Lontar OMU) **FIRST RUNNER UP** *Clean Coal & Technology Utilisation Power Generation Large Scale Category* (PLTU Jateng 2 Adipala OMU) Clean Coal & Technology Utilization Power Generation Large Scale Category (SPP Central Java 2 Adipala OMU)	16 September 2021 September 16, 2021	ASEAN Center for Energy (ACE)

No	Nama Penghargaan Name of Award	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
3	**Malaysia *Technology Expo* SDG's *Awards* 2021** 1. *Silver Medalist* kategori *Economic Growth* (*Head Office*) 2. *Silver Medalist* kategori *Environtment & Natural Resource* (Saguling POMU) 3. *Outstanding innovation award* (Saguling POMU) 1. Silver Medalist in Economic Growth category (Head Office) 2. Silver Medalist in Environtment & Natural Resource category (Saguling POMU) 3. Outstanding Innovation Award (Saguling POMU)	29 Oktober 2021 October 29, 2021	UTeM (Universiti Teknikal Malaysia Melaka) & SIRIM STV (Sirim Tech Venture Sdn Bhd)
4	**Asian Power Awards 2021** Raih 5 (lima) penghargaan 1. *Power Plant Upgrade of the Year* : *Heat Recovery Steam Generator* Tambak Lorok CCPP *Block* 2 *Life Extension and Upgrades* oleh Indonesia Power Semarang PGU 2. *Information Technology Project of the Year : Digital Power Plant Program - Automatic Failure Detection by* PT PLN (Persero) - Indonesia Power 3. *Environmental Upgrade of the Year* melalui PLTU Jawa 9 & 10, 2 x 1000 MW OECD-*Class* USC CSFPP PT Indo Raya Tenaga (anak usaha IP) 4. *Geothermal Power Project of the Year : Silver* - Indonesia Power Kamojang POMU - 375 MW 5. *Coal Power Project of the Year : Silver* - PLTU Jawa 9 & 10, 2 x 1000 MW OECD-*Class* USC CSFPP PT Indo Raya Tenaga (anak usaha IP) Earned 5 (five) awards 1. Power Plant Upgrade of the Year: Heat Recovery Steam Generator CCPP Tambak Lorok Block 2 Life Extension and Upgrades by Indonesia Power Semarang Power Generation Unit 2. Information Technology Project of the Year: Digital Power Plant Program - Automatic Failure Detection by PT PLN (Persero) - Indonesia Power 3. Environmental Upgrade of the Year: SPP Java 9 & 10, 2 x 1000 MW OECD-Class USC CSFPP PT Indo Raya Tenaga (IP subsidiary) 4. Geothermal Power Project of the Year: Silver - Indonesia Power Kamojang POMU - 375 MW 5. Coal Power Project of the Year: Silver - SPP Java 9 & 10, 2 x 1000 MW OECD-Class USC CSFPP PT Indo Raya Tenaga (IP subsidiary)	12 November 2021 November 12, 2021	Asian Power Magazine
4	**ASRRAT (*Asia Sustainability Report Rating* 2021)** *Platinum Rank* untuk *Sustainability Report* 2020 Platinum Rank for Sustainability Report 2020	17 November 2021 November 17, 2021	NCSR (*National Center for Sustainability Reporting*)
5	**ITEX (International Invention, Innovation and Technology Exhibition) 2021** 1. Dua *Gold Medal* kategori *Environment, Energy* 2. *Gold Medal* kategori *Equipment, Electronics, Machinery* 1. Two Gold Medals in Environment, Energy category 2. Gold Medal in Equipment, Electronics, Machinery category	9 Desember 2021 December 9, 2021	Malaysian Invention and Design Society (MINDS)

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021
AWARDS AND CERTIFICATES IN 2021

ASEAN Coal Awards





WINNER
Clean Coal & Technology Utilisation Power Generation Medium Scale Category
(PLTU SPP Banten 3 Lontar OMU)

FIRST RUNNER UP
Clean Coal & Technology Utilisation Power Generation Large Scale Category
(PLTU SPP Jateng 2 Adipala OMU)

Asian Power Awards





(Power Plant Upgrade of the Year, Information Technology Project of the Year, Environmental Upgrade of the Year, Geothermal Power Project of the Year & Coal Power Project of the Year)

Vision Awards 2020





Gold Award untuk Annual Report dan Sustainability Report 2020
Gold Award for Annual Report and Sustainability Report 2020

ASRRAT (Asia Sustainability Report Rating) 2021



Platinum Rank untuk Sustainability Report 2020
Platinum Rank for Sustainability Report 2020

Malaysia Technology Expo SDG's Awards 2021



Silver Medal

ITEX (International Invention, Innovation and Technology Exhibition) 2021



Gold Medal

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021
AWARDS AND CERTIFICATES IN 2021

No	Nama Penghargaan Name of Award	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
TINGKAT NASIONAL NATIONAL			
1	**TOP CSR AWARDS 2021** 🏆 TOP CSR *AWARDS* #Star 5 🏆 *TOP Leader on* CSR *Commitment* 2021 M. Ahsin Sidqi, Direktur Utama Indonesia Power TOP Leader on CSR Commitment 2021 - M. Ahsin Sidqi, Indonesia Power President Director 🏆 Kategori Khusus Program CSR Bidang Ekonomi & Lingkungan Special Category of Economic and Environmental CSR Program	22 April 2021 April 22, 2021	Majalah Top Business bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) TopBusiness Magazine with National Committee of Governance Policy (KNKG)
2	**Penghargaan K3 Tahun 2021** OHS Awards 2021 1. Penghargaan *Zero Accident* untuk 20 Unit; 2. Penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk 4 Unit; 3. Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV (P2HIV) untuk 8 Unit; 4. Penghargaan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (P2COVID) untuk 13 Unit dari Kementerian Ketenagakerjaan 1. Zero Accident Awards for 20 Units; 2. OHS Management System (SMK3) Awards for 4 Units; 3. HIV Prevention and Control Program (P2HIV) Awards for 8 Units; 4. COVID-19 Prevention and Control (P2COVID) Awards for 13 Units from the Ministry of Manpower	28 April 2021 April 28, 2021	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower
3	***Culture Festival*** **PLN 2021** 🏆 Anak Perusahaan Terbaik Best Subsidiary 🏆 Tim Ranger Terbaik (Juara 1) Best Ranger Team (1st Winner) 🏆 Implementasi Budaya Terbaik (Terbaik 2) Best Culture Implementation (2nd Best)	31 Agustus 2021 August 31, 2021	PT PLN (Persero)
4	**Indonesian SDG'S *Awards* (ISDA) 2021** 🏆 Kategori GOLD Priok POMU (Program Taman Hayati PKK Sunter) GOLD category - Priok POMU (Biogarden Program by Family Welfare Empowerment Group (PKK) of Sunter) 🏆 Kategori GOLD Bali PGU (Kelompok Dukungan Sebaya (KIDS) Sekar Jempiring) GOLD category - Bali PGU (Peer Support Group (KIDS) Sekar Jempiring) 🏆 Kategori GOLD Kamojang POMU (Budidaya & Pengelolaan Kopi Kamojang Berbasis Masyarakat) GOLD category - Kamojang POMU (Community-based Kamojang Coffee Cultivation and Management)	17 September 2021 September 17, 2021	Kementerian PPN/Bappenas dan Corporate dan Forum For CSR Development Ministry of National Development Plan/Bappenas and Corporate and Forum For CSR Development
5	**Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya** **Satyalancana Wira Karya Badge of Honor** Tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia. The badge of honor is presented by the Government of the Republic of Indonesia to its citizens for their large contribution to the country. ★ **Andi Taufik Saputra** ★ **Hendra Yudisaputri**	28 September 2021 September 28, 2021	Presiden Republik Indonesia President of the Republic of Indonesia

No	Nama Penghargaan Name of Award	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
6	***Credit Rating* PEFINDO** idAAA (Triple A, *Stable Outlook*) Superior 5 tahun berturut-turut Superior for 5 consecutive years	23 September 2021 September 23, 2021	PEFINDO Credit rating Agency
7	**SUBROTO AWARDS 2021 - Raih 10 Penghargaan** **SUBROTO AWARDS 2021 - Earned 10 awards** **Kategori B "Manajemen Energi di Gedung dan Industri" / Subkategori Inovasi Khusus** 1. Indonesia Power Semarang PGU Proyek "Modifikasi *Blocking Seal Plate* untuk Meningkatkan Efisiensi *Heat Recovery Steam Generator*" 2. Indonesia Power Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU Proyek "Optimasi Kinerja *Boiler* dengan *Expert Combustion Tuning* (X-Toni) untuk Mendukung Implementasi Program *Coal Switching & Co-Firing*" **Category B "Energy Management in Buildings and Industries" - Subcategory Special Innovation** 1. Indonesia Power Semarang PGU Project "Blocking Seal Plate Modification for Heat Recovery System Generator Efficiency Enhancement" 2. Indonesia Power West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU Project "Boiler Performance Optimization with Expert Combustion Tuning (X-Toni) to Support Coal Switching & Co-Firing Program Implementation" **Juara 2 Kategori B "Manajemen Energi di Gedung dan Industri" - Subkategori Industri Pertambangan dan Energi** 1. Indonesia Power Priok POMU **2nd Winner of Category B "Energy Management in Buildings and Industries" - Subcategory Mining and Energy Industry** 1. Indonesia Power Priok POMU **Juara 3 Kategori B "Manajemen Energi di Gedung dan Industri" - Subkategori Gedung Kecil dan Menengah** 1. Gedung Kantor Indonesia Power Bali PGU **3rd Winner Category B "Energy Management in Buildings and Industry" Subcategory Small and Medium Buildings** 1. Office Building of Indonesia Power Bali PGU **Kategori C "Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik" - Subkategori PLTU Non MT 100 - 400 MW** 1. Juara 1 PLTU Labuan Unit 1 - Indonesia Power 2. Juara 2 PLTU Suralaya Unit 2 - Indonesia Power **Category C "Emission Reduction and Trade in Power Generation Sector" - Subcategory Seller for Non-MT SPPs 100-400 MW** 1. 1st Winner: SPP Labuan Unit 1 - Indonesia Power 2. 2nd Winner: SPP Suralaya Unit 2 - Indonesia Power **Kategori C "Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik" - Subkategori Buyer untuk PLTU Non MT di atas 400 MW** 1. Juara 1 PLTU Jawa Tengah 2 Adipala - Indonesia Power 2. Juara 2 PLTU Suralaya Unit 8 - Indonesia Power **Category C "Emission Reduction and Trade in Power Generation Sector" - Subcategory Buyer for Non-MT SPPs above 400 MW** 1. 1st Winner: SPP Central Java 2 Adipala - Indonesia Power 2. 2nd Winner: SPP Suralaya Unit 8 - Indonesia Power	28 September 2021 September 28, 2021	Kementerian ESDM Ministry of Energy and Mineral Resources

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021
AWARDS AND CERTIFICATES IN 2021

No	Nama Penghargaan Name of Award	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
	Kategori C "Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik" - Subkategori *Buyer* PLTU Non MT 100 - 400 MW 1. Juara 1 PLTU Pelabuhan Ratu Unit 2 - Indonesia Power 2. Juara 3 PLTU Banten 3 Lontar Unit 1 - Indonesia Power **Category C "Emission Reduction and Trade in Power Generation Sector" - Subcategory Buyer of Non-MT SPPs 100-400 MW** 1. 1st Winner: SPP Pelabuhan Ratu Unit 2 - Indonesia Power 2. 3rd Winner: SPP Banten 3 Lontar Unit 1 - Indonesia Power		
8	**TOP GRC AWARDS 2021** TOP GRC 2021 Level #5 Stars TOP *Leader The Most Commitment* GRC *Leader* 2021 *The high Performing Board of Commissioners on* GRC 2021 *Special Appreciation on Application to Support GRC Implementation*	7 Oktober 2021 7 Oktober 2021	Majalah TopBusiness TopBusiness Magazine
9	**Penghargaan ProKLIM 2021 dari KLHK untuk Bali PGU** melalui Program "Banana *Smart Village*" untuk menggerakkan masyarakat dalam penghijauan pelestarian lingkungan. **ProKLIM Award from the Ministry of Environment and Forestry to Bali PGU** for "Banana Smart Village" Program that promotes the community's greening and environmental preservation efforts.	19 Oktober 2021 October 19, 2021	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Ministry of Environment and Forestry
10	**LIKE PLN 2021** **Juara 1 dan Juara 3 1st and 3rd Winner** Kategori Bidang Pembangkitan Power Generation Category	21 Oktober 2021 October 21, 2021	PT PLN (Persero)
11	**Business Performance Excellence Awards 2021** *Industry Leader* dalam Asesmen KPKU dengan skor 682,75 Industry Leader in Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) scored 682.75	9 November 2021 November 9, 2021	Forum Ekselen BUMN BUMN Excellent Forum
12	**Innovative Idea Competition "WOW DIAMOND" PLN Tahun 2021** **Innovative Idea Competition "WOW DIAMOND" PLN 2021** Juara 2 Kategori Digitalization Product dengan yang disampaikan adalah SOLANA (*Solar Energy Monitoring Apps*). Rank 2 in category Innovation presented was SOLANA (Solar Energy Monitoring App).	2 Desember 2021 Desember 2, 2021	PT PLN (Persero)
13	**OPEXCON (Indonesia Operational Excellence Conference and Award) 2021** 1. *Silver Achievement* - Menurunkan gangguan Sistem Pendingin menggunakan *Skateboard Filter* (PLTU Jeranjang) 2. *Bronze Achievement* - Perancangan Simulator DCS Unit 1 PLTP Kamojang Guna Meningkatkan Kemampuan Operator Dalam Pengoperasian Unit Pembangkit (PLTP Kamojang) 3. *Bronze Achievement* - Trans Suralaya, Aplikasi Mengoptimalkan dan Meningkatkan Efisiensi Operasional Kendaraan (PLTU Suralaya) 1. Silver Achievement - Reducing Cooling System Failure Using Skateboard Filter (SPP Jeranjang) 2. Bronze Achievement - DCS Simulator Designing for GPP Kamojang Unit 1 to Enhance Operator's Capability in Power Generation Unit Operations (GPP Kamojang) 3. Bronze Achievement - Trans Suralaya, an App to Optimize and Enhance Vehicles' Operational Efficiency (SPP Suralaya)	7 Desember 2021 Desember 7, 2021	SHIFT Indonesia

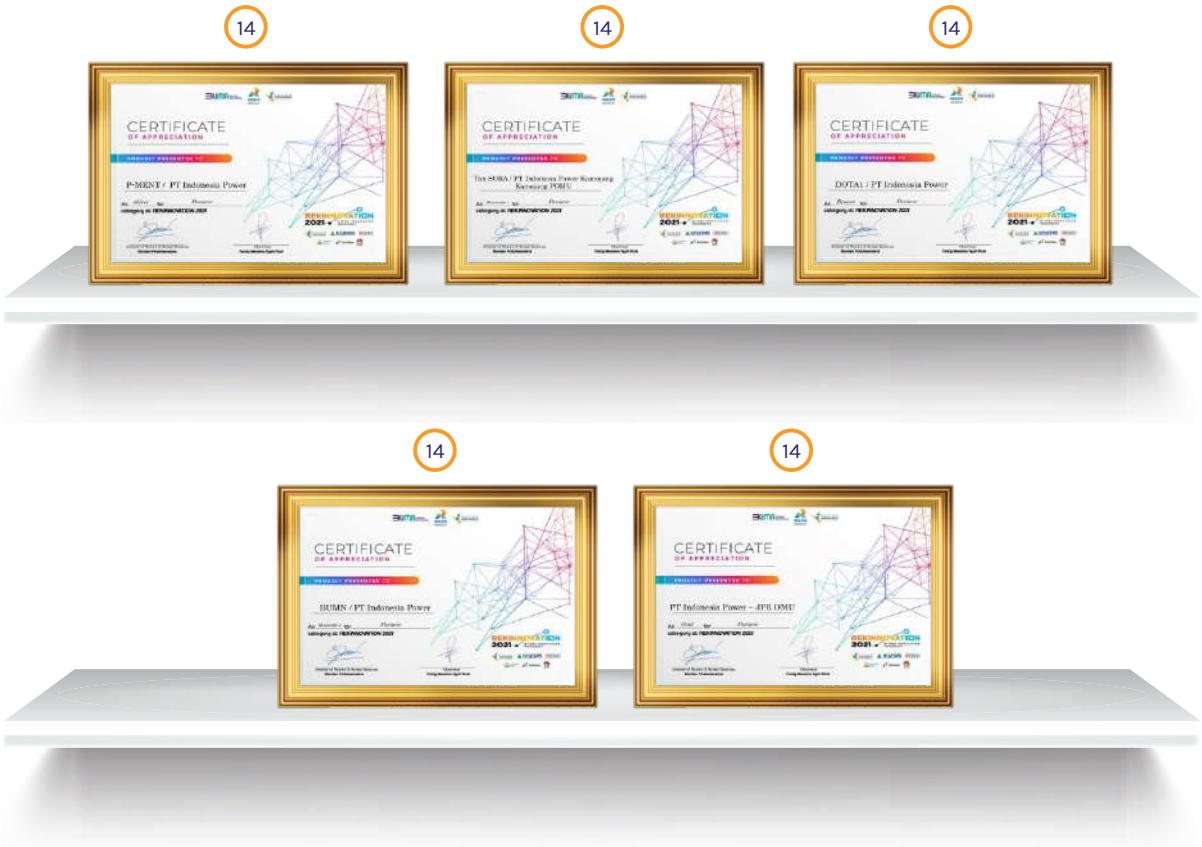
No	Nama Penghargaan Name of Award	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Penghargaan Awarder
14	**Rekinnovation 2021** 1. *Gold* – Optimasi Pembakaran Batubara Kalori Rendah Dengan Dcost – PLTU Pelabuhan Ratu OMU 2. *Silver – Propay – Head Office* 3. *Bronze - Digitize Online Tube Boiler Analysis* – PLTU Labuan OMU 4. *Honorable* I – *Smart Operator Realtime Assistant* – Kamojang POMU 5. *Honorable* II – *End to End Dashboard Monitoring Asset Healthines* Semarang PGU 1. Gold – Low Calorie Coal Combustion Optimization With Dcost – SPP Pelabuhan Ratu OMU 2. Silver – Propay – Head Office 3. Bronze - Digitize Online Tube Boiler Analysis – SPP Labuan OMU 4. Honorable I – Smart Operator Realtime Assistant – Kamojang POMU 5. Honorable II – End to End Dashboard Monitoring Asset Healthines Semarang PGU	9 Desember 2021 Desember 9, 2021	PT Rekayasa Industri
15	**Anugerah PROPER 2021** **PROPER Awards 2021** 1. Empat (4) Proper Emas: PLTDG Pesanggaran, PLTP Kamojang Darajat, PLTGU Grati dan PLTGU Priok 2. Tiga belas (13) Proper Hijau: PLTU Suralaya, PLTGU Tambak Lorok, PLTG Gilimanuk, PLTG Pemaron, PLTP Gunung Salak, PLTU Labuan, PLTU Banten 3 Lontar, PLTU Suralaya 8 OMU, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTGU Cilegon, PLTA PB Soedirman, Mrica PGU – Sub Unit Wonogori, PLTU Jeranjang. 3. Tiga (3) Proper Biru: PLTA Saguling, PLTU Adipala, PLTU Barru. 1. Four (4) PROPER Gold: DGPP Pesanggaran, GTPP Kamojang Darajat, SPP Grati, and SPP Priok 2. Thirteen (13) PROPER Green: SPP Suralaya, CCPP Tambak Lorok, GTPP Gilimanuk, GTPP Pemaron, GPP Gunung Salak, SPP Labuan, SPP Banten 3 Lontar, SPP Suralaya 8 OMU, SPP Pelabuhan Ratu, CCPP Cilegon, HPP PB Soedirman, Mrica PGU – Sub-Unit Wonogori, SPP Jeranjang. 3. Three (3) PROPER Blue: HPP Saguling, SPP Adipala, SPP Barru.	28 Desember 2021 December 28, 2021	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Ministry of Environment and Forestry

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021
AWARDS AND CERTIFICATES IN 2021




4
12
10
SERTIFIKAT PENGHARGAAN
Ahmad Baginda Lubis
PT Indonesia Power
2nd Champion of Digital Product
PT Indonesia Power
5
2
Sertifikat Penghargaan
Certificate of Appreciation
5
8
7
SATYALANCANA WIRA KARYA
Konsisten Terapkan Prinsip GRC, IP Berjaya di TOP GRC Awards 2021
SABET 10 PENGHARGAAN TERTINGGI ESDM

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021
AWARDS AND CERTIFICATES IN 2021



Sertifikasi
Certifications

"Sejalan dengan upaya meningkatkan komitmen penerapan prinsip integritas dan *fairness*, tahun 2021 ini merupakan *surveillance* pertama implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk memperluas ruang lingkup SMAP tidak hanya di Kantor Pusat, namun diimplementasikan juga di unit eksisting, baik PGU maupun POMU. Disamping itu, adanya perkembangan standar K3 dan lingkungan dengan implementasi ISO 45001:2018 dan ISO 14001:2015 diharapkan mampu mendorong terciptanya integrasi aspek mutu, K3 dan lingkungan lebih baik lagi di seluruh lingkungan Indonesia Power."

"In consonance with the effort to increase the commitment to implementing the integrity and fairness principles, the year 2021 saw the first surveillance of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) implementation that expanded the ABMS scope not only at the Head Office but also in existing units, both in PGUs and POMUs. Additionally, the improvement in OHSE standards through the implementation of ISO 45001:2018 and ISO 14001:2015 was expected to encourage better integration of quality, OHS, and environmental aspects across Indonesia Power."

Berikut daftar sertifikasi yang diperoleh selama periode tahun 2021 adalah:

The following certificates were received in 2021:

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Sertifikasi Certification Body	Masa Berlaku Sertifikasi Valid Until
1	**ISO 9001:2015** 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. MSU 11. Suralaya 8 OMU 12. Labuan OMU 13. Lontar OMU 14. Pelabuhan Ratu OMU 15. Adipala OMU 16. Cilegon OMU	14 Februari 2020 February 14, 2020	PT Sucofindo	13 Februari 2023 February 13, 2023

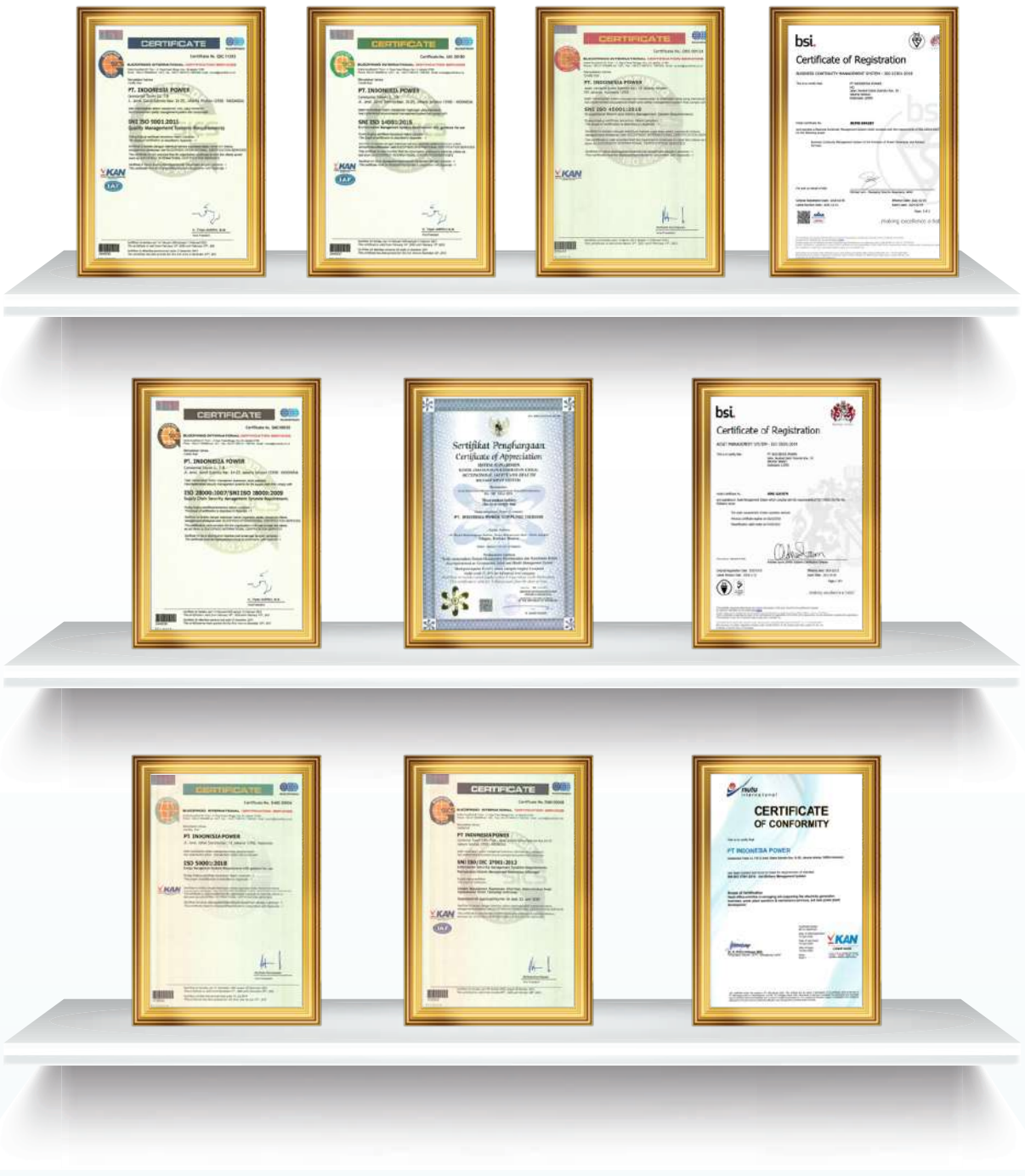
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021
AWARDS AND CERTIFICATES IN 2021

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Sertifikasi Certification Body	Masa Berlaku Sertifikasi Valid Until
2	**ISO 14001:2015** 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. MSU 11. Suralaya 8 OMU 12. Labuan OMU 13. Lontar OMU 14. Pelabuhan Ratu OMU 15. Adipala OMU 16. Cilegon OMU	14 Februari 2020 February 14, 2020	PT Sucofindo	13 Februari 2023 February 13, 2023
3	**ISO 45001:2018** 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. MSU 11. Suralaya 8 OMU 12. Labuan OMU 13. Lontar OMU 14. Pelabuhan Ratu OMU 15. Adipala OMU 16. Cilegon OMU	12 Maret 2021 March 12, 2021	PT Sucofindo	13 Februari 2023 February 13, 2023
4	**ISO 28000:2007 /** **SNI ISO 28000:2009** 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. Suralaya 8 OMU 11. Labuan OMU 12. Lontar OMU 13. Pelabuhan Ratu OMU 14. Adipala OMU 15. Cilegon OMU	14 Februari 2020 February 14, 2020	PT Sucofindo	13 Februari 2023 February 13, 2023

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Sertifikasi Certification Body	Masa Berlaku Sertifikasi Valid Until
5	**SMK3** 1. Suralaya PGU 2. Priok POMU 3. Saguling POMU 4. Kamojang POMU 5. Semarang PGU 6. Mrica PGU 7. Grati POMU 8. Bali PGU 9. MSU 10. Suralaya 8 OMU 11. Labuan OMU 12. Lontar OMU 13. Pelabuhan Ratu OMU 14. Adipala OMU 15. Cilegon OMU	Berbeda Setiap Unit Different for each unit	PT Sucofindo	Berbeda Setiap Unit Different for each unit
6	**ISO 55001:2014** 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. MSU 11. Suralaya 8 OMU 12. Labuan OMU 13. Lontar OMU 14. Pelabuhan Ratu OMU 15. Adipala OMU 16. Cilegon OMU	27 Oktober 2021 October 27, 2021	PT BSI Group Indonesia	26 Oktober 2024 October 26, 2024
7	**ISO 50001:2018** 1. Kantor Pusat Head Office 2. Suralaya PGU 3. Priok POMU 4. Saguling POMU 5. Kamojang POMU 6. Semarang PGU 7. Mrica PGU 8. Grati POMU 9. Bali PGU 10. Pangkalan Susu OMU 11. Suralaya 8 OMU 12. Labuan OMU 13. Lontar OMU 14. Pelabuhan Ratu OMU 15. Adipala OMU 16. Cilegon OMU	21 Desember 2020 December 21, 2020	PT Sucofindo	20 Desember 2023 December 20, 2023

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI TAHUN 2021
AWARDS AND CERTIFICATES IN 2021

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Tanggal Perolehan Date Obtained	Badan Pemberi Sertifikasi Certification Body	Masa Berlaku Sertifikasi Valid Until
8	**ISO 27001:2013** (DIV ITE Kantor Pusat) Head Office ITE Division)	09 Oktober 2020 October 9, 2020	PT Sucofindo	08 Oktober 2023 October 8, 2023
9	**ISO 22301:2019** (Kantor Pusat dan Priok POMU) (Head Office and Priok POMU)	05 Februari 2021 February 5, 2021	PT BSI Group Indonesia	4 Februari 2024 February 4, 2024
10	**ISO 37001:2016** (Kantor Pusat) (Head Office)	18 April 2020 April 18, 2020	PT Mutuagung Lestari	18 April 2023 April 18, 2023



VISI, MISI, MOTTO DAN KOMPETENSI INTI PERUSAHAAN

VISION, MISSION, MOTTO, AND CORE COMPETENCIES

Secara Berkala Indonesia Power melakukan peninjauan terhadap Visi dan Misi Perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan dinamika industri kelistrikan nasional.

Indonesia Power regularly reviews the Company Vision and Mission to ensure that they conform to the dynamics in the national electricity industry.

VISI
VISION

Menjadi Perusahaan Energi Terbaik yang Tumbuh Berkelanjutan

To be The Best Sustainable Energy Company

Penjelasan Visi
Elaboration of Our Vision:

1) **Perusahaan Energi**
Merupakan perusahaan penyedia solusi energi.

2) **Terbaik**
Diakui sebagai Perusahaan yang memiliki kinerja terbaik, yaitu memiliki kinerja operasional pembangkit kelas dunia.

3) **Tumbuh Berkelanjutan**
Memiliki bisnis yang mendukung kelangsungan usaha Indonesia Power dalam jangka panjang, baik secara nasional maupun global yang meliputi pengembangan pembangkit *low carbon energy*, dan bisnis *Beyond* kWh.

1) **Energy Company**
A company providing energy solution.

2) **Best**
Acknowledged as a Company with the best performance, i.e. power generation with world-class operational performance.

3) **Sustainable Growth**
Possessing a business that supports Indonesia Power's business continuity in the long run, both nationally and globally, covering the development of low-carbon power plants, and Beyond kWh business.

VISI, MISI, MOTTO DAN KOMPETENSI INTI PERUSAHAAN
VISION, MISSION, MOTTO, AND CORE COMPETENCIES

MISI
MISSION

Menyediakan Solusi Energi yang Andal, Inovatif, Ramah Lingkungan dan Melampaui Harapan Pelanggan.

Providing Reliable, Innovative and Environmental-friendly Energy Solutions, Beyond Customer Expectations

Penjelasan Misi
Elaboration of Our Mission:

1) **Solusi Energi**
Indonesia Power menyelenggarakan bisnis penyedia solusi energi, baik di bidang penyediaan tenaga listrik (kWh) maupun *beyond* kWh.

2) **Andal**
Indonesia Power menjalankan bisnis solusi energi yang selalu tersedia dengan baik pada saat dibutuhkan oleh pelanggan.

3) **Inovatif**
Indonesia Power menjalankan bisnis solusi energi berupa produk-produk yang dikembangkan dari peluang-peluang baru, mengikuti tren kebutuhan dan perilaku pelanggan, yaitu *smart mobility, smart living, smart lifestyle* guna memberikan nilai tambah pada pelanggan dan Perusahaan.

4) **Ramah Lingkungan**
Indonesia Power menjalankan bisnis solusi energi yang ramah lingkungan sebagai bagian dari *Sustainability Development Goals* (SDGs) dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), penggunaan energi hijau dan bersih, pemenuhan regulasi terkait baku mutu lingkungan, melakukan *Reuse, Reduce, Recycle* (3R) dan memelihara hubungan dengan masyarakat sekitar Perusahaan.

5) **Melampaui Harapan Pelanggan**
Indonesia Power menjalankan bisnis solusi energi yang mampu melampaui dan mengikuti tren kebutuhan, perilaku dan harapan pelanggan.

1) **Energy Solutions**
Indonesia Power conducts a business to provide energy solution, both in electricity supply (kWh) and beyond kWh.

2) **Reliable**
Indonesia Power runs an energy solutions business which is always available at the time the customers need them.

3) **Innovative**
Indonesia Power runs an energy solutions business that provides products developed from new opportunities, follows the trend shaped by customer needs and behavior, such as smart mobility, smart living, and smart lifestyle to give added value for the customers and the Company.

4) **Environmentally Friendly**
Environmentally-friendly means that Indonesia Power runs an environmentally-friendly energy solutions business as a part of the Sustainability Development Goals (SDGs) aiming at reducing greenhouse gas emission, utilizing green and clean energy, meeting regulations on environmental quality standards, implementing Reduce, Reuse, Recycle (3R), and maintaining relationship with the community surrounding the Company.

5) **Exceeding Customer Expectation**
Indonesia Power runs an energy solutions business that is capable of exceeding and following the trends of customers' needs, behavior, and expectation.

Persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi dan Misi Perusahaan

Approval from the Board of Commissioners and the Board of Directors for the Company Vision, Mission and Values

Tahun 2021 Indonesia Power melakukan *review* kesesuaian Visi dan Misi Perusahaan terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang dihadapi, dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan para *Senior Leader.*

Visi dan Misi Perusahaan yang berlaku saat ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 137.K/010/IP/2021 tentang Visi, Misi dan Motto Indonesia Power. Selanjutnya sosialisasi atas pembaharuan penjelasan Visi Perusahaan dilakukan pertama kali pada bulan November 2021, yang dihadiri juga Direksi dan *Senior Leader* dari PT PLN (Persero) selaku pemegang saham Indonesia Power, termasuk ke seluruh pegawai pada bulan Januari 2022.

In 2021, Indonesia Power performed a review on the conformity between the Vision and Mission and internal and external conditions faced. This activity involved the Board of Directors, the Board of Commissioners, and Senior Leaders.

The currently applicable Company Vision and Mission have been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors, as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 137.K/010/IP/2021 on Vision, Mission, and Motto of PT Indonesia Power. Further, the updated elaboration of the Company's Vision was first introduced in November 2021, in the presence the Board of Directors and Senior Leaders of PT PLN (Persero) as the Indonesia Power's shareholder. The new elaboration was also introduced to all employees in January 2022.

Moto Perusahaan

Motto Perusahaan

#EnergyofThings

Membangun kesadaran kepada Pelanggan dan Stakeholder bahwa setiap aktivitas membutuhkan energi dan Indonesia Power memiliki keunggulan dalam penyediaan solusi energi, baik di bidang penyediaan tenaga listrik (kWh) maupun *beyond* kWh.

Building Customers and Stakeholders' awareness that every activity requires energy and Indonesia Power has the advantage in providing energy solution, both in electricity supply (kWh) and beyond kWh.

Kompetensi Inti Perusahaan

Corporate Core Competency

Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit

Power Plant Operations and Maintenance

Pengelolaan pembangkit dengan kekuatan pada pengoperasian dan pemeliharaan berdasarkan tata kelola sesuai praktik terbaik (*best practice*) dan metode rekayasa (*engineering method*) yang ekselen.

Power plant management with an advantage in the operations and maintenance based on a governance that refers to the best practices and excellent engineering methods.

Pengembangan Bisnis Solusi Energi

Energy Solutions Business Development

Pengembangan bisnis penyediaan solusi energi yang meliputi bisnis penyediaan tenaga listrik atau kWh maupun bisnis *beyond* kWh.

The development of a business that provides energy solutions, covering electricity supply (kWh) and beyond kWh.

TATA NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE VALUES AND CULTURE

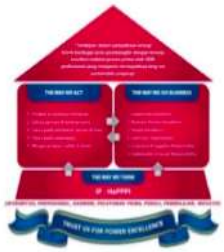
4promise PLN Terbaik → AKHLAK

Tahun 2020
2020

IP - Aksi Tahun 2015
IP - Aksi 2015



Indonesia Power Way Tahun 2011
Indonesia Power Way 2011



Tahun 2004 IP-HaPPPI
IP-HaPPPI 2004

Integritas Integrity
Profesional Professional
Harmoni Harmony
Pelayanan Prima Excellent Service
Peduli Care
Pembelajar Learner
Inovasi Innovation

12 Dimensi Perilaku Tahun 2020
12 Dimensions of Conduct 2020

1. Integritas Integrity
2. Sikap Melayani Attentive
3. Komunikasi Communication
4. Kerja Sama Cooperation
5. Tanggung Jawab Responsibility
6. Kepemimpinan Leadership
7. Pengambilan Keputusan Decision Making
8. Pemberdayaan Empowerment
9. Peduli Biaya dan Kualitas Cost-Effective and Quality
10. Adaptif Adaptive
11. Keselarasan Tujuan Common Goal
12. Keseimbangan Tugas dan Hubungan Sosial Balance of Social Relations and Duties

Perkembangan Nilai Perusahaan sejak Indonesia Power didirikan pada tanggal 3 Oktober 2000 telah mengalami perubahan beberapa kali. Pertama, nilai budaya IP-HaPPPI yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor 97.K/10/IP/2004, yaitu Integritas; Profesional; Harmoni; Pelayanan Prima; Peduli; Pembelajar; Inovatif. Kedua, dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip yang menjadi acuan cara berpikir dan bertindak untuk selanjutnya menjadi budaya Perusahaan melalui Indonesia Power Way yang ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2011 dan selanjutnya diperkuat dengan terbitnya Keputusan Direksi Nomor 03.K/010/IP/2012 tanggal 11 Januari 2012 tentang Budaya Perusahaan PT Indonesia Power. Ketiga, Indonesia Power melakukan transformasi Indonesia Power Way yang semula berlandaskan nilai IP-HaPPI menjadi berlandaskan nilai IP AkSi (Integritas, Profesional, Proaktif dan Sinergi). Keempat, PT Indonesia Power dalam transformasi core values, mengikuti proses perubahan tata nilai PT PLN dari PLN Terbaik kemudian I Promise, sampai dengan AKHLAK. Transformasi core values IP AKSI menjadi AKHLAK, ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 22.K/010/IP/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Tata Nilai Indonesia Power.

Indonesia Power Values, which was established on October 03, 2000, have been amended for several times. First, IP-HaPPPI culture values as stipulated by the Decree of the Board of Directors No. 97.K/10/IP/2004, i.e. Integritas (Integrity); Profesional (Professional); Harmoni (Harmonious); Pelayanan Prima (Excellent Service); Peduli (Caring); Pembelajar (Learner); Inovatif (Innovative). Second, as elaborated into the principles for the way to think and to conduct, subsequently becoming the Corporate Culture via Indonesia Power Way stipulated on October 03, 2011 and was further strengthened with the issuance of the Decree of the Board of Directors No. 03.K/010/IP/2012 dated January 11, 2012 on PT Indonesia Power Corporate Culture. Third, Indonesia Power transformed the Indonesia Power Way from previously based on IP-HaPPPI to be based on IP AkSi, i.e. Integritas (Integrity), Profesional (Professional), Proaktif (Proactive), and Sinergi (Synergy)). Fourth, in transforming the core values, PT Indonesia Power followed the change of PT PLN values from PLN Terbaik, I Promise to AKHLAK. The transformation from IP AkSi AKHLAK was stipulated under the Decree of the Board of Directors No. 22.K/010/IP/2021 dated March 12, 2021 on Indonesia Power Values.

Skema Tata Nilai AKHLAK
Scheme of AKHLAK Values



TATA NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE VALUES AND CULTURE

Tabel Definisi, Kata Kunci dan Panduan Perilaku Tata Nilai AKHLAK

Tabel of Definitions, Keywords, and Behaviour Guideline of AKHLAK values

6 TATA NILAI 6 Values		DEFINISI Definition	KATA KUNCI Keyword	PANDUAN PERILAKU Behavior Guideline
A	**AMANAH** Trustworthy	Memegang teguh Kepercayaan yang diberikan Upholding mandated trust	Integritas, Tulus, Konsisten (*integrity, honest & consistent*), Dapat dipercaya Having Integrity, Honest, Consistent, and Trustworthy	1. Memenuhi janji dan Komitmen 2. Bertanggung-jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan 3. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika 1. Fulfilling promises and commitment 2. Responsible for duties, decisions, and actions taken 3. Adhering to moral and ethical values
K	**KOMPETEN** Competent	Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Continuously learning and developing capabilities	Kinerja Terbaik, Sukses, Keberhasilan, Learning *agility*, Ahli di bidangnya Best Performance, Success, Learning Agility, Expert in its field	1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain Belajar 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik 1. Improving competence to answer to ever-changing challenges 2. Helping others to learn 3. Finishing duties with the best quality
H	**HARMONIS** Harmonious	Saling peduli dan menghargai perbedaan Care for each other and respecting diversity	Peduli (*caring*), Perbedaan Caring, Diversity	1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif 1. Respecting others regardless of their background 2. Helpful to others 3. Building favorable work environment
L	**LOYAL**	Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa negara Dedicated and prioritizing nation's interests	Komitmen, Dedikasi (rela berkorban), Kontribusi Commitment, Dedication, Contribution	1. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara 2. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar 3. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika 1. Maintaining the honor of fellow employees, leaders, SOEs, and Country 2. Willing to sacrifice for the greater good 3. Obeying leaders as long as in compliance with the laws and ethics
A	**ADAPTIF** Adaptable	Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan Constantly innovating and enthusiastic in driving and facing changes	Inovasi, Antusias terhadap perubahan, Proaktif Innovation, Enthusiasm for Change, Proactive	1. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik 2. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi 3. Bertindak proaktif 1. Easily adaptable to bettering self 2. Make continuous improvements to keep up with technological development 3. Being proactive

6 TATA NILAI 6 Values		DEFINISI Definition	KATA KUNCI Keyword	PANDUAN PERILAKU Behavior Guideline
K	**K**OLABORATIF Collaborative	Membangun kerja sama yang sinergis Building synergic cooperation	Kesediaan bekerjasama, Sinergi untuk hasil yang lebih baik Willingness to cooperate, Synergy for better outcome	1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama 1. Providing opportunity for other parties to contribute 2. Open to cooperation that delivers added value 3. Encouraging the utilization of various resources for common goals

Program Budaya Perusahaan Tahun 2021

Corporate Culture Program in 2021

Program Budaya Perusahaan yang dijalankan dalam tahun berjalan berdasarkan hasil evaluasi implementasi program budaya meliputi OFI *(Opportunity for Improvement)* to AFI (*Action for Improvement*), guna memperbaiki program dan mengukur dampak pada efektivitas penyelenggaraan program Budaya Perusahaan, sehingga ada penyesuaian program di tahun 2021, namun tidak menghilangkan program yang sudah berjalan.

The Corporate Culture Program run in the current year was evaluated based on the Opportunity for Improvement (OFI) to Action for Improvement (AFI) in order to improve the program and measure the impact of the program's effectiveness. An adjustment was made in 2021, without overlooking the currently implemented actions.

Program Budaya Perusahaan 2021 Corporate Culture Program In 2021	Penjelasan	Elaboration
Internalisasi *Core Values* AKHLAK Internalisasi Core Values AKHLAK	1. Penyampaian Tema Budaya dan *Story Telling* melalui email setiap bulannya dan instagram korporat; 2. Penyampaian Buku Saku *Core Values* AKHLAK kepada seluruh pegawai; 3. Penyampaian *E-Flyer Core Values* AKHLAK melalui *email* dan WAG pada tanggal 5-9 Maret 2021; 4. Penyampaian materi melalui Materi CoC Korporat; 5. Internalisasi melalui Video *Series* SEBAYA (SEmenit BAreng Budaya).	1. Promotion of Culture Theme and Story Telling via e-mail on monthly basis and Corporate Instagram account; 2. Distribution of AKHLAK Core Values handbook to all employees; 3. Distribution of AKHLAK Core Values e-flyer via e-mail and WhatsApp Group on March 5-9, 2021; 4. Dissemination of Corporate CoC materials; 5. Internalization via SEBAYA (Semenit Bareng Budaya - One Minute with Culture) video series.
***Leadership Quality Feedback* (LIQUID) Internal** Leadership Quality Feedback (LIQUID) Internal	• LIQUID bertujuan untuk mengumpulkan *feedback* budaya kepemimpinan pegawai struktural *level* Penyelia Atas sampai dengan Eksekutif Utama • Tahun 2021 tercapai 99% dari target 90% Pegawai Struktural melakukan tahapan LIQUID (mendapatkan *feedback* kepemimpinan oleh staf; membuat resolusi atas *feedback* dan; resolusi tersebut dinilai oleh stafnya. • Hasil LIQUID, selain mendapatkan informasi persepsi pegawai terhadap karakteristik Leader secara Korporat maupun Divisi dan Unit; juga menjadi salah satu informasi dalam pengambilan keputusan terkait program pengembangan kepemimpinan di Indonesia Power.	• LIQUID aims to collect feedbacks on leadership culture shown by Senior Supervisor to Chief Executive-level structural employees. • In 2021, through the program, 99% (out of the target of 90%) of the structural employees received the feedback from their staff; made resolutions based on the feedback, and had such resolutions evaluated by the staff. • The results of the LIQUID, apart from providing information on employees' perspective on the Corporate, Divisional, and Unit Leaders' characteristics, also provide information for decision making pertaining leadership development program at Indonesia Power.

TATA NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
CORPORATE VALUES AND CULTURE

Program Budaya Perusahaan 2021 Corporate Culture Program In 2021	Penjelasan	Elaboration
Program *Leader* Sapa Budaya Leader Sapa Budaya Program	• Program *Leader* Sapa Budaya merupakan saluran komunikasi *Leader* dalam berinteraksi dengan Insan IP terutama terkait penerapan tata nilai dan budaya Perusahaan. • Tujuan program ini dilaksanakan untuk internalisasi tata nilai dan mendukung keterlibatan Insan Indonesia Power dalam Program Penguatan Budaya. • Pelaksanaan Leader Sapa Budaya Tahun 2021: a. Leader Sapa Budaya DIRSDM (Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi) pada tanggal 20 April 2021, diikuti oleh Eksekutif Senior - Eksekutif Utama Struktural, MADM (Manajer Administrasi) /MSMH (Manajer SDM dan Humas) dan Pengelola Budaya • *Leader* Sapa Budaya Pimpinan Unit di Unit masing-masing , periode 21 April - 30 April 2021, yang diikuti pegawai di unit masing-masing.	• Leader Sapa Budaya Program is a communication medium for Leaders in interacting with IP Personnel, particularly pertaining to the Corporate Values and Culture. • The program is run for internalizing the core values and encouraging the engagement of Indonesia Power Personnel in the Culture Strengthening Program. • Implementation of Leader Sapa Budaya Program 2021: a. Leader Sapa Budaya by DIRSDM (Director of Human Capital and Administration) on April 20, 2021, participated by Structural Senior Executives - Chief Executives, MADM (Manager of Administration)/MSMH (Manager of Human Capital and Public Relations), and Culture Manager • Leader Sapa Budaya by Unit Leader at each Unit on April 21-30, 2021, participated by employees at respective Units.
***Briefing Code of Conduct* (CoC)**	• Tahun 2021, Pejabat Struktural (Eksekutif Utama/ Eksekutif Senior, Eksekutif dan Penyelia Atas) telah menyampaikan 11 materi CoC Korporat dalam *Briefing* CoC dengan kehadiran peserta Briefing CoC 97%.	• In 2021, Structural Officials (Chief Executive/ Senior Executives, Executives, and Senior Supervisors) have delivered 11 Corporate CoC materials in the CoC Briefing, whose attendance rate was 97%.
Program Budaya Spesifik: DAYA CERIA Specific Culture Program: DAYA CERIA	• Tahun 2021, Penguatan program budaya spesifik: DAYA CERIA (Data tepercaYA | Cek Evaluasi mitigasi Risiko dan Akurasi keputusan) dilakukan dengan mengidentifikasi Critical Few Behavior dan melakukan integrasi Program DAYA CERIA pada Program *Sub Strategic Initiative* – Transformasi Budaya Kerja Digital. • Monitoring Program DAYA CERIA di setiap unit dilakukan melalui *monitoring action plan survey* HRSE.	• In 2021, the strengthening of specific culture program: DAYA CERIA (Reliable data Check evaluation, risk mitigation, and accuracy of decision) was performed by identifying Critical Few Behaviors and integrating the DAYA CERIA Program into the Sub-Strategic Initiative Program – Digital Work Culture Transformation. • The monitoring of DAYA CERIA Program at each Unit was sought by the HRSE survey action plan.
Program Budaya Inti: PLN123 Core Culture Program: PLN123	• Program penguatan budaya diperlukan sebagai enabler Tranformasi PLN dalam memastikan kesiapan iklim kerja dan budaya yang mendukung transformasi berjalan. Program penguatan budaya PLN1,2,3 diimplementasi Indonesia Power dalam bentuk program bernama IDEA Light Up for IP Great. • PT PLN (Persero) melakukan coaching penguatan budaya PLN123 melalui 3 kali pelaksanaan coaching cycle 1, 2 dan 3, di mana Indonesia Power masuk kategori Outstanding untuk setiap sesi coaching. • Puncak penilaian implementasi program penguatan budaya PLN123 dilaksanakan dalam kegiatan Culture Festival PLN Group pada tanggal 31 Agustus 2021, dengan Indonesia Power memperoleh Juara 2 Unit Kerja Implementasi Budaya Terbaik Kategori Anak Perusahaan dan Juara 1 Tim Ranger Terbaik Kategori Anak Perusahaan.	• Culture strengthening program is necessary as an enabler for PLN Transformation to ensure the readiness of work climate and culture that support the ongoing transformation. PLN123 culture strengthening program was implemented at Indonesia Power under IDEA Light Up for IP Great program. • PT PLN (Persero) provides the three (3) coaching sessions for PLN123 culture strengthening under the coaching cycles 1, 2, and 3. In each cycle, Indonesia Power was recognized for its outstanding quality. • The peak of PLN 123 culture strengthening program implementation assessment was performed during PLN Group Culture Festival on August 31, 2021. Indonesia Power earned the 2nd Winner in Best Culture Implementing Work Unit in Subsidiary Category and 1st Winner in Best Ranger Team in Subsidiary Category.

Program Budaya Perusahaan 2021 Corporate Culture Program In 2021	Penjelasan	Elaboration
Semesta Budaya Tahun 2021 Semesta Budaya 2021	• Semesta Budaya IP (Semangat Bersama Implementasi Budaya Indonesia Power) merupakan salah satu upaya Perusahaan dalam memotivasi dan meningkatkan partisipasi peran semua pihak dalam terinternalisasinya Budaya Perusahaan dengan optimal • Tahun 2021 kegiatan Semesta Budaya IP dilaksanakan secara virtual pada tanggal 16-18 November 2021 dengan tema "*with Culture, We Generate Future Energy*". Rangkaian kegiatan dimulai dari *Strategic Planning* dan *Implementation* (April - September 2021) sampai dengan *On Desk Assesment* dalam rangka mengukur implementasi dan *deployment* program penguatan budaya PLN 123 - IDEA *Light Up* for IP *Great* dan Tata Nilai AKHLAK di Perusahaan • Hasil Semesta Budaya yaitu terpilih 3 Tim Ranger dan 3 Unit Implementasi Budaya Terbaik Indonesia Power, sebagai berikut: 1. Tim *Ranger* Terbaik - Tim *Ranger* Terbaik 1 : Grati *Power Generation and O&M Services Unit* (GRT POMU) - Tim *Ranger* Terbaik 2 : PLTGU Cilegon *Operation and Maintenance Services Unit* (CLG OMU) - Tim *Ranger* Terbaik 3 : PLTU Jeranjang *Operation and Maintenance Services Unit* (JRJ OMU) 2. Unit Implementasi Budaya Terbaik - Unit Terbaik 1 : PLTGU Cilegon *Operation and Maintenance Services Unit* (CLG OMU) - Unit Terbaik 2 : Grati *Power Generation and O&M Services Unit* (GRT POMU) - Unit Terbaik 3 : Priok *Power Generation and O&M Services Unit* (PRO POMU)	• Semesta Budaya IP (Semangat Bersama Implementasi Budaya Indonesia Power - Indonesia Power's Collective Spirit of Cultural Implementation) is among the Company's endeavor to encourage participation of all parties to chive optimal internalization of the Corporate Culture. • In 2021, Semesta Budaya IP was held virtually on November 16-18, 2021, bearing the theme, "With Culture, We Generate Future Energy". The event was started by Strategic Planning and Implementation (April-September 2021), followed by On-Desk Assessment to measure the implementation and deployment of PLN 123 culture strengthening program - IDEA Light Up for IP Great and AKHLAK Values in the Company. • Semesta Budaya acknowledged three (3) best Ranger Teams and three (3) Best Culture Implementing Unit in Indonesia Power, as follows: 1. Best Ranger Teams - 1st Best Ranger Team: Grati Power Generation and O&M Services Unit (GRT POMU) - 2nd Best Ranger Team: CCPP Cilegon Operation and Maintenance Services Unit (CLG OMU) - 3rd Best Ranger Team: SPP Jeranjang Operation and Maintenance Services Unit (JRJ OMU) 2. Best Culture Implementing Unit - 1st Best Unit: CCPP Cilegon Operation and Maintenance Services Unit (CLG OMU) - 2nd Best Unit: Grati Power Generation and O&M Services Unit (GRT POMU) - 3rd Best Unit: Priok Power Generation and O&M Services Unit (PRO POMU)
Change Agent / Ranger	Pengelolaan *Change Agent / Ranger* di Indonesia Power Tahun 2021 sebagai berikut: 1. Penjaringan dan Evaluasi calon *Change Agent / Ranger* dengan 2 metode: a. Jalur Rekrutmen Unit, dalam hal ini proses pemilihan dan evaluasi *Change Agent/ Ranger* dilakukan oleh masing-masing Unit, dan disampaikan ke Kantor Pusat untuk penetapan sebagai *Change Agent/Ranger* b. Jalur Rekrutmen Terbuka / *Open Recruitment*, dalam hal ini proses pemilihan dan evaluasi *Change Agent/Ranger* dilakukan secara terbuka dilakukan oleh Kantor Pusat untuk kemudian diseleksi dan ditetapkan sebagai *Change Agent/Ranger.* 2. Penetapan Change Agent / Ranger melalui Keputusan Direksi. 3. Pembekalan *Change Agent / Ranger* 4. *Monitoring* aktivitas *Change Agent / Ranger* 5. Evaluasi dan rewarding *Change Agent / Ranger*	Change Agent/Ranger management at Indonesia Power in 2021 was as follows: 1. Selection and evaluation of Change Agent/Ranger candidates with two (2) methods: a. Unit recruitment, where the selection and evaluation of Change Agent/Ranger are performed by each Unit, to be reported to the Head Office for determination as Change Agent/ Ranger b. Open Recruitment, where the selection and evaluation of Change Agent/Ranger are performed transparently by the Head Office, to be selected and determined as Change Agent/ Ranger. 2. The appointment of a Change Agent/Ranger is determined through Board of Directors Decree. 3. Briefing for Change Agent/Ranger 4. Monitoring of Change Agent/Ranger activities 5. Evaluation of and rewarding for Change Agent/ Ranger

BIDANG USAHA
LINE OF BUSINESS

Bidang Usaha Menurut Anggaran Dasar
Line of Business According to Articles of Association

Mengacu pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, bidang usaha Indonesia Power adalah menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka menunjang/mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Kepatutan serta Etika Bisnis pada Perseroan Terbatas, yang meliputi produk dan layanan sebagai berikut:

1. Pembangkitan Tenaga Listrik;
2. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
   a. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis YBDI;
   b. Jasa investigasi, desain, operasi dan pemeliharaan serta persewaan peralatan pembangkitan;
   c. Konstruksi Bangunan Elektrikal;
   d. Instalasi/Pemasangan mesin dan Peralatan Industril
   e. Pendidikan Teknik Swasta;
   f. Produksi, perbaikan dan perdagangan dan peralatan tenaga listrik;
   g. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI;
   h. Pertambangan Batubara;
   i. Industri Produk dari Batubara;
   j. Produksi pengolahan, pengangkutan dan perdagangan gambut, biomass dan gas alam;
   k. Pengusahaan tenaga panas bumi;
   l. *Cogeneration*;
   m. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air.
3. Selain usaha yang disebutkan pada angka 2, Indonesia Power dapat melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.

Pursuant to Article 3 of the Company's Articles of Association, Indonesia Power's line of business is to engage in electricity business based on the principles of sound industry and commerce by implementing Limited Liability Company principles, and performing assignments from Majority Shareholder to support Shareholder's business activities by implementing Good Corporate Governance Principles, Fairness, and Business Ethics in Limited Liability Companies, covering the following products and services:

1. Electricity power generation
2. Electricity-supply related businesses, i.e.:
   a. Engineering activities and relevant technical consultancy;
   b. Investigation, design, operations and maintenance, and power generation equipment rental services;
   c. Electrical building construction;
   d. Installation of industrial equipment and machineries;
   e. Private technical education;
   f. Production, repair, and trade of electrical equipment;
   g. Wholesale of solid, liquid, and gas fuel and relevant products;
   h. Coal mining;
   i. Coal derivatives industry;
   j. Processing, transport, and trade of peat, biomass, and natural gas;
   k. Geothermal power concession;
   l. Cogeneration;
   m. Water resource infrastructure construction;
3. Apart from the businesses mentioned in point 2, Indonesia Power is capable of conducting trades and/or supporting business activities for optimizing the utilization of resources at hand, including giving assignments to Subsidiaries.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan
Current Business Activities

Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini oleh Indonesia Power adalah:

Indonesia Power currently performs the following business activities:

1

Pembangkitan Tenaga Listrik

Electricity power generation

2

Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik, (*Beyond* kWh), antara lain jasa operasi dan pemeliharaan.

Electricity-supply related businesses (Beyong kWh), i.e.: operation & maintenance.

Terkait kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, Indonesia Power dapat memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan maupun dilakukan oleh Perusahaan Patungan.

In relation to supporting business activities that optimize the utilization of existing resources, Indonesia Power can give assignment to Subsidiaries and/or Joint Ventures.



PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

Segmen usaha utama Indonesia Power adalah pembangkitan tenaga listrik dan penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan (*Operation and Maintenance*/O&M) pembangkit dengan mengelola pembangkit eksisting dan pembangkit milik PLN yang tersebar di Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi dan Papua.

Dalam melakukan kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik serta penyediaan jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit, Indonesia Power memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:
1. Empat (4) PGU (*Power Generation Unit*) sebagai penyedia fungsi operasional penyediaan tenaga listrik dalam mengelola pembangkit milik Perusahaan;
2. Empat (4) POMU (*Power Generation and O&M Service Unit*) sebagai penyedia fungsi operasional penyediaan tenaga listrik dalam mengelola pembangkit milik sendiri serta fungsi jasa pengelolaan O&M pembangkit bukan milik Perusahaan;
3. Tiga belas (13) OMU (*Operation and Maintenance Service Unit*) sebagai penyedia fungsi jasa pengelolaan O&M pembangkit bukan milik Perusahaan;
4. Satu (1) MSU (*Maintenance Service Unit*) sebagai penyedia fungsi kegiatan pemeliharaan pembangkit;
5. Satu (1) PRU (*Project Unit*) sebagai penyedia fungsi perencanaan dan pengendalian kegiatan proyek pembangkit milik Perusahaan.

Untuk mendukung usaha penyediaan tenaga listrik, Indonesia Power memiliki pembangkit di Area Sumatera yang dikelola oleh Anak Perusahaan.

Penyediaan tenaga listrik dilakukan melalui pembangkitan energi listrik dari pembangkit milik sendiri pada 4 PGU dan 4 POMU dengan total kapasitas terpasang sebesar 9.125 MW. Sedangkan dalam penyediaan jasa O&M pembangkit, Indonesia Power mengoperasikan dan memelihara pembangkit dengan total kapasitas terpasang sebesar 7.948 MW. Selain itu, Perusahaan juga memiliki Pembangkit di Area Sumatera dengan total kapasitas terpasang sebesar 89 MW.

PGU merupakan unit pembangkitan Indonesia Power yang terdiri dari:

Indonesia Power's main business segment involves electricity power generation and provision of operations and maintenance (O&M) services for managing existing power plants and PLN-owned power plants across Java, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, West Kalimantan, South Sulawesi, North Sumatra, South Sumatra, Jambi, and Papua.

To perform business activities of electricity power generation and provision of operations and maintenance services, Indonesia Power has an organizational structure consisting of:
1. Four (4) Power Generation Units (PGU) to run electricity supply operations for the Company's existing power plants;
2. Four (4) Power Generation and O&M Service Units (POMU) to run electricity supply operations for the Company's existing power plants and to manage O&M services for IPP's power plants;
3. Thirteen (13) Operations and Maintenance Service Units (OMU) to manage O&M Services for IPP's power plants;
4. One (1) Maintenance Service Unit (MSU) to perform maintenance for power plants;
5. One (1) Project Unit (PRU) to perform planning and controlling of power plant project activities.

To further support the electricity supply activity, Indonesia Power also owns power plants in Sumatra Area, which are managed by its Subsidiaries.

The electricity is supplied by power generation at existing power plants in 4 PGUs and 4 POMUs at a total installed capacity of 9,125 MW. Meanwhile, in the provision of O&M service for power plants, Indonesia Power operates and maintains a total installed capacity of 7,948 MW for power plants. The Company also owns several power plants in Sumatra Area, at a total installed capacity of 89 MW.

Indonesia Power's Power Generation Units (PGU) cover the following:

Tabel PGU (Power Generation Unit)
Power Generation Units (PGU)

No.	Unit	Jumlah Unit Number of Units	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location
1	Suralaya PGU	7	3.400,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Cilegon (Banten)
2	Mrica PGU	32	325,25	Hydro	Banjarnegara (Jateng) Banjarnegara (Central Java)
3	Semarang PGU	11	1.238,30	Thermal (Gas/Minyak) Thermal (Gas/Oil)	Semarang (Jateng) Semarang (Central Java)
4	Bali PGU	41	742,43	Thermal (Gas/Minyak) Thermal (Gas/Oil)	Denpasar (Bali)

POMU adalah unit pembangkitan dan jasa pembangkitan Indonesia Power meliputi:

Indonesia Power's Power Generation and O&M Service Units (POMU) cover the following:

Tabel POMU (Power Generation and O&M Service Unit)
Power Generation and O&M Service Units (POMU)

No.	Unit	Jumlah Unit Number of Units	Unit Pembangkitan (Unit Eksisting) Power Generation Unit (Existing Unit)		Jasa Pembangkitan (Jasa O & M) O&M Service Unit (OMU)		Lokasi Location
			Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	
1	Priok POMU	14	1.285,30	Thermal (Gas/Minyak) Thermal (Gas/Oil)	-	-	Tanjung Priok (Jakarta)
	• Priok Blok 3 Priok Block 3	3	-	-	752,20	Thermal (Gas)	Tanjung Priok (Jakarta)
	• Priok Blok 4 Priok Block 4	3	-	-	909,50	Thermal (Gas)	Tanjung Priok (Jakarta)
2	Saguling POMU	29	797,36	Hydro		-	Rajamandala – Bandung (Jawa Barat) Rajamandala – Bandung (West Java)
3	Kamojang POMU	7	377,00	Geothermal	-	-	Garut (Jawa Barat) Garut (West Java)
	• Ulumbu	4	-	-	10,00	Geothermal	Ulumbu (NTT) Ulumbu (East Nusa Tenggara)
4	Grati POMU	8	959,08	Thermal (Gas/Minyak) Thermal (Gas/Oil)	-	-	Pasuruan (Jawa Timur) Pasuruan (East Java)
	• Grati Blok 3 Grati Block 3	3	-	-	501,00	Thermal (Gas)	Pasuruan (Jawa Timur) Pasuruan (East Java)

PRODUK DAN JASA
PRODUCTS AND SERVICES

OMU merupakan unit jasa pembangkitan Indonesia Power meliputi:

Indonesia Power's Operations and Maintenance Service Units (OMU) are the following:

Tabel OMU (*Operation and Maintenance Services Unit*)
Operations and Maintenance Service Units (OMU)

No	Unit	Jumlah Unit Number of Units	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location
1	PLTU Banten 1 Suralaya OMU SPP Banten 1 Suralaya OMU	1	625,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Cilegon (Banten)
2	PLTU Banten 2 Labuan OMU SPP Banten 2 Labuan OMU	2	600,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Pandeglang (Banten)
3	PLTU Banten 3 Lontar OMU SPP Banten 3 Lontar OMU	3	945,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Tangerang (Banten)
4	PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	3	1.050,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Sukabumi (Jawa Barat) Sukabumi (West Java)
5	PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	1	660,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Cilacap (Jawa Tengah) Cilacap (Central Java)
6	PLTU Pangkalan Susu OMU SPP Pangkalan Susu OMU	4*	880,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Medan (Sumatera Utara) Medan (North Sumatra)
7	PLTGU Cilegon OMU SPP Cilegon OMU	3	740,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Cilegon (Banten)
8	PLTU Barru OMU SPP Barru OMU	2	100,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Barru (Sulawesi Selatan) Barru (South Sulawesi)
9	PLTU Jeranjang OMU SPP Jeranjang OMU	3**	90,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Lombok Barat (NTB) Lombok Barat (West Nusa Tenggara)
10	PLTU Sanggau OMU SPP Sanggau OMU	2	17,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Sanggau (Kalimantan Barat) Sanggau (West Kalimantan)
11	PLTU Sintang OMU SPP Sintang OMU	3	27,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Sintang (Kalimantan Barat) Sintang (West Kalimantan)
12	PLTU Holtekamp OMU SPP Holtekamp OMU	2	24,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Jayapura (Papua)
13	PLTU Berau OMU SPP Berau OMU	2	17,00	Thermal (Batubara) Thermal (Coal)	Kabupaten Berau (Kalimantan Timur) Berau Regency (East Kalimantan)

* Terdapat COD Unit 3 dan 4 pada November 2021 * Units 3 and 4 had COD in November 2021
** Terdapat COD Unit 2 pada Oktober 2021 ** Unit 2 had COD in October 2021

Pembangkit milik Perusahaan di Area Sumatera meliputi:

The Company's existing power plants in Sumatra Area include:

Tabel Pembangkit Milik Perusahaan di Area Sumatera
Existing Power Plants in Sumatra Area

Pembangkit Power Plant	Kapasitas Terpasang Installed Capacity	Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location
Keramasan	20,10	Thermal (Gas)	Palembang (Sumatera Selatan) Palembang (South Sumatra)
Jambi	20,10	Thermal (Gas)	Batanghari (Jambi)
Indralaya 11	48,80	Thermal (Gas)	Palembang (Sumatera Selatan) Palembang (South Sumatra)

Keramasan & Batanghari sudah habis kontrak sehingga status unit pembangkit dikembalikan ke Indonesia Power (Sunyaragi 3 & 4)
Contracts with Keramasan and Batanghari have expired, and therefore the power generation units are now returned to Indonesia Power (Sunyaragi 3 and 4).

Selain itu, Indonesia Power memiliki 4 Anak Perusahaan, 1 Perusahaan Patungan, 2 Perusahaan Asosiasi serta 5 (lima) *Special Purpose Company* (SPC) serta 1 (satu) Anak Perusahaan di bawah PT Putra Indotenaga dalam menunjang kegiatan usaha yang dijalankannya yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian Daftar dan Alamat Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Patungan dalam Bab ini.

Indonesia Power also owns four (4) Subsidiaries, one (1) Joint Venture, two (2) Associates, five (5) Special Purpose Companies (SPC), and one (1) Affiliate under PT Putra Indotenaga to support its business activities. These entities will be described in more details in the section of List of Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates of this Chapter.

Uraian Segmen Pasar
Market Segmentation

Segmen pasar Indonesia Power secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembangkitan tenaga listrik dan usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan pembangkit milik Perusahaan (*existing*) kepada pelanggan *single buyer*, PT PLN (Persero) melalui mekanisme penjualan energi listrik dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) lima tahunan. Sedangkan usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yaitu jasa operasi dan pemeliharaan (O&M) dilakukan kepada pembangkit milik PT PLN (Persero) melalui kontrak *asset manager contract* (AMC) dan kontrak *supporting* dan kontrak *Performance Based*.

Indonesia Power's market segment is generally divided into two (2), i.e. power generation and electricity supply-related businesses. The electricity supply is performed by existing power plants to to the single buyer, PT PLN (Persero), under the sale of electricity contained in quinquennial Power Purchase Agreement (PPA). Meanwhile, electricity supply-related businesses, i.e. Operations and Maintenance (O&M) Services are provided to PT PLN (Persero)'s power plants under Asset Manager Contract (AMC), Supporting Contract and Performance Based Contract.

Selain itu, Indonesia Power melalui Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan juga menjalankan diversifikasi bidang usaha energi lainnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Indonesia Power.

Through its Subsidiaries and Joint Ventures, Indonesia Power also diversifies its business to cover other energy segments in order to realize the Company's Vision and Mission.

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDER STRUCTURE AND COMPOSITION

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

Indonesia Power merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) dengan kepemilikan dan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

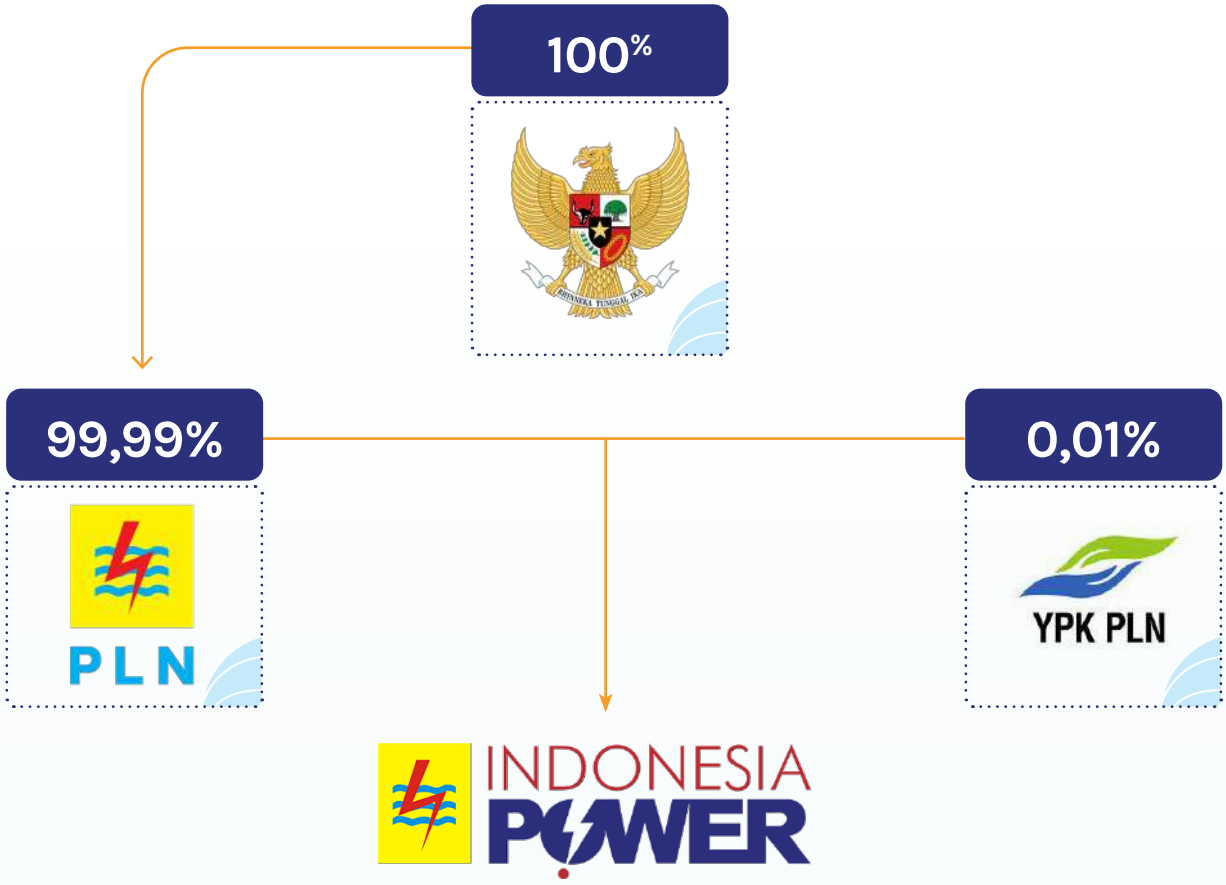
1. PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 1 dan 5.215.647.598 lembar Saham Seri 2, dan
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 lembar Saham Seri 2.

Indonesia Power is a subsidiary of PT PLN (Persero), with the following shareholder composition:

1. PT PLN (Persero), holding one (1) Series 1 share and 5,215,647,598 Series 2 shares, and
2. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero), holding one (1) Series 2 share.

Adapun skema struktur dan komposisi pemegang saham Perusahaan sampai dengan pemegang saham pengendali akhir *(ultimate shareholder)* dapat dilihat pada skema berikut:

The Company's shareholder structure and composition, up to the ultimate shareholder, can be found in the following scheme:



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Shareholding by the Board of Commissioners and the Board of Directors

Komposisi Saham Indonesia Power tidak ada yang dimiliki oleh Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan.

No members of Indonesia Power's Board of Commissioners and Board of Directors hold any of the Company's shares.

Pemegang Saham Dengan Kepemilikan 5% atau Lebih
5% Shareholders

Sampai dengan 31 Desember 2021, pemegang saham mayoritas Indonesia Power adalah PT PLN (Persero). Dengan demikian maka presentase kepemilikan saham 5% atau lebih adalah oleh PT PLN (Persero).

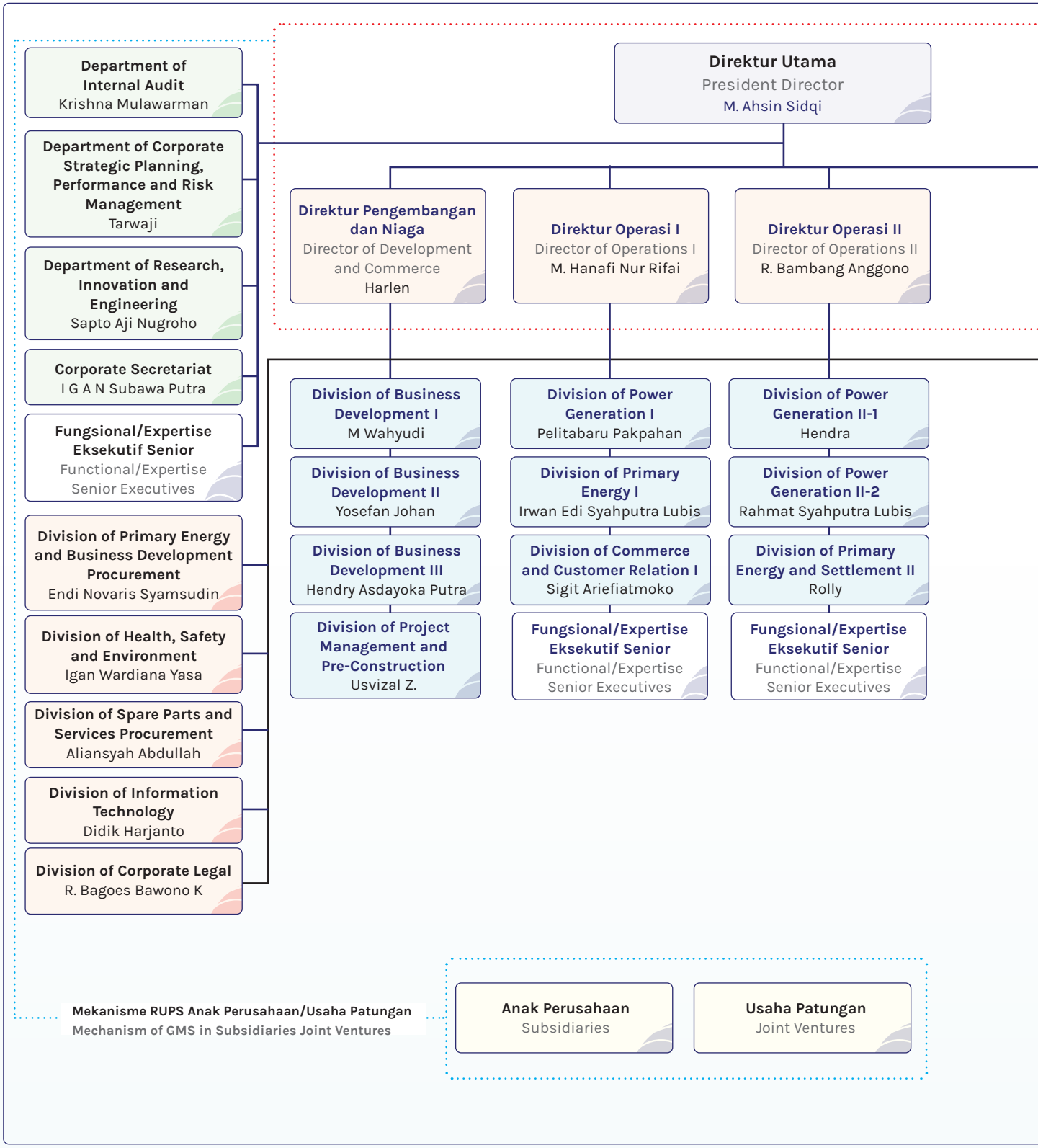
Until December 31, 2021, PT PLN (Persero) remained Indonesia Power's major shareholder. Therefore, PT PLN also holds the position as the Company's 5% shareholder.

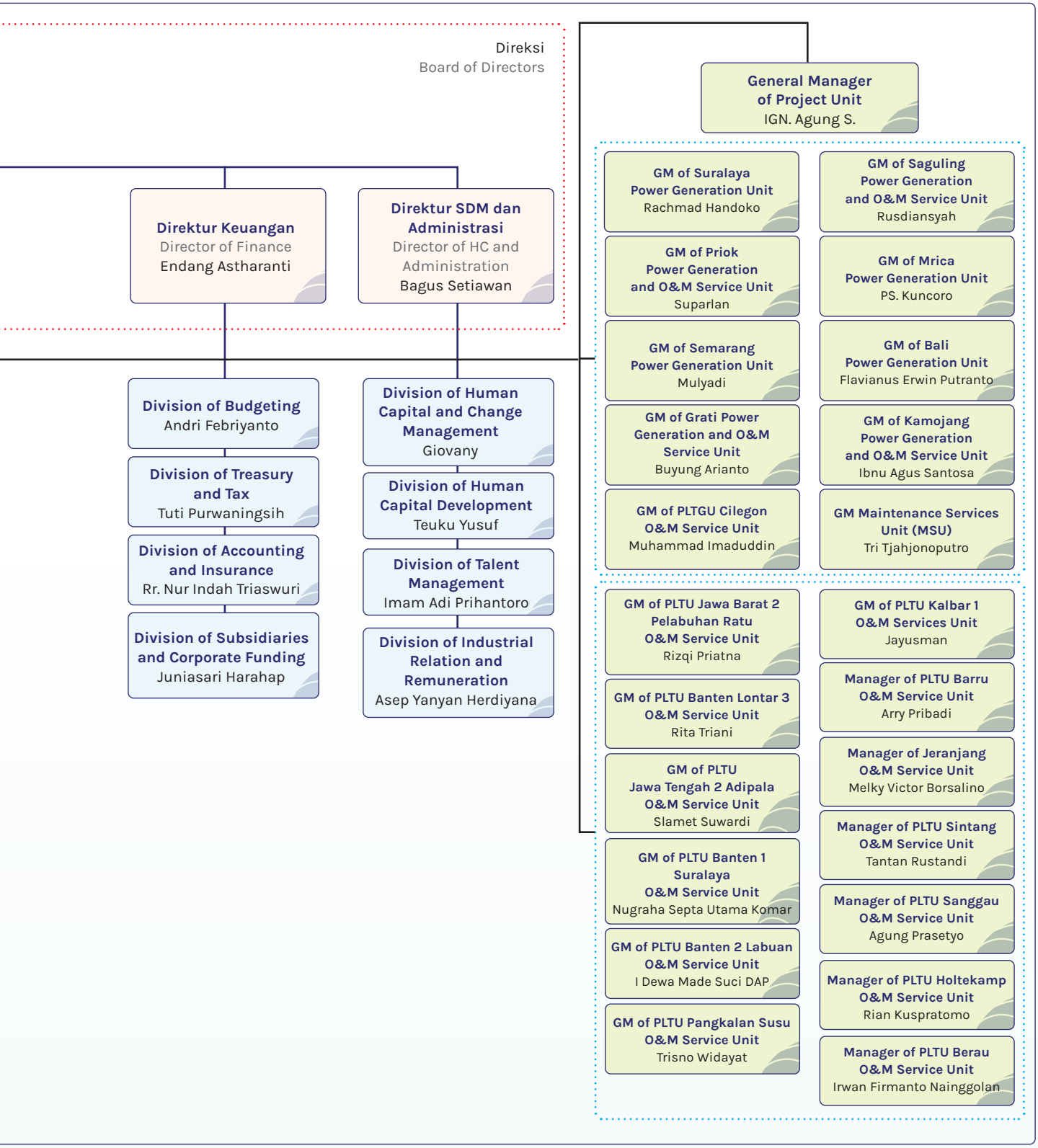


STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Indonesia Power ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 75.K/010/IP/2020 tanggal 4 Juni 2020 adalah sebagai

Indonesia Power organizational structure is contained in the Decree of the Board of Directors No. 75.K/010/IP/2020 dated June 4, 2020 as follows:




Direksi
Board of Directors
Direktur Keuangan
Director of Finance
Endang Astharanti
Direktur SDM dan Administrasi
Director of HC and Administration
Bagus Setiawan
Division of Budgeting
Andri Febriyanto
Division of Treasury and Tax
Tuti Purwaningsih
Division of Accounting and Insurance
Rr. Nur Indah Triaswuri
Division of Subsidiaries and Corporate Funding
Juniasari Harahap
Division of Human Capital and Change Management
Giovany
Division of Human Capital Development
Teuku Yusuf
Division of Talent Management
Imam Adi Prihantoro
Division of Industrial Relation and Remuneration
Asep Yanyan Herdiyana
General Manager of Project Unit
IGN. Agung S.
GM of Suralaya Power Generation Unit
Rachmad Handoko
GM of Priok Power Generation and O&M Service Unit
Suparlan
GM of Semarang Power Generation Unit
Mulyadi
GM of Grati Power Generation and O&M Service Unit
Buyung Arianto
GM of PLTGU Cilegon O&M Service Unit
Muhammad Imaduddin
GM of Saguling Power Generation and O&M Service Unit
Rusdiansyah
GM of Mrica Power Generation Unit
PS. Kuncoro
GM of Bali Power Generation Unit
Flavianus Erwin Putranto
GM of Kamojang Power Generation and O&M Service Unit
Ibnu Agus Santosa
GM Maintenance Services Unit (MSU)
Tri Tjahjonoputro
GM of PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu O&M Service Unit
Rizqi Priatna
GM of PLTU Banten Lontar 3 O&M Service Unit
Rita Triani
GM of PLTU Jawa Tengah 2 Adipala O&M Service Unit
Slamet Suwardi
GM of PLTU Banten 1 Suralaya O&M Service Unit
Nugraha Septa Utama Komar
GM of PLTU Banten 2 Labuan O&M Service Unit
I Dewa Made Suci DAP
GM of PLTU Pangkalan Susu O&M Service Unit
Trisno Widayat
GM of PLTU Kalbar 1 O&M Services Unit
Jayusman
Manager of PLTU Barru O&M Service Unit
Arry Pribadi
Manager of Jeranjang O&M Service Unit
Melky Victor Borsalino
Manager of PLTU Sintang O&M Service Unit
Tantan Rustandi
Manager of PLTU Sanggau O&M Service Unit
Agung Prasetyo
Manager of PLTU Holtekamp O&M Service Unit
Rian Kuspratomo
Manager of PLTU Berau O&M Service Unit
Irwan Firmanto Nainggolan

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Mohamad Oemar
Komisaris Utama
President Commissioner
(2020 – 2024)

Warga Negara Indonesia. Domisili di Jakarta, berusia 60 tahun. Meraih Magister Centre d'Etudes des Relations International et Strategie Brussels, Belgia (1993) dan Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada (1986).

An Indonesian Citizen. Domiciled in Jakarta, 60 years old. The holder of Master's degree from Centre d'Etudes des Relations International et Strategie Brussels, Belgium (1993) and Bachelor's Degree in International Relations from Gadjah Mada University (1986).



Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, pernah menjabat dalam berbagai penugasan baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain sebagai Sekretaris Wakil Presiden RI (2011-2021), Komisaris Pertamina Hulu Energi (2013-2019), Duta Besar LBBP RI untuk Italia merangkap Malta dan Siprus di Roma, Italia (2009-2011), Minister, *Deputy Chief of Mission* (DCM), KBRI (2006-2009), Direktur Perdagangan dan Perindustrian Multilateral pada Ditjen Multilateral (2004-2006), serta Kepala Subdit ECOSOC, Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral, Ditjen HELN (2000-2003).

Career Path
Prior to serving as the President Commissioner, he received various assignments both domestically and abroad, among others as Secretary to the Vice President of the Republic of Indonesia (2011-2021), the Commissioner of Pertamina Hulu Energi (2013-2019), Ambassador-at-Large of the Republic of Indonesia to Italy, Malta, and Cyprus in Rome, Italy (2009-2011), Minister, Deputy Chief of Mission (DCM) at the Embassy of the Republic of Indonesia (2006-2009), Director of Multilateral Trade and Industry at the Directorate General of Multilateral Cooperation (2004-2006), and Head of Sub-Directorate of ECOSOC, Directorate of Multilateral Economic Cooperation, Directorate General of Economic and Foreign Relations (2000-2003).

Dasar Hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 18 Maret 2020 (Periode Pertama).

Legal Basis for Appointment
Circular GMS dated March 18, 2020 (First Period)

Rangkap Jabatan
Duta Besar Indonesia untuk Perancis.

Concurrent Position
Ambassador-at-Large of the Republic of Indonesia to France.

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation
He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Power
-

Sertifikasi
-

Certifications
-

Iskandar Simorangkir

Komisaris
Commissioner
(2021 – 2025)

Warga Negara Indonesia. Domisili di Jakarta, berusia 58 tahun. Meraih gelar Doktor Ekonomi Spesialisasi Ekonomi Moneter dan Perbankan dari Universitas Indonesia (2007), Magister Ekonomi dari Vanderbilt University, Amerika Serikat (1997), dan Sarjana jurusan Manajemen dari Universitas Udayana (1986)

An Indonesian Citizen. Domiciled in Jakarta, 58 years old
The holder of Doctorate degree in Monetary Economics and Banking from the University of Indonesia (2007), Master's degree in Economics from Vanderbilt University, USA (1997), and Bachelor's degree in Management from Udayana University (1986).



Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, juga pernah menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia, Komisaris PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (2019-2021), Kepala Perwakilan Bank Indonesia (2014), Kepala Departemen Bank Indonesia (2013-2014) dan Kepala Biro/Grup Riset Ekonomi Bank Indonesia (2008-2012) dan Peneliti Madya Senior Bank Indonesia (2005-2008).

Career Path
Prior to serving as a Commissioner at Indonesia Power, he previously served several positions, including Assistant Governor of Bank Indonesia, Commissioner at PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (2019-2021), Head of Representative at Bank Indonesia (2014), Head of Department at Bank Indonesia (2013-2014), and Head of Economic Research Bureau/Group at Bank Indonesia (2008-2012) and Senior Associate Researcher at Bank Indonesia (2005–2008).

Dasar Hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 9 Februari 2021 (Periode Pertama).

Legal Basis for Appointment
Circular GMS dated February 09, 2021 (First Period).

Rangkap Jabatan
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2017-sekarang)

Concurrent Position
Coordinating Deputy of Macro-economy and Finance at the Coordinating Ministry of Economy (2017-present)

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi maupun dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation
He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Power
-

Sertifikasi
-

Certifications
-

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Djoko Siswanto
Komisaris
Commissioner
(2021 – 2025)

Warga Negara Indonesia. Domisili di Jakarta, berusia 57 tahun. Meraih gelar Doktor pada Teknik Perminyakan ITB (2011), MBA *Specialist Oil & Gas Management, Center of Energy Petroleum Mineral & Law* (CEPMLP) dari Dundee University UK (2001), MBA Program, Edinburg Business School dari Herriot Watt University, UK (2001) dan Sarjana Teknik Perminyakan dari ITB (1990).

An Indonesian Citizen. Domiciled in Jakarta, 57 years old The holder of Doctorate Degree in Petroleum Engineering from Bandung Institute of Technology (2011), MBA Specialist of Oil & Gas Management, Center of Energy, Petroleum, Mineral & Law (CEPMLP) from Dundee University, UK (2001), MBA Program, Edinburgh Business School from Herriot Watt University, UK (2001), and Bachelor's Degree in Petroleum Engineering from Bandung Institute of Technology (1990).



Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, juga pernah menjabat sebagai Plt. Dirjen Migas (2019 – 2020), Komisaris PT Elnusa Petrofin (2019), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM (2018-2019), Pengawas Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (2018) dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (2018).

Career Path
Prior to serving as the Directorate of Finance at Indonesia Power, he served as Acting Director General of Oil and Gas (2019-2020), Commissioner at PT Elnusa Petrofin (2019), Director General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources (2018-2019), Supervisor of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (2018), and Commissioner at PT Pertamina Hulu Energi (2018).

Dasar Hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 6 Juli 2021 (Periode Pertama).

Legal Basis for Appointment
Circular GMS dated July 06, 2021 (First Period).

Rangkap Jabatan
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (2019-Sekarang).

Concurrent Position
Secretary General of the National Energy Council (2019-current).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi maupun dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation
He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Power
-

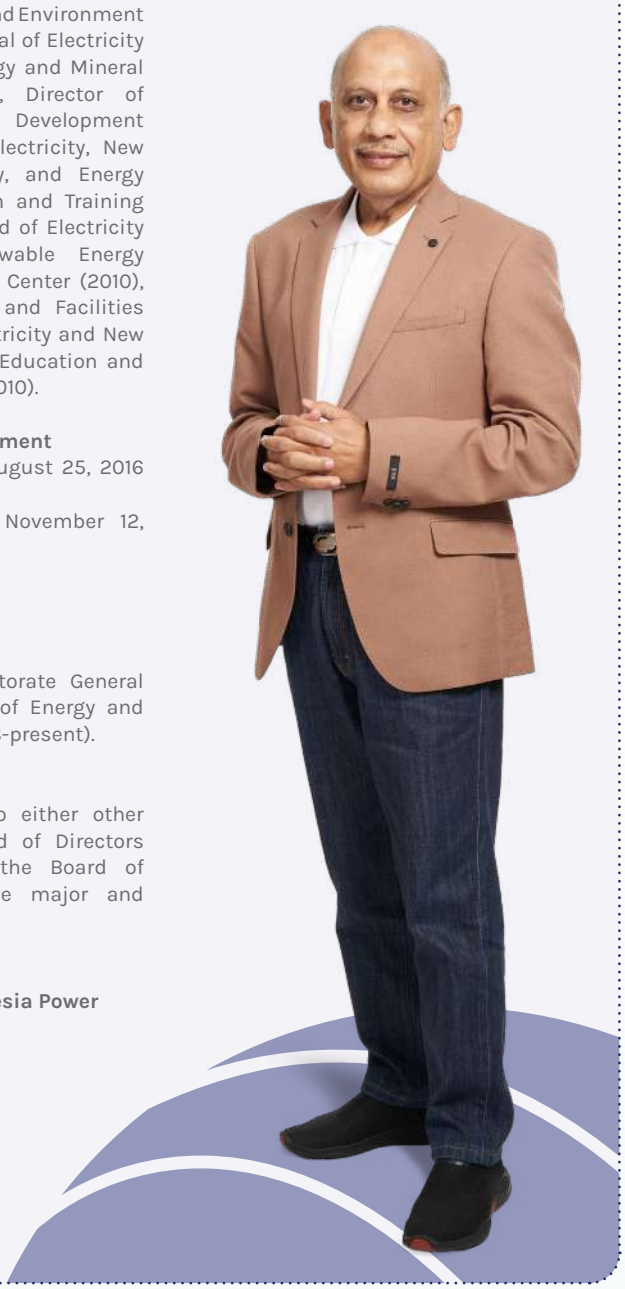
Sertifikasi
-

Certifications
-

Munir Ahmad
Komisaris
Komisaris
(2020 – 2024)

Warga Negara Indonesia. Domisili di Jakarta, berusia 60 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Hasanudin (1987).

An Indonesian Citizen. Domiciled in Jakarta, 60 years old The holder of Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Hasanuddin University (1987).



Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, juga pernah menjabat sebagai adalah Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (2015-2018) Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (2014-2015), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2010-2014), Kepala Pusdiklat Ketenagalistrikan Dan Energi Baru Terbarukan (2010) serta Kepala Bidang Pelatihan dan Sarana – Pusdiklat KEBT (2006-2010).

Career Path
Prior to serving as a Commissioner at Indonesia Power, he assumed several positions, including Director of Electrical Engineering and Environment of the Directorate General of Electricity at the Ministry of Energy and Mineral Resources (2015-2018), Director of Electricity Program Development (2014-2015), Head of Electricity, New and Renewable Energy, and Energy Conservation Education and Training Center (2010-2014), Head of Electricity and New and Renewable Energy Education and Training Center (2010), and Head of Training and Facilities Department of the Electricity and New and Renewable Energy Education and Training Center (2006-2010).

Dasar Hukum Pengangkatan
- RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 25 Agustus 2016 (Periode Pertama);
- RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 12 November 2020 (Periode Kedua).

Legal Basis for Appointment
- Circular GMS dated August 25, 2016 (First Period);
- Circular GMS dated November 12, 2020 (Second Period).

Rangkap Jabatan
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM (2018-sekarang).

Concurrent Position
Secretary to the Directorate General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (2018-present).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi maupun dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation
He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Power
-

Sertifikasi
-

Certifications
-

PROFIL DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Miftahul Jannah

Komisaris
Commissioner
(2020 – 2024)



Warga Negara Indonesia. Domisili di Depok, berusia 55 tahun. Meraih gelar Magister Bidang Manajemen Dari ITB (2002), dan Sarjana Fisika Dari ITS (1991).

An Indonesian Citizen. Domiciled in Depok, 55 years old. He earned Master of Management from ITB (2020), and Bachelor of Physics from ITS (1991).

Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Indonesia Power, juga pernah menjabat *Expert Bisnis* Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) (2021), Direktur Operasi 2 PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016-2020), *Expert* Niaga pada DITAGA PT PLN (Persero) (2015-2016), *Senior Specialist I* Niaga pada DITAGA PT PLN (Persero) (2013-2015), *Senior* Manajer Teknologi Pembangkitan PT PLN (Persero) (2012-2013), *Vice President* Enjiniring PT PLN (Persero) (2012), *General Manager* UP Muara Karang (2010-2012).

Career Path
Before serving as a Commissioner in Indonesia Power, he also works as a Regional Sumatera and Kalimantan Business Expert in PT PLN (Persero), Director of Operations 2 at PT Pembangkitan Jawa-Bali (2016-2020), Commerce Expert at the Directorate of Development and Commerce (DITAGA) PT PLN (Persero) (2015-2016), Senior Specialist I Commerce at the Directorate of Development and Commerce PT PLN (Persero) (2013-2015), Senior Manager of Power Generation Technology at PT PLN (Persero) (2012-2013), Vice President of Engineering at PT PLN (Persero) (2012), General Manager of Muara Karang PGU (2010-2012).

Dasar Hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 15 Juli 2020 (Periode Pertama).

Legal Basis for Appointment
Circular GMS dated July 15, 2020 (First Period).

Rangkap Jabatan
EVP Pembangkitan dan EBT Regional Jawa, Madura dan Bali PT PLN (Persero) (2021 - Sekarang).

Concurrent Position
EVP of Power Generation and NRE of Java, Madura, and Bali Regions of PT PLN (Persero) (2021-current).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation
He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Power
-

Sertifikasi
Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Certifications
Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Ulil Abshar

Komisaris Independen

Independent Commissioner

(2019 – 2023)

Warga Negara Indonesia. Domisili di Jakarta, berusia 39 tahun. Meraih gelar Doktor Sastra Arab dari Universitas Indonesia (2016), Magister *Cultural Studies* dari Universitas Indonesia (2006) dan Sarjana Adab dan Humaniora dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2004)

An Indonesian Citizen. Domiciled in Jakarta, 39 years old The holder of Doctorate Degree in Arabic Literature from University of Indonesia (2016), Master of Cultural Studies from University of Indonesia (2006), and Bachelor of Civilization and Humanities from Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2004).

Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen Indonesia Power, pernah menjabat sebagai, Sekretaris LTN (Lajnah Ta'lief wan Nasyr PBNU (2010–2015), Sekretaris Biro Kerjasama Timur Tengah PBNU (2005 - 2010).

Work Experience:
Before serving as an Independent Commissioner at Indonesia Power, he also works as Secretary to Lajnah Ta'lief wan Nasyr (LTN) of the Central Board of Nahdlatul Ulama (PBNU) (2010-2015) and the Secretary to the Bureau of Middle East Cooperation of the Central Board of Nahdlatul Ulama (PBNU) (2005-2010).

Dasar Hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 23 September 2019 (Periode Pertama).

Legal Basis for Appointment:
Circular GMS dated September 23, 2019 (First Period).

Rangkap Jabatan
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) (2015-sekarang)

Concurrent Position:
Deputy Secretary General of the Central Board of Nahdlatul Ulama (PBNU) (2015-present).

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

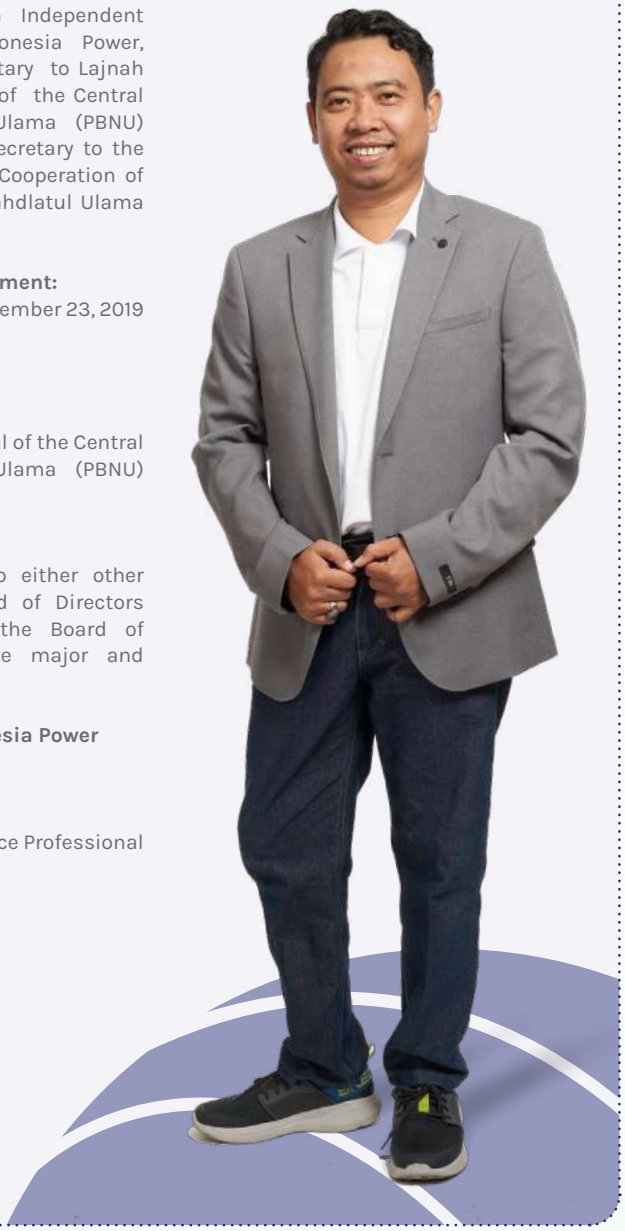
Affiliation:
He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Power
-

Sertifikasi
Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

Certifications
Qualified Risk Governance Professional (QRGP).



PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

M. Ahsin Sidqi
Direktur Utama
President Director
(2019 – 2023)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 55 tahun. Meraih gelar Doktor *Strategic Management* dari Universitas Trisakti (2018), Magister Manajemen dari IPWI Jakarta (1999) dan Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada (1991)

An Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 55 years old. The holder of Doctorate Degree in Strategic Management from Trisakti University (2018), Master of Management from IPWI Jakarta (1999), and Bachelor of Engineering from Gadjah Mada University (1991)



Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Indonesia Power, pernah menjabat sebagai Komisaris PT Cogindo Daya Bersama (2018-2019), *Head of IPP Division Procurement* PT PLN (Persero) (2017-2019), *General Manager* Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PT PLN (Persero) (2016-2017), *Head of Supply Chain Management* Indonesia Power (2014-2015) dan *General Manager* UBP Priok Indonesia Power (2011-2014).

Career Path
Prior to serving as the President Director at Indonesia Power, he served as a Commissioner at PT Cogindo DayaBersama (2018-2019), Head of IPP Procurement Division at PT PLN (Persero) (2017-2019), General Manager of Southern Sumatra Power Generation at PT PLN (Persero) (2016-2017), Head of Supply Chain Management at PT Indonesia Power (2011-2014), and General Manager of Priok POMU at Indonesia Power (2011-2014).

Dasar Hukum Pengangkatan
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2019 (Periode Pertama).

Legal Basis for Appointment
Circular GMS dated June 19, 2019 (First Period).

Rangkap Jabatan
-

Concurrent Position
-

Hubungan Afiliasi:
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi dan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation
He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Powe
-

Sertifikasi
- Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dari KPK
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)

Certifications
- Integrity Builder Expert (API) Certification by KPK
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

Harlen

Direktur Pengembangan dan Niaga

Director of Development and Commerce

(2020 – 2024)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 52 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Listrik dari Universitas Brawijaya (1993).

An Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 52 years old. The holder of Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Brawijaya University (1993).

Riwayat Jabatan

Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Niaga Indonesia Power, pernah menjabat sebagai *Executive Vice President* Batubara pada Direktorat Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) (2018 - 2020), Kepala Satuan Batubara pada PT PLN (Persero) (2015-2018), Kepala Divisi Batubara pada Direktorat Pengadaan dan Energi Primer PT PLN (Persero) (2015) dan *Senior Specialist* II Audit Teknik Tugas Karya ke PT PLN (Persero) (2012-2015) dan Engineer Teknik Mesin dan Listrik Tugas Karya ke Indonesia Power (2009-2011).

Career Path

Prior to serving as the Director of Development and Commerce at Indonesia Power, he previously served as Executive Vice-President of Coal at the Directorate of Strategic Procurement 2 PT PLN (Persero) (2018-2020), Head of Coal Unit at PT PLN (Persero) (2015-2018), Head of Coal Division at the Directorate of Procurement and Primary Energy PT PLN (Persero) (2015), Senior Specialist II of Technical Audit - Secondee at PT PLN (Persero) (2012-2015), and Engineer of Mechanical Engineering and Secondee at PT Indonesia Power (2009-2011).

Dasar Pengangkatan Pertama

RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 8 Desember 2020 (Periode Pertama).

Basis of First Appointment

Circular GMS dated December 08, 2020 (First Period).

Rangkap Jabatan

-

Concurrent Position

-

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation

He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power

-

Shareholding in Indonesia Power

-

Sertifikasi

- Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dari KPK;
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Certifications

- Integrity Builder Expert (API) Certification by KPK;
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP).



PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

M. Hanafi Nur Rifai

Direktur Operasi I
Director of Operations I
(2018 – 2022)



Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 51 tahun. Meraih gelar Master Bidang Mesin Institut Teknologi Bandung (2012) dan Sarjana Mesin Institut Teknologi 10 November (1993).

An Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 51 years old. The holder of Master of Engineering from Bandung Institute of Technology (2012) and Bachelor of Engineering from 10 Nopember Institute of Technology (1993).

Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi I Indonesia Power, pernah menjabat sebagai *General Manager* UP Suralaya (2015-2018), *General Manager* UBOH PLTU Banten 2 Labuan (2014-2015), General Manager UBOH PLTU 2 Jawa Tengah Adipala (2013-2014), *General Manager* UBP Kamojang (2011-2013), Deputy *General Manager* Bidang Teknik UBH (2010-2011).

Career Path
Prior to serving as the Director of Operations I at PT Indonesia Power, he served as the General Manager of Suralaya PGU (2015-2018), General Manager of SPP Banten 2 Labuan O&M Business Unit (2014-2015), General Manager of SPP 2 Central Java Adipala O&M Business Unit (2013-2014), General Manager of Kamojang Power Generation Business Unit (2011-2013), and Deputy General Manager of Maintenance Engineering Department (2010-2011).

Dasar Pengangkatan Pertama
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 24 Januari 2018 (Periode Pertama).

Basis of First Appointment
Circular GMS dated January 24, 2018 (First Period).

Rangkap Jabatan
-

Concurrent Position
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi dan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation
He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Power
-

Sertifikasi:
Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

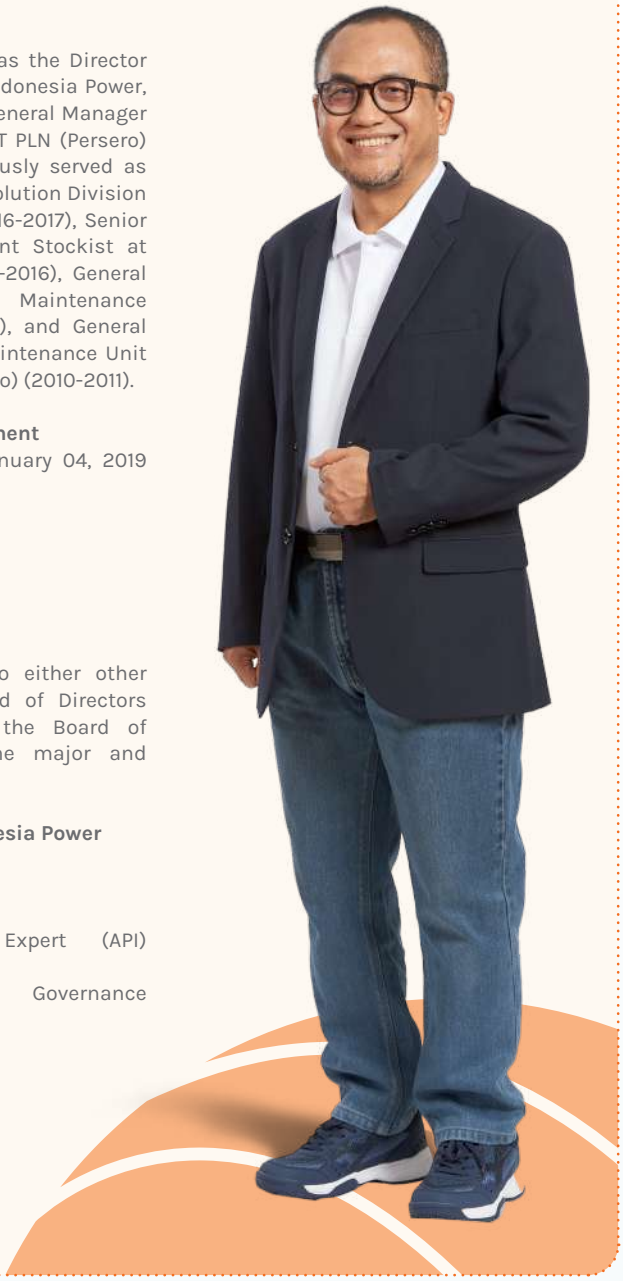
Certifications:
Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

R. Bambang Anggono

Direktur Operasi II
Director of Operations II
(2019 – 2023)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Gresik – Jawa Timur, berusia 55 tahun. Meraih gelar Magister Bidang Industri dari Institut Teknologi Surabaya (2012) dan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Surabaya (1991).

An Indonesian Citizen, domiciled in Gresik, East Java, 55 years old. The holder of Master's Degree in Industrial Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology (2012) and Bachelor's Degree inf Electrical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology (1991).



Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Direktur Operasi II Indonesia Power, pernah menjabat sebagai GM PLN Sumbangsel PT PLN (Persero) (2017-2019), Kepala Divisi *Business Solution* PT PLN (Persero) (2016-2017), Senior Manajer *Stockist* Pembangkit PT PLN (Persero) (2012-2016), General Manager UPHB (2011-2012) dan General Manager UPHT PT PLN (Persero) (2010-2011).

Career Path
In addition to serving as the Director of Operations II at PT Indonesia Power, he also serves as the General Manager of PLN Sumbagsel of PT PLN (Persero) (2017-2019), and previously served as the Head of Business Solution Division of PT PLN (Persero) (2016-2017), Senior Manager of Power Plant Stockist at PT PLN (Persero) (2012-2016), General Manager of Western Maintenance Unit (UPHB) (2011-2012), and General Manager of Eastern Maintenance Unit (UPHT) of PT PLN (Persero) (2010-2011).

Dasar Pengangkatan Pertama
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 4 Januari 2019 (Periode Pertama).

Basis of First Appointment
Circular GMS dated January 04, 2019 (First Period).

Rangkap Jabatan
-

Concurrent Position
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi dan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation
He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Power
-

Sertifikasi
- Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dari KPK
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)

Certifications
- Integrity Builder Expert (API) Certification by KPK
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP)

PROFIL DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS PROFILE

Bagus Setiawan

Direktur SDM dan Administrasi
Director of Human Capital and Administration
(2020 – 2024)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta, berusia 54 tahun. Meraih gelar Magister Bidang Manajemen Bisnis dari University of Missouri (2006) dan Sarjana Teknik Mesin dari ITB (1993).

An Indonesian Citizen, domiciled in Jakarta, 54 years old. The holder of Master of Business Management from the University of Missouri (2006) and Bachelor of Mechanical Engineering from ITB (1993).



Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai sebagai Direktur SDM dan Administrasi, pernah menjabat sebagai: *General Manager* PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2019-2020), *Executive Vice President Human Capital Management System* PT PLN (Persero) (2018-2019), Kepala Divisi *Human Capital Management System* PT PLN (Persero) (2015-2018), Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM PT PLN (Persero) (2013-2015) dan *Senior Specialist* I Manajemen SDM PT PLN (persero) PT PLN (Persero) (2011-2013).

Career Path:
Prior to serving as the Director of Human Capital and Administration, he held the following positions: General Manager of Electricity Research and Development Center at PT PLN (Persero) (2019-2020), Executive Vice-President of Human Capital Management System at PT PLN (Persero) (2018-2019), Head of Division of Human Capital Management System at PT PLN (Persero) (2015-2018), Head of Division of Human Capital System Development at PT PLN (Persero) (2013-2015), and Senior Specialist I of Human Capital Management at PT PLN (Persero) (2011-2013).

Dasar Pengangkatan Pertama
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 12 Juni 2020 (Periode Pertama).

Basis of First Appointment
Circular GMS dated June 12, 2020 (First Period).

Rangkap Jabatan
-

Concurrent Position
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi dan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation
He is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Power
-

Sertifikasi:
- Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dari KPK;
- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Certifications:
- Integrity Builder Expert (API) Certification by KPK;
- Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

Endang Astharanti

Direktur Keuangan
Director of Finance
(2021 – 2025)

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta berusia 45 tahun. Meraih gelar Master *Business Administration* (MBA) dari Nanyang Technology University, Singapore (2009) dan Sarjana Akuntansi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1999).

An Indonesian Citizen. Domiciled in Jakarta, 45 years old.
The holder of Master's Degree in Business Administration (MBA) Nanyang Technology University, Singapore (2009) and Bachelor's Degree in Accounting University of Gajah Mada, Yogyakarta (1999).

Riwayat Jabatan
Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan Indonesia Power, pernah menjabat sebagai: *Vice President Distribution Strategy Group* PT Bank Mandiri (Persero) (2021); Direktur *Sales and Product* PT Mandiri Management Investasi (2015-2021); Senior Executive Vice President (SEVP) Head of Sales Division PT Mandiri Management Investasi (2014-2015); Department Head of Marketing, Communication and Promotion PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2014).

Career Path
Prior to serving as the Director of Finance at Indonesia Power, she held the following positions: Vice President Distribution Strategy Group PT Bank Mandiri (Persero) (2021); Direktur Sales and Product PT Mandiri Management Investasi (2015-2021); Senior Executive Vice President (SEVP) Head of Sales Division PT Mandiri Management Investasi (201 -2015); Department Head of Marketing, Communication and Promotion PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011-2014).

Dasar Pengangkatan Pertama
RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 25 November 2021 (Periode Pertama.

Basis of First Appointment
Circular GMS dated November 25, 2021 (First Period)

Rangkap Jabatan
-

Concurrent Position
-

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan sesama anggota Direksi dan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Affiliation
She is not affiliated to either other members of the Board of Directors or the members of the Board of Commissioners, or the major and controlling shareholder.

Kepemilikan Saham di Indonesia Power
-

Shareholding in Indonesia Power
-

Sertifikasi
-

Certifications
-




BAGUS S.
M. HANAFI


MAHSIN SIDIQ
HARLEN
PLNNER

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, UNIT AUDIT INTERNAL DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

EDUCATION AND TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT UNIT, AND RISK MANAGEMENT UNIT

Indonesia Power terus berupaya melakukan pengembangan kapabilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris agar sejalan dengan kebutuhan masing-masing organ perusahaan dalam menjalankan tugasnya mengacu pada ketentuan dalam *Board Manual*. Pengembangan kapabilitas bagi Komite Dewan Komisaris juga difasilitasi oleh Perusahaan.

Adapun pendidikan dan pelatihan bagi kepala atau pimpinan unit kerja, terutama dalam mendukung implementasi tata kelola perusahaan, antara bagi Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Audit Internal dan Kepala Satuan Manajemen Risiko berdasarkan Kebijakan Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai.

Selama periode tahun 2021 pengembangan kapabilitas bagi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Kepala Satuan Audit Internal serta Kepala Satuan Manajemen Risiko dilakukan sebagai berikut:

Indonesia Power continuously encourages capability development for the Board of Directors and the Board of Commissioners so that they can keep up with the needs of each Company organ in running their duties mandated in the Board Manual. The Company also facilitates capability development for the Board of Commissioners' Committees.

The Policy on Employee Competency and Career Development System becomes a reference in determining the education and trainings for work unit heads or leaders, e.g. Corporate Secretary, Chief Audit Executive, and Head of Risk Management Unit, particularly in supporting the implementation of corporate governance.

Throughout 2021, capability developments for the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Commissioners Committees, Corporate Secretary, Head of Internal Audit Unit, and Head of Risk Management Unit were given as follows:

Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris
Capability Development Program for the Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Nama Workshop/Seminar Title of Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Miftahul Jannah	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum terkait Laporan Keuangan The Responsibilities of the Audit Committee when the Company is Involved in a Legal Issues concerning the Financial Report	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Indonesian Audit Committee Association (IKAI)	23 September 2021 September 23, 2021	*Video Conference*
	Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS)	1 November 2021 November 1, 2021	*Video Conference*
Ulil Abshar	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum terkait Laporan Keuangan The Responsibilities of the Audit Committee when the Company is Involved in a Legal Issues concerning the Financial Report	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Indonesian Audit Committee Association (IKAI)	23 September 2021 September 23, 2021	*Video Conference*
	Sertifikasi Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Certification	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS)	1 November 2021 November 1, 2021	*Video Conference*

Program Peningkatan Kapabilitas Direksi
Capability Improvement Program for the Board of Directors

Direksi Board of Directors	Nama Workshop/Seminar Title of Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
M. Ahsin Sidqi	*Training* Ahli Pembangun Integritas (API) TUK PT PLN (Persero) Integrity Builder Expert (API) Certification TUK PT PLN (Persero)	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) Indonesia	30 Maret - 01 April 2021 March 30–April 01, 2021	Jakarta
	Training dan Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS)	04-05 November 2021 04-05 November 2021	Jakarta
M. Hanafi Nur Rifai	*Training* Ahli Pembangun Integritas (API) TUK PT PLN (Persero) Integrity Builder Expert (API) Certification TUK PT PLN (Persero)	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) Indonesia	30 Maret - 01 April 2021 March 30–April 01, 2021	Jakarta
	Training dan Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS)	04-05 November 2021 04-05 November 2021	Jakarta
R. Bambang Anggono	*Training* Ahli Pembangun Integritas (API) TUK PT PLN (Persero) Integrity Builder Expert (API) Certification TUK PT PLN (Persero)	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) Indonesia	30 Maret - 01 April 2021 March 30–April 01, 2021	Jakarta
	Training dan Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS)	04-05 November 2021 04-05 November 2021	Jakarta
Harlen	*Training* Ahli Pembangun Integritas (API) TUK PT PLN (Persero) Integrity Builder Expert (API) Certification TUK PT PLN (Persero)	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) Indonesia	30 Maret - 01 April 2021 March 30–April 01, 2021	Jakarta
	Training dan Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS)	04-05 November 2021 04-05 November 2021	Jakarta
Bagus Setiawan	*Training* Ahli Pembangun Integritas (API) TUK PT PLN (Persero) Integrity Builder Expert (API) Certification TUK PT PLN (Persero)	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) Indonesia	30 Maret - 01 April 2021 March 30–April 01, 2021	Jakarta
	Training dan Sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Training and Certification	*Center for Risk Management & Sustainability* (CRMS)	04-05 November 2021 04-05 November 2021	Jakarta

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, UNIT AUDIT INTERNAL DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO
EDUCATION AND TRAINING FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT UNIT, AND RISK MANAGEMENT UNIT

Program Peningkatan Kompetensi Komite Audit
Audit Committee Competency Development Program

Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Nama Workshop/Seminar Title of Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Sudirmanto	Pengoperasian Pembangkit Listrik Sistem JAMALI yang Andal, Berkualitas dan Ekonomis Operation of Reliable, Quality, and Economical Java-Madura-Bali System Power Generator	Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI) Indonesian Power Engineers Association (IATKI)	7 Agustus 2021 August 07, 2021	*Video Conference*
	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum terkait Laporan Keuangan The Responsibilities of the Audit Committee when the Company is Involved in a Legal Issues concerning the Financial Report	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Indonesian Audit Committee Association (IKAI)	23 September 2021 September 23, 2021	*Video Conference*
Abdul Kadir	Pengoperasian Pembangkit Listrik Sistem JAMALI yang Andal, Berkualitas dan Ekonomis Operation of Reliable, Quality, and Economical Java-Madura-Bali System Power Generator	Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI) Indonesian Power Engineers Association (IATKI)	7 Agustus 2021 August 07, 2021	*Video Conference*
	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum terkait Laporan Keuangan The Responsibilities of the Audit Committee when the Company is Involved in a Legal Issues concerning the Financial Report	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Indonesian Audit Committee Association (IKAI)	23 September 2021 September 23, 2021	*Video Conference*

Program Peningkatan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan Pelaksana Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Competency Development Programs for Risk Management Committee and Acting Nomination and Remuneration Function

Anggota Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Member	Nama Workshop/Seminar Title of Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Anas Fadli Oesman	Pengoperasian Pembangkit Listrik Sistem JAMALI yang Andal, Berkualitas dan Ekonomis Operation of Reliable, Quality, and Economical Java-Madura-Bali System Power Generator	Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI) Indonesian Power Engineers Association (IATKI)	7 Agustus 2021 August 07, 2021	*Video Conference*
	Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum terkait Laporan Keuangan The Responsibilities of the Audit Committee when the Company is Involved in a Legal Issues concerning the Financial Report	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) Indonesian Audit Committee Association (IKAI)	23 September 2021 September 23, 2021	*Video Conference*

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Competency Development Program

Sekretaris Perusahaan telah pelatihan peningkatan kompetensi sebagai bagian dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang dilakukan oleh internal maupun pihak eksternal, antara lain adalah:

The Corporate Secretary has attended a number of competency development trainings as a part of its duties, either those organized internally or externally, such as:

Corporate Secretary	Nama Workshop/Seminar Title of Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
I G A N Subawa Putra	*Executive Education* (EE) I	PT PLN (Persero) Corporate University	30 September - 15 Oktober 2021 September 30–October 15, 2021	*Online*
	Winning Teams Culture System (IP LIGAT WAVE 4)	Andrew Tani & Co	27-30 September 2021 September 27-30, 2021	*Online*
	Workshop Pembekalan *Change Agent - Change Leader* dan *Change Agent* Workshop on Guidance for Change Agent - Change Leader and Change Agent	PT Arga Bangun Bangsa	26 Agustus 2021 August 26, 2021	*Online*
	Pelatihan Pasar Modal Pelatihan Pasar Modal	Patrari Jaya Consultant	28 Oktober 2021 October 28, 2021	*Online*

Program Peningkatan Kepala Departemen Audit Internal
Development Program for Head of Internal Audit Unit

Chief Audit Executive	Nama Workshop/Seminar Title of Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Krishna Mulawarman	*Winning Teams Culture System* (IP LIGAT WAVE 4)	Andrew Tani & Co	27-30 September 2021 September 27-30, 2021	*Online*
	Workshop Pembekalan *Change Agent* Workshop on Guidance for Change Agent	PT Arga Bangun Bangsa	26 Agustus 2021 August 26, 2021	*Online*

Program Peningkatan Kepala Satuan Manajemen Risiko
Development Program for Head of Risk Management Unit

Executive Vice President of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management	Nama Workshop/Seminar Title of Workshop/Seminar	Lembaga Penyelenggara Host	Waktu Pelaksanaan Date	Lokasi Location
Tarwaji	*Winning Teams Culture System* (IP LIGAT WAVE 4)	Andrew Tani & Co	27-30 September 2021 September 27-30, 2021	*Online*
	Executive Education (EE) I	PT PLN (Persero) Corporate University	30 September - 15 Oktober 2021 September 30 - October 15, 2021	*Online*
	Workshop Pembekalan *Change Agent - Change Leader* dan *Change Agent* Workshop on Guidance for Change Agent - Change Leader and Change Agent	PT Arga Bangun Bangsa	26 Agustus 2021 August 26, 2021	*Online*
	Webinar Implementasi Model Transformasi Manajemen di Era Pandemi Webinar on Implementation of Management Transformation Model during the Pandemics	PPM Management	10 Juli 2021 July 10, 2021	*Online*

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

EMPLOYEE COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Generasi milenial yang berada pada usia produktif menjadi komposisi dominan pegawai Indonesia saat ini. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan aspirasi visi Perusahaan menjadi "Perusahaan Energi Terbaik yang Tumbuh Berkelanjutan". Kami optimis dapat mencapai target bidang SDM berikutnya yakni tersedianya puluhan ahli pembangkitan bertaraf internasional dengan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan lembaga independen.

The millennial generation at their productive age dominates the current composition of Indonesian employees. This is important in realizing the aspiration, the Company's vision to be the "Best Energy Company with Sustainable Growth". We are optimistic to be able to meet the next HR target, i.e. availability of tens of power generation experts with international standards who meet the qualifications set by independent institutions.

Komposisi Pegawai Tahun 2019-2021

Employee Composition in 2019-2021

Indonesia Power berkomitmen untuk terus meningkatkan pengelolaan pegawai berdasarkan prinsip kesetaraan. Untuk itulah dalam setiap pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, penempatan serta promosi, Indonesia Power memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai untuk terus bertumbuh dan berkembang bersama Perusahaan.

Indonesia Power is committed to improving employee management based on the principle of equality. Accordingly, in every employee development, education and training, certification, placement, and promotion, Indonesia Power gives equal opportunity to all employees to continue developing and growing along with the Company.

Berdasarkan Jenjang Jabatan

By Position Level

Pada tahun 2021, komposisi pegawai berdasarkan jenjang jabatan didominasi oleh jenjang Penyelia Dasar yang mencapai 1.618 pegawai atau 38,28% dari total seluruh pegawai Indonesia Power, yang sebagian besarnya berada di Suralaya PGU.

In 2021, by position level, the employee composition was dominated by Supervisors, reaching 1, 618 employees or taking up 38.28% of the total number of Indonesia Power employees. Most of them are posted at Suralaya PGU.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2019-2021
Employee Composition by Position Level in 2019-2021

Jenjang Jabatan Position Level	Tahun Year			Perubahan 2020 ke 2021 Change from 2020 to 2021
	2019	2020	2021	
Direksi Board of Directors	6	6	6	0
Eksekutif Utama Chief Executive	8	8	8	0
Eksekutif Senior Senior Executive	87	87	87	0
Eksekutif Executive	286	274	283	9
Penyelia Atas Senior Supervisor	801	788	809	21
Penyelia Dasar Junior Supervisor	1.090	1.433	1.618	185
Pelaksana Officer	2.048	1.626	1.416	-210
Jumlah Pegawai* Number of Employees*	**4.326**	**4.222**	**4.227**	**5**

*Termasuk Direksi, namun Direksi tidak termasuk ke dalam enam kategori Jenjang Jabatan yang ada di Indonesia Power
* Six Position Level categories at Indonesia Power are exclusive of the Board of Directors



KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
EMPLOYEE COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Berdasarkan Usia
By Age

Pada tahun 2021, komposisi pegawai Indonesia Power berdasarkan usia didominasi oleh kelompok usia produktif yang biasa dikenal dengan generasi milenial dalam rentang usia 26-30 tahun sebanyak 36,53%. Berikut rincian jumlah pegawai berdasarkan usia dalam 3 tahun terakhir:

In 2021, Indonesia Power's employee composition by age was dominated by those of the productive group (also known as the millennial generation) within 26-30 age range, by 36.53%. The following shows the details of employee composition by age for the last three years:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2019-2021
Employee Composition by Age in 2019-2021

Usia (Tahun) Age (year old)	Tahun Year			Perubahan 2020 ke 2021 Change from 2020 to 2021
	2019	2020	2021	
19-25	1.110	452	222	-230
26-30	1.031	1.517	1.542	25
31-35	722	781	897	116
36-40	335	451	587	136
41-45	191	135	133	-2
46-50	552	507	423	-84
51-54	270	310	366	56
>55	109	63	51	-12
Jumlah Pegawai Aktif Number of Employees	**4.320**	**4.216**	**4.221**	**5**

Berdasarkan Tingkat Pendidikan
By Education Level

Di tahun 2021, komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan didominasi oleh jenjang pendidikan Sarjana, selanjutnya oleh jenjang pendidikan Diploma. Terdapat 37 pegawai yang semula berada di jenjang pendidikan Diploma dan/atau di bawahnya meningkat menjadi jenjang pendidikan Sarjana, sehingga komposisi jenjang pendidikan Sarjana menjadi sebesar 37,07%.

In 2021, the employee composition based on the level of education was dominated by Bachelor's Degree holders, followed by Diploma holders. 37 employees who were previously Diploma holders and/or below have earned their Bachelor's Degree, rendering the Bachelor's Degree composition to 37.07%.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2021
Employee Composition by Education Level in 2019-2021

Tingkat Pendidikan Level of Education	Tahun Year			Perubahan 2020 ke 2021 Change from 2020 to 2021
	2019	2020	2021	
S3 Doctorate Degree (S3)	1	1	0	-1
S2 Master's Degree (S2)	119	145	162	17
S1 Bachelor's Degree (S1)	1.477	1.488	1.565	77
Diploma Associate Degree (Diploma)	1.582	1.550	1.513	-37
SMA/K Senior/Vocational High School	1.118	1.015	967	-48
SLTP/SD Junior High/Primary School	23	17	14	-3
Jumlah Pegawai **Number of Employees**	**4.320**	**4.216**	**4.221**	**5**

Berdasarkan Jenis Kelamin
By Gender

Berdasarkan jenis kelamin, komposisi pegawai Indonesia Power didominasi oleh pegawai pria yaitu sebanyak 89,81% dan pegawai wanita sebanyak 10,19%, dengan rinciannya sebagai berikut:

By gender, Indonesia Power's employee composition was dominated by males, at 89.81%, followed by female employees at 10.19%. The details are shown below:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2021
Employee Composition by Gender in 2019-2021

Jenis Kelamin Gender	Tahun Year			Perubahan 2020 ke 2021 Change from 2020 to 2021
	2019	2020	2021	
Pria Male	3.870	3.786	3.791	5
Wanita Female	450	430	430	0
Jumlah **Total**	**4.320**	**4.216**	**4.221**	**5**

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
EMPLOYEE COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Berdasarkan Status Kepegawaian
By Employment Status

Pada tahun 2021 jumlah pegawai Organik Indonesia Power berkurang sebanyak 80 pegawai, dikarenakan pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri. Sedangkan peningkatan jumlah pegawai untuk Tugas Karya PLN sebanyak 83 pegawai, dikarenakan adanya penugasan PT PLN (Persero) kepada PT Indonesia Power sebagai *Asset Manager* PLTU Pangkalan Susu Blok 3 dan 4 sehingga terjadi Perubahan Organisasi PLTU Pangkalan Susu OMU.

In 2021, the number of Indonesia Power's organic employees reduced by 80 persons, due to retirement, death, and resignation. Meanwhile, the number of secondees from PLN increased by 83 persons, due to the secondment of PT PLN (Persero) to Indonesia Power as the Asset Manager of SPP Pangkalan Susu Blocks 3 and 4, resulting in the change in the organizational structure of SPP Pangkalan Susu OMU.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Pegawai Tahun 2019-2021
Employee Composition by Employment Status in 2019-2021

Status Kepegawaian Employment Status	Tahun Year			Perubahan 2020 ke 2021 Change from 2020 to 2021
	2019	2020	2021	
Pegawai Tetap Permanent Employee	4.320	4.216	4.221	5
• Organik Indonesia Power Indonesia Power Organic Employee	4.258	4.154	4.074	-80
• Tugas Karya PLN PLN Secondee	17	24	107	83
• Tugas Karya Anak Perusahaan Subsidiary Secondee	45	38	40	2
Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employee	4.521*	35	33	-2
Outsources (Alih Daya) Outsourced Employee		8.213	8.221	8
Jumlah Pegawai **Number of Employees**	**8.841**	**12.464**	**12.475**	**11**

*di tahun 2019 digabung menjadi Alih Daya
*Merged with Outsourced Employees in 2019

Berdasarkan Wilayah Kerja
By Work Area

Pada tahun 2021, jumlah pegawai terbanyak berdasarkan wilayah kerja, yang berada di urutan pertama adalah Kantor Pusat dengan komposisi pegawai sebanyak 15,80%. Diurutan kedua adalah Suralaya PGU merupakan unit dengan kapasitas terpasang terbesar dibandingkan seluruh unit yang ada dengan jumlah komposisi pegawai sebanyak 15,28%.

In 2021, by work area, the Head Office had the highest number of employees at 15.80%. Suralaya PGU, the unit with the largest installed capacity, placed the second at 15.28%.

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah pegawai PLTU Pangkalan Susu OMU dari tahun sebelumnya seiring dengan penugasan PT PLN (Persero) kepada Indonesia Power sebagai Asset Manager PLTU Pangkalan Susu Blok 3 dan 4.

In 2021, compared to the previous year, SPP Pangkalan Susu OMU saw an increase in the number of its employees with the secondment of PT PLN (Persero) to Indonesia Power as the Asset Manager of SPP Pangkalan Susu Blocks 3 and 4.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2019-2021
Employee Composition by Work Area in 2019-2021

Wilayah Kerja Work Area	Tahun Year			Perubahan 2020 ke 2021 Change from 2020 to 2021
	2019	2020	2021	
Kantor Pusat Head Office	617	634	667	33
Suralaya PGU	697	673	645	-28
Priok POMU	336	323	315	-8
Saguling POMU	190	182	180	-2
Kamojang POMU	233	230	227	-3
Semarang PGU	274	252	228	-25
Mrica PGU	161	155	152	-3
Grati POMU	206	197	191	-6
Bali PGU	202	203	197	-6
MSU	334	335	335	0
PLTU SPP Banten 1 Suralaya OMU	95	96	98	2
PLTU SPP Banten 2 Labuan OMU	116	109	116	7
PLTU SPP Banten 3 Lontar OMU	160	167	153	-14
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	146	150	140	-10
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	104	102	104	2
PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	124	120	186	66
PLTGU CCPP Cilegon OMU	107	107	105	-2
PLTU SPP Barru OMU	58	53	54	1
PLTU SPP Jeranjang OMU	82	49	47	-2
PLTU SPP Sanggau OMU	1	1	1	0
PLTU SPP Sintang OMU	1	1	1	0
PLTU SPP Holtekamp OMU	2	2	2	0
Project Unit	74	74	76	2
PLTU SPP Berau OMU		1	1	0
Jumlah Pegawai **Number of Employees**	**4.320**	**4.216**	**4.221**	**5**

Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development

Kesempatan yang Sama Kepada Seluruh Pegawai
Equal Opportunity for All Employees

Pengembangan kompetensi pegawai Indonesia Power ditetapkan selaras untuk mendukung implementasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020-2024 dan mengedepankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai tanpa memandang gender. Ini merupakan salah satu komitmen Indonesia Power untuk menghargai hak asasi manusia yang berlaku universal. Pelatihan dan Pengembangan mencakup pengenalan organisasi, visi dan misi, tata nilai dan budaya perusahaan, kompetensi teknis yang diperlukan, serta kemampuan memimpin yang diselaraskan dengan strategi Human Capital dengan mengedepankan adanya kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai.

Competency development for Indonesia Power employees is sought to support the implementation of Company Long-Term Plan (RJPP) 2020-2024 and to give equal opportunity for all employees regardless of their gender. This is among Indonesia Power's commitments to respect the universally-acknowledged human rights. The Training and Development covers introduction to organization, vision and mission, corporate values and culture, required technical competencies, and leadership capability. The materials are provided in accordance with the Human Capital strategies, by emphasizing the provision of equal opportunity for all employees.

Kebijakan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai diatur dalam PKB Pasal 22 tentang Pendidikan dan Pelatihan dan Kebijakan Sistem Pembelajaran Pegawai. Selain itu, Indonesia Power terus berupaya untuk memperkuat strategi sistem pengelolaan SDM, merekrut *talent* terbaik melalui serangkaian program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif.

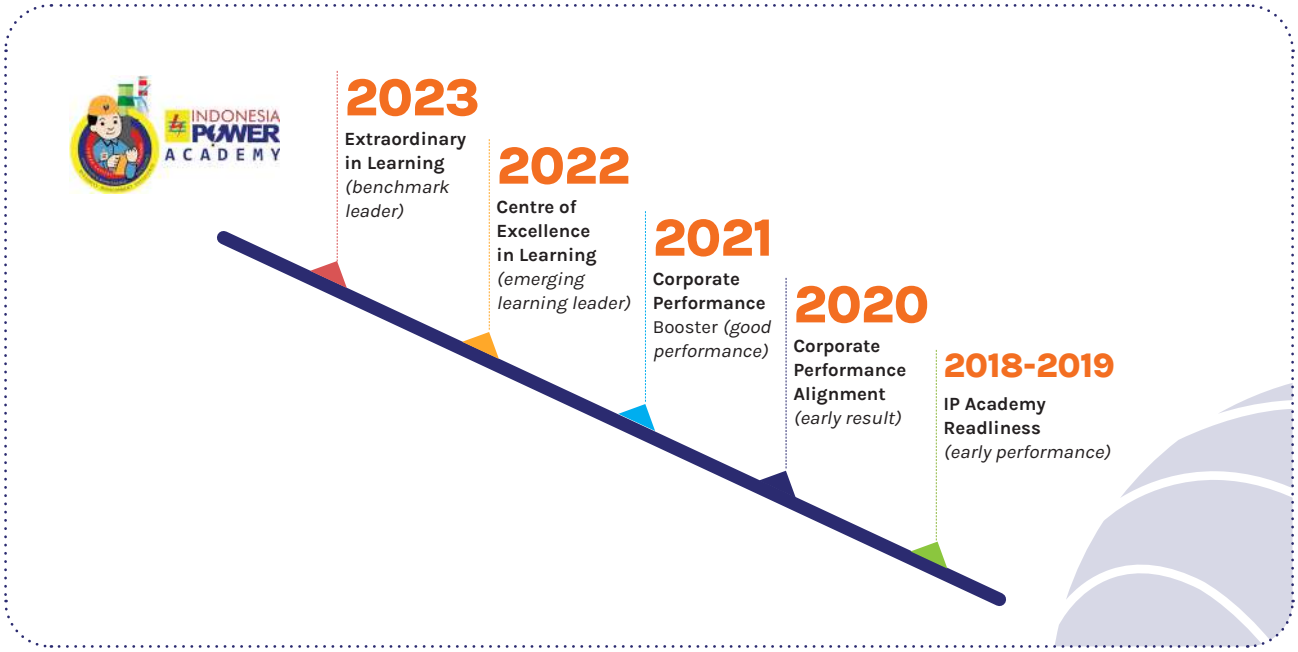
The policy on equal opportunity for all employees to receive competency development is set out in the CLA Article 22 on Education and Training and Employee Learning System Policy. Indonesia Power also strives to continuously strengthen the strategy for HC management system, recruiting the best talents through a set of comprehensive training and development programs.

IP Academy
IP Academy

Sejak diluncurkan tahun 2018, IP Academy sebagai *Centre of Excellence* dalam memecahkan berbagai persoalan terkait kinerja memiliki Roadmap sebagai grand disain pembelajaran untuk mewujudkan Kompetensi Inti Perusahaan sebagai Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit serta Pengembangan Bisnis Solusi Energi. *Roadmap* IP Academy sebelumnya adalah periode 2018-2022 telah mengalami *review* dan penyesuaian pada tahun 2020 dengan hasil *Roadmap* IP Academy 2018-2023 menjadi tahapan sebagai berikut:

Since its launch in 2018, IP Academy has become the Center of Excellence in resolving every performance issue, having a roadmap as the learning grand design to achieve the Company Core Competencies of Power Plant Operations and Maintenance and Power Plant Development. The previous IP Academy Roadmap 2018-2022 has been reviewed and and adjustment in 2020 with results IP Academy Roadmap 2018-2023, containing the following stages:

Roadmap IP Academy 2018 -2023
IP Academy Roadmap 2018-2023



Dalam *Roadmap* IP Academy 2018-2023 di atas, terjadi pergeseran tahapan dimana untuk tahun 2020 Indonesia Power belum memenuhi tahapan *Corporate Performance Booster* karena diperlukan alignment dan kesiapan lebih lanjut.

The IP Academy Roadmap 2018-2023 saw a shift in stages. The target to enter the Corporate Performance Booster stage by 2020 must be delayed as proper alignment and advanced readiness need longer time to prepare.

Memasuki tahun 2021, IP Academy berada pada Tahapan ***Corporate Performance Booster (Good Performance),*** yaitu:

Entering 2021, IP Academy was in the **Corporate Performance Booster (Good Performance)** Stage, i.e.:

> Pembelajaran dilaksanakan dengan tujuan menjadi penguat (*booster*) dalam pencapaian kinerja Indonesia Power, yang ditunjukkan dengan pelaksanaan evaluasi pembelajaran level 4 yang menjadi salah satu pengukuran dalam *Maturity Level* (MLI) kinerja *Human Capital Readiness* (HCR) di Perusahaan.
>
> Learning is given as a booster for achieving performance at Indonesia Power, as shown by the implementation of learning evaluation level 4 as the Maturity Level Indicator (MLI) for the Company's Human Capital Readiness (HCR).

Adapun realiasi pembelajaran di IP Academy untuk tahun 2021 menitikberatkan pada aspek *business issue, business concern* dan permasalahan kinerja korporat dengan isu, jumlah pelatihan dan peserta sebagai berikut:

The actual learning at IP Academy in 2021 put emphasis on the aspects of business issues, business concerns, and corporate performance problems with issues, number of trainings, and participants as detailed below:

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
EMPLOYEE COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Tabel Realisasi Pembelajaran Pada School IP Academy
Table of Realization of Learning at School IP Academy

School	Penjelasan Description	Realisasi Pelatihan 2019 Actual Training in 2019	Realisasi Jumlah Peserta 2019 Actual Number of Partici-pants in 2019	Realisasi Pelatihan 2020 Actual Training in 2020	Realisasi Jumlah Peserta 2020 Actual Number of Partici-pants in 2020	Realisasi Pelatihan 2021 Actual Training in 2021	Realisasi Jumlah Peserta 2021 Actual Number of Partici-pants in 2021
Power Plant Operation Excellence School (POE School)	Pusat pembelajaran bidang operasi pembangkit A learning center for power plant operations	19	271	14	289	-	-
Power Plant Maintenance Excellence School (PME School)	Pusat pembelajaran bidang pemeliharaan peralatan sistem mekanik pembangkit, instalasi Listrik Pembangkit. A learning center for power plant equipment and installation maintenance	41	591	9	260	-	-
Health Safety, Environment School (HSE School)	Pusat pembelajaran bidang *Health, Safety & Environment* A learning center for health, safety, and environmental aspects	41	1.019	26	488	-	-
Power Plant Engineering Excellence School (PEE School)	Pusat pembelajaran di bidang enjineering pembangkit A learning center for power plant engineering	29	839	39	132	-	-
Business Development Excellence School (BDE School)	Pusat pembelajaran di bidang Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Korporat. A learning center for corporate business planning and development	9	189	15	86	10	488
Business Enabler School (BEN School)	Pusat pembelajaran terkait dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi Penunjang Bisnis di Indonesia Power A learning center for meeting the Business Support competency requirements at Indonesia Power	53	1.283	36	1.464	20	1,464
Corporate Strategic Initiative School (CSI School)	Pusat pembelajaran dalam pengembangan kompetensi pegawai untuk seluruh proses bisnis yang bersifat korporat. A learning center for developing employee competency for all corporate business processes	36	1.254	27	1.167	24	1,167
Asset Performance Management School I (APM I)	Pusat pembelajaran yang berfokus pada pengelolaan pembangkit (Asset Management) sesuai *best practice* pada Unit Kerja di bawah pengelolaan Direktorat Operasi I. A learning center which focuses on asset management according to best practices at Work Units under the Directorate of Operations I	-	-	-	-	11	289

School	Penjelasan Description	Realisasi Pelatihan 2019 Actual Training in 2019	Realisasi Jumlah Peserta 2019 Actual Number of Partici-pants in 2019	Realisasi Pelatihan 2020 Actual Training in 2020	Realisasi Jumlah Peserta 2020 Actual Number of Partici-pants in 2020	Realisasi Pelatihan 2021 Actual Training in 2021	Realisasi Jumlah Peserta 2021 Actual Number of Partici-pants in 2021
Asset Performance Management School II (APM II)	Pusat pembelajaran yang berfokus pada pengelolaan pembangkit (Asset Management) sesuai best practice pada Unit Kerja dibawah pengelolaan Direktorat Operasi II. A learning center which focuses on Asset Management according to best practices at Work Units under the Directorate of Operations II	-	-	-	-	12	260

Di tahun 2021 terjadi perubahan *School* pada IP Academy yang dikarenakan adanya penyelarasan tata kelola pengembangan kompetensi (*Learning Governance*) di Perusahaan sejalan dengan tata kelola pembangkitan (*Asset Management*) sesuai *best practice*. Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

In 2021, there were some changes to the Schools in IP Academy due to an alignment between the Company's Learning Governance and Asset Management according to the best practices. The change resulted in the following:

1. Power Plant Operation Excellence School (POE School)
2. Power Plant Maintenance Excellence School (PME School)
3. Health Safety, Environment School (HSE School)
4. Power Plant Engineering Excellence School (PEE School)
5. Business Development Excellence School (BDE School)
6. Business Enabler School (BEN School)
7. Corporate Strategic Initiative School (CSI School)

Menjadi
into

1. Asset Performance Management School I (APM I)
2. Asset Performance Management School II (APM II)
3. Business Development Excellence School (BDE School)
4. Business Enabler School (BEN School)
5. Corporate Strategic Initiative School (CSI School)

Secara umum mengalami penurunan realisasi jumlah pelatihan yang dilakukan maupun pesertanya, yang disebabkan oleh karena disain awal pembelajaran dalam IP Academy semula adalah tatap muka, sehingga adanya pembatasan pertemuan secara fisik dalam rangka upaya mendukung rendahnya laju penularan Covid-19. Mengingat perubahan metode pembelajaran dari tatap muka menjadi *online learning* maka diperlukan penyesuaian lebih lanjut untuk unsur-unsur pendukungnya. Adapun pembelajaran secara praktek, praktis tidak dapat dilakukan. Terkait dengan menurunnya jumlah peserta pelatihan terutama dipengaruhi dengan pertimbangan efektivitas program pembelajaran yang dilakukan.

In general, the actual number of trainings held and the attending participants declined. The early learning design at IP Academy required face-to-face interaction. This certainly was difficult to realize given that physical meetings must be restricted in order to suppress the transmission of COVID-19 diseas. Due to a change in the learning method, from face-to-face interaction to online learning, further adjustments were required for the supporting elements. Practical learning was unable to be held. The decline in the number of training participants was mainly due to the consideration over the effectiveness of the learning programs given.

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
EMPLOYEE COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Setelah 5 (lima) *Center of Excellence* dibangun dan mulai dioperasikan, Indonesia Power juga terus mengembangkan keberadaan *Center of Excellence* di berbagai Unit lainnya. Di tahun 2021, Indonesia Power membentuk Anti *Corruption Centre of Excellence* dalam rangka menjadi Perusahaan rujukan di bidang anti korupsi. Selain itu, adanya perubahan *Learning Governance* IP *Academy* berpengaruh kepada jumlah *Learning Unit* yang ada sehingga *total Center of Excellence* dan *Learning Unit* yang dimiliki menjadi sebagai berikut antara lain:

Following the establishment and operation of five (5) Centers of Excellence, Indonesia Power continues to develop more Centers of Excellence in other Units. Indonesia Power established the Anti-Corruption Center of Excellence in 2021 as a reference for combating corruption. In addition, the change in IP Academy's Learning Governance has affected the number of existing Learning Units, rendering the total number of Centers of Excellence and Learning Units owned currently into as follows:

		Penjelasan Description
Center of Excellence	*Fire & Safety Academy (Centre of Excellence* Pandean Lamper) Fire & Safety Academy (Pandean Lamper Center of Excellence)	Pusat pelatihan, *asessment* dan konsultasi bidang K3, PMK dan *Low Rank Coal* bertempat di Pandean Lamper Semarang. A training center and assessment and consultancy center for HSE, Firefighting, and Low Rank Coal located in Pandean Lamper, Semarang
	Maintenance Centre	Pusat pelatihan, *asessment* dan konsultasi bidang pemeliharaan pembangkit bertempat di Semarang. A training center and assessment and consultancy center for power plant maintenance located in Semarang
	Pemaron *Centre of Excellence*	Pusat pelatihan enjiniring bertempat di Pemaron Bali. An engineering training center located in Pemaron, Bali
	Kamojang *Centre of Excellence*	Pusat pelatihan di bidang *Geothermal* guna meningkatkan daya saing dan memajukan pengembangan panas bumi sebagai energi terbarukan. A geothermal training center aiming to enhance competitiveness and promote geothermal development as renewable energy
	Boiler Centre of Excellence	Pusat pelatian, pengujian, *assessment* dan solusi permasalahan *boiler*/ HRSG *pressure part.* Pusat pelatihan ini didorong oleh adanya banyak gangguan di *boiler*, setelah diidentifikasi ternyata didapatkan adanya faktor kompetensi SDM, sehingga dirasakan perlu mendirikan pusat pelatihan dengan fokus pembelajaran *Boiler.* A training, testing, assessment, and solution center for boilers/HRSG pressure parts. The training center was established to address high occurrence of failures at boilers. Upon identification, it was found that human resource competence was also a contributing factor. This is why the establishment of a training center that focuses on boiler is necessary.
	Anti Corruption Centre of Excellence	Pusat pembelajaran di bidang anti korupsi sekaligus sebagai komitmen Perusahaan dalam penerapan GCG di Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, *Anti Corruption* COE bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dan *Transparency* International Indonesia (TII) dalam pengembangan dan *deliver* materi, modul *e-learning* dan Instruktur. A training center for anti-corruption effort as the embodiment of the Company's commitment to implementing GCG. In its operation, the Anti-Corruption COE collaborates with the Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), and Transparency International Indonesia (TII) in developing and delivering materials and e-learning modules and procuring instructors.

		Penjelasan Description
Learning Unit	Labuan *Learning Unit*, Pangkalan Susu, *Learning Unit*, Adipala *Learning Unit*, dan 14 *Learning Unit* lainnya yang tersebar di Unit Kerja Indonesia Power Labuan Learning Unit, Pangkalan Susu Learning Unit, Adipala Learning Unit, and 14 other Learning Units spread across Indonesia Power's Work Units	*Learning Unit* merupakan lokasi pembelajaran yang mendukung keunggulan dari *Centre of Excellence.* Learning Units are learning facilities that support the excellence of the Centers of Excellence.

Maintenance Center (COE Pemeliharaan) berlokasi di PLTU 1-2 Semarang direncanakan akan dievaluasi kembali, mengingat adanya hal-hal berikut:

1. Usia peralatan pembangkit sebagai media praktek yang telah melebihi masa manfaat 40 tahun;
2. Teknologi peralatan pembangkit yang telah *obsolete* sehingga tidak relevan lagi dengan teknologi pembangkit saat ini; serta
3. Biaya operasional tinggi yang meliputi biaya listrik, biaya pemeliharaan dan perawatan rutin.

The Maintenance Center (Maintenance COE) which is located in SPP 1-2 Semarang will be re-evaluated due to the following factors:

1. The useful life of 40 years of the power plant equipment used for practices has been exceeded;
2. Obsolete technology rendering power plant equipment no longer relevant with current power generation technology; and
3. High operational costs for electricity and regular maintenance.

Untuk tahun 2021, perkembangan COE *Anti-Corruption* telah melakukan serangkaian kegiatan pada awal pembentukannya, antara lain:

1. Bekerja sama dengan Lembaga Anti Korupsi baik Lembaga Pemerintah maupun independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dan *Transparency International* Indonesia (TII).
2. Melaksanakan pelatihan sebagai penunjang implementasi anti korupsi di Perusahaan, meliputi:

Since its early establishment in 2021, the Anti-Corruption COE has carried out a number activities, including:

1. Cooperation with Government-owned and independent anti-corruption institutions, i.e. Corruption Eradication Commission (KPK), Indonesia Corruption Watch (ICW), and Transparency International Indonesia (TII).
2. Provision of trainings to promote anti-corruption efforts in the Company, which include:

No	Judul Pembelajaran Title of Learning	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (person)
1	*E-Learning* Anti Korupsi & *Fraud Risk Asessment Anti Corruption* E-Learning on Anti-Corruption & Fraud Risk Assessment	15-16 Maret 2021 March 15-16, 2021	22
2	*E-Learning* Anti Korupsi & *Fraud Risk Asessment Batch* 1 E-Learning on Anti-Corruption & Fraud Risk Assessment Batch 1	5-7 Juli 2021 July 5-7, 2021	22
3	*E-Learning* Anti Korupsi & *Fraud Risk Asessment Batch* 2 E-Learning on Anti-Corruption & Fraud Risk Assessment Batch 2	12-14 Jul 2021 July 12-14, 2021	29
4	*E-Learning Assessment* Implementasi GCG Tahun 2021 E-Learning Assessment on GCG Implementation 2021	25-26 November 2021 November 25-26, 2021	11
5	*E-Learning Awareness Internal Audit Course* ISO 37001 ABMS *Batch* 1	8-11 & 15 Februari 2021 February 8-11 & 15, 2021	18
6	*E-Learning Awareness Internal Audit Course* ISO 37001 ABMS *Batch* 2	8-11 & 15 Februari 2021 February 8-11 & 15, 2021	22

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
EMPLOYEE COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Hingga akhir tahun 2021 terdapat 622 orang Instruktur yang terdaftar sebagai Instruktur Perusahaan, 445 orang memiliki kompetensi di bidang operasi dan 177 orang memiliki kompetensi di bidang pemeliharaan dengan jumlah Instruktur yang aktif mengajar di sepanjang tahun 2021 sebanyak 313 Orang.

At the end of 2021, the Company had 622 registered instructors in which 445 of them are competent in operations and 177 are competent in maintenance. 313 instructors were active throughout 2021.

Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training

Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pegawai dapat menjalankan pekerjaannya. Yaitu memenuhi kompetensi bidang sesuai Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) yang diembannya sehingga mendukung produktivitas di lingkungan kerja. Adapun jenis Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan mencakup:

1. **Program Pembelajaran Prajabatan**
   Merupakan kegiatan proses seleksi untuk mengevaluasi kesesuaian karakter dan kompetensi Peserta dengan KKJ, serta untuk memberikan pengenalan dan pemahaman kepada peserta mengenai bisnis inti Perusahaan dan kompetensi standar kelistrikan.
   Program Pembelajaran Prajabatan dapat terdiri dari:
   a. Pembinaan Sikap Mental Disiplin;
   b. Orientasi Perusahaan;
   c. Pembidangan; dan
   d. *On the Job Training* (OJT).

2. **Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi**
   Diselenggarakan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pengembangan kompetensi bidang untuk memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) Bidang yang dipersyaratkan pada Jabatan dan sesuai dengan struktur profesi yang berlaku di Perusahaan. Materi Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi mengacu pada standar KKJ dan/atau standar Profesi yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan bisnis Perusahaan. Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan untuk pegawai berupa sertifikasi *mandatory*, sertifikasi ekspertise dan sertifikasi keahlian.
   a. Sertifikasi mandatori: sertifikasi wajib yang harus dilaksanakan dan dipunyai pegawai sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan BAB XI LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN, Bagian Kedua Keteknikan Pasal 44, ayat (6) berbunyi : “Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi”.
   b Sertifikasi *Ekspertise*: sertifikasi keahlian bidang pembangkitan listrik yang hanya diakui internal Indonesia Power, namun dalam perkembangannya sertifikasi untuk *ekspertise* ini juga mengakomodasi sertifikasi kompetensi baik nasional maupun internasional dari asosiasi/pabrikan sesuai dengan bidang *Ekspertise*. Para Ekspertise ini tergabung dalam Community of Expertise (ComEt) yang merupakan sebuah komunitas keahlian pembangkitan di lingkungan internal Indonesia Power.

Education and training for all employees is given to ensure that every employee can perform their duties. It is to meet area competency according to their Job Competency Requirements which eventually enhances productivity at work. The types of education and training provided include:

1. **Pre-Service Learning Program**
   A selection program aiming to evaluate the conformity between participants’ characters and competencies and the Job Competency Requirements as well to give introduction to and understanding about the Company’s core business and standard electricity competencies.
   Pre-Service Learning Program may consist of:
   a. Discipline Building;
   b. Company Orientation;
   c. Job Division; and
   d. On-the-Job Training (OJT).

2. **Profession and Certification Learning Program**
   A part of competency coaching and development to meet the mandatory Job Competency Requirements for certain Departments in accordance with the applicable professional structure of the Company. The materials for the Profession and Certification Learning Program refer to the nationally and internationally-applicable professional standards that are relevant to the Company’s business. The employees are set to receive mandatory certifications, expertise certifications, and skill certifications.

   a. Mandatory certification: should be taken and owned by employees according to Law No. 30 of 2009 on Electricity CHAPTER XI ENVIRONMENT AND ENGINEERING, Part Two Engineering Article 44, sub-artilce (6), written: “Every engineer in electricity business shall obtain competency certificate.”

   b Expertise Certification: electricity-related expertise certifications acknowledged only internally in Indonesia Power. In its development, the expertise certification also accommodates national and international competency certifications from other associations/manufactures according to relevant fields of expertise. These experts are accommodated in the Community of Expertise (ComEt), which is an internal power generation expertise community at Indonesia Power.

c. Sertifikasi Keahlian: sertifikasi keahlian bidang secara umum dan pengakuan oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional, seperti sertifikasi vibrasi oleh Mobius International, *infrared thermography* oleh asosiasi *Infrared Thermography*, C*ertified Refractory Personnel* oleh *American Petroleum Institute* (API) dan lain sebagainya.

3. Program Pembelajaran Kepemimpinan

Adalah diklat kepemimpinan yang diselenggarakan Indonesia Power sebagai bagian dari proses pengembangan kompetensi dan pembinaan karir Pegawai untuk memenuhi Kompetensi Utama, Kompetensi Peran dan Kompetensi Bidang yang dipersyaratkan pada setiap Jenjang Jabatan sesuai tuntutan jalur karir yang diproyeksikan bagi Pegawai. Program Pembelajaran Kepemimpinan terdiri atas:

a. *Executive Education* (EE)
   Yaitu pembelajaran untuk memenuhi Kompetensi Utama dan Peran, serta Kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada Jenjang Jabatan struktural;
b. *Strategic Specialist Education* (SSE)
   Yaitu pembelajaran untuk memenuhi Kompetensi Utama dan Peran, serta Kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada Jenjang Jabatan fungsional;
c. *Leadership Development Program Series* (LDP)
   Yaitu pembelajaran untuk menyiapkan pemimpin yang mampu bersaing pada level BUMN.

4. Program Pembelajaran Inisiatif Stratejik Korporat

Merupakan program Pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja Unit/Korporat dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau berbasis *Business Issue/ Performance* dan *Business Concern.*

5. Program Pembelajaran Penunjang

Adalah pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan di luar Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi, maupun Program Pembelajaran Kepemimpinan. Pembelajaran Penunjang tidak bersifat wajib, dan dilaksanakan sesuai kebutuhan Perusahaan. Pembelajaran Penunjang meliputi:

a. Pendidikan Formal;
b. *Workshop*/Lokakarya/Seminar;
c. *Knowledge Management.*

6. Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti

Diselenggarakan untuk memberikan pembekalan dan persiapan bagi Pegawai dalam menghadapi Masa Purna Bakti yang memuat materi penyiapan sikap, mental, perilaku Pegawai dan isteri/suami dalam masa pensiun. Peserta Program Pembekalan Masa Purna Bakti adalah Pegawai yang memiliki sisa masa kerja maksimum 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal atau Pegawai yang berhak mendapat Program Pembekalan akibat terbitnya suatu kebijakan Direksi dengan ketentuan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai atau tidak sedang menjalani sanksi disiplin.

c. Skill Certification: skill certifications in general and acknowledgment by national and/or international certification bodies, such as vibration certification by Mobius International, infrared thermography by Infrared Thermography association, Certified Refractory Personnel by the American Petroleum Institute (API), and others.

3. Leadership Learning Program

A leadership education and training program held as a part of the employee competency and career development. This program aims at meeting the Main Competency, Role Competency, and Area Competency required for each Position Level according to the career expected for the relevant employees. The Leadership Learning Program consists of:

a. Executive Education (EE)
   A learning program which aims at meeting Main, Role, and Area Competencies required for structural Position Level;

b. Strategic Specialist Education (SSE)
   A learning program which aims at meeting Main, Role, and Area Competencies required for functional Position Level;
c. Leadership Development Program Series (LDP)
   A learning program for preparing competitive leaders at SOE level.

4. Corporate Strategic Initiative Learning Program

A learning program which aims at improving Unit/Corporate performance in short- and long-terms or according to Business Issue/Performance and Business Concern.

5. Support Learning Program

An education and training program required aside of the Certification Learning Program and the Leadership Learning Program. Support Learning Program is non-mandatory in nature and provided as required. Support learning includes:

a. Formal Education;
b. Workshop/Seminar;
c. Knowledge Management.

6. Post-Employment Preparation Education and Training

Provided to coach and prepare the employees in facing post-employment period that contains the materials on preparing attitude, mental, and behavior of the employees and their spouse in retirement period. Participants of Post-Employment Preparation Education and Training are employees whose remaining term of office is maximum five (5) years prior to the normal retirement age or those reserving the right to receive the Preparation Program due to the issuance of Board of Directors' policy, as long as they are not currently under investigation of disciplinary violation or undergoing disciplinary sanction.

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
EMPLOYEE COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Realisasi pendidikan dan pelatihan pegawai selama tahun 2021 adalah:

All educations and trainings provided to employees throughout 2021 were as follows:

Tabel Rata-rata Jam Pelatihan Berdasarkan Kategori Pegawai Tahun 2021
Average Training Hours by Employee Category in 2021

Program Pelatihan Training Program	Durasi (Jam) Duration (hour)			Jumlah Peserta (Orang) Number of Participants (person)			Rata-rata Jam Pelatihan (Durasi/Orang) Average Training Hours (duration/person)		
	Manajemen Management	Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Staff	Jumlah Total	Manajemen Management	Staff	Jumlah Total
Diklat yang dikelola IP Academy Education & Training under IP Academy									
Program Pembelajaran Prajabatan Pre-Service Learning Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi Profession and Certification Learning Program	2,488	38,984	41,472	79	1,205	1,284	31	32	32
Program Pembelajaran Kepemimpinan Leadership Learning Program	16,256	45,312	61,568	146	526	672	111	86	92
Program Pembelajaran Inisiatif Stratejik Korporat Corporate Strategic Initiative Learning Program	17,248	82,872	100,120	286	1,793	2,079	60	46	48
Program Pembelajaran Penunjang Support Learning Program	1,416	25,256	26,672	57	821	878	25	31	30
Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti Post-Employment Preparation Education and Training	0	48	48	0	2	2	0	24	24
Jumlah Total	**37.408**	**192.472**	**229.880**	**568**	**4.347**	**4.915**	**66**	**44**	**47**

Selama tahun 2021, Indonesia Power telah melaksanakan program diklat kepada 3.231 pegawai dengan jumlah jam pelatihan mencapai 229.880 jam sehingga rata-rata jam pelatihan mencapai 71 jam per pegawai. Pelaksanaan pembelajaran untuk pegawai dilaksanakan sesuai dengan hasil *Training needs analysis* (TNA) baik itu TNA Korporat yang berbasis *Business Issue* dan *Business Concern* (berbasis RJP Perusahaan) dan TNA berbasis *gap* kompetensi individu, sehingga setiap pegawai dimungkinkan mengikuti pengembangan kompetensi lebih dari 1 (satu) kali, hal ini dicerminkan dari angka realiasasi jumlah peserta sebesar 4.915 pegawai. Dalam rangka meningkatkan efektivas pelatihan, Perusahaan secara berkala melaksanakan *assessment Human Capital Readiness* (HCR) untuk aspek peningkatan kompetensi mencapai indeks sebesar 4,56 meningkat dari indeks tahun sebelumnya sebesar 4,10 dari skala maksimum 5. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan proses dan hasil dari pengembangan kompetensi pegawai Indonesia Power semakin menunjang pencapaian kinerja Perusahaan.

In 2021, Indonesia Power had provided education and training programs to 3,231 employees, at a total of 229,880 training hours, making the average of 71 training hours/employee. The trainings for the employees were provided in accordance with the Training Needs Analysis (TNA), both for Corporate TNA which was based on Business Issues and Business Concerns (based on Company's Long Term Plan) and for TNA based on individual competency gaps. Therefore, it is possible for each employee to attend more than one competency development trainings. This was evidenced with the total number of employees receiving the trainings at 4,915 persons. To increase the effectiveness of training, the Company regularly performs Human Capital Readiness (HCR) assessment for competency development aspect whose index increased to 4.56 from 4.10 in the previous year, out of the maximum scale of 5. This indicates that the maturity of employee competency development process and result at Indonesia Power progressively support the Company's performance.

Akselerasi Kompetensi Bidang Operasi dan Pemeliharaan
Operations and Maintenance Competency Acceleration

Program akselerasi kompetensi operasi dan pemeliharaan yang diluncurkan sejak Januari 2017, diyakini menjadi cara terbaik untuk membekali pegawai Indonesia Power menjadi tenaga ahli yang mampu mengoperasikan dan memelihara pembangkit-pembangkit baru dalam waktu 2-3 tahun, dari waktu yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi tersebut sekitar 5-6 tahun. Metode pembelajaran dilakukan secara *blended learning*, yaitu *In Class Training* 30% dan *On The Job Training* 70%. Di tahun 2021, tujuan untuk mengakselerasi kompetensi pegawai bidang O&M sudah tercapai sehingga konten program akselerasi kompetensi ini telah menjadi program pelatihan reguler di Indonesia Power.

The acceleration of operations and maintenance competency launched since January 2017 is believed to be the best method to prepare Indonesia Power employees to become experts who are able to operate and maintain new power plants within a span of 2-3 years, instead of the normal duration of 5-6 years to master such competency. The competency development is provided through blended learning which combines class training (30%) and on-the-job training (70%). In 2021, the acceleration targeting at closing the employees' competency in O&M has been achieved, thus the content of the competency acceleration program has a regular training program at Indonesia Power.

Pendidikan Formal
Formal Education

Indonesia Power senantiasa memfasilitasi pegawai untuk mendapatkan kualifikasi profesional yang memadai melalui jalur pendidikan formal guna terus meningkatkan kinerja organisasi. Jurusan yang diambil antara lain adalah teknik dan sumber daya manusia, baik di Perguruan Tinggi Negeri seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Gajah Mada maupun perguruan tinggi di luar negeri seperti Universiti Teknologi Malaysia. Untuk tahun 2021, jumlah pegawai yang sedang melanjutkan pendidikan dan dinyatakan lulus adalah sebanyak 15 orang dari Indonesia Power dan PLN.

Indonesia Power facilitates its employees to receive proper professional qualifications via formal education in order to continuously improve organizational performance. The majors pursued were including engineering and human capital in state universities such as the University of Indonesia, Bandung Institute of Technology, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Gadjah Mada University, and foreign universities such as Universiti Teknologi Malaysia. In 2021, 15 employees from Indonesia Power and PLN who were continuing their education have graduated.

	Tingkat pendidikan (S1/S2) Education Level (Bachelor's/Master's Degree)	Universitas University	Jurusan Major	Jumlah peserta Number of Participants
Program Pendidikan Education Program	S2 Master's Degree (S2)	Universitas Indonesia University of Indonesia	Teknik Sistem Energi (Program PLN) Energy System Engineering (PLN Program)	1
	S2 Master's Degree (S2)	Universitas Gajah Mada Gadjah Mada University	Profesi Psikologi (Program PLN) Professional Psychology (PLN Program)	1
	S2 Master's Degree (S2)	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh Nopember Institute of Technology	Manajemen Energi (Program Indonesia Power & Program PLN) Energy Management (Indonesia Power and PLN Program)	13

Sejak tahun 2017 hingga Desember 2021 sebanyak 54 Orang pegawai telah lulus Pendidikan Formal program Magister (S2) pada 12 Jurusan dari 4 Universitas dalam negeri dan 3 Universitas luar negeri.

From 2017 to December 2021, 54 employees have graduated from postgraduate program (S2) from 12 majors in 4 national universities and 3 international universities.

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
EMPLOYEE COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Sertifikasi
Certifications

Indonesia Power memastikan tersedianya tenaga kerja yang terampil dalam bidang ketenagalistrikan melalui program sertifikasi bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di bidangnya. Sertifikasi ini merupakan salah satu keunggulan Indonesia Power dalam hal sumber daya Manusia dan menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjalankan bisnis, baik itu bisnis saat ini ataupun bisnis Perusahaan ke depan (*Beyond* kWh). Jenis sertifikasi pegawai yang diselenggarakan untuk tahun 2021, mengalami perubahan dan penyesuaian dibanding tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh *training need analysis* (TNA) unit kerja yang berfokus pada *business issue* dan *business concern* sebagai berikut:

In collaboration with certification bodies, Indonesia Power holds certification programs in order to ensure the availability of skilled manpower in electricity sector. These certifications demonstrate Indonesia Power's excellence in human capital department and become the supporting factor in running business, both current and in the future (Beyond KWh). The types of employee certification programs provided in 2021 were changed and adjusted from the previous year, due to Work Unit's training need analysis (TNA) which focused on the following business issues and business concerns:

No	Jenis sertifikasi Type of Certification	Jumlah Peserta 2020 Number of Participants in 2020	Jumlah Peserta 2021 Number of Participants in 2021
1	**Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan** **Electricity Engineer Competency Certification**	**573**	**672**
1.1	Operasi Operations	296	330
1.2	Pemeliharaan Maintenance	277	342
2	**Sertifikasi K3 & Lingkungan OHSE Certification**	**410**	**311**
2.1	*Accident Investigation*	39	3
2.2	Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik (AK3L) Electricity Occupational Health and Safety Expert (AK3L)	39	1
2.3	Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U) General Occupational Health and Safety Expert (AK3U)	27	8
2.4	Auditor Energi Industri Industry Energy Auditor	11	8
2.5	Auditor Energi Termal & Mekanikal Mechanical & Thermal Energy Auditor	27	1
2.6	Damkar C Firefighting Class C	100	11
2.7	Damkar D Firefighting Class D	7	7
2.8	Manajer Energi Industri Industry Energy Manager	25	2
2.9	Operator Forklift Kelas II Forklift Operator Class II	23	2
2.10	Operator *Overhead Crane* Kelas III Overhead Crane Operator Class III	23	11
2.11	Pembinaan Dan Sertifikasi Teknisi K3 Bekerja Pada Bangunan Tinggi Tk. 2 Coaching and Certification for High-Rise Building OHS Technician Lv. 2	8	14
2.12	Penentuan Potensi Pencemaran Dan Karakteristik Limbah B3 (Manajer) Hazardous and Toxic Waste Characteristics and Pollution Potential Determination (Manager)	16	1
2.13	Petugas K3 Kimia Chemical OHS Officer	17	4
2.14	*Port Facility Security Officer* (PFSO)	22	2
2.15	Sertifikasi Auditor SMK3 SMK3 Auditor Certification	26	1
2.16	Sertifikasi *Life Cycle Assessment* (LCA) Life Cycle Assessment (LCA) Certification		59
2.17	Sertifikasi Petugas P3K First Aid Officer Certification		3

No	Jenis sertifikasi Type of Certification	Jumlah Peserta 2020 Number of Participants in 2020	Jumlah Peserta 2021 Number of Participants in 2021
2.18	Sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tingkat Tinggi 2 (TKBT 2) Certification for High-Rise Building Labor 2 (TKBT 2)		5
2.19	*Training* Dan Sertifikasi Auditor Energi Energy Auditor Training and Certification		9
2.20	*Training* Dan Sertifikasi Manajer Energi Energy Manager Training and Certification		8
2.21.	*Training* Dan Sertifikasi PLB3 Hazardous and Toxic Waste Management Training and Certification		46
2.22	*Training* Dan Sertifikasi POPA Wastewater Management Operational Officer (POPA) Training and Certification		19
2.23	*Training* Dan Sertifikasi POPU Air Pollution Control Officer (POPU) Training and Certification		26
2.24	*Training* Dan Sertifikasi PPPA Water Pollution Control Officer (PPPA) Training and Certification		32
2.25	*Training* Dan Sertifikasi PPPU Air Pollution Control Officer (PPPU) Training and Certification		28
3	**Sertifikasi Keahlian Expertise Certification**	**276**	**206**
3.1	*Certified IT Procurement Expert*	8	2
3.2	*Certified Supply Chain Professional*	45	3
3.3	*E-Learnig* Sertifikasi PFSO-ISPS *Code* E-Learning on PFSO-ISPS Code Certification	4	2
3.4	*E-Learning Certified Corporate Culture Specialist*	1	3
3.5	*E-Learning Certified Human Resource Program Basic for HR Supervisor*	5	2
3.6	*E-Learning Certified Learning Technologist Module 1*	13	12
3.7	*E-Learning Certified Information Systems Auditor (CISA)*	20	2
3.8	*E-Learning ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL)*	3	3
3.9	*E-Learning GRI Standards Certified Training on Sustainability Reporting*	2	2
3.10	QRMP (*Qualified Risk Management Professional*)	7	41
3.11	QRMA (*Qualified Risk Management Analyst*)	4	23
3.12	LCA (*Life Cycle Assessment*)	5	1
3.13	*E-Learning* Pelatihan dan Sertifikasi Perancangan Kontrak E-Learning on Contract Designing Training & Certification	3	4
3.14	*E-Learning* Sertifikasi QIA Tingkat Dasar E-Learning on Basic QIA Certification	22	4
3.15	*E-Learning* Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan E-Learning on Advanced QIA Certification	8	11
3.16	*E-Learning* Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial E-Learning on Managerial QIA Certification	18	6
3.17	QRMO (*Qualified Risk Management Officer*)	41	7
3.18	*E-Learning* Sertifikasi TKBT Level 2 E-Learning on Level 2 TKBT Certification	62	1
3.19	*E-Learning* Uji Sertifikasi Kompetensi PLTS E-Learning on SoPP Competency Certification Test		14
3.20	ICT Pelatihan dan Sertifikasi *Welding Inspector* ICT on Welding Inspector Training and Certification		4

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
EMPLOYEE COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

No	Jenis sertifikasi Type of Certification	Jumlah Peserta 2020 Number of Participants in 2020	Jumlah Peserta 2021 Number of Participants in 2021
3.21	ICT *Training* dan Sertifikasi Cisco *Certified Network Associate* ICT on Cisco Certified Network Associate Training and Certification		3
3.22	*In Class Training* Sertifikasi NDT *Ultrasonic* In-Class Training on NDT Ultrasonic Certification		1
3.23	Sertifikasi API-936 API-936 Certification		5
3.24	Sertifikasi LCA ALLIN LCA ALLIN Certification		1
3.25	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 Goods and Services Procurement Certification 2021		46
3.26	*Training* & Sertifikasi Vibrasi *Level* 1 Vibration Training and Certification Level 1		3

Jumlah realisasi peserta pada jenis sertifikasi tertentu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena terdapat personil pegawai yang sertifikasinya masih berlaku sehingga tidak terdapat kebutuhan sertifikasi bagi yang bersangkutan.

The actual number of attending participants for certain certifications declined compared to the previous year as several personnel whose certificates were still valid did not need any additional certification program.

Sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah pegawai yang telah mempunyai sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan aktif adalah sebanyak 1.750 dari jumlah pegawai O&M sebanyak 1.832 atau 96% pegawai tersertifikasi dari total pegawai O&M yang wajib sertifikasi. Rotasi, mutasi pegawai serta adanya rekrutmen pegawai baru di bidang Operasi & pemeliharaan mengakibatkan peningkatan dan/atau penurunan persentase pegawai O&M tersertifikasi dalam satu tahun. Berikut trend persentase sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk pegawai O&M dalam 4 tahun terakhir:

As of December 31, 2021, 1,750 out of 1,832 O&M employees have received the electrical engineering personnel competency certifications. This makes up 96% (1,750 personnel) of the total number of O&M employees with mandatory certification. Rotation, transfer, and recruitment of operations and maintenance personnel has resulted in the decline and/or increase in the percentage of certified O&M personnel within a year. The following table shows the trend of O&M personnel competency certification for the past four (4) years:

Tabel Persentase Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Untuk Pegawai O&M Tahun 2018-2021
Percentage of Electrical Engineering Personnel Competency Certification for O&M Employees in 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Prosentase pegawai O&M tersertifikasi Percentage of certified O&M employees	72%	84%	78%	96%

Dari pelaksanaan sertifikasi di atas, Sertifikasi Kompentensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan diwajibkan Perusahaan untuk setiap pegawai Operasi dan Pemeliharaan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2016 pasal 25 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan bahwa setiap tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi. Untuk pelaksanaan sertifikasi lainnya bersifat *non mandatory*. Pelaksanaan program Sertifikasi Kompetensi di tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

From the above programs, the Electrical Engineering Personnel Competency Certification is mandatory for all Operations and Maintenance employees, as stipulated by the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 10 of 206 Article 25 on Procedures for Electricity Accreditation and Certification, which requires electrical engineering personnel working in electricity industry to hold Competency Certificate. Other certifications, on the other hand, are non-mandatory. The Competency Certification programs held in 2020 and 2021 are shown in the following table:

Tabel Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Tahun 2020-2021
Table of Implementation of Competency Certification for Electrical Engineering Personnel in 2020-2021

Program Sertifikasi Kompetensi Competency Certification Program	Ukuran Size	2020			2021		
		Target	Realisasi Realization	%Capaian % Achieved	Target	Realisasi Realization	%Capaian % Achieved
Sertifikasi Baru New Certificate	Jumlah Pegawai Number of Employees	573	573	100%	384	384	100%
	Jumlah Unit Kompetensi Total Competency Unit	573	573	100%	384	384	100%
Sertifikasi Perpanjangan Renewed Certificate	Jumlah Pegawai Number of Employees	-	-	-	288	288	100%
	Jumlah Unit Kompetensi Total Competency Unit	-	-	-	288	288	100%

Untuk tahun 2021 realisasi sertifikasi kompetensi teknik ketenagalistrikan (sertifikasi baru) rendah, disebabkan karena minimnya rotasi & mutasi pegawai serta tidak adanya rekrutmen pegawai baru. Hal ini mengakibatkan rendahnya kebutuhan sertifikasi baru di tahun 2021. Namun terdapat sertifikasi perpanjangan mengingat banyak pegawai yang masa berlaku sertifikasinya akan habis di tahun 2021.

For 2021, the number of newly certified electricity personnel was low due to small frequency of employee rotation & mutation and no new employee recruitment. This resulted in low requirement of new certifications in 2021. Nevertheless, certificate renewal was sought after as many of the employees' certificates were expired in 2021.

Community of Expertise
Community of Expertise

Sebelumnya Indonesia Power menerapkan COMET 1.0 (pengakuan dari internal) berubah menjadi COMET 2.0 (diperluas dengan pengakuan dari pihak eksternal). COMET 2.0 mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor: 17.K/010/IP/2019 tentang Sistem *Ekspertise* Operasi Pemeliharaan dan Enjiniring (OME), dimana pengembangan *ekspertise* dilakukan dengan tahapan berikut:

Previously, Indonesia Power implemented COMET 1.0 (internal acknowledgment) which now has developed into COMET 2.0 (extended with external acknowledgment). COMET 2.0 refers to the Decree of the Board of Directors No. 17.K/010/IP/2019 on Operations and Maintenance and Engineering (OME) Expertise System in which the expertise development was sought under the following stages:

Senior Expert	- Sebagai Narasumber Konferensi Internasional - *Member* komunitas *Expert* Internasional - Evaluator jurnal Internasional	- As speaker at international conferences - Member of international expert community - Evaluator of international journals
Expert	- Pendidikan formal S3 - Sertifikasi Level 7 KKNI - Pembekalan Sertifikasi Level 8-9 KKNI - Penugasan 3-4 Multi Sistem - Sebagai Narasumber Konferensi Internasional/ Nasional - *Member* Komunitas *Expert* Internasional - Evaluator jurnal Nasional	- Formal education: Doctorate Degree - KKNI Level 7 certified - KKNI Levels 8-9 certification briefed - 3-4 multi-system secondment - As speaker at international/national conferences - Member of international expert community - Evaluator of national journals
Senior Specialist	- Pendidikan formal S2 - Pembekalan Sertifikasi Level 7 KKNI - Sertifikasi Level 3 Asosiasi/Pabrikan - Sebagai Narasumber Konferensi Nasional/ Internasional - *Member* Komunitas *Expert* Internasional - *Short Course* penulisan ilmiah Internasional - *Short Course* Bahasa Internasional - *Joint research* Internasional - Penugasan 1-2 Multi Sistem	- Formal education: Master's Degree - KKNI Level 7 certification briefed - Association/Manufacture Level 3 certified - As speaker at national/international conferences - Member of international expert community - International scientific writing short course - International language short course - International joint research - 1-2 multi-system secondment

KOMPOSISI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
EMPLOYEE COMPOSITION AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Specialist	- Pendidikan formal S1 - Pembekalan Sertifikasi Level 6 KKNI - Sertifikasi Level 2 Asosiasi/Pabrikan - Pembekalan sertifikasi Level 3 Asosiasi/Pabrikan - Sebagai Narasumber Konferensi Nasional - *Short Course* penulisan ilmiah level Nasional - *Short Course* Bahasa Inggris - *Joint research* - *Member* komunitas *Expert* Nasional	- Formal education: Bachelor's Degree - KKNI Level 6 certification briefed - Association/Manufacture Level 2 certified - Association/Manufacture Level 3 certification briefed - As speaker at national conferences - National scientific writing short course - English short course - Joint research - Member of national expert community
Candidate	- Sertifikasi Level 1-3 KKNI - Pembekalan sertifikasi Level 4-5 KKNI - Sertifikasi Level 1 Asosiasi/Pabrikan - Pembekalan sertifikasi Level 2 Asosiasi/Pabrikan	- KKNI Levels 1-3 certified - KKNI Levels 4-5 certification briefed - Association/Manufacture Level 1 certified - Association/Manufacture Level 2 certification briefed
	Persiapan *Candidate:* - Pembekalan sertifikasi Level 1-3 KKNI - Pembekalan sertifikasi Level 1 Asosiasi/Pabrikan	Candidate preparation: - KKNI Levels 1-3 certification briefed - Association/Manufacture Level 1 certification briefed

Hingga tahun 2021, Indonesia Power telah memiliki 6 (enam) orang *expertise* yang telah menempati jabatan *specialist, expert* dan *senior expert.*

In 2021, Indonesia Power has had six (6) personnel with expertise who assumed the positions as specialist, expert, and senior expert.

Biaya Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development Costs

Selama tahun 2021, Indonesia Power menyusun anggaran pengembangan kompetensi pegawai untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi serta pengembangan kompetensi lainnya dalam rangka meningkatkan *hard* dan *soft competency* terutama terkait dengan *business issues* dan *business concern* Perusahaan.

In 2021, the employee competency development budget was prepared for providing trainings and educations, certification programs, and other competency development programs,in order to enhance hard and soft competencies, particularly pertaining to the Company's business issues and business concerns.

Realisasi anggaran pengembangan kompetensi pegawai untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp32,53 miliar mengalami penurunan sebesar 7,8% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp35,10 miliar, yang disebabkan adanya penyesuaian target sebagai dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi realisasi program pembelajaran yang dilakukan dan efisiensi anggaran dengan adanya perubahan metode pembelajaran dari tatap muka menjadi *online.*

The actual spending for employee competency development in 2021 was Rp32.53 billion, which declined 7.8% from 2020 at Rp35.10 billion due to a target adjustment as an impact of the COVID-19 pandemic. The circumstance affected the learning programs held, while budget efficiency was obtained due to a change in learning method, from face-to-face to online learning.

Tabel Realisasi Anggaran Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2018-2021
Table of Education and Training Spending in 2018-2021

Uraian Description	Tahun (Rp Miliar) Year (Rp billion)			
	2018	2019	2020	2021
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Cost	78,524	79,1	29,8	29,5
Biaya Sertifikasi Pegawai Employee Certification Cost	10,008	8,9	5,3	3,03
Jumlah Realisasi Anggaran Total Budget Realization	**88,532**	**88,00**	**35,10**	**32,53**

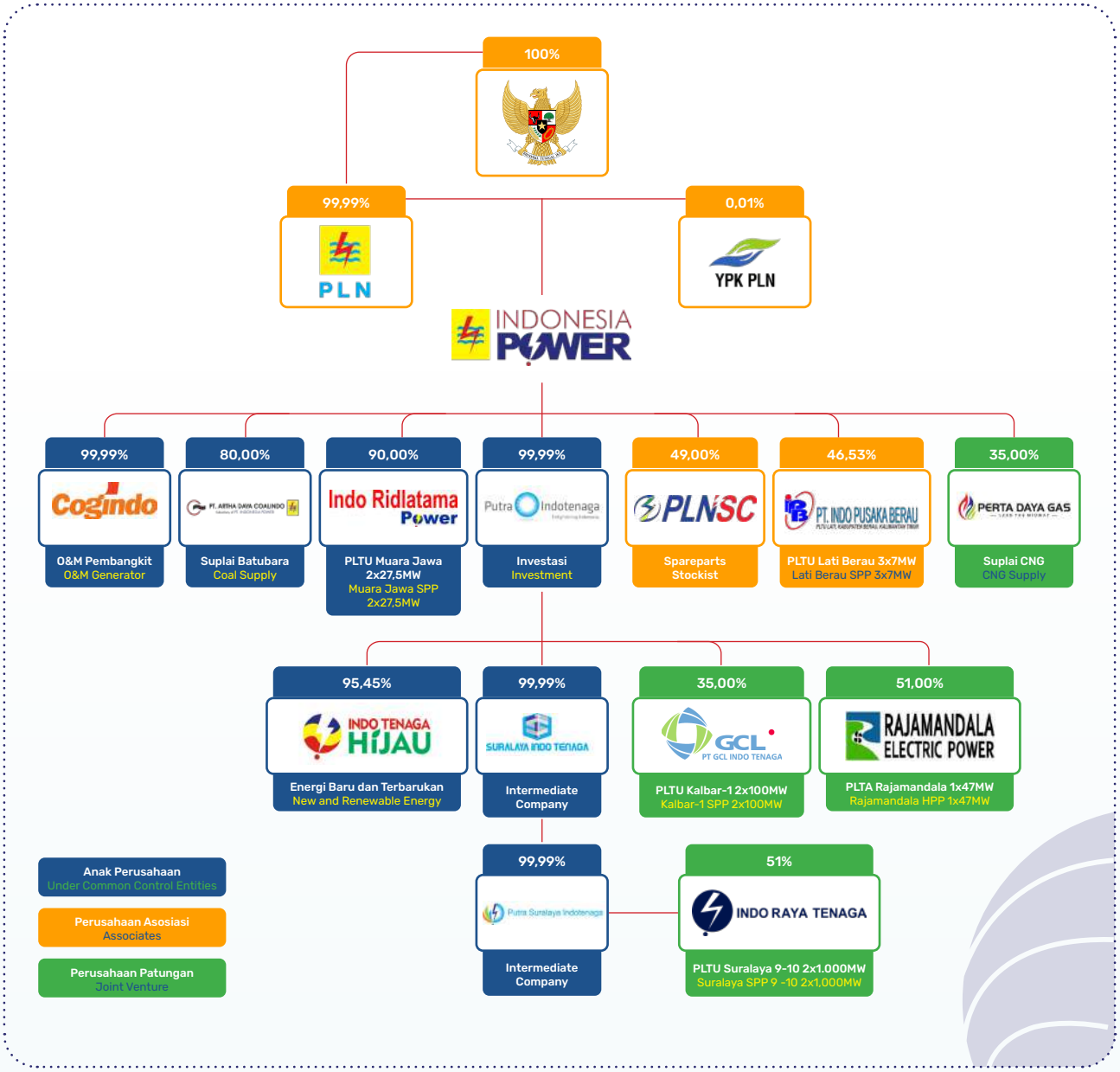
STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
CORPORATE GROUP STRUCTURE

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan portofolio usaha secara lebih sistematis dan komprehensif, Indonesia Power telah membentuk *Division of Subsidiaries and Corporate Fundings* (DIV SCF) yang mewadahi mekanisme hubungan *parenting* terhadap Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan maupun Perusahaan Asosiasi.

To have more systematic and comprehensive business portfolio management, Indonesia Power has established the Division of Subsidiaries and Corporate Fundings (DIV SCF) that manages the mechanism of parenting relationship with Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates.

Saat ini, Indonesia Power memiliki struktur grup Perusahaan yang terdiri dari 4 (empat) Anak Perusahaan, 1 (satu) Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*), 2 (dua) Perusahaan Asosiasi serta 5 (lima) *Special Purpose Company* (SPC) serta 1 (satu) Anak Perusahaan di bawah PT Putra Indotenaga, sebagaimana tergambar dalam struktur di bawah ini:

Indonesia Power Group structure currently has four (4) Subsidiaries, one (1) Joint Venture, two (2) Associates, five (5) Special Purpose Companies (SPC), and one (1) Subsidiary under PT Putra Indotenaga, as shown in the structure below:



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
CORPORATE GROUP STRUCTURE

Anak Perusahaan merupakan suatu perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia Power, memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional anak perusahaan untuk memperoleh manfaat dari aktivitas Anak Perusahaan tersebut.

A Subsidiary is an entity controlled by Indonesia Power, in which Indonesia Power has the authority to regulate the financial and operational policies of the subsidiary to gain benefits from the activities of such subsidiary.

Perusahaan *Joint Venture* (Perusahaan Patungan) merupakan perusahaan bersama dimana para pihak mempunyai bagian partisipasi, dan diatur oleh persetujuan untuk berbagi pengendalian ata¬s suatu aktivitas. Pada perusahaan ini, keputusan keuangan dan operasional strategis terkait dengan aktivitasnya, dipersyaratkan secara konsensus dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

A Joint Venture is an entity created by two or more parties with participating interests, which is regulated under the agreement of shared control over an activity. In this type of company, the strategic financial and operational decisions that influence its activities must be made by all controlling parties through consensus.

Perusahaan Asosiasi merupakan suatu perusahaan dimana Indonesia Power mempunyai pengaruh signifikan, dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Sedangkan definisi "Pengaruh Signifikan" adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional, tetapi tidak mengendalikan maupun mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

An Associate is an entity under Indonesia Power's significant influence. It is neither a subsidiary nor a participating interest in a joint venture. "Significant influence" here is defined as the authority to participate in the financial and operational policy decision-making, without any control or joint control over such policy.



***Special Purpose Company* (SPC)** adalah suatu perusahaan yang dibentuk untuk melakukan aktivitas khusus dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini biasanya, dimiliki hampir sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya.

Indonesia Power mengelompokan portofolio Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Afiliasi sesuai dengan aktivitas, proses bisnis dan misi strategisnya agar semakin fokus dalam memberikan kinerja yang optimal. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka mendorong Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi untuk berkontribusi pada keseluruhan rantai nilai bidang usaha ketenagalistrikan, sebagai upaya mendukung penciptaan nilai Perusahaan bagi PT PLN (Persero) dan segenap pemangku kepentingan.

A Special Purpose Company is an entity established to perform certain activities, with limited objective or focus. This type of company is commonly owned almost entirely by its sponsor legal entity.

Indonesia Power groups its portfolio of Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates according to their activities, business processes, and strategic visions, in order to gain better focus in delivering optimal performance. It aims to encourage the Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates to contribute to the entire value chain in the electricity industry, as an effort to support the creation of corporate value for PT PLN (Persero) and the stakeholders.



STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
CORPORATE GROUP STRUCTURE

Skema Sinergi dan *Alignment* Indonesia Power Group
Scheme of Indonesia Power Group Synergy and Alignment

Distribusi & Transportasi Energi
Energy Supply & Transport

Up Stream

PT. ARTHA DAYA COALINDO
Subsidiary of PT. INDONESIA POWER

Coal Trading, Coal Transport, Port Management & Supply Biomass

Mid Stream

PERTA DAYA GAS
PERTAMINA GAS INDONESIA POWER

LNG *Terminal*, CNG *Plant & Regasification*

Down Stream

Pembangkit Listrik
Power Plant

Batubara / *Coal*
Hydro / *Hydro*
Bahan Bakar / *Fuel*
Gas / *Gas*
Angin / *Wind*
Tenaga Surya / *Solar*

Non IPP

PLTA HPP 1.123 MW
PLTP GPP 377 MW
PLTU SPP 3.600 MW
PLTD DPP 176 MW
PLTG GTPP 854 MW
PLTGU CCPP 2.676 MW
PLTDG DGPP 200 MW
PLTMG MPP 120 MW

IPP

INDO TENAGA HIJAU
EBT *Power Plant*

PT. INDO PUSAKA BERAU
PLTU SPP Lati Berau 3x7 MW

Indo Ridlatama Power
PLTU SPP Muara Jawa 2x27,5 MW

Cogindo
PLTD DPP Tenau 5x8 MW

Putra Indotenaga
Enlightening Indonesia.
Investment & Participating interest

RAJAMANDALA ELECTRIC POWER
PLTA HPP Rajamandala 47 MW

GCL PT GCL INDO TENAGA
PLTU SPP Kalbar 1 2x100 MW

INDO RAYA TENAGA
PLTU SPP Suralaya 9-10 2x1000 MW

Operasi & Pemeliharaan
Operation & Maintenance

- *Operasi & Pemeliharaan Operation & Maintenance*
- *MRO Diesel & Gas Services*

PLTU SPP
5.035 MW

PLTP GPP
10 MW

PLTGU CCPP
2.903 MW

Dukungan Teknis dan Lainnya
Technical and Other Support

Full Package MI & Remaining Life Assessment

Wartsila Stockist

Dredging

Supply Chain Management

Intermediary companies

DAFTAR ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

LIST OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES, AND ASSOCIATES

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Indonesia Power melakukan konsolidasi laporan keuangan Anak Perusahaan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, yang terdiri

Until December 31, 2021, Indonesia Power has consolidated the financial statements from its Subsidiaries, either owned directly or indirectly, comprising the followings:

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Shareholding by Indonesia Power	Bidang Usaha Line of Business
	Anak Perusahaan Subsidiaries					
1	PT Cogindo DayaBersama	15 April 1998 April 15, 1998	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Gedung COGINDO Jl. Raya Pasar Minggu No.190 Jakarta 12510 Telp. : (62 - 21) 217 89990 Fax : (62 - 21) 217 89990 Email: info@cogindo.co.id Website: http://www.cogindo.co.id/	99,99%	Energi ketenagalistrikan, operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, serta *co-generation*, dengan kegiatan usaha: a. Penjualan Tenaga Listrik b. Jasa *Operation & Maintenance (OM) Services* c. Jasa *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO) d. Jasa Pemeliharaan Mesin Diesel Gas Electricity power, power plant operations and maintenance, and co-generation, with the following business activities: a. Sale of Electricity b. Operations & Maintenance (O&M) Services c. Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) Services d. Gas Diesel Engine Maintenance Service
2	PT Artha Daya Coalindo	21 Oktober 1997 October 21, 1997	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12760 Telp.: (62 21) 5203725 Email: support@arthadayacoalindo.co.id Website: http://www.arthadayacoalindo.co.id/	80,00%	Perdagangan, pengangkutan, bongkar muat, pemasaran dan keagenan batubara, dengan kegiatan usaha: a. Penjualan Batubara b. Pembongkaran Batubara c. Port Management d. Penyediaan Biomass e. O&M Kapal Keruk Coal trade, transport, loading-unloading, marketing, and agency, with the following business activities: a. Coal Sales b. Coal Unloading c. Port Management d. Biomass Provision e. Dredger Vessel O&M

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Shareholding by Indonesia Power	Bidang Usaha Line of Business
3	PT Indo Ridlatama Power	28 September 2007 September 28, 2007	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 10 Jakarta Selatan 12760 Telp: (62 21) 2503 1409 Email: - Website: http://www.indoridlatamapower.com Kantor Pembangkit Power Generation Office Jalan Moh. Hatta RT 023 Handil II Muara Jawa Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur	90,00%	Pembangkitan tenaga listrik melalui pengusahaan PLTU Muara Jawa 2x27,5 MW di Muara Jawa, Kalimantan Timur. Power generation through management of SPP Muara Jawa 2x27.5 MW in Muara Jawa, East Kalimantan
4	PT Putra Indotenaga	20 Desember 2013 December 20, 2013	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2 Jakarta Selatan Telp: (62 21) 526 7666 Fax: (62 21) 525 2623 Email: info@putraindotenaga.co.id Website: http://www.putraindotenaga.co.id/	99,99%	*Participating interest*, yaitu sebagai Anak Perusahaan Indonesia Power yang ditetapkan *unrestricted* terhadap *Indenture Covenant Global Bond*, untuk keperluan pendanaan proyek, dengan kegiatan usaha: a. Penyertaan pada PT Rajamandala Electric Power untuk pengembangan PLTA Rajamandala 47 MW b. Penyertaan pada PT GCL Indo Tenaga untuk pengembangan PLTU Kalbar-1 2x100 MW c. Penyertaan pada PT Suralaya Indo Tenaga sebagai *intermediate company* atas PT Indo Raya Tenaga dalam rangka pengembangan PLTU Suralaya 9-10 2 x1.000 MW d. Penyertaan pada PT Indo Tenaga Hijau untuk pengembangan EBT Participating interest, i.e. as a Subsidiary of Indonesia Power that is defined as unrestricted to Indenture Global Bond Covenant for project funding, with the following business activities: a. Equity participation in PT Rajamandala Electric Power for development of HPP Rajamandala 47 MW b. Equity participation in PT GCL Indo Tenaga for development of SPP West Kalimantan-1 2x100 MW c. Equity participation in PT Suralaya Indo Tenaga as intermediate company of PT Indo Raya Tenaga for development of SPP Suralaya 9-10 2x1,000 MW d. Equity participation in PT Indo Tenaga Hijau for NRE development

DAFTAR ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI
LIST OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES, AND ASSOCIATES

Adapun Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi yang dimiliki Indonesia Power sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the followings are the Joint Ventures and Associates owned by Indonesia power as of the end of 2021:

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Shareholding by Indonesia Power	Bidang Usaha Line of Business
Perusahaan Patungan Joint Ventures						
1	PT Perta Daya Gas	26 April 2012 April 26, 2012	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Jl. Ronggo Warsito No.1 Semarang, Jawa tengah Telp: (024) 86570237 Email: mail@pertadayagas.co.id Website: http://www.pertadayagas.co.id/ Kantor Perwakilan Jakarta Jakarta Representative Office Gedung The East Lt. 11 Unit 02 & 05 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung No. 1 Jakarta Selatan Kode Pos: 12950 Telp : (021) 295-270-78	35,00%	Tranportasi LNG melalui darat dan laut, penyimpanan dan regasifikasi LNG, serta usaha lain terkait industri gas bumi. Kegiatan usaha: a. CNG Plant PLTGU Tambak Lorok Semarang b. FSRU di Bali c. Gasifikasi di PLTMG Sorong Land and sea transport of LNG, LNG storage and regasification, and other businesses related to natural gas industry Business Activities a. CNG Plant at CCPP Tambak Lorok Semarang b. FSRU in Bali c. Gasification in GTPP Sorong
Perusahaan Asosiasi Associates						
1	PT Indo Pusaka Berau	12 Januari 2005 January 12, 2005	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Jalan Pemuda No. 356 Tanjung Redeb, Berau 77311 Kalimantan Timur Telp. : (62 554) 2021672 (62 554) 2021691 Fax : (62 554) 2027003 Email: secretary@ipb.co.id Website: http://www.ipb.co.id/ Kantor Perwakilan Jakarta Jakarta Representative Office Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan 12760 Telp: (62 21) 525 0912 Fax: (62 21) 525 0912	46,53%	Pembangkitan tenaga listrik, melalui pengusahaan PLTU Lati 3 x 7 MW di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur. Power generation through management of SPP Lati 3x7 MW in Tanjung Redeb, Berau, East Kalimantan

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Shareholding by Indonesia Power	Bidang Usaha Line of Business
2	PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	16 Juni 2017 June 16, 2017	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Recapital Building Lt. 3 Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan 12160 Telp: (62 21) 724 6184 Fax: (62 21) 739 8581 Email: email@pln.sc.co.id Website: www.plnsc.co.id	49,00%	a. Perdagangan barang dan jasa yang berkaitan dengan ketenagalistrikan, penyediaan *spareparts* pembangkit b. *E-commerce* di bidang *supply chain management* c. *Reverse engineering.* a. Electricity-related goods and service trade, power plant spare parts provision b. E-commerce in supply chain management c. Reverse engineering

PT Putra Indotenaga merupakan Anak Perusahaan Indonesia Power yang ditetapkan sebagai *unrestricted subsidiary* terhadap *Indenture Covenant Global Bond* PT PLN (Persero). Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan pembangkit baru, Indonesia Power melalui PT Putra Indotenaga membentuk 1 Anak Perusahaan dan 5 (lima) *Special Purpose Company* yang fokus dalam melaksanakan penugasan dalam rangka proyek pembangkitan serta pengembangan energi baru dan/atau terbarukan (EBT) sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembentukannya, yang terdiri dari:

PT Putra Indotenaga is a Subsidiary of Indonesia Power that is defined as unrestricted to Indenture Global Bond Covenant of PT PLN (Persero). To support the acceleration of new power plant development, Indonesia Power via PT Putra Indotenaga established one (1) Subsidiary and five (5) Special Purpose Companies (SPC) to focus working on the duties in power generation projects and new and/or renewable energy (NRE) development as mandated in the purpose of their establishment, which are:

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Shareholding by Indonesia Power	Bidang Usaha Line of Business
Afiliasi Anak Perusahaan (Perusahaan di Bawah PT Putra Indotenaga) **Affiliate of Subsidiary (Subsidiary Under PT Putra Indotenaga)**						
1	PT Indo Tenaga Hijau (Sebelumnya bernama PT Tangkuban Parahu Geothermal Power, berubah nama setelah dialihkan kepada PT Putra Indotenaga berdasarkan Akta No. 90 tanggal 10 Desember 2019) PT Indo Tenaga Hijau (Formerly PT Tangkuban Perahu Geothermal Power, changed its name after reassigned to PT Putra Indotenaga under Deed No. 90 dated December 10, 2019)	10 Desember 2019 December 10, 2019	Beroperasi In operation	Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 1 Jakarta Selatan Telp: (62 21) 526 7666 Fax: (62 21) 525 3467 Email: - Website: -	95,45% melalui PT Putra Indotenaga 95.45% via PT Putra Indotenaga	Pengusahaan energi baru dan/atau terbarukan, jasa penunjang ketenagalistrikan serta perdagangan dan jasa terkait ketenagalistrikan berbasis energi dan/atau energi terbarukan. New and/or renewable energy (NRE) management, electricity supporting services, and NRE-based electricity-related trade and services

DAFTAR ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI
LIST OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES, AND ASSOCIATES

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Shareholding by Indonesia Power	Bidang Usaha Line of Business
	***Special Purpose Company* di Bawah PT Putra Indotenaga** **Special Purpose Companies Under PT Putra Indotenaga**					
1	PT Rajamandala Electric Power	14 Februari 2012 February 14, 2012	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Wisma PMI Lt.2 Suite 202 Jalan Wijaya I No. 63 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12170 Telp. : (62 21) 726 5145 Fax : (62 21) 727 9370 Email : admin@rajamandala-power.com Website: www.rajamandala-power.com Kantor Pembangkit: Power Generation Office: PLTA Rajamandala Jl. PLTA Rajamandala, Kp. Bantarcaringin, Desa Cihea, RT 4 RW 10, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat – 43283	51,00% melalui PT Putra Indotenaga 51.00% via PT Putra Indotenaga	Pembangkit tenaga listrik melalui pengoperasian PLTA Rajamandala 1x47 MW (COD sejak 12 Mei 2019). Electricity generation via operation of HPP Rajamandala 1x47 MW (COD commenced on May 12, 2019)
2	PT GCL Indotenaga	25 Februari 2016 February 25, 2016	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office SOHO Capital Building 23rd Floor Unit 05 Jl. Letjend. S. Parman Kav 28. Jakarta Barat Telp. : (62 21) 3003 3370 Kantor Pembangkit: Power Generation Office: PLTU Kalbar-1 Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat	35,00% melalui PT Putra Indotenaga 35.00% via PT Putra Indotenaga	Pembangkitan tenaga listrik melalui pengoperasian PLTU Kalbar-1 2x100 MW (Unit 1 COD tanggal 3 Februari 2021, Unit 2 COD tanggal 25 Juni 2021). Electricity generation via development of SPP West Kalimantan-1 2x100 MW (Unit 1 COD commenced on February 3, 2021, Unit 1 COD commenced on June 25, 2021)
3	PT Suralaya Indo Tenaga	15 November 2019 November 15, 2019	Beroperasi In operation	Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2 Jakarta Selatan Telp.: (62 21) 526 7666	99,99% melalui PT Putra Indotenaga 99.99% via PT Putra Indotenaga	*Intermediate company* dalam rangka pengembangan PLTU Jawa 9-10 kapasitas 2x1000 MW Intermediate company in the development of SPP Java 9-10 2x1000 MW
4	PT Putra Suralaya Indotenaga	15 November 2019 November 15, 2019	Beroperasi In operation	Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 18 Lt. 2 Jakarta Selatan Telp.: (62 21) 526 7666	99,99% melalui PT Suralaya Indo Tenaga 99.99% via PT Suralaya Indo Tenaga	*Intermediate company* dalam rangka pengembangan PLTU Jawa 9-10 kapasitas 2x1000 MW Intermediate company in the development of SPP Java 9-10 2x1000 MW

No.	Perusahaan Company	Tanggal Pendirian Date of Establishment	Status Operasi Operation Status	Alamat Perusahaan Company Address	Kepemilikan Saham Indonesia Power Shareholding by Indonesia Power	Bidang Usaha Line of Business
5	PT Indo Raya Tenaga	15 Maret 2017 March 15, 2017	Beroperasi In operation	Kantor Pusat Head Office Sentral Senayan II, 17th Floor Suite 217B Jl. Asia Afrika No.8 Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat 10270 Telp: (62 21) 5790 0202 Fax: (62 21) 5790 0208 Email:- Website: www.irt.co.id Kantor Pembangkit: Power Generation Office: PLTU Jawa 9-10 Jl.Yos Sudarso Kelurahan Suralaya Merak Cilegon – Banten 42439	51,00% melalui PT Putra Suralaya Indotenaga via PT Putra Suralaya Indotenaga	Pembangkitan tenaga listrik melalui pengembangan PLTU Jawa 9-10 kapasitas 2x1000 MW. Power generation through development of SPP Java 9-10 2x1,000 MW



SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

PERFORMANCE OVERVIEW OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES, AND ASSOCIATES

Di tahun 2021, ADC, CDB, dan ITH berkontribusi pada pendapatan *Beyond* Kwh di luar PLN Group sebesar Rp208,39 miliar, yang bersumber dari bisnis usaha MRO (*Maintenance repair* and *Overhaul*), jasa OM (*Operation and Maintenance*), penjualan batubara, jasa *jetty management* dan pembongkaran batubara, serta pemasangan PV (*Photovoltaic*) *Rooftop*.

In 2021, PT Artha Daya Coalindo (ADC), PT Cogindo DayaBersama (CDB), and PT Indo Tenaga Hijau (ITH) contributed to the beyond kWh income outside PLN Group at an amount of Rp208.39 billion, resulted from Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) services, Operations and Maintenance (O&M) services, coal sales, jetty management and coal unloading services, and photovoltaic (PV) rooftop installation.

PT GCL Indo Tenaga mencapai tahap *financing* date pada tanggal 7 Juli 2017 dan mendapatkan pendanaan kredit dari China Construction Bank (CCB) Indonesia sejumlah USD288.080.192 dan menunjuk konsorsium yang diketuai oleh SepcoIII Electric Power Construction Co. Ltd untuk membangun PLTU Kalbar-1. Pembangunan PLTU Kalbar-1 berkapasitas 2x100 MW dimulai pada semester II 2017 dan proyek ini telah mencapai Unit COD pada 3 Februari 2021 dan *Plant* COD pada 25 Juni 2021. Saat ini PLTU Kalbar-1 dioperasikan oleh Indonesia Power berdasarkan Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 8 Juni 2021.

PT GCL Indo Tenaga achieved financing date on July 07, 2017 and received loan from the China Construction Bank (CCB) Indonesia amounting to US$288,080,192 and appointed a consortium led by Sepcoll Electric Power Construction Co. Ltd. For SPP West Kalimantan-1 construction. The construction of SPP West Kalimantan-1 at a capacity of 2x100 MW commenced in semester 2 of 2017. The project achieved its Unit COD on February 03, 2021 and Plant COD on June 25, 2021. SPP West Kalimantan-1 is currently managed by Indonesia Power under Operations and Maintenance Agreement dated June 08, 2021.

Dalam rangka mendukung tercapainya bauran energi hijau, ITH berhasil menyelesaikan EPC PLTS *Landbase* di Grati POMU dengan kapasitas 1.5 MWp dan telah COD pada tanggal 6 September 2021

To meet the green energy mix target, ITH has completed the EPC of land-based SoPP in Grati POMU of 1,5 Mwp capacity, and achieved the COD on September 06, 2021.

Anak Perusahaan
Subsidiaries

PT Cogindo DayaBersama (CDB)

Profil Perusahaan
Company Profile

PT Cogindo DayaBersama (CDB) didirikan pada tanggal 15 April 1998 berdasarkan Akta No. 52 Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH dengan penyertaan saham saat ini adalah Indonesia Power sebesar 99,99% dan YPK Indonesia Power sebesar 0,01%. CDB bergerak dalam bidang usaha (1) energi ketenagalistrikan, (2) operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, (3) jasa *Maintenance, Repair and Overhaul* (MRO), serta (4) *co-generation*.

PT Cogindo DayaBersama (CDB) was established on April 15, 1998 under Deed No. 52 of Notary Siti Pertiwi Henny Singgih, SH. Its shareholder composition currently consists of Indonesia Power by 99.99% and YPK Indonesia Power by 0.01%. CDB engages in (1) electricity energy, (2) power plant operations and maintenance, (3) Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) services, and (4) co-generation.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021
Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Komang Parmita	30 November 2020 – 18 Agustus 2021 November 30, 2020– Agustus 18, 2021
	Herry Nugraha	19 Agustus 2021 – 26 November 2021 August 19, 2021–November 26, 2021
Komisaris Commissioner	Susiana Mutia	30 November 2020 – 30 November 2023 November 30, 2020–November 30, 2023
Komisaris Commissioner	M. Mursid	19 Agustus 2021 - 18 Agustus 2024 August 19, 2021–August 18, 2024
Komisaris Independen Independent Commissioner	Zaenal Mustofa	6 Agustus 2019 - 18 Agustus 2021 August 06, 2019–August 18, 2021
	Zaenal Mustofa	19 Agustus 2021 - 18 Agustus 2024 August 19, 2021–August 18, 2024

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Ade Hendratno	30 November 2020 - 29 November 2023 November 30, 2020–November 29, 2023
Direktur Bisnis Director of Business	R. Triyono Budi P	9 Januari 2019 – 18 Agustus 2021 January 9, 2019–August 18, 2021
	Kukuh Pambudi	19 Agustus 2021 - 18 Agustus 2024 August 19, 2021–August 18, 2024
Direktur Operasi Director of Operations	Adi Rekno	30 November 2020 - 29 November 2023 November 30, 2020–November 29, 2023

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES, AND ASSOCIATES

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Keuangan Director of Finance	Riyanto I.U Siregar	5 Maret 2018 - 6 Maret 2021 March 5, 2018–March 6, 2021
	R. Triyono Budi P	8 Maret 2021 – 18 Agustus 2021 March 8, 2021–August 18, 2021
	Hari Muhardani Nasution	19 Agustus 2021 - 18 Agustus 2024 August 19, 2021–August 18, 2024
Direktur SDM Director of Human Capital	Ade Hendratno	9 Januari 2019 – 18 Agustus 2021 January 9, 2019–August 18, 2021
	R. Triyono Budi P	19 Agustus 2021 - 18 Agustus 2024 August 19, 2021–August 18, 2024

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp Juta)
Financial Performance in 2019-2021 (Rp million)

Keterangan Description	Tahun Year			Perubahan 2021 terhadap 2020 (%) Change in 2021 against 2020 (%)
	2019	2020	2021	
Total Aset Total Assets	1.214.340	1.265.324	1.203.567	(4,89)
Pendapatan Usaha Revenues	961.064	1.086.045	1.248.106	14,92
Beban Usaha Operating Expenses	819.974	919.453	1.045.941	13,76
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	141.090	166.592	202.165	21,35
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	107.104	139.284	145.310	4,33

PT Artha Daya Coalindo (ADC)

PT. ARTHA DAYA COALINDO
Subsidiary of PT. INDONESIA POWER

Profil Perusahaan
Company Profile

PT Artha Daya Coalindo (ADC) didirikan pada tanggal 21 Oktober 1997 berdasarkan Akta No. 70 Notaris Machrani Moertolo Soenarto, SH, dengan kepemilikan saham saat ini adalah Indonesia Power sebesar 80%, PT Arthindo Utama sebesar 10% dan PT Desira Pratama Line sebesar 10%. ADC bergerak dalam bidang usaha penjualan, transportasi dan jasa pembongkaran batubara, serta *port management* serta penyediaan biomass

PT Artha Daya Coalindo (ADC) was established on October 21, 1997 under Deed No. 70 of Notary Machrani Moertolo Soenarto, SH. Its shareholder composition currently consists of Indonesia Power by 80%, PT Arthindo Utama by 10%, and PT Desira Pratama Line by 10%. ADC is engaged in coal trade, transport, and unloading as well as port management services and biomass provision.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021
Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Derina	30 November 2020 – 30 November 2023 November 30, 2020–November 30, 2023
Komisaris Commissioner	Seta Perdana	23 Agustus 2018 - 1 Agustus 2021 August 23, 2018–August 1, 2021
Komisaris Commissioner	Marco Rosihan Yakub	23 Agustus 2018 - 1 Agustus 2021 August 23, 2018–August 1, 2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Judi Winarko	1 Agustus 2020 - 31 Juli 2023 August 1, 2020–July 31, 2023
Direktur Keuangan dan Administrasi Director of Finance and Administration	Rizaldi	10 Januari 2019 – 23 Maret 2021 January 10, 2019–March 23, 2021
	Judi Winarko	24 Maret 2021 – 18 Agustus 2021 March 24, 2021–August 18, 2021
	Kresna Siwiyati	19 Agustus 2021 - 18 Agustus 2024 August 19, 2021–August 18, 2024
Direktur Operasi Director of Operations	Andi Agung Bawono	30 November 2020 - 29 November 2023 November 30, 2020–November 29, 2023

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp Juta)
Financial Performance in 2019-2021 (Rp million)

Keterangan Description	Tahun Year			Perubahan 2021 terhadap 2020 (%) Change in 2021 against 2020 (%)
	2019	2020	2021	
Total Aset Total Assets	454.272	495.387	896.223	80,91
Pendapatan Usaha Revenues	572.532	1.459.094	3.420.261	134,41
Beban Usaha Operating Expenses	547.523	1.413.157	3.314.004	134,51
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	25.009	45.937	106.257	131,31
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	18.019	38.417	85.721	123,13

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES, AND ASSOCIATES

PT Indo Ridlatama Power (IRP)

Profil Perusahaan
Company Profile

PT Indo Ridlatama Power didirikan pada tanggal 28 September 2007 berdasarkan Akta No. 211 Notaris Ingrid Lannywaty, SH dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-06299 H.01.01-TH.2007. Kepemilikan saham berdasarkan perubahanan Anggaran Dasar Akta Nomor 11 tanggal 09 Oktober 2017 adalah Indonesia Power sebesar 90% dan PT Ridlatama Bangun Mandiri sebesar 10%. IRP didirikan untuk pengembangan PLTU Kaltim 2x27,5 MW di Muara Jawa, Kalimantan Timur.

PT Indo Ridlatama Power was established on September 28, 2007 under Deed No. 211 of Notary Ingrid Lannywaty, SH and Decree of the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-06299 H.01.01-TH.2007. The shareholders, according to the amendment to the Articles of Association under Deed No. 11 dated October 9, 2017, consist of Indonesia Power by 90% and PT Ridlatama Bangun Mandiri by 10%. IRP was established for the development of SPP East Kalimantan 2x27.5 MW in Muara Jawa, East Kalimantan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021
Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Eri Nurcahyanto	30 November 2020 – 30 November 2023 November 30, 2020–November 30, 2023
Komisaris Commissioner	Doddy Sumantyawan	1 Mei 2020 - 21 Juli 2022 May 1, 2020–July 21, 2022

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Makmur Marzuki	28 Desember 2018 – 28 Desember 2021 December 28, 2018–December 28, 2021
PLT Direktur Utama Acting President Director	Sudjilan	29 Desember 2021 – 29 Desember 2024 December 29, 2021–December 29, 2024
PLT Direktur Keuangan dan Administrasi Acting Director of Finance and Administration	Sudjilan (Merangkap) (Serving concurrently)	29 Desember 2021 – 29 Desember 2024 December 29, 2021–December 29, 2024
Direktur Operasi Director of Operations	Lukman Dahri	30 November 2020 - 29 November 2023 November 30, 2020–November 29, 2023

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp Juta)

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp Juta)

Keterangan Description	Tahun Year			Perubahan 2021 terhadap 2020 (%) Change in 2021 against 2020 (%)
	2019	2020	2021	
Total Aset Total Assets	1.650.462	1.623.619	1.503.176	(7,42)
Pendapatan Usaha Revenues	280.810	256.398	174.295	(32,02)
Beban Usaha Operating Expenses	210.110	193.787	188.829	(2,56)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	70.700	62.611	(14.534)	(123,21)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	15.318	(19.078)	(131.709)	590,37

PT Putra Indotenaga (PIT)

Profil Perusahaan

Company Profile

PT Putra Indotenaga (PIT) berdiri sejak 20 Desember 2013 berdasarkan Akta Nomor 24 Notaris Muhammad Hanafi, SH dengan kepemilikan saham saat ini adalah Indonesia Power sebesar 99,99% dan YPK Indonesia Power sebesar 0,01%.

Bidang usaha sesuai Anggaran Dasar antara lain menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan, serta penyertaan saham dan kepemilikan *participating interest* di dalam maupun luar negeri. PIT merupakan anak perusahaan yang ditetapkan sebagai *unrestricted subsidiary terhadap indenture covenant global bond* PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung pendanaan proyek, antara lain:

1. Penyertaan pada PT Rajamandala Electric Power untuk pengembangan PLTA Rajamandala kapasitas 47 MW.
2. Penyertaan pada PT GCL Indotenaga untuk pengembangan PLTU Kalbar-1 kapasitas 2x100 MW.
3. Penyertaan pada PT Indo Tenaga Hijau untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
4. Penyertaan pada PT Suralaya Indo Tenaga sebagai *intermediate company* atas PT Indo Raya Tenaga dalam rangka pengembangan PLTU Suralaya 9-10 kapasitas 2 x1.000 MW.

PT Putra Indotenaga (PIT) was established on December 20, 2013 under Deed No. 24 of Notary Muhammad Hanafi, SH. Its current shareholder composition consists of Indonesia Power by 99.99% and YPK Indonesia Power by 0.01%.

According to the Articles of Association, its line of business includes the management of electricity business share investment and participating interest inside and outside the country. PIT is a subsidiary defined as unrestricted to Indenture Global Bond Covenant of PT PLN (Persero) in order to support the funding of the following projects:

1. Equity participation in PT Rajamandala Electric Power for development of HPP Rajamandala 47 MW.
2. Equity participation in PT GCL Indotenaga for development of SPP West Kalimantan-1 2x100 MW.
3. Equity participation in PT Indo Tenaga Hijau for new and renewable energy (NRE) development.
4. Equity participation in PT Suralaya Indo Tenaga as intermediate company of PT Indo Raya Tenaga for development of SPP Suralaya 9-10 2x1,000 MW.

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES, AND ASSOCIATES

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021
Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
PLT Komisaris Utama Acting President Commissioner	Tarwaji	1 Juni 2020 – 17 Januari 2021 June 01, 2020–January 17, 2021
Komisaris Utama President Commissioner	Dedeng Hidayat	18 Januari 2021 - 10 Agustus 2021 January 18, 2021–August 10, 2021
	Vacant	
Komisaris Commissioner	I Gusti Ngurah Agung	27 Mei 2019 - 27 Mei 2022 May 27, 2019–May 27, 2022

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Wiryantono Setyolaksono	11 Januari 2019 – 16 Februari 2022 January 11, 2019–February 16, 2022
	Wiryantono Setyolaksono	17 Februari 2022 – 17 Februari 2025 February 17, 2022–February 17, 2025
PLT Direktur Bisnis Komersial Acting Director of Commercial Business	Budhi Setiawan	11 Januari 2019 – 18 Januari 2021 January 11, 2019–January 18, 2021
	Wiryantono Setyolaksono	19 Januari 2021 – 16 Februari 2022 January 19, 2021–February 16, 2022
Direktur Bisnis Komersial Director of Commercial Business	M. Imaduddin	17 Februari 2022 – 17 Februari 2025 February 17, 2022–February 17, 2025
Direktur Keuangan Director of Finance	Tri Susilo	11 Januari 2019 - 16 Februari 2022 January 11, 2019–February 16, 2022
	Laila Haerani	17 Februari 2022 – 17 Februari 2025 February 17, 2022–February 17, 2025

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp Juta)
Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp Juta)

Keterangan Description	Tahun Year			Perubahan 2021 terhadap 2020 (%) Change in 2021 against 2020 (%)
	2019	2020	2021	
Total Aset Total Assets	1.546.577	3.445.077	4.534.848	31,63
Pendapatan Usaha Revenues	1.085	491	16.972	3.356,52*
Beban Usaha Operating Expenses	13.545	17.131	31.775	85,48
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(12.460)	(16.640)	(14.804)	(11.03)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	51.171	167.429	418.138	149,74

*) Pendapatan mengalami peningkatan sehubungan adanya pengakuan pendapatan listrik PT ITH.
*) There was an increase in Revenues due to acknowledgment of income from electricity from PT ITH.

Perusahaan Asosiasi
Associates

PT Indo Pusaka Berau (IPB)

Profil Perusahaan
Company Profile

PT Indo Pusaka Berau (IPB) adalah perusahaan asosiasi Indonesia Power yang berdiri sejak 12 Januari 2005 berdasarkan Akta No,8 Notaris Sukawaty Sumadi, SH. Per 31 Desember 2021, kepemilikan saham Indonesia Power sebesar 46,53 %, Pemkab Berau sebesar 49,48%, dan PT Pusaka Jaya Baru sebesar 3,99%. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 001.K/010/RUPS-IPB/2022 tanggal 21 Januari 2022, dilakukan pengalihan seluruh saham PT Pusaka Jaya Baru di PT IPB kepada PT Jassin Effrin Jaya. Sehingga pemegang saham IPB saat ini adalah Indonesia Power sebesar 46,53 %, Pemkab Berau sebesar 49,48%, dan PT Jasin Effrin Jaya sebesar 3,99%.

PT Indo Pusaka Berau (IPB) is an associate of Indonesia Power which was established on January 12, 2005 under Deed No. 8 of Notary Sukawaty Sumadi, SH. As per December 31, 2021, the company's shareholder composition consisted of Indonesia Power by 46.53%, Berau Regency Government by 49.48%, and PT Pusaka Jaya Baru by 3.99%. Under Circular Shareholders Decree No. 001.K/010/RUPS-IPB/2022 dated January 21, 2022, the entire PT IPB shares in the possession of PT Pusaka Jaya Baru was transferred to PT Jassin Effrin Jaya. Therefore, the current shareholder composition consists of Indonesia Power by 46.53%, Berau Regency Government by 49.48%, and PT Jasin Effrin Jaya by 3.99%.

IPB memiliki bidang usaha yaitu penyediaan tenaga listrik berupa kegiatan pembangkitan tenaga listrik melaluipengoperasian PLTU Lati 3 x 7 MW.

IPB is engaged in the provision of electricity through power generation activity, by operating SPP Lati 3x7 MW.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021
Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Rachmat Hidayat	30 November 2020 – 30 November 2023 November 30, 2020–November 30, 2023
Komisaris Commissioner	Drs. H Mansyah Kelana	1 Mei 2020 – 1 Januari 2021 May 01, 2020–January 01, 2021
	Kamaruddin	14 Jan 2021 – 14 Januari 2024 January 14, 2021–January 14, 2024

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	H. Najemuddin	1 April 2019 - 1 April 2022 1 April 2019 - 1 April 2022
Wakil Direktur Utama Vice-President Director	Jefri Ade Saputra	30 Maret 2020 – 30 Maret 2023 30 Maret 2020 – 30 Maret 2023

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES, AND ASSOCIATES

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp Juta)
Financial Performance in 2018-2020 (Rp million)

Keterangan Description	Tahun Year			Perubahan 2021 terhadap 2020 (%) Change in 2021 against 2020 (%)
	2019	2020	2021	
Total Aset Total Assets	328.175	264.795	272.269	2,82
Pendapatan Usaha Revenues	95.418	103.880	106.812	2,82
Beban Usaha Operating Expenses	89.721	88.263	87.934	(0,37)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	5.697	15.617	18.878	20,88
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	7.816	10.127	14.078	39,01

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC)

Profil Perusahaan
Company Profile

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC) merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali dan Indonesia Power yang berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 16 Juni 2017 dihadapan Notaris Ny. Ni Putu Ayunita Waspuri di Surabaya, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0030040.AH.01.01 tanggal 14 Juli 2017. Kepemilikan PLN SC saat ini adalah PT Pembangkitan Jawa Bali sebesar 51% dan Indonesia Power sebesar 49%.

Bidang usaha sesuai Anggaran Dasar antara lain:

a. Perdagangan barang dan jasa berhubungan ketenagalistrikan;
b. Usaha bidang *reverse engineering* bidang industri ketenagalistrikan;
c. Usaha dalam bidang jasa *e-commerce* di bidang *supply chain management* pada industri pembangkitan tenaga listrik;
d. Usaha dalam bidang jasa konsultan berhubungan dengan ketenagalistrikan.

PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang (PLNSC) is a joint venture established by PT Pembangkitan Jawa Bali and PT Indonesia Power, under Deed of Establishment No. 5 dated June 16, 2017 which was made before Ni Putu Ayunita Waspuri, a Notary based in Surabaya. It has been ratified by the Minister of Laws and Human Rights as contained in Decree No. AHU-0030040.AH.01.01 dated July 14, 2017. PLN SC's shareholding currently consists of PT Pembangkitan Jawa Bali by 51% and PT Indonesia Power by 49%.

According to the Articles of Association, its line of business covers:

a. Trade of electricity-related goods and services
b. Reverse engineering in electricity
c. E-commerce in supply chain management of power generation industry
d. Electricity-related consultant service

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021
Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Yohanes Sukrilismono	02 Januari 2021 - 02 Januari 2024 January 02, 2021–January 02, 2024
Komisaris Commissioner	Miftahul Huda	02 Januari 2021 – 28 Februari 2022 January 02, 2021–February 28, 2022
	Najahul Imtihan	1 Maret 2022 – 1 Maret 2025 March 01, 2022–March 01, 2025

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Wisrawan Wahju Wibowo	15 Jan 2020 – 31 Oktober 2021 January 15, 2020–October 31, 2021
	Thommi Haposan	01 November 2021 – 01 November 2024 November 01, 2021–November 01, 2024
Direktur Bisnis Komersial Director of Engineering and Services	Andy Adam	02 Januari 2021 – 02 Januari 2024 January 02, 2021–January 02, 2024
Direktur Bisnis dan Keuangan Director of Business and Finance	Deni Susanto	02 Januari 2021 – 28 Februari 2022 January 02, 2021–February 28, 2022
	Miftahul Huda	1 Maret 2022 – 1 Maret 2025 March 1, 2022–March 01, 2025

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp Juta)
Financial Performance in 2019-2021 (Rp million)

Keterangan Description	Tahun Year			Perubahan 2021 terhadap 2020 (%) Change in 2021 against 2020 (%)
	2019	2020	2021	
Total Aset Total Assets	236.591	344.158	293.230	(14,80)
Pendapatan Usaha Revenues	413.822	356.419	261.839	(26,54)
Beban Usaha Operating Expenses	392.013	314.542	242.352	(22,95)
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	21.809	41.877	19.487	(53,47)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	17.232	23.667	11.664	(50,72)

SEKILAS KINERJA ANAK PERUSAHAAN, PERUSAHAAN PATUNGAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI
PERFORMANCE OVERVIEW OF SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES, AND ASSOCIATES

Perusahaan Patungan
Joint Ventures

PT Perta Daya Gas (PDG)

Profil Perusahaan
Profil Perusahaan

PT Perta Daya Gas (PDG) adalah perusahaan patungan (*joint venture*) antara Indonesia Power dengan PT Pertamina Gas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 60 Notaris Marianne Vincentia Hamdani SH tanggal 26 April 2012 dengan kepemilikan saham saat ini adalah Indonesia Power sebesar 35% dan PT Pertamina Gas sebesar 65%.

Bidang usaha sesuai Anggaran Dasar antara lain menjalankan usaha di bidang tranportasi LNG melalui darat dan laut, penyimpanan, regasifikasi LNG, serta usaha lain terkait industri gas bumi. Kegiatan usaha PDG saat ini mengoperasikan CNG *Plant* Tambak Lorok Semarang, FSRU di Bali, dan Gasifikasi PLTMG Sorong. Kedudukan PDG saat ini sesuai Akta Nomor 23 tanggal 22 November 2017 berada di Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Jl. Ronggo Warsito No.1 Semarang, Jawa Tengah.

PT Perta Daya Gas (PDG) is a joint venture between Indonesia Power and PT Pertamina Gas which was established under Deed No. 60 of Notary Marianne Vincentia Hamdani SH dated April 26, 2012. Its shareholder composition currently consists of Indonesia Power by 35% and PT Pertamina Gas by 65%.

According to the Articles of Association, its line of business covers land and sea transport of LNG, LNG storage and regasification, and other businesses related to natural gas industry. PDG's business activities currently cover the operations of CNG Plant at CCPP Tambak Lorok Semarang, Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) in Bali, and GTPP Sorong Gasification. In accordance with Deed Number 23 dated November 22, 2017 PDG is currently domiciled at Komplek Pelabuhan Tanjung Emas Jl. Ronggo Warsito No.1 Semarang, Central Java.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021
Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Aji Sutrisno	11 Desember 2020 - 11 Desember 2023 December 11, 2020–December 11, 2023
Komisaris Commissioner	Razli	26 November 2018 – 25 November 2021 November 26, 2018–November 25, 2021
	Hadameon Aritonang	26 November 2021 – 26 November 2024 November 26, 2021–November 26, 2024

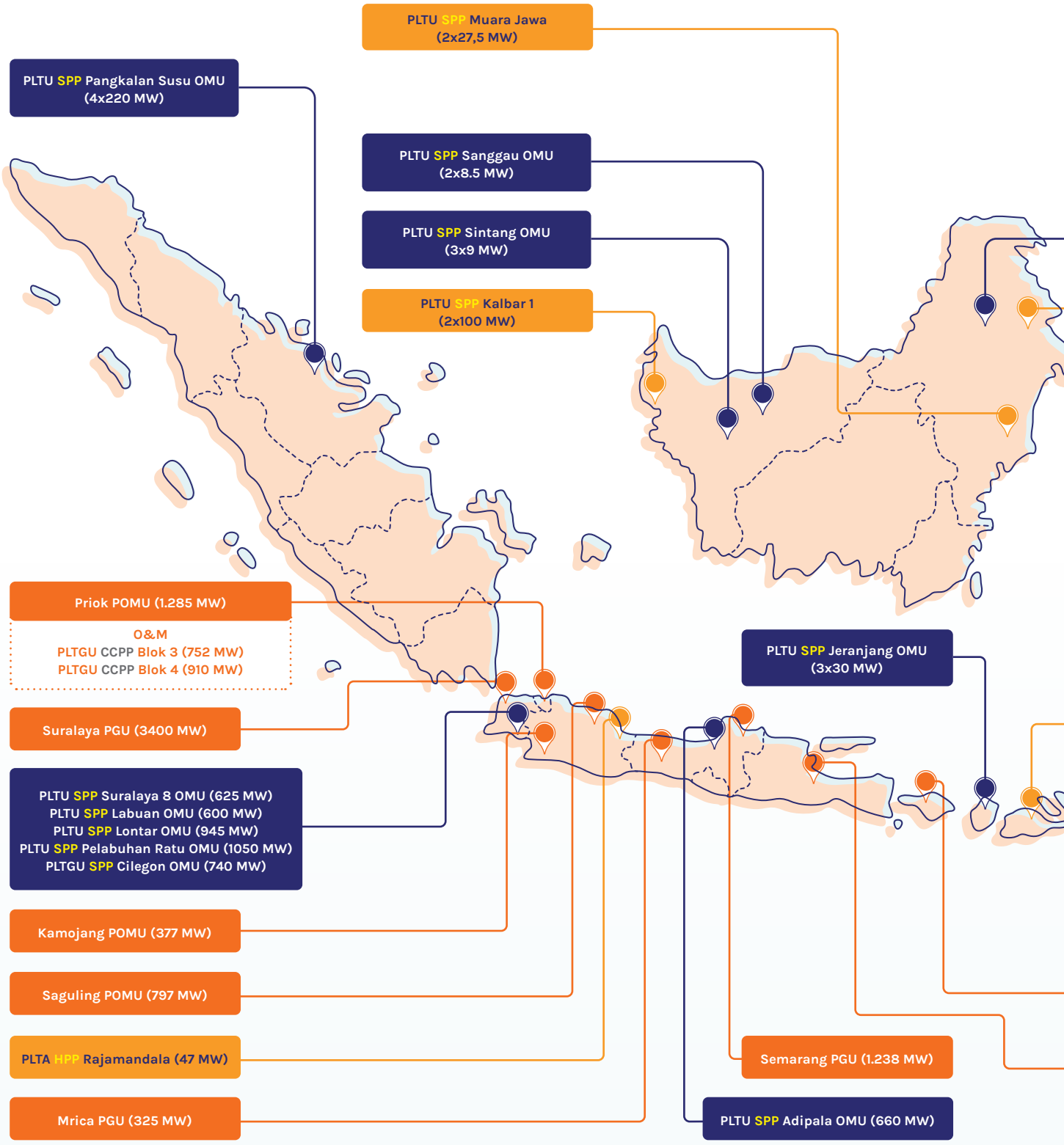
Jabatan Position	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office
Direktur Utama President Director	Arief Wardono	11 September 2019 – 11 September 2022 September 11, 2019–September 11, 2022
Wakil Direktur Utama Vice-President Director	Hadi Munib	15 Agustus 2020 – 15 Agustus 2023 August 15, 2020–August 15, 2023

Kinerja Keuangan Tahun 2019-2021 (Rp Juta)
Financial Performance in 2019-2021

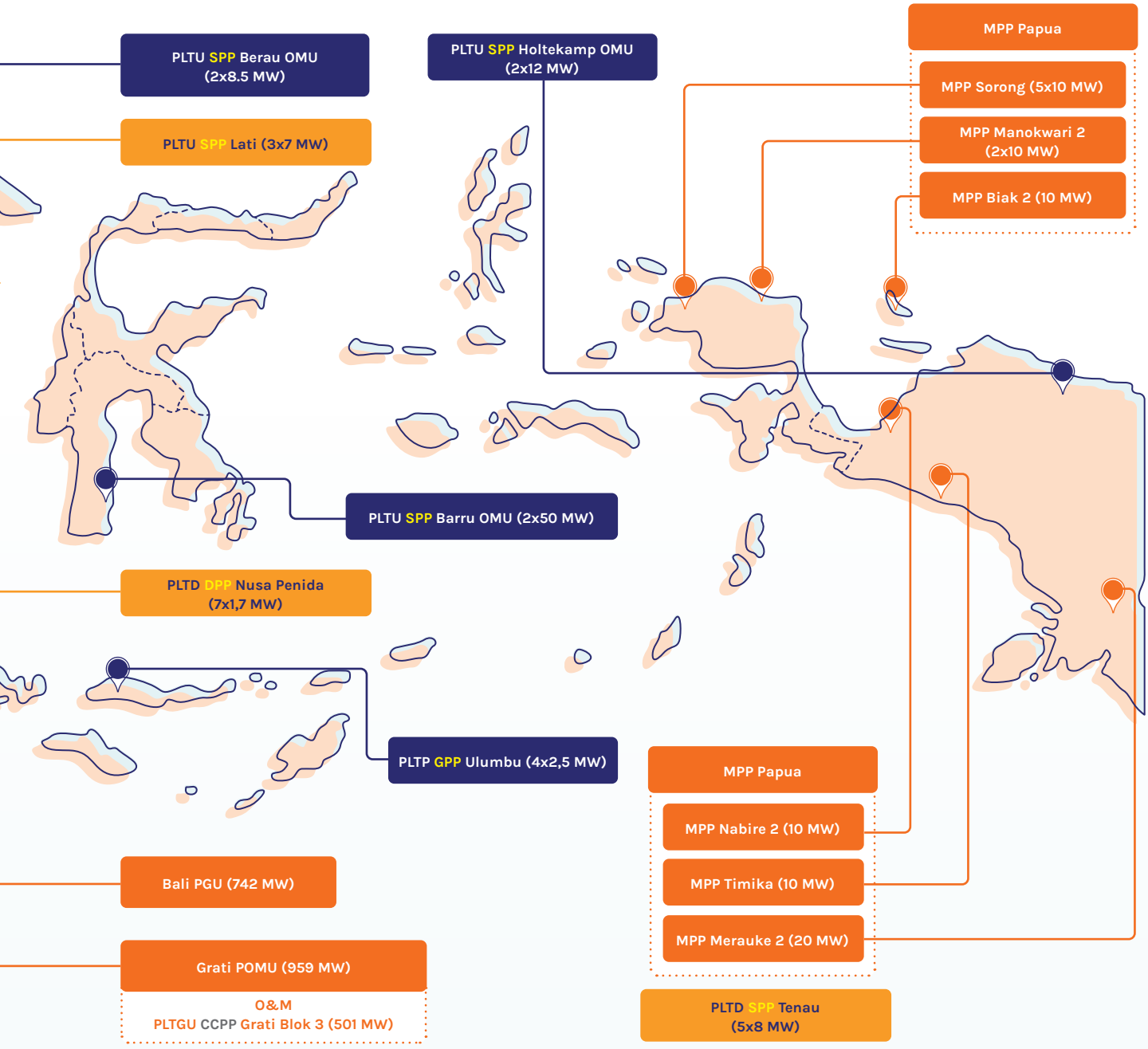
Keterangan Description	Tahun Year			Perubahan 2021 terhadap 2020 (%) Change in 2021 against 2020 (%)
	2019	2020	2021	
Total Aset Total Assets	619.903	628.538	507.435	(19,27)
Pendapatan Usaha Revenues	184.806	99.492	192.872	93,86
Beban Usaha Operating Expenses	109.231	87.308	107.522	23,15
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	75.575	12.184	85.350	600,51
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	63.682	(13.972)	32.115	(329,85)



WILAYAH OPERASI
OPERATIONAL AREAS



Unit Eksisting Existing Units	Unit O&M O&M Unit	Anak Perusahaan Subsidiaries
Total: 8 Unit Daya Terpasang: 9.124,72 MW Total: 8 units Installed Capacity: 9,124.72 MW	Total: 17 Unit Daya Terpasang: 7.947,7 MW Total: 17 Units Installed Capacity: 7,947.7 MW	Total: 6 Unit Daya Terpasang: 375 MW Total: 6 Unit Installed Capacity: 375 MW



DAFTAR ALAMAT UNIT
UNIT ADDRESS LIST

PGU (POWER GENERATION UNIT)

Suralaya PGU
Jl. Raya PLTU Suralaya PO Box 15 Cilegon 42456,
Banten, Indonesia
Telp: (62-254) 571 230, 571 240, 571 242
Faks: (62-254) 571 235

Mrica PGU
Jl. Raya Banyumas KM. 8 Kotak Pos 38
Banjarnegara 53471, Indonesia
Telp: (62-286) 597 081
Fax: (62-286) 597 044, 597 100

Semarang PGU
Jl. Ronggowarsito,Komplek Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang 50127, Indonesia
Telp: (62-24) 3518371 (Hunting)
Faks: (62-24) 3546835

Bali PGU
Jl. Brigjen I.G Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar 80001
Bali, Indonesia
Tel. (+62-361) 720 421, 720 422
Fax. (+62-361) 720 519

POMU (POWER GENERATION AND O&M SERVICE UNIT)

Priok POMU
Jl.Laks. RE Martadinata
Jakarta Utara 14310, Indonesia
Telp: (62-21) 4353 9114 - 19 (Hunting)
Faks: (62-21) 4393 6461

Saguling POMU
Komplek PLN Cioray, Tromol Pos No. 7 Rajamandala,
Kab. Bandung 40554
Telp:. (62-22) 690 3497, 690 3489
Fax: (62-22) 690 3613

Kamojang POMU
Jl. Komplek Perumahan PLTP Kamojang
Kotak Pos 125 Garut 44101, Indonesia
Telp: (+62-22) 780 5475 - 780 4478
Fax : (62-22) 7801013 – 7805469

Grati POMU
Jl. Raya Surabaya – Probolinggo KM.73 PO BOX 11, Grati 67184,
Desa Wates, Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan.
Tel : (03-43) 413582, 413583
Fax : (03-43) 413693, 413524, 425588

OMU (OPERATION AND MAINTENANCE SERVICE UNIT)

PLTU SPP Banten 1 Suralaya OMU
Jl. Yos Sudarso PLTU Suralaya 8, Kelurahan Suralaya, Kecamatan
Pulomerak, Cilegon, Banten 42439
Telp: (62-254) 570 402; (62-254) 7830 066
Faks: (62-254) 571 869

PLTU SPP Banten 2 Labuan OMU
Jl. Laba Terusan Panimbang Desa Sukamaju Kecamatan
Labuan Kabupaten Pandeglang, Banten 42246
Telp: (62-253) 803 312, 805 015

PLTU SPP Banten 3 Lontar OMU
Jl. Ir Sutami Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten
Tangerang, Banten
Telp: (62-21) 5939 0660
Faks: (62-21) 5939 0659

PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU
SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU
Jalan Pelita Desa Jayanti Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten
Sukabumi, Jawa Barat 43364
Telp: (62-266) 434 192
Faks: (62-266) 644 1111

PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU
SPP Central Java 2 Adipala OMU
Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah 53271
Telp: (62-282) 525 9647

PLTGU Cilegon OMU
CCPP Cilegon OMU
Jl. Raya Bojonegoro Salira, Desa Margasari, Kecamatan Pulo
Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42454
Tel: (+62-254) 575 1555, 575 1444
Fax: (+62-254) 575 1501

PLTU SPP Pangkalan Susu OMU
PLN Pangkalan Susu, Dusun 6
Desa Tanjung pasir, Kec Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat,
Sumatera Utara 20858

PLTU SPP Barru OMU
Dusun Bawasalo, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu,
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

PLTU SPP Jeranjang OMU
Jalan Raya PLTU Jeranjang, Dusun Jeranjang,
Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten

PLTU SPP Sanggau OMU
Desa Sungai Batu Kec. Kapuas Kab. Sanggau
Kalimantan Barat

PLTU SPP Sintang OMU
Ds. Sungai Ringin Kec. Sintang Kab. Sintang,
Kalimantan Barat, 78614

PLTU Berau OMU
Area Tambang BJU, Pinggir Sungai Segah, Teluk Bayur, Kab.
Berau, Kalimantan Timur 77352

PLTU SPP Holtekamp OMU
Jalan Hanurata KM. 9 Kampung Holtekamp,
District Muaratami, Kota Jayapura, Papua

MSU (MAINTENANCE SERVICE UNIT)
Jl. Aipda KS. Tubun No. 8, Jakarta Pusat 11420 Telp: (62-21) 563 8666 Faks: (62-21) 563 8622

PROJECT UNIT
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.18 Jakarta Selatan, Kode Pos 12950 Telp: (62-21) 526 7666 (Hunting) Fax: (62-21) 525 1923, 525 2623

MPP PAPUA	
MPP SORONG Desa Arar, Kecamatan Mayamuk, Sorong Provinsi Papua Barat.	**MPP MANOKWARI 2** Desa Andai, Kecamatan Manokwari Selatan, Manokwari Provinsi Papua.
MPP BIAK 2 Desa Urfu, Kecamatan Yendidori, Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.	**MPP NABIRE 2** Desa Kalibobo, Kecamatan Nabire, Nabire Provinsi Papua
MPP TIMIKA Dusun Pomako, Kabupaten Mimika Provinsi Papua	**MPP MERAUKE 2** Desa Karang Indah, Kecamatan Merauke, Merauke Provinsi Papua.

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

COMPANY-SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	
PWC Indonesia **Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**	World Trade Center (WTC 3) Jl. Jend. Sudirman No.Kav 29-31, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920 Telp : +62 21 5212901 Faks : +62 21 52905555, 52905050

Konsultan Hukum Law Consultant	
Nah'r Murdono Law Office	Mitra Building 9th Floor Suite 902 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21 Jakarta 12930 Tel: +62 21 522 00278 Fax: +62 21 522 0029
UMBRA Partnership	Telkom Landmark Tower, Tower 2 , lantai 49 Jl Jend Gatot Subroto kav. 52, Jakarta
Azwar Hadisupani Rum & Partners	Menara Palma 15th floor Jl. H.R Rasuna Said Blok X2 Kav. 6 Jakarta 12950 Phone: +6221 25983316 Fax: +6221 25983316 Email: office@ahrplaw.com www.ahrplaw.com

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN
COMPANY-SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

Konsultan Hukum Law Consultant	
Alfonso Lawfirm	The H Tower Lt. 15 Suite G Jl. H.R Rasuna Said, Kav. 20 Kuningan – Jakarta 12940 T: +6221 29555 215 F: +6221 29555 216
Janis & Associates Advocate Advocates & Legal Consultans	Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178 A, Jakarta 12870, Indonesia Phone +6221 8313135 ; Fax +6221 8305010 Email: janislaw@cbn.net.id
BIRO OKTROI ROOSSENO	Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Mega Kuningan) Jakarta 12950, INDONESIA Tel : (62)-21-576 2308, 576 2310 (hunting) Fax : (62)-21-576 2301, 576 2302, 576 2303 E-fax: [65] 6826-4084
Abraham Hoed Yudianto	**Jakarta** Jl. Ridwan I No.25, Patal Senayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan **Surabaya** Jl. Pahlawan No.7, Bubutan, Surabaya, 60174

Notaris Notary	
Lenny Janis Ishak, SH	Graha MIK Lantai 5 Jl. Hang Lekir IX No. 1 Jakarta 12120 Tel: +62 21 7221077 Fax: +62 21 7233855
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH	Jl. Panglima Polim V No.11 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Tel: +62 21 7398569 Fax: +62 21 7265090

Kantor Jasa Penilai Publik Office of Public Appraisal Service	
Rengganis, Hamid & Rekan	Jakarta Head Office Menara Kuningan 8th Floor Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. V Jakarta 12940 Tel: +6221 3001 6002 Email: secretariat@rhr.co.id

Ikatan Akuntan Indonesia **Institute of Indonesia Chartered Accountants**	Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng Jakarta 10310, Indonesia Tel: +62 21 31904232 ext. 666 / 777 Whatsapp: +62 818 717251 Email: iai-info@iaiglobal.or.id

Lembaga Pemerintah Government Institution	
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) **Deputy Attorney General for Civil and State Administration Affairs (Deputy Attorney General for Civil and State Administration Affairs (Jamdatun)**	Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia Tel: +62 21 722 1269 Email: humas.puspenkum@kejaksaan.go.id

Lembaga Pemerintah Government Institution	
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan - Kementerian ESDM Directorate General of Electricity - Ministry of Energy and Mineral Resources	Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X 2, Kav. 7-8, Kuningan, RT.10/RW.4, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 (Sebagai regulator dan fungsi verifikasi perizinan) (As regulator and permit verifier)
BKPM **(Badan Koordinasi Penanaman Modal)** Capital Investment Coordinating Board (BKPM)	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 PO Box 3186, Indonesia Telp. +62 21 5252 008 (hunting) Telp. 08071002576 atau 1500765 (Contact Center) Fax. +62 21 520 2050 Email: info@bkpm.go.id Email: satgasnasional@bkpm.go.id (Sebagai fungsi pusat perizinan terpadu satu pintu/online single submission) (As one-stop integrated permit center/online single submission)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia	Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto No.2, RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270 (Sebagai regulator dan fungsi verifikasi perizinan) (As regulator and permit verifier)
Kementerian PUPR Ministry of Public Works and Public Housing	Kementerian PUPR Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Email: informasi@pu.go.id
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia	Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Gambir, RT.11/RW.2, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Ministry of Energy and Mineral Resources	Jl. Medan Merdeka Sel. No.18, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Direktorat Jenderal EBTKE - Kementerian ESDM Directorate General of NRE and Energy Conservation - Ministry of Energy and Mineral Resources	Jl. Pegangsaan Timur No.1, RT.1/RW.1, Pegangsaan, Kec. Menteng Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10320
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia	Sentra Mulia, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kemenkumham Directorate General of Intellectual Properties - Ministry of Law and Human Rights	Gedung Ex. Sentra Mulia Jl H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan Telepon : (021) 152 Kode Pos : 12940 Email : halodjki@dgip.go.id (Sebagai regulator dan fungsi verifikasi perizinan atau kegiatan usaha)
Badan Siber dan Sandi Negara National Cyber and Crypto Agency	Jalan Raya Muchtar 70 Bojong Sari, Depok, Jawa Barat – 16518 Telp: +6221 77973360 Email: humas[at]bssn.go.id
BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Indonesian National Board for Disaster Management (BNPB)	Jl. Pramuka Kav.38 Jakarta Timur Telp. +62 21 298 27793 Fax. +62 21 212 81200
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) **Kantor Perwakilan DKI Jakarta** Finance and Development Supervisory Agency (BPKP)	Jl. Pramuka No.33, Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman, Jakarta Timur Telp.: (021) 85910031

LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN
COMPANY-SUPPORTING PROFESSIONAL INSTITUTIONS

Sejak menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Efek Beragun Aset (EBA) pada September 2017, Indonesia Power telah menunjuk lembaga profesi penunjang pasar modal sebagai berikut:

Since its issuance of Asset-Backed Security Collective Investment Contract (KIK-EBA) in September 2017, Indonesia Power has been collaborating with the following capital market-supporting professional institutions:

Lembaga Pemeringkat Rating Agency	
Pefindo	Panin Tower Senayan City, 17th Floor, Jl. Asia Afrika Lot.19, Jakarta 10270 Telp. (62-21) 7278 2380 Fax. (62-21) 7278 2370
Manajer Investasi Investment Manager	
PT Danareksa Investment Management	Plaza BP Jamsostek Lt. 11 Jl HR. Rasuna Said No.112 Blok B Jakarta 12910
Pencatatan Efek Security Listing	
PT Bursa Efek Indonesia	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53 Jakarta 12190
Bank Kustodian Custodian Bank	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Gedung BRI I Lt. 30 Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210 Tel : (62-21) 5752354 / 5758131 Fax : (62-21) 2510316 Website : www.bri.co.id
Konsultan Pajak Tax Consultant	
GNV Consulting	AIA Central Building 23rd Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 48A, Jakarta Selatan, Indonesia 12930
Lead Arranger / Sales Agent Lead Arranger/Sales Agent	
PT BRI Danareksa Sekuritas	Gedung BRI II Jl. Jend Sudirman, Bendungan Hilir, Jakarta 101210

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
SHARE LISTING CHRONOLOGY

Sampai dengan tahun 2021, Indonesia Power belum pernah mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi (corporate action), perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

Until 2021, Indonesia Power has yet to list its shares on the Stock Exchange. Consequently, there is no information regarding the listing chronology, corporate action, change in the amount of shares, or the name of the stock exchange.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

OTHER SECURITIES LISTING CHRONOLOGY

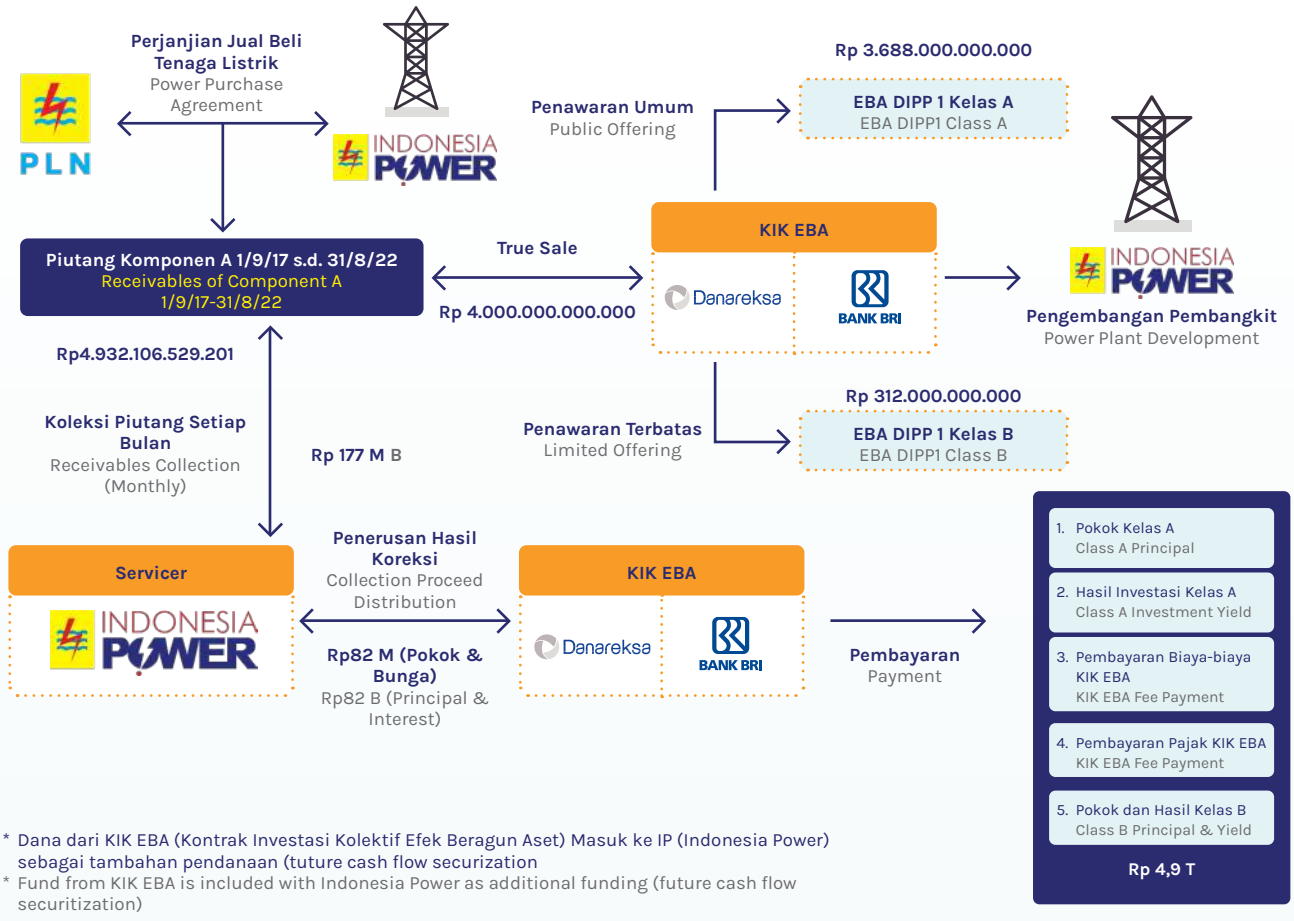
Sejak bulan September 2017 Indonesia Power telah melakukan sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) dengan terbitnya Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Untuk itulah terdapat informasi terkait kronologis pencatatan efek lainnya, jenis tindakan korporasi, perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek.

Since September 2017, Indonesia Power has performed the securitization of Asset-Backed Security (EBA) with the issuance of Collective Investment Contract (KIK). Therefore, we present the information on the chronology of other securities listing, such as corporate action, changes in the amount of securities, name of stock exchange, and security rating.

Indonesia Power melalui KIK EBA, melakukan sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) dengan nama EBA Danareksa Indonesia Power PLN1 - Piutang Usaha ("EBA DIPP1") guna mendukung rencana strategis program 35.000 MW melalui program pengembangan pembangkit baru, tentunya dengan tingkat pengembalian yang kompetitif. Penerbitan EBA DIPP1 sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan guna mengoptimalkan peluang bisnis dan mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Nilai EBA yang diterbitkan adalah Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dengan aset dasar disekuritisasi adalah aset keuangan yang merupakan bagian dari piutang penjualan ketenagalistrikan PLTU Suralaya Unit 1 – 4, dengan skema Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset sebagai berikut:

With the Collective Investment Contract (KIK) of Asset-Backed Security (EBA) under the name of "EBA Danareksa Indonesia Power PLN1 - Piutang Usaha" ("EBA DIPP1") or Asset-Backed Security (EBA) of Indonesia Power Mutual Funds PLN1-Trade Receivables, Indonesia Power supports the strategic plan of the 35,000 MW program through new power plant development, with evidently competitive rate of return. The issuance of EBA DIPP1 is seen as an alternative for financing sources to optimize business opportunity and assume bigger role in the electricity infrastructure development. The issued EBA was amounting to Rp4,000,000,000,000 (four trillion Rupiah), with securitized financial asset as a part of the receivables from the sale of electricity from SPP Suralaya Units 1-4 with the following Collective Investment Contract (KIK) of Asset-Backed Security (EBA) scheme:

Alur Transaksi EBA-DIPP1
EBA-DIPP1 Transaction Flow



* Dana dari KIK EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset) Masuk ke IP (Indonesia Power) sebagai tambahan pendanaan (tuture cash flow securization
* Fund from KIK EBA is included with Indonesia Power as additional funding (future cash flow securitization)

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA
OTHER SECURITIES LISTING CHRONOLOGY

EBA DIPP1 diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) antara PT Danareksa Investment Management selaku Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian, yang kemudian disebut KIK EBA DIPP 1. EBA DIPP1 diterbitkan atas 2 (dua) nilai yaitu:

1. EBA kelas A senilai Rp3,688 triliun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, dan
2. EBA kelas B senilai Rp312 miliar yang ditawarkan melalui Penawaran Terbatas.

Adapun detil tanggal listing, tenor, rating dan struktur pembayaran EBA DIPP 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

EBA DIPP1 was issued under Collective Investment Contract (KIK) between PT Danareksa Investment Management as the Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank, in which the security is subsequently called KIK EBA DIPP 1. EBA DIPP 1 was issued on two (2) values, i.e.:

1. EBA Class A at a value of Rp3.688 trillion which was offered through Public Offering, and
2. EBA Class B at a value of Rp312 billion which was offered through Limited Offering.

The details of the listing date, tenure, rating, and payment structure of EBA DIPP 1 can be found as follows:

Underlying	Piutang Komponen A PJBTL PLTU Suralaya 1-4 Receivables of Component A of PPA SPP Suralaya 1-4
Nilai Score	1. Kelas A: Rp3,688 triliun; dan Class A: Rp3.688 trillion; and 2. Kelas B: Rp312 miliar Class B: Rp312 billion1.
Tenor Tenure	5 (lima) tahun 5 (five) years
Yield	8,25%
Rating	idAAA (Pefindo) untuk EBA Kelas A idAAA (Pefindo) for EBA Class A
Struktur Pembayaran Payment Structure	Skema *pass-through*, seluruh pendapatan EBA dibayarkan ke investor berdasarkan urutan dalam KIK (*waterfall*). Dibayarkan setiap 3 bulanan Pass-through scheme, all EBA revenues paid to investor according to the order in KIK (waterfall). Paid on quarterly basis
Penggunaan Dana Use of Fund	1. PLTGU Grati *Add On* Blok 2; CCPP Grati Add On Block 2; 2. PLTGU Tambak Lorok Blok 3; CCPP Tambak Lorok Block 3; 3. PLTU Suralaya 9-10 2x1000 MW; SPP Suralaya 9-10 2x1000 MW; 4. PLTU MT Kaltim-1; SPP MT East Kalimantan-1; 5. PLTU Kalbar-1; dan SPP West Kalimantan-1; and 6. Proyek pengembangan usaha lainnya yang potensial dan ditetapkan Direksi. Other potential business development projects and determined by the Board of Directors.
Tanggal *Listing* Listing Date	20 September 2017 di Bursa Efek Indonesia September 20, 2017 on Indonesia Stock Exchange

Rating Corporate PT Indonesia Power

PT Indonesia Power Corporate Rating





2021

Rating idAAA

idAAA Rate

Merupakan peringkat obligasi tertinggi / superior diberikan oleh Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia). Peringkat Obligasi idAAA diberikan kepada perusahaan yang memiliki kemampuan baik dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

The highest/superior security rating granted by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). idAAA security rating is given to companies with good ability to meet their long-term liabilities.

Sampai dengan 31 Desember 2021, Indonesia Power telah mempergunakan dana sekuritisasi EBA pada proyek-proyek pengembangan usaha berikut:

Sampai dengan 31 Desember 2021, Indonesia Power telah mempergunakan dana sekuritisasi EBA pada proyek-proyek pengembangan usaha berikut:



KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA
OTHER SECURITIES LISTING CHRONOLOGY

Dari beberapa proyek yang mempergunakan dana sekuritisasi EBA tersebut, PLTU Kaltim-1 kapasitas 2x27,5 MW di Muara Jawa telah beroperasi tanggal 1 Desember 2018, PLTD Senayan kapasitas 101 MW telah beroperasi pada 5 Desember 2019 serta PLTGU Grati *Add On* Blok 2 kapasitas 183 MW telah beroperasi pada 30 Juni 2020. Selain itu, *Mobile Power Plant* Papua di beberapa lokasi juga telah beroperasi, antara lain MPP Sorong kapasitas 50 MW, MPP Biak kapasitas 10 MW, MPP Merauke-2 kapasitas 20 MW, MPP Manokwari-2 kapasitas 20 MW, MPP Timika kapasitas 10 MW, dan MPP Nabire kapasitas 10 MW. Di tahun 2021, Indonesia Power telah menyelesaikan pembangunan pembangkit PLTU Kalbar 1 (Unit 1 dan 2) berkapasitas 2x100 MW yang mulai beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date*/COD) pada tanggal 3 Februari 2021 dan 25 Juni 2021. Sedangkan PLTGU Tambak Lorok Blok 3 ditargetkan COD pada tahun 2022 dan PLTU Suralaya 9-10 diestimasi COD pada 2027 sesuai RUPTL.

Out of a number of projects funded by the EBA security, SPP East Kalimantan-1 2x27.5 MW in Muara Jawa has commenced its operation on December 1, 2018, DPP Senayan 101 MW has commenced its operation on December 5, 2019, and CCPP Grati Add-on Block 2 183 MW has commenced its operation on June 30, 2020. Additionally, Mobile Power Plants have also commenced their operations in several locations in Papua, among others MPP Sorong 50 MW, MPP Biak 10 MW, MPP Merauke-2 20 MW, MPP Manokwari-2 20 MW, MPP Timika 10 MW, and MPP Nabire 10 MW. In 2021, Indonesia Power has completed the development of SPP West Kalimantan 1 (Units 1 and 2) of 2x100 MW whose Commercial Operation Date (COD) was set on February 03, 2021 and June 25, 2021. Meanwhile CCPP Tambak Lorok Block 3 is targeted to set its COD by 2022 whereas SPP Suralaya 9-10 is estimated to set its COD by 2027 in accordance with the Electricity Supply Business Plan (RUPTL).

EBA - DIPP 1 (Executive Summary)
EBA - DIPP 1 (Executive Summary)

2017

EBA

Produk Product	EBA DIPP 1
Underlying	Piutang Komp. A PJBTL SLA 1-4 (2017-2022)
Nilai Perolehan Value Gained	EBA DIPP 1 : Rp4.00 Triliun Trillion a. Kelas A Class A : Rp3.688 Triliun Trillion (92.2%) b. Kelas B Class B : Rp312 Miliar Billion (7.8%) (*credit enhancement* / pendukung support)
Tenor Tenure	5 (Lima) Tahun 5 years
Yield	8,25%
Rating Instrument	idAAA for ABS Class A
Rating Corporate	idAAA (Stable Outlook)

2017 - 2018

Progress Disburse EBA s.d. 2018
EBA Disbursement Progress until 2018

1. PLTGU Grati *Add On* : 1.274,21 M (31,9%)
   CCPP Grati Add On = 1,274.21 B (31.9%)
2. PLTU MT Kaltim 1 : 653,55 M (16,3%)
   SPP MT East Kalimantan 1 = 653.55 B (16.3%)
3. PLTGU Tambak Lorok Blok 3 : 550,55 M (13,8%)
   CCPP Tambak Lorok Block 3 = 550.55 B (13.8%)
4. PLTU Suralaya 9-10 : 512,20 M (12,8%)
   SPP Suralaya 9-10 = 512.20 B (12.8%)
5. PLTU Kalbar-1 : 378,40 M (9,5%)
   SPP West Kalimantan-1 = 378.40 B (9.5%)
6. MPP & Lainnya : 631,09 M (15,8%)
   MPP & Others = 631.09 B (15.8%)

Disburse EBA = 4.000,00 M (100%)

Hasil Penempatan* s.d. 2018
Investment Yield* until 2018

1. Hasil Penempatan 2017 : 29,74 M
   Investment Yield 2017 = 29.74 B
2. Hasil Penempatan 2018 : 54,35 M
   Investment Yield 2018 = 54.35 B

Hasil Penempatan Investment Yield
84,09 M

Hasil EBA Kelas B 2017-2021
EBA Class B Yield in 2017-2020

1. Hasil Investasi EBA Kelas B : 58,50 M
   EBA Class B Investment Yield = 58.50 B
2. Pengembalian Pokok : 217,00 M
   Return on Principal = 217.00 B

Sisa Pokok EBA Kelas B
Remaining EBA Class B Principal
95,00 M 95.00 B

2018 - 2022

Penagihan & Kewajiban s.d. 2022
COLLECTION & LIABILITIES UNTIL 2022

Indonesia Power selaku servicer memiliki hak untuk melakukan Penagihan Piutang Komp. A SLA 1-4 ke PLN dan Berkewajiban mendistribusikan Pokok & Bunga kepada KIK-EBA s.d. 19 September 2022
Indonesia Power as the servicer reserves the right to collect the Receivables of Comp. A SLA 1-4 from PLN and has the obligation to distribute the Principal and Interest to KIK EBA until September 19, 2022.
1. Pokok & Bunga 2022 = 739,82 M
   Principal & Interest 2022 = 739.82 B

Saldo Pokok & Bunga
Balance of Principal & Interest
739,82 B (15%) 739.82 B (15%)

Total hasil koreksi yang berhasil Indonesia Power lakukan selaku servicer s.d. Desember 2021 adalah sebesar 4.192,29 M (85%) dan telah didistribusikan seluruhnya kepada KIK-EBA DIPP 1
Total collected fund by Indonesia Power as the servicer per December 2021 is 4,192.29 B (85%) which has been fully distributed to KIK EBA-DIPP1.

* Merupakan penempatan investasi pada bank atau instrumen efek utang dengan peringkat serendah-rendahnya di idAAA. (Sesuai persyaratan pemeringkatan efek oleh Pefindo)
investment placed in bank or payable security instrument at the lowest possible rating idAA (according to Pefindo's security rating requirements)

a. Kumulatif Pokok EBA Kelas B
Cumulated EBA Class B Principal

Tanggal Date	Penempatan Investasi EBA Kelas B EBA Class B Investment	Repayment Pokok EBA Kelas B EBA Class B Principal Repayment	Saldo Pokok EBA Kelas B EBA Class B Principal Balance
19 September 2017 September 19, 2017	Rp 312,000,000,000	-	Rp 312,000,000,000
21 Desember 2018 December 21, 2018		Rp 12,000,000,000	Rp 300,000,000,000
20 Desember 2019 December 20, 2019		Rp 25,000,000,000	Rp 275,000,000,000
20 Desember 2020 December 20, 2020		Rp 85,000,000,000	Rp 190,000,000,000
20 Desember 2021 December 20, 2021		Rp 95,000,000,000	Rp 95,000,000,000
31 Desember 2021 **December 31, 2021**		**Rp 217,000,000,000**	**Rp 95,000,000,000**

b. Kumulatif Imbal Hasil EBA Kelas B
Cumulated EBA Class B Return

Tanggal Date	Imbal Hasil EBA Kelas B EBA Class B Return	Kumulatif Imbal Hasil EBA Kelas B Cumulated EBA Class B Return
21 Desember 2018 December 21, 2018	Rp 11,501,936,978	Rp 11,501,936,978
20 Desember 2019 December 20, 2019	Rp 12,000,000,000	Rp 23,501,936,978
21 Desember 2020 December 21, 2020	Rp 20,000,000,000	Rp 43,501,936,978
20 Desember 2021 December 20, 2021	Rp 15,000,000,000	Rp 58,501,936,978
31 Desember 2021 **December 30, 2019**		**Rp 58,501,936,978**

Indonesia Power sebagai Originator merupakan pemilik aset berupa piutang tagihan listrik ke PLN di masa depan, sekaligus berperan sebagai *Servicer* (Penyedia Jasa) yaitu melakukan penagihan dan koleksi Piutang Komponen A Suralaya Unit 1-4 kepada PLN. Untuk selanjutnya mendistribusikan Piutang hasil koleksi tersebut kepada KIK EBA DIPP1 sebagai angsuran pokok dan bunga.

Dalam menjalankan peran sebagai Servicer, Indonesia Power meneruskan hasil penagihan Piutang Komponen A dari PLN kepada KIK EBA DIPP1 KIK EBA DIPP1 setiap bulannya sejak Oktober 2017 sampai dengan berakhirnya periode EBA selama 5 tahun, dan akan berakhir pada tanggal 19 September 2022. Atas pembayaran tersebut, KIK EBA DIPP1 akan meneruskan pembayaran kepada investor pemegang EBA setiap triwulan.

Indonesia Power as the Originator is the owner of assets in the form of future electricity billing receivables from PLN, which also acts as the Servicer (Service Provider) that collects Receivables of Component A of Suralaya Units 1-4 from PLN. Further, the Receivables from such collection will be distributed to KIK EBA DIPP1 as the installment for principal and interest.

In performing its role as a Servicer, Indonesia Power forwards the proceed from the collection of Receivables of Component A from PLN to KIK EBA DIPP1 on a monthly basis from October 2017 until the expiry of the quinquennial EBA, which will expire on September 19, 2022. KIK EBA DIPP1 will then forward the payment to the investor as the EBA holder on a quarterly basis.

INFORMASI *WEBSITE* PERUSAHAAN

INFORMATION ON COMPANY WEBSITE

Indonesia Power senantiasa berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada seluruh stakeholders, melalui situs resmi Indonesia Power dengan alamat www.indonesiapower.co.id. Hal tersebut merupakan komitmen implementasi prinsip-prinsip GCG, yakni prinsip transparansi dan prinsip kewajaran (*fairness*) yang sejalan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Situs resmi Indonesia Power tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, yang menyajikan informasi secara komunikatif dan update bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum.

Informasi pada website Indonesia Power meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. **Profil** memuat berbagai informasi Sekilas Indonesia Power, Manajemen yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, Sejarah, Penghargaan & Sertifikasi yang diperoleh dalam setahun terakhir, Kamus & Istilah, Keterbukaan Informasi Publik, Pertumbuhan Perusahaan, Kinerja Perusahaan, Testimoni *Stakeholder*.
2. **Produk & Layanan** memuat informasi terkait dengan Produk dan Layanan Indonesia Power serta profil ringkas Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan.
3. **Tata Kelola** berisi informasi terkait dengan informasi Praktik Tata Kelola yang dijalankan Indonesia Power, Pedoman Tata Kelola, Pedoman Perilaku, Pedoman Dewan, Mekanisme Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi, WBS, LHKPN, GCG *Assesment*, Informasi Pemegang Saham, dan Informasi RUPS.
4. **Komunitas & Lingkungan** memuat informasi terkait dengan Program Ketaatan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, *Corporate Social Responsibility*, Produk CSR, dan Program Keanekaragaman Hayati.
5. **Komunikasi Berkelanjutan** berisi pilihan informasi terkait dengan informasi Berita, Dokumentasi Video, Keterangan Pers, InPower Magz, dan *Reports* dan *eBooks*.
6. **Karir** memuat informasi terkait dengan terdiri dari informasi Peluang Karir , Rekrutmen dan IP Academy.
7. **Kontak.**

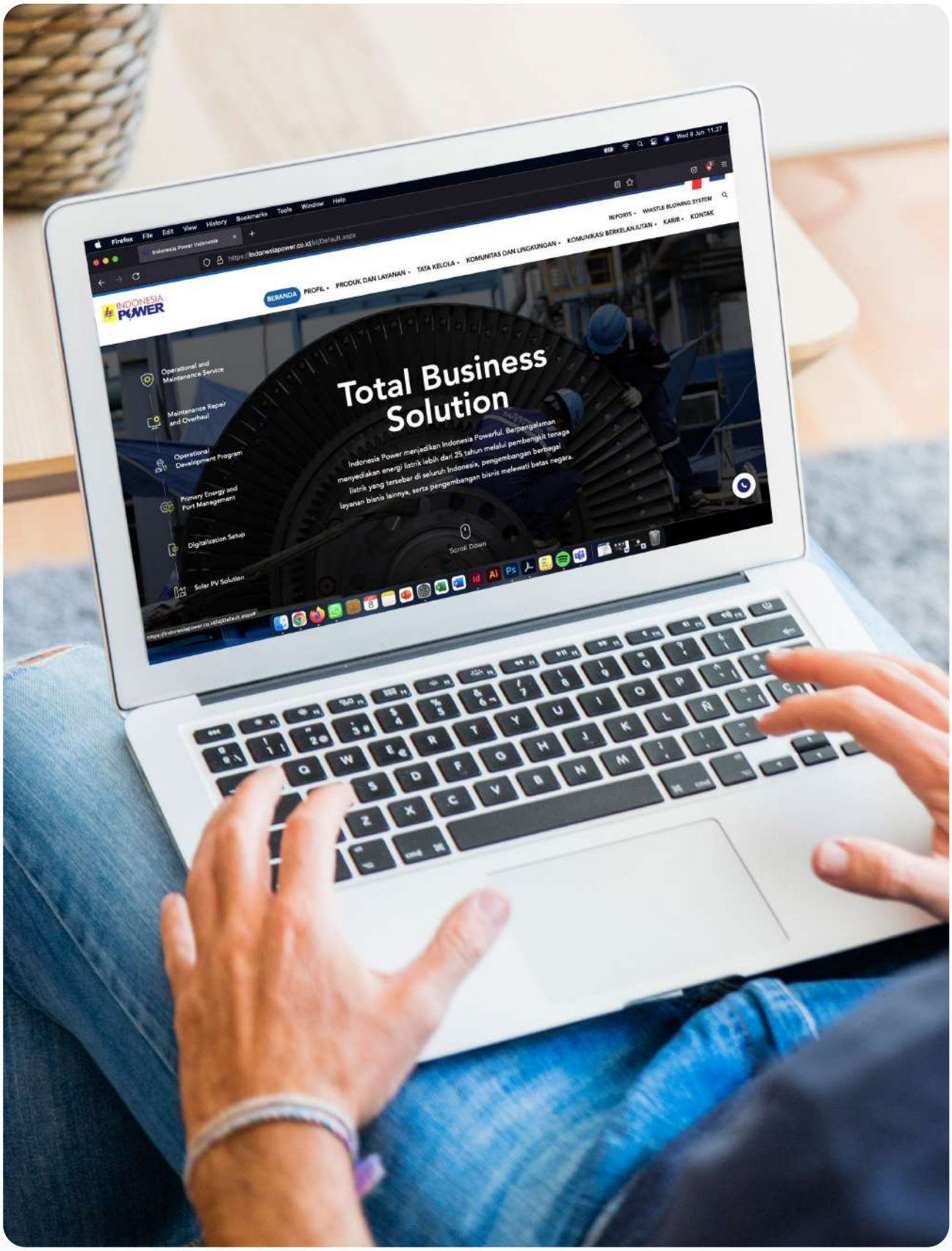
Informasi tambahan dapat dilihat di bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada Bab Tata Kelola Perusahaan

Indonesia Power is always committed to providing ease of access to information for all stakeholders via the Company's official website at www.indonesiapower.co.id. This is a commitment to implementing the GCG principles of transparency and fairness that refer to the Public Information Disclosure Act. Indonesia Power's official website is available in Indonesian and English, presenting communicative and updated information for all stakeholders and the public at large.

The information on Indonesia Power website contains the following matters:

1. **Profile**, covering Indonesia Power Overview, Management that consists of the Board of Commissioners and the Board of Directors, History, Achievements & Certifications earned within the past year, Glossary & Terms, Public Information Disclosure, Company Growth, Company Performance, and Stakeholder Testimonials.
2. **Products & Services**, covering information on Indonesia Power's products and services and brief profile of Subsidiaries and Joint Ventures.
3. **Governance**, covering information on Governance Practices run by Indonesia Power, GCG Code, Code of Conduct, Board Manual, Whistleblowing System, Gratification Control, State Official Wealth Report (LHKPN), GCG Assessment, Shareholder Information, and GMS Information.
4. **Community & Environment**, covering information on Environmental Compliance Program, Occupational Health, Safety and Environment, Corporate Social Responsibility, CSR product, and Biodiversity Program.
5. **Sustainable Communication**, covering information on News, Video Documentation, Press Releases, InPower Magz, Reports and eBooks.
6. **Career,** covering information on Career Opportunities, Recruitment, and IP Academy.
7. **Contacts.**

Additional information can be found in the section of Access to Company Data and Information in the Chapter of Corporate Governance.


Total Business Solution
Indonesia Power menjadikan Indonesia Powerful. Berpengalaman menyediakan energi listrik lebih dari 25 tahun melalui pembangkit tenaga listrik yang tersebar di seluruh Indonesia, pengembangan berbagai layanan bisnis lainnya, serta pengembangan bisnis melewati batas negara.
Operational and Maintenance Service
Maintenance Repair and Overhaul
Operational Development Program
Primary Energy and Port Management
Digitalization Setup
Solar PV Solution
Scroll Down


LIABILITY EFFICIENCY OPTIMIZATION
nesia Power Beyond Digital Solution #IndonesiaPowerGoesToArtificialIntelli
RELIABILITY EFFICIENCY OPTIMIZATION CENTER
50.022



TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Business Support Review

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

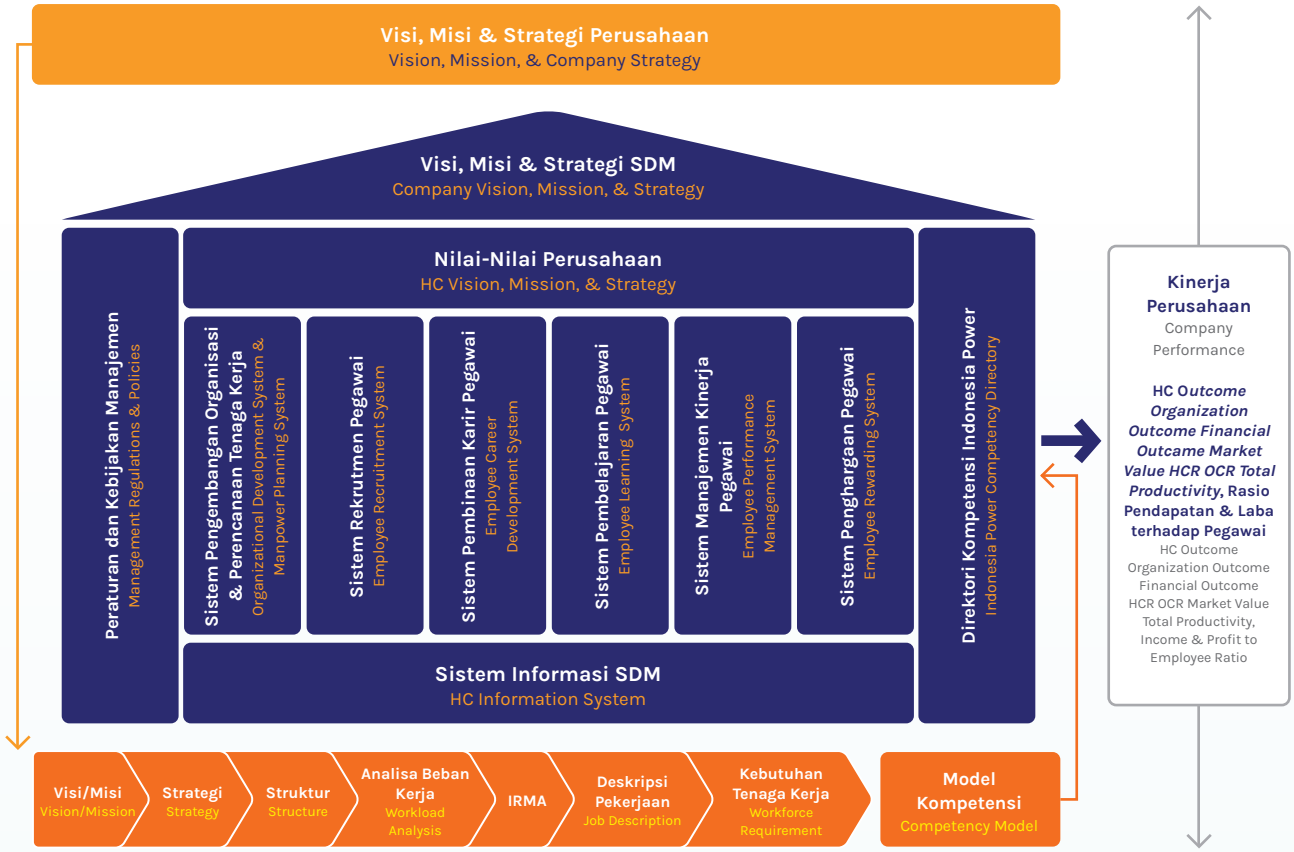
PT Indonesia Power mengatur dan mengelola Sumber Daya Manusia mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 38.K/010/IP/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) dan Surat Keputusan Direksi No. 186.K/010/IP/2012 tanggal 21 November 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 38.K/010/IP/2009 tentang MSDM-BK dengan menetapkan Pilar Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi yang terdiri dari :

1. Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Sistem Rekrutmen Pegawai;
3. Sistem Pembelajaran Pegawai;
4. Sistem Pembinaan Karir Pegawai;
5. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai;
6. Sistem Penghargaan Pegawai.

Regulation and management of Human Capital at PT Indonesia Power refers to Decree of the Board of Directors No. 38.K/010/IP/2009 dated May 7, 2009 on Competency-Based Human Capital Management System (MSDM-BK) as well as Decree of the Board of Directors No. 186.K/010/IP/2012 dated November 21, 2012 on Amendment to the Board of Directors Decree No. 38.K/010/IP/2009 on MSDM-BK which states that Pillars of the Competency-Based Human Capital Management System are:

1. Organizational Development and Manpower Planning System;
2. Employee Recruitment System;
3. Employee Learning System;
4. Employee Career Development System;
5. Employee Performance Management System;
6. Employee Rewarding System.

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) PT Indonesia Power
Competency-Based Human Capital Management System (MSDM-BK) PT Indonesia Power



Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja

Organizational Development and Manpower Planning System

Roadmap SDM

HC Roadmap

Dasar perencanaan strategis tidak terlepas dari *Roadmap Human Capital Excellence* 2020-2024 sebagai berikut:

As an integral basis for strategic planning, the Human Capital Excellence Roadmap 2020-2024 comprises:



SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Realisasi program *Roadmap Human Capital Excellence* 2020-2024 di tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

Below is the implementation of Human Capital Excellence Roadmap 2020-2024 program in 2021:

Program	Penjelasan Description
Organization: Lean organization	
Total Faktor Produktivitas Total Factor Productivity	Pengembangan Model Faktor Produktivitas dilakuan di tahun 2021. Pengukuran Produktivitas merupakan prasyarat bagi organisasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga bisa diketahui apakah organisasi telah berjalan dengan baik. Selain itu, pengukuran total faktor Produktivitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan efisiensi menghasilkan *output* dalam pengelolaan *input*/sumber daya organisasi. Manfaat pengukuran produktivitas bagi Perusahaan: 1. Mengukur tingkat produktivitas dan pertumbuhan produktivitas organisasi: a. memantau dan menganalisis produktivitas organisasi; b. memantau pertumbuhan produktivitas organisasi dari waktu ke waktu; c. mengukur produktivitas pegawai secara individual terkait dengan remunerasi. 2. Mengukur perbandingan produktivitas antar unit organisasi: a. membandingkan tingkat produktivitas antar unit organisasi dalam level yang sama; b. menentukan unit-unit sebagai unit *benchmark* bagi unit-unit yang produktivitasnya masih rendah; c. menjadi referensi dalam pengambilan keputusan terkait manajemen organisasi dari SDM. Productivity Factor Model was developed in 2021. For an organization, Productivity Measurement is a prerequisite to improve its performance, allowing it to know whether the organization has performed well. Besides, measurement of total factor Productivity is used to examine effectiveness and efficiency in managing input/organizational resources to generate output. Benefits of productivity measurement for Company: 1. Measuring the level and growth of organization productivity: a. monitoring and analyzing productivity of the organization; b. monitoring productivity growth of the organization from time to time; c. measuring employee productivity individually as it relates to remuneration. 2. Measuring comparison of productivity of all organizational units: a. comparing productivity levels of all units at the same level; b. setting units as a benchmark for units with low productivity; c. acting as a reference in making decisions related to HC organizational management.
Crafting Agile Organization	Berbagai tantangan strategis dihadapi Perusahaan terutama untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengembangan bisnis (*beyond* kWh) dalam kondisi lingkungan yang dinamis dan sekaligus meningkatkan efektivitas parenting kepada unit pembangkit & unit jasa O&M agar tetap kompetitif. Kondisi bisnis yang dinamis menuntut Perusahaan untuk semakin berdaya saing dan tumbuh. Struktur organisasi sebagai instrumen utama manajemen puncak Perusahaan untuk mengeksekusi strategi bisnis yang senantiasa harus di-*review* efektivitasnya. *Review* dan penyempurnaan organisasi yang dilakukan diharapkan akan memperkuat struktur organisasi Perusahaan sehingga mampu: 1. Mendukung eksekusi proses bisnis Perusahaan yang *agile* dan *adaptive*; 2. Mendukung Perusahaan untuk mencapai target-target kinerja; 3. Menunjang eksekusi proses bisnis yang berbasis tata kelola organisasi yang modern (*Good Corporate Governance*); 4. Mendukung efisiensi Perusahaan; 5. Mendorong penciptaan daya saing unit bisnis Perusahaan secara berkelanjutan; Atas dasar berbagai hal tersebut, arah penyempurnaan organisasi Kantor Pusat PT Indonesia Power dirancang sebagai berikut: 1. Penguatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan inovasi dan portofolio bisnis baru; 2. Menyeimbangkan budaya inovasi, *agility*, dan efisiensi; 3. Penguatan kompetensi organisasi ke arah *ambidextrous organization;* 4. Kejelasan akuntabilitas proses bisnis secara *end-to-end;* 5. Penguatan kemampuan kantor pusat dalam melakukan parenting kepada unit pembangkit dan jasa O&M dan mengelola anak perusahaan; 6. Mendorong peningkatan maturitas transformasi *digital* perusahaan.

Program	Penjelasan Description
	Company faces various strategic challenges particularly in improving its capability to develop business (beyond kWh) amidst dynamic environmental conditions and in increasing its effectiveness in parenting all generation units & O&M service units to remain competitive. Dynamic business conditions require the Company to maintain its competitiveness and grow. As company's top management's key instrument to execute business strategy, effectiveness of organizational structure must be continuously reviewed. It is expected that review and improvement of the organization can strengthen Company's organizational structure so that it can: 1. Support execution of agile and adaptive business process of the Company; 2. Support the Company to achieve its performance targets; 3. Support execution of a business process that is based on modern Good Corporate Governance; 4. Promote Company's efficiency; 5. Increase competitiveness of the Company's business units sustainably. Taking into account all the aspects, organizational improvement of PT Indonesia Power's Head Office will be carried out by: 1. Strengthening the company's ability to innovate and create new business portfolios; 2. Balancing innovation culture, agility, and efficiency; 3. Strengthening organizational competencies towards becoming an ambidextrous organization; 4. Maintaining clarity of end-to-end business process accountability; 5. Strengthening head office's ability to perform its parenting role towards generation units and OM services and control subsidiaries; 6. Promoting improvement in the company's digital transformation maturity.
Leadership: Innovative Leader	
Pengembangan *Talent* Talent Development	Tahun 2021 Perusahaan melaksanakan Program Pengembangan *Talent* yang bertujuan untuk mencetak suksesor (*Leader*) dan kepakaran (*Expert*). Program pengembangan *talent* merupakan rangkaian siklus yang terdiri dari *Define, Attract, Select, Develop, Deploy,* dan, *Retain*. - **Program *Leadership*** yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu Program Suksesi *Talent* Muda dan *Talent* Perempuan berupa Program *Mentoring* oleh Direksi. Terdapat 22 *Leader* Indonesia Power yang mengikuti program ini. Selain itu, terdapat program OCR *Leadership* 2021 yang mana bertujuan untuk mempersiapkan calon *Leader* di masa depan dengan program pengembangan *talent* berdasarkan hasil asesmen potensi dan *personality* dari pegawai kandidat *talent*. Hasil dari program ini adalah terpilihnya 189 *talent* dari seluruh Unit yang telah sukses menyelesaikan program pengembangan yang diberikan. - **Program *Expertise*** yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu pendataan *Expert* dari berbagai stream (*Transformator, Turbin, Boiler, Generator*) yang ada di Indonesia Power. Metode pengambilan data menggunakan metode *snowball sampling* dengan responden *Expert Existing* yang ada di Perusahaan. Selain itu, telah dilaksanakan Uji Sertifikasi dengan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) Sub Bidang Konsultasi Perencanaan dan Ahli Pembangkitan Level 4 hingga Level 8. Program ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan sebelum ditetapkannya kandidat *talent* ini menjadi Expert di Indonesia Power. Sebanyak 12 pegawai telah mengikuti Uji Sertifikasi tersebut dan dinyatakan Kompeten dan memperoleh Sertifikat Kompetensi SKTTK DJK sesuai Level yang dipersyaratkan. In 2021, the Company organized a Talent Development Program to give birth to Leaders and Experts. The program consists of a cycle of Define, Attract, Select, Develop, Deploy, and Retain. - **Leadership Program** sought in 2021, i.e. Female Talent and Young Talent Succession Program, provided mentoring from the Board of Directors. The program was participated in by 22 Indonesia Power Leaders. Also available was the OCR Leadership Program 2021 which aimed at preparing and developing the talent of potential future leaders based on the potency and personality assessment results of talent candidates. 189 talents from all Units have successfully completed their development program. - **Expertise Program** was carried out in 2021, by collecting data on Experts from a number of streams (Transformer, Turbine, Boiler, Generator) at Indonesia Power. The data were collected using snowball sampling method with existing internal Experts as the respondents. Certification Exam was also carried out using the Electricity Expert Competency Standard (SKTTK) for the Sub-Department of Power Generation Expert and Planning Consultancy of Levels 4-8. The program was held to fulfill the requirements prior to determining talent candidates to Indonesia Power Experts. 12 employees have participated in the Certification Exam and were declared Competent and obtained the SKTTK DJK Competency Certificate according to the required Level(s).

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Program	Penjelasan Description
IP Academy	IP Academy di-*launching* dalam menerapkan Pengembangan Kompetensi berbasis *Corporate University* melalui *Learning Value Chain*, menyebabkan Perusahaan mengalami beberapa penyesuaian. Dalam perjalanannya, dilakukan evaluasi terhadap proses bisnis di IP Academy termasuk Tata Kelola (*Learning Governance*) dari IP Academy. Berdasarkan hasil evaluasi dari proses bisnis dan tata kelola yang dilakukan di tahun 2020, pada akhir tahun 2021 terdapat tindak lanjut yaitu salah satunya terdapat perubahan jumlah *School* di IP Academy yang sebelumnya ada 7 *School* menjadi 5 *School*. Hal ini salah satunya didasari pada rencana jangka Panjang perusahaan ke depan dan implementasi perusahaan ke depan dan implementasi aset manajemen. Adapun 5 *school* IP Academy adalah sebagai berikut : 1. *Asset Performance Management School* I (APM School I) dengan *Vice Dean* DIROP I; 2. *Asset Performance Management School* II (APM School II) dengan *Vice Dean* DIROP II; 3. *Business Enabler School* (BEN School) dengan *Vice Dean* DIRKEU; 4. *Business Development Exellence School* (BDE School) dengan *Vice Dean* DIRAGA; 5. *Corporate Strategic Initiative School* (CSI School) dengan *Vice Dean* DIRSDM. The launch of IP Academy, a Corporate University which aims at Developing Competency through Learning Value Chain, has inspired the Company to adjust. IP Academy's business process, including its Learning Governance, was evaluated. According to the business process and governance evaluations carried out in 2020, at the end of 2021, Indonesia Power saw a follow-up, i.e. the change in the number of IP Academy schools, from previously 7 schools to 5 schools. It is influenced by the company's long-term Plan and future implementation as well as implementation of asset management, among others. The 5 schools managed by IP Academy include: 1. Asset Performance Management School I (APM School I) led by Vice Dean DIROP I; 2. Asset Performance Management School II (APM School I) led by Vice Dean DIROP II; 3. Business Enabler School (BEN School) led by Vice Dean DIRKEU; 4. Business Development Excellence School (BDE School) led by Vice Dean DIRAGA. 5. Corporate Strategic Initiative School (CSI School) led by Vice Dean DIRSDM.
Expertise: Utilize Expert as Business Solution	
Pengembangan *Expertise* Development of Expertise:	Dalam membangun O&M *Excellence* dan *Business Development Excellence*, Perusahaan mempersiapkan tenaga-tenaga ahli (*expert*) yang tergabung dalam *Community of Expertise* (Comet-IP). Pengembangan *expert* merupakan langkah Perusahaan dalam membangun *readiness of people* dengan kualifikasi internasional. Para *expert* tersebut, dibekali dengan program Pengembangan, untuk menunjang keahlian dan kompetensi, yang tidak hanya diakui internal perusahaan tetapi dapat diakui secara nasional dan internasional, dengan harapan *expert* dapat memaksimalkan *output* pekerjaan yang telah ditargetkan dan mendukung pencapaian perusahaan. Hingga tahun 2021, perusahaan telah memiliki 6 orang *expertise*. Tidak berhenti sampai disitu, Perusahaan terus melakukan Pengembangan *Expert*, sampai dengan bulan Desember 2021 Perusahaan sudah berhasil melakukan Pengembangan terhadap 14 orang yang terdiri dari *expertise* dan *candidate expertise*. In achieving O&M Excellence and Business Development Excellence, the company prepares experts incorporated in the Community of Expertise (Comet-IP). Expert development is the company's way to build readiness of the people to obtain international qualifications. These experts have participated in the Development program to build on their expertise and competencies acknowledged not only internally by the company but also at national and international levels. It is expected that they can maximize their targeted work output and support the Company's achievement. Up to 2021, the Company has had 6 experts. To go further, the company continued its Expert Development program. By December 2021, the Company had successfully trained 14 personnel comprising of experts and expert candidates.

Program	Penjelasan Description
Culture: Embody Strong Digital Culture	
Transformasi *Core Values* Core Values Transformation	Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri BUMN No. 7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, setiap BUMN wajib menerapkan *Core Values* menjadi Budaya Perusahaan dan menjadi dasar pembentukan karakter sumber daya manusia di lingkungan BUMN, Anak Perusahaan, serta Perusahaan Afiliasi terkonsolidasi. Penerapan *Core Values* diimpelementasikan secara utuh tanpa pengurangan atau penambahan *Core Values* lainnya pada seluruh group BUMN. Indonesia Power telah menetapkan *core values* AKHLAK dalam SK Direksi No. 22.K/010/IP/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Tata Nilai PT Indonesia Power. Secara substansi Tata Nilai IP AKSI sesuai dan selaras dengan *Core Values* AKHLAK, sehingga transformasi *Core Values* Indonesia Power menjadi AKHLAK dapat diterima dengan baik. Untuk memastikan internalisasi *Core Values* berjalan di seluruh unit kerja, tiap unit kerja melakukan internalisasi melalui media *electronic/web; face to face* dan *paper based*. As set out in Circular Letter of the Minister of SOEs No.7/MBU/07/2020 on State-Owned Enterprise Human Core Values, every SOE has a mandatory duty to adopt the Core Values into Corporate Culture and use them as the foundation to build human capital character within SOEs, their Subsidiaries, and Consolidated Affiliates. These Core Values must be fully adopted without any addition or omission in every SOE group. Indonesia Power has declared AKHLAK as its core values through Decree of the Board of Directors No. 22.K/010/IP/2021 dated March 12, 2021 on PT Indonesia Power's Value System. From content perspective, IP's Value System, namely AKSI, matches and aligns with the Company's Core Values, AKHLAK. Therefore, transformation of PT Indonesia Power's Core Values into AKHLAK is acceptable. To ensure internalization of these Core Values across working units, each unit uses electronic/web, face-to-face, and paper-based media to help them internalize these values.
Penguatan Budaya PLN 123 : IDEA Light Up for IP Great The Strengthening of PLN 123 Culture: IDEA Light Up for IP Great	Program penguatan budaya diperlukan sebagai *enabler* Transformasi PLN dalam memastikan kesiapan iklim kerja dan budaya yang mendukung transformasi berjalan. Tema Budaya PLN 2020: *Back to Basic, Build the Core,* merupakan ajakan kepada setiap insan PLN Group untuk membangun dan memperkuat budaya serta mengembangkan kapabilitas inti yang dibutuhkan untuk mewujudkan aspirasi PLN 2024. Aspirasi Penguatan Budaya yang ingin dicapai antara lain: memperkuat *governance, risk* dan *compliance culture,* bekerjasama meningkatkan kinerja terkait keandalan listrik (*collaboration & performance culture*) dan meningkatkan pelayanan prima atau *service culture*. Program penguatan budaya PLN 123 diimplementasi Indonesia Power dalam bentuk program bernama IDEA *Light Up for* IP *Great*. PT PLN melakukan *coaching* penguatan budaya PLN 123 melalui 3 kali pelaksanaan *coaching cycle* 1, 2 dan 3, di mana Indonesia Power masuk kategori *Outstanding* untuk setiap sesi *coaching*. Dan puncak penilaian implementasi program penguatan budaya PLN 123 dilaksanakan dalam kegiatan *Culture* Festival PLN Group pada tanggal 31 Agustus 2021, dengan Indonesia Power memperoleh Juara 2 Unit Kerja Implementasi Budaya Terbaik Kategori Anak Perusahaan dan Juara 1 Tim *Ranger* Terbaik Kategori Anak Perusahaan. Culture strengthening program is needed as an enabler of PLN Transformation in ensuring readiness of work climate and culture that support current transformation. The 2020 PLN Culture Theme: Back to Basic, Build the Core, encourages each PLN Group personnel to build and strengthen culture and develop core capabilities needed to achieve PLN's 2024 aspirations. The Culture Strengthening Aspirations to achieve include, among others: strengthening governance, risk, and compliance culture, collaborating to improve performance relating to electricity reliability (collaboration & performance culture) and improving service excellence or service culture. To strengthen PLN 123 culture, Indonesia Power implements IDEA Light Up for IP Great program. PT PLN conducted 3 coaching cycles themed strengthening PLN 123 culture, and in each session, PT Indonesia Power belonged to Outstanding category. On August 31, 2021, PLN Culture Festival was held. In this event, final evaluation of the implementation of PLN 123 culture was performed, resulting in PT Indonesia Power winning second place in Best Working Unit in Cultural Implementation at Subsidiaries Category and first place in Best Ranger Team at Subsidiaries Category.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Program	Penjelasan Description
Semesta Budaya (Semangat Bersama Implementasi Budaya) Semesta Budaya ('Semangat Bersama Implementasi Budaya')	Semesta Budaya IP (Semangat Bersama Implementasi Budaya Indonesia Power) merupakan salah satu upaya Perusahaan dalam memotivasi dan meningkatkan peran semua pihak dalam terinternalisasinya Budaya Perusahaan dengan optimal. Kegiatan Semesta Budaya IP Tahun 2021 dilaksanakan secara virtual pada tanggal 16-18 November 2021 dengan tema "*with Culture, We Generate Future Energy*". Rangkaian kegiatan dimulai dari *Strategic Planning* dan *Implementation* (April– September 2021) sampai dengan *On Desk Asessment* dalam rangka mengukur implementasi dan *deployment* program penguatan budaya PLN 123 - IDEA *Light Up* for IP *Great* dan Tata Nilai AKHLAK di Perusahaan. Semesta Budaya IP (Semangat Bersama Impelementasi Budaya Indonesia Power - Indonesia Power's Collective Spirit of Cultural Implementation) is one of the Company's efforts to motivate and increase roles of all parties to ensure optimal internalization of the Corporate Culture. Semesta Budaya IP 2021 was held virtually on November 16-18, 2021 on the theme "With Culture, We Generate Future Energy". The event began with the Strategic Planning and Implementation (April-September 2021) and ended with On Desk Assessment to assess implementation and deployment of PLN 123 Culture strengthening program - IDEA Light Up for IP Great--and AKHLAK Value System in the Company.
Survei HRSE (*Human Resources Satisfaction Engagement*) HRSE (Human Resource Satisfaction and Engagement) Survey	Survei HRSE merupakan *tool* untuk mengukur kepuasan/*satisfaction* dan keterikatan/*engagement* pegawai, dilakukan setiap tahunnya untuk memastikan program-program yang sudah diimplementasikan sesuai dengan tujuannya dan juga menggali harapan dan keinginan pegawai. Survei HRSE Tahun 2021 dilaksanakan periode 17-27 Agustus 2021 melalui survey.indonesiapower.co.id. HRSE Survey is a tool used to measure employee satisfaction and engagement. Conducted annually, this survey ensures the programs that have been implemented run towards the goals as well as finds out employees' expectations and aspirations. The 2021 HRSE Survey was conducted from August 17 to 27, 2021 through survey.indonesiapower.co.id.
IP LIGAT	IP Ligat merupakan Gerakan *Business, People & Organization* dengan lima gelombang aktivitas, yaitu (1) IP Inovasi Ligat *Think-shop* (2) IP *Business Stream Planning* (3) IP *Setting Business Direction* (4) IP *Winning Teams Culture System* (5) IP *Lean & Agile Organization* yang diselenggarakan untuk mewujudkan Indonesia Power Terbaik di era ekonomi *digital* dan kondisi VUCA-TUNA. Digaungkannya IP Ligat diharapkan mampu memperkuat strategi pengelolaan atas 90% omzet dari *core* bisnis Indonesia Power yaitu *power generation* dan *plant operation and maintenance*, dan meningkatkan peran anak perusahan dalam meningkatkan kontribusi omzet baik dari bisnis eksisting maupun *beyond* kWh dengan adanya *freedom to act, courage to excel* dibarengi *business savvy* yang ber-AKHKLAK. Dengan gerakan IP Ligat diharapkan dapat menguatkan kapabilitas IP sebagai *Industry Leader* dan menjadi *Global Energy Solutions Ecosystem.* IP Ligat is a Business, People & Organization Movement comprising of five waves of activity, namely (1) IP Ligat Innovation Think-shop, (2) IP Business Stream Planning, (3) IP Setting Business Direction, (4) IP Winning Teams Culture System, (5) IP Lean & Agile Organization, made to become the Best Indonesia Power in digital economic era and amidst VUCA-TUNA conditions. IP Ligat is introduced to strengthen the Company's strategies to manage 90% of turnover generated by Indonesia Power's core businesses including power generation as well as plant operation and maintenance, and increase roles of subsidiaries in increasing turnover from both existing business and beyond kWh through freedom to act, courage to excel and business savvy based on AKHLAK values. It is expected that IP Ligat can increase IP's capability as an Industry Leader and to become Global Energy Solutions Ecosystem.

Program	Penjelasan Description
Work Life Integration	Menghadapi kondisi Perekonomian dan bisnis yang VUCA dan TUNA, kesiapan fisik dan mental pegawai menjadi hal yang sangat difokuskan agar pegawai dapat cepat berantisipasi dan menyesuaikan diri dengan laju perubahan bisnis tersebut. Setiap pegawai memiliki perbedaan kecepatan di dalam merespon hal ini, tergantung dari seberapa efektifnya seorang pegawai dalam menata keseimbangan antara kehidupan personal, keluarga, dan pekerjaannya (Survei yang dilaksanakan oleh *Corporate Executive Board* terhadap pekerja Amerika terhadap pekerja Amerika menunjukkan adanya korelasi antara *work-life balance* dengan tingkat kepuasan kerja pegawai. Survei yang mereka lakukan juga mengemukakan bahwa 21% pegawai lebih produktif ketika mereka memiliki keseimbangan kehidupan dan pekerjaan yang cukup. Memiliki *work-life balance* yang positif dalam perusahaan dapat menciptakan peningkatan produktivitas, penurunan konflik, dan tingkat retensi pegawai yang lebih tinggi). Selama tahun 2021 Manajemen mendukung kesiapan pegawai melalui program *Work Life Integration* yang merupakan kelanjutan dari Program yang sama di tahun 2020. Selama kurun waktu ini Manajemen memfokuskan diri pada peningkatan program *Work Life Integration* menjadi lebih optimal dan efektif terutama terkait dengan program-program promotif (*well being*) insan Perusahaan. Program-program tersebut antara lain mengenai efektivitas pengontrolan diri (*mindset*) secara fisiologis, psikologis, maupun keuangan yang melibatkan diri pegawai, keluarga, dan komunitas terdekatnya dalam rangka meningkatkan antusiasme pegawai dalam bekerja. Berikut ini realisasi kegiatan *Work Life Integration* sepanjang tahun 2021: **Program Promotif Fisiologis terdiri atas:** 1. Ceramah *Working Life Integration*: "Olahraga Benar, Tubuh Segar, Virus Ambyar" pada tanggal 15 Januari 2021; 2. *Launching* video teknik Peregangan pada 5 Maret 2021; 3. Sosialisasi kesehatan fisik dengan tema: "Gizi dan Hidrasi Terjaga, Pegawai Aktif Selama Puasa" pada tanggal 16 April 2021; 4. Sosialisasi kesehatan fisik dengan judul: "*Cluster* Covid Keluarga: Bagaimana mengendalikannya?" pada tanggal 26 Juli 2021; 5. Sosialisasi kesehatan fisik dengan judul: Tubuh Fit untuk Antisipasi *Long* Covid pada tanggal 16 September 2021; 6. Senam Sinergi yang dilaksanakan mulai 5 November 2021 mempertimbangkan kondisi pandemi yang sempat menurun sehingga dapat dilaksanakan namun dengan prokes ketat. **Program Promotif Psikologis:** 1. Ceramah *Working Life Integration: "Alone with Your Thoughts* (Mencegah *Overthinking* untuk Mencapai *Well-being* Selama Isolasi Mandiri Covid-19)" pada tanggal 22 Februari 2021; 2. Sosialisasi kesehatan mental dengan judul: Jeda Sejenak untuk Lebih Bijak pada tanggal 29 Juli 2021; 3. Dialog interaktif dengan tema Perluas Koneksi, Selektif dalam Interaksi, Demi Sehat Diri pada tanggal 26 November 2021. **Program Keuangan :** Sosialisasi keuangan dengan tema: *How to Set Smart Financial Goals* in 2021 pada tanggal 23 April 2021. Faced with VUCA and TUNA economic and business conditions, the company mainly focuses on employees' physical and mental preparedness so that they can quickly anticipate and adapt to the speed of business changes. Each employee shows different speed in responding to these changes depending on how effective they are in maintaining balance among their personal lives, family, and work demands (the survey conducted by Corporate Executive Board involving American workers showed a correlation between work-life balance and employee work satisfaction. The survey also showed that 21% employees are more productive when their personal and work lives are sufficiently balanced. Having positive work-life balance helps company increase productivity, reduce conflicts, and increase employee retention rate.) Throughout 2021, the company's Management promoted employee preparedness through Work Life Integration program, an extension of the same Program in 2020. During the period, the Management focused on improving Work Life Integration program to make it, particularly well-being programs for the Company's personnel, more optimal and effective. These programs covered, such as, effective self-control (mindset) from physiological, psychological, or financial perspectives in situations that involve the employees themselves, their families and their closest community to increase employees' enthusiasm at work.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Program	Penjelasan Description
	Work Life Integration activities implemented throughout 2021 are as follows: The Physiological Well-Being Program, consisting of: 1. A Lecture on Work-Life Integration: "Olahraga Benar, Tubuh Segar, Virus Ambyar" (With Proper Workout, Body be Strong, Viruses be Gone) on January 15, 2021. 2. The launch of stretching techniques video on March 5, 2021. 3. Dissemination of physical health information themed: "Gizi dan Hidrasi Terjaga, Pegawai Aktif Selama Puasa" (Stay Nutritious and Hydrated, Stay Active while Fasting) on April 16, 2021 4. Dissemination of physical health information entitled: "Cluster COVID Keluarga: Bagaimana mengendalikannya?" (COVID in Family Cluster: How Can We Contain?) on July 26, 2021. 5. Dissemination of physical health information entitled: Tubuh Fit untuk Antisipasi Long COVID (Healthy Body to Anticipate Long COVID) on September 16, 2021. 6. Senam Sinergi (Synergy Exercise) starting November 5, 2021 when the pandemic slowed down, held while maintaining strict health protocols. The Psychological Promotional Program: 1. A Lecture on Work-Life Integration: "Alone with Your Thoughts (Preventing Overthinking to Achieve Well-being during COVID-19 Self-Isolation)" on February 22, 2021. 2. Dissemination of mental health information entitled: Jeda Sejenak untuk Lebih Bijak (Take a Pause for a Wiser Cause) on July 29, 2021. 3. An interactive dialogue themed Perluas Koneksi, Selektif dalam Interaksi, Demi Sehat Diri (Expanding Connection, Selective in Every Interaction, Ready for Any Action) on November 26, 2021. Financial Program: Dissemination of financial-related information themed: How to Set Smart Financial Goals in 2021 on April 23, 2021
Employee Assistant Program	Merupakan program terpadu yang diinisiasi oleh manajemen Indonesia Power dalam rangka mengoptimalisasi kesehatan fisik dan mental Pegawai. Program ini meliputi program yang bersifat kuratif maupun promotif atas kesehatan mental dan fisik Pegawai antara lain: 1. Penanganan dan pendampingan bagi pegawai yang menderita sakit fisik maupun mental sehingga mengalami penurunan produktifitas kerja dalam kurun waktu lama; 2. Pemberian konsultasi dan terapi psikologis serta fisik bagi pegawai dan keluarga pasien Covid-19. Dampak positif Program ini yaitu pegawai untuk lebih terbuka dalam mengatasi permasalahan dan menemukan *alternative* solusi masalah sehingga pegawai lebih fokus dalam penyelesaian masalah kesehatan dirinya yang pada akhirnya mempercepat proses penyembuhan pegawai tersebut, sehingga kembali produktif pada Perusahaan. As an integrated program initiated by the management of Indonesia Power, this program aims to optimize physical and mental health of the Employees. This program involves not only curative programs but also those that promote mental and physical health of the Employees, including: 1. Management and counseling for employees with physical and mental health problems whose productivity at work decreases for an extensive period of time; 2. Psychological and physical consultation and therapy session for employees and family members suffering from COVID-19. This Program exerts a positive impact in that it makes employees more open in handling problems and finding alternative solutions to the problems, allowing them to focus on solving their health problems, making recovery process faster and enabling them to regain productivity.

Program	Penjelasan Description
***Technology: Establish Integrated* HCEIS**	
LMS IP Academy IP Academy LMS	*Learning Management System* (LMS) dikembangkan dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran di perusahaan. Pengembangan LMS IP Academy dilakukan secara bertahap sesuai *roadmap* IP Academy dan dilakukan pengembangan sesuai proses bisnis IP Academy. Pada Tahun 2021 dilakukan penyempurnaan pengembangan pada modul *Learning Need Diagnosis* pada *Training Need Analysis* Individu yang digunakan pada pelaksanaan TNA TNA Individu Tahun 2021. Tidak hanya itu, IP Academy juga berhasil mengembangkan 67 video *learning* untuk pembelajaran *boiler*, hal ini dilakukan guna menunjang dan mengoptimalisasi pembelajaran *e-learning* di Indonesia Power. Learning Management System (LMS) is developed to support learning process in the company. IP Academy LMS is developed in stages pursuant to IP Academy road map and according to IP Academy business process. In 2021, the module for Learning Need Diagnosis for Individual Training Need Analysis used in the 2021 Individual TNA was improved. In addition, IP Academy also successfully created 67 learning videos for boiler operation training to support and optimize Indonesia Power's e-learning process.
STAR (Sistem Informasi *Talent*, Asesemen, Kinerja dan Karir) STAR (Talent, Assessment, Performance and Career Information System)	STAR adalah aplikasi yang digunakan untuk *mapping Talent, Assessment, Monitoring* realisasi formasi, *Succesion Planning*). Aplikasi STAR dapat diakses pada laman https://star.indonesiapower.co.id . Aplikasi STAR terdiri dari 3 modul utama yaitu Integrated *Talent Management, Assessment and Performance, Career Management*. Adapun kelebihan dari Aplikasi STAR adalah: 1. Terintegrasi dengan data yang ada di ERP, SIMKP, IP Academy dan IPKU; 2. Dapat diakses melalui perangkat komputer maupun *handphone* tanpa menggunakan VPN; 3. Tampilan *User Friendly* dan menyesuaikan perangkat apa yang digunakan untuk mengakses aplikasi; 4. Pembagian hak akses untuk setiap modul sesuai dengan kebutuhan Divisi Talenta dan pegawai. STAR is an application used for Talent mapping, Assessment, Monitoring of the actual formation, and Succession Planning). STAR application can be accessed via web https://star.indonesiapower.co.id. This application provides access to 3 modules namely Integrated Talent Management, Assessment and Performance, and Career Management. There are advantages of this application, and they include: 1. Integration with ERP, SIMKP, IP Academy, and IPKU data; 2. Access through computer or mobile devices without VPN; 3. User Friendly interface that can adjust to the device used to access the application; 4. Distribution of access right to each module based on the needs of the Talent Division and employees.
Indonesia Power dalam genggamanku (IPKU) Indonesia Power dalam genggamanku (IPKU)	**Pengembangan Absensi** Sebagai bentuk mendukung tertib administrasi kepegawaian, IPKU versi 1.4.0 dilakukan pengembangan sebagai berikut: 1. Adanya validasi *overlap* untuk pengajuan ketidakhadiran dengan mekanisme perubahan atau perbaikan presensi 1 (satu) bulan sebelum pada IPKU maupun aplikasi absensi lainnya hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. Lewat dari batas waktu tersebut, secara otomatis perubahan atau perbaikan presensi tidak dapat dilakukan lagi. 2. Adanya batas waktu *approval* perubahan atau perbaikan presensi pegawai oleh atasan setiap tanggal 12 bulan berikutnya. Lewat dari batas waktu tersebut, secara otomatis perubahan atau perbaikan presensi tidak dapat dilakukan lagi dan otomatis menjadi Mangkir. 3. Perubahan ketentuan otomatisasi mangkir dengan memberikan jeda waktu *approval* admin setiap tanggal 14 bulan berikutnya. Tidak hanya itu, IPKU versi 1.4.3 juga melakukan pengembangan dengan menambah notifikasi pada admin atau kepegawaian apabila ada pengajuan perubahan presensi pegawai yang telah *approved* oleh atasan dengan tujuan agar Admin atau kepegawaian dapat mengetahui adanya pengajuan perubahan presensi pegawai dengan detail dan mempercepat proses *approved*. **Pengembangan IP Health** Fitur IP Health pada IPKU digunakan untuk melakukan klaim *reimbursement* kesehatan yang berbasis *mobile*. Pengembangan dilakukan penambahan foto atau bukti kuitansi lebih dari 1 (satu) file sehingga memudahkan pegawai untuk meng-*upload* kuitansi dengan lengkap dan tentunya memudahkan admin dalam proses verifikasi *reimbursement* kesehatan tersebut.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Program	Penjelasan Description
	Pencetakan SPT pajak 1721-A1 Sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada Pegawai PT Indonesia Power, hadirlah fitur pencetakan SPT Pajak 1721-A1 pada menu Print-X di IPKU, yang diharapkan untuk mendukung percepatan pelaporan pajak penghasilan Pegawai, yang berakhir pada 31 Maret 2021. Dengan hadirnya fitur Print x – SPT 1721-A1, manfaat yang didapat adalah sebagai berikut : a. Menerima dokumen SPT 1721-A1 dengan cepat dan data akurat; b. Histori dokumen SPT 1721-A1 terjaga dengan baik, dan dapat diakses dengan mudah; c. Tidak adanya dokumen SPT 1721-A1 yang tercecer atau hilang, sehingga memotong waktu tunggu dalam mendapatkan kembali dokumen penggantinya; d. Pelaporan pajak penghasilan lebih cepat diselesaikan/ dilaporkan; e. Kerahasiaan data penghasilan Pegawai tetap terjaga karena dokumen hanya bisa diakses langsung oleh Pegawai yang bersangkutan; f. Menghilangkan kertas untuk pencetakan dokumen SPT 1721-A1 Pegawai; g. Efisiensi jasa pengiriman/biaya perjalanan dinas untuk pengambilan/pengiriman dokumen SPT 1721-A1 untuk pegawai diluar *Head Office* PT Indonesia Power. **Pencetakan e-SK** Untuk memenuhi kebutuhan teknologi yang semakin canggih, Perusahaan mengembangkan e-SK pada fitur Print-X di aplikasi *mobile* Indonesia Power dalam Genggamanku (IPKU) versi 1.4.3 yang dapat diakses oleh seluruh Pegawai PT Indonesia Power. e-SK pada aplikasi mobile IPKU dapat mendistribusikan Surat Keputusan Kenaikan *Grade* dan Skala Gaji Dasar Pegawai PT Indonesia Power, sehinga pendistribusiannya lebih efektif dan efisien serta mempermudah dalam proses pengarsipan secara digital serta tentunya dapat diakes dimanapun dan kapanpun oleh pegawai PT Indonesia Power. **Attendance Record Improvement** To comply with personnel administration regulations, IPKU version 1.4.0 was improved. This improvement includes: 1. Overlap validation for absence request or attendance can be changed or revised 1 (one) month in advance via IPKU or other attendance record applications, at the latest by the 10th day of the following month. Otherwise, changes or revisions to the record can no longer be made. 2. Approval for changes or revisions to employee attendance by supervisors must be obtained at the latest by the 12th day of the following month. Otherwise, changes or revisions to the attendance can no longer be made and the status will automatically change into Absent. 3. Changes in automatic absent mechanism which now gives administrator(s) time for approval, on the 14th day of the subsequent month. IPKU version 1.4.3 also sends notifications to administrator(s) or personnel division if the approved attendance by supervisors are changed. This provides the Administrator(s) or personnel division with detailed request for changes in employee attendance, making approval process faster. **IP Health Development** IP Health feature on IPKU allows claim on healthcare reimbursement to be made using mobile application. IP Health now allows employees to upload more than 1 (one) photo or receipt, making it easier for them to attach complete receipts and administrator(s) to verify the reimbursement. **1721-A1 Tax Return Printing** To improve services for Employees of PT Indonesia Power, the Company introduces 1721-A1 Tax Return printing feature in IPKU's Print-X menu expecting that this new feature can speed up Employees' income tax reporting which ended on March 31, 2021. With presence of Print x - 1721-A1 Tax Return, employees are able to: a. Receive 1721-A1 Tax Return documents quickly with accurate data; b. Keep track of the history of the 1721-A1 Tax Return documents and access it easily if necessary; c. Ensure none of the 1721-A1 Tax Return documents are scattered or missing, and therefore minimize the time needed to wait for a replacement;

Program	Penjelasan Description
	d. Complete income tax reporting faster; e. Protect confidentiality of Employees' data on salary as document can only be accessed by relevant employees; f. Go paperless as it is unnecessary to print 1721-A1 Tax Return documents; g. Reduce shipping/business travel costs needed to pick up/send SPT 1721-A1 document for employees working outside PT Indonesia Power Head Office. **e-SK Printing** To fulfill the needs for more advanced technologies, the Company develops e-SK as part of Print-X feature in its mobile application Indonesia Power dalam Genggamanku (IPKU) version 1.4.3 that can be accessed by all employees. e-SK can distribute Decree on Employee Promotion and Increase in Basic Salary Scale, making distribution more effective and efficient and digital filing easier, providing employees with easy access anywhere and anytime.

Budaya Perusahaan
Corporate Culture

AKHLAK
AMANAH KOMPETEN HARMONIS
LOYAL ADAPTIF KOLABORATIF

Budaya Perusahaan yang berlaku selama tahun 2021 adalah **Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (AKHLAK)**. Penjelasan terkait Budaya Perusahaan telah disajikan pada bagian Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Throughout 2021, the Company adopted a culture of Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif (AKHLAK - Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative). Discussion on the Corporate Culture is presented in the Company Profile of this Annual Report.

Analisis Kecukupan SDM
Analysis of HC Adequacy

Jumlah SDM Perusahaan tahun 2021 adalah sebanyak 4.227 pegawai. Lebih dari 60% komposisi pegawai Indonesia Power didominasi oleh generasi milenial menjadi unsur penting dalam mewujudkan aspirasi visi Perusahaan menjadi "Perusahaan Energi Terbaik yang Tumbuh Berkelanjutan". Tingkat *turnover* pegawai tahun 2021 sebesar 1,75% yaitu sebanyak 74 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu 124 orang yang disebabkan oleh menurunya seluruh jumlah *turnover* untuk masing-masing penyebab khususnya pensiun dengan kontribusi penurunan terbesar.

In 2021, the Company employed a total of 4,227 personnel. More than 60% of Indonesia Power employees fall under millennial generation who become a vital element in realizing the Company's vision to be the "Best Energy Company with Sustainable Growth". The Company's turnover rate of 2021 was 1.75% or 74 people. This lower total rate of employee turnover roots from declining number of turnover of each cause, with retirement being the largest contributor.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Informasi lebih lanjut terkait Komposisi SDM telah dijelaskan pada bagian Profil Perusahaan Sub Bab Komposisi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Laporan Tahunan ini. Sedangkan informasi lebih lanjut terkait *turnover* pegawai akan dijelaskan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sub Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Laporan Tahunan ini

Further details on HC Composition has been elaborated in Chapter Company Profile, Sub-chapter Employee Composition and Competency Development of this Annual Report. Meanwhile, further details on employee turnover will be elaborated in Chapter Corporate Social Responsibility, Sub-chapter Corporate Social Responsibility for Employment and Occupational Health and Safety of this Annual Report.

Penyempurnaan Kebijakan SDM
HC Policy Improvement

Sebagai bentuk pengelolaan SDM yang berkelanjutan, Indonesia Power senantiasa memperbaharui dan menyusun kebijakan secara berkala melalui Surat Keputusan (SK) Direksi dan kebijakan turunan lainnya. Pada tahun 2021, telah disahkan beberapa kebijakan baru, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi No. 025.K/010/IP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Penilaian *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organization Capital Readines* (OCR).
2. Keputusan Direksi No. 050.K/010/IP/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang *Assessment* Kompetensi.
3. Keputusan Direksi No. 119.K/010/IP/2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Tenaga Kerja Non Pegawai.
4. Keputusan Direksi No. 128.K/010/IP/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 63.K/010/IP/2009 tentang Sistem Penghargaan Pegawai.

Indonesia Power periodically prepares and updates its sustainable HC management policy as regulated by the Decree of the Board of Directors and other derivative policies. Several new policies were introduced in 2021, among others:

1. Decree of the Board of Directors No. 025.K/010/IP/2021 dated March 30, 2021 on Guidelines for Assessment of Human Capital Readiness (HCR) and Organization Capital Readiness (OCR).
2. Decree of the Board of Directors No. 050.K/010/IP/2021 dated June 7, 2021 on Assessment of Competencies.
3. Decree of the Board of Directors No. 119.K/010/IP/2021 dated December 7, 2021 on Non-Employee Workers.
4. Decree of the Board of Directors No. 128.K/010/IP/2021 dated December 15, 2021 on Amendment to Decree of the Board of Directors No. 63.K/010/IP/2009 on Employee Reward System.

Pengembangan Sistem SDM Terintegrasi
Development of Integrated HC System

Mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan *datacore* di Perusahaan yang terdiri dari:

1. Sistem Pengembangan Organisasi dan Perencanaan Tenaga Kerja: ERP, Aplikasi Dirjab dan Pengembangan aplikasi STAR melalui menu RENSDM.
2. Sistem Rekrutmen Pegawai: www.rekrutmenpln.co.id
3. Sistem Pembelajaran Pegawai: IP Academy, ERP, LMS PLN Corpu.
4. Sistem Pembinaan Karir Pegawai: Aplikasi STAR (Aplikasi yang digunakan Divisi Talenta untuk *Mapping Talent, Assessment, Monitoring* realisasi formasi, *Succesion Planning*), ERP.
5. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai: SIMKP (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai) adalah aplikasi yang digunakan Divisi Talenta untuk Perencanaan, penilaian, *monitoring* dan evaluasi Kinerja pegawai di Perusahaan, ERP.
6. Sistem Penghargaan Pegawai: ERP dan IPKU.

Developing a system that is integrated into the Company's datacore, and it includes:

1. Organizational Development and Manpower Planning System: ERP, Dirjab Application, and Development of STAR application through RENSDM menu,
2. Employee Recruitment System: www.rekrutmenpln.co.id
3. Employee Learning System: IP Academy, ERP, PLN Corpu LMS.
4. Employee Career Development System: STAR application (an application used for Talent mapping, Assessment, Monitoring of actual formation, and Succession Planning), ERP.
5. Employee Performance Management System: SIMKP (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai/Employee Performance Management System) is an application used by the Talent Division for planning, assessing, monitoring, and evaluating Performance of the employees in the Company, ERP.
6. Employee Appreciation System: ERP and IPKU.

Pengelolaan Pegawai Purna Bakti
Post-Employment Management

Kebijakan Pengelolaan Pegawai Purna Bakti berdasarkan pada:
1. PKB Bab V Pasal 31 tentang Kepesertaan Pensiun;
2. Surat Keputusan Direksi No. 205.K/010/IP/2012 tentang Pengelolaan Manfaat Pensiun Pegawai Melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
3. Surat Keputusan Direksi No. 116.K/010/IP/2016 tentang Masa Persiapan Pensiun;
4. Surat Keputusan Direksi No. 146.K/010/IP/2020 tentang Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti.

Indonesia Power memiliki kebijakan memberikan hak kepada pegawai untuk menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang terdiri dari Program MPP Tiga Bulan dan Program MPP Satu Tahun sebelum memasuki usia pensiun (56 tahun).

Dalam rangka MPP, pegawai diberikan pembekalan melalui program kewirausahaan, sertifikasi, serta pembekalan rohani. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti kepada 2 (dua) pegawai pegawai berupa pembinaan keagamaan.

The Policy on Post-Employment Management refers to:
1. CLA Chapter V Article 31 on Retirement Membership;
2. Decree of the Board of Directors No. 205.K/010/IP/2012 on Employee Post-Employment Benefit Management under Financial Institution Retirement Fund;
3. Decree of the Board of Directors No. 116.K/010/IP/2016 concerning Retirement Preparation Period;
4. Decree of the Board of Directors No. 146.K/010/IP/2020 on Post-Retirement Preparation Education and Training

Indonesia Power maintains a policy on employees' right to enter the Retirement Preparation Period (RPP) which consists of 3-month RPP Program and 1-year RPP Program, one year prior to the retirement age (at 56).

During the RPP, the employees are given entrepreneurial training, certification program, and spiritual guidance. In 2021, 2 (two) employees attended Post-Retirement Preparation Education and Training and received a spiritual guidance.

Sistem Rekrutmen Pegawai
Employee Recruitment System

Proses rekrutmen pegawai didasarkan pada Keputusan Direksi No. 85.K/010/IP/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Sistem Rekrutmen Pegawai. Metode perekrutan pegawai dapat dilakukan melalui metode Rekrutmen Umum dan/atau Rekrutmen Khusus:
1. Rekrutmen Umum (*regular*), diperuntukkan untuk seluruh pelamar luas yang sesuai dengan kualifikasi yang telah di tetapkan oleh Perusahan,
2. Rekrutmen Khusus (*direct shopping*), Indonesia Power melaksanakan Rekrutmen khusus melalui *direct shopping* dimana pernah melakukan berkerjasama dengan lembaga pendidikan STT PLN, Sekolah Vokasi UGM, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Negeri Surabaya.
3. Rekrutmen Pegawai dari Sumber Internal, rekrutmen ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme mutasi jabatan yang berlaku di Perusahaan dengan tujuan salah satunya untuk mengisi formasi jabatan sesuai perencanaan tenaga kerja yang ditetapkan, salah satu sumber rekrutmen internal adalah Pegawai Tugas Karya.

Pada tahun 2021 terdapat Rekrutmen Pegawai Sumber Internal (Tugas Karya) sebanyak 79 Pegawai dari PLN dan 1 Pegawai dari anak perusahaan Indonesia Power (PT Cogindo Daya Bersama/ CDB).

Employee recruitment process is based on Decree of the Board of Directors No. 85.K/010/IP/2012 dated June 19, 2012 concerning Employee Recruitment System. There are two methods of recruitments, i.e. Regular Recruitment and Special Recruitment:

1. Regular Recruitment aims at all applicants in general, who meet the qualifications set by the Company.

2. Meanwhile, Special Recruitment (direct shopping) is performed through collaboration with STT PLN, UGM Vocational School, Jakarta State Polytechnic, Malang State Polytechnic, and Surabaya State Polytechnic.

3. Internally Sourced Employee Recruitment is performed according to the Company's policy and mechanism for job transfer to fill a position based on the Company's manpower planning. Secondee is one of Company's internal sources.

In 2021, 79 Internally Sourced Employees (Secondees) from PLN and 1 Employee from Indonesia Power's subsidiary company (PT Cogindo Daya Bersama/CDB) were recruited.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Tabel Rekrutmen Umum-Khusus Pegawai Tahun 2018 - 2021 (orang)
Table of Employee Recruitment in 2018-2021 (person)

Tahun Year	Tingkat Pendidikan Level of Education			Jumlah Total
	S2 Master's Degree (S2)	S1 Bachelor's Degree (S1)	D3 Diploma (D3)	
2021*	-	-	-	-
2020	-	-	25	25
2019	4	72	79	155
2018	-	29	69	98

* Tahun 2021 tidak ada perekrutan pegawai secara umum (regular)/*direct shopping* dikarenakan adanya *freeze* rekrutmen.
In 2021, no regular recruitment/direct shopping was performed due to recruitment freeze.

Penempatan Pegawai
Employee Placement

Penempatan pegawai berdasar pada Surat Keputusan Direksi No. 85.K/010/IP/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Sistem Rekrutmen Pegawai dan Surat Keputusan Direksi No. 111.K/010/IP/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Diklat Prajabatan.

Employees are placed pursuant to Decree of the Board of Directors No. 85.K/010/IP/2012 dated June 19, 2012 on Employee Recruitment System and Decree of the Board of Directors No. 111.K/010/IP/2017 dated June 2, 2017 concerning Pre-Service Education and Training.

Setelah proses rekrutmen, calon pegawai mengikuti diklat persiapan atau OJT selama periode tertentu untuk memenuhi kompetensi minimal yang diperlukan sebagai pegawai di Indonesia Power. Apabila calon pegawai dinyatakan lulus diklat persiapan, maka diusulkan untuk ditetapkan sebagai pegawai organik. Pelaksanaan diklat persiapan adalah dalam rentang waktu 6-8 bulan. Sehubungan dengan kebijakan *freeze recruitment* yang diterapkan di seluruh PLN Group sepanjang tahun 2021 tidak dilaksanakan Diklat Persiapan.

Following the recruitment, employee candidates will receive pre-service education and training for a given period to meet the minimum competency requirements for Indonesia Power's employees. Employee candidates who passed the pre-service education and training are proposed for the appointment of organic employees. The pre-service education and training is held for 6-8 months. Due to recruitment freeze implemented by PLN Group throughout 2021, Pre-Service Education and Training was halted.

Sistem Pembelajaran Pegawai
Employee Learning System

Pelatihan dan Pengembangan
Training and Development

Sebagai langkah pemutakhiran dan peningkatan kemampuan serta *skill* pegawai, Indonesia Power secara berkala melakukan pengembangan kepada seluruh pegawainya sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Kebijakan perusahaan dalan rangka pelaksanaan pelatihan dan pengembangan mengacu pada:

To update and improve employee's ability and skill, Indonesia Power regularly provides development program for all employees according to Company's needs and priority scale. The company policy on the implementation of training and development refers to:

1. Surat Keputusan Direksi No. 38.K/010/ IP/2009 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) dan Surat Keputusan Direksi No. 186.K/010/IP/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 38.K/010/ IP/2009 tentang MSDM-BK,
2. Surat Keputusan Direksi No. 111.K/010/IP/2017 tentang Diklat Prajabatan,
3. Surat Keputusan Direksi No. 144.K/010/IP/2018 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir,
4. Surat Keputusan Direksi No. 147.K/010/IP/2018 tentang Sistem Tugas Karya,
5. Surat Keputusan Direksi No. 74.K/010/IP/2020 tentang Sistem Pembelajaran Pegawai,
6. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2021-2022 yang disepakati antara Manajemen dan Persatuan Pegawai (PP), pendidikan dan pelatihan masuk ke BAB IV tentang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Pasal 22.

1. Decree of the Board of Directors No. 38.K/010/IP/2009 on Competence-Based Human Capital Management System and Decree of the Board of Directors No. 186.K/010/IP/2012 on Amendment to the Board of Directors Decree No. 38.K/010/ IP/2009 on Competence-Based Human Capital Management System,
2. Decree of the Board of Directors No. 111.K/010/IP/2017 on Pre-Service Education and Training,
3. Decree of the Board of Directors No. 144.K/010/IP/2018 on Competency and Career Development System.
4. Decree of the Board of Directors No. 147.K/010/IP/2018 on Secondment System.
5. Decree of the Board of Directors No. 74.K/010/IP/2020 on Employee Learning System,
6. Collective Labor Agreement (CLA) 2021-2022 between the Management and the Employee Association (PP), education and training are described in CHAPTER IV on Employee Management and Development Article 22.

Pendidikan dan Pelatihan
Education and Training

Realisasi pelatihan telah dijelaskan pada bagian Profil Perusahaan Sub Bagian Komposisi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai.

The details on implemented trainings are presented in the Chapter Company Profile, Sub-chapter Employee Composition and Competency Development

Sistem Pembinaan Karir Pegawai
Employee Career Assistance System

Pengukuran dalam Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai
Measurement of Employee Competency and Career Development

Metode pengukuran yang dilakukan Perusahaan untuk penentuan dalam pengembangan kompetensi dan karir Pegawai melalui Asesmen Pegawai. *Feedback* hasil asesmen disampaikan Pegawai dan Atasan Pegawai. Asesmen Pegawai bertujuan untuk memetakan kompetensi maupun potensi pegawai agar dapat dilakukan pembinaan terhadap kompetensi dan karir pegawai. Jenis asesmen pegawai di tahun 2021 terdiri dari (1) Asesmen Kompetensi dan (2) Asesmen Potensi.

The Company uses Employee Assessment to measure and subsequently determine Employee competency and career development. Feedback on the assessment result is then submitted to the Employees and their respective Superior. Employee Assessment aims to map employees' competencies and potentials for competency and career development. In 2021, employee assessment involved (1) Competency Assessment and (2) Potential Assessment.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Tabel Metode Pengukuran dalam Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai
Table of Measurement Method for Employee Competency and Career Development

Metode Pengukuran Asesmen Pegawai Employee Assessment Measurement Method	Level Proyeksi Projection Level	Peserta Partici-pant	Periode Pelaksanaan Implementation Period
Asesmen Kompetensi bertujuan untuk untuk mengetahui gambaran kompetensi yang dimiliki oleh kandidat *talent* apakah sesuai dengan persyaratan kompetensi yang dipersyaratkan atau tidak. **Competency Assessment** aims at gaining a picture of the competencies owned by talent candidates, to see whether or not these candidates have the required competencies.			
a. Asesmen *Talent Post Leadership* Program Assessment of Talent Post Leadership Program	Manajemen Menengah, Manajemen Dasar, Supervisor Atas, Supervisor Dasar Middle Management, Lower Management, Senior Supervisor, Junior Supervisor	83	Triwulan 2 2021 Quarter 2 2021
b. Asesmen *Talent* OCR *Leadership Program* Assessment of Talent OCR Leadership Program	Manajemen Dasar, Supervisor Atas, Supervisor Dasar Lower Management, Senior Supervisor, Junior Supervisor	209	Triwulan 2 2021 Quarter 2 2021
Asesmen Potensi bertujuan untuk memberikan rekomendasi penempatan/penugasan pegawai berdasarkan potensi psikologi pegawai **Potential Assessment** aims to provide recommendations for employee placement/assignment based on the psychological potential of employees.			
a. Asesmen Potensi Eksternal dengan menggunakan Lembaga Asesmen PLN (UPAC) yang mengukur *Intelligence*, *Work Attitude* dan *Personality* External Potential Assessment with using the PLN Assessment Institute (UPAC) which measures Intelligence, Work Attitude and Personality	Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar, Supervisor Atas, Supervisor Dasar Top Management, Middle Management, Lower Management, Senior Supervisor, Junior Supervisor	1.311	Triwulan 3-4 2021 Quarter 3-4 2021
b. Asesmen Potensi Internal yang mengukur potensi Kepribadian dan *Adversity*. Internal Potential Assessment measuring Personality and Adversity potential	Seluruh Pegawai All Employees	4.218	Triwulan 3-4 2021 Quarter 3-4 2021

Perencanaan Suksesi
Succession Planning

Perencanaan suksesi pegawai merupakan lanjutan dari tahap pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan. Suksesi Jabatan merupakan rangkaian proses penelusuran, pengidentifikasian, pembinaan dan pengembangan kompetensi dan karir Pegawai dalam mengisi jabatan saat dibutuhkan Perusahaan.

Employee succession planning is the extension of the competency development stages performed. Succession planning is the process of exploring, identifying, fostering, and developing employees' competency and career in order to fill a position when required.

Pembinaan Karir
Career Development

Pembinaan jalur karir berdasarkan jenis jabatan dan jenjang jabatan dilaksanakan melalui kegiatan mutasi jabatan yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 144.K/010/IP/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai dan Keputusan Direksi No. 155.K/010/IP/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Jalur Karir. Pada tahun 2021, Indonesia Power telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 050.K/010/IP/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Asesmen Kompetensi dalam rangka menyempurnakan sistem manajemen karir yang telah mempertimbangkan aspek potensi pegawai.

Career development based on the type of job title and level of position is carried out through transfer of position as set out in Decree of the Board of Directors No. 144.K/010/IP/2018 dated September 14, 2018 concerning Employee Competency and Career Development System, and Decree of the Board of Directors No. 155.K/010/IP/2014 dated October 1, 2014 concerning Career Path. Throughout 2021, Indonesia Power issued Decree of the Board of Directors No. 050.K/010/IP/2021 dated June 7, 2021 on Competency Assessment to improve career management system that has taken into account employees' potentials.

Tabel Mutasi Jabatan
Table of Transfer of Position

Jenis Mutasi Jabatan Type of Transfer of Position	Penjelasan Description
Promosi Jabatan Promotion	Alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lain pada jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Transfer of a position to another position at one level higher.
Rotasi Jabatan Rotation	Alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lain pada jenjang jabatan yang sama. Transfer of a position to another position at the same level.
Demosi Jabatan Demotion	Alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lain pada jenjang jabatan yang lebih rendah dan tidak menyebabka pegawai mengalami penurunan *grade*. Transfer of a position to another position at one level lower without down-grading.

Pelaksanaan mutasi jabatan mengutamakan pola pergerakan karir yang diatur dalam Kebijakan Jalur Karir. Dalam melaksanakan pergerakan karir, Indonesia Power mempertimbangkan beberapa faktor meliputi kebutuhan organisasi, kemampuan, keahlian dan kompetensi pegawai, rencana pengembangan karir, dan program pelatihan serta rencana suksesi jabatan.

Transfer of position emphasizes on career progress as set out in Career Path Policy. The Company takes into account several factors in encouraging career progress, such as organization needs, employee capacity, skill, and competence, career development plan, training program, and succession plan.

Tabel Pengembangan Karir Tahun 2021 (orang)
Table of Career Development in 2021 (person)

Jenjang Jabatan Position Level	Rotasi Rotasi Rotation	Promosi Promotion
Eksekutif Utama Chief Executive	-	-
Eksekutif Senior Senior Executive	31	1
Eksekutif Executive	68	3
Penyelia Atas Senior Supervisor	233	18
Penyelia Dasar Junior Supervisor	245	51
Pelaksana Officer	280	231
Jumlah Total	**857**	**304**

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Pendidikan dan Pelatihan Karir
Career Education and Training

Dalam rangkaian perencanaan suksesi pegawai yang memiliki kesempatan untuk pengembangan karir, diberikan diklat penjenjangan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Diklat penjenjangan merupakan salah satu bentuk diklat kepemimpinan yang diselenggarakan Perusahaan sebagai bagian dari proses pengembangan kompetensi dan pembinaan karir pegawai untuk memenuhi Kompetensi Utama, Kompetensi Peran dan Kompetensi Bidang yang dipersyaratkan pada setiap Jenjang Jabatan sesuai tuntutan jalur karir yang diproyeksikan bagi pegawai. Adapun bentuk program diklat penjenjangan adalah sebagai berikut:

1. *Executive Education* (EE) yaitu Pembelajaran untuk memenuhi Kompetensi Utama dan Peran, serta Kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada Jenjang Jabatan Struktural.
2. *Strategic Specialist Education* (SSE), yaitu Pembelajaran untuk memenuhi Kompetensi Utama dan Peran, serta Kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada Jenjang Jabatan Fungsional.

Realisasi diklat penjenjangan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Within employee succession planning, employees with the career development potentials are provided with education and training for job grading according to the position they will assume. Education and training for job grading is a part of the leadership training held by the Company for employee competency and career development. This program aims at meeting the Main Competency, Role Competency, and Area Competency required for each Position Level according to the career expected for the relevant employees. The education and training for job grading includes the following programs:

1. Executive Education (EE) which aims at meeting Main, Role, and Area Competencies required for Structural Position Level.
2. Strategic Specialist Education (SSE) which aims at meeting Main, Role, and Area Competencies required for Functional Position Level.

The education and training programs for job grading implemented in 2021 are as follows:

Tabel Diklat Penjenjangan Tahun 2021
Table of Education and Training for Job Grading in 2021

Jenis Diklat Penjenjangan Type of Education and Training for Job Grading	Usulan Disetujui Approved Proposal	Jumlah Peserta Diundang Number of Invited Participants	Realisasi Perserta Hadir Number of Attending Participants	*On-Progress*	Lulus di Tahun 2021 Graduated in 2021
Executive Education I	7	14	14	14	-
Executive Education II	36	39	39	22	17
Executive Education III	51	99	99	44	55
Supervisory Education I	89	109	109	26	83
Strategic Specialist Education I	-	-	-	-	-
Strategic Specialist Education II	1	1	1	-	1
Strategic Specialist Education III	12	15	14	4	9
Specialist Education I	77	93	91	1	90

Realisasi pegawai yang diundang mengikuti diklat penjenjangan lebih besar dari pada usulan yang disetujui, hal ini dikarenakan adanya undangan peserta usulan tahun 2020 yang pelaksanaan diklat penjenjangannya dilaksanakan di tahun 2021.

The number of employees attending training and education for job grading was greater than the proposed number as some participants were invited in 2020 while the training was held in 2021.

Sistem Manajemen Kinerja Pegawai
Employee Performance Management System

Indonesia Power melakukan penilaian atas pencapaian yang telah diberikan terhadap para pegawainya untuk mengevaluasi produktivitas kinerja mereka. Sebagai dasar pengukuran pencapaian kinerja pegawai dalam mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien, Perusahaan telah menetapkan Sistem Manajemen Kinerja dengan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Kinerja Pegawai (SIMKP).

Indonesia Power assesses the employee achievements to evaluate their work productivity. The Company has established the Performance Management System using Employee Performance Management System (SIMKP) as the basis for measuring employee performance achievement in effectively and efficiently attaining Company objectives.

Penilaian Kinerja Pegawai
Employee Performance Assessment

Aturan mengenai Penilaian Kinerja Pegawai ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 145.K/010/IP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. Tahapan dalam Sistem Manajemen Kinerja Pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Employee Performance Assessment is regulated by the Decree of the Board of Directors No. 145.K/010/IP/2018 dated September 17, 2018 concerning Employee Performance Management System. The stages in the Employee Performance Management System are shown in the table below:

Tabel Tahap Penilaian Kinerja Pegawai
Table of Employment Performance Assessment Stages

Tahap Stage	Deskripsi Description
Perencanaan Kinerja Pegawai Employee Performance Planning	Tahap penyusunan Sasaran Kinerja pegawai yang dilakukan 1 (satu) kali pada awal tahun untuk Semester 1 dan Semester 2 yang terdiri atas: - Rencana sasaran kinerja pegawai, - Rencana Program Pengembangan Diri Pegawai. In this stage, Employee Performance Objectives are formulated once (1 time) at the beginning of the year for Semester 1 and Semester 2, which consist of: - Employee performance objective plan, - Employee Self-Improvement Program plan.
Pemantauan Kinerja Pegawai Employee Performance Monitoring	Tahap Pemantauan merupakan periode antara Tahap Perencanaan dan Tahap Evaluasi yang digunakan atasan langsung pegawai untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi, pemantauan *progress*/pencapaian atas kinerja pegawai. The Monitoring Stage is a period between the Planning Stage and Evaluation Stage, in which employees' direct superior provides direction, guidance, motivation, and progress/achievement monitoring of employees' performance.
Evaluasi Kinerja Pegawai Employee Performance Evaluation	Tahap Evaluasi yaitu tahap dimana atasan langsung wajib memberikan pengukuran secara objektif terhadap pencapaian target sasaran kinerja pegawai dan program pengembangan diri pegawai di bawah struktur jabatan atasan tersebut pada akhir semester berjalan. The Evaluation Stage is the stage where the direct superior must carry out objective measurement of the achievement of employee performance objectives and deliver self-improvement program for employees who report directly to the superior at the end of the current semester.

SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Tabel Kompetensi yang Dinilai dalam Penilaian Kinerja Pegawai
Table of Competency Assessed in Employee Performance Assessment

Jenis Kompetensi Type of Competency	Deskripsi Description
Sasaran kinerja pegawai Employee Performance Objective	Diukur berdasarkan pencapaian Target KPI *Exact*, KPI *Proxy* dan KPI *Activity*. Measured based on the achievement of Exact KPI, Proxy KPI, and Activity KPI Targets.
Kompetensi Individu Pegawai Employee's Individual Competency	Diukur melalui kuesioner kompetensi individu yang dinilai oleh Atasan langsung dari pegawai. Measured using individual competency questionnaire, as assessed by direct Superior of the relevant employees.
Program Pengembangan Diri Pegawai (PDP) Employee Self-Improvement Program (SIP)	Diukur melalui kuesioner kompetensi individu yang dinilai oleh Atasan langsung dari pegawai. Program PDP terdiri dari *Knowledge Management* dan Inovasi. Measured using individual competency questionnaire, as assessed by direct Superior of the relevant employees. Self-Improvement Program consists of Knowledge Management and Innovation.

Hasil penilaian menjadi dasar pertimbangan untuk pemberian *reward* dan pengembangan karir pegawai seperti promosi, rotasi, peningkatan remunerasi dan sebagainya, juga menjadi dasar pemberian *punishment* seperti surat peringatan, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi sampai pemutusan hubungan kerja.

Assessment result will become a consideration for the granting of reward and employee career development, such as promotion, rotation, remuneration increase, and so on, in addition to the basis for punishment, such as warning, postponement of promotion, demotion, transfer of position, and termination of employment.

Pengukuran *Maturity* Kinerja
Measuring Performance Maturity

Kinerja SDM diukur berdasarkan KPI aspek *Learning & Growth* telah ditetapkan melalui pencapaian nilai *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organizational Capital Readiness* (OCR). Formulasi yang digunakan untuk mengukur HCR dan OCR menggunakan skala Level 1-5 yang didapatkan dari hasil *assessment*, yaitu *assessment* PT PLN (Persero) terhadap Korporat dan *assessment* oleh Pembina *Head Office* kepada Unit setiap triwulan.

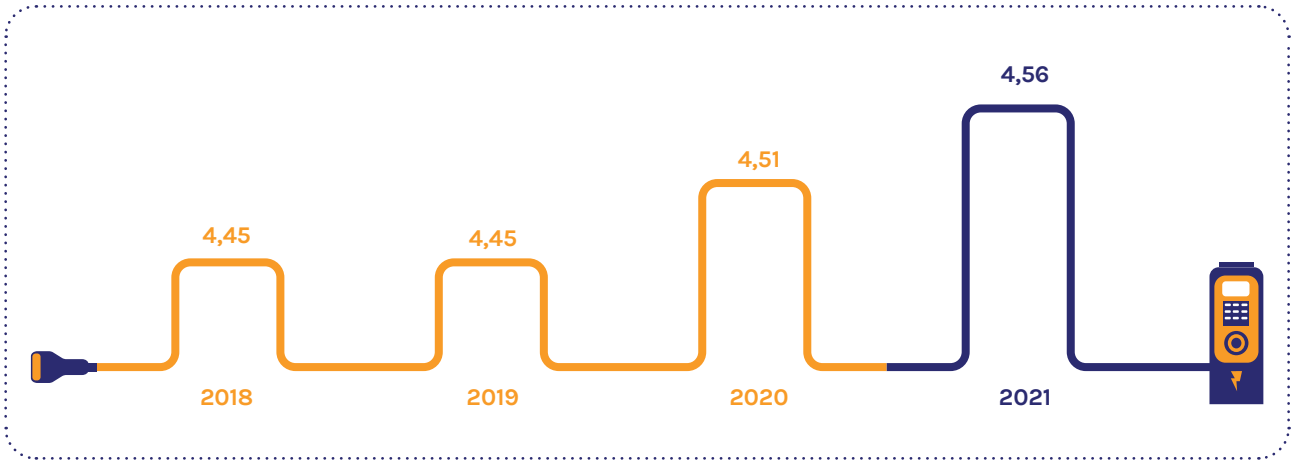
HC Performance is measured based on the Learning & Growth aspect in the KPI that has been determined through achievement of the Human Capital Readiness (HCR) and Organizational Capital Readiness (OCR) scores. HCR and OCR are measured using a 1–5 scale as obtained from assessment result, i.e. PT PLN (Persero)'s assessment of Corporate and assessment by the Head Office Supervisor to Units on a quarterly basis.

Human Capital Readiness
Human Capital Readiness

HCR adalah pengukuran kesiapan kapasitas dan kapabilitas SDM, yaitu dengan peningkatan kompetensi SDM yang optimal agar dapat mendukung implementasi strategi Perusahaan. Pencapaian HCR pada tahun 2021 meningkat 1,11% dibandingkan tahun 2020 menjadi level 4,56. Terkait dengan kesiapan kompetensi pegawai dalam menjalankan strategi Perusahaan, dilakukan melalui ukuran proses dan hasil peningkatan kompetensi, yaitu proses pada Level 4,20 dan hasil pada Level 5.00.

HCR measures the readiness of HC capacity and capability via optimal human capital competency development that supports the implementation of Company strategies. In 2021, HCR increased by 1.11% compared to that in 2020 to 4.56. With regard to employee competency readiness to execute Company's strategy, the measurement was conducted using competency improvement process and result at 4.20 and 5.00 respectively.

Grafik HCR Tahun 2015 - 2021 (level)
Chart of HCR in 2015-2021 (level)



Organizational Capital Readiness
Organizational Capital Readiness

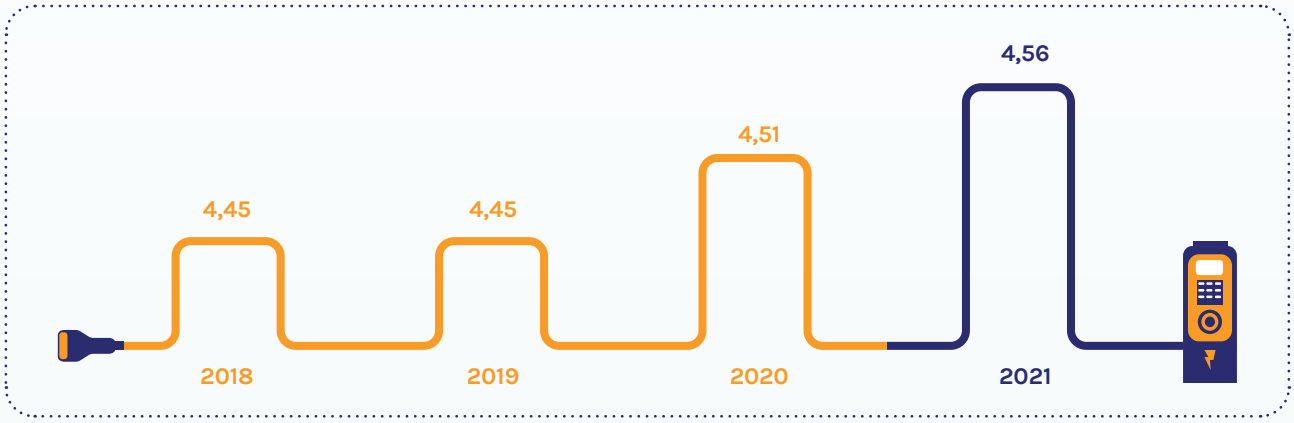
OCR merupakan pengukuran kesiapan organisasi berdasarkan empat aspek, yaitu budaya kerja, kepemimpinan, *alignment* dan *teamwork*. Pada tahun 2021, OCR meningkat 1,11% dibandingkan tahun 2020 menjadi Level 4,56 dengan capaian sasaran yang dilakukan melalui:

OCR is a measurement of organizational readiness based on four aspects, namely work culture, leadership, alignment, and teamwork. In 2021, the OCR scored 4.56, indicating a 1.11% improvement from that in 2020, by achieving the targets using the following measures:

Tabel Aspek Pengukuran Kesiapan Organisasi
Table of Organizational Readiness Measurement Aspects

Aspek Aspect	Proses/*Maturity* Process/Maturity	Hasil/KPI Result/KPI
Budaya Kerja Work Culture	4,20	5,00
Kepemimpinan Leadership	4,20	5,00
Alignment	4,20	5,00
Team Work	4,20	5,00

Grafik OCR Tahun 2018 - 2021 (level)
Chart of OCR in 2018-2021 (level)



SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Sistem Penghargaan Pegawai
Reward System

Strategi Remunerasi
Remuneration Strategy

Remunerasi pegawai Indonesia Power didasarkan PKB tahun 2021-2022 Bab VI tentang Penghargaan Pasal 55 Dasar Penghargaan, bentuk remunerasi yang diberikan Indonesia Power berupa kompensasi dan manfaat pegawai. Kompensasi terdiri dari *Pay for Person* (P1), *Pay for Position* (P2) dan Tunjangan Lainnya, *Pay for Performance* (P3), sedangkan untuk manfaat terdiri dari fasilitas dan *benefit*. Terkait dengan salah satu komponen remunerasi yaitu P1, terdapat penyesuaian secara berkala yang ditetapkan oleh Pemegang Saham yaitu PT PLN (Persero) kepada seluruh Anak Perusahaan terkait Kenaikan Berkala P1 Pegawai.

The remuneration for Indonesia Power employees is based on the CLA 2021-2022 Chapter VI on Rewards Article 55 on Basis for Rewards, which stipulates that Indonesia Power provides remuneration in the forms of compensation and employee benefits. The compensation covers Pay for Person (P1), Pay for Position (P2) and Other Allowances, and Pay for Performance (P3), while employee benefits include facilities and other benefits. The Company Shareholder, i.e. PT PLN (Persero), makes periodical adjustment to P1 at all of its subsidiaries in order to provide Periodical P1 Raise for the Employees.

Penjelasan lebih lanjut akan diuraikan secara lebih rinci pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sub Bagian Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Further details will be elaborated in Chapter Corporate Social Responsibility, Sub-chapter Corporate Social Responsibility Activities for Employment and Occupational Health and Safety.

Hubungan Industrial
Industrial Relations

Indonesia Power memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk berpendapat dan berserikat dalam rangka mematuhi Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD) Pasal 28 E UUD 1945 ayat (3) dan Undang-undang (UU) Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 pasal 1 dan Pasal 102. Indonesia Power. Indonesia Power dan pegawai membentuk Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP-IP) sebagai sarana bagi pegawai untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya yang terdaftar di Kantor Kemenakertrans RI. Untuk selanjutnya Indonesia Power dan PP-IP bersepakat dan menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berisi syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. PKB yang berlaku untuk tahun 2021 adalah PKB periode 2021-2022 yang merupakan pemutakhiran dari PKB periode sebelumnya.

Indonesia Power respects the employees' rights to freedom of speech and association in compliance with the 1945 Constitution Article 28 E sub-article (3) and Law on Job Creation No. 13 of 2003, Article 1 and Article 102. Indonesia Power Indonesia Power, together with the employees, established Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP-IP), which is registered at the Ministry of Manpower and Transmigration, to accommodate the employees' freedom of speech and association. Subsequently, Indonesia Power and PP-IP have made an agreement and entered into a Collective Labor Agreement (CLA) which sets out the work requirements, rights, and obligations of both parties. CLA 2021-2022, which contains updates from its previous version, was applicable throughout 2021.

Kegiatan hubungan industrial akan diuraikan secara lebih rinci pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sub Bagian Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Further details on industrial relations activities will be elaborated in Chapter Corporate Social Responsibility, Sub-chapter Corporate Social Responsibility Activities for Employment and Occupational Health and Safety.

Pengukuran Kepuasan dan Keterikatan Pegawai

Human Resources Satisfaction and Engagement

Indonesia Power secara berkala rutin melaksanakan Survei Kepuasan dan Keterikatan Pegawai yang disebut *Human Resources Satisfaction & Engagement* (HRSE) yaitu *Employee Satisfaction Survey* dan *Employee Engagement Survey*. Di tahun 2021, selain mengukur kepuasan dan keterikatan pegawai, Perusahaan juga mengukur *enablement* pegawai sebagai bagian dari *Employee Effectiveness Index*.

Pelaksanaan survei HRSE pada tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 17 - 27 Agustus 2021, dengan metode survei *online* melalui aplikasi internal: survey.indonesiapower.co.id.

Adapun aspek-aspek yang dinilai dalam survei HRSE adalah:

1. Kepuasan, dengan indikator:
- a. Kepuasan bekerja,
- b. Penempatan/promosi pegawai,
- c. Pendidikan dan pelatihan,
- d. Proses penilaian kinerja,
- e. Minat dan kompetensi,
- f. Bimbingan/arahan atasan langsung.

2. Dimensi *Engagement*:
- a. *Clear and promising direction,*
- b. *Confidence in leaders,*
- c. *Quality and client focus,*
- d. *Respect and recognition,*
- e. *Development opportunities,*
- f. *Pay and Benefits,*

3. Dimensi *Enablement*:
- a. *Performance management,*
- b. *Authority and empowerment,*
- c. *Resources,*
- d. *Training,*
- e. *Collaboration,*
- f. *Work, structure and process.*

4. Pemahaman Pegawai:
- a. Komunikasi,
- b. Biaya Pokok Produksi (BPP),
- c. Diklat,
- d. Visi, Misi, dan Tata Nilai.

Indonesia Power regularly conducts Human Resources Satisfaction & Engagement (HRSE) surveys through Employee Satisfaction Survey and Employee Engagement Survey. In 2021, in addition to measuring satisfaction and engagement of the employees, the Company also measured employees' enablement as part of Employee Effectiveness Index.

The HRSE survey in 2021 was carried out from August 17-27, 2021 via internal online survey at survey.indonesiapower.co.id.

Aspects that are assessed in the HRSE survey consist of:

1. Satisfaction, with the following indicators:
- a. Work satisfaction,
- b. Employee placement/promotion,
- c. Education and training,
- d. Performance assessment process,
- e. Interest and competency,
- f. Guidance/direction from direct superior.

2. Engagement Dimension:
- a. Clear and promising direction,
- b. Confidence in leaders,
- c. Quality and client focus,
- d. Respect and recognition,
- e. Development opportunities,
- f. Pay and Benefits,

3. Enablement Dimension:
- a. Performance management,
- b. Authority and empowerment,
- c. Resources,
- d. Training,
- e. Collaboration,
- f. Work, structure, and process.

4. Employee Understanding:
- a. Communication,
- b. Cost of Goods Manufactured (COGM)
- c. Education and Training,
- d. Vision, Mission, and Value System

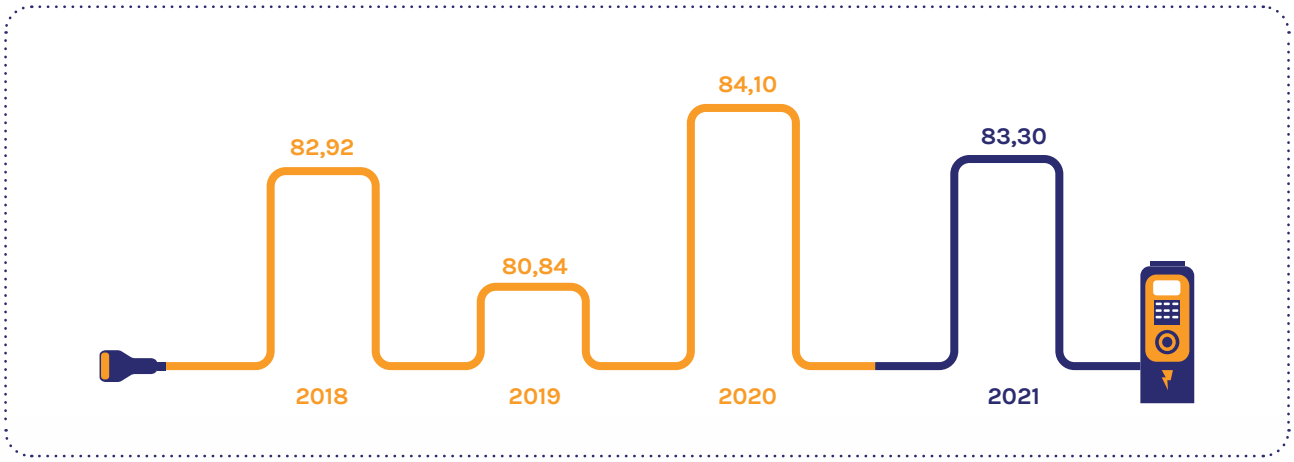
SUMBER DAYA MANUSIA
HUMAN CAPITAL

Employee Satisfaction Index
Employee Satisfaction Index

Pada tahun 2021, *Employee Satisfaction Index* (ESI) atau tingkat kepuasan pegawai menurun 0,95% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebebsar 83,3% yang disebabkan oleh beberapa aspek yang masih menjadi fokus pegawai untuk dapat ditingkatkan, yaitu terkait aspek Proses Penilaian Kinerja, Pendidikan & Pelatihan dan proses promosi/rotasi pegawai. Selain itu, kondisi pandemi juga memberi pengaruh terhadap penurunan kepuasan.

In 2021, Employee Satisfaction Index (ESI) decreased by 0.95% to 83.3% compared to 2020 due to several aspects that, from employees' perspectives, could be improved. These aspects include Performance Assessment Process, Education & Training and employee promotion/rotation process. In addition, the pandemic also played a role in decreased satisfaction level.

Grafik ESI Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of ESI in 2018-2021 (%)

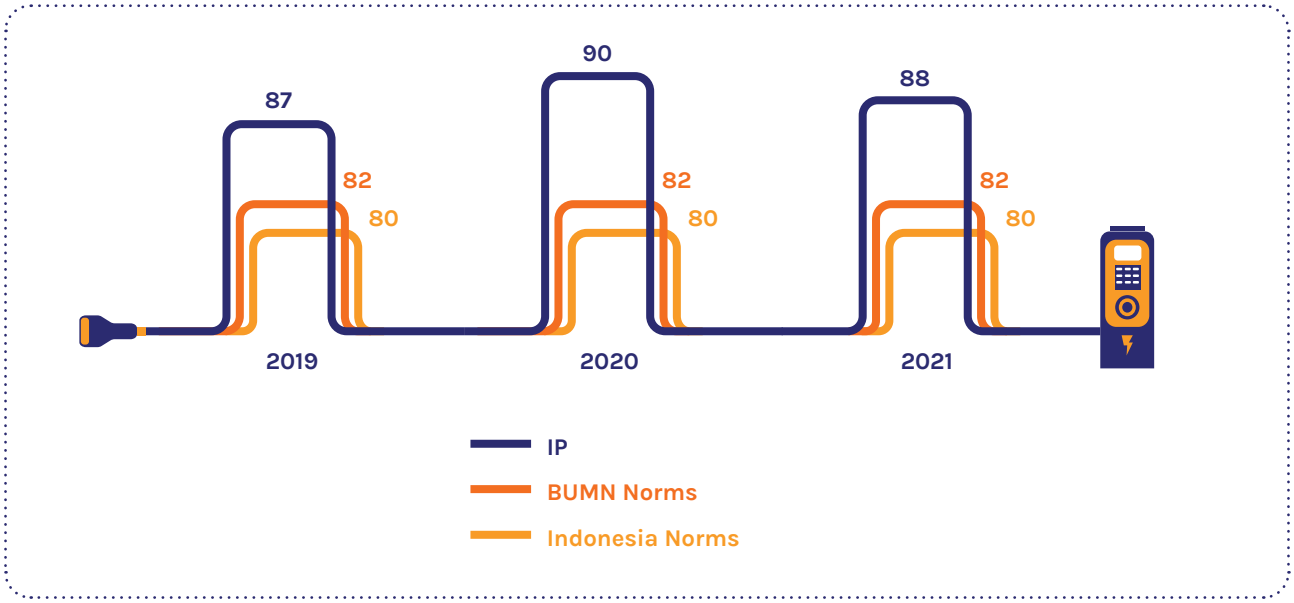


Employee Engagement Index
Employee Engagement Index

Pengukuran EEI di tahun 2021 menggunakan *framework* yang bisa diperbandingkan dengan Indonesia Norms dan BUMN Norms. Dengan penggunaan *framework* yang berbeda dengan tahun lalu, hasil menunjukkan nilai *engagement* sudah cukup tinggi dibandingkan dengan Indonesia *Norms* dan BUMN *Norms*, namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pengukuran menggunakan *framework* yang sama terjadi penurunan. Hasil survei menunjukan bahwa skor *Employee Engangement Index* (EEI) sebesar 88%,mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan skor 90%. Penurunan *engagement* pegawai salah satunya terkait dengan keberlangsungan/ prospek perusahaan ke depan yang dipengaruhi oleh isu Holdingisasi bidang Ketenagalistrikan dan perluasan bisnis Perusahaan ke arah Beyond kWh.

To measure Employee Engagement Index (EEI) in 2021, the Company applied a framework comparable to Indonesia Norms and SOEs Norms. With the new framework for this year, the engagement value is significantly high with such comparisons. However, the number decreases when measured with the framework used in the previous year. The survey result indicates that the EEI score for 2021 is 88%, dropping from 90% in 2020. This decline roots from, among others, the Company's sustainability/ prospect which is influenced by the issue of Holdingization of electricity sector and the Company's expansion towards Beyond kWh.

Grafik Perbandingan EEI Indonesia Power vs Indonesia Norms vs BUMN Norms Tahun 2019 - 2021 (%)
Chart of EEI Comparison among Indonesia Power, Indonesia Norms, and BUMN Norms 2019 - 2021 (%)



Evaluasi dan Tindak Lanjut HRSE
HRSE Evaluation and Follow-up

Telah dilaksanakan *workshop Focus Group Discussion* (FGD) konfirmatori hasil *survey* HRSE pada tanggal 27 - 28 Oktober 2021, dengan tujuan untuk memvalidasi hasil yang diperoleh dari *Survey* HRSE 2020 dan melakukan penelusuran/*inquiry* yang lebih mendalam mengenai latar belakang dari temuan yang diperoleh melalui *Survey* HRSE 2021.

A confirmatory Focus Group Discussion (FGD) was held on October 27-28, 2021 with the purpose of validating the results of HRSE Survey in 2020 and conducting an in-depth tracking/inquiry of findings from the survey.

Berdasarkan hasil *survey* HRSE dan konfirmatori melalui FGD, kemudian ditindaklanjuti dengan *Workshop* Penyusunan *Action Plan Survey* HRSE 2021 pada tanggal 24 - 25 November 2021, untuk mendapatkan *Action Plan Survey* HRSE 2022 yang tepat dan komprehensif serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Based on the HRSE survey result and confirmatory FGD, a workshop on the Development of HRSE Survey 2021 Action Plan was held on November 24-25, 2021 to formulate an accurate and comprehensive Action Plan for HRSE Survey 2022, which meets the Company's needs.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Sebagai salah satu *business enabler*, dukungan Teknologi Informasi (TI) yang andal dapat mendukung optimasi kegiatan bisnis yang efektif dan efisien. TI Indonesia Power memiliki perangkat kebijakan dan prosedur sistem informasi berupa Tata Kelola Teknologi Informasi Perusahaan (PROGEN), *Information Technology Master Plan* (ITMP), Kebijakan Keamanan Informasi, dan Kebijakan Penggunaan Hak Akses Jaringan, Email, Internet dan Aplikasi Perusahaan di Lingkungan Indonesia Power. Selain itu, inisiatif perbaikan senantiasa dilakukan untuk menjaga kualitas layanan dan sebagai langkah prefentif dalam menghadapi risiko reputasi dan operasional terkait dengan penyusunan dokumen-dokumen kebijakan internal Perusahaan yang berhubungan dengan IT *Governance*.

As a reliable business enabler, Information Technology (IT) supports an effective and efficient business activity optimization. This is what drives Indonesia Power to have a set of information system policies and procedures in the form of Company Information Technology Governance (PROGEN), Information Technology Master Plan (ITMP), Information Security Policy, and Policy of Network, Email, Internet Access Privilege within Indonesia Power. In addition, improvement initiatives have always been implemented in order to maintain the quality of services as well as to serve as a preventive measure in addressing risks associated with reputation and operation in connection with the development of the Company's internal policies on IT Governance.

Visi Sistem Informasi Indonesia Power

Membantu pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, bersaing, tangkas, dan efisien.

Misi Sistem Informasi Indonesia Power

1. Implementasi *Smart Enterprise Asset Management* untuk mencapai optimasi aset.
2. Implementasi *Digital Transformation* untuk mencapai efisiensi proses bisnis (*Big Data Analysis, Data Mining, Machine Learning*).
3. Meningkatkan efisiensi antara Bisnis dan IT dengan menyediakan aplikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM (HCIS, *Knowledge Management*).
4. Meningkatkan optimalisasi kegiatan bisnis di Indonesia Power dengan memanfaatkan teknologi informatika sebagai *enabler*.

Indonesia Power's Vision for Information System

To support sustainable, competitive, agile, and efficient business growth.

Indonesia Power's Mission for Information System

1. Implementing Smart Enterprise Asset Management to achieve asset optimization.
2. Implementing Digital Transformation to achieve business process efficiency (Big Data Analysis, Data Mining, Machine Learning).
3. Increasing efficiency between Business and IT by providing application for HR competence (HCIS) improvement.
4. Improving business activity optimization at Indonesia Power by utilizing information technology as an enabler.

Indonesia Power juga menyusun dan mengesahkan kebijakan *Disaster Recovery Plan* (DRP) sebagai standarisasi dalam pelaksanaan jika terjadi kondisi bencana. Dengan kelengkapan perangkat kebijakan dan prosedur sistem informasi yang dimiliki, Indonesia Power mampu menjalankan bisnis dengan proses pengambilan keputusan yang transparan, cepat dan akurat sehingga menunjang pencapaian tujuan jangka panjang Perusahaan.

Indonesia Power has also developed and authorized a Disaster Recovery Plan (DRP) as a standard for actions in the event of disasters. The information system policy sets and procedures enable Indonesia Power to operate its business through transparent, fast, and accurate decision making process, thus supporting the achievement of the Company's long-term objectives.

Information *Technology Master Plan*
Information Technology Master Plan

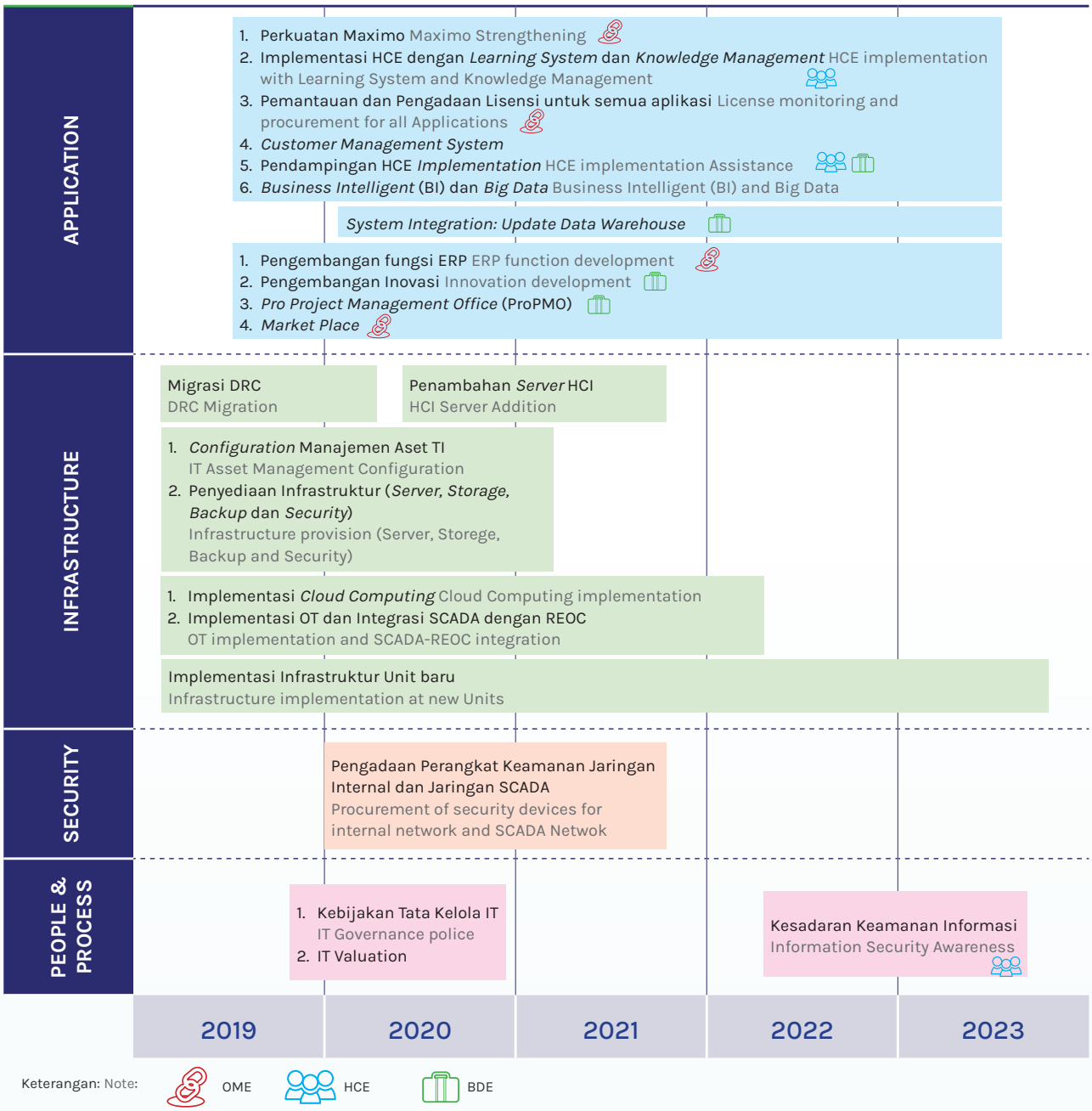
Sebagai bentuk komitmen terhadap pengembangan TI, Indonesia Power menyusun Information *Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam menjalankan program Teknologi Informasi. Pada Tahun 2019 dilakukan *Review* IT *Master Plan* PT Indonesia Power sesuai Keputusan Direksi No. 194.K/010/IP/2019 tentang *Information Technology Master Plan* tahun 2019 - 2023 tanggal 3 Oktober 2019. *Review master plan* ini dilakukan

As a commitment to IT development, Indonesia Power developed Information Technology Master Plan (ITMP) to guide the implementation of Information Technology programs. In 2019, IT Master Plan of PT Indonesia Power was conducted in accordance with Board of Directors' Decree No. 194.K/010/IP/2019 on Information Technology Master Plan 2019-2023 dated October 3, 2019. The master plan review was carried out to align with the

dalam rangka *alignment* terhadap Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2019 - 2023 dan *alignment* dengan ITMP PT PLN (Persero).

Company's Long-term Plan 2019-2023 as well as PT PLN (Persero) ITMP.

Master Plan Teknologi Informasi Tahun 2019 - 2023
Information Technology Master Plan 2019-2023



TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Di dalam ITMP juga mencakup inisiatif TI yang bisa mengarahkan tipe inisiatif apa saja yang bisa dilaksanakan oleh Indonesia Power. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh kegiatan pengembangan TI di Perusahaan searah dan selaras dengan Visi, Misi dan Strategi perusahaan serta tren TI di dunia. Inisiatif Teknologi Informasi tersebut yaitu:

1. Pemantauan Perangkat Pembangkit,
2. Rekomendasi Pengelolaan keamanan jaringan SCADA,
3. Pengamanan Infrastruktur dengan HSM (*Hardware Security Module*),
4. Data dan Aplikasi,
5. Digital Transformasi,
6. Tata Kelola Keamanan Informasi,
7. *Security Awareness* Perusahaan,
8. Tata Kelola TI,
9. Proses *Service Delivery* dan *Service Support,*
10. IT *Valuation*.

The ITMP also includes information technology initiatives that will direct which initiatives can be executed by Indonesia Power. With this document, it is expected that all IT development activities across the organization are in accordance and aligned with the Company's Vision, Mission, and Strategy as well as global IT trend. The Information Technology initiatives are:

1. Monitoring of Power Plant Devices;Recommendation of SCADA network security management;
2. Recommendation of SCADA network security management;
3. Infrastructure safeguarding using HSM (Hardware Security Module);
4. Data and Application;
5. Digital Transformation;
6. Information Security Governance;
7. Corporate Security Awareness;
8. IT Governance;
9. Service Delivery and Service Support Processes;
10. IT Valuation.

Program Teknologi Informasi
Information Technology Programs

Pengelola TI Indonesia Power adalah Division of Information Technology (DIV ITE). Fungsi Utama DIV ITE adalah memastikan seluruh proses bisnis Perusahaan mencakup Unit Kerja Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, menggunakan Sistem Teknologi Informasi yang terpadu dan proses bisnis Perusahaan IP-IMS dapat terlaksana secara aman, andal, efisien, kompetitif utnuk melayani pelanggan, mitra, Pemegang Saham dan stakeholders lainnya serta memaksimalkan kinerja keuangan dan kinerja perusahaan secara berkelanjutan sesuai PRK/RKAP/RJPP disertai manajemen risiko dan implementasi prinsip *Good Coporate Governance* (GCG) dan kepatuhan pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Untuk mendukung Fungsi Utama tersebut maka DIV ITE melakukan program kerja program kerja yang terdiri dari pemeliharaan rutin dan pengembangan/investasi.

At Indonesia Power, all affairs concerning Information Technology are managed by the Division of Information Technology. The main function of ITE DIV is ensuring all Company business process including Subsidiaries and Affiliates using integrated Information Technology System and the Company's business process of IP-IMS can be executed securely, reliably, efficiently, and competitively to serve customers, partners, Shareholders and other stakeholders as well as maximizing the Company's sustainable financial and performance in accordance with the WPP/Company Long-term Plan/WP&B with risk management and implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles and compliance of the Anti-Bribery Management System (SMAP). To support the primary function, the Division of Information Technology has implemented work programs consisting of regular maintenance and development/investment activities.

Pemeliharaan rutin maupun pengembangan/investasi yang dilakukan di tahun 2021 antara lain:

The regular maintenance and development/investment activities carried out in 2021 include:

Program Pengembangan Aplikasi
Application Development Program

Maintenance & Annual Technical Support Aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP)
Maintenance and Annual Technical Support for Enterprise Resource Planning (ERP) Application

Melakukan Pekerjaan untuk Pemeliharaan Aplikasi ERP dan Pembayaran *Annual Technical Support*. Aplikasi ERP yang digunakan di Indonesia Power adalah ERP *Oracle E-Business Suite Modul Financial, Human Capital dan Supply Chain Management*. Aplikasi ERP modul *Financial* digunakan untuk transaksi keuangan dan pembuatan Laporan keuangan, modul *Human Capital* digunakan untuk mencatat data kepegawaian, pelaksanaan diklat dan melakukan transaksi penggajian, modul *Supply Chain Management* untuk melakukan transaksi pengadaan dan *inventory*.

Conducted ERP application maintenance and annual technical support payment. The ERP application used in Indonesia Power is ERP Oracle E-Business Suite of Financial, Human Capital, and Supply Chain Management modules. The ERP Financial module is used for financial transactions and preparation of financial reports; Human Capital module is used to record employment data, training and education implementation, and payroll transactions; while Supply Chain Management module is used for procurement and inventory transactions.

Maintenance Aplikasi *Enterprise Asset Management* (EAM)
Maintenance of Enterprise Asset Management (EAM) Applications

Melakukan Pekerjaan untuk Pemeliharaan Aplikasi *Enterprise Asset Management* (EAM), menggunakan *tools software* Maximo. Aplikasi ini digunakan melakukan optimasi performa setiap aset sehingga dapat memberikan informasi terkait aset tersebut secara transparan untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Modul-modulnya terdiri dari *Work and Planning Control Management, Reliability Management,* Efisiensi Manajemen dan *Outage Management* serta modul *Health Safety Environment* (HSE).

Conducted Enterprise Asset Management (EAM) application maintenance using Maximo software tools. The application is used to optimize the performance of individual Assets in order to provide transparent information on these assets for decision making. The modules include Work and Planning Control Management, Reliability Management, Management Efficiency, and Outage Management, and Health, Safety, and Environment (HSE).

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Maintenance Aplikasi *Office Automation*
Maintenance of Office Automation Applications

Melakukan Pekerjaan untuk Pemeliharaan Aplikasi pendukung untuk *Office Automation*. Aplikasi ini seperti Aplikasi Tata Laksana Surat, *Website*, Aplikasi *Risk Management,* Aplikasi *Innovation*, dll.

Conducted maintenance for supporting applications for office automation. These applications include Mail Management, Website, Risk Management, Innovation, etc.

Maintenance Aplikasi *Tailor Made*
Maintenance of Tailor made Application

Melakukan pekerjaan pemeliharaan untuk Aplikasi yang dikembangkan mandiri oleh personil TI Perusahaan, agar ketersediaan aplikasi tetap terjaga.

Conducted maintenance for applications developed independently by the Company's TI personnel in order to maintain application availability.

Maintenance Aplikasi ECM (*Enterprise Commerse Management*) ProNIA
ProNIA Enterprise Commerce Management (ECM) Application Maintenance

Melakukan pekerjaan pemeliharaan Aplikasi untuk Produksi dan Niaga Indonesia Power.

Conducted maintenance for Indonesia Power Production and Commerce Application (Aplikasi Produksi dan Niaga Indonesia Power - ProNIA).

Maintenance Aplikasi *Primary Energy* (ICMS)
Maintenance Primary Energy (ICMS) Applications

Melakukan pekerjaan pemeliharaan aplikasi untuk pengelolaan manajemen batubara di PT Indonesia Power.

Conducted application maintenance for coal management in PT Indonesia Power.

Maintenance Aplikasi *Project Management Office* (ProPMO)

Maintenance of Project Management Office (PMO) Applications

Melakukan pekerjaan pemeliharan aplikasi untuk *monitoring milestone project* dalam bentuk *dashboard* dan aktivitas detil sesuai proses bisnis pengembangan usaha pembangkit, mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pra-konstruksi, kostruksi, sampai penyelesaian.

Conducted application maintenance for monitoring project milestones in the form of dashboard and detail activities as per plant development business process, from initiation, planning, pre-construction, instructions, to completion.

Maintenance Big Data dan *Business Inteligent* (BI)

Maintenance of Big Data and Business Intelligence (BI)

Melakukan pekerjaan pemeliharaan *Big Data & Business Inteligent* (BI) di PT Indonesia Power.

Conducted maintenance in Big Data & Business Intelligence (BI) in PT Indonesia Power.

Maintenance Aplikasi REOC *Dispatch*

REOC Dispatch Application Maintenance

Melakukan pemeliharaan Aplikasi Pusat Informasi dan Pengendalian Keandalan dan Efisiensi Aset Pembangkit yg terintegrasi dan *real time* sebagai sarana untuk analisis dan pengambilan keputusan yang meliputi: *Plant Information, Performance Management System, Plant Operation Management, Reliability Centered Maintenance, Risk Based Inspection* (*Support Outage Management*), *Early Warning System, Computerized Maintenance Management System.*

Conducting maintenance for the integrated and real-time Information Center and Reliability Management and Efficiency Management as analytical and decision-making tools that include: Plant Information, Performance Management System, Plant Operation Management, Reliability Centered Maintenance, Risk-Based Inspection (Support Outage Management), Early Warning System, and Computerized Maintenance Management System.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Pengembangan Aplikasi ICOFR GRC
ICOFR GRC Application Development

Sebagai komitmen Indonesia Power dalam pelaksanakan pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan manajemen risiko yang baik, Perusahaan terus melakukan pengembangan dalam implementasi ICOFR untuk mendapatkan hasil pengendalian internal yang lebih efektif dan efisien. Sebagai alat pengukuran dengan adanya aplikasi ICOFR, maka pelaksanaan *Control Self Assessment* dapat secara otomatis terintegrasi dengan aplikasi *enterprise* IP antara lain ERP dan Maximo. Dengan tersedianya data kontrol pada aplikasi enterprise IP, diharapkan dapat mendukung monitoring dan pelaporan kontrol ICOFR secara otomatis.

An embodiment of its commitment to performing internal control over good risk management, PT Indonesia Power continues developing ICOFR to obtain more effective and efficient internal control outcomes. As a measurement app, ICOFR allows automatic integration of Control Self-Assessment into enterprise IP applications such as ERP and Maximo. With enterprise IP's data control, automatic monitoring and reporting of ICOFR control is expected.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastrukur
Infrastructure Development and Management Programs

1. ***Service Support*** **dan EA** ***Product Microsoft***
   Kegiatan *maintenance support* dan *subscription Microsoft product.*
2. ***Maintenance*** **Infrastruktur**
   Melakukan pemeliharaan dan *renewal support* perangkat Infrastruktur seperti pemeliharaan *Server, Storage,* Perangkat *backup, Virtual machine,* dll agar semua peralatan infrastruktur IT terjamin keandalannya.
3. ***Maintenance Local Area Network*** **(LAN)/** ***Wide Area Network*** **(WAN) dan** ***Bandwidth Management***
   Melakukan Pemeliharaan dan renewal support perangkat jaringan LAN/WAN dan *Bandwith Management* untuk keandalan IT Perusahaan.
4. **Sewa** ***Location Data Center***
   Melakukan sewa lokasi *Data Center* Indonesia Power ke PT Indonesia Comnets Plus (Icon+) dikarenakan lokasi tersebut sudah memenuhi standar *tier* 3 sehingga menjamin ketersediaan dan keandalan Sistem IT Perusahaan.
5. **Pekerjaan** ***Helpdesk*** **dan** ***Desktop Support***
   Melakuan kegiatan *Helpdesk* Aplikasi dan *Helpdesk Desktop,* hal ini dilakukan agar operasional dan ketersediaan layanan IT tetap terjamin.

1. **Service Support and Microsoft Product EA**
   Conducted maintenance support and subscription of Microsoft product.
2. **Infrastructure Maintenance**
   Conducted maintenance and renewal support of Infrastructure devices, e.g. Server, Storage, Backup devices, Virtual machine Maintenance, etc to ensure that all IT infrastructure equipment is reliable.
3. **Maintenance of Local Area Network (LAN)/Wide Area Network (WAN) and Bandwidth Management**
   Conducted maintenance and renewal support the LAN/WAN network device and Bandwidth Management for Corporate's IT reliability.
4. **Location Data Center Lease**
   Provided Indonesia Power location data center to PT Indonesia Comnets Plus (icon+) for lease. It was because the site has met tier 3 standards ensuring availability and reliability of the Company IT System.
5. **Help Desk and Desktop Support Works**
   Conducted help desk activities for applications and desktop to ensure the operation and availability of IT services.

6. ***Maintenace & Support Enterprise Infrastructure Management* dan *Helpdesk System***
   Melakukan kegiatan pemeliharaan dan *renewal support* sistem *Data Center Infrastructure Management* (DCIM) termasuk *web helpdesk, Log Management* untuk menjaga ketersediaan dan keandalan IT Perusahaan.
7. **Sewa Jaringan WAN, internet dan VCON**
   Sewa jaringan Data, internet dan VCON untuk komunikasi data dan suara korporat Perusahaan.
8. **Sewa *Backup* Akses Internet**
   Sewa *backup* akses internet untuk ketersediaan jalur komunikasi data.

6. **Enterprise Infrastructure Management and Help Desk System Maintenance and Support**
   Conducted maintenance and renewal support of Data Center Infrastructure Management (DCIM) systems including web helpdesk, Log Management to maintain availability and reliability of the Company's IT.
7. **WAN Network, Internet, and VCON Lease**
   Data network, Internet, and VCON lease for the Company's corporate data and voice communication.
8. **Backup Internet Access Lease**
   Backup Internet Access Lease for communication line availability.

Program Pengelolaan *Security*
Security Management Programs

1. **Pemeliharaan dan *License* Perangkat *Security* Jaringan**
   Kegiatan pemeliharaan dan pembayaran *support* perangkat *security* dan jaringan. Pemeliharaan ini dilakukan untuk menjamin kemanan sistem IT Perusahaan.
2. **Pemeliharaan *Disaster Recovery Center* (DRC)**
   Melakukan jasa sewa *Disaster Recovery Center.*

1. **Network Security Device Maintenance and Licensing**
   Maintenance and payment of security and network support. The maintenance is performed to ensure the security of the Company's IT system.
2. **Disaster Recovery Center (DRC) Maintenance**
   Conducted Disaster Recovery Center leasing services.

IT *Maturity Assessment*
IT Maturity Assessment

Sesuai Kontrak Management tahun 2021, untuk KPI IT *Maturity level* dengan target skor 3. Metode pengukuran menggunakan *Control Objective for Information and Related Technology* 5 (COBIT 5). Pada semester 1 tahun 2021 telah dilaksanakan *self assessment* dengan hasil skor 3,3. Sedangkan pada akhir semester 2 tahun 2021, dilaksanaan penilaian *assessment independent* dengan skor 3,35. Selain itu, telah dilakukan Survei Layanan IT pada bulan September 2021 guna mendukung pencapaian IT *Maturity.*

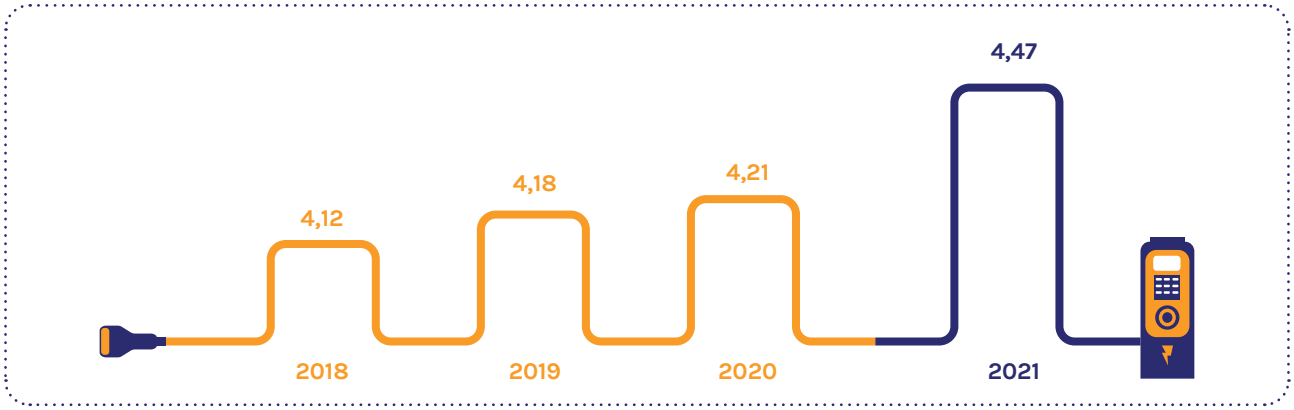
Selain melakukan *assessment* menggunakan COBIT 5 di Kantor Pusat, Indonesia Power juga melaksanakan IT *Maturity Assessment* di Unit-unit dengan menggunakan COBIT 4.1 yang tercermin dalam nilai *Information Capital Readiness* (ICR). Nilai ICR pada tahun 2021 meningkat menjadi 4,47. Peningkatan ini terutama didukung oleh adanya kegiatan sosialisasi-sosialisasi secara rutin ke unit dan juga *awareness* terhadap keamanan/*cyber security.*

According to the 2021 Management Contract, for KPI of IT maturity level with the target score 3. It was assessed using Control Objective for Information and related Technology 5 (COBIT 5). In the 1st semester of 2021, a self-assessment has been conducted with a score of 3.3. At the end of the 2nd semester of 2021, an independent assessment was conducted with a score of 3.35. In addition, IT Services Survey was conducted in September 2021 to support IT Maturity achievement.

In addition to conducting assessment using COBIT 5 in Head Office, Indonesia Power also conducted IT Maturity Assessment at Units using COBIT 4.1 as reflected in Information Capital Readiness (ICR). The ICR score in 2021 increased to 4.47. This increase was mainly supported by regular socialization to the unit and also awareness to security/cyber security.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Maturity Level ICR Tahun 2018 - 2021 (skor)
ICR Maturity Level in 2018-2021 (score)



IT *Valuation*
IT Valuation

IT *Valuation* adalah kegiatan melakukkan identifikasi untuk menilai manfaat Investasi IT baik secara *tangible* (*financial*) maupun manfaat *intangible* (tidak langsung). Proses yang dilakukan di Perusahaan saat ini adalah melakukan *Valuation* pada aplikasi ERP dengan menggunakan *framework 'Information Economic'* yang menilai dari domain bisnis (*business alignment* dan *business risk)* dan domain teknologi (*technology goals* dan *technology risk*). Selanjutnya dilakukan pengisian kuesioner, melakukan *interview* dan pengumpulan data eviden kepada *user* pengguna aplikasi ERP dan *add-on*-nya dengan hasil bahwa aplikasi ERP masuk kedalam kuadran *maintenance/ enhance* yang artinya investasi/inisiatif IT yang dilakukan telah memberikan manfaat dan mampu memenuhi kebutuhan bagi bisnis Perusahaan.

IT Valuation is identification to assess both tangible (financial) and intangible (indirect) benefits of IT Investment. The current process in the Company is Valuating ERP applications using the 'Information Economic' framework. It assesses the business domain (business alignment and business risk) and the technology domain (technology goals and technology risk). Furthermore, the Company conducted survey and interviews as well as collected evidence data to users of ERP application and its add-ons. The result is that the ERP application is included in the maintenance/enhance quadrant, meaning that IT investments/initiatives are beneficial and able to meet the Company's business needs.

Sosialisasi IT
IT Outreach

Secara rutin dan berkelanjutan DIV ITE, Indonesia Power melakukan sosialisasi Aplikasi Korporat maupun *Software/tools* yang digunakan di perusahaan baik kepada pegawai di unit maupun pegawai yang ada di Kantor Pusat. Hal ini dilakukan dalam upaya DIV ITE meyakinkan pemanfaatan dan keandalan sistem TI untuk mendukung kebutuhan Perusahaan.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

ITE Indonesia Power's Division has regularly and continually conducted socialization of Corporate Application and Software/ Tools used at the Company, to the employees at both the Head Office and Units. This was carried out to help the ITE Division in ensuring the utilization and reliability of IT system to support the Company's needs.

Several activities have been carried out in 2021, among others:

Tabel Sosialisasi Sistem TI
Table of IT System Dissemination

No	Tema Sosialisasi Dissemination Theme	Peserta Participant	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation
1.	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi IP Digimonx-OH Socialization of IP Digimonx-OH Application Use	Unit Barru Barru Unit	12 Januari 2021 January 12, 2021
2.	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi IP Digimonx-OH Socialization of IP Digimonx-OH Application Use	Unit Semarang Semarang Unit	28 Januari 2021 January 28, 2021
3.	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi IP Digimonx-OH Socialization of IP Digimonx-OH Application Use	Unit Priok Priok Unit	29 Januari 2021 January 29, 2021
4.	*Sharing Knowledge Troubleshooting IP* Digimonx Sharing Knowledge of IP Digimonx Troubleshooting	Staf IT All Unit All Staff of IT Unit	9 Februari 2021 Fenruary 9, 2021
5.	*Sharing Knowledge Troubleshooting* Maximo, Digimonx Sharing Knowledge of Maximo Troubleshooting, Digimonx	Staf IT Ops Apps Staff of IT OPS Apps	8-12 Maret 2021 March 8-12, 2021
6.	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi IP Digimonx-OH Socialization of IP Digimonx-OH Application Use	Unit Adipala Adipala Unit	21 Juni 2021 June 21, 2021
7.	Sosialisasi Aplikasi Prodin Dissemination of Prodin App	Sekretariat Unit Priok Priok Unit Secretariat	30 Juni 2021 June 30, 2021
8.	Sosialisasi Aplikasi Prolak Dissemination of Prolak App	sekretariat Unit Priok Priok Unit Secretariat	30 Juni 2021 June 30, 2021
9.	*Refreshment* Persiapan OH Mandiri Unit Grati Refreshment for Preparation of Self OH for Grati Unit	Unit Grati Grati Unit	24 Juli 2021 July 24, 2021
10.	Sosialisasi Aplikasi IP-Digimonx OH Dissemination of IP DigimonX OH App	Unit Grati Grati Unit	24 Juli 2021 July 24, 2021
11.	*Training of Trainer* Aplikasi *Neamiss* Training of Nearmiss Application Trainer	Staf Indo Ridlatama Power (PT IRP) Staff of Indo Ridlatama Power (PT IRP)	3 Agustus 2021 August 3, 2021
12.	Sosialisasi penggunaan DigimonX OH Dissemination of DigimonX OH use	Unit Jeranjang Jeranjang Unit	9 Agustus 2021 August 9, 2021
13.	*Refreshment* Penggunaan Aplikasi IP-Digimonx OH Refreshment of IP Digimonx OH Application Use	Unit Pangkalan Susu Pangkalan Susu Unit	26 Agustus 2021 August 26, 2021
14.	Sosialisasi *Reporting* Maximo pada Pilar WPC dan *Outage* Dissemination of Maximo Reporting on WPC and Outage Pillars	Bidang Kinerja Unit, Bidang QCP Unit Performance, QCP	2 September 2021 September 2, 2021
15.	Sosialisasi IS *Wrench* WO dan *Report* WPC Dissemination of IS Wrenches O and WPC Report	*All Units*	2 September 2021 September 2, 2021
16.	*Training* Aplikasi Maximo dan proInventory Training of Maximo and proInventory Applications	MPP Papua MPP Papua	22 September 2021 September 22, 2021
17.	Sosialisasi Aplikasi e-Procurement Dissemination of e-Procurement App	Divisi SSP SSP Division	27-28 September 2021 September 27-28, 2021
18.	*Training* Aplikasii Maximo Training of Maximo App	Staf PLTU Kalbar 1 Staff of SPP West Kalimantan 1	27-29 September 2021 September 27-29, 2021
19.	Sosialisasi pendampingan Aplikasi Modul ERP modul AP, AR, CE di PT Artha Daya Coalindo (PT ADC) Dissemination of ERP Module Application mentoring for AP, AR, CE modules at PT Artha Daya Coalindo (PT ADC)	Staf PT ADC Staff of PT ADC	7-8 Oktober 2021 October 7-8, 2021
20.	*Training* LCM *Asset* Training LCM Asset	Peserta Diklat Training Participants	27 Oktober 2021 October 27, 2021
21.	Sosialisasi IP Digimonx MPP Papua Dissemination of IP Digimonx for MPP Papua	MPP Papua MPP Papua	18 November 2021 November 18, 2021
22.	Sosialisasi Maximo Pangkalan Susu Unit 3-4 Dissemination of Maximo for Pangkalan Susu Unit 3-4	Unit Pangkalan Susu Pangkalan Susu Unit	23 Desember 2021 December 23, 2021

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Pengembangan Kompetensi SDM bagian TI
IT Human Capital Competency Development

Indonesia Power menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan SDM di bidang TI untuk meningkatkan keandalan operator TI yang selanjutnya dapat meningkatkan keandalan TI Perusahaan. Berikut adalah sertifikat SDM bagian TI di tahun 2021:

In 2020, IT human capital trainings and development activities were carried out by Indonesia Power to improve IT operators' reliability, which will in turn improve the Company's IT reliability. Below is the IT HC certificates in 2021:

Tabel Sertifikasi SDM bidang TI
Table of IT HC Certificates

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Jabatan Position	Jumlah Pegawai Number of Employees
1.	ISTQB® Certified Tester, Foundation Level	Assistant Manager of Office Automation, Assistant Analyst of Enterprise Asset Management	2
2.	ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management	Assistant Analyst of Enterprise Asset management	1
3.	Digital Mindset - BUMN Digital Mindset - SOEs	Analyst of Information Technology Big Data	1
4.	VMware Certified Professional - Data Center Virtualization	Assistant Analyst of Information Technology Infrastructure Opertional	1
5.	Certified IT Procurement Expert (CITPE)	Assisstant Manager of information technology Infrastructure Operational, Analyst of Information Technology Planning	2

Implementasi ISO 27001
ISO 27001 Implementation

Indonesia Power sebagai perusahaan energi terpercaya yang tumbuh berkelanjutan senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola perusahaan. Salah satu yang menjadi perhatian utama dalam perbaikan proses bisnis adalah terkait sistem manajemen keamanan informasi. Setelah melalui proses implementasi dan persiapan sertifikasi, pada tanggal 18 Agustus 2017, Indonesia Power berhasil mendapatkan sertifikat *International Organization for Standardization* (ISO) 27001:2013 untuk *Information Security Management System* (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan lingkup Departemen Sistem Informasi.

As a trusted energy company, Indonesia Power continually grows and has always been trying to make improvements in terms of corporate governance. One of the main points of attention in business process improvement is information security management system. Through a process of certification implementation and preparation, on August 18, 2017, Indonesia Power obtained the International Organization for Standardization (ISO) 27001:2013 for Information Security Management System (ISMS) in Information System Department.

Telah dilakukan Re-sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada tahun 2020 yang efektif berlaku sejak 9 Oktober 2020 s.d. 8 Oktober 2023, dimana setiap tahunnya dilakukan *assessment Audit Surveillance* untuk memastikan kontrol masih efektif. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Audit *Surveillance*.

An effective Information Security Management System re-certification has been conducted in 2020 from October 9, 2020 to October 8, 2023, where each year an Audit Surveillance assessment is performed to ensure control effectiveness. In 2021, Audit Surveillance was conducted.



Pencapaian ISO 27001:2013 memberi arti besar bagi Indonesia Power, karena standarisasi seperti ini selain mampu meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, juga memperkuat proses bisnis dan perbaikan-berkelanjutan (*continuous improvement*), serta meningkatkan pengamanan teknologi informasi. Dengan demikian, citra organisasi dan daya saing juga meningkat, sehingga membuka peluang untuk pengembangan organisasi di masa mendatang.

The success of obtaining ISO 27001:2013 is significant for Indonesia Power as this standard allows for increased stakeholder trust, stronger business processes, continuous improvements, and improved information technology security. As such, the Company also gains better image and competitiveness, thus unlocking opportunities for future organizational development.

Melindungi informasi berarti menjaga kerahasiaan, yaitu memastikan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Juga menjaga integritas, memastikan bahwa informasi tetap akurat dan lengkap, serta informasi tersebut tidak dimodifikasi tanpa otorisasi yang jelas. Dan terakhir, memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang ketika dibutuhkan.

Protecting information means protecting confidentiality, i.e. making sure that information can be accessed only by authorized parties. This also means protecting integrity, making sure that information stays accurate and complete and not modified without express authorization. Lastly, this also means making sure that information is accessible to authorized parties when required.

TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMATION TECHNOLOGY

Penghargaan di Bidang TI
IT-related Awards

Pada tahun 2021, Indonesia Power berhasil meraih beberapa penghargaan sebagai berikut:

Indonesia Power earned the following IT-related accolades in 2021:

Ajang Inovasi Rekinnovation 2021
2021 Rekinnovation Innovation Event

Rekinnovation merupakan lomba inovasi yang digelar oleh PT Rekayasa Industri tiap tahunnya. Pada gelaran tahun 2021 mengambil tema "*Enhancing Collaboration, Acceleration Transformation*".

Rekinnovation is an annual innovation competition held by PT Rekayasa Industri. The theme for 2021 event was "Enhancing Collaboration, Acceleration Transformation".



"Juara 1" Rekinnovation *Category Partner:*
Sistem Keamanan Jaringan DCSView
"The First Winner" Rekinnovation Category Partner: DCSView Network Security System



"Juara 2" Rekinnovation *Category Partner*: i-Track
(*Invoice tracking Accurate Capability Known*)
"The Second Winner" Rekinnovation Category Partner: i-Track (Invoice tracking Accurate Capability Known)

Asian Power Awards : IT *Project of The Year* (REOC HO)

Asian Power Awards: IT Project of the Year (REOC HO)





Information Technology Project of the Year: Digital Power Plant Program - Automatic Failure Detection by PT PLN (Persero) - PT Indonesia Power

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI INDONESIA POWER (IP-IMS)

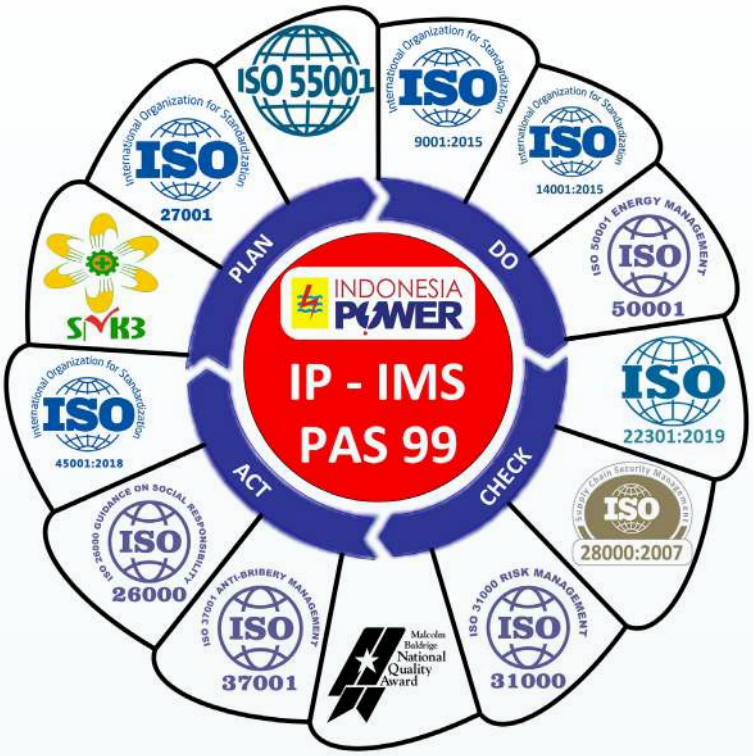
INDONESIA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (IP-IMS)

Penerapan Indonesia Power merancang Indonesia Power - *Integrated Management System* (IP-IMS) yang merupakan integrasi dari berbagai standar sistem manajemen, yang berlaku secara internasional. IP-IMS ini telah ditetapkan sejak tahun 2012 dan diterapkan tahun 2013, dengan mengalami pengembangan ruang lingkup dan jenis sistem manajemen hingga sekarang. Adapun Sistem Manajemen yang diintegrasikan dalam kerangka IP-IMS terdiri dari:

1. ISO 9001:2015 - Sistem Manajemen Mutu;
2. ISO 14001:2015 - Sistem Manajemen Lingkungan;
3. ISO 45001:2018 - Sistem Manajemen K3;
4. ISO 28000:2007 - Sistem Manajemen Keamanan Rantai Pasok;
5. ISO 55001:2014 - Sistem Manajemen Aset;
6. ISO 50001:2018 - Sistem Manajemen Energi;
7. ISO 27001:2013 - Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
8. ISO 26000 - *Guideline on Social Responsibility,*
9. ISO 31000:2018 - R*isk Management-Principles and Guidelines,*
10. Kriteria *Baldrige*,
11. ISO 22301:2019 - Sistem Manajemen Keberlangsungan Bisnis;
12. Sistem Manajemen K3 (SMK3) berbasis Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012;
13. ISO 37001:2016 - Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Indonesia Power has designed Indonesia Power Integrated Management System (IP-IMS), an integration of different globally-applicable management system standards. IP-IMS has been set out since 2012 and implemented since 2013 with improvement in terms of scope and types of management system up to the present time. Below are the Management Systems integrated into IP-IMS framework:

1. ISO 9001:2015 - Quality Management System;
2. ISO 14001:2015 - Environmental Management System;
3. ISO 45001:2018 - OHS Management System;
4. ISO 28000:2007 - Supply Chain Security Management System;
5. ISO 55001:2014 - Asset Management System;
6. ISO 50001:2018 - Energy Management System;
7. ISO 27001:2013 - Information Security Management System;
8. ISO 26000 - Guideline on Social Responsibility,
9. ISO 31000:2018 - Risk Management-Principles and Guidelines,
10. Baldrige Criteria,
11. ISO 22301:2019 - Business Continuity Management System;
12. Sistem Manajemen K3 (SMK3), or Indonesian OHS Management System based on Government Regulation Number. 50 of 2012;
13. ISO 37001:2016 - Anti-Bribery Management System.

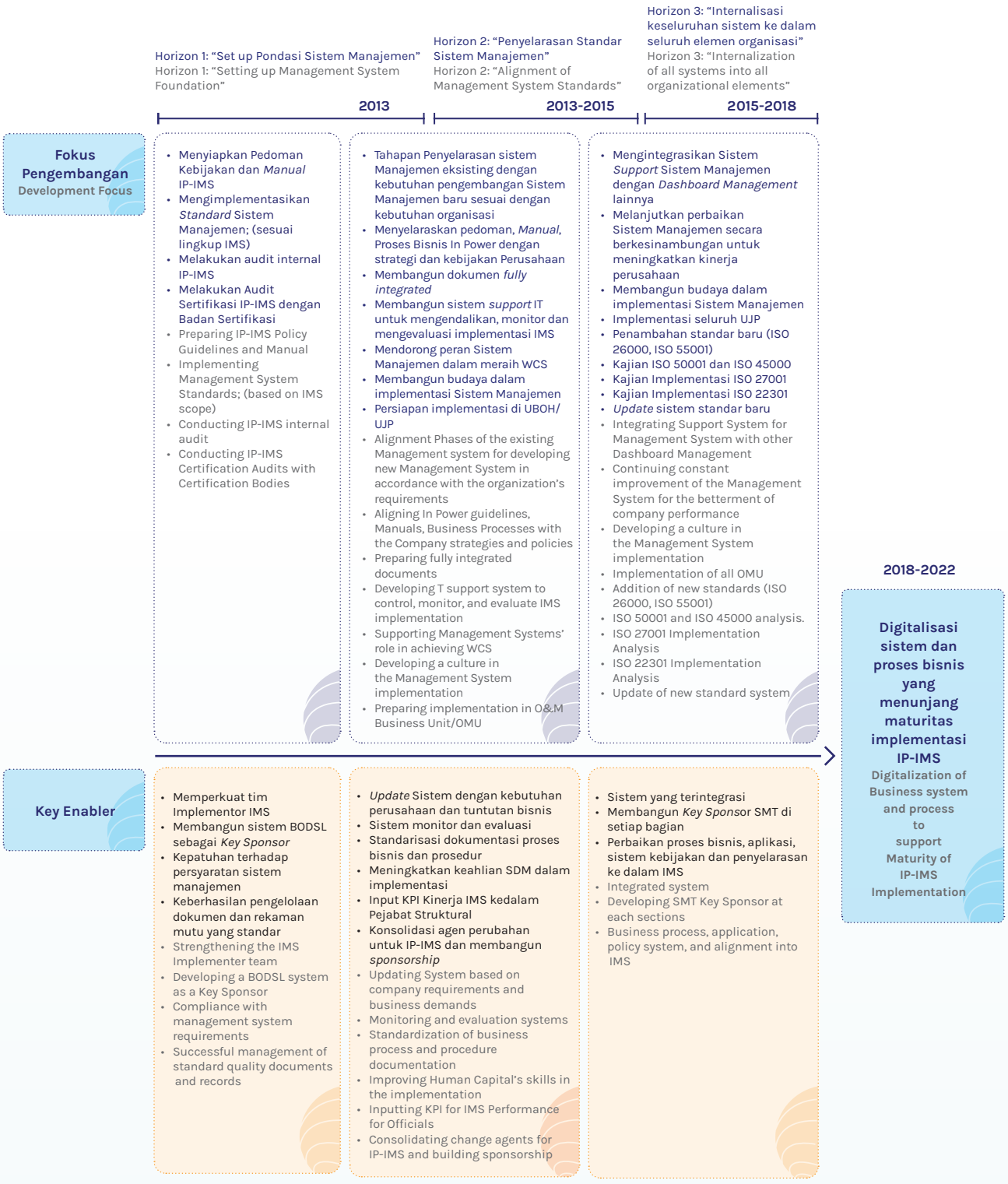


Indonesia Power dan seluruh unit bisnis senantiasa menyempurnakan proses bisnis secara terus-menerus berdasarkan standar terbaik.

Indonesia Power and the entire business units continuously improves its business processes in accordance with the best standards.

Secara lebih rinci, perjalanan implementasi IP-IMS dapat digambarkan sebagai berikut:

Below is a more detailed description of IP-IMS implementation process:



SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI INDONESIA POWER (IP-IMS)
INDONESIA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM (IP-IMS)

Hirarki Dokumen IP-IMS
Hierarchy of IP-IMS Documents

Hirarki Dokumen IP-IMS disusun ke dalam 4 (empat) level yang digambarkan sebagai berikut:

The hierarchy of IP-IMS Documents is put into four levels, described as follows:

1. **InPower ISM (*Integrated System Manual*)**
2. **InPower ISPM (*Integrated Procedure Manual*)**
3. **InPower *Related Document***
4. **InPower *Record Document***

Level	Nama Dokumen Document Name	Keterangan	Description
I	Manual IP-IMS (*In Power Integrated System Manual*) Manual IP-IMS (In Power Integrated System Manual)	Berisi deskripsi unsur-unsur utama dari sistem manajemen dan interaksinya, dan pedoman dokumen terkait, pengelolaan aset Perusahaan, kebijakan, strategi, dan sasaran Perusahaan yang susunan urutan pembahasannya mengacu ke PAS 99. Dokumen yang berisi di dalamnya berupa uraian mengenai: 1. Lembar kendali, 2. Ruang Lingkup, 3. *Cross Reference,* 4. Istilah dan Definisi, 5. Profil Organisasi, 6. Kepemimpinan, 7. Perencanaan, 8. Pendukung, 9. Operasi, 10. Evaluasi Kinerja, 11. Peningkatan, 12. Lampiran-lampiran.	Contains the main elements of management system and its interaction, as well as related documents, company asset management, policies, strategies, and goals, whose discussion order is based on PAS 99. Document that contains description on: 1. Control sheet, 2. Scope, 3. Cross Reference, 4. Terms and Definitions, 5. Organization Profile, 6. Leadership, 7. Planning, 8. Supports, 9. Operations, 10. Performance Evaluation, 11. Improvement, 12. Appendices.
II	Prosedur IMS (In Power *Integrated Procedure Manual*) Prosedur IMS (In Power Integrated Procedure Manual)	Berisi prosedur-prosedur terdokumentasi dan/ atau kriteria operasi. Jika tidak terdapat prosedur tersebut dapat menyebabkan kegagalan untuk mencapai kebijakan sistem, strategi sistem, sasaran sistem (termasuk pengelolaan aset) atau untuk mengendalikan identifikasi risiko sistem. Dokumen yang berisi sekumpulan rincian prosedur beserta lampirannya, sebagai bukti dari implementasi kebijakan. Dengan ketentuan sebagai berikut: - Disusun oleh satu level di bawah pemilik diagram konteks, - Diperiksa oleh pemilik diagram konteks, - Disahkan oleh *Management Representative*.	Contains documented procedures and/ or operational criteria. The absence of such procedures may result in the failure in realizing system policies, system strategies, system goals (including asset management), or in controlling system risk identification. Document that contains a collection of procedure details and appendices, serving as proof of policy implementation. The following terms apply: - Prepared by one level below context diagram owner, - Examined by context diagram owner, - Authorized by Management Representative.

Level	Nama Dokumen Document Name	Keterangan	Description
III	In Power *Related Document*/ Dokumen Referensi In Power Related Document/ Reference Document	Dokumen yang digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan sebuah proses kerja termasuk didalamnya antara lain dokumen referensi (SK dan SE), IK, Juknis, PROTAP, *manual book*, gambar, BPM ICoFR dll.	Documents used to guide the implementation of a work process, which includes, among others, reference documents (Decrees and Circulars), Work Instruction, Technical Instruction, Standard Operating Procedure, manual book, illustration, BPM ICOGR, etc.
IV	In Power *Record Document*/ Dokumen Catatan atau Rekaman In Power Record Document/ Note or Record Document	Dokumen yang berisikan formulir, dokumen dan yang sejenisnya, sebagai bukti bahwa suatu aktivitas dilaksanakan. Manajemen Indonesia Power menetapkan dan memelihara rekaman yang diperlukan untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan sistem (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, ISO 45001, ISO 55001, ISO 50001, SMK3, ISO 27001, ISO 37001, dan ISO 22301). Rekaman harus dapat dibaca, teridentifikasi dan terlacak. Rekaman dipelihara sesuai dengan persyaratan IP-IMS dan jenis catatannya.	Documents that contain forms, documents, and the likes, serving as proof of the implementation of a particular activity. Indonesia Power Management defines and maintains records required to demonstrate conformance to system requirements (ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, OHSAS 45001, ISO 55001, ISO 50001, SMK3, ISO 27001, ISO 37001, and ISO 22301). Records must be readable, identifiable, and traceable. Records must be maintained in accordance with IP-IMS requirements and by the types of record.

Untuk memastikan kesesuaian proses kerja aktual dengan dokumentasi IP-IMS yang tersedia, Indonesia Power mengkaji ulang isi dokumen IP-IMS ini secara berkala minimal setiap satu tahun sekali. Kaji ulang mencakup kaji ulang dokumen, audit sistem dan tinjauan manajemen dengan lingkup kebijakan, sasaran dan proses-proses di dalamnya untuk menjamin efektivitas dan konsistensi kebijakan dan rencana bisnis perusahaan, dan merespon terhadap perubahan harapan pelanggan, perundang-undangan persyaratan lainnya, tata kelola perusahaan serta dan perkembangan ilmu pengetahuan dan eknologi untuk relevansi dan konsistensi terhadap perencanaan strategi Perusahaan.

To ensure conformance between actual work processes and available IP-IMS documentation, Indonesia Power periodically re-assesses the content of IP-IMS documents once a year. The re-assessment includes document re-assessment, system audit, and management review in terms of the policies, goals, and processes contained within, in order to ensure the effectiveness and consistency of Company policies and business plans as well as to respond to changes in customer expectation, other legislative requirements, corporate governance, and science and technology development for relevance and consistency with the Company's strategy planning.

RISET DAN INOVASI TEKNOLOGI PEMBANGKITAN
DEVELOPMENT AND INNOVATION OF POWER GENERATION TECHNOLOGY

Riset dan inovasi pembangkitan menjadi hal yang penting mengingat bidang usaha yang dijalankan Perusahaan terutama memproduksi energi listrik. Keandalan pembangkit menjadi salah satu tujuan dalam operasional Indonesia Power dalam penyediaan energi listrik. Bahkan di bidang jasa, Perusahaan juga mengoperasikan dan melakukan perawatan pembangkit.

Development and innovation of power generation technology is crucial for the Company's line of business, i.e. electricity production. Power plant reliability comes as one of Indonesia Power's operational objectives in the provision of electricity. In service sector, the Company also operates and conducts power plant maintenance.

Program Riset/ Penelitian Teknologi Pembangkit
Research Program on Power Generation Technology

Pada tahun 2021 Indonesia Power menyusun program riset/ penelitian teknologi pembangkit di beberapa unit pembangkit diantaranya:

In 2021, Indonesia Power prepared power generation research programs at several power generation units, among others:

Program Riset Teknologi Energi Terbarukan
Renewable Energy Technology Development Program

Co-firing Biomass
Biomass Cofiring

Rangkaian pengujian *co-firing* biomassa sebagai bahan bakar alternatif pengganti sebagian batubara di berbagai jenis PLTU yang dikelola oleh Indonesia Power. Program ini dilakukan di seluruh PLTU dengan biaya sebesar Rp50 juta s.d Rp80 juta per pengujian. *Output* dari program ini adalah kesiapan PLTU untuk beroperasi *co-firing* dengan biomassa pada persentase tertentu untuk bauran energi terbarukan.

Series of biomass co-firing were tested as alternative fuel to coal in various SPP managed by Indonesia Power. This program was conducted at all SPP with a budget of Rp50 million to Rp80 million per test. The output of this program is SPP readiness to operate co-firing with biomass at certain percentage for renewable energy mix.





Pilot Plant Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP)
Solid Recovered Fuel (SRF) Pilot Plant

Pilot Plant Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) merupakan proses pengolahan sampah perkotaan menjadi bahan bakar jumputan padat sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk *co-firing* di PLTU. Program ini dilakukan di Cilegon dengan biaya Rp500 juta s.d. Rp700 juta per *pilot plant*. *Output* dari program ini adalah tersedianya BBJP sebagai bahan bakar *co-firing* PLTU dan penuntasan masalah sampah perkotaan.

Solid Recovered Fuel (SRF) Pilot Plant is processing urban waste process into refuse derived fuel in accordance with Indonesian National Standard (SNI) for co-firing at SPP. This program was conducted in Cilegon with a budget of Rp500 million to Rp700 million per pilot plant. The output is the availability of SRF as co-firing fuel and to mitigate urban waste problem.





Program Riset Teknologi Lainnya
Other Technology Development Programs

Mini Plant Garam
Mini Salt Plant

Mini Plant Garam merupakan program pemanfaatan *Brine Water Desalination Plant* menjadi garam industri bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Program ini dilakukan di Suralaya PGU dengan biaya Rp500 juta s.d. Rp1 miliar. *Output* dari program ini adalah kajian kelayakan produksi garam dari *Brine Water* secara komersial.

Mini Salt Plant is a program to convert Brine Water Desalination Plant into industrial salt in collaboration with the Indonesian National Research and Innovation Agency (BRIN). This program was conducted at Suralaya PGU with a budget of Rp500 million to Rp1 billion. The output of this program is a commercial feasibility study of salt production from Brine Water.





RISET DAN INOVASI TEKNOLOGI PEMBANGKITAN
DEVELOPMENT AND INNOVATION OF POWER GENERATION TECHNOLOGY

Produksi Oksigen dari Hidrogen *Plant*
Oxygen Production from Hydrogen Plant

Program ini merupakan program pemanfaatan Oksigen (O_2) yang terbuang dari Hidrogen (H_2) plant untuk keperluan O_2 medis. Program ini dilakukan di Priok POMU dengan biaya Rp400 juta. *Output* dari program ini adalah untuk produksi O_2 yang berkelanjutan.

This program utilizes Oxygen (O_2) released from Hydrogen (H_2) plant for medical purposes. The program was conducted at Priok POMU with a budget of Rp400 million. The output of this program is for sustainable O_2 production.





Inovasi Teknologi Pembangkitan
Power Generation Technology Innovations

Indonesia Power senantiasa melakukan inovasi-inovasi dalam kategori pembangkitan, *technical supporting*, dan *non-technical supporting* secara rutin untuk mengefisiensikan proses kerja guna pembangkit yang lebih andal. Beberapa inovasi unggulan di tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

Indonesia Power constantly innovates in power generation, technical supporting, and non-technical supporting with the aim at improving the efficiency and reliability of power plants. The following top innovations were made in 2021:

Inovasi Optimasi Pembakaran Batubara
Coal Optimization Innovations

Inovasi ini berjudul "Optimasi Pembakaran Batubara Kalori Rendah dengan D-CosT (*Digital Combustion Tuning*)" dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menghemat biaya komponen C (biaya bahan bakar) dari sisi peningkatan efisiensi *boiler*/penurunan *heat rate* pembangkit,
2. Meningkatkan citra perusahaan sebagai unit jasa pembangkitan yang terkemuka,
3. Salah satu upaya mendukung pencapaian PROPER dengan konservasi energi,
4. Mendukung Tranformasi PLN, yaitu aspirasi *Lean* pada terobosan digitalisasi pembangkit dan optimasi energi primer.

Inovasi ini mendapatkan **"Juara 1"** dalam **Seleksi Penghargaan Karya Inovasi PT PLN (Persero) ke-XXIV Tahun 2021** dan **"Juara 1"** dalam **Rekinnovation 2021**.

The innovation titled "Optimization of Low Calories Coal with a D-CosT (Digital Combustion Tuning)" aims at:

1. Saving the cost of C component (fuel cost) by improving boiler efficiency/reducing plant's heat rate,
2. Improving the company's image as a leading power generation service unit,
3. Supporting PROPER efforts with energy conservation,
4. Supporting PLN's Transformation, i.e. Lean aspiration on power generation digitization and primary energy optimization.

This innovation won the **"First Winner"** in **the 24th Seleksi Penghargaan Karya Inovasi PT PLN (Persero) 2021** and **"First Winner"** in **Rekinnovation 2021.**





Dari inovasi ini memiliki manfaat secara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut:

1. Kuantitatif: Penghematan sebesar Rp20,28 miliar/tahun dengan setara penurunan BPP sebesar Rp1,41/kWh.
2. Kualitatif:
   - Sebagai *leading* indikator dalam optimasi pembakaran *boiler*,
   - Mempermudah pekerjaan tim operasi unit dan energi primer,
   - Mempermudah identifikasi malfungsi pada peralatan di boiler baik dari sistem kontrol maupun mekanik.

The following are the quantitative and qualitative benefits of this innovation:

1. Quantitative: Cost saving at Rp20.28 billion/year cost, equivalent to decreased power plant production cost at Rp1.41/kWh drop.
2. Qualitative:
   - As a leading indicator in boiler combustion optimization,
   - Simplifying operation of primary unit and energy team,
   - Facilitating the identification of malfunction in equipment of boiler, both control and mechanical systems.

Inovasi Peningkatan Performa Generator

Innovation in Improved Performance of Generator

Inovasi ini berjudul **"Modifikasi *Axial Spacer End Winding* untuk Meningkatkan Performa *Generator* PLTU Lontar"** dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendukung Transformasi PLN Power *Beyond Generations*, yaitu *Innovative, Customer Focused* dan *Lean*,
2. Meningkatkan keandalan unit dengan menurunkan potensi kerusakan yang diakibatkan oleh deformasi *coil*,
3. Menjaga ketersediaan pasokan listrik untuk pelanggan Indonesia Power.

Inovasi ini mendapatkan "**Juara 3**" dalam **Seleksi Penghargaan Karya Inovasi PT PLN (Persero) ke-XXIV Tahun 2021**.

This innovation titled **"Axial spacer End Winding Modification to Improve Performance of SPP Lontar's Generator"** aims at:

1. Supporting PLN Power beyond Generation Transformation, i.e. innovative, Customer Focused, and Lean ,
2. Improving reliability of the unit by reducing the potential for damage due to coil deformation,
3. Maintaining electricity supply availability for Indonesian Power customers.

This innovation won the **"Third Winner"** in the **24th *Seleksi Penghargaan Karya Inovasi* PT PLN (Persero) of 2021.**

RISET DAN INOVASI TEKNOLOGI PEMBANGKITAN
DEVELOPMENT AND INNOVATION OF POWER GENERATION TECHNOLOGY





Dari inovasi ini memiliki manfaat secara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut:

1. Kuantitatif: Penghematan yang didapat oleh perusahaan dengan mengimplementasikan inovasi modifikasi *axial spacer*, yaitu Rp244,06 miliar.
2. Kualitatif:
   - Inovasi modifikasi bisa dijadikan referensi perbaikan untuk pembangkit lain yang memiliki *generator* dari manufaktur yang sama,
   - Menumbuhkan sikap percaya diri, keyakinan, dan kemandirian Indonesia Power khususnya, dan umumnya lingkungan PLN Grup mampu memperbaiki gangguan *rotor* manufaktur dari China yang sudah banyak terpasang di Indonesia,
   - Modifikasi merupakan langkah inovatif agar peralatan mampu beroperasi dengan andal dan memiliki *life time* lebih lama.

The following are the quantitative and qualitative benefits of this innovation:

1. Quantitative: The Company saved Rp244.06 billion by implementing axial spacer modification innovation.

2. Qualitative:
   - Modification innovations can be used as a reference for any other power generation that is equipped with generator from the same manufacturer,
   - Promoting self-confidence, determination, and independence in Indonesia Power in particular, and PLN Group environment in general can fix the disruptions of manufacturing rotor from China installed in Indonesia,
   - Modifications are innovative measures enabling the equipment to operate reliably and have longer life time.

Inovasi Optimasi Interval Pemeliharaan
Innovation in Maintenance Interval Optimization

Inovasi ini berjudul "**Optimasi Interval Pemeliharaan dengan *Geothermal Analysist Engineering Software* (GAES)**" dengan tujuan sebagai berikut:

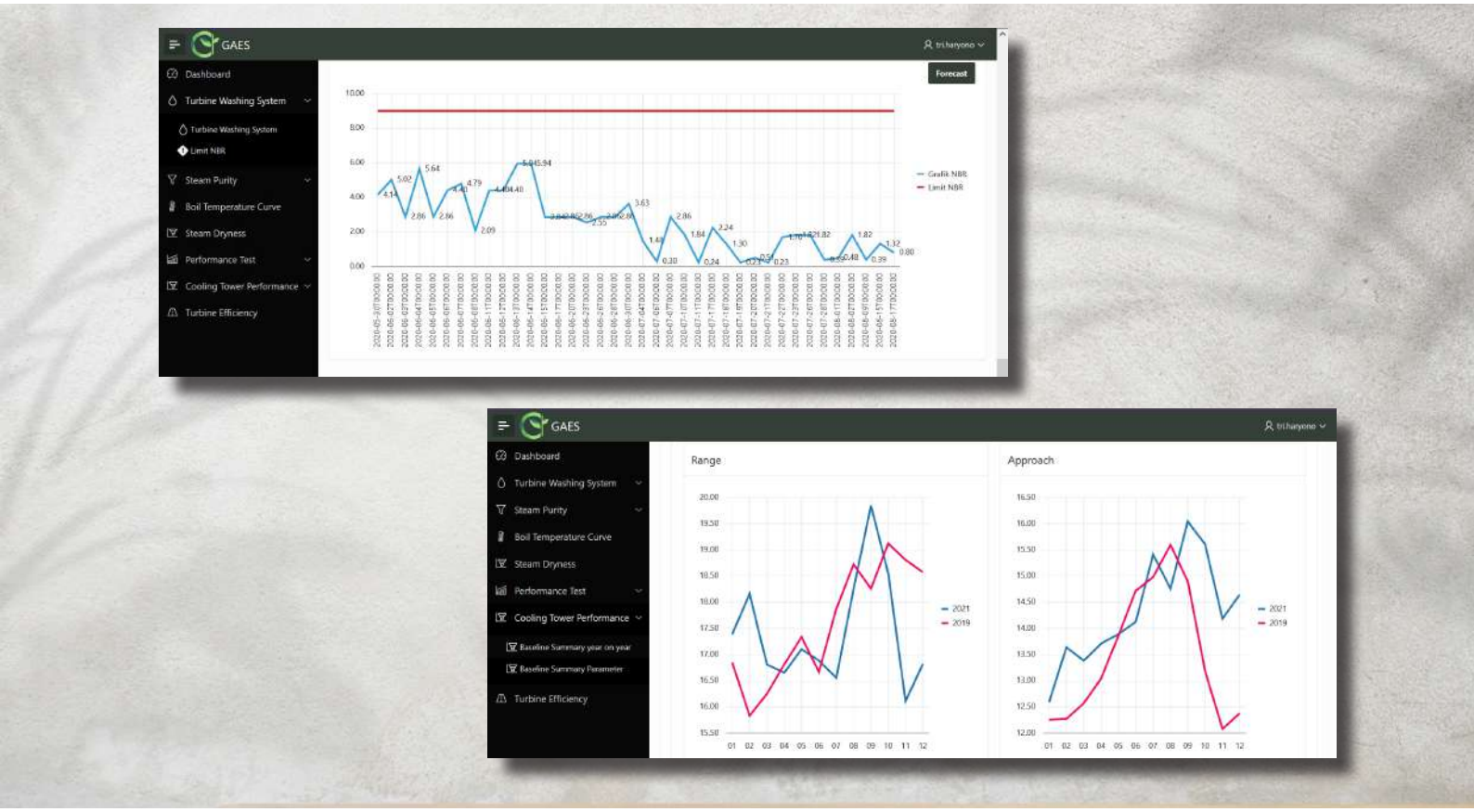
1. Meningkatkan keandalan kinerja Unit dan menekan kerugian ekonomi, *energy losses,* dan menghindari membengkaknya biaya perawatan peralatan unit PLTP Kamojang POMU,
2. Mendukung Program Budaya Ceria dan Eksekusi Ekselen Kamojang POMU,
3. Menjawab Tantangan IP Great Light UP 4.0.

Inovasi ini mendapatkan "***Gold Medal***" dalam **International Invention, Innovation, and Technology Exhibition (ITEX) Malaysia 2021** dan "***Silver Medal***" dalam **ASIAN Power Award kategori *Geothermal Power Project of The Year*.**

This innovation titled **"Optimization of Maintenance Interval with Geothermal Analyst Engineering Software (GAES)"** aims at:

1. Improving Unit performance reliability and reducing economic, energy losses, and avoid the growing costs of Kamojang POMU GPP equipment maintenance,
2. Supporting Budaya Ceria Program and Execution of Kamojang POMU Excellent,
3. Responding to IP Great Light UP 4.0.

These innovations receive **"Gold Medal"** in **International Invention, Innovation, and Technology Exhibition (ITEX) of Malaysia 2021** and **"Silver Medal"** in **THE ASIAN Power Award in the category of Geothermal Power Project of The Year.**



Dari inovasi ini memiliki manfaat secara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut:

1. Kuantitatif: Total penghematan yang dilakukan sebesar Rp299,27 juta atau berpotensi menghemat Rp239,27 juta per pelaksanaan *turbine washing*.
2. Kualitatif:
   - Memudahkan perhitungan *Nozzle Block Ratio* (NBR),
   - Memudahkan monitoring pelaksanaan *turbine washing* terintegrasi di Unit,
   - Meningkatkan keandalan kinerja Unit dan menekan kerugian ekonomi, *energy losses*, dan menghindari membengkaknya biaya perawatan peralatan unit PLTP Kamojang POMU.

The following are the quantitative and qualitative benefits of this innovation:

1. Quantitative: The Company saved Rp299.27 million in total or potentially saved Rp239.27 million per turbine washing.

2. Qualitative:
   - Facilitating the calculation of Nozzle Block Ratio (NBR),
   - Facilitating integrated turbine washing monitoring in the Unit,
   - Improving Unit performance reliability and reducing economic, energy losses, and avoid the growing costs of Kamojang POMU GPP equipment maintenance,

Inovasi Pengembangan Rantai Pasokan BBJP

Innovation in SRF Supply Chain Development

Inovasi ini berjudul "**Pola Pendekatan Stakeholder dalam Pengembangan Rantai Pasokan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) untuk *Co-firing***" dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan portofolio Indonesia Power sebagai perusahaan yang *green* dan ramah lingkungan, dan secara umum berdampak domino untuk PLN Group sebagai perusahaan induk.
2. Mendukung salah satu pilar Transformasi PLN, yaitu *Green*.

This innovation titled **"Stakeholder Approach Pattern in Solid Recovered Fuel (SRF) Supply Chain Development for Cofiring"** aims at:

1. Improving Indonesia Power's portfolio as green and environmentally-friendly company, which generally has affected PLN Group as the main company.

2. Supporting one of PLN Transformation pillars, i.e. Green.

RISET DAN INOVASI TEKNOLOGI PEMBANGKITAN
DEVELOPMENT AND INNOVATION OF POWER GENERATION TECHNOLOGY





Dari inovasi ini memiliki manfaat secara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut:

1. Kuantitatif: Manfaat finansial dari BBJP ini didapatkan dari potensi harga penjualan BBJP ke PLTU melalui sampah yang merupakan produk sisa dengan Proyeksi Manfaat Finansial Produksi BBJP Kapasitas 100 Ton per hari selama 15 tahun sebesar Rp6,00 miliar.
2. Kualitatif:
   - Turut berpartisipasi dalam pemenuhan bauran EBT nasional melalui kegiatan *co-firing* yaitu dari sisi penyediaan bahan bakar alternatif,
   - Salah satu solusi untuk masalah manajemen sampah di daerah,
   - Meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di sekitar lokasi produksi BBJP,
   - Membuka pintu kerja sama sinergi antar instansi pemerintah,
   - Memberikan jaminan pasokan BBJP baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun kesesuaian harga untuk *co-firing.*

The following are the quantitative and qualitative benefits of this innovation:

1. Quantitative: The financial benefits of SRF would be obtained from the potential selling price of SRF to SPP through waste, i.e. a waste product, with Projected Financial Benefits of SRF Production Capacity of 100 Tons per day for 15 years of Rp6.00 billion.
2. Qualitative:
   - Participating in meeting national NRE mix through co-firing activities, i.e. in terms of alternative fuel supply,
   - A solution to local waste management issue,
   - Improving job opportunities for the public or Non-Governmental Organizations (NGOs) around the production site of the SRF;
   - Promoting synergy-between government agencies,
   - Ensuring SRF supplies in terms of quantity, quality, and also price compliance for co-firing.

Inovasi Percepatan Implementasi PV *Rooftop*

Innovation in Accelerating implementation of PV Rooftop

Inovasi ini berjudul "Terobosan Skema Bisnis dalam Percepatan Implementasi PV *Rooftop*" dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengurangi biaya pemakaian sendiri yang sebelumnya harus membayar ke PLN akibat pemakaian impor kWh,

This innovation titled "groundbreaking Business Scheme in Acceleration of PV rooftop" aims at:

1. Reducing costs of previous internal use due to PLN for the import duty of kWh,

2. Meningkatkan kompetensi karyawan karena proses implementasi inovasi PLTS PV *Rooftop* melibatkan karyawan dengan tingkat *performance rate* yang tinggi,
3. Mengembangkan anak perusahaan dengan memiliki portofolio pemasangan PLTS PV *Rooftop* dengan optimal,
4. Mendukung pilar *Green* dalam program Transformasi PLN.

2. Improving employee competency due to implementation of SoPP PV Rooftop innovation process that involves employee with high level of performance,
3. Developing subsidiary with optimal Solar Power Plant PV Rooftop installation portfolio,
4. Supporting the Green pillar in PLN Transformation program.





Dari inovasi ini memiliki manfaat secara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut:

1. Kuantitatif: Manfaat finansial yang didapatkan dari uji implementasi PLTS PV *rooftop* di Bali PGU selama satu tahun kerja adalah sebesar Rp181,33 juta/tahun atau sebesar Rp2,72 miliar selama kontrak kerja 15 Tahun.
2. Kualitatif:
   - Adanya peningkatan kompetensi EPC dan OM pada PV rooftop ditandai nilai *performance ratio* mencapai 0,89,
   - Mampu menaikkan citra Perusahaan sebagai perusahaan yang mendukung *Green Energy*,
   - Mendukung pencapaian PROPER Emas,
   - Menambah Portfolio Perusahaan dalam pemasangan PLTS PV *Rooftop*.

The following are the quantitative and qualitative benefits of this innovation:

1. Quantitative: The financial benefits from the implementation test of Solar Power Plant PV rooftop in PGU Bali for one year would be Rp181.33 million/year or Rp2.72 billion during the 15-year work contract.
2. Qualitative:
   - Improved EPC and OM competence in PV rooftop with performance ratio of 0.89,
   - Successfully improving the company's image as a company supporting Green Energy
   - Supporting the achievements of the Gold PROPER,
   - Expanding the Company's Portfolio by installing Solar Power Plant PV rooftop.

ASET PEMBANGKITAN
POWER GENERATION ASSETS

Indonesia Power bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, sehingga aspek tata kelola dan pemeliharaan pembangkit menjadi hal yang sangat diperhatikan demi tercapainya keandalan pembangkit untuk memenuhi target produksi tenaga listrik yang telah ditetapkan.

As a company engaging in electricity power generation, Indonesia Power pays great attention to power plant governance and maintenance in order to meet the reliability that satisfies the set target of electricity production.

Aset Pembangkitan *Exsisting*
Existing Power Generation Assets

Aset Pembangkit yang dimiliki oleh Indonesia Power meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Sampai dengan tahun 2021, Indonesia Power memiliki pembangkit yang sudah beroperasi sebanyak 45 pembangkit *existing*.

Indonesia Power's existing power generation assets include Steam Power Plants (SPP), Gas Turbine Power Plants (GTPP), Combined Cycle Power Plants (CCPP), Hydro Power Plants (HPP), Diesel Power Plants (DPP), and Geothermal Power Plants (GPP). As of 2021, 45 Indonesia Power's existing power plants have been operating.

Proyek Pengembangan Pembangkitan
Power Generation Development Project

Selain berfokus pada pengelolaan pembangkit *existing*, Indonesia Power sampai dengan tahun 2021 melakukan pengembangan pembangkit berikut:

In addition to focusing on the management of existing power plants, as of 2021, Indonesia Power was involved in the following power generation development projects:

Progress Proyek Pembangkit
Progress of Power Plant Projects

No	Nama Proyek Name of Project	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Tahap Proyek di tahun 2021 Project Stage in 2021
1.	PLTD DPP Senayan Jakarta	101	Operation
2.	*Add on* Grati Blok 2	183	Operation
3.	MPP Biak 2	10	Operation
4.	MPP Manokwari 2	20	Operation
5.	MPP Merauke 2	20	Operation
6.	MPP Nabire 2	10	Operation
7.	MPP Sorong	50	Operation
8.	MPP Timika	10	Operation
9.	PLTU Kalbar 1 SPP West Kalimantan 1	2x100	Operation
10.	PLTGU CCPP Jawa Bali 1 (Tambak Lorok Blok 3)	779	Construction

No	Nama Proyek Name of Project	Kapasitas Terpasang (MW) Installed Capacity (MW)	Tahap Proyek di tahun 2021 Project Stage in 2021
11.	PLTU Jawa 9-10 Suralaya SPP Java 9-10 Suralaya	2x1.000	Construction
12.	BMPP Sulselbar/Kolaka I BMPP South and West Sulawesi/Kolaka I	60	Construction
13.	BMPP NTB (Sambelia) BMPP West Nusa Tenggara (Sambelia)	30	EPC Contract Signed
14.	BMPP Sulselrabar/Kolaka II BMPP South, Southeast, and West Sulawesi/Kolaka II	60	EPC Contract Signed
15.	PLTU SPP MT Jambi-1	2x300	Planning

Sedangkan untuk pengembangan pembangkit EBT adalah sebagai berikut:

Meanwhile, the followings are the NRE power plant projects implemented:

Progress Proyek Pembangkit EBT
Progress of NRE Power Plant Projects

No	Pengembangan Proyek Pembangkit Power Plant Project Development	Kapasitas (MW) Capacity (MW)	Tahap Proyek di tahun 2021 Project Stage in 2021
1.	PLTMH MHPP Gunung Wugul	2x1,5	Operation
2.	PLTA HPP Rajamandala	47	Operation
3.	PLTMH MHPP Lambur	2x4,0	Construction
4.	PLTMH MHPP Harjosari	3x3,3	Construction
5.	PLTMH MHPP Cileunca	2x0,5	Construction
6.	PLTA HPP Poigar 2	2x15	Proses PPA PPA Progress
7.	PLT Hybrid Nusa Penida Hybrid PP Nusa Penida	3,5	EPC *Tender* & Perizinan dan Penyediaan Lahan EPC Tender & Perizinan dan Penyediaan Lahan

Pengembangan pembangkitan EBT salah satunya adalah komitmen Indonesia Power dalam rangka menjaga mutu lingkungan. Terkait dengan andil dalam aspek lingkungan akan dijelaskan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sub Bagian Tanggung Jawab terhadap Lingkungan pada buku Laporan Tahunan ini.

The development of NRE power generation constitutes Indonesia Power's commitment in preserving the quality of environment. The Company's contribution to the environment will be explained in detail in the chapter of Corporate Social Responsibility sub-chapter Corporate Social Responsibility for the Environment of this Annual Report.

ASET PEMBANGKITAN
POWER GENERATION ASSETS

Program Pemeliharaan Pembangkit *Exsisting*

Existing Power Plants Maintenance Program

Pemeliharaan pembangkit menjadi sangat diperlukan sebagai upaya agar kandalan pembangkit terutama pembangkit eksisting Indonesia Power. Adapun pada tahun 2021 terdapat program pemeliharaan pembangkit adalah sebagai berikut:

1. Penggantian *tube boiler bank* PLTU,
2. Pergantian *partial tube boiler* PLTU,
3. *Retrofit* sistem kontrol *governor* unit pembangkit,
4. *Retrofit* sistem kontrol *Distributed Control System* (DCS).

Maintenance is highly crucial to protect the reliability of Indonesia Power existing power plants. The following are power generation maintenance program in 2021:

1. SPP bank boiler tube replacement,
2. SPP partial tube boiler replacement,
3. Retrofitting governor of power generation unit control system,
4. Retrofitting Distributed Control System (DCS) control system.

Penghargaan Bidang Keandalan Pembangkit

Awards for Power Plant Reliability

Pada tahun 2021 Indonesia Power memperoleh penghargaan dalam bidang keandalan pembangkit dari PLN diantaranya:

- Implementasi Automatic Generation Control (AGC) terbaik PLTGU Tambak Lorok Unit dengan Implementasi Anti Black Out (BO) Terbaik - JUARA 1,
- PLTDG Pesanggaran EFOR PLTG/MG/GU (Min. NCF 35%) - JUARA 3,
- PLTGU Priok Blok 4 EFOR PLTG/MG/GU (Min. NCF 35%) - JUARA 2,
- PLTU Adipala Keandalan Boiler Terbaik - JUARA 2,
- PLTU Lontar EAF PLTU Terbaik - JUARA 2,
- PLTU Pelabuhan Ratu EFOR PLTU Terbaik - JUARA 1,
- PLTU Pelabuhan Ratu EAF PLTU Terbaik - JUARA 3,
- PLTU Suralaya 1-7 EFOR PLTU Terbaik - JUARA 3.

In 2021, Indonesia Power earned awards for power plant reliability from PLN, these include:

- Best Automatic Generation Control (AGC) implementation CCPP Tambak Lorok Unit with Best Anti-Black Out (BO) Implementation - 1st Place,
- DGPP Pesanggaran for GTPP/GEPP/CCPP EFOR (Min. NCF 35%) - 3rd Place,
- CCPP Priok Blok 4 for GTPP/GEPP/CCPP EFOR (Min. NCF 35%) - 2nd Place,
- SPP Adipala for Best Boiler Reliability - 2nd Place,
- SPP Lontar for Best SPP EAF - 2nd Place,
- SPP Pelabuhan Ratu for Best SPP EFOR - 1st Place,
- SPP Pelabuhan Ratu for Best SPP EAF - 3rd Place,
- SPP Suralaya 1-7 for Best SPP EFOR - 3rd Place.




PRIOK POMU
NOVARINO H.M



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

TINJAUAN INDUSTRI
INDUSTRY OVERVIEW

Analisis Perekonomian Dunia
Global Economic Analysis

Pandemi CoronaVirus Disease-2019 (Covid-19) yang terjadi pada pertengahan tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi global mengalami ketidakpastian dan terkontraksi di tahun tersebut. Hadirnya vaksin di awal tahun 2021 menjadi titik terang dan harapan akan pemulihan pandemi Covid-19. Hal ini menjadi dasar tahap awal pemulihan perekonomian global yang terjadi di tahun ini. Hadirnya vaksin diharapkan dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan roda perekonomian kembali bergerak sebagaimana mestinya.

The Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) outbreak in mid-2020 resulted in uncertainties in and contractions to the global economic growth. The discovery of vaccine at the beginning of 2021 has shown a glimmer of hope for recoveries post-Covid-19. This is the basis for the initial stage of the global economic recovery of the year. The vaccine becomes the hope for suppressing the spread of the disease, returning public and economic activities back to normal.

Pemulihan ekonomi global menunjukkan peningkatan mobilitas masyarakat di tahun 2021 dan mendukung peningkatan aktivitas perekonomian yang ditandai dengan laju ekspansif dari *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur dan servis. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut terutama didorong oleh pelonggaran kebijakan *lockdown* dari Pemerintah berbagai negara seiring dengan penurunan kasus Covid-19 dan adanya vaksinasi. Keadaan tersebut menyebabkan aktivitas produksi dan manufaktur global mengalami tren yang meningkat. Meskipun demikian, tantangan terhadap pemulihan ekonomi dunia masih ada dari hadirnya varian baru Covid-19. Terkini, muncul varian baru yang disebut sebagai Omicron. Varian ini ditemukan pertama kali pada 24 November 2021 di Afrika Selatan.

The global economic recovery in 2021 demonstrated a rise in public mobility and economic activities, as proven by a boost in the Purchasing Managers' Index (PMI) of manufactures and services. The increase in public activities was mainly a result of the loosening of restrictions by a number of countries alongside declining Covid-19 cases and vaccine availability. The situation has resulted in the increase in manufacturing and production activities across the globe. Despite this, the global economic recovery is still challenged by the emergence of new variants of Covid-19. Omicron, the latest variant of the disease was first discovered in South Africa on November 24, 2021.

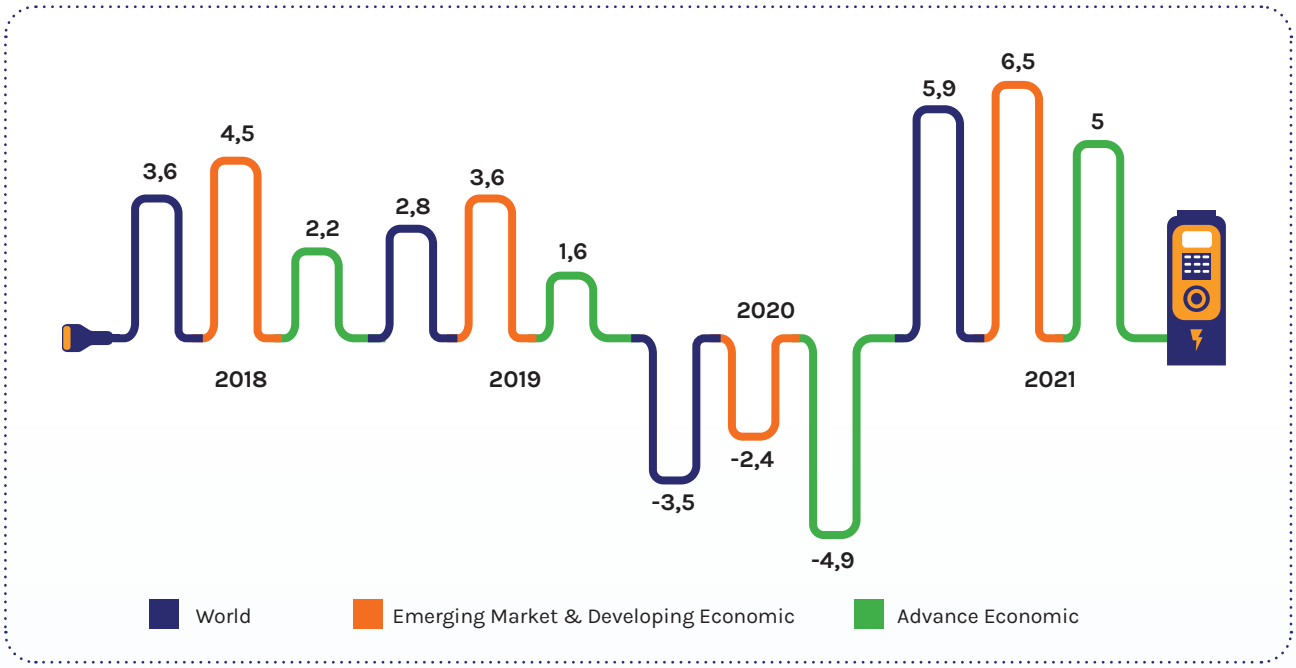
Selain dinamika perkembangan pandemi, pemulihan ekonomi global yang berlanjut pada tahun 2022 turut diwarnai tantangan lain yang hadir sejak pertengahan Quartal 3 tahun 2021. yaitu krisis energi global. Pada Agustus 2021 lalu, krisis energi terjadi dimulai di Inggris, harga gas alam di negara tersebut mengalami lonjakan harga yang signifikan. Kirisis energi dipengaruhi oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi seiring dengan pemulihan ekonomi sehingga permintaan gas alam untuk kegiatan produksi meningkat cukup tajam. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan *supply* gas alam yang memadai, bahkan saat itu Rusia menurunkan *supply* gas alamnya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang substitusi gas alam yaitu komoditas lain seperti batu bara, sehingga mengakibatkan peningkatan harga pada komoditas lain. Tren pemulihan ekonomi global juga mendapatkan tantangan dari disrupsi rantai pasok global yang sedang terjadi. *Shut down* sementara akibat pandemi yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang logistik menjadi penyebab disrupsi rantai pasok dimana peningkatan permintaan dunia tidak dapat diimbangi kesiapan pengiriman barang akibat belum normalnya aktivitas perusahaan pengiriman barang. Peningkatan permintaan barang dan belum normalnya aktivitas pengiriman barang menyebabkan naiknya biaya pengiriman (*shipping costs*).

Apart from the dynamics caused by the pandemic, the global economic recovery which has been going on through 2022 was faced with another challenge since mid Q3 of 2021: global energy crisis. In August 2021, the energy crisis emerged in the United Kingdom, which saw a very significant increase in natural gas price. The energy crisis was caused by increasing economic activities along with the economic recovery, resulting with a surge in natural gas demands for production activities. The gas supply, however, failed to meet the increasing demands. It was also a time when Russia reduced is natural gas supply. Such a situation resulted in increased demands for natural gas substitutes such as coal, which consequently gave rise to the price of other commodities. The global economic recovery was also challenged by the disruption in global supply chain. Temporary shutdowns taken place in logistics companies due to the pandemic caused a disruption in supply chain. A surge in global demands was unable to satisfy due to limited activities of freight forwarders. The rise in demands of goods and abnormal activities of freight forwarders has resulted in an increase in shipping costs.

Kembali mengulas perkembangan perekonomian dunia, berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) *Update* Januari 2022 mencatatkan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2021 adalah sebesar 5,9%. Angka ini sesuai dengan proyeksi IMF pada bulan Oktober 2021. Perkembangan tersebut didorong oleh akselerasi tingkat vaksinasi, stimulus kebijakan, dan pemulihan kegiatan ekonomi secara bertahap tidak hanya di Amerika Serikat dan Tiongkok, serta juga Negara-negara Eropa dan Asia lainnya. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebesar 5,6%, Negara Uni Eropa sebesar 5,2%, China sebesar 8,1%, dan India sebesar 9,0%.

In review of the global economic development, data from the International Monetary Fund (IMF) in the World Economic Outlook (WEO) Update January 2021 recorded 5.9% for the global economic growth in 2021. This was a match with IMF's projection in October 2021. The development was encouraged by accelerated vaccination, stimulus policy, and gradual recovery of economic activities not only in the United States and China, but also in other European and Asian countries. The economic growth rates in the United States, European Union, China, and India were 5.6%, 5.2%, 8.1%, and 9.0% consecutively.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Dunia Tahun 2018-2021 (%)
Trend of Global Economic Growth in 2018-2021 (%)



Sumber: *World Economic Outlook - International Monetary Fund* (IMF), 25 Januari 2022
Source: World Economic Outlook - International Monetary Fund (IMF), January 25, 2022

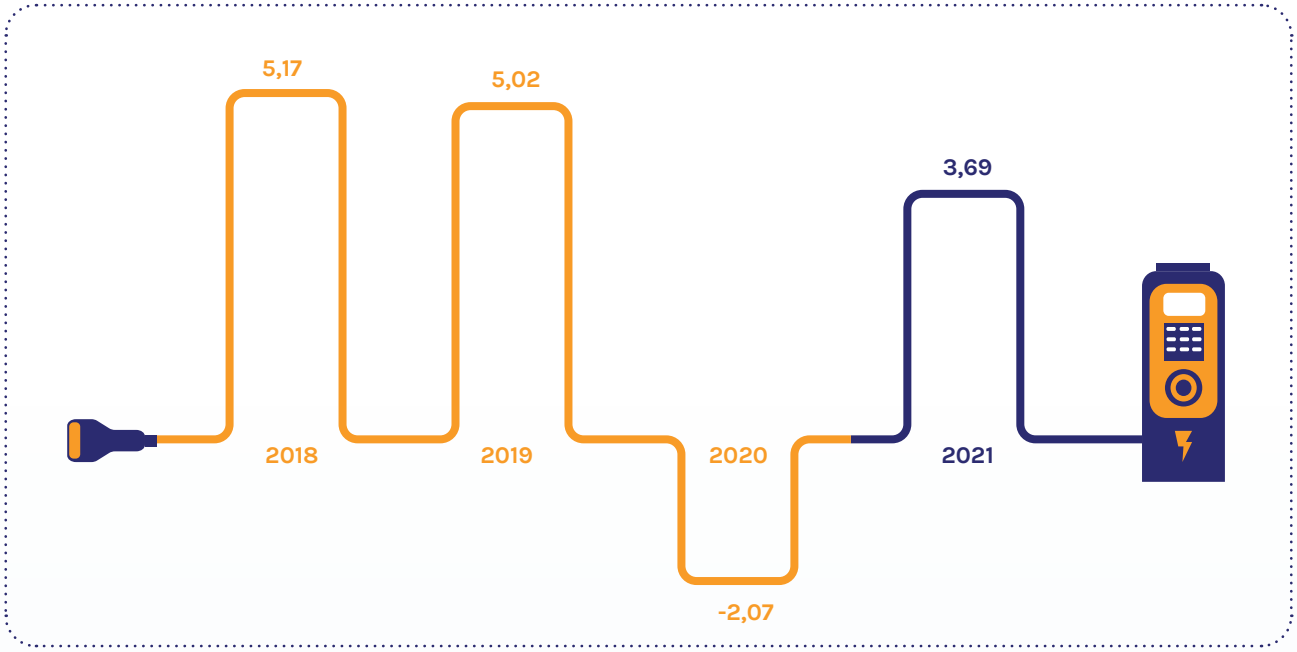
TINJAUAN INDUSTRI
INDUSTRY OVERVIEW

Analisis Perekonomian Indonesia
Indonesian Economic Analysis

Selama tahun 2021, sinyal pemulihan perekonomian dari efek pandemi Covid-19 mulai terlihat. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04%.

Throughout 2021, the economy has started to show a recovery from the impact of the Covid-19 pandemic. Indonesian economy in 2021 grew 3.69%, higher than the growth in 2020 which contracted to 2.07%. In terms of production, Healthcare Service and Social Activities sector saw the highest growth at 10.46%. Meanwhile, in terms of expense, Goods and Services Export sector saw the highest growth at 24.04%.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2018-2021 (%)
Trend of Indonesian Economic Growth in 2018-2021 (%)

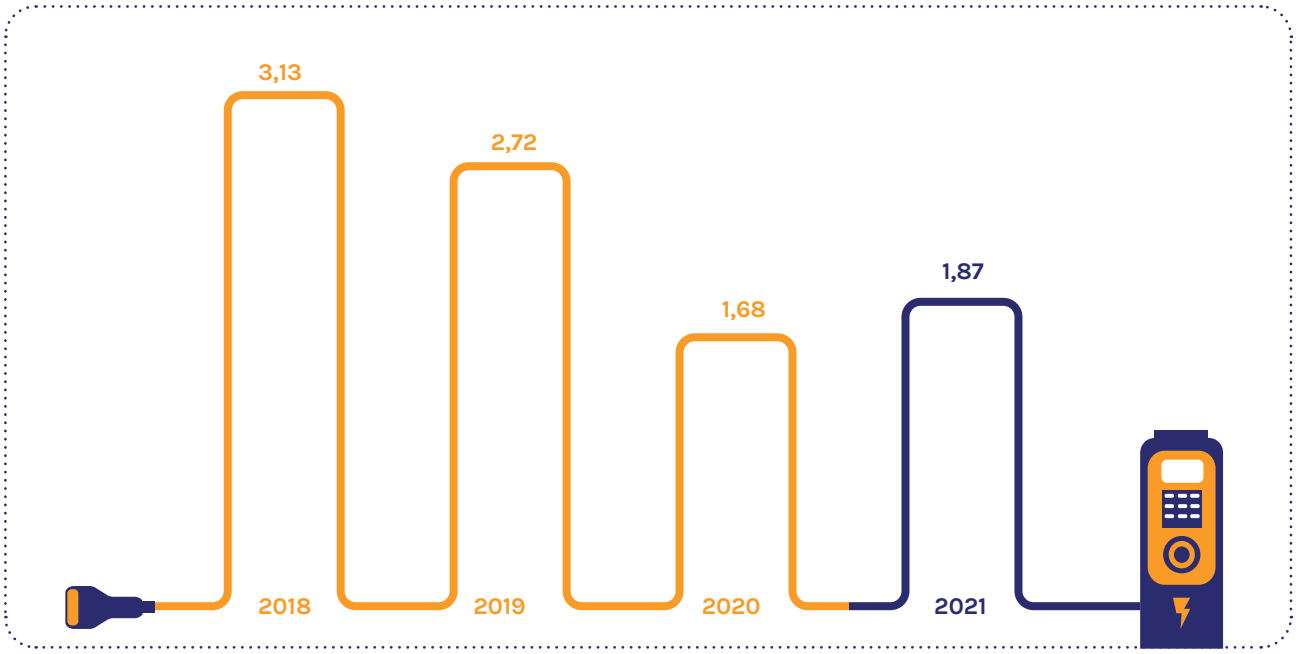


Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Februari 2022
Source: Press Release, Statistics Indonesia, February 2022

Sementara itu, kondisi inflasi pada Desember 2021 mengalami inflasi sebesar 0,57%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Namun secara umum, inflasi pada tahun 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran 3,0±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68% (yoy). Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19.

Meanwhile, Indonesia saw a 0.57% inflation in December 2021. Inflation takes place due to an increase in price, resulted from the increase in most of expense group indexes. However, in general, the inflation we saw in 2021 remained low and was under the targeted range of 3,0±1%. The inflation in Consumer Price Index (CPI) in 2021 was 1.87% (yoy), which was an increase from 2020's CPI at 1.68% (yoy). Such a low inflation was a result of low domestic demands as an impact of the Covid-19 pandemic.

Tren Laju Inflasi Tahun Kalender 2018-2021 (%)
Inflation Rate in Calendar Years of 2018-2021 (%)



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 2018-2021
Source: Press Release, Statistics Indonesia, 2018-2021

Kondisi Industri Listrik Indonesia

Indonesia's Power Industry Situation

Seiring dengan hadirnya vaksin di awal tahun 2021 dan juga semakin membaiknya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, kondisi perekonomian di Indonesia juga mengalami pertumbuhan, yang juga berdampak positif pada kenaikan *demand* listrik di Indonesia sebesar 4,97% pada tahun 2021, dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada pada posisi minus 12,58% di Sistem Jawa Bali. Kenaikan *demand* tersebut diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan sehubungan dengan target rasio elektrifikasi 100% di tahun 2022 oleh Kementrian ESDM, dimana kondisi hingga Maret 2021, rasio elektrifikasi adalah 99,28% dan rasio desa berlistrik adalah 99,59%. Selain itu, meningkatnya *trend* elektrifikasi di kalangan masyarakat atas penggunaan barang-barang yang menggunakan energi listrik, antara lain kompor listrik dan juga kendaraan listrik, berpotensi dapat menaikkan *demand* listrik di masa mendatang. Indonesia memiliki target Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

The discovery of Covid-19 vaccine in early 2021 and improvements in pandemic management in Indonesia have helped improving the economic situation, which in turn increasing electricity demands by 4.97%, compared to in 2020 which was at -12.58% for Java-Bali System. The increase in demands is estimated to continue along with the electrification ratio target of 100% by 2022 set by the Ministry of Energy and Mineral Resources. As of March 2021, the electrification ratio and electrified village ratio were 99.28% and 99.59%, consecutively. The increasing trend of electrification among the public for the use of electricity-fired goods such as electric stove and electric vehicles may also boost demands in the future.

TINJAUAN INDUSTRI
INDUSTRY OVERVIEW

sebesar 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Kebijakan ini, yang dipadukan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi hingga 29% pada tahun 2030 dan target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 untuk menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara masih mendominasi suplai energi listrik di Indonesia sedangkan pembangkit listrik EBT mengambil porsi 14,69% dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional. *Trend* penyediaan pembangkit listrik dalam 10 tahun terakhir mengindikasikan adanya komitmen pemerintah dalam menyediakan energi listrik yang lebih bersih, mulai dari menyediakan pembangkit listrik yang bersumber dari EBT, mengenalkan teknologi *Clean Coal Technology* (CCT), hingga mengenalkan pembangkit *Variable Renewable Energy* (VRE) yang memiliki karakteristik *intermittent*, dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Bersamaan dengan ini, untuk mencapai target NZE tahun 2060, Pemerintah telah menyusun *roadmap early retirement* pembangkit berbahan bakar fosil.

Indonesia targets 23% of new and renewable energy (NRE) portion in the national energy mix by 2025. The policy, along with Indonesia's commitment to reduce emission to 29% by 2030 and the net-zero emission (NZE) target by 2060 are the means toward clean and sustainable energy system. Coal-fired power plants remain dominating Indonesia's electricity power generation, while NRE power plants occupy 14.69% of the total power plant installed capacity nationally. The trend of electricity power generation in the past 10 years indicates the Government's commitment to providing cleaner electricity through the provision of NRE-based power plants, the introduction of Clean Coal Technology (CCT), and the introduction of intermittent Variable Renewable Energy (VRE) with the operation of Wind Power Plants (WPPs) and Solar Power Plants (SoPPs). Along the way, to accomplish the NZE target by 2060, the Government has devised the early retirement roadmap for fossil fuel-fired power plants.

Dengan bertambahnya VRE yang memiliki karakteristik *intermittent* yang dapat mengganggu stabilitas sistem kelistrikan di Indonesia, serta untuk melancarkan transisi energi dari pembangkit berbahan bakar fosil ke EBT, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*) yang harus dipenuhi oleh pembangkit yang akan ada di dalam sistem kelistrikan di Indonesia.

Intermittent in nature, the addition of VRE may disrupt the stability of Indonesian electricity system. Therefore, to address this issue as well as to expedite energy transition from fossil fuel to NRE, the Government has issued the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 20 of 2020 on Rules on Electricity System Network (Grid Code), to be complied by power plants integrated in Indonesian electricity system.

Kontribusi Indonesia Power terhadap Industri Listrik Nasional
Indonesia Power's Contribution to National Power Industry

Indonesia Power berkontribusi dalam industri listrik nasional dalam bidang penyediaan tenaga listrik, jasa *operation and maintenance* (O&M) dan solusi energi lainnya yang berkaitan dengan ketenagalistrikan. Sebagai salah satu Perusahaan pengelola berbagai jenis pembangkit (PLTU, PLTGU, PLTG, PLTA, PLTM, PLTD, PLTP dan PLTS) di Indonesia menjadikan pengalaman tersebut sebagai modal dasar dalam meraih peluang. Keunggulan tersebut perlu dikelola dan diciptakan strategi yang sesuai untuk dapat menghadapi tantangan dan persaingan yang makin ketat.

Indonesia Power contributes to the national electricity industry in electricity power generation and operations and maintenance (O&M) services as well as other energy solutions that relevant to electricity. As a company managing various types of power plants (Steam, Combined Cycle, Gas Turbine, Hydro, Mini Hydro, Diesel, Geothermal, and Solar Power Plants) in Indonesia, the Company saw this as an excellent opportunity. Such an advantage needs proper management and strategy to face increasingly strict challenges and competition.

Kontribusi Pengembangan Pembangkitan

Contribution in Power Generation Development

Dalam upaya memperkuat insfrastruktur kelistrikan yang mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia, Perusahaan sebagai *arm length* pertumbuhan PLN, berperan dalam menambah kapasitas pembangkit dengan melakukan pengembangan pembangkit listrik. Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah, misalnya dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta program 35.000 MW. Peran serta pengembangan pembangkit dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemanfaatan area pembangkit eksisting untuk pembangunan pembangkit baru yang akan dimiliki oleh perusahaan,
2. Mengikuti *tender Independent Power Producer* (IPP) yang diselenggarakan oleh PLN, bekerjasama dengan *investor/ developer* nasional maupun internasional.
3. Mengoptimalkan peran Anak Perusahaan dalam kontribusi pengembangan pembangkit.

Dari sisi pengembangan proyek dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi, pada tahun 2021 Indonesia Power telah menyelesaikan pembangunan pembangkit PLTU Kalbar 1 (200 MW), PLTM Gunung Wugul (3 MW), dan PLTS *Landbase* Grati (1,5 MWp) hingga pembangkit tersebut beroperasi secara komersial (*Commercial Operation Date* – COD).

In an effort to strengthen the electricity infrastructure that supports Indonesian economic growth, the Company, which is at arm's length with PLN, has a role in increasing power capacity by developing power plants. The expansion of power generation capacity is carried out in accordance with government policies, e.g. in the development of new and renewable energy (NRE), and the 35,000 MW program. The followings are the methods to develop power plants:

1. Utilizing existing power plant area for construction of new power plants that will be owned by the Company.
2. Participating in Independent Power Producer (IPP) bidding held by PLN, in collaboration with national and international investors/developers.
3. Optimizing Subsidiaries' roles in contributing to power plants development.

In terms of project development for realizing energy independence and security, in 2021 Indonesia Power has finalized the construction of SPP West Kalimantan 1 (200 MW), MHPP Gunung Wugul (3 MW), Landbase SoPP Grati (1.5 Mwp) until their Commercial Operation Date (COD).

Kontribusi Tenaga Listrik

Contribution of Electricity Power

Pada tahun 2021, pasokan (*supply*) energi listrik di sistem Jawa Bali meningkat 4,97% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 197.039 GWh di tahun 2021. Dari total pasokan tersebut, Indonesia Power memasok sebesar 18,99% atau sebesar 37.426 GWh, dimana hasil produksi ini dijual kepada induk Perusahaan yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *single buyer*. Jumlah energi listrik tersebut meningkat 13,01% dari tahun 2020 menjadi sebesar 37.426 GWh di tahun 2021. Sementara untuk pembangkit O&M kontribusi tahun 2021 menurun 11,23% dibandingkan tahun 2020 menjadi 14,57% di tahun 2021.

In 2021, the electricity supply to Java-Bali system increased 4.97% compared to in 2020, to 197,039 GWh. Indonesia Power occupied 18.99% or 37,426 GWh of the total count of supply, to be sold to the parent company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as the single buyer. The figure was an increase 13.01% from 2020, to 37,426 GWh in 2021. Meanwhile, the contribution of O&M power plants in 2021 decreased by 11.23%, to 14.57% in 2021.

TINJAUAN INDUSTRI
INDUSTRY OVERVIEW

Kontribusi Percepatan Bauran Energi Baru Terbarukan
Contribution to the New and Renewable Energy Mix Acceleration

Indonesia Power memiliki dan mengelola pembangkit dengan energi hijau dan bersih, antara lain berupa uap panas bumi pada PLTP, air pada PLTA dan PLTM dan cahaya matahari pada PLTS, sebesar 1.510 MW + 1,5 MWp. Selanjutnya, Indonesia Power memberikan kontribusi dalam percepatan bauran EBT di Indonesia melalui pengembangan pembangkit EBT dan *Co-firing* PLTU, sehingga diharapkan bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia Power mencapai 30% dari total kapasitas terpasang pembangkit yang dikelola pada tahun 2028. Sepanjang tahun 2021, Perusahaan telah mewujudkan transisi energi lewat pengembangan pembangkit EBT dengan telah menyelesaikan pembangunan PLTM Gunung Wugul (3 MW), dan PLTS *Landbase* Grati (1,5 MWp). Selain itu juga dalam pencapaian bauran EBT, di tahun 2021 perusahaan telah melakukan komersialisasi *co-firing* di 11 PLTU yaitu PLTU Suralaya 1-4, PLTU Suralaya 5-7, PLTU Suralaya 8, PLTU Labuan, PLTU Lontar, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Adipala, PLTU Sanggau, PLTU Sintang, PLTU Jeranjang dan PLTU Barru yang berdampak pada peningkatan produksi EBT dalam bauran energi.

Indonesia Power owns and manages green and clean energy-based power plants, such as geothermal energy for GPP, water for HPP and MHPP, and solar power for SoPP at a total of 1,510 MW + 1.5 MWp. Further, Indonesia Power also contributes to the acceleration of the NRE mix in Indonesia through the development of NRE-based power plants and Steam Power Plant co-firing. By 2028, Indonesia Power's NRE mix is expected to occupy 30% of the total installed capacity of the managed power plants. Throughout 2021, the Company as realized energy transition through NRE power plant development by finalizing MHPP Gunung Wugul (3 MW) and Landbase SoPP Grati (1.5 Mwp). Still, to accomplish the NRE mix target, the Company performed co-firing commercialization at 11 Steam Power Plants, i.e. Suralaya 1-4, SPP Suralaya 5-7, Suralaya 8, SPP Labuan, SPP Lontar, SPP Pelabuhan Ratu, SPP Adipala, SPP Sanggau, SPP Sintang, SPP Jeranjang, and SPP Barru which resulted in the increase in NRE portion in the energy mix.

Kontribusi kepada Pemegang Saham
Contribution to the Shareholders

Salah satu bentuk kontribusi Indonesia Power kepada Pemegang Saham adalah melalui pembayaran dividen. Pembayaran dividen di tahun 2021 atas laba tahun buku 2020 adalah sebesar Rp10,22 triliun. Secara lebih rinci terkait pembayaran dividen akan diuraikan pada Sub Bab Kebijakan Dividen.

Indonesia Power makes contribution to the Shareholders, among others through the dividend payment. In 2021, the dividend payment for the profit from the fiscal year 2020 was Rp10.22 trillion. The details of the dividend payment can be found in the Sub-chapter of Dividend Policy.

Kontribusi kepada Negara
Contribution to the Country

Setoran pajak pada tahun 2021 sebesar Rp1,47 triliun. Secara lebih rinci terkait setoran pajak akan diuraikan pada Sub Bab Kontribusi kepada Negara.

The Company's tax contribution in 2021 was amounted at Rp1.47 trillion. The details of the tax contribution can be found in the Sub-chapter of Contribution to the Country

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR
MARKETING ASPECT AND MARKET SHARE

Hasil produksi tenaga listrik Indonesia Power dijual kepada induk Perusahaan yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *single buyer*. Mekanisme penjualan energi listrik melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) periode 5 (lima) tahunan. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Sehingga aspek pemasaran Indonesia Power ditujukan untuk mengelola dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan kepuasan pelanggan.

The electricity produced by Indonesia Power is sold to the parent company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as the single buyer. This sale of electricity practice is regulated in the five-year period Power Purchase Agreement (PPA). Under this commitment, PLN pays for the electricity supplied by the Company in the amount determined based on the payment formula. That way, Indonesia Power can focus its marketing aspect on managing and improving shareholder trust and customer satisfaction.

Pangsa Pasar
Market Share

Energi listrik wilayah Jawa-Bali dipasok oleh beberapa perusahaan yaitu Indonesia Power, Pembangkitan Jawa Bali, Unit Pembangkitan Tanjung Jati B (UB Tanjung Jati B), pembangkit milik PLN dan pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producer*/IPP). Untuk pembangkit milik PLN dikelola oleh Indonesia Power dan Pembangkitan Jawa Bali melalui bisnis jasa O&M.

Indonesia Power, Pembangkitan Jawa Bali, Tanjung Jati B Power Generation Unit (Tanjung Jati B), PLN-owned power plants, and Independent Power Producers (IPP) are the suppliers of electricity for Java-Bali area. PLN-owned power plants are managed by Indonesia Power and Pembangkitan Jawa Bali under the O&M Service business.

Realisasi energi listrik di wilayah Jawa Bali meningkat 4,97% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 197.039 GWh di tahun 2021. Dari total pasokan tersebut, Indonesia Power memasok sebesar 18,99% atau sebesar 37.426 GWh, dimana hasil produksi ini dijual kepada induk Perusahaan yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *single buyer*. Jumlah energi listrik tersebut meningkat 13,01% dari tahun 2020 menjadi sebesar 37.426 GWh di tahun 2021. Sementara untuk pembangkit O&M kontribusi tahun 2021 menurun 11,23% dibandingkan tahun 2020 menjadi 14,57% di tahun 2021.

The actual electricity supply in Java-Bali increased 4.97% compared to in 2020, to 197,039 GWh in 2021. Indonesia Power occupied 18.99% or 37,426 GWh of the total count of supply, to be sold to the parent company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) as the single buyer. The figure was an increase 13.01% from 2020, to 37,426 GWh in 2021. Meanwhile, the contribution of O&M power plants in 2021 decreased by 11.23%, to 14.57% in 2021.

Tabel Pangsa Pasar Energi Listrik Jawa Bali Tahun 2018-2021
Table of Java-Bali Electricity Market Share in 2018-2021

Unit Pembangkit Generation Unit	2018		2019		2020		2021		Pertumbuhan Growth
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	
PT Indonesia Power *	40.151	21,40	37.391	19,22	33.117	17,64	37.426	18,99	13,01%
PT Pembangkitan Jawa Bali	24.825	13,23	22.338	11,48	17.055	9,09	19.779	10,04	15,97%
UB Tanjung Jati B	19.529	10,41	20.390	10,48	17.532	9,34	18.884	9,58	7,71%
IPP	48.322	25,76	51.553	26,50	61.244	32,63	67.568	34,29	10,33%
Unit O&M dikelola oleh Indonesia Power O&M Units managed by Indonesia Power	28.466	15,17	33.947	17,45	32.341	17,23	28.709	14,57	(11,23%)

ASPEK PEMASARAN DAN PANGSA PASAR
MARKETING ASPECT AND MARKET SHARE

Unit Pembangkit Generation Unit	2018		2019		2020		2021		Pertumbuhan Growth
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	
Unit O&M dikelola oleh Pembangkitan Jawa Bali O&M Units managed by Pembangkitan Jawa Bali	25.932	13,82	28.574	14,69	26.294	14,01	24.529	12,45	(6,71%)
PLN (Proyek) PLN (Projects)	379	0,20	346	0,18	135	0,07	145	0,07	7,41%
Sistem Jawa Bali Java-Bali System	**187.605**	**100.00**	**194.539**	**100,00**	**187.718**	**100,00**	**197.039**	**100,00**	**4,97%**

* Sejak tahun 2020, jumlah pasokan energi listrik Indonesia Power didapat dari penjualan listrik pembangkit *existing* yang tersambung dalam jaringan interkoneksi Jawa-Bali
* Since 2020, Indonesia Power supplies its power from the sale of electricity from existing power plants from Java-Bali interconnecting network.

Strategi Pemasaran
Marketing Strategy

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, pada tahun 2021 Indonesia Power melakukan beberapa strategi berikut:

1. Seluruh pembangkit menjalankan program perang EFOR untuk meningkatkan keandalan,
2. Penambahan dan pemulihan pasokan gas Semarang,
3. Optimalisasi pengoperasian PLTGU dengan pola operasi yang lebih efisien,
4. Pelaksanaan program Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Waduk Saguling,
5. Renegosiasi harga uap PLTP untuk meningkatkan CF PLTP,
6. Pemantauan dan pengendalian efisiensi dan *reliability* pembangkit secara *real time,*
7. Implementasi program *coal switching* (mulai Juni 2020) dan *co-firing* PLTU Suralaya 1-7 (mulai tahun 2021).

To maintain and expand the market share, Indonesia Power performs the following strategies in 2021:

1. All power plants executed EFOR mitigation program to improve reliability;
2. Addition and restoration of Semarang gas supply;
3. Optimization of CCPP for more efficient operations;
4. Weather Modification Technology (TMC) program implementation in Saguling Reservoir;
5. GPP geothermal price negotiation to increase GPP CF;
6. Real-time monitoring and controlling of power plants' efficiency and reliability.
7. Implementation of coal switching (commencing June 2020) and co-firing (commencing in 2021) at SPP Suralaya 1-7.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

PT Indonesia Power merupakan anak Perusahaan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan fokus operasi pada penyediaan tenaga listrik untuk disalurkan kepada pelanggan serta penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit. Segmen usaha Perusahaan, secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembangkitan tenaga listrik dan usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik (*beyond* kWh), antara lain jasa operasi dan pemeliharaan.

PT Indonesia Power is a subsidiary of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) which focuses its operations on the provision of electricity for distribution to customers as well as the provision of power plant operation and maintenance service. The Company's business segment is generally divided into two, i.e. Provision of electricity and businesses related to the provision of electricity (beyond kWh), including operation and maintenance services. and maintenance (O&M) service.

Segmen Usaha Indonesia Power
Indonesia Power Operation Segments

Pembangkitan Tenaga Listrik
Electricity Supply

melalui unit pembangkitan *existing*
via existing power generation units

Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik (*beyond* kWh) yaitu Jasa Operation and Maintenance (O&M)
Electricity power generation related businesses (beyond kWh) is Operation and Maintenance (O&M) Services

Indonesia Power juga memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan untuk kegiatan usaha lainnya seperti penjualan batubara dan sewa.

Indonesia Power also gives assignments to Subsidiaries for other business activities such as coal sales and rentals.

Segmen Pembangkitan Tenaga Listrik
Electricity Supply Segment

Pembangkitan tenaga listrik dilakukan melalui pembangkitan energi listrik dari pembangkit *existing*. Hasil produksi listrik Indonesia Power hanya dijual kepada induk Perusahaan yaitu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai *single buyer*. Mekanisme penjualan energi listrik melalui Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) periode lima tahunan.

The provision of electricity is sought through power generation from existing power plants. The electricity produced by Indonesia Power is sold only to the parent company, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), as the single buyer. This sale of electricity is regulated in the quinquennial Power Purchase Agreement (PPA).

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) Pembangkit *Existing*
Installed Capacity of Existing Power Plants

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) merupakan kapasitas atau daya yang tertera sesuai dengan setiap jenis pembangkit. DTP yang berasal dari pembangkit milik Perusahaan pada sistem Jawa Bali meningkat 0,35% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 9.124,72 MW di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh beroperasinya PLTM Lambur di tahun 2021, penyesuaian pengujian sertifikat laik operasi terakhir untuk PLTD Senayan di Priok POMU, beban di PLTGU Grati ST 2.0 telah *full load* setelah di tahun sebelumnya terjadi gangguan.

Installed Capacity refers to the capacity of a power plant as identified in writing at each type of power plants. The installed capacity of the Company's power plants in Java-Bali system increased 0.35% from 2020 to 9,124.72 MW in 2021. This was mainly contributed by the operation of MHPP Lambur in 2021, latest commissioning certificate for DPP Senayan in Priok POMU, and CCPP Grati ST 2.0 full load following several outages in the previous year.

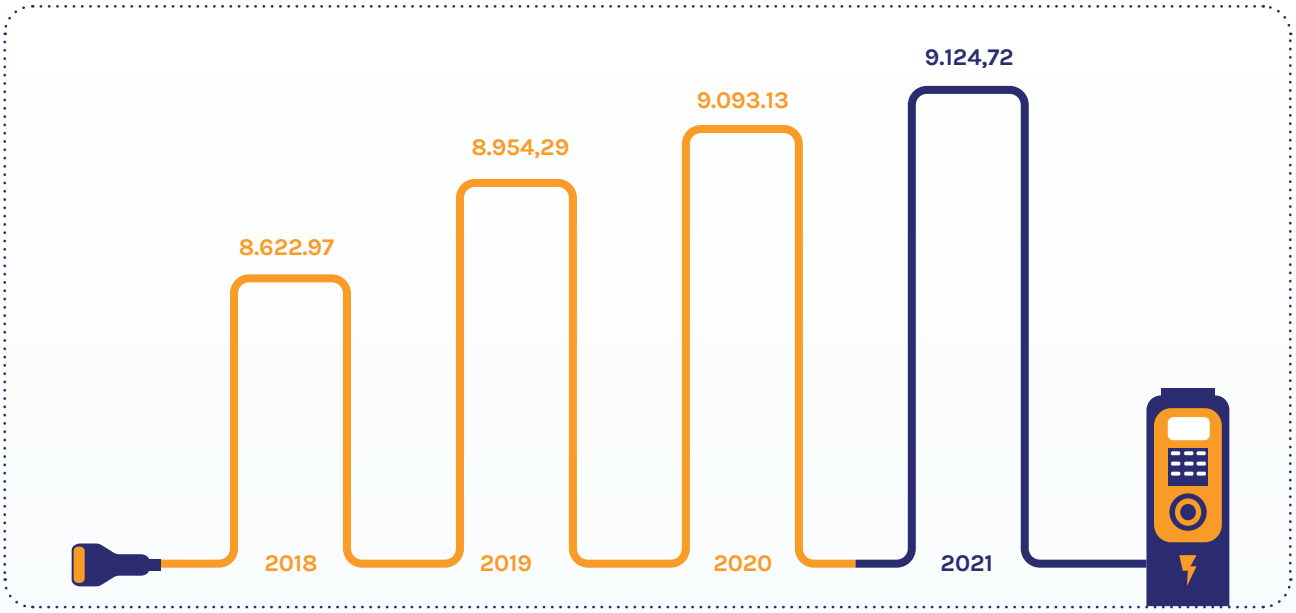
TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Tabel DTP Pembangkit *Existing* Tahun 2018 - 2021 (MW)
Table of Installed Capacity of Existing Power Plants in 2018-2021 (MW)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Suralaya PGU	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	-
Priok POMU	1.180,00	1.285,30	1.284,58	1.285,30	0,06%
Saguling POMU	797,36	797,36	797,36	797,36	-
Kamojang POMU	377,00	377,00	377,00	377,00	-
Mrica PGU	309,74	322,14	322,14	325,25	0,97%
Semarang PGU	1.238,30	1.238,30	1.238,30	1.238,30	-
Grati POMU	764,08	923,66	931,32	959,08	2,98%
Bali PGU*	556,49	610,53	622,43	742,43	19,28%
Holtekamp OMU	-	-	120,00	-	(100,00%)
Jumlah DTP Pembangkit *Existing* **Total Installed Capacity of Existing Power Plants**	**8.622,97**	**8.954,29**	**9.093,13**	**9.124,72**	**0,35%**

* Serah terima pengelolaan MPP Papua di Holtekamp OMU kepada Bali PGU di bulan Maret 2021
The management of MPP Papua in Holtekamp POMU was handed over to Bali PGU in March 2021.

Tabel DTP Pembangkit *Existing* Tahun 2018 - 2021 (MW)
Chart of Installed Capacity of Existing Power Plants in 2018-2021 (MW)



Produksi Tenaga Listrik
Electricity Production

Indonesia Power melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah produksi listrik. Perhitungan Produksi Listrik dapat digambarkan menggunakan *Capacity Factor* dan jumlah tenaga listrik yang dihasilkan (GWh).

Indonesia Power has made the efforts to expand the volume of its electricity production. Electricity production is calculated using Capacity Factor (CF), and the produced electricity is indicated in GWh unit.

Capacity Factor (CF) Pembangkit *Existing*
Capacity Factor (CF) of Existing Power Plants

Capacity Factor (CF) adalah persentase dari besarnya jumlah penjualan selama waktu tertentu, dibagi dengan maksimum jumlah energi yang bisa dikeluarkan pada masa periode yang sama. CF Pembangkit *existing* meningkat 13,14% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 51,82% di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan CF PLTGU Priok Blok 1-2 dan PLTU Suralaya 1-7 sesuai dengan kebutuhan sistem dan telah pulihnya kondisi pasokan gas PLTGU Tambak Lorok di akhir tahun 2020 pasca gangguan pasokan gas di triwulan I tahun 2020.

Capacity Factor (CF) is the percentage of the volume of sales within a certain period, divided by the maximum energy spent during the same period. The Capacity Factor (CF) of existing power plants increased 13.14% from 2020, to 51.82% in 2021. This was mainly contributed by the increase in CF of CCPP Priok Block 1-1 and SPP Suralaya 1-7 according to system demands and gas supply recovery in CCPP Tambak Lorok at the end of 2020 following gas supply shortage in Q1 of 2020.

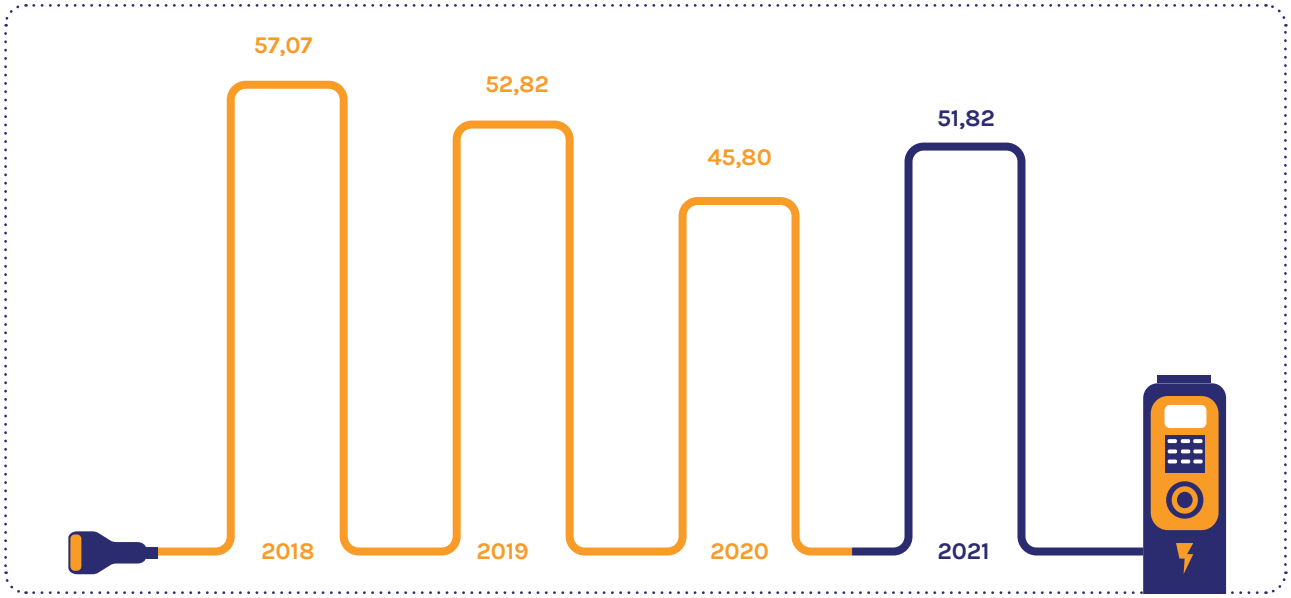
Tabel CF Pembangkit *Existing* Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Existing Power Plant CF in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Suralaya PGU	82,96	82,46	75,87	80,87	6,60%
Priok POMU	42,63	34,72	17,08	31,46	84,22%
Saguling POMU	34,34	33,84	40,27	37,87	(5,96%)
Kamojang POMU	87,55	83,86	84,15	87,84	4,39%
Mrica PGU	31,99	28,03	31,44	36,23	15,23%
Semarang PGU	45,36	33,18	10,28	26,90	161,70%
Grati POMU	28,45	18,64	23,80	24,87	4,51%
Bali PGU	23,37	20,34	20,49	19,75	(3,61%)
Jawa - Bali Grid & Embedded	**57,45**	**52,81**	**45,80**	**51,82**	**13,14%**
Pembelian Listrik di Area Bali* Power Purchase in Bali Area*	11,90	58,81	-	-	-
Jumlah CF Pembangkit *Existing* **Total CF of Existing Power Plants**	**57,07**	**52,82**	**45,80**	**51,82**	**13,14%**

*mulai tahun 2020, pencatatan produksi PLTD E Nusa Penida dimasukkan ke dalam Bali PGU (produksi sendiri)
*Starting from 2020, production from DPP E Nusa Penida was recorded in Bali PGU (self-production)

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Grafik CF Pembangkit *Existing* Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Existing Power Plant CF in 2018-2021 (%)



Jumlah Produksi Tenaga Listrik
Total Electricity Production

Jumlah produksi listrik meningkat 12,82% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 39.230,81 GWh di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan CF PLTGU Priok Blok 1-2 dan PLTU Suralaya 1-7 sesuai dengan kebutuhan sistem dan telah pulihnya kondisi pasokan gas PLTGU Tambak Lorok di akhir tahun 2020 pasca gangguan pasokan gas di triwulan I tahun 2020.

Peningkatan jumlah produksi tidak lepas dari realisasi *action plan* yang telah dilaksanakan, yaitu:
1. Seluruh pembangkit menjalankan program perang EFOR untuk meningkatkan keandalan,
2. Penambahan dan pemulihan pasokan gas Semarang,
3. Optimalisasi pengoperasian PLTGU dengan pola operasi yang lebih efisien,
4. Pelaksanaan program Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Waduk Saguling,
5. Renegosiasi harga uap PLTP untuk meningkatkan CF PLTP,
6. Pemantauan dan pengendalian efisiensi dan *reliability* pembangkit secara *real time.*

Total electricity production increased 12.82% from 2020, to 39,230.81 GWh in 2021. This was mainly contributed by the increase in CF of CCPP Priok Block 1-1 and SPP Suralaya 1-7 according to system demands and gas supply recovery in CCPP Tambak Lorok at the end of 2020 following gas supply shortage in Q1 of 2020.

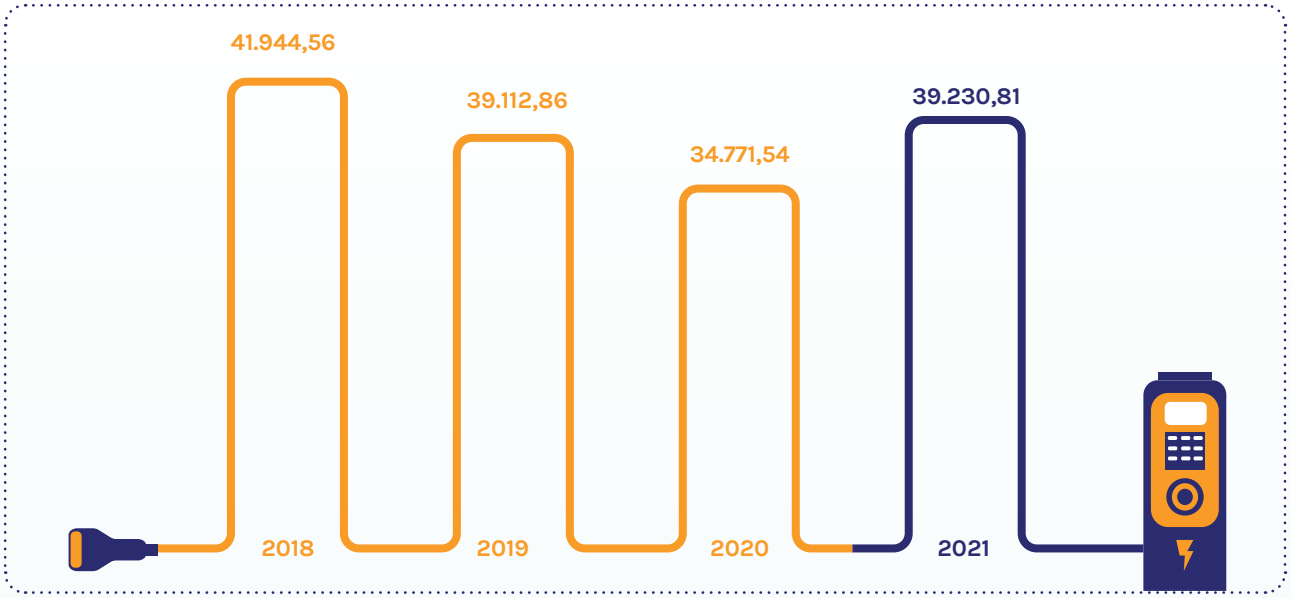
The increase in the volume of production was also a result of the following action plans carried out:
1. All power plants executed EFOR mitigation program to improve reliability;
2. Addition and restoration of Semarang gas supply;
3. Optimization of CCPP for more efficient operations;
4. Implementation of Weather Modification Technology in Saguling Reservoir;
5. GPP geothermal price negotiation to increase GPP CF;
6. Real-time monitoring and controlling of power plants' efficiency and reliability.

Tabel Produksi Listrik Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2018 - 2021 (GWh)
Table of Electricity Production by Generation Unit in 2018-2021 (GWh)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Suralaya PGU	24.776,14	24.506,85	22.661,32	24.058,36	6,16%
Priok POMU	4.168,24	3.690,16	1.820,00	3.353,18	84,24%
Saguling POMU	2.393,85	2.356,51	2.813,25	2.638,78	(6,20%)
Kamojang POMU	2.869,27	2.738,94	2.778,15	2.888,51	3,97%
Mrica PGU	890,46	777,22	879,64	1.016,17	15,52%
Semarang PGU	3.782,77	2.752,08	851,10	2.240,14	163,21%
Grati POMU	1.937,52	1.235,73	1.938,55	2.045,07	5,49%
Bali PGU	1.055,48	1.003,84	1.029,54	990,60	(3,78%)
Jawa - Bali Grid & Embedded	**41.873,74**	**39.061,34**	**34.771,54**	**39.230,81**	**12,82%**
Pembelian Listrik di Area Bali* Power Purchase in Bali Area*	70,82	51,52	-	-	
Jumlah Produksi Tenaga Listrik **Total Electricity Production**	**41.944,56**	**39.112,86**	**34.771,54**	**39.230,81**	**12,82%**

*mulai tahun 2020, pencatatan produksi PLTD E Nusa Penida dimasukkan ke dalam Bali PGU (produksi sendiri)
*Starting from 2020, production from DPP E Nusa Penida was recorded in Bali PGU (self-production)

Grafik Produksi Listrik Tahun 2018 - 2021 (GWh)
Chart of Electricity Production in 2018-2021 (GWh)



TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Penjualan Tenaga Listrik
Sale of Electricity

Jumlah penjualan tenaga listrik meningkat 13,00% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 37.590,11 GWh di tahun 2021.

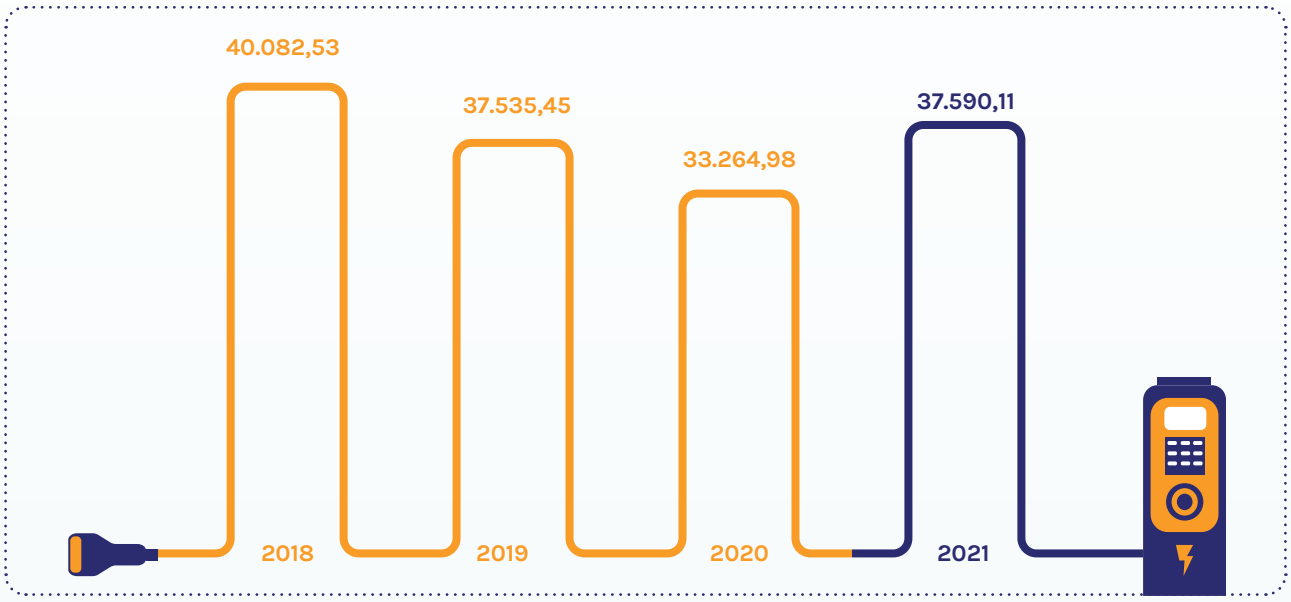
Total electricity sales increased 13.00% from 2020, to 37,590.11 GWh in 2021.

Tabel Penjualan Listrik Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2018 - 2021 (GWh)
Table of Electricity Sales by Generation Unit in 2018-2021 (GWh)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Suralaya PGU	23.339,32	23.198,17	21.404,79	22.752,99	6,30%
Priok POMU	4.089,52	3.637,31	1.795,95	3.299,64	83,73%
Saguling POMU	2.388,09	2.352,93	2.808,09	2.633,31	(6,22%)
Kamojang POMU	2.734,99	2.619,64	2.635,85	2.743,96	4,10%
Mrica PGU	874,54	768,40	867,88	1.003,49	15,63%
Semarang PGU	3.669,75	2.684,49	833,65	2.176,59	161,09%
Grati POMU	1.884,85	1.235,13	1.906,26	2.007,00	5,29%
Bali PGU	1.032,67	987,87	1.012,52	973,12	(3,89%)
Jawa - Bali Grid & Embedded	**40.013,72**	**37.483,93**	**33.264,98**	**37.590,11**	**13,00%**
Pembelian Listrik di Area Bali* Power Purchase in Bali Area*	68,80	51,52	-	-	-
Jumlah Penjualan Tenaga Listrik **Total Electricity Sales**	**40.082,53**	**37.535,45**	**33.264,98**	**37.590,11**	**13,00%**

*mulai tahun 2020, pencatatan produksi PLTD E Nusa Penida dimasukkan ke dalam Bali PGU (produksi sendiri)
*Starting from 2020, production from DPP E Nusa Penida was recorded in Bali PGU (self-production)

Grafik Penjualan Listrik Tahun 2018 - 2021 (GWh)
Chart of Electricity Sales in 2018-2021 (GWh)



Pemakaian Sendiri
Self-Consumption

Selain untuk disalurkan ke pembeli, ada sebagian tenaga listrik yang dipakai oleh Perusahaan untuk fasilitas produksi. Pemakaian sendiri (PS) merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk aktivitas operasional pembangkit. **Semakin rendah nilai PS menunjukkan kinerja pembangkit semakin baik.**

In addition to being distributed to buyer, some of the electricity generated is consumed by the Company for production facilities. Self-Consumption indicates the volume of electricity used for power plant's operational activities. **The lower the self-consumption, the better the performance of a power plant.**

Pemakaian sendiri meningkat 8,90% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 1.640,70 GWh di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan seiring dengan adanya peningkatan produksi.

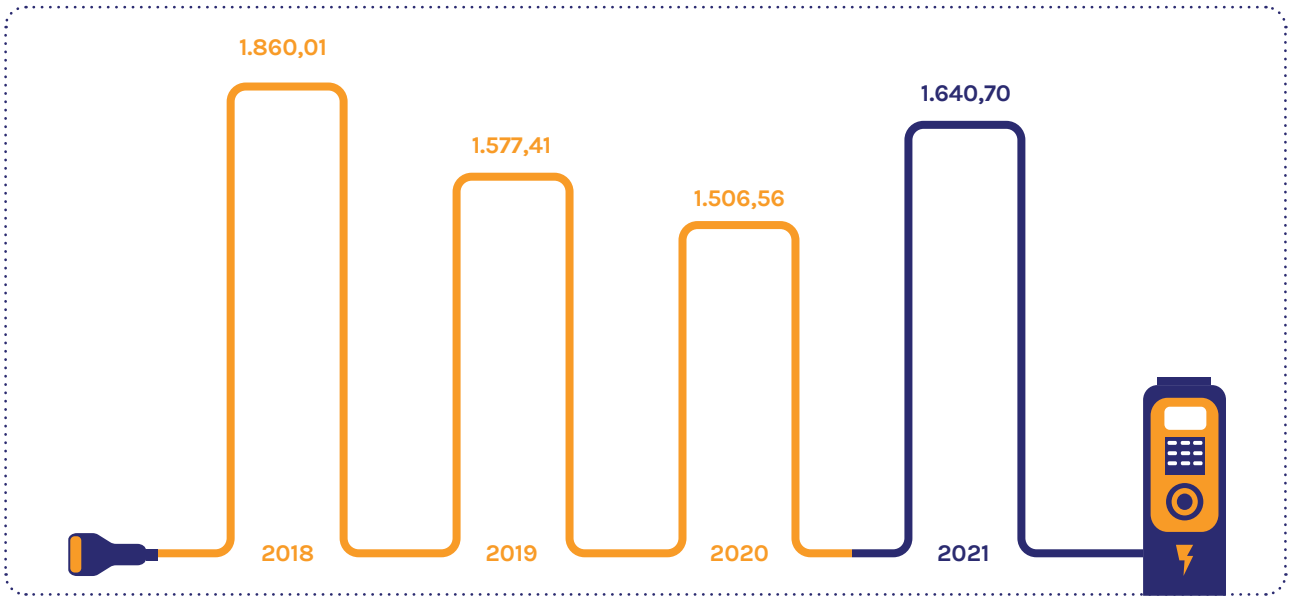
Self-Consumption increased 8.90% from 2020 to 1,640.70 GWh in 2021. This was mainly contributed by the increase in production.

Tabel Pemakaian Sendiri Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2018 - 2021
Table of Self-Consumption by Generation Unit in 2018-2021

Unit Pembangkit Generation Unit	2018		2019		2020		2021		Pertumbuhan Growth
	GWh	%	GWh	%	GWh	%	GWh	%	
Suralaya PGU	1.436,82	5,80	1.308,68	5,34	1.256,53	5,54	1.305,37	5,43	3,89%
Priok POMU	78,72	1,89	52,84	1,43	24,05	1,32	53,54	1,60	122,61%
Saguling POMU	5,76	0,24	3,59	0,15	5,16	0,18	5,48	0,21	6,13%
Kamojang POMU	134,28	4,68	119,30	4,36	142,30	5,12	144,54	5,00	1,58%
Mrica PGU	15,92	1,79	8,82	1,14	11,76	1,34	12,68	1,25	7,85%
Semarang PGU	113,03	2,99	67,59	2,46	17,45	2,05	63,55	2,84	264,21%
Grati POMU	52,66	2,72	0,61	0,05	32,29	1,67	38,06	1,86	17,86%
Bali PGU	22,82	2,16	15,97	1,59	17,02	1,65	17,47	1,76	2,65%
Jumlah Pemakaian Sendiri Total Self-Consumption	**1.860,01**	**4,44**	**1.577,41**	**4,04**	**1.506,56**	**4,33**	**1.640,70**	**4,18**	**8,90%**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Grafik Pemakaian Sendiri Tahun 2018 - 2021 (GWh)
Chart of Self-Consumption in 2018-2021 (GWh)



Hubungan Produksi, Pemakaian Sendiri, dan Penjualan Tenaga Listrik
Correlation between Electricity Production, Self-Consumption, and Sales

Produksi energi listrik langsung disalurkan kepada pelanggan (sebagai penjualan tenaga listrik) setelah dikurangi pemakaian sendiri. Jumlah energi listrik yang diproduksi disesuaikan dengan kebutuhan dari sistem.

Produksi Tenaga Listrik meningkat 12,82% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 39.230,81 GWh di tahun 2021 yang dipengaruhi jumlah Penjualan Tenaga Listrik yang meningkat 13,00% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 37.590,11 GWh di tahun 2021.

Electricity produced is directly distributed to customers (as electricity sales) after being reduced by self-consumption. The total of electricity produced is adjusted to the system requirements.

Electricity production increased 12.82% from 2020, to 39,230.81 GWh in 2021 due to the increase in electricity sales by 13.00% from 2020, to 37,590.11 GWh in 2021.

Kinerja Operasi Pembangkit *Existing*
Existing Power Plant Operational Performance

Dalam melakukan operasinya untuk menyediakan tenaga listrik, banyak faktor yang menjadi indikator keberhasilan atau tingkat keandalan pembangkit Perusahaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah produksi dan penjualan tenaga listrik, sehingga diperlukan monitor yang baik.

In carrying out its operations to provide electricity, the Company takes into account a number of factors that help indicating the reliability of its power plants. These factors may affect both electricity production and sales volumes, and therefore require proper monitoring.

Faktor Ketersediaan
Availability Factor

Faktor ketersediaan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Availability Factor* (EAF) dan *Scheduled Outage Factor* (SOF).

The availability factor of power plant engine is measured by Equivalent Availability Factor (EAF) and Scheduled Outage Factor (SOF).

Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit *Existing*

Equivalent Availability Factor (EAF) of Existing Power Plants

Equivalent Availability Factor (EAF) menunjukkan tingkat kesiapan suatu pembangkit untuk beroperasi menghasilkan tenaga listrik. Nilai EAF berfungsi untuk mengetahui faktor ketersediaan pembangkit untuk beroperasi dengan Daya Mampu Netto (DMN) pada periode tertentu. **Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan tingkat kesiapan pembangkit lebih baik.**

Equivalent Availability Factor (EAF) indicates the level of readiness of a power plant to operate and generate electricity. EAF score functions to find out the readiness of a power plant to operate with Net Capacity in a certain period. **Higher EAF score indicates better readiness of the power plant.**

EAF Pembangkit *Existing* lebih rendah 1,13% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 93,04%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya gangguan *derating* pada *Submerged Drag Chain Conveyor* (SDCC) atau Pengaturan Gas Buang Batubara di Suralaya Unit 6, serta pemeliharaan di Priok, Suralaya dan Semarang dengan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan tahun 2020.

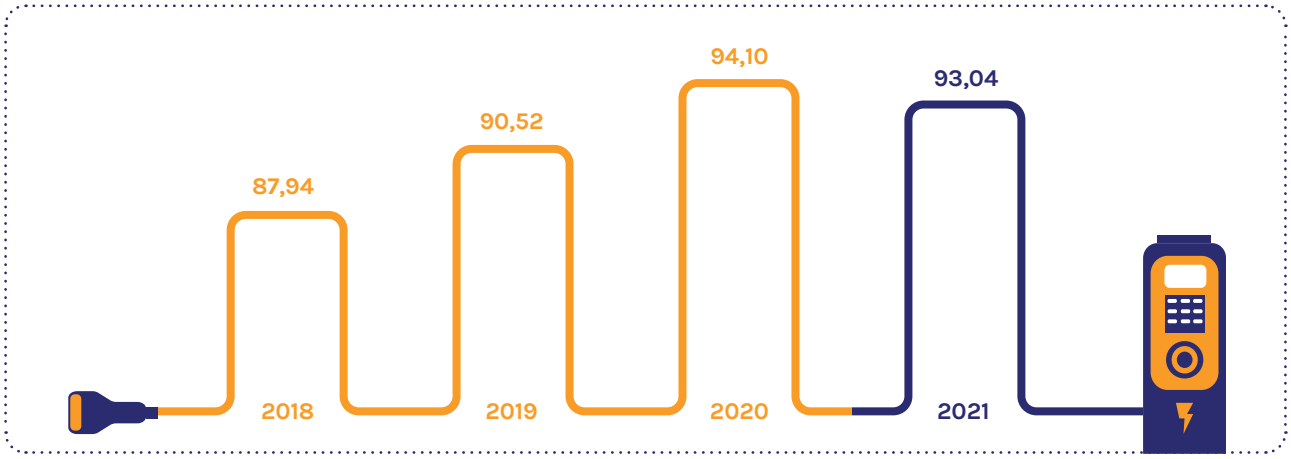
The EAF of existing power plants was 1.13% lower than in 2020, to 93.04%. This was particularly contributed by derating in Submerged Drag Chain Conveyor (SDCC) in Suralaya Unit 6 and maintenance in Priok, Suralaya, and Semarang which took longer duration compared to in 2020.

Tabel EAF Pembangkit *Existing* Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Existing Power Plant EAF by Generation Unit in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Suralaya PGU	89,05	92,02	90,11	89,49	(0,69%)
Priok POMU	82,19	78,58	97,84	92,15	(5,82%)
Saguling POMU	97,73	96,49	95,99	96,38	0,41%
Kamojang POMU	89,55	89,86	95,08	97,06	2,08%
Mrica PGU	99,10	93,93	96,64	97,42	0,73%
Semarang PGU	82,83	89,06	97,77	93,12	(4,76%)
Grati POMU	78,97	91,29	95,76	98,27	2,62%
Bali PGU	93,77	96,68	97,40	98,06	0,68%
Jumlah EAF Pembangkit *Existing* Total EAF of Existing Power Plants	**87,94**	**90,52**	**94,10**	**93,04**	**(1,13%)**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Grafik EAF Pembangkit *Existing* Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Existing Power Plant EAF in 2018-2021 (%)



Scheduled Outage Factor (SOF) Pembangkit *Existing*

Scheduled Outage Factor (SOF) digunakan untuk mengukur tingkat pembangkit keluar sistem karena pemeliharaan terencana, yaitu *Planned Outage Hour* dan *Maintenance Outage Hour* yang sudah direncanakan sebelumnya. **Semakin rendah nilai SOF menunjukkan unit pembangkit dapat melakukan optimasi dalam pemeliharaan yang direncanakan.**

SOF Pembangkit *Existing* tahun 2021 meningkat 22,74% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 5,29%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah pemeliharaan *Planned Outage* (PO) dan *Maintenance Outage* (MO) tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun 2020.

Scheduled Outage Factor (SOF) of Existing Power Plants

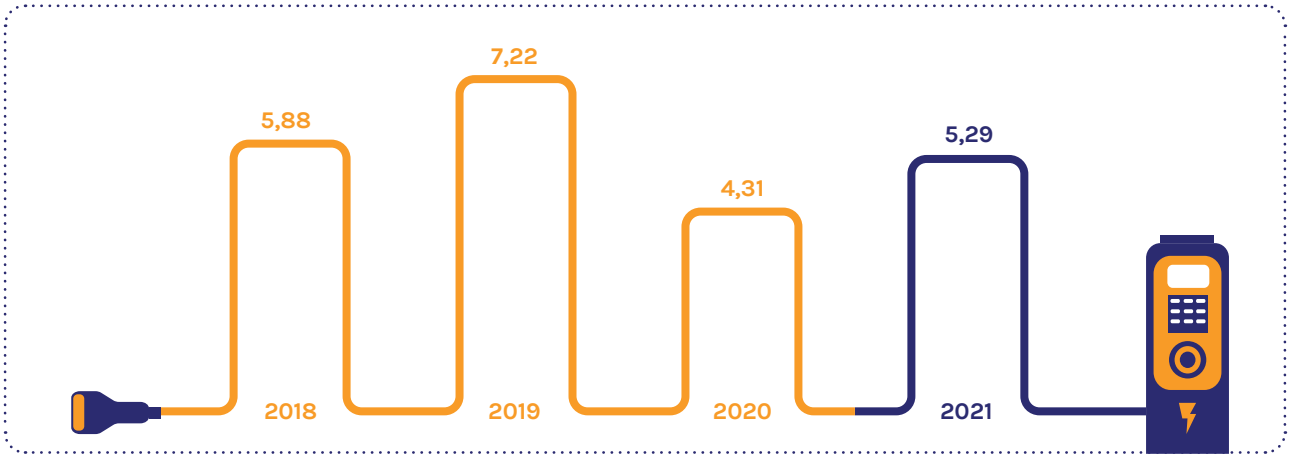
Scheduled Outage Factor (SOF) measures a power plant's outage due to scheduled maintenance, consisting of the previously scheduled Planned Outage Hour and Maintenance Outage Hour. **The lower SOF, the better generation unit's performance in optimizing the planned maintenance.**

The SOF of existing power plants in 2021 was 22.74% higher than in 2020, to 5.29%. This was due to the increase in the number of Planned Outage (PO) and Maintenance Outage (MO) compared to in 2020.

Tabel SOF Pembangkit *Existing* Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Existing Power Plant SOF by Generation Unit in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Suralaya PGU	7,59	6,40	6,59	8,08	22,61%
Priok POMU	4,28	14,78	1,53	5,13	235,29%
Saguling POMU	2,18	3,44	3,93	3,59	(8,65%)
Kamojang POMU	1,23	8,38	4,54	0,93	(79,52%)
Mrica PGU	1,08	5,94	3,34	2,55	(21,56%)
Semarang PGU	8,34	7,8	1,76	5,33	202,84%
Grati POMU	7,92	5,91	3,29	1,23	(62,61%)
Bali PGU	2,52	3,19	2,51	1,85	(26,29%)
Jumlah SOF Pembangkit *Existing* Total SOF of Existing Power Plants	**5,88**	**7,22**	**4,31**	**5,29**	**22,74%**

Grafik SOF Pembangkit *Existing* Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Existing Power Plant SOF in 2018-2021 (%)



Faktor Gangguan
Outage Factor

Untuk mengetahui gangguan mesin pembangkit diukur berdasarkan indikator *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR), dan *Sudden Outage Frequency* (SdOF).

Outage in a power plant can be measured using the indicators Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) and Sudden Outage Frequency (SdOF).

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) Pembangkit *Existing*

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) untuk mengukur tingkat mesin pembangkit keluar paksa atau ketidaksiapan unit untuk beroperasi karena gangguan. **Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan keandalan unit pembangkit lebih baik dan dapat mengatasi gangguan lebih cepat.**

EFOR Pembangkit *Existing* tahun 2021 lebih rendah 33,16% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 1,31%. Hal ini menunjukkan bahwa unit pembangkit *existing* Indonesia Power dapat menurunkan jumlah terjadinya gangguan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of Existing Power Plants

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) measures forced outage rate of a power plant's engine, i.e. unit's unpreparedness to operate due to interference. **The lower EFOR, the better generation unit's reliability and the faster outages are handled.**

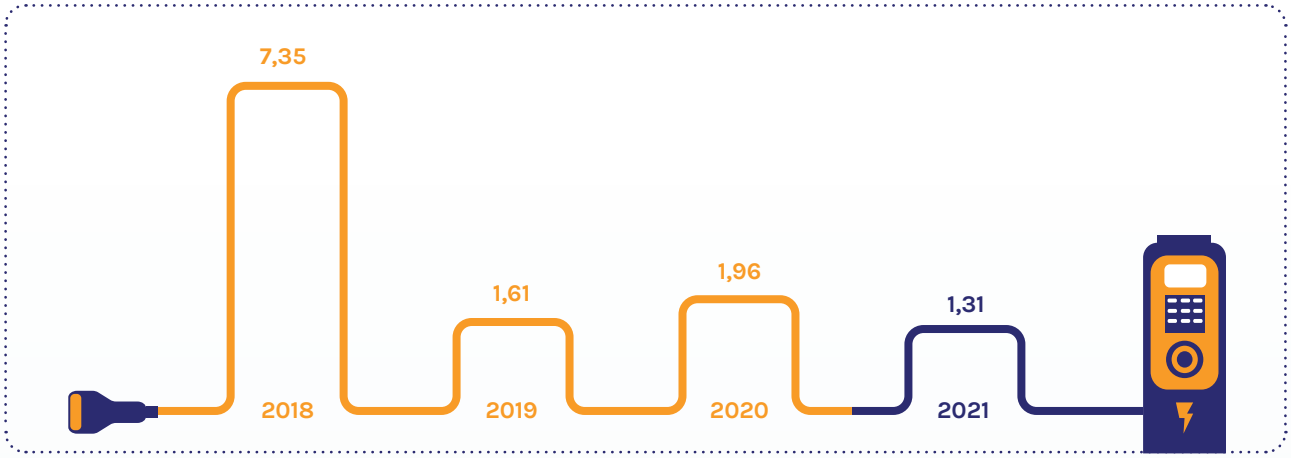
The EFOR of existing power plants in 2021 was 33.16% lower than in 2020, to 1.31%. This demonstrates that existing generation units in Indonesia Power was capable of reducing the number of outages in 2021 as compared to in 2020.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Tabel EFOR Pembangkit *Existing* Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Existing Power Plant EFOR by Generation Unit in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Suralaya PGU	3,47	1,36	2,83	1,74	(38,52%)
Priok POMU	14,83	2,71	1,18	1,67	41,53%
Saguling POMU	0,34	0,16	0,15	0,05	(66,67%)
Kamojang POMU	9,15	1,65	0,30	1,94	546,67%
Mrica PGU	0,36	0,34	0,04	0,05	25,00%
Semarang PGU	10,41	3,45	2,70	0,92	(65,93%)
Grati POMU	27,84	0,57	0,42	0,28	(33,33%)
Bali PGU	3,38	0,5	0,35	0,33	(5,71%)
Jumlah EFOR Pembangkit *Existing* Total EFOR of Existing Power Plants	**7,35**	**1,61**	**1,96**	**1,31**	**(33,16%)**

Grafik EFOR Pembangkit *Existing* Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Existing Power Plant EFOR in 2018-2021 (%)



Sudden Outage Frequency (SdOF) Pembangkit *Existing*

Sudden Outage Frequency (SdOF) menunjukkan jumlah gangguan yang terjadi dalam periode tertentu, terutama frekuensi terjadinya gangguan yang berulang. **Semakin rendah nilai SdOF maka semakin baik pengelolaan operasional Perusahaan dalam memitigasi gangguan.**

SdOF Pembangkit *Existing* tahun 2021 meningkat 56,78% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 1,46 kali. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah gangguan yang lebih banyak pada unit Priok dan Mrica di tahun 2021.

Sudden Outage Frequency (SdOF) of Existing Power Plants

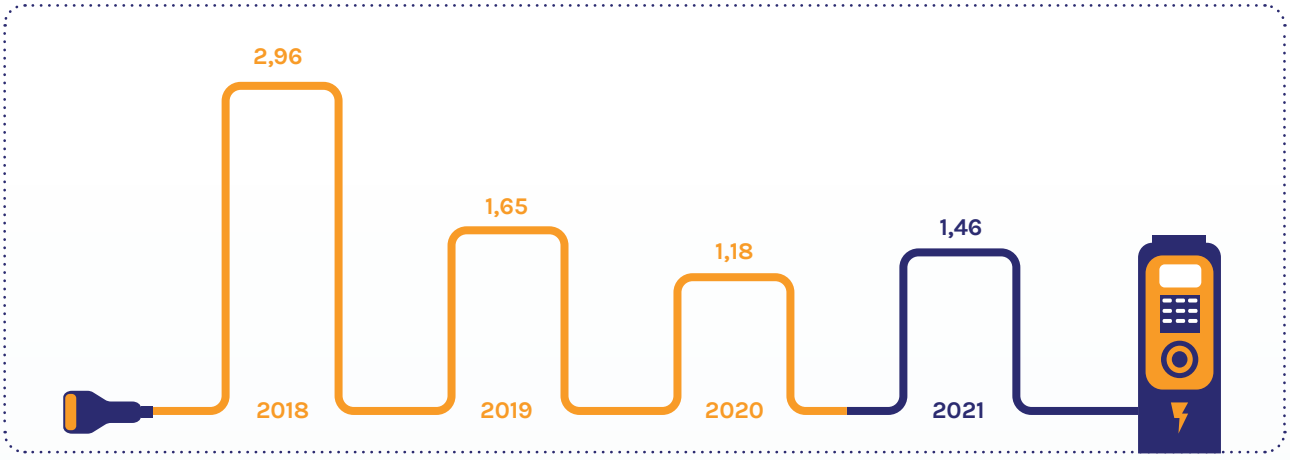
Sudden Outage Frequency (SdOF) indicates the frequency of outages occurring in a certain period, particularly the frequency of recurring outages. **Lower SdOF rate means better operational management in mitigating outages.**

The SdOF of existing power plants in 2021 was 56.78% higher than in 2020, to 1,46 time. This was due to higher number of outages in Priok and Mrica Units in 2021.

Tabel SdOF Pembangkit *Existing* Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2018 - 2021 (kali)
Table of Existing Power Plant SdOF by Generation Unit in 2018-2021 (time)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Suralaya PGU	1,00	1,00	0,86	0,43	(50,00%)
Priok POMU	5,75	4,71	1,29	3,29	155,04%
Saguling POMU	0,45	0,28	0,21	0,10	(52,38%)
Kamojang POMU	2,57	2,29	2,43	0,86	(64,61%)
Mrica PGU	0,37	0,07	0,23	0,78	273,91%
Semarang PGU	15,00	8,00	2,78	5,11	83,81%
Grati POMU	3,57	1,14	1,25	1,25	-
Bali PGU	3,32	1,16	2,27	1,64	(27,75%)
Jumlah SdOF Pembangkit *Existing* Total SdOF of Existing Power Plants	**2,96**	**1,65**	**1,18**	**1,46**	**56,78%**

Grafik SdOF Pembangkit *Existing* Tahun 2018 - 2021 (kali)
Chart of Existing Power Plant SdOF in 2018-2021 (time)



Pemakaian Energi Primer Pembangkit *Existing*
Primary Energy Consumption from Existing Power Plants

Dalam mengoperasikan pembangkit maka diperlukan bahan bakar untuk menjalankannya. Penggunaan bahan bakar yang efektif dan efisien akan mendorong kinerja pembangkitan yang semakin baik. Perusahaan terus berupaya meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi Energi salah satunya dengan pemantapan program 5E (*Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellent*), upaya peningkatan keandalan, mengurangi gangguan/*derating* (perang EFOR), serta optimalisasi pola operasi.

Power plant operations require fuel. Effective and efficient consumption of fuel will bring better power generation performance. The Company continues to enhance the energy effectiveness and efficiency among others by strengthening the 5E (Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellence) program, improving reliability, reducing outages/derating (EFOR mitigation), and optimizing operation pattern.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Bauran Energi Primer

Bauran Energi Primer tahun 2021 masih didominasi pemakaian energi fosil sebesar 83,13% dibandingkan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 16,87%.

Primary Energy Mix

The primary energy mix in 2021 remained dominated by fossil fuel energy by 83.13% as compared to NRE consumption at 16.87%.

Tabel Penggunaan Energi Primer Tahun 2018 - 2021 (GWh)
Table of Primary Energy Consumption in 2018-2021 (GWh)

Tipe Energi Type of Energy	2018	2019	2020	2021	Persentase terhadap Jumlah Energi Primer Percentage against Total Primary Energy
Energi Fosil: Fossil Energy:					
Gas	10.255,83	8.565,18	5.498,15	8.188,00	20,87%
Batubara Coal	24.776,14	24.506,85	22.661,32	23.987,81	61,15%
BBM Oil Fuel	758,58	166,29	138,88	438,54	1,12%
Jumlah Energi Fosil Fossil Energy	**35.790,55**	**33.238,31**	**28.298,35**	**32.614,35**	**83,13%**
Energi Baru Terbarukan: New Renewable Energy:					
Air Water	3.284,31	3.133,74	3.692,89	3.654,96	9,32%
Panas Bumi Geothermal	2.869,27	2.738,94	2.778,15	2.888,51	7,36%
Biofame Biofame	0,43	1,86	2,16	2,45	0,01%
Biomass	-	-	-	70,55	0,18%
Jumlah Energi Baru Terbarukan New Renewable Energy	**6.154,01**	**5.874,54**	**6.473,20**	**6.616,45**	**16,87%**
Jumlah Energi Primer Total Primary Energy	**41.944,56**	**39.112,86**	**34.771,54**	**39.230,81**	**100,00%**

Efisiensi *Thermal*

Efisiensi *Thermal* menunjukkan tingkat energi listrik (*output*) yang dihasilkan dalam pemakaian bahan bakar (*input*) suatu pembangkit pada periode tertentu. **Semakin tinggi nilai Efisiensi Thermal menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.**

Efisiensi *Thermal* Pembangkit *Existing* lebih rendah 0,70% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 33,55% di tahun 2021. Hal tersebut terutama disebabkan oleh program *coal switching* PLTU Suralaya 1-7 yang diimplementasikan mulai Juni 2020.

Thermal Efficiency

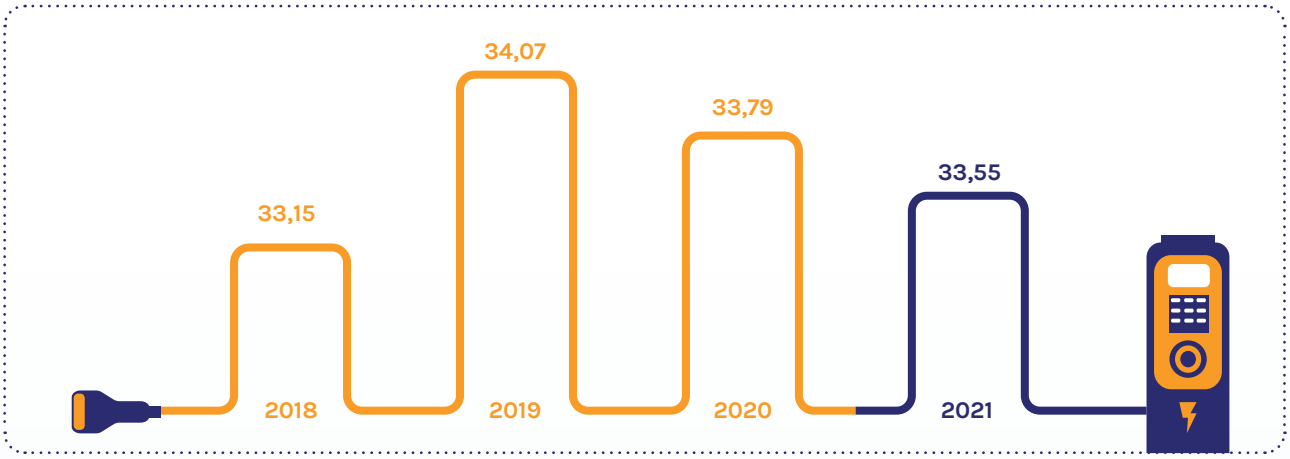
Thermal efficiency indicates the volume of electricity generated (output) with the consumption of fuel (input) by a power plant at a certain period. **The higher the thermal efficiency, the more efficient the power plant.**

The Thermal Efficiency of existing power plants was 0.70% lower than in 2020, to 33.55% in 2021. This was mainly caused by the implementation of coal switching at SPP Suralaya 1-7 since June 2020.

Tabel Efisiensi *Thermal* Pembangkit *Existing* Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Existing Power Plant Thermal Efficiency by Generation Unit in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Suralaya PGU	32,35	33,31	33,10	32,43	(2,02%)
Priok POMU	36,96	38,17	37,94	38,10	0,43%
Semarang PGU	34,44	34,79	35,19	34,91	(0,80%)
Grati POMU	33,01	34,25	36,38	37,89	4,16%
Bali PGU	34,23	36,82	36,89	36,52	(1,00%)
Jumlah Efisiensi *Thermal* Pembangkit *Existing* Total Thermal Efficiency of Existing Power Plants	**33,15**	**34,07**	**33,79**	**33,55**	**(0,70%)**

Grafik Efisiensi Thermal Pembangkit *Existing* Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Existing Power Plant Thermal Efficiency in 2018-2021 (%)



Tara Kalor Netto Pembangkit *Existing*

Tara Kalor Netto mengukur efisiensi pemakaian bahan bakar dalam nilai kalori yang dibutuhkan untuk setiap kWh produksi netto yang dibangkitkan oleh unit pembangkit pada suatu periode. **Semakin rendah nilai Tara Kalor Netto menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien.**

Tara Kalor Netto Pembangkit *Existing* meningkat 0,72% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 2.563,12 kCal/kWh di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh program *coal switching* PLTU Suralaya 1-7 yang diimplementasikan mulai Juni 2020.

Net Heat Rate of Existing Power Plants

Net heat rate measures the efficiency of fuel consumption in heating value required per net kWh produced by a generation unit in a period. **The lower the net heat rate, the more efficient the power plant.**

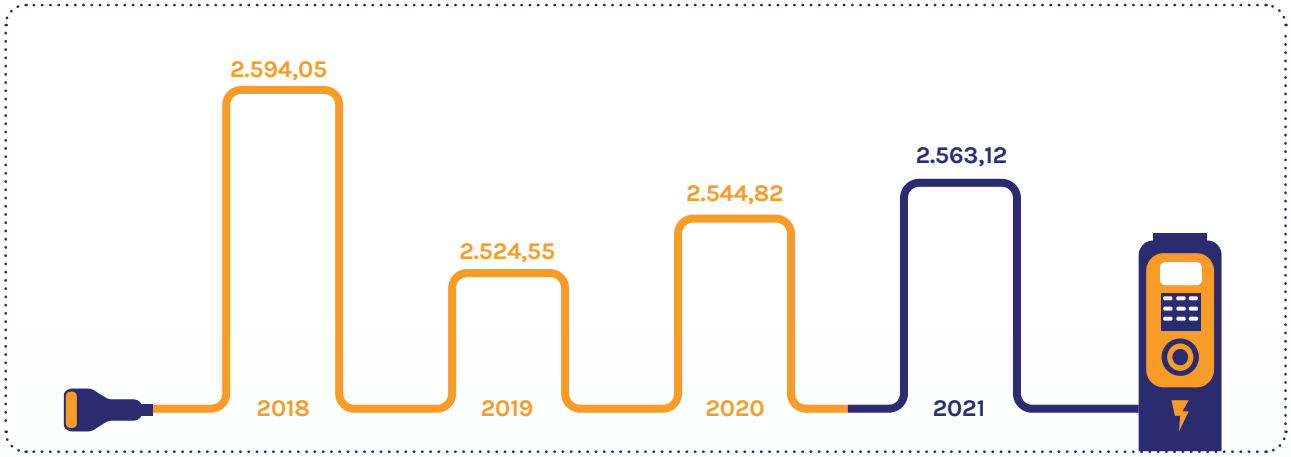
The Net Heat Rate of existing power plants increased 0.72% compared to in 2020, to 2,563.12 kCal/kWh in 2021. This was mainly caused by the implementation of coal switching at SPP Suralaya 1-7 since June 2020.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Tabel Tara Kalor Netto Pembangkit *Existing* Berdasarkan Unit Pembangkit Tahun 2018 - 2021 (kCal/kWh)
Table of Existing Power Plant Net Heat Rate by Generation Unit in 2018-2021 (kCal/kWh)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Suralaya PGU	2.658,80	2.581,97	2.598,29	2.651,82	2,06%
Priok POMU	2.327,00	2.253,10	2.266,90	2.256,96	(0,44%)
Semarang PGU	2.497,14	2.471,98	2.443,90	2.463,66	0,81%
Grati POMU	2.604,93	2.510,87	2.363,87	2.269,60	(3,99%)
Bali PGU	2.512,48	2.335,73	2.331,01	2.354,92	1,03%
Jumlah Tara Kalor Netto Pembangkit *Existing* Total Net Heat Rate of Existing Power Plants	**2.594,05**	**2.524,55**	**2.544,82**	**2.563,12**	**0,72%**

Grafik Tara Kalor Netto Pembangkit *Existing* Tahun 2018 - 2021 (kCal/kWh)
Chart of Existing Power Plant Net Heat Rate in 2018-2021 (kCal/kWh)



Segmen Jasa *Operation and Maintenance* (O&M)
Operations and Maintenance (O&M) Service Segment

Segmen usaha Perusahaan selain menyediakan tenaga listrik adalah menyediakan jasa O*peration & Maintenance* (O&M). Dalam pengelolaan jasa O&M untuk pembangkit milik PLN (pemilik aset), Perusahaan memiliki peran sebagai pihak yang mengoperasikan aset tersebut. Dalam hubungan tersebut, ada tiga macam kontrak jasa, yaitu:

1. Kontrak *Asset Manager Contract* (AMC) yaitu perjanjian O&M berbasis kinerja yang mengatur Indonesia Power sebagai *Asset Manager,*
2. Kontrak *Performance Based* yaitu perjanjian O&M berbasis kinerja yang mengatur Indonesia Power sebagai *Asset Operator,*
3. Kontrak *Supporting* yaitu perjanjian O&M tanpa berbasis kinerja yang mengatur Indonesia Power sebagai *Asset Operator.*

The Company's business segment covers the provision of electricity and operations and maintenance (O&M) services. In managing O&M service for PLN-owned power plants (PLN as the asset owner), the Company assumes the role of the asset operator. In such a commitment, there are three types of service contract, namely:

1. Asset Manager Contract (AMC) is a performance-based O&M service agreement that regulates Indonesia Power's role as Asset Manager;
2. Performance-based Contract is a performance-based O&M service agreement that regulates Indonesia Power's role as Asset Operator;
3. Supporting Contract is a non-performance-based O&M service agreement that regulates Indonesia Power's role as Asset Operator.

Tabel Pembangkit Jasa *Operating and Maintenance* (O&M)
Table of Operations and Maintenance (O&M) Service for Power Plants

Nama Unit Name of Unit	Status kontrak Contract Status	Jasa yang Diberikan Provided Service
PLTU SPP Banten 1 Suralaya OMU	AMC	*Asset Manager*
PLTU SPP Banten 2 Labuan OMU	AMC	*Asset Manager*
PLTU SPP Banten 3 Lontar OMU	AMC	*Asset Manager*
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	AMC	*Asset Manager*
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	AMC	*Asset Manager*
PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	AMC	*Asset Manager*
PLTGU Priok Blok 3 POMU CCPP Priok Block 3 POMU	AMC	*Asset Manager*
PLTU SPP Barru OMU	AMC	*Asset Manager*
PLTU SPP Jeranjang OMU	AMC	*Asset Manager*
PLTU SPP Sanggau OMU	Kontrak *Performance Based* Performance-Based Contract	*Asset Operator*
PLTP GPP Ulumbu	Kontrak *Supporting* Supporting Contract	*Asset Operator*
PLTGU CCPP Cilegon OMU	AMC	*Asset Manager*
PLTU SPP Holtekamp OMU	Kontrak *Supporting* Supporting Contract	*Asset Operator*
PLTU SPP Sintang OMU	Kontrak *Performance Based* Performance-Based Contract	*Asset Operator*
PLTGU CCPP Priok Blok 4 POMU	AMC	*Asset Manager*
PLTGU CCPP Grati Blok 3 POMU	AMC	*Asset Manager*
PLTU SPP Berau OMU	Kontrak *Supporting* Supporting Contract	*Asset Operator*

Kinerja Pembangkit Jasa O&M
Performance of O&M Service Power Plants

Sejak tahun 2016, Indonesia Power mendapatkan kontrak pengelolaan jasa O&M secara menyeluruh (*asset manager contract*) untuk pembangkit di Pulau Jawa, dimana Indonesia Power bertanggung jawab terhadap kinerja pembangkit yang dikelola tersebut.

Since 2016, Indonesia Power has been securing the asset manager contract (AMC) of O&M service for the entire power plants in Java, in which Indonesia Power is responsible for the performance of the power plants under their management.

Kinerja pembangkit jasa O&M Indonesia Power dibedakan menjadi dua yaitu Jawa dan Luar Jawa.

Indonesia Power O&M Service power plants are spread in two areas, i.e. in Java and outside Java.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Kinerja Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa
Performance of O&M Service Generation Units in Java

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) Jasa O&M Jawa

DTP Pembangkit Jasa O&M Jawa pada tahun 2021 sebesar 6.782,70 MW sama dengan tahun 2020.

Installed Capacity of O&M Service Power Plants in Java

The installed capacity of O&M Service power plants in Java in 2021 was 6,782.70 MW, which was the same as in 2020.

Tabel DTP Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Java O&M Service Generation Unit Installed Capacity in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU Banten 1 Suralaya OMU SPP Banten 1 Suralaya OMU	625,00	625,00	625,00	625,00	-
PLTU Banten 2 Labuan OMU SPP Banten 2 Labuan OMU	600,00	600,00	600,00	600,00	-
PLTU Banten 3 Lontar OMU SPP Banten 3 Lontar OMU	945,00	945,00	945,00	945,00	-
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	-
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	660,00	660,00	660,00	660,00	-
PLTGU Priok Blok 3 POMU CCPP Priok Block 3 POMU	740,00	710,00	752,20	752,20	-
PLTGU Priok Blok 4 POMU CCPP Priok Block 4 POMU	600,00	600,00	909,50	909,50	-
PLTGU Cilegon OMU CCPP Cilegon OMU	739,00	740,00	740,00	740,00	-
PLTGU Grati Blok 3 POMU CCPP Grati Block 3 POMU	303,00	501,00	501,00	501,00	-
Jumlah DTP Pembangkit Jasa O&M Jawa **Total Installed Capacity of O&M Service Power Plants in Java**	**6.262,00**	**6.431,00**	**6.782,70**	**6.782,70**	**-**

Capacity Factor (CF) Pembangkit Jasa O&M Jawa

Capacity Factor (CF) pembangkit jasa O&M Jawa pada tahun 2021 adalah sebesar 51,98% lebih rendah 10,61% dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan *supply* energi primer gas pada PLTGU dan batubara pada PLTU.

Capacity Factor (CF) of O&M Service Power Plants in Java

The capacity factor (CF) of O&M Service power plants in Java in 2021 was 51.98%, which was lower by 10.61% than in 2020. This was due to limited supply of primary energy, i.e. gas in CCPPs and coal in SPPs.

Tabel CF Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Java O&M Service Generation Unit CF in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU Banten 1 Suralaya OMU SPP Banten 1 Suralaya OMU	56,00	50,32	57,66	49,51	(14,13%)
PLTU Banten 2 Labuan OMU SPP Banten 2 Labuan OMU	80,19	70,00	69,54	66,41	(4,50%)
PLTU Banten 3 Lontar OMU SPP Banten 3 Lontar OMU	76,61	83,11	66,85	72,07	7,81%

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	62,92	77,11	78,60	64,73	(17,65%)
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	64,60	88,11	65,19	65,27	0,12%
PLTGU Priok Blok 3 POMU CCPP Priok Block 3 POMU	50,56	41,40	49,14	52,88	7,61%
PLTGU Priok Blok 4 POMU CCPP Priok Block 4 POMU	-	50,82	62,37	47,61	(23,67%)
PLTGU Cilegon OMU CCPP Cilegon OMU	54,79	51,02	36,05	25,23	(30,01%)
PLTGU Grati Blok 3 POMU CCPP Grati Block 3 POMU	-	33,69	13,62	0,82	(93,98%)
Jumlah CF Pembangkit Jasa O&M Jawa **Total CF of O&M Service Power Plants in Java**	**63,70**	**62,38**	**58,15**	**51,98**	**(10,61%)**

Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit Jasa O&M Jawa

Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan tingkat kesiapan pembangkit lebih baik. *Equivalent Availability Factor* (EAF) pembangkit jasa O&M Jawa meningkat 0,04% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 89,84% di tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh unit yang lebih andal karena durasi pemeliharaan yang lebih sedikit dibandingkan tahun 2020 di PLTU Lontar.

Equivalent Availability Factor (EAF) of O&M Service Power Plants in Java

Higher EAF score indicates better readiness of the power plant. The Equivalent Availability Factor (EAF) of O&M Service power plants in Java increased 0.04% compared to in 2020, to 89.84% in 2021. This was due to improved unit reliability, i.e. lower maintenance duration in SPP Lontar as compared to in 2020.

Tabel EAF Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2018-2021 (%)
Table of Java O&M Service Generation Unit EAF in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU Banten 1 Suralaya OMU SPP Banten 1 Suralaya OMU	68,99	55,79	71,40	59,22	(17,06%)
PLTU Banten 2 Labuan OMU SPP Banten 2 Labuan OMU	84,73	79,85	90,02	84,39	(6,25%)
PLTU Banten 3 Lontar OMU SPP Banten 3 Lontar OMU	82,58	92,94	83,28	94,7	13,71%
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	77,62	83,38	90,97	91,23	0,29%
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	66,59	93,83	85,17	86,2	1,21%
PLTGU Priok Blok 3 POMU CCPP Priok Block 3 POMU	80,57	84,44	93,74	92,04	(1,81%)
PLTGU Priok Blok 4 POMU CCPP Priok Block 4 POMU	-	86,95	97,41	96,12	(1,32%)
PLTGU Cilegon OMU CCPP Cilegon OMU	84,57	91,84	95,82	98,69	7,46%
PLTGU Grati Blok 3 POMU CCPP Grati Block 3 POMU	-	89,83	99,26	99,95	0,70%
Jumlah EAF Pembangkit Jasa O&M Jawa **Total EAF of O&M Service Power Plants in Java**	**78,70**	**84,72**	**89,80**	**89,84**	**0,04%**

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Scheduled Outage Factor (SOF) Pembangkit Jasa O&M Jawa

Semakin rendah nilai SOF menunjukkan unit pembangkit dapat melakukan optimasi dalam pemeliharaan yang direncanakan. *Scheduled Outage Factor* (SOF) pembangkit jasa O&M Jawa meningkat 41,09% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 7,76% di tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah durasi pemeliharaan *Planned Outage* (PO) dan *Maintenance Outage* (MO) tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun 2020.

Scheduled Outage Factor (SOF) of O&M Service Power Plants in Java

The lower SOF, the better generation unit's performance in optimizing the planned maintenance. The Scheduled Outage Factor (SOF) of O&M Service power plants in Java increased 41.09% compared to in 2020, to 7.76% in 2021. This increase was due to a rise in Planned Outage (PO) and Maintenance Outage (MO) duration in 2021 compared to in 2020.

Tabel SOF Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Java O&M Service Generation Unit SOF in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU Banten 1 Suralaya OMU SPP Banten 1 Suralaya OMU	24,62	17,77	6,91	29,93	333,14%
PLTU Banten 2 Labuan OMU SPP Banten 2 Labuan OMU	7,76	6,83	2,81	13,75	389,32%
PLTU Banten 3 Lontar OMU SPP Banten 3 Lontar OMU	13,02	2,31	12,64	3,00	(76,27%)
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	9,89	10,98	3,26	8,00	145,40%
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	29,23	4,64	13,16	9,46	(28,12%)
PLTGU Priok Blok 3 POMU CCPP Priok Block 3 POMU	13,13	1,19	3,84	4,88	27,08%
PLTGU Priok Blok 4 POMU CCPP Priok Block 4 POMU	-	9,89	1,52	3,82	151,32%
PLTGU Cilegon OMU CCPP Cilegon OMU	14,67	5,88	4,17	1,19	(71,46%)
PLTGU Grati Blok 3 POMU CCPP Grati Block 3 POMU	-	9,42	0,62	0,00	-
Jumlah SOF Pembangkit Jasa O&M Jawa **Total SOF of O&M Service Power Plants in Java**	**15,44**	**7,51**	**5,50**	**7,76**	**41,09%**

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) Pembangkit Jasa O&M Jawa

Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan keandalan unit pembangkit lebih baik dan dapat mengatasi gangguan lebih cepat. *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) pembangkit jasa O&M Jawa lebih rendah 21,93% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 2,10% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa unit pembangkit Jasa O&M Jawa dapat menurunkan jumlah durasi gangguan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of O&M Service Power Plants in Java

The lower EFOR, the better generation unit's reliability and the faster outages are handled. The Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of O&M Service power plants in Java decreased 21.93% compared to in 2020, to 2.10% in 2021. This demonstrates that Java O&M Service generation units were capable of reducing the number of outages in 2021 as compared to in 2020.

Tabel EFOR Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Java O&M Service Generation Unit EFOR in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU Banten 1 Suralaya OMU SPP Banten 1 Suralaya OMU	17,43	17,91	4,94	12,94	161,94%
PLTU Banten 2 Labuan OMU SPP Banten 2 Labuan OMU	6,96	14,29	6,31	1,98	(68,62%)
PLTU Banten 3 Lontar OMU SPP Banten 3 Lontar OMU	4,57	3,99	3,67	2,23	(39,24%)
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	13,51	6,16	4,06	0,62	(84,73%)
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	5,88	0,40	1,63	4,86	198,16%
PLTGU Priok Blok 3 POMU CCPP Priok Block 3 POMU	3,03	17,59	0,22	0,56	154,55%
PLTGU Priok Blok 4 POMU CCPP Priok Block 4 POMU	-	0,87	0,22	0,07	(68,18%)
PLTGU Cilegon OMU CCPP Cilegon OMU	0,15	0,00	0,01	0,12	1.100,00%
PLTGU Grati Blok 3 POMU CCPP Grati Block 3 POMU	-	1,53	0,15	0,06	(60,00%)
Jumlah EFOR Pembangkit Jasa O&M Jawa **Total EFOR of O&M Service Power Plants in Java**	**7,62**	**6,81**	**2,69**	**2,10**	**(21,93%)**

Sudden Outage Frequency (SdOF) Pembangkit Jasa O&M Jawa

Semakin rendah nilai SdOF maka semakin baik pengelolaan operasional Perusahaan dalam memitigasi gangguan. *Sudden Outage Frequency* (SdOF) pembangkit jasa O&M Jawa lebih rendah 47,10% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 0,82 kali di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa unit pembangkit Jasa O&M Jawa dapat menurunkan jumlah gangguan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Sudden Outage Frequency (SdOF) of O&M Service Power Plants in Java

Lower SdOF rate means better operational management in mitigating outages. The Sudden Outage Frequency (SdOF) of O&M Service power plants in Java decreased 47.10% compared to in 2020, to 0.82 times in 2021. This demonstrates that Java O&M Service generation units were capable of reducing the number of outages in 2021 as compared to in 2020.

Tabel SdOF Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2018 - 2021 (kali)
Table of Java O&M Service Generation Unit SdOF in 2018-2021 (frequency)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU Banten 1 Suralaya OMU SPP Banten 1 Suralaya OMU	8,00	3,00	2,00	3,00	50,00%
PLTU Banten 2 Labuan OMU SPP Banten 2 Labuan OMU	2,00	1,00	3,50	1,50	(57,14%)
PLTU Banten 3 Lontar OMU SPP Banten 3 Lontar OMU	3,33	0,67	2,33	1,00	(57,08%)
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	2,00	1,67	1,33	0,67	(49,62%)
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	3,00	2,00	2,00	2,00	-

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTGU Priok Blok 3 POMU CCPP Priok Block 3 POMU	2,67	1,00	0,33	1,00	203,03%
PLTGU Priok Blok 4 POMU CCPP Priok Block 4 POMU	-	1,67	1,67	0,33	(80,24%)
PLTGU Cilegon OMU CCPP Cilegon OMU	1,33	0,00	0,33	0,33	-
PLTGU Grati Blok 3 POMU CCPP Grati Block 3 POMU	-	3,33	1,67	0,00	-
Jumlah SdOF Pembangkit Jasa O&M Jawa **Total SdOF of O&M Service Power Plants in Java**	**2,69**	**1,50**	**1,55**	**0,82**	**(47,10%)**

Tara Kalor Netto Pembangkit Jasa O&M Jawa

Semakin rendah nilai Tara Kalor Netto menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien. Tara Kalor Netto pembangkit jasa O&M Jawa meningkat 5,74% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 2.638,12 kCal/kWh di tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh CF rendah akibat beban *Technical Minimum Load* (TML) karena keterbatasan pasokan energi primer batubara.

Net Heat Rate of O&M Service Power Plants in Java

The lower the net heat rate, the more efficient the power plant. The Net Heat Rate of O&M Service Power Plants in Java increased 5.74% compared to in 2020, to 2,638.12 kCal/kWh in 2021. This was due to low CF as a result of Technical Minimum Load (TML) resulted from limited supply of coal as primary energy.

Tabel Tara Kalor Netto Unit Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2018 - 2021 (kCal/kWh)
Table of Java O&M Service Generation Unit Net Heat Rate in 2018-2021 (kCal/kWh)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU Banten 1 Suralaya OMU SPP Banten 1 Suralaya OMU	2.764,25	2.842,13	2.961,56	3.229,53	9,05%
PLTU Banten 2 Labuan OMU SPP Banten 2 Labuan OMU	2.704,25	2.763,78	2.897,82	2.984,37	2,99%
PLTU Banten 3 Lontar OMU SPP Banten 3 Lontar OMU	2.736,37	2.688,90	2.821,80	3.086,83	9,39%
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	2.882,62	2.703,51	2.863,88	3.000,22	4,76%
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	2.377,71	2.384,49	2.436,03	2.499,65	2,61%
PLTGU Priok Blok 3 POMU CCPP Priok Block 3 POMU	1.824,34	1.935,59	1.916,29	1.834,59	(4,26%)
PLTGU Priok Blok 4 POMU CCPP Priok Block 4 POMU	-	1.954,91	1.761,37	1.763,63	0,13%
PLTGU Cilegon OMU CCPP Cilegon OMU	1.954,15	1.844,86	2.020,21	2.153,64	6,60%
PLTGU Grati Blok 3 POMU CCPP Grati Block 3 POMU	-	1.962,60	1.990,45	3.979,43	99,93%
Jumlah Tara Kalor Netto Pembangkit Jasa O&M Jawa **Total Net Heat Rate of O&M Service Power Plants in Java**	**2.522,93**	**2.358,78**	**2.494,81**	**2.638,12**	**5,74%**

Kinerja Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa
Performance of O&M Service Generation Units outside Java

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) Jasa O&M Luar Jawa

Daya Terpasang Pembangkit (DTP) pembangkit jasa O&M Luar Jawa meningkat 67,63% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 1.165,00 MW di tahun 2021 yang disebabkan oleh telah serah terima PLTU Jeranjang unit 2 pada bulan Oktober 2021 dan PLTU Pangkalan Susu Unit 3-4 pada bulan November 2021.

Installed Capacity of O&M Service Power Plants outside Java

The installed capacity of O&M Service power plants increased 67.63% from 2020, to 1,165.00 MW in 2021, as a result of the handover of PP Jeranjang Unit 2 in October 2021 and SPP Pangkalan Susu Units 3-4 in November 2021.

Tabel DTP Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Tahun 2018 - 2021 (MW)
Table of Outside Java O&M Service Generation Unit Installed Capacity in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	440,00	440,00	440,00	880,00	100,00%
PLTU SPP Barru OMU	100,00	100,00	100,00	100,00	-
PLTU SPP Jeranjang OMU	60,00	60,00	60,00	90,00	50,00%
PLTU SPP Sanggau OMU	17,00	17,00	17,00	17,00	-
PLTP SPP Ulumbu	10,00	10,00	10,00	10,00	-
PLTU SPP Sintang OMU	27,00	27,00	27,00	27,00	-
PLTU SPP Holtekamp OMU	24,00	24,00	24,00	24,00	-
PLTA HPP Orya Genyem OMU*	20,00	-	-	-	-
PLTU SPP Berau OMU	-	-	17,00	17,00	-
Jumlah DTP Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa **Total Installed Capacity of O&M Service Power Plants outside Java**	**698,00**	**678,00**	**695,00**	**1.165,00**	**67,63%**

* Kontrak pengelolaan jasa O&M telah berakhir pada bulan Agustus 2019
* The O&M service management contract has expired in August 2019

Capacity Factor (CF) Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa

Capacity Factor (CF) pembangkit jasa O&M Luar Jawa meningkat 1,97% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 56,85% di tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh eksekusi excelent operasi dan pemeliharaan di seluruh unit Luar Jawa melalui aplikasi Maximo serta implementasi program *Roll In Roll Out* (RIRO), *Joint Inventory*, dan *Beyond* 5ON dalam eksekusi pemeliharaan.

Capacity Factor (CF) of O&M Service Power Plants outside Java

The Capacity Factor (CF) of O&M Service power plants outside Java increased 1.97% compared to in 2020, to 56.85% in 2021. This was a result of excellent execution of O&M at all units outside Java using Maximo application as well as the implementation of Roll In Roll Out (RIRO), Joint Inventory, and Beyond 5ON programs in maintenance execution.

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

Tabel CF Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Outside Java O&M Service Generation Unit CF in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	39,34	46,53	63,02	55,28	(12,28%)
PLTU SPP Barru OMU	31,40	41,08	39,59	51,99	31,32%
PLTU SPP Jeranjang OMU	51,85	69,99	74,55	76,49	2,60%
PLTU SPP Sanggau OMU	38,62	41,40	63,46	73,69	16,12%
PLTP SPP Ulumbu	43,82	55,52	59,60	59,05	(0,92%)
PLTU SPP Sintang OMU	-	45,45	82,06	80,85	(1,47%)
PLTU SPP Holtekamp OMU	12,25	1,87	7,96	12,50	57,04%
PLTA HPP Orya Genyem OMU*	28,41	-	-	-	-
PLTU SPP Berau OMU	-	-	-	44,94	-
Jumlah CF Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa **Total CF of O&M Service Power Plants outside Java**	**35,09**	**43,12**	**55,75**	**56,85**	**1,97**

* Kontrak pengelolaan jasa O&M telah berakhir pada bulan Agustus 2019
* The O&M service management contract has expired in August 2019

Equivalent Availability Factor (EAF) Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa

Semakin tinggi nilai EAF menunjukkan tingkat kesiapan pembangkit lebih baik. *Equivalent Availability Factor* (EAF) pembangkit jasa O&M Luar Jawa lebih rendah 1,03% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 77,80% di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh adanya:

1. Kerusakan *Dome Coal Yard*, gangguan *Induced Draft Fan* dan *Boiler Feed Pump* (BFP) pada PLTU Pangkalan Susu OMU.
2. Gangguan Deformasi *Chain Grate* dan gangguan *Slagging Economizer Flue Gas System* pada PLTU Holtekamp OMU.

Equivalent Availability Factor (EAF) of O&M Service Power Plants outside Java

Higher EAF score indicates better readiness of the power plant. The Equivalent Availability Factor (EAF) of O&M Service power plants outside Java decreased 1.03% compared to in 2020, to 77.80% in 2021. This was due to:

1. Coal yard dome damage, induced draft fan failure, and boiler feed pump (BFP) failure in SPP Pangkalan Susu OMU.
2. Chain grate deformation and slagging and economizer flue gas system failure in SPP Holtekamp OMU.

Tabel EAF Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Outside Java O&M Service Generation Unit EAF in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	40,50	47,89	80,03	76,51	(4,40%)
PLTU SPP Barru OMU	49,94	49,42	54,39	67,27	23,68%
PLTU SPP Jeranjang OMU	67,15	74,03	74,75	85,53	14,42%
PLTU SPP Sanggau OMU	67,05	59,39	80,61	84,66	5,02%
PLTP SPP Ulumbu	87,83	84,42	92,90	92,50	(0,43%)
PLTU SPP Sintang OMU	-	71,83	83,15	86,79	4,38%
PLTU SPP Holtekamp OMU	47,90	12,97	84,46	35,73	(57,70%)
PLTA HPP Orya Genyem OMU*	64,86	-	-	-	-

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU SPP Berau OMU	-	-	-	73,45	-
Jumlah EAF Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa **Total EAF of O&M Service Power Plants outside Java**	**60,74**	**50,98**	**78,61**	**77,80**	**(1,03%)**

* Kontrak pengelolaan jasa O&M telah berakhir pada bulan Agustus 2019
* The O&M service management contract has expired in August 2019

Scheduled Outage Factor (SOF) Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa

Semakin rendah nilai SOF menunjukkan unit pembangkit dapat melakukan optimasi dalam pemeliharaan yang direncanakan. *Scheduled Outage Factor* (SOF) pembangkit jasa O&M Luar Jawa pada tahun 2021 meningkat 31,03% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 16,30%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah durasi pemeliharaan *Planned Outage* (PO) dan *Maintenance Outage* (MO) tahun 2021 lebih banyak dibandingkan tahun 2020.

Scheduled Outage Factor (SOF) of O&M Service Power Plants outside Java

The lower SOF, the better generation unit's performance in optimizing the planned maintenance. The Scheduled Outage Factor (SOF) of O&M Service power plants outside Java in 2021 increased 31.03% compared to in 2020, to 16.30%. This was due to the increase in the number of Planned Outage (PO) and Maintenance Outage (MO) duration compared to in 2020.

Tabel SOF Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Outside Java O&M Service Generation Unit SOF in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	17,36	16,26	12,02	10,83	(9,90%)
PLTU SPP Barru OMU	37,19	35,00	15,50	17,65	13,87%
PLTU SPP Jeranjang OMU	18,20	13,91	8,84	10,25	15,95%
PLTU SPP Sanggau OMU	29,60	37,51	15,03	13,58	(9,65%)
PLTP SPP Ulumbu	9,35	14,84	6,40	6,9	7,81%
PLTU SPP Sintang OMU	-	26,71	14,05	11,02	(21,57%)
PLTU SPP Holtekamp OMU	16,91	86,98	15,26	52,60	244,69%
PLTA HPP Orya Genyem OMU*	14,07	-	-	-	-
PLTU SPP Berau OMU	-	-	-	20,28	-
Jumlah SOF Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa **Total SOF of O&M Service Power Plants outside Java**	**20,38**	**22,61**	**12,44**	**16,30**	**31,03%**

* Kontrak pengelolaan jasa O&M telah berakhir pada bulan Agustus 2019
* The O&M service management contract has expired in August 2019

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa

Semakin rendah nilai EFOR menunjukkan keandalan unit pembangkit lebih baik dan dapat mengatasi gangguan lebih cepat. *Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) pembangkit jasa O&M Luar Jawa pada tahun 2021 lebih rendah 36,04% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 3,94%. Hal ini

Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of O&M Service Power Plants outside Java

The lower EFOR, the better generation unit's reliability and the faster outages are handled. The Equivalent Forced Outage Rate (EFOR) of O&M Service power plants outside Java in 2021 was a decline by 36.04% compared to in 2020, to 3.94%. This demonstrates that Outside Java O&M Service generation

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT

menunjukkan bahwa unit pembangkit Jasa O&M Luar Jawa telah melakukan eksekusi *excelent* operasi dan pemeliharaan melalui aplikasi Maximo serta implementasi program *Roll In Roll Out* (RIRO), *Joint Inventory,* dan *Beyond* 5ON dalam eksekusi pemeliharaan.

units have executed excellent operations and maintenance via Maximo software and implemented Roll In Roll Out (RIRO), Joint Inventory, and Beyond 5ON programs in maintenance execution.

Tabel EFOR Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Outside Java O&M Service Generation Unit EFOR in 2018-2021 (%)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	50,79	42,64	8,92	13,83	55,04%
PLTU SPP Barru OMU	6,47	3,15	8,11	5,39	(33,54%)
PLTU SPP Jeranjang OMU	6,01	13,21	17,73	4,57	(74,22%)
PLTU SPP Sanggau OMU	4,18	4,25	3,80	2,04	(46,32%)
PLTP SPP Ulumbu	3,49	0,96	0,94	0,81	(13,83)
PLTU SPP Sintang OMU	-	1,99	2,59	2,45	(5,41%)
PLTU SPP Holtekamp OMU	52,53	0,70	1,01	4,34	329,70%
PLTA HPP Orya Genyem OMU*	21,07	-	-	-	-
PLTU SPP Berau OMU	-	-	-	2,58	-
Jumlah EFOR Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Total EFOR of O&M Service Power Plants outside Java	**20,65**	**28,67**	**6,16**	**3,94**	**(36,04%)**

* Kontrak pengelolaan jasa O&M telah berakhir pada bulan Agustus 2019
* The O&M service management contract has expired in August 2019

Sudden Outage Frequency (SdOF) Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa

Semakin rendah nilai SdOF maka semakin baik pengelolaan operasional Perusahaan dalam memitigasi gangguan. *Sudden Outage Frequency* (SdOF) pembangkit jasa O&M Luar Jawa lebih rendah 3,52% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 4,11 kali di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa unit pembangkit Jasa O&M Luar Jawa telah melakukan eksekusi *excelent* operasi dan pemeliharaan melalui aplikasi Maximo serta implementasi program *Roll In Roll Out* (RIRO), *Joint Inventory,* dan *Beyond* 5ON dalam eksekusi pemeliharaan.

Sudden Outage Frequency (SdOF) of O&M Service Power Plants outside Java

Lower SdOF rate means better operational management in mitigating outages. The Sudden Outage Frequency (SdOF) of O&M Service power plants outside Java decreased 3.52% compared to in 2020, to 4.11 times in 2021. This demonstrates that Outside Java O&M Service generation units have executed excellent operations and maintenance via Maximo software and implemented Roll In Roll Out (RIRO), Joint Inventory, and Beyond 5ON programs in maintenance execution.

Tabel SdOF Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Tahun 2018-2021 (kali)
Table of Outside Java O&M Service Generation Unit SdOF in 2018-2021 (frequency)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	9,00	8,00	4,50	2,25	(50,00%)
PLTU SPP Barru OMU	6,50	3,50	0,50	1,00	100,00%
PLTU SPP Jeranjang OMU	7,00	6,00	7,00	3,67	(47,57%)
PLTU SPP Sanggau OMU	2,50	2,50	2,50	4,00	60,00%

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTP SPP Ulumbu	18,75	10,50	9,00	4,50	(50,00%)
PLTU SPP Sintang OMU	-	1,67	2,33	2,00	(14,16%)
PLTU SPP Holtekamp OMU	9,00	3,00	4,00	4,00	-
PLTA HPP Orya Genyem OMU*	8,79	-	-	-	-
PLTU SPP Berau OMU	-	-	-	8,00	-
Jumlah SdOF Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa **Total SdOF of O&M Service Power Plants outside Java**	**8,79**	**5,56**	**4,26**	**4,11**	**(3,52%)**

* Kontrak pengelolaan jasa O&M telah berakhir pada bulan Agustus 2019
* The O&M service management contract has expired in August 2019

Tara Kalor Netto Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa

Semakin rendah nilai Tara Kalor Netto menunjukkan bahwa pembangkit tersebut semakin efisien. Tara Kalor pembangkit jasa O&M Luar Jawa lebih rendah 19,43% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar 3.951,63 kCal/kWh di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan *monitoring* kinerja operasi melalui REOC dan percepatan percepatan penanganan gangguan melalui program *maintenance* rutin yaitu *First Line Maintenance* (FLM), *Preventive Maintenance* (PM), dan *Predictive Maintenance* (PDM) untuk keandalan unit pada Sanggau OMU dan Sintang OMU.

Net Heat Rate of O&M Service Power Plants outside Java

The lower the net heat rate, the more efficient the power plant. The Net Heat Rate of O&M Service power plants outside Java increased 19.43% compared to in 2020, to 3,951.63 kCal/kWh in 2021. This was due to the improvement of operational performance monitoring via REOC and accelerated handling of failures under regular maintenance programs, i.e. First Line Maintenance (FLM), Preventive Maintenance (PM), and Predictive Maintenance (PDM) for unit reliability in Sanggau OMU and Sintang OMU.

Tabel Tara Kalor Unit Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Tahun 2018-2021 (kCal/kWh)
Table of Outside Java O&M Service Generation Unit Net Heat Rate in 2018-2021 (kCal/kWh)

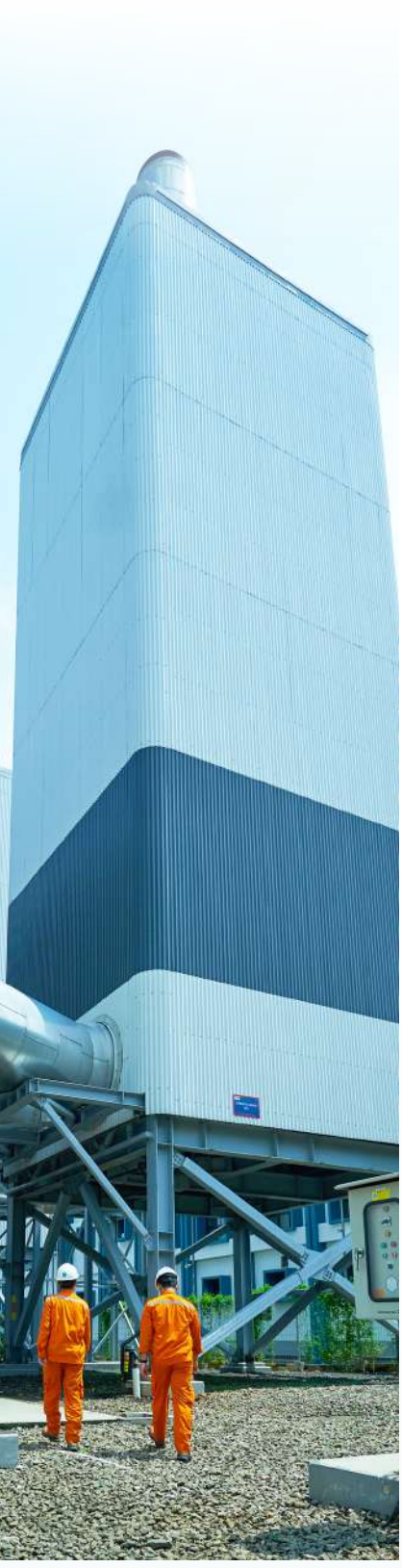
Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	3.364,81	3.615,25	3.628,10	3.557,92	(1,93%)
PLTU SPP Barru OMU	4.344,55	4.311,91	4.387,65	4.537,73	3,42%
PLTU SPP Jeranjang OMU	4.094,18	3.923,02	3.966,57	4.081,47	2,90%
PLTU SPP Sanggau OMU	6.042,35	7.134,89	6.607,20	5.538,40	(16,18%)
PLTU SPP Sintang OMU	7.235,62	5.695,49	5.932,12	5.559,96	(6,27%)
PLTU SPP Berau OMU	-	-	-	5.797,49	-
Jumlah Tara Kalor Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa **Total Net Heat Rate of O&M Service Power Plants outside Java**	**5.016,32**	**4.936,11**	**4.904,33**	**3.951,63**	**(19,43%)**

Segmen Usaha Lainnya
Other Business Segments

Segmen usaha lainnya terdiri dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui penugasan kepada Anak Perusahaan. Adapun jenis-jenis usaha yang ditugaskan ke Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Other business segments comprise business activities carried out through assignment to Subsidiaries. The types of business assigned to the Subsidiaries are as follows:

TINJAUAN KINERJA OPERASI PER SEGMEN
OPERATIONAL PERFORMANCE OVERVIEW BY SEGMENT



PETA BISNIS BEYOND KWH IP GROUP

IP Group's Beyond kWh Business Map

Biru : Produk Beyong kWh yang sudah dieksekusi
Hitam : Produk baru akan dieksekusi
Blue: Executed beyond kWh products
Black: New products to execute

Enterprise Asset Management

1. Setup Manajemen Aset
2. Setup Digitalisasi (Enterprise Architechture, DigiMonX, Maximo)
3. Sistem Pakar (Setup REOC)
4. Operational Development Program (ODP)

1. Asset Management Setup
2. Digitalization Setup (Enterprise Architecture, DigiMonX, Maximo)
3. Expert System (REOC System)
4. Operational Development Program (ODP)

Cogindo

Other Non-Core Business

1. Industri Garam
2. Sewa Tangki
3. Market Place (Business 4.0)
4. Sewa Lahan
5. Wisata *Hospitality* Area Pembangkit Eksisting
6. Jasa Konsultasi Manajemen
7. Pengelolaan FABA

1. Salt Industry
2. Tank Rental
3. Marketplace (Business 4.0)
4. Land Lease
5. Tourism/Hospitality of Existing Power Plant Area
6. Management Consulting Service
7. FABA Management

Putra Indotenaga

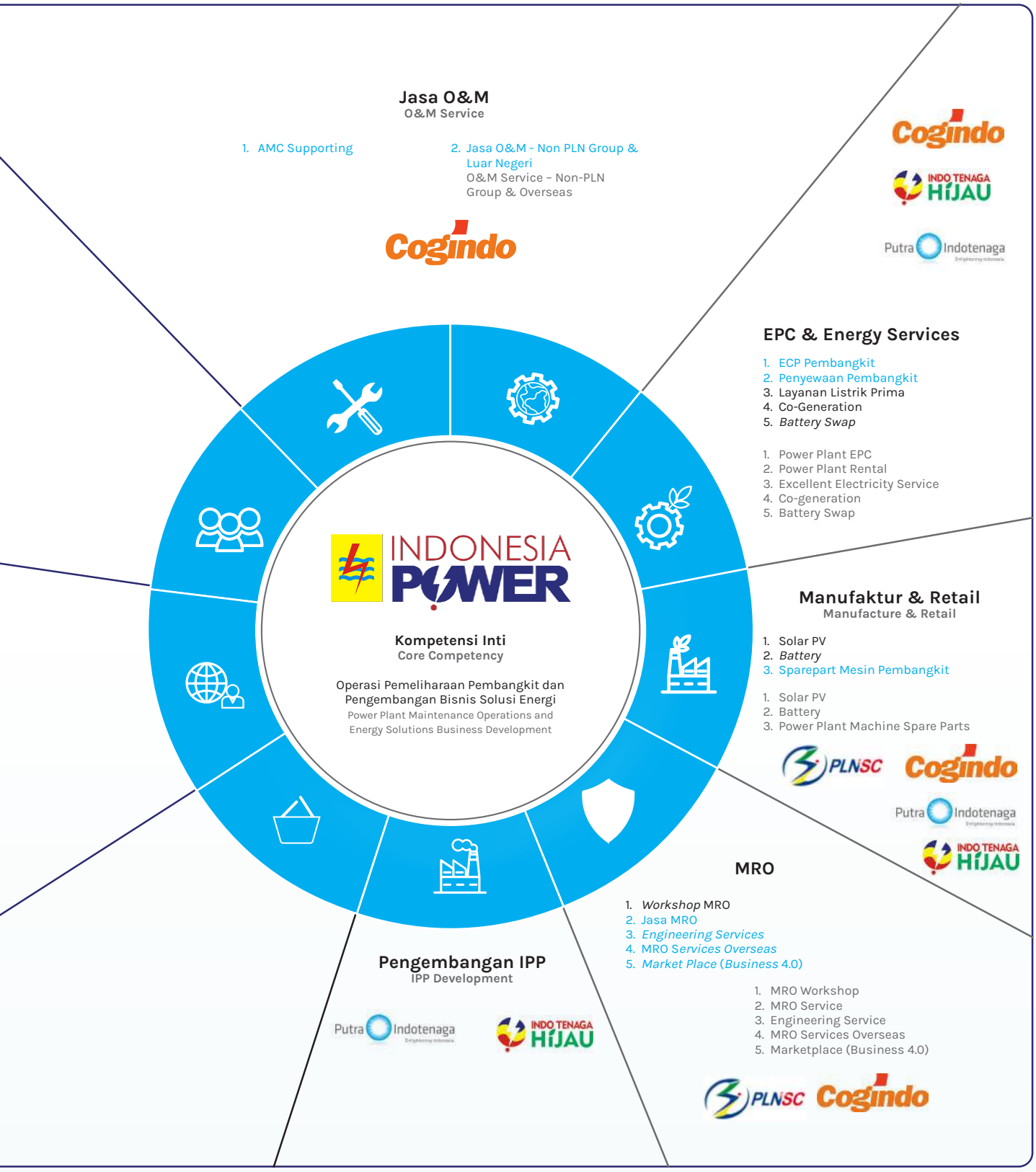
Primary Energy & Port Management

1. *Coal & Biomass Trading*
2. *Gas Midstream Facility*
3. *Port Management*
4. *Dredging*

PT. ARTHA DAYA COALINDO
Subsidiary of PT. INDONESIA POWER

PT PERTA DAYA GAS
PERTAMINA GAS | INDONESIA POWER

Kinerja operasional dari masing-masing kegiatan usaha Anak Perusahaan dapat dilihat pada Laporan Tahunan Anak Perusahaan yang dimaksud.



Operational performance of each Subsidiary's business activities is available in the Annual Report of the respective Subsidiaries.

PROFITABILITAS PER SEGMEN
PROFITABILITY BY SEGMENT

Pendapatan Operasi Per Segmen
Revenue by Segment

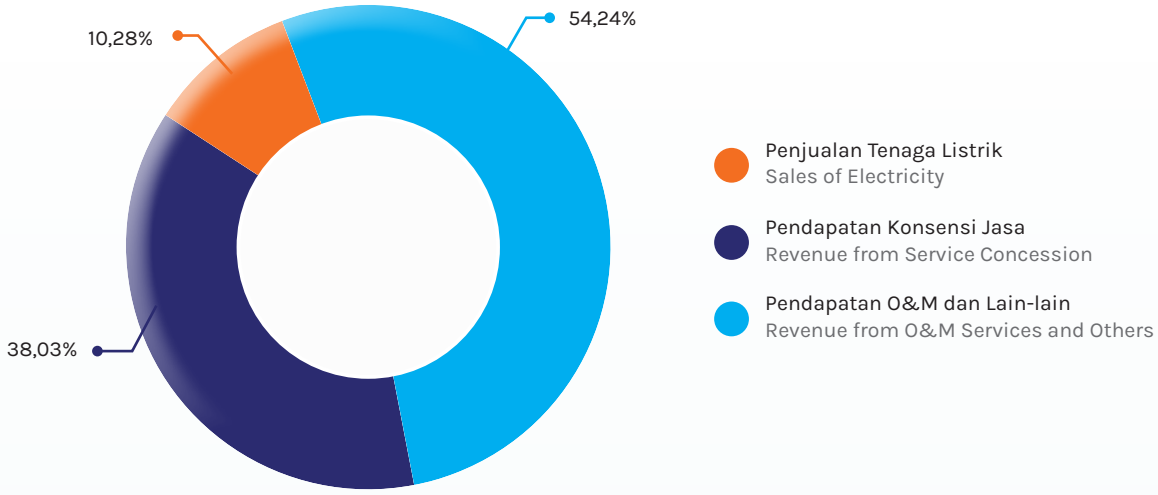
Pendapatan usaha Indonesia Power terdiri dari penjualan tenaga listrik, pendapatan dari konsensi jasa dan pendapatan jasa. Pendapatan usaha tahun 2021 adalah sebesar Rp38,52 triliun lebih rendah 0,57% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp38,74 triliun.

Dari jumlah pendapatan tersebut, pendapatan usaha dari segmen usaha pembangkitan tenaga listrik masih mendominasi dengan jumlah kontribusi sebesar Rp34,56 triliun atau 90%. Dari jumlah tersebut pendapatan usaha dari pembangkitan listrik adalah sebesar Rp19,91 triliun atau 54,24% dan pendapatan konsesi jasa sebesar Rp14,66 triliun atau 38,03%. Pendapatan usaha dari konsesi jasa sendiri atas PJBTL PLTU Suralaya 1-7 dan PT IRP sebagai dampak dari kontrak PJBTL selama 30 tahun yang memenuhi kriteria ISAK 16. Sedangkan pendapatan usaha dari segmen usaha jasa O&M dan lain-lain adalah sebesar Rp3,96 triliun atau kontribusi sebesar 10,28%.

Indonesia Power's revenue comprises sales of electricity, revenue from service concession, and service revenue. Revenue in 2021 was Rp38.52 trillion, 0.57% less than in 2020 with Rp38.74 trillion.

From such revenue, revenue from the electricity power generation was dominating with Rp34.56 trillion or 90% of the contribution. Revenue from electricity power generation comprise revenues from the sales of electricity amounting to Rp19.91 trillion or 54.24% and service concession amounting to Rp14.66 trillion or 38.03%. Revenue from service concession comprises Power Purchase Agreement (PPA) of SPP Suralaya 1-7 and PT IRP as an impact of the 30-year PPA that met ISAK 16 criteria. Meanwhile, revenue from O&M services and others were Rp3.96 trillion or 10.28% of the contribution.

Komposisi Pendapatan Usaha Per Segmen Tahun 2021 (Rp juta)
Composition of Revenue by Segment in 2021 (Rp million)



Kontribusi Kinerja Keuangan dari Anak Perusahaan
Contribution of Financial Performance from Subsidiaries

Laba komprehensif Indonesia Power juga dikontribusi dari kinerja Anak Perusahaan. Berikut merupakan profitabilitas Anak Perusahaan Indonesia Power tahun 2021:

The performances of Indonesia Power's subsidiaries affect their comprehensive profit or loss. The followings are the profit (loss) recorded from Indonesia Power's subsidiaries in 2021:

Tabel Laba Anak Perusahaan Tahun 2021 (Rp juta)
Table of Profit (Loss) from Subsidiaries in 2021 (Rp million)

No.	Nama Anak Perusahaan Name of Subsidiary	Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan Total Net Income for the Year
1.	ADC: PT Artha Daya Coalindo	85.721
2.	CDB: PT Cogindo DayaBersama	145.310
3.	IRP: PT Indo Ridlatama Power	(131.709)
4.	PIT: PT Putra Indotenaga	(14.804)

Uraian singkat mengenai kinerja Anak Perusahaan telah dijelaskan pada bab Profil Perusahaan bagian Sekilas tentang Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi dalam Laporan Tahunan ini.

The performance overview of the Subsidiaries can be found in the Chapter of Company Profile, Section of Performance Overview of Subsidiaries, Joint Ventures, and Associates in this Annual Report.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Uraian kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK). Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Akuntan Publik PWC dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022 mendapatkan opini **"wajar dalam semua hal yang material".** Selanjutnya, Laporan Keuangan lengkap beserta catatannya disajikan pada bagian tersendiri dalam Laporan Tahunan ini.

These financial performance highlights were prepared based on the Financial Statements made and presented according to the Financial Accounting Standards in Indonesia (SAK). The Financial Statements for the year ended on December 31, 2021 has been audited by Public Accountant PWC and Public Accounting Firm of KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan which was issued on March 31, 2022 and received the qualified opinion (**"present fairly, in all material respects"**). Further, the Financial Statements along with its notes will be presented in the separate section of this Annual Report.

Laporan Posisi Keuangan
Statements of Financial Position

Posisi keuangan Indonesia Power tahun 2021 dengan Jumlah Aset menjadi Rp193,71 triliun, Liabilitas menjadi Rp15,31 triliun dan Ekuitas menjadi Rp178,40 triliun.

Indonesia Power's financial position in 2021 comprises Total Assets of Rp193.71 trillion, Liabilities of Rp15.31 trillion, and Equity of Rp178.40 trillion.

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Tabel Posisi Keuangan Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Financial Position in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Jumlah Aset Total Assets	196.133.125	189.705.596	200.011.263	193.713.794	(3,15%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	8.095.689	7.712.397	16.067.595	15.312.157	(4,70%)
Jumlah Ekuitas Total Equity	188.037.436	181.993.199	183.943.668	178.401.637	(3,01%)

Aset
Assets

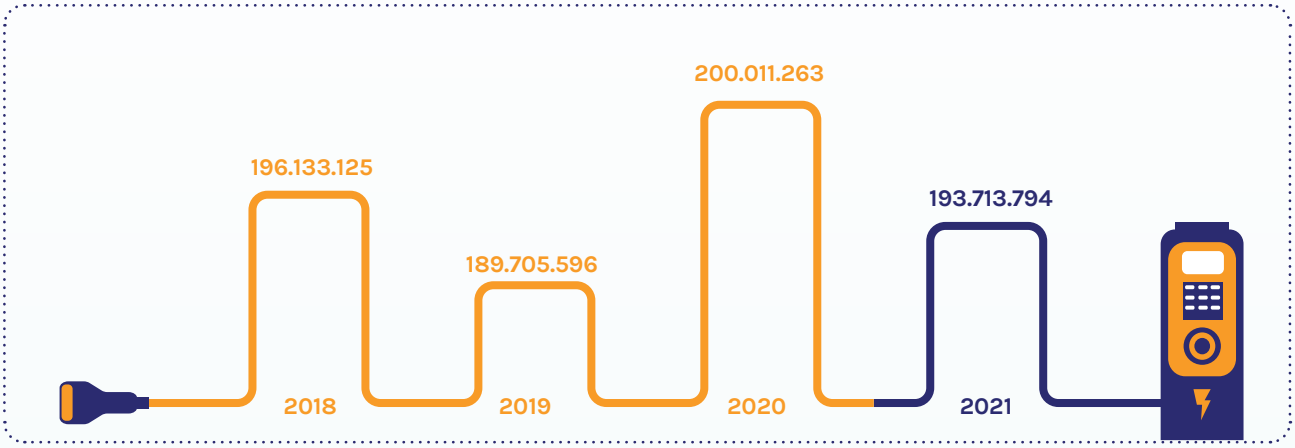
Jumlah Aset Indonesia Power lebih rendah 3,15% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp193,71 triliun di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh proses normal depresiasi aset tetap, dan membaiknya *collection* periode Piutang Usaha yang tercatat pada Aset Lancar.

Indonesia Power's Total Assets were 3.15% lower than in 2020, to Rp197.71 trillion in 2021. This was particularly influenced by the normal process of Property, Plant, and Equipment depreciation and improved collection period for Trade Receivables recorded in the Current Assets.

Tabel Aset Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Assets in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Aset Lancar Current Assets	36.506.702	31.546.109	37.189.744	34.232.232	(7,95%)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	159.626.423	158.159.487	162.821.519	159.481.562	(2,05%)
Jumlah Aset Total Assets	**196.133.125**	**189.705.596**	**200.011.263**	**193.713.794**	**(3,15%)**

Grafik Aset Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Assets in 2018-2021 (Rp million)



Aset Lancar
Current Assets

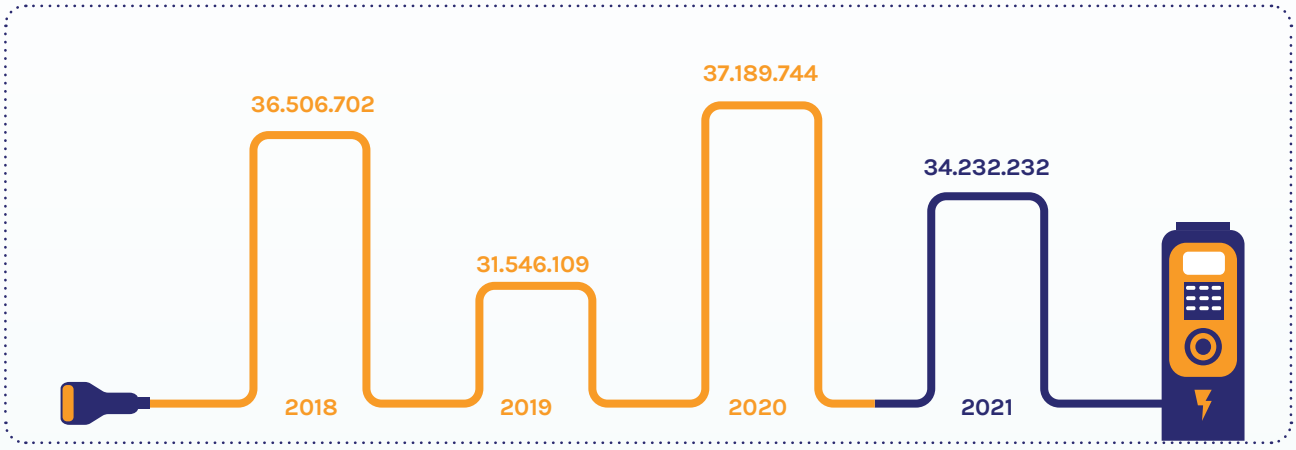
Aset Lancar Indonesia Power lebih rendah 7,95% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp34,23 triliun di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh Piutang Usaha, Persediaan, dan Pajak Dibayar Dimuka.

Indonesia Power's Current Assets were lower by 7.95% compared to in 2020, to Rp34.23 trillion in 2021. This was dominantly influenced by Trade Receivables, Inventories, and Prepaid Taxes.

Tabel Aset Lancar Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Current Assets in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.842.156	1.518.102	2.650.785	2.766.128	4,35%
Piutang Usaha Trade Receivables	29.133.798	24.846.959	30.775.556	27.340.015	(11,16%)
Piutang Lain-lain Other Receivables	9.986	8.115	26.180	28.861	10,24%
Persediaan Inventories	2.191.413	1.808.491	1.461.003	1.385.768	(5,15%)
Pajak dibayar di muka Prepaid Taxes	1.363.966	1.437.405	649.771	566.327	(12,84%)
Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid Expenses and Advances	489.013	314.175	11.343	66.638	487,47%
Aset Keuangan Konsesi Jasa jatuh tempo dalam satu tahun Current maturities of financial assets of service concession	1.417.262	1.532.251	1.538.433	2.019.485	31,27%
Piutang Pihak Berelasi Receivables from Related Parties	59.108	52.540	76.673	59.011	(23,04%)
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**36.506.702**	**31.546.109**	**37.189.744**	**34.232.232**	**(7,95%)**

Grafik Aset Lancar Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Current Assets in 2018-2021 (Rp million)



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Indonesia Power meningkat 4,35% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp2,77 triliun di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh membaiknya pelunasan piutang penjualan tenaga listrik.

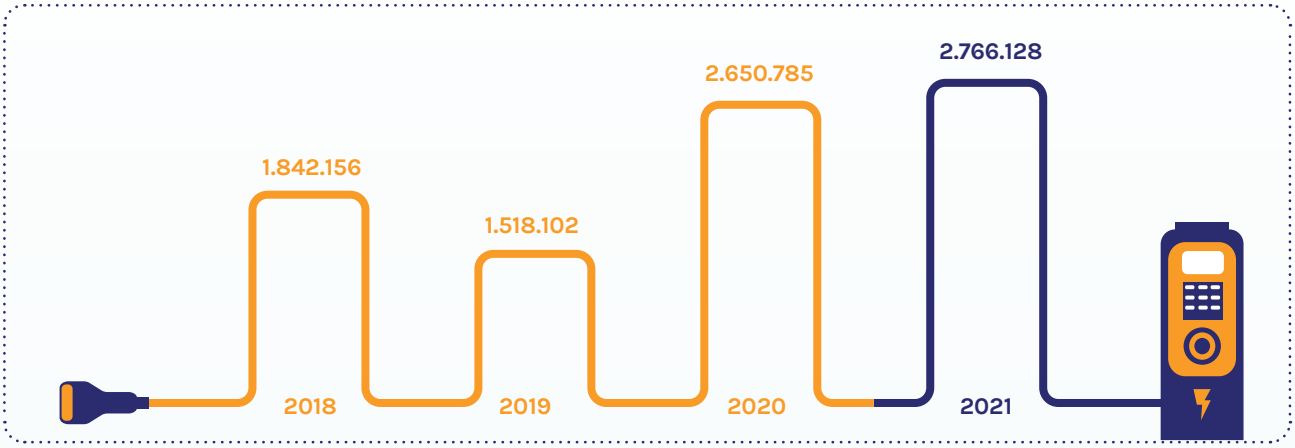
Cash and Cash Equivalents

Indonesia Power's Cash and Cash Equivalents increased by 4.35% compared to in 2020, to Rp2.77 trillion in 2021. This was mainly contributed by improved settlement of receivables from sales of electricity.

Tabel Kas dan Setara Kas Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Cash and Cash Equivalents in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Kas Cash on hand	**351**	**168**	**86**	**35**	**(59,24%)**
Bank:					
Pihak Berelasi Related Parties	1.106.088	840.644	2.110.939	2.217.210	5,03%
Pihak Ketiga Third Parties	50.967	11.940	1.660	1.557	(6,23%)
Jumlah Kas dan Bank **Total Cash on hand and Cash in bank**	**1.157.406**	**852.752**	**2.112.685**	**2.218.802**	**5,02%**
Setara Kas - Deposito Berjangka: **Cash Equivalents - Time Deposits**					
Pihak Berelasi Related Parties	684.750	665.350	538.100	547.326	1.71%
Pihak Ketiga Third Parties	-	-	-	-	-
Jumlah Setara Kas Total Cash Equivalents	**684.750**	**665.350**	**538.100**	**547.326**	**1,71%**
Jumlah Kas dan Setara Kas **Cash and Cash Equivalents**	**1.842.156**	**1.518.102**	**2.650.785**	**2.766.128**	**4,35%**

Grafik Kas dan Setara Kas Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Cash and Cash Equivalents in 2018-2021 (Rp million)



Piutang Usaha

Piutang Usaha Indonesia Power lebih rendah 11,16% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp27,34 triliun di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh membaiknya *collection* periode selama tahun 2021.

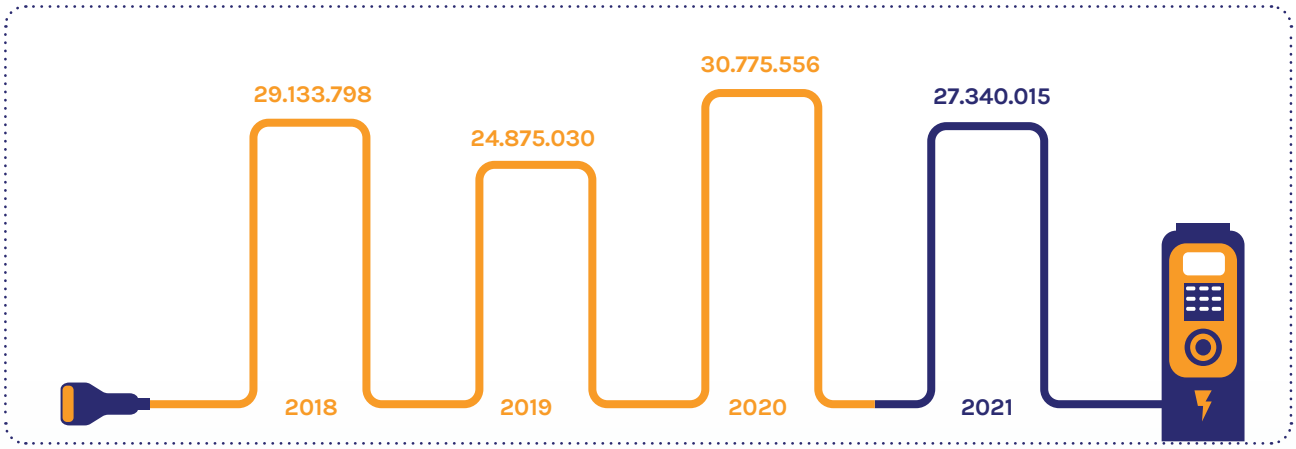
Trade Receivables

Indonesia Power's Trade Receivables were 11.16% lower than in 2020, to Rp27.34 trillion in 2021. This was mainly due to improved collection period in 2021.

Tabel Piutang Usaha Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Trade Receivables in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Pihak Berelasi - PT PLN Related Parties - PT PLN	29.109.066	24.846.959	30.741.055	27.248.591	(11,36%)
Pihak ketiga Third Parties	45.570	47.682	78.152	136.474	74,63%
Cadangan kerugian ekspektasian Allowance for expected credit losses	(20.838)	(19.611)	(43.651)	(45.051)	3,21%
Jumlah Piutang Usaha Total Trade Receivables	**29.133.798**	**24.875.030**	**30.775.556**	**27.340.015**	**(11,16%)**

Grafik Piutang Usaha Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Trade Receivables in 2018-2021 (Rp million)



Persediaan

Persediaan Indonesia Power lebih rendah 5,15% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp1,38 triliun di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh membaiknya *supply chain management* sebagai salah satu pilar utama proses operasional pembangkit.

Inventories

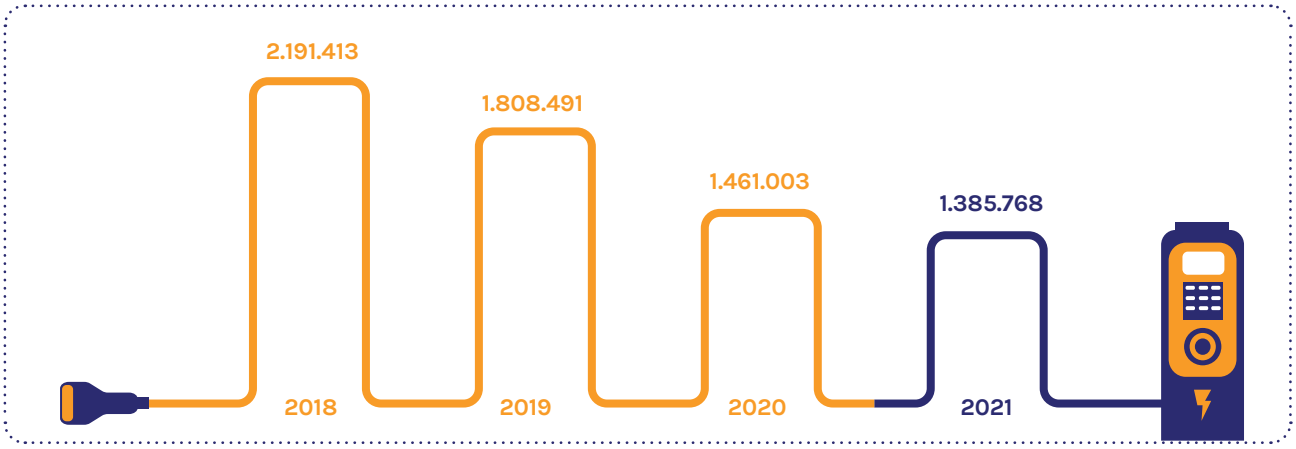
Indonesia Power's Inventories were 5.15% lower than in 2020, to Rp1.38 trillion in 2021. This was contributed by improved supply chain management which is a main pillar of the power plant operations.

Tabel Persediaan Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Inventories in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Bahan bakar dan pelumas Fuel and Lubricants	2.002.557	1.635.047	1.308.586	1.348.058	3,02%
Material pemeliharaan Maintenance Materials	209.896	193.650	168.948	162.400	(3,88%)
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence	(21.040)	(20.206)	(16.531)	(124.690)	654,27%
Jumlah Persediaan Total Inventories	**2.191.413**	**1.808.491**	**1.461.003**	**1.385.768**	**(5,15%)**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Grafik Persediaan Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Inventories in 2018-2021 (Rp million)



Pajak Dibayar di Muka (Bagian Lancar dan Tidak Lancar)

Pajak Dibayar di Muka Indonesia Power secara total meningkat 24,34% dibandingkan tahun 2020. Pada bagian Lancar Pajak Dibayar di Muka menjadi Rp566,33 miliar dan bagian tidak lancar menjadi Rp1,24 triliun di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya Pembayaran dimuka PPN dan Pembayaran dimuka atas surat ketetapan Pajak Kurang Bayar. Disajikan secara lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audit, yaitu Catatan No. 18.

Prepaid Taxes (Current Portion and Non-Current Portion)

Totally, Indonesia Power's Prepaid Taxes increased 24.34% from 2020. The Current Portion of the Prepaid Taxes was amounting to Rp566.33 billion, whereas the Non-Current Portion of the Prepaid Taxes was Rp1.24 trillion in 2021. Such an increase was particularly contributed by the increase in the prepayment of VAT and the prepayment of Tax Assessment Letters of Underpayment. It is presented in more detail in the Notes to the Audited Financial Statements, namely Note No. 18.

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka (Bagian Lancar dan Tidak Lancar)

Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka Indonesia Power secara total meningkat 95,37% dibandingkan tahun 2020. Pada bagian jangka pendek biaya dibayar dimuka dan uang muka menjadi Rp66,64 miliar dan bagian jangka panjang biaya dibayar dimuka dan uang muka menjadi Rp41,41 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi alokasi biaya dibayar dimuka untuk bagian lancar. Disajikan secara lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audit, yaitu Catatan No. 19.

Prepaid Expenses and Advances (Current Portion and Non-Current Portion)

Indonesia Power's total Prepaid Expenses and Advances increased 95.37% from 2020. The current portion of prepaid expenses and advances amounted to Rp66.64 billion, whereas the non-current portion of prepaid expenses and advances amounted to Rp41.41 billion. This was particularly caused by the allocation of prepaid expenses for current portion. It is presented in more detail in the Notes to the Audited Financial Statements, namely Note No. 19.

Aset Keuangan dari Proyek Konsesi (Bagian Lancar dan Tidak Lancar)

Aset Keuangan dari Proyek Konsesi Indonesia Power secara total untuk bagian lancar dan tidak lancar lebih rendah 3,39% dibandingkan tahun 2020. Pada bagian lancar, Aset Keuangan dari Proyek Konsesi menjadi Rp2,02 triliun dan bagian tidak lancar menjadi Rp41,77 triliun di tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi oleh pelunasan aset keuangan konsesi jasa. Disajikan secara lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audit, yaitu Catatan No. 9.

Financial Assets of Concession Project (Current Portion and Non-Current Portion)

Totally, Indonesia Power's Financial Assets of Concession Project for current and non-current portions were 3.39% lower compared to in 2020. The Current Portion of the Financial Assets of Concession Project was amounting to Rp2.02 trillion, whereas the Non-Current Portion of the Financial Assets of Concession Project was Rp41.77 trillion in 2021. This was due to the settlement of financial assets of service concession. It is presented in more detail in the Notes to the Audited Financial Statements, namely Note No. 9.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

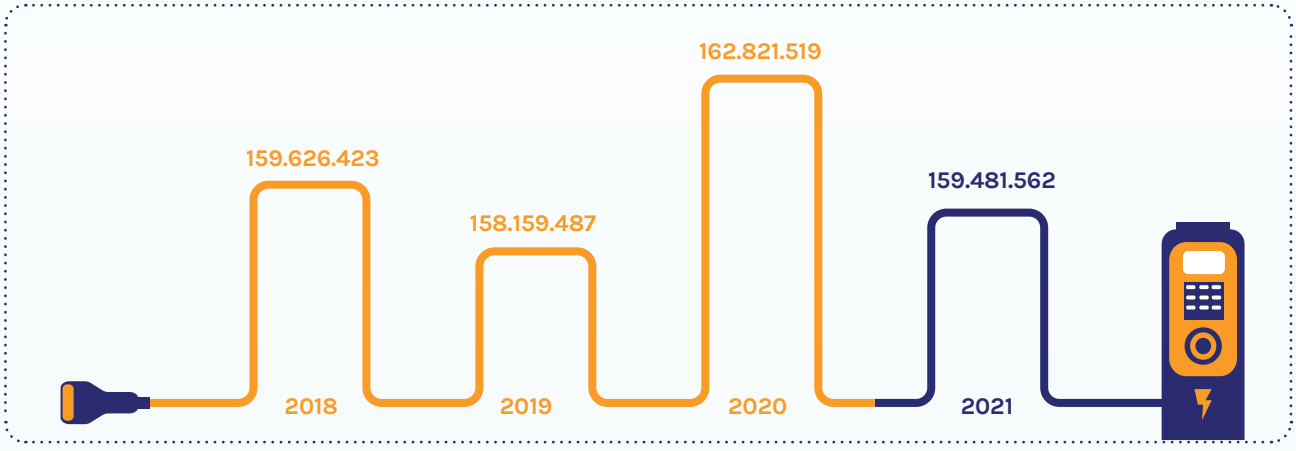
Aset Tidak Lancar Indonesia Power lebih rendah 2,05% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp159,48 triliun di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh proses normal penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Hak guna selama tahun 2021.

Indonesia Power's Non-Current Assets were 2.05% lower than in 2020, to Rp159.48 trillion in 2021. This was particularly caused by the normal processes of Property, Plant, and Equipment depreciation and Right-of-Use Assets depreciation in 2021.

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Non-Current Assets in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Aset Tetap Property, Plant, and Equipment	107.400.160	109.338.937	109.098.467	107.729.655	(1,25%)
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	-	-	3.904.393	3.307.776	(15,28%)
Properti Investasi Investment Properties	129.491	133.821	139.452	143.969	3,24%
Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Investment in Associates and Joint Ventures	757.725	1.309.620	3.232.658	4.321.545	33,68%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	4.906.433	2.266.515	912.713	19.493	(97,86%)
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	-	-	805,204	1.242.799	54,35%
Piutang Pihak Berelasi Receivables from Related Parties	486.885	475.265	512.157	468.080	(8,61%)
Piutang Lain-lain Other Receivables	33.010	39.329	41.229	48.115	16,70%
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka Prepaid Expenses and Advances	11.371	210.623	43,962	41.411	(5,80%)
Aset Keuangan dari Konsesi Jasa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun Financial Assets of Service Concession - net of current portion	45.487.215	43.954.963	43.791.382	41.771.897	(4,61%)
Rekening Bank yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash in Banks	-	-	-	1.117	-
Aset Tidak Lancar Lain Other Non-Current Assets	414.133	430.414	339.902	385.705	13,48%
Jumlah Aset Tidak Lancar **Total Non-Current Assets**	**159.626.423**	**158.159.487**	**162.821.519**	**159.481.562**	**(2,05%)**

Grafik Aset Tidak Lancar Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Non-Current Assets in 2018-2021 (Rp million)



TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Aset Tetap

Aset Tetap Indonesia Power lebih rendah 1,25% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp107,73 triliun di tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi oleh proses penyusutan normal selama tahun 2021 meskipun terjadi pula peningkatan nilai aset karena revaluasi.

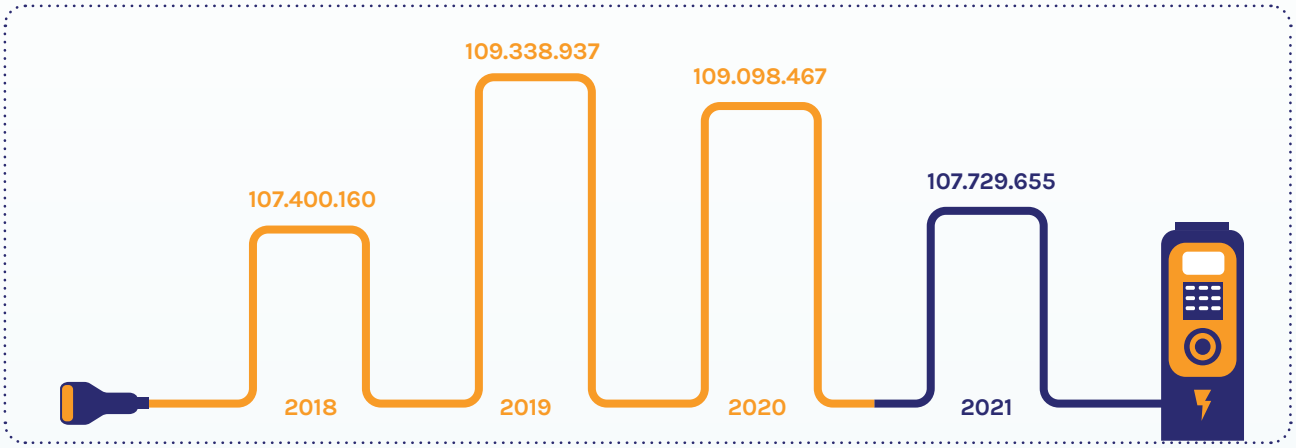
Property, Plant, and Equipment

Indonesia Power's Property, Plant, and Equipment were 1.25% lower than in 2020, to Rp107.73 trillion in 2021. This was affected by normal depreciation process in 2021, albeit an increase in asset value due to re-evaluation.

Tabel Aset Tetap Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Property, Plant, and Equipment in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Tanah Land	17.310.384	17.163.834	17.237.100	17.383.151	0,85%
Bangunan, Waduk, dan Prasarana Buildings, Reservoir, and Infrastructures	6.389.757	6.780.309	6.748.707	6.966.675	3,23%
Instalasi dan mesin pembangkit Installations and Power Plants	75.682.080	75.740.687	75.871.836	72.315.486	(4.69%)
Peralatan Transmisi Transmission Equipment	2.404.601	2.757.707	2.943.889	4.303.218	46,17%
Perlengkapan Pengolahan Data dan Telekomunikasi Telecommunication and Data Processing Equipments	65.427	90.826	108.268	94.492	(12,72%)
Peralatan Umum General Equipment	227.640	374.109	403.396	343.845	(14,76%)
Kendaraan Bermotor Motor Vehicles	13.512	18.105	24.558	16.675	(32,10%)
Material Cadangan Utama Major Spare Parts	218.250	264.636	431.600	251.127	(41,81%)
Aset dalam Pembangunan Construction in Progress	4.823.172	4.909.020	5.071.481	5.933.624	17,00%
Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Assets not Used in Operations	265.337	1.218.602	257.633	132.049	(48,75%)
Jumlah Aset Tetap Total Property, Plant, and Equipment	**107.400.160**	**109.338.937**	**109.098.467**	**107.729.655**	**(1,25%)**

Grafik Aset Tetap Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Property, Plant, and Equipment in 2018-2021 (Rp million)



Aset Hak Guna

Aset Hak Guna Indonesia Power lebih rendah 15,28% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp3,31 triliun di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi proses penyusutan atas aset hak guna selama tahun 2021.

Right-of-Use Assets

Indonesia Power's Right-of-Use Assets were 15.28% lower than in 2020, to Rp3.31 trillion in 2021. This was particularly caused by the process of Right-of-Use Assets depreciation in 2021.

Properti Investasi

Properti Investasi Indonesia Power dominan adalah aset tanah meningkat 3,24% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp143,97 miliar di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh hasil revaluasi tahun 2021 yang meningkat Rp4,00 miliar dari nilai tahun sebelumnya.

Investment Properties

Indonesia Power's Investment Properties, predominantly Land, increased 3.24% compared to in 2020, to Rp143.97 billion in 2021. This was mainly due to the result of re-evaluation in 2021 which increased Rp4.00 billion from the previous year's value.

Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Indonesia Power meningkat 33,68% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp4,32 triliun di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi mutasi pencapaian laba perseroan.

Investment in Associates and Joint Ventures

Indonesia Power's Investment in Associates and Joint Ventures increased by 33.68% compared to in 2020, to Rp4.32 trillion in 2021. This was particularly due to the movement of Company profits.

Tabel Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Investment in Associates and Joint Ventures in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Entitas Asosiasi Associates					
PT Indo Pusaka Berau	117.578	112.270	115.644	121.953	5,46%
PT Prima Layanan Suku Cadang	76.356	84.776	101.327	103.323	1,97%
Entitas Ventura Bersama Joint Ventures					
PT Perta Daya Gas	19.768	38.331	40.341	55.954	38,70%
PT Rajamandala Electric Power	124.492	125.215	120.311	125.627	4,42%
PT GCL Indotenaga	419.531	426.857	420.643	613.580	45,93%
PT Indo Raya Tenaga	-	522.170	2.426.336	3.292.872	35,71%
PT Maxpower Cogindo Batam	-	-	8.236	8.236	-
Jumlah Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Total Investment in Associates and Joint Ventures	**757.725**	**1.309.620**	**3.232.658**	**4.321.545**	**33.68%**

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan Indonesia Power lebih rendah 97,86% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp19,49 miliar di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh saling *nett off* antara Aktiva Pajak Tangguhan dengan Liabilitas Pajak tangguhan sebesar Rp4,00 triliun.

Deferred Tax Assets

Indonesia Power's Deferred Tax Assets were 97.86% lower than in 2020, to Rp19.49 billion in 2021. This was caused by the net-offsetting between Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities amounting to Rp4.00 trillion.

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi Indonesia Power lebih rendah 8,61% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp468,08 miliar di tahun 2021. Hal tersebut dipengaruhi oleh proses pelunasan selama tahun 2021. Piutang tersebut adalah merupakan piutang terhadap Asosiasi Indonesia Power (PT PDG dan PT REP).

Receivables from Related Parties

Indonesia Power's Receivables from Related Parties were 8.61% lower than in 2020, to Rp468.08 billion in 2021. This was mainly due to repayments throughout 2021. These are the receivables from Indonesia Power's Associates (PT PDG and PT REP).

Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain Piutang Pihak Berelasi Indonesia Power meningkat 16,70% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp48,11 miliar di tahun 2021. Piutang tersebut merupakan pinjaman kepemilikan rumah untuk pegawai.

Other Receivables

Indonesia Power's Other Receivables increased 16.70% from 2020, to Rp48.11 billion in 2021. These are the receivables from house ownership loans for employees.

Aset Tidak Lancar Lain

Aset Tidak Lancar Lain Indonesia Power meningkat 13,48% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp385,70 miliar di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pengembangan projek selama tahun 2021.

Other Non-Current Assets

Indonesia Power's Other Non-Current Assets increased 13.48% from 2020, to Rp385.70 billion in 2021. This was mainly due to the increase in project development throughout 2021.

Liabilitas
Liabilities

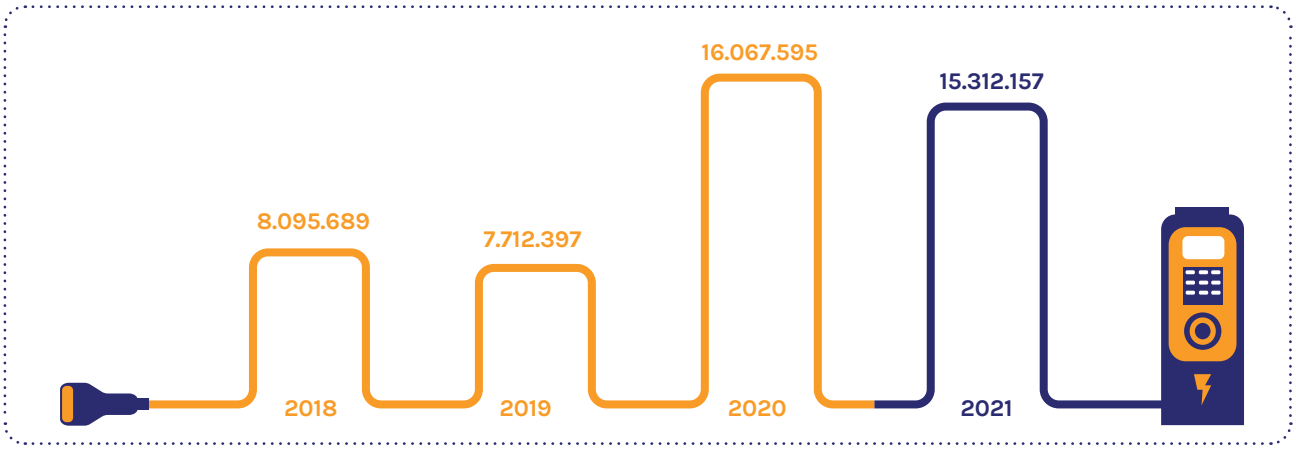
Jumlah Liabilitas Indonesia Power lebih rendah 4,70% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp15,31 triliun di tahun 2021.

Indonesia Power's Total Liabilities were 4.70% lower than in 2020, to Rp15.31 trillion in 2021.

Tabel Liabilitas Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Liabilities in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.256.190	4.756.821	7.314.262	5.894.646	(19,41%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2.839.499	2.955.576	8.753.333	9.417.511	7,59%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**8.095.689**	**7.712.397**	**16.067.595**	**15.312.157**	**(4,70%)**

Grafik Liabilitas Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Liabilities in 2018-2021 (Rp million)



Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Liabilitas Jangka Pendek Indonesia Power lebih rendah 19,41% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp5,89 triliun di tahun 2021.

Indonesia Power's Current Liabilities were 19.41% lower than in 2020, to Rp57.89 trillion in 2021.

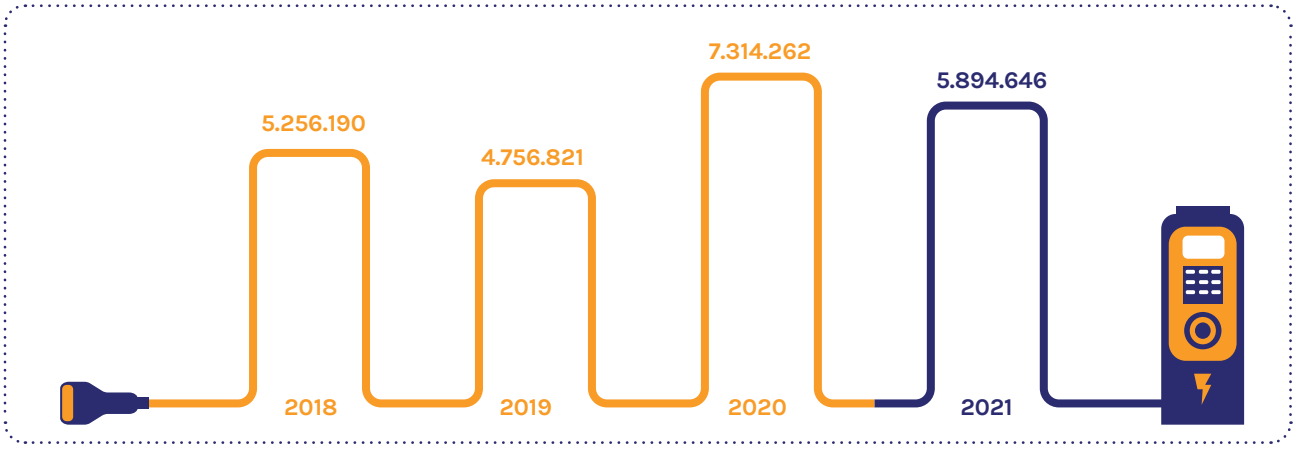
Tabel Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Current Liabilities in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Utang Usaha Trade Payables	3.498.908	2.878.091	4.981.366	3.608.941	(27,55%)
Utang Pajak Taxes Payable	321.122	323.536	362.874	346.773	(4,44%)
Biaya Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	1.123.413	1.203.469	288.416*	319.998	10,95%
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	-	4.429	605.038	670.239	10,78%
Pinjaman dari Pemegang Saham Loans from a Shareholder	46.078	60.293	248.891*	254.347	2,19%
Liabilitas Imbalan Kerja jangka pendek Short-term Employee Benefit Liabilities	266.669	287.003	795.248*	691.250	(13,08%)
Utang Pajak Penghasilan Badan Corporate Income Tax Payables	-	33.653	32.429	3.098	(90,45%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**5.256.190**	**4.756.821**	**7.314.262**	**5.894.646**	**(19,41%)**

*) Direklasifikasi
*) Reclassified

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Grafik Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Current Liabilities in 2018-2021 (Rp million)



Utang Usaha

Utang Usaha Indonesia Power lebih rendah 27,55% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp3,61 triliun di tahun 2021. Hal dipengaruhi oleh proses pembayaran utang usaha.

Utang Pajak

Utang Pajak Indonesia Power lebih rendah 4,44% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp346,77 miliar di tahun 2021. Penurunan dominan pada komponen pajak PPh 21 dan PPN.

Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya yang Masih Harus Dibayar Indonesia Power lebih tinggi 10,95% dibanding tahun 2020 (setelah reklasifikasi) menjadi Rp320,00 miliar di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi pengakuan penyisihan atas suatu perkara hukum.

Liabilitas Sewa – (Bagian Jangka Pendek dan Jangka Panjang)

Utang Sewa Pembiayaan Indonesia Power meningkat 10,78% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp670,24 miliar di tahun 2021. Secara total untuk Utang Sewa Pembiayaan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Untuk bagian jangka pendek adalah sesuai yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun yaitu sebebsar Rp670,24 miliar. Sedangkan untuk Bagian Jangka Panjang lebih rendah 15,95% menjadi Rp2,88 triliun di tahun 2021. Disajikan secara lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audit, yaitu Catatan No. 23.

Trade Payables

Indonesia Power's Trade Receivables were 27.55% lower than in 2020, to Rp3.62 trillion in 2021. This was due to the payments of trade payables.

Taxes Payable

Indonesia Power's Taxes Payable were 4.44% lower than in 2020, to Rp346.77 billion in 2021. This decline was dominant in the components of Income Tax 21 and VAT.

Accrued Expenses

Accrued Expenses Indonesia Power is 10.95% higher than in 2020 (after reclassification) to Rp320.00 billion in 2021. This is mainly due to the recognition of provision for a legal case.

Lease Liabilities - (Current Portion and Non-Current Portion)

The Lease Liabilities increased 10.78% from 2020, to Rp670.24 billion in 2021. Totally, the Lease Liabilities were lower than those in the previous year. The allocation for the current portion maturing in one (1) year is amounting to Rp670.24 billion. Meanwhile, the non-current portion was 15.95% lower to Rp2.88 trillion in 2021. It is presented in more detail in the Notes to the Audited Financial Statements, namely Note No. 23.

Pinjaman dari Pemegang Saham – (Bagian Jangka Pendek dan Jangka Panjang)

Pinjaman dari Pemegang Saham adalah merupakan pinjaman dengan PLN yang digunakan untuk mendanai projek PLTGU Tambak Lorok Blok III. Pinjaman Pemegang Saham secara total meningkat 48,25% dibandingkan tahun 2020. Saldo pinjaman dari Pemegang Saham tahun 2021 adalah sebesar Rp1,54 triliun dengan bagian jangka pendek sebesar Rp254,35 miliar dan bagian jangka panjang sebesar Rp1,29 triliun. Disajikan secara lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audit, yaitu Catatan No. 36.

Loans from a Shareholders - (Current Portion and Non-Current Portion)

Loans from a Shareholders covered loans from PLN that are used to finance CCPP Tambak Lorok Block III project. Totally, loans from Shareholders increased by 48.25% from 2020. The balance of loan from Shareholders in 2021 was Rp1.54 trillion with current portion amounting to Rp254.35 billion, whereas the non-current portion was amounting to Rp1.29 trillion. It is presented in more detail in the Notes to the Audited Financial Statements, namely Note No. 36.

Liabilitas Imbalan Kerja – (Bagian Jangka Pendek dan Jangka Panjang)

Liabilitas Imbalan Kerja secara total jangka panjang dan pendek mengalami penurunan, yang dipengaruhi oleh beberapa asumsi aktuaria yang disesuaikan yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti dan Imbalan Pemeliharaan Kesehatan. Bagian jangka pendek lebih rendah 13,08% dibanding tahun 2020 menjadi Rp691 miliar. Sedangkan untuk bagian jangka panjang lebih rendah 3,32% dibanding tahun lalu menjadi Rp3,46 triliun. Disajikan secara lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan Audit, yaitu Catatan No. 35.

Employee Benefit Liabilities - (Current Portion and Non-Current Portion)

In total, Employee Benefit Liabilities of non-current and current portions declined, due to a number of adjusted actuarial assumptions, i.e. Defined Benefit Retirement Plan and Healthcare Benefit. The current portion was 13.08% lower than in 2020, to Rp691 billion. Meanwhile, the non-current portion was 3.32% lower than in the previous year, to Rp3.46 trillion. It is presented in more detail in the Notes to the Audited Financial Statements, namely Note No. 35.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Libilitas Jangka Panjang Indonesia Power meningkat 7,59% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp9,42 triliun di tahun 2021.

Indonesia Power's Non-Current Liabilities increased by 7.59% from 2020, to Rp9.42 trillion in 2021.

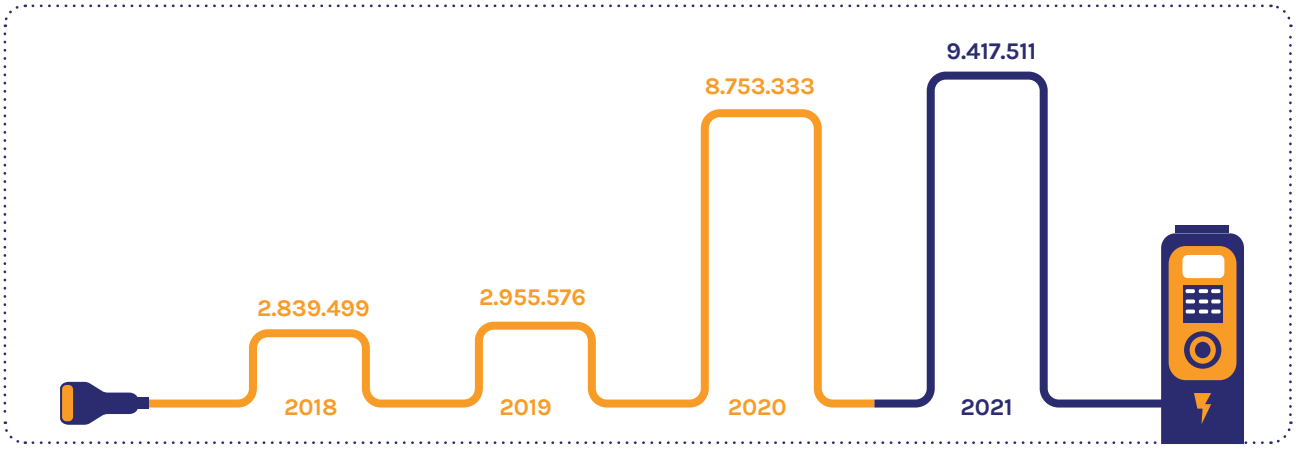
Tabel Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Non-Current Liabilities in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	14.585	14.480	945.199	1.776.220	87,92%
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	-	14.754	3.430.755	2.884.932	(15,91%)
Pinjaman dari Pemegang Saham Loans from a Shareholder	-	-	794.456*	1.292.375	62,67%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefit Liabilities	2.824.914	2.926.342	3.582.923	3.463.984	(3,32%)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-Current Liabilities**	**2.839.499**	**2.955.576**	**8.753.333**	**9.417.511**	**7,59%**

*) Direklasifikasi
*) Reclassified

TINJAUAN KINERJA KEUANGAN
FINANCIAL PERFORMANCE OVERVIEW

Grafik Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Non-Current Liabilities in 2018-2021 (Rp million)



Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan Indonesia Power meningkat 87,92% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp1,78 triliun di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi selisih *Net Book Value* (NBV) aset fiskal dengan aset komersial.

Deferred Tax Liabilities

Deferred Tax Liabilities increased by 87.92% from 2020, to Rp1.78 trillion in 2021. This was mainly due to the difference in Net Book between fiscal assets and commercial assets.

Ekuitas
Equity

Jumlah Ekuitas Perusahaan Indonesia Power lebih rendah 3,01% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp178,40 triliun di tahun 2021. Hal tersebut terutama karena pembayaran deviden tahun 2020.

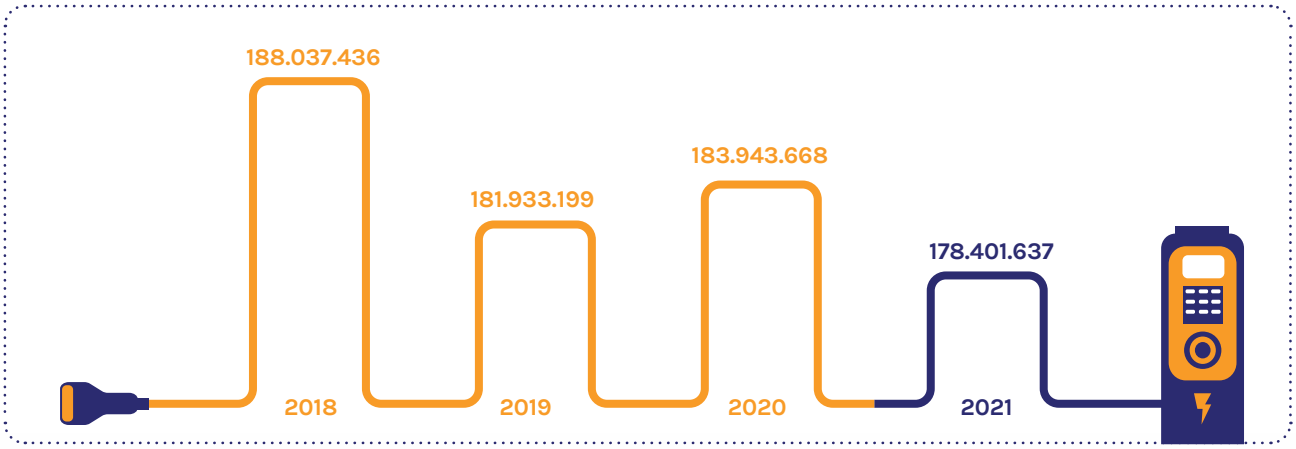
Total Equity was 3.01% lower than in 2020, to Rp178.40 trillion in 2021. This was due to the payment of dividends in 2020.

Tabel Ekuitas Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Equity in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Modal: Capital:					
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid-up Capital	2.607.824	2.607.824	2.607.824	2.607.824	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	5.513.843	5.513.843	5.513.843	5.513.843	-
Saldo Laba: Retained Earnings:					
Ditentukan Penggunaannya Appropriated	2.122.213	2.122.213	2.122.213	2.122.213	-
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	37.604.756	32.231.693	35.035.494	28.844.407	(17,67%)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	140.114.582	139.439.544	138.581.169	139.227.406	0,47%

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Ekuitas yang dapat Diatribusikan: **Equity Attributable to:**			-		
Kepada pemilik entitas induk Owners of the Parent	187.963.218	181.915.117	183.860.543	178.315.693	(3,02%)
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	74.218	78.082	83.125	85.944	3,39%
Jumlah Ekuitas Total Equity	**188.037.436**	**181.993.199**	**183.943.668**	**178.401.637**	**(3,01%)**

Grafik Ekuitas Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Equity in 2018-2021 (Rp million)



Ekuitas yang Dapat Diatribusikan

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Indonesia Power lebih rendah 3,02% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp178,32 triliun di tahun 2021.

Equity Attributable

Indonesia Power's Equity Attributable to Owners of the Parent was 3.02% lower than in 2020, to Rp178.32 trillion in 2021.

LABA RUGI KOMPREHENSIF
COMPREHENSIVE PROFIT OR LOSS

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

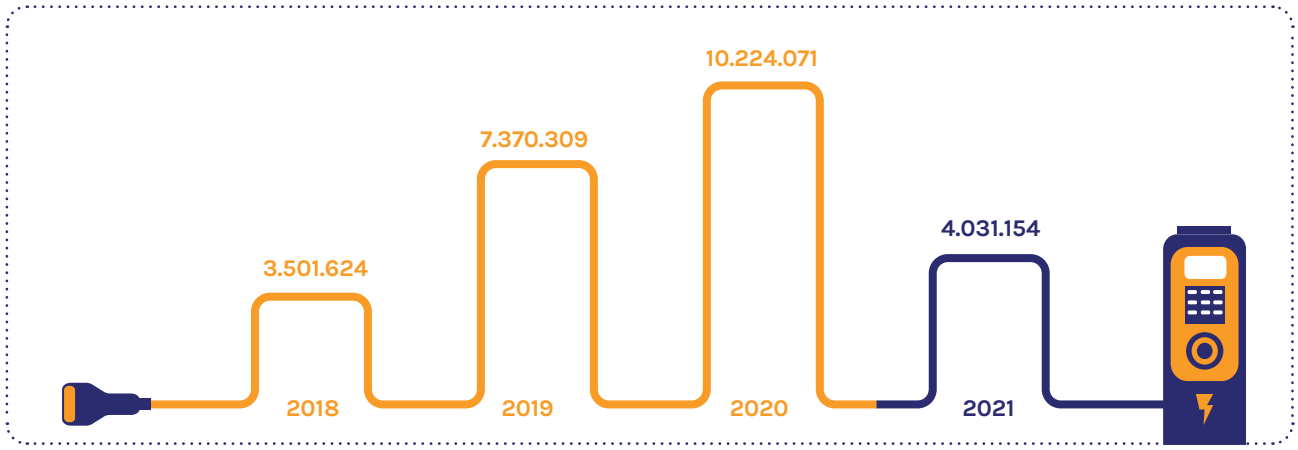
Ditengah fluktuasi *demand energy* dan pasokan bahan bakar batu bara, Perusahaan pada tahun 2021 berhasil membukukan laba sebesar Rp4,03 triliun dengan peningkatan penjualan tenaga listrik sebesar 37.590,11 GWh melebihi tahun lalu.

Amid the fluctuating energy demand and coal supply, the Company made some profits amounting to Rp4.03 trillion in 2021 with an increase in electricity sales by 37,590.11 GWh compared to the previous year.

Tabel Laba Rugi Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Profit or Loss in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Pendapatan Usaha Revenue	43.038.300	42.583.849	38.740.449	38.519.859	(0,57%)
Beban Usaha Operating Expenses	37.776.434	33.183.189	26.884.270	32.429.534	20,63%
Laba Usaha Operating Income	5.261.866	9.400.660	11.856.179	6.090.325	(48,63%)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other (Expenses)/Income	(129.046)	652.673	917.180	(181.014)	(119,74%)
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	5.132.820	10.053.333	12.773.358	5.909.311	(53,74%)
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(1.631.196)	(2.683.024)	(2.549.287)	(1.878.157)	(26,33%)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**3.501.624**	**7.370.309**	**10.224.071**	**4.031.154**	**(60,57%)**
Laba Tahun Berjalan Diatribusikan kepada: Profit for the Year Attributable to:					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	3.499.463	7.365.289	10.218.256	4.027.169	(60,59%)
- Kepentingan Non Pengendali - Non-Controlling Interest	2.161	5.020	5.815	3.985	(31,47%)
Penghasilan/(Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak Other Comprehensive (Loss)/Income for the Year, net of Tax	(21.373.076)	(675.038)	(858.375)	646.237	(175,29%)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan **Total Comprehensive Income for the Year**	**(17.871.452)**	**6.695.271**	**9.365.696**	**4.677.391**	**(50,06%)**
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada: Total Comprehensive Income for the Year attributable to:					
- Pemilik Entitas Induk Owners of the Parent	(17.873.613)	6.690.251	9.359.881	4.673.406	(50,07%)
- Kepentingan Non Pengendali - Non-Controlling Interest	2.161	5.020	5.815	3.985	(31,47%)
Laba Per Lembar Saham (Rp penuh) **Basic Earnings per Share (in Rupiah full amount)**	**671**	**1.413**	**1.959**	**773**	**(50,06%)**

Grafik Laba Tahun Berjalan Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Profit for the Year in 2018-2021 (Rp million)



Pendapatan Usaha
Revenue

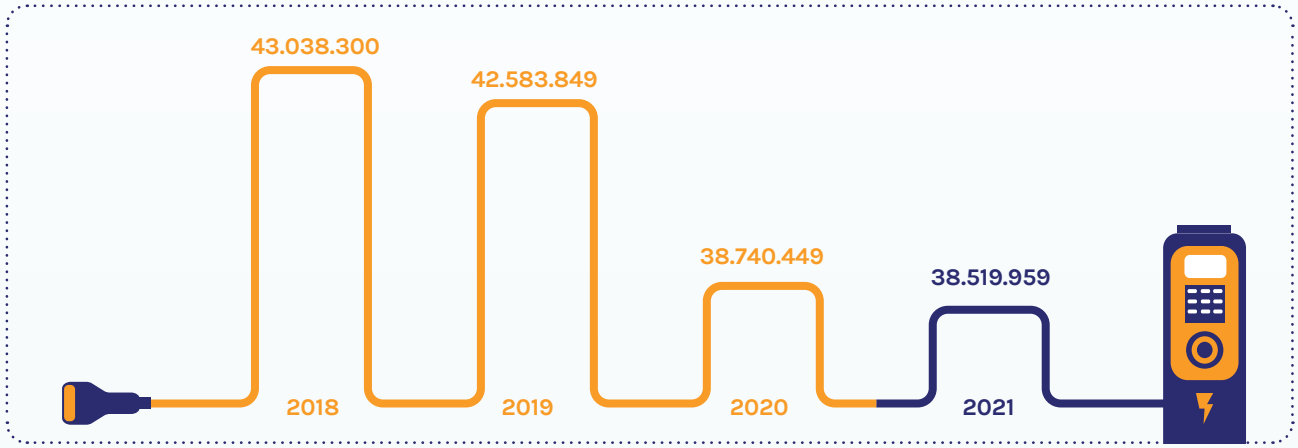
Pendapatan Usaha Indonesia Power relatif stabil dibandingkan tahun 2020 pada kisaran Rp38 triliun.

Indonesia Power's Revenue was relatively steady compared to in 2020, at the range of Rp38 trillion.

Tabel Pendapatan Usaha Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Revenue in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Penjualan Tenaga Listrik Sales of Electricity	23.781.265	23.970.771	21.011.210	19.907.755	(5,25%)
Pendapatan dari Konsesi Jasa Revenue of Service Concession	15.292.014	14.860.732	14.259.159	14.656.755	2,79%
Pendapatan O&M lain-lain Revenue from O&M Services and Others	3.965.021	3.752.345	3.470.080	3.955.349	13,98%
Jumlah Pendapatan Usaha **Total Revenue**	**43.038.300**	**42.583.849**	**38.740.449**	**38.519.959**	**(0,57%)**

Grafik Pendapatan Usaha Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Revenue in 2018-2021 (Rp million)



LABA RUGI KOMPREHENSIF
COMPREHENSIVE PROFIT OR LOSS

Beban Usaha
Operating Expenses

Beban Usaha Indonesia Power meningkat 20,63% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp32,43 triliun di tahun 2021. Peningkatan pada unsur bahan bakar & pelumas, dipengaruhi oleh peningkatan volume pemakaian batu bara dan gas, konsesi jasa karena peningkatan biaya unsur konsesi, biaya pemeliharaan menurun dibanding tahun lalu dipengaruhi oleh jadwal *overhoul* atas mesin pembangkit.

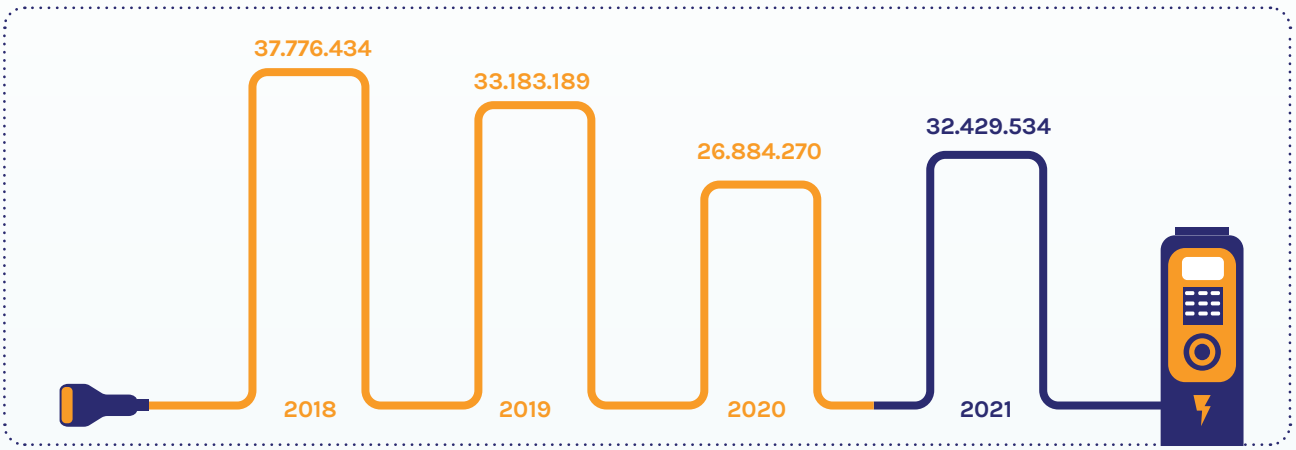
Indonesia Power's Trade Receivables increased 20.63% from 2020, to Rp32.43 trillion in 2021. The increase in the component of Fuel and Lubricants was caused by the increased volume of coal and gas consumption, service concession due to the increase in concession cost, maintenance cost declined compared to the previous year due to scheduled overhaul of power plant engines.

Tabel Beban Usaha Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Operating Expenses in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Bahan Bakar dan Pelumas Fuel and Lubricants	16.232.067	12.614.914	7.796.125*	10.897.344	39,78%
Konsesi Jasa Service Concession	11.750.850	11.198.444	9.747.752	11.784.157	20,89%
Penyusutan Aset Tetap Property, Plant, and Equipment Depreciation	3.376.650	2.790.948	2.871.186	2.919.112	1,67%
Penyusutan Aset Hak Guna Right-of-Use Assets Depreciation	-	-	712.096*	725.526	1,89%
Perbaikan dan Pemeliharaan Repairs and Maintenance	3.771.770	3.500.769	2.792.776	3.172.566	13,60%
Kepegawaian Personnel	2.176.167	2.347.383	2.352.770	2.253.410	(4,22%)
Pembelian Tenaga Listrik Purchased Electricity	17.345	236.104	238.329	208.311	(12,60%)
Sewa Rental	-	-	52.825	58.823	10,33%
Lain-lain Others	451.585	494.627	320.411	410.826	28,22%
Jumlah Beban Usaha **Total Operating Expenses**	**37.776.434**	**33.183.189**	**26.884.270**	**32.429.534**	**20,63%**

*) Direklasifikasi
*) Reclassified

Grafik Beban Usaha Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Operating Expenses in 2018-2021 (Rp million)



Pendapatan (Beban) Lain-lain
Other (Expenses)/Income

Beban Lain-lain Indonesia Power lebih rendah 119,74% dibandingkan tahun 2020 menjadi beban Rp181,01 triliun di tahun 2021. Peningkatan beban lain-lain tersebut terutama dipengaruhi oleh beban keuangan atas aset hak guna.

Other Expenses was 119.74% lower than in 2020, to Rp181.01 trillion in 2021. Such an increase was particularly due to the Finance Costs from Right-of-Use Assets.

Tabel Pendapatan (Beban) Lain-lain Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Other (Expenses)/Income in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Penghasilan Keuangan Finance Income	269.196	165.270	53.889	82.196	52,53%
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing - bersih Gain/(Losses) on Foreign Exchange - Net	(62.136)	10.141	(9.553)	21.025	(320,09%)
Beban Keuangan Finance Costs	(62.449)	(3.370)	(162.694)	(467.733)	187,49%
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama Share in Net Income of Associates and Joint Ventures	-	74.790	203.915	445.809	118,62%
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi Gain on Sale of Assets not Used in Operations	-	123.500	1.062.610	5.444	(99,49%)
Lain-lain - bersih Others - Net	(273.657)	282.342	(230.988)	(267.755)	15,92%
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Total Other (Expenses)/Income	**(129.046)**	**652.673**	**917.179**	**(181.015)**	**(119,74%)**

Laba Sebelum Pajak
Profit before Tax

Perusahaan membukukan Laba Sebelum Pajak Indonesia Power sebesar Rp5,91 triliun. Pencapaian laba tersebut masih dominan atas segmen usaha jual beli tenaga listrik.

The Company's Profit before Tax was amounting to Rp5.91 trillion. This was predominantly contributed by electricity sales/purchase.

Beban Pajak Penghasilan
Income Tax Expense

Beban Pajak Indonesia Power lebih rendah 26,33% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp1,88 triliun di tahun 2021. Nilai tersebut masih dipengaruhi terutama oleh perbedaan nilai buku aset fiskal dibanding aset komersial.

Indonesia Power's Tax Expense was 26.33% lower than in 2020, to Rp1.88 trillion in 2021. The value was still mainly contributed by the difference in book value between fiscal assets and commercial assets.

LABA RUGI KOMPREHENSIF
COMPREHENSIVE PROFIT OR LOSS

Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak
Other Comprehensive (Loss)/Income for the Year after Tax

Beban Komprehensif Lain Tahun Berjalan setelah Pajak pada tahun 2020 menjadi Pendapatan Komprehensif Lain di tahun 2021 dipengaruhi atas kerugian revaluasi atas aset tetap yang dihapuskan.

Other Comprehensive Expense for the Year after Tax in 2020 became Other Comprehensive Income in 2021, which was due to a loss from the re-evaluation of written-off Property, Plant, and Equipment.

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Income for the Year

Ditengah fluktuasi *demand energy* dan pasokan bahan bakar batu bara, Perusahaan pada tahun 2021 berhasil membukukan Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp4,68 triliun dengan peningkatan penjualan tenaga listrik sebesar 37.590,11 GWh melebihi tahun lalu.

Amid the fluctuating energy demand and coal supply crisis, the Company in 2021 recorded Rp4.68 trillion for Comprehensive Income for the year, with the increase in electricity sales by 37,590.11 GWh compared to the previous year.

LAPORAN ARUS KAS
STATEMENTS OF CASH FLOWS

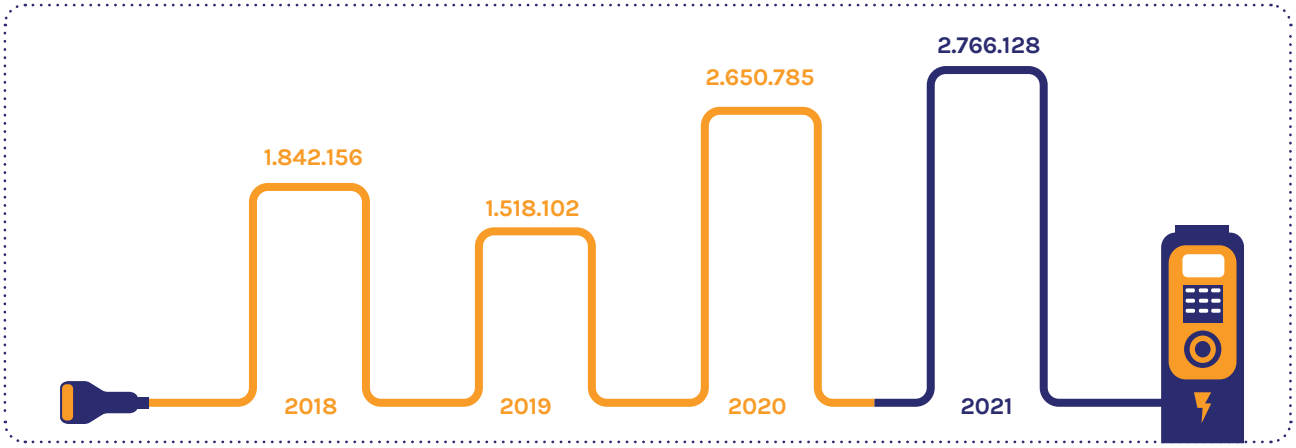
Arus Kas terdiri dari aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas pada akhir periode meningkat sebesar 4,35% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp2,17 triliun di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh membaiknya kualitas *collection period* atas piutang penjualan tenaga listrik.

Cash Flows comprise operating, investing, and financing activities. The Cash and Cash Equivalents were 18.28% lower than in 2020, to Rp2.77 trillion in 2021. This increase was mainly due to the improvement of collection period for receivables from electricity sales.

Tabel Arus Kas Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Cash Flows in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows from Operating Activities	1.539.535	5.260.440	5.248.247	2.679.222	(48,95%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flows from Investing Activities	(4.393.472)	(5.580.545)	(4.003.866)	(2.420.998)	(39,53%)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows from Financing Activities	(146.909)	(3.054)	(125.693)	(150.591)	19,81%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(3.000.846)	(323.159)	1.118.688	107.633	(90,38%)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun **Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year**	**4.841.012**	**1.842.156**	**1.518.102**	**2.650.785**	**74,61%**
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun **Cash and Cash Equivalents at End of Year**	**1.842.156**	**1.518.102**	**2.650.785**	**2.766.128**	**4,35%**

Grafik Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Chart of Cash and Cash Equivalents at End of Year in 2018-2021 (Rp million)



Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Net Cash Provided from Operating Activities

Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi Indonesia Power lebih rendah 48,95% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp2,68 triliun di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh membaiknya pelunasan piutang penjualan tenaga listrik.

Indonesia Power's Net Cash Provided from Operating Activities was 48.95% lower than in 2020, to Rp2.68 trillion in 2021. This was mainly due to improved settlement of receivables from electricity sales.

Tabel Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Cash Flows from Operating Activities in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Penerimaan Kas dari Pelanggana Cash Receipts from Customers	24.042.850	25.470.396	20.791.572	27.285.066	31,23%
Pembayaran kepada Pemasok dan Karyawan Cash Paid to Suppliers and Employees	(22.044.104)	(19.874.597)	(15.611.962)	(24.163.539)	54,78%
Penerimaan Bunga Interest Received	129.480	76.295	206,547	82.196	(60,21%)
Pembayaran Bunga Interest Paid	-	-	(279,780)	(478.769)	71,12%
Penerimaan Restitusi Pajak Tax Restitution Received	297.246	279.394	531,820	463.109	(12,92%)
Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Paid	(885.937)	(691.048)	(389.950)	(508.841)	30,49%
Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi **Net Cash Provided by Operating Activities**	**1.539.535**	**5.260.440**	**5.248.247**	**2.679.222**	**(48,95%)**

LAPORAN ARUS KAS
STATEMENTS OF CASH FLOWS

Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
Net Cash from Investing Activities

Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Indonesia Power lebih rendah 39,53% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp2,42 triliun di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi atas progress aset dalam pembangunan yang ditetapkan sesuai disburse untuk tahun berjalan oleh Pemegang Saham.

The Net Cash Used in Investing Activities was 39.53% lower than in 2020, to Rp2.42 trillion in 2021. This was mainly due to the realization of construction in progress set by the Shareholders according to the disbursement for the current year.

Tabel Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Cash Used in Investing Activities in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Perolehan Aset Tetap Additions of Property, Plant, and Equipment	(4.295.045)	(5.248.006)	(4.090.045)	(2.580.801)	(36,90%)
Hasil Penjualan Aset Tidak Digunakan dalam Operasi Proceeds from Sale of Assests Not Used in Operations	-	139.634	1.901.218	5.444	(99,71%)
Penyertaan Modal pada Entitas Ventura Bersama Capital Subscription in Joint Ventures	(99.597)	(501.421)	(1.901.280)	(38.115)	(98,00%)
Perolehan Investasi Efek Beragunan Aset Receipts of Investment in Asset-backed Securities	12.000	25.000	85.000	95.000	11,76%
Penerimaan Piutang Pihak Berelasi Receipts of Receivables from Related Parties	(12.072)	4.248	-	97.474	-
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi Proceeds from Dividends of Associates	1.242	-	1.241	-	(100,00%)
Kas bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi **Net Cash Used in Investing Activities**	**(4.393.472)**	**(5.580.545)**	**(4.003.866)**	**(2.420.998)**	**(39,53%)**

Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
Net Cash from Financing Activities

Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Indonesia Power meningkat 19,81% dibandingkan tahun 2020 menjadi Rp150,59 miliar di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman dari Pemegang Saham.

The Net Cash Used in Financing Activities increased by 19.81% compared to in 2020, to Rp150.59 billion in 2021. This was mainly due to the payment of loans from a shareholder.

Tabel Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Cash Flows from Financing Activities in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Pembayaran Liabilitas Sewa Payments of Lease Liabilities	(145.807)	(1.898)	(1.107.984)	(637.138)	(42,50%)
Penerimaan Pinjaman dari Pemegang Saham Proceeds from Loan from a Shareholder	-	-	1.043.356	739.395	(29,13%)
Pembayaran Pinjaman dari Pemegang Saham Loan Repayments from a Shareholder	-	-	(60.293)	(252.848)	319,37%
Pembayaran Dividen kepada Kepentigan Non-Pengendali Payments of Dividends to Non-Controlling Interest	(1.102)	(1.156)	(772)	-	
Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan **Net Cash used in Financing Activities**	**(146.909)**	**(3.054)**	**(125.693)**	**(150.591)**	**19,81%**



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA

SOLVENCY, COLLECTIBILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Kemampuan Membayar Utang

Solvency

Penilaian atas kemampuan Perusahaan dalam membayar utangnya dapat ditunjukan dengan indikator rasio solvabilitas dan likuiditas sebagaimana dijelaskan sebagai berikut

The Company's ability in paying its debts is indicated by the solvency and liquidity ratios as explained below.

Rasio Solvabilitas

Solvency Ratios

Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan Perusahaan membayar kewajiban jangka panjang maupun seluruh utangnya. Rasio ini terdiri dari *Debt to Total Assets Ratio* (Rasio Utang terhadap Aset) dan *Debt to Total Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Modal). Semakin kecil nilai rasionya menunjukkan semakin kecil kewajiban yang harus dipenuhi oleh

Solvency ratios are used to see the Company's ability to meet its long-term liabilities as well as its entire debts. These ratios include Debt to Total Assets Ratio and Debt to Total Equity Ratio. The smaller the ratio, the fewer the liabilities that must be met by the Company.

Tabel Solvabilitas Tahun 2018 - 2021 (%)

Table of Solvency in 2018-2021 (%)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Rasio Utang terhadap Aset (DAR) Debt to Total Assets Ratio (DAR)	4,13	4,07	8,03	7,90	(1,60%)
Rasio Utang terhadap Modal (DER) Debt to Total Equity Ratio (DER)	4,31	4,24	8,74	8,58	(1,74%)

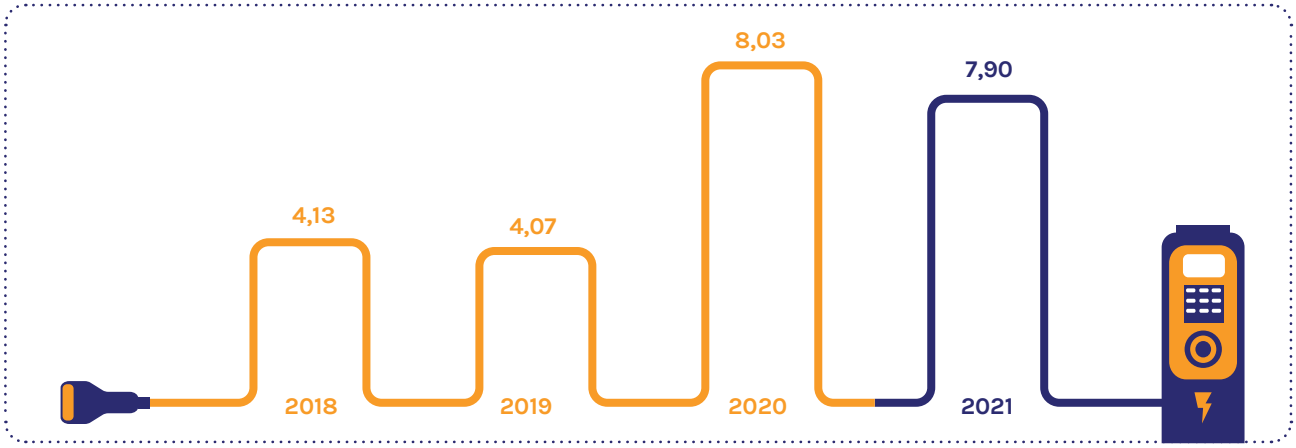
Rasio Utang terhadap Aset

Debt to Total Assets Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian aset yang digunakan dalam menjamin keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai rasio utang terhadap Aset Perusahaan Indonesia Power lebih rendah 1,60% dibandingkan tahun 2020 menjadi 7,90% di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan liabilitas jangka pendek dominan atas utang usaha, utang pajak dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek serta penurunan total aset dominan atas aset lancar pada piutang usaha dan persediaan.

This ratio is used to measure the portion of assets used to guarantee overall liabilities or debt. Indonesia Power's Debt to Total Assets Ratio was 1.60% lower than in 2020, to 7.90% in 2021. This was mainly due to the decrease in dominant current liabilities over trade payables, taxes payable, and current employee benefit liabilities, as well as the decrease in dominant total assets over current assets in trade receivables and inventories.

Grafik Rasio Utang terhadap Aset Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Debt to Total Assets Ratio in 2018-2021 (%)

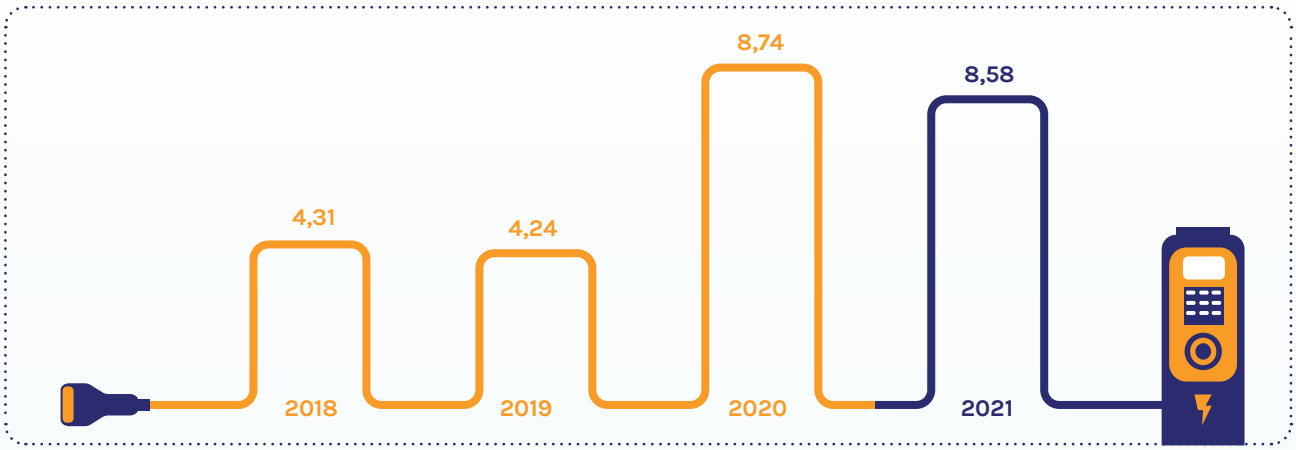


Rasio Utang terhadap Modal
Debt to Total Equity Ratio

Rasio ini digunakan untuk mengukur bagian modal yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang. Nilai rasio utang terhadap modal Indonesia Power lebih rendah 1,74% dibandingkan tahun 2020 menjadi 8,58% di tahun 2021. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan liabilitas jangka pendek dominan atas utang usaha, utang pajak dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek serta penurunan ekuitas pada saldo laba atas laba rugi tahun berjalan.

This ratio is used to measure the portion of equity used to guarantee overall liabilities or debt. Indonesia Power's Debt to Total Equity Ratio was 1.74% lower than in 2020, to 8.58% in 2021. This was mainly due to the decrease in dominant current liabilities over trade payables, taxes payable, and current employee benefit liabilities, as well as the decrease in equity in retained earnings over profit/loss for the year.

Grafik Rasio Utang terhadap Modal Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Debt to Total Equity Ratio in 2018-2021 (%)



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
SOLVENCY, COLLECTIBILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Rasio Likuiditas
Liquidity Ratios

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang terdiri dari *Cash Ratio* (Rasio Kas), *Quick Ratio* (Rasio Cepat) dan *Current Ratio* (Rasio Lancar). Semakin tinggi nilai dari rasio-rasio tersebut, maka mengindikasikan bahwa Perusahaan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya yang akan jatuh tempo. Rasio likuiditas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Liquidity ratios are used to measure the Company's ability to meet its short-term liabilities. These ratios consist of Cash Ratio, Quick Ratio, and Current Ratio. Higher ratio indicates the Company's ability to pay its maturing liabilities. The Company's liquidity ratios are described in the table below.

Tabel Likuiditas Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Liquidity in 2018-2021 (%)

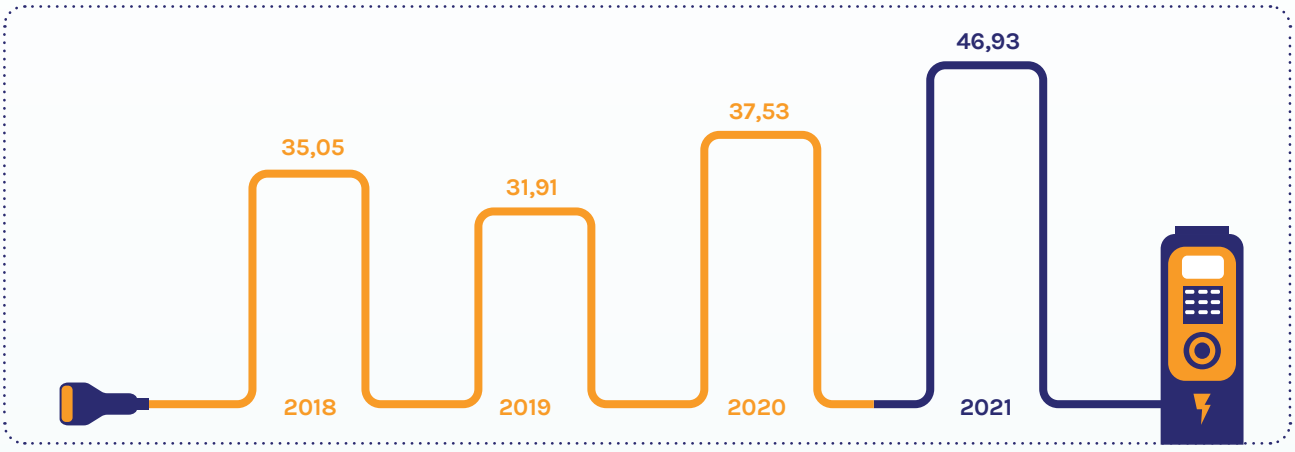
Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Rasio Kas Cash Ratio	35,05	31,91	37,53	46,93	25,02%
Rasio Cepat Quick Ratio	589,32	625,16	505,91	557,23	10,14%
Rasio Lancar Current Ratio	694,55	663,18	526,60	580,73	10,28%

Rasio Kas
Cash Ratio

Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan kas. Nilai rasio kas Indonesia Power meningkat 25,02% dibandingkan tahun 2020 menjadi 46,93% di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan kas dan setara kas.

Cash ratio is used to measure the Company's ability to meet its current liabilities using cash. The Cash Ratio increased 25.02% from 2020, to 46.93% in 2021. This was mainly contributed by the increase in cash and cash equivalents.

Grafik Rasio Kas Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Cash Ratio in 2018-2021 (%)

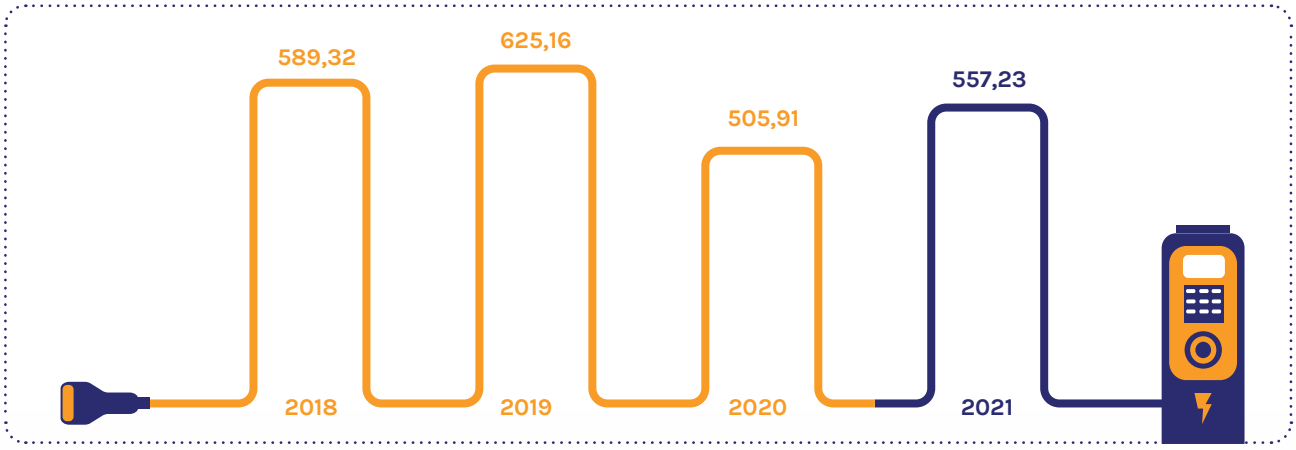


Rasio Cepat
Quick Ratio

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancar Perusahaan di luar persediaan diukur menggunakan rasio cepat. Nilai rasio cepat Indonesia Power meningkat 10,14% dibandingkan tahun 2020 menjadi 557,23% di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan aset lancar dominan atas piutang usaha serta penurunan liabilitas jangka pendek dominan atas utang usaha, utang pajak dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek.

Quick ratio is used for measuring the Company's ability to meet its current liabilities using its current assets aside of inventories. The Quick Ratio increased 10.14% from 2020, to 557.23% in 2021. This was mainly due to the decrease in dominant current assets over trade receivables as well as the decline in dominant current liabilities over trade payables, taxes payable, and current employee benefit liabilities.

Grafik Rasio Cepat Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Quick Ratio in 2018-2021 (%)



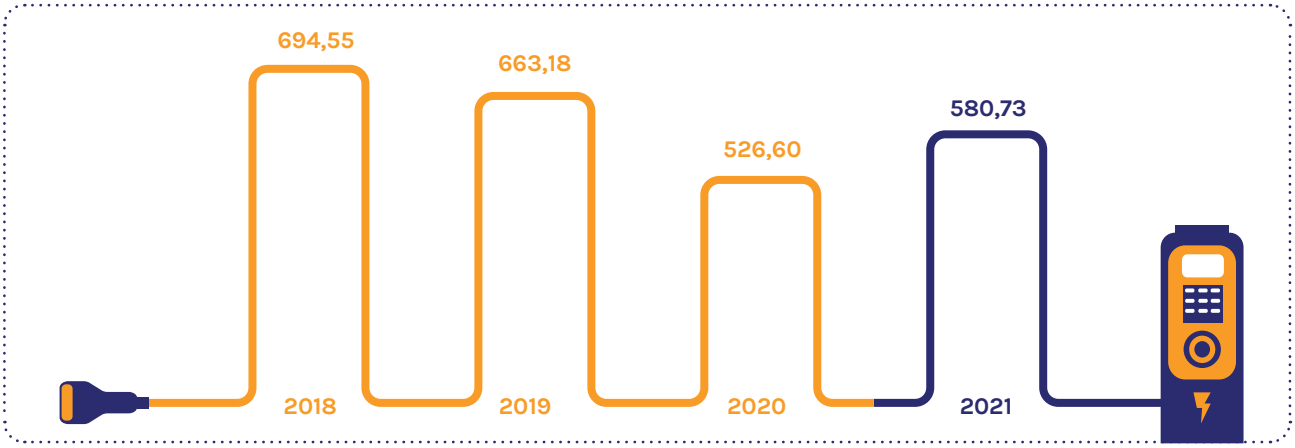
Rasio Lancar
Current Ratio

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui seluruh aset lancar yang dimilikinya diukur menggunakan rasio lancar. Nilai rasio lancar Indonesia Power meningkat 10,28% dibandingkan tahun 2020 menjadi 580,73% di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan aset lancar dominan atas piutang usaha serta penurunan liabilitas jangka pendek dominan atas utang usaha, utang pajak dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek.

Current ratio is used for measuring the Company's ability to meet its current liabilities using all current assets at hand. The Current Ratio increased 10.28% from 2020, to 580.73% in 2021. This was mainly due to the decrease in dominant current assets over trade receivables as well as the decline in dominant current liabilities over trade payables, taxes payable, and current employee benefit liabilities.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
SOLVENCY, COLLECTIBILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Grafik Rasio Lancar Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Current Ratio in 2018-2021 (%)

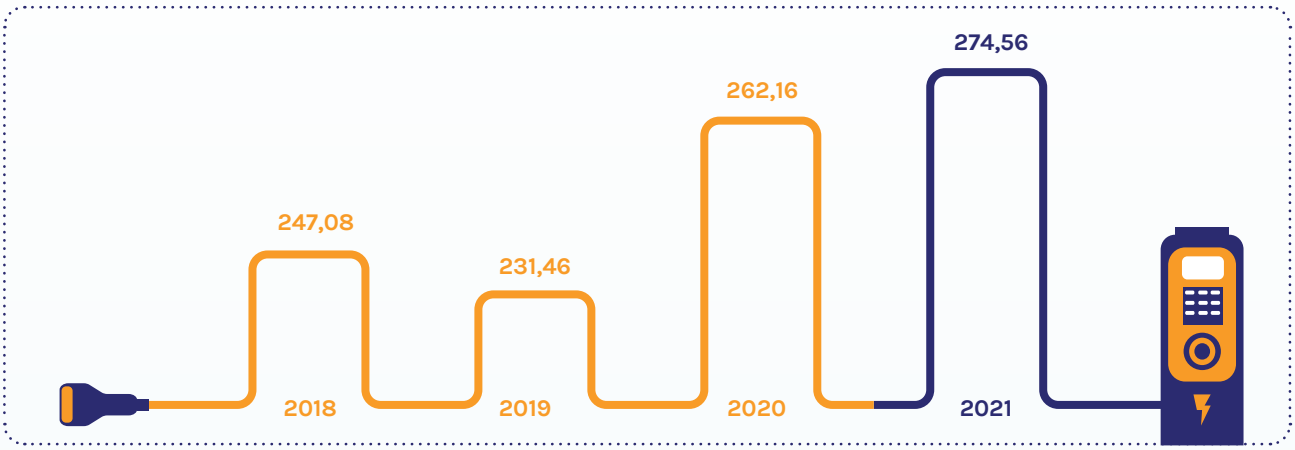


Kolektibilitas Piutang
Collectibility

Tingkat kolektibilitas piutang (periode penagihan) digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Nilai periode penagihan Indonesia Power meningkat 4,73% dibandingkan tahun 2020 menjadi 274,56 hari di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan piutang usaha rata-rata.

Collectibility rate (collection period) is used to measure the Company's ability in collecting receivables. The collection period increased 4.73% from 2020, to 274.56 days in 2021. The main factor of this was the increase in average trade receivables.

Grafik Periode Penagihan Tahun 2018 - 2021 (hari)
Chart of Collection Period in 2018-2021 (day)



Rasio Keuangan Lainnya
Other Financial Ratios

Selain kemampuan perushaaan dalam menyelesaikan kewajiban dan kemampuan dalam periode penagihan piutang, terdapat rasio-rasio keuangan penting lainnya sebagai berikut:

In addition to the Company's solvency and collectibility in the receivable collection period, there are other important financial ratios as follows:

Rasio Profitabilitas
Profitability Ratios

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang terdiri dari *Return on Equity* (tingkat pengembalian modal), *Return on Investment* (tingkat pengembalian investasi) *Operating Profit Margin* (margin operasi), dan *Net Profit Margin* (margin laba bersih). Rasio profitabilitas Perusahaan ditunjukkan dalam tabel berikut.

The Company's ability to generate profit is measured using profitability ratios. These ratios include Return on Equity, Return on Investment, Operating Profit Margin, and Net Profit Margin. The Company's profitability is described in the table below.

Tabel Profitabilitas Tahun 2018 - 2021 (%)
Table of Profitability in 2018-2021 (%)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Margin Operasi Operating Profit Margin	12,23	22,08	30,60	15,81	(48,34%)
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	8,14	17,31	26,39	10,47	(60.35)
Tingkat Pengembalian Modal Return on Equity	1,90	4,22	5,89	2,31	(60,72)
Tingkat Pengembalian Investasi Return on Investment	4,39	6,60	7,55	4,80	(36,49%)

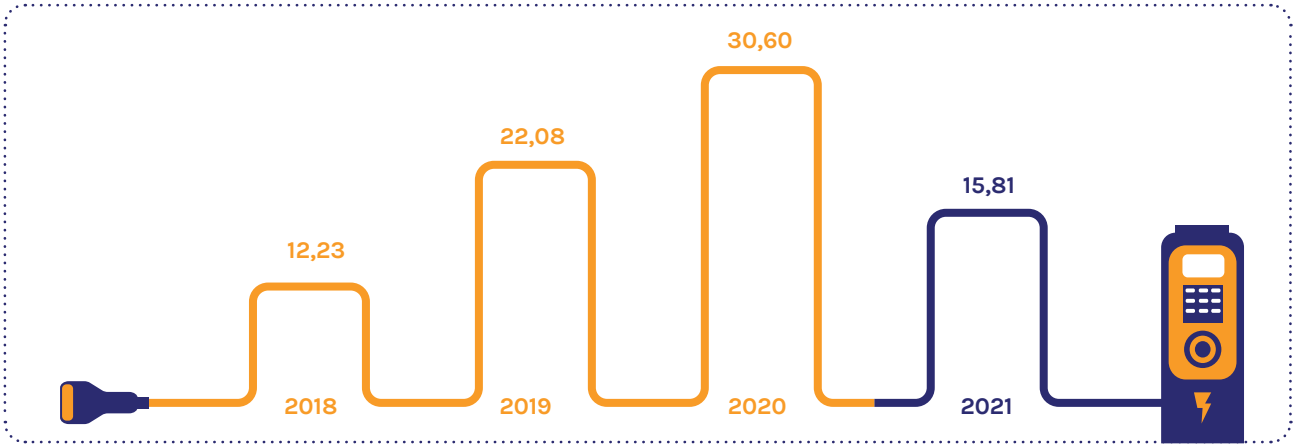
Margin Operasi
Operating Profit Margin

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi yang dihasilkan dari penjualannya. Margin operasi Indonesia Power lebih rendah 48,34% dibandingkan tahun 2020 menjadi 15,81% di tahun 2021.

This margin is a measure of the Company's ability in generating operating profits from sales. The Operating Profit Margin was 48.34% lower than in 2020, to 15.81% in 2021.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
SOLVENCY, COLLECTIBILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Grafik Margin Operasi Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Operating Profit Margin in 2018-2021 (%)

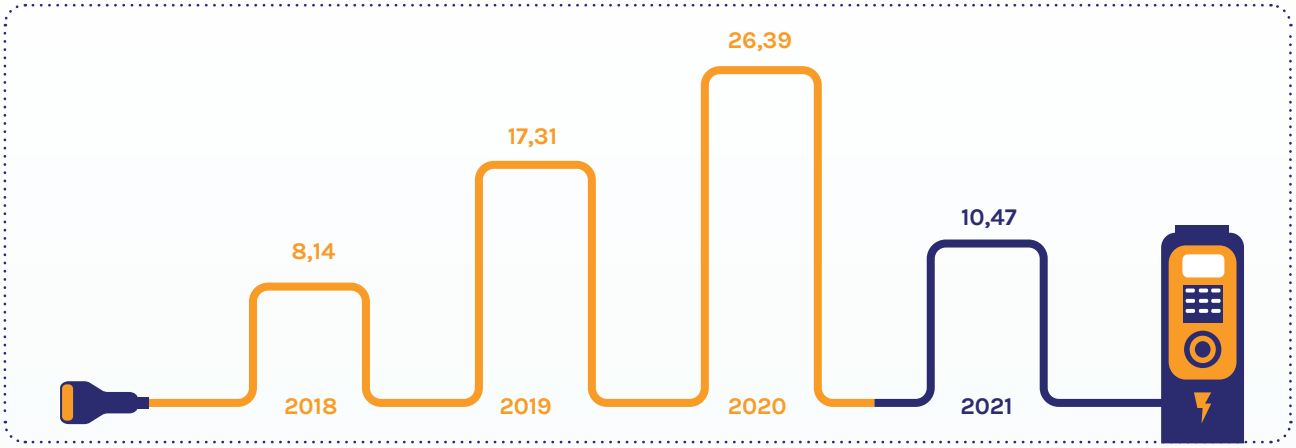


Margin Laba Bersih
Net Profit Margin

Merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba laba bersih yang dihasilkan dari penjualannya. Margin laba bersih Indonesia Power lebih rendah 60,35% dibandingkan tahun 2020 menjadi 10,47% di tahun 2021.

This margin is a measure of the Company's ability in generating net profits from sales. Net Profit Margin decreased 60.35% from 2020, to 10.47% in 2021.

Grafik Margin Laba Bersih Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Net Profit Margin in 2018-2021 (%)

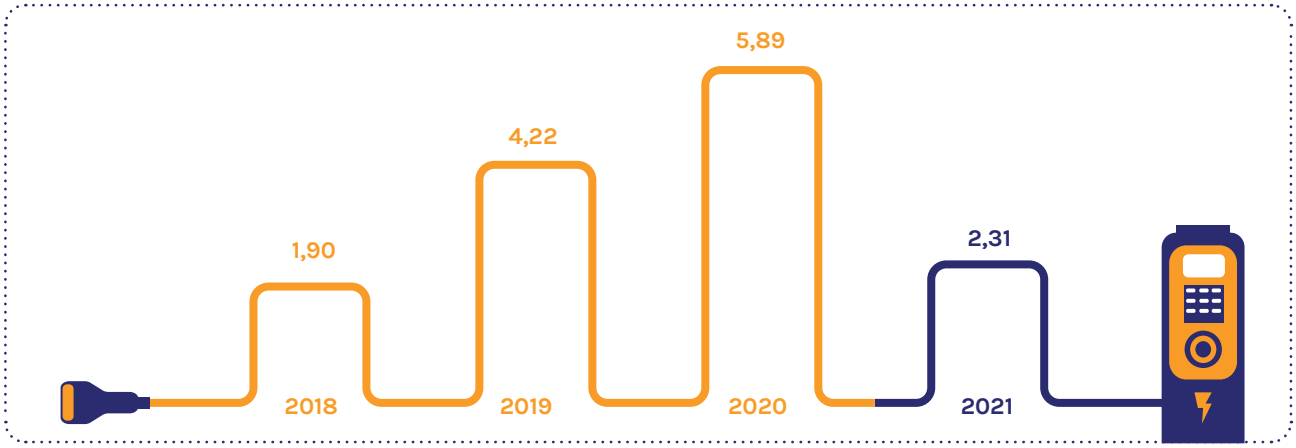


Tingkat Pengembalian Modal
Return on Equity

Rasio yang memperlihatkan sejauh manakah Perusahaan mengelola modal sendiri secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau Pemegang Saham. Nilai tingkat pengembalian modal Indonesia Power lebih rendah 60,72% dibandingkan tahun 2020 menjadi 2,31% di tahun 2021.

This ratio shows the extent to which the Company manages its own equity effectively, measuring return on investments made by capital owner or Shareholders. Return on Equity decreased 60.72% from 2020, to 2.31% in 2021.

Grafik Tingkat Pengembalian Modal Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Return on Equity in 2018-2021 (%)

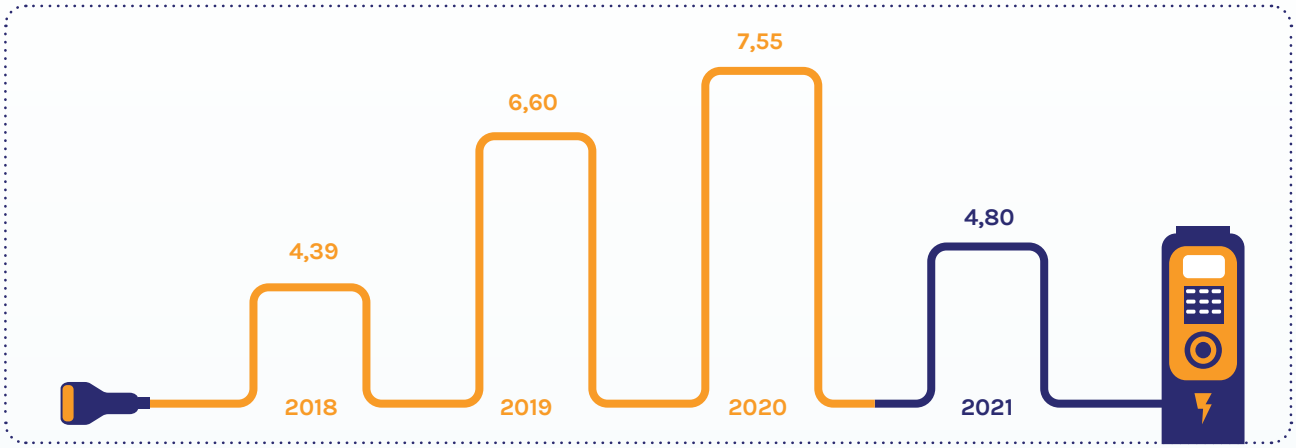


Tingkat Pengembalian Investasi
Return on Investment

Merupakan kemampuan Perusahaan secara keseluruhan dalam memperoleh Keuntungan dengan jumlah Aset yang tersedia didalam Perusahaan. Nilai tingkat pengembalian investasi Indonesia Power lebih rendah 36,49% dibandingkan tahun 2020 menjadi 4,80% di tahun 2021.

This ratio signifies the Company's overall ability in generating profits using the total Assets available in the Company. Return on Investment decreased 36.49% from 2020, to 4.80% in 2021. This was mainly contributed by the decline in EBITDA and total assets.

Grafik Tingkat Pengembalian Investasi Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Return on Investment in 2018-2021 (%)



Rasio Aktivitas
Activity Ratios

Merupakan rasio-rasio yang menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya.

These ratios indicate the effectiveness of the Company in managing its assets.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
SOLVENCY, COLLECTIBILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Tabel Rasio Aktivitas Tahun 2018 - 2021
Table of Activity Ratios in 2018-2021

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth (%)
Perputaran Persediaan (kali) Inventory Turnover (time)	3,66	3,28	3,29	4,27	29,79%
Perputaran Aset (%) Asset Turnover (%)	4,39	23,04	19,87	20,51	3,22%

Perputaran Persediaan
Inventory Turnover

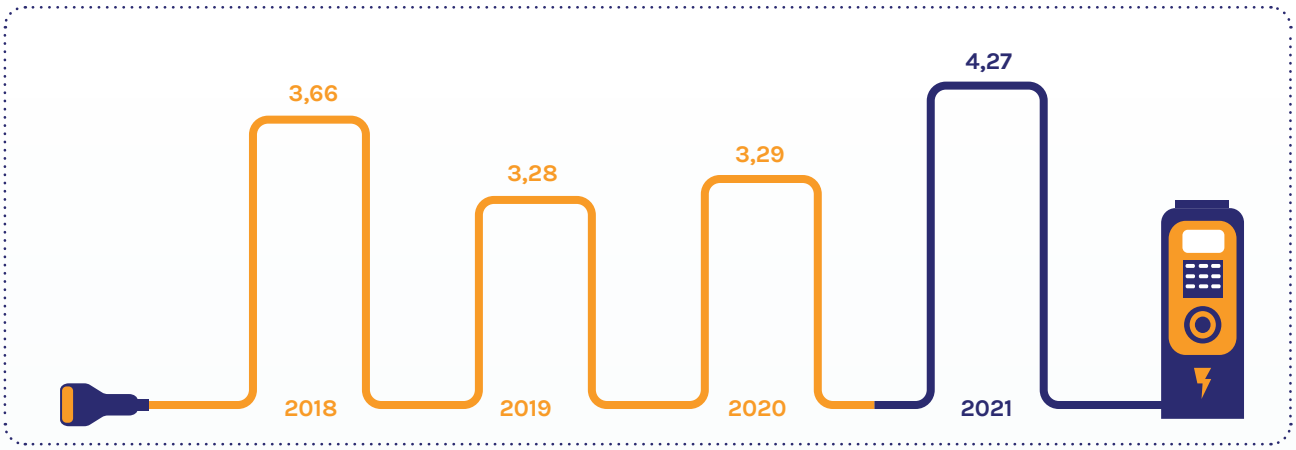
Perputaran persediaan tahun 2021 diukur menggunakan perputaran persediaan (kali) untuk lebih mengetahui seberapa efektifnya perencanaan *supply chain* sesuai dengan pengukuran yang digunakan perusahaan dalam mengevaluasi implementasi *asset management*.

The inventory turnover in 2021 was measured with time as its unit, to better understand how effective the supply chain planning is in accordance with the measurement used by the Company in evaluating the asset management implementation.

Realisasi perputaran persediaan tahun 2021 lebih baik 29,79% terhadap tahun lalu menggambarkan bahwa supply chain semakin efektif.

The actual inventory turnover in 2021 improved 29.79% from the previous year, which indicates that the supply chain has been becoming more effective.

Grafik Perputaran Persediaan Tahun 2018 - 2021 (kali)
Chart of Inventory Turnover in 2018-2021 (time)

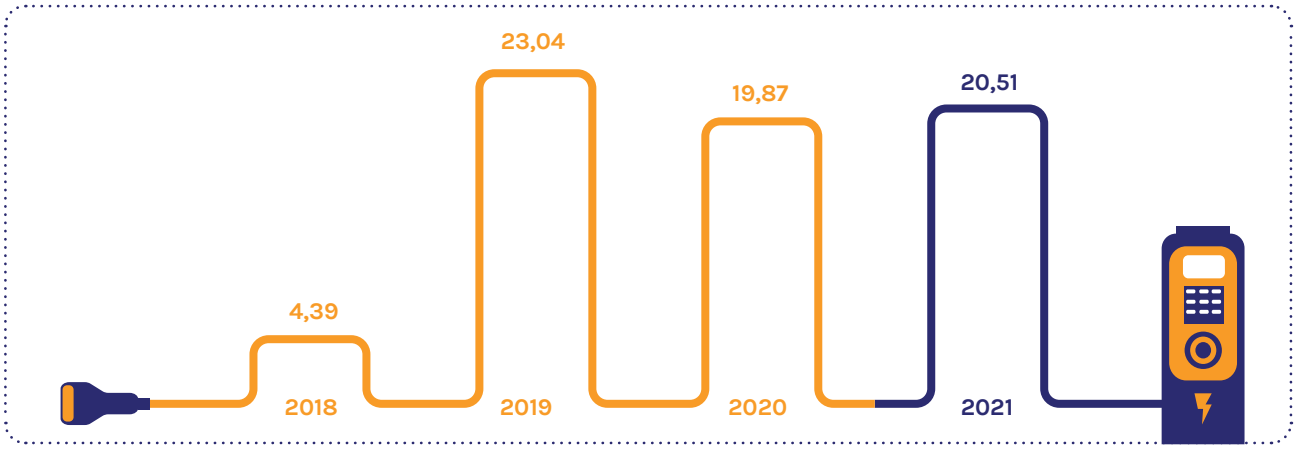


Perputaran Aset
Asset Turnover

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan aset perusahaan untuk memperoleh pendapatan, semakin cepat aset perusahaan berputar makin besar pendapatan perusahaan tersebut. Perputaran aset Indonesia Power meningkat 3,22% dibandingkan tahun 2020 menjadi 20,51% di tahun 2021. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan total aset dominan atas aset lancar pada piutang usaha dan persediaan.

This ratio measures the Company's ability to manage its assets to earn revenue. The faster the Company's assets turnover, the greater the Company's revenue. Asset Turnover increased 3.22% from 2020, to 20.51% in 2021. This was particularly due to the decline in dominant total assets over current assets in trade receivables and inventories.

Grafik Perputaran Aset Tahun 2018 - 2021 (%)
Chart of Asset Turnover in 2018-2021 (%)



STRUKTUR MODAL
CAPITAL STRUCTURE

Struktur Modal
Capital Structure

Struktur modal Perusahaan pada tahun 2021 terdiri dari Liabilitas sebesar Rp15,31 triliun lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Adapun yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar Rp178,40 triliun lebih rendah dibandingkan tahun 2020.

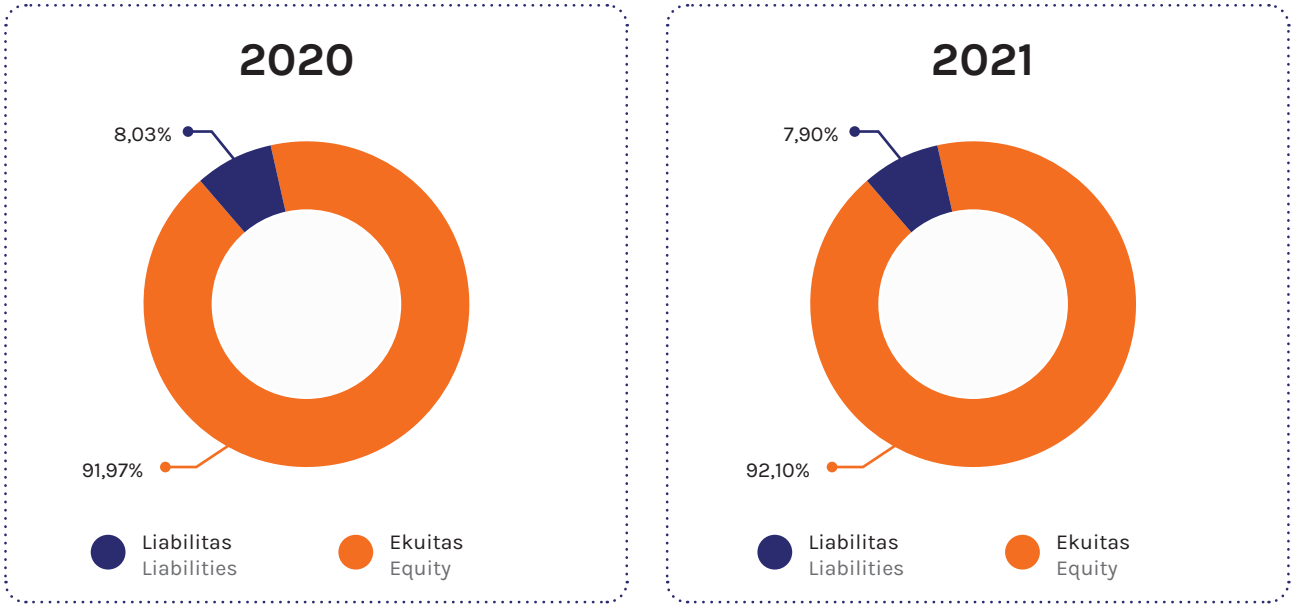
The Company's capital structure in 2021 consisted of Liabilities amounting to Rp15.31 trillion, which was lower than in 2020. Equity, on the other hand, was amounted to Rp178.40 trillion, which was also lower than in 2020.

Tabel Struktur Modal Tahun 2019 - 2021
Table of Capital Structure in 2019-2021

Uraian Description	2019		2020		2021	
	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%
Liabilitas Liabilities	**7.712.397**	**4,07**	**16.067.595**	**8,03**	**15.312.157**	**7,90**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	4.756.821	2,51	7.314.262	3,66	5.894.646	3,04
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2.955.576	1,56	8.753.333	4,38	9.417.511	4,86
Ekuitas Equity	**181.993.199**	**95,93**	**183.943.668**	**91,97**	**178.401.637**	**92,10**
Jumlah Aset Total Assets	**189.705.596**	**100,00**	**200.011.263**	**100,00**	**193.713.794**	**100,00**

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG, KOLEKTIBILITAS PIUTANG DAN RASIO KEUANGAN LAINNYA
SOLVENCY, COLLECTIBILITY, AND OTHER FINANCIAL RATIOS

Grafik Komposisi Struktur Modal Tahun 2020 dan 2021 (%)
Chart of Capital Structure in 2020 and 2021 (%)



Kebijakan dan Mekanisme *Review* Struktur Modal
Capital Structure Review Policy and Mechanism

Kondisi struktur modal yang optimal dicapai dengan modal rata-rata tertimbang (*Weighted Average Cost of Capital*/WACC) yang minimal. Penggunaan utang yang bertambah akan meminimalkan WACC sebab biaya utang (*cost of debt*) lebih murah dari biaya modal sendiri (*cost of equity*). Di samping itu, penggunaan utang juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi penghematan pajak. Meskipun demikian, peningkatan utang yang dilakukan Perusahaan akan meningkatkan biaya beban bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, Perusahaan mengelola penggunaan utang dan modal sehingga diperoleh kondisi yang optimum.

An optimal capital structure can be achieved through minimum Weighted Average Cost of Capital (WACC). The increase in debt appropriation will decrease WACC, as the cost of debt is lower than the cost of equity. In addition, debt appropriation will reduce taxable expenses, thus cutting taxes. Nevertheless, the increase in the Company's debt will increase the cost of interest expenses, which will further decrease the overall value of the Company. Therefore, the Company manages its debt and capital appropriation to achieve an optimal condition.

Tingkat Likuiditas Perusahaan
Company Liquidity Level

Perusahaan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap rasio likuiditas, rasio ini mengindikasikan kemampuan Perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas maka struktur modal akan semakin optimal. Rasio likuiditas Perusahaan dicerminkan oleh rasio kas, rasio cepat dan rasio lancar.

The Company constantly monitors the liquidity ratios that indicate the Company's solvency in settling its current liabilities. Higher liquidity ratios means better capital structure. The Company's liquidity ratios are reflected by cash, quick, and current ratios.

Pada tahun 2021, rasio kas sebesar 46,93% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, rasio cepat sebesar 557,23% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, dan rasio lancar sebesar 580,73% lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.

In 2021, the cash ratio was at 46.93%, which was higher than in 2020; the quick ratio was at 557.23%, which was higher than in 2020; and the current ratio was at 580.73%, which was higher than in 2020.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

Setoran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tax payment is the responsibility and participation of taxpayers to directly and jointly perform their tax obligation for financing the country and supporting the national development.

Selama tahun 2021 Indonesia Power tidak terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak, baik PPh Karyawan, PPh Badan, PPN Masa dan PBB. Selain itu juga tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan bulanan, serta tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator.

In 2021, Indonesia Power always made timely payment of tax obligations which include Employee Income Tax, Corporate Income Tax, Periodic VAT, and Land and Building Tax. The company also punctually submitted tax documents such as annual and monthly Tax Returns as well as other obligatory documents to the regulator.

Setoran pajak meningkat 41,51% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar Rp1,47 triliun di tahun 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 08 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, transaksi tagihan ke PLN yang awalnya PPN disetorkan oleh PT PLN (Persero) menjadi kewajiban Indonesia Power.
2. Pengenaan batubara sebagai objek pajak PPN sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 112.

Tax payment increased 41.51% from 2020 to Rp1.47 trillion in 2021. The increase was due to:

1. With the issuance of Regulation of the Minister of Finance No. 08 of 2021 on Value-Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, PT PLN (Persero)'s VAT payable obligation was transferred to Indonesia Power.
2. Inclusion of coal as VAT taxable object according to Law No. 11 of 2020 on Job Creation, Article 112.

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
CONTRIBUTION TO THE COUNTRY

Tabel Setoran Pajak Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Tax Payment in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PPN Pungut Collected VAT	864.583	845.121	733.256	1.165.010	58,88%
PPN Impor VAT on Import	108.735	60.216	41.622	46.770	12,37%
Bea Masuk Import Duty	107.238	23.661	24.757	14.355	(42,02%)
PPh 21 Income Tax 21	166.218	191.631	146.199	159.542	9,13%
PBB, Materai dan Retribusi Land and Building Tax, Stamp Duty, and Levy	24.464	38.747	93.611	85.285	(8,89%)
Jumlah Setoran Pajak Total Tax Payment	**1.271.239**	**1.159.376**	**1.039.445**	**1.470.962**	**41,51%**

Indonesia Power mendapatkan fasilitas pembebasan nilai pajak sesuai Kebijakan Pengajuan Pembebasan (PPh 22 Impor/ PPN Impor/PPh 22/PPh 23) untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 268/PMK.03/2015 & PER - 1/PJ/2011 jo PER - 21/PJ/2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain serta PMK No. 268/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi.

Indonesia Power mendapatkan fasilitas pembebasan pajak tahun 2021 sebesar Rp356,60 miliar lebih rendah 46,21% dibandingkan tahun 2020 yang disebabkan oleh berkurangnya nilai PPN Impor karena Investasi yang dilakukan oleh Indonesia Power merupakan investasi luncuran dari tahun 2020.

Indonesia Power received the tax exemption facility based on the Exemption Submission Policy (Income Tax 22 on Import/ VAT on Import/Income Tax 22/Income Tax 23) for obtaining the facility provided by the Directorate General of Taxes in accordance with the Regulation of the Minister of Finance (PMK) Numbers 268/PMK.03/2015 and PER-1/PJ/2011 in conjunction with PER-21/PJ/2014 on the Procedures for Filing Applications for Exemption from Withholding and/or Collection of Income Tax by Other Parties and Regulation of the Minister of Finance Number 268/PMK.03/2015 on the Procedures for the Granting of VAT Exemption Facility for the Import and/or Delivery of Certain Strategic Taxable Goods and the Procedures for the Payment of VAT on Certain Strategic Taxable Goods Exempted from Tax as well as the Imposition of Sanctions.

Indonesia Power was granted the tax exemption facility at an amount of Rp356,60 billion in 2021, 46.21% less than in 2020, due to reduced amount of VAT on Import, considering that Indonesia Power's investment was a launch from 2020.

Tabel Pembebasan Nilai Pajak Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Tax Exemption in 2018-2021 (Rp million)

Uraian Description	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
PPh 22 Impor Import Income Tax 22	177.407	19.601	9.485	8.690	(8,38%)
PPN Impor VAT on Import	101.567	55.822	201.688	1.931	(99,04%)
PPh 22 Income Tax 22	479.580	468.856	426.326	302.139	(29,13%)
PPh 23 Income Tax 23	100.071	156.285	25.509	43.842	71,87%
Jumlah Pembebasan Nilai Pajak **Total Tax Exemption**	**858.625**	**700.565**	**663.008**	**356.602**	**(46,21%)**

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2021, REALISASI 2021 DAN PROYEKSI 2022

COMPARISON BETWEEN 2021 TARGET, 2021 REALIZATION, AND 2022 PROJECTION

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Operasional

Comparison between Operational Target, Realization, and Projection

Evaluasi terhadap pencapaian target kinerja operasional merupakan salah satu bentuk upaya Perusahaan untuk menentukan strategi di masa yang akan datang terkait dengan pengelolaan operasi pembangkitan sehingga pencapaian target yang akan datang dapat lebih maksimal. Berikut adalah tabel perbandingan kinerja operasional Perusahaan terhadap target di tahun 2021 serta proyeksi tahun 2022.

The evaluation of operational performance target achievement shows the Company's effort in determining future strategies for power plant operation management, so that the Company's target can be achieved more optimally in the future. The following table presents the Company's operational performance against the 2021 target and 2022 projection.

Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Pembangkit

Power Plant Performance Target, Realization, and Projection

Kinerja pembangkit dikategorikan berdasarkan segmen operasi Indonesia Power yaitu kinerja pembangkit milik sendiri dan kinerja pembangkit jasa O&M Jawa.

The performance of power plants is categorized according to Indonesia Power's operation segments, i.e. existing power plants and O&M Service power plants in Java.

Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Pembangkit *Existing*

Existing Power Plant Performance Target, Realization, and Projection

Berikut adalah realisasi pencapaian target Kinerja Pembangkit *Existing*:

The following is the realization of existing power plants performance target:

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit *Existing* Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

Table of Comparison of Existing Power Plant Performance Target against Realization in 2021 and 2022 Projection

Kinerja Pembangkit *Existing* Existing Power Plant Performance	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
EAF (%)	91,00	93,04	102,24%	91,03
SOF (%)	6,02	5,29	112,13%	6,30
EFOR (%)	3,29	1,31	160,18%	1,48
SdOF (kali) SdOF (time)	2,52	1,46	142,06%	1,69

Realisasi EAF Pembangkit *Existing* tahun 2021 sebesar 93,04% dengan pencapaian 102,24% dari target RKAP 2021. EAF tercapai karena unit pembangkit dapat menjaga keandalan dan kesiapan peralatan pembangkit. Selanjutnya pada tahun 2022 EAF ditargetkan sebesar 91,03% dengan dasar asumsi adanya rencana pemeliharaan yang lebih panjang dibandingkan tahun 2021, derating pembangkit di Suralaya unit 7 selama 324 hari sebesar ±50MW serta keterbatasan energi primer gas untuk unit pembangkit PLTGU.

The realization of existing power plants' EAF in 2021 was at 93.04% with 102.24% achievement from WP&B 2021 target. The EAF was achieved due to generation unit's capability of maintaining the reliability and readiness of power plant equipment. Further for 2022, the EAF is targeted at 91.03% with the basis of assumption that there will be longer maintenance planned compared to in 2021, i.e. power plant derating in Suralaya Unit 7 for 324 days of ±50 MW and limited gas primary energy for CCPP generation unit.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2021, REALISASI 2021 DAN PROYEKSI 2022
COMPARISON BETWEEN 2021 TARGET, 2021 REALIZATION, AND 2022 PROJECTION

Realisasi SOF Pembangkit *Existing* tahun 2021 sebesar 5,29% dengan pencapaian 112,13% dari target RKAP 2021. SOF tercapai karena unit pemabngkit dapat melakukan optimasi durasi pemeliharaan *Planned Outage* (PO) dan *Maintenance Outage* (MO) di tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 SOF ditargetkan sebesar 6,30% dengan dasar asumsi adanya rencana pemeliharaan yang lebih panjang dibandingkan tahun 2021.

The realization of existing power plants' SOF in 2021 was at 5.29% with 112.13% achievement from WP&B 2021 target. The SOF was achieved due to generation unit's capability of optimizing the duration of Planned Outage (PO) and Maintenance Outage (MO) in 2021. Further for 2022, the SOF is targeted at 6.30% with the basis of assumption that there will be longer maintenance duration planned compared to in 2021.

Realisasi EFOR Pembangkit *Existing* tahun 2021 sebesar 1,31% dengan pencapaian 160,18% dari target RKAP 2021. Hal ini menunjukkan bahwa unit pembangkit *existing* Indonesia Power dapat menurunkan jumlah terjadinya gangguan di tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 EFOR ditargetkan sebesar 1,48% dengan dasar asumsi kondisi usia pembangkit rata-rata di atas 20 tahun dan belum dilakukan *retrofit* pada peralatan utama pembangkit.

The realization of existing power plants' EFOR in 2021 was at 1.31% with 160.18% achievement from WP&B 2021 target. This demonstrates that existing generation units in Indonesia Power were capable of reducing the number of failures in 2021. Further for 2022, the EFOR is targeted at 1.48% with the basis of assumption that the average age of power plants is above 20 years old and retrofitting has never been done on power plants' main equipment.

Realisasi SdOF Pembangkit *Existing* tahun 2021 sebesar 1,46 kali dengan pencapaian 142,06% dari target RKAP 2021. Hal ini menunjukkan bahwa unit pembangkit *existing* Indonesia Power dapat menurunkan jumlah terjadinya gangguan di tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 SdOF ditargetkan sebesar 1,69 kali dengan dasar asumsi kondisi usia pembangkit rata-rata di atas 20 tahun dan belum dilakukan *retrofit* pada peralatan utama pembangkit.

The realization of existing power plants' SdOF in 2021 was at 1.46 time with 142.06% achievement from WP&B 2021 target. This demonstrates that existing generation units in Indonesia Power were capable of reducing the number of failures in 2021. Further for 2022, the SdOF is targeted at 1.69 time with the basis of assumption that the average age of power plants is above 20 years old and retrofitting has never been done on power plants' main equipment.

Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Pembangkit Jasa O&M Jawa
Java O&M Service Power Plant Performance Target, Realization, and Projection

Berikut adalah realisasi pencapaian target Kinerja Pembangkit Jasa O&M Jawa:

The following is the realization of Java O&M Service power plant performance target:

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Jasa O&M Jawa Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022
Table of Comparison of Java O&M Service Power Plant Performance Target against Realization in 2021 and 2022 Projection

Kinerja Pembangkit Jasa O&M Jawa Performance of O&M Service Power Plants in Java	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
EAF (%)	88,92	89,84	101,03%	86,68
SOF (%)	7,46	7,76	95,99%	9,61
EFOR (%)	2,72	2,10	122,71%	2,66
SdOF (kali) SdOF (time)	2,35	0,82	165,07%	1,74

Realisasi EAF Pembangkit Jasa O&M Jawa tahun 2021 sebesar 89,84% dengan pencapaian 101,03% dari target RKAP 2021. EAF tercapai karena kinerja unit yang lebih andal serta gangguan yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2022 EAF ditargetkan sebesar 86,68% karena memiliki rencana durasi pemeliharaan yang lebih panjang daripada tahun 2021.

The realization of Java O&M Service Power Plants' EAF in 2021 was at 89.84% with 101.03% achievement from WP&B 2021 target. This was mainly due to improved reliability of units and fewer outages as compared to the previous year. Further for 2022, the EAF is targeted at 86.68% due to planned longer maintenance duration compared to in 2021.

Realisasi SOF Pembangkit Jasa O&M Jawa tahun 2021 sebesar 7,76% dengan pencapaian 95,99% dari target RKAP 2021. SOF belum tercapai karena perpanjangan durasi pemeliharaan PLTU Suralaya 8 serta MO di PLTU Adipala dan PLTU Suralaya 8. Selanjutnya, pada tahun 2022 SOF ditargetkan sebesar 9,61% dengan dasar asumsi usulan target SOF disesuaikan dengan jadwal dan *Scope Overhaul* tahun 2022.

The realization of Java O&M Service Power Plants' SOF in 2021 was at 7.76% with 95.99% achievement from WP&B 2021 target. The SOF was not realized due to lengthened duration of SPP Suralaya 9 maintenance and MO in SPP Adipala and SPP Suralaya 8. Further for 2022, the SOF is targeted at 9.61% with the basis of assumption that the proposed SOF target is adjusted to the schedule and scope of 2022 Overhaul.

Realisasi EFOR Pembangkit Jasa O&M Jawa tahun 2021 sebesar 2,10% dengan pencapaian 122,71% dari target RKAP 2021. EFOR tercapai yang menunjukkan bahwa unit pembangkit Jasa O&M Jawa dapat menurunkan jumlah durasi gangguan di tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 EFOR ditargetkan sebesar 2,66% dengan dasar asumsi usulan target EFOR 2022 disesuaikan berdasarkan histori kinerja di tahun sebelumnya.

The realization of Java O&M Service Power Plants' EFOR in 2021 was at 2.10% with 122.71% achievement from WP&B 2021 target. The EFOR achieved demonstrates that existing Java O&M generation units were capable of reducing the number of outages in 2021. Further for 2022, the EFOR is targeted at 2.66% with the basis of assumption that the proposed EFOR target for 2022 is adjusted to the previous year's performance history.

Realisasi SdOF Pembangkit Jasa O&M Jawa tahun 2021 sebesar 0,82 kali dengan pencapaian 165,07% dari target RKAP 2021. SdOF tercapai yang menunjukkan bahwa unit pembangkit Jasa O&M Jawa dapat menurunkan jumlah gangguan mendadak di tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 SdOF ditargetkan sebesar 1,74 kali dengan dasar asumsi usulan target SdOF 2022 disesuaikan berdasarkan *trend* gangguan unit pada tahun sebelumnya.

The realization of Java O&M Service Power Plants' SdOF in 2021 was at 0.82 times with 165.07% achievement from WP&B 2021 target. The SdOF achieved demonstrates that existing Java O&M generation units were capable of reducing the number of sudden outages in 2021. Further for 2022, the SdOF is targeted at 1.74 times the basis of assumption that the proposed SdOF target for 2022 is adjusted to the previous year's Unit outage trend.

Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa
Outside Java O&M Service Power Plant Performance Target, Realization, and Projection

Berikut adalah realisasi pencapaian target Kinerja Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa:

The following is the realization of Outside Java O&M Service power plant performance target:

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa 2021 dan Proyeksi Tahun 2022
Table of Comparison of Outside Java O&M Service Power Plant Performance Target against Realization in 2021 and 2022 Projection

Kinerja Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa Performance of O&M Service Power Plants outside Java	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
EAF (%)	81,56	77,80	95,39%	81,67
SOF (%)	13,89	16,30	82,65%	11,49
EFOR (%)	3,91	3,94	99,23%	6,85
SdOF (kali) SdOF (time)	6,85	4,11	140,07%	4,05

Realisasi EAF Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa tahun 2021 sebesar 77,80% dengan pencapaian 95,39% dari target RKAP 2021. EAF belum tercapai karena adanya:

1. Pelaksanaan *Maintenance Outage* (MO) program peningkatan keandalan pada PLTU Holtekamp.
2. Kerusakan *Dome Coal Yard,* gangguan *Induced Draft Fan* dan *Boiler Feed Pump* (BFP) pada PLTU Pangkalan Susu OMU.
3. Gangguan Deformasi *Chain Grate* dan gangguan *Slagging Economizer Flue Gas System* pada PLTU Holtekamp OMU.

The realization of Outside Java O&M Service Power Plants' EAF in 2021 was at 77.80% with 95.39% achievement from WP&B 2021 target. The EAF was unrealized due to:

1. Maintenance Outage (MO) as a part of reliability enhancement in SPP Holtekamp.
2. Coal yard dome damage, induced draft fan failure, and boiler feed pump (BFP) failure in SPP Pangkalan Susu OMU.
3. Chain grate deformation and slagging and economizer flue gas system failure in SPP Holtekamp OMU.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2021, REALISASI 2021 DAN PROYEKSI 2022
COMPARISON BETWEEN 2021 TARGET, 2021 REALIZATION, AND 2022 PROJECTION

Selanjutnya, pada tahun 2022 EAF ditargetkan sebesar 81,67% dengan dasar asumsi *Service Level Agreement* (SLA) dengan PLN Regional Wilayah.

Realisasi SOF Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa tahun 2021 sebesar 16,30% dengan pencapaian 82,65% dari target RKAP 2021. SOF belum tercapai karena oleh adanya:
1. Kerusakan *Dome Coal Yard*, gangguan *Induced Draft Fan* dan *Boiler Feed Pump* (BFP) pada PLTU Pangkalan Susu OMU.
2. Gangguan Deformasi *Chain Grate* dan gangguan *Slagging Economizer Flue Gas System* pada PLTU Holtekamp OMU.

Selanjutnya, pada tahun 2022 SOF ditargetkan sebesar 11,49% dengan dasar asumsi sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) dengan PLN Regional Wilayah dan jadwal pemeliharaan pada dokumen Rencana Operasi Tahunan (ROT).

Realisasi EFOR Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa tahun 2021 sebesar 3,94% dengan pencapaian 99,23% dari target RKAP 2021. EFOR belum tercapai karena oleh adanya:
1. Kerusakan *Dome Coal Yard,* gangguan *Induced Draft Fan* dan *Boiler Feed Pump* (BFP) pada PLTU Pangkalan Susu OMU.
2. Gangguan Deformasi *Chain Grate* dan gangguan *Slagging Economizer Flue Gas System* pada PLTU Holtekamp OMU.

Selanjutnya, pada tahun 2022 EFOR ditargetkan sebesar 6,85% dengan dasar asumsi alokasi jam gangguan, *derating* dan *Service Level Agreement* (SLA) dengan PLN Regional Wilayah.

Realisasi SdOF Pembangkit Jasa O&M Luar Jawa tahun 2021 sebesar 4,11 kali dengan pencapaian 140,07% dari target RKAP 2021. SdOF tercapai karena:
1. Peningkatan keandalan operasi dan *maintenance* di PLTU Luar Jawa.
2. Terlaksananya investasi sesuai dengan target 2021, *improvement* di beberapa peralatan di unit PLTU Barru OMU, PLTU Holtekamp OMU dan PLTU Jeranjang OMU.
3. Pengoperasian beban sesuai dengan rekomendasi pabrikan dan manajemen penataan batubara pada PLTU Barru OMU.

Selanjutnya, pada tahun 2022 SdOF ditargetkan sebesar 4,05 kali dengan dasar asumsi alokasi frekuensi gangguan dalam *forced outage* 1.

Further for 2022, the EAF is targeted at 81.67% with the basis of assumption of Service Level Agreement (SLA) with PLN Regional units.

The realization of Outside Java O&M Service Power Plants' SOF in 2021 was at 16.30% with 82.65% achievement from WP&B 2021 target. The SOF was unrealized due to:
1. Coal yard dome damage, induced draft fan failure, and boiler feed pump (BFP) failure in SPP Pangkalan Susu OMU.
2. Chain grate deformation and slagging and economizer flue gas system failure in SPP Holtekamp OMU.

Further for 2022, the SOF is targeted at 11.49% with the basis of assumption of Service Level Agreement (SLA) with PLN Regional units and in accordance with the maintenance schedule in the Annual Operation Plan.

The realization of Outside Java O&M Service Power Plants' EFOR in 2021 was at 3.94% with 99.23% achievement from WP&B 2021 target. The EFOR was unrealized due to:
1. Coal yard dome damage, induced draft fan failure, and boiler feed pump (BFP) failure in SPP Pangkalan Susu OMU.
2. Chain grate deformation and slagging and economizer flue gas system failure in SPP Holtekamp OMU.

Further for 2022, the EFOR is targeted at 6.85% with the basis of assumption of outage and derated hours allocation and Service Level Agreement (SLA) with PLN Regional units

The realization of Outside Java O&M Service Power Plants' SdOF in 2021 was at 4.11 times with 140.07% achievement from WP&B 2021 target. The SdOF was achieved due to:
1. Enhanced operations and maintenance reliability in outside Java SPPs.
2. Implemented investments according to 2021 target, improvement of several tools in SPP Barru OMU, SPP Holtekamp OMU, and SPP Jeranjang OMU.
3. Load operations meeting manufacturer's recommendation and coal management in SPP Barru OMU.

Further for 2022, the SdOF is targeted at 4.05 times with the basis of assumption of outage frequency allocation in forced outage 1.

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Produksi Listrik
Comparison of Electricity Production Target, Realization, and Projection

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Produksi Listrik Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 (GWh)
Table of Comparison of Electricity Production Target against Realization in 2021 and 2022 Projection (GWh)

	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
Jumlah Produksi Listrik Jumlah Produksi Listrik	30.963,38	39.230,81	126,70%	31.836,00

Realisasi Produksi Tenaga Listrik Indonesia Power tahun 2021 sebesar 39.230,81 GWh dengan pencapaian 126,70% dari target RKAP 2021. Realisasi ini terutama didukung oleh:
1. Peningkatan produksi PLTGU Priok dan PLTU Suralaya 1-7 sesuai dengan kebutuhan sistem.
2. Peningkatan produksi di PLTGU Grati Blok 2 untuk memenuhi kebutuhan di 150 kV.
3. Telah pulihnya kondisi pasokan gas PLTGU Tambak Lorok di akhir tahun 2020 pasca gangguan pasokan gas di triwulan I tahun 2020 serta penambahan pasokan gas Tambak Lorok.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Produksi Tenaga Listrik diproyeksikan sebesar 31.836,00 GWh dengan dasar asumsi sesuai simulasi alokasi energi dari PT PLN (Persero) dan PT PLN (Persero) UIP2B.

The realization of electricity production in 2021 was 39,230.81 GWh, with the achievement of 126.70% from the WP&B 2021 target. This was mainly contributed by:
1. Increased production in CCPP Priok and SPP Suralaya 1-7 according to system demands.
2. Increased production in CCPP Grati Block 2 to meet demands at 150 kV.
3. Gas supply recovery in CCPP Tambak Lorok at the end of 2020 following gas supply shortage in Q1 of 2020 and additional gas supply for Tambak Lorok.

Further for 2022, the electricity production is projected at 31,836.00 GWh, with the basis of assumption according to the energy allocation simulation of PT PLN (Persero) and PT PLN (Persero) UIP2B.

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Penjualan Listrik
Comparison of Electricity Sales Target, Realization, and Projection

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Penjualan Listrik 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 (GWh)
Table of Comparison of Electricity Sales Target against Realization in 2021 and 2022 Projection (GWh)

	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
Jumlah Penjualan Listrik Total Sale of Electricity	29.502,31	37.590,11	127,41%	30.389,45

Realisasi Penjualan Tenaga Listrik Indonesia Power tahun 2021 sebesar 37.590,11 GWh dengan pencapaian 127,41% dari target RKAP 2021. Realisasi ini terutama didukung oleh:
1. Peningkatan produksi PLTGU Priok dan PLTU Suralaya 1-7 sesuai dengan kebutuhan sistem.
2. Peningkatan produksi di PLTGU Grati Blok 2 untuk memenuhi kebutuhan di 150 kV.
3. Telah pulihnya kondisi pasokan gas PLTGU Tambak Lorok di akhir tahun 2020 pasca gangguan pasokan gas di triwulan I tahun 2020 serta penambahan pasokan gas Tambak Lorok.

The realization of electricity sale in 2021 was 37,590.11 GWh, with the achievement of 127.41% from the WP&B 2021 target. This was mainly contributed by:
1. Increased production in CCPP Priok and SPP Suralaya 1-7 according to system demands.
2. Increased production in CCPP Grati Block 2 to meet demands at 150 kV.
3. Gas supply recovery in CCPP Tambak Lorok at the end of 2020 following gas supply shortage in Q1 of 2020 and additional gas supply for Tambak Lorok.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2021, REALISASI 2021 DAN PROYEKSI 2022
COMPARISON BETWEEN 2021 TARGET, 2021 REALIZATION, AND 2022 PROJECTION

Selanjutnya, pada tahun 2022, Penjualan Tenaga Listrik diproyeksikan sebesar 30.389,45 GWh dengan dasar asumsi sesuai simulasi alokasi energi dari PT PLN (Persero) dan PT PLN (Persero) UIP2B.

Further for 2022, the electricity sales are projected at 30,389.45 GWh, with the basis of assumption according to the energy allocation simulation of PT PLN (Persero) and PT PLN (Persero) UIP2B.

Perbandingan Target, Realisasi, dan Proyeksi Pemakaian Sendiri (PS)
Comparison of Self-Consumption Target, Realization, and Projection

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi PS Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022
Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi PS Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022

	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target		Realisasi 2021 2021 Realization		Pencapaian Achievement	Proyeksi 2022 2022 Projection	
	GWh	%	GWh	%	GWh	GWh	%
Pemakaian Sendiri Self-Consumption	1.461,07	4,72	1.640,70	4,18	112,29%	1.446,55	4,54

Realisasi PS tenaga listrik Indonesia Power tahun 2021 sebesar 1.640,70 GWh dengan pencapaian 112,29% dari target RKAP 2021. Peningkatan PS terhadap rencana dikarenakan adanya peningkatan produksi.

The realization of self-consumption in 2020 was 1,640.70 GWh, with the achievement of 112.29% from the WP&B 2021 target. The increase in self-consumption compared to plan was due to the increase in production.

Selanjutnya, pada tahun 2022, PS diproyeksikan sebesar 1.446,55 GWh dengan dasar asumsi sesuai simulasi alokasi energi dari PT PLN (Persero) dan PT PLN (Persero) UIP2B.

Further for 2022, the self-consumption is projected at 1,446.55 GWh, with the basis of assumption according to the energy allocation simulation of PT PLN (Persero) and PT PLN (Persero) UIP2B.

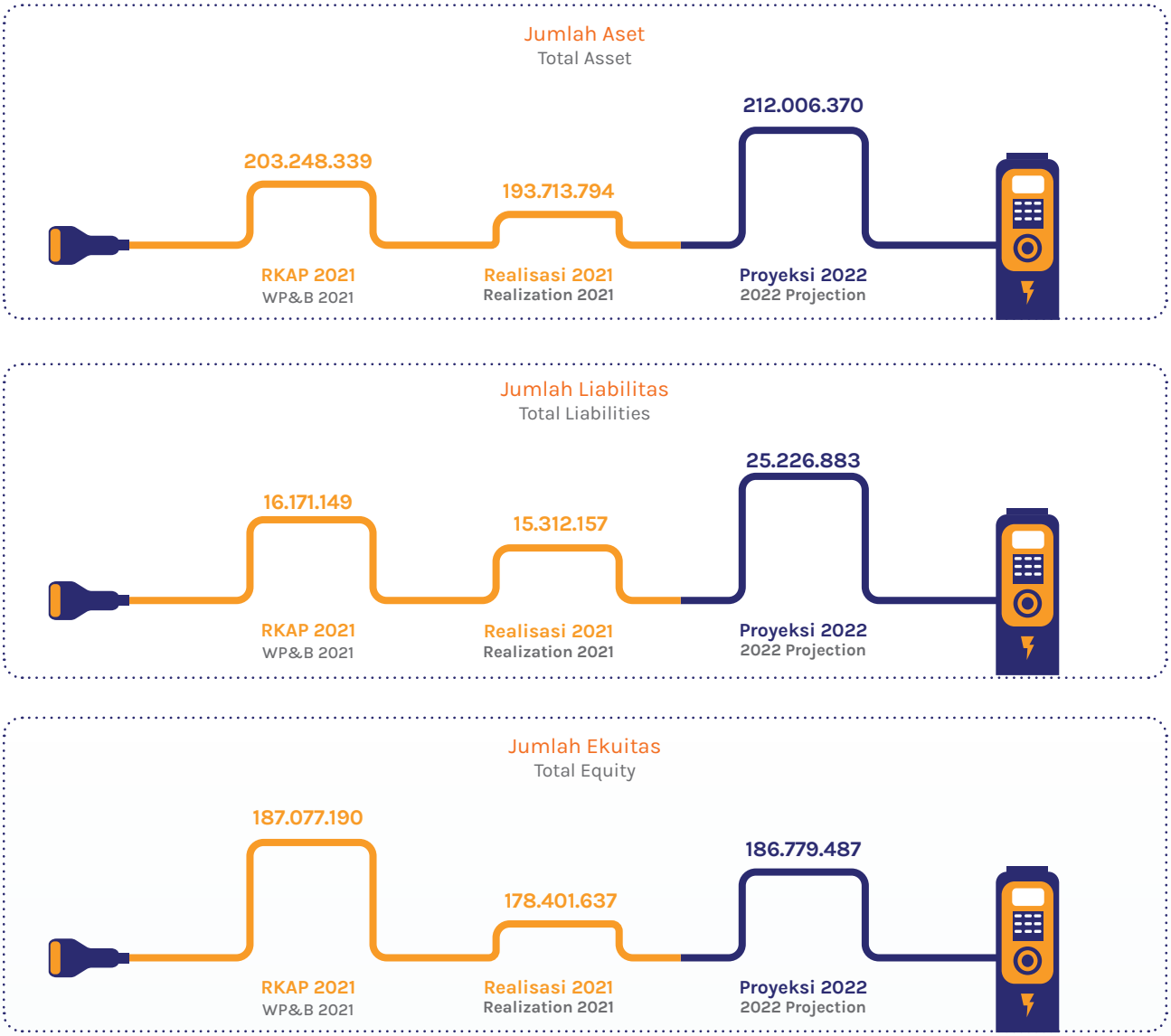
Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Keuangan
Comparison between Financial Performance Target, Realization, and Projection

Target, Realisasi, dan Proyeksi Posisi Keuangan
Financial Position Target, Realization, and Projection

Tabel Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Kinerja Keuangan (Rp juta)

Uraian Description	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
Aset Lancar Current Assets	28.964.402	34.232.232	118,19%	34.568.381
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	174.283.937	159.481.562	91,51%	177.437.989
Jumlah Aset Total Assets	**203.248.339**	**193.713.794**	**95,31%**	**212.006.370**
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	5.882.442	5.894.646	100,21%	7.158.383
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	10.288.707	9.417.511	91,53%	18.068.500
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**16.171.149**	**15.312.157**	**94,69%**	**25.226.883**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**187.077.190**	**178.401.637**	**95,36%**	**186.779.487**

Grafik Perbandingan Target dengan Realisasi Posisi Keuangan Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 (Rp juta)
Chart of Comparison of Financial Position Target against Realization in 2021 and 2022 Projection (Rp million)



Realisasi Jumlah Aset tahun 2021 sebesar Rp193,71 triliun dengan pencapaian sebesar 95,31% dari target RKAP 2021. Realisasi ini terutama didukung oleh membaiknya pelunasan piutang pada PT PLN (Persero) untuk segmen usaha jasa OM.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Jumlah Aset diproyeksikan sebesar Rp212,01 triliun dengan dasar asumsi terdapat beberapa project yang COD di tahun 2022 yaitu PLTGU Jawa Bali-1 (Tambak Lorok Blok 3), BMPP Kolaka I, PLTM Lambur, PLTM Harjosari, PLTM Cileunca & PLT Hybrid Nusa Penida. Investasi Sementara berkurang di tahun 2022 karena investasi kelas B KIK EBA telah jatuh tempo sehingga investasi sementara hanya saham Bukit Asam.

The actual Total Assets in 2021 was Rp193.71 trillion with 95.31% achievement of WP&B 2021 target. This was mainly supported by improved settlement of receivables in PT PLN (Persero) for O&M service business segment.

Further for 2022, Total Assets is projected at Rp212.01 trillion with the basis of assumption that some projects will see their COD, i.e. CCPP Java-Bali -1 (Tambak Lorok Block 3), BMPP Kolaka I, MHPP Lambur, MHPP Harjosari, MHPP Cileunca, and Hybrid PP Nusa Penida. Temporary Investment will decline by 2022 due to maturing KIK EBA class B, leaving the temporary investment only in Bukit Asam shares.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2021, REALISASI 2021 DAN PROYEKSI 2022
COMPARISON BETWEEN 2021 TARGET, 2021 REALIZATION, AND 2022 PROJECTION

Realisasi Jumlah Liabilitas tahun 2021 sebesar Rp15,31 triliun dengan pencapaian sebesar 94,69%dari target RKAP 2021. Realisasi ini terutama didukung oleh pelunasan kewajiban oleh Perusahaan.

Rp15.31 trillion with 94.69% achievement of WP&B 2021 target. This was mainly due to the settlement of liabilities by the Company.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Jumlah Liabilitas diproyeksikan sebesar Rp25,23 triliun dengan dasar asumsi Liabilitas Jangka Panjang meningkat sebesar 20% dari Prognosa 2021 dominan disebabkan karena kenaikan beban pajak tangguhan dan beban manfaat pekerja (PSAK 24). Liabilitas Jangka Pendek naik sebesar 7% dari Prognosa 2021 disebabkan karena naiknya hutang pengadaan energi primer.

Further for 2022, Total Liabilities is projected at Rp25.23 trillion, with the basis of assumption that Non-Current Liabilities will increase 20% from the 2021 prognosis, which is predominantly due to the increase in deferred tax expenses and employee benefit expenses (PSAK 24). Current Liabilities will increase 7% from 2021 prognosis due to the increase in primary energy procurement payables.

Realisasi Jumlah Ekuitas tahun 2021 sebesar Rp178,40 triliun dengan pencapaian 95,36% dari target RKAP 2021. Realisasi lebih rendah dari rencana ini adalah karena pelunasan deviden ke pemegang saham.

The actual Total Equity in 2021 was Rp178.40 trillion with 95.36% achievement of the WP&B 2021 target. The figure was lower from the plan due to the settlement of dividend payables to shareholders.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Jumlah Ekuitas diproyeksikan sebesar Rp186,78 triliun dengan dasar asumsi Laba Tahun 2021 disetor sebagai dividen sehingga ekuitas tahun 2022 akan identik dengan tahun 2021 (prognosa).

Further for 2022, Total Equity is projected at Rp186.78 trillion, with the basis of assumption that the Income for 2021 is deposited as dividend, and therefore the equity in 2022 will be identical with that of 2021 (prognosis).

Target, Realisasi, dan Proyeksi Laba Rugi
Profit/Loss Target, Realization, and Projection

Untuk realisasi laba rugi, Perusahaan memiliki dua bentuk penyajian yaitu berdasarkan angka laporan keuangan yang diaudit dan berdasarkan angka untuk pelaporan kepada Pemegang Saham. Perbedaan penyajian ini dilatarbelakangi oleh RKAP Indonesia Power yang disahkan oleh Pemegang saham sebagai program kerja dan target yang harus dicapai perusahaan tidak mengadopsi penerapan ISAK 16 Konsesi Jasa (Laporan Keuangan Audit). Hal ini dikarena PT PLN Persero Selaku pemegang saham mengadopsi POJK 6 bahwa pembelian tenaga listrik diberlakukan sebagai transaksi jual beli, meskipun PJBTL Suralaya 1-7 yang merupakan pembangkit kepemilikan Indonesia Power mempunyai masa kontrak 30 tahun sehingga terpenuhi ISAK 16 Konsesi Jasa, dalam RKAP secara target tetap disajikan dalam penjualan tenaga listrik. Untuk mempermudah pengukuran dan evaluasi management maka disajikan laporan keuangan dengan struktur penyajian seperti RKAP.

For the profit/loss realization, the Company prepares two types of presentation, i.e. based on audited financial statements and based on the report to shareholders. The differing presentations were based on Indonesia Power WP&B which was ratified by the Shareholders. The document contains the work plan and budget to be achieved while not adopting ISAK 16 on Service Concession (Audited Financial Statement). Such a non-adoption was based on PT PLN (Persero)'s reasoning. As the shareholder which adopts OJK Regulation 6, PT PLN (Persero) treats electricity sales as sale and purchase transaction. Although the PPAs for existing Suralaya 1-7 power plants are valid for 30 years, therefore meeting ISAK 16 on Service Concession, they remained accommodated in the WP&B as electricity sales target. For convenient measurement and management evaluation, the financial statements are presented similar to the WP&B's presentation structure.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Laba Rugi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 berdasarkan Penyajian Laporan Keuangan Audited (Rp juta)
Table of Comparison of Profit/Loss Target against Realization in 2021 and 2022 Projection based on Audited Financial Statements Presentation (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
Pendapatan Usaha Revenues	39.734.703	38.519.859	96,94%	42.250.460

Uraian Description	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
Beban Usaha Operating Expenses	34.228.451	32.429.534	94,74%	36.426.038
Laba Usaha Operating Income	5.506.252	6.090.325	110,61%	5.824.422
Laba Bersih Net Income	3.454.082	4.031.154	116,71%	4.099.309

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Laba Rugi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 berdasarkan Penyajian Laporan kepada Pemegang Saham (Rp juta)

Table of Comparison of Profit/Loss Target against Realization in 2021 and 2022 Projection based on Reporting to Shareholders (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
Pendapatan Usaha Revenues	39.734.703	40.933.572	103,02%	42.250.460
Beban Usaha Operating Expenses	34.228.451	34.301.388	100,21%	36.426.038
Laba Usaha Operating Income	5.506.252	6.632.183	120,45%	5.824.422
Laba Bersih Net Income	3.454.082	4.814.880	139,40%	4.099.309

Penjelasan terkait realisasi laba rugi di bawah adalah uraian penyajian sesuai pelaporan kepada pemegang saham.

Elaboration on profit/loss realization below is presented according to the reporting to Shareholders.

Realisasi Pendapatan Usaha tahun 2021 sebesar Rp40,93 triliun dengan pencapaian 103,03% dari target RKAP 2021. Pencapaian tersebut terutama dipengaruhi oleh kemampuan Perusahaan meningkatkan pasokan energi. Peningkatan GWh Penjualan sebesar 8.027 GWh.

The actual Revenues in 2021 were amounting to Rp40.93 trillion, achieving 103.03% of the WP&B 2021 target. This was contributed by the Company's capability in increasing energy supply. The Sales GWh increased 8,027 GWh.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Pendapatan Usaha diproyeksikan sebesar Rp42,25 triliun dengan dasar asumsi Pendapatan Tenaga Listrik mengikuti volume penjualan (GWh) dan biaya penyediaan tenaga listrik. Sedangkan untuk pendapatan Jasa O&M dan lainnya dengan asumsi terdapat pengelolaan unit-unit baru & ekspansi anak perusahaan dalam bisnis *Beyond* KWh.

Further for 2022, Revenues are projected at Rp42.25 trillion with the basis of assumption that Revenues from Electricity follow the sales volume (GWh) and electricity power generation cost. Meanwhile, revenues from O&M services and others use the assumption that there will be a management of new units and subsidiary expansion in Beyond kWh lines.

Realisasi Beban Usaha tahun 2021 sebesar Rp34,30 triliun atau setara 100,21% untuk laporan keuangan padanan RKAP. Realisasi tersebut sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

The realization of Operating Expenses in 2021 was Rp34.30 trillion or equal to 100.21% for the financial statements equal to WP&B. This has met the work plan set.

Selanjutnya, pada tahun 2022, Beban Usaha diproyeksikan sebesar Rp36,43 triliun dengan dasar asumsi kebutuhan energi primer sesuai alokasi produksi dari Divisi Anggaran PLN dan kebutuhan untuk tetap menjaga keandalan Unit Pembangkit.

Further for 2022, Operating Expenses are projected to be at Rp36.43 trillion with the basis of assumption that the primary energy demands meet the production allocation of PLN's Budgeting Division as well as the need for maintaining the reliability of Generation Units.

Realisasi Laba Tahun Berjalan tahun 2021 sebesar Rp4,81 triliun dengan pencapaian 139,40% dari target RKAP 2021 yang dipengaruhi oleh kenaikan GWh Penjualan selama tahun 2021.

The realization of Income for the Year in 2021 was Rp4.81 trillion, with 139.40% achievement of the WP&B 2021 target which was contributed by the increase in Sales GWh throughout 2021.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2021, REALISASI 2021 DAN PROYEKSI 2022
COMPARISON BETWEEN 2021 TARGET, 2021 REALIZATION, AND 2022 PROJECTION

Selanjutnya, pada tahun 2022, Laba Tahun Berjalan diproyeksikan sebesar Rp4,10 triliun dengan dasar asumsi Laba Tahun 2022 disusun dengan strategi *tax planning* Perusahaan.

Further for 2022, Income for the Year is projected at Rp4.10 trillion with the basis of assumption that the Income for 2022 is sought with the Company's tax planning strategy.

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Struktur Modal

Comparison between Capital Structure Target, Realization, and Projection

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Struktur Modal Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 (Rp juta)
Table of Comparison of Capital Structure Target against Realization in 2021 and 2022 Projection (Rp million)

Uraian Description	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target		Realisasi 2021 2021 Realization		Pencapaian Achievement	Proyeksi 2022 2022 Projection	
	Rp juta Rp million	%	Rp juta Rp million	%	%	Rp juta Rp million	%
Liabilitas Liabilities	16.171.149	7,96	15.312.157	7,90	94,69%	25.226.883	11,90
Ekuitas Equity	187.077.190	92,04	178.401.637	92,10	95,36%	186.779.487	88,10
Aset Assets	203.248.339	100,00	193.713.794	100,00	95,31%	212.006.370	100,00

Saldo Liabilitas lebih rendah dibanding RKAP terutama dipengaruhi oleh membaiknya pelunasan piutang sehingga perushaan mampu melkaukan pelunasan kewajiban. Sedangkan Ekuitas pada realisasi lebih rendah, karena saat penyusunan RKAP belum mengakomodir pelunasan Deviden kepada pemegang saham.

Selanjutnya, Perusahaan memproyeksikan perbandingan Liabilitas dan Ekuitas terhadap Aset tahun 2022 masing-masing sebesar 11,90% dan 88,10%. Proyeksi tersebut dikarenakan adanya asumsi kenaikan Liabilitas Pajak Tangguhan, Liabilitas Manfaat Pekerja dan pembagian dividen tahun 2021.

Saldo Liabilitas lebih rendah dibanding RKAP terutama dipengaruhi oleh membaiknya pelunasan piutang sehingga perushaan mampu melkaukan pelunasan kewajiban. Sedangkan Ekuitas pada realisasi lebih rendah, karena saat penyusunan RKAP belum mengakomodir pelunasan Deviden kepada pemegang saham.

Selanjutnya, Perusahaan memproyeksikan perbandingan Liabilitas dan Ekuitas terhadap Aset tahun 2022 masing-masing sebesar 11,90% dan 88,10%. Proyeksi tersebut dikarenakan adanya asumsi kenaikan Liabilitas Pajak Tangguhan, Liabilitas Manfaat Pekerja dan pembagian dividen tahun 2021.

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Pengembangan SDM

Comparison between HC Development Target, Realization, and Projection

Terkait dengan pengembangan SDM terdapat beberapa indikator yaitu jumlah pelatihan dan biaya pelatihan.

Pertaining to HC development, several indicators are involved, i.e. Total trainings and training cost.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022
Table of Comparison of HC Development Target against Realization in 2021 and 2022 Projection

Uraian Description	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
Jumlah Pelatihan (kali) Total Trainings (time)	709	709	100,00%	1.391
Biaya Pelatihan (Rp miliar) Training Cost (Rp billion)	30	29,5	98,33%	97,4

Realisasi jumlah pelatihan tahun 2021 adalah 709 kali dengan pencapaian 100,00% dari target RKAP 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 jumlah pelatihan diproyeksikan sebanyak 1.391 kali dengan berdasarkan pada RJPP versi 2.0 dan turunannya, termasuk *Strategic Objective* dan *Strategic Initiative* Perusahaan dan *Roadmap* IP Academy 2018-2023.

Total Trainings realization in 2021 was at 709 times with 100.00% achievement from WP&B 2021 target. Further for 2022, total trainings is projected at 1,391 times, based on the Company's Long-Term Plan version 2.0 and its derivatives, including the Company's Strategic Objectives, Strategic Initiatives, and IP Academy Roadmap 2018-2023.

Realisasi biaya pelatihan tahun 2021 adalah Rp29,5 miliar dengan pencapaian 98,33% dari target RKAP 2021. Selanjutnya, pada tahun 2021 jumlah pelatihan diproyeksikan sebanyak Rp97,4 miliar dengan berdasarkan pada RJPP versi 2.0 dan turunannya, termasuk *Strategic Objective* dan *Strategic Initiative* Perusahaan dan *Roadmap* IP Academy 2018-2023.

Training Cost realization in 2021 was Rp29.3 billion with 98.33% achievement from WP&B 2021 target. Further for 2022, training cost is projected at Rp97.4 billion, based on the Company's Long-Term Plan version 2.0 and its derivatives, including the Company's Strategic Objectives, Strategic Initiatives, and IP Academy Roadmap 2018-2023.

Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Proyeksi Aspek Pemasaran

Comparison between Marketing Aspect Target, Realization, and Projection

Terkait dengan aspek pemasaran teradapat indikator yang ditentukan yaitu pangsa pasar dan survei kepuasan pelanggan.

Pertaining to the marketing aspect, several indicators are involved, i.e. Market share and customer satisfaction survey.

Tabel Perbandingan Target dengan Realisasi Aspek Pemasaran Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022 (%)
Table of Comparison of Marketing Aspect Target against Realization in 2021 and 2022 Projection (%)

Uraian Description	Target RKAP 2021 WP&B 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization	Pencapaian Achievement (%)	Proyeksi 2022 2022 Projection
Pangsa Pasar (%) Market Share (%)	17,55	18,99	108,21%	14,51
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit *Existing* (Skala *Likert*) (%) Customer Satisfaction Survey for Existing Power Plants (Likert Scale) (%)	82,00	86,58	105,59%	83,00
Survei Kepuasan Pelanggan untuk Pembangkit Jasa O&M (Skala *Likert*) (%) Customer Satisfaction Survey for O&M Service Power Plants (Likert Scale) (%)	82,00	84,84	103,46%	83,00

Realisasi pangsa pasar tahun 2021 adalah 18,99% dengan pencapaian sebesar 108,21% dari target tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 pangsa pasar diproyeksikan sebesar 14,51% dengan dasar asumsi sesuai dengan alokasi PT PLN (Persero) UIP2B pada Rencana Operasi Tahunan (ROT) 2022.

The market share realization in 2021 was 18.99%, at 108.21% achievement from the target in 2021. Further for 2022, the market share is projected at 14.51% with the basis of assumption in accordance with the allocation of PT PLN (Persero) UIP2B in the 2022 Annual Operation Plan (ROT).

Realisasi survei kepuasan pelanggan untuk pembangkit eksisting tahun 2021 adalah 86,58% dengan pencapaian 105,59% dari target tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 skor survei kepuasan pelanggan pembangkit eksisting diproyeksikan sebesar 83,00%. Proyeksi tersebut didasarkan pada pencapaian dan harapan-harapan pelanggan sesuai hasil survei tahun 2021.

The realization of customer satisfaction survey for existing power plants in 2021 was 86.58%, with 105.59% achievement from the 2021 target. Further for 2022, the customer satisfaction survey score for existing power plants is projected at 83.00%. The projected is based on the achievement and customers' expectation according to the 2021 survey.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET 2021, REALISASI 2021 DAN PROYEKSI 2022
COMPARISON BETWEEN 2021 TARGET, 2021 REALIZATION, AND 2022 PROJECTION

Realisasi survei kepuasan pelanggan untuk pembangkit jasa O&M tahun 2021 adalah 84,84% dengan pencapaian 103,46% dari target tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022 skor survei kepuasan pelanggan pembangkit jasa O&M diproyeksikan sebesar 83,00%. Proyeksi tersebut didasarkan pada pencapaian dan harapan-harapan pelanggan sesuai hasil survei tahun 2021.

The realization of customer satisfaction survey for O&M Service power plants in 2021 was 84.84%, with 103.46% achievement from the 2021 target. Further for 2022, the customer satisfaction survey score for O&M Service power plants is projected at 83.00%. The projected is based on the achievement and customers' expectation according to the 2021 survey.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN PENCAPAIAN KPI

COMPANY SOUNDNESS LEVEL AND KPI ACHIEVEMENT

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Soundness Level

Tingkat kesehatan merupakan kriteria atau indikator yang digunakan Perusahaan dalam menilai tingkat kesehatan perusahaan yang ditetapkan dalam RKAP tahun buku 2021.

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler Indonesia Power tanggal 3 April 2012 perihal penerapan/ pemberlakuan KPI (*Key Performance Indicator*), maka ditetapkan penggunaan 5 (lima) perspektif KPI berbasis Malcolm Baldrige yang meliputi Fokus Pelanggan, Efektifitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar serta Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan. Penggolongan Tingkat Kesehatan Perusahaan mengacu pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sebagai dasar pengukuran Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan.

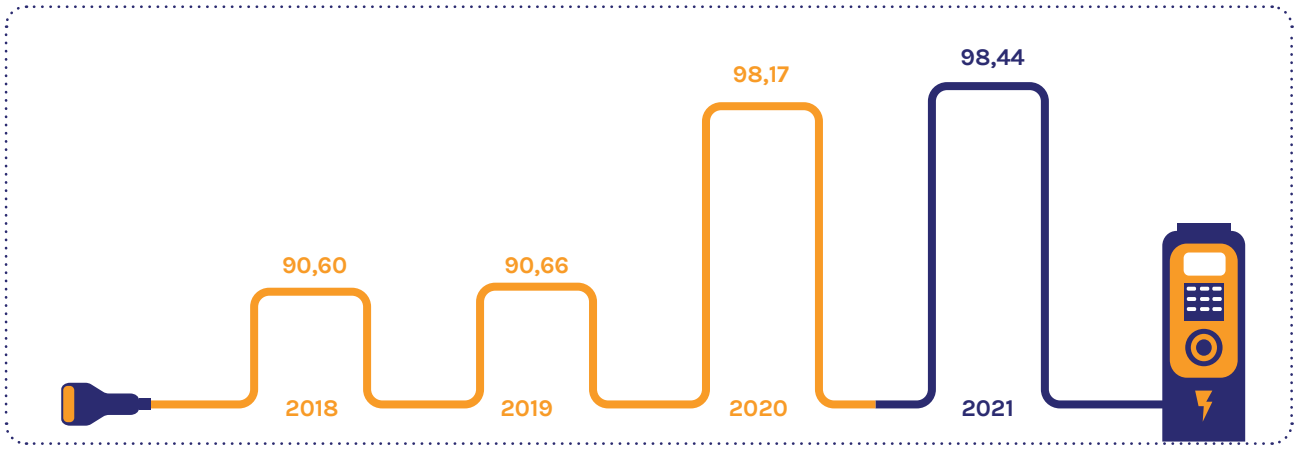
Tingkat Kesehatan Perusahaan tahun 2021 berada pada level **"AAA"** yang termasuk dalam klasifikasi **"SEHAT"** dengan nilai **98,44.**

Company Soundness Level constitutes the criteria and indicators used by the Company to assess the Company's soundness. It is regulated in the WP&B 2021.

According to the Circular Shareholders Decree dated April 3, 2012 on implementation/enforcement of Key Performance Indicators (KPI), there are five (5) Malcolm Baldrige-based KPI perspectives. Those cover Customer Focus, Effectiveness of Products and Process, Manpower Focus, Finance and Market, and Leadership, Governance, and Social Responsibility. The Company Soundness Level is classified according to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 on the Assessment of Soundness Level in SOEs as the basis for the Company's soundness level assessment.

The Company Soundness Level in 2021 was at **"AAA"** rating or in the **"SOUND"** category, with the score of **98.44.**

Grafik Pencapaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2018 - 2021
Chart of Company Soundness Level Rating in 2018-2021



Pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI)

Key Performance Indicator (KPI) Achievement

Salah satu indikator untuk menilai tingkat pencapaian kinerja Perusahaaan adalah dengan melihat pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan. KPI merupakan suatu ukuran kinerja yang bersifat kuantitatif, yang disetujui sebelumnya oleh Manajemen dan merupakan cerminan faktor-faktor penentu keberhasilan Perusahaan. Perusahaan tentu memiliki tujuan yang ingin diraih. Terkait dengan hal tersebut, Perusahaan menggunakan KPI sebagai cerminan dari target, progress dan pencapaian tujuan.

Key Performance Indicators (KPI) are among the means to measure the achievement of the Company's performance. KPIs measure performance quantitatively. They are pre-approved by the Management and reflecting the factors that determine the success of the Company. The Company certainly has some goals to achieve. Thus, KPIs are utilized as the reflection of the achievement of the Company's targets, progresses, and goals.

KPI tahun buku 2021 dilaksanakan sesuai dengan keputusan risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021 tanggal 29 Januari 2021.

The KPI for fiscal year 2021 was performed according to the resolutions recorded in the minutes of General Meeting of Shareholders (GMS) on Ratification of Work Plan and Budget 2021 dated January 29, 2021.

Tabel Pencapaian KPI Tahun 2021
Table of KPI Achievements in 2021

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Polarisasi Polarization	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization
I	**Fokus Pelanggan** Customer Focus				
1.1	*Equivalent Forced Outage Rate* (EFOR) Korporat Corporate Equivalent Forced Outage Rate (EFOR)				
	a. EFOR Pembangkit Eksisting Existing Power Plant EFOR	⌄⌄	%	2,55	1,74
	b. EFOR Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali AMC Java-Bali Coal-Fired SPP EFOR	⌄⌄	%	3,85	3,58

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN DAN PENCAPAIAN KPI
COMPANY SOUNDNESS LEVEL AND KPI ACHIEVEMENT

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Polarisasi Polarization	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization
	c. EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal-Fired SPP EFOR	⌄⌄	%	0,34	0,55
II	**Efektivitas Produk dan Proses** Effectiveness of Products and Process				
2.1	*Equivalent Availability Factor* (EAF) Pembangkit Power Plant Equivalent Availability Factor (EAF)				
	a. EFOR Pembangkit Eksisting Existing Power Plant EFOR	⌄⌄	%	90,70	89,49
	b. EFOR Pembangkit PLTU Batubara AMC Jawa Bali AMC Java-Bali Coal-Fired SPP EFOR	⌄⌄	%	89,73	84,94
	c. EFOR Pembangkit Non PLTU Batubara Non-Coal-Fired SPP EFOR	⌄⌄	%	96,43	95,73
2.2	Umur Persediaan Batubara Eksisting dan AMC Jawa Bali Age of Coal Supply in Existing and AMC Java-Bali Plants	»	Hari Day	15-22	-
2.3	Penambahan Kapasitas Pembangkit EBT NRE Power Plant Capacity Expansion	⌃⌃	MW	11,00	7,49
2.4	*Purchasing Effectiveness*	⌃⌃	%	2,00	4,30
2.5	Jumlah Unit Power Plant yang sudah mengimplementasikan Teknologi Digital Total Power Plant Units Implementing Digital Technology	⌃⌃	*Power Plant*	19,00	23,00
2.6	*Co-Firing Biomass*	⌃⌃	MW	70,24	176,67
III	**Fokus Tenaga Kerja** Manpower Focus				
3.1	*Human Capital Readiness (HCR)*	⌃⌃	Level	4,56	4,56
3.2	*Organizational Capital Readiness (OCR)*	⌃⌃	Level	4,56	4,56
3.3	Produktivitas Pegawai Employee Productivity	⌃⌃	GWh / Pegawai GWh / Employee	8,97	12,67
3.4	Pemenuhan *Talent Pool & Talent Mobility*: Talent Pool & Talent Mobility Compliance:				
	a. % Perempuan dalam *Nominated Talent* % of Female in Nominated Talent	⌃⌃	%	15,00	15,00
	b. % Milenial (<40 tahun) dalam *Top Talent* % of Millennials (<40 y.o) in Top Talent	⌃⌃	%	50,00	50,00
IV	**Keuangan dan Pasar** Finance and Market				
4.1	Laba Rugi Tahun Berjalan* Net Profit (Loss) for the Year*	⌃⌃	Rp miliar Rp billion	3.454,08	4.722,61
4.2	EBITDA*	⌃⌃	Rp miliar Rp billion	10.329,31	12.171,37
4.3	Biaya Pokok Penyediaan Pembangkit Power Plant Production Cost				

No	Indikator Kinerja Performance Indicator	Polarisasi Polarization	Satuan Unit	Target 2021 2021 Target	Realisasi 2021 2021 Realization
	a. BPP Pembangkit Eksisting Existing Power Plant Production Cost	⌄⌄	Rp/kWh	859,87	805,71
	b. BPP Pembangkit AMC AMC Power Plant Production Cost	⌄⌄	Rp/kWh	804,05	806,71
4.4	Sinergi Synergies				
	a. Sinergi antar Anak Perusahaan lain Synergy with Other Subsidiaries	⌃⌃	Rp miliar Rp billion	2.034,32	4.143,07
	b. Sinergi dengan Pusharlis (termasuk O&M/AMC) Synergy with Electricity Maintenance Center (including O&M/AMC)	⌃⌃	Rp miliar Rp billion	15,81	36,90
V	**Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan** **Leadership, Governance, and Social Responsibility**				
5.1	Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Good Corporate Governance (GCG) Implementation	⌃⌃	Skor Score	95,48	95,51
5.2	*Maturity Level* ERM	⌃⌃	Level	3,20	3,45
5.3	IT *Maturity Level*	⌃⌃	Level	3,00	3,35
5.4	Tingkat Proper unit (*Beyond Compliance*) Unit Proper Rating (Beyond Compliance)	⌃⌃	Jumlah Unit Total Unit	*Beyond Compliance* (Hijau: 12, Emas: 1) Beyond Compliance (Green: 12, Gold: 1)	Beyond Compliance (Hijau: 13, Emas: 4) Beyond Compliance (Green: 13, Gold: 4)
5.5	Penyelesaian Temuan Auditor Settlement of Auditor's Findings		Max -5		
5.6	Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja & Lingkungan Hidup) Compliance with Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE)		Max -10		
	Jumlah Total				**98,44**

* Indikator laba rugi tahun berjalan dan EBITDA yang bertujuan untuk memonitor kondisi keuangan dalam rangka menjaga kondisi kesehatan keuangan perusahaan sesuai dengan pembukuan berbasis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6 (POJK 6) yang dilaporkan kepada PT PLN (Persero) sebagai induk Perusahaan.
The Net Profit (Loss) for the Year and EBITDA indicator aims to monitor the financial situation for maintaining the Company's financial health in accordance with the accounting based on OJK Regulation No. 6 which was reported to the Parent Company, PT PLN (Persero).

⌃⌃ Semakin besar realisasi, maka pencapaian semakin baik, dimana rumus pencapaian = (Realisasi / Target) x 100%
⌄⌄ Semakin kecil realisasi, maka pencapaian semakin baik, dimana rumus pencapaian = (2-(Realisasi / Target)) x 100%
⌃⌃ Higher realization indicates better achievement, with the formula = (Realization/Target) x 100%
⌄⌄ Lower realization indicates better achievement, with the formula = (2-(Realization/Target)) x 100%

KEBIJAKAN DIVIDEN
DIVIDEND POLICY

Kebijakan Pembagian Dividen
Dividend Sharing Policy

Kebijakan Dividen perusahaan telah mempertimbangkan peraturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila saldo laba positif sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The Company's Dividend Policy has taken into account the applicable regulations in accordance with Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies which requires the Company to set aside a certain amount of its net income each fiscal year for allowances. Whenever the Company has positive retained earnings, the allowance shall at least be set at 20% of the total issued and paid up capital. The dividend is shared according to the General Meeting of Shareholders (GMS) resolutions.

Rincian Pembagian Dividen
Details of Dividend Sharing

Tahun Buku 2021
Fiscal Year 2021

Pembagian dividen untuk tahun buku 2021 akan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan Perusahaan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022.

The dividend sharing for fiscal year 2021 will be carried out in accordance with the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in June 2022.

Tahun Buku 2020
Fiscal Year 2020

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2021, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2020 untuk dividen sebesar Rp10,22 triliun. Pada tanggal 31 Desember 2021, pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan cara saling hapus terhadap piutang usaha dari PLN.

According to Annual General Meeting of Shareholders dated June 29, 2021, shareholders have given their approval for the use of net income 2020 for dividends, at an amount of Rp10.22 trillion. On December 31, 2021, the dividend payment to PLN was performed by the offsetting of trade receivables from PLN.

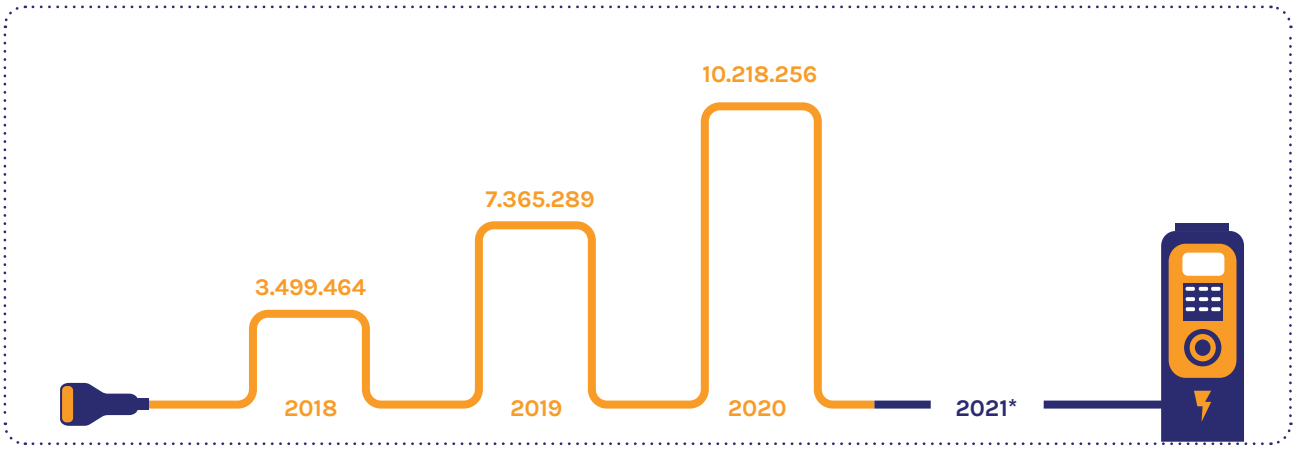
Tabel Pembayaran Dividen Tahun Buku 2020 - 2021
Table of Dividend Payout in Fiscal Years 2020-2021

	Tahun Buku 2018 Fiscal Year 2018	Tahun Buku 2019 Fiscal Year 2019	Tahun Buku 2020 Fiscal Year 2020	Tahun Buku 2021 Fiscal Year 2021
Laba Bersih (Rp juta) Net Income (Rp million)	3.499.464	7.365.289	10.218.256	4.031.154
Persentase Dividen (%) Dividend Percentage (%)	100	100	100	*
Dividen yang Dibagikan (Rp juta) Appropriated Dividends (Rp million)	3.499.464	7.365.289	10.218.256	*
Dividen per Lembar Saham (Rp) Dividend per Share (Rp)	671	1.412	1.959	*
Dividend Pay Out Ratio	99,999999980826: 0,000000000192	99,9999999808: 0,000000000192	99,9999999808: 0,000000000192	*

	Tahun Buku 2018 Fiscal Year 2018	Tahun Buku 2019 Fiscal Year 2019	Tahun Buku 2020 Fiscal Year 2020	Tahun Buku 2021 Fiscal Year 2021
Tanggal Pengumuman Pembayaran Date of Payment Announcement	13 Juni 2019 June 13, 2019	11 September 2020 September 11, 2020	31 Desember 2021 December 31, 2021	*
Tanggal Realisasi Pembayaran Dividen Kas Date of Cash Dividend Payment Completed	03 Februari 2020 February 3, 2020	21 Oktober 2020 October 21, 2020	5 Januari 2022 January 5, 2022	*

* Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2021 dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022
* Dividend for Fiscal Year 2021 will be paid in accordance with resolutions of GMS to be held in June 2022.

Tabel Dividen yang Dibagikan Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Appropriated Dividends in 2018-2021 (Rp million)



* Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2021 dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan RUPS yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022
* Dividend for Fiscal Year 2021 will be paid in accordance with resolutions of GMS to be held in June 2022.

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

INFORMATION ON MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

Dalam melakukan investasi barang modal, Perusahaan adakan sejumlah perikatan material, baik dengan pihak berelasi maupun pihak ketiga.

In placing capital investment, the Company engages in the material commitments with related or third parties.

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
INFORMATION ON MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

Tabel Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Tahun 2021
Table of Material Commitments for Capital Investment in 2021

Jenis Ikatan Type of Commitment	Nama Pihak yang Melakukan Ikatan Party under Commitment	Tujuan dari Ikatan Purpose of Commitment	Sumber Dana Source of Fund	Mata uang yang Menjadi Denominasi Base Currency
LTPA (*Long Term Parts Agreement*)	General Electric (Switzerland) GmbH, General Electric Global Parts and Products GmbH, Mitsubishi Corporation, PT Power Systems Service Indonesia, PT Poeser Indonesia - PT Power Systems Service Indonesia (*Joint Operation*)	Kebutuhan *spare part* kapitalisir untuk *overhaul* Spare parts capitalization requirement for overhaul	Internal	EUR, JPY
Kontrak EPC EPC Contract	Konsorsium Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk Consortium	Pekerjaan EPC PLTGU *Add on* Grati Blok 2 EPC Work at CCPP Add-on Grati Block 2	Internal	USD; EUR
Kontrak EPC EPC Contract	Konsorsium GE Global Parts & Products GmbH - Marubeni Corporation - PT Hutama Karya GE Global Parts & Products GmbH - Marubeni Corporation - PT Hutama Karya Consortium	Pekerjaan EPC PLTGU Tambak Lorok Blok 3 EPC Work at CCPP Tambak Lorok Block 3	Internal	USD; EUR; JPY
Kontrak EPC EPC Contract	Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) - WWS Wasserkraft GmbH & CO KG PT Hutama Karya (Persero) - WWS Wasserkraft GmbH & CO KG Consortium	Pekerjaan EPC PLTMH Gunung Wugul EPC Work at MHPP Gunung Wugul	Internal	EUR

Langkah Perlindungan Risiko terhadap Posisi Mata Uang Asing
Protection against Foreign Currency Risk

Untuk mengurangi risiko fluktuasi kurs mata uang asing, langkah yang ditempuh adalah penggunaan mata uang Rupiah untuk transaksi, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diundangkan per tanggal 31 Maret 2015 yang mewajibkan penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Republik Indonesia, mengatur bahwa khusus untuk pengadaan *spareparts* impor yang telah di perjualbelikan di Indonesia, ikatan perjanjian/kontrak Perusahaan dan *vendor* wajib menggunakan mata uang Rupiah. Dalam ikatan ini, Indonesia Power menggunakan kebijakan sistem *Floating Rate* yang dihitung dengan menggunakan formula nilai Kurs Tengah Transaksi Bank Indonesia.

In order to limit foreign exchange fluctuation risk, the Company uses Rupiah for transaction. This complies with the Regulation of Bank Indonesia (PBI) enacted on March 31, 2015 which requires the use of Rupiah within the territory of the Republic of Indonesia. The Regulation specifically sets out that the procurement of imported spare parts traded in Indonesia, in addition to any commitments/contracts between the Company and vendors, must use Rupiah. In these commitments, Indonesia Power uses floating rate calculated using Median Exchange Rate for EUR - Bank Indonesia transactions.

Ikatan Material Tahun 2021
Material Commitments in 2021

Berikut merupakan uraian mengenai perikatan material berupa ikatan dan kontinjensi yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2021.

The followings are the descriptions of the material commitments i.e. agreements and contingencies entered into by the Company in 2021.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL)
Power Purchase Agreement (PPA)

Perusahaan dan entitas anak memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan dan entitas anak sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

The Company and its susidiaries has various PPAs with PLN. Under those agreements, PLN will pay the Group for the supply of electricity at an amount determined in accordance with the payment formula. Such payment formula includes cost of capacity, energy, as wall as operations and maintenance components which depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar
Fuel Supply Agreement

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Gas
Gas Fuel Supply Agreement

Tabel Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Gas
Table of Gas Fuel Supply Agreement

Sektor Sector	Pemasok Supplier	No. Perjanjian No. Agreement	Periode Term	Satuan Unit	Jumlah yang disepakati (angka penuh) Amount Agreed (in full value)
Tanjung Priok	PT Perusahaan Gas Negara (PGN)	0556.PJ/ EPI.01.02/010000/2019	2019-2030	BBTUD	s.d. up to 38, 16 (TOP 31,8)
	PT Nusantara Regas (NR)	273.PJ/041/DIR/2012	2012-2022	BBTUD	s.d. up to 250
Grati	Medco Energi Sampang Ply Ltd; Singapore Petroleum Sampang Ltd; Cue Sampang Ply Ltd	Perjanjian penjualan gas Gas sales agreement	2004-2022	BBTUD	16,9-19,1 (TOP 95%)
	Medco Energi Sampang Ply Ltd; Singapore Petroleum Sampang Ltd; Cue Sampang Ply Ltd	115.PJ/061/IP/2010	2011-2022	BBTUD	17,1-22,7 (TOP 95%)
	Kangean Energy Indonesia Ltd	462.Pj AMD II/040/ DIR/2010	2012-2028	BBTUD	20 -50 (TOP 90%)
	PT Pertamina Gas	0056-1.Pj/040/ DIR/2014	2014-2033	MMSCFD	s.d up to 100 (TOP 80)
	PT Enviromate Technology International (CNG)	002.PJ/061/IP/2013	2012-2023	MMSCFD	15 (TAP)
	PT Inti Alasindo Energy	403.PJ/061/IP/2021	2021-2022	BBTUD	0-40

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
INFORMATION ON MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

Sektor Sector	Pemasok Supplier	No. Perjanjian No. Agreement	Periode Term	Satuan Unit	Jumlah yang disepakati (angka penuh) Amount Agreed (in full value)
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	97.PJ/061/IP/2007	2010-2029	BBTUD	50-54,5 (TOP 40)
	PT Perta Daya Gas (PDG)	87.PJ/061/IP/2013	2013-2029	BBTUD	17
	PT Pertamina (Persero)	1670.Pj/EPI01.02/ DIRUT/2017	2021-2035	BBTUD	100 (TOP 90%)
Bali	PT Pelindo Energi Logistik	307.PJ/061/IP/2017	2023	BBTUD	40 (TOP 32)
	PT Benoa Gas Terminal (FSRU)	045.PJ/061/IP/2019	2019-2033	MMSCFD	s.d. up to 50
	PT Pertamina (Persero)	1265.PJ/EPI.01.02/ DITDAN/2018	2022	BBTUD	*Confirmation Notice*
Sorong	PT Malamoi Olom Wobok	331.PJ/061/IP/2020	2021-2025	BBTUD	7,2-8,8
	PT Perta Daya Gas (PDG)	339.PJ/061/IP/2020	2021-2040	MMSCFD	7,2-8,8

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Batubara
Coal Fuel Supply Agreement

Tabel Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Batubara
Table of Coal Fuel Supply Agreement

Pemasok Supplier	Nomor Kontrak Contract Number	Jumlah yang disepakati (angka penuh) Amount in Metric Ton (in full value)	Periode Term
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	12.PJ/061/IP/2013	3.450.000	2013 – 2025
PT Oktasan Baruna Persada	406.PJ/061/IP/2018	1.800.000	2019 - 2026
PT Berau Coal	84.PJ/061/IP/2008	1.642.000	2009 - 2022
PT Adaro Indonesia	117.PJ/061/IP/2014	1.572.000	2014 - 2023
PT Artha Daya Coalindo	159.PJ/061/IP/2017	2.263.500	2017 - 2027
PT PLN Batubara	170.PJ/061/IP/2020	2.046.000	2020 - 2040

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp820.397 dan Rp895.607 per ton sebelum penyesuaian spesifikasi batubara (2020: Rp703.862 - Rp785.234).

Pada tanggal 2 November 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Poin utama peraturan tersebut yang berkaitan dengan Grup adalah hasil pertambangan batubara termasuk dalam jenis barang yang dikenai PPN, maka seluruh pembelian batubara dikenakan PPN terhitung mulai tanggal tersebut.

The purchase price of coal ranges from Rp820,397 to Rp895,607 per ton, which is adjusted against coal specification (2020: Rp703,862 - Rp785,234).

On 2 November 2020, the Minister of Law and Human Rights issued Law No. 11 year 2020 on Job Creation Law. The main point of the law relating to the Group relates to the inclusion of coal mining products in the types of goods subject to VAT, and therefore all purchases of coal are subject to VAT from that data.

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Minyak
Oil Fuel Supply Agreement

Perusahaan melalui PLN dan PT Pertamina (Persero) (Pertamina) mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain:

(i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;
(ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun;
(iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%;
(iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007;
(v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; dan
(vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011.

Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai independen surveyor.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 17 Desember 2021, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Selama masa negosiasi, formula harga baru untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, menggunakan formula harga sementara yang telah disepakati pada adendum untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
b. Bersamaan dengan hal tersebut, akan disepakati formula harga baru untuk periode terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, estimasi liabilitas atas pembelian bahan bakar dari Pertamina masing-masing Rp754.489 dan Rp171.541 yang disajikan sebagai utang usaha dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Company, through PLN and Partamina, entered into a Fuel Sala and Purchase Agreement No. 071.PJ/060IDIR/2001 dated 8 October 2001. This agreement was amended on 16 May 2007, whereby the Company and Pertamina agreed among others, that:

(i) the monthly fuel price to be used for the period 1 January until 30 April 2007 is determined by Partamina and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore (MOPS) plus VAT for the period 1 May 2007 until 31 December 2007;
(ii) the fuel price subsequent to 31 December 2007 will be determined by both parties every year;
(iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%;
(iv) effective on 1 May 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until 30 April 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until sett/ad by issuance of PLN bonds, which is no later than 31 August 2007;
(v) the maximum payable to Partamina includes bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion; and
(vi) this agreement is valid for five years from 1 January 2007 until 31 December 2011.

Based on the Joint Deal Latter dated 16 May 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

The agreement has been amended several times. Based on Amendment VIII dated 17 Dasambar 2021, the agreement on the sale and purchase price of fuel oil (HSD and MFO) from 1 January 2021 to 31 December 2023 between Partamina and the Company is as follows:

a. During the negotiation period, the new price formula for the period of 1 January 2021 to 31 December 2021, using the provisional price formula agreed in the amendment for the period of 1 January 2018 to 31 December 2020.
b. At the moment, a new price formula will be agreed for the period starting from 1 January 2022 to 31 December 2023. As at 31 December 2021 and 2020, estimated liabilities for purchase of fuel from Partamina amounted to Rp754,489 and Rp171,541, respectively, which are presented as trade payables in the consolidated statements of financial position.

INFORMASI IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
INFORMATION ON MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL INVESTMENT

Perjanjian Pasokan Bahan Bakar Uap Panas Bumi
Geothermal Steam Fuel Supply Agreement

Melalui PLN, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah melalui Amandemen I Surat Perjanjian antara Pertamina dan PLN PLTP Unit 1,2,3 di Kamojang. Sampai tahun 2015, perjanjian masih menggunakan Amandemen V Perjanjian Interim antara PT Pertamina Geothermal Energy, PLN dan IP. Pada tanggal 11 Februari 2016, dilakukan amandemen secara keseluruhan dan pernyataan kembali atas perjanjian induk, yang berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2040. Untuk PLTP Gunung Salak perjanjian selama masa 30 tahun yang berakhir tahun 2030.

The Company, through PLN, entered into a geothermal procurement agreement with Partamina to purchase Geothermal Steam for Kamojang area for 30 years until 2012 and the agreement has been amended under amendment I between Partamina and PLN PL TP Unit 1,2,3 in Kamojang. Until 2015, the agreement was still using the Fifth amendment of the Interim Agreement between PT Pertamina Geothermal Energy, PLN and IP. On 11 February 2016, the main agreement was wholly amended and restated, which is valid from 1 August 2012 to 31 December 2040. For PL TP Gunung Salak and Darajat, the agreement is valid for 30 years until 2030.

Perjanjian-perjanjian Lain
Other Agreements

Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Fasilitas Penyimpanan *Liquid Natural Gas* (LNG) dan Perjanjian Terminal LNG untuk PLTDG Pesanggaran
Agreement of Shipping Management Services, Agreement of Liquid Natural Gas (LNG) Storage Facilities and Agreement of LNG Terminal for PL TOG Pasanggaran

Pada tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan dan PT Pelindo Energi Logistik menandatangani masing-masing Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Fasilitas Penyimpanan LNG dan Perjanjian Terminal LNG untuk PLTDG Pesanggaran.

On 8 December 2015, the Company and PT Pelindo Enargi Logistik signed an agreement for Shipping Management Services, LNG Storage Facility Services and LNG Terminal Services for PLTDG Pesanggaran.

Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan dan Perjanjian Jasa Fasilitas LNG berlaku selama 7 tahun berdasarkan kontrak No. 187.PJ/061/IP/2015 dan 188.PJ/061/IP/2015, sedangkan Perjanjian Jasa Terminal LNG berlaku selama 5 tahun berdasarkan kontrak No. 189.PJ/061/IP/2015.

The shipping management services agreement and LNG Storage agreement are effective for seven years based on contract No. 187.PJ/061/IP/2015 and 188.PJ/061/IP/2015 respectively, while the LNG Terminal Agreement is affective for five years based on contract No. 189.PJ/061/IP/2015.

Pada tanggal 27 Desember 2017, Perusahaan dan PT Pelindo Energi Logistik menandatangani adendum perjanjian atas Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Jasa Fasilitas Penyimpanan LNG dan Perjanjian Jasa Terminal LNG melalui Perjanjian Jasa Fasilitas *Midstream* LNG Benoa Bali No. 307.PJ/061/IP/2017 (Perjanjian Unifikasi) yang berlaku sampai dengan 28 Februari 2023.

On 27 December 2017, the Company and PT Pelindo Energi Logistik signed an addendum of the Shipping Management Agreement, LNG Storage Facility Service Agreement and LNG Terminal Services Agreement through Midstream LNG Facility Agreement Benoa Bali No. 307.PJ/0611/P/2017 (Unification Agreement), which is valid until 28 February 2023.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan PT Pelindo Energi Logistik menandatangani Addendum Kedua Perjanjian Unifikasi terkait pengurangan ruang lingkup jasa fasilitas penyimpanan LNG, perubahan *single* tarif tanpa lingkup penyimpanan dari 3,8 USD/MMBTU menjadi 2,7531 USD/MMBTU, pengurangan *residual losses* dari 3,56% menjadi 2,12% dan penambahan klausul ketidaksiapan fasilitas.

On 30 September 2021, the Company and PT Pelindo Energi Logistik signed the Second Amendment to the Unification Agreement related to reducing the scope of services for LNG storage facilities, changing the single tariff without storage scope from 3.8 USD/MMBTU to 2.7531 USDIMMBTU, reducing residual losses from 3.56% to 2.12% and including the addition of a facility unpreparedness clause.

Stand by Letter of Credit (SBLC)

Stand by Letter of Credit (SBLC)

Perusahaan memliki fasilitas *Non Cash Loan* berupa SBLC dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan jual beli gas dari:

a. Perjanjian jual beli gas dengan Medco Energi Sampang Pty Ltd dengan nominal sebesar US$10.253.469 atau setara dengan Rp146,31 miliar dengan jangka waktu sampai dengan 30 Agustus 2022 berlokasi di Lapangan Minyak dan Gas Oyong, Jawa Timur.
b. Perjanjian jual beli gas dengan Medco Energi Sampang Pty Ltd dengan nominal sebesar US$12.013.575 atau setara dengan Rp169,45 miliar dengan jangka waktu sampai dengan 24 Januari 2022 berlokasi di Lapangan Minyak dan Gas Wortel, Jawa Timur.
c. Perjanjian jual beli gas dengan PT Malamoi Olom Wobok dengan nominal US$3.431.970 atau setara dengan Rp48,41 miliar dengan jangka waktu sampai dengan 14 Januari 2022.

The Company has a Non Cash Loan facility of SBLC with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, which is used as a gas purchase guarantee from:

a. Gas sales and purchase agreement with Medco Energi Sampang Pty Ltd amounted to US$10,253,469 or equivalent to Rp146.31 nillion with a maturity date of 30 August 2022 located in Oyong Oil and Gas Field, East Java.
b. Gas sales and purchase guarantee with Medco Energi Sampang Pty Ltd amounted to US$12,013,575 or equivalent to Rp169.45 billionwith a maturity date of 24 January 2022 located in Wortel Oil and Gas Field, East Java.
c. Gas sales and purchase guarantee with PT Malamoi Olom Wobok amounted to US$3,431,970 or equivalent to Rp48.41 billion with a maturity date of 14 January 2022.



INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL INVESTMENT

Investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memperoleh Aset Tetap atau menambah nilai Aset Tetap yang telah dimiliki dengan tujuan akan memberikan nilai manfaat di masa yang akan datang.

Investment is any expenses made by the Company for earning or increasing Property, Plant, and Equipment and aiming at rendering added value in the future.

Nilai investasi Barang Modal Perusahaan tahun 2021 menurun 26,54% dibandingkan tahun 2020 menjadi sebesar Rp3,58 triliun. Rincian investasi barang modal tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut:

The Company's Capital Investment in 2021 declined 26.54% to Rp3.58 trillion compared to in 2020. The details of the capital investment in 2021 are shown in the following table:

Tabel Investasi Barang Modal Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Capital Investment in 2018-2021 (Rp million)

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Investment	2018	2019	2020	2021	Kebijakan	Policy
Bangunan, waduk dan prasarana Buildings, Reservoir, and Infrastructure	124.125	648.614	288.624	7.439	**Tujuan Investasi**: Keandalan dan efisiensi pembangkit	Purpose of Investment: Power plant reliability and efficiency
					Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal)	Source of Fund: Investment budget (Internal)
					Mata Uang: Rupiah	Currency: Rupiah
					Langkah Perlindungan Risiko: Asuransi untuk bangunan pembangkit dan pemeliharaan sesuai prosedur untuk waduk dan prasarana non pembangkit	Risk Protection Measure: Insurance for power plant building and maintenance according to procedure for reservoir and non-power plant infrastructure
Instalasi dan mesin pembangkit Installations and Power Plant	516.470	2.188.073	2.034.919	633.849	**Tujuan Investasi:** Keandalan dan efisiensi pembangkit	Purpose of Investment: Power plant reliability and efficiency
					Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal)	Source of Fund: Investment budget (Internal)
					Mata Uang: Rupiah dan Valas (JPY dan EUR)	Currency: Rupiah and Foreign Exchanges (JPY and EUR)
					Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur dan asuransi pembangkit	Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure and insurance for power plant
Peralatan transmisi Transmission Equipment	63.243	483.064	375.375	2.163	**Tujuan Investasi**: Keandalan dan efisiensi pembangkit	Purpose of Investment: Power plant reliability and efficiency
					Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal)	Source of Fund: Investment budget (Internal)
					Mata Uang: Rupiah	Currency: Rupiah
					Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur dan asuransi pembangkit	Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure and insurance for power plant

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Investment	2018	2019	2020	2021	Kebijakan	Policy
Instalasi telekomunikasi Telecommunication Installation	8.994	26.089	28.029	-	**Tujuan Investasi**: Mendukung kinerja operasional Perusahaan	Purpose of Investment: Supporting the Company's operational performance
					Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal)	Source of Fund: Investment budget (Internal)
					Mata Uang: Rupiah	Currency: Rupiah
					Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur	Risk Protection Measure: Maintenance according to procedures
Peralatan umum General Equipment	38.089	194.952	81.868	30.116	**Tujuan Investasi**: Mendukung kinerja operasional Perusahaan	Purpose of Investment: Supporting the Company's operational performance
					Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal)	Source of Fund: Investment budget (Internal)
					Mata Uang: Rupiah	Currency: Rupiah
					Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur	Risk Protection Measure: Maintenance according to procedures
Kendaraan bermotor Motor Vehicles	604	2.394	11.752	-	**Tujuan Investasi**: Mendukung kinerja operasional Perusahaan	Purpose of Investment: Supporting the Company's operational performance
					Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal)	Source of Fund: Investment budget (Internal)
					Mata Uang: Rupiah	Currency: Rupiah
					Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur	Risk Protection Measure: Maintenance according to procedures
Material Cadang Spare Parts	64.000	16.811	12.114	28.328	**Tujuan Investasi**: Menjamin ketersediaan material cadang	Purpose of Investment: Ensuring the availability of spare parts
					Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal)	Source of Fund: Investment budget (Internal)
					Mata Uang: Rupiah	Currency: Rupiah
					Langkah Perlindungan Risiko: Pemakaian dan penyimpanan sesuai prosedur	Risk Protection Measure: Utilization and storage according to procedures
Tanah Land	-	794.027	-	285	**Tujuan Investasi**: Modal utama membangun pembangkit	Purpose of Investment: Main capital for constructing power plants
					Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal)	Source of Fund: Investment budget (Internal)
					Mata Uang: Rupiah	Currency: Rupiah
					Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur dan kepemilikan sesuai peraturan	Risk Protection Measure: Maintenance according to procedures and ownership according to regulations

INVESTASI BARANG MODAL
CAPITAL INVESTMENT

Jenis Investasi Barang Modal Type of Capital Investment	2018	2019	2020	2021	Kebijakan	Policy
Pekerjaan dalam pelaksanaan Construction in Progress	2.893.558	92.723	140.157	2.070.219	**Tujuan Investasi**: Keandalan dan Efisiensi pembangkit	Purpose of Investment: Power plant reliability and efficiency
					Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal)	Source of Fund: Investment budget (Internal)
					Mata Uang: Rupiah dan Valas (JPY, EUR dan USD)	Currency: Rupiah and Foreign Exchanges (JPY, EUR, and USD)
					Langkah Perlindungan Risiko: Pemeliharaan sesuai prosedur dan asuransi pembangkit	Risk Protection Measure: Maintenance according to procedure and insurance for power plant
Penyertaan Investment	-	-	1.901.280	-	**Tujuan Investasi**: Menambah kapasitas pembangkit	Purpose of Investment: Power plant capacity expansion
					Sumber Dana: Anggaran Investasi (Internal)	Source of Fund: Investment budget (Internal)
					Mata Uang: Rupiah dan Valas (USD)	Currency: Rupiah and Foreign Exchange (USD)
					Langkah Perlindungan Risiko: Monitoring Progres Pembangunan secara berkala	Risk Protection Measure: Periodical monitoring of development progress
Jumlah Investasi Barang Modal Total Capital Investment	**3.709.083**	**4.446.749**	**4.874.118**	**2.772.398**		
Arus Kas Pembayaran untuk Investasi Barang Modal Cash Flows of Payment for Capital Investment	**4.863.538**	**4.446.749**	**4.874.118**	**3.580.713**		

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATES/RELATED PARTIES

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan

Material Transactions Containing Conflicts of Interest

Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

Throughout 2021, there were no transactions containing conflicts of interest. Thus, no information can be disclosed in this area.

Transaksi Material dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Transactions with Affiliates/Related Parties

Pihak-pihak Berelasi

Related Parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan dan entitas anak (entitas pelapor):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau
   iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

Related parties are individuals or entities that are related to the Company and its subsidiaries (reporting entity):

a. An individual or their immediate family member is related to the reporting entity if such a person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting party or reporting entity; or
   iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of the parent of the reporting entity.
b. An entity is related to the reporting entity if meeting one of the following conditions:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that one entity's parent, subsidiary, and sub-subsidiary are related to the other entity);
   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture that is a member of a business group the other entity of which is a member);
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the same third entity;

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATES/RELATED PARTIES

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas),

c. Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.
d. Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

v. The entity constitutes post-employment benefit plan for employee benefits from one of the reporting entities or entities that are related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity organizing the plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
vi. Entity controlled or jointly controlled by the individual specified in letter (a); or
vii. The individual identified in letter (a) (i) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or the parent of the entity),

c. Entity related to the government is an entity controlled, jointly controlled, or influenced by the government. Government refers to the government, government agencies, and similar bodies, be it local, national, or international.
d. Entity related to the government is an entity controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or the Regional Government as the shareholders of the entity, or entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as the shareholder's proxy.

All transactions made with related parties, whether or not made under the same terms and conditions as those with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

Sifat Hubungan Pihak Berelasi
Nature of Relations with Related Parties

Berikut adalah sifat hubungan pihak berelasi:
a. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham PT PLN (Persero) dan Badan Usaha Milik Negara
b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
c. Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan atau kontrol bersama atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
d. Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci perusahaan.

The followings are the nature of relationship with related parties:
a. The Government of the Republic of Indonesia is the shareholder of PT PLN (Persero) and State-Owned Enterprises (SOEs).
b. The Company is related to other SOEs under the same ownership of the Ministry of Finance.
c. The Company has significant influence on or joint control over investments in associates or joint ventures.
d. The Board of Commissioners and the Board of Directors are the key management personnel of the Company.

Nama Pihak yang Bertransaksi
Names of Parties under Transactions

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

The following is a list of related parties transacting with the Company:

Tabel Nama Pihak Berelasi Tahun 2021
Table of Names of Related Parties in 2021

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relation	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)/ PLN	Pemegang saham Perusahaan Shareholder of the Company	Transaksi pembelian tenaga listrik Purchase of electricity
YPK PLN	Pemegang saham Perusahaan Shareholder of the Company	Penyertaan Modal Capital Subscription
Personil Manajemen Kunci Key Management Personnel	Direktur dan Komisaris Grup Group Directors and Commissioners	Pembayaran gaji dan tunjangan Salary and allowance payment
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control via the Indonesian Government	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/ Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control via the Indonesian Government	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/ BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control via the Indonesian Government	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek Placement of cash and cash equivalents and short-term investment
PT Pertamina (Persero)/ Pertamina	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control via the Indonesian Government	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas Purchase of fuels and lubricants
PT Bukit Asam (Persero) Tbk/ PTBA	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control via the Indonesian Government	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/ PGN	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control via the Indonesian Government	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Nusantara Regas/ NR	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
PT Hutama Karya/ HK	Pengendalian melalui Pemerintah Control through the Government	Transaksi Jasa Konstruksi Construction Service Transactions
PT Asuransi Jasa Indonesia/ AJI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia Control via the Indonesian Government	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi serta kapal milik Perusahaan Insurance services for Company buildings, installations and power plants, transmission equipment, and vessels
PT Rajamandala Electric Power/ REP, PT GCL Indo Tenaga/ GCL, PT Perta Daya Gas/ PDG	Asosiasi dan ventura bersama Associate and joint venture	Investasi, pemberian pinjaman, perdagangan batu bara, jasa pemeliharaan dan pengelolaan Investments, loan provision, coal trade, maintenance and management services
PT Indo Pusaka Berau/ IPB, PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang/ PLN SC, PT Indo Raya Tenaga/ IRT, PT Maxpower Cogindo Batam/MCB	Asosiasi dan ventura bersama Associate and joint venture	Investasi pada asosiasi dan ventura bersama Investment in associates and joint ventures
PT Pembangkitan Jawa Bali/ PJB	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi lain-lain Other transactions

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATES/RELATED PARTIES

Pihak-pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relation	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Haleyora Power/ Haleyora	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi penyediaan tenaga kerja Workforce outsourcing transactions
PT Indonesia Comnet Plus/ ICON+	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi penyediaan layanan internet Internet service provision transactions
PT PLN Batubara/ PLN B	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi pembelian bahan bakar Purchase of fuels
DP-PLN	Pihak berelasi lainnya Other related parties	Pengelola dana pensiun Retirement fund manager
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring/ PLNE	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi jasa profesional Professional service transactions
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna/ BAG	Entitas anak dari PLN Subsidiary of PLN	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batu bara Fuel and coal transport service transactions

Tujuan Transaksi Pihak Berelasi
Purpose of Transactions with Related Parties

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah salah satu bentuk dukungan kepada kelancaran dan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Transactions with related parties in general serve as a form of support for streamlining and sustaining of the Company's business.

Nilai Transaksi Pihak Berelasi
Value of Transactions with Related Parties

Berikut adalah nilai transaksi dengan pihak berelasi pada tahun 2020 dan 2021:

The followings are the values of transactions with related parties in 2020 and 2021:

Tabel Nilai Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2020 - 2021 (Rp juta)
Table of Value of Transactions with Related Parties in 2020-2021 (Rp million)

	2020	2021
Piutang Pihak Berelasi Receivables from Related Parties		
REP	333.984	358.699
PDG	179.464	114.012
Lain-lain	75.382	54.380
Jumlah Total	**588.830**	**527.091**
Kas dan setara kas Cash and Cash Equivalents		
BNI	2.089.448	2.362.689
Bank Mandiri	417.670	312.825
BRI	141.921	89.022
Jumlah Total	**2.649.039**	**2.764.536**

	2020	2021
Rekening yang dibatasi penggunaannya Restricted Cash in Banks		
BNI	-	1.117
Aset keuangan dari konsesi jasa Financial Assets of Service Concession		
PT PLN (Persero)	45.329.815	43.791.382
Piutang usaha Trade Payables		
PLN	30.741.055	27.083.532
GCL	-	165.059
Jumlah Total	**30.741.055**	**27.248.591**
Utang usaha Trade Payables		
Pertamina	171.541	754.489
PLN B	231.874	102.182
PTBA	444.845	94.198
BAG	226.021	61.944
HK	259.126	193
PGN	166.819	-
NR	13.673	-
Lain-lain Others	582.533	255.655
Jumlah Total	**2.096.432**	**1.268.661**
Pinjaman dari pemegang saham Loans from a shareholder		
PLN	1.043.347	1.546.722
Liabilitas sewa Lease Liabilities		
PDG	14.754	9.431
Penjualan tenaga listrik Sales of Electricity		
PLN	21.011.210	19.907.755
Pendapatan Konsensi Jasa Revenue of Service Concession		
PT PLN (Persero)	14.259.159	14.656.755
Pendapatan Jasa Service Revenue		
PLN	3.248.553	3.479.304
GCL	24.192	253.382
PJB	40.994	15.962
REP	1.533	1.364
Jumlah Total	**3.315.272**	**3.750.012**

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI/BERELASI
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATES/RELATED PARTIES

	2020	2021
Beban usaha Operating Expenses		
PTBA	3.278.332	2.975.154
Pertamina	997.293	2.783.330
PGN	1.492.380	2.207.102
PLN B	1.382.461	477.157
NR	32.564	442.203
Haleyora	33.625	114.869
BAG	336.295	305.313
PJB	1.291	30.219
AJI	79.923	36.303
ICON+	15.670	15.684
PLNE	8.870	12.769
Lain-lain Others	48.876	26.559
Jumlah Total	**7.707.580**	**9.426.662**

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan tahun 2021 adalah sebesar Rp65,51 miliar lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp62,00 miliar.

Total compensations paid to the Board of Directors and Board of Commissioners in 2021 was amounting to Rp65.51 billion, which was higher than in 2020 at Rp62.00 billion.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi
Fairness of Transactions with Related Parties

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Selain itu, penilaian kewajaran transaksi dengan pihak berelasi didasarkan pada *the arm's length principle.*

The fairness of all transactions with related parties, whether or not made under terms and conditions with third parties, is disclosed in the financial statements, in accordance with PSAK 7 standard: Disclosure of Related Parties. Additionally, the fairness of transactions with related parties is measured based on arm's length principle.

Mekanisme *Review* dan Pemenuhan Peraturan Transaksi Pihak Berelasi
Mechanism of Review and Compliance with Regulations for Transactions with Related Parties

Mekanisme *review* atas transaksi dengan pihak berelasi melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor. Salah satu tujuan pengungkapan transaksi pihak berelasi adalah upaya pemenuhan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Transactions with related parties are reviewed through audit which is conducted by either internal or external auditor. To ensure the fairness of transactions and compliance with generally accepted accounting standards in Indonesia, the aforementioned affiliate transaction reports have been audited by auditors. The disclosure of transactions with related parties among others aims at meeting PSAK 7: Disclosure of Related Parties.

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI

MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND/OR RESTRUCTURING

Sebagai bentuk langkah strategis, Indonesia Power melakukan beberapa *corporate action* untuk mendukung kelancaran operasi Perusahaan untuk memaksimalkan kinerja operasional dan nilai Perusahaan.

As a strategic measure, Indonesia Power performed several corporate actions that allow smooth operation of the Company while maximizing operational performance and Company value.

Informasi Investasi

Information on Investment

Terkait dengan kegiatan investasi, Indonesia Power melakukan tiga jenis kegiatan investasi yaitu diantaranya adalah Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan; Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama; dan Investasi Penyertaan Saham Pada Entitas Anak. Berikut adalah penjelasan singkatnya:

There are three types of investing activities, namely Investment in Existing Plants, Business Development, and Equity Participation; Share Investment in Associates and Joint Ventures; and Share Investment in Subsidiaries. The followings are the overview of these investments:

Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan

Investment in Existing Power Plants, Business Development, and Equity Participation

Investasi ini dilakukan Indonesia Power dengan tujuan untuk keandalan dan efisiensi pembangkit eksisting dan pengembangan pembangkit baru serta usaha terkait lainnya, dengan menggunakan dana dari internal, maupun melalui pendanaan alternatif seperti ECA.

Indonesia Power performs these investments to gain reliability and efficiency of existing plants and develop new power plants and other related businesses. These investments were sourced from internal funds as well as alternative funding such as ECA.

Realisasi *disburse* tahun 2021 lebih rendah dibanding tahun 2020 karena fase *project* di tahun 2021 ada penundaan terkait dengan pandemi Covid-19 dan ketidaksiapan infrastruktur pendukung diluar kendali Indonesia Power. Realisasi investasi pada pembangkit eksisting, pengembangan usaha dan penyertaan disajikan pada tabel berikut:

Total actual disbursement in 2021 was lower than in 2020 due to a delay in project phase as a result of the Covid-19 pandemic and unreadiness of infrastructure that was beyond Indonesia Power's control. The actual investments in existing plants, business development, and equity participation are presented in the following table:

Tabel Investasi Pembangkit Eksisting, Pengembangan Usaha dan Penyertaan Tahun 2018 - 2021 (Rp juta)
Table of Investment in Existing Power Plants, Business Development, and Equity Participation in 2018-2021 (Rp billion)

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Program Investasi Pembangkit *Existing*: Existing Power Plants Investment Plan:					
Program Keandalan Pembangkit Plant Reliability Program	1.137.620	1.688.160	1.133.440	1.021.572	(9,87%)
Program Efisiensi Pembangkit Plant Efficiency Program	135.260	175.830	2.420	-	(100,00%)

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI
MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND/OR RESTRUCTURING

Unit Pembangkit Generation Unit	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Growth
Program Pelestarian Lingkungan Environmental Preservation Program	-	18.410	34.240	24.487	(28,48%)
Program Sarana Fasilitas Penunjang Supporting Facilities Program	36.720	127.720	89.350	37.715	(57,79%)
Sub Jumlah Sub Total	**1.309.600**	**2.010.120**	**1.259.450**	**1.083.774**	**(13,95%)**
Program Pengembangan Usaha: Business Development Program:					
Pengembangan Pembangkit Baru New Power Plant Development	3.034.049	4.396.174	1.639.650	2.455.928	49,78%
Jasa Konsultan Consultant Service	5.876	28.231	25.971	2.565	(90,12%)
Pengembangan Usaha Lainnya Other Business Developments	428.974	127.935	1.933.895	38.446	(98,01%)
Sub Jumlah Sub Total	**3.468.899**	**4.552.341**	**3.599.516**	**2.496.939**	**(30,63%)**
Jumlah Pembangkit *Existing*, Pengembangan Usaha dan Penyertaan Total Existing Power Plants, Business Development, and Equity Participation	**4.778.499**	**6.562.45**	**4.858.966**	**3.580.713**	**(26,31%)**

Investasi Persentase Kepemilikan Saham pada Entitas Anak
Share Investment Percentage in Subsidiaries

Investasi ini dilakukan Indonesia Power dengan tujuan untuk pengembangan pembangkit baru dan usaha terkait lainnya dengan menggunakan dana dari internal. Realisasi investasi saham pada entitas anak disajikan pada tabel berikut:

Indonesia Power performs this investment to develop new power plants and other relevant businesses using funds from internal sources. The actual share investment in associates is presented in the following table:

Tabel Persentase Kepemilikan Saham pada Entitas Anak Tahun 2018 - 2021
Table of Share Investment Percentage in Subsidiaries in 2018-2021

Entitas Anak Subsidiary	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	Penyertaan (%) Investment (%)			
			2018	2019	2020	2021
PT Cogindo DayaBersama	*Co-generation*, pemasok energi, jasa pelayanan energi dan manajemen. Co-generation, energy supply, energy and management services	1999	99,99	99,99	99,99	99,99
PT Artha Daya Coalindo	Perdagangan dan jasa pengangkutan batu bara. Coal trade and transport services	1998	80,00	80,00	80,00	80,00
PT Indo Ridlatama Power	Pembangkitan tenaga listrik. Electricity generation	2018	90,00	90,00	90,00	90,00
PT Putra Indotenaga dan entitas anak	Ketenagalistrikan dan energi. Electricity and energy	2016	99,99	99,99	99,99	99,99

Investasi Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Share Investment in Associates and Joint Ventures

Investasi ini dilakukan Indonesia Power dengan tujuan untuk pengembangan pembangkit baru dan usaha terkait lainnya dengan menggunakan dana dari internal. Realisasi investasi penyertaan saham pada entitas asosiasi dan ventura bersama disajikan pada tabel berikut:

Indonesia Power performs this investment to develop new power plants and other relevant businesses using funds from internal sources. The actual share investment in associates and joint ventures is presented in the following table:

Tabel Penyertaan Saham pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Tahun 2018 - 2021

Table of Share Investment in Associates and Joint Ventures in 2018-2021

Entitas Anak Subsidiary	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	Penyertaan (%) Investment (%)			
			2018	2019	2020	2021
Entitas Asosiasi: Associate:						
PT Indo Pusaka Berau	Pembangkit tenaga listrik. Electricity generation	2005	46,53	46,53	46,53	46,53
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang	Perdagangan barang dan jasa, enjiiring *supply chain* dan konsultasi dibidang ketenagalistrikan. Goods and services trade, supply chain engineering, and electricity-related consultation	2018	49,00	49,00	49,00	49,00
Ventura Bersama: Joint Venture:						
PT Perta Daya Gas	Transportasi, penyimpanan dan regasifikasi LNG. LNG transport, storage, and regasification	2015	35,00	35,00	35,00	35,00
PT Rajamandala Electric Power	Pembangkitan tenaga listrik. Electricity generation	2019	51,00	51,00	51,00	51,00
PT GCL Indotenaga	Pembangkitan tenaga listrik. Electricity generation	2021	35,00	35,00	35,00	35,00
PT Indo Raya Tenaga	Pembangkitan tenaga listrik. Electricity generation	*	51,00	51,00	51,00	51,00
PT Maxpower Cogindo Batam	Pembangkit tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, perdagangan mesin, suku cadang dan perlengkapannya. Power plant, electricity supporting activities, trade of machineries, spare parts, and equipment	*	-	-	30,00	30,00

* dalam tahap pengembangan
* in development

INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI
MATERIAL INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, ACQUISITION, AND/OR RESTRUCTURING

Investasi Penyertaan Saham PT Putra Indotenaga pada Entitas Anak
PT Putra Indotenaga Share Investment in Subsidiaries

Tabel Prosentase Kepemilikan Saham PT PIT pada Entitas Anak Tahun 2018 - 2021
Table of PT PIT Share Investment Percentage in Subsidiaries in 2018-2021

Entitas Anak Subsidiary	Jenis Usaha Type of Business	Tahun Operasi Komersial Year of Commercial Operation	Penyertaan (%) Investment (%)			
			2018	2019	2020	2021
PT Indo Tenaga Hijau	Pengembangan energi baru dan terbarukan. New and renewable energy development	*	95,21	95,21	95,45	95,45
PT Suralaya Indo Tenaga	Ketenagalistrikan dan energi. Electricity and energy	*	-	99,99	99,99	99,99
PT Putra Suralaya Indotenaga	Ketenagalistrikan dan energi. Electricity and energy	*	-	99,99	99,99	99,99

* dalam tahap pengembangan
* in development

Informasi Ekspansi
Information on Expansion

Pada tahun 2021, tidak ada kegiatan ekspansi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan ekspansi.

In 2021, there were no expansion activities. Thus, there is no information regarding the purpose, value or number of transactions, and sources of funds from the proceeds of the expansion activities.

Informasi Divestasi
Information on Divestment

Pada tahun 2021, tidak ada kegiatan divestasi sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, hasil kegiatan divestasi.

In 2021, there were no divestment activities. Thus, there is no information regarding the purpose, value or number of transactions, and sources of funds from the proceeds of the divestment activities.

Informasi Akuisisi
Information on Acquisition

Pada tahun 2021, tidak ada kegiatan akuisisisehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan akuisisi.

In 2021, there were no acquisition activities. Thus, there is no information regarding the purpose, value or number of transactions, and sources of funds from the proceeds of the acquisition activities.

Informasi Restrukturisasi Utang atau Modal
Information on Debt and/or Capital Restructuring

Pada tahun 2021, tidak terjadi restrukturisasi hutang/modal sehingga tidak ada informasi terkait tujuan, nilai atau jumlah transaksi, sumber dana, dari hasil kegiatan restrukturisasi.

In 2021, there were no Debt and/or Capital Restructuring. Thus, there is no information regarding the purpose, value or number of transactions, and sources of funds from the proceeds of the restructuring activities.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

ACTUAL USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Sampai dengan tahun 2021, Indonesia Power belum menjadi perusahaan terbuka (go public) atau belum melakukan Penawaran Umum di bursa efek, sehingga tidak ada informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas perubahan penggunaan dana.

As of 2021, Indonesia Power was not a publicly listed company (go public) or had not made any Public Offering on the stock exchange. Thus, there is no information related to the total proceeds, fund appropriation, details of fund appropriation, balance of funds, and the date of approval of the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding changes in fund appropriation.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (MSOP/ESOP)

EMPLOYMENT AND/OR MANAGEMENT STOCK OPTION PLANS (ESOP/MSOP)

Sampai akhir tahun 2021, saham Indonesia Power sebanyak 99,99% dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 0,01% dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN. Oleh karena itu, tidak ada kepemilikan saham oleh karyawan atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) dan tidak ada kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP). Sehingga tidak ada informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise*.

As of the end of 2021, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) held 99.99% of Indonesia Power's shares, whereas Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PT PLN held 0.01% shares. Therefore, there are no stocks held by the employees through the Employee Stock Option Plan (ESOP) or by the Management through the Management Stock Option Plan (MSOP). In addition, there is no information on the number of ESOP/MSOP shares and their realization, terms, employee and/or management eligibility requirements, and exercise price.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER ACCOUNTING REPORT DATE

Pada tahun 2021, tidak terdapat informasi dan fakta material atau kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan beserta dengan potensi dampak yang akan ditimbulkan.

In 2021, there were no information and material facts, nor any significant events occurring after accounting report date. Therefore, there are no information and any potential impacts to be disclosed.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY

Pernyataan Kepatuhan Kebijakan Akuntansi

Statement of Compliance with Accounting Policies

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK-IAI) Ikatan Akuntan Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. These include the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes in Accounting Policies

Perubahan Kebijakan Akuntansi PSAK dan ISAK

Changes in PSAK and ISAK Accounting Policies

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

Implementation of New and Revised Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) effective for the fiscal year starting on or after January 1, 2022

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- PSAK No. 112, Akuntansi Wakaf;
- Amendemen PSAK No. 22 Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis;
- Amendemen PSAK No. 71, Amendemen PSAK No. 55, Amendemen PSAK No. 60, Amendemen PSAK No. 62 dan Amendemen PSAK No. 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga 2;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, Akuntansi Sukuk;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111, Akuntansi Wa'd;
- Amendemen PSAK 73, Covid-19 Terkait Konsesi Rental;
- Penyesuaian tahunan atas PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan, PSAK No. 13, Properti Investasi, PSAK No. 48, Penurunan Nilai Aset, PSAK No. 66, Pengaturan Bersama dan Interpretasi Standard Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 16, Pengaturan Jasa Konsesi.

The implementation of the new standards, interpretations, amendments, and annual improvements of the accounting standards, which are effective beginning January 1, 2021, did not result in significant changes in the accounting standards and had no material impact on the amount reported in the consolidated financial statements of the current year:

- PSAK No. 112, Accounting for Endowments;
- Amendment to PSAK No. 22, Business Combinations - Business Definition;
- Amendment to PSAK No. 71, Amendment to PSAK No. 55, Amendment to PSAK No. 60, Amendment to PSAK No. 62, and Amendment to PSAK No. 73, Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2;
- Annual Improvement to PSAK No. 110, Sukuk Accounting;
- Annual Improvement to PSAK No. 111, Wa'd Accounting;
- Amendment to PSAK 73, Covid-19-Related Rent Concessions;
- Annual Improvement to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements, PSAK No. 13, Investment Properties, and Amendment to PSAK No. 48, Impairment of Assets, PSAK No. 66, Joint Arrangements, and Interpretation of Statement of Financial Accounting Standard (ISAK) No. 16, Service Concession Arrangements.

Sehubungan dengan amendemen PSAK No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 dan No. 73, Grup saat ini memiliki pinjaman dari pemegang saham yang mengacu pada US Dollar London *Interbank Offered Rate* (LIBOR) dan diperpanjang setelah tahun 2022. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan.

With respect to the Amendments to PSAK No. 71, No. 55, No. 60, No. 62, and No. the Group currently has loans from shareholders which refer to US Dollar London Interbank Offered Rate (LIBOR) and extend beyond 2022. As at December 31, 2021, the alternative benchmark had not yet been determined.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru dan Revisi, serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022

Implementation of New and Revised Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) effective for the fiscal year starting on or after January 1, 2022

Standar baru, amendemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Revisi PSAK No. 107, Akuntansi *Ijarah*;
- Amendemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas Lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK No. 16, Aset Tetap – Hasil Penggunaan yang Diintensifkan;
- Amendemen PSAK No. 22, Bisnis Kombinasi Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Kewajiban yang Timbul dari Satu Transaksi;
- Amendemen PSAK No. 57, Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, Agrikultur;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan;
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, Sewa;
- PSAK No. 74, Kontrak Asuransi;
- Pengesahan amendemen PSAK No. 74, Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 – Informasi Komparatif.

Standar baru, amendemen, revisi dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali Amendemen PSAK No. 1, Amendemen PSAK No. 16, Amendemen PSAK No. 25, Amendemen PSAK No. 46, dan Revisi PSAK No. 107 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 dan Amendemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

The new standards, amendments, and annual improvements issued, but not yet effective for the fiscal year starting on January 1, 2021, are as follows:

- Revision of PSAK No. 107, Ijarah Accounting;
- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current;
- Amendment to PSAK No. 1, Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies;
- Amendment to PSAK No. 16, Fixed Assets - Proceeds before Intended Use;
- Amendment to PSAK No. 22, Business Combinations - References to the Conceptual Framework for Financial Reporting;
- Amendment to PSAK No. 25, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors - Definition of Accounting Estimates;
- Amendment to PSAK No. 46, Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction;
- Amendment to PSAK No. 57, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract;
- Annual Improvement to PSAK No. 69, Agriculture;
- Annual Improvement to PSAK No. 71, Financial Instruments;
- Annual Improvement to PSAK No. 73, Leases;
- PSAK No. 74, Insurance Contracts;
- Endorsement of Amendment to PSAK No. 74, Insurance Contract relating to Initial Application of PSAK No. 74 and PSAK No. 71 - Comparative Information.

The above new standards, amendments, revisions, and annual improvements are effective beginning January 1, 2022, except for the Amendment to PSAK No. 1, Amendment to PSAK No. 16, Amendment to PSAK No. 25, Amendment to PSAK No. 46, and Revision of PSAK No. 107 which are effective beginning January 1, 2023, and PSAK No. 74 and Amendment to PSAK No. 74 which are effective beginning January 1, 2025, but early adoption is permitted.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amendemen, revisi dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Company is evaluating the potential impact of these new standards, amendments, revisions, and annual improvements on the Company's consolidated financial statements.

Perubahan Kebijakan Akuntansi Lainnnya
Changes in Other Accounting Policies

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi lainnya selain perubahan ISAK dan PSAK.

In 2021 there were no amendments to accounting policies other than those in ISAK and PSAK.

Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi pada Perusahaan
Impacts of the Changes in Accounting Policies on the Company

Penyesuaian Perubahan Kebijakan Akuntansi PSAK dan ISAK terhadap Laporan Keuangan
Improvements to the Changes in PSAK and ISAK Accounting Policies on Financial Statements

Implementasi dari standar-standar Akuntansi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dapat dilihat pada Laporan Keuangan Audit pada Catatan atas Laporan Keuangan No. 38.

Qualitative and quantitative implementation of the accounting standards can be found in the Audited Financial Statements in the segment of Notes to the Financial Statements No. 38.

Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Lainnya terhadap Perusahaan
Impacts of the Changes in Other Accounting Policies on the Company

Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi lainnya selain perubahan ISAK dan PSAK.

In 2021 there were no amendments to accounting policies other than those in ISAK and PSAK.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SIGNIFIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
SIGNIFICANT REGULATORY CHANGES AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi komitmen Indonesia Power dalam menjalankan operasional Perusahaan. Dalam rangka upaya pemenuhan tersebut, Indonesia Power senantiasa melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru terbit maupun yang terjadi perubahan.

Compliance with all relevant laws and regulations becomes Indonesia Power's commitment in running operations. To meet this commitment, Indonesia Power constantly observes newly issued or amended laws and regulations.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Regulatory Changes

Di tahun 2021, terdapat peraturan baru dan berubah yang berpengaruh terhadap Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

There were regulatory changes in 2021 that affected the Company:

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Change	Uraian Penyesuaian oleh Indonesia Power Description of Adjustment made by Indonesia Power
1.	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Beberapa ketentuan baru yang ditetapkan salah satunya terkait dikeluarkannya sejumlah limbah dari kelompok berbahaya dan beracun yakni limbah abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) hasil pembakaran batu bara yang saat ini berstatus sebagai limbah non-B3 serta beberapa ketentuan lingkungan lainnya.	Melakukan *review* dan kajian secara teknis terhadap pengelolaan limbah pada Perusahaan sebagaimana yang diatur pada Keputusan Direksi No. 191.K/010/IP/2019 Tentang Pengelolaan Limbah Di Lingkungan PT Indonesia Power, mengingat juga terdapat ketetapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, dimana pembuat undang-undang perlu melakukan perbaikan terkait UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Putusan MK dibacakan (sehingga Perusahaan masih dapat menetapkan/menerbitkan ketentuan atau prosedur terkait guna mengisi kekosongan hukum yang ada dengan ketentuan dikemudian hari terbit petunjuk pelaksanaan/peraturan maka kebijakan Perusahaan perlu disesuaikan).
	Government Regulation No. 22 of 2021 on Administration of Environmental Protection and Management.	Several newly stipulated provisions, including those pertaining to the production of fly ash and bottom ash (FABA) from coal combustion which are currently still considered as toxic and dangerous wastes.	To perform technical review and analysis of the Company's waste management as mandated in the Decree of the Board of Directors No. 191.K/010/IP/2019 on Waste Management in PT Indonesia Power, bearing in mind the Constitutional Court Ruling No. 91/PUU-XVIII/2020, which stipulates that lawmakers must make improvements in relation to the Job Creation Act within a period of two (2) years since the reading of the Constitutional Court Ruling (therefore, the Company will still be able to stipulate/issue relevant provisions or procedures to fill the vacant policy, provided that when a new statement of practice/regulation is issued in the future, the Company's policy must be adjusted to such statement/regulation).
2.	Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2021 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	Sebagai konsekuensi ditetapkannya Peraturan 26/2021, terdapat beberapa ketentuan dan peraturan yang berlaku sebelumnya membahas hal-hal serupa terdampak sebagai berikut: 1. Ketentuan mengenai operasi paralel yang awalnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri No. 1 tahun 2017 tentang Operasi Paralel Pembangkit Tenaga Listrik dengan Jaringan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Ketentuan ini sekarang tidak berlaku untuk penggunaan sistem PLTS atap oleh Pelanggan PLTS atap; dan 2. Peraturan Menteri No. 49 tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), sebagaimana telah diubah beberapa kali, paling baru melalui penerbitan Peraturan Menteri No. 16 tahun 2019 (Peraturan 49/2018 dan perubahannya), yang sekarang telah dicabut dan diganti.	Melakukan pembahasan terkait proyek-proyek PLTS Atap sebagai berikut: • Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) harus dipasang dan dioperasikan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan untuk memastikan keselamatan operasional dan keandalan jaringan tenaga listrik yang dimiliki oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (IUPTLU). • Pelanggan PLTS atap yang membangun dan memasang sistem PLTS atap dengan kapasitas total lebih dari 500 kW yang terhubung ke sistem instalasi daya listrik tunggal diperlukan untuk mendapatkan izin usaha untuk penyediaan daya listrik untuk kepentingan sendiri. • Sistem PLTS atap yang memiliki kapasitas total lebih dari 500 kW terhubung di seluruh sistem instalasi tenaga listrik tunggal dan total kapasitas hingga 500 kW dengan spesifikasi panel kontrol teknis yang diintegrasikan ke dalam unit tunggal, harus dicakup oleh Sertifikat Laik Operasi (SLO).

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SIGNIFIKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN
SIGNIFICANT REGULATORY CHANGES AND THEIR IMPACTS ON THE COMPANY

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Change	Uraian Penyesuaian oleh Indonesia Power Description of Adjustment made by Indonesia Power
	Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 26 of 2021 on Rooftop Solar Power Plant Connected to Electricity Network of the Permit Holder of Electricity Power Generation Business for Public Interest	As a consequence for the stipulation of the Regulation No 26 of 2021, several existing provisions and regulations on similar topic were affected, such as: 1. Provision on parallel operations which previously was stipulated under Ministerial Regulation No. 1 of 2017 on Parallel Operations of Power Plants and Electricity Network of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). The Regulation is no longer valid for the use of Rooftop SoPP by Rooftop SoPP customers; and 2. Ministerial Regulation No. 49 of 2018 on the Utilization of Rooftop Solar Power Plant System by Consumers of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), as amended for several times, lately by the issuance of the Ministerial Regulation No. 16 of 2019 (Regulation No. 49 of 2018 and its amendment), which has been revoked and replaced.	To open discussions on Rooftop SoPP projects as follows: • Solar Power Plant (SoPP) systems must be installed and operated according to the Indonesian National Standard and/or international standard and in accordance with relevant laws and regulations in order to ensure operational safety and reliability of electricity network owned by the permit holder of electricity power generation business for public interest. • Rooftop SoPP customers constructing and installing Rooftop SoPP system at a total capacity of over 500 kW which is connected to single electricity installation system must obtain business permit for electricity provision for private use. • Rooftop SoPP system with a total capacity of over 500 kW which is connected to the entire system of single electricity installation system and a total capacity of up to 500 kW with the technical control panel integrated into a single unit must be accompanied with Commissioning Certificate.
3.	Peraturan Pemerintah No. 25 2021 tentang Penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral.	Beberapa poin *highlight* ketentuan: - Penyediaan Dana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; - Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum; - Klasifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.	1. Melaksanakan kegiatan proses bisnis Perusahaan sesuai dengan arahan Pemegang Saham yang telah disesuaikan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional berdasarkan kebijakan energi nasional (periode perencanaan kebijakan energi nasional) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 2. Pemenuhan Pembangkit tenaga listrik yang dinyatakan memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik operasi. 3. Pemenuhan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk Pengoperasian dan Pemeliharaan terkait adanya klasifikasikan dalam bidang dan sub bidang Pembangkitan Tenaga Listrik.
	Government Regulation No. 25 of 2021 on	The following provisions are highlighted: - Provision of Electricity Power Generation Business Fund; - Electricity Power Generation Business for Public Interest; - Classification of Electricity-Supporting Businesses.	1. To carry out business activities as directed by the Shareholders and in accordance with the National Electricity Master Plan based on the national energy policy (national energy policy planning period) stipulated under Ministerial Regulation. 2. To provide operational-worthy power plants as proven by Commissioning Certificate. 3. To provide Electricity-Supporting Business for Operations and Maintenance in relation to classification of power generation sectors and sub-sectors.
4.	Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Berusaha Berbasis Resik.	Tata Cara dan Pembagian Kewenangan Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Pemenuhan dan Pengurusan Perizinan PT Indonesia Power sesuai proses bisnis dengan menyesuaikan Kewenangan Perizinan.
	Government Regulation No. 5 of 2021 on Administration of Risk-Based Business Permit.	The Procedures and Description of Business Permit Issuance Authority was issued by the Central and Regional Governments and in accordance with the norms, standards, procedures, and criteria set out by the Central Government.	To provide and obtain permits according to business process and in adjustment with Permit Issuance Authority.
5.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e dan huruf g sampai dengan huruf o Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan beberapa poin: - Perencanaan dan Persiapan Pengadaan; - Persiapan Pemilihan; - Pelaksanaan Pemilihan; - Penyusunan HPS; - Jaminan Pengadaan; - Metode Pemilihan; - Dsb.	PT Indonesia Power sedang melakukan *review* pada Keputusan Direksi No. 218 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan Keputusan Direksi No. 169 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi No. 218 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

No.	Nama Peraturan Name of Regulation	Keterangan Perubahan Description of Change	Uraian Penyesuaian oleh Indonesia Power Description of Adjustment made by Indonesia Power
	Regulation of National Public Procurement Agency of the Republic of Indonesia No. 12 of 2021 on Guidelines for Government Goods/Services Procurement via Providers.	To execute the provisions of Article 91 sub-article (1) letters e and g to o of the Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Procurement of Government Goods/Services as amended by Presidential Regulation No. 12 of 2021 on Amendment to Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Procurement of Government Goods/Services which contains the following items: - Procurement Planning and Preparation; - Selection Preparation; - Selection Implementation; - Owner Estimate (OE) Preparation; - Procurement Guarantee; - Selection Method; - etc.	PT Indonesia Power is currently reviewing the Decree of the Board of Directors No. 218 of 2016 on Guidelines for Goods/Services Procurement and the Decree of the Board of Directors No. 169 of 2017 on First Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 218 of 2016 on Guidelines for Goods/Services Procurement.
6.	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Mencabut Peraturan Lembaga No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2021. Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi: a. pemberian peningkatan kapasitas Pelaku Usaha; b. pemberian dukungan; c. penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa; dan d. pengenaan Sanksi Daftar Hitam.	PT Indonesia Power telah melakukan *review* pada Keputusan Direksi No. 218 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dan Keputusan Direksi No. 169 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direksi No. 218 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut: 1. Ketentuan IP masih sesuai khususnya pada penilaian kinerja juga telah tercakup sanksi tertentu. 2. Dalam hal pembinaan/pemberian peningkatan kapasitas PT IP secara rutin telah melakukan *vendor gathering*.
	Regulation of National Public Procurement Agency of the Republic of Indonesia No. 4 of 2021 on Management of Government Goods/Services Procurement Business Owners	To revoke the Regulation of National Public Procurement Agency No. 17 of 2018 on Blacklist Sanction in Government Goods/Services Procurement; this Regulation of National Public Procurement Agency is effective on May 06, 2021. The Regulation of National Public Procurement Agency has the following scope: a. provision of capacity development for Business Owners; b. provision of support; c. assessment of Goods/Services Provider's Performance; and d. imposition of Blacklist Sanction.	PT Indonesia Power has reviewed the Decree of the Board of Directors No. 218 of 2016 on Guidelines for Goods/Services Procurement and the Decree of the Board of Directors No. 169 of 2017 on First Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 218 of 2018 on Guidelines for Goods/Services Procurement, with the following outcome: 1. IP's provisions are still relevant, particularly those pertaining to performance assessment, which has accommodated certain sanctions. 2. In terms of capacity development/management, PT IP has been regularly arranging vendor gathering.
7.	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.	Yang diatur dalam Peraturan ini, meliputi: 1. Jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) beserta hak dan kewajibannya; 2. Pemutusan Hubungan Kerja beserta akibat hukumnya.	PT Indonesia Power telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 119.K/010/IP/2021 tentang Tenaga Kerja Non Pegawai yang mengatur tentang jenis-jenis tenaga kerja non pegawai di lingkungan PT Indonesia Power meliputi: 1. Konsultan perorangan; dan 2. Tenaga Alih Daya (TAD).
	Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed Term Employment Agreement, Outsourcing, Work Hours, Work Relationship and Break Time, and Termination of Employment.	The Regulation accommodates the following: 1. Types of Fixed Term Employment Agreement and their rights and obligations; 2. Termination of Employment and their legal consequences.	PT Indonesia Power has issued the Decree of the Board of Directors No. 119.K/010/IP/2021 on Non-Employee Workforce which stipulates the types of non-employee workforce within PT Indonesia Power, i.e.: 1. Individual consultant; and 2. Outsourced staff.

Dampak Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Impacts of Regulatory Changes

Dampak dari perubahan peraturan dan pemberlakuan peraturan baru di tahun 2021, Perusahaan memerlukan peninjauan terhadap proses bisnis Perusahaan pada setiap hal-hal yang terkena dampak adanya Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud. Contohnya pada ketentuan baru yang ditetapkan salah satunya terkait dikeluarkannya sejumlah

Due to the regulatory changes and enforcement of new regulations in 2021, the Company needs to review its business processes for every matter affected by such impacts. This includes, for example, newly stipulated provisions such as those pertaining to the production of fly ash and bottom ash (FABA) from coal combustion which are currently still considered as toxic and

limbah dari kelompok berbahaya dan beracun yakni limbah abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) hasil pembakaran batu bara yang saat ini berstatus sebagai limbah non-B3 serta beberapa ketentuan lingkungan lainnya. PT Indonesia Power melakukan *review* dan kajian secara teknis terhadap pengelolaan limbah pada Perusahaan sebagaimana yang diatur pada Keputusan Direksi No. 191.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Limbah Di Lingkungan PT Indonesia Power.

dangerous wastes. PT Indonesia Power performs technical review and analysis of the Company's waste management as mandated in the Decree of the Board of Directors No. 191.K/010/IP/2019 on Waste Management in PT Indonesia Power.

Selain penyesuaian yang telah dilakukan sebagaimana dalam tabel diatas, tidak terdapat dampak signifikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Apart from the above-mentioned adjustments, there were neither significant qualitative nor quantitative impacts.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Sejak awal tahun 2020, telah terjadi wabah penyakit Covid-19 di seluruh dunia, yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* - WHO) sebagai pandemi. Pandemi sangat mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan jasa dan rantai pasokan.

Since early 2020, Covid-19 outbreak has been occurring around the world, rendering it announced as a pandemic by the World Health Organization (WHO). The pandemic highly affects, among others, the global demands for products and services and supply chains.

Di saat yang sulit ini, Perusahaan terus berupaya mempertahankan kegiatan operasional dan terus berfokus untuk tetap efisien serta melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan. Tim kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3LH) di lapangan dan di Jakarta telah menerapkan langkah-langkah pencegahan maupun prosedur kesehatan yang harus dipatuhi setiap karyawan, termasuk peningkatan perilaku higienis, larangan perjalanan non esensial, penerapan jarak fisik di tempat kerja, identifikasi kelompok risiko tinggi di Perusahaan, dan sedapat mungkin bekerja dari rumah untuk para karyawan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Setiap unit bisnis telah menyiapkan rencana manajemen krisis dan menyiapkan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Amid these difficult times, the Company strives to maintain its operational activities and focus on being efficient while protecting the safety and security of its employees. The occupational health, safety, and environment (OHSE) teams on site and in Jakarta have implemented precautions and health procedures all employees must obey, including the intensification of hygienic behavior, restriction of non-essential travels, physical distancing at work, identification of high-risk groups in the Company, and work from home (WFH) for employees not directly involved in production activities. Every business unit has prepared crisis management plan and necessary precautionary measures.

Prioritas pertama adalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan pemasok Perusahaan. Beberapa kegiatan utama yang telah Perusahaan lakukan pada masa pandemi ini, meliputi antara lain:

a. Menjalankan program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna memastikan kesehatan karyawan.
b. Memberikan arahan dan dukungan kepada karyawan.
c. Memantau dengan cermat kapasitas infrastruktur dan keamanan kegiatan operasional.
d. Mengikuti arahan dari Pemerintah dan organisasi kesehatan.
e. Senantiasa melayani dan melibatkan pelanggan dan pemasok.
f. Mengembangkan rencana Perusahaan sebagaimana diperlukan.

Perusahaan telah melakukan penilaian atas dampak kejadian ini terhadap rencana operasi dan bisnis Perusahaan. Berdasarkan penilaian yang dilakukan di atas, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Perusahaan sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi Covid-19 dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi Perusahaan.

The Company's main priorities are the health, safety, and welfare of the employees, customers, and suppliers. The Company's main activities during the pandemic cover:

a. Implementing promotional, preventive, curative, and rehabilitative programs to ensure the health of the employees.
b. Providing directives and support to employees.
c. Performing careful monitoring of the infrastructure capacity and security of the operational activities.
d. Following directives from the Government and health authorities.
e. Serving and engaging customers and suppliers.
f. Developing Company plans as required.

The Company has assessed the impacts of this event on its operational and business plans. Based on such assessment, the Management found that there are no material uncertainties that will bring significant loss to the Company's business and operations as of the finalization date of the consolidated financial statements. The Management will continue monitoring the progress of the Covid-19 pandemic and take necessary measures pertaining to its impact on the Company's business, financial position, and operational output.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN

IMPACT OF PRICE CHANGE ON THE COMPANY'S PERFORMANCE

Pendapatan penjualan tenaga listrik diakui berdasarkan energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PT PLN (Persero) dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Formula tarif mencakup perhitungan komponen harga kapasitas, harga tetap operasi dan pemeliharaan, harga bahan bakar, tingkat pasokan energi serta variabel lainnya. Pada kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir faktor signifikan yang mempengaruhi pendapatan dan laba Perusahaan adalah perubahan harga energi primer.

Revenues from the sale of electricity are assessed based on the volume of electricity (kWh) supplied to PT PLN (Persero) using the tariff formulated in the power purchase agreement. The tariff formula includes the calculation of capacity price, fixed price for operations and maintenance, fuel price, energy supply level, and other variables. In the past two (2) years, change in primary energy price has been the significant factor affecting the Company's revenue and profit.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
IMPACT OF PRICE CHANGE ON THE COMPANY'S PERFORMANCE

Perubahan Harga Energi Primer
Change in Primary Energy Price

Dalam rangka memastikan ketersediaan dan kecukupan energi primer dalam kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit, Indonesia Power mengupayakan diperolehnya energi primer dengan harga yang lebih kompetitif sehingga harga satuan kalor menjadi lebih rendah dan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik yang dihasilkan kompetitif. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan merit order pembangkit sehingga dapat mendukung sustainability pembangkit dalam jangka panjang. Perubahan harga energi primer sangat mempengaruhi besaran BPP mengingat porsinya mencapai 60%-70% dari BPP.

In order to ensure the availability and sufficiency of primary energy to meet the qualitative and quantitative demands for power plants, Indonesia Power seeks to obtain primary energy at a more competitive price. It aims at reducing energy unit price and achieving more efficient power plant production cost. It is expected to contribute to the improvement of merit order of the power plants, in order to sustain the power plants in the long run. The change in primary energy price highly affects production cost, given its portion that is 60-70% of the production cost.

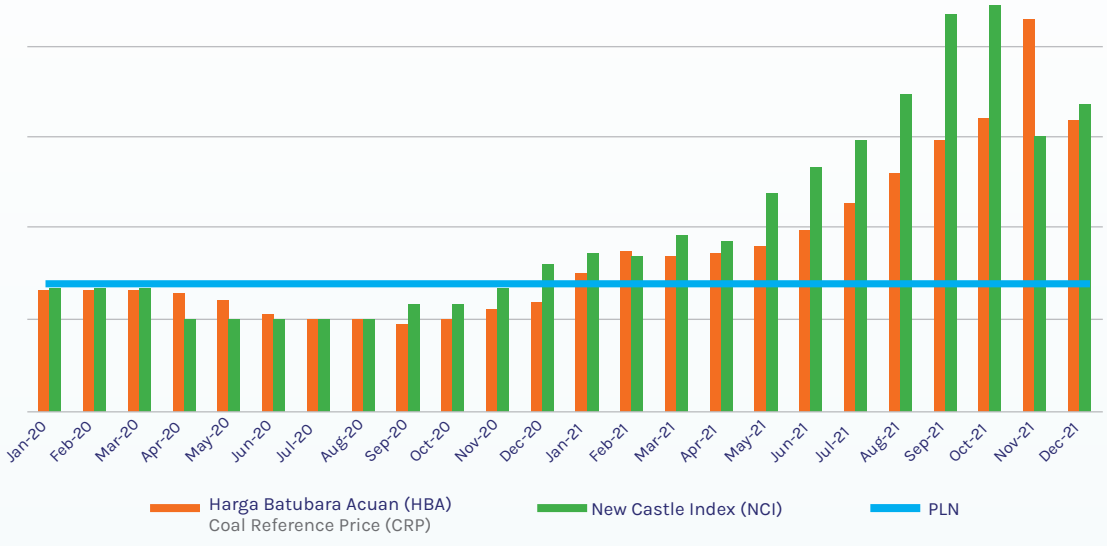
Biaya penyediaan batubara untuk pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar US$70/MT berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021, dimana harga batubara di market jauh di atas US$70/MT bahkan pada bulan Oktober 2021 mencapai puncak tertingginya yaitu sebesar U$D223/MT.

The cost for supplying coal for electricity generation for public interest was set at US$70/MT under the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 139.K/HK.02/MEM.B/2021, in which the market price for coal was far above US$70/MT, reaching its peak of U$D223/MT in October 2021.

Kondisi ini kemudian memicu krisis pasokan batubara yang terjadi sepanjang tahun 2021 hampir di seluruh PLTU PLN Group, sehingga berimbas terhadap penurunan level persediaan batubara hingga < 5 HOP di beberapa PLTU dan juga peningkatan konsumsi bahan bakar gas serta bahan bakar minyak untuk menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan.

The condition was triggering the coal supply crisis which took place throughout 2021 in almost all SPPs of PLN Group, which resulted in the decline in coal supply level to <5 HOP in several SPPs, as well as the increase in gas and oil fuel consumption in order to maintain the reliability of electricity system.

Grafik *Trend* Harga Batubara Tahun 2020 - 2021 (US$/MT)
Chart of Coal Price Trend in 2020-2021 (US$/MT)



Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan batubara PLTU, Indonesia Power melakukan beberapa upaya, antara lain:

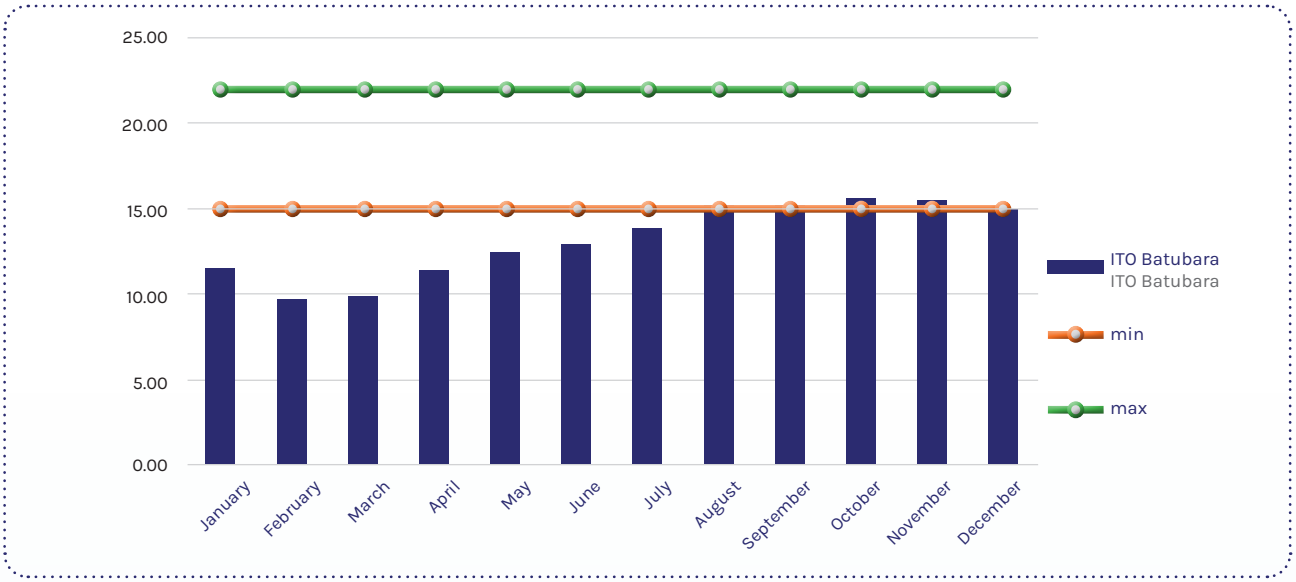
1. Melakukan penambahan pasokan batubara melalui anak perusahaan yaitu PT Artha Daya Coalindo.
2. Melakukan penambahan pasokan dari mitra pemasok *existing*.
3. Melakukan kontrak *spot* batubara.
4. Berkoordinasi dengan Divisi Batubara PT PLN (Persero), Minerba, ESDM, RJK, DitJen Gatrik dan instansi terkait lainnya, untuk memenuhi kebutuhan batubara PLTU PLN Group melalui pengetatan regulasi *Domestic Market Obligation* (DMO).

As an endeavor to cover the needs for coal at SPPs, Indonesia Power carried out the following:

1. Increasing coal supply through PT Artha Daya Coalindo.
2. Increasing coal supply from existing vendors.
3. Establishing coal spot contract.
4. Coordinating with the Division of Coal of PT PLN (Persero); Directorate General of Mineral and Coal of the Ministry of Energy and Mineral Resources; RJK of Directorate General of Electricity, and other relevant institutions to meet PLN Group's SPP coal demands by tightening the regulation on Domestic Market Obligation (DMO).

Trend Inventory Turn Over (ITO) Batubara Tahun 2021

Coal Inventory Turnover (ITO) Trend in 2021



Sedangkan, sebagai bentuk antisipasi terhadap perubahan harga beli energi primer non-batubara pada tahun 2021 yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi penurunan harga *Midstream, Surveyor* dan Transportir Bahan Bakar Minyak (BBM).
2. Negosiasi yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Interim *Agreement* harga diskon Uap untuk PLTP Kamojang 1,2,3.
3. Skenario pengambilan *Liquefied Natural Gas* (LNG) dengan metode baru (*Breakbulking* dari Jawa Satu Power).
4. Pengendalian operasi untuk menghindari terkena harga *excess*, harga *surcharge* dan *Take or Pay* (TOP).
5. Negosiasi peniadaan *Standby Letter of Credit* (SBLC).
6. Negosiasi penurunan atau peniadaan TOP dan Ship or Pay (SOP).
7. Negosiasi Pengambilan Make Up Uap PLTP Darajat.
8. Pemanfaatan BBM *Idle*.
9. Pengadaan kontrak gas baru, serta perpanjangan atau amandemen perjanjian gas.

Meanwhile, the anticipatory measures for the changes in the purchase price of non-coal primary energy in 2021 were as follows:

1. Negotiation to get cheaper price of oil fuel midstream, surveyor, and transporter.
2. The negotiation was followed by the issuance of Interim Agreement on Steam Discount Price for GPP Kamojang 1, 2, and 3.
3. Scenario of Liquefied Natural Gas (LNG) extraction using new method (Breakbulking from Jawa Satu Power).
4. Operation control to avoid excess price, surcharge price, and Take or Pay (TOP).
5. Negotiation to omit Standby Letter of Credit (SBLC).
6. Negotiation to reduce or omit Take or Pay (TOP) and Ship or Pay (SOP).
7. Negotiation to extract steam makeup from SPP Darajat.
8. Utilization of idle oil fuel.
9. Procuring new gas contracts and renewing or making amendments to gas contracts.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

Kelangsungan Usaha
Business Continuity

Terkait dengan kewajiban, Indonesia Power mampu memenuhi seluruh kewajiban baik kewajiban dalam aspek keuangan maupun non-keuangan sehingga tidak mengalami hambatan signifikan terkait kelangsungan usaha. Secara keuangan, penilaian kelangsungan usaha dapat dibuktikan dengan opini auditor independen oleh Akuntan Publik PWC dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2022 mendapatkan opini "wajar dalam semua hal yang material".

In terms of liability, Indonesia Power is capable of meeting its entire liabilities, both in the financial and non-financial aspects, hence allowing the Company to retain streamlined business continuity. In terms of finance, the business continuity assessment can be proven by the opinion of independent auditor(s) from Public Accounting Firm PWC and Public Accountant Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan on the Financial Statements for Fiscal Year 2021, with the opinion "fair in all material respects".

Asumsi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Assumptions

Kelangsungan usaha Indonesia Power dipertimbangkan atas dasar faktor internal dan eksternal yang signifikan. Indonesia Power berada pada posisi "*Hold & Maintain*" sehingga dirumuskan 2 (dua) strategi yang dapat dilaksanakan, yaitu:

1. **Strategi *Market Penetration***
   Market penetration merupakan strategi yang dapat dilakukan Perusahaan untuk meningkatkan *market share* atas produk dan jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan saat ini. Untuk dapat meningkatkan *market share* atas bisnis penjualan tenaga listrik dan jasa O&M yang saat ini dilakukan oleh Perusahaan, maka Perusahaan perlu melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan daya saing pembangkitnya agar selalu mendapatkan *dispatch* untuk dioperasikan dan disalurkan kepada PLN. Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam pengelolaan O&M pembangkit, Perusahaan harus melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dimilikinya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan jasa O&M yang diberikan.
2. **Strategi *Product Development***
   Product development merupakan suatu strategi untuk meningkatkan penjualan melalui peningkatan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan saat ini atau mengembangkan produk dan jasa yang baru. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan pada bisnis penjualan tenaga listrik dan disisi lain terbukanya peluang *captive market* di bisnis ketenagalistrikan, maka Perusahaan harus mulai mengembangkan inovasi-inovasi produk dan jasa baru yang dapat meningkatkan pendapatan bagi Perusahaan.

The business continuity of Indonesia Power is assessed based on significant internal and external factors. Indonesia Power is currently at the position of "Hold and Maintain", and therefore two (2) following actionable strategies are formulated:

1. **Market Penetration Strategy**
   Market penetration is a strategy actionable for increasing the market share of products and services currently produced by the Company. To increase the market share of electricity sales and O&M services currently provided, the Company needs to make efforts to increase the competitiveness of its power plants in order to get the dispatch for operations and distribution to PLN. To increase customer trust in power plant O&M management, efforts must be taken to enhance the capacity and capability of human capitals at hand, in order to improve the provided O&M services.
2. **Product Development Strategy**
   Product development aims to increase sales by improving the quality of products and services currently produced, in addition to developing new products and services. With strict competition in electricity sale business and good prospect in electricity captive market, the Company must start developing new product and service innovations in order to gain more revenues.

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

Prospek Perekonomian Dunia
Global Economic Outlook

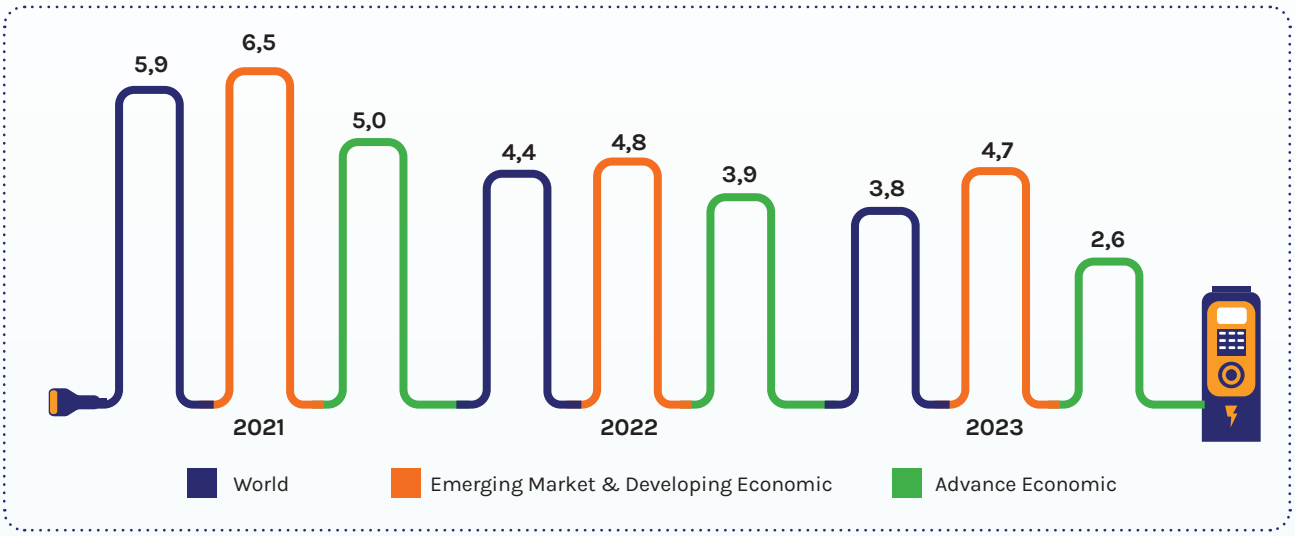
International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022 berada di kisaran 4,4% yoy, atau lebih rendah 0,5% dari perkiraan pada Oktober 2021. Penurunan perkiraan pertumbuhan pada tahun ini tak lepas dari berkembangnya varian baru Covid-19, yaitu varian Omicron yang menyebabkan beberapa negara kembali menerapkan restriksi. Selain karena pandemi Covid-19, penurunan perkiraan pertumbuhan ekonomi ini juga didorong oleh peningkatan harga komoditas dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan peningkatan inflasi. Kondisi di beberapa negara juga mengakibatkan adanya normalisasi kebijakan moneter yang kemudian akan mempengaruhi stabilitas keuangan, terutama di negara ekonomi berkembang karena menyebabkan hengkangnya dana asing.

Lebih lanjut, IMF lebih optimistis akan prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Pada tahun 2023, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia ada di kisaran 3,8% yoy, atau meningkat 0,2% poin dari perkiraan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun dari 5,6% di 2021, menuju 4,0% di 2022, dan 2,6% di 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok adalah 8,1%, 4,8% dan 5,2%, sedangkan di Eropa sebesar 5,2%, 3,9%, dan 2,5%. India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 9,0% di 2021 dan 9,0% di 2022, dan kemudian mengalami moderasi menjadi 7,1% di 2023.

The International Monetary Fund (IMF) has reduced the projected global economic growth for 2022 to 4.4% yoy, which is 0.5% lower than the October 2021 estimation. The reduction in this year's estimated growth was contributed by the development of Covid-19's new variant, Omicron, which forced several countries to reintroduce restrictions on travel. In addition to the Covid-19 pandemic, the economic growth projection was also based on the increase in commodity price and disruption in supply chain resulting in increased inflation. Situations in several countries have also triggered monetary policy normalization which in turn will affect financial stability, particularly in economically developing countries, as it causes foreign investors pulling out of the country.

Further, the IMF grows optimistic about the future economic outlook. By 2023, the IMF estimates the global economy will growth at 3.8%, which increases 0.2% of the previous estimate. The US economic growth is predicted to decline from 5.6% in 2021 to 4.0% in 2022 and 2.6% in 2023. For the same period, China's economic outlook will see 8.1%, 4.8%, and 5.2% consecutively, while Europe's economic growth is predicted at 5.2%, 3.9%, and 2.5%. India is predicted to grow rapidly by 9.0% in 2021 and 9.0% in 2022 and moderated to 7.1% in 2023.

Tren Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)
Trend of Global Economic Growth Outlook (%)



Sumber: IMF, *World Economic Outlook Update*, 25 Januari 2021
Source: IMF, World Economic Outlook Update, January 25, 2021

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

Prospek Perekonomian Indonesia
Indonesian Economic Outlook

Proses pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2022 diprakirakan berlanjut meski peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron perlu diwaspadai. Sejumlah indikator ekonomi hingga Februari 2022 tercatat tetap baik, antara lain penjualan eceran, ekspektasi konsumen, dan *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur, di tengah perbaikan mobilitas masyarakat yang melandai. Dengan perkembangan itu, perekonomian domestik diprakirakan tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7-5,5% pada tahun 2022.

The national economic recovery is predicted to continue in 2022, although the spread of Covid-19 Omicron variant is one to watch for. As of February 2022, a number of economic indicators such as retail sales, consumer expectation, and Manufacture Purchasing Managers' Index (PMI) are well maintained amid the flattening curve of the public mobility improvement. Based on the development, the domestic economy is estimated to grow higher, to 4.7%-5.5% in 2022.

Inflasi pada tahun 2022 diprakirakan terkendali dalam sasaran 3,0%±1% sejalan dengan masih memadainya sisi penawaran dalam merespon kenaikan sisi permintaan, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

The inflation is estimated to be controlled at the targeted range of 3.0%±1%, due to offer's sufficiency in responding to increased demands, controlled inflation expectation, and Rupiah exchange rate stability.

Sumber: Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter, Januari 2021
Source: Bank Indonesia, Tinjauan Kebijakan Moneter, January 2021

Prospek Industri Listrik Indonesia
Indonesian Power Industry Outlook

Prospek industri listrik Indonesia didukung oleh beberapa aspek yakni politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum.

Indonesia's power industry outlook is supported by political, economic, social, technological, environmental, and legal aspects.

Aspek Politik
Political Aspect

1. Peluang untuk masuk ke dalam pasar global, seiring dengan pencanangan target BUMN GO GLOBAL oleh Kementrian BUMN untuk memperkenalkan BUMN di Pasar Global.
2. Peluang untuk memanfaatkan penelitian berbasis ekonomi sirkuler yang dikembangkan oleh Pemerintah dengan memanfaatkan sisa kegiatan ekonomi seperti *Waste to Energy*.
3. Peluang untuk mendukung program hilirisasi produk batubara yang dicanangkan Pemerintah.
4. Peluang untuk mendukung 5 prioritas riset nasional EBT yang dicanangkan Pemerintah, yaitu pengembangan bahan bakar nabati, PLT Biogas, PLTP skala kecil, pengembangan baterai dan teknologi nuklir.
5. Adanya ancaman terhadap kepemilikan aset karena Kementerian BUMN berencana melakukan pembentukan *Holding* PLTU milik PLN yang sudah tidak efisien.

1. Opportunity to penetrate the global market, in line with the declaration of 'BUMN GO GLOBAL' target by the Ministry of SOEs to introduce Indonesia's State-Owned Enterprises to the global market.
2. Opportunity to use circular economy-based research developed by the Government by utilizing economic residuals, such as Waste-to-Energy.
3. Opportunity to support the downstreaming of coal products declared by the Government.
4. Opportunity to support five (5) national NRE research priority declared by the Government, i.e. development of biofuel, biogas power plant, small-scaled GPP, battery, and nuclear technology.
5. Threats against asset holding as the Ministry of SOEs is planning to establish PLN's SPP Holding which is no longer efficient.

Aspek Ekonomi
Economic Aspect

Peluang untuk meningkatkan investasi di bidang EBT karena BPP pembangkit EBT semakin kompetitif dibandingkan fosil dan investasi di bidang EBT diproyeksikan terus meningkat.

Opportunity to boost investments in NRE sector, as the production cost for NRE power plants is increasingly competitive and investment in NRE sector is predicted to continue developing.

Aspek Sosial
Social Aspect

Peluang untuk menjaga keandalan pembangkit yang ada saat ini dan juga meningkatkan kapasitas listrik yang dimiliki dan dikelola Perusahaan karena konsumen listrik terus bertambah akibat dari peningkatan *trend* elektrifikasi.

Opportunity to maintain the reliability of existing power plants while expanding the capacity of electricity owned and managed by the Company, bearing in mind the increasing number of electricity consumers due to higher electrification trend.

Aspek Teknologi
Technological Aspect

1. Terdapat peluang untuk melakukan inovasi teknologi pembangkitan, dengan, dengan memanfaatkan teknologi baru, seperti *thorium molten salt reactor, battery electric vehicle, battery energy storage system, wind turbine, solar photo voltaic, smart grid, hydrogen fuel cell,* teknologi *carbon captured storage.*
2. Terdapat peluang untuk memanfaatkan perkembangan teknologi digital pada semua aspek bisnis dan produksi energi listrik.
3. Terdapat peluang untuk meningkatkan peran pembangkit eksisting karena meningkatnya kebutuhan pembangkit yang *fast respond*, seiring meningkatnya juga pembangkit *variable renewable energy.*

1. Opportunity to innovate in power generation sector by utilizing new technology such as thorium molten salt reactor, battery electric vehicle, battery energy storage system, wind turbine, solar photovoltaic, smart grid, hydrogen fuel cell, and carbon captured storage.
2. Opportunity to utilize digital technology development in all business aspects and electricity production.
3. Opportunity to enhance the role of existing power plants due to increasing demand for fast-response power plants, along with the increase in the number of variable renewable energy-based power plants.

Aspek Lingkungan
Environmental Aspect

Terdapat peluang untuk pengembangan pembangkit EBT dan merubah pembangkit energi fosil dengan menggunakan EBT seperti *biomassa, biodiesel,* biogas, dan lain-lain seiring dengan dicanangkannya target *Net Zero Emission* pada tahun 2060.

Opportunity to develop NRE power plants and modify fossil fuel-fired power plants into NRE-based, such as using biomass, biodiesel, biogas, and other NRE fuel, in line with the net-zero emission target by 2060.

PROSPEK USAHA
BUSINESS OUTLOOK

Aspek Hukum
Legal Aspect

1. Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2017 menugaskan PLN dan Anak Perusahaan untuk menyelenggarakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK). Hal ini merupakan peluang bagi Perusahaan, sebagai salah satu anak perusahaan PLN, untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
2. Pemerintah menargetkan porsi bauran energi pembangkit listrik pada tahun 2025 terdiri dari EBT minimum 23%, gas sekitar 22%, batubara 55% dan BBM sekitar 0,1%, sebagaimana tertuang pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038. Kebijakan ini menjadi peluang bagi Perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangkit dengan menggunakan EBT.
3. Adanya rencana Pemerintah untuk menerapkan pajak karbon yang tertuang pada perluasan obyek PPN yang diatur dalam RUU No. 6 Tahun 1983, sehingga menuntut pengelolaan pembangkit yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi pembangkit.
4. Terdapat peraturan pemerintah terkait tingkat komponen dalam negeri untuk PLTS, yaitu pada Permen Perindustrian No. 04/M-IND/PER/2/2017.
5. Terdapat Permen ESDM No. 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*) yang mengatur sustansi penegakan pelaksanaan *grid code* oleh seluruh pemakai jaringan dan pelaksanaan investigasi atas ketidakpatuhan yang akan berdampak pada keandalan sistem.
6. Terdapat Permen KLHK No. 15 Tahun 2019 tentang baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal dan PP No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. The Government, under Presidential Regulation No. 14 of 2017, gives mandate to PLN and its subsidiaries to perform the Acceleration of Electricity Infrastructure Development. This is an opportunity for the Company, a subsidiary of PLN, to contribute to the electricity infrastructure development.
2. The Government's target of energy mix for 2025 consists of NRE at minimum 23%, gas by around 22%, coal by 55%, and oil fuel by 0.1%, as contained in the National Electricity Master Plan 2019-2038. The policy opens an opportunity for the Company to contribute to establishing NRE-based power plants.
3. The Government's plan to impose carbon tax as contained in Vat object expansion as accommodated in Bill No. 6 of 1983, which demands better power plant management for efficiency boost.
4. Enforcement of regulation on the level of domestic components for SoPP, i.e. Regulation of the Minister of Industry No. 04/M-IND/PER/2/2017.
5. Enforcement of Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 20 of 2020 on Rules on Electricity System Network (Grid Code), which stipulates the substance for the enforcement of the Grid Code to all network users and the implementation of investigation of non-compliance, in the hope of improving system reliability.
6. Enforcement of Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 15 of 2019 on Thermal Power Plant Emission Quality Standard and Government Regulation No. 22 of 2021 on Administration of Environmental Protection and Management.

Prospek Usaha Indonesia Power

Indonesia Power's Business Outlook

Operation and Maintenance Excellence, Low Carbon Energy Development dan Beyond kWh Business Development merupakan tema strategis Perusahaan untuk mencapai visi Perusahaan yang tumbuh berkelanjutan. Tema startegis tersebut selaras dengan *Sustainability Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB, terutama SDG No. 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), No. 9 (Infrastruktur, Industri dan Inovasi), dan No. 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Selanjutnya terkait penjelasan SDGs akan diuraikan lebih rinci pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Operations and Maintenance Excellence, Low Carbon Energy Development, and Beyond kWh Business Development are the Company's strategic themes to realize the vision of sustainable growth. These strategic themes are in line with the United Nation's Sustainability Development Goals (SDGs), particularly Goal No. 7 (Affordable and Clean Energy), Goal No. 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure), and Goal No. 13 (Climate Action). Further elaboration of the SDGs will be provided in the Chapter of Corporate Social Responsibility of this Annual Report.

Hingga usia yang ke 26 tahun, Perusahaan telah bergerak di bidang bisnis Pembangkit listrik, kepemilikan IPP oleh Anak Perusahaan, Jasa O&M, serta bisnis lainnya terkait dengan solusi energi, dimana pendapatan Perusahaan didominasi dari penjualan tenaga listrik melalui pembangkit yang dimiliki Perusahaan (*Asset Owner Power Plant*). Untuk terus meningkatkan pertumbuhan dan mempertahankan *sustainability*, Perusahaan melakukan *Shifting Strategy and Innovation Focus* melalui pengembangan proses bisnis, kapabilitas dan kapasitas SDM, serta teknologi yang telah dimiliki saat ini untuk dapat terus mengelola pembangkit listrik yang andal dan efisien, menghasilkan pembangkit baru yang hijau, bersih dan ramah lingkungan, serta penambahan portofolio bisnis baru di luar penjualan tenaga listrik, sebagai respon atas keunggulan dan tantangan bisnis di masa mendatang.

In its 26th year of operation, the Company has been engaging in power generation business, IPP holding by subsidiaries, O&M services, and other energy solution businesses, in which the Company's revenues are dominated by electricity sales via asset owner's power plants. To continue increasing growth and maintaining sustainability, the Company shifts strategies and focuses on innovations by developing business process, human capital capabilities and capacity, and existing technology in order to manage efficient and reliable power plants, establish new green and clean power plants, and expand business portfolio beyond electricity sales, in response to future business challenges and advantages.

Untuk mencapai hal tersebut, Perusahaan menyusun rencana pengembangan bisnis baru di luar penjualan tenaga listrik, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini, dimana pengembangan bisnis dilakukan dengan berbasis kepada kompetensi inti Perusahaan dan dikembangkan melalui inovasi untuk menghasilkan produk dalam rangka menangkap peluang dan menghadapi tantangan bisnis di masa mendatang.

To accomplish the goal, the Company prepares new business plan beyond electricity sales as shown in the image below, based on its core competency and innovative development to produce products that are capable of capturing the opportunities and facing future business challenges.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Penguatan penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan sepanjang tahun 2021, merupakan salah satu strategi Indonesia Power dalam upaya membangun bisnis secara berkelanjutan sekaligus mempertahankan kepercayaan segenap pemangku kepentingan di tengah pemulihan pasca pandemi Covid-19.

The strengthening of Good Corporate Governance throughout 2021 became another strategy for Indonesia Power to build a sustainable business while maintaining trust of all stakeholders amid the post-pandemic recovery.

KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN PRAKTIK TERBAIK *CORPORATE GOVERNANCE*

COMMITMENT TO IMPLEMENTING THE BEST CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

Selaras dengan upaya Perusahaan untuk terus meningkatkan pencapaian bisnisnya, Indonesia Power juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan dan menerapkan kualitas Tata Kelola Perusahaan tetap terjaga dengan baik meskipun dalam masa pandemi Covid-19. Indonesia Power percaya bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan landasan dalam meraih pencapaian kinerja yang baik dalam jangka panjang serta melindungi kepentingan dan menambah nilai kepada para pemangku kepentingan. Setiap organ tata kelola menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Indonesia Power juga senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada setiap kebijakan, pedoman, serta perangkat pendukung GCG secara berkala.

In alignment with the effort to enhance business performance, Indonesia Power strengthens its commitment to continuously improving and implementing good corporate governance, albeit facing the COVID-19 pandemic. Indonesia Power believes that Good Corporate Governance implementation is a foundation to deliver a satisfactory performance in the long run, in addition to protecting interests and adding values to the stakeholders. Every governance organ runs its functions and duties in compliance with the Company's policies and applicable and supported laws and regulations. All policies, guidelines, and supporting tools of the GCG are periodically reviewed and enhanced.

Pada tahun 2021, sebagai hasil dari komitmen Perusahaan dalam penerapan praktik terbaik GCG, Perusahaan kembali mendapatkan apresiasi dalam ajang TOP GRC Awards atas keberhasilan pengelolaan manajemen risiko. Dalam ajang tersebut Indonesia Power meraih 4 Gelar dengan **Level Bintang Lima, TOP *Leader The Most Committed GRC Leader* 2021, *The High Performing Board of Commissioners on* GRC 2021** dan kategori khusus, yaitu ***Special Appreciation on Applications to support* GRC *Implementation.***

In 2021, as a result of the commitment to implementing the best GCG practices, Indonesia Power once again received recognition during the TOP GRC Awards, for its success in risk management practices. During the event, the Company received four (4) accolades, i.e. **Five-Star Level, TOP Leader - The Most Committed GRC Leader 2021, The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021,** and **Special Appreciation on Applications to Support GRC Implementation.**

Berbagai pencapaian lainnya yang diperoleh Perusahaan atas implementasi GCG sepanjang tahun 2021 terangkum dalam penjelasan di bawah ini.

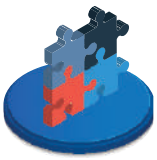
The appreciations for GCG implementation throughout 2021 are summed in the following.



Sertifikasi ISO 37001:2016
ISO 37001:2016 Certification

Hasil Audit *Surveillance* yang telah dilakukan, Indonesia Power berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001:2016 untuk penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

The Surveillance Audit held resulted in Indonesia Power maintaining the ISO 37001:2016 Certification for Anti-Bribery Management System (ABMS) implementation.



Penilaian Penerapan GCG
GCG Implementation Assessment

- Penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap penerapan GCG tahun 2021 memperoleh skor 95,51% ("Sangat Baik").
- Mendapatkan Skor 95,88 dengan Kategori "*Very Good*" pada *Self Assessment* GCG Berbasis ASEAN *Corporate Governance Scorecard.*

- The self-assessment of GCG implementation in 2021 scored 95.51% ("Very Good").
- Scored 95.88 with "Very Good" category in ASEAN Corporate Governance Scorecard-based GCG Self-Assessment.



Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK
KPK's Gratification Control Program

Memperoleh skor 100 dalam kegiatan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang dilakukan oleh KPK, khususnya penilaian terhadap perangkat PPG, implementasi PPG dan hasil implementasi PPG.

Indonesia Power scored 100 during the Gratification Control Program evaluation held by KPK, particularly for assessment on Gratification Control Program tools, implementation, and implementation result.

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Basis of Corporate Governance Implementation

Dalam mengembangkan infrastruktur dan implementasi prinsip-prinsip GCG, Indonesia Power memastikan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola telah mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan perubahannya Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN;

In developing corporate governance infrastructure and implementing Corporate Governance principles, Indonesia Power ensures that these principles have been referring to the following applicable provisions:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on Implementation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises and its amendment, the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012;
3. Decree of the Secretary to the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 on Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises;

KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN PRAKTIK TERBAIK *CORPORATE GOVERNANCE*
COMMITMENT TO IMPLEMENTING THE BEST CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

4. Surat Kementrian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 Tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di BUMN;
5. ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
6. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
7. Anggaran Dasar Perusahaan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
8. Peraturan dan Kebijakan Perusahaan.

Berbagai ketentuan tesebut secara sederhana dirangkum ke dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang sesuai dengan nilai dan budaya Perusahaan, sehingga diharapkan dapat mempermudah setiap unsur yang ada di Indonesia Power untuk memahami dan menerapkan GCG dengan baik.

4. Letter of the Ministry of SOEs No. S-17/S.MBU/02/2020 on ISO 37001 Anti-Bribery Management System (ABMS) Certification in State-Owned Enterprises;
5. ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF);
6. Indonesian GCG Code issued by the National Committee for Governance Policies (KKNG);
7. Company Articles of Association and General Meeting of Shareholders (GMS) Resolutions;
8. Company Regulations and Policies.

These various terms are summarized in the GCG Code that is in accordance with the Company's values and culture. This allows all personnel of Indonesia Power to understand and implement GCG properly.

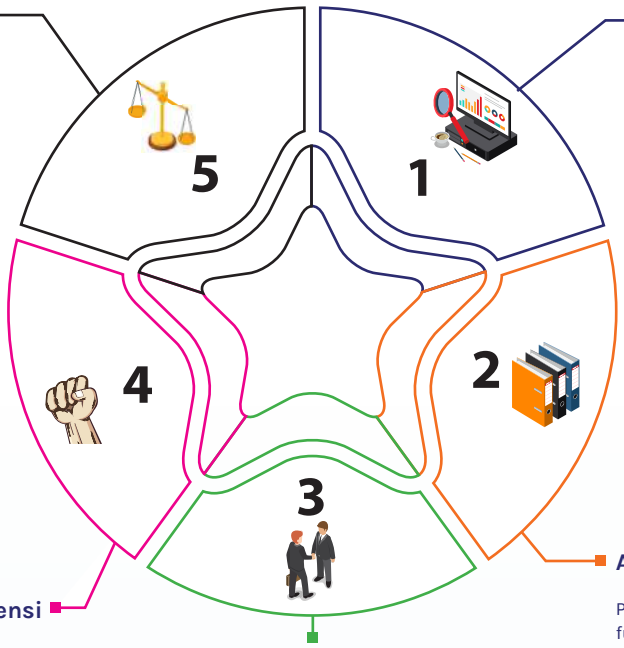


Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Principles

Indonesia Power berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara sistematis dan konsisten agar dapat memacu perkembangan bisnis Perusahaan, akuntabilitas serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan Pemegang Saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Indonesia Power menempatkan prinsip-prinsip dan kebijakan GCG sebagai pedoman bagi seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasional di lingkup Perusahaan.

Indonesia Power is committed to fully implementing GCG principles in systematic and consistent manners, so as to promote business development, enhance accountability, and create sustainable added value for the Shareholders in the long run without overlooking other stakeholders. Indonesia Power uses GCG principles and policies to guide Company Personnel in running business and operational activities.



Kewajaran

Perusahaan tidak melakukan tindakan diskriminatif, serta menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fairness
The Company does not discriminate and guarantees the protection of the rights of the Shareholders and stakeholders in compliance with the applicable laws and regulations.

Transparansi

Perusahaan menjamin ketersediaan akses informasi yang relevan secara akurat dan tepat waktu kepada para Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Transparency
The Company guarantees the availability of accurate, correct, and relevant information for all Shareholders and other stakeholders.

Akuntabilitas

Perusahaan telah mengatur kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dari masing-masing organ Perusahaan sehingga seluruh kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat dipertanggung-jawabkan

Accountability
The Company has made clear the function, structure, system, and accountability of each Company organ, so that all business and operational activities within the Company are run effectively, efficiently, and accountably.

Responsibilitas

Perusahaan senantiasa patuh terhadap ketentuan perundangundangan yang berlaku dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis dan operasionalnya sehari-hari guna terciptanya iklim bisnis yang sehat dan kondusif.

Responsibility
The Company always complies with the applicable laws and regulations in running daily business and operational activities in order to create a sound and favorable business environment.

Independensi

Perusahaan memastikan bahwa pelaksanaan tugas, kewajiban serta wewenang dari masing-masing organ Perusahaan senantiasa berjalan dengan baik tanpa ada intervensi dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independence
The Company ensures that the execution of duties, responsibilities, and authorities of each Company organ is streamlined without intervention from any parties that do not comply with the applicable laws and regulations.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA DI LINGKUP PERUSAHAAN

DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN THE COMPANY

Sepanjang tahun 2021, komitmen Indonesia Power dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, tercermin dalam berbagai program dan aktivitas Perusahaan yang secara konsisten menerapkan prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan, sebagaimana berikut:

Indonesia Power's commitment to implementing Good Corporate Governance in 2021 was reflected in a number of programs and activities which consistently applied the corporate governance principles and practices as follow:

Penyempurnaan Kebijakan, Pedoman dan Perangkat Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Policy, Code, and Tool Improvement

Perusahaan melakukan peninjauan dan pemutakhiran atas perangkat kebijakan dan pedoman GCG yang dimiliki, agar terus memiliki relevansi terhadap perkembangan Perusahaan maupun perkembangan regulasi yang berlaku. Pada tahun 2021, Indonesia Power melakukan pemutakhiran terhadap Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 112.K/010/IP/2021 tanggal 24 November 2021 serta Kebijakan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.045.K/010/IP/2021 dan No.008. SK/DEKOM-IP/2021 Tanggal 10 Mei 2021. Kedua pedoman dan kebijakan ini merupakan penyempurnaan terhadap kebijakan dan pedoman yang telah dimiliki sebelumnya.

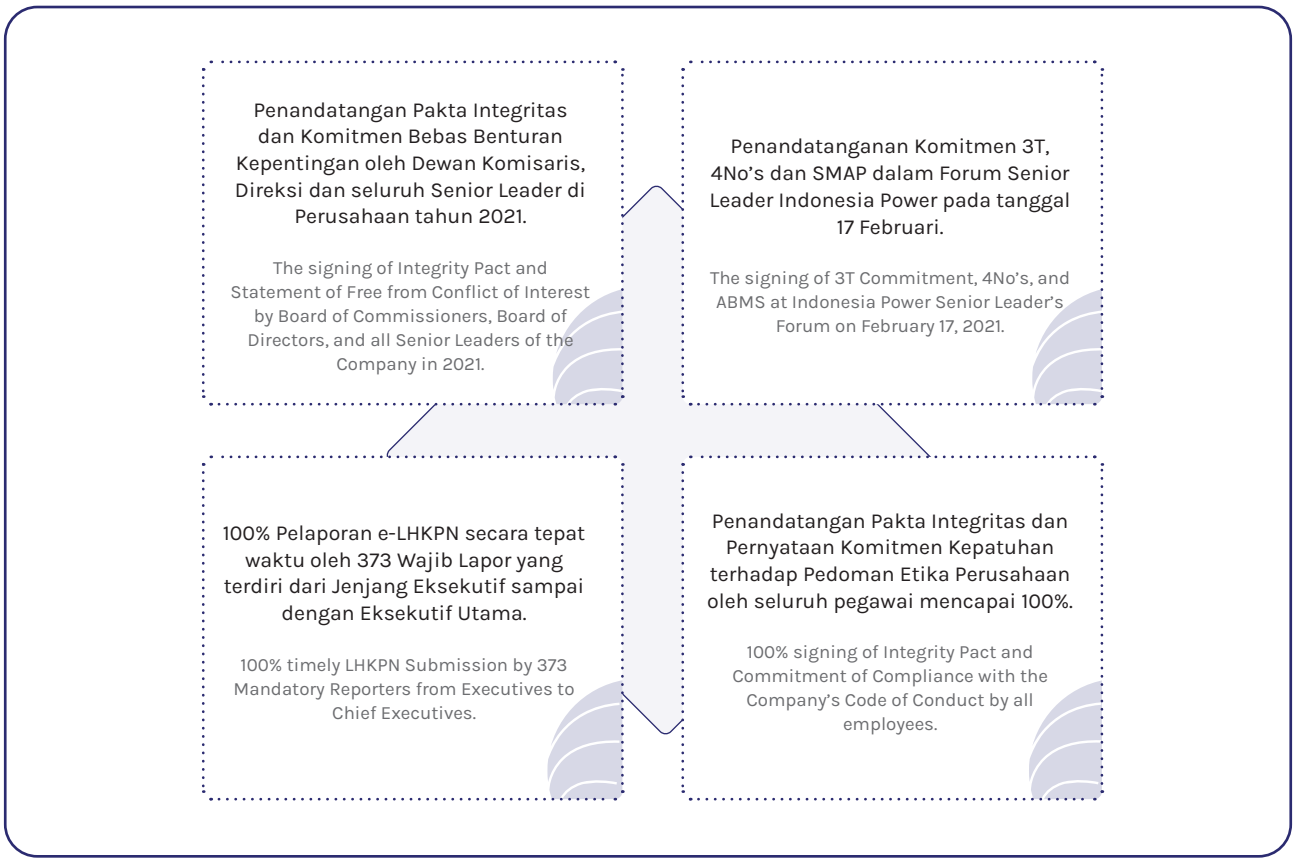
The Company periodically reviews and updates its policies, codes, and tools to maintain their relevance with the Company's development and currently applicable regulations. In 2021 Indonesia Power updated the State Official Wealth Report (LHKPN) Submission Guidelines which has been ratified by the Decree of the Board of Directors No. 112.K/010/IP/2021 dated November 24, 2021 and Policy on the Implementation of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) which was ratified by Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Numbers 045.K/010/IP/2021 and 008.SK/DEKOM-IP/2021 dated May 10, 2021. These guidelines and policies are the improved versions of the previous policies and guidelines.

Deklarasi Komitmen Insan Indonesia Power pada Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Indonesia Power Personnel's Declaration of Commitment to Corporate Governance Implementation

Segenap jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan serta seluruh pegawai Indonesia Power mendeklarasikan komitmen untuk menegakkan penerapan GCG melalui penandatanganan pernyataan komitmen penerapan GCG secara berkala.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees of Indonesia Power have declared their commitment to upholding GCG implementation by signing periodical statement of GCG implementation commitment.



Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dissemination of Corporate Governance Implementation

Untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, Perusahaan melakukan sosialisasi terhadap prinsip GCG dan perangkatnya kepada seluruh pegawai di setiap jenjang organisasi. Pada tahun 2021, kegiatan sosialisasi dilakukan terhadap seluruh kebijakan, pedoman dan perangkat GCG melalui Aplikasi Pro GCG. Sosialisasi kepada pegawai juga dilakukan secara langsung bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan penandatanganan Komitmen 3T, 4No's dan SMAP di Forum Senior Leader Indonesia Power yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2021 serta sosialisasi melalui penyampaian materi briefing *Code of Conduct* terkait Benturan Kepentingan yang dilakukan pada bulan Agustus 2021.

To continue improving GCG implementation quality, the Company disseminates GCG principles and tools to all employees at every organizational level. The dissemination on GCG policies, codes, and tools was performed through Pro GCG application in 2021. Direct dissemination was also held alongside the dissemination and signing of 3T Commitment, 4No's, and ABMS at Indonesia Power Senior Leader's Forum on February 17, 2021 as well as the distribution of the Code of Conduct briefing materials concerning Conflict of Interest in August 2021.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA DI LINGKUP PERUSAHAAN
DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN THE COMPANY

Selain kepada pegawai, Indonesia Power juga memberikan sosialisasi GCG Perusahaan kepada Mitra Kerja melalui pelaksanaan *vendor gathering* pada tanggal 23 Desember 2021. Fokus sosialisasi yang disampaikan adalah terkait Komitmen 4T "Tidak Suap, Tidak Gratifikasi, Tidak *Fraud*, Tidak *Luxurious Hospitality*" serta terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejalan dengan diperolehnya sertifikat ISO 37001:2016. Untuk masyarakat luas, sosialisasi GCG dilakukan melalui *website* dan media sosial, diantaranya terkait keberadaan *Whistleblowing System* (WBS) dan SMAP.

In addition to the employees, the GCG implementation was also disseminated to Work partners during vendor gathering on December 23, 2021. The dissemination was focused on 4T Commitment of "Tidak Suap, Tidak Gratifikasi, Tidak Fraud, Tidak Luxurious Hospitality" (No Bribery, No Gratification, No Fraud, No Luxurious Hospitality) and the Anti-Bribery Management System (ABMS) upon the receipt of ISO 37001:2016 certificate. For the public in general, the dissemination of, for example, Whistleblowing System (WBS) and ABMS was performed through official website and social media.



Audit *Surveillance* Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Surveillance Audit of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification

Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) merupakan upaya Perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang bersih dari praktik korupsi. Pada tahun 2021, melalui kegiatan Audit *Surveillance* SMAP SNI ISO 37001:2016 yang dilakukan pada tanggal 9-11 Juni 2021, Indonesia Power berhasil mempertahankan Sertifikasi SMAP Berbasis ISO 37001:2016 yang telah diperoleh tahun 2020. Keberhasilan Perusahaan dalam mempertahankan Sertikasi tersebut menunjukan bahwa Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk memperkuat penerapan kebijakan anti korupsi di lingkungan Perusahaan.

Implementing Anti-Bribery Management System (ABMS), the Company aims to deliver a clean governance. Indonesia Power successfully maintained the ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management System (ABMS) (first received in 2020) following the Surveillance Audit held on June 09-11, 2021. This demonstrates that the Company is highly committed to strengthening the anti-bribery policy implementation internally.

Penjelasan lebih lanjut terkait penerapan SMAP di Indonesia Power dijelaskan secara lengkap dalam Bab Tata Kelola Perusahaan bagian Peningkatan Penerapan SMAP Berkelanjutan.

Further elaboration on ABMS implementation at Indonesia Power is available in the Chapter of Corporate Governance, Section of Improvement of Sustainable ABMS Implementation.

Survei Perilaku Etis

Ethical Conduct Survey

Pada tahun 2021 Indonesia Power kembali melakukan Survei Perilaku Etis untuk mengukur penerapan Prinsip GCG di Perusahaan berdasarkan dimensi TARIF dan Proses Kerja, diantaranya Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness. Hasil Indeks Survei Perilaku Etis tahun 2021 bertahan dalam kategori "*HIGH*" dengan perolehan skor sebesar 81%. Hal ini menunjukan bahwa seluruh pegawai Perusahaan telah menampilkan perilaku yang mendukung berjalannya GCG dalam menyelesaikan pekerjaan.

In 2021, Indonesia Power held another Ethical Conduct Survey to measure the effectiveness of GCG principles implementation according to the dimensions of TARIF and Work Process, which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness. The result of the Ethical Conduct Survey 2021 remained in "High" category, with the score of 81%. This shows that all employees have demonstrated the behavior that is supporting the run of GCG in their job.

Sinergi Indonesia Power Bersama Anak Perusahaan Dalam Penerapan GCG

Indonesia Power's Synergy with Subsidiaries in GCG Implementation

Indonesia Power bersinergi dengan Anak Perusahaan untuk memperkuat penerapan GCG di lingkup Perusahaan, yakni melalui kegiatan penyelarasan terhadap kebijakan, pedoman dan perangkat GCG. Indonesia Power juga secara rutin melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip dan struktur pelaksanaan GCG di Anak Perusahaan, termasuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil *assessment* GCG Anak Perusahaan.

Indonesia Power synergizes with the subsidiaries in strengthening GCG implementation within the Company, i.e. by aligning the GCG policies, codes, and tools. Indonesia Power also regularly evaluates the implementation of GCG principles and structures in subsidiaries, including monitoring the follow-up on recommendations resulted from GCG assessment in the subsidiaries.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA DI LINGKUP PERUSAHAAN
DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN THE COMPANY

Pada tahun 2021, PT Cogindo DayaBersama sebagai salah satu Anak Perusahaan berhasil meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Hal ini merupakan salah wujud sinergi penguatan GCG yang telah dilakukan Indonesia Power dan anak Perusahaan, khususnya terkait realisasi Komitmen Anti Penyuapan di lingkup Perusahaan.

In 2021, PT Cogindo DayaBersama, a subsidiary of Indonesia Power, received ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Certification. This is a result of the synergy between Indonesia Power and its subsidiaries, particularly pertaining the manifestation of Anti-Bribery Commitment within the Company.

Pencapaian *Roadmap* Penerapan GCG 2021
Achievement of GCG Roadmap 2021

Untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, Indonesia Power telah menetapkan tahapan Roadmap GCG 2019-2023 yang diselaraskan dengan perencanaan strategis dalam implementasi GCG secara berkelanjutan. Tahapan *Roadmap* GCG ini menjadi panduan bagi penerapan GCG di Perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan menuju pencapaian Indonesia Power menjadi *Group Corporate Citizenship* di tahun 2023. *Roadmap* tata kelola Indonesia Power tahun 2019 hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:

To improve the quality of GCG implementation according to Company vision and mission, Indonesia Power has established the GCG Roadmap 2019–2023 according to the strategic planning of sustainable GCG implementation. The GCG Roadmap helps guiding consistent and sustainable GCG implementation in the Company, towards Group Corporate Citizenship by 2023. The GCG Roadmap 2019–2023 contains the following:



Sejalan dengan *roadmap* tata kelola yang telah disusun, sepanjang tahun 2021 Peusahaan telah melakukan berbagai kegiatan penguatan infrastruktur GCG di Anak Perusahaan dalam upaya mencapai "*Beyond Compliance* Indonesia Power Group, GRC *Implemented* di Anak Perusahaan dan *Subsidiary Governance*" antara lain:

- Memberikan arahan dan pendampingan kepada Anak Perusahaan untuk menyusun Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) yang selaras dengan Indonesia Power;
- Memberikan arahan dan pedoman kepada Anak Perusahaan untuk menyusun dan melakukan penilaian kinerja Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
- Memberikan arahan kepada Anak Perusahaan untuk meningkatkan implementasi GCG dengan menerapkan dan menyempurnakan kebijakan, pedoman dan perangkat GCG, diantaranya terkait Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Pelaporan Harta Kekayaan (LHKPN) serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

In line with the GCG Roadmap, in 2021 the Company performed GCG infrastructure strengthening at subsidiaries to achieve Indonesia Power Group's beyond Compliance, GRC Implemented at Subsidiaries, and Subsidiary Governance through the following activities:

- Providing directives and assistance to subsidiaries in preparing Board Manual that conforms to Indonesia Power;
- Providing directives and guidance to subsidiaries in preparing and assessing Board of Commissioners performance assessment in subsidiaries;
- Providing directives to subsidiaries in improving GCG implementation by applying and enhancing GCG policies, codes, and tools concerning Gratification Control, Conflict of Interest, State Official Wealth Report (LHKPN) Submission, and Anti-Bribery Management System (ABMS).

Penilaian Penerapan GCG
Assessment of GCG Implementation

Indonesia Power secara berkala melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG dengan melakukan penilaian baik oleh pihak internal maupun eksternal dengan menggunakan beberapa parameter yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

Indonesia Power periodically evaluates the implementation of GCG principles through internal and external assessment based on several nationally- and internationally-recognized parameters.

Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan SK-16/S-MBU/2012
GCG Implementation Assessment According to SK-16/S-MBU/2012

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran kualitas penerapan GCG, Perusahaan melakukan penilaian secara berkala. Pada tahun 2021, pelaksanaan asesmen GCG di Perusahaan dilakukan secara internal melalui penilaian mandiri (*self assessment*) dan telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta. Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012, yaitu:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi;
6. Aspek lainnya.

To observe and have an idea of the quality of GCG implementation, the Company performs periodical assessment. The internal GCG assessment was held in 2021 through self-assessment which has been verified by the Finance and Development Supervisory Agency of DKI Jakarta Representative. The assessment and evaluation was performed using measurement tools that comprise six (6) aspects with the predetermined weights as set out in the Copy of Decree of the Secretary to the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012, i.e.:

1. Commitment to sustainable Good Corporate Governance implementation;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Disclosure of information and transparency;
6. Other aspects.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA DI LINGKUP PERUSAHAAN
DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN THE COMPANY

Pencapaian skor asesmen GCG tahun 2021 adalah sebesar 95,51% dengan kualifikasi "Sangat Baik". Berikut capaian hasil asesmen penerapan GCG yang dilakukan secara *self assessment* pada tahun 2021:

The GCG assessment in 2021 scored 95.51% at "Very Good" category. The GCG self-assessment resulted in the following:

Hasil Penilaian *Assessment* GCG Tahun 2021
Result of GCG Assessment 2021

No.	Aspek *Governance* Governance Aspect	Bobot Weight	Capaian Achievement		Penjelasan Description
			Skor Score	(%)	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Corporate Governance Implementation	7,00	6.89	98.43	Sangat Baik Very Good
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	8.24	91.56	Sangat Baik Very Good
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	33.06	94.46	Sangat Baik Very Good
IV	Direksi Board of Directors	35,00	33.38	95.37	Sangat Baik Very Good
V	Pengungkapan Informasi dan Transparasi Disclosure of Information and Transparency	9,00	8.94	99.33	Sangat Baik Very Good
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	5.00	100.00	Sangat Baik Very Good
Total		**100,00**	**95.51**	**95.51**	**Sangat Baik** **Very Good**

Rekomendasi Hasil Penilaian dan Alasan Belum/Tidak Diterapkannya
Recommendations of the Assessment Result and Reason for No Follow-up

Rekomendasi	Recommendations	Rencana Tindaklanjut atas Rekomendasi	Follow-up Plans on Recommendations
Pemegang Saham dan RUPS / Pemilik modal agar membuat kebijakan yang menetapkan ketentuan Jenis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas	Shareholders and GMS/ Capital Owners are to prepare a policy that defines the type of concurrent position of the Board of Commissioners/ Supervisory Board	Menambahkan Kebijakan Penetapan Jenis Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dalam *Subsidiary Governance*	To add a policy that defines the types of concurrent position of the Board of Commissioners in the Subsidiary Governance
Memastikan kegiatan monitoring tindak lanjut terkait hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan kebijakan	To ensure that the monitoring of follow-up on recommendations from Board of Commissioners resolutions, recommendations, and directives has complied with applicable policies	Memasukkan Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Keputusan, Rekomendasi dan Arahan Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi	To include the report of the monitoring of the follow-up on the resolutions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners in BOC/BOD Joint Meetings
Melaksanakan evaluasi/ penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas	To evaluate/assess the effectiveness of internal control at entity level	Melakukan Evaluasi atas Efektivitas Pengendalian Intern pada Tingkat Entitas	To evaluate the effectiveness of internal control at entity level

Rekomendasi	Recommendations	Rencana Tindaklanjut atas Rekomendasi	Follow-up Plans on Recommendations
Melakukan kajian sumber daya terkait dengan implementasi program kemitraan dengan usaha kecil	To review resources for the implementation of partnership program with small entrepreneurs	Usulan kepada Group of Corporate Communication Perusahaan untuk melakukan kajian sumber daya terkait dengan program kemitraan dengan usaha kecil	To suggest to the Group of Corporate Communication to perform review on resources for the implementation of partnership program with small entrepreneurs
Melampirkan Pakta Integritas untuk setiap usulan Tindakan Direksi yang perlu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan /atau Persetujuan RUPS / Pemilik Modal	To attach Integrity Pact for every proposed BOD Actions requiring recommendations from BOC/Supervisory Board and/or approval from GMS/ Capital Owners	Membuat prosedur usulan tindakan Direksi yang perlu mendapatkan Rekomendasi Dewan Komisaris atau Persetujuan RUPS	To prepare the procedures for filing proposal for BOD Actions requiring BOC recommendation or GMS approval

ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Penilaian atas implementasi praktik tata kelola di Perusahaan, juga dilakukan melalui asesmen GCG berdasarkan parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS). Kriteria penilaian ACGS terdiri dari 5 (lima) aspek meliputi Hak-Hak Pemegang Saham (*Rights of Shareholders*), Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham (*Equitable Treatment of Shareholders*), Peran Pemangku Kepentingan (*Role of Stakeholders*), Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*), serta Tanggung Jawab Dewan (*Responsibilities of the Board*).

The GCG implementation in the Company is also assessed using the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS). The ACGS covers five (5) criteria, i.e. Rights of Shareholders, Equitable Treatment to Shareholders, Role of Stakeholders, Disclosure and Transparency, and Responsibilities of the Board.

Pada tahun 2021, penilaian ACGS dilakukan secara *self assessment* dengan didampingi oleh PT Adikarya Gemilang Solusindo selaku pihak independen. Skor hasil penilaian ACGS yang diperoleh tahun 2021 adalah sebesar 95,88 dengan klasifikasi kualitas penerapan GCG "*Very Good*". Pencapaian hasil GCG Indonesia Power berdasarkan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* tahun 2021 adalah sebagai berikut:

In 2021, the ACGS-based self-assessment was assisted by PT Adikarya Gemilang Solusindo as independent party. The ACGS assessment 2021 scored 95.88, with the GCG implementation quality classification of "Very Good". Indonesia Power's GCG assessment score based on the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2021 was as follows:

Area		Bobot Weight	Skor Skor	% Capaian % Achievement
Level 1				
A.	*Rights of Shareholders*	10,00	9,38	93,75%
B.	*Equitable Treatment of Shareholders*	15,00	12,50	83,33%
C.	*Role of Stakeholders*	10,00	9,23	92,31%
D.	*Disclosure and Transparency*	25,00	21,15	84,62%
E.	*Responsibilities of The Board*	40,00	30,63	76,56%
	Level 1 Sub-Total	**100,00**	**82,88**	**82,88%**

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA DI LINGKUP PERUSAHAAN
DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN THE COMPANY

Area		Bobot Weight	Skor Skor	% Capaian % Achievement
Level 2				
	Bonus	30,00	13,00	43,33%
	Penalty	(65,00)	-	0,00%
	Level 2 Sub-Total	**30,00**	**13,00**	**43,33%**
Skor Keseluruhan Overall Score		**130,00**	**95,88**	**73,76%**
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Classification			**Very Good**	

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE, POLICY, AND MECHANISM

Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam penerapan GCG, Indonesia Power telah menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola Perusahaan guna memastikan penerapan GCG dapat berjalan efektif melalui pembagian peran, tugas dan tanggung jawab secara jelas. Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan.

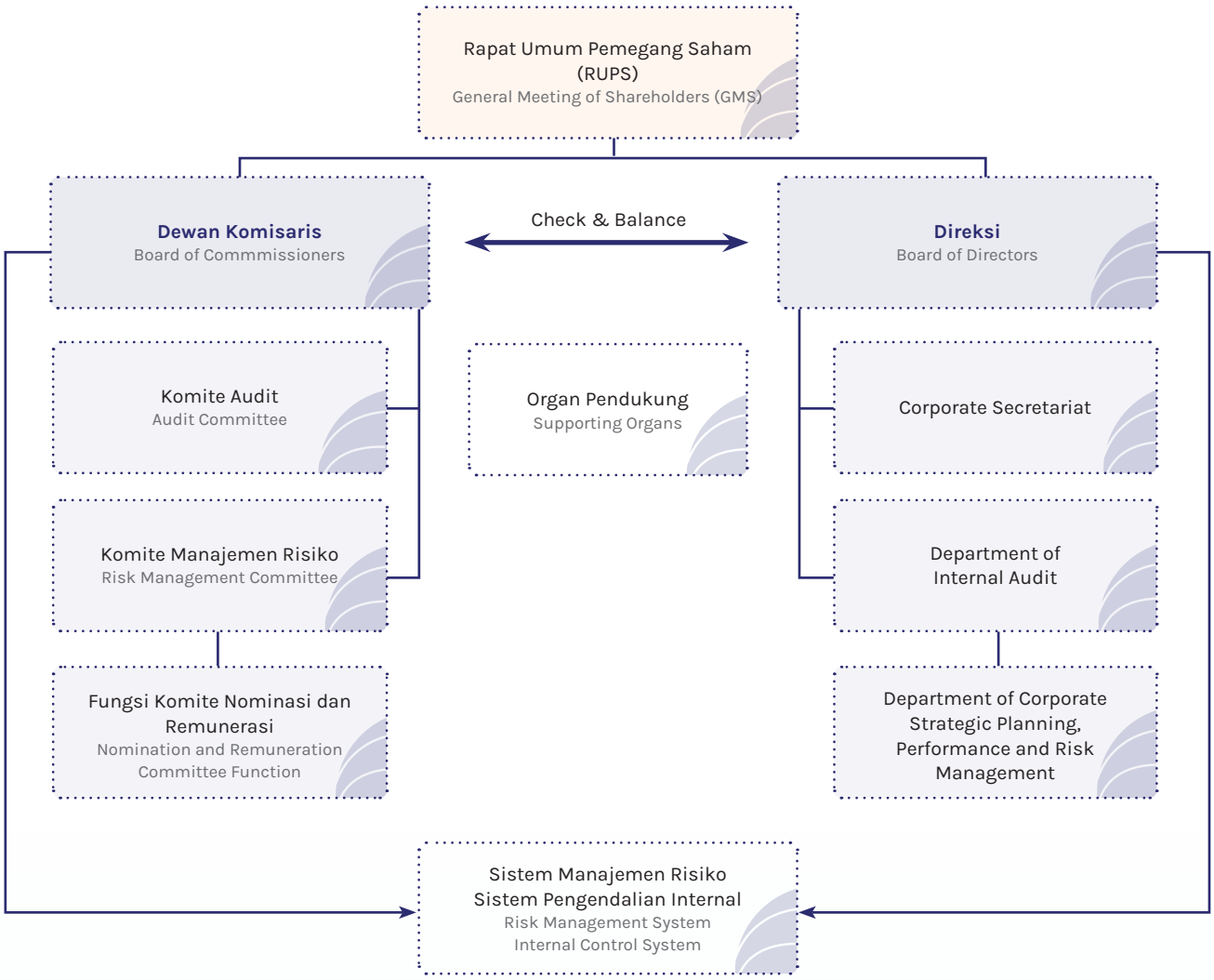
In accordance with the commitment to implementing GCG, Indonesia Power has defined the corporate governance structure and mechanism that ensure effective GCG implementation through clear description of roles, duties, and responsibilities. Corporate governance is practiced systematically and steadily, allowing GCG principles being referred to in every business activity.

Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Organ Structure

Organ tata kelola Perusahaan dibentuk untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Pembentukan organ pendukung ini dilakukan sebagai bagian dari pembagian wewenang yang jelas dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG secara efektif. Struktur tata kelola Indonesia Power terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung. Organ Utama Perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam kegiatan operasional, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk organ pendukung untuk membantu kelancaran tugasnya.

Corporate governance organs exist to support the implementation of Good Corporate Governance principles, allowing a systematic and structured practice. These supporting organs were established in the effort of conducting clear division of duties for effective GCG principles implementation. Indonesia Power governance structure consists of Main and Supporting Organs. The Main Organs include General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. In the Company's operations, the Board of Commissioners and the Board of Directors establish supporting organs to help streamlining their duties.



Kebijakan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Policy on Corporate Governance Implementation

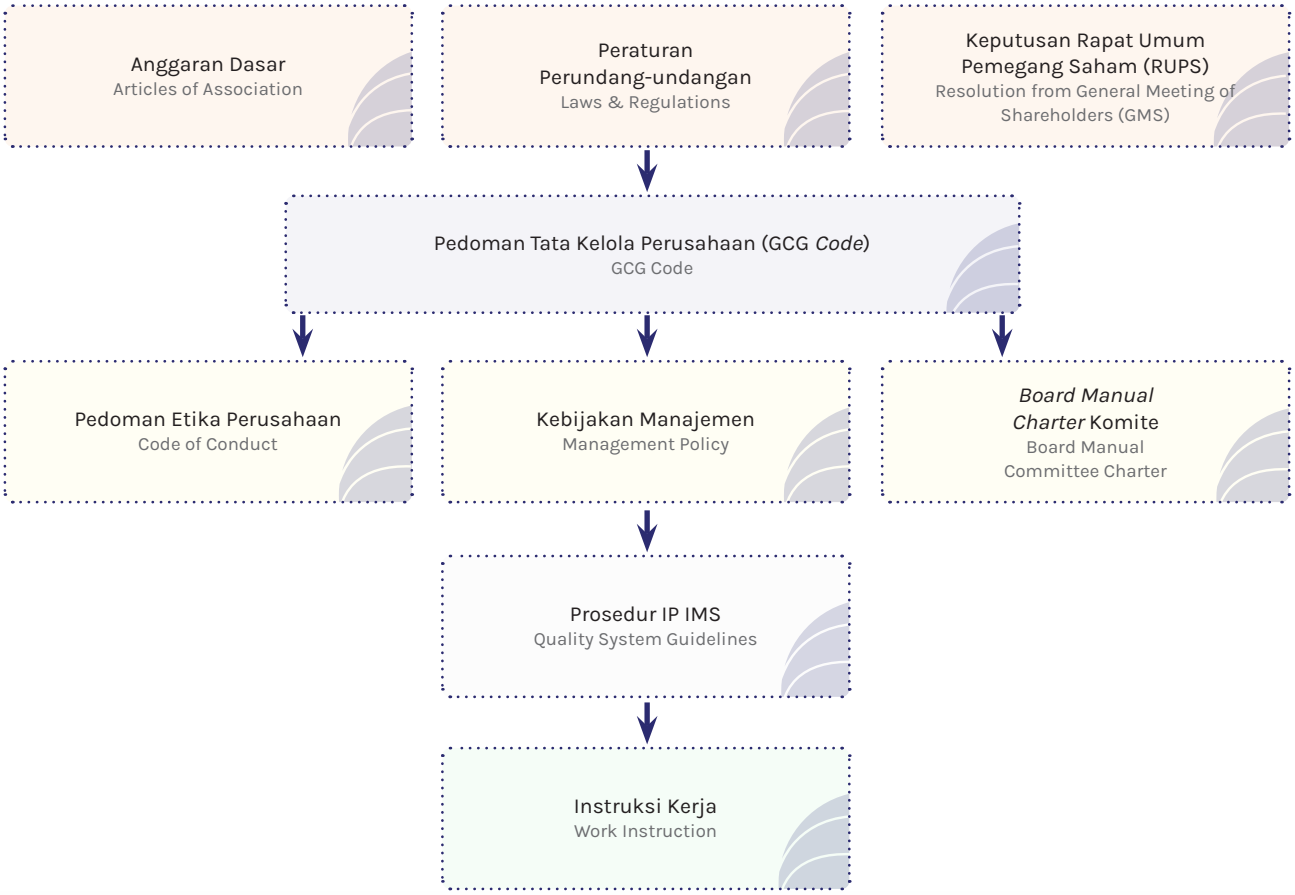
Dalam mendukung penerapan GCG di Perusahaan, Indonesia Power telah menyusun dan menetapkan berbagai perangkat kebijakan yang telah disepakati secara bersama-sama oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Perangkat kebijakan ini mengatur pelaksanaan hubungan kerja seluruh Organ Tata Kelola di lingkungan Perusahaan, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Perangkat kebijakan tata kelola Indonesia Power terdiri dari lima level kebijakan sebagai berikut:

To support GCG implementation internally, Indonesia Power has devised and established policy tools that are agreed upon by the Board of Commissioners and the Board of Directors. They regulate the working relations among the Company's Governance Organs by referring to the Articles of Association and/or applicable laws and regulations.

Indonesia Power governance policy consists of five policy levels as follows:

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE, POLICY, AND MECHANISM



Untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Indonesia Power telah menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan, antara lain:

In sustainably bettering the governance implementation, Indonesia Power has prepared and implemented some policies that are in line with our GCG principles, i.e.

Kebijakan dan Pedoman Policy and Code	Keterangan	Description
Pedoman Tata Kelola Perusahaan (GCG *Code*) GCG Code	Merupakan arahan strategis Direksi dan Dewan Komisaris dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai Perusahaan, Visi dan Misi yang menjadi acuan dalam mengelola Perusahaan. GCG *Code* pertama kali disusun pada tahun 2002, yang kemudian mengalami penyempurnaan beberapa kali, dan terakhir diperbarui pada tahun 2019 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 178.K/010/IP/2019 dan 006.SK/DEKOM-IP/2019 tanggal 26 Juni 2019.	Strategic directives from the Board of Directors and Board of Commissioners for the implementation of GCG principles, Company values, Vision, and Mission as the reference for the Company management. The GCG Code was first established in 2002, and later amended for several times, lastly in 2019 as set out in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Numbers 178.K/010/IP/2019 and 006.SK/DEKOM-IP/2019 dated June 26, 2019.

Kebijakan dan Pedoman Policy and Code	Keterangan	Description
Pedoman Etika Perusahaan Code of Conduct	Menjadi acuan Perusahaan dalam melakukan interaksi di antara manajemen, pegawai serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan nilai dan budaya Perusahaan serta prinsip-prinsip GCG. Perusahaan telah menyusun Pedoman Etika Perusahaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 179.K/010/IP/2019 dan 007.SK/DEKOM-IP/2019 Tanggal 27 Juni 2019.	The reference for interactions between the Management, the employees, and the stakeholders according to the desired Company values and culture and the GCG principles. The establishment of the Code of Conduct is set out in the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors Numbers 179.K/010/IP/2019 and 007.SK/DEKOM-IP/2019 dated June 27, 2019.
Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Board Manual	Seperangkat petunjuk tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual)* disahkan melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 051.K/010/IP/2020 dan 005.SK/DEKOM-IP/2020 Tanggal 20 Maret 2020.	A set of procedures for the Board of Commissioners and the Board of Directors in implementing their respective duties and obligations. The Board Manual was ratified by the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Numbers 051.K/010/IP/2020 and 005.SK/DEKOM-IP/2020 dated March 20, 2020.
Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) Whistleblowing System (WBS) Policy	Perusahaan mengimplementasikan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) dalam rangka mencegah terjadinya tindak kecurangan dengan melaporkan kejadian perilaku pelanggaran serta mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan. Pedoman pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 250.K/010/IP/2019 dan 020.SK/DEKOM-IP/2019 tanggal 13 Desember 2019.	The Whistleblowing System (WBS) is adopted to prevent any fraud within the Company. Any violation shall be reported in order to promote a culture of honesty and transparency. The Whistleblowing System guidelines in the Company refer to the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors Numbers 250.K/010/IP/2019 and 020.SK/DEKOM-IP/2019.
Pedoman Benturan Kepentingan Conflict of Interest Code	Indonesia Power telah menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) yang disahkan melalui Keputusan Direksi Nomor 018.K/010/IP/2020 tanggal 11 Februari 2020. Pedoman tersebut bertujuan agar potensi benturan kepentingan tersebut ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sehingga tetap menjunjung tinggi etika dan praktik bisnis yang sehat, mencegah kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.	Indonesia Power has established the Conflict of Interest Code which was ratified by the Decree of the Board of Directors Number 018.K/010/IP/2020 dated February 11, 2020. The Code aims to address potential conflicts of interest in accordance with Good Corporate Governance principles thus maintaining ethical and sound business practices while preventing fraud and other irregularities.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam menciptakan perusahaan yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi dan gratifikasi, Indonesia Power menetapkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang disahkan melalui Keputusan Direksi No. 019.K/010/IP/2020 tanggal 11 Februari 2020.	To realize our commitment to creating a clean company without corruption and gratification, Indonesia Power has established the Gratification Control Guidelines which were ratified by the Decree of the Board of Directors No. 019.K/010/IP/2020 dated February 11, 2020.
Pedoman Penerapan Tata Kelola *Governance, Risk and Compliance* (GRC) Governance, Risk, and Compliance (GRC) Guidelines	Pedoman dan acuan dalam penerapan Tata Kelola, Risiko dan Kepatuhan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, pertumbuhan dan keberlanjutan Perusahaan. Pedoman ini disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 213.K/010/IP/2019 tanggal 30 Oktober 2019.	Guidelines for Governance, Risk, and Compliance that aim at improving the effectiveness, efficiency, growth, and sustainability of the Company. These guidelines were ratified by the Decree of the Board of Directors Number 213.K/010/IP/2019 dated October 30, 2019.

STRUKTUR, KEBIJAKAN DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE, POLICY, AND MECHANISM

Kebijakan dan Pedoman Policy and Code	Keterangan	Description
Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) State Official Wealth Report (LHKPN) Submission Guidelines	Pemenuhan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel salah satunya diwujudkan melalui kewajiban wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kebijakan tentang kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN tertuang dalam Keputusan Direksi Nomor 112.K/010/IP/2021 tanggal 24 November 2021.	The implementation of transparent and accountable corporate governance is among others fulfilled through the obligation to submit the State Officials Wealth Report (LHKPN). The policy on compliance with mandatory LHKPN submission was ratified by the Decree of the Board of Directors No. 112.K/010/IP/2021 dated November 24, 2021.
Kebijakan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Policy on ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation	Komitmen Perusahaan untuk menjalankan usaha dengan berintegritas, jujur, beretika dan tidak memberikan toleransi pada korupsi dan suap mengacu kepada Pemenuhan Klausul dalam SNI ISO 37001:2016. Pada tahun 2021 Indonesia Power telah mengesahkan Kebijakan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.045.K/010/IP/2021 dan No.008.SK/DEKOM-IP/2021 Tanggal 10 Mei 2021.	The Company's commitment to running a business with integrity, honesty, ethics, and zero tolerance to corruption and bribery refers to the fulfillment of the clauses in SNI ISO 37001:2016. In 2021, Indonesia Power ratified the Policy on ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) Implementation under Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 045.K/010/IP/2021 and No.008.SK/DEKOM-IP/2021 dated May 10, 2021.
Kebijakan *Fraud* Fraud Control Policy	Sebagai tindak lanjut arahan PT PLN (Persero) dalam membangun sistem manajemen anti *fraud*, Perusahaan sebagai entitas PT PLN (Persero) turut mendukung program tersebut melalui kebijakan Direksi yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 014.K/010/IP/2020 tanggal 05 Februari 2020 tentang Kebijakan Pengendalian *Fraud*. Kebijakan ini merupakan ratifikasi dari Peraturan Direksi PLN mengenai *Fraud*.	To follow up on the directives from PT PLN (Persero) in building an anti-fraud management system, the Company as a subsidiary of PT PLN (Persero) has established the Fraud Control Policy which was ratified by the Decree of the Board of Directors No. 014.K/010/IP/2020 dated February 5, 2020. The policy refers to the Regulation of PT PLN (Persero) Board of Directors Regulation on Fraud.

Secara berkala, Perusahaan melakukan peninjauan dan pemutakhiran atas perangkat kebijakan yang dimiliki, agar terus memiliki relevansinya, baik terhadap perkembangan Perusahaan maupun perkembangan regulasi yang berlaku.

The Company periodically reviews and updates its policy tools to maintain their relevance with the Company's development and currently applicable regulations.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Mechanism

Indonesia Power menerapkan GCG dalam berbagai proses mulai dari rekrutmen, sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko, evaluasi kinerja, pengambilan keputusan sampai dengan sistem *reward* dan *punishment*. Seluruh organ GCG memiliki tanggung jawab tersendiri namun tetap melaksanakan implementasi GCG secara terintegrasi. Berdasarkan mekanisme tersebut, RUPS memiliki kewenangan tertinggi, Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi. Sedangkan Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan yang sejalan dengan penerapan prinsip GCG.

Indonesia Power implements GCG in a number of processes, from recruitment, internal control system, risk management, performance evaluation, decision making, to reward and punishment system. All GCG organs have their respective duties while implementing good corporate governance collaboratively. This mechanism puts GMS as the highest authority, with the Board of Commissioners assuming the duty to supervise and direct the Board of Directors. The Board of Directors, on the other hand, is responsible for the Company management that is in line with the implementation of GCG principles.

Indonesia Power senantiasa melakukan perbaikan dan meminta masukan dari pihak eksternal dengan melakukan *assessment* GCG secara independen sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG. Secara keseluruhan, mekanisme penerapan tata kelola di Perusahaan telah berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

Indonesia Power constantly makes improvements and asks for inputs from external parties through independent GCG assessment in order to improve the quality of GCG implementation. As a whole, the mechanism of governance implementation has complied with the basic governance principles, i.e. transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness.

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

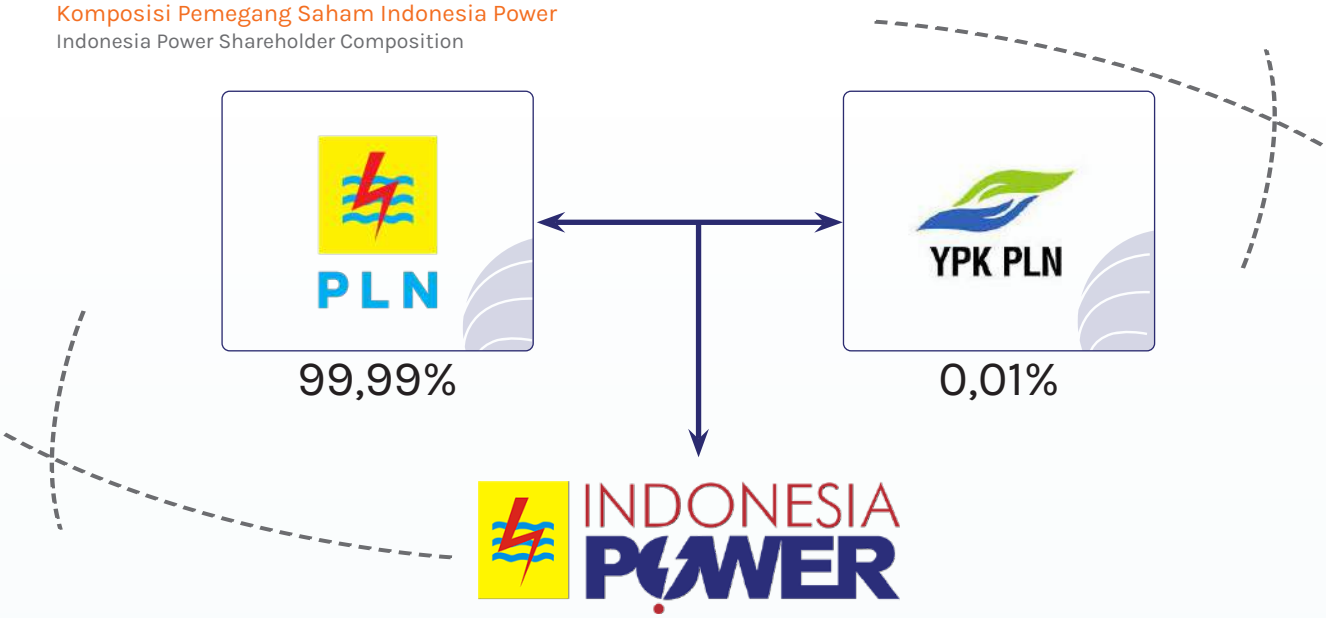
INFORMATION ON MAJOR AND CONTROLLING SHAREHOLDER

Pemegang Saham sebagai pemilik modal memiliki hak dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemegang Saham Perusahaan terdiri dari Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali dan Pemegang Saham Pendiri.

Shareholders as the capital owner have the rights and obligations as set out in the laws and regulations and the Company's Articles of Association. The Company's Shareholders consist of Major and/or Controlling Shareholders and Founding Shareholders.

Komposisi Pemegang Saham Indonesia Power

Indonesia Power Shareholder Composition



Per 31 Desember 2021, PT PLN (Persero) merupakan pemegang saham utama sekaligus pemegang saham pengendali dengan total kepemilikan saham sebesar 99,99% atau sebanyak 5.215.647.599 lembar saham, yang terdiri dari 1 (satu) lembar Saham Seri 1 dan 5.215.647.598 lembar Saham Seri 2. Sedangkan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Saham Pendiri memiliki 0,01% saham Perusahaan atau sebanyak 1 lembar Saham Seri 2.

As of December 31, 2021, PT PLN (Persero) was the Company's major and controlling shareholder, with 99.99% shareholding covering a total of 5,215,647,599 shares, divided into one (1) Series 1 share and 5,215,647,598 Series 2 shares. Meanwhile, Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) as the Founding Shareholder holds 0.01% of the Company's shares, covering 1 Series 2 share.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola Indonesia Power yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perusahaan telah menyediakan informasi yang sama kepada pemegang saham secara akurat dan tepat waktu. Adapun media/sarana yang digunakan guna memudahkan Pemegang Saham dalam mengakses informasi terkait Perusahaan diantaranya melalui:

1. RUPS, baik RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (Sirkuler) sebagai forum untuk Pemegang Saham dapat berkomunikasi dengan pengelola Perusahaan (Direksi dan Dewan Komisaris) untuk mendapatkan informasi mengenai Perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan;
2. Laporan Tahunan, merupakan media yang menyampaikan informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan Perusahaan secara berkala dalam setiap tahun buku;
3. Laporan Manajemen, yaitu laporan terkait realisasi kinerja Perusahaan yang disampaikan kepada Pemegang Saham, baik secara triwulanan maupun tahunan; dan
4. Media komunikasi lainnya.

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in Indonesia Power Governance structure which serves as a medium for the shareholders to perform their rights and obligations. The GMS has special authority which cannot be delegated to the Board of Directors and the Board of Commissioners, within the limit specified in the laws and/or Company's Articles of Association.

For a good corporate governance implementation, the Company has provided the same information to the shareholders accurately and punctually. To facilitate the Shareholders in accessing the information on the Company, the following media are available:

1. GMS, both Annual and Extraordinary (Circular), which serves as a communication forum between the Shareholders and the Company Management (Board of Directors and Board of Commissioners) to gain information on the Company as the basis for decision making;
2. Annual Report, which periodically delivers information on the Company's performance and financial situation for every fiscal year;
3. Managerial Report, which contains the realization of the Company's performance, submitted to the Shareholders on quarterly and annual basis; and
4. Other communication media.

Jenis-Jenis Pelaksanaan RUPS
Types of GMS Implementation

Sesuai dengan penyelenggaraannya, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan terkait Pengesahan RKAP dan Persetujuan Laporan Tahunan, serta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang waktu penyelenggaraannya bisa terjadi di luar waktu RUPST. Pelaksanaan RUPS mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Pemanggilan RUPS dilakukan melalui surat tercatat dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan tata cara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perusahaan.

According to its implementation, GMS consists of Annual GMS (AGMS) on WP&B Ratification and Annual Report Approval and Extraordinary GMS (EGMS) which can be held at anytime outside the AGMS schedule. The implementation of GMS refers to the laws and regulations and Company Articles of Association on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders. GMS summons is delivered not later than 14 days since the date the GMS implementation request is received. GMS summons is delivered by registered letter that contains the date, time, venue, and etiquette of the meeting, along with the notification that the discussion material for the incoming GMS is available at the Company's office.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan
Stages of GMS Implementation



Penyelenggaraan RUPS Selama Tahun 2021
GMS Implementation in 2021

Pada tahun 2021, Indonesia Power telah menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yaitu RUPS Tahunan tentang Persetujuan RKAP tanggal 29 Januari 2021 dan RUPS Tahunan tentang Persetujuan Laporan Tahunan tanggal 29 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan serta perwakilan dari Pemegang Saham.

Indonesia Power held two (2) Annual GMS in 2021, i.e. Annual GMS on WP&B Approval on January 29, 2021 and Annual GMS on Annual Report Approval on June 29, 2021. Both GMS were attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders' proxies.

Berikut kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Tahunan Pengesahan RKAP dan Laporan Tahunan:

The attendances of the Board of Commissioners and Board of Directors in the AGMS on WP&B and Annual Report Ratification are recorded below:

Kehadiran Dewan Komisaris
Board of Commissioners Attendance

Nama Name	Keterangan Description
Mohamad Oemar	Komisaris Utama President Commissioner
F.X. Sutijastoto	Komisaris Commissioner
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner
Miftahul Jannah	Komisaris Commissioner
Ulil Abshar	Komisaris Independen Independent Commissioner

Kehadiran Direksi
Board of Directors Attendance

Nama Name	Keterangan Description
M. Ahsin Sidqi	Direktur Utama President Director
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi I Director of Operations I
R. Bambang Anggono	Direktur Operasi II Director of Operations II
Harlen	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce
Khusnul Mubien	Direktur Keuangan Director of Finance
Bagus Setiawan	Direktur SDM & Administrasi Director of Human Capital and Administration

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Keputusan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 dan Realisasinya
GMS Resolutions on the Ratification of Financial Statements 2020 and Their Realizations

Agenda Rapat Pertama: First Meeting Agenda:	Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2020.	Approval and Ratification of Financial Statements 2020, including Report of Board of Commissioners Supervisory Duty Implementation 2020 and the granting of full release (Volledig Acquit et de Charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Management and Supervision performed throughout FY 2020
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:	RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2020 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan serta menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020.	The GMS approves and receives the Annual Report on the situation and the run of the company throughout FY 2021 which consists of Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Compliance Report, and approves and receives the Report of Board of Commissioners Supervisory Duty Implementation 2021.
Tindak Lanjut/ Realisasi: Follow-up/ Realization:	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 telah disahkan oleh Pemegang Saham pada saat RUPS berlangsung.	The Annual Report and Financial Statements for the fiscal year 2020 have been ratified by the Shareholders during the course of the GMS.
Agenda Rapat Kedua: Second Meeting Agenda:	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020.	Determination of the Utilization of Net Profit from FY 2020
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:	RUPS memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020.	The GMS authorizes Majority Shareholder to determine the utilization of net profit from FY 2020.
Tindak Lanjut/ Realisasi: Follow-up/ Realization:	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2020 melalui surat PLN No.78120/MNJ.01.02/ C01000000/2021	PT PLN (Persero) as the Majority Shareholder has determined the utilization of net profit from FY 2020 under PLN Letter No. 78120/MNJ.01.02/ C01000000/2021.
Agenda Rapat Ketiga: Third Meeting Agenda:	Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2020 dan Remunerasi Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2020.	Approval for tantiem for FY 2020 and remuneration for FY 2021 for the Board of Directors and the Board of Commissioners and Employee Bonus for FY 2020
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:	RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2020 dan Remunerasi Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan Tahun Buku 2020.	The GMS authorizes Majority Shareholder to determine the tantiem for FY 2020 and remuneration for FY 2021 for the Board of Directors and the Board of Commissioners and employee bonus for FY 2020.
Tindak Lanjut/ Realisasi: Follow-up/ Realization:	PT PLN (Persero) selaku Pemegang Saham Mayoritas telah menetapkan besaran gaji, honorarium, tunjangan fasilitas dan insentif bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan melalui Surat PLN No. 61094/MNJ.01.02/C01000000/2021-R tanggal 29 Oktober 2021 dan menetapkan besaran bonus pegawai tahun 2020 melalui Surat PLN No. 33067/SDM.06.01/C01060000/2021-SR perihal pembayaran Insentif Kinerja Perusahaan (IKP) tahun buku 2020.	PT PLN (Persero) as the Majority Shareholder has determined the amount of salary, honorarium, allowances, facilities, and incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners under PLN Letter No. 61094/MNJ.01.02/C01000000/2021-R dated October 29, 2021 and determined the amount of employee bonus for 2020 under PLN Letter No. 33067/SDM.06.01/C01060000/2021-SR on the payment of Company Performance Incentives for Fiscal Year 2020.

Agenda Rapat Keempat: Fourth Meeting Agenda:	Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.	Determination of Public Accounting Firm to Audit the Company's Financial Statements for FY 2021
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:	RUPS memberi kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk tahun buku 2021.	The GMS authorizes Majority Shareholder to determine the appointment of a Public Accounting Firm as the auditor of the Company's Financial Statements, Performance Assessment Report, and Compliance Report for FY 2021.
Tindak Lanjut/ Realisasi: Follow-up/ Realization:	RUPS telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021.	The GMS has appointed Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan to audit the Financial Statements 2021.

Keputusan RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 dan Realisasinya

GMS Resolutions on Work Plan and Budget (WP&B) 2021 and Their Realizations

Agenda Rapat Pertama: First Meeting Agenda:	Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2021.	Approval and Ratification of Work Plan and Budget 2021
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:	RUPS memutuskan menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021.	The GMS approves and ratifies the Work Plan and Budget (WP&B) 2021.
Tindak Lanjut/ Realisasi: Follow-up/ Realization:	RKAP Tahun 2021 telah disahkan pada saat RUPS berlangsung.	The Work Plan and Budget (WP&B) 2021 have been ratified by the Shareholders during the course of the GMS.
Agenda Rapat Kedua: Second Meeting Agenda:	Persetujuan dan Pengesahan Kontrak Manajemen / *Key Performance Indicator* Tahun 2021.	Approval and Ratification of Management Contract/Key Performance Indicators for fiscal year 2021
Keputusan Rapat: Meeting Resolutions:	RUPS menyetujui dan mengesahkan Kontrak Manajemen / *Key Performance Indicator* Tahun 2021.	The GMS approves and ratifies the Management Contract/Key Performance Indicators for fiscal year 2021.
Tindak Lanjut/ Realisasi: Follow-up/ Realization:	Kontrak Manajemen / *Key Performance Indicator* Tahun 2021 telah disahkan pada saat RUPS.	The Management Contract/Key Performance Indicators have been ratified during the course of the GMS.

RUPS Luar Biasa (Sirkuler) Tahun 2021

Extraordinary (Circular) GMS 2021

Selama tahun 2021, Pemegang Saham telah menerbitkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler sebanyak (7) tujuh Keputusan, meliputi:

Throughout 2021, the Shareholders have issued seven (7) Circular Resolutions for Indonesia Power, which include:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Tanggal RUPS GMS Date	Perihal	Description
19 Januari 2021 January 19, 2021	Persetujuan Konsolidasi Pengadaan Asuransi Perseroan dengan PT PLN (Persero)	Approval for the consolidation of Company insurance procurement with PT PLN (Persero)
17 Februari 2021 February 17, 2021	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pelepasan Aktiva Tetap Tidak Beroperasi Umur diatas Lima Tahun PT Indonesia Power Semarang PGU Hasil Inventarisasi 2017 dan 2018	Approval for write-off and disposal of PT Indonesia Power Semarang PGU's non-operating fixed assets of 5 years and above which were inventoried throughout 2017-2018
6 Juli 2021 July 6, 2021	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Indonesia Power	Dismissal and appointment of PT Indonesia Power Board of Commissioners members
21 Juli 2021 July 21, 2021	Persetujuan Pengusulan Wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan Perseroan	Approval for the proposal of Company representative to be the candidate for the Board of Directors and Board of Commissioners at the Company's Subsidiaries and/or Joint Ventures
9 November 2021 November 9, 2021	Persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJP) PT Indonesia Power Tahun 2020-2024	Approval for PT Indonesia Power Long-Term Plan 2020-2024
25 November 2021 November 25, 2021	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan	Dismissal and Appointment of PT Indonesia Power Board of Directors Members
27 Desember 2021 November 27, 2021	Persetujuan Relokasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Grati Kapasitas 2x100 MW ke Pesanggaran	Approval for the relocation of Gas Turbine Power Plants (GTPP) Grati 2x100 MW to Pesanggaran

Tindak Lanjut Arahan Pemegang Saham
Follow-up on Shareholders' Directives

Pelaksanaan RUPS tahun 2021 menghasilkan beberapa arahan dari Pemegang Saham dan telah direalisasikan oleh Perusahaan, sebagaimana tabel berikut:

The GMS held in 2021 resulted in several Shareholders' directives which have been followed-up by the Company, as shown in the following table:

Arahan RUPS 2021 dan Tindak Lanjutnya
GMS 2021 Directives and Their Follow-ups

RUPS GMS	Status			
	Jumlah Arahan Pemegang Saham Number of Shareholders' Directives	Realisasi Hasil RUPS Realization of GMS Results	Persentase Progress Progress Percentage	Alasan Keputusan RUPS yang Belum di Realisasikan Reason for Unrealized GMS Resolutions
RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 GMS on Annual Report Approval and Financial Statements Ratification for FY 2020	29	29	100%	-
RUPS Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021 GMS on Work Plan and Budget (WP&B) 2021 Approval	28	28	100%	-

Keputusan RUPS Tahun 2020 dan Tindak Lanjutnya
GMS 2020 Resolutions and Their Follow-ups

Indonesia Power terus memantau tindak lanjut dan status realisasi dari keputusan serta arahan RUPS secara berkelanjutan dan melaporkan progres tindak lanjutnya kepada Pemegang Saham dalam bentuk penyajian Laporan Manajemen setiap triwulan. Seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan tahun 2020 telah dilaksanakan, sehingga dalam Laporan Tahunan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

Indonesia Power continues to monitor the follow-ups, statuses, and progresses of the realization of GMS resolutions and directives, to be reported to the Shareholders in quarterly Managerial Report. All recommendations from the Annual GMS 2020 Resolutions were followed-up. Therefore, this Annual Report does not include any information on any unrealized GMS resolutions.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan saran dan rekomendasi yang konstruktif dan solutif kepada Direksi, dalam menghadapi tantangan. Arahan Dewan Komisaris kepada Direksi adalah untuk senantiasa mengedepankan aspek kepatuhan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dewan Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan.

The Board of Commissioners constantly aims to assume its responsibilities by providing constructive and resolving advices and recommendations to the Board of Directors in the face of challenges. The Board of Commissioners directs the Board of Directors to always prioritize the aspect of compliance and Good Corporate Governance principles. The Board of Commissioners regularly meets with the Board of Directors to discuss any matters pertaining Company management during joint meetings.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris
Composition of the Board of Commissioners

Pada tahun 2021, terjadi perubahan susunan keanggotaan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Pemegang Saham. Melalui Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 9 Februari 2021, Pemegang Saham menetapkan untuk mengangkat anggota Komisaris baru, yaitu Sdr. Iskandar Simorangkir. Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2021 melalui Keputusan RUPS Sirkuler, Pemegang Saham memutuskan untuk menyetujui pemberhentian Sdr. F.X. Sutijastoto dan menetapkan Sdr. Djoko Siswanto sebagai Komisaris baru.

In 2021, the Board of Commissioners composition was changed based on decree of the Shareholders. Under Circular GMS Resolutions dated February 09, 2021, the Shareholders determined to appoint new Commissioner, Mr. Iskandar Simorangkir. Further on July 06, 2021, under Circular GMS Resolutions, the Shareholders determined to approve the dismissal of Mr. F.X. Sutijastoto and assigned Mr. Djoko Siswanto as a new Commissioner.

Dengan adanya perubahan tersebut, susunan dan komposisi Dewan Komisaris sampai dengan 31 Desember 2021 berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, dan 5 (empat) anggota Komisaris, yang salah satunya merupakan Komisaris Independen.

With such change, as of December 31, 2021, the Board of Commissioners of Indonesia Power consisted of six (6) members comprising of one (1) President Commissioner and five (5) Commissioners, one of whom is an Independent Commissioner.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Tabel Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Periode Tahun 2021
Table of Board of Commissioners Composition in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Mohamad Oemar	Komisaris Utama President Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 18 Maret 2020 Circular GMS dated March 18, 2020	2020-2024
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 9 Februari 2021 Circular GMS dated February 09, 2021	2021-2025
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 6 Juli 2021 Circular GMS dated July 06, 2021	2021-2025
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 12 November 2020 Circular GMS dated November 12, 2020	2020-2024
Miftahul Jannah	Komisaris Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 15 Juli 2020 Circular GMS dated July 15, 2020	2020-2024
Ulil Abshar	Komisaris Independen Independent Commissioner	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 23 September 2019 Circular GMS dated September 23, 2019	2019-2023

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
Board Charter

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah dilengkapi Pedoman Kerja Komisaris (*Board Manual*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 20 Maret 2020. Dalam *Board Manual* tersebut, menjelaskan secara terperinci penerapan GCG dalam Perusahaan yang mencakup aspek-aspek:

1. Pengertian dan Persyaratan Dewan Komisaris
2. Komposisi Dewan Komisaris
3. Pengaturan Rangkap Jabatan
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris
5. Masa Jabatan Dewan Komisaris
6. Program Pengenalan dan Pelatihan
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
8. Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris
9. Tugas Dewan Komisaris
10. Wewenang Dewan Komisaris
11. Pendelegasian Wewenang Diantara Anggota Dewan Komisaris
12. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
13. Rapat Dewan Komisaris
14. Penetapan Kebijakan Pengawasan Perusahaan
15. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
16. Remunerasi Dewan Komisaris
17. Organ Pendukung Dewan Komisaris.

In carrying out its duties, the Board of Commissioners have been equipped with a Board Manual which was stipulated by the Board of Commissioners in the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners on March 20, 2020. The Board Manual elaborates the GCG implementation in the Company which includes the following aspects:

1. Definition and Requirements of the Board of Commissioners
2. Board of Commissioners Composition
3. Provision on Concurrent Positions
4. Appointment and Discharge of the Board of Commissioners
5. Term of Office of the Board of Commissioners
6. Orientation and Training Programs
7. Work Plan and Budget of the Board of Commissioners
8. Performance Achievement Indicators of the Board of Commissioners
9. Duties of the Board of Commissioners
10. Authorities of the Board of Commissioners
11. Delegation of Authority among Members of the Board of Commissioners
12. Responsibilities of the Board of Commissioners
13. Board of Commissioners Meetings
14. Determination of Company Supervisory Policy
15. Reporting and Accountability of the Board of Commissioners
16. Remuneration for the Board of Commissioners
17. Supporting Organs for the Board of Commissioners

Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan wujud akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Tanggung jawab Dewan Komisaris Perusahaan, diantaranya:

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perusahaan
2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 3 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada poin 3 apabila dapat membuktikan: (a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; (b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan (c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
6. Atas nama Perusahaan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan ke pengadilan negeri
7. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan akibat kepailitan tersebut, setiap Anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan Anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi
8. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin 1 berlaku juga bagi Anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan

In performing its duties, the Board of Commissioners answers to the GMS. The responsibilities of the Board of Commissioners to the GMS is the embodiment of the supervisory accountability for the Company management in accordance with the implementation of GCG principles. The Board of Commissioners' responsibilities include:

1. The Board of Commissioners is responsible for the supervision of the Company.
2. Every member of the Board of Commissioners shall, in good faith, with prudence and responsibility, perform the supervisory and advisory duties to the Board of Directors for the interest and according to the intents and purposes of the Company.
3. Every member of the Board of Commissioners holds personal responsibility for the Company's losses in the event where such a member is mistakenly or negligently implementing his/her duties.
4. In the case where the Board of Commissioners consists of two or more members, the responsibility as specified in point 3 shall be jointly taken by all Board of Commissioners members.
5. The Board of Commissioners members shall hold no accountability for the losses as specified in point 3, if they are able to prove that: (a) They have performed the supervision in good faith and prudentially for the interest and according to the intents and purposes of the Company; (b) They do not have personal interest both directly and indirectly in the loss-inflicting management of the Board of Directors; (c) They have provided advices for the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of such losses.
6. On behalf of the Company, the shareholder which represents at least 1/10 (one-tenth) of the entire shares with voting right may contest the Board of Commissioners which, due to its mistake or negligence, inflicts loss to the Company to the District Court.
7. In the event of bankruptcy due to the mistake or negligence of the Board of Commissioners in performing the supervisory duty to the management by the Board of Directors and the Company's wealth is insufficient to settle the entire liabilities due to such bankruptcy, every member of the Board of Commissioners and the Board of Directors shall jointly take responsibility for the outstanding liabilities.
8. The liabilities as specified in point 1 shall also apply to the members of the Board of Commissioners who are no longer serving their position up to five (5) years prior to the announcement of bankruptcy.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 apabila dapat membuktikan: (a) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; (c) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan (d) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan
10. Ketentuan mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Hukum Pidana.

9. The Board of Commissioners members shall hold no accountability for the bankruptcy as specified in point 1, if they are able to prove that: (a) The bankruptcy is not resulted from their mistake or negligence; (b) They have performed the supervisory duty in good faith and prudentially for the interest and according to the intents and purposes of the Company; (c) They do not have personal interest both directly and indirectly in the bankruptcy-inflicting managerial actions performed by the Board of Directors; (d) They have provided advices for the Board of Directors to prevent such bankruptcy.
10. Provision on the Board of Commissioners' responsibility for its mistake and negligence specified in the law does not waive the provisions set in the Penal Code.

Sedangkan hal-hal yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris Perusahaan, yaitu:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu
7. Memberhentikan sementara Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini
8. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan
12. Melasanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

Whereas the matters under the Board of Commissioners' authority include:

1. Reviewing books, letters, and other documents; checking cash for verification; and checking other securities and Company's wealth.
2. Entering the yards, buildings, and offices used by the Company.
3. Asking for explanation from the Board of Directors and/or other officials pertaining to every issue on the Company management.
4. Acknowledging all policies and actions performed or to be performed by the Board of Directors.
5. Requesting the presence of the Board of Directors and/or other officials under and with the acknowledgment of the Board of Directors, in the Board of Commissioners meetings.
6. Appointing and dismissing the Secretary to the Board of Commissioners, if considered necessary.
7. Suspending members of the Board of Directors in accordance with the provision of the Articles of Association.
8. Establishing other committees apart from the Audit Committee, if considered necessary, by taking into account the Company's capability.
9. Using experts/specialists for certain issues in a certain period at the expense of the Company, if considered necessary.
10. Performing Company management in a certain situation for a certain period in accordance with the provisions of the Articles of Association.
11. Attending Board of Directors meetings and providing inputs on the matters discussed.
12. Performing other supervisory authorities provided that they do not conflict with the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

Ruang Lingkup Pembagian Tugas Pengawasan Masing-Masing Dewan Komisaris

Scope and Description of Supervisory Duties for Each Commissioner

Pembagian tugas Dewan Komisaris dilakukan untuk kelancaran tugas disetiap masing-masing anggota untuk menciptakan kinerja yang baik dan efektif. Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Indonesia Power tanggal 16 Juli 2021. Fokus bidang pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris mengacu pada pembagian peran sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

The description of duties for the Board of Commissioners allows streamlined operations by each member, producing good and effective performance. The Board of Commissioners independently regulates the description of duties among its members based on the Minutes of Agreement on the Description of Duties of the Board of Commissioners of PT Indonesia Power dated July 16, 2021. The focus of the area of supervision for each Commissioner refers to the description of duties according to their competencies and experiences.

Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Description of Supervisory Duties for the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas	Description of Duties
Mohamad Oemar	Komisaris Utama President Commissioner	Keseluruhan Bidang Perusahaan	All Areas
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner	Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi, SDM dan Organisasi serta SIstem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Risk Management, Nomination and Remuneration, HC and Organization, and Anti-Bribery Management System (ABMS)
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	Audit, Tata Kelola (*Good Corporate Governance*/GCG) , *Whistle Blowing*, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Audit, Corporate Governance, Whistleblowing, Anti-Bribery Management System (ABMS)
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	Audit, Tata Kelola (*Good Corporate Governance*/GCG) , *Whistle Blowing*, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Audit, Corporate Governance, Whistleblowing, Anti-Bribery Management System (ABMS)
Miftahul Jannah	Komisaris Commissioner	Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi, SDM dan Organisasi serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Risk Management, Nomination and Remuneration, HC and Organization, and Anti-Bribery Management System (ABMS)
Ulil Abshar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Manajemen Risiko, Nominasi dan Remunerasi, SDM dan Organisasi serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	Risk Management, Nomination and Remuneration, HC and Organization, and Anti-Bribery Management System (ABMS)

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

Independent Commissioner exists to ensure an effective and law-abiding supervision while providing balance between the Majority Shareholder's interest and the Minority Shareholder's interest.

Pada tahun 2021, Indonesia Power memiliki 1 (satu) orang Komisaris Independen yang ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 18 Maret 2020. Jumlah tersebut mewakili 17% dari seluruh anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 6 (enam) orang.

In 2021, Indonesia Power has had one (1) Independent Commissioner appointed under the GMS Resolutions dated March 18, 2020. This represents 17% of all six (6) members of the Board of Commissioners.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen dan Pemenuhannya
Criteria for Determining Independent Commissioners and Its Fulfillment

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perusahaan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria penentuan Komisaris Independen Perusahaan mencakup:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha Perusahaan
3. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan
4. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan yang bersangkutan.

Independent Commissioner is appointed to ensure that the Company supervision runs effectively and in accordance with the laws and regulations. The criteria for the determination of Company's Independent Commissioners are:

1. Not affiliated with the Company, Commissioners, Directors, or Majority/Controlling Shareholders of the Company
2. Not having any direct or indirect business commitments that pertain to the Company's business
3. Not holding any shares, either directly or indirectly, in the Company
4. Not holding any concurrent positions as a Director at the Company's affiliates

Pernyataan Tentang Independensi Komisaris Independen
Statement of the Independence of the Independent Commissioners

Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi kriteria independensi dan telah dinyatakan oleh Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan independensi yang diperbarui secara berkala. Berikut pernyataan independensi Sdr. Ulil Abshar sebagai Komisaris Independen Perusahaan tahun 2021.

The Company's Independent Commissioner has met the independence criteria and has declared his independence by signing a statement of independence which is updated regularly. The following is the statement of independence of Mr. Ulil Abshar, the Company's Independent Commissioner for 2021.

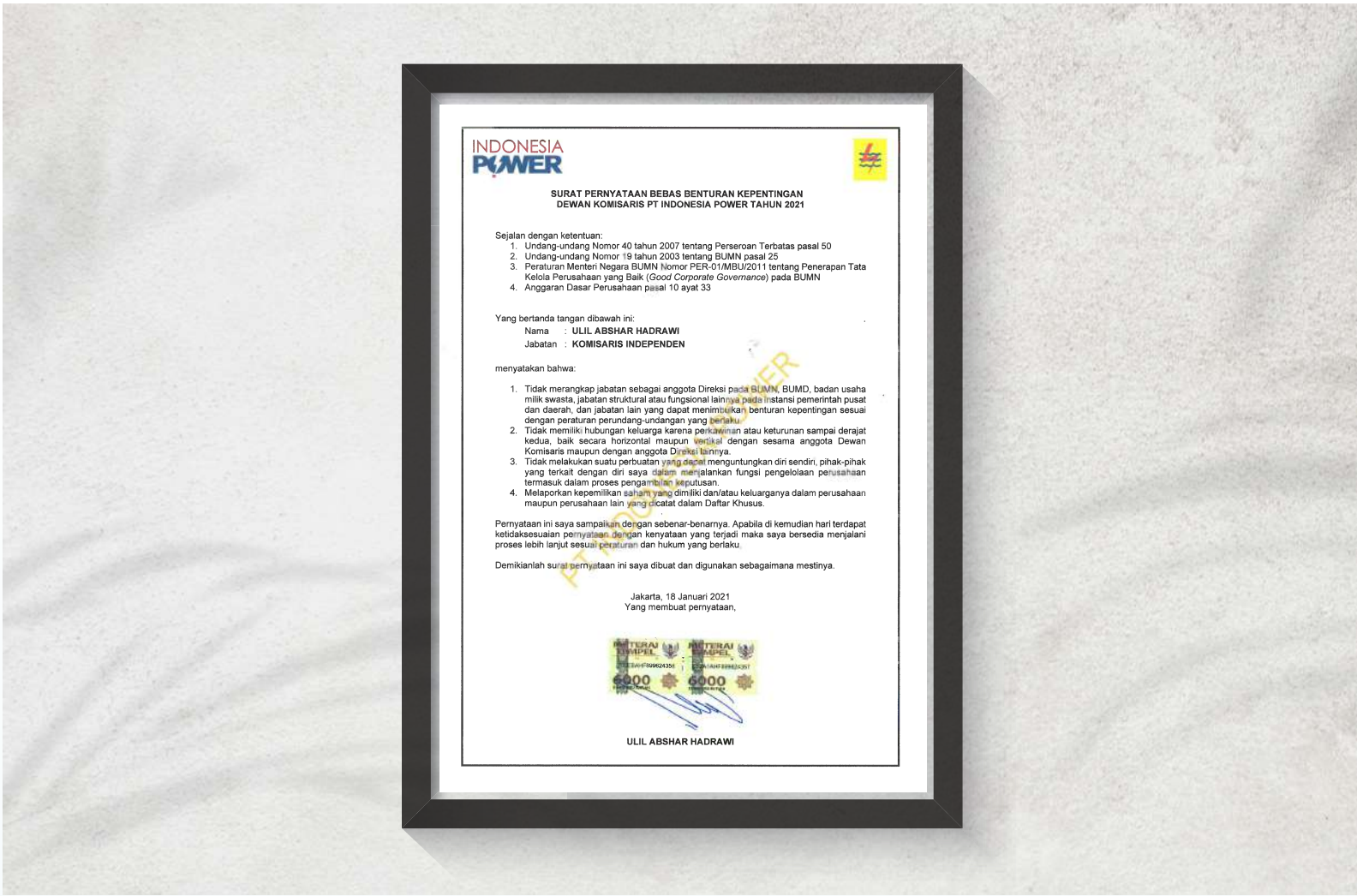
Kriteria Independensi	Independence Criteria	Ulil Abshar
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan	Not affiliated with the Company, Commissioners, Directors, or Majority/Controlling Shareholders of the Company	√
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan usaha Perusahaan	Not having any direct or indirect business commitments that pertain to the Company's business	√
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan	Not holding any shares, either directly or indirectly, in the Company	√
Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan yang bersangkutan.	Not holding any concurrent positions as a Director at the Company's affiliates	√

√ = Independen
X = Tidak Independen

√ = Independent
X = Non-Independent

Berdasarkan tabel di atas, Komisaris Independen Perusahaan telah memenuhi persyaratan independensi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

As seen from the table above, the Company's Independent Commissioner has met the independence requirements in accordance with the stipulated provisions.



DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Independensi Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Independence

Seluruh Dewan Komisaris telah menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya guna menjamin independensi Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang mempengaruhi independensinya termasuk apabila terdapat rangkap jabatan maupun adanya perubahan kepemilikan saham baik pribadi ataupun keluarga di Perusahaan dan/atau Perusahaan lain. Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan.

All Board of Commissioners members have signed the statement of free from conflict of interest which clarifies the absence of affiliation with any members of either the Board of Directors or the Board of Commissioners to guarantee their independence. Members of the Board of Commissioners must also report should there be any changes in status that affect their independence, including any changes in concurrent positions or shareholding, either personally or by their family in the Company and/or other companies. Throughout 2021, there were no situations with potential conflicts of interest faced by members of the Board of Commissioners during decision making.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
Shareholding by Board of Commissioners Members

Untuk menghindari potensi benturan kepentingan, Perusahaan berkomitmen untuk mengungkapkan kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan keluarga untuk dicatat dalam Daftar Khusus. Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris disajikan dalam tabel berikut:

To avoid any conflict of interest, the Company is committed to disclosing the shareholding by the Board of Commissioners members and their family to be recorded in the Special Register. The followings are details of shareholding by the Board of Commissioners:

Daftar Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Tahun 2021
List of Board of Commissioners' Shareholding in 2021

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Shareholding in Other Companies
Mohamad Oemar	Tidak Ada N/A
Iskandar Simorangkir	Tidak Ada N/A
Djoko Siswanto	Tidak Ada N/A
Munir Ahmad	Tidak Ada N/A
Miftahul Jannah	Tidak Ada N/A
Ulil Abshar	Tidak Ada N/A

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Policy on Concurrent Position by the Board of Commissioners

Berdasarkan *Board Manual*, Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta
2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pengurus partai politik dan/ atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan/atau
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pada tahun 2021 terdapat beberapa anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan. Namun dapat dipastikan rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Under Board Manual, members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent position as:

1. Member of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises
2. Other positions in accordance with the provisions of the laws and regulations, political party official and/or legislative candidate/member and/or Regional Head/Deputy Regional Head candidate; and/or
3. Other positions that may lead to conflict of interest.

In 2021, several members of the Board of Commissioners held concurrent positions. However, it can be ascertained that such concurrent positions have complied with the laws and regulations.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Tahun 2021

Concurrent Position by the Board of Commissioners in 2021

Nama Name	Jabatan di Indonesia Power Position at Indonesia Power	Jabatan di Perusahaan Lain Position at Other Companies
Mohamad Oemar	Komisaris Utama President Commissioner	Duta Besar Indonesia untuk Perancis Indonesian Embassy in France
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Deputy of Macro-economy and Finance Coordination at the Coordinating Ministry of Economy
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Secretary General of the National Energy Council
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Secretary to the Directorate General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources
Miftahul Jannah	Komisaris Commissioner	EVP Pembangkitan dan EBT Regional Jawa, Madura dan Bali PT PLN (Persero) EVP of Power Generation and NRE of Java, Madura, and Bali Regions of PT PLN (Persero)
Ulil Abshar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Sekretaris Jenderal PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Deputy Secretary General of the Central Board of Nahdlatul Ulama (PBNU)

Program Pengenalan Perusahaan Bagi Komisaris Baru

Orientation Program for New Commissioners

Perusahaan telah menetapkan kebijakan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kali wajib diberikan karena sangat penting untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Program pengenalan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas berbagai hal yang berkaitan dengan Perusahaan dan menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

The Company has established the policy on orientation program for firstly-appointed Commissioners. This mandatory program is vital for the effectiveness and efficiency of their duties and obligations. The orientation program is intended for providing overview about the matters pertaining to the Company that fall under the Board of Commissioners' responsibilities.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Pada tahun 2021, Perusahaan mengadakan program pengenalan Perusahaan pada anggota Komisaris yang baru diangkat. Program pengenalan kepada Iskandar Simorangkir dilakukan pada tanggal 23 Februari 2021 dan pengenalan kepada Djoko Siswanto dilakukan pada tanggal 27 Juli 2021. Adapun materi pengenalan yang disampaikan, yaitu terkait *Corporate Exposure,* RJPP, RKAP, GCG, Manajemen Risiko, Hukum dan Audit.

In 2021, the Company has held an orientation program for the newly appointed members of the Board of Commissioners. The orientation programs were provided for Iskandar Simorangkir on February 23, 2021 and Djoko Siswanto on July 27, 2021. The program covered the areas of Corporate Exposure, Company Long-Term Plan,WP&B, Risk Management, Legal, and Audit.

Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Decrees, Recommendations, and Implementation of Duties of the Board of Commissioners

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya yang sebagian diantaranya dituangkan dalam bentuk surat keputusan dan surat lainnya yang bersifat pengawasan dan persetujuan, antara lain:

1. Mengikuti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 29 Juni 2021;
2. Menyusun pembagian tugas Dewan Komisaris tahun 2021;
3. Membentuk Komite-Komite Dewan Komisaris dan terlibat dalam penyusunan Piagam serta Program Kerja Komite;
4. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk Usulan RKAP dan Kontrak Manajemen Tahun 2021, serta rekomendasi untuk Revisi RKAP Tahun 2021;
5. Rekomendasi Dewan Komisaris atas Permohonan Rekomendasi Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Tidak Beroperasi;
6. Rekomendasi Dewan Komisaris atas Usulan Persetujuan Pengurus Anak Perusahaan dan Pejabat BOD-1 Indonesia Power;
7. Rekomendasi terkait Usulan Pembagian Laba Tahun 2020;
8. Rekomendasi usulan Pemberian Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus Pegawai Tahun 2020, serta Penyesuaian Honorarium Direksi & Dewan Komisaris Tahun 2021;
9. Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil *Talent Committee Meeting* Direksi Indonesia Power Tahun 2021;
10. Rekomendasi Dewan Komisaris atas Usulan Persetujuan Perpanjangan Masa Jabatan Direksi Anak Perusahaan.

The Board of Commissioners, in 2021, has performed its functions, duties, and responsibilities that are covered in decrees and other letters concerning supervisory and approval, such as:

1. Attending Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2020 on June 29, 2021;
2. Preparing the description of duties of the Board of Commissioners for 2021;
3. Establishing Board of Commissioners Committees and participating in the preparation of Committee Charter and Work Program;
4. Preparing BOC recommendation for proposed WP&B and Management Contract for 2021 and recommendation for WP&B 2021 Revision;
5. Preparing BOC recommendation for request for write-off recommendation and transfer of non-operating fixed assets;
6. Preparing BOC recommendation for proposal for approval for subsidiary management and BOD-1 officials of Indonesia Power;
7. Preparing recommendation for proposal for the sharing of 2020 profit;
8. Preparing recommendation for proposed provision of tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as employee Bonus for 2020 as well as adjustments to the honorarium for the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2021;
9. Preparing BOC recommendation for the result of Talent Committee meeting of Indonesia Power Board of Directors in 2021;
10. Preparing BOC recommendation for proposed extension of Board of Directors' term of office at subsidiaries.

Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Competency Development Programs for the Board of Commissioners

Selama tahun 2021, program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dilaksanakan melalui program pelatihan dan/ atau pembelajaran, sesuai dengan topik/tema bidang kompetensi yang diperlukan, dalam bentuk kegiatan seminar, *workshop*, sosialisasi dan kegiatan sejenis. Lebih rinci mengenai pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dapat dilihat di bagian Pendidikan dan/atau Pelatihan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The competency development for the Board of Commissioners was sought through trainings/learning programs (e.g. Seminars, workshops, disseminations, etc.) throughout 2021, in accordance with the required area of competencies. Further details on the competency development programs for the Board of Commissioners are available in the Section of Education and/ or Training, Chapter of Company Profile of this Annual Report.

Penilaian Kinerja Masing-Masing Komite Dewan Komisaris
Performance Assessment of Each Committee under the Board of Commissioners

Penilaian Kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Piagam Komite dan Program Kerja Komite. Kinerja Komite Dewan Komisaris dievaluasi oleh Dewan Komisaris yang dilakukan setiap triwulan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite dengan parameter penilaian sebagai berikut:

1. Kontribusi terhadap pencapaian target Tim
2. Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi
3. Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim
4. Kerjasama dalam Tim
5. Mutu dan Kualitas Konsep

Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada uraian bagian Komite Di Bawah Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

The assessment of the performance of the Board of Commissioners Committees is determined based on the duties and responsibilities contained in the Committee Charter and Committee Work Program. The performances of the Board of Commissioners Committees are evaluated by the Board of Commissioners on a quarterly basis based on the actual and completed work programs as contained in the Committees' Work Plan and Budget, using the following assessment parameters:

1. Contribution to Team target achievement
2. Number of Reviews, Analyses, and Recommendations
3. Team Engagement
4. Team Collaboration
5. Quality of Concept

Further explanation regarding the performance assessment of Committees under the Board of Commissioners is available in the section of Committees under the Board of Commissioners of this Annual Report.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Direksi memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan tata kelola yang baik di lingkungan Perusahaan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya, seluruh calon Direksi menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anggota Direksi kemudian ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan dilaksanakan secara sirkuler dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemegang Saham Sirkuler.

The Board of Directors has a huge role and responsibility to exemplify a good governance in the Company. In assuming its duties, the Board of Directors is given clear authority and responsibilities according to the Articles of Associations, as guided by the applicable laws and regulations. To ensure integrity and professionalism in their fields, all candidates for the Board of Directors must pass Fit and Proper Test in accordance with the applicable laws and regulations. The appointment of the Board of Directors members is further determined by Circular General Meeting of Shareholders with the issuance of the Circular Decree of Shareholders.

Susunan dan Komposisi Direksi
Composition of the Board of Directors

Komposisi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis Perseroan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Komposisi Direksi Indonesia Power terdiri dari 6 (enam) jabatan fungsional yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasi I, Direktur Operasi II, Direktur Pengembangan dan Niaga, Direktur Keuangan, serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Administrasi.

The composition of the Board of Directors members is determined by the GMS by taking into account the Company's vision, mission, and strategic plans, hence allowing effective, accurate, and swift decision making, as well as being able to act independently. Indonesia Power Board of Directors composition comprises six (6) functional positions, i.e. President Director, Director of Operations I, Director of Operations II, Director of Development and Commerce, Director of Finance, and Director of Human Capital and Administration.

Pada tahun 2021, terjadi perubahan susunan keanggotaan Direksi berdasarkan keputusan Pemegang Saham tanggal 25 November 2021. Dalam RUPS tersebut, Pemegang Saham menyetujui pemberhentian Sdr. Khusnul Mubien selaku Direktur Keuangan dan menetapkan Sdr. Endang Astharanti sebagai Direktur Keuangan yang baru.

In 2021, the Board of Directors composition was changed based on Shareholder decree dated November 25, 2021. During the GMS, the Shareholders had approved to dismiss Mr. Khusnul Mubien from the Director of Finance position and appointed Ms. Endang Astharanti as the new Director of Finance.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2021
Board of Directors Composition in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
M. Ahsin Sidqi	Direktur Utama President Director	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2019 Circular GMS dated June 19, 2019	2019 - 2023
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi I Director of Operations I	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 24 Januari 2018 Circular GMS dated January 24, 2018	2018-2022
R. Bambang Anggono	Direktur Operasi II Director of Operations II	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 4 Januari 2019 Circular GMS dated January 4, 2019	2019-2023
Harlen	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 8 Desember 2020 Circular GMS dated December 8, 2020	2020-2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 25 November 2021 Circular GMS dated November 25, 2021	2021-2025
Bagus Setiawan	Direktur SDM dan Administrasi Director of Human Capital and Administration	RUPS Sirkuler Pemegang Saham tanggal 12 Juni 2020 Circular GMS dated June 12, 2020	2020-2024

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Board Manual

Sebagai pendukung dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Perusahaan, Direksi telah dilengkapi Pedoman Tata Tertib Kerja (*Board Manual*) Direksi. Dalam *Board Manual* tersebut, menjelaskan secara terperinci aspek-aspek pedoman kerja Direksi, antara lain terkait:

1. Pengertian dan Persyaratan Direksi;
2. Komposisi Direksi;
3. Pengaturan Rangkap Jabatan;
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi;
5. Masa Jabatan Direksi ;
6. Program Pengenalan dan Pelatihan;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;
8. Tugas Direksi;
9. Wewenang Direksi;
10. Kewajiban Direksi;
11. Tanggung Jawab Direksi;
12. Rapat Direksi;
13. Pelaporan Pertanggungjawaban Direksi;
14. Remunerasi Direksi;
15. Organ Pendukung Direksi.

As the supporting organ in carrying out the Company's management functions, the Board of Directors has been equipped with Board Manual. The Board Manual provides detailed account on aspects of the Board of Directors' work guidelines, including those related to:

1. Definition of and Requirements for the Board of Directors;
2. Board of Directors Composition;
3. Provision on Concurrent Positions;
4. Appointment and Dismissal of the Board of Directors;
5. Board of Directors Term of Office;
6. Orientation and Training Programs;
7. Work Plan and Budget of the Board of Directors;
8. Duties of the Board of Directors;
9. Authorities of the Board of Directors;
10. Obligations of the Board of Directors;
11. Responsibilities of the Board of Directors;
12. Board of Directors Meetings;
13. Board of Directors Accountability Reporting;
14. Remuneration for the Board of Directors;
15. Board of Directors Supporting Organs.

Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
Responsibilities and Authorities of the Board of Directors

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, *Board Manual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab Direksi meliputi:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun diluar pengadilan;

The duties and responsibilities of the members of the Board of Directors are determined by the Articles of Association, the Board Manual, and the applicable laws and regulations. The responsibilities of the Board of Directors cover:

1. In performing its duties, the Board of Directors is fully responsible for the Company management for the interest and objectives of the Company, while representing the Company inside and outside the courtroom;

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

2. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan kesinambungan Perusahaan. Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
3. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal Direksi terdiri atas dua anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
4. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:
   - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
   - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
   - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
   - Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 4 tidak mengurangi hak Anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perusahaan;
6. Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang hukum pidana;
7. Dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi Anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
8. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perusahaan apabila dapat membuktikan:
   - Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
   - Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
   - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan

2. The Board of Directors is responsible for the Company management in order to generate profit and ensure the Company's sustainability. The management shall be performed by each member of the Board of Directors in good faith and with full responsibility;
3. Every member of the Board of Directors holds full personal responsibility for the Company's losses in the event where such a member is mistakenly or negligently implementing their duties. In the case where the Board of Directors consists of two or more members, the responsibility shall be jointly taken by all Board of Directors members;
4. The Board of Directors members shall hold no accountability for the Company's losses, if they are able to prove that:
   - The loss is not resulted from their mistake or negligence;
   - They have performed the supervisory duty in good faith and cautiously for the interest and according to the intents and purposes of the Company;
   - They do not have conflicting interest both directly and indirectly in the loss-inflicting managerial actions;
   - They have taken the measures to prevent the occurrence or the continuation of the loss;
5. The provision of point 4 shall not waive the rights of the other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to file a lawsuit on behalf of the Company;
6. Provision on the Board of Directors' responsibility for its mistake and negligence specified in the law shall not waive the provisions set in the Penal Code;
7. In the event of bankruptcy due to the mistake or negligence of the Board of Directors where the bankruptcy estate is insufficient to settle the Company's entire liabilities due to such bankruptcy, every member of the Board of Directors shall jointly take responsibility to cover for the entire outstanding liabilities from such bankruptcy estate. The liabilities shall also apply to the mistaken or negligent members of the Board of Directors who have served their position within the period of five (5) years prior to the announcement of bankruptcy;
8. The Board of Directors members shall hold no accountability for the Company's bankruptcy, if they are able to prove that:
   - The bankruptcy is not resulted from their mistake or negligence;
   - They have performed the supervisory duty in good faith, with caution and full responsibility for the interest and according to the intents and purposes of the Company;
   - They do not have conflicting interest both directly and indirectly in the managerial actions;

- Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan

9. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi Direksi dari Perusahaan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Sedangkan wewenang yang dimiliki Direksi, meliputi:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditujukan untuk itu;
3. Mengatur kebijakan kepegawaian termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan;
6. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS;
7. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila terjadi perkara di pengadilan antara Perusahaan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan, atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan. Adapun yang berhak mewakili Perusahaan adalah Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan, Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan;
8. Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perusahaan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
9. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perusahaan dalam kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

- They have taken the measures to prevent such a bankruptcy;

9. These provisions also apply to the Board of Directors in the event where the Company is announced bankrupt from a third-party lawsuit.

The Board of Directors has the following authorities:

1. Determining the Company's managerial policy;
2. Arranging the delegation of Board of Directors authority to represent the Company inside and outside the courtroom to one or several members of the Board of Directors specially appointed for such purpose;
3. Arranging the policy for personnel, including the determination of salary, retirement, or old-age security and other incomes for the employees according to applicable laws and regulations;
4. Appointing and dismissing employees according to employment rules and applicable laws and regulations;
5. Appointing a Corporate Secretary;
6. Performing all actions and other activities pertaining to Company management, binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, and representing the Company inside and outside the courtroom concerning all matters and events as set out in the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions;
7. A member of the Board of Directors has no authority to represent the Company in the event where the Company and the relevant Board of Directors member are against each other in the courtroom, or the relevant member of the Board of Directors has a conflict of interest with the Company. The persons eligible for representing the Company are other members of the Board of Directors who have no conflict of interest with the Company, the Board of Commissioners in the case where all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company, and/or other Parties appointed by the GMS in case all members of the Board of Directors or the Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company;
8. The Board of Directors shall not reverse the right to apply for bankruptcy for the Company to the Commercial Court prior to obtaining approval from GMS, without prejudice to the provisions set out in the bankruptcy law and suspension of payment obligations;
9. In the event of bankruptcy due to the mistake or negligence of the Board of Directors where the bankruptcy estate is insufficient to settle the Company's entire liabilities due to such bankruptcy, every member of the Board of Directors shall jointly take responsibility to cover for the entire outstanding liabilities from such bankruptcy estate.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Ruang Lingkup Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Scope of Duties and Responsibilities of Each Director

Pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jabatan masing-masing anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. Selanjutnya Direksi menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi melalui Keputusan Direksi Nomor 075.K/010/IP/2020 tentang Organisasi PT Indonesia Power.

The description of duties and responsibilities of each Board of Directors member is determined based on their respective position as set out in their appointment by the GMS. Furthermore, the Board of Directors determines the description of duties and responsibilities of each of its members through the Decree of the Board of Directors No. 075.K/010/IP/2020 on Organization of PT Indonesia Power.

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Anggota Direksi

Description of Duties and Responsibilities of Each Director

Nama Nama	Jabatan Position	Pembagian Tugas	Description of Duties
M. Ahsin Sidqi	Direktur Utama President Director	Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Department of Internal Audit (DEP IAD), Corporate Secretariat (COR SEC), Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management (DEP SPR) dan Department of Research, Innovation and Engineering (DEP RIE) bertanggungjawab kepada Direktur Utama.	Performing all actions relevant to the Company management for the Company's interest, according to the intents and purposes of the Company, and representing the Company inside and outside the courtroom as set out in the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions. Department of Internal Audit (DEP IAD), Corporate Secretariat (COR SEC), Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management (DEP SPR), and Department of Research, Innovation and Engineering (DEP RIE) responsible for President Director.
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi I Director of Operations I	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan strategi Perusahaan di bidang operasi dan pemeliharaan serta jasa pemeliharaan pembangkit ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, kegiatan jasa pemeliharaan, perencanaan energi primer, manajemen energi, komersial, settlement, transaksi dan hubungan pelanggan serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal. Direktur Operasi I membawahi Division of Power Generation I, Division of Primary Energy I and Division of Commerce and Customer Relation I. Selain itu terdapat Division of Health, Safety and Environtmental yang bertanggungjawab kepada Direktur Operasi I.	Having the duties, responsibilities, and authorities to lead and interpret the Company's strategic policy in operations and maintenance and power plant maintenance services into business process, procedures and rules; developing and supervising power plant operations and maintenance, maintenance service activities, primary energy planning, energy management, commerce, settlements, transactions, and customer relations; and coordinating with internal and external parties according to its main functions. The Director of Operation I heads the the Division of Power Generation I, Division of Primary Energy I and Division of Commerce and Customer Relation. In addition, there is the Division of Health, Safety and Environtmental that is responsible for Director of Operations I.

Nama Nama	Jabatan Position	Pembagian Tugas	Description of Duties
R. Bambang Anggono	Direktur Operasi II Director of Operations II	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan strategi Perusahaan di bidang operasi dan pemeliharaan ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, perencanaan energi primer, manajemen energi, komersial, settlement, termasuk pada bisnis jasa O&M serta jasa terkait di luar penugasan PT PLN (Persero), transaksi dan hubungan pelanggan serta melakukan koordinasi sesuai dengan fungsi utama dengan pihak internal dan eksternal. Direktur Operasi II membawahi Division of Power Generation II-1, Division of Power Generation II-2, Division of Primary Energy and Settlement II. Selain itu terdapat Divison of Spareparts and Services Procurement yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Operasi II.	Having the duties, responsibilities, and authorities to lead and interpret the Company's strategic policy in operations and maintenance into business process, procedures and rules; developing and supervising power plant operations and maintenance, primary energy planning, energy management, commerce, settlement, including in O&M service business and services beyond PT PLN (Persero)'s assignments, transactions, and customer relations; and coordinating with internal and external parties according to its main functions. Director of Operations II oversees the Division of Power Generation II-1, Division of Power Generation II-2, Division of Primary Energy and Settlement II. In addition, there is the Divison of Spareparts and Services Procurement that is responsible for Director of Operations II.
Harlen	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang Pengembangan dan Niaga ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan terkait kegiatan pengembangan usaha dan pelaksanaan proyek pembangkit serta bisnis lain di luar Pembangkitan dan jasa O&M serta jasa terkait di luar penugasan PT PLN (Persero). Direktur Pengembangan dan Niaga membawahi Divison of Business Development I, Divison of Business Development II, Divison of Business Development III dan Division of Project Management and Preconstruction. Selain itu, terdapat Division of Primary Energy and Business Development Procurement yang bertanggungjawab pada Direktur Pengembangan dan Niaga.	Having the duties, responsibilities, and authorities to lead and interpret the Company's development and commerce strategy and policy into business process, procedures and rules; developing, supervising, and coordinating with internal and external parties concerning business development activities and power plant project implementation, as well as other businesses beyond power generation, O&M services, and PT PLN (Persero)'s assignments. Director of Development and Commerce oversees the Division of Business Development I, Division of Business Development II, Division of Business Development III, and Division of Project Management and Preconstruction. In addition, there is the Division of Primary Energy and Business Development Procurement that is responsible for Director of Development and Commerce.

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Nama Nama	Jabatan Position	Pembagian Tugas	Description of Duties
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang keuangan ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendanaan, investasi penyertaan, anggaran, tresuri, perpajakan, asuransi dan Akuntansi, pembinaan Anak Perusahaan dan Afiliasi, serta melakukan koordinasi sesuai fungsi utama dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Direktur Keuangan membawahi Division of Budgeting, Division Treasury and Tax, Divison of Accounting and Insurance, dan Divison of Subsidiaries and Corporate Funding. Selain itu, terdapat Divison of Information Technology yang bertanggungjawab pada Direktur Keuangan.	Having the duties, responsibilities, and authorities to lead and interpret the Company's financial strategy and policy into business process, procedures and rules; developing and supervising the funding activities, participating investment, budgeting, treasury, taxation, insurance and accounting, and guiding the Subsidiaries and Affiliates; and coordinating with internal and external parties according to its main functions. Director of Finance oversees the Division of Budgeting, Division Treasury and Tax, Divison of Accounting and Insurance, dan Divison of Subsidiaries and Corporate Funding. In addition, there is Divison of Information Technology that is responsible for Director of Finance.
Bagus Setiawan	Direktur SDM dan Administrasi Director of Human Capital and Administration	Memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam memimpin dan menerjemahkan kebijakan dan strategi Perusahaan di bidang sumber daya manusia ke dalam proses bisnis, prosedur dan aturan; melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengembangan sistem SDM, pengadaan SDM, pengembangan SDM, administrasi SDM, pengelolaan hubungan industrial, pengelolaan budaya perusahaan serta melakukan koordinasi sesuai fungsi utama dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan. Direktur SDM dan Administrasi membawahi Division of Human Capital and Change Management, Divison of Human Capital Development, Division of Talent Management, Division of Industrial Relations and Remuneration. Selain itu Divison of Corporate Legal bertanggungjawab kepada Direktur SDM dan Administrasi.	Having the duties, responsibilities, and authorities to lead and interpret the Company's human capital policy and strategy into business process, procedures and rules; developing and supervising HC system development, HC procurement, HC development, HC administration, industrial relations management, corporate culture management; and coordinating with internal and external parties according to its main functions. Director of Human Capital and Administration oversees the Division of Human Capital and Change Management, Divison of Human Capital Development, Division of Talent Management, Division of Industrial Relations and Remuneration. In addition, there is Divison of Corporate Legal that is responsible for Director of Human Capital and Administration.

Independensi Direksi
Independence of the Board of Directors

Perusahaan menilai faktor independensi Direksi merupakan salah satu hal penting yang harus dijaga agar seluruh anggota Direksi senantiasa bertindak maksimal demi kepentingan Perusahaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perusahaan telah menetapkan ketentuan bahwa selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan intervensi atau campur tangan dalam kepengurusan Perusahaan. Setiap anggota Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Selain itu, setiap anggota Direksi juga dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2021 telah menyatakan independensinya dalam surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang ditandatangani pada awal pengangkatan dan diperbaharui setiap awal tahun.

For the Company, the Board of Directors' independence is of a paramount matter to maintain, allowing all members of the Board of Directors to work optimally for the Company's interest. Thus, the Company has stipulated a provision that any other parties except for the Board of Directors are prohibited from intervening or interfering with the management of the Company. Each member of the Board of Directors must be able to make decisions objectively, without conflict of interest and free from any pressure from any party. In addition, each member of the Board of Directors is also prohibited from carrying out activities that can interfere with their independence in managing the Company.

All members of the Board of Directors serving in 2021 have declared their independence in a conflict of interest disclosure statement which was signed prior to their appointment and renewed at the beginning of each year.

Kepemilikan Saham Direksi
Shareholding by the Board of Directors

Kepemilikan saham anggota Direksi senantiasa diungkapkan secara berkala melalui Daftar Khusus yang diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Daftar Khusus tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota Direksi beserta keluarganya. Pada tahun 2021, terdapat 1 (satu) orang Anggota Direksi yang tercatat memiliki saham di perusahaan lain dengan kepemilikan kurang dari 5%. Rincian Kepemilikan Saham masing-masing anggota Direksi disajikan dalam tabel berikut:

The shareholding by the Board of Directors members is regularly disclosed through a Special Register prepared by the Corporate Secretary. The Special Register contains information on the shareholding by the Board of Directors members and their families. In 2021, one (1) Director was disclosed to hold ≤5% shares in other company(ies). The followings are details of the shareholding by each member of the Board of Directors:

Kepemilikan Saham Anggota Direksi Tahun 2021
Board of Directors Shareholding in 2021

Nama Name	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain Shareholding in Other Companies
M. Ahsin Sidqi	Nihil Zero
M. Hanafi Nur Rifai	Nihil Zero
R. Bambang Anggono	Nihil Zero
Harlen	Nihil Zero
Endang Astharanti	235.000 lembar saham 235,000 shares
Bagus Setiawan	Nihil Zero

DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi
Policy on Concurrent Position by the Board of Directors

Dalam ketentuan Anggaran Dasar dan *Board Manual*, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas pada Perseroan;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan/atau Daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pada tahun 2021 seluruh anggota Direksi yang menjabat tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan lain, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

As stated in the Articles of Association and the Board Manual, the members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as mentioned below, namely:

1. Member of the Board of Directors in State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises;
2. Member of the Board of Commissioners and/or Supervisory Board of the Company;
3. Other structural and functional positions in Central and/or Regional Government agencies/institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions of the laws and regulations, political party official, and/or political party and/or legislative candidate/member and/or regional head/deputy regional head and/or regional/deputy regional head; and/or
5. Other positions that may lead to any conflicts of interest.

In 2021, all members of the Board of Directors did not serve any concurrent positions at other companies, as shown in the following table.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2021
Board of Directors Concurrent Position in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Jabatan Rangkap di Concurrent Position in	
		Perusahaan Company	Perusahaan Lain Other Company
M. Ahsin Sidqi	Direktur Utama President Director	Tidak Ada N/A	Tidak Ada N/A
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi I Director of Operations I	Tidak Ada N/A	Tidak Ada N/A
R. Bambang Anggono	Direktur Operasi II Director of Operations II	Tidak Ada N/A	Tidak Ada N/A
Harlen	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	Tidak Ada N/A	Tidak Ada N/A
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	Tidak Ada N/A	Tidak Ada N/A
Bagus Setiawan	Direktur SDM dan Administrasi Director of Human Capital and Administration	Tidak Ada N/A	Tidak Ada N/A

Program Pengenalan Perusahaan Bagi Direksi Baru
Orientation Program for New Directors

Pada tahun 2021, Perusahaan telah mengadakan program pengenalan kepada Sdr. Endang Astharanti selaku anggota Direksi yang baru diangkat. Program pengenalan ini dilakukan pada tanggal 2 Desember 2021 guna memberikan pemahaman kepada anggota Direksi yang baru diangkat mengenai gambaran atas aktivitas bisnis, rencana Perusahaan ke depan dan hal-hal strategis lainnya.

In 2021, the Company had held an orientation program for Ms. Endang Astharanti as a new Director. The orientation program was held on December 02, 2021 to provide the new Director with an understanding of the business activities, future plans, and other strategic matters in the Company.

Program Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas
Competency and Capability Development Program

Program peningkatan kompetensi dan kapabilitas untuk Direksi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai daftar program atau kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.

The competency and capability development program for the Board of Directors is given to improve their work effectiveness. Detailed explanation regarding the list of educational/training programs or activities attended by the Board of Directors throughout 2021 is provided in the Company Profile chapter.

Penilaian Atas Kinerja Komite Di Bawah Direksi
Assessment of the Performance of Committees under the Board of Directors

Sampai dengan tahun 2021, Indonesia Power tidak memiliki Komite di bawah Direksi, sehingga tidak ada informasi terkait Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi. Namun demikian, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh organ fungsional yang dipimpin oleh Executive Vice President. Masing-masing Unit Kerja tersebut mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Direksi sesuai dengan *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan sebagai target kinerja yang perlu dicapai.

Until 2021, Indonesia Power did not have any Committees under the Board of Directors, and therefore there are no information on the assessment of the performance of such Committees. However, the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors is supported by functional organs led by the Executive Vice President (EVP). Each Work Unit answers its performance to the Board of Directors in accordance with the Key Performance Indicators set as the mandatory performance targets.

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

WORK RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Terciptanya hubungan kerja yang baik diantara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi salah satu hal penting bagi Perusahaan agar masing-masing organ dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai fungsinya. Selain mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan juga telah memiliki *Board Manual* sebagai pedoman dan tata tertib yang mengatur hubungan kerja yang efektif antara Direksi dan Dewan Komisaris. Tujuan dari *Board Manual* Perusahaan dimaksudkan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, efektif dan efisien dengan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan. Ruang lingkup hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam *Board Manual*, mencakup:

1. Perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris;
2. Perbuatan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS;
3. Pertemuan formal dan informal Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Komunikasi formal dan informal Dewan Komisaris dan Direksi.

The establishment of a healthy work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is crucial for the Company, so that each organ can work effectively and efficiently according to their respective functions. In addition to referring to its Articles of Association, the Company owns a Board Manual in place that guides and regulates an effective work relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Board Manual aims to create a standard work relationship between both Boards in implementing their duties, thus allowing the creation of a professional, transparent, effective, and efficient Company management that upholds integrity in running the Company's business activities. The scope of work relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors has been accommodated in the Board Manual, as follows:

1. Board of Directors' actions requiring written approval from the Board of Commissioners;
2. Board of Directors' actions requiring written response from the Board of Commissioners and GMS approval;
3. Formal and informal meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
4. Formal and informal communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors.



HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

AFFILIATION BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDER

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Affiliation

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali, sebagaimana tercermin pada tabel berikut:

All members of the Board of Commissioners have no affiliation, neither familial nor financial relationship, with each other, as well as with the Directors and the Major and/or Controlling Shareholder, as shown in the table below:

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dengan Sesama Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pemegang Saham Utama/Pengendali

Disclosure of Affiliation among Board of Commissioners Members and between Board of Commissioners and Board of Directors and Majority/Controlling Shareholder

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relation with						Hubungan Keuangan sebagai Financial Relation with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Mohamad Oemar	Komisaris Utama President Commissioners	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioners	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioners	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Munir Ahmad	Komisaris Commissioners	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Miftahul Jannah	Komisaris Commissioners	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ulil Abshar	Komisaris Independen Independent Commissioners	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI
AFFILIATION BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDER

Hubungan Afiliasi Direksi
Board of Directors' Affiliation

Sama halnya dengan Dewan komisaris, seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keuangan ataupun hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Utama.

Similar to the Board of Commissioners, all incumbent members of the Board of Directors have neither financial nor up to third degree familial relationship with each other, as well as with the Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholder.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Direksi dengan Sesama Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama/Pengendali
Disclosure of Affiliation among Board of Directors members and between Board of Directors and Board of Commissioners and Majority/Controlling Shareholder

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relation with						Hubungan Keuangan sebagai Financial Relation with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
M. Ahsin Sidqi	Direktur Utama President Director	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi I Director of Operations I	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
R. Bambang Anggono	Direktur Operasi II Director of Operations II	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Harlen	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Bagus Setiawan	Direktur SDM dan Administrasi Director of Human Capital and Administration	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
Provision and Implementation of Board of Commissioners Meetings

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta tata tertib rapat sebagaimana yang diatur dalam *Board Manual*. Dewan Komisaris secara berkala yaitu setiap bulan mengadakan rapat, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi, dan rapat sewaktu-waktu di luar rapat berkala untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak ataupun hal-hal yang perlu segera mendapatkan keputusan Dewan Komisaris.

Board of Commissioners meetings are held by referring to the provisions set in the Company Articles of Association and meeting etiquette contained in the Board Manual. The Board of Commissioners holds its meetings every month, be it the internal ones or the joint meetings with the Board of Directors. Accidental meetings are also held outside the regular ones to discuss urgent matters or matters requiring swift decision from the Board of Commissioners.

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat berkala bersama Komite. Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat berkala bersama Komite dapat dilihat dalam uraian masing-masing Komite Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan ini.

In 2021, the Board of Commissioners held regular meetings with its Committees. The attendance of the Board of Commissioners in these meetings can be seen in the details of each Board of Commissioners Committee of this Chapter of Corporate Governance.

Ketentuan dan Pelaksanaan Rapat Direksi
Provision and Implementation Board of Directors Meetings

Sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi dan atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Direksi.

As specified in the Board Manual, Board of Directors meetings shall be held at least once in a month. The Board of Directors meetings can be held at any time when one or more members of the Board of Directors deem it necessary, supported by written request from one or more members of the Board of Directors.

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali rapat dengan rata-rata tingkat kehadiran anggota Direksi secara keseluruhan adalah sebesar 99%.

The Board of Directors held 47 (forty-seven) internal meetings throughout 2021, at average attendance rate of 99%.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi Dalam Rapat Internal
Frequency and Attendance Rate of Board of Directors in Internal Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendees	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
M. Ahsin Sidqi	Direktur Utama President Director	47	47	100%
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi I Director of Operations I	47	47	100%
Bambang Anggono	Direktur Operasi II Director of Operations II	47	46	98%

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendees	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Harlen	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	47	46	98%
Khusnul Mubien*	Direktur Keuangan Director of Finance	42	42	100%
Endang Astharanti**	Direktur Keuangan Director of Finance	5	5	100%
Bagus Setiawan	Direktur SDM dan Administrasi Director of Human Capital and Administration	47	44	94%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Direksi Average Attendance of Board of Directors				**99%**

Keterangan: Notes:
*) Berhenti menjabat sejak tanggal 25 November 2021. **) Mulai menjabat pada tanggal 25 November 2021
*) Leaving the position on November 25, 2021 **) Assuming the position since November 25, 2021

Agenda Rapat Internal Direksi
Board of Directors Internal Meeting Agenda

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
7 Januari 2021 January 7, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan RKAP 2021 sebagai persiapan RUPS RKAP 2021	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. WP&B 2021 exposure to prepare for GMS on WP&B 2021	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
20 Januari 2021 January 20, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Akhir Studi Pelaksanaan Relokasi PLTGU Jawa ke Bali 3. Paparan Program CSR Kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam gempa bumi di Majene Sulawesi Barat dan Banjir di Kalimantan Selatan	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Final report for the study of CCPP relocation from Java to Bali 3. Exposure of CSR humanitarian program to help the community affected by earthquake in Majene, West Sulawesi and flood in South Kalimantan	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
27 Januari 2021 January 27, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Rencana Pengadaan Batubara *Emergency* Sumber Tambang 3. Tindaklanjut Lahan Jambi 1 untuk Persiapan *Co Firing* >20%	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Emergency coal procurement plan for mining source 3. Follow-up on Jambi 1 field for cofiring >20% preparation	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
5 Februari 2021 February 5, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Persetujuan Eksekusi Usulan Anggaran Investasi (AI) murni 2021 PLTU AMC Jawa & Biaya Cofiring PLTU FTP 3. Usulan Perubahan Pengelolaan MPP Papua 4. Paparan Kepindahan Kantor Indonesia Power	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Approval for executing the proposed pure Investment Budget (AI) 2021 SPP Java AMC & SPP FTP cofiring cost 3. Proposal for the change of management for MPP Papua 4. Exposure of Indonesia Power office move	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
16 Februari 2021 February 16, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Finalisasi Nilai KKU Semester II dan Rencana Target Kontrak Manajemen Unit 2021 3. Paparan Laporan Hasil Akhir SPI PT PLN (Persero) 4. Usulan Kelanjutan LIGAT Step 3, 4 dan 5	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Finalization of Performance Coefficient (KKU) score Semester 2 and Unit Management Contract Target Plan 2021 3. Exposure of Report of Final Result of PT PLN (Persero) Internal Control Unit 4. Proposal for the continuation of LIGAT steps 3, 4, and 5	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
25 Februari 2021 February 25, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Persetujuan Pengadaan Sewa Kompresor PLTGU Cilegon 3. Persetujuan Pengadaan Batubara Unit Suralaya 1-7 4. Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Bisnis Tahun 2021 5. Laporan Inisiatif Strategis Bidang Pengelolaan Kesehatan	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Approval for the procurement of rental compressor for CCPP Cilegon 3. Approval for the procurement of coal for Suralaya Units 1-7 4. Report of Business Forum Implementation Result 2021 5. Report of Health Management Strategic Initiative	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
10 Maret 2021 March 10, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Pelaksanaan *Whistle Blowing System* tahun 2020 3. Laporan Persiapan *Launching Anti Corruption* COE 4. Laporan *Progress* PLTA Poigar-2 5. *Safety Culture*	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Report of Whistleblowing System Implementation in 2020 3. Report of Anti-Corruption COE Launching Preparation 4. HPP Poigar-2 Progress Report 5. Safety Culture	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
17 Maret 2021 March 17, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan pemantapan Tata Kelola HSSE untuk meningkatkan *Safety Culture* 3. Persetujuan Tema dan Desain *Annual Report* dan *Sustainability Report* 2020	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Report of HSSE Governance strengthening to improve Safety Culture 3. Approval for theme and design of Annual Report and Sustainability Report 2020	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
24 Maret 2021 March 24, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan *Joint Research* Rencana Suralaya Berjangka 3. Persetujuan Program CSR Semester 1 Tahun 2021 4. Laporan Hasil Survei Perilaku Etis tahun 2020 5. Laporan Evaluasi *Accident* dan Upaya Pencegahan serta Perbaikan	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Report of Joint Research for Suralaya Term Plan 3. Approval for CSR Program for Semester 1 of 2021 4. Report of Ethical Conduct Survey 2020 Result 5. Report of Accident Evaluation, Prevention, and Mitigation	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
30 Maret 2021 March 30, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Permohonan Persetujuan Usulan Penyelesaian *Dispute* Tagihan Jasa *Midstream* 3. Permohonan Persetujuan Pemegang Saham terkait RJPP PT Putra Indo Tenaga	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Request for approval for the proposal for midstream service invoice dispute settlement 3. Request for Shareholders' approval for PT Putra Indo Tenaga Long-Term Plan	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Harlen 4. Khusnul Mubien
8 April 2021 April 8, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Hasil Survei HRSE 3. Permohonan Persetujuan Usulan Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan 2021 4. Permohonan Persetujuan Perubahan Skema Pendanaan Pengembangan Proyek PLTMG Baloi 30MW oleh PT Cogindo DayaBersama 5. Persetujuan Penggunaan Dana Pengganti *Development Cost* PLTU Kalbar-1 untuk Pengembangan Proyek PLTS *Land Base* Grati POMU oleh PT Indo Tenaga Hijau	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Report of HRSE Survey Result 3. Request for approval for the proposal for the Company's Organizational Structure Change in 2021 4. Request for approval for the change in funding scheme for GEPP Baloi 30 MW project development by PT Cogindo DayaBersama 5. Approval for the appropriation of substitute fund of SPP West Kalimantan-1 development cost for Land-based SoPP Grati POMU project development by PT Indo Tenaga Hijau	1. M. Hanafi Nur Rifai 2. Bambang Anggono 3. Harlen 4. Khusnul Mubien 5. Bagus Setiawan
14 April 2021 April 14, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Pengajuan Anggaran Pengadaan *Part Critical* PLTU Lontar 3. Paparan Rencana Bisnis Pemanfaatan Faba PLTU 4. Laporan *Quick Win Program Boiler*	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Proposal for critical part procurement budget for SPP Lontar 3. Exposure of business plan for SPP FABA utilization 4. Report of boiler quick win program	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
21 April 2021 April 21, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan *Lesson Learn Boiler* PLTU Suralaya 8 OMU 3. Laporan *Lesson Learn Leak Condensor* PLTU Adipala OMU 4. Usulan Persetujuan Pembentukan Tim Percepatan Peningkatan Kapasitas Bongkar dan Kesiapan *Coal Handling*	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Report of lesson learned from SPP Suralaya 8 OMU boiler issue 3. Report of lesson learned from SPP Adipala OMU condenser leak 4. Proposal for approval for the establishment of acceleration team for coal handling preparation and unload capacity expansion	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
28 April 2021 April 28, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Permohonan Persetujuan Pinjaman PT Putra Indo Tenaga kepada Pemegang Saham (PT Indonesia Power) dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Modal Kerja tahun 2021-2022 3. Laporan Pergerakan LSM Amsub	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Request for approval for PT Putra Indo Tenaga loan to shareholder (PT Indonesia Power) to meet the need for work capital for 2021-2022 3. Report of LSM Amsub movement	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
5 Mei 2021 May 5, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Wacana Pembentukan *Holding* Geotermal oleh KBUMN	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Report of geothermal holding establishment plan by the Ministry of SOEs	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien
11 Mei 2021 May 11, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Persetujuan Perpanjangan *Availability* Period SHL Penerusan Pinjaman KfW untuk Rehabilitasi Kamojang Unit 2-3 3. Permohonan Persetujuan Pinjaman PT Putra Indo Tenaga kepada Pemegang Saham (PT Indonesia Power) dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Modal Kerja tahun 2021-2022 4. Paparan Pekerjaan *Temporary Jetty* PLTU Pelabuhan Ratu OMU	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Approval for the extension of SHL availability period for KfW funding for Kamojang Units 2-3 rehabilitation 3. Request for approval for PT Putra Indo Tenaga loan to shareholder (PT Indonesia Power) to meet the need for work capital for 2021-2022 4. Exposure of temporary workers for SPP Pelabuhan Ratu OMU jetty	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
19 Mei 2021 May 19, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan Rencana Tata Kelola Kesehatan PT Indonesia Power 3. Paparan Implementasi *Near Miss* di Pembangkit 4. Paparan Terkait Kontrak Penugasan PLTU Pangkalan Susu Unit 3-4	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Exposure of PT Indonesia Power health governance plan 3. Exposure of near miss implementation in power plants 4. Exposure of civil servant secondment contract SPP Pangkalan Susu Unit 3-4	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
27 Mei 2021 May 27, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Rencana Setoran Modal Indonesia Power ke PT Putra Indo Tenaga untuk Pengembangan Proyek PLTA Poigar-2 (30 MW) 3. Paparan Strategi Penambahan Pasokan Batubara Unit Suralaya 1-7 & 8 Antisipasi Kelangkaan Pasokan Akibat Kenaikan Harga Batubara serta Persetujuan Metode Peminjam- Pakaian Batubara PLTU Suralaya 1-7 & Unit 8	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Indonesia Power's Capital Injection Plan to PT Putra Indo Tenaga for HPP Poigar -2 (30 MW) project development 3. Exposure of fuel supply addition strategy for Suralaya Units 1-7 & 8 for anticipating short fuel supply due to price increase and approval for fuel rent-use method for SPP Suralaya Units 1-7.	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
9 Juni 2021 June 9, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Radir Sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Persetujuan Usulan Work from Bali 3. Laporan Progres SIC 4. Laporan Perkembangan Masalah Hukum & WBS 5. Laporan Tim *Task Force* Batubara & Energi Primer 6. Paparan Rencana Pengembangan Bisnis untuk mencari *New Revenue Stream*	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Approval for Work from Bali proposal 3. SIC Progress Report 4. Legal Issue & WBS Progress Report 5. Coal & Primary Energy Task Force Report 6. Exposure of Business Development Plan to seek for New Revenue Stream	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
16 Juni 2021 June 16, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan *Draft* Usulan RKAP 2022 3. Persetujuan Program *Anti Fire Anti Explosion* Suralaya PGU 4. Laporan Kasus *Generator Rotor* Jeranjang 5. Paparan *Beyond* kWh *Business Through Power Generation Group Purchasing Organization* 6. Laporan Perbaikan Pasca Longsor di PLTMH Gunung Wugul	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Report of draft WP&B 2022 proposal 3. Approval for Anti-Fire Anti-Explosion program at Suralaya PGU 4. Report of rotor generator issue in Jeranjang 5. Exposure of Beyond kWh Business through Power Generation Group Purchasing Organization 6. Report of Post-Landslide Repair in MHPP Gunung Wugul	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
23 Juni 2021 June 23, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Persetujuan Penambahan Volume Kontrak Batubara PT OBP sebanyak 3 Juta MT untuk masa 5 tahun (setara 600 Ribu MT/tahun) 3. *Brainstorming* Tim *Integre Quadro* terkait Desain Pembelajaran Pengembangan *Leadership* PT Indonesia Power	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Approval for the addition of coal contract volume for PT OBP of 3 million MT for 5 years (equal to 600 thousand MT/year) 3. Integre Quadro Team brainstorming on Indonesia Power Leadership Development Learning Design	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
30 Juni 2021 June 30, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Progres Kontrak O&M PLTU #3 BARRU dan PLTU SUMBAWA BARAT 3. Laporan *Recovery* Trafo Suralaya Unit 7	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Progress Report of O&M Contract for SPP #3 Barru and SPP Sumbawa Barat 3. Report of Transformer Recovery at Suralaya Unit 7	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
7 Juli 2021 July 7, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan Terkait Usulan Pengalihan Saham PT Pusaka Jaya Baru di PT Indo Pusaka Berau 3. Laporan Progres Aplikasi *Ask the Expert*	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Exposure of proposal for PT Pusaka Jaya Baru share transfer in PT Indo Pusaka Berau 3. Progress Report of Ask the Expert application	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
14 Juli 2021 July 14, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Persetujuan Pelaksanaan *Long Terms Service Agreement* (LTSA) *Spare Parts* dan Jasa PLTMG Balai Pungut – Duri 3. Paparan Progres *Project* Rehabilitasi Kamojang 4. Laporan Progres Penyiapan AMC PLTU Pangkalan Susu 3-4 5. Laporan Perkembangan Kasus Hukum & *Review* Data-data Kontrak	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Approval for the execution of Long-Term Service Agreement (LTSA) of Spare Part and Services for GEPP Balai Pungut - Duri 3. Exposure of Kamojang rehabilitation project progress 4. Progress Report of SPP Pangkalan Susu 3-4 AMC Preparation 5. Progress Report of Legal Case and Contract Data Review	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
21 Juli 2021 July 21, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Progres Proyek PLTGU Tambak Lorok dan *Review* 4th EOT 3. Laporan Informasi Produksi Oksigen di *Power Plant* untuk Aksi Kemanusiaan Bersama PLN Grup	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Progress Report of CCPP Tambak Lorok Project and 4th EOT Review 3. Report of information on Oxygen Production at Power Plants for Humanitarian Action with PLN Group	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
28 Juli 2021 July 28, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Ijin Pelaksanaan Perdagangan Emisi antar Unit tahun 2021 di Sektor Pembangkit Listrik 3. Laporan Gangguan & *Recovery* GIL PLTU Suralaya #7 saat Pasca Penggantian Trafo 22 Juli 2021 4. Paparan Materi Presentasi Sesi *Interview* Penjurian TOP GRC *Award* 2021	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Permit for inter-Unit Emission Trade in 2021 in Electricity Power Generation Sector 3. Report of GIL Failure & Recovery of SPP Suralaya #7 post-transformer replacement on July 22, 2021 4. Exposure of presentation material during interview session of TOP GRC Award 2021 judging	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
4 Agustus 2021 August 4, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Pemaparan Pencapaian Kinerja Unit Semester I 2021 3. Laporan Pengalihan Batubara PLTU Suralaya 1-7 ke PLTU Banten 1 Suralaya Bulan Agustus 4. Laporan Progress Vaksinasi Pegawai Perusahaan (target 100%) & Alihdaya	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Pemaparan Pencapaian Kinerja Unit Semester I 2021 3. Laporan Pengalihan Batubara PLTU Suralaya 1-7 ke PLTU Banten 1 Suralaya Bulan Agustus 4. Laporan Progress Vaksinasi Pegawai Perusahaan (target 100%) & Alihdaya	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
12 Agustus 2021 August 12, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Progres Produksi Oksigen di PT Indonesia Power	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Progres Produksi Oksigen di PT Indonesia Power	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
18 Agustus 2021 August 18, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Progres Persiapan Rapat Koordinasi Semester 2 Tahun 2021	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. Progress Report of Preparation of Coordination Meeting Semester 2 of 2021	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien
1 September 2021 September 1, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan BJPSDA dan rencana pengawalan RPP UU17 2019 3. Laporan *Sustainability Feed Stok Co-Firing*	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan BJPSDA dan rencana pengawalan RPP UU17 2019 3. Laporan Sustainability Feed Stok Co-Firing	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
8 September 2021 September 8, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan Revisi RKAP 2021 3. Laporan Permasalahan Lahan PLTA Mrica PGU 4. Laporan *Update* Kebijakan IP dalam Pengaturan Pegawai Masa PPKM 5. Laporan terkait Surat Teguran PT PLN (Persero) atas Temuan BPK	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan Revisi RKAP 2021 3. Laporan Permasalahan Lahan PLTA Mrica PGU 4. Laporan Update Kebijakan IP dalam Pengaturan Pegawai Masa PPKM 5. Laporan terkait Surat Teguran PT PLN (Persero) atas Temuan BPK	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
15 September 2021 September 15, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan Proses Pelaksanaan Persiapan Penghapusan Aset Geothermal Indonesia Power 3. Persetujuan Lelang EPC Nusa Penida 4. Laporan Bantuan CSR dan Sponsorship Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) 5. Laporan Kesiapan Relokasi Grati	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan Proses Pelaksanaan Persiapan Penghapusan Aset Geothermal Indonesia Power 3. Persetujuan Lelang EPC Nusa Penida 4. Laporan Bantuan CSR dan Sponsorship Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) 5. Laporan Kesiapan Relokasi Grati	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
22 September 2021 September 22, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya dan Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Rencana Pengalihan Saham PT PJB di PT IPB 3. Laporan Hasil Kajian Hukum atas Rencana Pengalihan Saham 4. Pembahasan Rencana Pengalihan Aset O&M Pembangkit PLN ke IP guna Meningkatkan Pendapatan Penjualan tenaga Listrik 5. Laporan Strategi Kesiapan Batubara Memasuki Musin Hujan/Cuaca Buruk di Awal Tahun Depan	1. Delivery of Board of Directors meeting etiquette, review of the previous Board of Directors meetings, and report of Corporate Management Contract 2. PT PJB Share Transfer Plan at PT IPB 3. Report of Result of Legal Review of Share Transfer Plan 4. Discussion of O&M Asset Transfer Plan of PLN Power Plants to IP to Increase Income from Electricity Sales 5. Strategic Report of Coal Readiness Entering Rainy Season/Facing Bad Weather at the Beginning of the Next Year	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
29 September 2021 September 29, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Rencana Relokasi Pembangkit Grati Ke Bali	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Rencana Relokasi Pembangkit Grati Ke Bali	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
6 Oktober 2021 October 6, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Progres dan Rencana Percepetan *Dredging* Waduk PB Sudirman 3. Laporan Progres Penyelesaian Proyek PLTU IPP Kalbar 1 4. Permohonan Persetujuan Pengadaan Batubara untuk Suralaya Tahun 2022-2026 5. Penyelesaian Final Acceptance Certificate (FAC) Add On Grati	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Progres dan Rencana Percepetan Dredging Waduk PB Sudirman 3. Laporan Progres Penyelesaian Proyek PLTU IPP Kalbar 1 4. Permohonan Persetujuan Pengadaan Batubara untuk Suralaya Tahun 2022-2026 5. Penyelesaian Final Acceptance Certificate (FAC) Add On Grati	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
13 Oktober 2021 October 13, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan *Live Drone Monitoring* Waduk Mrica PGU 3. Paparan Pembentukan Tim Pengendalian *Not Allowable Cost* (NAC) 4. Laporan Kajian Potensi & Skema Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Kelautan 5. Paparan Persiapan *Asessment* KPKU Menuju Industri *Leader*	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Live Drone Monitoring Waduk Mrica PGU 3. Paparan Pembentukan Tim Pengendalian Not Allowable Cost (NAC) 4. Laporan Kajian Potensi & Skema Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Kelautan 5. Paparan Persiapan Asessment KPKU Menuju Industri Leader	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
19 Oktober 2021 October 19, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Pengelolaan Lahan Saguling 3. Permohonan Ijin untuk Penandatangan MOU IP-IAE dan Pengadaan Gas s.d. Juni 2022 untuk Penguatan Sistem Jawa Bali	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Pengelolaan Lahan Saguling 3. Permohonan Ijin untuk Penandatangan MOU IP-IAE dan Pengadaan Gas s.d. Juni 2022 untuk Penguatan Sistem Jawa Bali	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
28 Oktober 2021 October 28, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan Tindak Lanjut Penandatanganan AMC PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 3. *Live Drone* Pengamatan Proyek Cileunca	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan Tindak Lanjut Penandatanganan AMC PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan 4 3. Live Drone Pengamatan Proyek Cileunca	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
3 November 2021 November 3, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan terkait *Dredging* Waduk PB Sudirman: a. Hasil Kajian Oleh Lembaga Pendidikan b. Laporan *Legal Opinion* Pekerjaan *Dregging* Waduk PB Soedirman 3. Laporan Pengadaan Batubara Suralaya PGU 4. Restrukturisasi Organisasi PT Indo Pusaka Berau	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan terkait Dredging Waduk PB Sudirman: a. Hasil Kajian Oleh Lembaga Pendidikan b. Laporan Legal Opinion Pekerjaan Dregging Waduk PB Soedirman 3. Laporan Pengadaan Batubara Suralaya PGU 4. Restrukturisasi Organisasi PT Indo Pusaka Berau	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
10 November 2021 November 10, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Penyediaan Lahan PLTU MT Jambi-1 *Co-Firing* 30% 3. Laporan Ketentuan Seragam PLN Group dan Kebijakan untuk IP 4. Usulan Penetapan Tantiem dan Bonus AP/P/A tahun 2020	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Penyediaan Lahan PLTU MT Jambi-1 Co-Firing 30% 3. Laporan Ketentuan Seragam PLN Group dan Kebijakan untuk IP 4. Usulan Penetapan Tantiem dan Bonus AP/P/A tahun 2020	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
17 November 2021 November 17, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Tindak lanjut Hasil Asesment KPKU 3. Laporan *Review* Kontrak Perusahaan 4. Laporan kesiapan Energi Primer (batubara) akhir tahun 5. Laporan *Update* WBS 6. Laporan Usulan Disain Kalender 2022 7. *Live Drone* PLTU Suralaya 1-7, PLTU Banten 1 Suralaya, Suralaya 9-10	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Tindak lanjut Hasil Asesment KPKU 3. Laporan Review Kontrak Perusahaan 4. Laporan kesiapan Energi Primer (batubara) akhir tahun 5. Laporan Update WBS 6. Laporan Usulan Disain Kalender 2022 7. Live Drone PLTU Suralaya 1-7, PLTU Banten 1 Suralaya, Suralaya 9-10	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Khusnul Mubien 5. Bagus Setiawan

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
24 November 2021 November 24, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Hasil *Project* Pengembangan Model Produktivitas Terintegrasi pada Fungsi Bisnis Pembangkitan dan Bisnis Jasa Pembangkitan Indonesia Power 3. Diskusi BOD dengan PT LETMI ITB tentang Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi Indonesia Power 4. Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Pajak Impor Barang dan Amandemen Proyek BMPP Nusantara 2- 60 MW dan Nusantara 3- 30 MW 5. Tindaklanjut Pengadaan Batubara Spot untuk Pengamanan Pasokan Batubara PLTU Suralaya 1-7 6. Laporan Persiapan Proper Emas dan Hijau Indonesia Power tahun 2021 serta Arahan Direksi	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Laporan Hasil Project Pengembangan Model Produktivitas Terintegrasi pada Fungsi Bisnis Pembangkitan dan Bisnis Jasa Pembangkitan Indonesia Power 3. Diskusi BOD dengan PT LETMI ITB tentang Evaluasi dan Penyempurnaan Organisasi Indonesia Power 4. Permohonan Persetujuan Pemanfaatan Pajak Impor Barang dan Amandemen Proyek BMPP Nusantara 2- 60 MW dan Nusantara 3- 30 MW 5. Tindaklanjut Pengadaan Batubara Spot untuk Pengamanan Pasokan Batubara PLTU Suralaya 1-7 6. Laporan Persiapan Proper Emas dan Hijau Indonesia Power tahun 2021 serta Arahan Direksi	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Khusnul Mubien 6. Bagus Setiawan
2 Desember 2021 December 2, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan *Future* Suralaya (Hasil Laporan Pekerjaan Konsultan) 3. Laporan Perkembangan Pemindahan PLTGU Grati ke Bali 4. Laporan Pemulihan Batubara Suralaya	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Paparan Future Suralaya (Hasil Laporan Pekerjaan Konsultan) 3. Laporan Perkembangan Pemindahan PLTGU Grati ke Bali 4. Laporan Pemulihan Batubara Suralaya	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Endang Astharanti 6. Bagus Setiawan
7 Desember 2021 December 7, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat. 2. Paparan Materi RUPS RKAP 2022 3. Laporan Notisi BPKP terkait *Dispute* Tagihan BJPSDA pada PLN Grup oleh PJT-2	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat. 2. Paparan Materi RUPS RKAP 2022 3. Laporan Notisi BPKP terkait Dispute Tagihan BJPSDA pada PLN Grup oleh PJT-2	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Endang Astharanti 6. Bagus Setiawan
15 Desember 2021 December 15, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Usulan Penetapan Laba Bersih Tahun Buku 2020 Anak Perusahaan Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi Indonesia Power 3. Laporan Adendum BMPP Kolaka I 4. *Live Drone* PLTU Barru	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Usulan Penetapan Laba Bersih Tahun Buku 2020 Anak Perusahaan Perusahaan Patungan dan Perusahaan Asosiasi Indonesia Power 3. Laporan Adendum BMPP Kolaka I 4. Live Drone PLTU Barru	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Endang Astharanti 6. Bagus Setiawan

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
22 Desember 2021 December 22, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Permohonan ijin Proses Pengadaan Relokasi PLTG Grati ke Pesanggaran 3. Laporan Pengadaan Batubara Spot untuk Pengamanan Pasokan Batubara PLTU Suralaya 1-7 4. Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa O&M PLTU Kalbar-1 (2X100MW) - PT Cogindo DayaBersama 5. Amandemen Proyek Tambak Lorok blok 3	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Permohonan ijin Proses Pengadaan Relokasi PLTG Grati ke Pesanggaran 3. Laporan Pengadaan Batubara Spot untuk Pengamanan Pasokan Batubara PLTU Suralaya 1-7 4. Permohonan Persetujuan Penandatanganan Perjanjian dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa O&M PLTU Kalbar-1 (2X100MW) - PT Cogindo DayaBersama 5. Amandemen Proyek Tambak Lorok blok 3	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Endang Astharanti 6. Bagus Setiawan
29 Desember 2021 December 29, 2021	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, *Review* Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Persetujuan Pengadaan Tambahan Gas PLTG Grati 3. Persetujuan Pengadaan Batubara Spot untuk Pengamanan Pasokan Batubara PLTU Suralaya 1-7 - Koperasi Bangun Prima Mandiri 4. Laporan terkait Krisis Energi Primer 5. Laporan Penyerapan Anggaran tahun 2021 6. Laporan Audit Khusus Pengelolaan Lahan pada Saguling POMU	1. Penyampaian Tata Tertib Rapat Direksi, Review Rapat Direksi sebelumnya & Laporan Kontrak Manajemen Korporat 2. Persetujuan Pengadaan Tambahan Gas PLTG Grati 3. Persetujuan Pengadaan Batubara Spot untuk Pengamanan Pasokan Batubara PLTU Suralaya 1-7 - Koperasi Bangun Prima Mandiri 4. Laporan terkait Krisis Energi Primer 5. Laporan Penyerapan Anggaran tahun 2021 6. Laporan Audit Khusus Pengelolaan Lahan pada Saguling POMU	1. M. Ahsin Sidqi 2. M. Hanafi Nur Rifai 3. Bambang Anggono 4. Harlen 5. Endang Astharanti 6. Bagus Setiawan

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

Selain mengadakan rapat internal, Dewan Komisaris juga mengagendakan pertemuan berkala dalam forum Rapat Dewan Komisaris-Direksi. Rapat ini adalah sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan Direksi dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat Gabungan. Penyelenggaraan rapat berkala ini untuk membahas berbagai agenda terkait rencana kerja, operasional, peluang usaha, serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

In addition to holding internal meetings, the Board of Commissioners also plans Board of Commissioners-Board of Directors (BOC-BOD) joint meetings on a periodical basis. The meeting aims to discuss the reports submitted by the Board of Directors as well as to provide responses, notes, and advices that are recorded in the Minutes of Joint Meeting. BOC-BOD joint meeting discusses, among others, work plans, operations, business opportunities, and strategic issues that require the Board of Commissioners' approval.

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris mengadakan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat dengan rincian kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

In 2021, the Board of Commissioners had held 13 (thirteen) joint meetings with the Board of Directors, with the following attendance rates for each member of both the Board of Commissioners and Board of Directors:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Dalam Rapat Gabungan

Frequency and Attendance Rate of Board of Commissioners and Board of Directors in Joint Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendees	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Kehadiran Dewan Komisaris Board of Commissioners Attendance				
Mohamad Oemar	Komisaris Utama President Commissioners	13	12	92%
F.X. Sutijastoto*	Komisaris Commissioners	6	6	100%
Iskandar Simorangkir**	Komisaris Commissioners	12	11	92%
Djoko Siswanto***	Komisaris Commissioners	7	6	86%
Munir Ahmad	Komisaris Commissioners	13	11	85%
Miftahul Jannah	Komisaris Commissioners	13	13	100%
Ulil Abshar	Komisaris Independen Independent Commissioners	13	12	92%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Average Attendance of Board of Commissioners				92%
Kehadiran Direksi Board of Directors Attendance				
M. Ahsin Sidqi	Direktur Utama President Director	13	13	100%
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi I Director of Operations I	13	12	92%
Bambang Anggono	Direktur Operasi II Director of Operations II	13	13	100%

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Attendees	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Khusnul Mubien*	Direktur Keuangan Director of Finance	12	12	100%
Endang Astharanti**	Direktur Keuangan Director of Finance	1	1	100%
Harlen	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	13	11	85%
Bagus Setiawan	Direktur SDM dan Administrasi Director of Human Capital and Administration	13	13	100%
Rata-Rata Tingkat Kehadiran Direksi Average Attendance of Board of Directors				**97%**

Keterangan Kehadiran Dewan Komisaris:
*)Berhenti menjabat pada 6 Juli 2021; **)Mulai menjabat pada 9 Februari 2021; ***)Mulai menjabat pada 6 Juli 2021
Note on Board of Commissioners Attendance:
*Leaving the position on July 06, 2021 **Serving the position since February 09, 2021 ***)Serving the position since July 06, 2021

Keterangan Kehadiran Direksi:
*) Berhenti menjabat sejak tanggal 25 November 2021. **) Mulai menjabat pada tanggal 25 November 2021
Note on Board of Directors Attendance:
*) Leaving the position on November 25, 2021 **) Assuming the position since November 25, 2021

Tingkat kehadiran Dewan Komisaris secara keseluruhan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi adalah sebesar 92%, sedangkan rata-rata tingkat kehadiran anggota Direksi secara keseluruhan dalam rapat gabungan adalah sebesar 97%.

The total attendance rate of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners-Board of Directors joint meetings is 92%, while the average attendance of members of Board of Directors in whole in joint meetings is 97%.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi
Agenda of Board of Commissioners-Board of Directors Joint Meetings

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
26 Januari 2021 January 26, 2021	Persiapan RUPS RKAP Tahun 2021 Indonesia Power	Preparation of GMS 2021 on WP&B	1. Mohamad Oemar 2. F.X. Sutijastoto 3. Munir Ahmad 4. Miftahul Jannah 5. Ulil Abshar 6. M. Ahsin Sidqi 7. M. Hanafi Nur Rifai 8. R. Bambang Anggono 9. Bagus Setiawan 10. Khusnul Mubien
23 Februari 2021 February 23, 2021	1. Isu Strategis Perusahaan 2. Evaluasi Kinerja s.d Januari Tahun 2021 3. Penyampaian Induksi Dewan Komisaris	1. Company Strategic Issues 2. Performance Evaluation until January 2021 3. Report of Board of Commissioners Induction	1. Mohamad Oemar 2. F.X. Sutijastoto 3. Iskandar Simorangkir 4. Munir Ahmad 5. Miftahul Jannah 6. Ulil 7. M. Ahsin Sidqi 8. M. Hanafi Nur Rifai 9. R. Bambang Anggono 10. Bagus Setiawan 11. Khusnul Mubien 12. Harlen

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
31 Maret 2021 March 31, 2021	1. Isu Strategis Perusahaan 2. Laporan Kinerja Perusahaan s.d Februari Tahun 2021	1. Company Strategic Issues 2. Company Managerial Report until February 2021	1. Mohamad Oemar 2. F.X. Sutijastoto 3. Iskandar Simorangkir 4. Munir Ahmad 5. Miftahul Jannah 6. Ulil Abshar 7. M. Ahsin Sidqi 8. M. Hanafi Nur Rifai 9. R. Bambang Anggono 10. Bagus Setiawan 11. Khusnul Mubien
26 April 2021 April 26, 2021	1. Isu strategis Perusahaan s.d bulan April Tahun 2021 2. Laporan Manajemen Perusahaan s.d Triwulan I Tahun 2021	1. Company Strategic Issues until April 2021 2. Company Managerial Report until Q1 of 2021	1. Mohamad Oemar 2. F.X. Sutijastoto 3. Iskandar Simorangkir 4. Munir Ahmad 5. Miftahul Jannah 6. Ulil Abshar 7. M. Ahsin Sidqi 8. M. Hanafi Nur Rifai 9. R. Bambang Anggono 10. Bagus Setiawan 11. Khusnul Mubien 12. Harlen
31 Mei 2021 May 31, 2021	1. Pengantar dari Direktur Utama Indonesia Power 2. *Draft* Materi RUPS Laporan Pengesahan Tahunan 2020 3. Percepatan Proyek EBT Indonesia Power 4. *Update* progres pembangunan EPC IPP 5. *Update* info data terkait Ijin Usaha Jasa O&M Pembangkit dan Persyaratan lain 6. Laporan Kinerja Perusahaan s.d bulan April Tahun 2021.	1. Introduction from Indonesia Power President Director 2. Draft of GMS on Annual Ratification Report 2020 3. Indonesia Power's NRE Program Acceleration 4. Progress Report of IPP EPC development 5. Progress Report of Power Plant O&M Service Business Permit and other Requirements 6. Performance Report until April 2021	1. Mohamad Oemar 2. F.X. Sutijastoto 3. Munir Ahmad 4. Miftahul Jannah 5. Ulil Abshar 6. M. Ahsin Sidqi 7. M. Hanafi Nur Rifai 8. R. Bambang Anggono 9. Bagus Setiawan 10. Khusnul Mubien 11. Harlen
24 Juni 2021 June 24, 2021	1. *Draft* RKAP Tahun 2022 2. Program berjangka PLTU Suralaya 1-4 menuju *Carbon Neutral* 2060 3. Laporan Kinerja Perusahaan Bulan Mei 2021 4. Pembahasan Isu Strategis : - Peresmian IP FABA *Information Centre* - Kesiapan Unit dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional dan *Grand Prix* Mandalika	1. Draft WP&B 2022 2. SPP Suralaya 1-4 Term Program toward Carbon Neutral 2060 3. Performance Report for May 2021 4. Discussion on strategic issues: - Inauguration of IP FABA Information Center - Unit readiness in facing the National Sports Week (PON) and Grand Prix Mandalika	1. Mohamad Oemar 2. F.X. Sutijastoto 3. Iskandar Simorangkir 4. Miftahul Jannah 5. Ulil Abshar 6. M. Ahsin Sidqi 7. M. Hanafi Nur Rifai 8. R. Bambang Anggono 9. Bagus Setiawan 10. Khusnul Mubien 11. Harlen

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
27 Juli 2021 July 27, 2021	1. Laporan Kinerja Perusahaan bulan Juni/ TW II Tahun 2021 2. *Project Export* Listrik ke Singapore 3. Induksi Perusahaan untuk Komisaris yang baru diangkat 4. Lanjutan agenda rapat gabungan bulan Juni 2021	1. Performance Report for June/Q2 of 2021 2. 'Electricity Export to Singapore' Project 3. Induction for newly appointed Commissioner(s) 4. Continuation of June 2021 joint meeting agenda	1. Mohamad Oemar 2. Iskandar Simorangkir 3. Djoko Siswanto 4. Miftahul Jannah 5. Ulil Abshar 6. M. Ahsin Sidqi 7. M. Hanafi Nur Rifai 8. R. Bambang Anggono 9. Bagus Setiawan 10. Khusnul Mubien 11. Harlen
31 Agustus 2021 August 31, 2021	1. Laporan Kinerja Perusahaan s.d bulan Juli Tahun 2021 2. Progres Pembangunan PLTU Suralaya 9-10 3. Progres *Beyond* kWh	1. Performance Report until July 2021 2. Progress of SPP Suralaya 9-10 development 3. Beyond kWh progress	1. Mohamad Oemar 2. Iskandar Simorangkir 3. Munir Ahmad 4. Djoko Siswanto 5. Miftahul Jannah 6. Ulil Abshar 7. M. Ahsin Sidqi 8. M. Hanafi Nur Rifai 9. R. Bambang Anggono 10. Bagus Setiawan 11. Khusnul Mubien 12. Harlen
14 September 2021 September 14, 2021	Usulan Revisi RKAP Indonesia Power Tahun 2021	Indonesia Power WP&B 2021 Revision Proposal	1. Mohamad Oemar 2. Iskandar Simorangkir 3. Munir Ahmad 4. Miftahul Jannah 5. Ulil Abshar 6. M. Ahsin Sidqi 7. M. Hanafi Nur Rifai 8. R. Bambang Anggono 9. Bagus Setiawan 10. Khusnul Mubien 11. Harlen
28 September 2021 September 28, 2021	Rencana Jangka Panjang (RJP) Indonesia Power 2020 – 2024 Rev.02	Indonesia Power Long-Term Plan (RJP) 2020-2024 2nd Revision	1. Iskandar Simorangkir 2. Munir Ahmad 3. Djoko Siswanto 4. Miftahul Jannah 5. Ulil Abshar 6. M. Ahsin Sidqi 7. M. Hanafi Nur Rifai 8. R. Bambang Anggono 9. Bagus Setiawan 10. Khusnul Mubien 11. Harlen

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participant
22 Oktober 2021 October 22, 2021	Laporan Manajemen Perusahaan s.d Triwulan III Tahun 2021	Company Managerial Report until Q3 of 2021	1. Mohamad Oemar 2. Iskandar Simorangkir 3. Munir Ahmad 4. Djoko Siswanto 5. Miftahul Jannah 6. Ulil Abshar 7. M. Ahsin Sidqi 8. R. Bambang Anggono 9. Bagus Setiawan 10. Khusnul Mubien 11. Harlen
26 November 2021 November 26, 2021	1. Laporan Kinerja Perusahaan s.d bulan Oktober 2021 2. *Update* kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dalam *Four Eyes Principle* dan *Risk Based Decision Making*	1. Performance Report until October 2021 2. Update of Company Risk Management Policy in Four Eyes Principle and Risk-based Decision Making	1. Mohamad Oemar 2. Iskandar Simorangkir 3. Munir Ahmad 4. Djoko Siswanto 5. Miftahul Jannah 6. Ulil Abshar 7. M. Ahsin Sidqi 8. M. Hanafi Nur Rifai 9. R. Bambang Anggono 10. Bagus Setiawan 11. Khusnul Mubien 12. Harlen
23 Desember 2021 December 23, 2021	1. Laporan Kinerja Perusahaan s.d bulan November 2021 2. *Initiative Strategy* RKAP Perusahaan Tahun 2022 3. *Update* kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dalam *Four Eyes Principle* dan *Risk Based Decision Making*	1. Performance Report until November 2021 2. Company WP&B 2022 Initiative Strategy 3. Update of Company Risk Management Policy in Four Eyes Principle and Risk-based Decision Making	1. Mohamad Oemar 2. Iskandar Simorangkir 3. Munir Ahmad 4. Djoko Siswanto 5. Miftahul Jannah 6. M. Ahsin Sidqi 7. M. Hanafi Nur Rifai 8. R. Bambang Anggono 9. Bagus Setiawan 10. Endang Astharanti 11. Harlen

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Tahunan

Board of Commissioners and Board of Directors' Attendance in Annual GMS

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan tahun 2021. Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS selama tahun 2021 telah diungkapkan dalam Bagian Rapat Umum Pemegang Saham dalam Laporan Tahunan ini.

The Board of Commissioners and Board of Directors' accountability over the implementation of their duties and responsibilities is submitted to the shareholders via Annual GMS 2021. The attendance rate of the Board of Commissioners and the Board of Directors in the meeting is disclosed in the Section of General Meeting of Shareholders of this Annual Report.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

EVALUATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Performance Assessment

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin setiap tahun. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kinerja Perusahaan. Hasil evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.

The assessment of the Board of Commissioners' performance is carried out every year. In general, the performance of the Board of Commissioners is determined by the duties and responsibilities set in applicable laws and regulations, Company Articles of Association, and Shareholders' mandates. The Board of Commissioners' performance is evaluated by the Shareholders in the GMS based on the Company's performance. The result from such evaluation is used as a consideration in providing directives that help improving the effectiveness of the Board of Commissioners.

Selain penilaian berdasarkan kinerja Perusahaan, penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui asesmen GCG sesuai Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012. Pelaksanaan penilaian assessment GCG Dewan Komisaris pada tahun 2021 dilaksanakan secara internal (*self-assessment*) oleh Perusahaan.

Apart from basing on Company performance, the Board of Commissioners' performance is also assessed through GCG assessment as mandated by the Decree of the Secretary to the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012. The GCG assessment for the Board of Commissioners in 2021 was performed internally (i.e. self-assessment).

Hasil penilaian aspek Dewan Komisaris dalam *self assessment* implementasi GCG Indonesia Power yang dilaksanakan pada tahun 2021 mencapai skor 94,46% dengan predikat kualitas penerapan GCG "Sangat Baik". Kriteria dan dasar penilaian atas penerapan prinsip GCG di lingkungan Dewan Komisaris tahun 2021, secara garis besar meliputi aspek pengujian dan indikator/parameter sebagai berikut.

The result of the GCG self-assessment held at Indonesia Power in 2021 for the Board of Commissioners aspect scored 94.46% at "Very Good" category. The criteria and basis for the GCG assessment for the Board of Commissioners in 2021 generally cover the following:

Indikator	Indicator	Bobot Indikator Indicator Weight	Skor Penilaian Assessment Score
Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	Board of Commissioners conducts sustainable training/education program.	1.35	1.35
Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Board of Commissioners makes clear description of their duties, authorities, and responsibilities and determines the factors necessary to support the implementation of the Board of Commissioners' duties.	2.13	2.13
Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	Board of Commissioners gives approval for draft Company Long Term Plan (RJPP) and Work Plan and Budget (WP&B) submitted by the Board of Directors.	2.90	2.90
Dewan Komisaris memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	Board of Commissioners gives directives to the Board of Directors on the implementation of Company plans and policies.	9.59	9.21
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	Board of Commissioners supervises the Board of Directors in the implementation of Company plans and policies.	6.48	6.27

Indikator	Indicator	Bobot Indikator Indicator Weight	Skor Penilaian Assessment Score
Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan.	Board of Commissioners supervises the implementation of subsidiary/joint venture management policy.	1.50	1.26
Dewan Komisaris berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	Board of Commissioners is involved in the candidacy of the Board of Directors members, assesses the Board of Directors' performance (individually and collegially), and proposes tantiem/performance incentives according to applicable provisions while taking into account the Board of Directors' performance.	2.44	2.10
Dewan Komisaris melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	Board of Commissioners takes the measures that address any potential conflicts of interest pertaining to themselves.	0.57	0.43
Dewan Komisaris memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	Board of Commissioners monitors and ensures that Good Corporate Governance (GCG) practices have been applied effectively and sustainably.	1.66	1.54
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Board of Commissioners holds effective Board of Commissioners meetings and attends Board of Commissioners meetings according to applicable laws and regulations.	1.35	1.18
Dewan Komisaris memiliki Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris	Board of Commissioners owns a Secretary to the Board of Commissioners to support its secretarial duties.	2.59	2.26
Dewan Komisaris memiliki Komite Dewan Komisaris yang efektif.	Board of Commissioners owns effective Board of Commissioners Committees.	2.44	2.44
Skor Score		**35**	**33.06**

Penilaian Kinerja Direksi

Board of Directors Performance Assessment

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi. Penilaian kinerja Direksi melalui KPI dilakukan berdasarkan Kontrak Manajemen yang telah disahkan oleh Pemegang Saham. Kriteria evaluasi kinerja Direksi berdasarkan KPI dibagi ke dalam beberapa perspektif, yaitu: Fokus Pelanggan, Efektifitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Keuangan dan Pasar serta Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan. Hasil penilaian KPI Direksi tahun 2021 diperoleh dari kelima perspektif dengan skor 98,44%.

Selain secara kolegial, evaluasi kinerja Direksi juga dilakukan secara individu terhadap masing-masing anggota Direksi yang dinilai berdasarkan capaian-capaian parameter KPI masing-masing anggota Direksi.

The assessment of the Board of Directors' performance is carried out periodically every year by the Shareholders during GMS, which is used as a material in evaluating the performance of the Directors, as well as for the accountability reporting of the Board of Directors' duty implementation. The assessment of the Board of Directors' performance through KPI was held under Management Contract ratified by the Shareholders. This evaluation was divided into several perspectives, namely: Customer Focus, Effectiveness of Products and Process, Manpower Focus, Finance and Market, and Leadership, Governance, and Social Responsibility. The KPI-based assessment of the Board of Directors for these five perspectives scored 98.44%.

Apart from collegially, evaluation is also performed on individual performance of each Director assessed based on the achievements of the KPI parameters of each Director.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
EVALUATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

KPI Direksi secara kolegial merupakan KPI Direktur Utama, yang selanjutnya diturunkan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab anggota Direksi dalam lingkup direktorat yang dipimpinnya. Kinerja masing-masing anggota Direksi pada tahun 2021 sebagian telah mencapai target sesuai dengan KPI yang ditetapkan.

The KPI of the Board of Directors collectively constitutes the KPI of the President Director. The KPI is then passed on to each member of the Board of Directors according to their respective duties, functions, and responsibilities within the directorates they lead. In 2021, the performance of each member of the Board of Directors partially reached the target in accordance with the set KPIs.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan *Assessment* GCG

Board of Directors Performance by GCG Assessment

Sejalan dengan penilaian Dewan Komisaris, penilaian Kinerja Direksi juga dilakukan melalui penilaian asesmen GCG berdasarkan Peraturan Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN tanggal 6 Juni 2012. Pada tahun 2021, hasil *assessment* GCG terhadap aspek Direksi mencapai skor 95,37% dengan kualitas penerapan GCG "Sangat Baik". Capaian masing-masing indikator penilaian dari Aspek Direksi tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

In line with the Board of Commissioners assessment, the GCG assessment of the Board of Directors is carried out pursuant to the Regulation of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 on the Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises dated June 6, 2012. In 2021, the GCG assessment to Board of Directors aspect scored 95.37%, at "Very Good" category. The achievements for each indicator in Board of Directors aspect in 2021 are as follows:

Indikator	Indicator	Bobot Indikator Indicator Weight	Skor Penilaian Assessment Score
Direksi melaksanakan program pelatihan/ pembelajaran secara berkelanjutan.	Board of Directors conducts sustainable training/education program.	1.09	0.99
Direksi melakukan pembagian tugas/ fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	Board of Directors makes clear description of their duties, authorities, and responsibilities.	1.87	1.79
Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	Board of Directors performs the Company planning.	4.04	3.86
Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	Board of Directors is involved in meeting the Company's performance target.	8.09	7.89
Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	Board of Directors performs operational and financial control over the implementation of Company plans and policies.	3.27	3.19
Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	Board of Directors manages the Company in accordance with applicable laws and regulations and the Articles of Association.	0.78	0.74
Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan *stakeholders*.	Board of Directors establishes relations that bring added value for the Company and the stakeholders.	6.69	6.07
Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	Board of Directors monitors and manages potential conflicts of interest between Board of Directors members and the Management under the Board of Directors.	1.09	0.93

Indikator	Indicator	Bobot Indikator Indicator Weight	Skor Penilaian Assessment Score
Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu.	Board of Directors makes sure that the Company performs the disclosure of information and communication in accordance with applicable laws and regulations and delivers information to the Board of Commissioners and the Shareholders in timely manner.	1.09	1.06
Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Board of Directors holds Board of Directors meetings and attends Board of Commissioners meetings according to the laws and regulations.	1.56	1.56
Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	Board of Directors has the obligation to run a quality and effective internal supervision.	1.71	1.71
Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif.	Board of Directors runs a quality and effective Corporate Secretary function.	1.71	1.71
Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	Board of Directors holds Annual GMS and other GMS according to the laws and regulations.	2.02	1.89
Skor Score		**35.00**	**33.38**



KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY ON THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui keputusan RUPS Tahunan. Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi meliputi Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Tantiem yang diberikan berdasarkan kinerja dan pencapaian Perusahaan. Kebijakan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/ MBU/ 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The remuneration for the Boards is determined by the Shareholders during Annual GMS. The income of the Boards covers salary/honorarium, allowances, and tantiem that are provided according to Company performance and achievements. The policy on the stipulation of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2021 on the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/ MBU/ 2014 on Guidelines for the Stipulation of Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Procedures and Mechanism of Proposal to Stipulation of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2021 dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh Pemegang Saham serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris. Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Berikut prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi:

The remuneration for the Boards in 2021 was calculated using the formula established by the Shareholders and reviewed by the Board of Commissioners. The amount of remuneration for the Boards is determined by the Shareholders during GMS. The procedures of stipulating the remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows:

Pengusulan Remunerasi

Direksi meminta pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan *review* remunerasi kemudian mengajukan usulan remunerasi kepada Dewan Komisaris.

Proposal of Remuneration

The Board of Directors requests third party consultant to perform review on the remuneration, and then proposes the remuneration to the Board of Commissioners.

Kajian Remunerasi

Fungsi Nominasi dan Remunerasi melakukan kajian dan membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris perihal usulan remunerasi yang diajukan Direksi.

Review of Remuneration

Nomination and Remuneration Function reviews the proposal and submits recommendation to Board of Commissioners concerning the remuneration proposal from the Board of Directors.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempelajari rekomendasi dari Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya diusulkan kepada RUPS

Board of Commissioners Recommendation

Board of Commissioners reviews the Nomination and Remuneration Function's recommendation to be proposed to GMS.

Pengusulan Remunerasi

RUPS memberikan pengesahan atas ketetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Stipulation of Remuneration

GMS ratifies the stipulation of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indicators for Stipulation of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Remunerasi diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah dalam bentuk honorarium/gaji, tunjangan dan fasilitas yang disediakan Perusahaan. Penetapan remunerasi tersebut telah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pendapatan, aktiva, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator, meliputi faktor pencapaian target, tingkat kesehatan, dan kemampuan keuangan, serta faktor-faktor lain yang relevan (*merit system*) yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

Remuneration is provided to the Board members in the forms of honorarium/salary, allowances, and facilities. The stipulation of the remuneration has taken into account the Company's revenues, assets, financial capability and condition, inflation rate, and other relevant factors, and may not conflict with the laws and regulations. The remuneration refers to a number of indicators, such as target achievement, soundness level, and financial capability, in addition to other relevant factors (merit system) generally applied in the similar industries.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Structure of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Pemberian remunerasi kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham Nomor 61094/MNJ.01.02/C01000000/2021-R tanggal 29 Oktober 2021. Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

The remuneration is provided by referring to Shareholders' Resolutions No. 61094/MNJ.01.02/C01000000/2021-R dated October 29, 2021. The structure of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors comprises the following:

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021
Table of Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure in 2021

Jabatan Position	Struktur Remunerasi	Remuneration Structure
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Direktur Utama sedangkan Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Komisaris Utama. 2. Tunjangan yang terdiri dari: - Tunjangan Transportasi sebesar 20% dari honorarium - Asuransi Purna Jabatan sebesar Maksimal 25% dari Honorarium dalam satu tahun. 3. Fasilitas yang terdiri dari: - Fasilitas Kesehatan, yaitu Rawat jalan dan obat, rawat inap, obat-obatan dan *general check up* 1 kali setahun termasuk kepada seorang istri / suami dan maksimal 3 orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau biaya pengobatan. - Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.	1. The honorarium for the President Commissioner is determined at 45% of the President Director's honorarium, while the honorarium for the Commissioners is determined at 90% of the President Commissioner's honorarium. 2. The allowances include: - Transport allowance is 20% of the honorarium. - Post-employment insurance is at maximum 25% of 1-year worth honorarium. 3. The facilities include: - Healthcare facilities, i.e. outpatient care, inpatient care, medications, and general check-up once in a year, including for one (1) spouse and maximum three (3) unemployed and unmarried children who are below 25 years old. Provided as healthcare insurance or medical expenses. - Legal assistance is provided for the actions/ performances on behalf of his/her position that pertain to the intents and purposes and business activities of the Company.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
POLICY ON THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Jabatan Position	Struktur Remunerasi	Remuneration Structure
	4. Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran untuk Komisaris Utama yaitu 45% dari Direktur Utama dan Anggota bagi anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari Komisaris Utama.	4. As stipulated by the Shareholders, tantiem for the President Commissioner is 45% of the President Director's tantiem and tantiem for the Commissioners is 90% of the President Commissioner's tantiem.
Direksi Board of Directors	1. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp142.125.000 per bulan. Gaji Anggota Direktur Lainnya sebesar 85% dari Direktur Utama. 2. Tunjangan, terdiri dari: - Tunjangan Perumahan yang diberikan dalam bentuk rumah jabatan. - Asuransi Purna Jabatan sebesar Maksimal 25% dari gaji dalam satu tahun. 3. Fasilitas, terdiri dari: - Fasilitas Kendaraan Dinas 1 (satu) Unit Mobil beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan Perusahaan - Fasilitas Kesehatan, yaitu Rawat jalan dan obat, rawat inap, obat-obatan dan general *check up* 1 (satu) kali setahun termasuk kepada seorang istri / suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau biaya pengobatan. - Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. 4. Tantiem ditetapkan oleh Pemegang Saham dengan komposisi besaran Anggota Direktur Lainnya sebesar 85% dari Direktur Utama.	1. The salary for the President Director is determined at Rp142,125,000 per month. The salary for other Directors is 85% of the President Director's salary. 2. The allowances include: - Housing allowance which is provided as official house. - Post-employment insurance is at maximum 25% of 1-year worth salary. 3. The facilities include: - One (1) office vehicle as well as its maintenance and operational allowance with regard to the Company's financial condition. - Healthcare facilities, i.e. outpatient care, inpatient care, medications, and general check-up once in a year, including for one (1) spouse and maximum three (3) unemployed and unmarried children who are below 25 years old. Provided as healthcare insurance or medical expenses. - Legal assistance is provided for the actions/ performances on behalf of his/her position that pertain to the intents and purposes and business activities of the Company. 4. As stipulated by the Shareholders, tantiem for other Directors is 85% of the President Director's tantiem.

Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Disclosure of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Komponen Remunerasi yang Diterima Dewan Komisaris Tahun 2021
Components of the Board of Commissioners' Remuneration in 2021

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Jumlah Anggota Dewan Komisaris Number of Board of Commissioners Member	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 Year(Rupiah)
Honorarium	7	4,251,436,875
Tantiem	5	2,688,970,726
Tunjangan Allowance	7	1,209,471,750
Jumlah Total		**8,149,879,351**

Jumlah Remunerasi yang Diterima Dewan Komisaris Tahun 2021
Total Board of Commissioners' Remuneration in 2021

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person in 1 Year	2021
Di Atas 1 miliar Above Rp1 billion	5
Di antara 500 juta s/d 1 miliar Between Rp500 million and Rp1 billion	1
Di Bawah 500 juta Under Rp500 million	1

Remunerasi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Tahun 2021
Remuneration for Each Board of Commissioners Member in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Honor per Bulan Monthly Salary	Tunjangan Transport Transport Allowance	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem	THR Religious Holiday Allowance	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan Term of Office
Mohamad Oemar	Komisaris Utama President Commissioner	65,306,250	13,061,250	78,367,500	538,570,875	65,306,250	1,544,287,125	12
F.X. Sutijastoto*	Komisaris Commissioner	58,775,625	11,755,125	70,530,750	631,492,913	58,775,625	1,113,453,038	6
Iskandar Simorangkir**	Komisaris Commissioner	58,775,625	11,755,125	70,530,750	-	58,775,625	834.613.875	11
Djoko Siswanto***	Komisaris Commissioner	58,775,625	11,755,125	70,530,750	-	-	423.184.500	6
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	58,775,625	11,755,125	70,530,750	616,815,000	58,775,625	1,521,959,625	12
Miftahul Jannah	Komisaris Commissioner	58,775,625	11,755,125	70,530,750	285,276,938	58,775,625	1,190,421,563	12
Ulil Abshar	Komisaris Independen Independent Commissioner	58,775,625	11,755,125	70,530,750	616,815,000	58,775,625	1,521,959,625	12

* Berhenti menjabat pada 6 Juli 2021
** Diangkat sebagai Komisaris pada tanggal 9 Februari 2021
*** Diangkat sebagai Komisaris pada tanggal 6 Juli 2021
* Leaving the position on July 06, 2021
** Appointed as Commissioner on February 09, 2021
*** Appointed as Commissioner on July 06, 2021

Komponen Remunerasi yang Diterima Direksi Tahun 2021
Components of the Board of Directors' Remuneration in 2021

Jenis Remunerasi Type of Remuneration	Jumlah Anggota Direksi Number of Board of Directors Member	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 Year (Rupiah)
Honorarium	7	9,142,875,000
Tantiem	6	5,620,250,749
Tunjangan Allowance	6	761,906,250
Jumlah Total		**15,525,031,999**

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
POLICY ON THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

Jumlah Remunerasi yang Diterima Direksi Tahun 2021
Total Board of Directors' Remuneration in 2021

Jumlah Remunerasi per Orang Dalam 1 Tahun Total Remuneration per Person in 1 Year	2021
Di Atas 1 miliar Above Rp1 billion	6
Di antara 500 juta s/d 1 miliar Between Rp500 million and Rp1 billion	-
Di Bawah 500 juta Under Rp500 million	1

Remunerasi Masing-Masing Anggota Direksi Tahun 2021
Remuneration for Each Board of Directors Member in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Honor per Bulan Monthly Salary	Total per Bulan Monthly Total	Tantiem	THR Religious Holiday Allowance	Penghasilan per Tahun Annual Income	Masa Jabatan Term of Office
M. Ahsin Sidqi	Direktur Utama President Director	145,125,000	145,125,000	1,523,000,000	145,125,000	3,264,500,000	12
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi I Director of Operations I	123,356,250	123,356,250	1,294,550,000	123,356,250	2,774,825,000	12
Bambang Anggono	Direktur Operasi II Director of Operations II	123,356,250	123,356,250	1,294,550,000	123,356,250	2,774,825,000	12
Harlen	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	123,356,250	123,356,250	79,830,583	123,356,250	1,560,105,583	12
Khusnul Mubien*	Direktur Keuangan Director of Finance	123,356,250	123,356,250	714,160,083	123,356,250	2,071,078,833	11
Endang Astharanti**	Direktur Keuangan Director of Finance	123,356,250	123,356,250	-	-	123,356,250	1
Bagus Setiawan	Direktur SDM dan Administrasi Director of Human Capital and Administration	123,356,250	123,356,250	714,160,083	123,356,250	2,194,435,083	12

*) Berhenti menjabat sejak tanggal 25 November 2021. **) Mulai menjabat pada tanggal 25 November 2021
*) Leaving the position on November 25, 2021 **) Assuming the position since November 25, 2021

Bonus Non Kinerja dan Opsi Saham
Non-Performance Bonus and Stock Option

Sampai dengan periode laporan, tidak terdapat Bonus Non Kinerja dan penawaran Opsi Saham yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Indonesia Power.

Until the reporting period, there were no Non-Performance Bonuses provided for and Stock Options offered to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and Executives of Indonesia Power.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS COMPOSITIONS

Komposisi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang ditunjuk RUPS memiliki keberagaman dari segi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Persyaratan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/ MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed by the GMS is diverse in terms of age, gender, educational background, and experience necessary to support the implementation of duties and responsibilities of each member. The requirements for appointing the members of the Board of Commissioners and Board of Directors have taken into account the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/ MBU/2012 on Guidelines for the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of SOE Subsidiaries.

Selaras dengan peraturan tersebut, penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Indonesia Power dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan kepada semua orang yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras dan agama.

In line with the regulation, the stipulation of the Board of Commissioners and Board of Directors at Indonesia Power takes into account the Company's needs and complexity. The Company provides opportunities for all qualified parties to become the members of the Board of Commissioners and Board of Directors regardless of their gender, race, and religion.

Berikut merupakan ringkasan keberagaman anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan tahun 2021.

The following table summarizes the diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris Indonesia Power Tahun 2021

The diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2021

Nama Name	Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (y.o.)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja	Work Experience
Mohamad Oemar	Komisaris Utama President Commissioner	60	Laki-laki Male	- Sarjana Hubungan Internasional dari UGM Tahun 1986 - Magister Centre d'Etudes des Relations International et Strategie, Brussels, Belgia Tahun 1993 - Bachelor of International Relations from Gadjah Mada University (1986) - Master's Degree from Centre d'Etudes des Relations International et Strategie, Brussels, Belgium (1993)	- Direktur Perdagangan dan Perindustrian Multilateral pada Ditjen Multilateral (2004 - 2006) - Minister, Deputy Chief of Mission/DCM, KBRI Beijing (2006 - 2009) - Duta Besar LBBP RI untuk Italia merangkap Malta dan Siprus di Roma, Italia (2009 - 2011) - Komisaris Pertamina Hulu Energi (2013-2019) - Sekretaris Wakil Presiden RI yang berasal dari Kementerian Luar Negeri tahun 2011 -2021 - Duta Besar Indonesia untuk Perancis Tahun 2021-sekarang.	- Director of Multilateral Trade and Industry at the Directorate General of Multilateral (2004–2006) - Minister, Deputy Chief of Mission/DCM, Indonesian Embassy in Beijing (2006–2009) - Indonesian Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador for Italy, Malta, and Cyprus in Roma, Italy (2009–2011) - Commissioner of Pertamina Hulu Energi (2013–2019) - Secretary to Indonesian Vice-President from the Ministry of Foreign Affairs (2011–2021) - Indonesian Embassy in France in 2021-current.
Iskandar Simorangkir**	Komisaris Commissioner	58	Laki-laki Male	- Sarjana Manajemen di Universitas Udayana - Magister Ekonomi di Vanderbilt University, Amerika Serikat - Doktor jurusan Ekonomi dengan spesialisasi Ekonomi Moneter dan Perbankan di Universitas Indonesia.	- Peneliti Madya Senior Bank Indonesia (2005-2008) - Kepala Biro/Grup Riset Ekonomi Bank Indonesia (2008-2012) - Kepala Departemen Bank Indonesia (2013-2014)	- Senior Associate Researcher at Bank Indonesia (2005–2008) - Head of Economic Research Bureau/Group at Bank Indonesia (2008–2012) - Head of Department at Bank Indonesia (2013–2014)

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS COMPOSITIONS

Nama Name	Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (y.o.)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja	Work Experience
				- Bachelor of Management from Udayana University - Master of Economics from Vanderbilt University, United States of America - Doctorate Degree in Economics, specializing in Monetary Economics and Banking from the University of Indonesia	- Kepala Perwakilan Bank Indonesia (2014) - Komisaris PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (2019-Januari 2021) - Asisten Gubernur Bank Indonesia Tahun 2019 - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2017-sekarang	- Head of Representatives at Bank Indonesia (2014) - Commissioner at PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) (2019–January 2021) - Assistant Governor of Bank Indonesia in 2019 - Coordinating Deputy of Macro-economy and Finance at the Coordinating Ministry of Economy (2017–current)
Djoko Siswanto***	Komisaris Commissioner	57	Laki-laki Male	- Sarjana Teknik Perminyakan dari ITB Tahun 1990 - MBA Specialist Oil & Gas Management, Center of Energy Petroleum Mineral & Law (CEPMLP) dari Dundee University UK Tahun 2001, MBA Program, Edinburg Business School dari Herriot Watt University, UK Tahun 2001 - Doktor pada Teknik Perminyakan ITB Tahun 2011. - Bachelor of Petroleum Engineering from Bandung Institute of Technology (1990) - MBA Specialist of Oil & Gas Management, Center of Energy, Petroleum, Mineral & Law (CEPMLP) from Dundee University, UK (2001), MBA Program, Edinburgh Business School from Herriot Watt University, UK (2001) - Doctorate Degree in Petroleum Engineering from Bandung Institute of Technology (2011)	- Pengawas Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (2018) dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (2018) - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM (2018-2019) - Komisaris PT Elnusa Petrofin (2019) - Plt. Dirjen Migas (2019 – 2020) - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (2019-sekarang)	- Supervisor of the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (2018) and Commissioner at PT Pertamina Hulu Energi (2018) - Director General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources (2018–2019) - Commissioner at PT Elnusa Petrofin (2019) - Acting Director General of Oil and Gas (2019–2020) - Secretary General of the National Energy Council (2019-present)
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	60	Laki-laki Male	Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Hasanudin Tahun 1987 Bachelor of Electrical Engineering from Hasanuddin University (1987)	- Kepala Bidang Pelatihan dan Sarana - Pusdiklat KEBT (2006-2010) - Kepala Pusdiklat Ketenagalistrikan Dan Energi Baru Terbarukan (2010) - Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (2010 - 2014) - Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan (2014 - 2015) - Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (2015-2018) - Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (2018-sekarang)	- Head of Training and Facilities Department of the Electricity and New and Renewable Energy Education and Training Center (2006–2010) - Head of Electricity and New and Renewable Energy Education and Training Center (2010) - Head of Electricity, New and Renewable Energy, and Energy Conservation Education and Training Center (2010–2014) - Director of Electricity Program Development (2014–2015) - Director of Electricity Engineering and Environment, Directorate General of Electricity, Ministry of Energy and Mineral Resources (2015–2018) - Secretary to the Directorate General of Electricity (2018-present)

Nama Name	Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (y.o.)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja	Work Experience
Miftahul Jannah	Komisaris Commissioner	55	Laki-laki Male	- Sarjana Fisika dari ITS Tahun 1991 - Magister Bidang Manajemen dari ITB Tahun 2002 - Bachelor of Physics from Sepuluh Nopember Institute of Technology (1991) - Master of Management from Bandung Institute of Technology (2002)	- General Manager UP Muara Karang (2010-2012) - Vice President Enjiniring PT PLN (Persero) (2012) - Senior Manajer Teknologi Pembangkitan PT PLN (Persero) (2012-2013) - Senior Specialist I Niaga pada DITAGA PT PLN (Persero) (2013-2015) - Expert Niaga pada DITAGA PT PLN (Persero) (2015-2016) - Direktur Operasi 2 PT PLN (Persero) (2016-2020) - *Expert* Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PT PLN (Persero) Tahun 2021. - EVP Pembangkitan dan EBT Regional Jawa, Madura dan Bali PT PLN (Persero) (2021-sekarang)	- General Manager of Muara Karang PGU (2010–2012) - Vice-President of Engineering at PT PLN (Persero) (2012) - Senior Manager of Power Generation Technology at PT PLN (Persero) (2012–2013) - Senior Specialist I of Commerce, Directorate of Development and Commerce at PT PLN (Persero) (2013–2015) - Expert on Commerce, Directorate of Development and Commerce at PT PLN (Persero) (2015–2016) - Director of Operations 2 at PT PLN (Persero) (2016–2020) - Business Expert at PT PLN (Persero) Sumatra and Kalimantan Regions (2021) - EVP of Power Generation and NRE of Java, Madura and Bali Region, PT PLN (Persero) (2021-present)
Ulil Abshar	Komisaris Independen Independent Commissioner	39	Laki-laki Male	- Sarjana Adab dan Humaniora dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2004 - Magister Cultural Studies dari Universitas Indonesia Tahun 2006 - Doktor Sastra Arab dari Universitas Indonesia Tahun 2016 - Bachelor of Adab and Humanities from Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2004) - Master of Cultural Studies from University of Indonesia (2006) - Doctorate Degree in Arabic Literature from University of Indonesia (2016)	- Sekretaris Biro Kerjasama Timur Tengah PBNU (2005 - 2010) - Sekretaris LTN (Lajnah Ta'lief wan Nasyr PBNU (2010 - 2015) - Wakil Sekretaris Jenderal PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) tahun 2015 - sekarang) - Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 - sekarang.	- Secretary to the Bureau of Middle East Cooperation of the Central Board of Nahdlatul Ulama (PBNU) (2005–2010) - Secretary to Lajnah Ta'lief wan Nasyr (LTN) of the Central Board of Nahdlatul Ulama (PBNU) (2010–2015) - Deputy Secretary General of the Central Board of Nahdlatul Ulama (PBNU) (2015–current) - Lecturer at Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta (2009-current)

Keberagaman Komposisi Direksi Indonesia Power Tahun 2021

Keberagaman Komposisi Direksi Indonesia Power Tahun 2021

Nama Name	Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (y.o.)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja	Work Experience
M. Ahsin Sidqi	Direktur Utama President Director	55	Laki-laki Male	- Sarjana Teknik dari Universitas Gadjah Mada Tahun 1991 - Magister Manajemen dari IPWI Jakarta (1999) - Doktor Strategic Management dari Universitas Trisakti Tahun 2018 - Bachelor of Engineering from Gadjah Mada University (1991)	- Head of Supply Chain Management PT Indonesia Power (2014-2015) - General Manager Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan PT PLN (Persero) (2016-2017) - Komisaris PT Cogindo DayaBersama (2018-2019) - Head of IPP Division Procurement PT PLN (Persero) (2017-2019)	- Head of Supply Chain Management at PT Indonesia Power (2014–2015) - General Manager of Southern Sumatra Power Generation PT PLN (Persero) (2016–2017)

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
DIVERSITY OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS COMPOSITIONS

Nama Name	Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (y.o.)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja	Work Experience
				- Master of Management from IPWI Jakarta (1999) - Doctorate Degree in Strategic Management from Trisakti University (2018)		- Commissioner at PT Cogindo DayaBersama (2018–2019) - Head of IPP Division of Procurement PT PLN (Persero) (2017–2019)
M. Hanafi Nur Rifai	Direktur Operasi I Director of Operations I	51	Laki-laki Male	- Sarjana Mesin dari Institut Teknologi 10 November Tahun 1993 - Master Bidang Mesin dari Institut Teknologi Bandung Tahun 2012 - Bachelor of Mechanical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology (1993) - Master of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (2012)	- Manajer Operasi Unit 5-7 UBP Suralaya (2008-2010) - Deputy General Manager Bidang Teknik UBH (2010-2011) - General Manager UBP Kamojang (2011-2013) - General Manager UBOH PLTU 2 Jawa Tengah Adipala (2013-2014) - General Manager UBOH PLTU Banten 2 Labuan (2014-2015) - General Manager UP Suralaya (2015-2018)	- Manager of Operations of Suralaya Power Generation Business Unit 5-7 (2008–2010) - Deputy General Manager of Maintenance Engineering Department (2010–2011) - General Manager of Kamojang Power Generation Business Unit (2011–2013) - General Manager of SPP 2 Central Java Adipala O&M Business Unit (2013–2014) - General Manager of SPP Banten 2 Labuan O&M Business Unit (2014–2015) - General Manager of Suralaya PGU (2015–2018)
Bambang Anggono	Direktur Operasi II Director of Operations II	55	Laki-laki Male	- Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Surabaya Tahun 1991 - Magister Bidang Industri dari Institut Teknologi Surabaya Tahun 2012 - Bachelor of Electrical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology (1991) - Master of Industrial Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology (2012)	- General Manager UPHT PT PLN (Persero) (2010-2011) - General Manager UPHB (2011-2012) - Senior Manajer Stockist Pembangkit PT PLN (Persero) (2012-2016) - Kepala Divisi Business Solution PT PLN (Persero) (2016-2017) - GM PLN Sumbangsel PT PLN (Persero) (2017- 2019)	- General Manager of Eastern Maintenance Unit (UPHT) of PT PLN (Persero) (2010–2011) - General Manager of Western Maintenance Unit (UPHB) (2011–2012) - Senior Manager of Power Plant Stockist at PT PLN (Persero) (2012–2016) - Head of Business Solution Division at PT PLN (Persero) (2016–2017) - General Manager of PLN Sumbagsel of PT PLN (Persero) (2017–2019)
Harlen	Direktur Pengembangan dan Niaga Director of Development and Commerce	52	Laki-laki Male	Sarjana Listrik dari Universitas Brawijaya Tahun 1993 Bachelor of Electrical Engineering from Brawijaya University (1993)	- Senior Specialist II Audit Teknik ditugaskaryakan ke PT PLN (Persero) (2012-2015) - Kepala Divisi Batubara pada Direktorat Pengadaan dan Energi Primer PT PLN (Persero) (2015) - Kepala Satuan Batubara pada PT PLN (Persero) (2015-2018) - Executive Vice President Batubara pada Direktorat Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) (2018 - 2020)	- Senior Specialist II of Technical Audit Commerce, secondee at PT PLN (Persero) (2012–2015) - Head of Division of Coal at the Directorate of Procurement and Primary Energy, PT PLN (Persero) (2015) - Head of Coal Unit at PT PLN (Persero) (2015–2018) - Executive Vice-President of Coal at the Directorate of Strategic Procurement 2, PT PLN (Persero) (2018–2020)

Nama Name	Jabatan Position	Usia (Tahun) Age (y.o.)	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja	Work Experience
Endang Astharanti	Direktur Keuangan Director of Finance	45	Perempuan Female	- Sarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada (1999) - Magister Bisnis Administrasi Nanyang Technology University (2009) - Bachelor of Accounting from Gadjah Mada University (1999) - Master of Business Administration from Nanyang Technology University (2009)	- Senior Executive Vice President PT Mandiri Management Investasi (2014 - 2015) - Dirrektur Sales & Product PT Mandiri Management Investasi (2015 - 2021) - Vice President Distribution Strategy Griup PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2021)	- Senior Executive Vice President at PT Mandiri Management Investasi (2014–2015) - Director of Sales & Product at PT Mandiri Management Investasi (2015–2021) - Vice President of Disctribution Strategy Group at PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2021)
Bagus Setiawan	Direktur SDM dan Administrasi Director of Human Capital and Administration	54	Laki-laki Male	- Sarjana Mesin dari ITB Bandung Tahun 1993 - Magister Bidang Manajemen Bisnis dari University of Missouri Tahun 2006 - Bachelor of Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (1993) - Master of Management from the University of Missouri (2006)	- General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2010 - 2011) - Senior Specialist I Management SDM PT PLN (Persero) (2012-2013) - Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM pada Direktorat HCM (2013-2015) - Kepala Divisi Human Capital Management System pada Direktorat HCM (2015 - 2018) - Executive Vice President Human Capital Management System PT PLN (Persero) (2018-2019) - General Manager PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan (2019-2020)	- General Manager at PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (2010–2011) - Senior Specialist I of Human Capital Management at PT PLN (Persero) (2012-2013) - Head of Division of Human Capital System Development at the Directorate of HCM (2013–2015) - Head of Division of Human Capital Management System at the Directorate of HCM (2015–2018) - Executive Vice President Human Capital Management System at PT PLN (Persero) (2018-2019) - General Manager of Electricity Research and Development Centre at PT PLN (Persero) (2019-2020)

Profil lengkap masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat di Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Complete profile of each Board member can be found in the Chapter of Company Profile of this Annual Report.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Penunjang Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko yang juga sebagai pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap Komite telah dilengkapi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun dan ditinjau secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku. Keanggotaan Komite diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

To perform its supervisory duty, the Board of Commissioners has established supporting organs, i.e. the Audit Committee and Risk Management Committee. The Risk Management Committee also assumes the duty as the acting Nomination and Remuneration Committee Function. Each Committee has been equipped with Committee Manual which was prepared and reviewed periodically according to applicable regulations. Committee members are appointed by the Board of Commissioners based on Board of Commissioners Decree.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Audit Committee was established by the Board of Commissioners to improve the effectiveness of the implementation of supervisory duties and function on matters pertaining to the quality of financial statements, internal control system, internal and external audit function implementation, governance implementation, and compliance with applicable laws and regulations.

Pedoman Kerja Komite Audit
Audit Committee Charter

Komite Audit memiliki pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian internal. Piagam Komite Audit telah disahkan berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 243.K/010/IP/2019 dan Nomor 019.SK/DEKOM-IP/2019 tentang Piagam Komite Audit PT Indonesia Power tanggal 10 Desember 2019. Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain terkait dengan fungsi dan tugas pokok Komite Audit, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit, Anggota dan Organisasi Komite Audit, Kode Etik, Rapat Komite Audit, Penilaian kinerja Komite Audit serta honorarium dan pembebanan biaya Komite Audit.

The Audit Committee's work guidelines are available in the Audit Committee Charter that supports the implementation of internal control supervisory duties and responsibilities. The Charter was ratified under Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Numbers 243.K/010/IP/2019 and 019.SK/DEKOM-IP/2019 on PT Indonesia Power Risk Audit Committee Charter dated December 10, 2019. The Audit Committee Charter's scope covers the functions and main duties of the Audit Committee; obligations, responsibilities, and authority of the Audit Committee; members and organization of Audit Committee; Code of Conduct; Audit Committee meetings, Audit Committee performance assessment, and honorarium and expenses of the Audit Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Duties and Responsibilities of Audit Committee

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penilaian terhadap *internal control* atas kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan dengan tugas pokoknya antara lain:

1. Menelaah program audit tahunan yang disusun Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
2. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut temuan audit, termasuk temuan signifikan yang belum ditindak lanjuti secara tuntas;
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya;
5. Melakukan penelaahan atas hasil pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Code of Conduct* serta pencegahan tindakan kecurangan;
6. Memberikan saran kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses audit;

The Audit Committee assists the Board of Commissioners in performing the supervisory duty by assessing the internal control of the activities performed by the Management, with the following core duties:

1. Reviewing the annual audit program prepared by Internal and External Auditors;
2. Reviewing the sufficiency of audits performed by by Internal and External Auditors;
3. Providing inputs to the Board of Commissioners on follow-ups on audit findings, including significant findings not completely followed through;
4. Reviewing the financial information to be issued by the Company, such as Financial Statements, Outlook, and other Financial Information;
5. Conducting analysis on the results of supervision related to the implementation of Code of Conduct and prevention of frauds;
6. Providing inputs to the Management via the Board of Commissioners on matters that may improve the continuity and effectiveness of audit process;

7. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit;
8. Mengevaluasi hasil pemantauan Auditor Internal atas tindak lanjut hasil audit dan menelaah kecukupan sumber daya serta kualifikasi tenaga Auditor Internal;
9. Bersama tim seleksi memilih Auditor Eksternal yang akan melakukan audit dan mengusulkan agar dilakukan penggantian Auditor Eksternal apabila yang sedang bertugas dinilai tidak kompeten;
10. Memantau pelaksanaan GCG dan melakukan evaluasi hasil *assesment* berkala atas penerapan GCG;
11. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem dan kelengkapan GCG Perusahaan;
12. Membuat laporan tertulis dan melakukan paparan kepada Dewan Komisaris;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Providing inputs to the Board of Commissioners on the changes and improvements of Audit Committee Charter;
8. Evaluating the result of Internal Auditor's monitoring for the follow-up on audit findings and reviewing the sufficiency of resources and qualification of Internal Auditors;
9. Together with selection team, screening the External Auditor to perform audit and proposing the replacement for unavailable or incompetent External Auditor;
10. Monitoring GCG implementation and evaluating the result of periodical assessment of GCG implementation;
11. Evaluating and providing recommendation for improving GCG system and tools;
12. Preparing written report and giving explanations to the Board of Commissioners;
13. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners under the Board of Commissioners' scope of duties and responsibilities, in accordance with the applicable laws and regulations.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit
Appointment and Dismissal of Audit Committee

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penunjukan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, kemampuan dan keahlian sesuai bidang pekerjaannya untuk mendukung terselenggaranya tata kelola yang sehat.

The Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners for a period of one (1) year since the appointment, and can be reappointed for the next tenure. All Audit Committee members are highly committed, possessing high level of integrity, capabilities, and expertise according to their relevant field, in order to deliver a sound governance.

Susunan dan Komposisi Komite Audit
Composition of Audit Committee

Pada tahun 2021, komposisi Komite Audit berjumlah 4 (empat) orang, termasuk anggota dari unsur Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Indonesia Power No.009.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Perubahan Susunan Keanggotan Komite Audit Dewan Komisaris PT Indonesia Power.

In 2021, the Audit Committee consisted of four (4) members, including member(s) from the Board of Commissioners as stipulated by the Decree of the Board of Commissioners No. 009.SK/DEKOM-IP/2021 dated July 16, 2021 on Changes in PT Indonesia Power Board of Commissioners' Audit Committee Membership Composition.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit Tahun 2021
Structure and Membership of Audit Committee in 2021

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Position in the Committee	Periode Jabatan Term of Office
Munir Ahmad	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	2021
Djoko Siswanto	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua Deputy Head	2021
Sudirmanto	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris Komite Secretary to Committee	2021
Abdul Kadir	Pihak Independen Independent Party	Anggota Komite Committee Member	2021

Profil Anggota Komite Audit
Profile of Audit Committee Members



Munir Ahmad
Ketua Komite Head of Committee

Diangkat sebagai Ketua Komite Audit Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.009.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Appointed as the Head of Audit Committee under Board of Commissioners Decree No. 009.SK/DEKOM-IP/2021 dated July 16, 2021.

Profil Ketua Komite Audit dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini.

The profile of the Head of Audit Committee is available in the Chapter of Board of Commissioners Profile of this Annual Report.



Djoko Siswanto
Wakil Ketua Deputy Head

Diangkat sebagai Wakil Ketua Komite Audit Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.009.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Appointed as the Deputy Head of Audit Committee under Board of Commissioners Decree No. 009.SK/DEKOM-IP/2021 dated July 16, 2021.

Profil Wakil Ketua Komite Audit dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini.

The profile of the Deputy Head of Audit Committee is available in the Chapter of Board of Commissioners Profile of this Annual Report.



Sudirmanto

Sekretaris Komite Secretary to Committee

Warga negara Indonesia, 63 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Sekretaris Komite Audit Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.009.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Sekretaris Komite Audit, beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah: Sekretaris Komite Manajemen Risiko (2017-2020); Sekretaris Komite Audit (2015-2017); Kepala Satuan Audit PT Indonesia Power (2010-2014); General Manager UBP Suralaya (2008-2010); Vice President Pengusahaan Pembangkit Kelompok II (2006-2008); General Manager UBP Semarang (2004-2006).

Riwayat Pendidikan:
Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Sekolah Tinggi Teknik Mesin (STTN) pada tahun 1986 dan Master Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM School of Management pada tahun 1999.

Pelatihan yang Diikuti pada tahun 2021:
- Pengoperasian Pembangkit Listrik Sistem JAMALI yang Andal, Berkualitas dan Ekonomis, yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI) pada tanggal 7 Agustus 2021.
- Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum terkait Laporan Keuangan yang diselenggarakan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) pada tanggal 23 September 2021.

An Indonesian Citizen, 63 years old. Domiciled in Indonesia. Appointed as the Secretary to the Audit Committee under Board of Commissioners Decree No. 009.SK/DEKOM-IP/2021 dated July 16, 2021.

Career Path:
In addition to serving as the Secretary of the Audit Committee, he had held several other positions as follows: Secretary of Risk Management Committee (2017–2020); Secretary of Audit Committee (2015–2017); Head of Audit Unit at PT Indonesia Power (2010–2014); General Manager of Suralaya PGU (2008–2010); Vice-President of Generator Management Group II (2006–2008); General Manager of Semarang POMU (2004–2006).

Educational Background:
The holder of Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from STTN (1986) and Master of Management from PPM School of Management (1999).

Attended Trainings in 2021:
- Operation of Reliable, Quality, and Economical Java-Madura-Bali System Power Generator, held by Indonesian Power Engineers Association (IATKI) on August 07, 2021
- Audit Committee's Responsibility when the Company is Undergoing Legal Proceeding Related to Financial Report, held by the Indonesian Audit Committee Association (IKAI) on September 23, 2021.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE



Abdul Kadir

Anggota Komite Committee Member

Warga negara Indonesia, 54 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.009.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Anggota Komite Audit, beliau juga menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM PLN Enjiniring tahun 2021. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Vice President Anggaran III PLN Kantor Pusat (2018 – 2021); Manager Senior Anggaran III PLN Kantor Pusat (2016 -2018); dan Manager Bidang Keuangan Unit Induk Pembangunan III (2013 - 2015).

Riwayat Pendidikan:
Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Hasanudin tahun 1992.

Pelatihan yang Diikuti pada tahun 2021:
- Pengoperasian Pembangkit Listrik Sistem JAMALI yang Andal, Berkualitas dan Ekonomis, yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI) pada tanggal 7 Agustus 2021.
- Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum terkait Laporan Keuangan yang diselenggarakan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) pada tanggal 23 September 2021.

An Indonesian Citizen, 54 years old. Domiciled in Indonesia. Appointed as the member of the Audit Committee under Board of Commissioners Decree No. 009.SK/DEKOM-IP/2021 dated July 16, 2021.

Career Path:
Apart from serving as a member of Audit Committee, he served as the Director of Finance and Human Capital at PLN Enjiniring in 2021. Previously, he served as the Vice President of Budget III at PLN Head Office (2018–2021), Senior Manager of Budget III at PLN Head Office (2016–2018), and Manager of Finance Department at Development Parent Unit III (2013–2015).

Educational Background:
The holder of Bachelor's Degree in Accounting from Hasanuddin University (1992).

Attended Trainings in 2021:
- Operation of Reliable, Quality, and Economical Java-Madura-Bali System Power Generator, held by Indonesian Power Engineers Association (IATKI) on August 07, 2021
- Audit Committee's Responsibility when the Company is Undergoing Legal Proceeding Related to Financial Report, held by the Indonesian Audit Committee Association (IKAI) on September 23, 2021.

Independensi Anggota Komite Audit

Audit Committee Members' Independence

Seluruh anggota Komite Audit Perusahaan menyatakan independensinya untuk senantiasa bekerja secara profesional, independen dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

All members of the Audit Committee has declared their independence to work in professional, independent, and objective manner at all times and free of interventions or any other things that may potentially give rise to conflict of interest.

Pernyataan Pemenuhan Independensi Komite Audit Tahun 2021
Declaration of Audit Committee's Independence in 2021

Aspek Independensi Independence Aspect	Munir Ahmad	Djoko Siswanto	Sudirmanto	Abdul Kadir
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris. Not a person in any Public Accounting Firm, Legal Consultant Service, or any other Parties providing audit services, non-audit services, and/or other forms of consultancy services for the Company within the last six (6) months prior to being appointed by the Board of Commissioners	√	√	√	√
Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris Not a person with the authority and responsibilities to plan, lead, or control Company activities within the last six (6) months prior to being appointed by the Board of Commissioners	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit No familial relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Audit Committee	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Not holding any shares, either directly or indirectly, in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan kepengurusan di Indonesia Power, anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi No managerial relationship at Indonesia Power, its Subsidiaries, or Affiliates	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relationship with the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat pemerintah daerah Not serving as the member of a political party management or as regional government official	√	√	√	√

Keterangan: √ : Independen ×: Tidak Independen
Remarks: √: Independent x: Non-independent

Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Audit Committee Competency Development

Penjelasan lebih lanjut mengenai program atau kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Audit sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Detailed explanation regarding the list of educational/training programs or activities attended by the Audit Committee throughout 2021 is provided in the Chapter of Company Profile of this Annual Report.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meetings

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) bulan sekali sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Audit. Rapat Komite Audit terdiri dari rapat koordinasi Komite Audit dengan Department of Internal Audit serta pertemuan dengan auditor eksternal pada saat jadwal pemeriksaan audit. Komite Audit juga dapat mengundang Manajemen melalui Department of Internal Audit untuk menghadiri rapat guna memberikan informasi yang diperlukan.

Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan frekuensi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

Audit Committee holds meetings periodically, at least once a month, as set out in the Audit Committee Charter. Audit Committee meetings consist of coordination meetings between Audit Committee and the Department of Internal Audit and meetings with external auditors during auditing process. The Audit Committee also invites the Management via the Department of Internal Audit to the meetings in order to provide necessary information.

The Audit Committee had held six (6) meetings in 2021, with the attendance frequency and agenda as follows:

Frekuensi Kehadiran Anggota Komite Dalam Rapat
Committee Members' Attendance and Frequency in Meetings

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
F.X Sutijastoto*	4	3	75%
Munir Ahmad	6	5	83%
Djoko Siswanto**	3	2	67%
Sudirmanto	6	6	100%
Martono***	2	2	100%
Abdul Kadir****	3	3	100%

*Berhenti menjabat pada tanggal 6 Juli 2021
** Mulai menjabat pada tanggal 6 Juli 2021
*** Berhenti menjabat pada tanggal 12 April 2021
**** Mulai menjabat pada tanggal 3 Mei 2021

*Leaving the position on July 06, 2021
**Serving the position since July 06, 2021
***Leaving the position on April 12, 2021
****Serving the position since May 03, 2021

Agenda Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Agenda

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
19 Februari 2021 February 19, 2021	Laporan Hasil Audit Tahun 2020 Audit Result Report 2020
25 Maret 2021 March 25, 2021	Evaluasi Kebijakan dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Evaluation of Policy and Implementation of Internal Control System
29 April 2021 April 29, 2021	Laporan Hasil Audit Triwulan I Tahun 2021 Audit Result Report Q1 2021
6 Juli 2021 July 6, 2021	Pengawasan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal dan Audit Internal Monitoring of the Effectiveness of External and Internal Audit Implementation
26 Agustus 2021 August 26, 2021	Laporan Hasil Audit Operasional Triwulan II Tahun 2021 Operational Audit Result Report Q2 2021
11 November 2021 November 11, 2021	Laporan Hasil Audit Operasional Triwulan III Tahun 2021 Operational Audit Result Report Q3 2021

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Audit Committee Activity Implementation Report

Selain melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan, Komite Audit berkewajiban membuat laporan berkala, yaitu laporan triwulan, semester dan tahunan yang berisi hal-hal yang telah dilakukan oleh Komite Audit tahun 2021 berdasarkan penugasan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2021, Komite Audit telah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan program kerja yang telah disusun, antara lain:

1. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja Komite;
2. Melakukan telaah atas Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal serta melakukan rapat koordinasi/ pertemuan dengan Department of Internal Audit untuk mengawasi progress tindak lanjut atas temuan audit;
3. Rapat internal Komite Audit dengan Komite Manajemen Risiko;
4. Rapat evaluasi kinerja Perusahaan dan pelaksanaan GCG antara Komite Audit dengan Corporate Secretary;
5. Rapat dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Department of Internal Audit mengenai rencana pemeriksaan tahunan dan hasil audit rutin atau khusus KAP dilingkungan Indonesia Power;
6. Melakukan kunjungan kerja ke Unit Kerja Perusahaan, yaitu Unit Kamojang POMU tanggal 14 Oktober 2021 dan Suralaya PGU tanggal 19 Oktober 2021.

In addition to reviewing financial information to be published by the Company, the Audit Committee has the responsibility to make periodical reports, i.e. Quarterly, biannual, and annual reports containing activities performed by the Audit Committee throughout 2021 in accordance with the assignment by the Board of Commissioners. Throughout 2021, the Audit Committee has performed the following duties and responsibilities according to its work program:

1. Preparing and evaluating Committee Work Program;
2. Analyzing the Internal Audit Result Report and holding coordination meetings with the Department of Internal Audit to monitor the progress of follow-up on the audit findings;
3. Holding internal meetings with the Risk Management Committee;
4. Holding meetings to evaluate Company performance and GCG implementation with the Corporate Secretary;
5. Holding meetings with Public Accountant Firm and Department of Internal Audit to discuss annual audit plan and result of the firm's regular/special audit in Indonesia Power;
6. Conducting work visit to Work Units, i.e. Kamojang POMU on October 14, 2021 and Suralaya PGU on October 19, 2021.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Audit Committee Performance Assessment

Penilaian kinerja Komite didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kinerja Komite Audit dievaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara triwulanan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

The Committee's performance assessment is based on the rules set by the Board of Commissioners, taking into account applicable provisions. The performance of the Audit Committee is evaluated by the Board of Commissioners on a quarterly basis based on the actual and completed work programs as contained in the Audit Committee Work Plan and Budget. The assessment result serves as a consideration material for the Board of Commissioners to re-appoint and/or dismiss the Audit Committee members for the subsequent term of office.

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

Penilaian Kinerja Anggota Komite Audit Tahun 2021
Audit Committee Performance Assessment in 2021

Parameter Penilaian Assessment Parameter	Penilaian Assessment	
	Sudirmanto	Abdul Kadir
Kontribusi terhadap pencapaian target Tim Contribution to Team target achievement	4	2
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of Reviews, Analyses, and Recommendations	3	2
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim Team Engagement	4	2
Kerjasama dalam Tim Team Collaboration	3	2
Mutu dan Kualitas Konsep Quality of Concept	4	3
Jumlah Nilai Kinerja Total Performance Score	**18**	**11**
Koefisien Coefficient	**1,0**	**0,8**

Keterangan skor penilaian: 1 = Tidak Sesuai Harapan; 2= Kurang Sesuai Harapan; 3= Sesuai Harapan; 4= Melampaui Harapan.
Description of score: 1 = Unsatisfactory; 2= Improvement Needed; 3= Meets Expectations; 4= Exceeds Expectations



KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko dan memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terkait dengan kerangka kerja dan kebijakan pengelolaan risiko Perusahaan.

Risk Management Committee is responsible for assuming risk monitoring function and providing independent recommendations and professional opinions to the Board of Commissioners pertaining to the Company's risk management framework and policy.

Pedoman Kerja Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Work Guidelines

Komite Manajemen Risiko telah dilengkapi dengan Piagam Komite Manajemen Risiko yang menjadi pedoman kerja Komite Manajemen Risiko. Piagam tersebut ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Nomor 242.K/010/IP/2019 dan Nomor 018.SK/DEKOM-IP/2019 Tentang Piagam Komite Manajemen Risiko PT Indonesia Power tanggal 10 Desember 2019. Piagam tersebut memuat aspek-aspek yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Manajemen Risiko, antara lain fungsi dan tugas pokok Komite Manajemen Risiko, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang, anggota dan organisasi Komite Manajemen Risiko, Kode etik, rapat Komite Manajemen Risiko, Penilaian kinerja dan honorarium dan pembebanan biaya Komite Manajemen Risiko.

The Risk Management Committee is equipped with Risk Management Committee Charter that guides the performance of its duties. The Charter was stipulated by the Board of Commissioners under Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Numbers 242.K/010/IP/2019 and 018. SK/DEKOM-IP/2019 on PT Indonesia Power Risk Management Committee Charter dated December 10, 2019. The Charter provides the aspects concerning the implementation of duties and responsibilities of each of the Risk Management Committee members, such as the core functions and duties, obligations, responsibilities and authorities, membership and organization, Code of Conduct, meetings, performance assessment, and honorarium and expenses of the Risk Management Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko
Duties and Responsibilities of Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penelaahan terhadap kajian risiko atas kelayakan kegiatan yang direncanakan oleh Manajemen Perseroan dan termasuk melakukan penelaahan terhadap kebijakan di bidang Nominasi dan Remunerasi. Tugas pokok Komite Manajemen Risiko yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris berupa penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko serta kajian risiko yang dilakukan oleh Manajemen Perusahaan, terkait kegiatan perencanaan, investasi dan operasi Perusahaan;
2. Memantau dan memastikan bahwa semua kegiatan Perusahaan yang ada di dalam RJP dan RKAP telah memperhatikan prinsip-prinsip Manajemen Risiko;
3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut hasil evaluasi, terutama terhadap kebijakan yang mempunyai dampak keuangan yang signifikan;

Risk Management Committee assists the Board of Commissioners in performing its supervisory duties by reviewing the risk assessment of the feasibility of the activities planned by the Management, including reviewing the Nomination and Remuneration policies. The core duties of the Risk Management Committee are as follows:

1. Providing inputs to the Board of Commissioners by reviewing the risk management and risk analysis performed by the Management, in relation to the planning, investment, and operations of the Company;
2. Monitoring and ensuring that all Company activities within the Long-Term Plan and WP&B have complied with the Risk Management principles;
3. Providing inputs to the Board of Commissioners concerning the follow-up on evaluation findings, particularly on policies with significant financial impacts;

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

4. Memberikan rekomendasi kepada Manajemen Perusahaan melalui Dewan Komisaris untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko;
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Manajemen Risiko;
6. Memberi rekomendasi tentang sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
7. Memberikan rekomendasi kepada Direksi/Manajemen Eksekutif untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif;
8. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko antara lain melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris, meliputi:
1. Laporan Berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris;
2. Laporan Khusus, berisi Kajian Risiko yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan;
3. Rekomendasi sesuai hasil telaahan dan evaluasi terhadap Kajian Risiko yang telah dilakukan; serta
4. Rekomendasi sesuai hasil penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi dan Remunerasi.

4. Providing recommendations to the Management via the Board of Commissioners to design and execute the Risk Management policy;
5. Providing inputs to the Board of Commissioners on the changes and improvements of Risk Management Committee Charter;
6. Providing recommendations on payroll system and provision of allowance for the Board of Commissioners and the Board of Directors members;
7. Providing recommendations to the Board of Directors/ Executive Management to design and implement an effective Nomination and Remuneration policy;
8. Preparing reports to the Board of Commissioners;
9. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners under the Board of Commissioners' scope of duties and responsibilities, in accordance with the applicable laws and regulations;

The Risk Management Committee has the responsibility to immediately report to the Board of Commissioners the result of evaluation performed. The reports of which include:
1. Periodical Report, containing the cores of the outcomes of the works assigned by the Board of Commissioners;
2. Special Reports, containing the analysis of risks suspected to disturb the Company's business activities;
3. Recommendations according to results of analysis and evaluation of the Risk Analysis performed; and
4. Recommendations according to results of analysis of Nomination and Remuneration policy.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Manajemen Risiko
Appointment and Dismissal of Risk Management Committee

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Komite Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pemberhentian Komite Manajemen Risiko dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya atau diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

The Risk Management Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners for a tenure of one (1) year. They can be reappointed for the next tenure. A Risk Management Committee member can be dismissed when their term of office expires, and according to the Board of Commissioners Decree, being dismissed for the inability to meet the specified performance target and/or being incompetent of performing their duties.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Manajemen Risiko
Composition of Risk Management Committee Members

Susunan dan komposisi keanggotaan Komite Manajemen Risiko tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Dewan Komisaris PT Indonesia Power.

The composition and membership of the Risk Management Committee in 2021 were stipulated under the Board of Commissioners Decree No. 005.SK/DEKOM-IP/2021 dated May 03, 2021 on Establishment of Risk Management Committee of PT Indonesia Power Board of Commissioners.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Tahun 2021
Structure and Membership of Risk Management Committee in 2021

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Position in the Committee	Periode Jabatan Term of Office
Miftahul Jannah	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	2021
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua I Deputy Head I	2021
Ulil Abshar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua II Deputy Head II	2021
Anas Fadli Oesman	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris Komite Committee Secretary	2021

Profil Anggota Komite Manajemen Risiko
Profile of Risk Management Committee Members



Miftahul Jannah
Ketua Komite Head of Committee

Diangkat sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 3 Mei 2021.

Profil Ketua Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini.

Appointed as the Head of Risk Management Committee by Board of Commissioners Decree No. 005.SK/DEKOM-IP/2021 dated May 03, 2021.

The profile of the Head of Risk Management Committee is available in the Chapter of Board of Commissioners Profile of this Annual Report.



Iskandar Simorangkir
Wakil Ketua I Deputy Head I

Diangkat sebagai Wakil Ketua I Komite Manajemen Risiko Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 3 Mei 2021.

Profil Wakil Ketua I Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini.

Appointed as the Deputy Head I of Risk Management Committee by Board of Commissioners Decree No. 005.SK/DEKOM-IP/2021 dated May 03, 2021.

The profile of the Deputy Head I of Risk Management Committee is available in the Chapter of Board of Commissioners Profile of this Annual Report.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE



Ulil Abshar

Wakil Ketua II Deputy Head II

Diangkat sebagai Wakil Ketua II Komite Manajemen Risiko Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 3 Mei 2021.

Profil Wakil Ketua II Komite Manajemen Risiko dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Komisaris dalam buku Laporan Tahunan ini.

Appointed as the Deputy Head II of Risk Management Committee by Board of Commissioners Decree No. 005.SK/DEKOM-IP/2021 dated May 03, 2021.

The profile of the Deputy Head II of Risk Management Committee is available in the Chapter of Board of Commissioners Profile of this Annual Report.



Anas Fadli Oesman

Sekretaris Komite Committee Secretary

Warga negara Indonesia, 61 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 3 Mei 2021.

Perjalanan Karir:
Selain menjabat sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko, beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah: Kepala Divisi Bukopin Syariah Jakarta Supervisi Bisnis dan Fee Base (2019 – 2020); Kepala Divisi Bank Syariah Bukopin (2015-2018); Kepala Divisi Bukopin Area V BSD (2013-2015); Pemimpin Cabang Bukopin Cabang Semarang (2010-2013).

Riwayat Pendidikan:
Meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Syiah Kuala Darussalam tahun 1987.

Pelatihan yang Diikuti pada tahun 2021:
- Pengoperasian Pembangkit Listrik Sistem JAMALI yang Andal, Berkualitas dan Ekonomis, yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI) pada tanggal 7 Agustus 2021.
- Tanggung Jawab Komite Audit Saat Perseroan Tersangkut Masalah Hukum terkait Laporan Keuangan yang diselenggarakan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) pada tanggal 23 September 2021.

An Indonesian Citizen, 61 years old. Domiciled in Indonesia. Appointed as the Secretary to Risk Management Committee by Board of Commissioners Decree No. 005.SK/DEKOM-IP/2021 dated May 03, 2021.

Career Path:
In addition to serving as the Secretary to the Risk Management Committee, he had held several other positions as follows: Head of Fee-Based and Business Supervision Division at Bank Syariah Bukopin (2019–2020), Division Head at Bank Syariah Bukopin (2015–2018), Head of Division at Bukopin Area V BSD (2013–2015), Branch Office Head at Bukopin Semarang Branch (2010–2013).

Educational Background:
Earned Bachelor's Degree in Management from Syiah Kuala Darussalam University (1987).

Attended Trainings in 2021:
- Operation of Reliable, Quality, and Economical JAMALI System Power Generator, held by Indonesian Power Engineers Association (IATKI) on August 07, 2021
- Audit Committee's Responsibility when the Company is Undergoing Legal Proceeding Related to Financial Report, held by the Indonesian Audit Committee Association (IKAI) on September 23, 2021.

Independensi Anggota Komite Manajemen Risiko
Independence of Risk Management Committee Members

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan menyatakan independensinya untuk senantiasa bekerja secara profesional, independen dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, serta kepemilikan saham di Indonesia Power dan perusahaan lainnya sebagaimana tabel berikut:

All members of the Risk Management Committee declared their independence to work in professional, independent, and objective manners at all times and free of interventions or any other things that may potentially give rise to conflict of interest. The independence of the Risk Management Committee members is indicated by the familial, financial, managerial, and shareholding relationships at Indonesia Power and other companies, as shown below:

Pernyataan Pemenuhan Independensi Komite Manajemen Risiko Tahun 2021
Declaration of Risk Management Committee's Independence in 2021

Aspek Independensi Independence Aspect	Miftahul Jannah	Iskandar Simorangkir	Ulil Abshar	Anas Fadli Oesman
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relationship with the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan kepengurusan di Indonesia Power, anak Perusahaan maupun Perusahaan afiliasi No managerial relationship at Indonesia Power, its Subsidiaries, or Affiliates	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan kepemilikan saham di Perusahaan No shareholding in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Manajemen Risiko No familial relationship with the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Risk Management Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat Pemerintah Daerah Not serving as the member of a political party management or as regional government official	√	√	√	√

Keterangan: √ : Independen ×: Tidak Independen
Remarks: √: Independent x: Non-independent

Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Competency Development

Penjelasan lebih lanjut mengenai program atau kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Manajemen Risiko sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Detailed explanation regarding the list of educational/training programs or activities attended by the Risk Management Committee throughout 2021 is available in the Chapter of Company Profile chapter of this Annual Report.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Rapat Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Meetings

Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko telah diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko, yaitu dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. Komite Manajemen Risiko dapat mengadakan rapat, baik secara internal maupun rapat koordinasi dengan Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management Perusahaan. Selama tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan frekuensi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

The arrangement of the Risk Management Committee meetings is available in the Risk Management Committee Charter, i.e. to be held at least once in a month. Risk Management Committee can hold a meeting, either internal meeting or coordination meeting with the Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management. Throughout 2021, the Risk Management Committee had held five (5) meetings, with the attendance frequency and agenda as follows:

Frekuensi Kehadiran Anggota Komite Dalam Rapat
Committee Members' Attendance and Frequency in Meetings

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Miftahul Jannah	5	5	100%
Iskandar Simorangkir*	5	2	40%
Ulil Abshar	5	5	100%
Anas Fadli Oesman	5	5	100%
Giovany**	2	2	100%

*Mulai menjabat pada tanggal 9 Februari 2021
*Berhenti menjabat pada tanggal 12 April 2021
*Serving the position since February 09, 2021
*Leaving the position on April 12, 2021

Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Meeting Agenda

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
29 Maret 2021 March 29, 2021	Pengembangan Usaha Energi Baru Terbarukan (EBT) Developing New & Renewable Energy (NRE) Business
8 April 2021 April 8, 2021	• Evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2020; • Monitor dan evaluasi Profile Risiko dan Mitigasi Risiko RKAP Tahun 2021 sampai dengan Maret 2021; • *Lesson learn* kejadian Pertamina Balongan dan *action plan* untuk semua Pembangkit yang dikelola Indonesia Power. • Evaluation of Risk Management Implementation in 2020 • Monitoring and evaluation of Risk Profile and Risk Mitigation of WP&B 2021 until March 2021 • Lesson learned from Pertamina Balongan incident and action plan for all power plants under Indonesia Power's management
4 Mei 2021 May 4, 2021	Evaluasi Organisasi, Sistem dan Prosedur serta Kebijakan SDM Evaluation of Organization, System and Procedure, and Policy of Human Capital
19 Juli 2021 July 19, 2021	*Monitoring* Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko Monitoring of Risk Management Policy & Implementation
7 Desember 2021 December 7, 2021	• Penelaahan Usulan Remunerasi Direksi; • Evaluasi Organisasi, Sistem dan Prosedur serta Kebijakan SDM. • Review of Proposed Remuneration for the Board of Directors • Evaluation of Organization, System and Procedure, and Policy of Human Capital

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Activity Implementation Report

Sepanjang tahun 2021, sesuai dengan program kerja yang telah disusun, Komite Manajemen Risiko telah melakukan penelahan terhadap kajian risiko atas kelayakan kegiatan yang direncanakan oleh Perusahaan, serta mengevaluasi dan melakukan pengawasan Fungsi Nominasi dan Remunerasi di Perusahaan, antara lain:

1. Menyusun dan mengevaluasi Program Kerja Komite;
2. Rapat rutin internal Komite Manajemen Risiko sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan;
3. Rapat internal Komite Manajemen Risiko dengan Komite Audit;
4. Rapat koordinasi Komite Manajemen Risiko dengan Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management Perusahaan;
5. Rapat koordinasi Komite Manajemen Risiko dengan Divisi Human Capital and Change Management Perusahaan;
6. Melakukan Kunjungan kerja ke Unit Kerja Perusahaan, yaitu Unit Kamojang POMU pada tanggal 14 Oktober 2021 dan Suralaya PGU pada tanggal 19 Oktober 2021;
7. Mengevaluasi dan melakukan pengawasan Fungsi Nominasi dan Remunerasi di Perusahaan.

Throughout 2021, according to the work programs prepared, the Risk Management Committee has reviewed the risk analysis on the feasibility of activities planned by the Company, as well as evaluating and monitoring the Nomination and Remuneration Function in the Company, among others:

1. Preparing and evaluating Committee Work Program;
2. Holding regular internal Risk Management Committee meetings at least once in a month;
3. Holding internal meetings with the Audit Committee;
4. Holding coordination meetings with the Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management;
5. Holding coordination meetings with the Division of Human Capital and Change Management;
6. Conducting work visit to Work Units, i.e. Kamojang POMU on October 14, 2021 and Suralaya PGU on October 19, 2021;
7. Evaluating and supervising the Nomination and Remuneration Function at the Company.

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Performance Assessment

Evaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris dilakukan setiap triwulanan berdasarkan realisasi atas penyelesaian program kerja dan anggaran Komite Manajemen Risiko. Hasil penilaian kinerja tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Manajemen Risiko untuk periode jabatan berikutnya. Berikut hasil penilaian kinerja anggota Komite Manajemen Risiko tahun 2021.

The Risk Management Committee's performance is evaluated every quarter by the Board of Commissioners based on the actual completion of the Risk Management Committee's work programs and budget. The performance assessment result serves as the consideration for the Board of Commissioners to re-appoint and/or dismiss the Risk Management Committee members for the subsequent term of office. Below is the result of performance assessment of the Risk Management Committee members in 2021.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Penilaian Kinerja Anggota Komite Manajemen Risiko Tahun 2021
Risk Management Committee Performance Assessment in 2021

Parameter Penilaian Assessment Parameter	Penilaian Assessment
	Anas Fadli Oesman
Kontribusi terhadap pencapaian target Tim Contribution to Team target achievement	3
Jumlah Kajian, Analisis, Rekomendasi Number of Reviews, Analyses, and Recommendations	4
Tingkat keaktifan dalam kegiatan Tim Team Engagement	4
Kerjasama dalam Tim Team Collaboration	4
Mutu dan Kualitas Konsep Quality of Concept	3
Jumlah Nilai Kinerja Total Performance Score	**18**
Koefisien Coefficient	**1,0**

Keterangan skor penilaian: 1 = Tidak Sesuai Harapan; 2= Kurang Sesuai Harapan; 3= Sesuai Harapan; 4= Melampaui Harapan.
Description of score: 1 = Unsatisfactory; 2= Improvement Needed; 3= Meets Expectations; 4= Exceeds Expectations

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Dalam pelaksanaan salah satu tugasnya, Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi terhadap proses nominasi dan remunerasi di Perusahaan. Saat ini, Dewan Komisaris belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi telah dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko. Fungsi ini dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip GCG dan standar etika Perusahaan serta terselenggaranya fungsi nominasi di lingkup Perusahaan.

In conducting one of its duties, the Board of Commissioners performs review of and provides recommendation for the nomination and remuneration process in the Company. The Board of Commissioners has not established the Nomination and Remuneration Committee. However, the function is assumed by the Risk Management Committee. The function was established to assist the implementation of the Board's duties and responsibilities in ensuring the implementation of GCG principles and the code of conduct and the run of nomination function within the Company.

Pedoman Kerja Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi
Work Guidelines for Nomination and Remuneration Committee Function

Dalam menjalankan tugasnya terkait pelaksanaan nominasi dan remunerasi Direksi, Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada Piagam Komite Manajemen Risiko yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 242.K/010/IP/2019 dan No. 018.SK/DEKOM-IP/2019. Adapun hal-hal yang diatur dalam Piagam Komite Manajemen Risiko

In performing its duties for the Board of Directors' nomination and remuneration, the Function refers to Risk Management Committee Charter ratified in Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 242.K/010/IP/2019 and No. 018.SK/DEKOM-IP/2019. Matters contained in the Risk Management Committee Charter for the implementation of

atas pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi, antara lain terkait tugas dan tanggung jawab Komite dalam melakukan penelaahan dan evaluasi kebijakan dibidang Nominasi dan Remunerasi.

Dalam pelaksanaan nominasi Direksi, Perusahaan mengacu pada Anggaran Dasar dan *Board Manual* Perusahaan serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemegang saham dan Peraturan Menteri BUMN PER-04/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/ MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN. Sedangkan pelaksanaan remunerasi Direksi dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/ MBU/ 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

nomination and remuneration function include the duties and responsibilities of the Committee in reviewing and evaluating policies on nomination and remuneration.

In nominating the Board of Directors, the Company refers to the Articles of Association and the Board Manual, as well as the provisions set by the shareholders, not to mention the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/06/2020 dated June 26, 2020 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/2012 on Guidelines for the Appointment of the Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of SOE Subsidiaries. The determination of remuneration for the Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2021 on the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for the Stipulation of Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Duties and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee Function

Salah satu tugas pokok Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah melakukan penelaahan terhadap kebijakan dibidang Nominasi dan Remunerasi. Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Direksi/ Manajemen Eksekutif untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas Perusahaan yang terkait dengan sistem Nominasi dan Remunerasi, diantaranya mengenai:

1. Penilaian terhadap sistem yang diberlakukan
2. Opsi yang diberikan, antara lain opsi saham
3. Sistem Pensiun; dan
4. Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai.

The Function's core duties among others include reviewing the policies on nomination and remuneration. The Nomination and Remuneration Committee Function provides recommendations to the Board of Directors/Executive Management to design and implement an effective nomination and remuneration policy, including matters that may enhance the smoothness and effectiveness of nomination and remuneration system implementation that includes:

1. Assessment of implemented systems;
2. Provided options, e.g. stock options;
3. Retirement system; and
4. System concerning compensation and other benefits for employee reduction.

Susunan dan Komposisi Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi

Composition of Nomination and Remuneration Committee Function

Penetapan keanggotaan Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi melekat pada pengangkatan Komite Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005.SK/DEKOM-IP/2021 tanggal 3 Mei 2021.

The determination of Nomination and Remuneration Committee Function members was covered in the appointment of Risk Management Committee as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners No. 005.SK/DEKOM-IP/2021 dated May 3, 2021.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Struktur Keanggotaan Komite
Committee's Membership Structure

Nama Name	Jabatan di Perusahaan Position at the Company	Jabatan di Komite Position in the Committee	Periode Jabatan Term of Office
Miftahul Jannah	Komisaris Commissioner	Ketua Komite Head of Committee	2021
Iskandar Simorangkir	Komisaris Commissioner	Wakil Ketua I Deputy Head I	2021
Ulil Abshar	Komisaris Independen Independent Commissioner	Wakil Ketua II Deputy Head II	2021
Anas Fadli Oesman	Pihak Independen Independent Party	Sekretaris Komite Committee Secretary	2021

Profil Anggota Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi
Profile of Nomination and Remuneration Committee Function Members

Profil anggota Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada profil Komite Manajemen Risiko yang telah disajikan pada bab Tata Kelola Perusahaan dalam buku Laporan Tahunan ini.

The profile of the Nomination and Remuneration Committee Function is available in the profile of Risk Management Committee presented in the Chapter of Corporate Governance of this Annual Report.

Independensi Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independence of Nomination and Remuneration Committee Function

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan telaah dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh anggota Komite telah memenuhi aspek independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan Perusahaan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

The Nomination and Remuneration Committee Function performs its duties and responsibilities professionally and independently, reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners, without any intervention from any parties that do not comply with the applicable laws and regulations. All members of the Committee have met the independence aspect, i.e. no financial, managerial, shareholding, and/or familial relation with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or any kind of relationships with the Company which may influence their capacity to act independently.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi
Competency Development for Nomination and Remuneration Committee Function

Penjelasan lebih lanjut mengenai program atau kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini dijalankan oleh Komite Manajemen Risiko, dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Further explanation on education/trainings participated by the Nomination and Remuneration Committee Function, in this case run by the Risk Management Committee, is available in the Chapter of Company Profile of this Annual Report.

Rapat Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Function Meetings

Selama tahun 2021, Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dengan frekuensi kehadiran dan agenda sebagai berikut:

In 2021, the Nomination and Remuneration Committee Function had held two (2) internal meetings, with the attendance frequency and agenda as follows:

Frekuensi Kehadiran Anggota Komite Dalam Rapat
Committee Members' Attendance and Frequency in Meetings

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendances	Tingkat Kehadiran Frequency
Miftahul Jannah	2	2	100%
Iskandar Simorangkir	2	0	0%
Ulil Abshar	2	2	100%
Anas Fadli Oesman	2	2	100%

Agenda Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Function Meeting Agenda

Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
4 Mei 2021 May 4, 2021	Evaluasi Organisasi, Sistem dan Prosedur serta Kebijakan SDM Evaluation of Organization, System and Procedure, and Policy of Human Capital
7 Desember 2021 December 7, 2021	• Penelaahan Usulan Remunerasi Direksi; • Evaluasi Organisasi, Sistem dan Prosedur serta Kebijakan SDM. • Review of Proposed Remuneration for the Board of Directors • Evaluation of Organization, System and Procedure, and Policy of Human Capital

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi
Report of Nomination and Remuneration Committee Function Activity Implementation

Sepanjang tahun 2021, Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi telah secara aktif memberikan masukan penyempurnaan terkait dengan pengawasan perencanaan formasi SDM serta memberikan rekomendasi atas kebijakan dan usulan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi/Manajemen Eksekutif untuk merancang dan melaksanakan kebijakan Nominasi dan Remunerasi yang efektif, termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas Perseroan yang terkait dengan sistem Nominasi dan Remunerasi;
2. Memberikan rekomendasi tentang sistem penggajian (remunerasi) dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk:

Throughout 2021, the Nomination and Remuneration Committee Function has been actively providing inputs for the improvement of HC formation planning supervision as well as recommendations for policy on and proposal of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors as follows.

1. Providing recommendations to the Board of Directors/ Executive Management to design and implement an effective nomination and remuneration policy, including matters that may enhance the smoothness and effectiveness of nomination and remuneration system implementation.
2. Providing recommendations on payroll (remuneration) system and provision of allowances for the Board of Commissioners and the Board of Directors members, which include:

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

- Penilaian terhadap sistem yang diberlakukan;
- Opsi yang diberikan, antara lain opsi saham;
- Sistem Pensiun;
- Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai.

3. Melakukan rapat koordinasi Komite Manajemen Risiko dengan Divisi Human Capital and Change Management Indonesia Power yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.

- Assessment of implemented systems;
- Provided options, e.g. stock options;
- Retirement system; and
- System concerning compensation and other benefits for employee reduction.

3. Holding coordination meetings between Risk Management Committee and the Division of Human Capital and Change Management, at least once every month.

Penilaian Kinerja Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Function Performance Assessment

Penilaian kinerja Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2021 melekat pada penilaian Komite Manajemen Risiko atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko sebagai pelaksana fungsi Komite Nominasi dan remunerasi. Penilaian kinerja Komite terkait pelaksanaan tugas Nominasi dan Remunerasi didasarkan pada hasil penelaahan dan evaluasi Komite terhadap Organisasi, Sistem dan Prosedur serta Kebijakan SDM serta penelaahan usulan remunerasi Direksi.

The assessment of the Nomination and Remuneration Committee Function's performance in 2021 was included in the assessment of the Risk Management Committee for the implementation of the Committee's duty as the implementer of the Nomination and Remuneration Committee Function. The assessment was based on the Committee's review and evaluation of the organization, system and procedure, HC policy, and review of the Board of Directors' proposed remuneration.

Kebijakan Suksesi Direksi
Board of Directors Succession Policy

Perencanaan suksesi Direksi termasuk ke dalam salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dalam mempersiapkan regenerasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam prinsip GCG.

Succession planning for the Board of Directors is covered in the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, i.e. in preparing regeneration and maintaining the continuity of future leadership. To deliver a transparent, accountable, and responsible process and mechanism of Board of Directors and Board of Commissioners' selection and replacement, professionalism, as set out in GCG principles, must be adhered to during appointment and dismissal of Board members.

Kebijakan dasar terkait suksesi Direksi di lingkup Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN. Adapun mekanisme suksesi Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham, yaitu PT PLN (Persero). Untuk memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya, seluruh calon Direksi menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Direksi terpilih diangkat oleh Pemegang Saham melalui RUPS.

The foundational policy on succession of the Board of Directors refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/06/2020 on Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/2012 on Guidelines for the Appointment of Board of Directors and Board of Commissioners Members of SOE Subsidiaries. The succession of the Board of Directors is sought according to the provisions set out by PT PLN (Persero) as the Shareholder. To ensure integrity and professionalism in each of their areas, all Director Candidates must take fit and proper test as stipulated by applicable laws and regulations. Subsequently, selected Directors are appointed by the Shareholders during GMS.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran yang besar dalam memastikan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Didy Poeriadi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006. SK/DEKOM-IP/2020 tanggal 24 Maret 2020. Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris telah berdasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dipersyaratkan Perusahaan.

The Board of Commissioners' Secretary has administrative and secretariat duties and functions that pertain to the Board of Commissioners' supervisory duties. The Secretary answers directly to the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners also has a crucial role in ensuring that the Board of Commissioners implements the GCG principles according to the best practices and applicable laws and regulations.

The Secretary to the Board of Commissioners position is currently assumed by Didy Poeriadi as stipulated by the Board of Commissioners Decree No. 006.SK/DEKOM-IP/2020 dated March 24, 2020. The appointment of the Board of Commissioners Secretary has complied with the requirements on educational background and work experience.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners Secretary Profile



Didy Poeriadi
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners

Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Berdomisili di Indonesia. Diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006. SK/DEKOM-IP/2020 tanggal 24 Maret 2020.

Perjalanan Karir:
Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Power tahun 2011 - sekarang, beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Komisaris PT Cogindo DayaBersama tahun 2011, Komisaris PT Indonesia Power tahun 2010, Kepala Satuan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) tahun 2009, Management Consulting Group PT PLN (Persero) tahun 2008, Kepala Staf Perencanaan Proyek Induk Pembangkit Hidro Jabar dan Proyek Induk Pembangkit Jabar Jaya 1994.

Riwayat Pendidikan:
Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh November tahun 1980.

An Indonesian Citizen, 67 years old. Domiciled in Indonesia. Appointed as the Secretary to the Board of Commissioners by Board of Commissioners Decree No. 006.SK/DEKOM-IP/2020 dated March 24, 2020.

Career Path:
Prior to serving as the Secretary to the Board of Commissioners of PT Indonesia Power in 2011–current, he held several other positions, such as Commissioner of PT Cogindo DayaBersama in 2011, Commissioner of PT Indonesia Power in 2010, Head of Risk Management Unit of PT PLN (Persero) in 2009, Management Consulting Group in PT PLN (Persero) in 2008, Head of Hydro Power Plant Master Project Planning Staff of West Java and Power Plant Master Project Jabar Jaya 1994.

Educational Background:
The holder of Bachelor's Degree in Electrical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology (1980).

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris

Work Guidelines for the Secretary to the Board of Commissioners

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada *Board Manual*. Tugas dan tanggung jawab utama Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu kelancaran pekerjaan dan memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang mencakup:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris;
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:

a. Monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris;
b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perusahaan;
c. Dukungan administrasi serta monitoring berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris.

In assuming its duties and responsibilities, the Board of Commissioners Secretary refers to the Board Manual. The main duties and responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners are to give assistance for streamlined works and provide support for the Board of Commissioners in performing its duty and responsibility, which include:

1. Carrying out secretariat administrative work within the Board of Commissioners;
2. Holding Board of Commissioners meetings and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, Board of Directors, and other relevant parties;
3. Providing data/information necessary for the Board of Commissioners and committees under the Board of Commissioners, with regard to:
   a. The monitoring of the follow-up on the resolutions, recommendations, and directives of the Board of Commissioners;
   b. Administrative materials containing the reports/activities of the Board of Directors in managing the Company;
   c. Administrative support for and monitoring of any matter that requires approval or recommendation from the Board of Commissioners in relation to Company management by the Board of Directors.
4. Collecting technical data from committees and specialists of the Board of Commissioners to be used by the Board of Commissioners.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Implementation of the Duties of the Board of Commissioners' Secretary

Selama tahun 2021, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris;
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Dewan Komisaris, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perusahaan;
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat;
4. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen Dewan Komisaris lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

Throughout 2021, the Board of Commissioners' Secretary has carried out the following activities:

1. Carrying out secretarial activities within the Board of Commissioners;
2. Coordinating the provision of information necessary for the Board of Commissioners, such as periodical report from the Board of Directors (Monthly Reports, Quarterly Reports, Annual Reports, Internal Control Unit Audit Finding Report) and other reports/information on the Company;
3. Arranging Board of Commissioners meetings, including but not limited to preparing and sending summons, delivering meeting materials, and creating minutes of meetings;
4. Documenting minutes of meeting and other Board of Commissioners' documents, as well as delivering meeting resolutions to relevant parties;

5. Mengadministrasikan Surat Keluar Masuk Dewan Komisaris, selama tahun 2021 terdapat 80 Surat Masuk kepada Dewan Komisaris dan 244 Surat Keluar Dewan Komisaris;
6. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahunan 2021.

5. Documenting incoming and outgoing mails in the Board of Commissioners. In 2021, the Board of Commissioners received 80 incoming mails and delivered 244 outgoing mails;
6. Preparing the Annual Report of the Board of Commissioners Secretary Duty Performance.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

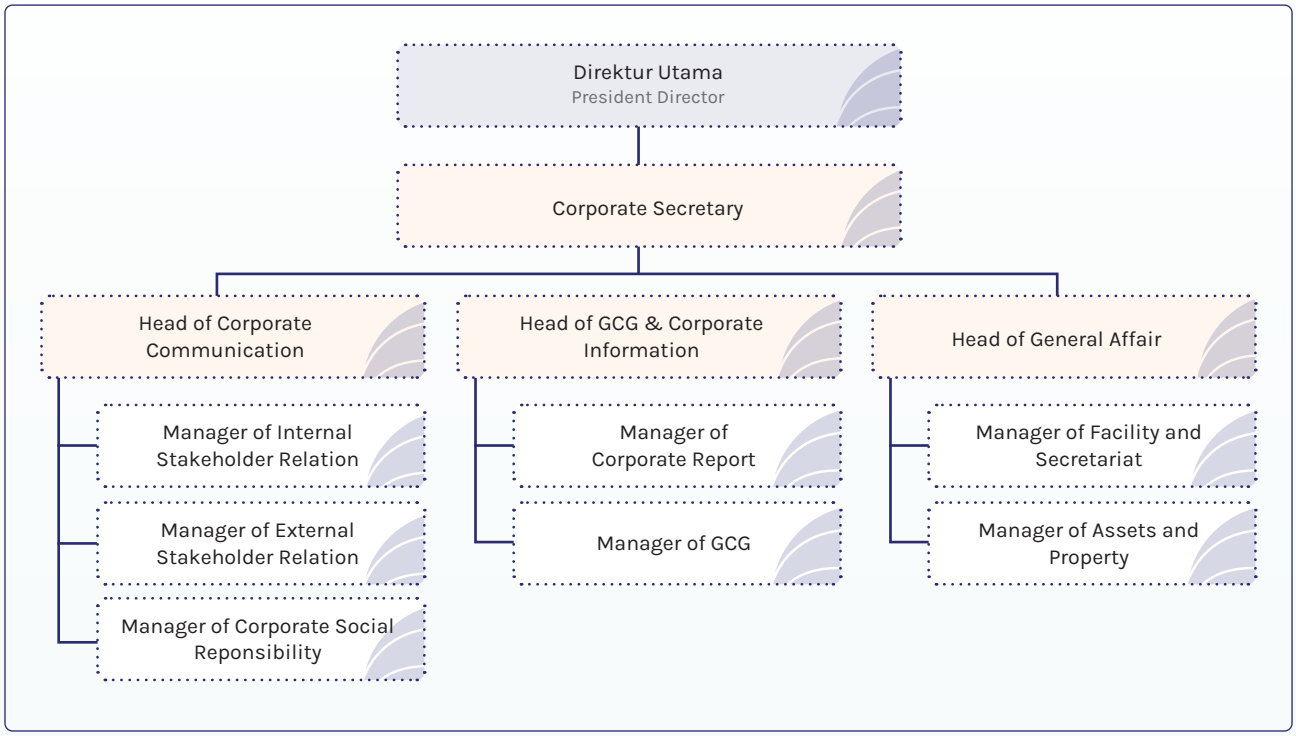
Indonesia Power memiliki Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab dalam memelihara citra Perusahaan, melindungi kepentingan Perusahaan dengan membangun komunikasi dan hubungan baik dengan pemegang saham, investor dan *stakeholders* lainnya serta memastikan terselenggaranya penyampaian informasi secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia Power has a Corporate Secretary whose responsibilities are to maintain the Company's image and protect the Company's interests through building good communication and relations with the shareholders, investors, and other stakeholders, while ensuring timely delivery of accurate information to all stakeholders.

Fungsi Sekretaris Perusahaan Indonesia Power dijalankan oleh Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 091.K/010/IP/2019 tanggal 21 Juni 2019.

The Corporate Secretary function at Indonesia Power is assumed by the Corporate Secretary as mandated by the Decree of the Board of Directors No. 091.K/010/IP/2019 dated June 21, 2019.

Struktur Organisasi Corporate Secretariat
Corporate Secretariat Organizational Structure



SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Kedudukan Corporate Secretariat dalam Struktur Organisasi
Position of Corporate Secretariat in Organizational Structure

Sejalan dengan struktur organisasi Indonesia Power tersebut, kedudukan Corporate Secretariat dalam struktur organisasi Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan memiliki hubungan fungsional dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

According to Indonesia Power's organizational structure, the Corporate Secretariat reports directly to the President Director and has functional relations and is capable of establishing direct communication with the Board of Commissioners.

Profil Corporate Secretary
Corporate Secretary Profile

Dari sejak 8 Januari 2019, Corporate Secretary Indonesia Power dijabat oleh Sdr. IGAN Subawa Putra berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 037.K/020/IP/2019 tanggal 8 Januari 2019. Berikut profil ringkas Corporate Secretary Indonesia Power:

Since January 8, 2019, the Corporate Secretary position has been assumed by Mr. IGAN Subawa Putra pursuant to the Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Power Number 037.K/020/IP/2019 dated January 8, 2019. Below is a concise profile of the Corporate Secretary:



IGAN Subawa Putra
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia. Lahir Lahir di Tabanan tanggal 24 Januari 1969, Berdomisili di Jakarta Indonesia, Lulusan Sarjana Mesin dari ITS Surabaya tahun 1933 dan Magister Teknik Mesin dari ITB bandung tahun 2011.

An Indonesian Citizen Born in Tabanan on January 24, 1969; Domiciled in Jakarta, Indonesia; The holder of Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Sepuluh Nopember Institute of Technology Surabaya (1993) and Master's Degree in Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (2011).

Riwayat Pekerjaan:
Sebelum menjabat sebagai Corporate Secretary di Indonesia Power, beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah General Manager Bali PGU (2014 - 2019), Manajer Area Semarang & Mrica MSU (2012 - 2013), Manajer Teknik Bali PGU (2010 - 2012) dan Manajer Unit PLTG Pemaron (2008 - 2010).

Professional Background:
Prior to serving as the Corporate Secretary in Indonesia Power, he also held several other positions, such as General Manager of Bali PGU (2014-2019), Area Manager of Semarang & Mrica MSU (2012-2013), Technical Manager of Bali PGU (2010-2012), and GTPP Pemaron Unit Manager (2008-2010).

Pelatihan Tahun 2021:
Pelatihan *Capital Market* tanggal 28 Oktober 2021; *Executive Education* (EE) I 2021 tanggal 30 September s.d 15 Oktober 2021 dan IP LIGAT 2021 tanggal 27 - 30 September 2021.

Trainings in 2021:
Training on Capital Market (October 28, 2021); Executive Education (EE) I 2021 (September 30-October 15, 2021); and IP LIGAT 2021 (September 27-30, 2021)

Sertifikat:
Sertifikat Kompetensi dari University of Missouri/ST.Louis

Certificates:
Certificate of Competence from the University of Missouri/St. Louis

Masa Jabatan
Efektif sejak 8 Januari 2019 sampai dengan sekarang.

Term of Office
Effective since January 08, 2019 until currently.

Pengangkatan dan Pemberhentian Corporate Secretary
Appointment and Dismissal of Corporate Secretary

Corporate Secretary diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director under the Company's internal mechanism and with approval from the Board of Commissioners, in consideration of educational qualification, work experience, and other qualifications as per Company's business needs.

Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Corporate Secretary
Corporate Secretary Appointment and Discharge Process

Direksi menyampaikan Usulan Calon Corporate Secretary Kepada Dewan Komisaris
Board of Directors proposes Corporate Secretary Candidate(s) to Board of Commissioners

→

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Usulan Direksi tersebut
Board of Commissioners approves the Board of Directors' Proposal

→

Penetapan Pengangkatan/ Pemberhentian melalui Surat Keputusan Direksi
Determination of Appointment/ Dismissal through the Decree of the Board of Directors

Pedoman Kerja Corporate Secretary
Corporate Secretary Work Guidelines

Dalam menjalankan fungsinya, Corporate Secretary telah memiliki pedoman kerja yang dituangkan dalam *Board Manual* dan Surat Keputusan Direksi. Pedoman tersebut mencakup tugas pokok organisasi Corporate Secretary, uraian tugas Corporate Secretary, dan Pedoman Komunikasi Perusahaan serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Corporate Secretary. Dengan adanya Pedoman Kerja ini, diharapkan pelaksanaan tugas Corporate Secretary akan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Corporate Secretary.

In performing its function, the Corporate Secretary uses work guidelines as set out in the Board Manual and Board of Directors Decree. The guidelines cover main organizational duty of the Corporate Secretary, description of Corporate Secretary duty, and Corporate Communication Guidelines, as well as other things relevant to the performance of duties and function of the Corporate Secretary. With these Work Guidelines, it is expected that the performance of Corporate Secretary duty is more aligned and effective; the Guidelines can also be used as an instrument for assessing the Corporate Secretary's performance.

Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Secretary
Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 075.K/010/IP/2020 tanggal 4 Juni 2020 adalah memastikan terkelolanya tata kelola informasi, tata hubungan dengan pengurus Perusahaan, lembaga terkait dan seluruh *stakeholder* Perusahaan, dan pengelolaan fasilitas Perusahaan dalam rangka terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan/peraturan lainnya yang terkait dengan

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary pursuant to the Decree of the Board of Directors No. 075.K/010/IP/2020 dated June 4, 2020 are to ensure well-managed relationship with Company management, related agencies, and all stakeholders and proper information governance and facility management in order to fulfill the Company's obligation and responsibility under the Articles of Association and other relevant provisions/regulations, by using an integrated

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

menggunakan suatu sistem informasi terpadu sesuai InPower IMS, untuk memaksimalkan kinerja Perusahaan sesuai prinsip GCG dan kepatuhan pada SMAP, dengan tugas pokok Corporate Secretary, diantaranya:

1. Menyusun dan mengkaji strategi jangka Panjang, kebijakan, proses bisnis dan proses Corporate Secretary;
2. Menyusun dan mengendalikan program kerja dan anggaran sesuai fungsi utama Corporate Secretary untuk mendukung RJPP dan RKAP;
3. Menyusun kajian risiko dan mengelola mitigasinya atas kegiatan di lingkungan Corporate Secretary;
4. Menyusun usulan dan perencanaan pengadaan Corporate Secretary;
5. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan, desain dan strategi komunikasi internal termasuk pengelolaan media sosial, kegiatan Perusahaan dan protokoler;
6. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan komunikasi eksternal, pengelolaan *website*, media relation dan *sponsorship* termasuk komunikasi dengan Lembaga Negara dan Lembaga pembuat kebijakan ketenagalistrikan;
7. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan CSR;
8. Melaksanakan pembinaan kegiatan aneka usaha non pembangkit yang ada di Lingkungan Perusahaan;
9. Menyusun dan mengendalikan laporan korporat (Laporan Manajemen, Laporan Kinerja, Laporan Tahunan) rapat korporat (RUPS, Rapat Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat *Monitoring* Kinerja, Rapat Koordinasi), laporan statistik Perusahaan, KIP dan Prosedur serta Surat Keputusan terkait informasi korporat;
10. Menyusun dan mengevaluasi dan kebijakan GCG;
11. Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi RKAP administrasi korporat dan administrasi Anak Perusahaan konsolidasi;
12. Menyusun laporan daan mengendalikan realisasi Tenaga Kerja *outsourcing* di luar struktur organisasi Perusahaan;
13. Menyusun dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan fasilitas Perusahaan dan kesekretariatan;
14. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyediaan fasilitas Perusahaan dan kesekretariatan;
15. Mengelola dan mengendalikan aset dan properti Perusahaan;
16. Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan *general cleaning* pada area kerja fasilitas, sarana gedung dan bangunan di lingkungan Perusahaan;
17. Membuat dan mengevaluasi laporan rutin dan non rutin Corporate Secretary;
18. Melakukan pembinaan kegiatan terkait bidang kerja kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Perusahaan.

information system that is in line with InPower IMS. In optimizing the Company's performance according to GCG principles and ABMS compliance, the Corporate Secretary has the following core duties:

1. Prepare and review long-term strategies, policies, business processes, and procedures of the Corporate Secretary;
2. Prepare and control work program and budget according to Corporate Secretary main function to support Company Long-term Plan and WP&B;
3. Conduct risk analysis and manage risk mitigation for activities in the Corporate Secretariat;
4. Develop procurement proposal and planning for the Corporate Secretary;
5. Plan, execute, and control internal communication activities, design, and strategies, which include the management of the Company's social media, activities, and protocols;
6. Plan, execute, and control external communication activities, and manage website, media relations, and sponsorship, including communicate with State Agencies and electricity-related regulators;
7. Plan, execute, and control CSR activities;
8. Manage non-generation business activities in the Company;
9. Preparing and controlling corporate reports (Managerial Report, Performance Report, Annual Report), corporate meetings (GMS, BOD meetings, BOC-BOD joint meetings, performance meetings, coordination meetings), Company statistics report, KIP and Procedures, and Decree pertaining to corporate information;
10. Prepare and evaluate GCG policy;
11. Plan, monitor, and evaluate WP&B, corporate administration, and consolidated subsidiary administration;
12. Prepare reports and control outsourcing beyond the Company's organizational structure;
13. Prepare and evaluate policy on facility management in the Company and secretariat;
14. Plan, execute, and control the provision of facilities for the Company and secretariat;
15. Manage and control Company's assets and properties;
16. Perform and control general cleaning of work areas in facilities and buildings within the Company;
17. Prepare and evaluate regular and non-regular reports of the Corporate Secretary;
18. Manage area-specific activities in all Work Units of the Company.

Pelaksanaan Tugas Corporate Secretary Tahun 2021

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2021

Corporate Secretary telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengendalikan kebijakan, sasaran, desain dan strategi komunikasi internal termasuk pengelolaan media sosial, kegiatan Perusahaan dan protokoler.
2. Menyusun dan mengendalikan kebijakan, sasaran dan strategi komunikasi eksternal, pengelolaan *website*, *media relation* dan *sponsorship* termasuk komunikasi dengan lembaga negara dan lembaga pembuat kebijakan ketenagalistrikan.
3. Mengelola Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
   Selama tahun 2021, Indonesia Power telah melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali RUPS Tahunan dan telah mengeluarkan 7 (tujuh) keputusan RUPS secara sirkuler yang telah dijelaskan pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bagian Rapat Umum Pemegang Saham dalam Laporan tahunan ini.
4. Mengelola Rapat Internal Direksi dan Rapat Gabungan Direksi Bersama Dewan Komisaris.
   Selama tahun 2021, Direksi telah mengadakan rapat internal Direksi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali rapat dan rapat gabungan Bersama Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat yang telah dijelaskan pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bagian Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.
5. Mengelola Penyampaian laporan berkala.
   Sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugasnya, Corporate Secretary telah menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap tahunnya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dengan uraian sebagai berikut:

The Corporate Secretary has performed its duties for 2021 as follows:

1. Developing and controlling internal communication policy, target, design, and strategy, which include the management of the Company's social media, activities, and protocols.
2. Developing and controlling external communication policy, target, design, and strategy, and manage website, media relations, and sponsorship, including communicate with State Agencies and electricity-related regulators.
3. Managing the General Meeting of Shareholders (GMS).
   Throughout 2021, Indonesia Power had held two (2) Annual GMS and issued seven (7) circular GMS resolutions, as explained in the Chapter of Corporate Governance, Sub-chapter of General Meeting of Shareholders of this Annual Report.
4. Managing the Board of Directors' internal meetings and BOD-BOC joint meetings.
   Throughout 2021, the Board of Directors had held 47 (forty-seven) internal meetings and 13 (thirteen) BOC-BOD meetings, as explained in the Chapter of Corporate Governance, Sub-chapter of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings of this Annual Report.
5. Submitting periodical reports.
   To show accountability for the performance of its duty, the Corporate Secretary has prepared and submitted periodical reports to the Board of Commissioners and Shareholders with the following details:

Jenis Laporan Type of Report	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Pemegang Saham Shareholders
Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2021 Management Report Q1 2021	8 April 2021 April 8, 2021	12 April 2021 April 12, 2021
Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2021 Management Report Q2 2021	8 Juli 2021 July 8, 2021	12 Juli 2021 July 12, 2021
Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2021 Management Report Q3 2021	8 Oktober 2021 October 8, 2021	12 Oktober 2021 October 12, 2021
Laporan Manajemen Tahun 2021 (*unaudited*) Annual Management Report 2021 (Unaudited)	10 Januari 2022 January 10, 2022	12 Januari 2022 January 12, 2022
Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 Annual Report for FY 2020	30 Agustus 2021 August 30, 2021	30 Agustus 2021 August 30, 2021
Laporan Statistik Perusahaan 2020 Company Statistical Report 2020	30 Agustus 2021 August 30, 2021	30 Agustus 2021 August 30, 2021

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

6. Menyusun dan mengelola sasaran dan strategi serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan dan Pemberdayaan Masyarakat) guna mendukung pencapaian sasaran Kinerja Indonesia Power.
7. Penilaian Implementasi GCG.
   Corporate Secretary telah melaksanakan *Assessment* GCG di Kantor Pusat beserta Anak Perusahaan yang didampingi oleh Konsultan Independen dengan menggunakan Parameter SK-16/MBU/2012 dan ASEAN CG *Scorecard* yang telah dijelaskan pada Bab Tata Kelola Perusahaan Sub Bagian Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Lingkup Perusahaan.
8. *Monitoring* pencapaian tindak lanjut *Area of Improvement* (AOI) hasil *Assessment* GCG Tahun 2021 untuk periode selama tahun 2021 mencapai 100%.
9. Melaksanakan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal.
   - Optimalisasi hubungan dua arah dengan *stakeholder* internal dan eksternal melalui optimalisasi saluran komunikasi internal dan eksternal melalui media Indonesia Power Daily New Share (IDEA), InPower Weekly News (IPWN), Buku Pedoman *Strategic Awareness*, *Wallpaper Desktop*, TV *Wall*, *Videotron*, *Standing Banner*, *Sticker Lift*, Intranet dan Media sosial.
   - Kegiatan Pengelolaan Hubungan dengan *Stakeholders*:
     a. Hubungan dengan Pegawai dilaksanakan melalui kegiatan *Coffee Morning*, BOD/BOC Notes, Seminar Virtual dan BoD *Gathering Morning & Afternoon*.
     b. Hubungan dengan Pelanggan (P3B dan PLN Distribusi) dilakukan melalui Koordinasi rutin yang dilakukan oleh Divisi Niaga dan *Settlement* setiap bulannya.
     c. Hubungan dengan *stakeholder* lainnya dilakukan melalui kegiatan Malam 1001, RUPS, Forum *Generate Future Energy* dan Penandatanganan Kerjasama/MOU.
     d. Hubungan dengan Pemerintah melalui kegiatan sebagai berikut:

6. Preparing and managing Corporate Social Responsibility (Community Service, Relations Management, and Community Empowerment) goals, strategies, and activities to support the achievement of Indonesia Power's goals.
7. Assessing GCG implementation.
   The Corporate Secretary has performed GCG assessment at the Head Office and Subsidiaries with assistance from independent consultant, with reference to parameters set out in the Decree of the Minister of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 and the ASEAN CG Scorecard, as explained in the Chapter of Corporate Governance, Sub-chapter of Development of Good Corporate Governance Implementation in the Company.
8. Monitoring the follow-up on the GCG Assessment 2021 Area of Improvement (AOI), which has progressed to 100%.
9. Establishing communication with internal and external parties.
   - Optimizing two-way relations with internal and external stakeholders by enhancing internal and external communication channels such as Indonesia Power Daily News Share (IDEA), InPower Weekly News (IPWN), Strategic Awareness Guidebook, Desktop Wallpaper, TV Wall, Videotron, Standing Banner, Sticker Lift, Intranet, and Social Media.
   - Managing stakeholders relations:
     a. The employee relations were maintained through Morning Coffee, BOD/BOC Notes, Virtual Seminars, and Morning & Afternoon BOD Gathering.
     b. The customer relations (with P3B and PLN Distribusi) were maintained through regular coordination carried out by the Division of Commerce and Settlement on monthly basis.
     c. Other stakeholder relations were maintained through Malam 1001 ("1001 Nights"),GMS, Generate Future Energy Forum, and Agreement/MOU Signing.
     d. Government relations were maintained through the following activities:

Kegiatan Activity	Tanggal dan Unit Date and Unit	Keterangan Description
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Work Visit by Commission VII of the Indonesian House of Representatives (DPR RI)	28 Januari 2021, KAMOJANG POMU January 28, 2021, Kamojang POMU	Kunjungan Spesifik Special Visit
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Work Visit by Commission VII of the Indonesian House of Representatives (DPR RI)	11 Februari 2021, SURALAYA PGU February 11, 2021, Suralaya PGU	Kunjungan Spesifik dan Reses Special and Recess Visits
Kunjungan Kerja Direktur Pengawasan BPKP RI Work Visit by Supervisory Directors of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP RI)	26 Agustus 2021, SAGULING POMU August 26, 2021, Saguling POMU	Observasi *Review* BPJSDA Water Resources Management Service Fee Review Observation
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Work Visit by Commission VII of the Indonesian House of Representatives (DPR RI)	16 September 2021, SAGULING POMU September 16, 2021, Saguling POMU	Kunjungan Spesifik Special Visit

Kegiatan Activity	Tanggal dan Unit Date and Unit	Keterangan Description
Kunjungan Kerja Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Work Visit by the Directorate of Electricity, Ministry of Energy & Mineral Resources	20-22 September 2021, KAMOJANG POMU September 20-22, 2021, Kamojang POMU	Arahan terkait Mekanisme Subsidi Listrik Directives on Electricity Subsidy Mechanism
Kunjungan Kerja BNPT Work Visit by the National Counter Terrorism Agency (BNPT)	28-29 September 2021, Suralaya PGU September 28-29, 2021 Suralaya PGU	Kunjungan Observasi OBVITNAS National Vital Object Observation Visit
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Work Visit by Commission VII of the Indonesian House of Representatives (DPR RI)	8 Oktober 2021, BALI PGU dan KAMOJANG POMU October 08, 2021, Bali PGU and Kamojang POMU	Kunjungan Reses Recess Visit
Kunjungan Kerja Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Work Visit by the Director of Government Support and Infrastructure Financing Management, Ministry of Finance	22-24 November 2021, KAMOJANG POMU November 22-24, 2021, Kamojang POMU	*Site Visit Asset*
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Work Visit by Commission VII of the Indonesian House of Representatives (DPR RI)	3 Desember 2021, CILEGON OMU December 03, 2021, Cilegon OMU	Kunjungan Spesifik Special Visit
Kunjungan Kerja Menteri ESDM Work Visit by the Minister of Energy & Mineral Resources	24 Desember 2021, SAGULING POMU December 24, 2021, Saguling POMU	*Site Visit*

10. Menyelenggarakan berbagai pelatihan atau *workshop* sebagai berikut:

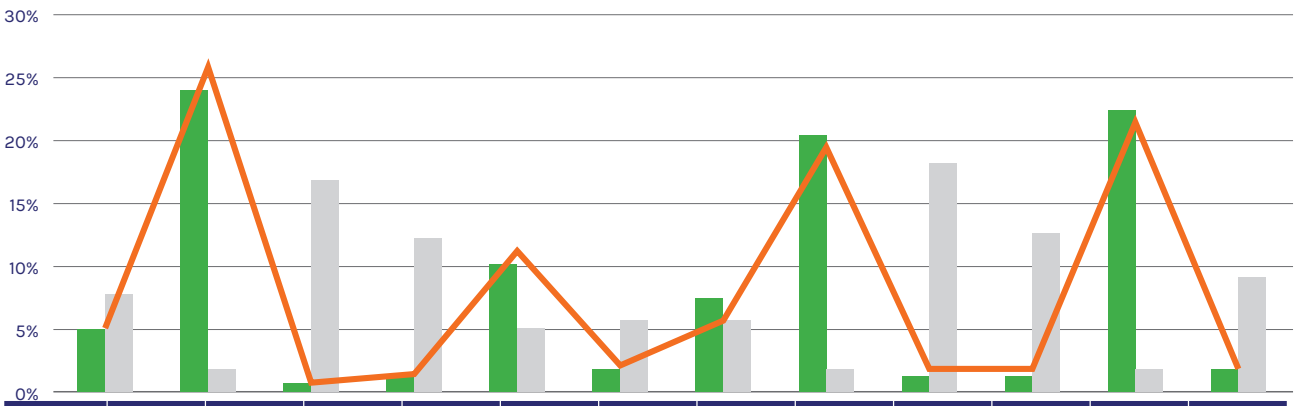
10. Organizing the following trainings and/or workshops:

No.	Tanggal dan Unit Name of Training	Penyedia Pelatihan dan Waktu Pelaksanaan Training Provider and Time of Implementation
1	*Workshop How Become A Professional*	Talkinc, Jakarta, Februari 2021 Talkinc, Jakarta, February 2021
2	*Workshop* Produksi dan Editing Video Workshop on Video Production and Editing	Indonesia Power, Jakarta Oktober 2021 Indonesia Power, Jakarta, October 2021
3	*Workshop Awareness* dan Internal *Audit Course* ISO 37001:2016 ABMS bagi pengelola GCG unit Awareness Workshop and ISO 37001:2016 ABMS Internal Audit Course for Unit GCG Managers	Sustain, Jakarta Februari 2021 Sustain, Jakarta, February 2021
4	*Workshop* Gratifikasi bagi GCG dan Manajer Administrasi Seluruh Unit dengan materi: - Webinar Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi KPK - Arahan Corporate Secretary Mengenai Pemberian Gratifikasi - *E-Learning* Bimtek Pengendalian Gratifikasi KPK Workshop on GCG Manager Gratification and Multi-Attribute Decision Making (MADM) with the following materials: - Webinar on Identifying Gratification Vulnerable Spots, by KPK - Corporate Secretary Directives on Gratuity Giving - E-learning on Technical Guidance for Gratification Control, by KPK	Indonesia Power bekerjasama dengan KPK RI, Jakarta, September 2021 Indonesia Power in collaboration with the Corruption Eradication Commission (KPK RI), Jakarta, September 2021

11. Melakukan Survei Efektivitas dan Preferensi Saluran Komunikasi yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 dengan hasil sebagai berikut:

11. Conducting the Communication Channel Effectiveness and Preference Survey in October 2021, with the following outcome:

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY



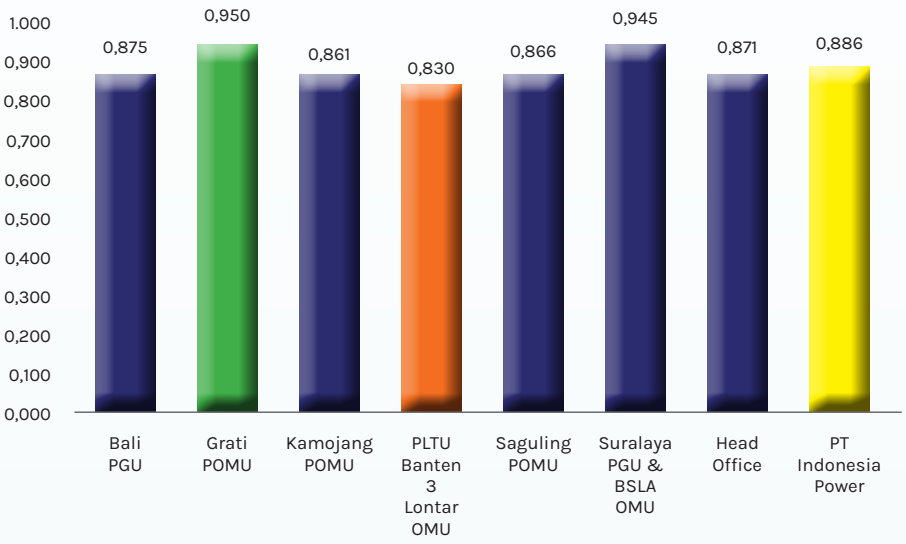
	Desktop PC/Laptop	*Email*	Facebook	Inpower Weekly	Instagram	Internet	IPNEWS pada IPKU IPNEWS at IPKU	Pertemuan Tatap Muka (*Coffee Morning*, COC,Rapat) Face-to-face Meetings (Morning Coffee, COC, Meetings)	TV *Wall*/ Visual Manajemen TV Wall/ Visual Management	*Website* Perusahaan Company Website	*What's App Group* (WAG)	Youtube
Efektif Effective	5%	24%	1%	2%	10%	2%	7%	20%	2%	2%	23%	2%
Tidak Efektif Not Effective	85%	2%	17%	12%	5%	6%	6%	2%	8%	18%	2%	9%
Preferensi Preferences	5%	26%	1%	2%	2%	2%	7%	20%	2%	2%	21%	2%

Efektif Effective | Tidak Efektif Not Effective | Preferensi Preferences

12. Melakukan Pengukuran *Stakeholder Perception Index* (SPI) tahun 2020 guna mengukur persepsi *stakeholder* kunci terhadap kinerja dan proses bisnis Indonesia Power. Hasil Pengukuran Tersebut adalah sebagai berikut:

12. Measuring the Stakeholder Perception Index (SPI) in 2020 to analyze the perception of key stakeholders of Indonesia Power's business process and performance. The outcome was as follows:

Indeks Persepsi Agregat Berdasarkan Unit dan Kantor Pusat
Aggregate Perception Indexes by Units and Head Office



13. Melakukan Pemetaan *Stakeholders* (*Stakeholders Mapping*) pada tanggal 17 November 2021 s.d 24 Desember 2021
14. *Monitoring* Media Sosial dan *Website*
15. Melakukan 39 (tiga puluh Sembilan) kegiatan *sponsorship* untuk partisipasi kegiatan seminar pameran energi keolahragaan dan penerbitan buku
16. Melaksanakan beberapa program untuk menguatkan *Engagement* Media Eksternal melalui kegiatan sebagai berikut:

13. Conducting Stakeholder Mapping from November 17, 2021 to December 24, 2021.
14. Monitoring social media and website.
15. Giving out 39 (thirty-nine) sponsorships for energy-related exhibitions and seminars, sports events, and book launching events.
16. Carrying out external media engagement strengthening programs through the following events:

2 Februari 2021

- Media *Gathering* di Priok POMU
- Dengan mengajak beberapa wartawan foto dan tv untuk ekspose PLTGU Priok
- Diikuti 8 media nasional yang terdiri dari media elektronik, media *online* dan media cetak

February 2, 2021

- Media gathering at Priok POMU
- Inviting some photo & TV journalists to expose CCPP Priok
- Attended by 8 national media from electronic, online, and printed media

17 Juni 2021

- Liputan *Launching* Faba Centre
- Diikuti 6 Media

June 17, 2021

- Faba Center Launching coverage
- Attended by 6 media

22 Juli 2021

- Liputan Vaksinasi Keluarga Pegawai Suralaya PGU
- Misi liputan adalah komitmen Perusahaan untuk mengamankan aset penting perusahaan yaitu SDM beserta lingkungan terdekatnya
- Dihadiri oleh beberapa media kontributor nasional dan media lokal Banten

July 22, 2021

- Coverage on vaccination for Suralaya PGU employees and their families
- The coverage's mission embodied the Company's commitment to securing vital assets, i.e. Human Capitals and their closest environment
- Attended by several national contributor media and Banten local media

28 Juli 2021

- Liputan Vaksin Massal di Suralaya PGU
- Misi untuk mempublikasikan dukungan Indonesia Power terhadap Pemerintah untuk dorong *target Herd Immunity*
- Dihadiri oleh beberapa media kontributor nasional dan media lokal Banten

July 28, 2021

- Coverage on mass vaccination in Suralaya PGU
- The coverage's mission was to publish Indonesia Power's support to the Government's herd immunity target
- Attended by several national contributor media and Banten local media

13 Agustus 2021

- Liputan Vaksinasi keluarga pegawai priok POMU
- Diikuti 8 media nasional dan beberapa media lokal Banten

August 13, 2021

- Coverage on vaccination for Priok PGU employees and their families
- Attended by 8 national media and several local media under Priok POMU's assistance

11 November 2021

- *Media Gathering* di Saguling POMU
- Dihadiri 21 awak media nasional, 4 media TV dan 19 media *online*/cetak

November 11, 2021

- Media gathering at Saguling POMU
- Attended by 21 national media, 4 TV media, and 18 online/printed media

18 November 2021

- Liputan penyerahan bantuan oksigen Priok POMU kepada RS dan Puskesmas Jakarta Utara
- Dihadiri oleh 9 media nasional dan dipublikasikan ke media nasional lain yang tidak hadir melalui *press release*

November 18, 2021

- Coverage on the handover of oxygen donation from Priok POMU to hospitals and community health centers in North Jakarta
- Attended by 9 national media and published to other absent national media via press release

1 Desember 2021

- Liputan Penuangan BBJP TPSA Bagendung ke PLTU Suralaya
- Dihadiri 15 awak media, 3 media kontributor nasional, 12 media lokal dan dipublikasikan ke media nasional lain yang tidak hadir melalui *press release*

December 1, 2021

- Coverage on Solid Recovered Fuel (SRF) pouring at Final Disposal Site (TPSA) Bagendung to SPP Suralaya
- Attended by 15 national media, 3 national contributor media, 12 local media, and published to other absent national media via press release

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

Evaluasi Pelaksanaan Tugas Corporate Secretary

Evaluation of Corporate Secretary Duty Performance

Penilaian kinerja Corporate Secretary dilakukan oleh Direksi berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Corporate Secretary yang dituangkan dalam indikator penilaian kinerja Corporate Secretary (*Key Performance Indicators*/ KPI). Realisasi pencapaian kinerja Corporate Secretary tahun 2021 sebagai berikut:

The Corporate Secretary's performance is assessed by the Board of Directors by observing the implementation of its duties and responsibilities as set out in the Key Performance Indicators (KPIs) of the Corporate Secretary. The Corporate Secretary's performance throughout 2021 was realized as follows:

Realisasi KPI Corporate Secretary tahun 2021

KPI Target Realization for the Corporate Secretary in 2021

No.	Deskripsi Description	Prosentase Pencapaian Achievement Percentage
Semester I		
1	Penyelesaian masalah tanah Saguling (Plengan) dan Mrica Settlement of Saguling (Plengan) and Mrica land disputes	100%
2	*Surveillance* ISO 37001:2016	100%
3	Tindak Lanjut OFI KPKU 2020 Follow-up on Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) OFI 2021	100%
4	Penguatan & Pemberdayaan Komunitas Proyek Pembangkitan & Unit Pembangkitan (*Strengthening & Empowerment Community*) Power Generation Project and Power Generation Unit Community Strengthening and Empowerment	100%
5	Efisiensi biaya Administrasi Administration Cost Efficiency	100%
6	Pencapaian Investasi Achievement of Investment	105%
7	Tindak Lanjut Temuan Auditor Follow-up on Auditor's Findings	100%
8	Membuat / Mengupdate Kebijakan / Strategi terkait Divisi Preparation/Update of Division-level Policy/Strategies	100%
9	Penyelesaian *Enterprise Architecture* dan *Update* IPM Enterprise Architecture Finalization and IPM Update	100%
10	Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup). Compliance with Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE)	100%
11	Pengelolaan Arahan RUPS, Keputusan Rapat Direksi, Program Utama dan Arahan Dewan Komisaris Management of GMS Directives, BOD Meeting Resolutions, Main Programs, and BOC Directives	103%
Semester II		
1	Penyelesaian masalah tanah Saguling (Plengan) dan Mrica Settlement of Saguling (Plengan) and Mrica land disputes	100%
2	Efektifitas Penerapan GCG (Skor) GCG Implementation Effectiveness (Score)	100%
3	*Surveillance* ISO 37001:2016	100%
4	Tingkat Proper Emas unit (Jumlah Unit) Unit PROPER Gold (Number of Units)	600%
5	Tindak Lanjut OFI KPKU 2020 Follow-up on Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) OFI 2021	100%
6	KPKU / *Malcolm Baldrige* 2021 (Skor) KPKU/Malcolm Baldrige 2021 (Score)	103%

No.	Deskripsi Description	Prosentase Pencapaian Achievement Percentage
7	Penguatan & Pemberdayaan Komunitas Proyek Pembangkitan & Unit Pembangkitan (*Strengthening & Empowerment Community*) Power Generation Project and Power Generation Unit Community Strengthening and Empowerment	100%
8	Efisiensi biaya Administrasi Administration Cost Efficiency	113%
9	Pencapaian Investasi Achievement of Investment	105%
10	Tindak Lanjut Temuan Auditor Follow-up on Auditor's Findings	100%
11	Membuat / Mengupdate Kebijakan / Strategi terkait Divisi Preparation/Update of Division-level Policy/Strategies	100%
12	Penyelesaian *Enterprise Architecture* dan *Update* IPM Enterprise Architecture Finalization and IPM Update	100%
13	Kepatuhan pada K3LH (Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup). Compliance with Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE)	100%
14	Pengelolaan Arahan RUPS, Keputusan Rapat Direksi, Program Utama dan Arahan Dewan Komisaris Management of GMS Directives, BOD Meeting Resolutions, Main Programs, and BOC Directives	100%
15	*Stakeholder Perception index*	102%



AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Fungsi unit Audit Internal adalah untuk melaksanakan kegiatan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) dengan independen dan objektif, guna meningkatkan nilai Perusahaan dan mengoptimalkan kegiatan operasional usaha. Fungsi Audit Internal Indonesia Power dilaksanakan oleh Department of Internal Audit sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor 065.K/010/IP/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Bagan Susunan Jabatan, Tingkat Jabatan dan Formasi Jabatan pada Department of Internal Audit.

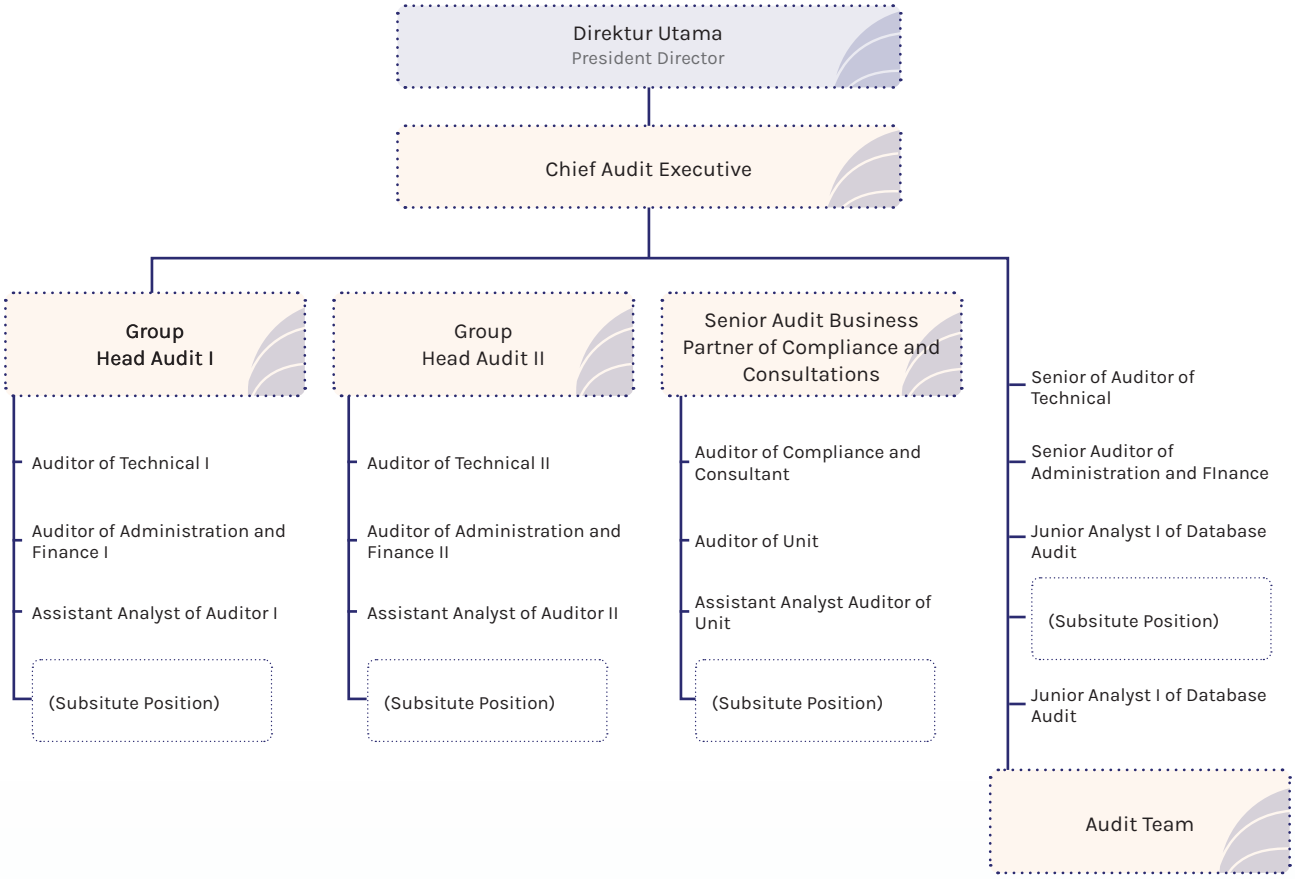
Berikut adalah struktur organisasi Department of Internal Audit Indonesia Power:

The Internal Audit Unit functions to perform assurance and consulting duties independently and objectively, in order to enhance Company values and optimize business operations. The Internal Audit Function at Indonesia Power is run by the Department of Internal Audit as specified in the Decree of the Board of Directors No. 065.K/010/IP/2021 dated July 02, 2021 on Structural Chart of Position, Position Level, and Position Formation of the Department of Internal Audit.

The following is the Department of Department of Internal Audit's organizational structure:

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Struktur organisasi Department of Internal Audit Indonesia Power
Organizational Structure of Department of Internal Audit



Kedudukan Department of Internal Audit dalam Struktur Organisasi
Position of Department of Internal Audit in the Organizational Structure

Sejalan dengan struktur organisasi Indonesia Power, Department of Internal Audit Indonesia Power dipimpin oleh seorang Chief Audit Executive yang kedudukannya berada langsung di bawah supervisi Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi langsung ke Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

In line with the Company's organizational structure, the Department of Internal Audit is led by a Chief Audit Executive, under direct supervision from the President Director and with direct communication line to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Chief Audit Executive
Workflow of Appointment and Dismissal of Chief Audit Executive



Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan.

Saat ini, Chief Audit Executive Indonesia Power dijabat oleh Sdr. Krishna Mulawarman sebagai Chief Audit Executive menggantikan Sdr. Rachmanto Kusumonegoro berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 606.K/020/IP/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Chief Audit Executive is appointed and dismissed by the President Director in accordance with the Company's internal mechanism and with approval from the Board of Commissioners, in consideration of educational qualification, work experience, and other qualifications as per Company's business needs.

The current Chief Audit Executive is Mr. Krishna Mulawarman who replaced Mr. Rachmanto Kusumonegoro as stipulated by the Decree of PT Indonesia Power Board of Directors No. 606.K/020/IP/2021 dated February 16, 2021.

Profil Chief Audit Executive
Chief Audit Executive Profile



Krishna Mulawarman
Chief Audit Executive

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta tanggal 7 Februari 1967, Berdomisili di Jakarta Indonesia, Lulusan Sarjana Jurusan Teknik Mesin Universitas Brawijaya Tahun 1991.

Riwayat Pekerjaan:
Sebelum menjabat sebagai Chief Audit Executive, beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah Senior Audit Executive Maluku dan Papua pada Satuan Pengawasan Intern PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2019 - 2021); dan Vice President Pelaksanaan Pengadaan Supply Chain Management pada Divisi Supply Chain Management Direktorat Pengadaan Strategis 1 PT PLN (Persero) Kantor Pusat (2018 - 2019).

Pelatihan:
Qualified Internal Auditor (QIA), *Qualified Risk Management Professional* (QRMP).

Sertifikat:
Sertifikat Kompetensi dari University of Missouri/ST.Louis

Masa Jabatan
Efektif sejak 16 Februari 2021 sampai dengan Sekarang

An Indonesian Citizen Born in Jakarta on February 07, 1967; Domiciled in Jakarta, Indonesia; The holder of Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Brawijaya University (1991)

Professional Background:
Prior to serving as the Chief Audit Executive, he held several other positions, including Senior Audit Executive of Maluku and Papua at the Internal Control Unit PT PLN (Persero) Head Office (2019-2021) and Vice President of Supply Chain Management Procurement Implementation at the Division of Supply Chain Management, Directorate of Strategic Procurement 1 of PT PLN (Persero) Head Office (2018-2019).

Trainings:
Qualified Internal Auditor (QIA), Qualified Risk Management Professional (QRMP)

Certificates:
Certificate of Competence from the University of Missouri/St. Louis

Term of Office
Effective since February 16, 2021 until currently

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Pedoman Kerja Department of Internal Audit

Work Guidelines for the Department of Internal Audit

Pedoman Kerja Department of Internal Audit mengacu pada Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 008.K/010/IP/2021 dan Nomor 001.SK/DEKOM-IP/2021 tentang Piagam Audit Internal Terintegrasi (*Integrated Internal Audit Charter*) PT Indonesia Power tanggal 20 Januari 2021 sebagai pembaharuan dari Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 114.K/010/IP/2020 dan Nomor 015.SK/DEKOM-IP/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Indonesia Power mengatur antara lain tentang:

1. Pendahuluan meliputi latar belakang, sifat piagam audit internal terintegrasi, tujuan piagam audit internal terintegrasi, pengertian dan tujuan audit internal, prinsip-prinsip pokok audit internal, visi, misi dan tujuan, dasar hukum dan referensi, sifat jasa *assurance* yang diberikan audit internal kepada Perusahaan, sifat jasa konsultasi yang diberikan audit internal kepada Perusahaan
2. Struktur meliputi struktur organisasi, persyaratan auditor, larangan perangkapan tugas
3. Tugas dan tanggung jawab serta lingkup pekerjaan
4. Wewenang
5. Pelaporan
6. Audit internal terintegrasi
7. Penggunaan jasa eksternal untuk mendukung tugas audit internal
8. Komunikasi audit
9. Standar pelaksanaan tugas audit internal, kode etik dan program *Quality Assurance*
10. Pertanggungjawaban Department of Internal Audit

Di samping mengacu pada Piagam Audit Internal, Department of Internal Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya juga berpedoman pada Pedoman Audit Internal Perusahaan Nomor 116.K/010/IP/2020 tanggal 20 Agustus 2020, Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan penyempurnaan perangkat operasional melalui aplikasi *Risk Based Audit* (ProRBA) yang akan diintegrasikan dengan penerapan manajemen risiko.

Internal Audit Unit Work Guidelines were developed with reference to Internal Audit Charter, as stipulated in accordance with the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Numbers 008.K/010/IP/2021 and 001.SK/DEKOM-IP/2021 dated January 20, 2021 on Integrated PT Indonesia Power Internal Audit Charter as an update to the Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners Numbers 114.K/010/IP/2020 dan 015.SK/DEKOM-IP/2020 dated August 18, 2020.

Indonesia Power Internal Audit Charter accommodates, among others:

1. Foreword, covering background; nature of integrated internal audit charter; objectives of integrated internal audit charter; definition and objectives of internal audit; internal audit core principles; vision, mission, and objectives; legal basis and references; nature of assurance service provided by internal audit to the Company, nature of consulting service provided by internal audit to the Company
2. Structure, covering organizational structure; requirements for auditors; prohibition of concurrent positions
3. Duties and responsibilities and scope of work
4. Authorities
5. Reporting
6. Integrated internal audit
7. Utilization of external services to support internal audit's duties
8. Audit communication
9. Internal audit duty implementation standard, code of conduct, and quality assurance program
10. Department of Internal Audit's accountability

In addition to the Internal Audit Charter, in assuming its duties and responsibilities, the Department of Internal Audit is also guided by the Company's Internal Audit Guidelines according to the Decree of the Board of Directors Number 116.K/010/IP/2020 dated August 20, 2020, Annual Audit Work Plan (AAWP), and improvement of operational instruments through Risk-Based Audit (ProRBA) that will be integrated into risk management implementation.

Tugas dan Tanggung Jawab Department of Internal Audit

Duties and Responsibilities of the Department of Internal Audit

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab Department of Internal Audit (DEP IAD) adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan mengkaji strategi jangka panjang, kebijakan, proses bisnis dan prosedur DEP IAD;
b. Menyusun dan mengendalikan program kerja dan anggaran sesuai fungsi utama DEP IAD untuk mendukung RJPP dan RKAP;
c. Menyusun kajian risiko dan mengelola mitigasinya atas kegiatan DEP IAD;
d. Menyusun usulan dan perencanaan pengadaan DEP IAD;
e. Melaksanakan pengujian dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal di Perusahaan dan Anak Perusahaan sesuai kebijakan Perusahaan;
f. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Audit Internal yang meliputi pengujian, penilaian, pelaporan, dan pemberian saran atau rekomendasi untuk memastikan tata kelola Perusahaan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pengendalian risiko secara optimal, serta telah mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG;
g. Melaksanakan kegiatan konsultasi dan saran secara independen dan objektif atas proses bisnis yang sedang dijalankan manajemen;
h. Mengendalikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan terutama pada kegiatan Pengadaan, Energi Primer dan Investasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit Perusahaan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal serta secara proaktif membina hubungan baik dengan auditor eksternal;
j. Mengelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan Perusahaan sebagai berikut:
    1) Menyusun sistem serta petunjuk pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perusahaan dan isu terkait penyuapan;
    2) Mengawasi dan memastikan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku;
    3) Melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan maupun penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam mengelola risiko penyuapan yang dihadapi Perusahaan;
    4) Melaporkan pada rentang waktu terencana dan secara *ad-hoc*, jika diperlukan, kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terkait kecukupan perangkat, penerapan dan kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan, termasuk hasil investigasi dan hasil audit.

In accordance with the Internal Audit Charter, below are the duties and responsibilities of the Department of Internal Audit:

a. Prepare and analyze long-term strategies, policies, business processes, and procedures at the Department of Internal Audit;
b. Prepare and control work program and budget according to the Department's main function to support Company Long-term Plan and WP&B;
c. Prepare risk analysis and manage risk mitigation for the Department of Internal Audit's activities;
d. Develop procurement proposal and planning for the Department of Internal Audit;
e. Test and evaluate the implementation of internal controls at the Company and its Subsidiaries in accordance with the Company's policies;
f. Plan, implement, and control internal audit activities, including testing, assessment, reporting, and provision of recommendations to ensure that Corporate Governance has been implemented effectively and efficiently by optimal risk controls and has complied with the applicable laws and regulations and GCG principles;
g. Provide independent, objective consultancy and recommendations for business processes implemented by the Management;
h. Control the policies, terms, systems, procedures, and business activities conducted in Procurement, Primary Energy, and Investment areas to assure their compliance with the applicable laws and regulations;
i. Coordinating the Company's audit activities implemented by external parties and proactively develop good relationship with external auditors;
j. Manage Anti-Bribery Management System in the Company as follows:
    1) Develop system and technical instructions of the Anti-Bribery Management System and bribery-related issues;
    2) Supervise and ensure that the implementation of Anti-Bribery Management System is in accordance with the applicable standards;
    3) Conduct ongoing evaluation to assess the effectiveness of policies and implementation of Anti-Bribery Management System in managing bribery-related risks that the Company is exposed to;
    4) Provide scheduled reporting and in ad-hoc manner, where required, to the Board of Commissioners and Board of Directors on the sufficiency of devices, implementation and performance of Anti-Bribery Management System, including results of investigation and audit.

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

k. Membuat dan mengevaluasi laporan rutin dan non rutin DEP IAD;
l. Melakukan pembinaan kegiatan terkait bidang kerja kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Perusahaan.
m. Melaporkan isu-isu penting yang berhubungan dengan proses pengendalian kegiatan Perusahaan, unit usaha dan afiliasinya.
n. Mengembangkan rencana audit tahunan yang dituangkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) yang fleksibel dengan menggunakan metodologi pendekatan risiko.
o. Melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT), termasuk segala tugas-tugas lain yang diminta oleh Direktur Utama dan Komite Audit Dewan Komisaris melalui Direktur Utama.
p. Secara berkesinambungan mengembangkan kompetensi auditor dengan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi professional.
q. Berperan aktif dalam pengawasan mekanisme pelaksanaan *Code of Conduct* serta pencegahan tindakan kecurangan (*fraud*).
r. Mengelola kegiatan yang berkaitan dengan audit dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan *monitoring* tindak lanjut menggunakan aplikasi manajemen *audit web based* berbasis risiko (ProRBA).

k. Prepare and evaluate regular and non-regular reports of the Department of Internal Audit;
l. Manage area-specific activities in all Work Units of the Company;
m. Report important issues related to activity control process in the Company, business units, and its affiliates;
n. Develop annual audit plan as presented in a flexible Annual Audit Work Plan (AAWP) using risk approach methodology;
o. Implement Annual Audit Work Plan (AAWP), including all other tasks as requested by the President Director and Audit Committee via President Director;
p. Continuously improve auditors' competence with sufficient knowledge, expertise, and experience, in addition to professional certifications;
q. Actively take part in monitoring the Code of Conduct implementation mechanism and prevention of fraud;
r. Manage activities associated with audit, from planning, implementation, reporting, to monitoring of follow up using risk-based web-based audit management application (ProRBA).

Kode Etik Auditor Internal
Code of Conduct for Internal Auditors

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Internal senantiasa mengacu pada Standar dan kode etik audit internal dari The Institute Internal Auditors (IIA) yang mencakup 4 (empat) prinsip (integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi) yang relevan dengan profesi dan suasana praktik *internal auditing*, dan dijabarkan dalam 12 (dua belas) aturan perilaku sebagai berikut:

Aturan Perilaku Auditor Internal

1. Integritas
   a. Melakukan pekerjaan audit internal dengan jujur, produktif, professional dan tanggung jawab;
   b. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal PT Indonesia Power yang berlaku;
   c. Tidak ikut serta dalam kegiatan yang tidak legal atau melakukan kegiatan yang dilarang oleh profesi Auditor; dan
   d. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan hukum dan etika yang ditetapkan PT Indonesia Power.

When performing their duties, Internal Auditors must at all time refer to the audit internal standards and code of conduct as specified by the Institute of Internal Auditors (IIA) which comprises four (4) principles, i.e. integrity, objectivity, confidentiality, and competence, as relevant to the profession and practices of internal auditing and set forth in 12 (twelve) code of conduct rules, as follows:

Code of Conduct for Internal Auditors

1. Integrity
   a. Performing internal audit tasks in honest, productive, professional, and responsible manners;
   b. Complying with the laws and regulations and applicable internal regulations;
   c Refraining from participating in illegal conducts or activities prohibited for an auditor; and
   d. Respecting and contributing to the legal objectives and ethics stipulated by PT Indonesia Power.

2. Objektivitas
   a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi penilaian Auditor
   b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya; dan
   c. Mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaksanakan tugasnya dan jika tidak dilaporkan dapat merugikan PT Indonesia Power.
3. Kerahasiaan
   a. Bijaksana dalam menggunakan dan melindungi informasi yang didapat dalam melakukan pekerjaan; dan
   b. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan diri sendiri dengan cara yang tidak legal atau tidak berjalan dengan tujuan hukum dan etika di PT Indonesia Power.
4. Kompetensi
   a. Melakukan audit pada objek yang sesuai keterampilan, pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam melaksanakan audit;
   b. Melaksanakan audit sesuai dengan Piagam dan Pedoman Audit Internal PT Indonesia Power yang sejalan dengan Standar Profesi Auditor Internal; dan
   c. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan profesional berkelanjutan untuk tujuan peningkatan kualitas dan efisiensi kerja.

2. Objectivity
   a. Refraining from participating in activities that may affect an auditor's assessment;
   b. Refraining from receiving anything in any form that may compromise their professional judgment; and
   c. Disclosing all important facts in their possessions for the implementation of their duties and for avoiding any loss to PT Indonesia Power.
3. Confidentiality
   a. Acting wisely in utilizing and protecting information obtained in their tasks; and
   b. Refraining from using the information obtained in their tasks for personal interest through illegal means or non-compliance with the objectives of the law and PT Indonesia Power's ethics.
4. Competency
   a. Conducting audits according to their skills, knowledge, expertise, and experience;
   b. Conducting audits according to PT Indonesia Power's Internal Audit Charter and Guidelines that are in accordance with the Internal Auditor Professional Standard; and
   c. Enhancing competency through continuous professional education that improves work quality and efficiency.

Jumlah Personil dan Kualifikasi Department of Internal Audit

Number of Personnel and Qualification of Department of Internal Audit

Secara umum tingkat pendidikan untuk auditor Department of Internal Audit telah sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan Perusahaan. Hingga dengan 31 Desember 2021, jumlah tenaga Auditor Internal Indonesia Power adalah sebanyak 50 orang. Jumlah tersebut dipandang telah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas audit internal dibandingkan dengan objek audit yang direncanakan.

In general, the educational qualification for auditors at the Department of Internal Audit have complied with the qualifications set by the Company. Up to December 31, 2021, Indonesia Power has had 50 internal auditors. The number is considered sufficient to support the performance of internal audit duties against the planned audit objects.

Jabatan Position	Jumlah Auditor Number of Auditor	Informasi Riwayat Pendidikan Auditor Auditor's Educational Background				
		Nama Name	Tingkat Degree	Bidang Studi Subject	Lembaga Institution	Tahun Year
Chief Audit Executive	1	Krishna Mulawarman	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Brawijaya Brawijaya University	1991
Group Head Audit	2	Mangihut T.Samosir	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	1991
		Mangihut T.Samosir	Magister Master	Mesin Mechanical Engineering	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	2012
		Windi Winarso	Sarjana Bachelor	Akuntansi Accounting	Universitas Brawijaya Brawijaya University	2001
		Windi Winarso	Magister Master	Bidang Ekonomi Economics	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	2005

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Jabatan Position	Jumlah Auditor Number of Auditor	Informasi Riwayat Pendidikan Auditor Auditor's Educational Background				
		Nama Name	Tingkat Degree	Bidang Studi Subject	Lembaga Institution	Tahun Year
Senior Audit Business Partner Of Compliance And Consultation	1	Roedi Rachmanto	Sarjana Bachelor	Fisika Physics	Institut Teknologi 10 Nopember November 10th Institute of Technology	1991
Senior Auditor Of Technical	2	Agoes Danarto	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Brawijaya Brawijaya University	1992
Auditor Of Technical		Amlan	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Andalas Andalas University	1992
Auditor of Administration And Finance	4	Asep Maman Sukirman	STM Technical Vocational High School	Elektro Electrical Engineering	STM Negeri Public Technical Vocational High School	1984
		Setyo Harsono	Sarjana Bachelor	Elektronika Electrical Engineering	Universitas Fatahillah Cilegon University	2007
		Setyo Harsono	Magister Master	Teknik Mesin Mechanical Engineering	IMNI	2010
		Suwarna	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	ISTN	2001
		R. Chairudin	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Krisnadwipayana Krisnadwipayana University	1997
Auditor of Administration And Finance	5	Pangastuti Sri W.	Sarjana Bachelor	Akuntansi Accounting	STIE	1997
		Pangastuti Sri W.	Magister Master	Magister Manajemen Master in Management	Universitas Pancasila Pancasila University	2006
		Hery Suryansyah	Sarjana Bachelor	Ilmu Ekonomi Economics	STIE Indonesia	2007
		Ika Ramalia Sukhairani	Sarjana Bachelor	Akuntansi Accounting	Universitas Mercu Buana Mercu Buana University	1997
		Adek Hendriana	Sarjana Bachelor	Ilmu Ekonomi Economics	Universitas Borobudur Borobudur University	1998
		Adek Hendriana	Magister Master	Bidang Manajemen Management Field	Universitas Trisakti Trisakti University	2002
		Arief Hidayat	Sarjana Bachelor	Psikologi Psychology	Universitas Airlangga Airlangga University	1999
		Arief Hidayat	Magister Master	HR & Organizational Studies	The University of New South Wales (UNSW)	2010
Auditor of Compliance And Consultation	3	Yakobus Krisnu Brayanto	Sarjana Bachelor	Ilmu Ekonomi Economics	UNTAG	1998
		Agnes Isti Widyawati	Sarjana Bachelor	Akuntansi Accounting	Universitas Sebelas Maret Sebelas Maret University	2001
		Agnes Isti Widyawati	Magister Master	Bidang Manajemen Management Field	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	2014
		Purwo Adiwiyanto	Sarjana Bachelor	Akuntansi Accounting	Universitas Islam Indonesia Indonesian Islamic University	2001

Jabatan Position	Jumlah Auditor Number of Auditor	Informasi Riwayat Pendidikan Auditor Auditor's Educational Background				
		Nama Name	Tingkat Degree	Bidang Studi Subject	Lembaga Institution	Tahun Year
Auditor of Unit	7	Robert Sunarijanto	STM Technical Vocational High School	Elektro Electrical Engineering	STM Negeri, Kediri Public Technical Vocational High School, Kediri	2000
		Hasan Basori	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Ageng Tirtayasa University	2007
		Mukhlis	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Syiah Kuala-Banda Aceh Syiah Kuala University, Banda Aceh	2002
		Choirul Anam	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Institut Teknologi Bandung Bandung Institute of Technology	1998
		Marpodho	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	1999
		Sentot Kristanto	Magister Master	Manajemen Management	Universitas Udayana Udayana University	2013
		Musyawir	Sarjana Bachelor	Elektro/Listrik Electrical Engineering	Universitas Hasanuddin Hasanuddin University	1997
Assistant Analyst of Auditor	4	Irsya Bakhtiar	Sarjana Bachelor	Ilmu Hukum Legal Studies	Universitas Islam Indonesia Indonesian Islamic University	2015
		Betrecia Nurhelana Triaryani	Sarjana Bachelor	Psikologi Psychology	Universitas Islam Indonesia Indonesian Islamic University	2009
		M. Hisyam Lanang	Sarjana Bachelor	Teknik Fisika Physics Technic	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	2016
		Sopian Al Rasyid	Sarjana Bachelor	Teknik Elektro Electrical Engineering	Universitas Pendidikan Indonesia Indonesian education university	2011
Asistant Analyst Auditor of Unit	18	Mas'ud	Sarjana Bachelor	Teknik Industri Industrial Engineering	Universitas Al Azhar Indonesia Al Azhar University	2012
		Teuku Sadri Ramadhan	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	2014
		Tomy Afrilianto	Sarjana Bachelor	Teknik Industri Industrial Engineering	Universitas Atma Jaya Atma Jaya University	2013
		Irfan Efrizal Rahman	Sarjana Bachelor	Elektro/Listrik Electrical Engineering	Institut Teknologi 10 Nopember November 10th Institute of Technology	2015
		Iqbal	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Jenderal Achmad Yani Jenderal Achmad Yani University	2016
		Bastian Edward Trijayanto	Sarjana Bachelor	Teknik Industri Industrial Engineering	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sultan Ageng Tirtayasa University	2012

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Jabatan Position	Jumlah Auditor Number of Auditor	Informasi Riwayat Pendidikan Auditor Auditor's Educational Background				
		Nama Name	Tingkat Degree	Bidang Studi Subject	Lembaga Institution	Tahun Year
		Angga Hertoh Hendra	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Andalas Andalas University	2016
		Yuda Lestari	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Muhammadiyah Malang Muhammadiyah University, Malang	2015
		Herdian Raditya	Sarjana Bachelor	Teknik Fisika Physics Technic	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	2016
		Samgar Siahaan	Sarjana Bachelor	Teknik Elektro/Listrik Electrical Engineering	Universitas Sumatera Utara Sumatera Utara University	2016
		Akbar Russavel Navis	Sarjana Bachelor	Teknik Industri Industrial Engineering	Universitas Andalas Andalas University	2016
		Yosua Tetra Priyatno	D4 Associate Degree	Elektronika Electrical Engineering	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Surabaya State Electronics Polytechnic	2014
		Rizqa Ulfa	Sarjana Bachelor	Manajemen Bisnis Business Management	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	2016
		Reza Bagus Hermawan	Sarjana Bachelor	Teknik Sipil Civil Engineering	Universitas Sebelas Maret Sebelas Maret University	2016
		Kurnia Aryansyah	Sarjana Bachelor	Teknik Elektro Electrical Engineering	Universitas Haluoleo Haluoleo University	2015
		Putri Muqodimatul Wahyu Inayah	Sarjana Bachelor	Teknik Industri Industrial Engineering	Universitas Brawijaya Brawijaya University	2015
		Bayu Satrio Nugroho	SM/D3 Associate Degree	Teknik Listrik Electrical Engineering	Politeknik Negeri Malang Malang State Polytechnic	2006
		Andreas Novier	Sarjana Bachelor	Teknik Sipil Civil Engineering	Universitas Diponegoro Diponegoro University	2015
Junior Analyst I of Auditor Unit	1	Cristian Alboin Rovandy Sipahutar	Sarjana Bachelor	Mesin Mechanical Engineering	Universitas Padjadjaran Padjadjaran University	2013
Junior Analyst I of Database Audit	1	Resta Purnita	SM/D3 Associate Degree	Administrasi Bisnis Business Administration	Politeknik Negeri Malang Malang State Polytechnic	2015
Junior Analyst I of Auditor II	1	Nurma Amalia	SM/D3 Associate Degree	Akuntansi Accounting	Universitas Diponegoro Diponegoro University	2018
TOTAL	50 Orang Personnel					

Jumlah auditor Indonesia Power Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 42 auditor menjadi 50 auditor.
The number of auditors at Indonesia Power has increased compared to 2020, i.e. from 42 auditors to 50 auditors.

Sertifikasi Profesi Auditor Department of Internal Audit

Internal Auditor Professional Certification at Department of Internal Audit

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dengan optimal dan menghasilkan kinerja audit yang handal, Auditor Department of Internal Audit telah mempunyai sertifikasi sebagai berikut:

To optimally support the implementation of duties and deliver excellent audit performance, auditors at the Department of Internal Audit have been equipped with the following certifications:

Sertifikasi Profesi Department of Internal Audit Tahun 2021
Internal Audit Professional Certification in 2021

No.	Nama Sertifikasi Name of Certification	Jumlah Sertifikasi Number of Certification
1	*Qualified Risk Management Professional (QRMP)*	5
2	*Certified Fraud Examiner (CFE)*	2
3	*Qualified Internal Auditor (QIA)*	16
4	Audit Intern Tingkat Lanjutan Advanced Internal Audit	25
5	Audit Intern Tingkat Dasar Basic Internal Audit	5

Program Pengembangan Kapabilitas Personil Department of Internal Audit
Capacity Development Program for Department of Internal Audit Personnel

Indonesia Power senantiasa melakukan program peningkatan kompetensi untuk Department of Internal Audit dengan melakukan program pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan berjenjang. Sampai dengan 31 Desember 2021, Auditor Department of Internal Audit telah mengikuti pelatihan sebagai berikut:

Indonesia Power helps improving the competencies of the Department of Internal Audit by providing capacity development program for auditors in a systematic and gradual scheme. Until December 31, 2021, the auditors of the Department of Internal Audit had participated in several trainings as indicated below.

Pelatihan Auditor Internal Tahun 2021
Internal Audit Trainings in 2021

Jabatan Position	Nama Pendidikan dan Pelatihan Name of Education and Training	Waktu Pelaksanaan Time
Auditor of Administration And Finance	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA) 2021 Internal Audit National Seminar (SNIA) 2021	30 November -. 03 Desember 2021 November 30 - December 03, 2021
Auditor of Technic		
Auditor of Unit		
Assistant Analyst Auditor of Unit		
Auditor of Compliance and Consultation	*E-Learning* Anti Korupsi & *Fraud Risk Assessment* E-Learning on Anti-Corruption & Fraud Risk Assessment	12-14 Juli 2021 July 12-14, 2021
Auditor of Unit		
Assistant Analyst Auditor of Unit		
Auditor of Administration and Finance	*E-Learning Awareness & Internal Audit Course* ISO 9001:2015 QMS	19-27 Juli 2021 July 19-27, 2021
Auditor of Technic		
Senior Audit Business Partner of Compliance and Consultation	*E-Learning Awareness Internal Audit Course* ISO 37001 ABMS	08-11 Februari 2021 Februari 8-11, 2021
Auditor of Administration and Finance		
Auditor of Technic		
Auditor of Compliance and Consultation		

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Jabatan Position	Nama Pendidikan dan Pelatihan Name of Education and Training	Waktu Pelaksanaan Time
Auditor of Compliance and Consultation	*E-Learning Fighting Fraud with Good Policy Management in GRC Ecosystem*	17 Juni 2021 June 17, 2021
Chief Audit Executive	*E-Learning Winning Teams Culture System*	05-08 Oktober 2021 October 5-8, 2021
Group Head Audit		
Senior Audit Business Partner of Compliance And Consultation		
Auditor of Unit	ICT *Refreshment Enterprise Asset Management* (EAM)	14-17 Juni 2021 June 14-17, 2021
Senior Audit Business Partner of Compliance and Consultation	Seminar GRC *Summit Agility Amid a Chaotic World* GRC Summit on Agility amid a Chaotic World	26 Agustus 2021 August 26, 2021
Auditor of Compliance and Consultation		
Auditor of Administration and Finance	Sertifikasi Qualified Internal Audit Tingkat Dasar Basic Qualified Internal Auditor Certification	September & Oktober 2021 September & October, 2021
Auditor of Unit		
Junior Analyst I of Auditor		
Assistant Analyst of Auditor	Sertifikasi *Qualified Internal Audit* Tingkat Lanjutan Advanced Qualified Internal Auditor Certification	Maret, Juni, Juli dan September 2021 March, June, July and September, 2021
Assistant Analyst Auditor of Unit		
Junior Analyst I of Database Audit		
Junior Analyst I Auditor of Unit		
Assistant Analyst Auditor of Unit	Sertifikasi *Qualified Internal Audit* Tingkat Manajerial Managerial-Level Qualified Internal Auditor Certification	September & Oktober 2021 September & October, 2021

Laporan Pelaksanaan Tugas Department of Internal Audit Tahun 2021

Report of Department of Internal Audit Activity Implementation in 2021

Department of Internal Audit Indonesia Power senantiasa melaksanakan kegiatan atau tugas sesuai dengan Program Kerja Audit Tahunan Perusahaan yang disusun berdasarkan analisa risiko yang mempengaruhi kelangsungan operasional Perusahaan dan menitikberatkan pada sistem keandalan unit dan sarana pendukung lainnya yang memiliki risiko signifikan.

Program kerja audit tersebut disampaikan kepada Direktur Utama dan di-review oleh Komite Audit. Berikut realisasi pelaksanaan Program Kerja Audit Tahunan Perusahaan Department of Internal Audit tahun 2021:

The Department of Internal Audit has always carried out its activities or duties in accordance with the Company's Annual Audit Work Plan, which was prepared based on the analysis of risks that may affect the continuity of the Company's operations and focused on reliability system at units and other supporting facilities with significant risks.

This audit work program is reported to the President Director and reviewed by the Audit Committee. Below is the explanation on the implementation of the Department of Internal Audit's Annual Audit Work Plan in 2021:

Audit Operasional Pada Unit

Operational Audit at Units

Audit Operasional Unit pada tahun 2021 telah seluruhnya dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

The Operational Audit at Units in 2021 had been completed as described below:

No	Unit	Laporan Hasil Audit Audit Result Report	
		No.	Tanggal Date
Semester I Tahun 2021 Semester 1 of 2021			
1	*Project Unit*	001/LHA/PRU/2021	05 Februari 2021 February 5, 2021
2	PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	002/LHA/PNSOMU/SMT-I/2021	29 Januari 2021 January 29, 2021
3	Saguling POMU	03/LHA/SGL POMU/SMT-I/2021	23 Februari 2021 February 23, 2021
4	Priok POMU	04/LHA/PRO POMU/SMT-I/2021	19 Februari 2021 February 19, 2021
5	PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java-2 Pelabuhan Ratu OMU	05/LHA/JPR OMU/SMT-I/2021	15 Maret 2021 March 15, 2021
6	Mrica PGU	06/LHA/MRC-PGU/SM-I/2021	16 Maret 2021 March 16, 2021
7	PLTU SPP Sanggau OMU	07/LHA/SGU-OMU/SMT-I/2021	06 April 2021 April 6, 2021
8	PLTU SPP Sintang OMU	08/LHA/STGOMU/SMT-I/2021	30 Maret 2021 March 30, 2021
9	Kamojang POMU	09/LHA/KMJ-POMU/SMT-I/2021	27 April 2021 April 27, 2021
10	PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java-2 Adipala OMU	10/LHA/ADP-OMU/SMT-I/2021	28 April 2021 April 28, 2021
Semester II Tahun 2021 Semester 2 of 2021			
1	PLTU SPP Banten 1 Suralaya OMU	21/LHA/BSLAOMU/SMT-II/2021	10 Agustus 2021 August 10, 2021
2	PLTU SPP Banten 3 Lontar OMU	22/LHA/BLTOMU/2021	09 Agustus 2021 August 9, 2021
3	*Maintenance Services Unit*	23/LHA/MSU/SMT-II/2021	30 Agustus 2021 August 30, 2021
4	PLTU SPP Banten 2 Labuan OMU	24/LHA/BLB-OMU/2021	27 Agustus 2021 August 27, 2021
5	Semarang PGU	25/LHA/SMGPGU/SMT-II/2021	17 September 2021 September 17, 2021
6	Bali PGU	26/LHA/BLI PGU/SMT-II/2021	17 September 2021 September 17, 2021
7	PLTGU CCPP Cilegon OMU	27/LHA/PLTGU-CLG/SMT-II/2021	15 Oktober 2021 October 15, 2021
8	PLTU SPP Barru OMU	28/LHA/BRU-OMU/2021	15 Oktober 2021 October 15, 2021
9	Grati POMU	29/LHA/GRT POMU/SMT-II/2021	29 Oktober 2021 October 29, 2021
10	PLTU SPP Holtekamp OMU	30/LHA/HTK POMU/SMT-II/2021	28 Oktober 2021 October 28, 2021
11	Suralaya PGU	31/LHA/SLA PGU/SMT-II/2021	12 November 2021 November 12, 2021
12	PLTU SPP Jeranjang OMU	32/LHA/JRJ-OMU/SMT-II/2021	12 November 2021 November 12, 2021

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Audit Operasional Kantor Pusat
Operational Audit at the Head Office

Pada tahun 2021, Department of Internal Audit telah melaksanakan audit di Kantor Pusat terhadap 13 obyek audit dan 13 satuan kerja yang terdiri dari:

In 2021, the Department of Internal Audit had audited 13 audit objects and 13 work units at the Head Office, which included:

No	Divisi Division	Laporan Hasil Audit Audit Result Report	
		No.	Tanggal Date
Semester I Tahun 2021 Semester 1 of 2021			
1	DIV PBP	11/LHA/DIVPBP/2021	07 Mei 2021 May 7, 2021
2	DIV SSP	12/ST/CAE/2021	07 Mei 2021 May 7, 2021
3	DITKEU	013/LHA-DITKEU/KP/2021	04 Juni 2021 June 4, 2021
4	DITOP I	14/LHA/IP-DITOP I/2021	4 Juni 2021 June 4, 2021
5	DITOP II	15/LHA/IP-DITOP II/2021	22 Juni 2021 June 22, 2021
Semester II Tahun 2021 Semester 2 of 2021			
1	DEP SPR	19/LHA-DEPT SPR/2021	16 Juli 2021 July 16, 2021
2	DIT SDM	20/LHA/IP-DITSDM/2021	16 Juli 2021 July 16, 2021
3	DIV ITE	33/LHA/IP-DIV ITE/2021	29 November 2021 November 29, 2021
4	CORSEC	34/LHA-CORSEC/2021	29 November 2021 November 29, 2021
5	DEP RIE	35/LHA/DEP RIE/SMT-II/2021	20 Desember 2021 December 20, 2021
6	DIV HSE	36/LHA/IP-DIVHSE/SMT-II/2021	10 Desember 2021 December 10, 2021
7	DIV LGL	37/LHA/DIV CL/SMT-II/2021	27 Desember 2021 December 27, 2021
8	DITAGA	38/LHA/DITAGA/SMT-II/2021	24 Desember 2021 December 24, 2021

Audit Operasional *Subsidiaries*
Operational Audit at Subsidiaries

Pada tahun 2021, Department of Internal Audit telah melaksanakan audit di Anak Perusahaan sebagai berikut:

In 2021, the Department of Internal Audit had audited the Company's Subsidiaries as described below:

No	Anak Perusahaan Subsidiaries	Laporan Hasil Audit Audit Result Report	
		No.	Tanggal Date
1	PT Putra Indotenaga (PIT)	016/LHA/PIT/2021	18 Juni 2021 June 18, 2021
2	PT Cogindo DayaBersama (CDB)	017/LHA/PT CDB/2021	2 Juli 2021 July 2, 2021
3	PT Artha Daya Coalindo (ADC)	018/LHA-PT ADC/AP/2021	2 Juli 2021 July 2, 2021

Kegiatan Konsultasi
Consulting Activities

Department of Internal Audit telah melaksanakan beberapa kegiatan konsultasi dan kepatuhan sesuai permintaan user. Selama tahun 2021, Department of Internal Audit telah melaksanakan kegiatan konsultasi sebanyak 98 Kegiatan konsultasi yang terdiri dari 23 kegiatan konsultasi di Kantor Pusat dan 75 kegiatan konsultasi di Unit Perusahaan.

The Department of Internal Audit had carried out several consulting and compliance activities upon request from users. In 2021, the Department of Internal Audit has carried out 98 consulting activities, comprising 23 consulting and compliance activities at the Head Office and 75 consulting and compliance activities at Units.

Kegiatan Konsultasi di *Head Office*
Consulting Activities at the Head Office

Kegiatan konsultasi di *Head Office* dilaksanakan secara online menggunakan Microsoft Teams, dengan kegiatan yang dikonsultasikan terdiri dari investasi 48%, Pengelolaan Energi Primer 30%, Pengadaan Barang dan Jasa 9% dan lainnya 13%.

The consulting activities at the Head Office were carried out virtually using Microsoft Teams, discussing investments (48%), primary energy management (30%), good and services procurement (9%), and other matters (13%).

Kegiatan Konsultasi di Unit
Consulting Activities at Units

Hasil konsultasi di Unit selama Tahun 2021 didominasi kegiatan proses bisnis Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 57%, kemudian disusul proses bisnis lainnya sebanyak 32%. Adapun dari kegiatan konsultasi tersebut, sumber penyebab risiko tertinggi pada SDM sebanyak 39%, disusul kemudian Eksternal sebanyak 33%.

Consulting activities at Units were dominated by discussion on goods and services procurement (57%), followed by other business processes (32%). From the consulting activities, it was found that the biggest source of risks was human capitals (39%), followed by external factors (33%).

Kegiatan Kepatuhan
Compliance Activities

Sepanjang tahun 2021, Department of Internal Audit melakukan pemeriksaan atas 559 sampel dari beberapa proses bisnis yang dikelola di unit-unit pembangkit dalam wilayah bisnis Indonesia Power. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sampel dalam kegiatan kepatuhan atas proses bisnis yang dikelola Indonesia Power menunjukan hasil sebagai berikut:

In 2021, the Department of Internal Audit analyzed 559 samples from several business processes managed at power generation units within Indonesia Power's business areas. The analysis of the sample documents in the compliance activities of the business processes managed by Indonesia Power resulted in the following:

No	Tata Kelola Kepatuhan Compliance Governance	Jumlah *Sample* Number of Samples	Persentase Percentage
1	Energi Primer Primary Energy	30	5%
2	Investasi Investment	45	8%
3	Pengadaan Barang dan Jasa Goods & Services Procurement	417	75%
4	Lainnya (O&M, K3LP, Gudang, CSR) Others (O&M, K3LP, Warehouse, CSR)	67	12%
Jumlah Total		**559**	**100%**

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Adapun untuk tingkat risiko dan efektivitas pengendalian risiko atas kegiatan kepatuhan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

The level of risks and effectiveness of risk control in compliance activities performed are as follows:

No	Tingkat Risiko Risk Level	Jumlah *Sample* Number of Samples	Persentase Percentage	Efektif Effective	Belum Efektif Non-Effective
1	Rendah Low	34	6%	44%	56%
2	Moderat Moderate	285	51%	56%	44%
3	Tinggi High	240	43%	65%	35%
Jumlah Total		**559**	**100%**		

Evaluasi Penyebab Risiko atas belum efektifnya pengendalian risiko proses bisnis oleh pemilik proses terhadap 201 sampel dokumen yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

The evaluation of risk cause due to ineffective risk control in business process by process owner against 201 sample documents concerned about the followings:

No	Penyebab Cause	Jumlah *Sample* Number of Samples	Persentase Percentage
1	Pengawas mutu pekerjaan kurang cermat Inattentive Quality Assurer	20	10%
2	Prosedur kurang memadai Insufficient procedures	7	3%
3	SDM terkait kurang cermat Inattentive personnel	155	77%
4	SDM terkait perencanaan pemeliharaan kurang cermat Inattentive maintenance planning personnel	2	1%
5	SDM pengelola ICoFr pengadaan kurang cermat Inattentive ICoFr management personnel	10	5%
6	SDM terkait pemeliharaan kurang cermat Inattentive maintenance personnel	4	2%
7	User pengelola anggaran belum kompeten Incompetent user's budget manager	3	1%
Jumlah Total		**201**	**100%**

Sehingga hasil pengelolaan Fungsi Kepatuhan pada Indonesia Power selama Tahun 2021 saat pemeriksaan atas 559 sampel dengan tingkat risiko rendah sebesar 6%, sampel dengan tingkat risiko moderat sebesar 51% dan tingkat risiko tinggi sebesar 43% sampel yang terdiri dari dokumen pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, pengelolaan Energi Primer dan pengelolaan Investasi dan pengelolaan proses bisnis lainnya (O&M, K3LP, Gudang, CSR). Ditemukan bahwa sampel pada tingkat risiko moderat dengan hasil efektif sebesar 56% dan belum efektif sebesar 44% dan sampel pada tingkat risiko tinggi hasil efektif sebesar 65% dan belum efektif sebesar 35%. Dari hasil yang belum efektif diambil sampel sebesar 36% dapat diketahui bahwa 77% disebabkan karena SDM terkait kurang cermat, dan 10% disebabkan karena pengawas mutu pekerjaan yang kurang cermat.

The Compliance Function management in Indonesia Power throughout 2021 during the assessment to 559 samples used 6% low-risk samples, 51% moderate-risk samples, and 43% high-risk samples consisting of Goods and Services Procurement management documents, Primary Energy management, Investment management, and other business process management (O&M, K3LP, Warehouse, CSR). It was found that the moderate-risk samples showed effective results by 56% and non-effective results by 44%, whereas the high-risk samples showed effective results by 65% and non-effective results by 35%. Out of the non-effective results, 36% samples were taken and it was learned that 77% of non-effective results were due to inattentive personnel, whereas 10% of the non-effective results were caused by lack of thoroughness on the part of work quality assurer.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan atas Hasil Audit

Monitoring of Follow-up on Audit Findings

Mekanisme tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit berdasarkan pada rekomendasi *due date* yang harus diselesaikan, terdapat 439 rekomendasi audit yang batas penyelesaian di tahun 2021 dan 70 rekomendasi batas penyelesaian tindak lanjut untuk tahun 2022.

By completion due date of the follow-up on the recommendations from the audit findings, 439 audit recommendation follow-ups must be completed by 2021, whereas 70 recommendation follow-ups must be completed by 2022.

Rincian Progres penyelesaian Tindak lanjut Temuan Audit di lingkungan Indonesia Power tahun 2021 dengan batas penyelesaian tindak lanjut tahun 2021:

The details of audit finding follow-ups which must be completed by 2021 are available in the following table:

Head Office/Unit	2021					
	Semester I			Semester II		
	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Rekomendasi ditindaklanjuti Actionable Recommendations	Status monitor Monitoring status	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Rekomendasi ditindaklanjuti Actionable Recommendations	Status monitor Monitoring status
Head Office	17	17	0	59	59	0
Power Generation Unit & Power Generation and O&M Services Unit (PGU &POMU)	60	60	0	99	99	0
Operation and Maintenance Services Unit (OMU)	81	81	0	94	94	0
Subsidiaries	0	0	0	29	29	0
Jumlah Total	**158**	**158**	**0**	**281**	**281**	**0**

Adapun rincian Progres penyelesaian Tindak lanjut Temuan Audit di lingkungan Indonesia Power tahun 2021 dengan batas penyelesaian tindak lanjut tahun 2022 adalah sebagai berikut:

The details of audit finding follow-ups which must be completed by 2022 are available in the following table:

Batas Penyelesaian Tindak Lanjut Pada Semester I 2022 Follow-up Completion Due Date for Semester 1 of 2022			Batas Penyelesaian Tindak Lanjut Pada Semester II 2022 Follow-up Completion Due Date for Semester 2 of 2022		
Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Rekomendasi ditindaklanjuti Recommendation followed up	Status monitor Monitoring status	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Rekomendasi ditindaklanjuti Recommendation followed up	Status monitor Monitoring status
30	2	27	4	0	4
22	6	16	0		0
14	2	12	0	0	0
66	**10**	**55**	**4**	**0**	**4**

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Sehingga tindak lanjut untuk rekomendasi hasil audit di lingkungan Indonesia Power dengan batas waktu penyelesaian tahun 2021 sudah 100%. Adapun untuk tindak lanjut rekomendasi hasil audit dengan batas waktu penyelesaian masuk pada tahun 2022 merupakan rekomendasi berupa kebijakan yang memerlukan waktu yang lebih untuk proses tindak lanjutnya. Kegiatan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut temuan dilakukan sesuai laporan tindak lanjut yang disampaikan oleh *Auditee*.

This indicates that the audit finding recommendations whose due dates were in 2021 have been 100% completed. Audit finding recommendation follow-ups which must be completed by 2022 include recommendations for policies whose completion takes longer time. The evaluation of the follow-up on the findings was carried out in accordance with the follow-up report as provided by the Auditee.

Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan oleh *Auditee* melalui aplikasi ProRBA, yang kemudian dievaluasi untuk menetapkan, apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan "selesai ditindaklanjuti".

Follow up results are reported by the Auditee via ProRBA, to be further evaluated to determine if the follow up has satisfied the provided recommendations. Completed follow-ups will be marked "follow-up completed".

Selain itu, Indonesia Power senantiasa melakukan *monitoring* tindak lanjut atas temuan-temuan hasil audit yang dilakukan Auditor Eksternal (KAP dan/atau BPK RI) untuk memastikan temuan-temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan agar temuan yang sama tidak akan terulang kembali. Pada tahun 2021, tidak terdapat temuan audit KAP sehingga tidak terdapat monitoring tindak lanjut yang dilakukan. *Monitoring* tindak lanjut atas temuan audit oleh BPK RI dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

In addition, Indonesia Power always monitors the follow-up of audit findings conducted by the External Auditor (KAP and/or BPK RI) to ensure that the findings have been followed up to prevent recurring findings. In 2021, there were no KAP audit findings, therefore no follow-up monitoring regarding KAP audit findings have been conducted. Follow-up monitoring of audit findings by BPK RI shown in the following table:

Pemeriksaan BPK RI Audit by BPK RI	Jumlah Temuan Number of Findings	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Status		
			Sesuai Rekomendasi Following Recommendation	Belum Sesuai Rekomendasi Not Following Recommendation	Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti Recommendation Not Actionable
AUDIT PDTT 2014 – 2015	2	27	4	0	4

* Sesuai dengan surat BPK RI No. 252/S/XX/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I 2020 pada Indonesia Power disampaikan bawa sebanyak 2 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti karena tindaklanjutnya diluar kendali dari PT Indonesia Power dan hal tersebut disetujui oleh pihak BPK RI

* In accordance with Letter of the Audit Board of the Republic of Indonesia No. 252/S/XX/07/2020 dated July 30, 2020 on Monitoring of Follow-up on Recommendation of BPK RI's Audit Findings for Semester I of 2020 in PT Indonesia Power, it was stated that 2 recommendations were not actionable as they were beyond the control of PT Indonesia Power. The statement has been approved by BPK RI.

Monitoring Penyimpangan Internal
Monitoring of Internal Frauds

Penyimpangan Internal merupakan tindakan penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (honorer dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Perusahaan yang mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan secara signifikan. Untuk itu, Indonesia Power telah menerapkan fungsi audit intern yang efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan guna menghindari tindakan kecurangan di lingkungan Perusahaan. Selama tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan yang bersifat kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh Pegawai Indonesia Power.

Internal Fraud is defined as deviation/fraud committed by the management, permanent staff, and non-permanent staff (contract and outsourced staff) in terms of work processes and Company operation activities that result in significant impacts on the Company's finance. As such, Indonesia Power has implemented effective internal audit function on the entire aspects and activity elements in order to prevent frauds in the Company. Throughout 2021, there were no frauds committed by Indonesia Power employees.

Kasus Case	Jumlah Kasus Number of Case
Total *Fraud* Total Fraud	0
Telah diselesaikan Resolved	0
Dalam proses penyelesaian di internal Perusahaan Under resolution at Company internal level	0
Belum diupayakan penyelesaiannya No resolution yet	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up by legal proceeding	0

Fraud Risk Assessment (FRA)

Fraud Risk Assessment (FRA)

Dalam rangka memenuhi *Maturity Level* Kepatuhan Anak Perusahaan PLN Group Compliance And Consultation terlibat dalam penyusunan FRA proses bisnis korporat dan juga melakukan pendampingan kepada pemilik proses pada penyusunan FRA bidang. Berikut kegiatan rangkuman pendampingan dengan pemilik proses sampai dengan per 31 Desember 2021:

To satisfy the Subsidiary Compliance Maturity Level, PLN Group Compliance and Consultation participated in the preparation of FRA of corporate business process and provided assistance to process owners during department-level FRA preparation. The following assistances were provided to process owners as of December 31, 2021:

No	Nama Kegiatan Activity Name
1	Laporan FRA Korporat Semester 1 2021 Corporate FRA Report for Semester 1 of 2021
2	Laporan FRA Korporat Tahun 2021 Corporate FRA Report 2021
3	Undangan Rapat Pembahasan Lanjutan Dokumen *Fraud Risk Assessment* (FRA) pada Proyek EPC PLTM Lambur 2 x 4 MW Meeting Invitation for Advanced Discussion of Fraud Risk Assessment (FRA) Documents in EPC Project MHPP Lambur 2 x 4 MW
4	*Coaching* Penyusunan FRA dan *Maturity Level* GCG *Compliance Unit* Coaching on Preparation of FRA and Unit GCG Compliance Maturity Level
5	Undangan Rapat Pembahasan dan *Coaching Draft* FRA Proyek Dieselisasi Indonesia Power Meeting Invitation for Discussion of and Coaching on FRA Draft for Indonesia Power Dieselization Project
6	*Review* dan *Coaching* FRA Proyek BDV III Review of and Coaching on FRA for BDV III Project
7	FRA *Project* Relokasi PLTG Grati FRA for GTPP Grati Relocation Project

Penyerahan Laporan Berkala

Periodical Report Submission

Setiap Laporan Hasil Audit disampaikan langsung kepada pihak yang diaudit (*auditee*) dilengkapi dengan saran tindakan perbaikan, termasuk sanksi apabila diperlukan. Kemajuan tindakan harus dilaporkan oleh pihak yang diaudit kepada Department of Internal Audit melalui aplikasi ProRBA sesuai dengan batas waktu penyelesaian tindak lanjut yang telah disepakati antara Auditor dengan *Auditee* untuk memastikan agar setiap pihak yang diaudit selalu berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Every Audit Result Report is submitted directly to the auditee, supplied with advices for remediation measures, including imposition of sanction where necessary. Progress of actions must be reported by auditee to the Department of Internal Audit via ProRBA within the follow-up completion deadline agreed upon by the auditor and auditee to ensure that each audited party implement the remediation and improvement measures.

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

Laporan Manajemen Department of Internal Audit dibuat setiap semester yang disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan aktivitas audit internal di Perusahaan. Penyampaian Laporan Hasil Audit Department of Internal Audit kepada Komite Audit dilakukan setiap triwulan.

The Management Report of the Department of Internal Audit is prepared every semester and submitted to relevant parties as an accountability report over internal audit implementation in the Company. The Audit Result Report of the Department of Internal Audit is submitted to the Audit Committee every quarter.

Selama tahun 2021, Department of Internal Audit telah menyampaikan Laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris C.q Komite Audit antara lain terkait laporan Audit Operasional dan Audit Tetap Tidak Beroperasi.

In 2021, the Department of Internal Audit has submitted several reports to the President Director, with a copy to the Board of Commissioners, with attention to Audit Committee. These include reports on Operational Audit and Non-Operating Fixed Assets Audit.

Kegiatan Pendukung Audit Lainnya
Other Audit-Supporting Activities

1. Melaksanakan pendampingan Audit Laporan Keuangan Tahun 2020 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) sesuai surat dari PT PLN (Persero) tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan terbit Laporan Keuangan PT Indonesia Power pada tanggal 31 Maret 2021;
2. Melaksanakan pendampingan pemeriksaan BPK RI untuk Perhitungan Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2020 pada PT PLN (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait sesuai Surat Tugas BPK tanggal 06 Januari 2021;
3. Melaksanakan pendampingan pemeriksaan SPI PT PLN (Persero) atas Audit Tematik *Anti Blackout* pada PT Indonesia Power pada tanggal 15 Maret 2021 s.d. 08 April 2021;
4. Melaksanakan pendampingan pemeriksaan SPI PT PLN (Persero) atas Audit Teknologi pada tanggal 12 April s.d. 06 Mei 2021;
5. Melaksanakan pendampingan pemeriksaan SPI PT PLN (Persero) atas Audit Tematik *Non Allowable Cost* (NAC) pada PT Indonesia Power pada tanggal 14 Juni s.d. 08 Juli 2021;
6. Melaksanakan pendampingan pemeriksaan SPI PT PLN (Persero) atas Audit Operasional Berbasis Risiko pada PT Indonesia Power pada tanggal 26 Juli s.d. 19 Agustus 2021;
7. Melaksanakan pendampingan pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Perhitungan Subsidi Listrik, dan Pengelolaan Keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Tahun 2021 pada PT PLN (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta sesuai Surat Tugas BPK tanggal 30 Agustus 2021.;
8. Melaksanakan Audit atas Usulan Penghapusan Aset Tetap Tidak Beroperasi B3 (Battery) Grati POMU tanggal 08 s.d. Desember 2021;
9. Melaksanakan Audit atas Proses Persiapan Pelaksanaan Konsolidasi *geothermal* di Kamojang Power Generation and O&M *Services Unit* pada tanggal 26 September s.d. 01 Oktober 2021;

1. Providing assistance for KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia) during Financial Statements 2020 Audit in accordance with PT PLN (Persero)'s letter dated October 27, 2020 until the issuance of PT Indonesia Power Financial Statements on March 31, 2021;
2. Providing assistance for BPK RI during the audit of Electricity Subsidy for 2020 Budget Year at PT PLN (Persero), Subsidiaries, and Relevant Agencies in accordance with BPK's Letter of Assignment dated January 06, 2021;
3. Providing assistance for PT PLN (Persero)'s Internal Audit Unit during Anti-Blackout Thematic Audit at PT Indonesia Power from March 15, 2021 to April 08, 2021;
4. Providing assistance for PT PLN (Persero)'s Internal Audit Unit during Technology Audit from April 12, 2021 to May 06, 2021;
5. Providing assistance for PT PLN (Persero)'s Internal Audit Unit during Non-Allowable Cost Thematic Audit at PT Indonesia Power from June 14, 2021 to July 08, 2021;
6. Providing assistance for PT PLN (Persero)'s Internal Audit Unit during Risk-based Operational Audit at PT Indonesia Power from July 26, 2021 to August 19, 2021;
7. Providing assistance for BPK RI during the audit of compliance with Power Provision Business Activities, Electricity Subsidy Calculation, and Financial Management in COVID-19 Pandemic Management for 2021 at PT PLN (Persero) and Relevant Agencies in Jakarta, in accordance with BPK's Letter of Assignment dated August 30, 2021;
8. Conducting audit of Proposal for Non-Operating Fixed Assets Write-off (Toxic and Hazardous Material, i.e. Battery) of Grati POMU from December 08, 2021 to December 2021;
9. Conducting audit of Geothermal Consolidation Implementation Process in Kamojang Power Generation and O&M Services Unit from September 26, 2021 to October 01, 2021;

10. Melaksanakan Audit atas Usulan Penghapusan Aset Tetap Tidak Beroperasi Semarang PGU tanggal 25 s.d. 29 Desember 2021;
11. Melakukan *review* atas Pedoman Audit Internal PT Indonesia Power;
12. Melakukan *review* atas Audit Charter PT Indonesia Power dalam rangka meratifikasi *Audit Charter* PT PLN (Persero);
13. Melakukan Kegiatan *Quality Assurance* pada setiap aktivitas audit operasional;
14. Melakukan analisa terhadap Laporan Konsultasi dan Kepatuhan dari unit - unit .

10. Conducting audit of Proposal for Non-Operating Fixed Assets Write-off of Semarang PGU from December 25, 2021 to December 29, 2021;
11. Reviewing PT Indonesia Power's Internal Audit Guidelines;
12. Reviewing PT Indonesia Power's Audit Charter for ratification of PT PLN (Persero)'s Audit Charter;
13. Conducting Quality Assurance to every operational audit activity;
14. Analyzing Consulting and Compliance Reports from Units.

Penilaian Atas Kinerja Department of Internal Audit

Performance Assessment of the Department of Internal Audit

KPI (*Key Performance Indicators*).

Key Performance Indicators (KPI)

Realisasi pencapaian kinerja Department of Internal Audit tahun 2021 sebesar 100% dari target 100% dengan komponen KPI Department of Internal Audit terdiri dari (1). Kualitas Konsultasi Audit; (2) Survei Kepuasan *Auditee*; (3) Efektivitas pelaksanaan program kerja; (4) Integrasi Audit dengan Sistem Manajemen; (5) Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal; (6) Pelaksanaan Pengendalian Mutu (*Quality Assurance*) Audit; (7) KPKU / *Malcolm Baldrige*; (8) Skor GCG perihal Audit; (9) Penyelesaian Arahan RUPS, Arahan Rapat Direksi, Arahan Dewan Komisaris, Pemenuhan Tindak Lanjut AOI GCG; (10). Penyelesaian *Enterprise Architecture* dan *Update* IPM Divisi; dan (11) Kepatuhan pada K3LH (kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup).

The Department of Internal Audit's performance in 2021 was 100% of the 100% target, with the following KPI components: (1) Audit Consulting Quality; (2) Auditee Satisfaction Survey; (3) Work Program Implementation Effectiveness; (4) Audit Integration with Management System; (5) External Audit Finding Follow-up Completion; (6) Audit Quality Assurance Implementation; (7) Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU)/ Malcolm Baldrige; (8) GCG Score on Audit; (9) Finalization of GMS Directives, BOD Meeting Directives, BOC Directives, GCG AOI Follow-up Completion; (10) Finalization of Enterprise Architecture and IPM Update per Division; and (11) Compliance with Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE).

Quality Assurance Review

Quality Assurance Review

Indonesia Power secara berkala melakukan *Quality Assurance Review* guna melihat sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap *charter* internal audit, standar dan kode etik, efisiensi serta efektivitas dari fungsi Audit Internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholders*. *Quality Assurance Review* dilakukan setiap setahun sekali oleh Internal dan 5 (lima) tahun sekali oleh pihak independen.

Pada Tahun 2021, Indonesia Power melaksanakan *Quality Assurance Review* secara internal yang dilakukan Department of Internal Audit. *Quality Assurance Review* tersebut dilakukan terhadap audit operasional pada setiap tahapan proses antara lain dimulai dari dokumen rencana kerja audit tahunan, surat

Indonesia Power conducts Quality Assurance Review to observe to which extent the compliance with internal audit charter, code of ethics and standards, and Internal Audit function's effectiveness and efficiency are met, particularly in meeting stakeholders' needs. Quality Assurance Review is carried out once in a year internally and once in five (5) years by independent party.

In 2021, Indonesia Power held internal Quality Assurance Review which was performed by the Department of Internal Audit. The Quality Assurance Review was performed on operational audit at every stage of process, starting from annual audit work plan document, letter of assignment, audit work program,

AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT

tugas, program kerja audit, pelaksanaan audit, laporan hasil audit, *released Area of Improvement* (AoI), dan evaluasi tindak lanjut, dengan 3 (tiga) kategori kriteria penilaian antara lain memenuhi kriteria, memenuhi kriteria namun dengan catatan, dan belum memenuhi kriteria. Kesimpulan Hasil QA audit operasional tahun 2021 bahwa setiap tahapan proses audit operasional telah memenuhi ketentuan sesuai Pedoman Audit Internal Indonesia Power.

audit implementation, audit result report, released area of improvement, to follow-up evaluation. The review has 3 (three) assessment criteria, i.e. Criteria met, criteria met with condition, and criteria unmet. The result of the operational audit QA in 2021 found that every stage of operational audit process has met the provisions set in Indonesia Power's Internal Audit Guidelines,

Adapun untuk *Quality Assurance Review* yang dilakukan oleh Pihak Independen telah dilaksanakan pada tahun 2020. *Quality Assurance Review* Indonesia Power dilakukan oleh PT Bina Audita Indonesia dengan kesimpulan hasil *assurance* "penerapan Sistem Pengendalian Internal Indonesia Power secara keseluruhan sudah efektif namun masih perlu perbaikan pada komponen Lingkungan Pengendalian pada prinsip Integritas dan Etika, komponen Penilaian Risiko pada prinsip Analisa Risiko dan Risiko *Fraud*, serta komponen Aktivitas Pengendalian pada prinsip Aktivitas Pengendalian".

Independent Party-led Quality Assurance Review was performed in 2020. The Quality Assurance Review was performed by PT Bina Audita Indonesia, which found that albeit has been generally effective, the Internal Control System implementation has a number of areas of improvement in Control Environment (Integrity and Ethics principles), Risk Assessment (Risk Analysis and Fraud Risk principles), and Control Activity (Control Activity principles) components.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Indonesia Power secara berkesinambungan. Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan elemen penting serta menjadi dasar bagi kegiatan operasional Indonesia Power yang sehat dan aman, serta dapat membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga aset Perusahaan, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tujuan Kepatuhan), tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi), efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha Perusahaan (Tujuan Operasional).

Internal control system is a supervisory mechanism implemented on an ongoing basis at Indonesia Power. An effective internal control system is vital and fundamental for a sound and secure operation at Indonesia Power. It also assists the Board of Commissioners and the Board of Directors in safekeeping Company assets; enhancing compliance with applicable policies, laws, and regulations (Compliance Objective); providing proper, complete, and timely financial and managerial information (Informational Objective), and delivering efficient and effective business activities (Operational Objective).

Selain itu, Sistem pengendalian internal dibangun untuk meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi *(integrated control system*), baik antara Perusahaan dan Entitas Anak guna memastikan bahwa kegiatan operasional telah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan.

The internal control system was also established to enhance the function of integrated control system between the Company and its subsidiaries to ensure that the operations have been properly run and are capable of adding values for the Company.

Sistem Pengendalian Internal Indonesia Power telah dilengkapi dengan ICoFR yang berada di bawah pengawasan pimpinan Perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Karyawan) dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan pelaporan keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan untuk pihak luar sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Internal Control System at Indonesia Power is reinforced by ICoFR under the supervision of Company leaders (Board of Commissioners, Board of Directors, Management, and Employees) to give adequate assurance of the reliability

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)

Internal Control over Financial Reporting (ICoFR)

ICoFR Indonesia Power mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 174.K/010/IP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Kebijakan Implementasi *Internal Control over Financial Reporting*/ICoFR yang meliputi pengendalian tingkat transaksional dan berlaku di Unit luar Jawa seperti Sanggau, Sintang dan HTK Kantor Pusat Indonesia Power.

ICoFR bertujuan untuk mengelola pengendalian internal atas risiko pelaporan keuangan yang diinisiasi dari aktivitas-aktivitas yang berdampak pada validasi angka-angka semua transaksi yang dicatat pada laporan keuangan. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi aktivitas tidak hanya fungsi keuangan dan juga fungsi non keuangan, mulai dari proses pengelolaan pembangkit dan jasa O&M, proses Pengadaan barang dan jasa serta proses pendukung lainnya. Adapun tahapan implementasi ICoFR Indonesia Power ditetapkan sebagai berikut:

ICoFR in Indonesia Power is guided by Decree of the Board of Directors Number 174.K/010/IP/2016 dated August 12, 2016 concerning Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) Implementation, which includes transaction-level control and applies to all Units outside Java, such as in Sanggau, Sintang, and Indonesia Power Head Office HTK.

ICoFR aims to manage internal control over financial reporting risk, starting from activities that bring impact to validation of numbers in all transactions recorded in financial statements. These activities include those pertaining to financial and non-financial functions, from power generation and O&M service management to procurement of goods and services, and other supporting services. ICoFR implementation stages in Indonesia Power are as follows:

Tahapan implementasi ICoFR Indonesia Power Tahun 2012 -2021

Indonesia Power Risk ICoFR Implementation Stages in 2012-2021

Tahun Year	Aktivitas Activity
2012-2013	Persiapan Perancangan dan Pengendalian BPM & RCM Segmen B, Segmen C, Segmen D, Segmen H, Segmen F & Segmen G Preparation for Design and Control of BPM & RCM Segments B, C, D, H, F, and G
2014	Inisiasi Implementasi Rancangan BPM & RCM Segmen B, Segmen C, Segmen D, Segmen H, Segmen F & Segmen G Initiation of Implementation of Design of BPM & RCM Segments B, C, D, H, F, and G
2015-2016	Adaptasi Pengembangan Ruang Lingkup dan Aplikasi CSA Segmen B, Segmen C, Segmen D, Segmen H, Segmen F, Segmen G & Segmen A Adaptation of Scope and CSA App Development Segments A, B, C, D, H, F, and G
2017	Integrasi Rancangan ICOFR, *Risk Assessment* dan Proses Bisnis Korporat Integration of ICoFR Design, Risk Assessment, and Corporate Business Process
2018	Pemutakhiran BPM & RCM sesuai Proses Bisnis ERP dan Struktur Organisasi terakhir Updating of BPM and RCM according to ERP Business Process and current Organizational Structure
2019	Inisiasi Pengembangan Aplikasi ICOFR CSA dan GRC versi PLN Initiation of ICoFR CSA and GRC Application Development of PLN's version
2020	Pengembangan Aplikasi ICOFR Adaptasi versi PLN dan Pengembangan Aplikasi ICOFR Integrasi Development of ICoFR application adapted from PLN's version and Developing Integrated ICoFR Application
2021	Implementasi Pelaksanaan CSA *Online* menggunakan Aplikasi ICOFR Terintegrasi Adaptasi versi PLN Implementation of online CSR using Integrated ICoFR application adapted from PLN's version

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Implementasi ICoFR Indonesia Power meliputi pengendalian tingkat transaksional yang terdiri dari segmen Pendapatan Penjualan Listrik, Biaya Operasi, Aset tetap, Persediaan, Pengembangan Proyek, Perbendaharaan, Perpajakan dan Pelaporan Keuangan. Pelaporan *Control Self Assessment* (CSA) telah dilakukan secara periodik melalui Aplikasi Online sejak 2016. Melalui penerapan ICoFR, diharapkan Indonesia Power dapat mencapai sasaran sebagai berikut:

ICoFR implementation at Indonesia Power includes transaction-level control, which consists of Revenues from the Sale of Electricity; Operating Cost; Property, Plant, and Equipment, Inventories, Project Development, Treasury, Taxes, and Financial Reporting. Control Self-Assessment (CSA) has been reported periodically using online application since 2016. By ICoFR implementation, it is expected that Indonesia Power will be able to achieve the following goals:



Audit Atas Implementasi ICoFR
Audit of ICoFR Implementation

Pada tahun 2021, Department of Internal Audit telah melakukan audit atas implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) pada 3 Unit dengan menggunakan aplikasi CSA (*Control Self Assessment*) yang dilakukan oleh setiap pemilik *control* dengan hasil audit yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

In 2021, the Department of Internal Audit has conducted audit on the implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) on 3 Units using CSA (Control Self-Assessment) application conducted by individual control owners, the results of which are presented in the table below:

Unit	Uraian Description	Judul Title
Saguling POMU	AOI	Pengendalian Tingkat Transaksional Pada *Risk Control Matrix* (RCM) Saguling POMU belum optimal Transaction-Level Control on Risk Control Matrix (RCM) at Saguling POMU was ineffective and not updated in accordance with the Company's business processes
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West-Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	AOI	Penerapan Program ICoFR dan Pelaksanaan CSA (*Control Self Assessment*) di PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU Belum Optimal ICoFR Program and CSA (Control Self-Assessment) implementation in SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU were non-optimal

Unit	Uraian Description	Judul Title
DITKEU	AOI	Masih Terdapat 6 (enam) Unit Di Lingkungan Indonesia Power yang belum Mengimplementasikan ICOFR namun tidak mengurangi fungsi kontrol karena dari 6 (enam) unit tersebut relatif tidak material dan mempunyai proses bisnis yang sederhana While six (6) Units of Indonesia Power have not yet implemented the ICoFR, this does not lessen the control function as such issue was relatively immaterial due to the simplistic nature of their business processes.

Berdasarkan hasil audit ICoFR tersebut permasalahan yang ditemukan menunjukkan ketidakefektifan pengendalian bersifat minor dan dapat diperbaiki dengan mendesain ulang kontrol yang ada disesuaikan dengan perkembangan struktur organisasi terkini dan meningkatkan ketelitian dengan melampirkan atribut kontrol dalam pelaporan transaksinya. Dengan hasil audit tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pengendalian yang dilakukan Manajemen dalam pelaporan keuangan telah didukung pengendalian yang efektif sehingga diharapkan tidak terdapat salah saji yang material atas laporan keuangan yang disusun Perusahaan.

Based on the result of ICoFR audit, problems that were found indicated minor control ineffectiveness, and such ineffectiveness could be improved by redesigning the existing control with adjustment to the latest organizational structure and improving accuracy by attaching control attribute in transaction reporting. Based on the audit result, it can be concluded that control by the Management in financial reporting has been supported by effective control, by which it is expected that material error will not be found in the financial statements prepared by the Company.

Penerapan Sistem Sistem Pengendalian Intern dan Kesesuaian dengan COSO – *Internal Control Framework*

Implementation of Internal Control System and Conformity with COSO's Internal Control-Integrated Framework

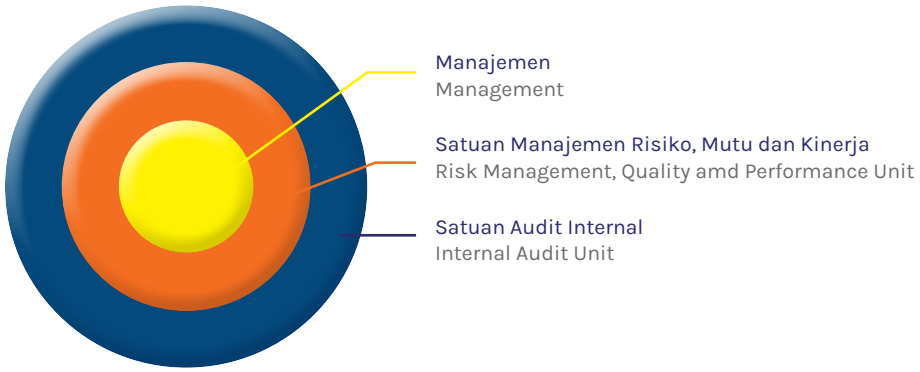
Salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan secara efektif. Penerapan sistem pengendalian internal diarahkan untuk memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki kehandalan laporan dan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Maka dengan demikian, Indonesia Power senantiasa berupaya menerapkan Sistem pengendalian internal Perusahaan sejalan dengan prinsip-prinsip Internal Control-Integrated Framework yang ditetapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

One of the implementations of good corporate governance is ensuring an effective internal control system. Internal control system implementation is aimed at ensuring that the Company has reliable financial statements and financial information, compliance with applicable regulations, and efficiency and effectiveness in operational activities. Thus, Indonesia Power strives to implement an Internal Control System that is consistent with the Internal Control-Integrated Framework principles formulated by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Indonesia Power mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk seluruh fungsi operasi dengan mekanisme pengawasan berjenjang (*three lines of defense*). Adapun skema sistem pengendalian internal Indonesia Power dapat dilihat pada gambar berikut:

Indonesia Power develops an effective internal control system for all operational functions, using tiered supervision mechanism (three lines of defense). Internal control system scheme in Indonesia Power is shown in the figure below:

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM



Keterangan:
1. Pengendalian Internal Lapis Pertama, dilaksanakan oleh pemilik proses bisnis (Owners)/Manajemen.
2. Pengendalian Internal Lapis Kedua, dilaksanakan oleh Satuan Manajemen Risiko, Mutu, dan Kinerja.
3. Pengendalian Internal Lapis Ketiga, dilaksanakan oleh Satuan Audit Internal.

Remarks:
1. Internal Control Tier 1, implemented by business process owner/the Management.
2. Internal Control Tier 2, implemented by Risk Management, Quality, and Performance Unit.
3. Internal Control Tier 3, implemented by Internal Audit Unit.

Sesuai dengan prinsip-prinsip COSO *framework*, unsur pengendalian internal Indonesia Power terdiri dari: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Aktivitas Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi, serta (5) Pemantauan.

In accordance with COSO Framework principles, internal control elements in Indonesia Power consist of: (1) Control Environment; (2) Risk Assessment; (3) Control Activity; (4) Information and Communication, and (5) Monitoring.

Lingkungan Pengendalian
Control Environment

Lingkungan pengendalian merupakan segala sesuatu yang dimiliki dan mempengaruhi pencapaian perusahaan untuk mencapai budaya sadar pengendalian, yang meliputi:

1. Nilai Integritas dan Etika sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) dan Indonesia *Power-Way;*
2. Komitmen terhadap kompetensi, yang ditetapkan dalam kebijakan SDM berbasis kompetensi (Sertifikasi);
3. Pengawasan terhadap manajemen dan Komite Audit, sebagaimana diatur dalam *Board Manual*, *Internal Audit Charter* dan *Audit Committee Charter;*
4. Filosofi manajemen dan gaya operasi, yang diatur lebih lanjut dalam kebijakan dan penerapan manajemen risiko;
5. Struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

Control environment refers to anything that is owned by and affects the Company in achieving control awareness culture, which includes:

1. Integrity and Ethics values as set out in the Company's Code of Conduct and Indonesia Power Way.
2. Commitment to competency, as set out in the competency-based HC policy (Certification).
3. Supervision of the Management and Audit Committee, as set out in the Board Manual, Internal Audit Charter, and Audit Committee Charter.
4. Management philosophy and operation style, as set out further in risk management policy and implementation.
5. Organizational structure, delegation of authority and responsibility.

Penilaian Risiko
Risk Assessment

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, Indonesia Power memiliki potensi risiko yang perlu terus diidentifikasi dan diukur yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Penilaian risiko dilakukan melalui pelaksanaan *Maturity Level Assessment* manajemen risiko di Kantor Pusat dan Unit untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dikelola dengan baik dengan tindakan mitigasi yang diperlukan.

In operating its business, Indonesia Power encounters potential risks that require continuous identification and measurement, which are affected by various internal and external factors. Risk assessment is carried out through risk management Maturity Level Assessment at the Head Office and Units to ensure that existing risks are managed properly with appropriate mitigation measures.

Aktivitas Pengendalian
Control Activity

Aktivitas sistem pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh manajemen untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, melalui:

1. Pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan sesuai dengan fungsi dari masing-masing unit organisasi;
2. Mempersiapkan sistem pencatatan data dan penyimpanan dokumen Perusahaan yang baik;
3. Mempersiapkan sistem pengamanan data dan dokumen Perusahaan dengan baik;
4. Manajemen SDM berbasis kompetensi;
5. Komitmen penerapan manajemen risiko yang mengarah pada budaya sadar risiko;
6. Melakukan penilaian atau pemeriksaan atas kinerja Perusahaan oleh pihak independen seperti oleh Kantor Akuntan Publik;
7. Implementasi *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR) secara konsisten dan efektif.

Control system activity is a policy and procedure made by the Management to fulfill the specified purpose through:

1. Distribution of duty, responsibility, and authority in accordance with the function of each organizational unit.
2. Preparation of proper recording and storage system for Company data and documents.
3. Preparation of proper protection system for Company data and documents.
4. Competency-based HC management.
5. Commitment towards risk management implementation that leads to risk awareness culture.
6. Implementation of Company performance assessment or audit by independent parties, such as Public Accounting Firm.
7. Consistent and effective implementation of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).

Informasi dan Komunikasi
Information and Communication

Salah satu unsur penting dalam mendukung tercapainya sistem pengendalian internal yang efektif adalah pelaksanaan informasi dan komunikasi melalui berbagai forum komunikasi internal yaitu: (1) Sistem pelaporan formal; (2) Aplikasi sistem teknologi informasi, dan (3) Program komunikasi manajemen antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, *coffee morning.*

One of the important elements in supporting the attainment of effective internal control system is the provision of information and communication through various internal communication forums, such as: (1) Formal reporting system; (2) Information technology system application, and (3) Management communication program through Board of Commissioners meetings, Board of Directors meetings, Audit Committee and Risk Management Committee meetings, and Coffee Morning sessions.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Pemantauan
Monitoring

Indonesia Power terus meningkatkan pemantauan implementasi sistem pengendalian internal, yang mencakup pengendalian keuangan maupun pengendalian operasional secara berkala. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk melihat, memastikan efektivitas pelaksanaan pengendalian internal antara rencana dan realisasi. Pemantauan dilakukan dengan pelaksanaan *assessment* oleh Satuan Perencanaan, Kinerja dan Manajemen Risiko Korporat serta dilakukan *assurance* secara berkala yang dilaksanakan oleh Department of Internal Audit.

Indonesia Power melakukan evaluasi atau penilaian atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat korporat maupun tingkat operasional/aktivitas dengan menerapkan dan memelihara sistem pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal yang digunakan adalah Internal *Control over Financial Reporting* (ICoFR).

Indonesia Power continues to improve the monitoring of internal control system implementation, which includes periodical financial and operational controls. The purpose of this monitoring is to observe and ensure the effectiveness of internal control implementation plan, in comparison to the realization. The monitoring was conducted through assessment by Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management Unit, in addition to regular assurance by the Department of Internal Audit.

Indonesia Power evaluates internal control effectiveness both at corporate and operational/activity levels, by implementing and maintaining adequate internal control system and financial reporting procedure according to the applicable provisions. The Company's Internal Control System Policy adopts the Internal Control over Financial Reporting (ICoFR).

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Operasional dan Keuangan
Implementation of Operational and Financial Control Systems

Pengendalian intern Indonesia Power diterapkan atas 2 (dua) aspek, yaitu pengendalian operasional dan pengendalian keuangan. Adapun Pengendalian operasional dan Keuangan yang dilakukan oleh Indonesia Power, antara lain meliputi:

1. Menciptakan lingkungan pengendalian yang dapat mendukung efektivitas pengendalian internal antara lain: (a) Memastikan bahwa semua anggota manajemen Perusahaan memiliki integritas dan nilai etika yang tinggi; (b) Menetapkan filosofi Perusahaan yang disosialisasikan dan diterapkan kepada seluruh komponen didalam Perusahaan; (c) Membuat struktur organisasi yang memungkinkan dilakukannya pengendalian secara efektif; (d) Mendorong peranan aktif dari Komite Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan agar pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif; (e) Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara unit organisasi; (f) Menetapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif.
2. Menerapkan kesadaran manajemen risiko kepada semua level manajemen Perusahaan.
3. Mempersiapkan sistem informasi yang memungkinkan pengendalian internal dilakukan secara efektif, efisien dan akurat.

At Indonesia Power, internal control is applied to two aspects, i.e. Operations and finance. The implementation of this control includes the following activities:

1. Establishing control environment that is capable of supporting internal control, such as by: (a) Ensuring all personnel in the Management have high integrity and standard of ethics; (b) Determining Company philosophy to be disseminated and implemented to all components in the Company; (c) Developing an organizational structure that enables effective control; (d) Promoting active engagement of Committees under the Board of Commissioners in monitoring activities and providing feedback for effective internal control; (e) Determining clear duty and responsibility among organizational units; (f) Developing policy for competitive human capital development.
2. Promoting risk management awareness at all levels in Company management.
3. Preparing an information system that enables effective, efficient, and accurate internal control.

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan antara lain dengan: (a) Supervisi dari tiap tingkatan level manajemen di dalam Perusahaan; (b) Sistem pertanggungjawaban dan penilaian yang memungkinkan untuk melakukan penilaian terhadap setiap anggota manajemen dan unit-unit dalam organisasi Perusahaan; (c) Pelaksanaan pengawasan melalui audit internal yang dilakukan oleh DEP IAD; (d) Pelaksanaan pengawasan melalui pemeriksaan oleh pihak independen seperti Kantor Akuntan Publik; (e) Pengawasan oleh Dewan Komisaris atas seluruh pelaksanaan aktivitas manajemen Perusahaan yang dilakukan Direksi, termasuk pengawasan oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan penasihatan terkait dengan proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dibantu oleh Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko. Sedangkan Direksi menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur Perusahaan secara konsisten dan memenuhi kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, baik terkait dengan kegiatan usaha Indonesia Power, penerapan manajemen risiko, perencanaan strategis, pembagian tugas dan pendelegasian wewenang yang jelas serta kebijakan akuntansi yang memadai. Divisi Corporate Risk Management bekerja sama dan/atau berkoordinasi dengan Department of Internal Audit melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengendalian internal (internal control) dalam berbagai kegiatan operasional Perusahaan. Pengendalian internal di lingkungan Indonesia Power terus dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perusahaan maupun regulasi yang berlaku.

4. Conducting monitoring and evaluation, such as through: (a) Supervision of all management levels in the Company; (b) Accountability and assessment systems that enable the evaluation of all Management personnel and organizational units in the Company; (c) Implementation of supervision through internal audit by IAD; (d) Implementation of supervision through examination by independent party, such as Public Accounting Firm; (e) Supervision by the Board of Commissioners of all management activities carried out by the Board of Directors, including supervision by Audit Committee and Risk Management Committee.

The Board of Commissioners supervises and provides advices related to adequacy and fairness in the preparation of financial statements and risk management, in consideration of the prudential principle and with assistance from the Audit Committee and Risk Management Committee. Meanwhile, the Board of Directors implements internal control system through consistent implementation of Company policies and procedures and complies with applicable regulations, in relation to Indonesia Power's business activities, risk management implementation, strategic planning, clear duty assignment and delegation of authority, as well as adequate accounting policy. The Division of Corporate Risk Management cooperates and/or coordinates with the Department of Internal Audit to improve internal control in different operational activities within the Company. Internal control in Indonesia Power is continuously evaluated to keep up with the Company's business development and applicable regulations.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluation of Internal Control System Effectiveness

Indonesia Power secara berkesinambungan melakukan evaluasi efektivitas penerapan sistem pengendalian internal atas 5 (lima) komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring yang dilakukan oleh pihak independen. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa selama tahun 2021, sistem pengendalian internal Perusahaan telah berjalan efektif dalam mendukung kinerja operasional dan keuangan.

Selain itu, Indonesia Power juga telah melakukan evaluasi sistem pengendalian Internal yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal Indonesia Power sebagai perangkat untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis yakni efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan pada hukum dan peraturan, serta laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Indonesia Power continuously evaluates the effectiveness of the internal control system implementation by observing five (5) components: control environment, risk assessment, control activity, information and communication, and monitoring by independent party. The result of the evaluation indicated that throughout 2021, the Company's internal control system was proven effective in supporting operational and financial performance.

Indonesia Power has also evaluated the internal control system evaluation performed by the Department of Internal Audit that aims to assist the Company in accomplishing the business objectives of operational effectiveness and efficiency, compliance with the laws and regulations, and accountable financial statements.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
INTERNAL CONTROL SYSTEM

Evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Audit Internal Indonesia Power berlandaskan pada Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Departemen Audit Internal Indonesia Power yaitu seperti dengan melakukan audit operasional di seluruh area operasi Perusahaan, kegiatan konsultasi, *monitoring* tindak lanjut temuan dan aktivitas lainnya sebagaimana dijelaskan pada bab Audit Internal - Laporan Pelaksanaan Tugas Department of Internal Audit Tahun 2021 dalam Laporan Tahunan.

The evaluation by the Department of Internal Audit was based on the Annual Audit Work Program of the Department of Internal Audit, i.e. By performing operational audit across the Company's operational areas, consulting activities, monitoring of follow-up on findings, and other activities specified in the Chapter of Internal Audit - Report of Department of Internal Audit Activity Implementation in 2021 of this Annual Report.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Sukses Kelola Manajemen Risiko, Indonesia Power Raih 4 (empat) Gelar Bergengsi di Ajang TOP GRC *Awards* 2021 dengan **level bintang lima, *TOP Leader The Most Committed GRC Leader*** 2021 yang diberikan kepada M. Ahsin Sidqi selaku Direktur Utama Indonesia Power, ***The High Performing Board of Commissioners on*** GRC 2021 dan terakhir meraih penghargaan kategori khusus yakni ***Special Appreciation on Applications to support GRC Implementation.***

Successful in Risk Management, Indonesia Power Brought Home 4 Prestigious Titles at the TOP GRC Awards 2021 which include five-star level, TOP Leader - The Most Committed GRC Leader 2021 awarded to M. Ahsin Sidqi, Indonesia Power President Director, The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021, and a special category award, Special Appreciation on Applications to support GRC Implementation.



Dalam pelaksanaannya, Kegiatan *TOP GRC Awards* ini menilai penerapan GCG, manajemen risiko, dan kepatuhan, yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran dan kinerja bisnis Indonesia Power. Ini menandakan bahwa Indonesia Power sebagai Pemenang TOP GRC Awards 2021, merupakan Perusahaan dengan kinerja bisnis yang tumbuh berkelanjutan, dengan didasarkan pada implementasi GRC yang baik, efektif, dan berkualitas.

The TOP GRC Awards assessed the implementation of GCG, risk management, and compliance, relative to the achievement of business performance and goals of Indonesia Power. This signifies that, as a winner in the TOP GRC Awards 2021, Indonesia Power has a sustainably growing business performance, based on good, effective, and quality GRC implementation.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko Yang Diterapkan Indonesia Power

Overview of Risk Management System at Indonesia Power

Indonesia Power senantiasa berupaya menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memastikan pencapaian Visi dan Misi Perusahaan. Kebijakan ini diterapkan guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan memastikan pencapaian nilai bagi *Stakeholders*.

Penerapan manajemen risiko di Indonesia Power berorientasi pada konsep *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 138.K./010/IP/2021 Tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi tanggal 30 Desember 2021 sebagai pembaharuan dari Surat Keputusan Direksi No. 193.K./010/IP/2018 Tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Korporat (ERM) tanggal 20 Desember 2018 dengan mengacu pada ISO 31000:2018.

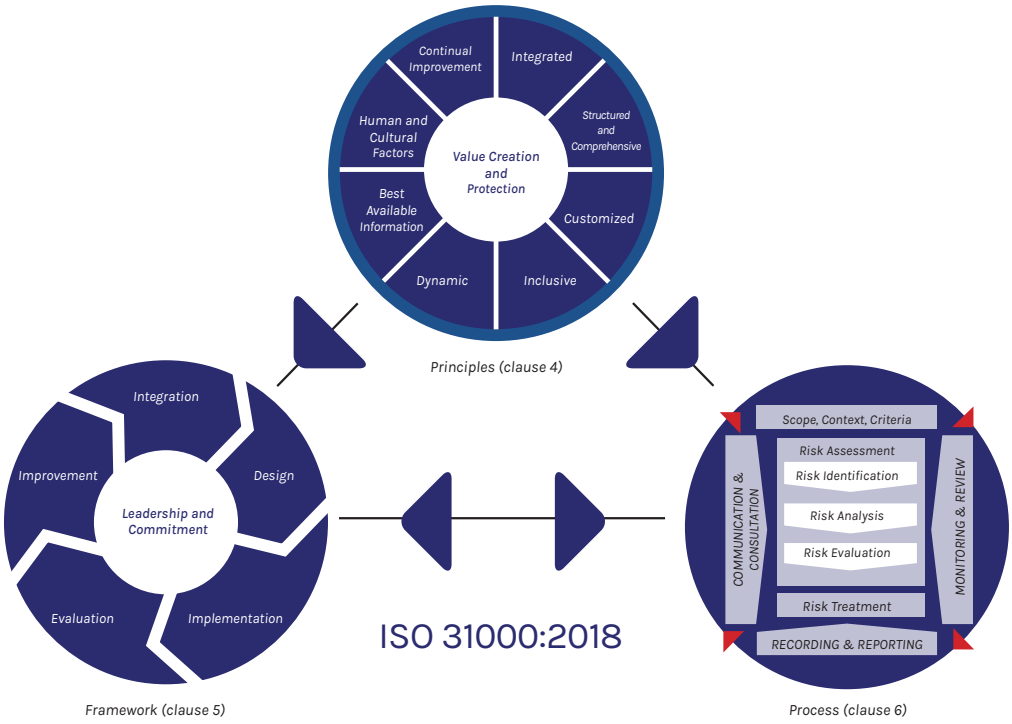
ISO 31000 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas 3 (tiga) elemen: prinsip (*principle*), kerangka kerja (*framework*), dan proses (*process*). Prinsip manajemen risiko adalah dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Kerangka kerja adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Proses adalah aktivitas pengelolaan risiko yang berurutan dan saling terkait. Berdasarkan ISO 31000:2018, arsitektur manajemen risiko digambarkan sebagai berikut:

Indonesia Power always implements an Integrated Risk Management to ensure the achievement of the Company's Vision and Mission. The policy was implemented to actualize a good corporate governance and ensure the achievement of values for the stakeholders.

Risk management implementation at Indonesia Power refers to Enterprise Risk Management (ERM) concept as stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 138.K./010/IP/2021 dated December 30, 2021 on Integrated Risk Management Guidelines as the update for the Decree of the Board of Directors No. 193.K./010/IP/2018 dated December 20, 2018 on Enterprise Risk Management (ERM) Implementation which refers to ISO 31000:2018.

ISO 31000 is a risk management implementation guide which consists of three (3) elements, i.e. Principle, framework, and process. Risk management principle is the foundation/philosophy for risk management practice. Framework concerns about organization-wide, structured and systematic risk management. Process means a set of sequential and interrelated risk management activities. The risk management architecture based on ISO 31000:2018 are as follows:

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT



Untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi, dan Sasaran Indonesia Power serta memberikan panduan dalam implementasi yang terarah, Indonesia Power telah menyusun *Roadmap* Manajemen Risiko 2020- 2024.

To deliver its Vision, Mission, and Goals while guiding a directed implementation, Indonesia Power has prepared Risk Management Roadmap 2020-2024.

Roadmap Manajemen Risiko
Risk Management Roadmap

Wujud Komitmen Indonesia Power dalam pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Perusahaan, Indonesia Power telah memiliki *Roadmap* Manajemen Risiko untuk periode 2020-2024 yang disusun berdasarkan penerapan manajemen risiko berbasis *governance*, yang mengklasifikasikan 3 (tiga) aspek dalam proses implementasi manajemen risiko, yaitu:

1. Aspek struktural, yaitu aspek yang memastikan arah penerapan, struktur organisasi, penerapan dan akuntabilitas pelaksanaan manajemen risiko dalam organisasi, penyediaan sumber daya dan sebagainya;
2. Aspek operasional, yaitu aspek yang menunjukkan tahapan proses implementasi yang sistematis dan terarah, mulai dari penyusunan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan, briefing untuk Dewan Komisaris, Direktur dan *Senior Leader,* serta pelatihan para pemangku risiko hingga penerapannya;

The Risk Management Roadmap 2020-2024 demonstrates Indonesia Power's commitment to internal risk management. The roadmap was prepared based on governance-based risk management which classifies three (3) risk management implementation processes, namely:

1. Structural aspect, i.e. an aspect ensuring risk management direction, organizational structure, implementation, and accountability in the organization, provision of resource, etc.

2. Operational aspect, i.e. an aspect indicating stages in the systematic and directed implementation process, from development of Corporate Risk Management Guidelines to briefing for the Board of Commissioners, Board of Directors, and Senior Leaders, as well as trainings preparation and implementation for risk holders.

3. Aspek perawatan, yaitu aspek yang memastikan adanya upaya menjaga efektivitas penerapan dan perbaikan yang berkesinambungan melalui *monitoring* dan *review* serta *maturity level assessment* manajemen risiko.

Dengan adanya *Roadmap* Manajemen Risiko diharapkan langkah-langkah dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan akan lebih terarah. Berikut *Roadmap* Manajemen Risiko Indonesia Power tahun 2020–2024:

3. Maintenance aspect, i.e. an aspect ensuring the efforts to maintain the effectiveness of continuous implementation and improvement through monitoring and review, as well as risk management maturity level assessment.

With Risk Management Roadmap in place, it is expected that the Company's risk management planning and implementation steps are well-oriented. The following is Indonesia Power Risk Management Roadmap 2020-2024:

Roadmap Manajemen Risiko Indonesia Power tahun 2020 – 2024
Indonesia Power Risk Management Roadmap 2020-2024



Kebijakan dan Sistem Manajemen Risiko Indonesia Power
Risk Management Policy and System at Indonesia Power

Dalam menjalankan tugas dan perannya, Divisi Corporate Risk Management mengacu pada 3 (tiga) ketentuan yaitu:

1. ISO 31000:2018 yang terdiri dari Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka Kerja Manajemen Risiko dan Proses Manajemen Risiko;
2. Surat Keputusan Direksi No. 138.K./010/IP/2021 Tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT Indonesia Power tanggal 30 Desember 2021 sebagai pembaharuan dari Surat Keputusan Direksi No. 193.K./010/IP/2018 Tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Korporat (ERM) tanggal 20 Desember 2018;
3. Surat Keputusan Direksi No. 030.K/010/IP/2019 tentang Peningkatan *Risk Awareness* dan *Risk Culture* di Lingkungan Indonesia Power tanggal 12 Maret 2019; dan
4. Surat Edaran Direksi No. 12.E/012/IP/2021 Tentang Taksonomi Risiko PT Indonesia Power tanggal 10 Juni 2021.
5. Buku *Practical Guide for Corporate Risk Management* diterbitkan pada September 2020.

The Corporate Risk Management Division, in assuming its duties and responsibilities, refers to 3 (three) provisions:

1. ISO 31000:2018 which consists of Risk Management Principles, Risk Management Framework, and Risk Management Process;
2. Decree of the Board of Directors No. 138.K./010/IP/2021 dated December 30, 2021 on PT Indonesia Power Integrated Risk Management Guidelines as the update for the Decree of the Board of Directors No. 193.K./010/IP/2018 dated December 20, 2018 on Enterprise Risk Management (ERM) Implementation Policy;
3. Decree of the Board of Directors No. 030.K/010/IP/2019 dated March 12, 2019 on Risk Awareness and Risk Culture Enhancement in PT Indonesia Power; and
4. Circular of the Board of Directors No. 12.E/012/IP/2021 dated June 10, 2021 on PT Indonesia Power Risk Taxonomy.
5. The book 'Practical Guide for Corporate Risk Management' was published in September 2020.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Tugas Dan Tanggung Jawab Utama Pengelola Manajemen Risiko
Duties and Responsibilities of Risk Management Group

Bentuk mandat dan komitmen dalam Penerapan Manajemen Risiko Indonesia Power dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip, penjabaran tugas pokok dan tanggung jawab utama pengelolaan risiko di setiap level organisasi mulai dari pemilik risiko sampai dengan Dewan Komisaris beserta Komite. Berikut pembagian tugas pengawasan dan pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Indonesia Power berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 138.K./010/IP/2021 Tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko Terintegrasi PT Indonesia Power tanggal 30 Desember 2021 :

The mandate of and commitment to Risk Management implementation in Indonesia Power are manifested based on the principles, description of core duties, and main responsibilities of risk management in all organizational levels of the Company, from the risk owner to the Board of Commissioners and Committees. The followings are the description of duties for monitoring and managing risk management within Indonesia Power as set out in the Decree of the Board of Directors No. 138.K/010/IP/2021 dated December 30, 2021 on PT Indonesia Power Integrated Risk Management Guidelines:

Pihak/Pengelola Key Party/Key Management	Pokok dan Tanggung Jawab Utama	Main Principal and Key Responsibilities
Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Mengawasi pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. - Memastikan adanya upaya pengawasan yang efektif, proaktif dan berkesinambungan atas berlangsungnya pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat.	- Supervises implementation of risk management at corporate level. - Ensures effective, proactive, and continuous supervision of risk management implementation at corporate level.
Dewan Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee Board	- Mengawasi penerapan manajemen risiko korporat secara efektif, sesuai dengan Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Korporat yang berlaku	- Supervises corporate risk management implementation effectively, in accordance with the prevailing Corporate Risk Management Implementation Policy.
Direksi Board of Directors	- Memastikan terbangunnya sistem pengelolaan manajemen risiko korporat. - Memastikan tersedianya profil risiko korporat. - Penanggung jawab utama pelaksanaan pengelolaan risiko di tingkat korporat. - Memastikan keberlangsungan pelaksanaan pengelolaan risiko perusahaan secara efektif, proaktif dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan dan Kebijakan yang berlaku serta elemen tata kelola Manajemen Risiko Korporat (kriteria dampak dan kemungkinan, format peta risiko, standar respon risiko, kebijakan Manajemen Risiko). - Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan manajemen risiko (SDM, finansial serta infrastruktur pendukung lainnya) - Sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan risiko di tingkat korporat.	- Ensures the establishment of a corporate risk management system. - Ensures the availability of corporate risk profile. - Acts as the main party in charge of risk management implementation at corporate level. - Ensures sustainability of corporate risk management implementation in an effective, proactive, and continuous manner in accordance with the applicable Regulations, Policies, and Corporate Risk Management governance elements (impact and possibility criteria, risk map format, risk response standards, Risk Management policy). - Ensures the availability of vital resources for risk management implementation (HC, finance, and other supporting infrastructure). - Acts as decision maker in risk management implementation at corporate level.
Direktur Pembina Manajemen Risiko (DPMR) Director of Risk Management Development	- Berperan sebagai anggota Direksi pemegang mandat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan pengelolaan Risiko perusahaan - Berperan sebagai pembina Satuan Kerja Manajemen Risiko di Kantor Pusat maupun Fungsi Manajemen Risiko di Unit Induk/Pusat-Pusat	- Acts as the Director granted the General Meeting of Shareholders (GMS)'s mandate of risk management implementation at the Company. - Serves as Risk Management Work Unit manager at the Head Office and Risk Management Function manager at Parent Unit/Centers.

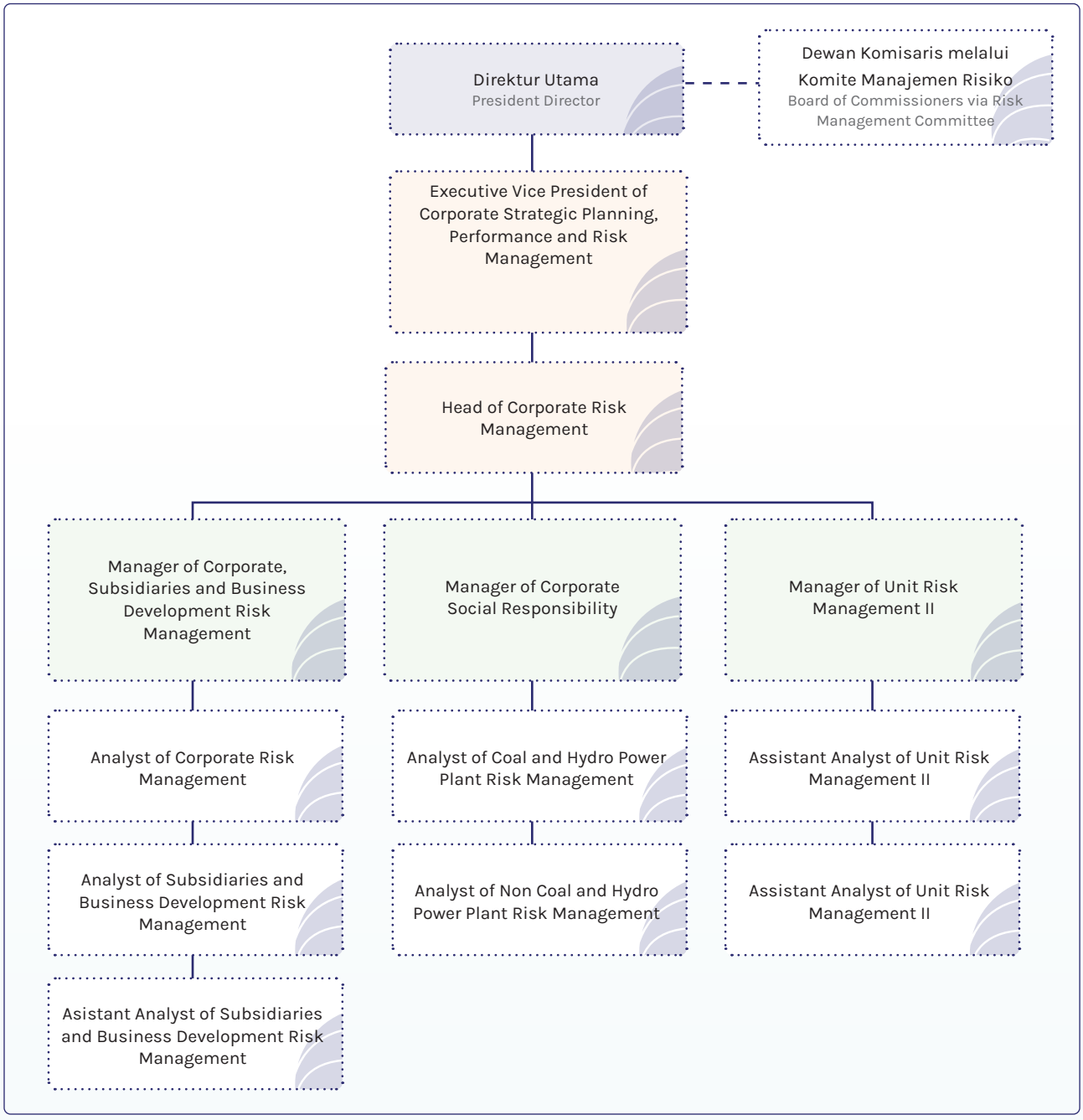
Pihak/Pengelola Key Party/Key Management	Pokok dan Tanggung Jawab Utama	Main Principal and Key Responsibilities
Bidang Manajemen Risiko Risk Management Department	- Sebagai penanggung jawab penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi perusahaan sesuai dengan desain kerangka kerja dan tata kelola Risiko, beserta upaya pengembangannya. - Sebagai pendamping dan *Checker/Reviewer,* dan *Approval* sesuai mekanisme pendelegasian wewenang terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko perusahaan. - Sebagai pemberi masukan terhadap penilaian Risiko maupun tindak lanjut Risiko yang dijalankan oleh *Risk Leader* dan *Risk Champion* di Unit Kerja dan Kantor Pusat. - Melakukan *update* dan perbaikan *tools*, aplikasi, dashboard Manajemen Risiko	- Holds responsibility for the Company's Integrated Risk Management according to Risk Management framework and governance designs and development. - Assists Checker/Reviewer and Approver, as set out in the authority delegation mechanism, in risk assessment and risk follow-up in the Company. - Provides inputs for risk assessment and follow-up run by Risk Leaders and Risk Champions in Work Units and Head Office. - Updates and enhances Risk Management tools, applications, and dashboard.
Risk Officer	- Mengoordinasikan dan memfasilitasi proses Manajemen Risiko Terintegrasi (identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, pendokumentasian, pemantauan dan pelaporan) yang dilakukan *Risk Leader* pada bidang kerjanya. - Berperan sebagai penghubung dalam proses komunikasi dan konsultasi dengan Bidang Manajemen Risiko dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.	- Coordinates and facilitates Integrated Risk Management process (identification, analysis, evaluation, treatment, documentation, monitoring, and reporting) performed by Risk Leaders in their area of expertise. - Liaises for the communication and consultation with Risk Management Department in Integrated Risk Management implementation.
Pemilik Risiko Risk Owner	- Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) secara efektif, proaktif dan berkesinambungan pada area tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka melakukan suatu upaya pemastian atas pencapaian sasaran perusahaan di tingkatnya masing-masing. - Melakukan pengelolaan risiko (berikut pelaporannya) yang dihadapi secara efektif, proaktif dan berkesinambungan.	- Holds responsibility for risk management implementation (and the reporting) in an effective, proactive, and continuous manner in their respective duty and responsibility area, to ensure the achievement of Company's goals at their respective levels. - Carries out risk management (and its reporting) in an effective, proactive, and continuous manner.
Departemen Audit Internal (Dept. IAD) Internal Audit Department (IAD)	- Berperan dalam melaksanakan fungsi audit internal Indonesia Power. - Sebagai *reviewer* terhadap pelaksanaan penerapan manajemen Risiko terintegrasi dan praktik pengelolaan Risiko Perusahaan.	- Assumes the internal audit function at PT Indonesia Power. - Functions as reviewer of integrated risk management implementation and risk management practices in the Company.
Risk Leader	- Sebagai *reviewer* dan approver atas: 1) penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal; 2) penilaian dan tindak lanjut Profil Risiko pada Unit Kerja dan Kantor Pusatnya; dan - *Risk Leader* Kantor Pusat dan Unit Kerja bertanggung jawab kepada Direksi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pengendalian internal pada entitas kerjanya.	- Functions as the reviewer of and approver for: 1) assessment and follow-up on Risk Analysis in critical decision making process; and 2) assessment and follow-up on Risk Profile at Work Units and Head Office. - Risk Leaders at the Head Office and Units answer to the Board of Directors for the effectiveness of the Integrated Risk Management implementation and internal control at each of their work entity.
Risk Champion	- Berperan sebagai *Marker* atas : 1) penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko dalam proses pengambilan keputusan kritikal. 2) penilaian dan tindak lanjut Kajian Risiko pada Unit Kerja; dan 3) pelaporan Risiko kepada *Risk Leader.* - *Risk Champion* bertanggung jawab kepada *Risk Leader* masing-masing atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi serta pengendalian internal pada Unit Kerja.	- Functions as the Marker for: 1) assessment and follow-up on Risk Analysis in critical decision making process; 2) assessment and follow-up on Risk Analysis at Work Units; and 3) risk reporting to Risk Leader. - Risk Champions answer to each of their Risk Leaders for the effectiveness of the Integrated Risk Management implementation and internal control at Work Units.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Indonesia Power

Indonesia Power Risk Management Organizational Structure

Fungsi Manajemen Risiko Indonesia Power dijalankan oleh Department Of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management (SPR) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 090.K/010/IP/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Bagan Susunan Jabatan, Tingkat Jabatan dan Formasi Jabatan pada Departemen SPR. Berikut adalah struktur organisasi pada Departemen SPR Indonesia Power:

Risk Management function at Indonesia Power is carried out by the Department of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management (SPR) based on the Decree of the Board of Directors No. 090.K/010/IP/2019 dated June 21, 2019 on Schemes of Structure, Level, and Formation of Positions of SPR Department. The following is SPR Department organizational structure:



Kedudukan Department SPR dalam Struktur Organisasi

Position of SPR Department in Organizational Structure

Sejalan dengan Struktur Organisasi Perusahaan, Department SPR dipimpin oleh seorang EVP SPR yang kedudukannya berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi langsung ke Dewan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko. Dalam pelaksanaan tugasnya EVP SPR dibantu oleh **Group of Corporate Risk Management (GRO CRM).**

In line with the Company's Organizational Structure, the SPR Department is led by an EVP SPR who answers to the President Director and has a direct line of communication with the Board of Commissioners through Risk Management Committee. EVP SPR, in implementing its duties, is assisted by the Group of Corporate Risk Management (GRO CRM).

Alur Pengangkatan dan Pemberhentian EVP SPR

EVP SPR Appointment and Discharge Process

Direksi menyampaikan Usulan Calon EVP SPR Kepada Dewan Komisaris
Board of Directors proposes EVP SPR Candidate(s) to the Board of Commissioners

→

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Usulan Direksi tersebut
Board of Commissioners approves the Board of Directors' Proposal

→

Penetapan Pengangkatan/ Pemberhentian melalui Surat Keputusan Direksi
Determination of Appointment/ Dismissal through the Decree of the Board of Directors

EVP SPR diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan. Saat ini, EPV SPR Indonesia Power dijabat oleh Sdr. Tarwaji berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Indonesia Power No.839.K/020/IP/2019 tanggal 01 Agustus 2019.

EVP SPR is appointed and dismissed by the President Director under the Company's internal mechanism and with approval from the Board of Commissioners, in consideration of educational qualification, work experience, and other qualifications as per Company's business needs. The current EVP SPR is Mr. Tarwaji who was appointed under the Decree of the Board of Directors of PT Indonesia Power No. 839.K/020/IP/2019 dated August 1, 2019.



MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT



Tarwaji
EVP SPR Profile

Warga Negara Indonesia. Lahir di Pati tanggal 22 Mei 1968. Berdomisili di Jakarta Indonesia, Lulusan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Diponegoro Tahun 1993, Magister Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung Tahun 2012 dan Doktor Teknik Mesin dari Universitas Diponegoro 2021.

Riwayat Pekerjaan:
Sebelum menjabat sebagai Executive Vice President of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management, beberapa jabatan lain yang pernah dipegangnya adalah PLS. General Manager Unit Jasa Pemeliharaan (April 2019 - Juli 2019); Kepala Bidang Perencanaan Korporat Kantor Pusat (April 2017 - April 2019); General Manager Unit Pembangkitan Semarang (Mei 2014 - April 2017); General Manager Unit Jasa Operasi dan Pemeliharaan PLTU Banten 3 Lontar (Februari 2014 - Mei 2014) dan Deputy GM Bidang Teknik Unit Jasa Pemeliharaan (Juni 2012 - Februari 2014).

Pelatihan Tahun 2021:
LIGAT dari Andrew Tani & Co dan *Executive Education* 1 (EE1)

Sertifikasi
Qualified Risk Management Professional (QRMP)

An Indonesian Citizen Born in Pati on May 22, 1968. Domiciled in Jakarta, Indonesia; The holder of Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Diponegoro University (1993), Master's Degree in Mechanical Engineering from Bandung Institute of Technology (2021), and Doctorate Degree in Mechanical Engineering from Diponegoro University (2021).

Professional Background:
Prior to serving as Executive Vice President of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management Department, he assumed several positions, among others were Acting General Manager of Maintenance Service Unit (April–July 2019), Head of Corporate Planning Department at the Head Office (April 2017–April 2019), General Manager of Semarang PGU (May 2014–April 2017), General Manager of SPP Banten 3 Lontar Operation and Maintenance Service Unit (February–May 2014), and Deputy GM of Technical Operation MSU (June 2012–February 2014).

Trainings in 2021:
LIGAT from Andrew Tani & Co and Executive Education 1 (EE1)

Certifications
Qualified Risk Management Professional (QRMP)

Jumlah Personil dan Kualifikasi Group Of CRM
Group of CRM Personnel and Qualification

Sejalan dengan Struktur Organisasi Departemen SPR, EVP SPR dibantu oleh Group of Corporate Risk Management (GRO CRM) yang dikepalai oleh Seorang Head of Corporate Risk Management dengan membawahi 3 (tiga) Manager, 4 (empat) Analyst dan 3 (tiga) Assistant Analyst. Sehingga Jumlah Personil Bidang SDM CRM Per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 12 (dua belas) orang.

Secara umum jumlah Personil dan Kualifikasi Personil Bidang CRM dipandang telah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas audit internal dibandingkan dengan objek audit yang direncanakan. Berikut adalah Jumlah Personil dan Daftar Kualifikasi Bidang CRM Indonesia Power

In accordance with the SPR Department Organizational Structure, the EVP SPR is assisted by the Group of Corporate Risk Management (GRO CRM) which is led by the Head of Corporate Risk Management and membered by three (3) Managers, four (4) Analysts, and three (3) Assistant Analysts. As of December 31, 2021, the CRM consisted of 12 (twelve) personnel.

In general, the number and qualification of CRM personnel are considered adequate in supporting the implementation of internal audit duties relative to the planned audit objects. The following table lists the CRM personnel and their qualifications:

Jabatan Jabatan	Jumlah SDM Bidang CRM Jumlah SDM Bidang CRM	Informasi Riwayat Pendidikan Education History Information			
		Tingkat Degree	Bidang Studi Subject	Lembaga Institution	Tahun Year
EPV of Corporate Strategic Planning, Performance and Risk Management (EVP SPR)	1	- Sarjana - Magister - Doctor - Bachelor - Master - Doctor	Teknik Mesin Mechanical Engineering	- Universitas Diponegoro - Institut Teknologi Bandung - Universitas Diponegoro - Diponegoro University - Bandung Institute of Technology - Diponegoro University	- 1993 - 2012 - 2021
Head of Corporate Risk Management (CRM)	1	- Sarjana - Magister - Bachelor - Master	Informatika Informatics	- Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya - Institut Teknologi Sepuluh Nopember - Adhi Tama Institute of Technology Surabaya - Sepuluh Nopember Institute of Technology	- 1995 - 2002
Manager of Corporate Subsidiaries & Business Development Risk Management	1	Sarjana Bachelor	Teknik Elektro Electrical Engineering	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sepuluh Nopember Institute of Technology	2012
Manager of Unit Risk Management I	1	Sarjana Bachelor	Teknik Mesin Mechanical Engineering	Universitas Indonesia University of Indonesia	2001
Manager of Unit Risk Management II	1	Sarjana Bachelor	Teknik Elektro Electrical Engineering	Universitas Brawijaya Brawijaya University	2005
Analyst of Corporate Risk Management	1	Diploma III Diploma 3 (Associate Degree)	Teknik Elektro Electrical Engineering	Politeknik Negeri Semarang Semarang State Polytechnics	2006
Analyst of Coal and Hydro Power Plant Risk Management	1	- Diploma III - Sarjana - Diploma 3 (Associate Degree) - Bachelor	- Teknik Listrik - Teknik Elektro - Electrical Engineering - Electrical Engineering	- Politeknik Negeri Bandung - Universitas Mercubuana - Bandung State Polytechnics - Mercubuana University	- 2007 - 2012
Analyst of Non Coal and Non Hydro Power Plant Risk Management	1	Sarjana Bachelor	Teknik Industri Industrial Engineering	Universitas Andalas Andalas University	2008
Analyst of Subsidiaries & Business Development Risk Management	1	Sarjana Bachelor	Teknik Mesin Mechanical Engineering	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	2007
Assistant Analyst of Subsidiaries & Business Development Risk Management	1	Sarjana Bachelor	Elektronika dan Instrumentasi Electronics and Instrumentation	Universitas Gadjah Mada Gadjah Mada University	2011
Assistant Analyst of Unit Risk Management 2	1	- Diploma III - Sarjana - Diploma 3 (Associate Degree) - Bachelor	- Teknik Listrik - Teknik Industri - Electrical Engineering - Industrial Engineering	- Politeknik Negeri Jakarta - Universitas Pancasila - Jakarta State Polytechnics - Pancasila University	- 2009 - 2014
Assistant Analyst of Unit Risk Management 2	1	Sarjana Bachelor	Teknik Elektro Electrical Engineering	- Institut Teknologi PLN - PLN Institute of Technology	2016
Total	**12 Orang** Personnel				

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Sertifikasi Profesi Manajemen Indonesia Power
Indonesia Power Management Professional Certification

Dalam rangka terus meningkatkan mutu dan kompetensi pengelolaan risiko, Perusahaan melakukan program pengembangan kompetensi manajemen risiko secara sistematis dan berjenjang. Sampai dengan tahun 2021, sertifikasi profesi Manajemen Risiko Indonesia Power adalah sebagai berikut:

For continuous risk management quality and competency development, the Company arranges systematic and tiered risk management competency development. As of 2021, these were Risk Management professional certifications obtained by Indonesia Power:

Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko
Risk Management Professional Certifications

No	Nama Sertifikasi Name of Certification	Jumlah Pegawai Indonesia Power yang Tersertifikasi Certified Indonesia Power Employee	Jumlah Pegawai GRO CRM yang Tersertifikasi Certified GRO CRM Employee
1	*Qualified Risk Governance Professional* (QRGP)	5	-
2	*Qualified Risk Management Professional* (QRMP)	119	8
3	*Qualified Risk Management Analyst* (QRMA)	17	2
4	*Qualified Risk Management Officer* (QRMO)	33	-
5	*Enterprise Risk Management Associate Profesional* (ERMAP)	2	1

Penerapan dan Pengembangan Manajemen Risiko di Lingkungan Indonesia Power
Risk Management Implementation and Development in Indonesia Power

Indonesia Power terus berupaya mengembangkan infrastruktur dan budaya risiko yang kuat dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjaga reputasi Perusahaan. Penerapan manajemen risiko menjadi salah satu pondasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dengan return yang optimal.

Indonesia Power constantly seeks to develop solid infrastructure and risk culture aiming at providing added value for all stakeholders, as well as maintaining the Company's reputation. Risk management implementation is among the foundations in supporting a sound and sustainable business growth with optimal returns.

Salah satu pengembangan tersebut adalah membangun aplikasi pro-RBA (Risk Based Audit) berbasis web pada tahun 2014 dan mulai dioperasikan sejak awal tahun 2015, yang kemudian dikembangkan menjadi aplikasi IRMA (*Integrated Risk Management Application*) di tahun 2017. Aplikasi ini bertujuan agar pengelolaan risiko berjalan efektif dengan cara otomatisasi proses penyusunan kajian manajemen risiko. Aplikasi ini memberikan beberapa kemudahan diantaranya :

It among others was realized through the development of web-based Pro-RBA (Risk-Based Audit) application in 2014 whose operation began in 2015, with later development into Integrated Risk Management Application (IRMA) in 2017. The application aims to realize an effective risk management through the automation of risk management analysis preparation. The application offers some conveniences:

Tujuan aplikasi IRMA Objectives of IRMA	1. Memastikan pengelolaan risiko (identifikasi analisa perlakuan risiko, *monitoring* dan evaluasi) dilakukan secara digital dan terintegrasi. 2. Memberikan Informasi kepada seluruh *Stakeholders* khususnya Direksi terkait dengan Profil Risiko Korporat dan monitoringnya.	1. Ensuring risk management (risk treatment analysis identification, monitoring, and evaluation) is run digitally and in integration. 2. Providing information to all stakeholders, particularly the Board of Directors, on Corporate Risk Profile and its monitoring.
Kemudahan dalam menggunakan aplikasi IRMA Ease of use of IRMA	1. Taksonomi risiko Taksonomi risiko memungkinkan keseragaman dalam pengungkapan deskripsi risiko. Taksonomi risiko bersifat fleksibel karena memberikan ruang untuk menuangkan penyebab dari risiko yang mungkin berbeda-beda; 2. Pembuatan Profil Risiko Seluruh Risiko yang dihadapi oleh Perusahaan yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya sasaran Perusahaan dipetakan oleh setiap pemilik risiko/*risk owner*. Setiap pemilik risiko menetapkan risikonya masing-masing dan melakukan analisis risiko sampai dengan rencana mitigasi risiko. Rencana mitigasi risiko ini merupakan aksi nyata program kerja di tahun berikutnya. Seluruh kegiatan pembuatan profil risiko dilakukan di aplikasi IRMA dan dimonitor secara berkelanjutan progress mitigasinya. 3. Pembuatan Dokumen Manajemen Risiko (DMR) Seluruh perencanaan program kerja Unit maupun Korporat dituangkan dalam DMR secara online sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing divisi. Proses pembuatan DMR menggunakan aplikasi sehingga mempermudah dalam pelaksanaan *monitoring* dan menjamin keamanan data yang ada sekaligus sebagai salah satu program *paperless* dari sebelumnya menggunakan dokumen fisik.	1. Risk taxonomy Risk Taxonomy enables uniformity in the disclosure of risk description. Risk Taxonomy is flexible, giving room for elaboration of different causes of risk. 2. Risk Profiling All Risks exposed to the Company, which may prevent the attainment of Company objectives, are mapped by the respective risk owners. Each risk owner determines their respective risk and performs from risk analysis to risk mitigation planning. Risk mitigation plan is a real action for the subsequent year's work program. All risk profiling activities are carried out in IRMA and mitigation progress is monitored continuously. 3. Risk Management Document (RMD) Preparation The entire planning of work program at Work Unit and Corporate level are described online in the RMD according to the duties and responsibilities of each division. RMD preparation utilizes an application that helps monitoring and guarantying data security, also implementing the paperless campaign in order to reduce the use of paper documents.

Disamping itu, Indonesia Power juga telah menerapkan ISO 22301 tentang *Business Continuity Management* sampai dengan sertifikasi ISO 22301 sejak tahun 2017. ISO 22301 adalah standar internasional yang menentukan persyaratan untuk menerapkan *Business Continuity Management System* (BCMS). Standar ini memberikan panduan bagi organisasi untuk membangun dan terus meningkatkan sebuah sistem kelangsungan bisnis yang memungkinkan mereka untuk mengurangi terjadinya suatu peristiwa yang mengganggu, merespons secara efektif ketika terjadi gangguan, dan cepat pulih jika kasus peristiwa serupa itu muncul.

Since 2017, Indonesia Power has also been implementing ISO 22301 Business Continuity Management. ISO 22301 is an international standard that sets out the requirements for Business Continuity Management System (BCMS) implementation. The standard guides organizations to develop and improve a business continuity system that enables them to reduce the occurrence of disruptions, respond effectively when disruption occurs, and recover quickly when similar event reoccurs.

Profil dan Peta Risiko
Risk Profile and Map

Profil risiko disusun berdasarkan pada sasaran, faktor internal, eksternal dan fokus Perusahaan serta telah diselaraskan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2021.

Indonesia Power's risk profile was developed based on its goal, internal and external factors, as well as Company focus. It has been aligned with the Company's Long-Term Plan 2021. In

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Dalam penyusunan profil risiko tersebut, Indonesia Power telah melaksanakan *risk assessment* di semua proses bisnis untuk menggali potensi-potensi risiko dan mengklasifikasikan risiko menjadi peringkat Rendah, Moderat, Tinggi dan Ekstrim.

developing its risk profile, Indonesia Power has conducted risk assessment in all business processes to discover risk potentials and classify these risks into Low, Moderate, High, and Extreme levels.

Profil Risiko Indonesia Power Tahun 2021
Indonesia Power Risk Management Profile for 2021

Peta Control Risk Risk Control Map

Tingkat Kemungkinan Possibility			1 Tidak Signifikan Insignificant	2 Minor	3 Medium	4 Signifikan	5 Malapetaka
	Sangat Besar Very High Possibility	E	Moderat Moderate	Moderat Moderate	Tinggi High 3 12 13 19	Ekstrim Extreme 1 2 6 8	Ekstrim Extreme 9
	Besar High Possibility	D	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High 14 18	Ekstrim Extreme 5 10 11 15 16 17 20	Ekstrim Extreme 4 7
	Sedang Medium Possibility	C	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Tinggi High	Ekstrim Extreme
	Kecil Low Possibility	B	Rendah Low	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Ekstrim Extreme
	Sangat Kecil Very Low Possibility	A	Rendah Low	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Tinggi High
			TINGKAT DAMPAK IMPACT LEVEL				

Peta Residual Risk Residual Risk Map

Tingkat Kemungkinan Possibility			1 Tidak Signifikan Insignificant	2 Minor	3 Medium	4 Signifikan	5 Malapetaka
	Sangat Besar Very High Possibility	E	Moderat Moderate	Moderat Moderate	Tinggi High	Ekstrim Extreme	Ekstrim Extreme
	Besar High Possibility	D	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Ekstrim Extreme	Ekstrim Extreme
	Sedang Medium Possibility	C	Rendah Low	Moderat Moderate 14 15 16	Tinggi High 1 7 9	Tinggi High	Ekstrim Extreme
	Kecil Low Possibility	B	Rendah Low	Rendah Low 17 20	Moderat Moderate 2 3 4 5 6 10 11 12 13 16 18 8	Tinggi High	Ekstrim Extreme
	Sangat Kecil Very Low Possibility	A	Rendah Low	Rendah Low	Moderat Moderate	Tinggi High	Tinggi High
			TINGKAT DAMPAK IMPACT LEVEL				

No.	ID Risk	Risiko Risk
1	**S.3.6.1**	Terancamnya Keberlangsungan Usaha Perusahaan Company's business continuity is threatened
2	**F.15.5.1**	Penurunan Pendapatan Perusahaan dalam Periode Tahun Berjalan Decline in Company's revenues in current year's period
3	**F.15.5.2**	Biaya Pokok Produksi Pembangkitan Energi Listrik Tinggi High power generation production cost
4	**P.8.7.1**	Kesulitan Mencari Pendanaan Proyek dari Lembaga Keuangan Eksternal Difficulty in securing project funding from external financial agencies
5	**P.8.19.1**	Waktu Penyelesaian Pekerjaan Terlambat. Delay in project completion
6	**O.14.1.1**	Terjadi Kecelakaan Kerja Occupational accidents
7	**O.4.1.1**	Belum ada kejelasan energi primer untuk memenuhi kebutuhan masa operasi pembangkit Lack of clarity regarding primary energy to meet power generation operational needs
8	**O.5.5.1**	Terjadi *Outages* atau *Derating* Akibat Ketidaksiapan Peralatan Pembangkit Outages or derating due to power generator equipment unreadiness
9	**O.5.6.1**	Terjadi *Force Outage* atau *Force Derating* Akibat Gangguan Peralatan Pembangkit Forced outages or forced derating due to power generation equipment failures
10	**O.5.7.1**	Penurunan Efisiensi Pembangkit Decline in power generator efficiency
11	**S.3.6.2**	Gagal melakukan pengembangan portofolio bisnis Failure in business portfolio development
12	**F.15.4.1**	Likuiditas perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan pembayaran operasional/ investasi Company liquidity is insufficient to pay for operations/investments
13	**P.8.18.1**	Penyelesaian pengurusan perijinan terlambat Delayed completion of license administration
14	**O.11.1.1**	Jumlah SDM Belum Memenuhi Kebutuhan Perusahaan Inadequate number of HC unable to meet Company requirements
15	**O.11.2.1**	Kompetensi SDM belum sesuai standar kebutuhan Perusahaan HC competencies are below the Company's standard
16	**O.14.1.8**	Terjadi pandemi penyakit The occurrence of pandemics
17	**O.14.2.5**	Kegagalan meraih Proper Failure to earn PROPER rating
18	**O.18.5.1**	Terjadi tuntutan dari *Stakeholder* Lawsuits by stakeholders
19	**O.6.1.1**	Tidak memperoleh jaminan *dispatch* dari regulator sistem No dispatch guarantee from system regulator
20	**O.20.2.2**	Transformasi proses bisnis tidak optimal Non-optimal business process transformation

Risiko yang Dihadapi Perusahaan dan Mitigasinya

Risks Faced by the Company and Their Mitigation

Berdasarkan pengelompokkan dan peta risiko Perusahaan di atas terdapat 20 (dua puluh satu) risiko utama yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan. Selama tahun 2021, Indonesia Power telah melakukan mitigasi guna mengurangi dampak ataupun kerugian yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan sebagaimana tabel dibawah ini:

Based on the above risk classification and map, there are 20 (twenty) main risks that may hinder the Company's performance. Throughout 2021, Indonesia Power carried out the mitigations to reduce any impact or damage that may disrupt Company performance as indicated in the table below:

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Tabel Profil Risiko dan Mitigasi Risiko Indonesia Power Tahun 2021
Table of Indonesia Power's Risk Profile and Risk Mitigation in 2021

No	ID Risk	Jenis Risiko Risk Type	Mitigasi	Description
1	S.3.6.1	Terancamnya Keberlangsungan Usaha Perusahaan Company's business continuity is threatened	• Pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) • Pengembangan *Solar Photovoltaic* (PV) Manufaktur • Pengembangan beberapa PLTA • Pengembangan PLTN Kalbar • Melanjutkan Pengembangan PLTS On Grid Kalbar dan *Off Grid* Kalimantan • Pengembangan PLTS Atap Pada Pelanggan PT PLN (Persero) • Melanjutkan proses pengembangan proyek PLTU Kalbar-2 • Pengembangan PLT *Hybrid* Karimunjawa • Pengembangan Proyek PLT EBT *Hybrid* dengan Konsep *Mini Grids* Tersebar (*Scattered*) di Provinsi Maluku • Pengembangan PLTS *Peaker* Lampung • Pengembangan PLTS Terapung Singkarak • Melanjutkan *Feasibility Study Decommissioning and Rebuild New* Suralaya *Stage* 2 • Melakukan aktivasi dan implementasi *Business Continuity Management System* (BCMS) sesuai dengan *Business Continuity Plan* (BCP) yang telah disusun	• Developing New & Renewable Energy (NRE) Power Plants • Developing Solar Photovoltaic (PV) Manufacturing • Developing some HPPs • Developing NPP West Kalimantan • Continuing the development of On-Grid SoPP West Kalimantan and Off-Grid SoPP Kalimantan • Developing Rooftop SoPP for PT PLN (Persero) Customers • Proceeding SPP West Kalimantan-2 project development process • Developing Hybrid PP Karimunjawa • Developing Hybrid NRE PP Project with the Concept of Scattered Mini Grids in Maluku • Developing Peaker SoPP Lampung • Developing Floating SoPP Singkarak • Continuing Decommissioning Feasibility Study and Rebuild New Suralaya Stage 2 • Activating and implementing Business Continuity Management System (BCMS) according to the prepared Business Continuity Plan (BCP)
2	F.15.5.1	Penurunan Pendapatan Perusahaan dalam Periode Tahun Berjalan Decline in Company's revenues in current year's period	• Program Pengalihan Aset Pembangkit Jasa O&M • Melaksanakan relokasi pembangkit-pembangkit yang handal ke sistem yang membutuhkan • Melakukan Analisa Dampak Kurs Secara Periodik • Optimalisasi proses pengadaan • Penagihan *Shareholder Loan* (SHL) Anak Perusahaan Sesuai Jadwal • Koordinasi aktif dan rekonsiliasi dengan Kontrak Investasi Kolektif • Efek Beragun Aset (KIK EBA) 2-3 bulan sebelum jatuh tempo pembayaran • Melaksanakan pencatatan keluar masuk anggaran yang terpakai dan selalu memonitoring anggaran • Pengawasan terhadap *delivery time* supaya tidak mengalami keterlambatan yang dapat menimbulkan denda dan bisa mengurangi penyerapan anggaran • Mengembangkan skema Jasa O&M *performance based* menjadi skema AMC (*Asset Management Contract*)	• O&M Services Power Plant Asset Transfer Program • Relocating excellent power plants to systems in need • Analyzing Exchange Rate Periodically • Optimizing procurement process • Collecting Subsidiaries' Shareholder Loan (SHL) on time • Actively coordinating and reconciling with Asset-Backed Security Collective Investment Contract • (KIK-EBA) 2-3 months prior to payment maturity date • Recording cash flows and monitoring budget all the time • Supervising delivery time to avoid delay that may result in penalties and reduce budget adsorption • Developing performance-based O&M Services scheme into Asset Management Contract (AMC) scheme

No	ID Risk	Jenis Risiko Risk Type	Mitigasi	Description
3	F.15.5.2	Biaya Pokok Produksi Pembangkitan Energi Listrik Tinggi High power generation production cost	• Melakukan negosiasi kontrak dengan dasar Kajian Legal Dampak Covid 19 Indonesia Power • Meningkatkan kehandalan fungsi peralatan pembangkit • Melengkapi dokumen Instruksi Kerja (IK) dan *Quality Control* (QC) *Overhaul* (OH) • Penggantian Trafo UAT GT Grati PGU	• Conducting negotiation for contracts based on Indonesia Power's Legal Analysis on COVID-19 Impacts • Enhancing power generator equipment reliability • Equipping Work Instruction (IK) and Quality Control (QC) documents for Overhaul (OH) • Replacing Unit Auxiliary Transformer (UAT) and Generator Transformer (GT) at Grati PGU
4	P.8.7.1	Kesulitan Mencari Pendanaan Proyek dari Lembaga Keuangan Eksternal Difficulty in securing project funding from external financial agencies	• Eksekusi SHL dari Pemegang Saham atas penerusan pinjaman - Pendanaan dari KFW untuk Pengembangan Proyek Kamojang • Pendampingan Konsultan Independen untuk review skema pendanaan Perusahaan • Eksekusi SHL dari Pemegang Saham atas penerusan pinjaman – Pendanaan • Credit Agency (ECA) untuk Pengembangan Proyek Tambak Lorok • Mengajukan SHL ke Pemegang Saham melalui Penerusan Pinjaman / SHL (*Shareholder Loan*) PT PLN (Persero) ke Perusahaan untuk Pendanaan EPC MPP dengan kapasitas total 170 MW	• Executing Shareholder Loan (SHL) - Funding from KFW for Kamojang Project Development • Procuring Independent Consultant's assistance for reviewing the Company's funding scheme • Executing Shareholder Loan (SHL) - Funding from • Export Credit Agency (ECA) for Tambak Lorok Project Development • Requesting SHL to Shareholders through PT PLN (Persero)'s Shareholder Loan (SHL) for the Company for funding the Engineering-Procurement-Construction (EPC) of MPP at a total capacity of 170 MW
5	P.8.19.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan Terlambat. Delay in project completion	• Melakukan verifikasi data pada aplikasi *Pro Project Management Office* (PMO) dan kesesuaian progress proyek terkini agar tidak terjadi deviasi data (kroscek *monthly report, S-curve, Project issue, Project Progress*) • *Monitoring* proyek melalui *daily progress*, daily meeting, *microsoft project* dan *monitoring Non Conformity Report* • Menyiapkan *expert* lokal pengganti tenaga *expert* asing • Melaksanakan protokol kesehatan (pengecekan suhu tubuh, penyediaan hand sanitizer dan tempat cuci tangan serta menjaga jarak) di internal MSU (*Maintenance Service Unit*) serta berkoordinasi dan mengikuti peraturan pelaksanaan OH di masing-masing unit • *Monitoring Timeline* ketepatan pengiriman *part*/material serta melakukan koordinasi kepastian dengan *vendor part*/material • Penajaman *scope* (standar dan tambahan) *Overhaul* pada saat P2 dan strategi eksekusi • Pengadaan Peralatan / *Tools* OH	• Verifying data in Pro Project Management Office (PMO) application and conformity of current project's progress to avoid data deviation (crosscheck of monthly report, project issue, project progress) • Overseeing projects via daily progress, daily meetings, Microsoft project, and Non-Conformity Report monitoring • Preparing local experts as replacement for foreign experts • Implementing health protocols (checking body temperature, providing hand sanitizer and handwashing facilities, and keeping distance) at internal Maintenance Service Unit (MSU) and coordinating and complying with OH implementation guidelines in each unit • Monitoring the timeliness of part/material delivery against timeline and coordinating certainty with part/material vendors • Improving details of Overhaul scopes (standard and additional) during P2 and execution strategies • Procuring Overhaul (OH) tools
6	O.14.1.1	Terjadi Kecelakaan Kerja Occupational accidents	• Digitalisasi Proses Bisnis *Health Safety Security (*HSS) • Memonitor kondisi terkini pendemo dari sumber-sumber resmi (pemerintah) • Membuat kebijakan korporat terkait pandemi Covid 19 • Membuat kebijakan K3 yang adaptif dan komprehensif sesuai kondisi masing-masing unit • Implementasi CSMS (*Contractor Safety Management System*) • Memperbaiki rencana Simulasi Tanggap Darurat Dam *Break* di Area PLTA • Pelatihan dan Sertifikasi Peralatan & SDM • Investasi Peralatan & sistem K3 • Revitalisasi Peralatan K3	• Conducting Health Safety Security (HSS) business process digitalization • Monitoring the current demonstration situation from official sources (the government) • Preparing corporate policy regarding COVID-19 pandemics • Preparing adaptable and comprehensive OHS policy according to the condition at each unit • Implementing Contractor Safety Management System (CSMS) • Revising Dam Break Disaster Response Simulation plan for HPP areas • Arranging HC & equipment training & certification • Investing in OHS equipment and system • Refurbishing OHS equipment

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No	ID Risk	Jenis Risiko Risk Type	Mitigasi	Description
7	0.4.1.1	Belum ada kejelasan energi primer untuk memenuhi kebutuhan masa operasi pembangkit Lack of clarity regarding primary energy to meet power generation operational needs	• Perencanaan Pembangunan Terminal Gas di Candikusuma • Melakukan kajian laju sedimentasi waduk secara detail • Penyambungan Pipa Gas Gresik-Semarang ke PLTGU Tambak Lorok • Pemasangan *Weather Station* dan *Automatic Rain Record* Bendungan PLTA PB. Soedirman *Realtime* • Pengembangan aplikasi sistem *monitoring* pemantauan hidroklimatologi PLTA Saguling berbasis *desktop* dan *mobile phone* • Koordinasi dengan *Asset Manager* dan *Asset Owner* terkait penambahan kompresor gas baru dalam upaya memaksimalkan penyerapan gas apabila *supply* gas PGN berpotensi naik pada tahun 2021 • *Feasibility study minimum load combined cycle* dengan Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)	• Planning Gas Terminal Construction in Candikusuma • Conducting detailed analysis of dam sedimentation rate • Connecting Gresik-Semarang gas pipeline to CCPP Tambak Lorok • Installing real-time Weather Station and Automatic Rain Record at HPP PB. Soedirman dam • Developing mobile and desktop-based hydroclimatology monitoring system application for HPP Saguling • Coordinating with Asset Managers and Asset Owners regarding the addition of new gas compressors to optimize gas absorption to anticipate potential increase in PGN gas supply in 2021 • Carrying out combined cycle minimum load feasibility study with Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS)
8	0.5.5.1	Terjadi *Outages* atau *Derating* Akibat Ketidaksiapan Peralatan Pembangkit Outages or derating due to power generator equipment unreadiness	• Pengadaan *Strategic Parts* peralatan - peralatan kritikal • Retrofit Sistem Kontrol Pembangkit • Pelaksanaan *Overhaul* sesuai prinsip 5ON (*On Time, On Quality, On Scope, On Cost & On Safety*) • *Upgrading* peralatan - peralatan utama Pembangkit • Rehabilitasi / Revitalisasi Peralatan Pembangkit • Modifikasi Peralatan Pembangkit • Penggantian Peralatan Utama yang telah *Obsolete*	• Procuring strategic parts for critical equipments • Conducting power generator control system retrofitting • Carrying out Overhaul under 5ON (on time, on quality, on scope, on cost, and on safety) principle • Upgrading main power generator equipment • Refurbishing power generator equipment • Modifying power generator equipment • Replacing obsolete main equipment
9	0.5.6.1	Terjadi *Force Outage* atau *Force Derating* Akibat Gangguan Peralatan Pembangkit Forced outages or forced derating due to power generation equipment failures	• *Retrofit* Peralatan Utama Pembangkit • Penggantian Part kritikal pada Peralatan Utama (*Boiler, Turbin & Generator*) • *Upgrading* peralatan - peralatan utama Pembangkit • Rehabilitasi / Revitalisasi Peralatan Pembangkit • Modifikasi Peralatan Pembangkit • Penggantian Peralatan Utama yang telah *Obsolence* • Pengadaan *Critical Part Boiler Tube*	• Conducting main power generator equipment retrofitting • Replacing critical parts of main equipment (boilers, turbines, and generators) • Upgrading main power generator equipment • Refurbishing power generator equipment • Modifying power generator equipment • Replacing obsolete main equipment • Procuring critical parts for boiler tube
10	0.5.7.1	Penurunan Efisiensi Pembangkit Decline in power generator efficiency	• Pembuatan matriks simulasi pasokan batubara dengan nilai kalori kisaran 4300 kcal/kg namun dengan Rp/kcal paling rendah • Pengadaan Elemen APH • Rehabilitasi HPH / LPH • Optimalisasi *Dome Coal Yard* dan *Coal Yard Mapping* • Penggantian sistem peralatan utama pembangkit yang *Leak Through* • Melakukan FIFO (*First In First Out*) *management stockpile* • *Coal Mill Output Optimization (Coal Fineness Monitoring)* • Optimasi pemakaian sendiri	• Preparing coal supply simulation matrix for calorific value of 4,300 kcal/kg with the lowest Rp/kcal • Procuring APH element • Refurbishing HPH/LPH • Optimizing Coal Yard Dome and Coal Yard Mapping • Replacing leaked main power generator equipment • Implementing first-in-first-out (FIFO) method for managing stockpile • Optimizing coal mill output (coal fineness monitoring) • Optimizing self-consumption

No	ID Risk	Jenis Risiko Risk Type	Mitigasi	Description
11	S.3.6.2	Gagal melakukan pengembangan portofolio bisnis Gagal melakukan pengembangan portofolio bisnis	• Usulan Pengembangan PLT Hybrid Nusa Penida • Pengembangan PLTA Tanjung Sakti 115 MW • Pengembangan PLTA Poigar-2 • PLTMG Timika 40 MW dan PLTDG Fakfak, Serui, Raja Ampat @2 x 4 MW • Pengembangan PLTA Woyla 154 MW • Pengembangan PLTS Apung Saguling 60 MW • Pengembangan PLTBm Tebo Jambi (4x110 MW) • Pengembangan BMPP Sambelia 1x30 MW • Melakukan pengembangan PLTGL di Sumba dan PSPP di Jatiluhur • Melakukan pengadaan jasa konsultasi penyusunan portofolio *management*	• Proposing the development of Hybrid PP Nusa Penida • Developing HPP Tanjung Sakti 115 MW • Developing HPP Poigar-2 • GEPP Timika 40 MW and DGPP Fakfak, Serui, Raja Ampat @2 x 4 MW • Developing HPP Woyla 154 MW • Developing Floating SoPP Saguling 60 MW • Developing BMPP Tebo Jambi (4x110 MW) • Developing BMPP Sambelia 1x30 MW • Developing Ocean Wave Power Plant (OWPP) in Sumba and PSPP in Jatiluhur • Procuring consultant service for management portfolio making
12	F.15.4.1	Likuiditas perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan pembayaran operasional/ investasi Company liquidity is insufficient to pay for operations/investments	• Mengkoordinasikan penetapan anggaran investasi (PRK) untuk program kerja yang akan dilaksanakan • Rekonsiliasi tagihan *outstanding* dan *dropping* mingguan dengan PT PLN (Persero)	• Coordinating investment budgeting (Work Plan Program) for work plans to be held • Reconciling weekly outstanding and dropped bills with PT PLN (Persero)
13	P.8.18.1	Penyelesaian pengurusan perijinan terlambat Delayed completion of license administration	• Melakukan pengurusan perizinan menggunakan jasa konsultan yang kompeten dan ahli dalam pengurusan perizinan • Menyusun RKA 2021 perizinan terminal khusus (tersus) 2021 dengan mendaftarkan KK1 dan KK2 berserta dokumen pendukung • Berkoordinasi dengan aparat Pemda untuk pengurusan perizinan	• Hiring competent consultant to help expediting licensing process • Preparing Work Plan Program 2021 for special terminal licensing by registering KK1 and KK2 and their supporting documents • Coordinating with Regional Government officials for licensing process
14	O.11.1.1	Jumlah SDM Belum Memenuhi Kebutuhan Perusahaan Inadequate number of HC unable to meet Company requirements	• Melakukan *mapping* dan *monitoring* program *leadership* pegawai • Usulan Pemenuhan Struktur Organisasi yang sesuai antara Kebutuhan Kompetensi jabatan dengan *background* dan kompetensi pegawai • Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Penunjang	• Conducting employee mapping and monitoring employee leadership program • Proposing organizational structure fulfillment that balances between Position Competency Requirement and employee background and competence • Procuring support workforce
15	O.11.2.1	Kompetensi SDM belum Sesuai Standar Kebutuhan Perusahaan HC competencies are below the Company's standard	• Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui *Training* Bersama Antar Unit (TBAU) dengan narasumber Internal *Expert* dari Perusahaan • Pengukuran Kompetensi dan Sertifikasi Pegawai • Melakukan pemetaan kompetensi pegawai, membuat silabus *training*, membuat jadwal *training*, melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program akselerasi kompetensi pegawai • Pengembangan Kompetensi Pegawai • Program Pengembangan Kompetensi *Expertise* (Comet 2.0) • Program *Readiness People*	• Increasing employee competency with Joint Inter-Unit Trainings with speakers from the Company's internal experts • Measuring employee competency and certification • Mapping employee competencies, preparing training syllabuses, preparing training schedules, and monitoring and evaluating employee competency acceleration program implementation • Developing employee competency • Implementing Expertise Competency Development (Comet 2.0) • Implementing People Readiness program
16	O.14.1.18	Terjadi Pandemi penyakit The occurrence of pandemics	• Memperketat pelaksanaan protokol terkait pandemi • Melaksanakan metode *Work From Home* (WFH) • Mewajibkan penggunaan kendaraan dinas untuk pelaksanaan dinas luar • Memastikan ke tim keamanan (*security*) bahwa mitra tidak diperbolehkan masuk ke ruang kerja pegawai, hanya diperbolehkan di ruang tertentu yang telah disediakan - mitra yang akan melaksanakan pekerjaan harus melampirkan izin kerja dan hasil test yang diatur sesuai ketentuan K3 • Implementasi BCMS (*Business Continuity Management System*) pada masing-masing unit	• Applying stricter health protocols for the pandemics • Requiring employees to work from home (WFH) • Requiring the use of official vehicles for business trips • Instructing security team to limit vendors' access to employee work area. Vendors are only allowed to visit certain designated areas. Vendors who are going to perform some works must provide work permit and OHS-complied test results. • Implementing Business Continuity Management System (BCMS) at all units

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

No	ID Risk	Jenis Risiko Risk Type	Mitigasi	Description
17	0.14.2.5	Kegagalan Memperoleh PROPER Failure to earn PROPER rating	• Digitalisasi *monitoring* Pengelolaan dan Ketaatan Lingkungan Seluruh Unit serta Sentralisasi *data base* pengelolaan Lingkungan Korporat • Mengembangkan dan menetapkan peningkatan target pencapaian program seluruh Kriteria PROPER melalui langkah Perencanaan, Pelaksanaan, *Monitoring* dan Evaluasi Program • Pembuatan Tempat Penimbusan Akhir atau Landfill Abu Batubara Tahap 1B Suralaya PGU • Pembinaan kelompok nelayan desa salira terhadap hasil olahan ikan • Pembuatan Bank sampah cibeber • Pemasangan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) dan Pembuangan Limbah Harus Memiliki Izin yang Masih Berlaku • Melakukan Perpanjangan Izin Lingkungan • Melaksanakan Program *One Employee One Tree* • Penambahan *Mercury Emission Monitoring System Unit* • Melakukan Revitalisasi peralatan - peralatan pendukung Proper di Unit	• Digitalizing the monitoring of Environmental Management and Compliance at all Units and centralizing corporate environmental management database • Improving target achievement for all PROPER criteria by planning, developing, monitoring and evaluating the program • Continuing phase 1B of fly ash landfill construction for Suralaya PGU • Introducing fish processing methods for fishermen's groups in Salira Village • Establishing Cibeber Waste Bank • Installing Continuous Emission Monitoring System (CEMS) and ensuring validity of permits for waste disposal • Renewing environmental permit • Kicking off 'One Employee One Tree' program • Adding Mercury Emission Monitoring System at Units • Refurbishing PROPER-supporting equipment at Units
18	0.18.5.1	Terjadi Tuntutan Hukum dari *Stakeholder* Lawsuits by stakeholders	• Pendampingan Hukum dan Advokasi • Melakukan jaring komunikasi terkait program perusahaan bersama tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan	• Arranging for legal assistance and advocacy • Establishing communication network with community figures and stakeholders for interactions pertaining the Company's programs
19	0.6.1.1	Tidak memperoleh jaminan *dispatch* dari regulator sistem No dispatch guarantee from system regulator	• Jasa Uji *Heat Rate* Tahun 2021 • *Quick win pengelolaan Coal Handling* Lontar terpadu berdasarkan rekomendasi PT PLN (Persero) Regional JMB dan McKinsey • Analisis Kurva NPHR *Performance Test* terbaru dari PLN Pusertif yang paling besar memberikan keuntungan / laba finansial serta *Merit Order* paling baik • Program optimalisasi Hari Operasi (HOP) Stok Batubara • Negosiasi *Capacity Factor* (CF) tinggi ke P2B tiap Rapat Alokasi Energi bulanan • Teknologi Modifikasi Cuaca • Program - program Peningkatan *Merit Order* Pembangkit	• Heat rate testing service 2021 • Integrated Lontar coal handling management quick win based on recommendations from PT PLN (Persero) Regional JMB and McKinsey • Latest NPHR performance test curve analysis by PLN Pusertif, the biggest value delivers the best financial profit and merit order • Coal stock operation day optimization program • High Capacity Factor (CF) negotiation to P2B during monthly Energy Allocation Meetings • Weather Modification Technology • Power generator merit order enhancement programs
20	0.20.2.2	Transformasi Proses Bisnis tidak optimal Non-optimal business process transformation	• Pengembangan *Enterprise Architecture* dengan *tool* aplikasi EA.	• Developing Enterprise Architecture with EA application tool

Hasil Monitoring Mitigasi Risiko
Result of Risk Mitigation Monitoring

Hasil *monitoring* mitigasi profil risiko sampai dengan Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The result of risk profile mitigation monitoring per December 2021 was as follows:

No	ID Risk	Jenis Risiko Jenis Risiko	Belum Dikerja-kan Belum Dikerja-kan	Inprog-ress	Selesai Selesai	Cancel	Jumlah Total
1	S.3.6.1	Terancamnya Keberlangsungan Usaha Perusahaan Company's business continuity is threatened	0	24	7	3	34
2	F.15.5.1	Penurunan Pendapatan Perusahaan dalam Periode Tahun Berjalan Decline in Company's revenues in current year's period	0	1	3	0	4
3	F.15.5.2	Biaya Pokok Produksi Pembangkitan Energi Listrik Tinggi High power generation production cost	0	3	15	8	26
4	P.8.7.1	Kesulitan Mencari Pendanaan Proyek dari Lembaga Keuangan Eksternal Difficulty in securing project funding from external financial agencies	0	14	3	1	18
5	P.8.19.1	Waktu Penyelesaian Pekerjaan Terlambat Delay in project completion	0	2	4	0	6
6	O.14.1.1	Terjadi Kecelakaan Kerja Occupational accidents	0	7	8	1	16
7	O.4.1.1	Belum ada kejelasan energi primer untuk memenuhi kebutuhan masa operasi pembangkit Lack of clarity regarding primary energy to meet power generation operational needs	0	61	313	300	674
8	O.5.5.1	Terjadi *Outages* atau *Derating* Akibat Ketidaksiapan Peralatan Pembangkit Outages or derating due to power generator equipment unreadiness	0	8	36	37	81
9	O.5.6.1	Terjadi *Force Outage* atau *Force Derating* Akibat Gangguan Peralatan Pembangkit Forced outages or forced derating due to power generation equipment failures	0	0	0	1	1
10	O.5.7.1	Penurunan Efisiensi Pembangkit Decline in power generator efficiency	0	58	473	363	894
11	S.3.6.2	Gagal melakukan pengembangan portofolio bisnis Gagal melakukan pengembangan portofolio bisnis	0	3	2	1	6
12	F.15.4.1	Likuiditas perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan pembayaran operasional/ investasi Company liquidity is insufficient to pay for operations/investments	0	4	33	4	41
13	P.8.18.1	Penyelesaian pengurusan perijinan terlambat Delayed completion of license administration	0	9	45	29	83
14	O.11.1.1	Jumlah SDM Belum Memenuhi Kebutuhan Perusahaan Inadequate number of HC unable to meet Company requirements	0	1	33	4	38
15	O.11.2.1	Kompetensi SDM belum Sesuai Standar Kebutuhan Perusahaan HC competencies are below the Company's standard	0	2	48	22	72
16	O.14.1.18	Terjadi Pandemi penyakit The occurrence of pandemics	0	1	1	0	2
17	O.14.2.5	Kegagalan Memperoleh PROPER Failure to earn PROPER rating	0	1	1	6	8
18	O.18.5.1	Terjadi Tuntutan Hukum dari *Stakeholder* Lawsuits by stakeholders	0	0	2	0	2
19	O.6.1.1	Tidak memperoleh jaminan *dispatch* dari regulator sistem No dispatch guarantee from system regulator	0	0	13	0	13
20	O.20.2.2	Transformasi Proses Bisnis tidak optimal Non-optimal business process transformation	0	0	37	3	40
Jumlah Total			**0**	**199**	**1077**	**783**	**2059**

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Dari tabel tersebut diatas progress pelaksanaan Mitigasi Profil Risiko hingga akhir Desember 2021 sebagai berikut:

1. Belum dilaksanakan : 0%
2. Dalam pelaksanaan : 10%
3. Telah selesai : 52%
4. *Cancel Program* : 38%

As seen in the table, the progress of Risk Profile Mitigation implementation until the end of December 2021 was as follows:

1. Not Implemented : 0%
2. In Progress : 10%
3. Completed : 52%
4. Canceled : 38%

Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Tahun 2021

Evaluation of Risk Management System Effectiveness in 2021

Pengelolaan Risiko atas Pelaksanaan Proyek/Kegiatan

Risk Management over Project/Activity Implementation

Pengelolaan risiko dilaksanakan di seluruh lini proses dan kegiatan Perusahaan oleh pemilik program atau pemilik proses sebagai pemilik risiko (*risk owner*). Bidang Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam memastikan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai kebijakan dan ketentuan, serta selalu mengikuti acuan *best practice*. Salah satu tahapan terpenting dalam penerapan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian target kinerja jangka pendek dan panjang, adalah penyusunan Profil Risiko dan Dokumen Manajemen Risiko (DMR) oleh Satuan kerja, Divisi maupun PGU, POMU, OMU dan MSU Indonesia Power sebagai *risk owner*. DMR merupakan dokumen perencanaan yang meliputi Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Lingkungan (KKL), Kajian Hukum (KH), Kajian Kelayakan Finansial (KKF) dan Kajian Risiko (KR). Bidang Manajemen Risiko memberikan *coaching* dan *mentoring* terhadap penyusunan Profil Risiko dan DMR yang dilakukan oleh Satuan kerja, Divisi maupun Unit yang memerlukan, serta melakukan verifikasi atas Dokumen tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diatur melalui Keputusan Direksi. Selain melaksanakan pendampingan dan verifikasi untuk penyusunan Profil Risiko dan DMR program/proyek kegiatan di tingkat *risk owner*, Bidang Manajemen Risiko juga melaksanakan berbagai pendampingan *coaching* dan mentoring atas penyusunan kajian risiko strategis dalam mendukung pengambilan keputusan Direksi dan proses permohonan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Dengan pendekatan ini, maka seluruh Keputusan yang diambil telah berbasis risiko.

Risk management is carried out in all process lines and activities in the Company by program owner or process owner as the risk owner. Risk Management Department is responsible to ensure that risk management has been implemented in accordance with the specified policy and provision, and aligned with the best practice reference. One of the most important stages in risk management implementation to support the attainment of short-term and long-term performance target is the preparation of Risk Profile and Risk Management Document (RMD) by Work Units, Divisions, and PGU, POMU, OMU, and MSU at Indonesia Power as the risk owners. RMD is a planning document that covers Operational Feasibility Analysis (OFA), Environmental Feasibility Analysis (EFA), Legal Analysis (LA), Financial Feasibility Analysis (FFA), and Risk Analysis (RA). Risk Management Department provides coaching and mentoring for Risk Profile and RMD preparation by the requiring Work Units, Divisions, and Units, and verifies the RMD according to the specified authority, pursuant to the Decree of the Board of Directors. In addition to assisting and verifying Risk Profile and RMD preparation for program/project at risk owner level, Risk Management Department also provided mentoring and coaching for the preparation of strategic risk analysis to support decision-making process by the Board of Directors and approval request to the Board of Commissioners or GMS. Using this approach, all decisions has been made in consideration of the risks.

Pemantauan dan Peninjauan Penerapan Manajemen Risiko

Monitoring and Review of Risk Management Implementation

Untuk memastikan keefektifan pengelolaan risiko sebagai *enabler* dalam pencapaian sasaran perusahaan, maka perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan penerapan manajemen risiko. Sasaran dilakukannya pemantauan dan peninjauan tersebut adalah untuk:

(1) Mengevaluasi pemenuhan kaidah, kebijakan dan ketentuan pengelolaan risiko;
(2) Mengukur keefektifan sistem pengelolaan risiko;
(3) Evaluasi Manajemen dalam mensinkronisasikan ERM sebagai enabler dari kegiatan-kegiatan perusahaan;
(4) Identifikasi langkah-langkah perbaikan secara bertahap pemantauan dan peninjauan tersebut dilakukan melalui optimalisasi penggunaan aplikasi IRMA (*Integrated Risk Management Application*).

To ensure the effectiveness of risk management as the enabler in the attainment of Company goals, monitoring and review of risk management implementation are required. The objectives of the monitoring and review are to:

(1) Evaluate the compliance with risk management principles, policy, and provisions;
(2) Measure the effectiveness of risk management system;
(3)Evaluate the Management in synchronizing ERM as the enabler of the Company's activities;
(4) Identify improvement measures in phases.
These monitoring and review are sought through the optimization of the Integrated Risk Management Application (IRMA) utilization.

Assessment Maturity Level Manajemen Risiko

Risk Management Maturity Level Assessment

Guna mengetahui tingkat kematangan penerapan manajemen Risiko yang sudah dijalankan sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan *best practice* suatu penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM), Indonesia Power melaksanakan *Assessment Maturity Level* Manajemen Risiko yang berdasarkan pada 5 (lima) kategori penilaian, yaitu:

1. Kepemimpinan (*Leadership*);
2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko (*Framework*);
3. Budaya (*Culture*);
4. Proses Manajemen Risiko (*Process*);
5. Penciptaan & Perlindungan Nilai (*Result*).

Berdasarkan *assessment* terhadap lima kategori tersebut, tren skor *maturity level* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi budaya pengelolaan risiko di Indonesia Power telah mulai menunjukkan hasil dan keefektifannya.

To measure the maturity level of risk management implemented according to plan and Enterprise Risk Management (ERM) best practices, Indonesia Power carried out Risk Management Maturity Level Assessment based on five (5) assessment categories, namely:

1. Leadership;
2. Framework;
3. Culture;
4. Process;
5. Value Creation & Protection (Result).

According to the assessment of these categories, the maturity level score tends to increase every year. This indicates that the internalization of risk management culture in Indonesia Power begins to demonstrate its result and effectiveness.

MANAJEMEN RISIKO
RISK MANAGEMENT

Achievement of Score Maturity Level - ERM Tahun 2016-2021
Maturity Level Score Achievement - ERM in 2016-2021

	2016	2017	2018	2019***	2020***	2021****
Target	3.50	3.60	> 3.85	>3,23	>3,30	3,20
Realisasi Realization	3.56	3.85	3.98* dan and 3, 23**	3,41	3,43	3,45
Penjelasan singkat atas realisasi *maturity level* ERM Brief description of ERM maturity level realization	Pencapaian Nilai *Maturity Level* ERM PT Indonesia Power melebihi dari yang telah ditargetkan dalam nilai kinerja organisasi korporat. The achievement of ERM maturity level of PT Indonesia Power exceeded the target set in the corporate organization performance score.					

* *Assessment* Eksternal *based on* ISO 31000:2012
** *Assessment* Eksternal *based on* ISO 31000:2018
*** *Self Assessment* Internal & Menggunakan Kriteria *Assessment* Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
**** *Assessment* dilakukan oleh PT PLN (Persero), menggunakan kriteria *Maturity* terbaru PT PLN (Persero)
*External Assessment based on ISO 31000:2012
**External Assessment based on ISO 31000:2018
***Internal Self-Assessment & using Risk Management Assessment Criteria from PT PLN (Persero)
****The Assessment was performed by PT PLN (Persero), using the latest maturity criteria from PT PLN (Persero)

Hasil dari *Assessment Maturity* Manajemen Risiko Tahun 2021 yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) adalah 3,45 dari target 3,20. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa aspek telah menunjukkan kematangan implementasi manajemen risiko.

The score of the Risk Management Maturity Assessment in 2021 carried out by PT PLN (Persero) was 3.45, out of the target of 3.20. This indicates that risk management maturity has been achieved by several aspects.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan GRO CRM
GRO CRM Activity Implementation Report

Berikut adalah realisasi kegiatan Bidang Manajemen Risiko sesuai dengan program kerja tahun 2021 :

1. Pengembangan Aplikasi IRMA (*Integrated Risk Management Application*).
2. Melakukan pengembangan *dashboard* untuk *monitoring Enterprise Risk Management* (ERM) kepada pihak manajemen di lingkungan Indonesia Power;
3. Proses Bisnis Berbasis Risiko dengan menggunakan *Enterprise Architecture* (EA);
4. Melakukan *Review* dan *Update* Dokumen *Business Continuity Management System* (BCMS) Indonesia Power;
5. Melakukan Penyusunan Profil Risiko Investasi Tahun 2023 oleh masing-masing unit kerja di Indonesia Power;
6. Menjadi tujuan *Benchmark* Pengelolaan Manajemen Risiko dari PT. PLN Batam, PT. PLN UIK SBS, dan Divisi MRO PT. PLN (Persero).

Below is the realization of Risk Management Department activities according to the 2021 work program:

1. Developing Integrated Risk Management Application (IRMA);
2. Developing Enterprise Risk Management (ERM) monitoring dashboard for Indonesia Power management;
3. Conducting risk-based business process using Enterprise Architecture (EA);
4. Reviewing and updating Indonesia Power's Business Continuity Management System (BCMS) document;
5. Preparing Investment Risk Profile 2023 by each Work Unit at Indonesia Power;
6. Becoming the standard for risk management benchmark of PT PLN Batam, PT PLN UIK SBS, and MRO Division of PT PLN (Persero).

7. Membantu *set up* dan implementasi Pengembangan Aplikasi Manajemen Risiko PT. PLN (Persero);
8. Menyelenggarakan *Risk Talk and Risk Award* Indonesia Power;
9. Melakukan Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko;
10. Melakukan pembahasan dan konsultasi ratifikasi perdir dengan tim *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) dan Legal;
11. Finalisasi Ratifikasi Peraturan Direksi No. 071 PLN Manajemen Risiko Terintegrasi Indonesia Power melalui diskusi dengan beberapa bidang;

7. Assisting in the set up and implementation of risk management application for PT PLN (Persero);
8. Organizing Indonesia Power Risk Talk and Risk Award;
9. Obtaining risk management competency certifications;
10. Discussing and consulting about BOD Regulation ratification with Governance, Risk, and Compliance (GRC) and Legal teams;
11. Finalizing the ratification of BOD Regulation No. 071 PLN on Indonesia Power Integrated Risk Management via cross-departmental discussions.

Penilaian Atas Kinerja Bidang Manajemen Risiko

Risk Management Department Performance Assessment

Penilaian Atas Kinerja GRO CRM sebagaimana yang diatur dalam komponen KPI (*Key Performance Indicators*). Realisasi pencapaian kinerja GRO CRM tahun 2021 sebesar 103,60% dari target 100%.

Adapun komponen KPI GRO CRM terdiri dari (1) Waktu Penyelesaian *Review* DMR; (2) Profil Risiko Korporat; (3) *Maturity Level* ERM; (4) Rekomendasi dan *Risk Early Warning System;* (5) Pelaksanaan Forum *Strategic* Pengelolaan Manajemen Risiko; (6) Integrasi Manajemen Risiko dalam Proses Bisnis; (7) Pengelolaan BCMS; (8) *Risk Talk Senior Leader*; (9) Pengembangan Tata Kelola *Key Risk Indicator* (KRI); (10) Sertifikasi *Senior Leader* Pengelolaan Manajemen Risiko (QRMP,QRGP); (11) Pengendalian Anggaran Departemen (12) Tindak Lanjut Temuan Auditor, Arahan RUPS dan Risalah Rapat Direksi; (13) Membuat/ Meng*update* Kebijakan/Strategi terkait Divisi; dan (14) Penyelesaian *Enterprise Architecture* dan *Update* IPM Divisi

The assessment of GRO CRM performance covers the KPI (Key Performance Indicators) components. The realization of GRO CRM performance in 2021 was 103.60% of the defined target of 100%.

The KPI components for the GRO CRM are (1) RMD Review Completion Time; (2) Corporate Risk Profile; (3) ERM Maturity Level; (4) Recommendations and Risk Early Warning System; (5) Risk Management Strategic Forum Implementation; (6) Integration of Risk Management in Business Processes; (7) BCMS Management; (8) Senior Leader's Risk Talk; (9) Key Risk Indicator (KRI) Governance Development; (10) Risk Management Senior Leader Certification (QRMP, QRGP); (11) Department Budget Control; (12) Follow-up on Auditor Findings, GMS Directives and Minutes of Board of Directors Meetings; (13) Preparation/Update of Division-level Policies/Strategies; (14) Enterprise Architecture Completion and Division IPM Update.

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

Akuntan publik atau auditor eksternal merupakan organ eksternal yang membantu Indonesia Power dalam memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Auditor Eksternal yang telah dipilih oleh Indonesia Power dalam melakukan audit telah berpedoman pada standar audit yaitu:

1. Standar Umum, dimana audit harus dilakukan oleh auditor yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai, memiliki sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit, bersikap profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
2. Standar Pekerjaan Lapangan, Auditor dapat merencanakan dan mengawasi jalannya pekerjaan secara memadai, memiliki pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya termasuk pengendalian internal, memperoleh cukup bukti atau dokumen sebagai dasar yang tepat menyangkut laporan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan, Auditor menyiapkan laporan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapan informatif, disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

A public accountant or external auditor assists Indonesia Power to provide an independent and objective opinion on the fairness, compliance, and consistency of the Company's financial statements in comparison to the Financial Accounting Standards in Indonesia and in accordance with the applicable laws and regulations.

The selection of external auditor at Indonesia Power has followed the following audit standards:

1. General Standard, audit must be performed by a trained auditor who has adequate technical abilities, acts independently in all matters pertaining to audit, and shows professionalism during auditing and reporting processes.
2. Field Work Standard, an auditor must be capable to properly plan and supervise works, have adequate understanding about the audited entity and its environment, including the entity's internal control, have sufficient evidence or documents as the foundation in auditing relevant statements.
3. Reporting Standard, an auditor must prepare a complete report of the financial statements, including informational disclosures that are presented according to the generally applied accounting principles.

Mekanisme Penunjukan Auditor Eksternal
Mechanism of External Auditor's Appointment

Proses Penunjukan Auditor Eksternal Indonesia Power telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 1 Agustus 2011, yaitu dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan pendelegasian wewenang dari RUPS (sesuai Risalah RUPS Tahun Buku 2020 tanggal 29 Juni 2021), dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit sebagaimana surat Komite Audit tanggal 24 Juni 2021 yang disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui surat Nomor 0297/451/IP/2021-R Perihal Permohonan Penunjukan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Sejalan dengan RUPS Tahunan tanggal 29 Juni 2021, telah disetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Indonesia Power adalah KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.

The appointment of external auditor for Indonesia Power has followed the Regulation of the State Minister of State Owned Enterprises No. Per-01 /MBU/2011 on Good Corporate Governance Implementation in State Owned Enterprises dated August 1, 2011. The appointment was performed by the Board of Commissioners as mandated by the GMS (pursuant to Minutes of GMS of Fiscal Year 2020 dated June 29, 2021, by taking into account recommendations from the Audit Committee as written in the letter of Audit Committee No. 0453/553/IP/2020-R dated June 2, 2020 on Request for Public Accounting Firm Appointment for Auditing the Company's Financial Statements of Fiscal Year 2021 which was submitted to the Board of Commissioners.

In accordance with the Annual GMS on June 29, 2021, KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan was approved and appointed to perform such audit..

Nama Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan Opini Audit

Name of Public Accounting Firm, Public Accountant, and Audit Opinion

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Indonesia Power selama 6 (enam) tahun terakhir:

The Public Accounting Firms performing audit on Indonesia Power's Financial Statements for the past six (6) years are listed below:

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Opini Audit Tahun 2016-2021

Public Accounting Firm, Accountant Name, and Audit Opinion in 2016-2021

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Periode KAP Public Accounting Firm's Term	Periode AP Public Accountant's Term	Ruang Lingkup Scope	Opini Audit Opinion of Audit
2021	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA Izin No.AP.0241 License No. AP.0241	Periode ke-2 2nd period	Periode ke-2 2nd period	Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan, dan Laporan Audit Kepatuhan. Company's Financial Statement, Performance Evaluation Report, and Compliance Audit Report	Wajar Dalam Semua Hal yang Material. Qualified Opinion
2020	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC)	Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA Izin No.AP.0241 License No. AP.0241	Periode ke-1 1st period	Periode ke-1 1st period		Wajar Dalam Semua Hal yang Material. Qualified Opinion
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.	Dedy Sukrisnadi, Izin No.AP.0645 License No. AP.0645	Periode ke-4 4th period	Periode ke-1 1st period		Wajar Dalam Semua Hal yang Material. Qualified Opinion
2018	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.	Saptoto Agustomo, Izin No.AP.0499 License No. AP.0499	Periode ke-3 3rd period	Periode ke-3 3rd period		Wajar Dalam Semua Hal yang Material. Qualified Opinion
2017	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.	Saptoto Agustomo, Izin No.AP.0499 License No. AP.0499	Periode ke-2 2nd period	Periode ke-2 2nd period		Wajar Dalam Semua Hal yang Material. Qualified Opinion
2016	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan.	Saptoto Agustomo, Izin No.AP.0499 License No. AP.0499	Periode ke-1 1st period	Periode ke-1 1st period		Wajar Tanpa Pengecualian. Unqualified Opinion

Penetapan KAP Indonesia Power telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tahun) tahun buku berturut-turut.

The appointment of the Public Accounting Firm has met the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 article 3 sub-article 1, which specifies that provision of general audit service for the financial statements of an entity shall be carried out by a Public Accounting Firm for a maximum six (6) consecutive fiscal years and by a Public Accountant for a maximum 3 (three) consecutive fiscal years.

AKUNTAN PUBLIK
PUBLIC ACCOUNTANT

Fee Audit Atas Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan
Financial Statements Audit Fee

Ketentuan fee audit sepenuhnya ditetapkan oleh PT PLN (Persero) selaku Induk Perusahaan sekaligus pemegang saham. Nilai *fee* jasa audit KAP tahun buku 2021 yaitu sebesar Rp3.862.268.000,- untuk Audit Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal untuk posisi & periode yang berakhir 31 Desember 2021.

The audit fee was solely specified by PT PLN (Persero) as the Parent Company and the Company's shareholder. The amount of audit fee for the Public Accounting Firm in 2021 was Rp3,862,268,000,- for Audits of Financial Statements, Performance Evaluation Report, and Report on Compliance with Laws and Regulations and Internal Control for the position and period ending on December 31, 2021.

Jasa Lain dan *Fee* Audit Lainnya
Other Audit and Service Fees

Pada tahun 2021, tidak ada fee yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC) untuk jasa non-audit.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PWC) did not receive any other fees for non-audit services in 2021.



Pengawasan dan Penilaian atas Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Supervision and Assessment over Effectiveness of External Audit Implementation

Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit melakukan pengawasan sekaligus melakukan evaluasi atas kualitas proses pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP. Selain itu Direksi dengan dibantu Internal Audit juga secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan auditor eksternal agar pelaksanaan audit berjalan efektif. Dan apabila terjadi kendala dalam objek pemeriksaan dapat segera dicari solusi dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Direksi juga secara aktif melakukan pemantauan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan kerja terkait serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Dewan Komisaris secara berkala.

The Board of Commissioners, with assistance from the Audit Committee, supervised and evaluated the quality of audit performed by Public Accounting Firm. Meanwhile, the Board of Directors with assistance from the Internal Audit also actively coordinated and communicated with external auditor for the effectiveness of the audit. That way, any issues with any audit objects can be immediately addressed. The Board of Directors actively monitored the follow-up on the findings from the external audit in every coordination meeting between the Board of Directors and relevant work units, as well as regularly reported follow-up implementation to the Board of Commissioners.

Pemantauan terhadap kinerja KAP dibahas dengan Direksi melalui rapat Komite Audit yang diikuti oleh Internal Audit dan Direksi terkait. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai 1). kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerja audit; 2). kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; 3). hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal, dan 4). tindak lanjut temuan hasil audit KAP.

Supervision over Public Accounting Firm's performance was discussed with the Board of Directors during Audit Committee meetings which was also attended by the Internal Audit Department and relevant Directors. During the meeting was also discussed: 1) congruency between audit completion and audit work plan; 2) compliance of audit implementation with public accounting professional standards; 3) external audit results and external audit recommendation quality; and 4) follow-up on Public Accounting Firm's audit findings.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Indonesia Power memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan prinsip GCG dalam operasional Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan. Sebagai bagian atas penerapan prinsip GCG, penerapan sistem *Whistleblowing System* (WBS) Indonesia Power merupakan salah satu elemen kunci bagi Perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan transparansi Perusahaan dan sebagai sarana media pelaporan pelanggaran yang dapat digunakan oleh pihak internal (Insan Indonesia Power) maupun eksternal (pelanggan, mitra kerja, dan *stakeholder* lainnya) untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan kode etik atau perbuatan lainnya yang berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan.

Indonesia Power is highly committed to adhering to GCG principles in its operations so as to achieve the Company vision and mission. As part of the implementation of GCG principles, the Whistleblowing System (WBS) is among the key elements that maintain and improve transparency. The system also doubles as the medium for reporting any suspected fraud, violation of laws and the code of conduct, or other activities that may potentially harm the Company's reputation for internal (Indonesia Power Personnel) and external parties (customers, work partners, and stakeholders).



Setiap pegawai wajib melaporkan adanya indikasi maupun aktivitas pelanggaran terhadap kebijakan Perusahaan, dan indikasi atau dugaan adanya kelemahan SMAP Perusahaan.

Every employee has the duty to report any fraudulent indication and/or activity against the Company policies and indication or suspicion of any weakness in the Company's ABMS.

Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, Kontraktor, Pemasok atau orang lain yang memiliki hubungan bisnis dengan Indonesia Power dapat menjadi obyek pelaporan pengaduan apabila terlibat dalam perilaku sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial seperti tidak jujur, curang atau korup, gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan Perusahaan termasuk suap atau kegiatan lainnya;
2. Aktivitas ilegal (seperti pencurian, penjualan, kekerasan, pelecehan, diskriminasi atau intimidasi, kerusakan pidana pada aset Perusahaan);

Employees, the Board of Directors, Board of Commissioners, Board of Commissioners Supporting Organs, Contractors, Vendors, or any other parties having business relations with Indonesia Power may become the object of tipping-off whenever involved in the following conducts:

1. Any action that may give rise to financial and non-financial loss, such as dishonesty, fraud or corruption, and any gratification against the Company's provisions, including bribery or any conducts;
2. Illegal activities (e.g. theft, sale, violence, abuse, discrimination or intimidation, and criminal damage to Company assets);

3. Tidak etis atau melanggar kebijakan Perusahaan (seperti mengubah catatan atau data Perusahaan secara tidak jujur, mengadopsi praktik akuntansi yang tidak baik atau dengan sengaja melanggar Pedoman Etika Perusahaan atau prosedur lain);
4. Berpotensi merugikan atau membahayakan Perusahaan, Pegawai Perusahaan atau pihak ketiga yang menyebabkan kerugian finansial bagi Perusahaan atau merusak reputasi. seperti praktik kerja yang tidak aman, kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, atau penyalahgunaan aset atau sumber daya Perusahaan;
5. Penyalahgunaan Wewenang;
6. Melakukan segala bentuk ketidakwajaran dan pelanggaran etika lainnya yang berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan.

3. Any non-ethical conduct or violation against the Company policies (e.g. tampering with Company data and records, adopting improper accounting practices, or intentionally violating the Company's Code of Conducts or other procedures);
4. Any conduct that may potentially harm the Company, employees, or third parties, which may result in financial loss to the Company or damage the Company's reputation (e.g. unsafe work practices, environmental damage, health risks, or misuse of Company assets or resources);
5. Abuse of authority;
6. Any other irregularities and violation against the code of conduct that may potentially damage the Company's reputation.

Kebijakan dan Tujuan WBS
WBS Policy and Purposes

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Indonesia Power mengacu pada Keputusan Bersama Direksi dan Dekom PT Indonesia Powe No. 250.K/010/IP/2019 dan No. 20.SK/Dekom/IP/2019 tentang Kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) serta SK No. 060.K/020/IP/2020 tentang Susunan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (*Whistleblowing*) dan Tim Investigasi Pengaduan pelanggaran PT Indonesia Power.

The policy of the Whistleblowing System refers to the Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Indonesia Power No. 250.K/010/IP/2019 and No. 20.SK/Dekom/IP/2019 on Policy on the Management of Whistle Blowing System (WBS) and Decree No. 060.K/020/IP/2020 on Composition of Whistleblowing Management Team and Complaint Investigative Team at PT Indonesia Power. .

Tujuan disusunnya kebijakan WBS adalah 1) sebagai pedoman pelaksanaan dalam menangani pengaduan pelanggaran dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh *stakeholders*; dan 2) sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai pelanggaran dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku dan kelemahan sama SMAP.

The objectives of WBS policy are: 1) to serve as guidelines for the implementation of whistleblowing from stakeholders to ensure effective whistleblowing mechanism in sufficient duration for stakeholders and 2) to serve in the disclosure of violations in the Company that go against the applicable standards of code of conduct and weaknesses in ABMS.

Kebijakan WBS Indonesia Power dapat diunduh pada https://www.indonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Pedoman-Tata-Kelola.aspx

Indonesia Power's WBS Policy is accessible via https://www.indonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Pedoman-Tata-Kelola.aspx.

Pengelola WBS
WBS Admin

Sejalan dengan kebijakan WBS, pengelola pengaduan pelanggaran Indonesia Power adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Direksi dan Tim Pengelola Pengaduan sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai, sebagai berikut:

In accordance with the WBS policy, the WBS admins are set as follows:

1. In relation to violations committed by employees, the Board of Directors and Whistleblowing Management Team have the following authorities:

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

a. Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai Perusahaan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
b. Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi sesuai level pelaku pelanggaran dengan pembagian tugas sebagai berikut:

a. The Board of Directors is responsible for the implementation of Whistleblowing Policy for the reporting of violations suspected to be committed by employees as set out in the Decree.
b. The Board of Directors is to form Whistleblowing Management Team, which is to be established in accordance with the Decree of the Board of Directors according to the level of offenders, with the following delegation of duties:

Terduga Pelaku Pelanggaran (Terlapor) Suspected Offender (Reportee)	Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Whistle-Blowing Management Team	Ketua Tim Pengelola Pelanggaran Head of Whistle-Blowing Management Team
Pegawai jenjang Eksekutif Utama Chief Executive-level Employee	Direksi Board of Directors	Direktur Utama President Director
Pegawai Jenjang Eksekutif Senior, Eksekutif, Penyelia dan Pelaksana Senior Executive-level employee, Executive-level employee, Supervisor, and Acting employee	Tim Pengaduan Pelanggaran dan Kepala DIvisi Terkait Whistle-Blowing Team and relevant Head of Division	Chief Audit Executive

2. Kewenangan Dewan Komisaris dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan sehubungan dengan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Oknum Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Dewan Komisaris, sebagai berikut:
   a. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Organ Penunjang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

2. The authority of the Board of Commissioners and the establishment of Whistleblowing Management Team for violations suspected to be committed by the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Commissioners Supporting Organs is as follows:
   a. The Board of Commissioners is responsible for the implementation of Whistleblowing Policy for the reporting of violations suspected to be committed by the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Board of Commissioners Supporting Organs as set out in the Decree.

Terduga Pelaku Pelanggaran (Terlapor) Suspected Offender (Reportee)	Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Whistle-Blowing Management Team	Ketua Tim Pengelola Pelanggaran Head of Whistle-Blowing Management Team
Anggota Direksi Member of Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komisaris Utama President Commissioner
Anggota Organ Penunjang Dewan Komisaris Member of Supporting Organs for the Board of Commissioners	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Komisaris Utama President Commissioner
Anggota Dewan Komisaris Member of Board of Commissioners	Pemegang Saham Shareholders	Pemegang Saham Shareholders

b. Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

b. The Board of Commissioners establishes the Whistleblowing Management Team, as necessary, according to their competencies and expertise.

Media Penyampaian Laporan Pelanggaran

Tipping-off Media

Whistleblowing System Indonesia Power menyediakan 2 (dua) media/saluran pelaporan dalam menyampaikan laporan pelanggaran (*whistleblowing*) yaitu sebagai berikut:

The Whistleblowing System at Indonesia Power provides two (2) whistleblowing channels, i.e.:

Apabila Terlapor adalah Pegawai (Eksekutif Utama, Eksekutif Senior, Eksekutif, Penyelia dan Pelaksana) disampaikan melalui salah satu media, yaitu: When the Reportee is an employee (Chief Executive, Senior Executive, Executive, Supervisor and Acting-level), tipoff is to be submitted through one of the media, i.e.:	Apabila Terlapor adalah oknum Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Dewan Komisaris disampaikan melalui salah satu media, yaitu: When the Reportee is a member of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs for the Board of Commissioners, tipoff is to be submitted through one of the media, i.e.:
Pegawai jenjang Eksekutif Utama Chief Executive-level Employee	Direktur Utama President Director
1. Direksi 2. Fungsi Kepatuhan Perusahaan 3. *Website* Perusahaan www.indonesiapower.co.id atau *email*: pengaduan@indonesiapower.co.id 4. Surat resmi yang ditujukan kepada: u.p Admin Pengaduan Pelanggaran dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perusahaan ke Alamat Perusahaan yang berlaku saat ini. 5. Drop box, yang ditempatkan di Area Lobby Perusahaan atau tempat - tempat yang ditentukan oleh Perusahaan. 6. Pesan singkat atau WhatsApp ke No. 081-1979-8888	1. Fungsi Kepatuhan Perusahaan 2. *Website* Perusahaan www.indonesiapower.co.id atau *email*: pengaduan@indonesiapower.co.id 3. Surat resmi yang ditujukan kepada: u.p Admin Pengaduan Pelanggaran dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perusahaan ke Alamat Perusahaan yang berlaku saat ini. 4. Drop box, yang ditempatkan di Area Lobby Perusahaan atau tempat - tempat yang ditentukan oleh Perusahaan. 5. Pesan singkat atau WhatsApp ke No. 081-1979-8888
1. Board of Directors 2. Corporate Compliance Function 3. Company Website www.indonesiapower.co.id or email: pengaduan@indonesiapower.co.id 4. Letter addressed to: Att. Whistle-Blowing Admin via direct delivery or via postal service to the currently valid Company Address. 5. Drop box placed in the Company's Lobby Area or other places as specified by the Company. 6. Short message or WhatsApp message to 081-1979-8888	1. Corporate Compliance Function 2. Company Website www.indonesiapower.co.id or email: pengaduan@indonesiapower.co.id 3. Letter addressed to: Att. Whistle-Blowing Admin via direct delivery or via postal service to the currently valid Company Address. 4. Drop box placed in the Company's Lobby Area or other places as specified by the Company. 5. Short message or WhatsApp message to 081-1979-8888

Isi Pengaduan agar menjelaskan dengan lengkap dan jelas atas Pelanggaran yang dilaporkan serta pihak yang diduga sebagai Terlapor. Pengaduan Pelanggaran wajib menyampaikan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.

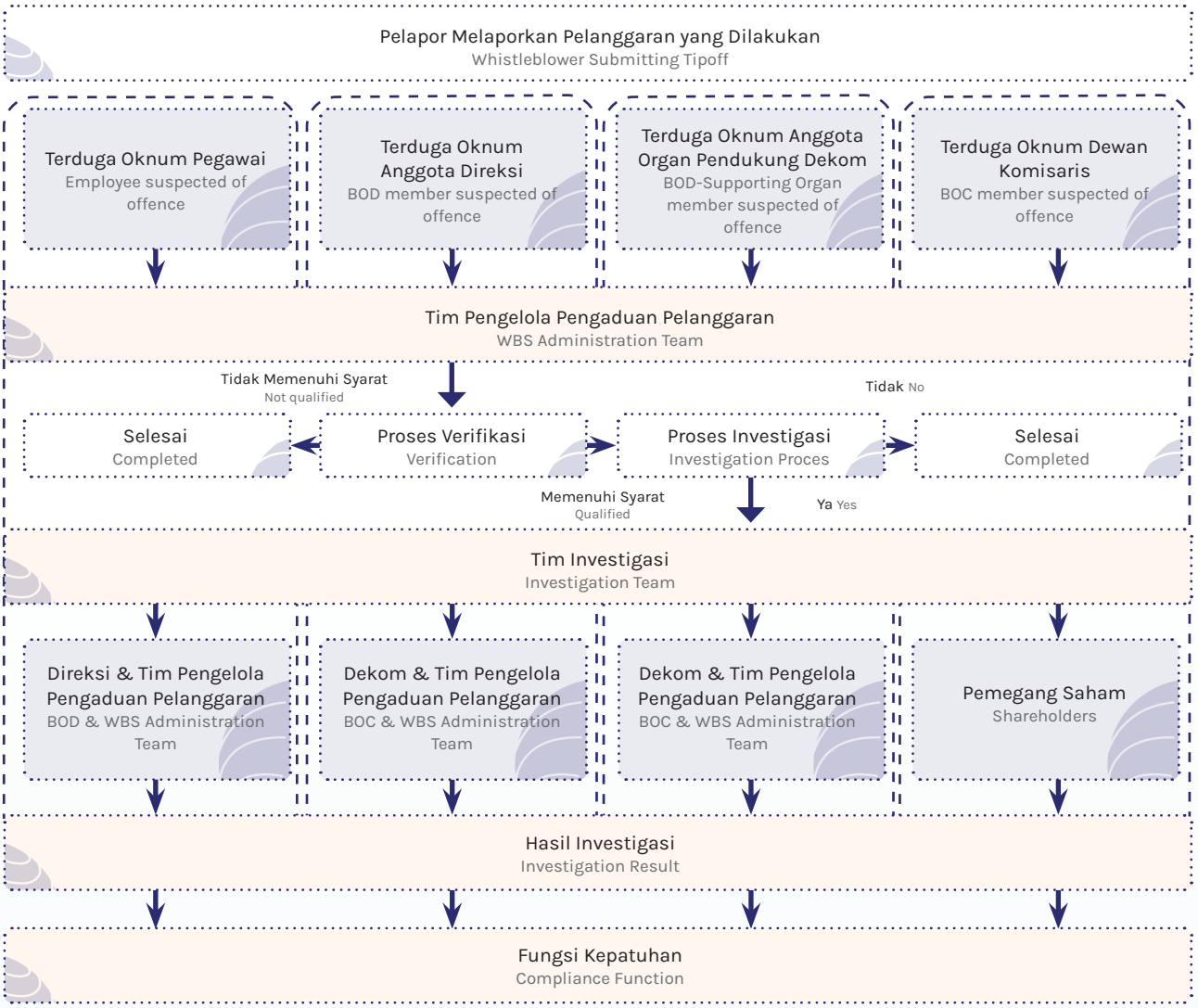
The tipoff should clearly and completely describe the violation reported and the suspected offender identified as the Reportee. Whistleblowing should be supported by evidences such as documents related to the transaction in question and/or the tipoff to be submitted.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Proses Penanganan Pengaduan
Tipoff Handling Process

Seluruh laporan yang memiliki bukti awal yang valid mengenai terjadinya tindak pelanggaran akan segera ditindak lanjuti dengan pelaksanaan investigasi mendalam. Mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan secara lengkap dapat dilihat pada skema proses pengaduan pelanggaran sebagai berikut:

All tipoffs with valid preliminary evidences will be immediately followed up with in-depth investigation. The complete mechanism of the tipping-off and its handling is available in the whistleblowing scheme as follows:



Pemantauan Tindak Lanjut WBS

Monitoring of WBS Follow-up

Pemantauan tindak lanjut Pengaduan Pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran, termasuk pemantauan terhadap pengaduan yang diteruskan kepada bidang kerja terkait dalam Perusahaan. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi menyampaikan laporan secara berkala Pengaduan Pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi. Adapun untuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris menyampaikan laporan secara berkala Pengaduan Pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Dewan Komisaris.

Monitoring of Whistleblowing follow-up is carried out by the Whistleblowing Management Team, including monitoring of tipoffs forwarded to the relevant work unit in the Company. The Whistleblowing Management Team to the Board of Directors provides periodic reports of incoming, investigated and resolved tipoffs to the Board of Directors. As for the Board of Commissioners, the Whistleblowing Management Team to the Board of Commissioners provides periodic reports of incoming, investigated and resolved tipoffs to the Board of Commissioners.

Perlindungan Bagi Pelapor dan Terlapor

Protection to Whistleblower and Reportee

Indonesia Power telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa setiap pelapor yang melapor dengan itikad baik akan dilindungi dan informasi yang masuk diperlakukan secara rahasia. Identitas pelapor hanya diketahui oleh admin pengaduan pelanggaran kecuali pelapor mengizinkan untuk dibuka identitasnya.

Indonesia Power has taken various measures to ensure that any whistleblowers submitting the tipoffs in good faith will be protected and given confidentiality for their tipoffs. The whistleblower's identity will only be known to the WBS administrator, unless the whistleblower allows the disclosure of their identity.

Pelapor dapat mengadukan apabila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan balasan lain yang dialaminya. Pengaduan harus disampaikan kepada Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, Pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perusahaan seperti misalnya mediator, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atas biaya Perusahaan.

The Whistleblower may submit grievance when they receive retaliation in the form of persecution or threat or other forms of retaliation. The grievance should be submitted to the Whistleblowing Management Team through the specified mechanism. In the event where such an issue cannot be resolved internally, the Whistleblower reserves the right to escalate the issue to external independent agencies such as mediator or Witness and Victim Protection Agency at the Company's expense.

Indonesia Power memberikan perlindungan kepada Pelapor meliputi: pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya serta catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*), serta memberikan jaminan kerahasiaan identitas Terlapor sampai berubah pada status terperiksa, apabila terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dilaporkan oleh pelapor, perusahaan memberikan jaminan atas nama baik terlapor.

Indonesia Power provides protection to the Whistleblower, which includes: unfair termination of work, rank/position demotion, harassment or discrimination in any forms whatsoever, including disadvantageous records in their personal file record. Indonesia Power also guarantees the confidentiality of the Reportee's identity up to the Reportee's status being elevated to 'examinee'. Where the Reportee is proven not guilty of the alleged violations as reported by the Whistleblower, the Company guarantees that the Reportee's honor shall be restored.

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Apresiasi Pelapor
Appreciation for the Whistleblower

Perusahaan dapat memberikan apresiasi/penghargaan bagi pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/uang Perusahaan dapat diselamatkan dalam jumlah yang signifikan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Perusahaan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan atau perlindungan Pelapor.

The Company may provide appreciation/reward for the Whistleblower for the violation they reported that can be proven and thus saving the Company from significant asset/financial loss in accordance with the provisions specified by the Board of Directors. The reward is provided in accordance with the Company policy by taking into account the Whistleblower's confidentiality and protection.

Sanksi atas Pelaporan Palsu
Sanction for False Whistleblowing

Apabila hasil investigasi menyimpulkan Pengaduan yang disampaikan mengandung unsur dengan itikad tidak baik, menyampaikan bukti palsu, ada unsur kedengkian, tanpa dasar yang jelas, maka Pelapor tersebut dapat digugat balik atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sanksi bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran antara lain berupa teguran, peringatan tertulis, penurunan kelas jabatan, hingga pemecatan. Adapun sanksi bagi pihak lain yang bekerja sama dengan Indonesia Power antara lain berupa pemutusan kontrak kerjasama.

In the event where an investigation finds a tipoff to be untrue or made in bad faith, provide false evidence, contain hate on unclear ground, the whistleblower will be subject to counterclaim or imposition of sanction pursuant to the applicable provisions. Sanction for employee who is proven committing violation includes reprimand, written warning, demotion, and dismissal. Sanction for any other party who partners with Indonesia Power includes termination of cooperation contract.

Sosialisasi WBS
WBS Outreach

Sejalan dengan Kebijakan WBS, Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengaduan Pelanggaran dalam 2 (dua) bahasa yaitu Indonesia dan inggris kepada seluruh Pegawai maupun *Stakeholders* melalui berbagai media Perusahaan, seperti: 1). kegiatan *vendor meeting*; 2). forum internal Perusahaan; 3) *website* Perusahaan; dan 5). Media komunikasi internal Pegawai.

In accordance with WBS Policy, the Company is required to publish and socialize the Whistleblowing Policy in two (2) languages, i.e. Indonesian and English, to all employees and stakeholders via various Company media, such as: 1) Vendor meetings; 2) Internal forums; 3) Company website, and 4) Internal employee communication media.

Sepanjang tahun 2021, Indonesia Power telah melakukan sosialisasi kebijakan WBS melalui:

1. *Vendor Gathering* tanggal 23 Desember 2021;
2. Email dan *Whatsapp Group* pada saat Periode Pengisian *Survey* Pemahaman Integritas; dan
3. *Website* Perusahaan.

The WBS outreach throughout 2021 was performed through the following:

1. Vendor Gathering on December 23, 2021;
2. E-mail and WhatsApp Group messages during the Integrity Comprehension Survey period; and
3. Company Website.

Jumlah Pengaduan WBS dan Tindak Lanjutnya Tahun 2021

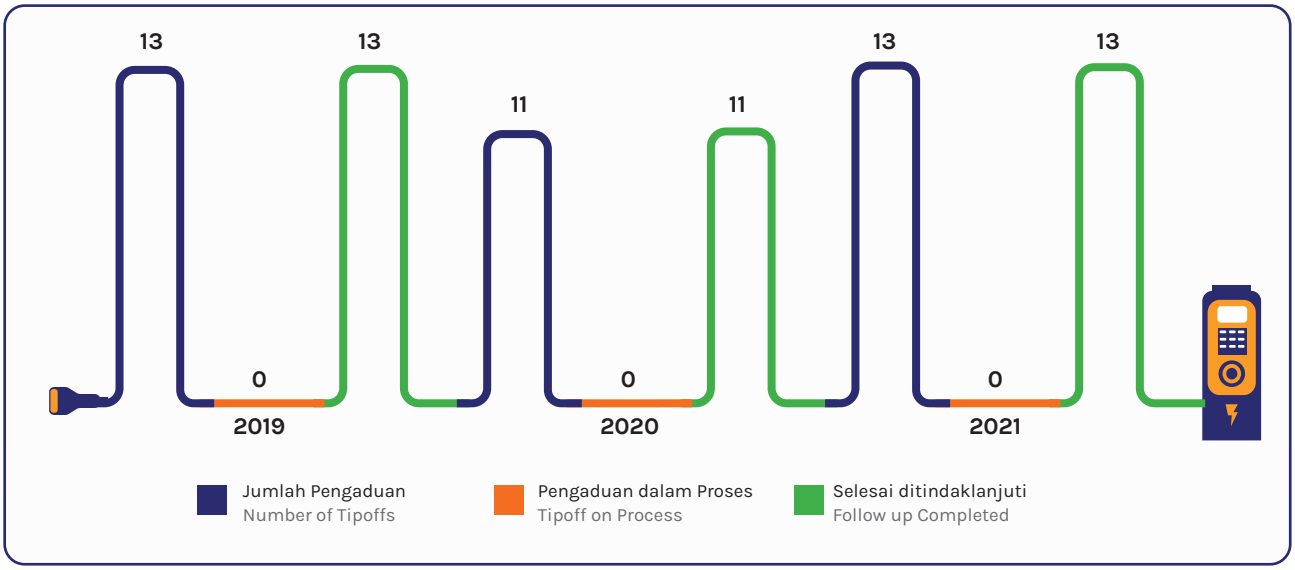
Number of Tipoffs and Follow-Ups in 2021

Indonesia Power melalui pengelola WBS secara aktif merespon dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk guna meminimalisir dampak atau risiko yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut terhadap Perusahaan. Sepanjang tahun 2021 terdapat 13 (tiga belas) pengaduan yang masuk pada WBS Indonesia Power dan telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya.

Through the WBS management, Indonesia Power has actively responded to and followed up all tipoffs submitted in order to minimize the impacts or risks posed by the violations to the Company. In 2021, there were 13 (thirteen) tipoffs submitted to Indonesia Power's WBS, all of which have been fully resolved.

Jumlah Pengaduan dan Status Pengaduan

Number and Status of Whistleblowing Tipoffs



Adapun untuk tindak lanjut atas pelaporan pelanggaran tersebut tercermin dalam tabel sebagai berikut:

Follow-ups for these tipoffs are shown in the following table:

Tanggal Date	Pelapor Whistleblower	Kategori Laporan Pelanggaran Tipoff Category	Penanganan Handling	Sanksi Yang diberikan Sanction Imposed
19 Februari 2021 February 19, 2021	Perorangan Individual	Pengadaan Procurement	Verifikasi pihak terkait dan merespon laporan pelapor Relevant party verification and responding to tipoff	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
23 Maret 2021 March 23, 2021	Perorangan Individual	Pengadaan Procurement	Verifikasi pihak terkait dan merespon laporan pelapor Relevant party verification and responding to tipoff	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
31 Maret 2021 March 31, 2021	Perorangan Individual	Non WBS Non-WBS	Respon Balasan melalui Email Pengaduan Response/reply via whistleblowing e-mail	Tidak ada sanksi disiplin No sanction

WHISTLEBLOWING SYSTEM
WHISTLEBLOWING SYSTEM

Tanggal Date	Pelapor Whistleblower	Kategori Laporan Pelanggaran Tipoff Category	Penanganan Handling	Sanksi Yang diberikan Sanction Imposed
13 & 19 Agustus 2021 August 13 & 19, 2021	Perorangan Individual	Etika Ethics	Penyampaian Surat Permohonan Tindak Lanjut Kepada Direktur SDM Delivery of Request for Follow-up to Director of Human Capital	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
25 Agustus 2021 August 25, 2021	Perorangan Individual	Pengadaan Procurement	Verifikasi pihak terkait dan Penjelasan Hasil Audit Operasional Relevant party verification and explanation of operational audit findings	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
5 Oktober 2021 October 5, 2021	Perorangan Individual	Penyalahgunaan Wewenang Abuse of authority	Verifikasi pihak terkait dan Penjelasan Hasil Audit Operasional Relevant party verification and explanation of operational audit findings	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
25 Oktober 2021 October 25, 2021	Perorangan Individual	Pengadaan Procurement	Verifikasi pihak terkait dan Penjelasan Hasil Audit Operasional Relevant party verification and explanation of operational audit findings	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
28 Oktober 2021 October 28, 2021	Perorangan Individual	Etika Ethics	Penyampaian Surat Permohonan Tindak Lanjut Kepada VP IRR Delivery of Request for Follow-up to VP IRR	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
2 November 2021 November 2, 2021	Perorangan Individual	Pengadaan Procurement	Verifikasi pihak terkait dan merespon terhadap Pelapor Relevant party verification and responding to whistleblower	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
16 November 2021 November 16, 2021	Perorangan Individual	Lahan Land	Verifikasi dan Penyampaian Surat untuk pros tindak lanjut ke PT PLN (Persero) Verification and delivery of letter for follow-up to PT PLN (Persero)	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
28 November 2021 November 28, 2021	Perorangan Individual	Penyalahgunaan Aset Misuse of assets	Verifikasi pihak terkait dan merespon laporan pelapor Relevant party verification and responding to tipoff	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
21 Desember 2021 December 21, 2021	Perorangan Individual	Etika Ethics	Penyampaian Surat Permohonan Tindak Lanjut Kepada GM Delivery of Request for Follow-up to GM	Tidak ada sanksi disiplin No sanction
27 Desember 2021 December 21, 2021	Perorangan Individual	Lahan Land	Penyampaian Permohonan Surat Tindak Lanjut Kepada GRO GAF Delivery of Request for Follow-up to GRO GAF	Tidak ada sanksi disiplin No sanction

Peran Dewan Komisaris Terhadap Implementasi WBS
Role of the Board of Commissioners in WBS

Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas pelaksanaan WBS di Perusahaan. Pemantauan pelaksanaan WBS diserahkan kepada Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit. Laporan WBS juga dibahas dalam rapat Komite Audit dengan

The Board of Commissioners is responsible to monitor the adequacy and effectiveness of WBS implementation in the Company. WBS implementation monitoring is assigned to Committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee. WBS Report is also discussed in Audit

Department of Internal Audit, dimana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris memberikan rekomendasi terkait laporan WBS yaitu menyarankan kepada Department of Internal Audit agar meminta unit yang bersangkutan mengupayakan penyelesaiannya secara tuntas. Dengan adanya pengawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan WBS serta mampu menekan tingkat pelanggaran yang ada di lingkungan Perusahaan.

Committee meeting with Internal Audit Department, where recommendation is given by the Board of Commissioners to the Internal Audit Department to ask for comprehensive settlement by relevant units. The monitoring is expected to improve the effectiveness of WBS management and minimize the number of violation in the Company.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengaduan Pelanggaran
Evaluation of Whistleblowing System Implementation

Indonesia Power senantiasa melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem pelaporan pelanggaran untuk menilai eksistensi dan mengetahui kesesuaian pedoman tersebut dengan kebutuhan Perusahaan serta mengetahui efektivitas dari penerapan yang dilakukan dalam bentuk survei kepada seluruh Insan Indonesia Power maupun kegiatan evaluasi yang dilakukan berkala oleh Tim Pengaduan Pelanggaran itu sendiri.

Perusahaan senantiasa melakukan pengembangan dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap pedoman sistem pengaduan pelanggaran mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan melakukan *review*/revisi secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Indonesia Power always monitors and evaluates the implementation of the whistleblowing system to assess the existence, measure the conformance of the guidelines to the Company's needs, and learn about the effectiveness of the implementation. Such an effort is sought through survey across the Company to all personnel as well as via periodical evaluation by the Whistleblowing Team.

The Company strives to consistently develop and improve the whistleblowing system guidelines by referring to the result of the evaluation, reviewing/revising them regularly according to the Company's needs.



CODE OF CONDUCT
CODE OF CONDUCT

Penerapan *Code of Conduct* merupakan bagian terpenting dalam implementasi tata Kelola Perusahaan yang sehat serta penguatan nilai dan budaya yang dimiliki Perusahaan. Indonesia Power telah memiliki Pedoman Etika Perusahaan sejak tahun 2002. Dokumen tersebut telah ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala pada tahun 2010, 2012, 2016, dan 2019. Code of Conduct yang berlaku saat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 178.K/010/IP/2019 dan No. 006.SK/DEKOM-IP/2019 tanggal 26 Juni 2019.

Code of Conduct atau CoC merupakan acuan bagi Insan Indonesia Power dalam melakukan interaksi diantara manajemen, pegawai serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan kaidah dan etika berbisnis guna menjaga reputasi baik Perusahaan serta mencegah terjadinya penyimpangan.

The implementation of the Code of Conduct is a vital part for implementing a sound Corporate Governance and strengthening the Company's values and culture. Indonesia Power has been guided by a Code of Conduct since 2002. The document has been reviewed and updated periodically in 2010, 2012, 2016, and 2019. The currently applicable Code of Conduct was stipulated by the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 178.K/010/IP/2019 and No. 006.SK/DEKOM-IP/2019 dated June 26, 2019.

Code of Conduct (CoC) serves as a reference for Indonesia Power Personnel in interacting with the management, employees, and stakeholders according to business principles and ethics, in order to maintain the Company's reputation and prevent any deviations.

Nilai dan Budaya Perusahaan
Company Values and Culture

Penjelasan mengenai Nilai dan Budaya Perusahaan dijelaskan lebih lanjut Pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The elaboration of the Company Values and Culture is available in the Chapter of Company Profile of this Annual Report.

Tujuan *Code of Conduct*
Objectives of the Code of Conduct

Tujuan penerapan *Code of Conduct* bagi Setiap Insan Indonesia Power adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pegawai
   a. Menjadi pedoman tentang tingkah laku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan oleh Indonesia Power;
   b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya perusahaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai secara menyeluruh.
2. Untuk Perusahaan (Indonesia Power)
   a. Mendorong kegiatan operasional menjadi lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pegawai, mitra kerja, pelanggan, masyarakat, pemerintah dan *stakeholders* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
   b. kepada para *stakeholders* dalam berhubungan dengan Indonesia Power sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
   c. Meningkatkan nilai Indonesia Power dengan memberikan kepastian dan perlindungan

For Indonesia Power Personnel, the CoC implementation has the following objectives:

1. For Employees
   a. Providing guidelines on the conducts expected and not expected from the employees;
   b. Creating a work environment that upholds the corporate culture and values which eventually will improve employee performance and productivity as a whole.

2. For the Company (Indonesia Power)
   a. Encouraging more efficient and effective operations, given that relations with employees, partners, customers, community, government, and other stakeholders are bound by certain ethical standards;
   b. Providing guidelines on stakeholder relations so as to create good reputation that help maintaining business success in the long run;

   c. Increasing Company values by providing certainty and protection.

3. Untuk Pemegang Saham (*Shareholders*)
   a. Meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham bahwa Indonesia Power dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan tetap memperhatikan kepentingan Indonesia Power.
4. Untuk Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)
   a. Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan *stakeholders* sehingga mendorong reputasi Indonesia Power sebagai perusahaan yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*).

3. For Shareholders
   a. Increasing Shareholders' trust that Indonesia Power is managed prudentially, efficiently, transparently, accountably, and fairly in order to come to the expected level of profitability while taking into account Indonesia Power's interest.
4. For Stakeholders
   a. Creating a harmonious and mutually beneficial relation with the stakeholders, thus improving Indonesia Power's reputation as a good corporate citizen.

Pokok-Pokok *Code of Conduct*

Principles of the Code of Conduct

CoC Indonesia Power mengatur 2 (dua) aspek hal mendasar, yaitu Pedoman Etika Bisnis dan Pedoman Etika Kerja Pegawai.

Pedoman Etika Bisnis merupakan pedoman yang mengatur standar perilaku usaha yang digunakan oleh Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis dalam berinteraksi dan berhubungan dengan *Stakeholders* baik internal maupun eksternal, sedangkan Pedoman Etika Kerja Pegawai merupakan pedoman yang mengatur standar perilaku kerja yang digunakan oleh Insan Indonesia Power dalam melaksanakan tugas untuk dan atas nama Perusahaan, maupun dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama rekan kerja serta *Stakeholders*.

Muatan/pokok-pokok CoC Indonesia Power tercermin pada tabel sebagai berikut:

The CoC covers two (2) basic aspects, i.e. Business Ethics Guidelines and Employee Work Ethics Guidelines.

Business Ethics Guidelines provide the standards for business conducts performed by the Company as a business entity in interacting and relating with internal and external stakeholders, whereas the Employee Work Ethics Guidelines provide the standards for work behavior shown by Indonesia Power Personnel in performing duties for and on behalf of the Company and in interacting and relating with coworkers and stakeholders.

Indonesia Power CoC principles are presented in the table below:

Bab I. Pendahuluan Chapter I. Introduction	
1. Dasar Pemikiran	1. Rationale
2. Misi dan Visi Indonesia Power	2. Indonesia Power's Mission and Vision
3. Nilai-Nilai Perusahaan	3. Corporate Values
4. Tujuan Pedoman Etika Perusahaan	4. Purpose of the Code of Conduct
5. Pihak yang Wajib Mematuhi Pedoman Etika Perusahaan	5. Parties with Mandatory Compliance with the Code of Conduct
6. Tanggung Jawab Pegawai Indonesia Power	6. Responsibility of Indonesia Power Employees
7. Tanggung Jawab Para Pemimpin Indonesia Power	7. Responsibility of Indonesia Power Leaders

CODE OF CONDUCT
CODE OF CONDUCT

Bab II. Kebijakan Etika Perusahaan Chapter II. Policy on the Code of Conduct			
A. Pedoman Etika Kerja A. Guidelines for Work Ethics		B. Pedoman Etika dan Perilaku Pegawai B.Guidelines for Employee's Ethics and Conducts	
1. Hubungan dengan Pegawai	1. Employee Relations	1. Perilaku Etis terhadap sesama pegawai	1. Ethical Conduct among Employees
2. Hubungan dengan Pemegang Saham	2. Shareholder Relations	2. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan Perusahaan	2. Compliance with Company Laws and Regulations
3. Hubungan dengan Pelanggan	3. Customer Relations	3. Benturan Kepentingan	3. Conflict of Interest
4. Hubungan dengan Pemasok	4. Supplier Relations	4. Kepatuhan Terhadap K3L	4. Compliance with OHSE
5. Hubungan dengan Kreditur/Investor	5. Creditor/Investor Relations	5. Pembayaran Tidak Wajar, Partisipasi Politik dan Organisasi Profesi	5. Improper Payments, Political Participation, and Professional Organizations
6. Hubungan dengan Pemerintah (Regulator)	6. Government Relations	6. Sistem Teknologi Informasi	6. Information Technology System
7. Hubungan dengan Anak Perusahaan/ Perusahaan Patungan	7. Parent-Subsidiary/ Joint Venture Relations	7. Penyimpanan Dokumen	7. Document Storage
8. Hubungan dengan Masyarakat	8. Community Relations	8. Hak atas Kekayaan Intelektual	8. Intellectual Property Rights
		9. Pengawasan & Penggunaan Aset Perusahaan	9. Supervision and Utilization of Company Assets
		10. Kerahasiaan Informasi & Media Komunikasi	10 Information Confidentiality and Communication Media
		11. Memberi & Menerima	11. Providing and Receiving
		12. Integritas Laporan Keuangan	12. Integrity of Financial Statements.
		13. Aktivitas Sosial Perusahaan dan Pegawai	13. Social Activities of Company and Employees
		14. Etika Pegawai dalam menggunakan Media Sosial	14. Employee Ethics in Using Social Media
		15. Etika Pegawai terkait Komunikasi dan Informasi	15. Employee Ethics on Communication and Information
		16. Etika Pegawai terkait Aktivitas Sosial dan Politik	16. Employee Ethics on Social and Political Activities
		17. Etika Pegawai terkait Teknologi Informasi	17. Employee Ethics on Information Technology

Bab III. Petunjuk Pelaksanaan Chapter III. Statement of Practice	
1. Konsultasi berhubungan dengan Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*)	1. Consultation related to the Code of Conduct
2. Pelanggaran Etika Perusahaan	2. Violation of the Code of Conduct
3. Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)	3. Violation Reporting (Whistleblowing System)
4. Penghargaan dan Sanksi	4. Rewards and Sanctions

Pernyataan Kepatuhan *Code of Conduct* di Seluruh Level Organisasi

Statement of Compliance with the Code of Conduct at All Organizational Levels

Indonesia Power mewajibkan Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan, pejabat, dan seluruh mitra kerja Perusahaan untuk membaca dan memahami CoC serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Indonesia Power senantiasa berupaya menegakan CoC dalam bentuk sikap, perbuatan, dan komitmen yang dilakukan dengan penuh kesadaran melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Pernyataan Kepatuhan terhadap CoC
   Setiap Pegawai Indonesia Power Diwajibkan untuk menandatangani Pernyataan Kepatuhan dan Komitmen Pada Etika Bisnis dan Etika Kerja yang wajib diperbaharui setiap tahun. Pada Tahun 2021 Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap CoC Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris telah selesai terkumpul 100% pada aplikasi IP PRO GCG.
2. Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan
   Setiap jajaran Indonesia Power harus membuat pernyataan bebas benturan kepentingan setiap tahun. Dalam pernyataan tersebut disebutkan situasi yang memiliki potensi benturan kepentingan harus dihindari. Pada tahun 2021, Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan Direksi, Dewan Komisaris dan General Manager telah selesai terkumpul 100%
3. Pakta Integritas
   Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh pejabat pemegang kewenangan dan seluruh rekanan/mitra Indonesia Power yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Pakta Integritas ditandatangani oleh Insan Indonesia Power dalam rangka implementasi pengendalian Gratifikasi. Pada tahun 2021, Pakta Integritas telah ditandatangani oleh seluruh Insan Indonesia Power 100% pada aplikasi IP PRO GCG.
4. Daftar Khusus
   Daftar khusus merupakan Informasi daftar kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Pada tahun 2021, pengumpulan Daftar Khusus Direksi dan Dewan Komisari telah terkumpul 100%.

Indonesia Power requires the Board of Commissioners, the Board of Directors, all employees, officials, and work partners to read, understand, and implement the CoC in the performance of their respective duties and responsibilities. Indonesia Power puts all efforts into nurturing its Code of Conduct by promoting considerate manner, action, and commitment through various activities as follows:

1. Statement of Compliance with the CoC
   Every Indonesia Power employee must sign the Statement of Compliance with and Commitment to the Code of Conduct. This Statement must be renewed every year. In 2021, the Statements of Compliance with the CoC signed by the employees, BOD, BOC, and BOC Committees have been fully submitted (100%) on the IP PRO GCG application.
2. Statement of Free from Conflict of Interest
   Every year, all Indonesia Power personnel must declare their statement of free from conflict of interest. The statement requires that any situation with potential conflict of interest must be avoided. In 2021, the Statements of Free from Conflict of Interest by the BOD, BOC, and General Managers have been fully submitted (100%).
3. Integrity Pact
   The Integrity Pact is signed by authority-holding officials and all Indonesia Power's partners involved in procurement of goods and services. The Pact must also be signed by Indonesia Power Personnel as a part of gratification control endeavor. In 2021, the Integrity Pacts signed by all Indonesia Power Personnel have been fully submitted (100%) on the IP PRO GCG application.
4. Special Register
   Special Register is a list containing information on shareholding by the BOD and BOC and their families in the Company and/or other companies, along with the date of purchase. In 2021, the Special Register has been completed 100%.

CODE OF CONDUCT
CODE OF CONDUCT

Pernyataan *Code of Conduct* Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi
Statement of the Code of Conduct Applies to All Organizational Levels

Code of Conduct Indonesia Power menjadi standar acuan dalam melakukan interaksi diantara manajemen, pegawai serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan nilai dan budaya perusahaan dan prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, Indonesia Power memberlakukan kewajiban untuk mentaati CoC bagi seluruh Insan Indonesia Power dari mulai Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi, Jajaran Manajemen dan Pegawai.

Pelaksanaan dan penerapan CoC menjadi tanggung jawab seluruh karyawan di seluruh jenjang organisasi, serta sebagai salah satu komitmen Indonesia Power untuk menerapkan *Good Corporate Governance* dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

The Code of Conduct serves as a reference for interactions among the Management, the employees, and the stakeholders according to the desired Company values and culture and the GCG principles. Therefore, Indonesia Power requires all of its personnel to comply with the CoC. This applies to the Board of Commissioners, Board of Commissioners' Committees, Board of Directors, the Management, and all Employees.

The implementation of the Code of Conduct becomes the responsibility of all employees across all organizational levels. This is a part of Indonesia Power's commitment to implementing a Good Corporate Governance and achieving the pre-determined vision and mission.

Sosialisasi *Code of Conduct*
Dissemination of the Code of Conduct

Agar insan Indonesia Power senantiasa patuh terhadap CoC dan secara sadar dan sukarela akan mengimplementasikan CoC dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Indonesia Power secara berkala melakukan sosialisasi penerapan atau implementasi CoC kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai melalui berbagai media komunikasi antara lain *e-mail, website,* intranet, visual manajemen, dan forum lainnya.

Selain itu, CoC juga menjadi materi yang wajib disosialisasikan oleh seluruh unit dan merupakan salah satu target kinerja Unit di dalam aspek OCR (*Organization Capital Readiness*).

Berikut kegiatan sosialisasi CoC yang dilaksanakan Indonesia Power pada tahun 2021 diantaranya adalah:
- Melakukan pengukuran Pemahaman CoC yang mana setiap tahunnya Indonesia Power melakukan survei tingkat pemahaman CoC guna mengetahui sejauh mana Insan Indonesia Power memahami implementasi CoC dan memahami mekanisme pelaporan atas pelanggaran terhadap CoC. Hasil survei pemahaman CoC tahun 2021 menunjukan tingkat pemahaman Insan Indonesia Power terhadap CoC adalah 94,93% meningkat dari tahun 2020 sebesar 92,97%.
- Penandatanganan Komitmen CoC, yang mana setiap tahunnya seluruh Insan Indonesia Power wajib menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap CoC.
- *Email* dan Whatsapp Group seluruh Pegawai terkait dengan materi CoC.

So that all Indonesia Power personnel comply with the Code of Conduct and deliberately and willingly implement the Code of Conduct in their daily task performance, Indonesia Power periodically disseminates the Code of Conduct implementation to the Board of Commissioners and its supporting organs, the Board of Directors and officials at one level under the Board of Directors, and all employees via various communication media, such as email, website, intranet, visual management, and other forums.

The Code of Conduct is a prerequisite material to be communicated by all Units in the Company and a target of Unit performance in Organizational Capital Readiness (OCR) aspect.

The CoC disseminations in 2021 were as follows:
- Measuring the comprehension on CoC through annual survey to find out to which extent Indonesia Power Personnel understand about the implementation of CoC and the whistleblowing system related to CoC violations. The CoC comprehension survey in 2021 scored 94.93% of comprehension level, which was an improvement from 2020 at 92.97%.
- Signing the Commitment of Compliance with CoC which must be performed on an annual basis by Indonesia Power Personnel.
- Disseminating CoC material to all employees via email and Whatsapp groups.

Penegakan *Code of Conduct*

Enforcement of the Code of Conduct

Indonesia Power melakukan penegakan terhadap CoC dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan CoC dan menyediakan fasilitas bagi pengaduan terhadap pelanggaran CoC.

Indonesia Power enforces the CoC by monitoring its implementation periodically and providing facilities for those wanting to report the CoC violation.

Pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas CoC tersebut kepada atasan, Pejabat Yang Berwenang Menindak (PYBM) serta melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS). Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti-bukti akurat sehingga pelanggaran dapat diproses lebih lanjut. Setiap pelanggaran atas CoC. akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengenaan sanksi tersebut tidak bersifat diskriminatif.

The employees may report alleged violation of the Code of Conduct to their superior or to Officials Having Authority to Take Action (OHAA) and via Whistleblowing System (WBS). All reports must be supplied with accurate data and/or evidences for the violation to be escalated. Any violation of the Code of Conduct is subject to sanction pursuant to the applicable regulations in which such imposition of sanction is non-discriminatory.

Pelapor dapat melaporkan indikasi *fraud*, kriminal, pelanggaran kebijakan Perusahaan dan pelanggaran CoC yang melibatkan segenap jajaran Indonesia Power dengan menyampaikan pengaduan melalui media pelaporan yaitu sebagai berikut:

Any individual may report any indication of fraud, crime, violation of Company policy, and violation of the Code of Conduct that involves any Indonesia Power personnel by submitting a report to the available reporting channels, as follows:



Indonesia Power berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan informasi pelapor dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran sebagai penerapan prinsip kerahasiaan (*confidentiality*). Identitas pelapor hanya diketahui oleh admin pengaduan pelanggaran kecuali pelapor mengizinkan untuk dibuka identitasnya.

Indonesia Power is committed to keeping the confidentiality of the whistleblower and the reportee as an implementation of the principle of confidentiality. The whistleblower's identity will only be known to the WBS administrator, unless the whistleblower allows the disclosure of their identity.

Jenis Sanksi Pelanggaran *Code of Conduct*
Types of Sanction for Code of Conduct Violation

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 258.K/010/IP/2017 terkait ketentuan Penegakan Disiplin Pegawai Pasal 42, segala pelanggaran atas CoC akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin ringan, sedang dan berat. Jenis sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran CoC adalah sebagai berikut:

According to Article 42 of the Decree of the Board of Directors No. 258.K/010/IP/2017 concerning Disciplinary Enforcement for Employees, any violation of the Code of Conduct is subject to sanction in the form of minor, medium, and major disciplinary actions. Below are the sanctions that may be imposed for the violation of the Code of Conduct:

No	Kategori Pelanggaran Category of Violation	Jenis Sanksi	Type of Sanction
1	Pelanggaran ringan Minor violation	- Sanksi Tertulis Selama tiga bulan - Sanksi Tertulis Selama enam bulan	- Written Sanction, applicable for three months - Written Sanction, applicable for six months
2	Pelanggaran sedang Medium violation	- Sanksi Tertulis Selama sembilan bulan - Sanksi Tertulis Selama 12 bulan	- Written Sanction, applicable for nine months - Written Sanction, applicable for twelve months
3	Pelanggaran berat Major violation	- Demosi pada jenjang jabatan satu tingkat di bawahnya, dan diturunkan minimum satu *grade* dibawahnya - Diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	- Demotion to one lower level of position, and reduction to minimum one lower grade - Dishonorable termination of employment, which will be implemented according to the applicable laws and regulations

Tindakan lain yang diduga merugikan orang lain dan/atau Perusahaan yang belum tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan ini atau belum dimasukan dalam klasifikasi Pelanggaran Disiplin Ringan, Sedang, atau Berat, klasifikasinya ditetapkan oleh Lembaga Kerja Sama Bipartit.

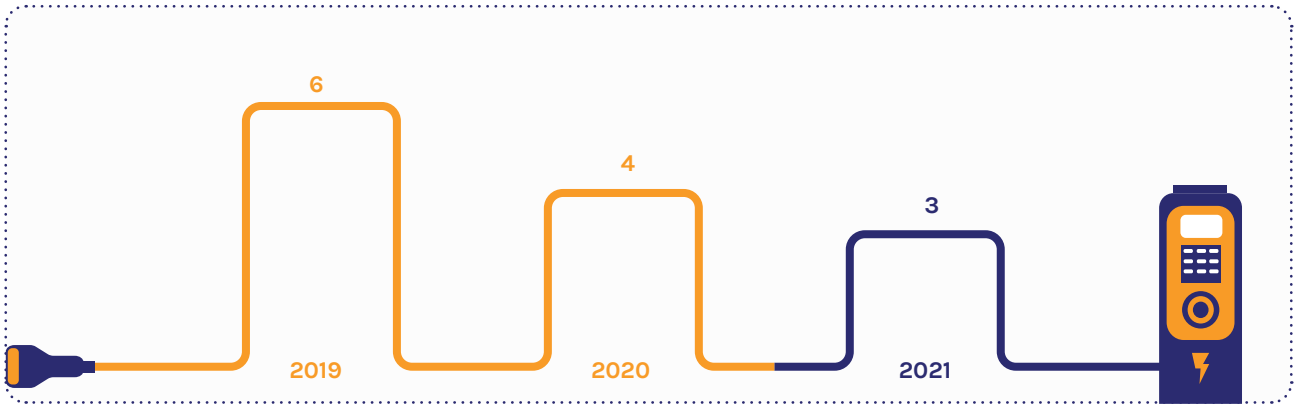
Other actions that are alleged to harm other people and/or the Company, which have not been set out in Articles 4 and 5 of the Decree or have not been classified into the Minor, Medium, or Major categories, will be classified by Bipartite Cooperation Institution.

Jumlah Pelanggaran *Code of Conduct* dan Sanksi yang Diberikan
Number of Code of Conduct Violations and Sanctions Imposed

Indonesia Power secara tegas memberikan sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran CoC apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan. Di tahun 2021, terdapat 3 (tiga) pelanggaran CoC dengan kategori pelanggaran sanksi ringan dan sedang. Pelanggaran CoC tersebut telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya.

Indonesia Power strictly imposes the sanctions according to the CoC violations committed, if any. In 2021, three (3) employees committed CoC violations and received minor and medium sanctions. All of these CoC violations have been fully addressed.

Jumlah Pelanggaran *Code of Conduct* Tahun 2019-2021
Number of Code of Conduct Violations in 2019–2021



Adapun Sanksi dan tindak lanjut atas pelaporan pelanggaran tersebut tercermin dalam tabel sebagai berikut:

The sanctions and follow-ups on these tipoffs are shown in the following table:

Sanksi atas pelaporan pelanggaran CoC Perusahaan Tahun 2021
Sanction for Reported CoC Violations in 2021

No	Kategori Pelanggaran Violation Category	Penanganan/sanksi yang diberikan (Tindak Lanjut) Action/Sanction Imposed (Follow-up)	Jumlah Karyawan Number of Employee
1	Sanksi Ringan Minor Sanction	Sanksi Tertulis Selama 3 bulan Written Sanction, applicable for three (3) months	1
2	Sanksi Sedang Medium Sanction	Sanksi Tertulis Selama 9 bulan Written Sanction, applicable for nine (9) months	2
TOTAL			**3**

Evaluasi dan Monitoring Tindak Lanjut Pelanggaran *Code of Conduct*
Evaluation and Monitoring of Follow-up on Code of Conduct Violation

Indonesia Power secara konsisten melakukan evaluasi dan memantau pelanggaran CoC yang masuk melalui saluran WBS Perusahaan untuk mengukur sejauh mana Insan Indonesia Power mengetahui dan memahami pelaksanaan CoC Perusahaan termasuk mekanisme pelaporan pelanggaran Standar Etika Perusahaan. Selama tahun 2021, jumlah pelanggaran CoC sebanyak 3 (tiga) pelanggaran lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 4 (empat) pelanggaran. Hal ini menunjukan tingkat pengelolaan pelanggaran CoC Indonesia power telah berjalan efektif dengan menurunnya jumlah pelanggaran CoC.

Indonesia Power consistently evaluates and monitors CoC violations reported via WBS in order to measure to which extent Indonesia Power Personnel know and understand the implementation of CoC, including the whistleblowing procedures for CoC violations. In 2021, there were three (3) CoC violations. This number was lower than in 2020 in which there were four (4) CoC violations. This demonstrates that the effectiveness of CoC violation management has improved.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN

IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY

Indonesia Power selalu terbuka terhadap setiap pengaduan dari *stakeholder* dengan terlebih dahulu mengedepankan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka permasalahan akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Indonesia Power is always open to receiving every complaint from the stakeholders by prioritizing deliberation and consensus. When deliberation and consensus fails, settlement is then sought through legal pursuit.

Permasalahan Hukum Dewan Komisaris Dan Direksi

Legal Issues Faced by the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sepanjang tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi Indonesia Power yang sedang menjabat tidak memiliki perkara penting/permasalahan hukum, baik perdata, pidana maupun kasus lainnya.

Throughout 2021, incumbent members of the Board of Commissioners and Board of Directors were not involved in any important cases/legal issues, neither in civil cases, criminal cases, nor other cases.

Permasalahan Hukum Indonesia Power

Legal Issues Faced by Indonesia Power

Hingga akhir 31 Desember 2021, Indonesia Power meyakini tidak memiliki perkara yang berdampak penting pada kelangsungan hidup dan kegiatan usaha Perusahaan, namun sebagai wujud transparansi atas Laporan Tahunan, Indonesia Power mengungkapkan perkara yang dihadapi oleh Perusahaan dan Entitas Anak Perusahaan hingga akhir 31 Desember 2021.

As of December 31, 2021, Indonesia Power believed that there were no cases that have brought significant impact on the Company's sustainability and business activities. However, to seek transparency of the Annual Report, Indonesia Power discloses the cases faced by the Company and its Subsidiaries until December 31, 2021.

Perkara hukum yang dihadapi Perusahaan adalah perkara hukum yang telah bersengketa di pengadilan yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

The legal cases faced by the Company, i.e. those disputed at the court, are shown in the following table:

Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan dan Entitas Anak Perusahaan Tahun 2021
Important Cases Faced by the Company and Subsidiaries in 2021

Permasalahan Hukum Permasalahan Hukum	Jenis Perkara yang Dihadapi Perusahaan Type of Case Faced by the Company				Jenis Perkara yang Dihadapi Entitas Anak Perusahaan Type of Case Faced by Subsidiary			
	Perdata Civil Case	Pidana Criminal Case	Tata Usaha Negara (TUN) State Administration Case	Perkara Lainnya Other Cases	Perdata Civil Case	Pidana Criminal Case	Tata Usaha Negara (TUN) State Administration Case	Perkara Lainnya Other Cases
Telah Selesai (Berkekuatan Hukum) Settled (with Legal Force)	1	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian On Progress	1	0	0	0	0	0	0	0
Total	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Permasalahan Hukum Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap
Legal Issues with Permanent Legal Force

No	Pihak yang Berperkara dengan Indonesia Power Litigant against Indonesia Power	Jenis Perkara Type of Case	Pokok Permasalahan Issue	Status Penyelesaian Settlement Status	Nilai nominal tuntutan/ gugatan Nominal amount of claim/suit	Sanksi Sanction	Risiko yang dihadapi perusahaan Risk exposed to the Company
1	Perkara No. 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/ PN.Niaga.Jkt. Pst. tanggal 10 Agustus 2021. Antara Ir. Liliana Wibisono selaku Pimpinan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta sebagai PEMOHON PAILIT. PT Indonesia Power sebagai TERMOHON PAILIT.	Perdata	Bahwa Indonesia Power telah menerima surat dari Konsorsium Kinarya Liman Margaseta tanggal 09 November 2020 perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang (*Cessie*) yang pada pokoknya memberitahukan bahwa sebagian tagihan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) telah dialihkan (*cessie*) kepada PT Baloi 128, berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan. Bahwa Indonesia Power telah menerima surat dari kuasa hukum dari Konsorsium Kinarya Liman Margaseta (Otto Hasibuan) perihal Somasi Terakhir yang pada pokoknya menyampaikan memperingatkan untuk terakhir kalinya agar membayar kewajiban kepada Konsorsium Kinarya Liman Margaseta dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak surat ini diterima untuk menghindari tuntutan hukum secara perdata maupun kepailitan. Bahwa atas putusan tersebut, Indonesia Power sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2020 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.	Pada tanggal 01 November 2021 telah dibacakan amar putusan yang pada intinya menolak gugatan kepailitan dari Pemohon Pailit. Pemohon Pailit (Pemohon Kasasi) mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 November 2021. Kemudian berdasarkan Surat Pengadilan Niaga Pada Negeri Jakarta Pusat Pemberitahuan dan Penyampaian Pencabutan Kasasi dan Memori Kasasi Akta No. 64 Kas/ Pdt.Sus Pailit/2021. Jo. No. 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 14 Desember 2021 disampaikan bahwa permohonan kasasi telah dicabut.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH PERUSAHAAN
IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY

No	Pihak yang Berperkara dengan Indonesia Power Litigant against Indonesia Power	Jenis Perkara Type of Case	Pokok Permasalahan Issue	Status Penyelesaian Settlement Status	Nilai nominal tuntutan/ gugatan Nominal amount of claim/suit	Sanksi Sanction	Risiko yang dihadapi perusahaan Risk exposed to the Company
1	Case No. 35/ Pdt.Sus-Pailit/2021/ PN.Niaga.Jkt. Pst. dated August 10, 2021. Between Ir. Liliana Wibisono in her capacity as the Head of Kinarya Liman Margaseta Consortium as BANKRUPTCY APPELLANT. PT Indonesia Power as BANKRUPTCY APPELLEE.	Civil Case	Whereas Indonesia Power has received a letter from Kinarya Liman Margaseta Consortium dated November 09, 2020 regarding the Announcement of Transfer of Receivables (Cessie) which substantially notifies that a part of the claim amounting to Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) has been assigned to PT Baloi 128, in accordance with the Deed of Agreement of Transfer of Right to Claims. Whereas Indonesia Power has received a letter from the proxy of Kinarya Liman Margaseta Consortium (Otto Hasibuan) regarding the Final Legal Notice which substantially warns for the last time that PT Indonesia Power shall pay its liabilities to Kinarya Liman Margaseta Consortium within not later than three (3) days since the acceptance of this letter in order to avoid civil and bankruptcy lawsuit. Whereas based on the verdict, Indonesia Power was seeking a legal remedy of Judicial Review on October 12, 2020 through the Clerk of South Jakarta District Court.	On November 01, 2021, an injunction has been read, which substantially rejected the bankruptcy appeal by the Bankruptcy Appellant. The Bankruptcy Appellant (Petitioner for Appeal) sought a legal remedy to the verdict of the Commercial Court at Central Jakarta District Court on November 09, 2021. Further, in accordance with the Letter of Commercial Court at Central Jakarta District Court regarding the Announcement of Revocation of Appeal and Memorandum of Appeal of Deed No. 64 Kas/Pdt.Sus Pailit/2021. in conjunction with No. 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst. dated December 14, 2021 was stated that the petition for appeal has been revoked.	N/A	N/A	N/A

Permasalahan Hukum Dalam Proses Penyelesaian
Legal Issues on Progress

No	Pihak yang Berperkara dengan Indonesia Power Litigant against Indonesia Power	Jenis Perkara Type of Case	Pokok Permasalahan Issue	Status Penyelesaian Settlement Status	Nilai nominal tuntutan/ gugatan Nominal amount of claim/suit	Sanksi Sanction	Risiko yang dihadapi perusahaan Risk exposed to the Company
1	Perkara Perdata Nomor 390/Pdt.G/2021/PN Jkt. Tim. tanggal 04 Agustus 2021 antara • PT Indonesia Power selaku Penggugat; • PT Liman Obor Cahaya, sebagai Tergugat I; • PT Margaseta Utama, sebagai Tergugat II; • PT Kinarya Gemilang Adhitama, sebagai Tergugat III; • PT Perusahaan Gas Negara, sebagai Turut Tergugat I;	Perdata	Bahwa perbuatan Konsorsium Kinarya Liman Margaseta (KKLM) yang tidak memindahkan kompresor miliknya dari lokasi tanah Indonesia Power dan tidak melakukan pembongkaran bangunan serta fasilitas pendukungnya padahal perjanjian sewa menyewa atas fasilitas kompresor tersebut telah berakhir sejak tanggal 31 Maret 2017 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan Hak Subyektif Penggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum KKLM, bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.	Berdasarkan pada *website* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur panggilan sidang pertama dilaksanakan hari Kamis, tanggal 02 September 2021 dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkara dipersidangan.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

No	Pihak yang Berperkara dengan Indonesia Power Litigant against Indonesia Power	Jenis Perkara Type of Case	Pokok Permasalahan Issue	Status Penyelesaian Settlement Status	Nilai nominal tuntutan/ gugatan Nominal amount of claim/suit	Sanksi Sanction	Risiko yang dihadapi perusahaan Risk exposed to the Company
1	Civil Case No. 390/ Pdt.G/2021/PN Jkt. Tim. dated August 04, 2021 between - PT Indonesia Power as the Plaintiff; - PT Liman Obor Cahaya, as Defendant I; - PT Margaseta Utama, as Defendant II; - PT Kinarya Gemilang Adhitama, as Defendant III; - PT Perusahaan Gas Negara, as Co-Defendant I;	Civil Case	Whereas the actions of Kinarya Liman Margaseta Consortium (KKLM) of not removing its compressor from Indonesia Power's site and of not demolishing its buildings and supporting facilities following the expiry of the lease agreement on the compressor facility since March 31, 2017 are deemed as Unlawful Acts that are against the Plaintiff's Subjective Rights, against the legal obligation of KKLM, and against the public decorum.	According to the Case Tracking System of East Jakarta District Court, the summons for the first trial was held on Thursday, September 02, 2021. The case is currently undergoing the hearing process at the court.	N/A	N/A	N/A

Permasalahan Hukum Pada Entitas Anak Perusahaan

Legal Issues Faced by Subsidiaries

Hingga akhir 31 Desember 2021, tidak terdapat permasalahan hukum pada entitas Anak Perusahaan Indonesia Power, Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan baik perdata, pidana maupun kasus lainnya.

As of December 31, 2021, there were no legal issues (civil, criminal, or other cases) faced by either Indonesia Power's subsidiaries or the Board of Directors and the Board of Commissioners of the subsidiaries.

Informasi Terkait Sanksi Administrasi

Information on Administrative Sanction

Sepanjang tahun 2021, tidak ada sanksi administrasi yang dikenakan kepada Perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan, dan lainnya).

Throughout 2021, there was no administrative sanction for the Company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and Board of Commissioners that was imposed by the relevant authority (capital market authority, banking authority, or other authorities).

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Indonesia Power senantiasa berkomitmen untuk menerapkan aspek transparansi yang merupakan salah satu bagian dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Indonesia Power memberikan kemudahan akses informasi dan data Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja Perusahaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, melalui jalur-jalur komunikasi seperti siaran *pers* dan paparan lainnya.

Indonesia Power is always committed to implementing the transparency aspect of the Good Corporate Governance principles. All stakeholders are provided with the information and data on the Company's financial and non-financial performances which are accessible via communication channels such as press releases and other exposures.

Indonesia Power menyediakan akses informasi bagi seluruh pemangku kepentingan melalui https://www.indonesiapower.co.id yang memuat berbagai informasi mengenai Perusahaan yang tersedia dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Indonesia Power provides access to information for all stakeholders via https://www.indonesiapower.co.id that contains various information on the Company in two languages, i.e. Indonesian and English.



Selain itu, Indonesia Power juga menyediakan sarana informasi dengan menghubungi kantor pusat secara langsung melalui alamat berikut.

Indonesia Power also provides means of information via direct contact to the Head Office at the following address.

PT INDONESIA POWER

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
(62-21) 5267666 (hunting)
(62-21) 5252623

Kebijakan Informasi dan Data Perusahaan

Company Information and Data Policy

Kebijakan mengenai keterbukaan informasi, Indonesia Power mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 37.K/010/IP/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pedoman Komunikasi Perusahaan dan Keputusan Direksi Nomor 246.K/010/IP/2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang diatur dalam kebijakan tersebut, antara lain sebagai berikut:

The policy on the transparency of information in Indonesia Power is guided by the Decree of the Board of Directors Number 37.K/010/IP/2012 dated March 21, 2012 on Corporate Communication Guidelines and Decree of the Board of Directors Number 246.K/010/IP/2017 dated December 31, 2017 on Service, Disclosure, and Transparency of Public Information. The policy sets out the following aspects:

Pedoman Komunikasi Perusahaan	Corporate Communication Guidelines	Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Infomasi Publik	Service, Disclosure, and Transparency of Public Information
Mengatur Komunikasi Perusahaan, Stakeholders Perusahaan, Strategi Komunikasi, Penanggung Jawab Kegiatan Komunikasi Perusahaan, Klasifikasi Informasi dan Pengungkapan Informasi ke Publik, Juru Bicara dan Substansi Materi Informasi, Koordinasi Pengumpulan Data dan Penyebarannya, Manajemen Krisis, Desentralisasi Pengelolaan Komunikasi, Program dan Anggaran dan Pelaporan dan Evaluasi.	Corporate Communication, Company Stakeholders, Communication Strategy, Person in Charge of Corporate Communication Activity, Information Classification and Disclosure of Information to the Public, Spokesman and Content of Information Material, Coordination for Data Collection and Distribution, Crisis Management, Decentralization of Information Management, Reporting and Evaluation Program and Budget.	Mengatur Pengungkapan Informasi Publik, Hak Pemohon Informasi Publik, Kewajiban Pengguna Informasi Publik, Hak dan Kewajiban Perusahaan, Mekanisme Penyampaian Informasi Publik, Pengelolaan Informasi Publik, Tugas dan Tanggung Jawab PPID, Wewenang PPID, Standar Pelayanan Informasi Publik, Pelanggaran terhadap Pengungkapan Informasi Publik.	Disclosure of Information to the Public, Rights of Public Information Requester, Obligation of Public Information User, Company's Rights and Obligation, Public Information Disclosure Mechanism, Public Information Management, Duty and Responsibility of Information and Data Administration Officer (IDAO), IDAO Authority, Public Information Service Standard, Violation of Disclosure of Public Information.

Pengelola Akses Informasi

Information Access Administrator

Indonesia Power telah menunjuk juru bicara sekaligus pejabat pengelola informasi dan dokumen (PPID) Perusahaan, yaitu Sekretaris Perusahaan sebagai PPID Kantor Pusat dan Manajer Pengelola Kehumasan sebagai PPID Unit Kerja.

Indonesia Power has appointed a spokesperson cum Information and Data Administration Officer (IDAO) for the Company, namely the Corporate Secretary as the IDAO of the Head Office and Public Relation Manager as the IDAO of Work Unit.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA



Media Informasi Kepada Pihak Eksternal
Media of Information to External Parties

Akses informasi Indonesia Power dapat dilakukan melalui media sebagai berikut:

Information on Indonesia Power is accessible through the following media:

Website Perusahaan
Company Website

Website Indonesia Power https://www.indonesiapower.co.id memuat informasi antara lain:

a. Profil dengan konten Sekilas Indonesia Power, Manajemen, Sejarah, Penghargaan dan Sertifikasi, Kamus dan Istilah, Keterbukaan Informasi Publik, Pertumbuhan Perusahaan, Kinerja Perusahaan dan Testimoni *Stakeholders*;
b. Produk dan Layanan dengan konten Produk, Layanan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan;
c. Tata Kelola dengan konten Praktik Tata Kelola, Pedoman Tata Kelola, Pedoman Perilaku, Pedoman Dewan, Mekanisme Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System* (WBS), LHKPN, GCG *Assessment*, Informasi Pemegang Saham dan Informasi RUPS;
d. Komunitas dan Lingkungan dengan konten Program Ketaatan Lingkungan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, *Corporate Social Responsibility*, Produk CSR, Program Keanekaragaman Hayati.

The website https://www.indonesiapower.co.id contains the following information:

a. Profile, covering Indonesia Power Overview, Management, History, Awards & Certifications, Glossary & Terns, Public Information Disclosure, Company Growth, Company Performance, and Stakeholder Testimonials;
b. Products and Services, covering Products, Services, and Subsidiaries and Joint Ventures;
c. Governance, covering Governance Practices, GCG Code, Code of Conduct, Board Manual, Grievance Mechanism, Gratification Control, Whistle Blowing System, State Official Wealth Report (LHKPN), GCG Assessment, Shareholder Information, and GMS Information;
d. Community and Environment, covering Environmental Compliance Program. Occupational Health and Safety, CSR, CSR News, CSR Products, and Biodiversity Programs;

e. Komunikasi Berkelanjutan memuat konten Berita, Dokumentasi Video, Inpower Magz, Report (*Annual Report, Sustainability Reports, Statistic Report* dan *Financial Report*) dan *Ebooks*;
f. Karir dengan konten Peluang Karir, Rekrutmen dan IP Academy;
g. Kontak Perusahaan.

e. Sustainable Communication, covering News, Documentation, Videos, InPower Magz, Reports (Annual Reports, Sustainability Reports, Statistical Reports, and Financial Statements), and E-books;
f. Career, covering Career Opportunities, Recruitment, and IP Academy;
g. Company Contacts.

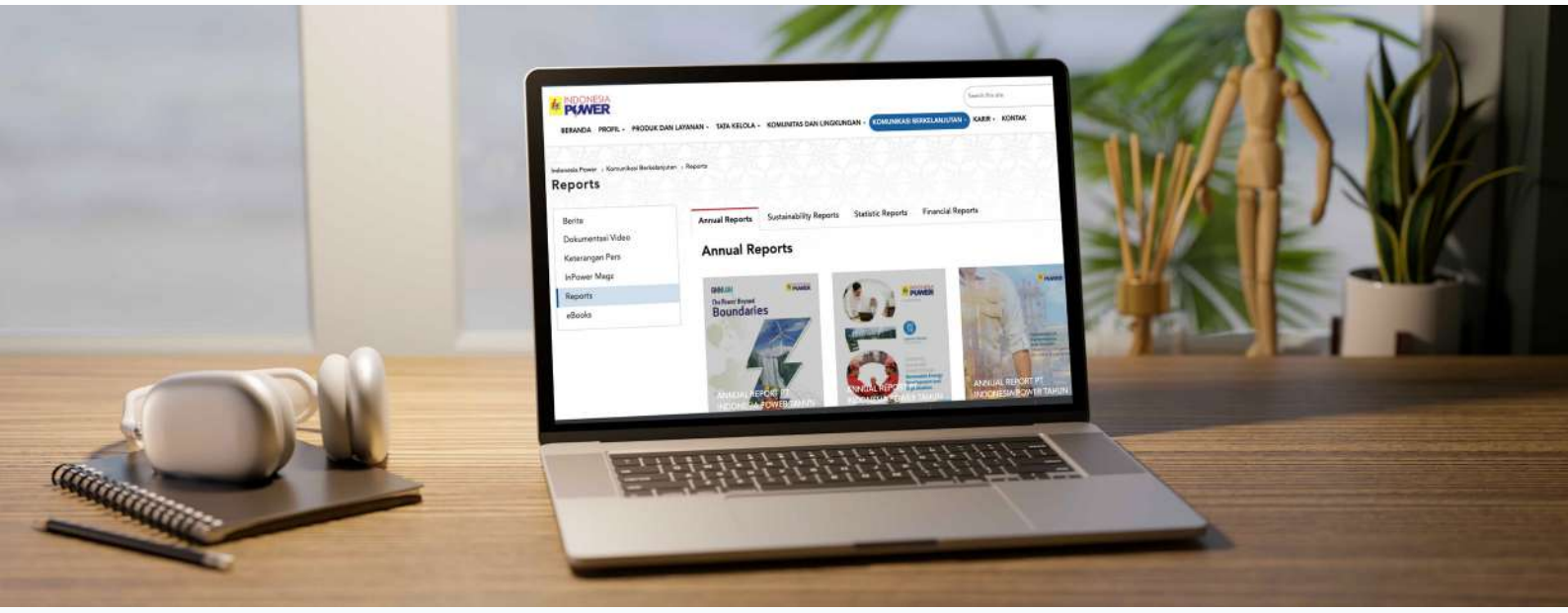
Sosial media
Social media

@pt.indonesiapower | @pt.indonesiapower | PT Indonesia Power Official | @pt.indonesiapower

Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Statistik dan Laporan Keuangan
Annual Reports, Sustainability Reports, Statistical Reports, and Financial Statements

Indonesia Power senantiasa mempublikasi Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Statistik dan Laporan Keuangan dalam *website* Perusahaan sebagai bentuk transparansi Perusahaan kepada *Stakeholders* dalam hal informasi Perusahaan kepada Pemegang Saham, regulator, media massa dan masyarakat.

Indonesia Power regularly publishes Annual Reports, Sustainability Reports, Statistical Reports, and Financial Statements which are also available at Company website. It is a proof of the Company's transparency to stakeholders when it comes to disclosure of information to shareholders, regulators, mass media, and the public.



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Media Elektronik Lainnya
Other Electronic Media

Media elektronik yang digunakan oleh Indonesia Power sebagai sarana penyebaran data dan informasi Perusahaan, antara lain yaitu *E-mail,* TV *Wall* sebagai Manajemen Visual dan *Video Conference*. TV *Wall* di-*update* setiap 2-3 kali/hari kerja.

To distribute the Company's data and information, Indonesia Power uses email, TV Wall as a Visual Management, and Video Conference. TV Wall is updated 2-3 times per business day.

Siaran Pers
Press Releases

Selain media komunikasi di atas, sebagai bentuk penyampaian dan keterbukaan informasi kepada *stakeholders*, Indonesia Power telah menerbitkan siaran pers (*press release*) sebanyak 28 *press release* selama tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Apart from the communication media previously mentioned, to practice information transparency and disclosure to the stakeholders, Indonesia Power has issued 28 press releases throughout 2021:

No	Judul Release Press Release Title	Tanggal Terbit Release Date
1	Pemerintah Apresiasi Keandalan PLTU Suralaya Dan Komitmennya Terhadap Program Dan Target Yang Ditetapkan Pemerintah The Government Endorses SPP Suralaya and its Commitment to Government's Programs and Targets	7 januari 2021 January 7, 2021
2	Pemerintah Kota Cilegon Beri Penghargaan Kepada Mitra Binaan PLTU Suralaya Cilegon City Government Presented Awards to SPP Suralaya Foster Partners	7 januari 2021 January 7, 2021
3	Tanggap Bencana Sulbar dan Kalimantan Selatan Indonesia Power Group Datang dan Turut Terjunkan Relawan Hingga Salurkan Berbagai Bantuan Indonesia Power Group's Disaster Response Team Visited and Dispatched Volunteers and Donated Reliefs for West Sulawesi and South Kalimantan	29 januari 2021 January 29, 2021
4	Indonesia Power Siap Menatap Harapan Yang Menantang Di Tahun 2021 Indonesia Power Ready to Welcome Challenging 2021	2 Februari 2021 February 2, 2021
5	Menyapa Pembangkit Listrik Di Utara Jakarta Getting Acquainted with North Jakarta's Power Plant	2 Februari 2021 February 2, 2021
6	Lebih Dekat Dengan PLTU Suralaya Taking a Closer Look at SPP Suralaya	11 Februari 2021 February 11, 2021
7	Lebih Dekat dengan PLTA Rajamandala Taking a Closer Look at HPP Rajamandala	11 Februari 2021 February 11, 2021
8	Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Apresiasi Kontribusi Indonesia Power Terhadap Keberlangsungan Sungai Ciliwung Dalam Pemanfaatan Sampah Menjadi Sumber Energi Minister of Environment & Forestry Endorses Indonesia Power's Contribution to Ciliwung River's Sustainability, Transforming Waste into Energy Source	27 Maret 2021 March 27, 2021
9	Catatkan Sejarah Baru, Anak Usaha Indonesia Power Tembus Pasar Global dan Perkuat Beyond kWh PLN Group Making New History, Indonesia Power's Subsidiary Penetrates Global market and Strengthens PLN Group's beyond kWh	31 Maret 2021 March 31, 2021
10	PLTA Plengan Listrik Dan Dukung Kesejahteraan Masyarakat Sekitar HPP Plengan Distributes Electricity and Promotes Surrounding Community's Welfare	10 April 2021 April 10, 2021

No	Judul Release Press Release Title	Tanggal Terbit Release Date
11	Atasi Permasalahan Sampah Dan Tingkatkan *Renewable Energy*, Anak Usaha PT PLN (Persero) Jajaki TPA di Barat Ibu Kota Addressing Waste Issues and Enhancing Renewable Energy, PT PLN (Persero)'s Subsidiary Explores Landfills in the Capital's Western Part	28 April 2021 April 28, 2021
12	Menjaga Identitas Bangsa, Indonesia Power Bersama KLHK Lakukan Pelepasliaran "Sang Garuda" Preserving Nation's Identity, Indonesia Power and the Ministry of Environment and Forestry Release Javan hawk-eagle	1 Juni 2021 June 1, 2021
13	PLN Grup Bersinergi Kembangkan *Digital Power Plant* Sebagai Bagian Proses Bisnis PLN Group Synergizes: Developing Digital Power Plant as Part of Business Process	2 Juni 2021 June 2, 2021
14	Indonesia Power Dorong Potensi Besar FABA Untuk Membangun Indonesia Indonesia Power Encourages Faba's Large Potential for Developing Indonesia	17 Juni 2021 June 17, 2021
15	Amankan Komponen Terpenting Dalam Wujudkan Pembangkit Yang Andal, Indonesia Power Suralaya PGU Lanjutkan Vaksinasi Di Lingkup Keluarga Pegawai Securing Most Vital Components in Delivering Reliable Power Plant, Indonesia Power's Suralaya PGU Resumes Vaccination for Employees' Family	22 Juli 2021 July 22, 2021
16	Dorong Target *Herd Immunity*, Indonesia Power Gelar Vaksinasi Massal Spurring Herd Immunity Target, Indonesia Power Holds Mass Vaccination	28 Juli 2021 July 28, 2021
17	Sadar Pentingnya Aset SDM Untuk Keandalan Pembangkit, Indonesia Power Priok POMU Vaksinasi Keluarga Pegawai Aware of the Importance of Human Capital Assets for Power Plant's Reliability, Indonesia Power's Priok POMU Vaccinates Employees' Family	13 Agustus 2021 August 13, 2021
18	Selalu Gunakan Teknologi Ramah Lingkungan, Indonesia Power Kembali Menyabet Penghargaan di Ajang Asean *Coal Awards* 2021 Avid User of Green Technology, Indonesia Power Once Again Brought Home Awards during ASEAN Coal Awards 2021	15 September 2021 September 15, 2021
19	Terus Lakukan Inovasi di Bidang Kelistrikan, Indonesia Power Banjir Penghargaan Continues Innovating in Power Industry, Indonesia Power Made a Clean Sweep	28 September 2021 September 28, 2021
20	Konsisten Dalam Terapkan Prinsip GRC, Indonesia Power Raih 4 (empat) Gelar Bergengsi di Ajang *Top* GRC *Awards* 2021 Consistent in Implementing GRC Principles, Indonesia Power Received 4 (four) Prestigious Awards at the Top GRC Awards 2021	7 Oktober 2021 October 7, 2021
21	Indonesia Power Dukung & Sukseskan Gelaran PON XX Papua Indonesia Power Supports and Contributes to the Success of PON XX Papua	13 Oktober 2021 October 13, 2021
22	Buktikan Kelasnya, Indonesia Power Raih Penghargaan di Ajang BPEA *Awards* 2021 Proving Its Class, Indonesia Power Brought Home Awards from BPEA Awards 2021	23 September 2021 September 23, 2021
23	Kompeten, Indonesia Power Raih SDG *International Innovation Awards* Competence Helped Indonesia Power Brought Home SDG International Innovation Awards	29 Oktober 2021 October 29, 2021
24	Menjadi *Role Model*, Indonesia Power Tularkan Semangat Transformasi Menuju Industri 4.0 Kepada BUMN Lain Being a Role Model, Indonesia Power Spreads the Spirit of Transformation towards Industry 4.0 to Other SOEs	12 November 2021 November 12, 2021
25	Indonesia Power Produksi dan Salurkan Oxygen Di RSUD dan Puskesmas di Jakarta Indonesia Power Produces and Distributes Oxygen to Jakarta's Regional Hospitals and Community Health Centers	18 November 2021 November 18, 2021
26	Indonesia Power Terus Kembangkan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Indonesia Power Continues Developing Waste-to-Energy Management	1 Desember 2021 December 1, 2021
27	Lebih Dekat dengan PLTA Modern di Bumi Parahyangan Taking a Closer Look at Modern HPP in the Land of Parahyangan	11 November 2021 November 11, 2021
28	Lanjutkan Tren Positif Di PLN Group, Indonesia Power Raih 4 (empat) Proper Emas di Tahun 2021 Consistently Maintaining Positive Trend in PLN Group, Indonesia Power Brought Home 4 (four) Gold PROPER in 2021	28 Desember 2021 December 28, 2021

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Media Informasi Kepada Pihak Internal
Information Media to Internal Parties

Forum Komunikasi Internal
Internal Communication Forum

Indonesia Power menyediakan saluran komunikasi sebagai sarana diskusi antara pegawai dengan manajemen yaitu melalui *Coffee Morning, Team Briefing* dan e-buletin mingguan Indonesia Power Weekly News (IPWN). Hasil *Coffee Morning* secara elektronik disebarluaskan melalui e-mail, IPWN, dan Manajemen Visual (TV *Wall*). *Coffee morning* adalah saluran tatap muka langsung antara Manajemen dan pegawai yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali. Komunikasi ini berlangsung dua arah karena Manajemen dapat menyampaikan arahan dan mensosialisasikan program kerja Perusahaan kepada seluruh pegawai dan pegawai dapat memberikan masukan dan kritikan langsung maupun tidak langsung kepada manajemen. Selain itu, beberapa Divisi di Indonesia Power juga telah melakukan komunikasi dua arah secara konsisten dengan melibatkan karyawan melalui *Team Briefing* yang dilakukan satu bulan sekali. Selama tahun 2021 e-buletin Inpower Weekly News (IPWN) terbit sebanyak 28 edisi.

Indonesia Power provides communication channels for discussion between employees and the Management through Coffee Morning session, Team Briefing, and Indonesia Power Weekly News (IPWN) e-bulletin. Results of the Coffee Morning session are distributed electronically through email, IPWN, and Visual Management (TV Wall). Coffee Morning session is a direct meeting between the Management and employees, which is held once in a month. It is a two-way communication where the Management will be able to give directives and communicate the Company's work program to all employees, whereas the employees will be able to give direct and indirect feedback and criticism for the Management. In addition, several Divisions in Indonesia Power also implement two-way communication consistently by involving employees in Team Briefing once in a month. Throughout 2021, 28 issues of InPower Weekly News (IPWN) e-bulletin have been published.





Intranet
Intranet

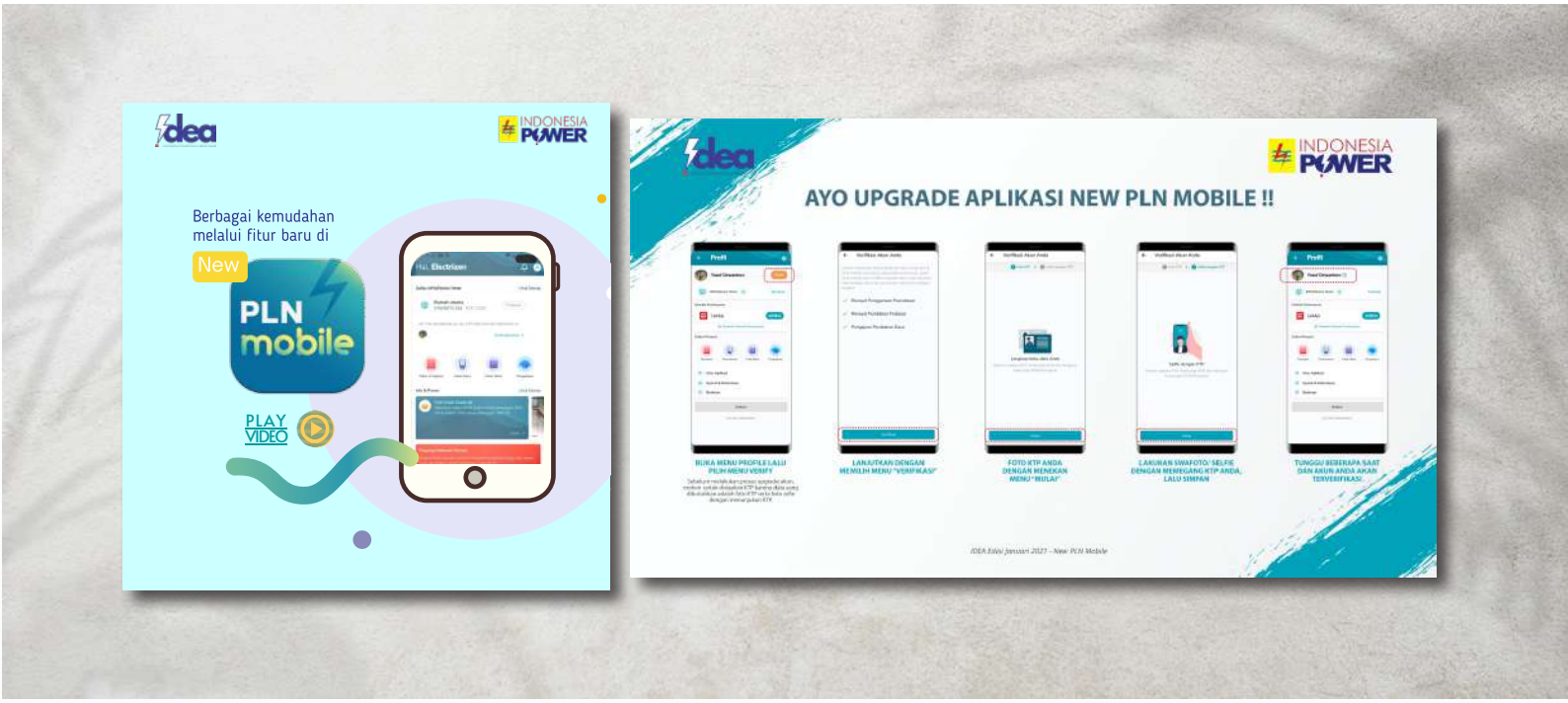
Intranet merupakan media online bagi internal Indonesia Power yang menyampaikan informasi aktivitas Perusahaan dan pegawai yang diperbaharui setiap saat. Intranet tersebut dapat diakses oleh setiap pegawai yang terhubung dengan jaringan internal Perusahaan (*Wide Area Network*/WAN).

Intranet is an online media for provided internally, which offers information about the Company's activities and employees with live update. The intranet can be accessed by every employee who is connected to Company's internal network (Wide Area Network/WAN).

Indonesia Power Daily News Share (IDEA)
Indonesia Power Daily News Share (IDEA)

Merupakan Program PLN 1 yang menyampaikan satu informasi setiap hari kepada pegawai (dengan tema bulanan yang ditentukan oleh PLN) yang disampaikan melalui saluran email dan IPKU-IP *News*. Tujuan IDEA adalah *Governance, Risk and Compliance Culture.*

A program of PLN 1 to deliver one information per day to employees (the themes are decided monthly by PLN) via e-mails and IPKU-IP News. IDEA targets at Governance, Risk, and Compliance Culture.



AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Pertemuan dengan *Stakeholders*
Meetings with Stakeholders

Guna membina hubungan yang harmonis dengan segenap pemangku kepentingan internal dan eksternal, Indonesia Power juga melakukan pertemuan dengan para *stakeholder* untuk mengetahui harapan terkini para pemangku kepentingan dan menyelesaikannya dengan program-program kerja dan strategi bisnis Perusahaan.

To maintain good relationship with all internal and external stakeholders, Indonesia Power also arranges meeting with stakeholders to discover their current expectations and align them with Company's work programs and business strategies.

Pada tahun 2021, Indonesia Power melakukan pertemuan dengan para *stakeholder* diantaranya sebagai berikut:

In 2021, Indonesia Power had held several meetings with stakeholders as described below:

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Pertemuan Meeting Frequency
Pemegang Saham Pemegang Saham	1. RUPS 1. GMS	- RUPS Tanggal 29 Juni 2021 - RUPS RKAP tanggal 29 Januari 2021 - RUPS Sirkuler tanggal 19 Januari 2021, 17 Februari 2021, 6 Juli 2021, 21 Juli 2021, 9 November 2021, 25 November 2021, 27 November 2021 - GMS on June 29, 2021 - GMS on WP&B on January 29, 2021 - Circular GMS on January 19, 2021, February 17, 2021, July 06, 2021, July 21, 2021, November 9, 2021, November 25, 2021, November 27, 2021
Pemerintah (Pusat dan Daerah) Government (Central and Regional)	Pelaporan terkait pengelolaan lingkungan, kepegawaian, perizinan usaha pembangkitan dan proyek Reporting on environmental management, employment, power generation business licensing, and projects	Periodik Periodical
Pegawai Employee	*Coffee morning*	Sekali dalam sebulan Once in a month
	Pertemuan periodik Periodical meeting	Minimal sekali dalam 1 semester At least once in six months
	Perayaan Hari Ulang Tahun Perusahaan Company Anniversary Celebration	1 kali setahun pada tanggal 3 Oktober 2021 Once in a year on October 03, 2021
	Survei HRSE Human Resource Satisfaction & Engagement (HRSE) Survey	1 kali setahun pada tanggal 17-27 Agustus 2021 Once in a year on August 17-27, 2021
	Simulasi Tanggap Darurat Bencana di Unit dan Kantor Pusat Disaster Response Simulation at Units and Head Office	29 kali dalam setahun 29 times in a year
	Coffee morning	Sekali dalam sebulan Once in a month

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Pertemuan Meeting Frequency
Pelanggan Customer	Program Mendengarkan Suara Pelanggan: - Forum Komunikasi Pelanggan - Customer Gathering - Forum Sharing Pembangkit Program Listening to Customers' Voice: - Customer Communication Forum - Customer Gathering - Power Generation Sharing Unit	Periodik : Forum Sharing Pembangkit, yang diselenggarakan secara virtual oleh beberapa Unit PT Indonesia Power bersama dengan pelanggan diantaranya : a. Semarang PGU dengan PLN UP2B Jawa Tengah & DIY tanggal 30 Maret 2021; b. PLTGU Cilegon OMU dengan PLN UIP2B JAMALI tanggal 9 April 2021; c. Suralaya PGU dengan PLN UIP2B JAMALI tanggal 12 April 2021; d. Grati POMU dengan PLN UIP2B JAMALI dan PLN UP2B Jawa Timur tanggal 29 Juni 2021; e. Semarang PGU dengan PLN UP2B Jawa Tengah & DIY tanggal 30 Juni 2021; f. Semarang PGU dengan PLN UP2B Jawa Tengah & DIY tanggal 5 Agustus 2021; g. PLTGU Cilegon OMU dengan PLN UP2B Jakarta & Banten tanggal 6 Agustus 2021; h. Semarang PGU dengan PLN UP2B Jateng & DIY tanggal 23 November 2021; i. Grati POMU dengan PLN UIP2B JAMALI dan PLN UP2B Jawa Timur tanggal 30 Desember 2021. j. Customer Gathering, yang diselenggarakan oleh PLTU Jeranjang OMU pada tanggal 14 Agustus 2021 dengan mengusung tema "*Fun Bike*" bersama Pelanggan" Periodical: Power Generation Sharing Unit, held virtually by several PT Indonesia Power's Units and customers, which include: a. Semarang PGU and PLN UP2B Central Java & Yogyakarta on March 30, 2021; b. CCPP Cilegon OMU and PLN UIP2B Java, Madura & Bali on April 09, 2021; c. Suralaya PGU and PLN UIP2B Java, Madura & Bali on April 12, 2021; d. Grati POMU and PLN UIP2B Java, Madura & Bali and PLN UP2B East Java on June 29, 2021; e. Semarang PGU and PLN UP2B Central Java & Yogyakarta on June 30, 2021; f. Semarang PGU and PLN UP2B Central Java & Yogyakarta on August 05, 2021; g. CCPP Cilegon OMU and PLN UP2B Jakarta & Banten on August 06, 2021; h. Semarang PGU and PLN UP2B Central Java & Yogyakarta on November 23, 2021; i. Grati POMU and PLN UIP2B Java, Madura & Bali and PLN UP2B East Java on December 30, 2021. j. Customer Gathering, held by SPP Jeranjang OMU on August 14, 2021, themed "Fun Biking with Customers"
	Rapat Alokasi Energi Energy Allocation Meeting	Sekali dalam sebulan Once in a month
	Kunjungan Pelanggan Customer Visit	Periodik Periodical
	Aplikasi Harian Deklarasi Ketidaksiapan Pembangkit (HDKP) Power Plant Unreadiness Daily Declaration (HKDP) Application	Jika Diperlukan. As necessary
	Rapat Koordinasi Sistem Jawa Bali Java-Bali System Coordination Meeting	Periodik Periodical

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN
ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Metode Pelibatan Engagement Method	Frekuensi Pertemuan Meeting Frequency
	Survei Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey	Sekali dalam setahun yang dilaksanakan pada periode 10 Agustus - 12 November 2021 Once in a year, from August 10 to November 12, 2021
Penyedia Vendor	*Vendor Gathering*	Minimal 1 Kali setahun yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021 At least once in a year on December 23, 2021
	Business Review Meeting	Minimal 1 Kali setahun sesuai kebutuhan At least one in a year as necessary
	Survei Perilaku Etis atau survey lainnya Ethical Behavior Survey or other surveys	Minimal 1 Kali setahun untuk masing - masing kriteria dilaksanakan sejak tanggal 27 Desember 2021 -21 Januari 2022 At least once in a year for each criteria, held from December 27, 2021 to January 21, 2022
	Sales Engineering Support berupa *Assessment, Inspection, Consultation* Sales Engineering Support berupa Assessment, Inspection, Consultation	Sesuai kebutuhan masing-masing Unit As necessary at each Unit
Komunitas Penduduk Sekitar Pembangkit: Masyarakat di Wilayah Binaan, LSM Lokal & Internasional, Tokoh Masyarakat, Institusi/ Lembaga Profesi dan Media **Local Community surrounding the Power Plants:** Communities in Foster Areas, Local & International NGOs, Community Figures, Professional Institutions/Agencies, and Media	Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Community-Police Partnership Forum	Minimal sekali dalam setahun At least once in a year
	Program CSR yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. CSR programs focused on community empowerment	Minimal 4x dalam setahun sejak perencanaan, implementasi monitoring sampai dengan evaluasi program At least 4 times in a year from the planning, implementation, monitoring, to evaluation of program
	Kegiatan CSR (*Charity*) CSR (Charitable) Activities	Minimal sekali dalam setahun At least once in a year

Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Kebijakan Pengendalian Informasi Perusahaan

The Company's Compliance with Information Control Policy

Dalam rangka menjaga rahasia atau informasi sensitif agar tidak terjadi kebocoran informasi yang akan merugikan perusahaan, Indonesia Power telah memiliki *Non-Disclosure Agreement* ("NDA") yang merupakan perjanjian yang mengatur pembatasan larangan untuk men-disclose (membeberkan) informasi penting milik perusahaan. Selama tahun 2021, Indonesia Power telah menerbitkan 17 NDA.

To maintain confidentiality, protect sensitive information, and prevent leak of information that may harm the Company, Indonesia Power has Non-Disclosure Agreement (NDA) in place. The document obliges its signers to refrain from disclosing any confidential information belonged to the Company. Throughout 2021, Indonesia Power has issued 17 NDA documents.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Indonesia Power memiliki fungsi utama untuk memastikan terlaksananya Perencanaan, pengelolan dan pengedalian penyediaan barang / jasa pendukung kegiatan operasioanl di lingkungan Perusahaan secara efisien melalui proses yang sesuai dengan tata kelola perusahaan yang benar (*Good Corporate Governance*).

Indonesia Power bears the main function to ensure efficient planning, management, and control of the provision of goods/ services that support its operational activities through processes that are in compliance with the good corporate governance.

Sebagai wujud komitmen Indonesia power dalam mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa secara transparan, Indonesia Power telah meluncurkan aplikasi *Supply Chain Management* (SCM) yang dapat diakses pada website Perusahaan https://scm.indonesiapower.co.id. Melalui Aplikasi tersebut *Supplier* dapat mengakses beberapa informasi termasuk berita terbaru tentang kegiatan SCM di Indonesia Power seperti Informasi pengadaan, kebijakan pengadaan dan informasi terkait lainnya. *Supplier* juga dapat masuk dan mendaftar secara *online*.

To show its commitment to implementing transparent goods/ services procurement, Indonesia Power has launched the Supply Chain Management (SCM) application which can be accessed at https://scm.indonesiapower.co.id. Using the application, suppliers can access some information, including updates on SCM activities at Indonesia Power such as information on procurement, procurement policy, and other relevant information. Supplier can also log in and register online on the website.



PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Selain itu, untuk mempermudah penyedia barang dan jasa dalam memonitor *progress* tagihannya. Indonesia Power telah memiliki aplikasi I-Track yang merupakan aplikasi berbasis *web* dan *mobile*.

To facilitate goods/services providers in monitoring the progress of their invoices, Indonesia Power provides web-based and mobile I-Track application.

i-Track merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang digunakan **untuk memonitor Dokumen Tagihan (*Invoice*)**, dimulai dari tagihan masuk ke IP sampai terbayarkan.
i-Track is a web and mobile application used for monitoring invoices, from the receipt of invoices to payment process.

Link Download aplikasi i-Track *mobile*
Android : Google Play
Ios : https/webip.indonesiapower.co.id:6090/itrack/

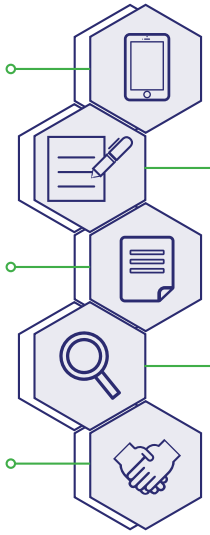
Link i-Track *Vendor*
https/webip.indonesiapower.co.id/supplier/

Link i-Track Pegawai
Link i-Track Employee
https/webip.indonesiapower.co.id/erpvw/

START
Download aplikasi i-track di Playstore/ App Store, lalu Instal, Setelah itu buka aplikasi i-Track.
Download i-Track from Playstore/App Store, install, and open the application.

DIREKSI PEKERJAAN/ PIC TAGIHAN
DIRECTOR OF UNIT/INVOICE PIC
1. Menerima dokumen tagihan dari *vendor*;
2. Melakukan Verikasi dokumen tagihan melalui aplikasi i-Track.
1. Receiving invoices from vendors;
2. Verifying invoices using i-Track.

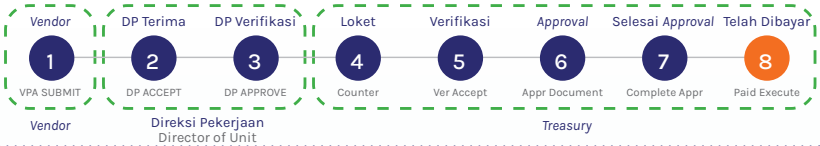
END
Memproses dokumen tagihan mulai dari loket hingga dibayarkan kepada *vendor*.
Processing invoice from counter to payment to vendor.



VENDOR
1. Melakukan Registrasi pada *web supplier* (https://supplier.indonesiapower.co.id);
2. Mengajukan dokumen tagihan melalui aplikasi i-Track;
3. Mencetak lembar dokumen *tracking*;
4. Membawa dokumen tagihan *hardcopy* + lembar dokumen *tracking* ke Direksi pekerjaan/ PIC tagihan.
1. Registering at the website for suppliers (https://supplier.indonesiapower.co.id);
2. Submitting invoices using i-Track;
3. Printing tracking documents;
4. Delivering hard copy of invoices and tracking documents to Director of Unit/invoice PIC.

TREASURY
Memproses dokumen tagihan mulai dari loket hingga di bayarkan kepada *vendor*.
Processing invoices from the counter to payment to vendor.

Status *Tracking* pada Aplikasi i-Track
Tracking status in i-Track application



Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Indonesia Power telah mempertimbangkan kecukupan jumlah kebutuhan, kualitas yang baik, harga yang wajar, unsur tepat waktu & ekonomi serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman internal Perusahaan.

Goods and services procurement at Indonesia Power has considered the sufficiency of needs, good quality, fair price, punctuality, economy, and compliance with applicable laws and regulations and the Company's internal guidelines.

Selain itu, dalam Pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia Power juga telah mengimplementasikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini diterapkan untuk menciptakan iklim pengadaan barang dan jasa yang bersih dan memperkuat sistem pencegahan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa termasuk persyaratan pendaftaran calon pemasok.

Indonesia Power has also implemented ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System in goods and services procurement process. The implementation of Anti-Bribery Management System aims to create a clean procurement climate and strengthen the corruption, collusion, and nepotism prevention system in every goods/services procurement stage, including during the setting of requirements for supplier candidate's registration.



Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Manager

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Indonesia Power dilakukan baik di kantor pusat maupun di unit. Untuk kantor pusat dilaksanakan oleh dua Divisi yaitu Divisi Primary Energy And Business Development Procurement dan Divisi Spare Part and Services Procurement dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

The procurement of goods and services in Indonesia Power is performed at the Head Office and Units. The procurement at the Head Office is performed by two divisions, i.e. the Division of Primary Energy and Business Development Procurement and the Division of Spare Parts and Services Procurement, each of which has certain duties and responsibilities:

Divisi Primary Energy And Business Development Procurement

Division of Primary Energy and Business Development Procurement

1. Menyusun, mengelola dan membina pelaksanaan pengadaan Energi Primer & Pengembangan Usaha di lingkungan Perusahaan;
2. Melakukan dan mengarahkan proses pengadaan Energi Primer & Pengembangan Usaha di lingkungan Perusahaan;
3. Melakukan *review* dan *update* kebijakan Pengadaan Energi Primer & Pengembangan Usaha di lingkungan Perusahaan;

1. Prepare, manage, and provide assistance in the implementation of primary energy & business development procurement in the Company;
2. Implement and direct primary energy and business development procurement process in the Company;
3. Review and update the policy on primary energy & business development procurement in the Company;

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

Divisi Spare Part and Services Procurement

Division of Spare Parts and Services Procurement

1. Menyusun, mengelola dan membina pelaksanaan Pengadaan *Spare Part* & Jasa di lingkungan Perusahaan;
2. Melakukan dan mengarahkan proses Pengadaan Spare Part & Jasa di lingkungan Perusahaan;
3. Melakukan *review* dan *update* kebijakan Pengadaan Spare Part & Jasa di lingkungan Perusahaan.

1. Prepare, manage, and provide assistance in the implementation of spare parts and services procurement in the Company;
2. Implement and direct spare parts and services procurement in the Company;
3. Review and update the policy on spare parts and services procurement in the Company.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Policy on Goods and Services Procurement

Untuk menjamin kecukupan jumlah kebutuhan, kualitas yang baik, harga yang wajar, unsur tepat waktu & ekonomi atas barang dan jasa yang diperoleh Perusahaan, Indonesia Power telah memiliki kebijakan pengadaan barang dan jasa mengacu Keputusan Direksi Nomor 218.K/010/IP/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Indonesia Power dan perubahannya. Kebijakan ini mengatur ketentuan mengenai:

- Organisasi pengadaan barang dan jasa;
- Pengelolaan perencanaan pengadaan;
- Pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
- Manajemen penyedia barang dan jasa;
- *e-Procurement;*
- Pengendalian pengadaan barang dan jasa.

To ensure the sufficiency of needs, good quality, fair price, punctuality, and economy of the goods and services procured, Indonesia Power has a policy on goods and services procurement in place, which refers to the Decree of the Board of Directors No. 218.K/010/IP/2016 dated November 01, 2016 on Guidelines for Goods and Services Procurement at PT Indonesia Power and their amendments. The policy concerns about:

- Goods and services procurement organization;
- Procurement planning management;
- Goods and services procurement management;
- goods and services provider management;
- E-Procurement;
- Goods and services procurement control.

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Principles of Goods and Services Procurement

Value for Money merupakan prinsip utama dalam pengadaan barang/jasa di Indonesia Power. Artinya, barang dan jasa yang dibeli harus sepadan atau lebih baik dari pada uang yang dibelanjakan. Terdapat 6 (enam) *rights* pada konsep *value for money* yaitu spek kualitas, kuantitas, waktu penerimaan, tempat penerimaan, tepat sosial dan ekonomi serta harga yang wajar indikator keberhasilan sebagai berikut:

'Value for Money' is the key principle in the procurement of goods and services in Indonesia Power. This means that goods and services purchased must be equal to, if not exceeding, the value of money spent. There are six (6) rights in the concept of value for money, i.e. quality, quantity, time of acceptance, place of acceptance, social and economic-appropriate, and fair price. The success indicators are presented below:

1 ***Right Quality***

Kualitas barang/jasa harus sesuai atau lebih baik dari yang dipersyaratkan.
Quality of goods/services must meet or exceed expectation.

2 ***Right Quantity***

Jumlah atau lingkup barang/jasa harus benar sesuai dengan yang diperlukan.
Number or scope of goods/services must be true to the needs.

3 ***Right Time***

Barang/jasa harus tersedia sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Goods/services must be available at the required time.

4 ***Right Place***

Barang/jasa harus diserahterimakan di tempat yang benar sesuai keperluan.
Goods/services must be handed over at the right place as needed.

2 ***Right Price***

Harga/biaya yang paling menguntungkan bagi Perusahaan, tetapi tidak berarti harga termurah.
The price/cost must be the most beneficial for the Company, not necessarily the cheapest.

3 ***Right Social Economic***

Dapat mempertimbangkan tujuan sosial ekonomi, antara lain mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Taking into account socio-economic aspect, e.g. encouraging consumption of domestic products.

Etika Perusahaan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Company Ethics in Goods and Services Procurement

Indonesia Power mewajibkan Penyedia untuk menandatangani Pakta Integritas dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini ditujukan agar seluruh proses bisnis dan operasional dapat berjalan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan objektif, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya sasaran Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya;

Indonesia Power requires the suppliers to sign mandatory Integrity Pact regarding goods and services procurement. This aims to keep all business and operational processes running objectively and in line with the applicable provisions. Decision-making process is carried out objectively to prevent unfair domination by any stakeholders and to avoid influence from one-sided interest.

Related parties in the procurement of goods and services must comply with the following ethics:

1. Perform duty in full compliance and responsibility to achieve target, streamlined process, and accuracy of goods and services procurement;
2. Work professionally with honesty and independence, and protect confidential information;
3. Avoid direct and indirect influence that may cause unfair competition;
4. Take responsibility for any decision made in accordance with the assigned authority;

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Keuangan Perusahaan;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan; dan
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun Etika dalam hubungan dengan Pemasok/Penyedia sebagaimana yang diatur dalam *Code of Conduct* Perusahaan adalah sebagai berikut:

5. Avoid and prevent conflict of interest between the involved parties, either directly or indirectly, in goods and services procurement;
6. Avoid and prevent inefficiency and leak of Company's fund;
7. Avoid and prevent abuse of authority and/or collusion for the benefit of any individuals, or certain groups or parties, which may directly or indirectly harm the Company; and
8. Not to receive, offer, or promise to give or receive any gift, reward, incentive, rebate, and any similar gratuities to anyone who is known or reasonably alleged to be related to goods and services procurement.

The ethics of conducting transactions with suppliers, as set out in the Code of Conduct, are as follows:

The Do's		The Don't's	
1. Melaksanakan hubungan dengan pemasok berdasarkan prinsip praktek usaha yang sehat, efisien dan wajar (*fair*);	1. Establishing supplier relations according to sound, efficient, and fair business practices.	1. Pemilihan pemasok yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku;	1. Selecting suppliers who fail to meet applicable provisions and regulations set by the Company.
2. Pemasok wajib mematuhi peraturan perundangan, peraturan pengadaan barang dan jasa, serta persyaratan tambahan dari Perusahaan, terutama yang berkaitan dengan perburuhan, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak wajar;	2. Suppliers must comply with the laws and regulations, regulation on goods and services procurement, and additional requirements from the Company, particularly those pertaining to labors, environment, health and security, intellectual property rights, and improper payment.	2. Potensi konflik kepentingan dalam pemilihan pemasok, termasuk penerimaan gratifikasi yang dilarang;	2. Potential conflict of interest in supplier selection, including receiving gratification.
3. Hanya bekerjasama dengan pemasok- pemasok yang memenuhi kualifikasi dan secara konsisten mampu memenuhi standar kualitas, biaya dan pengiriman yang disepakati.	3. Only collaborating with qualified suppliers who consistently meet the agreed upon standards of quality, cost, and delivery.	3. Pemilihan pemasok yang dimiliki atau dikelola oleh keluarga atau teman secara tidak fair,	3. Unfair selection of supplier owned or managed by family or friends.
4. Memenuhi hak (pembayaran) pemasok sesuai dengan perjanjian yang disepakati.;	4. Meeting suppliers' rights (to payment) according to contract.	4. Praktek *mark-up* harga yang menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif;	4. Establishing markup price that prevents competitiveness.
5. Memberikan perlakuan yang setara (adil) kepada pemegang saham untuk dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Indonesia Power dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	5. Giving equal (fair) treatment to shareholders to use their rights according to Indonesia Power Articles of Association and applicable laws and regulations.	5. Komunikasi yang tidak lancar dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.	5. Poor communication with goods and services suppliers, including in following up complaints and objections.

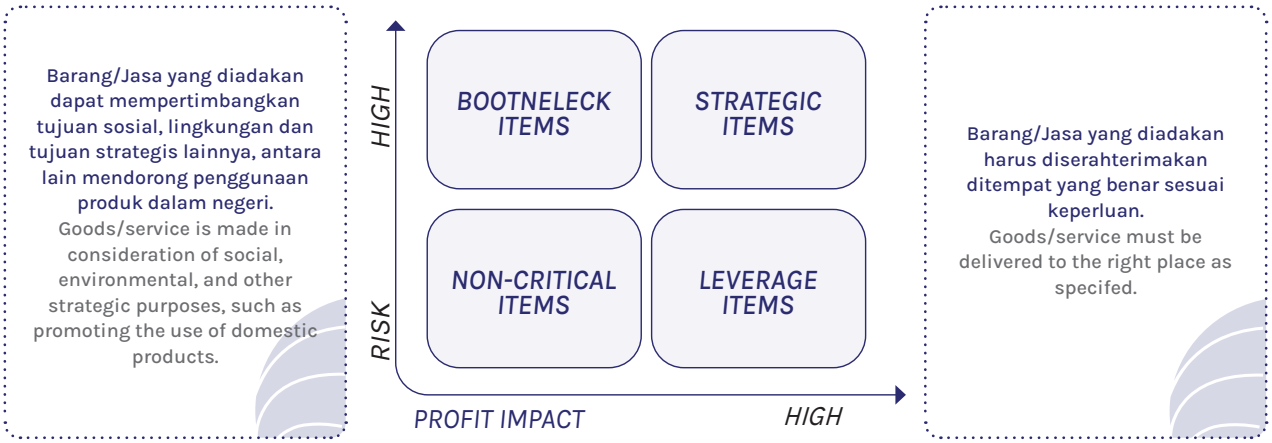
Pendekatan Strategis Pengadaan Barang dan Jasa

Strategic Approach to Goods and Services Procurement

Dalam mencapai sasaran utama pengadaan barang dan jasa yaitu menjamin terlaksananya kegiatan usaha serta penciptaan nilai tambah (*value creation*) dan peningkatan daya saing Perusahaan, Indonesia Power telah melakukan pendekatan strategis berdasarkan *tools* yang biasa digunakan dalam *best practice* Pengadaan yaitu *supply positioning model.* Adapun *Kraljic supply positioning* model sebagai berikut:

In achieving the ultimate goal of goods and services procurement, i.e. to guarantee business activity operation, added value creation, and improvement of Company's competitiveness, Indonesia Power has developed a strategic approach based on the tools used in procurement best practices, namely the Supply Positioning Model. Kraljic Supply Positioning Model is explained below:

Supply Positioning Model



Dalam *supply positioning model* tersebut terdapat *profit impact* yaitu hal-hal yang bisa menambah *profit* atau menghindari kehilangan *profit* atau menghindari penambahan biaya Perusahaan, serta *supply risk* yaitu semua bentuk risiko yang berpengaruh pada Perusahaan terkait dengan pengadaan yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Berdasarkan konsep manajemen risiko, terdapat risiko yang dapat dihilangkan, dihindari, dipindahkan atau dimitigasi/kelola.

Supply Positioning Model contains profit impact, i.e. things that may increase profit or avoid the loss of profit or avoid additional cost for the Company, and supply risk, i.e. any forms of risk that affect the Company with regard to the procurement as may be affected by internal and external factors. Based on the risk management concept, there are risks that can be eliminated, avoided, transferred, or mitigated/managed.

Metode Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Methods

Dalam pelaksanaannya, Indonesia Power memiliki sejumlah jenis metode pengadaan barang dan jasa, yakni sebagai berikut:

Indonesia Power has several methods for procuring goods and services:

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

No	Metode Method	Penjelasan	Description
1	Pelelangan Terbatas Restricted Tendering	Pelelangan terbatas dilakukan dengan pascakualifikasi.	Restricted tendering is carried out through post-qualification stage.
2	Pelelangan Cepat Terbatas Quick Restricted Tendering	Metode pengadaan ini menggunakan metode permintaan penawaran *Request for Quotation* (RFQ).	This procurement procedure uses Request for Quotation (RFQ) method.
3	Pelelangan Terbuka Open Tendering	Pelelangan Terbuka dapat dilakukan dengan prakualifikasi maupun pascakualifikasi.	Direct Appointment is carried out by directly appoint a Supplier
4	Penunjukan Langsung Direct Appointment	Penunjukan Langsung dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia	Penunjukan Langsung dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu Penyedia
5	Penunjukan Langsung dengan metode *Open Book* Direct Appointment with Open Book method (Open Book Direct Appointment)	Pengadaan dengan pola *Open Book* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang kompetitif tanpa melalui proses Pelelangan, dengan tetap menjaga kualitas/mutu dan memenuhi ketepatan waktu pengadaan di lingkungan Perusahaan	Open book procurement is carried out in order to get a competitive price without tendering while maintaining quality and Timeliness of the procurement in the Company
6	Pengadaan Langsung Direct Procurement	Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang / jasa yang terdapat di pasar sehingga diyakini bahwa barang / jasa tersebut merupakan hasil persaingan di pasar dengan nilai maksimal Rp500.000.000 untuk Kantor Pusat dan Rp300.000.000 untuk Unit.	Direct Procurement refers to the purchase of goods/services in the market which is considered a result of market competition, with a maximum value of Rp500,000,000 for procurement for the Head Office and Rp300,000,000 for Units.
7	*Beauty Contest*	Merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Adapun contohnya antara lain pengadaan desain interior, desain arsitektur, desain *company profile* dan lain lain.	Selection of Service Provider through contest of original ideas, creativity, and innovation at a price/cost that is not specified on Unit Price basis. This includes interior design competition, architectural design competition, company profile design competition, etc.

Seleksi Penyedia Barang dan Jasa
Selection of Goods and Services Supplier

Guna mendapatkan penyedia barang /jasa sesuai dengan yang dibutuhkan Perusahaan, Indonesia Power senantiasa menerapkan persyaratan kualifikasi, dimana persyaratan kualifikasi yang ditetapkan merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk pekerjaan yang risiko teknis dan komersialnya tinggi atau pekerjaan kompleks dapat ditambahkan persyaratan yang lebih spesifik dan khusus, baik yang berkaitan dengan peralatan, tenaga ahli dan pengalamannya.

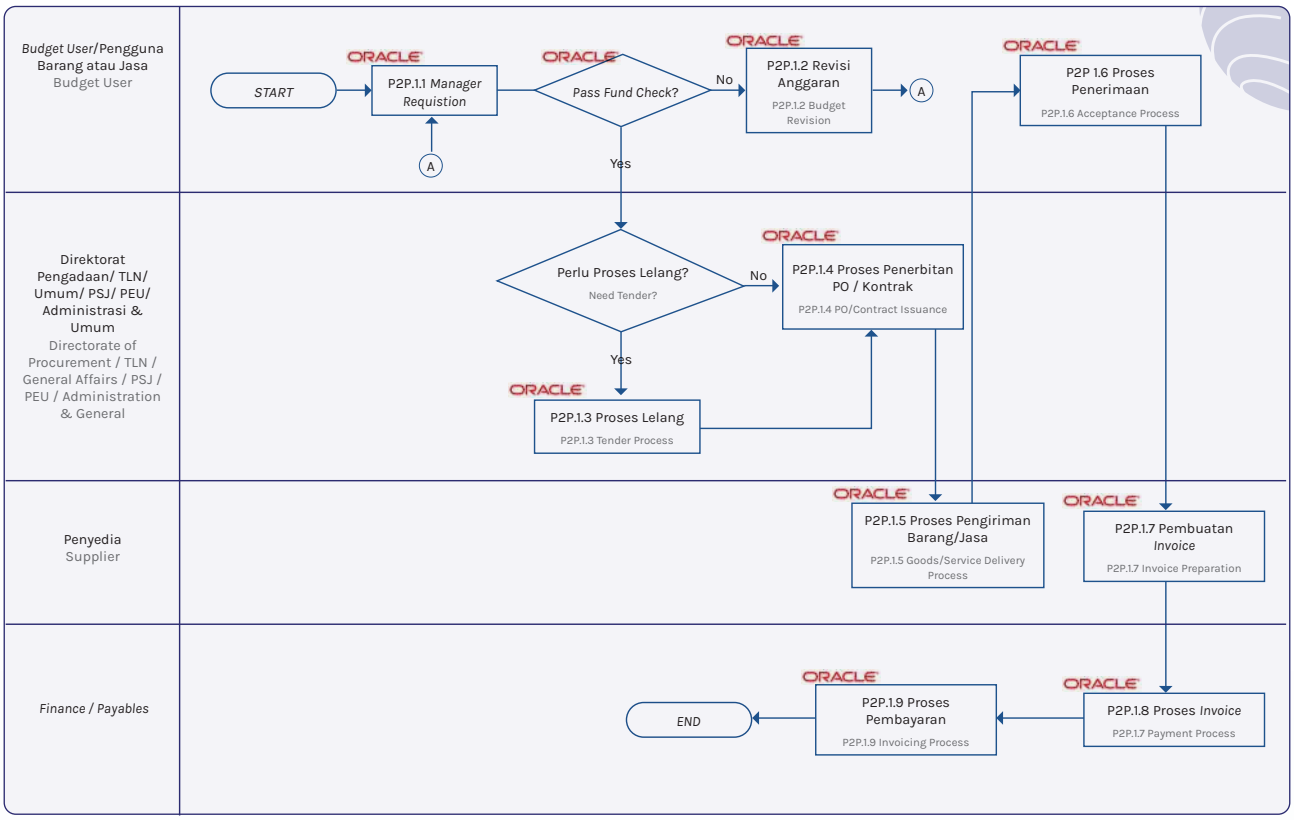
In order to find goods/service supplier that meets the Company's needs, Indonesia Power always applies certain minimum requirements for implementing works. For works with high technical and commercial risks or complex works, more detailed and specific requirements for either equipment, expert, or experience may be added.

Tahapan dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Stages of Goods and Services Procurement

Secara umum mekanisme proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia Power digambarkan sebagai berikut:

In general, goods and services procurement process at Indonesia Power is illustrated in the following:



Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Activities

1. *Value Generation* Pada Proses Pengadaan
   Dengan pelaksanaan proses pengadaan *optimal based purchasing strategy*, Indonesia Power telah berhasil mendapatkan penghematan biaya (*value generation*) pada tahun 2021 sebesar Rp73,9 miliar dengan pencapaian *Procurement Return of Investment* sebesar 716%.

1. Value Generation in Procurement Process
   With optimal implementation of purchasing strategies, Indonesia Power has obtained value generation amounting to Rp73.9 billion in 2021, with 716% of Procurement Return of Investment.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
GOODS AND SERVICES PROCUREMENT

2. Pelaksanaan *Vendor Gathering*
   Merupakan sarana meningkatkan komunikasi antara Perusahaan dengan para mitra kerja dalam hal penyampaian program-program dan kebijakan pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Perusahaan, mendengar masukan dari mitra kerja untuk meningkatkan kinerja dalam hubungan kemitraan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa, serta memberikan umpan balik atas kinerja pemasok. Pada tahun 2021, Indonesia Power mengundang seluruh pemasok melalui *event vendor gathering* serentak pada tanggal 23 Desember 2021.

   Adapun pemasok terbaik Indonesia Power tahun 2021 tercermin pada tabel sebagai berikut:

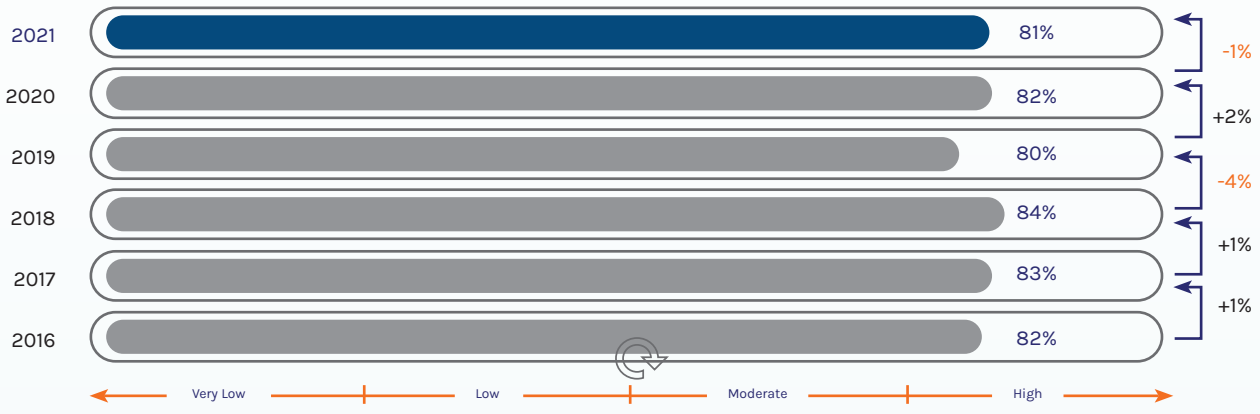
2. Vendor Gathering
   A forum for improving the communication between the Company and its business partners in the dissemination of programs and policies related to the procurement of goods and services in the Company, receiving feedbacks from business partners to improve partnership performance in the procurement of goods and services, and providing feedbacks on vendor's performance. Indonesia Power invited all vendors to the vendor gathering which was held on December 23, 2021.

   Indonesia Power's best vendors in 2021 were as follows:

Vendor	Kategori Category	Penilaian Assessment
PT Perta Daya Gas	Energi Primer - Non Batubara Primary Energy - Non-coal	Terbaik Best
PT Berau Coal	Energi Primer - Batubara Primary Energy - Coal	Terbaik Best
Umbra Partnership	Jasa Pendukung Pengembangan Usaha Business Development-Supporting Service	Terbaik Best
PT Mitra Integrasi Informatika	Teknologi Informasi Information Technology	Terbaik Best
PT PAL Indonesia	EPC	Terbaik Best
Mitsubishi Corporation	*Spare Part*	Terbaik Best

3. Survei Perilaku Etis
   Merupakan penilaian dari pemasok terhadap Indonesia Power atas etika dan kepuasan dari aspek perencanaan pengadaan, proses pengadaan, implementasi kontrak dan pembayaran yang dilakukan secara tahunan oleh Perusahaan. Proses penilaian dilakukan secara independen tanpa intervensi dari Indonesia Power yang dilakukan oleh LPT UI.

3. Ethical Behavior Survey
   Assessment performed by vendors on the ethics and satisfaction of procurement planning, procurement process, contract implementation, and payment performed by Indonesia Power, performed on an annual basis. The assessment is performed by LPT UI independently, without intervention from Indonesia Power.



KEBIJAKAN TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

POLICY ON THE FULFILLMENT OF CREDITOR'S RIGHTS

Kebijakan Hubungan dengan kreditur secara umum diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan yang di dalamnya diatur mengenai berbagai hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, antara lain sebagai berikut:

The policy on the relationship with creditors is generally set out in the Company's Code of Conduct, which regulates the dos and the don'ts, such as:

The Do's		The Don't's	
• Pemilihan berdasarkan kreditur/ investor dilakukan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku.	• Selection of creditor/investor in consideration of accountable credibility and reliability, and in accordance with the prevailing procedure and mechanism;	• Pembukuan ganda untuk kepentingan kreditur /investor;	• Double bookkeeping for the interest of the creditor/investor;
• Menyampaikan informasi keuangan maupun non-keuangan secara akuntabel untuk menjaga kepercayaan kreditur /investor;	• Deliver financial and non-financial information in an accountable manner to maintain creditor/ investor trust;	• Pelanggaran kontrak/ perjanjian;	• Breach of contract/ agreement;
• Kreditur dan investor mematuhi ketentuan yang berlaku;	• Creditor and investor comply with the applicable provisions;	• Syarat perjanjian yang tidak transparan dan wajar.	• Non-transparent and unreasonable terms of the agreement.
• Komitmen untuk memenuhi setiap kontrak perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur / investor;	• Commitment to performing all agreements that had been entered into with creditor/investor;		
• Syarat perjanjian mengedepankan prinsip transparansi dan kewajaran (*fairness*) sehingga tidak merugikan salah satu pihak.	• Terms of agreement prioritize transparency and fairness principles to avoid damage to either party.		

Kemampuan Perusahaan Dalam Membayar Hutang

The Company's Solvency

Dalam ketentuan Indenture Global Bond yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero), bahwa Indonesia Power sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero) harus mematuhi indenture Global Bond PT PLN (Persero) dimana adanya pembatasan untuk melakukan penambahan utang baru "*limitation on additional indebtedness*", sehingga selama tahun 2021, Indonesia Power tidak memiliki kreditur. Adapun Uraian detail terkait Informasi Kemampuan Perusahaan Dalam Membayar Hutang telah diuraikan dalam Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen.

The Global Bond Indenture issued by PT PLN (Persero) specifies that as PT PLN (Persero)'s subsidiary, Indonesia Power must comply with the provisions of the indenture, specifically one pertaining to the "limitation on additional of indebtedness" which rendered Indonesia Power to have no creditors throughout 2021. The details about the information on the Company's solvency are available in the Chapter of Management Discussion and Analysis.

PENGENDALIAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

CONTROL AND MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST

Indonesia Power menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap pengendalian dan penanganan benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan bisnis yang efektif dalam mencapai tujuan Perusahaan.

Indonesia Power is aware of the importance of assertiveness in controlling and managing conflicts of interest within its environment, in order to create an effective business management that aims to achieve the Company's objectives.

Untuk mencegah dan mengendalikan Benturan Kepentingan, Indonesia Power telah mengambil sejumlah langkah dan strategi, diantaranya, melakukan sosialisasi tentang aturan Benturan Kepentingan, kemudian mewajibkan seluruh manajemen dan pegawai struktural setingkat Eksekutif Senior ke atas untuk menandatangani Komitmen Kepatuhan terhadap Benturan Kepentingan setiap awal tahun.

To prevent and control any conflicts of interest, Indonesia Power has taken a number of measures and strategies, which include disseminating provisions on conflict of interest, then requiring the management and all structural officials (Senior Executives level and above) to sign the Commitment to being Free from Conflict of Interest every beginning of each year.

Kebijakan

Policy

Indonesia Power telah mengatur secara tegas tentang pengendalian Benturan Kepentingan melalui SK Direksi No.018.K/010/IP/2020, yang merupakan ratifikasi kebijakan dari Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.0122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan PT PLN (Persero).

Indonesia Power has explicitly accommodate the Conflict of Interest (COI) control in the Decree of the Board of Directors No. 018.K/010/IP/2020, which refers to the Regulation of PT PLN (Persero) Board of Directors No. 0122.P/DIR/2019 on Conflict of Interest Management in PT PLN (Persero).

Pedoman Benturan Kepentingan Indonesia Power mengatur tentang jenis dan sebab terjadinya Benturan Kepentingan serta mekanisme pengendaliannya yang terdiri dari pencegahan, pelaporan, penanganan, dan mitigasi jika terjadi Benturan Kepentingan. Hingga, sanksi Perusahaan terhadap pelanggaran yang dilakukan Insan Perusahaan dengan Benturan Kepentingan.

The Conflict of Interest Code covers the types and causes of conflict of interest and the control mechanism that includes prevention, reporting, handling, and mitigation of conflicts of interest, if any. The Code also introduces sanctions that may be imposed on the Company's personnel who commit COI violations.

Kebijakan terkait Benturan Kepentingan di Indonesia Power melingkupi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Kebijakan Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang mengatur tidak boleh adanya rangkap jabatan, pernyataan Komitmen Bebas Benturan Kepentingan, serta keterbukaan dalam hal kepemilikan saham di perusahaan lain.
2. Kebijakan Benturan Kepentingan dalam Aktivitas Pengadaan. Dalam hal ini, Insan Perusahaan dengan potensi Benturan Kepentingan tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan pada proses pengadaan.
3. Kebijakan Benturan Kepentingan terhadap Aktivitas Sampingan Pegawai, yang mengatur tentang cara pegawai beraktivitas bisnis maupun non bisnis disamping tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai.

Policy on Conflict of Interest at Indonesia Power covers three (3) issues, i.e.

1. COI Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors, which includes the prohibition of concurrent position, statement of commitment to being free from conflict of interest, and transparency of shareholding in other companies.
2. Policy on COI in Procurement Activities. In this case, Company Personnel with potential conflict of interest must refrain from making decisions during procurement process.
3. COI Policy on Employees' Sideline Activities. This provides how the employees conduct any business or non-business activities beyond their duties and responsibilities as Indonesia Power's employees.

Jenis Benturan Kepentingan
Types of Conflict of Interest

Benturan Kepentingan Potensial
Potential Conflict of Interest

Ketika seseorang memiliki kapasitas kepentingan Pribadi yang dapat mengakibatkan situasi konflik kepentingan
When a person has personal interest capacity that may result in a conflict of interest

Benturan Kepentingan Aktual
Actual Conflict of Interest

Ketika seseorang berada dalam situasi dimana dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas
When a person is in a situation that may affect the implementation of duties

Benturan Kepentingan yang dipersepsikan
Perceived Conflict of Interest

Ketika seseorang terlihat seperti berada dalam benturan kepentingan, namun kenyataannya tidak
When a person seems to be in a conflict of interest, but actually doesn't

Definisi Benturan Kepentingan
Definition of Conflict of Interest

Situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan Indonesia Power (baik disengaja maupun tidak) untuk memanfaatkan kedudukan dan wewenangnya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang dilaksanakannya menjadi tidak objektif dan berpotensi merugikan Perusahaan

A situation where there is a conflict of interest for Indonesia Power Personnel (either intentionally or not) to take advantage of their position and authority in the Company for personal, familial, or friendship gain that renders their duties becoming non-objective and potentially harming the Company.

SK Direksi Nomor 018.K/010/1P/2020 Tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan PT Indonesia Power

Decree of the Board of Directors No. 018.K/010/IP/2020 on Conflict of Interest in PT Indonesia Power

Sumber-sumber yang dapat menyebabkan terjadinya Benturan Kepentingan
Sources that may Cause Conflict of Interest

- Hubungan Afiliasi — Affiliation
- Kepemilikan Aset — Asset Ownership
- Gratifikasi — Gratification
- Keuntungan Finansial — Financial Gain
- Rangkap Jabatan — Concurrent Position
- Kepentingan Pribadi — Personal Interest

PENGENDALIAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
CONTROL AND MANAGEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST

Pelaporan
Reporting

Guna memudahkan pelaporan benturan kepentingan, Indonesia Power telah memiliki Aplikasi IP PRO GCG dan IPKU. Tak hanya melaporkan, melalui aplikasi dan fitur ini juga bisa langsung disampaikan solusi penanganan atas Benturan Kepentingan tersebut.

For easy reporting of any conflicts of interest, Indonesia Power has IP PRO GCG and IPKU applications in place. These applications and features do not only report the occurrence of conflicts of interest, but also offer solutions to address such issue.

Adanya aplikasi IP PRO GCG dan IPKU serta *email blast* notifikasi Benturan Kepentingan setiap bulannya telah dapat meningkatkan *awareness* insan Indonesia Power terhadap pelaporan Benturan Kepentingan. Pelaporan Benturan Kepentingan ini dapat berupa pelaporan diri sendiri atau pelaporan orang lain yang terlibat dalam Benturan Kepentingan.

The existence of IP PRO GCG and IPKU applications and monthly Conflict of Interest Notification via e-mail blast have been successful in increasing Indonesia Power Personnel's awareness about COI reporting. It can be done through self-report or by reporting other persons involved in COI.

Pelaporan juga dapat disampaikan oleh pihak luar jika terjadi Benturan Kepentingan atau penyalahgunaan wewenang oleh insan Indonesia Power. Pelaporan oleh pihak luar disampaikan melalui 3 (tiga) saluran, yaitu:

- *Whistleblowing System* (WBS) pada *website* PT Indonesia Power https://www.indonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Form-Aduan-WBS.aspx
- Email pengaduan@indonesiapower. co.id
- Surat yang ditujukan ke Admin Pengaduan pada alamat perusahaan

External parties may also submit the report in the occurrence of COI or abuse of authority by Indonesia Power Personnel. Reports from external parties can be delivered via three (3) media, namely:

- Whistleblowing System (WBS) on PT Indonesia Power website at https://www.indonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Form-Aduan-WBS.aspx
- E-mail: pengaduan@indonesiapower. co.id
- Letter delivered to WBS Admin at the Company address

PT INDONESIA POWER

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
(62-21) 5267666 (hunting)
(62-21) 5252623

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik yang dilakukan Insan Indonesia Power. Pada prinsipnya setiap Insan Indonesia Power senantiasa menghindari pengambilan keputusan yang memiliki situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.

Throughout 2021, Indonesia Power Personnel did not carry out any transactions containing conflicts of interest. Principally, every person within Indonesia Power always avoids making decisions that may give rise to a situation or condition of conflict of interest.

PROGRAM ANTI KORUPSI INDONESIA POWER

ANTI-CORRUPTION PROGRAM AT INDONESIA POWER

Indonesia Power berkomitmen tinggi dalam menciptakan lingkungan Indonesia Power yang tangguh (Profesional dan tahan goncangan/godaan), unggul (mengutamakan sistem, mutu dan inovasi), bermartabat (bersih dari segala penyimpangan dan kecurangan termasuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran serta meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) yang sehat.

Indonesia Power is highly committed to creating a robust (professional and unwavering), excellent (prioritizing system, quality, and innovation), and dignified (clean from any irregularities and fraud, including from corruption, collusion, and nepotism) environment, complying with Good Corporate Governance principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, and promoting a sound corporate culture.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Indonesia Power melakukan berbagai program dan terus mendorong efektifitas diantaranya melalui **Pengelolaan Indonesia Power Bersih, pengelolaan Pengendalian Gratifikasi, pengelolaan Laporan Harta Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).**

To materialize these goals, Indonesia Power carries out a number of programs and continues seeking effectiveness through **"Indonesia Power Bersih" Management, Gratification Control Management, State Officials Wealth Report (LHKPN) Management, and Anti-Bribery Management System (ABMS) Management.**

Pengelolaan Indonesia Power Bersih

Indonesia Power Bersih Management

Kebijakan Indonesia Power Bersih merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Indonesia Power Bersih di Perusahaan yang bertujuan untuk menghilangkan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Perusahaan. Pedoman IP Bersih diatur dalam Keputusan Direksi No.161.K.020.IP.2014 tentang Pedoman Indonesia Power Bersih tanggal 7 Oktober 2014.

Indonesia Power's policies guide every activity, with the aim to eliminate the practice of corruption, collusion, and nepotism within the Company. "Indonesia Power Bersih" (IP Bersih) guidelines are accommodated in the Decree of the Board of Directors No. 161.K.020.IP.2014 dated October 07, 2014 on Guidelines for "Indonesia Power Bersih".

Tujuan dibentuknya Kebijakan tersebut adalah untuk:

a. Mengupayakan internalisasi Indonesia Power Bersih yang terus menerus agar semangat IP Bersih benar-benar menjadi budaya perusahaan (*corporate culture*) sehingga membantu meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Indonesia Power.
b. Mengoptimalkan nilai-nilai pedoman etika perusahaan (*Code of Conduct*) dan Indonesia Power Way agar Indonesia Power memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya secara berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Indonesia Power.
c. Mendorong agar Insan Indonesia Power dan Pemangku Kepentingan melaksanakan tindakannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, peraturan perusahaan dan anggaran dasar Indonesia Power agar tercipta Indonesia Power Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

The policy was established to:

a. Seek continuous internalization within Indonesia Power, to embed IP Bersih into corporate culture, thus help increasing public trust in Indonesia Power.
b. Optimize the values of the Code of Conduct and Indonesia Power Way, thus help strengthening the competitiveness, both nationally and internationally, in order to sustainably exist to achieve the Company's intents and purposes.
c. Encourage Indonesia Power Personnel and Stakeholders to act based on high moral value and compliance with the laws and regulations, Company regulations, and Indonesia Power Articles of Associations, thus help creating a Clean Indonesia Power ("Indonesia Power Bersih") that is free from corruption, collusion, and nepotism.

Pedoman IP Bersih dapat diunduh pada https://www.indonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Pedoman-Tata-Kelola.aspx

Guidelines for Indonesia Power Bersih is accessible via https://www.indonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Pedoman-Tata-Kelola.aspx

PROGRAM ANTI KORUPSI INDONESIA POWER
ANTI-CORRUPTION PROGRAM AT INDONESIA POWER

Implementasi Program Anti Korupsi Indonesia Power Tahun 2021

Implementation of Indonesia Power's Anti-Corruption Program in 2021

Sepanjang Tahun 2021, Indonesia Power telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka mendukung terciptanya Indonesia Power Bersih yaitu diantaranya dengan melakukan :

Throughout 2021, Indonesia Power has carried out the following activities as a commitment to creating "Indonesia Power Bersih":

Aktivitas Activity	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date
Audit Surveillance SNI ISO 37001:2016 SMAP oleh Mutu International Surveillance Audit on SNI ISO 37001:2016 ABMS by MUTU International	9-11 Juni 2021 June 9-11, 2021
Launching Anti Corruption Center of Excellence (COE) IP Acade	15 Maret 2021 March 15, 2021
Webinar Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi bersama KPK RI bagi seluruh Pengelola GCG Unit Webinar on Identifying Gratification Vulnerable Spots with KPK RI for all Unit GCG Managers	28 - 29 September 2021 September 28-29, 2021
e-Learning Bimtek Pengendalian Gratifikasi KPK bagi Seluruh Pengelola GCG Unit E-learning on Technical Guidance for Gratification Control with KPK for all Unit GCG Managers	28 - 29 September 2021 September 28-29, 2021
Workshop Awareness dan Internal *Audit Course* ABMS bagi Pengelola GCG Unit Awareness Workshop and ABMS Internal Audit Course for Unit GCG Managers	15 Februari 2021 February 15, 2021
Pengembangan Aplikasi berupa penambahan fitur Laporan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan pada IPKU Application Development, i.e. Addition of Gratification and Conflict of Interest Reporting Feature in IPKU	Januari - Februari 2021 January - February, 2021
Sosialisasi Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) melalui Lomba Foto dan Video antar Unit Socialization of World Anti-Corruption Day with Photo and Video Competition among Units	Desember 2021 December, 2021

Laporan Insiden Korupsi Tahun 2021

Corruption Incident Report in 2021

Hingga akhir 31 Desember 2021, tidak terdapat *inside* korupsi yang dilakukan oleh Insan Indonesia Power sebagaimana yang tercermin pada tabel sebagai berikut:

As of December 31, 2021, no inside corruptions were committed by Indonesia Power Personnel, as shown in the following table:

Jenis Insiden Type of Incident	Jumlah insiden Number of Incident(s)
insiden korupsi corruption incident	Nihil Zero
insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan karyawan diberhentikan atau dihukum karena korupsi proven corruption incident resulting in an employee's termination of employment or punishment due to corruption	Nihil Zero
insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi proven corruption incident resulting in the termination or expiry of contract with a business partner due to corruption-related violation	Nihil Zero

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control Management

Indonesia Power menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam implementasi pengendalian gratifikasi Perusahaan melalui Keputusan Direksi No.019.K/010/IP/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Indonesia Power sebagai pembaharuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi tahun 2019, serta dipertegas dalam Surat Edaran Direksi No.09.E/012/IP/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Larangan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi sebagai pembaharuan Surat Edaran tahun 2018.

Indonesia Power has set a policy that guides the gratification control implementation in the Company, which was ratified by the Board of Directors Decree No. 019.K/010/IP/2020 on Guidelines for Gratification Control in PT Indonesia Power as an amendment to the Gratification Control Guidelines 2019, which was confirmed by the Board of Directors Circular No. 09.E/012/IP/2020 dated March 6, 2020 on Prohibition to Provide and Receive Gratification as an amendment to Circular of 2018.

Program ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi "Indonesia Power Bersih" yang dilaksanakan sejak tahun 2014. Sedangkan acuan IP Bersih adalah program yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) sebagai entitas induk, yaitu: "PLN Bersih" guna meningkatkan budaya Perusahaan yang sehat di lingkungan Perusahaan.

The program is the follow up on "Indonesia Power Bersih" (IP Bersih) declaration made in 2014. IP Bersih refers to a program established by PT PLN (Persero) as the parent entity, i.e. "PLN Bersih" which aims at promoting a sound corporate culture.

Hal-hal yang diatur dalam kebijakan Pengendalian Gratifikasi Indonesia Power adalah tentang Jenis Gratifikasi, Pemanfaatan dan Pengelolaan Gratifikasi, Implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pelaporan dan Sanksi serta Perlindungan Saksi/Pelapor.

Matters covered in Indonesia Power Gratification Control policy include Types of Gratification, Utilization and Management of Gratification, Implementation of Gratification Control Guidelines, Reporting/Whistleblowing and Sanctions, and Witness/Whistleblower Protection.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini mengikat dan mengatur segenap Insan Indonesia Power dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga diharapkan dengan adanya pedoman tersebut dapat membentuk lingkungan Perusahaan yang terkendali dalam penanganan Gratifikasi sehingga prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik.

The Gratification Control Guidelines bind and regulate all Indonesia Power personnel in running the business, and are expected to create a controlled environment in terms of gratification controlling, so that the transparency and accountability principles are well implemented.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Indonesia Power dapat diunduh pada https://www.indonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Pedoman-Tata-Kelola.aspx

Indonesia Power's WBS Policy is accessible via https://www.indonesiapower.co.id/id/tata-kelola/Pages/Pedoman-Tata-Kelola.aspx

Pengelola Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control Management

Pengelolaan Gratifikasi dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

Gratification Control is carried out by the Gratification Control Unit whose duties and responsibilities cover the following:

PROGRAM ANTI KORUPSI INDONESIA POWER
ANTI-CORRUPTION PROGRAM AT INDONESIA POWER

1. Menerima laporan Gratifikasi, memilah kategori Gratifikasi, dan memfasilitasi penerusan laporan Gratifikasi ke KPK;
2. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Perusahaan dalam pelaksanaan pedoman ini;
3. Memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi;
4. Menyampaikan surat keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status Gratifikasi kepada Penerima serta penyimpanan bukti penyetoran uang yang diterima dari Gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara;
5. Melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan Perusahaan;
6. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi, dan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali dan melaporkan kepada Corporate Secretary;
7. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Corporate Secretary apabila terjadi pelanggaran pedoman Gratifikasi terkait kedinasan oleh Insan Indonesia Power;
8. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang diterima dari Pelapor;
9. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas efektivitas dari kebijakan terkait pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan;
10. Mensosialisasikan pemahaman tentang pengendalian Gratifikasi kepada Insan Indonesia Power, Pihak Ketiga dan/atau *Stakeholder* pada umumnya di lingkungan Perusahaan;
11. Menyampaikan laporan rekapitulasi pelaporan dan tindak lanjut pelaporan kepada Direksi dan KPK secara periodik setiap semester.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, UPG dibantu oleh Admin Unit yang ditunjuk atau melekat sesuai *job desk* yang ditetapkan oleh Direksi.

1. Receiving gratification report, sorting gratification category, and facilitating the escalation of gratification reporting to KPK;
2. Coordinating, consulting, and corresponding with KPK on behalf of the Company in implementing the guidelines;
3. Monitoring follow-ups on the utilization of gratuities received;
4. Delivering decision letter of KPK Chair on confirmation of recipient's gratification status and retention of receipt for money generated from the gratification should KPK decide to confiscate such gratuities for the State;
5. Managing gratification objects under the Company's responsibility;
6. Mapping vulnerable spots for giving and receiving gratuities and, on an annual basis, reporting the map to the Corporate Secretary;
7. Recommending follow-up actions to the Corporate Secretary pertaining work-related violation against the Gratification Guidelines committed by Indonesia Power Personnel;
8. Ensuring the confidentiality of tip-off from whistleblower;
9. Monitoring and evaluating the effectiveness of gratification control guidelines within the Company;
10. Disseminating understanding about gratification control to Indonesia Power personnel, third parties, and/or general stakeholders in the Company;
11. Submitting biannual recapitulation and follow-up reports to the Board of Directors and KPK.

In performing its duties, the Gratification Control Unit is assisted by an Admin Unit who assumes its duties according to the job descriptions set by the Board of Directors.

Mekanisme Pelaporan
Reporting Mechanism

Mekanisme pelaporan atas gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan dan penolakan Gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada UPG dengan mengisi formulir pada Aplikasi IP PRO GCG dengan alamat gcg.indonesiapower.co.id:2000, disertai dokumen pendukung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan;

The gratification reporting mechanism, as explained in the Guidelines for Gratification Control and Reporting, is as follows:

1. The receipt and rejection of gratification that must be reported are notified to the Gratification Control Unit by filling out the form IP PRO GCG application at gcg.indonesiapower.co.id:2000, along with supported documents, no later than 10 (ten) working days following the date of the receipt;

2. Untuk penerimaan barang yang mudah busuk/rusak/cepat kadaluarsa dalam batas kewajaran (misal: makanan dan minuman), dapat disalurkan langsung kepada Panti Asuhan, Panti Jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan melaporkan kepada UPG disertai tanda bukti penyerahan barang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan;
3. UPG melaporkan penerimaan Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan telah ditetapkan menjadi ranah KPK disertai dengan dokumen pendukung kepada KPK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan Gratifikasi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengarah;
4. Atas Pelaporan Gratifikasi tersebut, KPK akan melakukan analisa, verifikasi dan klasifikasi serta memberikan penetapan status Gratifikasi atas laporan Gratifikasi yang akan disampaikan kepada UPG paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
5. SK Penetapan Status Gratifikasi dari KPK akan dikirimkan kepada pelapor oleh UPG paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SK ditetapkan;
6. UPG membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi serta melaporkannya kepada Direksi dan Direksi PT PLN (Persero) secara periodik setiap tahun;
7. Apabila diketahui adanya Insan Indonesia Power menerima/memberi Gratifikasi yang tidak diperbolehkan atau berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan dan Insan Indonesia Power dimaksud tidak melaporkannya maka dapat dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System;*

2. Perishable goods received in reasonable amount (e.g. food and drinks) can be immediately donated to orphanages, retirement homes, direct beneficiaries, or other social institutions by reporting to Gratification Control Unit along with the receipt of the goods handover, no later than 10 (ten) working days following the date of the receipt;
3. Gratification Control Unit submits the report on gratuities that must be reported and has been handed over to KPK, along with the supporting documents, to KPK no later than 20 (twenty) working days following the date of the gratification report receipt, after receiving approval from the Steering Committee;
4. In response of the gratification report, KPK will perform the analysis, verification, and classification, and determine the gratification status of the reported gratification, to be notified to the Gratification Control unit no later than 30 (thirty) working days;
5. The Decree of Gratification Status Determination from KPK will be delivered to the whistleblower by Gratification Control Unit no later than seven 7 (seven) working days following the stipulation of the Decree;
6. Gratification Control Unit recapitulates the gratification receipt and rejection report and submits it to Indonesia Power Board of Directors and PT PLN (Persero) Board of Directors on an annual basis;
7. In the event that a member of Indonesia Power Personnel is known to receive/give any prohibited gratuities or gratuities that may potentially result in an abuse of power/position, and such person fails to report it, a tip-off may be submitted via Whistleblowing System.

Mekanisme Perlindungan Saksi/Pelapor
Witness/Whistleblower Protection Mechanism

Mekanisme perlindungan saksi/Pelapor terdiri dari:

1. Pelapor yang patuh terhadap ketentuan Gratifikasi berhak untuk mendapatkan upaya perlindungan dari Perusahaan berupa:
   - Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor seperti namun tidak terbatas pada penurunan *grade*, penurunan penilaian, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
   - Pemindahan tugas/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik terhadap Pelapor;
   - Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

The protection for witness/whistleblower covers the following:

1. Any whistleblower in compliance with the Gratification Control Guidelines reserves the right to receive protection from the Company, such as:
   - Protection from retaliation or administrative discrimination against the whistleblower, including but not limited to down-grading, assessment score reduction, proposal of transfer of position, or other career barriers;
   - Transfer of position for whistleblower in the event of intimidation or physical threat against the whistleblower;
   - Legal assistance in accordance with applicable provisions in the Company.

PROGRAM ANTI KORUPSI INDONESIA POWER
ANTI-CORRUPTION PROGRAM AT INDONESIA POWER

2. Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas diberikan dalam hal:
   - Adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak lazim lainnya baik dari pihak internal maupun eksternal;
   - Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direksi melalui Department of Internal Audit, dalam evaluasinya Department of Internal Audit dapat berkoordinasi dengan Corporate Secretary sebagai pengelola UPG.

2. The protection as referred to in letter a above is provided when:
   - There is an intimidation, threat, discredit, or other irregular treatments from internal or external parties;
   - The whistleblower submits a written proposal to the Board of Directors via the Department of Internal Audit. In evaluating the proposal, the Department of Internal Audit may coordinate with the Corporate Secretary as the manager of the Gratification Control Unit.

Sanksi Atas Pelanggaran
Sanction for Offenses

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Any violations against the provision of the Gratification Guidelines are subject to sanctions according to applicable regulations within the Company.

Implementasi Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control Implementation

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi Indonesia Power sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi pada setiap dokumen dalam proses Pekerjaan yang terkait dengan *Stakeholder.*
2. Mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang dan jasa dan atau pada kontrak pengadaan barang dan jasa serta pada setiap dokumen yang disampaikan kepada Pihak Ketiga.
3. Menugaskan kepada Unit yang memiliki hubungan kerja dengan Pihak Ketiga untuk melakukan penyampaian Pedoman Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai *supply chain management* (penyedia barang dan jasa, pabrikan, agen, distributor, konsultan, auditor/*asesor* dan pelanggan serta *Stakeholder* lainnya) di lingkungannya melalui:
   - *Vendor Gathering* tanggal 23 Desember 2021;
   - Email dan Media Sosial Indonesia Power mengenai larangan gratifikasi hari raya keagamaan.
4. Sosialisasi materi Gratifikasi kepada Insan Indonesia Power pada saat Periode Pengisian Survei Pemahaman Integritas.
5. Sosialisasi Larangan Gratifikasi Hari Raya Idul Fitri via *Email* dan WA Group tanggal 7 Mei 2021 dan Desember 2021.
6. *Launching* dan pembelajaran modul F*raud Risk Assessment Anti Corruption Center of Excellence* (COE) IP Academy tanggal 15 Maret 2021-16 Maret 2021

The Gratification Control Unit has carried out the following activities throughout 2021:

1. Attaching provisions on the prohibition to receive and/or give gratification in every document that pertains to work process with stakeholders.
2. Attaching provisions on the prohibition to receive and/or give gratification in every announcement and/or contract of goods and services procurement as well as in every document delivered to third parties.
3. Assigning Units collaborating with third parties to deliver gratification guidelines to all relevant parties in the supply chain management (goods and services providers, manufacturers, agents, distributors, consultants, auditors/assessors, customers, and other stakeholders) in their areas via:
   - Vendor Gathering on December 23, 2021;
   - Indonesia Power email and social media, regarding prohibition of gratification during religious holidays.
4. Disseminating gratification material to Indonesia Power Personnel during Integrity Comprehension Survey period.
5. Disseminating the prohibition of gratification during Eid al-Fitr Holiday via email and WA group on May 07, 2021 and in December 2021.
6. Organizing the launching and learning of Fraud Risk Assessment module, Anti-Corruption Center of Excellence (COE) IP Academy on March 15-16, 2021.

7. Sosialisasi dan *Coaching* Pengisian *Fraud Risk Assessment* dan Identifikasi Titik Rawan Gratifikasi kepada Pengelola GCG Unit pada tanggal 7 April 2021
8. Mengelola Laporan Gratifikasi
   UPG setiap semesteran menyampaikan laporan rekapitulasi pelaporan dan tindak lanjut pelaporan gratifikasi kepada Direksi dan KPK. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah laporan gratifikasi yang diterima Unit Pelaporan Gratifikasi (UPG) Indonesia Power dari seluruh unit dan Anak Perusahaan berjumlah 22 Laporan Gratifikasi, yang terdiri dari 6 Laporan Penolakan Gratifikasi, 16 Laporan Penerimaan.

Dari seluruh laporan gratifikasi tersebut tidak ada yang disampaikan kepada KPK dikarenakan semua laporan gratifikasi merupakan ranah instansi Indonesia Power.

7. Organizing dissemination and coaching on Fraud Risk Assessment Implementation and Identifying Gratification Vulnerable Spots to Unit GCG Managers on April 07, 2021.
8. Managing Gratification Reports
   The Gratification Control Unit submits the gratification reporting and follow-up recapitulation report to the Board of Directors and KPK on a biannual basis. As of the end of 2021, the Gratification Control Unit has received 22 gratification reports from all units and subsidiaries, covering 6 gratification rejections and 16 gratification receipts.

All of the reported gratifications were not escalated to KPK as they were under the authority of Indonesia Power.

Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Indonesia Power

Evaluation of Indonesia Power's Gratification Control Program

Secara berkala Indonesia Power melakukan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan arahan Pemegang Saham yaitu PT PLN (Persero). PPG yang dinilai antara lain perangkat PPG, implementasi PPG dan hasil implementasi PPG. Hasil *monitoring* dan evaluasi PPG Indonesia Power Untuk Tahun 2021 mencapai 100 dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Periodically, Indonesia Power evaluates the Gratification Control Program performed by KPK as directed by PT PLN (Persero) as the shareholder. Factors assessed from the Gratification Control Program include the Program's tools, implementation, and implementation result. Indonesia Power's monitoring and evaluation of the Gratification Control Program scored 100 with the following details:

Kegiatan Activity	Uraian Kegiatan Description	Skor Score
Perangkat PPG Gratification Control Program Tools	Aturan Rules	100
	SK UPG Gratification Control Unit Decision Letter	100
	GOL UPG Gratification Control Unit Online Gratification (GOL) Application	100
Implementasi PPG Gratification Control Program Implementation	Diseminasi Dissemination	100
	E-Learning	100
	Sosialisasi Socialization	100
	Bimtek Technical Guidance	100
	Titik Rawan Vulnerable Spots	100
	Mitigasi Risiko Risk Mitigation	100
	Stakeholder	100
Hasil Implementasi PPG Gratification Control Program Implementation Result	Pelaporan Reporting	100
	Penanganan Pelaporan Report Handling	100
Rata-rata Nilai Average Score		**100**

PROGRAM ANTI KORUPSI INDONESIA POWER
ANTI-CORRUPTION PROGRAM AT INDONESIA POWER

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials Wealth Report (LHKPN) Management

Indonesia Power telah memiliki kebijakan tentang kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.112.K/010/IP/2021 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Indonesia Power tanggal 24 November 2021 sebagai pembaharuan dari Keputusan Direksi Nomor 235.K/010/IP/2017 tanggal 11 Desember 2017.

Indonesia Power has a policy on compliance with mandatory LHKPN submission as set out in the Decree of the Board of Directors No. 112.K/010/IP/2021 on Guidelines for State Officials Wealth Report in PT Indonesia Power dated November 24, 2021 as the amendment of the Decree of the Board of Directors No. 235.K/010/IP/2017 dated December 11, 2017.

Pedoman LHKPN Indonesia Power mengatur tentang Pendaftaran Wajib Lapor LHKPN, Pelaporan LHKPN, Pengisian LHKPN, Verifikasi Administratif atas LHKPN, Pengumuman LHKPN, Pengelolaan LHKPN dan Sanksi.

Indonesia Power's LHKPN Guidelines oversee the Registration of LHKPN Mandatory Reporters, LHKPN Submission, LHKPN Form Filling, LHKPN Administrative Verification, LHKPN Announcement, LHKPN Management, and Sanctions.

Wajib Lapor

Mandatory Reporters

Sejalan dengan Pedoman LHKPN, wajib lapor LHKPN adalah:

- Dewan Komisaris Indonesia Power dimana dalam pengelolaannya mengikuti pengelolaan pada instansi asal;
- Direksi Indonesia Power;
- Pegawai Indonesia Power pada jenjang jabatan Eksekutif Utama, Eksekutif Senior dan Eksekutif pada jenis jabatan struktural dan fungsional;
- Pegawai Indonesia Power yang memangku jabatan struktural pada jenjang jabatan penyelia;
- Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
- Pegawai Organik Jenjang Supervisor/Penyelia Atas, Eksekutif Senior pada Anak Perusahaan.

According to LHKPN Guidelines, the mandatory reporters include:

- Indonesia Power Board of Commissioners, whose management complies with the provision of each of the Commissioners' original institutions;
- Indonesia Power Board of Directors;
- Indonesia Power's employees at Chief Executive, Senior Executive, and Executive levels at both structural and functional positions; and
- Indonesia Power's employees at Supervisor level at structural position;
- Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries;
- Organic employees at Supervisor/Senior Supervisor, Senior Executive levels in Subsidiaries.

Pengelola LHKPN

LHKPN Admin

Sejalan dengan Pedoman LHKPN Indonesia Power, Pengelola LHKPN di Indonesia Power dijalankan oleh Head of Group yang mengenai fungsi kepatuhan GCG (Head of GCG & Corporate Information) pada Corporate Secretary.

In accordance with the LHKPN Guidelines, LHKPN Admin position at Indonesia Power is assumed by the Head of GCG & Corporate Information at the Corporate Secretariat.

Sanksi atas Kelalaian Pelaporan LHKPN

Sanctions for Failure to Submit LHKPN

Sejalan dengan Pedoman LHKPN, bagi Wajib Lapor yang tidak melaporkan LHKPN sampai dengan akhir tahun pelaporan dinyatakan tidak melakukan tanggung jawab jabatannya.

According to LHKPN Guidelines, Mandatory Reporters who fail to submit the LHKPN as of the end of the reporting year shall be deemed unable to meet their official responsibility. A mandatory

Dalam hal wajib lapor LHKPN tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi disiplin pegawai berdasarkan Peraturan Disiplin Pegawai dan Sistem Penilaian Kinerja (Unit/Organisasi) yang berlaku di lingkungan Indonesia Power.

reporter who fails to meet their obligation shall be subject to disciplinary sanction in accordance with Employee Disciplinary Regulation and Performance Assessment System (Unit/Organization) applicable in Indonesia Power.

Laporan LHKPN
LHKPN Submission

Pada tahun 2021, Admin pengelola LHKPN telah memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pegawai terkait melalui pendistribusian dokumen dan sosialisasi formal yaitu e-lhkpn *online* sebagai sarana konsultasi dalam pengisian e-lhkpn melalui *email, coffee morning* dan sosialisasi secara langsung dalam kegiatan pengisian pelaporan LHKPN selama periode pelaporan LHKPN Januari 2021.

In 2021, the LHKPN Admin has provided introduction and technical guidelines on LHKPN to relevant employees through document distribution and formal disseminations such as via online e-lhkpn platform to provide consultancy on e-lhkpn form filling via e-mail, morning coffee, and direct dissemination during LHKPN form filling period in January 2021.

Pelaporan LHKPN yang dilaksanakan Indonesia Power pada tahun 2021 untuk periode tahun 2020 seluruh Wajib Lapor sebanyak 374 orang (Pejabat Indonesia Power mulai dari Jenjang Eksekutif s.d. Eksekutif Utama) tercatat telah melaksanakan pelaporan kekayaannya dengan tingkat kepatuhan 100%.

The LHKPN submission in 2021, which was for the reporting of the wealth throughout 2020, involved 374 Mandatory Reporters (Indonesia Power's officials from Executives to Senior Executives) who have submitted their reports, with 100% compliance rate.

Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Anti-Bribery Management System Management

Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Indonesia Power merupakan upaya Perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang bersih dari praktik korupsi.

Implementing Anti-Bribery Management System (ABMS), Indonesia Power aims to deliver a clean, corruption-free governance.

Tujuan implementasi SMAP di Indonesia Power adalah meningkatkan kredibilitas dan reputasi Perusahaan di tingkat nasional, regional, maupun internasional; mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko suap; serta menciptakan kultur anti suap di sektor ketenagalistrikan.

ABMS implementation will increase the Company's credibility and reputation at national, regional, and international settings; prevent, detect, and respond to risks of bribery; and create an anti-bribery culture in the electricity power sector.

Dengan SMAP, Indonesia Power diharapkan dapat lebih fokus dalam melaksanakan perannya di industri pembangkitan energi listrik karena tidak diganggu praktik penyuapan atau kecurangan lainnya. "Hal ini sekaligus sebagai bukti bahwa Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan tindak korupsi untuk menghindarkan dan melindungi Perusahaan dari jeratan tindak pidana korporasi."

With ABMS, Indonesia Power expects to focus more on implementing its duties in power generation industry with the absence of bribery or other fraudulent practices. "This also proves that the Company has sought corruption prevention efforts to avoid and to protect the Company from corruption acts."

PROGRAM ANTI KORUPSI INDONESIA POWER
ANTI-CORRUPTION PROGRAM AT INDONESIA POWER

"Indonesia Power menjadi perusahaan pertama di bidang ketenagalistrikan yang mendapatkan Sertifikat SNI ISO 37001:2016".

"Indonesia Power is the first power company receiving SNI ISO 37001:2016 Certification."

Inisiasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Indonesia Power telah dimulai sejak tahun 2019 sesuai Arahan Direktur Utama Indonesia Power, mengacu kepada Inpres No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan PERMA No 13 Tahun 2016 tentang Pidana Korporasi. Dilanjutkan dengan proses *Set Up* dan Implementasi selama tahun 2019 - 2020 mulai dari pembentukan Tim *Set Up*, Pencanangan Komitmen Manajemen, Penyusunan Perangkat dan Kebijakan, Sosialisasi dan Internalisasi kepada Pegawai, Identifikasi Risiko Penyuapan dan Monitoring Mitigasi kemudian dilanjutkan dengan Audit Internal dan Bribery Self Assessment. Pada Bulan Maret - April Tahun 2020 dilakukan proses Sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Mutu Internasional, dimana Proses Audit dan Verifikasi Dokumen dilakukan secara Remote Audit (Virtual). Indonesia Power resmi mendapatkan sertifikasi SMAP pada tanggal 18 April 2020, sebagai perusahaan pertama di bidang ketenagalistrikan di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi SMAP SNI ISO 37001:2016.

The Anti-Bribery Management System implementation in Indonesia Power was initiated in 2019 according to the Directives to PT Indonesia Power President Director, with reference to Presidential Instruction No. 10 of 2016 on Corruption Prevention and Eradication Action of 2016 and 2017 and the Regulation of the Supreme Court No. 13 of 2016 on Corporate Crime. The initiation was followed by the set up and implementation throughout 2019-2020, from the establishment of Setup Team, Management Commitment Declaration, Tools and Policy Preparation, Socialization and Internalization to Employees, Bribery Risk Identification and Mitigation Monitoring, to Internal Audit and Bribery Self-Assessment. In March-April 2020, Mutu Sertifikasi Internasional conducted remote audit and verification on relevant documents. Indonesia Power has been officially ABMS-certified as of April 18, 2020, as the first Indonesian power company obtaining SNI ISO 37001:2016 ABMS.

Dasar Penerapan SMAP
Basis for ABMS Implementation

Implementasi dan penerapan SMAP Indonesia Power dilaksanakan berdasarkan:

1. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus. Aturan ini dikuatkan oleh Surat Edaran BUMN No.2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih melalui implementasi pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; penanganan benturan kepentingan; serta penguatan pengawasan intern;
3. Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;

The implementation of ABMS at Indonesia Power is based on:

1. Presidential Instruction No. 10 of 2016 on Prevention and Eradication of Corruption;
2. Regulation of the Supreme Court No. 13 of 2016 on Corporate and Managerial Criminal Accountability. The regulation is reinforced by SOE Circular No. 2 of 2019 on Clean SOE Management with the implementation of corruption, collusion, and nepotism prevention, conflict of interest management, and internal control strengthening;
3. Letter of SOE Minister No. S-35/MBU/01/2020 dated January 10, 2020 on Implementation of Anti-Bribery Management System at SOEs as the implementation of Presidential Regulation No. 54 of 2018 on National Strategy for Corruption Prevention;

4. Surat Kementerian BUMN Nomor S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN;
5. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.045.K/010/IP/2021 dan No.008.SK/DEKOM-IP/2021 tentang Kebijakan Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Penyuapan (SMAP) Tanggal 10 Mei 2021.

4. Letter of Ministry of SOEs No. S-17/S.MBU/02/2020 dated February 17, 2020 on ISO 37001 Anti-Bribery Management System Certification at SOEs;
5. Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners Numbers 045.K/010/IP/2021 and 008.SK/DEKOM-IP/2021 on Policy on the Implementation of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS) dated May 10, 2021.

Peningkatan Penerapan SMAP Berkelanjutan
Improvement of Sustainable ABMS Implementation

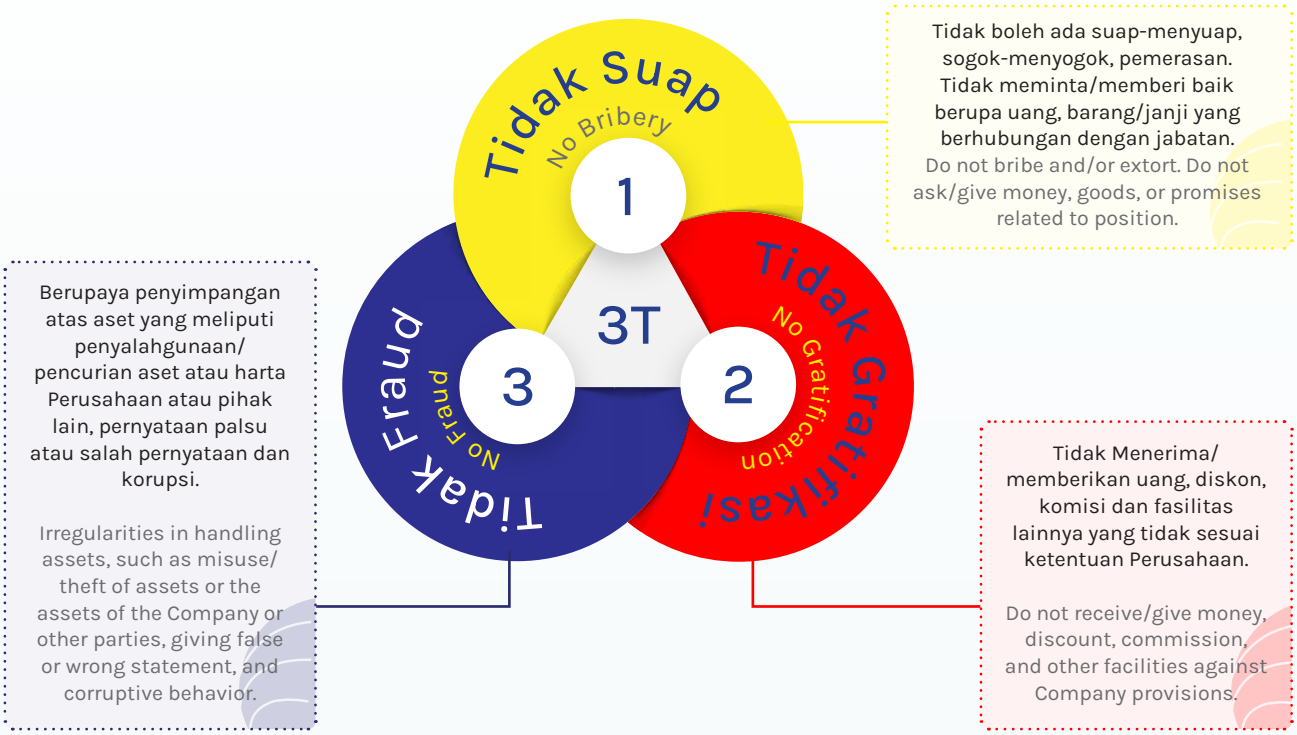
Wujud komitmen Indonesia Power dalam meningkatkan penerapan SMAP yang berkelanjutan mendapat dukungan penuh dari Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi melalui Deklarasi Komitmen Penerapan SMAP yang dilakukan pada 24 April 2019 lalu. Kemudian pada awal tahun 2020, dalam upaya mendukung implementasi SMAP, Perusahaan menyatakan *Setting Tone from the Top* yaitu Komitmen 3T (Tidak Suap, Tidak Gratifikasi, dan Tidak *Fraud*).

Komitmen 3T dilaksanakan untuk membangun integritas dalam sikap keseharian sehingga menjadi budaya yang tertanam dalam diri setiap Insan Perusahaan. Pelanggaran atas komitmen ini dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin yang berat dan akan dikenakan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Indonesia Power's commitment to sustainably improve ABMS implementation receives full support from the Board of Commissioners and the Board of Directors. Together, they produced the Declaration of Commitment to ABMS Implementation on April 24, 2019. Later at the beginning of 2020, in order to support ABMS implementation, the Company has declared to be setting the Tone from the Top, i.e. the 3T Commitment (Tidak Suap, Tidak Gratifikasi, Tidak Fraud - No Bribery, No Gratification, No Fraud).

The 3T Commitment aims to build integrity in daily conduct, so that it is embedded in every member of Company personnel. Violation against the commitment will be considered as major disciplinary violation and therefore punishable according to applicable rules.

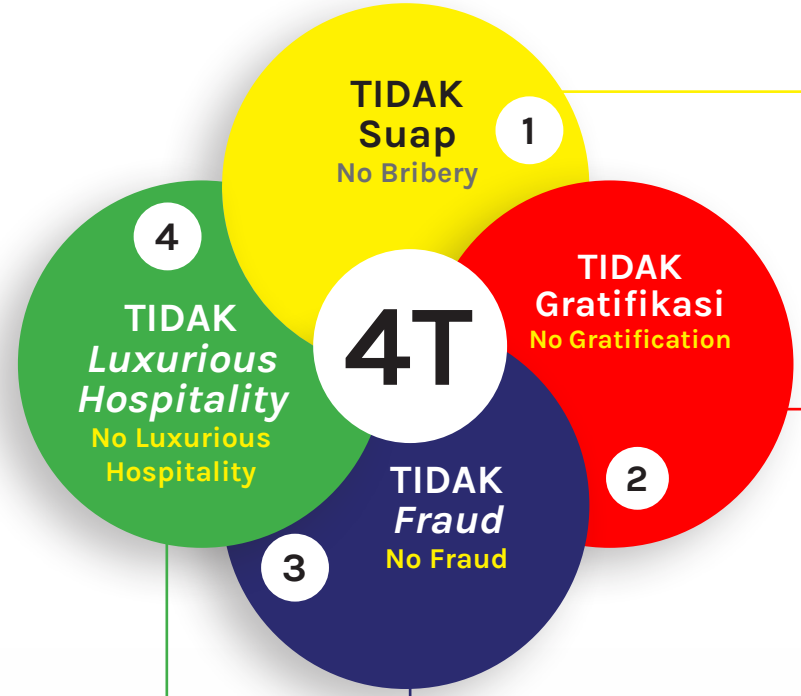
Komitmen 3T
3T Commitment



PROGRAM ANTI KORUPSI INDONESIA POWER
ANTI-CORRUPTION PROGRAM AT INDONESIA POWER

Pada tahun 2021, dalam rangka keselarasan dengan prinsip 4No's (*No Bribbery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality*) PT PLN (Persero), Komitmen 3T yang telah ditetapkan sebagai *setting Tone from the Top* oleh Dewan Komisaris dan Direksi berubah menjadi 4T. Komitmen 4T (Tidak Suap, Tidak Gratifikasi, dan Tidak *Fraud*, Tidak *Luxurious Hospitality*).

In 2021, to align with PT PLN (Persero)'s 4 No's principle (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality), the 3T Commitment of setting the Tone from the Top by the Board of Commissioners and the Board of Directors has been modified into 4T Commitment. The 4T Commitment stands for "Tidak Suap, Tidak Gratifikasi, Tidak Fraud, Tidak Luxurious Hospitality" (No Bribery, No Gratification, No Fraud, No Luxurious Hospitality).



Tidak boleh ada suap-menyuap, sogok-menyogok, pemerasan. Tidak meminta/memberi baik berupa uang, barang/janji yang berhubungan dengan jabatan.
Do not bribe and/or extort. Do not ask/give money, goods, or promises related to position.

Tidak Menerima/memberikan uang, diskon, komisi dan fasilitas lainnya yang tidak sesuai ketentuan Perusahaan.

Do not receive/give money, discount, commission, and other facilities against Company provisions.

Berupaya penyimpangan atas aset yang meliputi penyalahgunaan/ pencurian aset atau harta Perusahaan atau pihak lain, pernyataan palsu atau salah pernyataan dan korupsi.

Irregularities in handling assets, such as misuse/theft of assets or the assets of the Company or other parties, giving false or wrong statement, and corruptive behavior.

Menolak atau hindari penyambutan dan jamuan yang berlebihan

Refuse or avoid excessive reception and entertainment.

Selain itu, dalam upaya mempertahankan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016, Indonesia Power juga melakukan berbagai aktivitas diantaranya sebagai berikut:

- Penandatanganan Komitmen 3T dan prinsip 4No's pada tanggal 17 Februari 2021 pada saat Rapat Koordinasi Awal Tahun 2021 oleh Dewan Komisaris dan Seluruh Senior Leader Indonesia Power.

As an effort to maintain the SNI ISO 37001:2016 certification, Indonesia Power also performed the following activities:

- The signing of 3T Commitment and 4 No's principles on February 17, 2021 during Beginning of Year's Coordination Meeting 2021 by the Board of Commissioners and all Senior Leaders of Indonesia Power.

- Melaksanakan Audit *Surveillance* SNI ISO 37001:2016 pada tanggal 9 – 11 Juni 2021 bersama tim Auditor Internal dari PT Mutuagung Lestari dengan hasil 1 (satu) temuan *minor* dan beberapa saran perbaikan yang telah ditindaklanjuti. Pada Tahun 2021 pun, Anak Perusahaan Indonesia Power seperti PT CDB mulai menerapkan SMAP dengan mengikuti Sertifikasi dan berhasil mendapatkan Sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP dari Lembaga British Standards Institution (BSI) Group Indonesia pada tanggal 21 Desember 2021.
- Sosialisasi Penerapan SMAP kepada Mitra Kerja melalui *Vendor Gathering* baik yang dilakukan terpusat maupun oleh pengelola GCG Unit pada tanggal 23 Desember 2021.
- Sosialisasi Penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP kepada karyawan melalui *Website*, Media Sosial, Publikasi *Desktop*, Poster, Video Pendek, *Name Table, Running* LED Teks dan Neon *Box* di Kantor Pusat dan Unit.

- The implementation of Surveillance Audit on SNI ISO 37001:2016 on June 9-11, 2021 jointly with Internal Auditor from PT Mutuagung Lestari, with one (1) minor finding whose improvement recommendations have been followed up. Still in 2021, Indonesia Power's subsidiaries, such as PT Cogindo DayaBersama (CDB), started implementing the ABMS and received the SNI ISO 37001:2016 ABMS certificate from British Standards Institution (BSI) Group Indonesia on December 21, 2021.
- The socialization of ABMS implementation to Vendors during Vendor Gathering, both at the Head Office and by Unit GCG Managers on December 23, 2021.
- The socialization of SNI ISO 37001:2016 ABMS implementation to employees via website, social media, desktop publication, posters, short videos, name tables, running LED texts, and neon boxes at the Head Office and Units.



PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PRAKTIK *BAD CORPORATE GOVERNANCE*

STATEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

"Sampai dengan tahun 2021 Indonesia Power maupun jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah melakukan praktik *bad corporate governance*".

"Until 2021, neither Indonesia Power nor its Board of Commissioners and Board of Directors had ever committed any bad corporate governance practices in their activities."

Indonesia Power senantiasa berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan mematuhi seluruh regulasi terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan maupun regulasi lainnya, termasuk melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sampai dengan tahun 2021, Indonesia Power maupun jajaran Dewan Komisaris dan Direksi, dalam menjalankan aktivitasnya tidak pernah melakukan praktik *bad corporate governance,* seperti antara lain yang terkait dengan (1) Pencemaran lingkungan; (2) Pelanggaran hukum; (3) Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak; (4) Pelanggaran terhadap hak-hak karyawan; serta (5) Ketidaksesuaian pelaporan keuangan dengan peraturan yang berlaku.

Indonesia Power is always committed to implementing good corporate governance by complying with all regulations governing the Company's business activities and other regulations, including properly fulfills its obligation. By 2021, Indonesia Power, the Board of Commissioners, and the Board of Directors had never committed any bad corporate governance practices in their activities, such as practices that are related to (1) Environmental pollution, (2) Breach of law, (3) Noncompliance with tax obligation, (4) Violation of employees' rights, and (5) Noncompliance of financial reporting with the applicable regulations.

No	Keterangan Description	Praktik Practice
1	Laporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan Report on the Company activities that cause environmental pollution	Nihil N/A
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan Important events encountered by the Company, its subsidiaries, and active members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners that had not been disclosed in the Annual Report	Nihil N/A
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Noncompliance with tax obligation	Nihil N/A
4	Kasus terkait hubungan industrial Industrial relations cases	Nihil N/A
5	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK Noncompliance of presentation of annual report and financial statements with applicable regulations and financial accounting standards	Nihil N/A

Mengingat Indonesia Power telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha atau bisnis Perusahaan sesuai dengan regulasi dan praktik terbaik yang ada, dengan demikian, sampai dengan saat laporan tahunan ini dibuat, Indonesia Power tidak menerima sanksi apa pun dari regulator, baik sanksi yang bersifat material maupun administratif.

In consideration of the fact that Indonesia Power had carried out all business activities or Company business in compliance with applicable regulations and the best practices, Indonesia Power, by the time this annual report was prepared, had never been given any material or administrative sanction.




care
INDONESIA POWER



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

KOMITMEN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INDONESIA POWER

COMMITMENT TO IMPLEMENTING SOCIAL RESPONSIBILITY AT INDONESIA POWER

Kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan kepedulian sosial menuntut setiap kegiatan bisnis yang dijalankan tidak hanya memenuhi aspek ekonomi bagi pelaku usaha namun juga harus dapat mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) melalui pemenuhan kinerja lingkungan (*environmental performance*) dan investasi sosial (*social investment)* dengan tata kelola yang baik (*good governance*). Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia Power terus berupaya membangun kegiatan usaha pembangkit yang ramah lingkungan dan mampu memberikan manfaat sosial yang luas untuk mencapai kesejahteraan bersama bagi Perusahaan dan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

The awareness of the importance of sustainability and social responsibility demands any business activity not only to fulfill the economic aspects for businesspeople, but also to promote sustainable development through environmental performance and social investment under good governance. Therefore, Indonesia Power strives to develop green power generation business and socially beneficial in a wider scope to deliver mutual prosperity for the Company and stakeholders in a sustainable manner.

Indonesia Power berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* melalui komitmen atas tanggung jawab sosial Perusahaan. sebagai bagian dari upaya mendorong efektifitas pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan, dilakukan uji tuntas (*due diligence*) sebagai tahapan perumusan program tanggung jawab sosial Perusahaan. Selain itu, Indonesia Power telah menetapkan Bidang Komunikasi Korporat yang membawahi Manajer *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Unit yang bertugas mengelola pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Indonesia Power seeks to present added value for the stakeholders by committing to CSR. To pursue an effective CSR, the company performs due diligence to formulate such an initiative. For this purpose, Indonesia Power has established Corporate Communication Division which oversees the CSR Manager. It functions as the Unit responsible for managing the Company's CSR implementation.

Landasan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power

Foundation for the Implementation of Social Responsibility at Indonesia Power

Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan merupakan bagian dari upaya Indonesia Power dalam memenuhi kepatuhan dan kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan serta mengelola risiko dari aktivitas operasional Perusahaan. Landasan hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial Indonesia Power mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Landasan hukum tersebut menjadi dasar penyususnan kebijakan serta pedoman internal pelaksanaan pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk mendorong perilaku bertanggung jawab setiap Insan Indonesia Power pada seluruh level organisasi.

CSR is a means of Indonesia Power to comply with and care for sustainable development, as well as to manage risk of the corporate operational activities. The legal basis for CSR at Indonesia Power refers to the applicable regulations, namely Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility. These regulations serve as the foundation to formulate the policy and internal guidelines for the implementation of CSR in order to promote the accountability of every Indonesia Power Personnel at all organizational levels.

Selain itu, Indonesia Power menetapkan pedoman internal berlandaskan ISO 26000 melalui Keputusan Direksi Nomor 25.K/010/IP/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Keputusan Direksi Nomor 26.K/010/IP/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan InPower Care di Lingkungan PT Indonesia Power, Keputusan Direksi Nomor 249.K/010/IP/2015 tentang Pedoman *Green Power Plant*, Keputusan Direksi Nomor 211.K/010/IP/2016 tentang Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian Lingkungan dalam Menjaga Keberlanjutan Planet, Keputusan Direksi Nomor 180.K/010/IP/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Komitmen *Community Development* melalui Program Inspirasi Perempuan dan Keputusan Direksi Nomor 56.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Program Unggulan *Community Development* sebagai wujud kesungguhan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Indonesia Power has set out its internal guideline based on ISO 26000 under the Board of Directors Decree No. 25.K/010/IP/2014 dated February 11, 2014 on Corporate Social and Environmental Responsibility, Board of Directors Decree No. 26.K/010/IP/2014 dated February 11, 2014 on the Guidelines for Implementation of InPower Care in PT Indonesia Power, Board of Directors Decree No. 249.K/010/IP/2015 on Guidelines for Green Power Plant, Board of Directors Decree No. 211.K/010/IP/2016 on the Commitment to Preserving Ecosystem and Environment to Maintain the Planet's Sustainability, Board of Directors Decree No. 180.K/010/IP/2018 dated November 22, 2018 on the Community Development Commitment through Women's Inspiration Program and Board of Directors Decree No. 56.K/010/IP/2019 on the Management of Community Development's Excellent Programs as the implementation of CSR.

Prinsip Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power

Principles of Social Responsibility at Indonesia Power

Pendekatan dalam merumuskan lingkup tanggung jawab sosial Indonesia Power didasarkan pada prinsip keseimbangan kehidupan sosial (*people*); kelestarian lingkungan (*planet*); kemakmuran atau kemandirian ekonomi (*prosperity*); kedamaian atau kerukunan (*peace*) dan kemitraan (*partnership*). Uraian prinsip tanggung jawab sosial Indonesia Power adalah sebagai berikut :

In articulating the scope of CSR, Indonesia Power relies on several principles, namely people, planet, prosperity, peace or harmony and partnership. The details of each is outlined as follows:

KOMITMEN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INDONESIA POWER
COMMITMENT TO IMPLEMENTING SOCIAL RESPONSIBILITY AT INDONESIA POWER

People

Komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan pada masyarakat sekitar pembangkit atau unit Kerja melalui program IPPintar, SehatIP, Hijaunesia Power, IPreneur, Inspirasi Perempuan, dan AdIPertiwi.
A commitment to local community around the power plants and or work units through various programs, namely IPPintar, SehatIP, Hijaunesiapower, IPreneur, Women's Inspiration, and AdIPertiwi.

Planet

Komitmen menjaga ekosistem lingkungan melalui program pemenuhan ketaatan aturan lingkungan (PROPER), GO90, Hijaunesia Power dan Kawan Hijaunesia Power.
A commitment to preserving environmental ecosystem through the compliance with the environmental regulations (PROPER), GO90, Hijaunesia Power, and Kawan Hijaunesia Power.

Prosperity

Komitmen untuk menciptakan kemakmuran atau kemandirian ekonomi masyarakat sekitar pembangkit atau unit kerja melalui kegiatan *community empowerment* dengan program IPreneur dan Inspirasi Perempuan.
A commitment to creating prosperity or economic well-being of the local community surrounding the power plants or work units through community empowerment programs, namely IPreneur and Women's Inspiration.

Peace

Komitmen untuk menciptakan kedamaian atau kerukunan dengan masyarakat sekitar pembangkit atau unit kerja melalui kegiatan *community relation* (komunikasi sosial, forum warga, partisipasi hari besar keagamaan dan nasional, dan partisipasi kegiatan masyarakat).
A commitment to keeping the peace or harmony among the local community neighboring the power plants or work units through community relation activities (social communication, community forum, participation in religious festive days and national days, and contribution to the community activities).

Partnership

Komitmen untuk menjalankan program CSR yang berbasis kemitraan antara perusahaan, pemerintah, swasta dan masyarakat.
A commitment to executing partnership-based CSR programs between the Company, government, private sectors, and community.

Visi dan Misi serta Tujuan Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power

Vision, Missions and Objectives of Social Responsibility at Indonesia Power

Visi Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power

Vision of Social Responsibility at Indonesia Power

"Bersahabat dengan lingkungan dan menjadikan tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai bagian dari tata kelola Perusahaan yang baik".

"To be environmentally-friendly and view corporate social responsibility as a part of good corporate governance."

Misi Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power

Missions of Social Responsibility at Indonesia Power

1. Meningkatkan reputasi Perusahan di kalangan pemangku kepentingan.
2. Membangun sinergi Perusahaan dengan pemangku kepentingan untuk keberlanjutan operasional Perusahaan.
3. Berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tingkat menengah.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui potensi yang dimiliki sesuai kemampuan Perusahaan
5. Berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1. To improve the Company reputation before the stakeholders.
2. To create synergy between the Company and the stakeholders, thus maintaining corporate sustainability.
3. To contribute to the quality improvement of education.
4. To improve the life quality of community through their existing potential in accordance with the Company's ability.
5. To contribute to the achievement of sustainable development goals.

Tujuan Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power

Goals of Social Responsibility at Indonesia Power

"Mewujudkan visi dan misi Perusahaan, dan secara khusus agar dapat bersahabat dengan lingkungan serta mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik"

"To embody the corporate vision and missions, in particular to be environmentally-friendly and actualize good corporate governance."

KOMITMEN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INDONESIA POWER
COMMITMENT TO IMPLEMENTING SOCIAL RESPONSIBILITY AT INDONESIA POWER

Roadmap Tanggung Jawab Sosial Indonesia Power

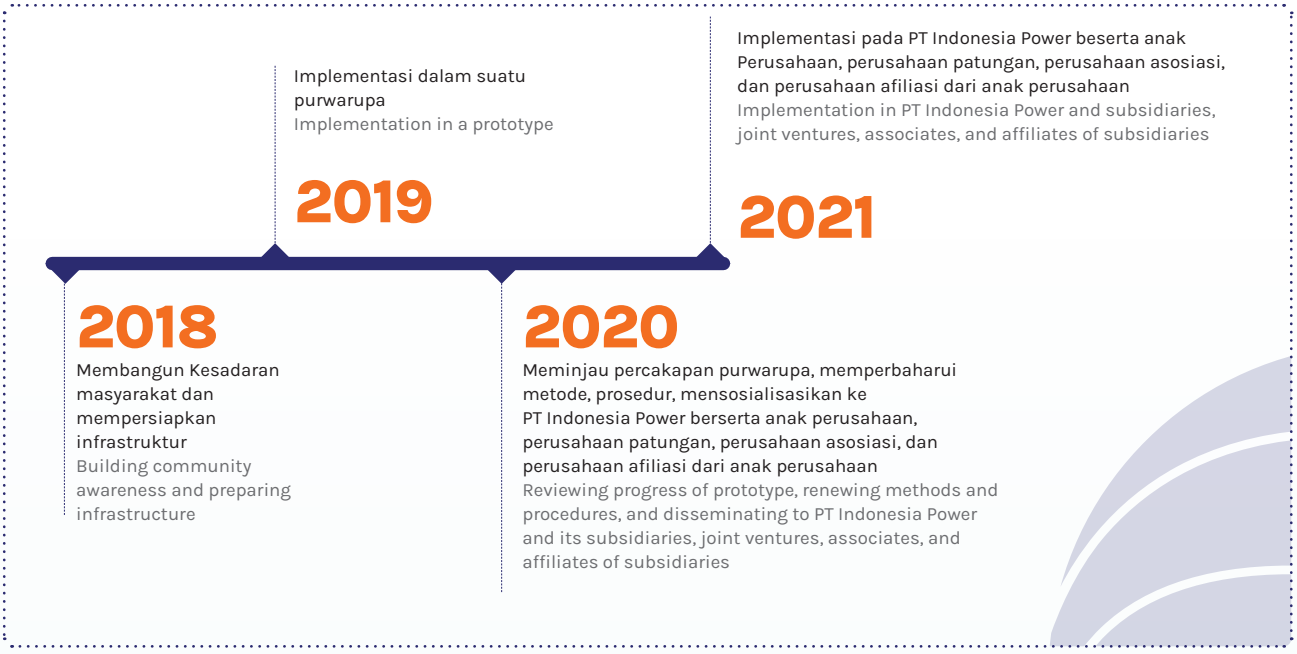
Roadmap of Social Responsibility at Indonesia Power

Sebagai bagian dari perumusan lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan, Indonesia Power merumuskan *Grand Strategy* dan *milestone* implementasi tanggung jawab sosial Perusahaan sampai dengan tahun 2021 guna mengintegrasikan strategi tanggung jawab sosial Perusahaan Grup Indonesia Power pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan yang dituangkan dalam *Sustainability Roadmap* Indonesia Power beserta anak perusahaan, perusahaan patungan, perusahaan asosiasi dan perusahaan afiliasi dari anak perusahaan. Perumusan strategi tersebut telah melalui tahapan kajian atas seluruh regulasi terkait isu-isu tanggung jawab sosial diantaranya mencakup lingkungan hidup, ketenagakerjaan, konsumen serta sosial kemasyarakatan.

In the course of formulating the scope of CSR, Indonesia Power composed Grand Strategy and the milestone of CSR implementation up to 2021. This measure was taken to integrate CSR implementation of Indonesia Power Group as outlined in the Sustainability Roadmap of Indonesia Power and its subsidiaries, joint ventures, associate companies and affiliated companies of the subsidiaries. Such a formulation has been reviewed against all regulations on relevant issues, among others environment, employment, consumer and social aspects.

Sustainability Roadmap Indonesia Power beserta anak perusahaan, perusahaan patungan, perusahaan asosiasi, dan perusahaan afiliasi dari anak perusahaan

Sustainability Roadmap of Indonesia Power and subsidiaries, joint ventures, associate companies and affiliates of the subsidiaries



Dukungan Indonesia Power dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Indonesia Power's Support to Sustainable Development Goals (SDGs)

Indonesia Power berkomitmen serta mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong dunia bisnis untuk ikut serta dalam pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs). Hal tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi dari fungsi "agen pembangunan" yang melekat pada Indonesia Power sebagai entitas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Indonesia Power mendorong pegawai, pemasok dan mitra strategis lain untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi pada SDGs sesuai dengan kemampuan dan relevansinya. Selain itu, Indonesia Power juga bermitra dengan Pemerintah setempat untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menolong diri sendiri dan mampu berswadaya.

Indonesia Power commits to supporting Indonesian Government in promoting business in order to aim for Sustainable Development Goals (SDGs). It is one of the actualizations of the "development agent" function carried by the Company as an entity of State-owned Enterprise (BUMN). Indonesia Power encourages its employees, suppliers and other strategic partners to take business responsibly and contribute to SDGs according to their skill and relevance. Additionally, not only partnering with local governments to contribute to sustainable development, Indonesia Power also increases public awareness of self-sufficiency and self-subsistence.

Fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Focus on Development Goals Sustainable



Kebijakan Indonesia Power sejalan dengan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang diimplementasikan melalui program-program tanggung jawab sosial Perusahaan mencakup kegiatan operasional yang pro lingkungan (*Green Power Plant* & Hijaunesia Power) dan pro masyarakat (*In-Power Care*). *Green Power Plant* dilakukan melalui pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, efisiensi energi, efisiensi air dan pengelolaan limbah yang tepat, sedangkan untuk kegiatan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dijalankan melalui program Hijaunesia Power. Indonesia Power menyusun

Indonesia Power's policies align with the commitment to sustainable development, as implemented through CSR programs in environment (Green Power Plant & Hijaunesia Power) and social (In-Power Care). Green Power Plant program was organized through development and utilization of renewable energy, energy efficiency, water efficiency and appropriate waste management. Whereas, Hijaunesia Power program focused on environmental sustainability and biodiversity activities. Indonesia Power also prepares Sustainability Report containing details about the CSR implementation to support SDGs. The

KOMITMEN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL INDONESIA POWER
COMMITMENT TO IMPLEMENTING SOCIAL RESPONSIBILITY AT INDONESIA POWER

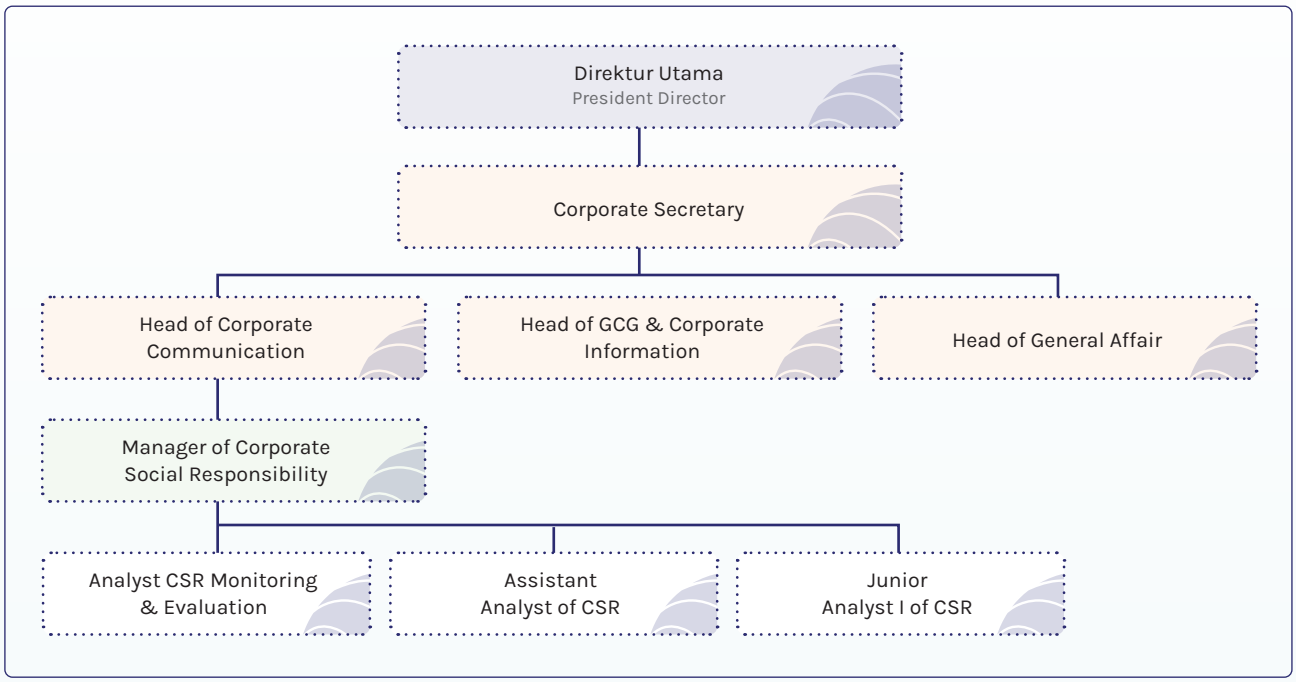
Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) yang memuat Informasi terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial Indonesia Power dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutam. Penyusunan Laporan Keberlanjutan Perusahaan mengacu kepada Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting Guidelines*) yang disusun oleh *Global Reporting Initiative* (GRI) *Standards* dengan tingkat kesesuaian "*Comprehensive*" termasuk G4 *Financial Services Sector Disclosures.* Laporan Keberlanjutan disusun secara berkala sebagai wujud konsistensi komitmen keberlanjutan Indonesia Power yang ditunjukan melalui pengungkapan kinerja tanggung jawab perusahaan atas apek lingkungan, sosial dan ekonomi.

preparation of the report refers to the Sustainability Reporting Guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI) Standards with the conformance level "Comprehensive" which includes G4 Financial Services Sector Disclosures. Compiled regularly, the sustainability report demonstrates the Company's commitment to sustainability as expressed through the disclosure of corporate responsibility performance towards environmental, social and economy aspects.

Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Administrator

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan Indonesia Power dikelola oleh Kantor Pusat dan Unit Pembangkitan. Di Kantor Pusat, program tanggung jawab sosial Perusahaan dikelola oleh Bidang Corporate Communication yang berada dibawah Corporate Secretary, sedangkan di Unit Pembangkitan dikelola oleh Bidang Humas & CSR. Bidang Corporate Communication bertanggung jawab antara lain melakukan kajian-kajian terhadap program tanggung jawab sosial Perusahaan di seluruh Unit Pembangkit meliputi kajian pemetaan sosial dan pemangku kepentingan, *Social License to Operate* (SLO), *monitoring* & evaluasi serta pengukuran dampak program.

Indonesia Power's CSR programs are managed by the Head Office (represented by Corporate Communication Division under the Corporate Secretary) and Power Generation Units (represented by Public Relation & CSR divisions). Corporate Communication Division holds the responsibility of reviewing CSR programs in all Power Generation Units, including review of social and stakeholder mapping, Social License to Operate (SLO) and monitoring, evaluation and measurement of program impact.



Selain itu, agar implementasi CSR sejalan dengan pedoman internasional, Perusahaan telah membentuk Komite CSR yang bertindak sebagai koordinator setiap subyek inti dalam ISO 26000 yang meliputi tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, Lingkungan, praktek operasi yang adil, isu-isu konsumen serta pelibatan dan pengembangan komunitas. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan Indonesia Power melibatkan setiap level organisasi di lingkungan Perusahaan dan dilakukan secara terintegrasi. Direksi sebagai manajemen puncak memastikan kecukupan atas kebijakan, pelaksanaan dan pelaporan program kerja tanggung jawab sosial Perusahaan, mendorong kepedulian seluruh manajemen terhadap pemenuhan tanggung jawab sosial Perusahaan serta melakukan review atas kinerja program tanggung jawab sosial Perusahaan. Unit-unit terkait dalam Perusahaan juga turut serta dalam mengkaji dan meningkatkan keredibilitas inisiatif dan laporan tanggung jawab sosial Perusahaan yang mencakup bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, konsumen serta sosial kemasyarakatan.

To align with the CSR with international guidelines, the Company has established CSR Committee as the coordinator of each core subject in ISO 26000 that includes organization governance, human rights, employment, environment, fair operations, consumer issues and community engagement and development. The CSR is carried out in an integrated manner by involving each and every level of organization within the Company. As the top management, the Board of Directors ensures the adequacy of policy, implementation, and preparation of activity report of CSR work program, promoting the awareness of the entire management over the fulfillment of CSR, and conducting performance review on the CSR programs. Relevant units in the Company also participate in reviewing and improving the credibility of CSR initiatives and reports that include environment, employment, consumers and social aspects.



PERUMUSAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL INDONESIA POWER

FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS AT INDONESIA POWER

Perumusan program tangung jawab sosial Perusahaan mengacu dan sejalan dengan komitmen dan kebijakan dan lingkup tangung jawab sosial Perusahaan. Selain itu, perumusan program tanggung jawab sosial Perusahaan harus mampu mendukung pemenuhan prinsip serta pencapaian visi, misi, tujuan serta *Roadmap* tangung jawab sosial Indonesia Power pada Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu upaya Indonesia Power dalam mengelola risiko dari kegiatan operasional yang dijalankan Perusahaan. Indonesia Power melakukan uji tuntas (*due diligent*) sebagai bagian dari tahapan perumusan tanggung jawab sosial Indonesia Power dengan melakukan *update*, identifikasi dan *review* terhadap seluruh kebijakan; analisis isu penting, dampak dan risiko dari kegiatan Perusahaan; ekspektasi *stakeholders* Perusahaan yang secara rutin dilaksanakan secara berkala. Indonesia Power juga mempersiapkan mekanisme penanganan keluhan dalam mendukung peningkatan efektifitas pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan.

The formulation of CSR programs refers to and aligns with the Indonesia Power's CSR commitment, policy and scope. Also, it must comply with the principles and support the corporate vision, missions, objectives and Roadmap of CSR. As a matter of fact, CSR activities are a means of the Company to manage business risks. To formulate CSR plan, Indonesia Power conducts due diligence by regularly updating, identifying and reviewing all policies, analyzing key issues, impacts, and risks from the Company operation, and examining the expectation of the stakeholders. Indonesia Power has also prepared complaint handling mechanism to improve the effectiveness of CSR implementation.

Metode dan Lingkup Uji Tuntas Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Aktifitas Perusahaan

Method and Scope of Due Diligence on Social, Economic and Environmental Impacts of the Company's Activities

Langkah yang paling mendasar yang perlu dilakukan untuk mendorong efektifitas pelaksanaan tanggung jawab sosial Indonesia Power adalah dengan melakukan uji tuntas (*due diligent*) tanggung jawab sosial perusahaan atas dampak risiko yang timbul dari aktivitas Perusahaan serta mempersiapkan mekanisme penanganan keluhan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan berjalan efektif. Metode dan lingkup uji tuntas terhadap dampak dari aktivitas operasional Perusahaan antara lain:

1. Menetapkan dan meninjau secara berkala kebijakan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dampak dari kegiatan operasional yang dijalankan Perusahaan.
2. Melakukan kajian Pemetaan Sosial dan Pemangku Kepentingan (*Social and Stakeholder Mapping*) untuk mengidentifikasi siapa saja *stakeholder* yang terdampak ataupun memberi dampak bagi operasi Perusahaan dari segi sosial, ekonomi dan Lingkungan; mengetahui hubungan/derajat hubungan antar *stakeholder*; mengetahui potensi serta masalah yang ada sehingga program yang akan dilaksanakan tepat sasaran sesuai ekspektasi para *stakeholder* dan menyusun rencana program CSR.

The most underlying measures for effective CSR implementation comprise due diligence on the impact of risks arising from the Company operation and preparation of handling complaint mechanism. They are carried out with the following methods and scopes:

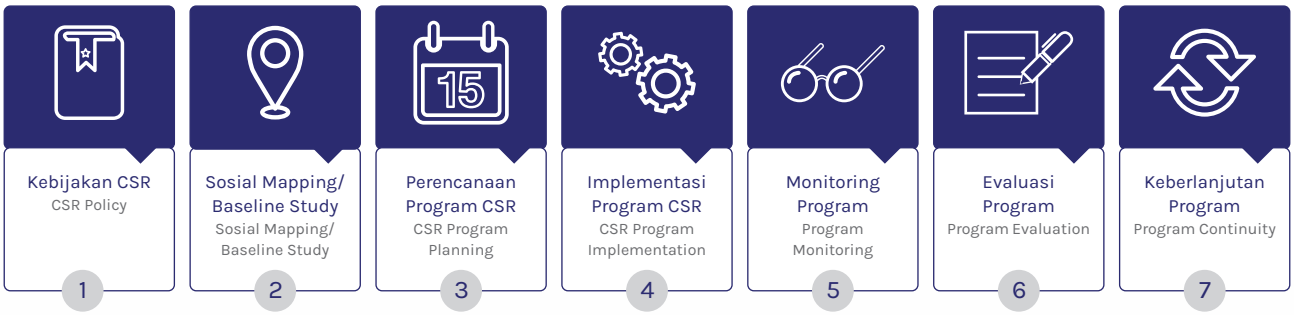
1. Establishing and regularly reviewing CSR policy in relation to such impact.
2. Reviewing the Social and Stakeholder Mapping to identify stakeholders affected by and affecting Company operations from social, economy and environmental aspects, recognizing the correlation/relationship degree between stakeholders, acknowledging existing potentials and issues so that the programs to be implemented are executed accurately according to stakeholder expectation, and planning CSR programs.

3. Mengintegrasikan pengelolaan dampak tersebut ke dalam budaya Perusahaan dan sistem manajemen dengan melibatkan dan membangun kesadaran kepada masing-masing individu pada setiap level jabatan yang ada di Perusahaan mulai dari Direksi sebagai manajemen puncak serta Dewan Komisaris sebagai pelaksana fungsi pengawasan akan pentingnya pengelolaan dampak risiko dari aktivitas Perusahaan.
4. Menetapkan indikator kinerja, melaporkan kinerja pelaksanaan, serta mengevaluasi indikator dan capaian kinerja tanggung jawab sosial Perusahaan.

Uji tuntas terhadap dampak dari aktivitas operasional Perusahaan terhadap *stakeholder* dan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan beberapa tahapan untuk merumuskan program dan memastikan efektifitas penerapannya tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai berikut :

3. Integrating impact management with Corporate Culture and management system by taking into account and building awareness of all personnel in every position level within the Company; from the Board of Directors at the top of the management to the Board of Commissioners as the supervisor.
4. Setting out performance indicators, reporting implementation performance and evaluating CSR indicators and performance achievement.

To identify the impact of the Company's business upon stakeholders and sustainable development, the due diligence is performed in the following stages for effective program formulation and CSR implementation:



Prioritas pelaksanaan tanggung jawab sosial Indonesia Power disesuaikan dengan jangkauan dan kondisi masing-masing wilayah serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait diantaranya pemerintah setempat dan para pihak yang terlibat langsung untuk memastikan lingkup tanggung jawab sosial baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban Perusahaan. Wilayah yang terdampak dengan kegiatan operasional Perusahaan diidentifikasi melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil dari analisis tersebut, Perusahaan melakukan pemetaan sosial (*social mapping*).

The CSR implementation priority is adapted to the extent and condition of each area and coordinated with relevant parties, among others local government and parties with direct involvement with the CSR program, to ensure the proper scope of the CSR, both within and beyond the Company's responsibility. The affected area is identified through Environmental Impact Assessment (EIA). The result then enables the Company to carry out social mapping.

Pada tahun 2021, mempertimbangkan kondisi yang masih dalam masa Pandemi, Indonesia Power melakukan pemetaan sosial pada 13 desa di 4 wilayah unit kerja, yaitu Grati POMU, Bali PGU – PLTG Pemaron, Bali PGU – PLTG Gilimanuk dan PLTU Banten 2 Labuan OMU. Sampai dengan tahun 2021, unit kerja dan wilayah yang telah melakukan pemetaan sosial adalah sebagai berikut:

In 2021, by taking into account the pandemic situation, Indonesia Power conducted social mapping in 13 villages in 4 working unit areas, namely Grati POMU, Bali PGU – GTPP Pemharon, Bali PGU – GTPP Gilimanuk and SPP Banten 2 Labuan OMU. The following table lists the work units and areas completing the social mapping up to 2021:

PERUMUSAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL INDONESIA POWER
FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS AT INDONESIA POWER

No.	Unit Kerja Work Unit	Tahun Pelaksanaan Year of Implementation	Jumlah Kelurahan/Desa Number of Villages	Nama Desa/Kelurahan Village's Name
1	Suralaya PGU	2019	4 Kelurahan 4 Urban Villages	Suralaya, Lebak Gede, Taman Sari, Salira
2	PLTU Banten 1 Suralaya OMU SPP Banten 1 Suralaya OMU	2020	3 Kelurahan 3 Urban Villages	Suralaya, Lebak Gede, Salira
3	Priok POMU	2017	3 Kelurahan 3 Urban Villages	Tanjung Priok, Sunter Agung, Karet Tengsin
4	Saguling POMU	2018	10 Desa 10 Villages	Cikande, Rajamandala Kulon, Saguling, Jati, Cipangeran, Girimukti, Bojong Haleuang, Cihampelas, Mekar Jaya, Tanjung Jaya
5	Mrica PGU	2018	8 Desa 8 Villages	Binorong, Blambangan, Bawang, Tapen, Wanadadi, Karang Kemiri, Bandingan, Lengkong.
6	Semarang PGU	2018	4 kelurahan 4 Villages	Tanjung Mas, Kemijen, Tugurejo, Gunung Pati
7	Grati POMU	2021	5 Desa 5 Villages	Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Tambak Lekok, Ranuklindungan
8	Bali PGU – PLTG Pemaron Bali PGU – GTPP Pemaron	2021	2 Desa 2 Villages	Pemaron, Tukad Mungga
9	Bali PGU – PLTG Gilimanuk Bali PGU – GTPP Gilimanuk	2021	1 Desa 1 Village	Gilimanuk
10	Bali PGU – PLTD Pesanggaran Bali PGU – GTPP Pesanggaran	2018	1 Kelurahan, 3 Desa 1 Urban Village, 3 Villages	Pedungan, Gunaksa, Saba, Taro
11	MSU	2019	1 Kelurahan 1 Village	Kota Bambu Selatan
12	*Head office*	2014	3 Kelurahan 3 Urban Villages	Tegal Parang, Kuningan Timur, Setiabudi
13	Kamojang POMU - PLTP Gunung Salak GPP Gunung Salak Kamojang POMU	2018	10 Desa 10 Villages	Purwabakti, Cibunian, Ciasmara Kabandungan, Cipeuteuy Cihamerang, Pulosari, Palasari Girang, Kalapanunggal, Sundawenang
14	Kamojang POMU - PLTP Darajat GPP Darajat Kamojang POMU	2018	6 Desa 6 Villages	Karyamekar, Padaawas, Ibun, Sukakarya, Mekarwangi, Laksana
15	PLTGU Cilegon OMU CCPP Cilegon OMU	2018	3 Desa 3 Villages	Margasari, Argawana, Banyuwangi
16	PLTU Jeranjang OMU SPP Jeranjang OMU	2019	1 Desa 1 Village	Taman Ayu
17	PLTU Barru OMU SPP Barru OMU	2016	1 Desa 1 Village	Lampoko
18	Holtekamp POMU	2016	2 Kelurahan 2 Urban Villages	Koya Barat, Koya Timur
19	PLTU Pangkalan Susu OMU SPP Pangkalan Susu OMU	2020	4 Desa 4 Villages	Pulau Sembilan, Tanjung Pasir, Pintu Air, Sei Siur
20	PLTU Adipala OMU SPP Adipala OMU	2019	4 Desa 4 Villages	Bunton, Wlahar, Penggalang, Adipala
21	PLTU Pelabuhan Ratu OMU SPP Pelabuhan Ratu OMU	2019	4 Desa 4 Villages	Cidadap, Loji, Jayanti, Citarik
22	PLTU Banten 2 Labuan OMU SPP Banten 2 Labuan OMU	2021	5 Desa 5 Villages	Cigondang, Sukamaju, Margagiri, Margawana, Teluk

No.	Unit Kerja Work Unit	Tahun Pelaksanaan Year of Implementation	Jumlah Kelurahan/Desa Number of Villages	Nama Desa/Kelurahan Village's Name
23	PLTD Karimunjawa DPP Karimunjawa	2016	4 Desa 4 Villages	Parang, Kemojan, Nyamuk, Karimunjawa
24	PLTP Ulumbu GPP Ulumbu	2016	1 Desa 1 Village	Manggarai
25	PLTU Sanggau OMU SPP Sanggau OMU	2016	1 Desa 1 Village	Sei Batu
26	PLTU Banten 3 Lontar OMU SPP Banten 3 Lontar OMU	2018	2 Desa 2 Villages	Lontar, Karanganyar
27	PLTU Sintang OMU SPP Sintang OMU	2018	3 Desa 3 Villages	Sungai Ringin, Anggah Jaya, Kedabah
28	PLTM Harjosari MHPP Harjosari	2018	3 Desa 3 Villages	Bojongkoneng, Notogiwang, Werdi
29	PLTM Lambur MHPP Lambur	2018	2 Desa 2 Villages	Kandang Serang, Lambur
30	PLTD Senayan DPP Senayan	2019	1 Kelurahan 1 Urban Villages	Grogol Utara

Isu-isu Penting dan Risiko Sosial Ekonomi dan Lingkungan terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Key Social, Economic and Environmental Issues and Risks Related to the Impacts of the Company's Operations

Indonesia Power telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemetaan sosial dan analisis SWOT untuk merumuskan isu-isu penting anggung jawab sosial Perusahaan dan risiko yang mungkin terjadi dari kegagalan penerapan tanggung jawab sosial Perusahaan. Isu-isu dan risiko tersebut diantaranya terkait dengan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang diperoleh dari pemetaan sosial dan survei persepsi *stakeholder* sebagai berikut :

Indonesia Power has made an Analysis of Environmental Impact Assessment (EIA), social mapping and SWOT analysis to identify key issues concerning CSR and potential risks from the failure of CSR implementation. They are among other things related to the social, economy and environmental aspects sourced from the social mapping and stakeholder perception survey, as elaborated below:

Aspek Aspect	Isu-isu Penting dan Risiko Sosial Ekonomi dan Lingkungan	Key Social, Economic and Environmental Issues and Risks
Hak Azasi Manusia Human rights	1. Kompensasi jam lembur 2. Kebebasan berpendapat 3. Lapangan Pekerjaan 4. Kelestarian Lingkungan	1. Overtime compensation 2. Freedom of speech 3. Job opportunities 4. Environmental sustainability
Operasi yang Adil Fair operations	1. Hak Kekayaan Intelektual 2. Tindakan Korupsi 3. Pelanggaran Hukum dan Regulasi 4. Pendayagunaan produk dalam negeri dan pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan proses pengadaan. 5. Persaingan usaha 6. Keterlibatan politik	1. Intellectual property rights 2. Corruption 3. Violation of laws and regulations 4. Domestic product utilization and compliance with health and safety standards related to procurement. 5. Business competition 6. Political involvement

PERUMUSAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL INDONESIA POWER
FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS AT INDONESIA POWER

Aspek Aspect	Isu-isu Penting dan Risiko Sosial Ekonomi dan Lingkungan	Key Social, Economic and Environmental Issues and Risks
Lingkungan Hidup Environment	1. Pencemaran Udara; 2. Pencemaran Air; 3. Pencemaran Limbah B3.	1. Air pollution 2. Water pollution 3. Hazardous and toxic waste pollution
Ketenagakerjaan dan K3 Employment and occupational health and safety	1. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku; 2. Kesejahteraan Tenaga Kerja; 3. Keselamatan Kerja.	1. Compliance with the applicable regulations of law 2. Manpower welfare 3. Occupational safety
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social and community development	1. Tenaga Kerja; 2. Bantuan CSR; 3. Masalah Lingkungan; 4. Masalah Kesehatan; 5. Bantuan Pendidikan.	1. Manpower 2. CSR aids 3. Environmental issues 4. Health issues 5. Educational aids
Konsumen Customers	1. Pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melakukan pembaruan teknologi dan inovasi pembangkit yang lebih ramah terhadap lingkungan; 2. Peningkatan sosialisasi layanan dan produk; 3. Peningkatan kualitas produk dan layanannya; 4. Kemudahan dalam memperoleh bantuan dan layanan.	1. Services that satisfy the needs of communities through technology updates and innovation in greener power plants 2. Improvement of services and products socialization 3. Improvement of services and products quality 4. Facilitation of assistance and services

Stakeholder Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan

Key Stakeholders Affected by or Affecting the Company's Activities

Indonesia Power mengidentifikasi *stakeholders* penting yang terdampak atau berpengaruh pada Kegiatan Perusahaan salah satunya melalui mekanisme pemetaan sosial (*social mapping*) yang dilakukan sebagai tahapan dari proses uji tuntas tanggung jawab sosial Perusahaan. Selain itu, Perusahaan secara berkala melakukan survei persepsi dari masing-masing *stakeholder* dalam mengenal dan merumuskan ekspektasi *stakeholders* tentang peran sosial Indonesia Power. *Stakeholders* penting yang terdampak atau berpengaruh pada Kegiatan Perusahaan antara lain :

Indonesia Power identifies key stakeholders affected by or affecting the Company's activities, among others through the social mapping. The Company also periodically conducts a perception survey aimed at each stakeholder in getting to know and understand the expectations of the stakeholders about the social role of Indonesia Power. These stakeholders consist of:

Stakeholders			
1.	*Shareholder*/PLN	6.	Mitra Binaan Unit Unit's Foster Partners
2.	Pemerintah (Kementerian) Government (Ministries)	7.	*Vendor Unit*
3.	Pemda/Dinas Local Government/Offices	8.	Tokoh Masyarakat (Mewakili masyarakat) Public Figures (Community representatives)
4.	Asosiasi/LSM Associations/NGOs	9.	Institusi Keamanan Security Institutions
5.	Media Lokal Local Media	10.	Pegawai Indonesia Power Indonesia Power Employees

PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM PLANNING

Tanggung jawab sosial Perusahaan ditetapkan sesuai perumusan tanggung jawab sosial Perusahaan berdasarkan hasil *social mapping*. Indonesia Power kemudian menentukan prioritas program tangung jawab sosial Perusahaan bedasarkan cakupan wilayah yang terkena dampak dan memberikan dampak terkait operasional Perusahaan secara langsung baik dari aspek lingkungan hidup; ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja; produk dan layanan; pengembangan masyarakat; dan rantai pasok termasuk didalam terkait hak asasi manusia.

At Indonesia Power, CSR is established according to its formulation based on social mapping. Subsequently, the priority is arranged based on the scope of the areas directly affected by and affecting the Company's operating activities from the aspects of environment, employment, occupational health and safety, products and services, community development, supply chain and human rights.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Baik yang Merupakan Kewajiban maupun yang Melebihi Kewajiban

Scope of Corporate Social Responsibility within and beyond the Company's Responsibility

Perencana tanggung jawab sosial Perusahaan secara umum meliputi lingkup kegiatan Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat; Pemenuhan Ketaatan dan Peraturan Lingkungan serta Sinergi *Beyond Compliance.* Lingkup pemenuhan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai berikut:

1. **Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat**
   Indonesia Power telah menetapkan wilayah yang menjadi prioritas utama lingkup komunitas binaan melalui Keputusan Direksi Nomor 26.K/010/IP/2014 tanggal 11 Februari 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan INPOWER-CARE. Dalam implementasinya Indonesia Power pun melakukan tidak pengembangan Masyarakat di luar wilayah tersebut. Lingkup komunitas binaan menjadi 4 wilayah, yaitu:
   Ring 1 : Wilayah yang terkena dampak dan memberikan dampak terkait operasional Perusahaan secara langsung, yaitu:
   - Wilayah administratif terkecil tempat Perusahaan berdiri (desa/kelurahan s.d tingkat kecamatan)
   - Wilayah yang memberikan dampak terhadap keberlanjutan Perusahaan, misal di PLTA: catchment area.

   Ring 2 : Wilayah administratif setingkat Kabupaten/Kota tempat beroperasi Perusahaan, Wilayah yang memiliki potensi SDA, sosial dan masyarakat untuk dikembangkan dan memberikan dampak positif terhadap citra Perusahaan.
   Ring 3 : Wilayah administratif Provinsi tempat beroperasi Perusahaan dan Wilayah rencana lokasi pengembangan Perusahaan.
   Ring 4 : Wilayah yang mengalami bencana alam dan non alam di luar Ring 1 sampai dengan Ring 3.

In general, CSR planning covers the scope of Community Engagement and Development, Compliance with the Environmental Regulation and 'Beyond Compliance' Synergy. Each detail is outlined as follows:

1. **Community Engagement and Development**
   Indonesia Power has designated areas as the top priority of the foster community scope based on the Board of Directors Decree Number 26.K/010/IP/2014 dated February 11, 2014 on the Implementation Guideline of INPOWER-CARE. In practice, Indonesia Power carried out Community development beyond the specified area. The scope of foster community is separated into 4 areas, i.e.:
   Ring 1 : Areas directly affected by and affecting the Company's operating activities, namely:
   - The smallest administrative areas where the Company is located (villages/urban villages up to subdistricts)
   - Areas affecting the Company's sustainability, for instance catchment area in HPP.

   Ring 2 : Administrative areas equivalent to District/ Municipality where the Company operates, Areas with potential human resource, social and community factors to develop, and positive influence towards Company's image.
   Ring 3 : Provinces as the administrative area where the Company operates and Areas where the Company is to be developed.
   Ring 4: Areas suffering natural and non-natural disaster outside Ring 1 to Ring 3

PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM PLANNING

2. **Pemenuhan Ketaatan dan Peraturan Lingkungan**
   Komitmen dan upaya Senior Leader dilakukan untuk menciptakan sinergi antar bidang dan seluruh pegawai dalam mendukung Keandalan Operasional, Ketentuan teknis serta pemenuhan parameter dan baku mutu. Melalui upaya yang sinergi, pemenuhan ketaatan pengelolaan Lingkungan dapat dipastikan 100% Taat dan mewujudkan Pembangkit yang Ramah Lingkungan. Sesuai Peraturan Menteri LHK No 1 tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Indonesia Power telah melaksanakan pemenuhan ketaatan dan peraturan lingkungan melalui keikutsertaan PROPER.

3. **Sinergi *Beyond Compliance***
   Sinergi *Beyond Complience* secara konsisten diterapkan untuk menciptakan Pembangkit yang berkomitmen tinggi dan terus melakukan usaha lebih dalam kepedulian terhadap Lingkungan. Dengan pedoman *Green Power Plant*, Sinergi dilakukan oleh seluruh bidang dalam eksekusi program Efisiensi Energi, Penurunan Emisi, Konservasi dan Efisiensi Air, 3R Limbah B3, 3R Limbah Non B3, Keanekaragaman Hayati dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemenuhan Kebijakan, Kompetensi, Inovasi, Data dan Dokumen, Perencanaan dan Realisasi, *Monitoring* dan Evaluasi, Data Perhitungan dan Laporan Program terhadap seluruh jenis Program harus dipastikan sehingga Sasaran *Green to Gold Power Plant* tercapai.

2. **Compliance with the Environmental Regulation**
   The commitment and efforts of the Senior Leaders are displayed to create synergy across all fields and employees to support Operational Reliability, Technical requirements, and fulfillment of parameters and quality standards. Through synergy, the environmental management compliance can be ensured and Green Power Plants can be established. Pursuant to the Minister of Environment Regulation No. 1 of 2021 on the Assessment Program of Corporate Performance Rating in Environmental Management, Indonesia Power has complied with the environmental regulations by participating in PROPER.

3. **'Beyond Compliance' Synergy**
   'Beyond Compliance' Synergy is consistently implemented to create highly committed Power Plant and carry out a greater effort to maintain the environment. With Green Power Plant as the guideline, the synergy is enforced in all fields during the execution of many programs, i.e. Energy Efficiency, Emission Reduction, Water Conservation and Efficiency, 3R (Reduce, Reuse, Recycle) of Hazardous and Toxic Waste, 3R of Non-Hazardous and Toxic Waste, Biodiversity, and Community Empowerment. Policies fulfillment, Competence, Innovation, Data and Documents, Planning and Realization, Monitoring and Evaluation, Calculation Data and any Program Report must be ensured so that Green to Gold Power Plant target is satisfied.

Strategi dan Program Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Strategy and Work Program

Hasil perumusan tanggung jawab sosial Perusahaan berdasarkan pemetaan sosial dan survei persepsi menjadi dasar penyusunan strategi dan program kerja. Selain itu, Indonesia Power juga melibatkan *Stakeholders* merumuskan strategi tanggung jawab sosial Perusahaan. Strategi yang akan dilaksanakan disusun dalam bentuk *Sustainability Commitment*. Strategi tanggung jawab sosial Perusahaan merupakan upaya menciptakan manfaat bersama bagi Perusahaan, *Stakeholders* dan pembangunan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat meningkatkan *Stakeholders Engagement* dan nilai tambah bagi *Stakeholders* dan *Shareholder*.

The formulation of CSR is based on social mapping and perception survey and serves as the basis for designing strategy and work program. Indonesia Power engages the Stakeholders in developing the strategy, which is then arranged into a Sustainability Commitment. This strategy is proposed to obtain mutual benefit for the Company, Stakeholders, and sustainable development, thus improving Stakeholder Engagement and the added value for Stakeholders and Shareholders.

Visi Vision

Menjadi Perusahaan Energi Terbaik yang Tumbuh Berkelanjutan

To be the Best Energy Company with Sustainable Growth

Misi Mission

Menyediakan Solusi Energi yang Andal, Inovatif, Ramah Lingkungan dan Melampaui Harapan Pelanggan

Providing Energy Solutions that are Reliable, Innovative, Environmentally-Friendly, and Exceeding Customer Expectation

STRATEGIC RESULTS	Kinerja Operasional Kelas Dunia World Class Operational Performance	Peningkatan *Green & Clean Power Plant* Green & Clean Power Plant Improvement	Penambahan Portofolio Bisnis Baru di luar Penjualan Tenaga Listrik Addition of New Business Portfolio Outside of Electric Power Sales
STRATEGIC THEMES	**Operation & Maintenance Excellence (OME)**	**Low-carbon Energy Development (LCE)**	**Beyond KWH Busioness Development (BBD)**

Indonesia Power Care
Community Assistance Relation Empowerment

Community Assistance

1. Bantuan Sarana dan Prasarana
2. Bantuan Pelayanan Kesehatan
3. Bantuan Pelayanan Pendidikan
4. Bantuan Bencana Alam
1. Facilities and Infrastructure Assistance
2. Health Service Assistance
3. Education Service Assistance
4. Natural Disaster Relief

Community Relation

1. Komunikasi Sosial
2. Partisipasi Peringatan Hari Besar
3. Partisipasi Kegiatan Masyarakat
1. Social Communication
2. Participation in National Holiday Commemoration
3. Participation in Community Activities

Community Empowerment

1. Bantuan Pengembangan modal usaha
2. Bantuan Peningkatan Keterampilan
3. Bantuan Pemasaran Produk
4. Riset dan Pengembangan
1. Business Capital Development Assistance
2. Skill Development Assistance
3. Product Marketing Assistance
4. Research and Development

IP PINTAR PROGRAM INTERNSHIP ASESMEN DAN SERTIFIKASI

Sehati

iPreneur

Kawan Hijrah Indonesia Power

inspirasi perempuan

Tata Nilai: AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), GCG, ISO26000, dan Kebijakan Perundangan

Values: AKHLAK (Amanah (Trustworthy), Kompeten (Competent), Harmonis (Harmonious), Loyal, Adaptif (Adaptable), Kolaboratif (Collaborative)). GCG, ISO26000, and Laws and Policies

PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM PLANNING

Sustainability Commitment menjadi dasar penyusunan program kerja tanggung jawab sosial Perusahaan diantaranya sebagai berikut:

1. IP *Community Assistance* (Pelayanan Masyarakat) merupakan program yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas Lingkungan, memberikan dukungan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat di sekitar wilayah operasi Perusahaan.
2. IP *Community Relation* (Hubungan Masyarakat) kegiatan Komunikasi dua arah yang dilakukan untuk memfasiltasi tumbuhnya pemahaman bersama dan mewujudkan komitmen bersama di antara para *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama, mendorong lahirnya sikap positif komunitas terhadap perusahaan serta memberbaiki dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang kondusif terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan.
3. IP *Community Empowerment* (Pemberdayaan Komunitas), yaitu program yang berkaitan dengan usaha memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat setempat untuk menunjang kemandiriannya.

Sustainability Commitment is the foundation of CSR work program formulation. It comprises:

1. IP Community Assistance: a program to recover the environment quality and support local community and government in developing area around the Company's operational areas.
2. IP Community Relation: a program that promotes two-way communication to facilitate mutual understanding and commitment among stakeholders to achieve shared goals, foster positive viewpoint towards the Company, and develop and encourage conducive public policies that support the Company's business sustainability.
3. IP Community Empowerment: a program that provides wider access to local communities for the sake of their self-dependency.

Program kerja yang dirancang Indonesia Power merupakan tindak lanjut hasil pemetaan sosial (*social mapping*) dan survei persepsi *stakeholder*. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya Indonesia Power untuk menurunkan dampak dari berbagai keputusan dan kegiatan Perusahaan melalui program unggulan sebagai berikut:

The work program designed by Indonesia Power is a follow-up to the result of social mapping and stakeholder perception survey. It is part of the Company's commitment to reduce the impact of numerous decisions and activities of the Company, through the following flagship programs:

No.	Unit Kerja Work Unit	Program
1.	Suralaya PGU	Omah Kreteg Anggana Omah Kreteg Anggana (Anggana Kreteg House)
		Pemberdayaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Empowerment of People with Mental Disabilities
		Sekolah peduli lingkungan menuju sekolah Adiwiyata Green school
		Program pemberdayaan berbasis budaya dan lingkungan Cultural and environmental empowerment program
2.	Priok POMU	PAUD Inklusi Inclusive Early Childhood Education (PAUD)
		Taman Hatinya Sunter Taman Hatinya Sunter
		Kampung Sehat HIjaunesiaPower Kampung Sehat (Healthy Kampong) Hijaunesia Power
		Rumah Kreatif & Inovasi Anak Muda Creative & Youth Innovation Center
		Rojali di Ancol Rojali di Ancol (Rojali in Ancol)
3.	Kamojang POMU	Budidaya Kopi Kamojang Kamojang Coffee Farming
		Budidaya Jangkrik Cricket Farming
		Galeri Lapasan Sabilulungan Lapasan Sabilulungan Gallery
		Program Bank Sampah Waste Bank Program
		Program Budidaya Ikan Nila Nile Tilapia Farming Program
		Program Budidaya dan Pengolahan Kopi Pelag Pelag Coffee Farming and Production Program

No.	Unit Kerja Work Unit	Program
4.	PLTP GPP Gunung Salak	Kelompok Tani UMKM PANCAR BAKTI - Beras Glikemik Farmer Group of PANCAR BAKTI MSME - Glycemic Rice
		Kelompok Domba/Kambing Sumber Jaya Sumber Jaya Sheep/Goat Farmer Group
		Kelompok Ternak Mekar Tani Mekar Tani Farmer Group
		Pemberdayaan Perempuan Insan Mandiri Independent Women Empowerment
5.	Pangkalan Susu OMU	Rumah Jahit PKK Tanjung Pasir Sewing Center of Tanjung Pasir's Family Welfare Empowerment Group (PKK)
		Pembuatan Terasi Khas Pulau 9 Production of Pulau 9's Traditional Shrimp Paste
		Budidaya Ikan Siakap Barramundi Farming
		Budidaya kepiting Asoka Soft-Shell Crab Farming
6.	Banten 1 Suralaya OMU	Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Community-Based Integrated Waste Management
		Kelompok Perempuan Olahan Pangan Ringan (jenis makanan ringan seperti keripik dll) Women's Group for Snack Production (chips, etc.)
		Kelompok Nelayan terdampak Desa Salira dan Istri Nelayan dalam pengolahan hasil tangkap ikan Fish processing for the Affected Fisher People of Salira Village and Fishermen's Wives group
		Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Community-Based Integrated Waste Management
7.	Banten 2 Labuan OMU	Pengelolaan produk sarang burung walet "*Bird Nest* Caringin" Birds' nest products management "Caringin Bird Nest"
		Pendampingan Karang Taruna Mutiara Putih Desa Cigondang Mentoring of Cigondang Village's Youth Organization of Mutiara Putih
		Pengelolan kelompok perikanan "Margasana Unggul" Management of fisheries group "Margasana Unggul"
8.	Banten 3 Lontar OMU	Budidaya Bandeng dan Udang Milkfish and Shrimp Farming
		Pemberdayaan Kelompok Pembatik Kembang Mayang Empowerment of Kembang Mayang Batik Artists Group
		Pengolahan TPST 3R Pemuda Berkarya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Integrated Waste Management Site "Pemuda Berkarya"
		Budidaya Bebek Petelur Laying Ducks Farming
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tambak Processing and Marketing of Fish Farming Products
		Pengolahan Makanan Hasil Tani & Hasil Tambak Food Production from Crops and Fish Farming Products
		Budidaya Labu Madu Butternut Squash Farming
9.	Saguling POMU	Pengembangan Ternak Domba Mandiri Development of Self-sufficiency Sheep Farming
		Pengembangan Ternak Itik Sawargi Development of Sawargi Duck Farming
		Pengolahan Makanan Khas Jawa Barat West Java's Traditional Food Processing
		Kerajian Bambu Bambaray Bambaray Bamboo Crafting
		Budidaya Kopi Plengan Plengan Coffee Farming
		Pemanfaatan Limbah Sampah Organik Sebagai Pakan Ikan Organic Waste Utilization for Fish Feed

PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM PLANNING

No.	Unit Kerja Work Unit	Program
10.	Mrica PGU	Pengembangan kampung kopi konservasi desa Pegundungan Coffee conservation development in Pegundungan village.
		Pengembangan ternak kambing Goat farming development
		Optimalisasi Pengembangan Mrica *Corner* Optimization of Mrica Corner Development
		Pemasaran kopi bagi para petani kopi Coffee marketing for coffee farmers
11.	Semarang PGU	Program Olahan Ikan dan Panganan Processed Fish and Snacks Program
		Program Batik Alam Malon Malon Natural-Dyed Batik Program
		Program olahan makanan berbahan dasar tepung pongge durian Durian seed flour-based food production program
		Program Bank Sampah Kemijen Kemijen Waste Bank Program
		pengolah dan pemasar olahan dari ikan asap menjadi aneka olahan khas Semarang Semarang's smoked fish-based traditional food processing and marketing
		Program Konservasi Mangrove Pesisir Semarang Semarang's Coastal Mangrove Conservation Program
		Program pemanfaatan lahan pekarangan yang sempit untuk menanam sayuran, cabai, dll Small space farming program
12.	Grati POMU	Rumah kerajinan batik "Bungkoh Batik" Desa Pasinan "Bungkoh Batik" batik craft center in Pasinan Village
		Rumah pupuk kompos "Power Green" Desa Ranuklindungan "Power Green" Compost Center in Ranuklindungan Village
		Pengolahan produk susu Balunganyar Dairy product processing in Balunganyar
		Pengolahan produk makanan dan kerajinan hasil laut Sea food processing and crafts
13.	Bali PGU	Ekowisata Tukik Saba Asri Saba Asri Baby Sea Turtle Ecotourism
		Ekowisata Lembu Putih Taro Taro White Cattle Ecotourism
		Program Pembedayaan Wanita Pengrajin Banten Banten Women Artisan Empowerment Program
		Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah 3R Nangun Resik Desa Paksebali Development of Nangun Resik 3R Waste Management Site in Paksebali Village
		Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Werdhi Guna Development of Werdhi Guna Waste Management Site
		Ekowisata Mangrove Segera Guna Batu Lumbang Segara Guna Mangrove Ecotourism in Batu Lumbang
		Kelompok Dukungan Sebaya ODHA Peer Support Group for People Living with HIV/AIDS (PLWHA)
		Pengembangan produk olahan makanan mangrove Development of mangrove-based food products
14.	Barru OMU	Pengolahan makanan ringan Snack production
15.	Jeranjang OMU	Jeranjang Olah Sampah Setempat Jeranjang Local Waste Management
		Pengolahan makanan/agroindustri Food production/industrial agriculture
		Pengembangan kain tenun lombok Development of Lombok traditional woven fabric
		Program Taman Laut Pandanan Pandanan Marine Park Program

No.	Unit Kerja Work Unit	Program
16.	Palabuhan Ratu OMU	Bahari Power Bahari Power (Maritime Power)
		Bank Sampah Cipta Madani Cipta Madani Waste Bank
		Handcraft Pesantren Handcrafts made by Islamic Boarding School Students
		Karang Taruna Pantai Wisata Palabuhanratu Youth Organization of Palabuhanratu Recreational Beach
		Surfing School Power Battle
		TAMPOMAS Desa Jayanti TAMPOMAS Jayanti Village
		BUMDES Desa Loji Loji Village-owned Business Enterprises
		Panganir Cai Desa Cidadap Shinto Lestari Panganir Cai Cidadap Village Shinto Lestari
17.	Adipala OMU	Pengembangan Batik Seloka Adipala Seloka Batik Development in Adipala
		Pengembangan Batik Praja Adipala Praja Batik Development in Adipala
		KWT PI Sidamegar Adipala PI Sidamegar Adipala Women Farmers Group
		KWT Sekar Kamboja Sekar Kamboja Women Farmers Group
18.	Cilegon OMU	Pengembangan ternak bibit domba Development of sheep yearling breeding
		Pengelolaan bank sampah dan produk makanan Management of waste banks and food products
		Pengembangan olahan kacang (peyek, kue kacang dan *snack box*) Development of peanut-based foods (peanut fried crackers, peanut cake, and snack box)
		Pengembangan proklim dan produk makanan Development of climate-conscious village program and food products

Program yang Melebihi Tanggung Jawab Minimal Perusahaan yang Relevan dengan Bisnis yang Dijalankan

Business-Relevant Programs beyond the Company's Minimum Responsibility

Sebagai wujud kontribusi terhadap upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia Power juga menyusun program tanggung jawab sosial yang melebihi tanggung jawab minimal Perusahaan dan relevan dengan bisnis yang dijalankan. Hal tesebut juga menjadi bagian dari upaya mitigasi atas dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasional Perusahaan antara lain :

1. Program Tempat Olah Sampah Setempat, hasil Pelet dari desa Gunaksa selain digunakan sebagai bahan bakar kompor, juga digunakan sebagai campuran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
2. Program Jeranjang Olah Sampah Setempat, hasil Pelet dari TPA Kebun Kongok digunakan sebagai subtitusi energy primer di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

As a contribution to sustainable development goals, Indonesia Power also designs business-related CSR programs beyond the Company's Minimum Responsibility. They take part as the mitigation from the impact of the Company's activity, consisting of:

1. Local Waste Processing Area Program: used for the fuel for stoves, the pellet from Gunaksa Village is also utilized as a compound for coal in Steam Power Plants.
2. Jeranjang Local Waste Processing: pellet from Kebun Kongok landfill is utilized as a substitute for primary energy in Steam Power Plants.

PERENCANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM PLANNING

3. Program konservasi Kopi di Banjarnegara, untuk mengurangi sedimentasi waduk PLTA PB Sudirman dan Program peternakan Itik, untuk mengurangi sedimentasi waduk PLTA Saguling sehingga menambah umur waduk.
4. Program Citarum Harum, pembersihan aliran sungai dan waduk PLTA Saguling dari Keramba Jaring Apung untuk mengurangi sedimentasi dan memperbaiki kualitas air sehingga dapat meminimalisir kerusakan peralatan pembangkit listrik yang berdampak pada kehandalan.
5. Program Budidaya Kopi Kamojang, untuk memperbaiki kualitas udara yang terdampak dari kegiatan operasional Perusahaan serta menjaga kualitas uap panas bumi.
6. Program Hijaunesia Power, Program kepedulian terhadap lingkungan.

3. Coffee conservation in Banjarnegara: a program to mitigate the sedimentation of HPP PB Sudirman dam and duck farming program, and to minimize the sedimentation of HPP Saguling dam to be longer-lasting.
4. Citarum Harum: a program to free watershed and HPP Saguling dam from Floating Cage Net to reduce sedimentation and improve water quality to preserve power plant equipment, thus maintaining the reliability of the power plant.
5. Kamojang Coffee Farming: a program to improve air quality impacted by the Company's operation and maintain the geothermal quality
6. Hijaunesia Power: a program that promotes care for the environment.

Biaya dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial
Corporate Social Responsibility Cost and Budget

Biaya dan anggaran tanggung jawab sosial Indonesia Power untuk masing-masing aspek pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Below is the spending and budget for Indonesia Power's 2020 Corporate Social Responsibility for each aspect:

Aspek Aspect	Biaya (Rp Juta) Expense (Rp million)
Hak Azasi Manusia Human Rights	70.351,71
Operasi yang Adil Fair Operations	286,23
Lingkungan Hidup Environment	93.317,94
Pelanggan Customers	678,27
Ketenagakerjaan dan K3 Employment and Occupational Health and Safety	1.127.691,06
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Social and Community Development	37.447,20

Evaluasi atas Efektifitas Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Evaluation of Corporate Social Responsibility Program Effectiveness

Bidang Komunikasi Korporat yang membawahi Manajer *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai unit yang bertugas mengelola pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan, memastikan bahwa tahapan perumusan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan penyusunan laporan tanggung jawab sosial Perusahaan berjalan efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Lingkungan Indonesia Power.

The Corporate Communication Division which oversees CSR Manager performs as the unit responsible for managing CSR implementation. It ensures the seamless CSR formulation, planning, implementation, and preparation of activity report in accordance with the policy and procedure set out by Indonesia Power. The Board of Directors and management take part in reviewing and improving the credibility of the initiatives,

Direksi dan jajaran manajemen me*review* dan meningkatkan kredibilitas inisiatif, capaian dan laporan tanggung jawab sosial Perusahaan, serta memastikan keterlibatan *Stakeholders* relevan dalam inisiatif tanggung jawab sosial Perusahaan. Perusahaan mengukur dampak dan *output* capaian program tanggung jawab sosial Perusahaan salah satunya dengan cara Analisis *Compass Sustainability*. Selain itu, perusahaan juga melakukan analisis *Social Return On Investment* (SROI) untuk mengukur dampak sosial yang dapat dihasilkan di masa mendatang oleh Perusahaan. Pada tahun 2021, Perusahaan melakukan analisis SROI pada beberapa program tanggung jawab sosial Perusahaan diantaranya :

achievement, and report of CSR. They also ensure the engagement of stakeholders relevant to the respective CSR program. The Company then measures the impact and output of the program, among others through Sustainability Compass Analysis. The Company also analyzes the Social Return On Investment (SROI) to assess the potential social impact of the Company in the future. In 2021, SROI analysis was conducted on several CSR programs as follows:

Program yang Dianalisis Analyzed Program	Metode Method	Hasil pengukuran Measurement result
Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) Local Waste Processing Area	Kuesioner dan Wawancara Questionnaire and Interview	2,13
Omah Kreteg Anggana Anggana Kreteg House		2,42
Olahan Pangan Berbahan Dasar Pongge Durian Durian seed-based Food Processing		1,35
Rumah Kompos Power Green Desa Ranuklindungan “Power Green” Compost Center in Ranuklindungan Village		1,26
Budidaya dan Pengelolaan Kopi Pasca Panen Post-harvest Coffee Farming and Management		6,03
PAUD Inklusi Inclusive Early Childhood Education (PAUD)		4,99



TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATIONS

Indonesia Power menjalankan tanggung jawab sosial berlandaskan ISO 26000 dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan melalui kinerja sosial. Aspek operasi yang adil merupakan salah satu dimensi penerapan tanggung jawab sosial berbasis ISO 26000. Sejalan dengan hal tersebut, pemenuhan aspek operasi yang adil menjadi bagian dari implemetasi etika perusahaan yang sejalan dengan norma-norma perilaku internasional dalam mengelola bisnis yang dijalankan. Tanggung jawab Perusahaan atas operasi yang adil merupakan upaya dalam mewujudkan pengelolaan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab untuk mendukung keberlanjutan bisnis yang dijalankan dan memberikan nilai tambah kepada seluruh *stakeholder*.

Indonesia Power's CSR initiative is certified with ISO 26000 to improve Company performance through social aspect. This is reflected by, among others, fair operations. This principle serves as a part of the Company's code of conducts to comply with international business norms in its operation. Fair operations represent the means of the Company to actualize clean and responsible business management, establishing solid business sustainability and presenting added value to each and every stakeholder.

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Commitment and Policy on Corporate Responsibility for Fair Operations

Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terhadap operasi yang adil merupakan komitmen Indonesia Power terhadap persaingan yang adil, anti korupsi, menghormati hak kekayaan intelektual, kontribusi dan keterlibatan politik serta patuh pada hukum dan regulasi. Hal tersebut juga menjadi bagian dari implementasi atas nilai-nilai dan budaya perusahaan yang sejalan dengan kebijakan internal Perusahaan sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi No. 161.K/020/IP/2014 tentang Pedoman Indonesia Power Bersih.
2. Keputusan Direksi No. 131.K/010/IP/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi No. 218.K/010/IP/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa PT Indonesia Power.
3. Keputusan Direksi Nomor: 34.K/010/IP/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Karya Inovasi PT Indonesia Power.
4. Edaran Direksi No. 15.E/012/IP/2018 tentang Larangan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi.
5. Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
6. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 045.K/010/IP/2021 dan No. 008.SK/DEKOMIP/2021 Tentang Kebijakan Anti Penyuapan PT Indonesia Power.
7. Keputusan Direksi No. 227.K/010/IP/2019 Tentang Disain Sistem Pengendalian Gratifikasi.
8. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Indonesia Power Nomor 178.K/010/IP/2019, Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2019 tentang pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*).

Fair operating practice is a commitment of Indonesia Power to fair competition, anti-corruption, respect for intellectual property rights, contribution and political involvement as well as complying with laws and regulations. It is also a manifestation of the Company's values and culture in line with the following Company's internal policies:

1. Decree of the Board of Directors No. 161.K/020/IP/2014 on Guidelines for "Indonesia Power Bersih".
2. Decree of the Board of Directors No. 131.K/010/IP/2021 on Second Change of Decree of the Board of Directors No. 218.K/010/IP/2016 on Guidelines for Procurement of Goods and Services at PT Indonesia Power.
3. Decree of the Board of Directors No. 34.K/010/IP/2017 on Guidelines for the Implementation of Innovation Works at PT Indonesia Power.
4. Circular of the Board of Directors No. 15.E/012/IP/2018 on Prohibition to Grant and Receive Gratification.
5. Collective Labor Agreement
6. Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners No. 045.K/010/IP/2021 and No. 008.SK/DEKOMIP/2021 of Anti Bribery policy of PT Indonesia Power.
7. Decree of the Board of Directors No. 227.K/010/IP/2019 on the Design of Gratification Control System.
8. Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Indonesia Power No. 178.K/010/IP/2019, No. 006.SK/Dekom-IP/2019 on Good Corporate Governance Guidelines in PT Indonesia Power.

9. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT. Indonesia Power Nomor 179.K/010/IP/2019, Nomor 007.SK/DEKOM-IP/2019 tentang Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) PT Indonesia Power.
10. Keputusan Direksi No. 014.K/010/IP/2020 tentang Kebijakan Anti Fraud Di Lingkungan PT Indonesia Power.
11. Kebijakan No. 018.K/010/IP/2020 tentang Benturan Kepentingan Di Lingkungan PT Indonesia Power
12. Keputusan Direksi No. 019.K/010/IP/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di PT Indonesia Power.

9. Joint Decree of the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Indonesia Power No. 179.K/010/IP/2019, No. 007.SK/Dekom-IP/2019 on Code of Conduct of PT Indonesia Power.
10. Decree of the Board of Directors No. 014.K/010/IP/2020 on Anti-Fraud Policy of PT Indonesia Power.
11. Policy No. 018.K/010/IP/2020 on Conflict of Interest in PT Indonesia Power
12. Decree of the Board of Directors No. 019.K/010/IP/2020 on Gratification Control Guidelines in PT Indonesia Power.

Perumusan dan Perencanaan Lingkup Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Company Formulation and Planning on Corporate Responsibility for Fair Operations

Perumusan tanggung jawab sosial perusahaan terkait operasi yang adil melalui tahapan uji tuntas dengan melakukan *review*, identifikasi dan *update* terhadap seluruh peraturan terkait operasi yang adil secara berkala dalam memastikan kecukupan kebijakan dan penerapan tanggung jawab Perusahaan terhadap operasi yang adil, *social mapping* untuk merumuskan dan mengenali isu penting, *stakeholder*, dampak dan risiko yang timbul dari aktivitas Perusahaan terkait operasi yang adil. Indonesia Power juga mempersipakan mekanisme penanganan keluhan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan berjalan efektif. Lingkup tanggung jawab Perusahaan terkait operasi yang adil meliputi keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik, anti korupsi, kompetisi yang adil, integrasi CSR dalam rantai pemasok/*supply chain* serta penghargaan atas *property rights.*

The formulation of corporate social responsibility for fair operations is conducted through due diligence. It covers reviewing, identifying, and updating all regulations on fair operations regularly to ensure the adequacy of policy and implementation of such a principle. To pursue similar purpose, social mapping is also carried out to formulate and identify key issues, stakeholders, impacts, and risks that may arise from the corporate activity in relation to fair operations. Indonesia power also prepares the complaint handling mechanism for an effective CSR. The scope of CSR related to fair operations includes the responsible involvement in politics, anti-corruption, fair competition, CSR integration in supply chain, and rewards for property rights.

Isu Penting, Dampak dan Resiko Kegiatan dan Keputusan Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Key Issues, Activity Impacts and Risks, and Stakeholder Expectations of the Company Related to Fair Operations

Isu-isu penting terkait operasi yang adil yang relevan dengan bisnis perusahaan secara umum meliputi hak kekayaan intelektual, tindakan korupsi, pelanggaran hukum dan regulasi, pendayagunaan produk lokal dan pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan proses pengadaan, persaingan usaha, keterlibatan politik. Isu tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi *stakeholders*, dampak dan resiko dari kegiatan operasional terkait operasi yang adil yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan sebagai berikut :

Key issues for this point generally includes intellectual property rights, corruption, violation of laws and regulations, local product utilization, fulfillment of health and safety standards in procurement, business competition, and political involvement. They are analyzed to identify the stakeholders, also impacts and risks of the Company's operation in connection with fair operations, directly and indirectly connected to the Company as elaborated below:

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATIONS

Analisis Dampak, Risiko dan Tindakan Penanggulangan
Analysis of Impacts, Risks, and Countermeasures

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Tindakan Korupsi Tindakan Korupsi	• Pelanggaran kode etik Perusahaan • Permasalahan hukum • Kegiatan usaha tidak efisien • Violation against the code of conduct • Legal issues • Inefficient business activities	• Penyusun dan sosialisasi Kebijakan dan program anti korupsi meliputi pedoman etika perusahaan; benturan kepentingan, gratifikasi, LHKPN, sistem palporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dan lain-lain. • Pelaksanakan kebijakan dan program anti korupsi secara konsisten. • Pelaporan dan evaluasi perangkat pendukung kebijakan anti korupsi. • Penandatanganan pakta integritas. • Formulating and disseminating anti-corruption policies and programs, among others code of conducts, conflict of interests, gratifications, State Official Wealth Report (LHKPN), and whistleblowing system. • Consistently implementing anti-corruption policy and program. • Reporting and evaluating supporting tools for anti-corruption policy. • Signing integrity pact
Hak kekayaan intelektual tidak dilindungi Unprotected intellectual property rights	• Kehilangan hak atas kekayaan intelektual • Menurunnya semangat berinovasi • Loss of intellectual property rights • Low spirit of innovation	• Pemberian penghargaan atas karya inovasi. • Pendaftaran karya inovasi untuk mendapatkan hak paten. • Awarding any form of innovation. • Registering patents for innovation.
Politik praktis Practical politics	• Potensi benturan kepentingan • Pelanggaran kode etik Perusahaan • Rendahnya efektifitas pencapaian tujuan Perusahaan • Potential conflict of interest • Violation against the code of conduct • Poor effectiveness of Company's objectives achievement	• Sosialiasi kode etik Perusahaan secara berkala. • Pemberian sanksi pelangaran kode etik terkait keterlibatan politik. • Penandatanganan pakta integritas. •• Regularly disseminating code of conduct. • Imposing sanctions for violations of code of conduct due to political involvement. • Signing integrity pact
Proses pengadaan tidak memperhatikan aspek tanggung jawab sosial Perusahaan. Disregarding CSR aspect in a procurement practices.	• Minimnya pendayagunaan produk lokal • Minimnya pemenuhan standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan terkait pengadaan barang dan jasa • Lack of local product utilization • Lack of health, safety, and environmental standards fulfillment in goods and services procurement	• Pendayagunaan produk lokal sesuai kebijakan intenal Perusahaan. • Sosialisasi dan pengembangan kompetensi pemasok terkait standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan terkait pengadaan barang dan jasa. • Local product utilization in accordance with the Company's internal policies. • Dissemination and development of supplier competency related to health, safety, and environmental standards in goods and services procurement.

Ekspektasi dan Jangkauan Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Isu Operasi yang Adil pada *Stakeholder*

Expectation and Scope of Company's Influence Related to Fair Operations on Stakeholders

Sebagai bagian dari perumusan tanggung jawab Perusahaan terkait operasi yang adil, Indonesia Power melakukan upaya pelibatan *stakeholders* berdasarkan lingkup pengaruh Perusahaan terkait isu operasi yang adil sebagai pengembangan dari hasil analisis isu terkait operasi yang adil. Indonesia Power melakukan identifikasi *stakeholder* penting dan harapan terhadap Perusahaan dalam menangani isu terkait aspek operasi yang adil tersebut sebagai berikut:

In formulating CSR practice related to fair operations, Indonesia Power engages stakeholders based on the scope of Company's influence in terms of fair operations after developing the analysis as mentioned above. Indonesia Power identifies the following key stakeholders and expectation about the Company in addressing this issue:

Analisis *Stakholder* Penting, Ekspektasi serta Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder*

Analysis of Key Stakeholders, Expectations, Handling of Issues, and Engagement of Stakeholders

Stakeholder Penting Key Stakeholder	Harapan Expectation	Langkah Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder* Measures in Handling Issues and Engagement of Stakeholders
Pegawai Employees	• Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Pencegahan Tidak Pidana Korupsi • Intellectual Property Rights Protection • Prevention of Corruption	• Mendaftarkan karya inovasi untuk mendapatkan hak paten atau hak cipta • Memberikan penghargaan atas karya inovasi. • Melakukan sosialisasi Kebijakan dan program anti korupsi meliputi pedoman etika perusahaan; benturan kepentingan, gratifikasi, LHKPN, sistem palporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dan lain-lain. • Penandatanganan pakta integritas secara berkala. • Registering patents or copyrights for innovation works. • Awarding any forms of innovation. • Disseminating anti-corruption policies and programs, among others code of conducts, conflict of interests, gratification guidelines, State Official Wealth Report (LHKPN), and whistleblowing system.
Masyarakat Community	• Pencegahan Tidak Pidana Korupsi • Ketaatan atau kepatuhan pada Hukum dan peraturan perundang-undangan. • Prevention of Corruption • Adherence to or compliance with the laws and regulations.	• Publikasi laporan tahunan dan laporan keuangan • Menyediakan dan melakukan evaluasi atas perangkat pendukung program anti korup seperti sistem palporan pelanggaran (*whistleblowing system*). • Publication of annual report and financial statement • Preparing and performing evaluation of supporting tools for anti-corruption policy, e.g. whistleblowing system.
Pemasok Suppliers	• Fleksibilitas pembayaran • Transparansi dan kewajaran • Kerjasama bisnis jangka panjang • Payment flexibility • Transparency and fairness • Long-term business cooperation	• Melaksanakan survei prilaku etis dan asemen pemasok secara berkala, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasilnya. • Gathering pemasok secara berkala untuk mensosialisasikan kebijakan pengadaan dan membangun hubungan baik dengan pemasok. • Menyediakan portal/website atau aplikasi pengadaan (*e-Procurement*). • Performing ethical conduct survey and assessment of suppliers regularly as well as following up the results. • Organizing gathering event for suppliers on a regular basis to disseminate the procurement policy and fostering harmonious relationship with the suppliers. • Providing portal/website or procurement application (e-Procurement).

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATIONS

Stakeholder Penting Key Stakeholder	Harapan Expectation	Langkah Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder* Measures in Handling Issues and Engagement of Stakeholders
Pemerintah Government	• Pencegahan Tidak Pidana Korupsi • Ketaatan atau kepatuhan pada Hukum dan peraturan perundang-undangan • Prevention of Corruption • Adherence to or compliance with the Laws and regulations	• Melakukan pelaporan LHKPN secara tepat waktu • Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaporan kepada regulator. • Submitting State Officials Wealth Report (LHKPN) in a timely manner • Adhering to the provisions in law and regulations as well as reporting requirements to the regulators.

Perencanaan Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Planning of Corporate Responsibility for Fair Operations

Kegiatan tanggung jawab Perusahaan diharapkan mampu menciptakan manfaat bersama bagi *Stakeholder* dan Perusahaan khusunya terkait aspek operasi yang adil. Indonesia Power berupaya meminimalisir dampak operasional Perusahaan atas operasi yang adil melalui pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan yang dilaksanakan Perusahaan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program tanggung jawab Perusahaan, Indonesia Power turut melibatkan *stakeholder* untuk mendorong operasi yang adil dalam rantai nilai perusahaan. Indonesia Power dengan pengaruh perusahaan juga berupaya melibatkan para pihak terkait untuk mencegah segala bentuk pelanggaran terkait aspek operasi yang adil. Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terkait aspek operasi yang adil juga menjadi sarana untuk menciptakan manfaat bersama bagi Perusahaan dan *stakeholder*. Rencana Perusahaan terkait penerapan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap karya dan hak cipta atas karya inovasi dan produk ciptaan.
2. Pencegahan Korupsi (Program Anti Korupsi).
3. Kepatuhan atas kode etik terkait keterlibatan politik.
4. Integrasi tanggung jawab sosial Perusahaan dalam kegiatan pengadaan.

The Corporate responsibility activities are expected to create mutual benefits for the Stakeholders and the Company, especially related to fair operations. Indonesia Power seeks to reduce the impacts of its business on fair operations to minimum through CSR activities. In planning and executing these activities, the Company engages stakeholders to support fair operations within the corporate chain of value. With its influence, Indonesia Power also involves related parties to prevent any violations against fair operations. CSR practice on fair operations serves as a means to create mutual benefits for the Company and stakeholders. Below are the Company's plans on CSR for fair operations:

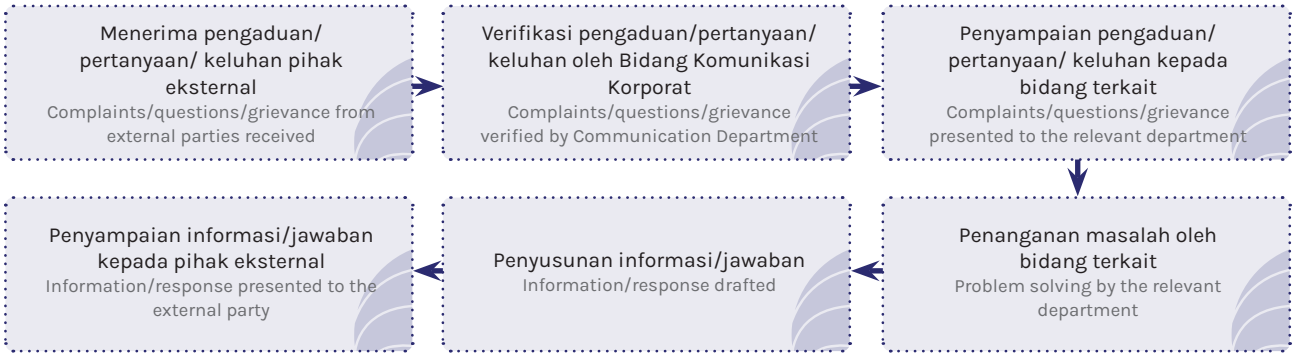
1. Protection for works and copyrights to innovative works and products.
2. Corruption Prevention (Anti-Corruption Program)
3. Compliance with code of conduct in terms of political involvement.
4. Integration of CSR into procurement practices.

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Konflik Terkait Operasi yang Adil

Complaint and Conflict Handling Mechanism Related to Fair Operations

Indonesia Power memastikan pelaksanaan upaya pemenuhan atas operasi yang adil dengan menyediakan sarana pengaduan terhadap pelanggaran dan konflik atas aspek operasi yang adil yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perusahaan. Pengaduan pelangaran tersebut dapat disampaikan berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan bidang terkait seperti masalah ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan, atau melalui saluran *whistleblowing system* (WBS). Secara umum mekanisme penanganan pengaduan dan konflik terkait aspek operasi yang adil adalah sebagai berikut :

Indonesia Power ensures fair operations by providing a means for the tipping-off of violation and conflict against fair operations principle relating to Company's operations. Any tip-off can be submitted in accordance with proper mechanism in the related field, such as employment, social, or through the Whistleblowing System (WBS). In general, the complaint and conflict handling mechanism related to this matter is outlined as follows:



Biaya Tanggung Jawab Perusahaan terkait Operasi yang Adil

Total Spending for CSR Programs Related to Fair Operations

Biaya tanggung jawab Perusahaan terkait operasi yang adil yang dikeluarkan Indonesia Power selama tahun 2021, mencakup perlindungan terhadap karya dan hak cipta atas karya inovasi dan produk ciptaan serta *gathering* pemasok dan survei perilaku etis tahun 2021 adalah sebesar Rp 286,23 Juta.

Throughout 2021, the CSR costs related to fair operations of Indonesia Power amount to Rp286.23 million for the protection of works and copyrights to innovation works and creative products, supplier gathering event, and ethical behavior survey.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Implementation of the Corporate Responsibility Initiatives Related to Fair Operations

Inisiatif tanggung jawab Perusahaan terkait operasi yang adil merupakan bagain dari komitmen pelaksanaan *Code of Conduct* (CoC) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Indonesia Power menuntut Insan Perusahaan untuk menerapkan prilaku yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan salah satunya dengan memenuhi aspek operasi yang adil operasi yang adil operasi yang adil dalam kegiatan operasional serta interaksi dan menjaga hubungan dengan *stakeholders* untuk menunjang keberlanjutan Indonesia Power.

Implementation of Corporate responsibility initiatives related to fair operations is a part of the commitment to implementing the Code of Conduct and Collective Labor Agreement. Indonesia Power demands its personnels to conduct ethically according to the corporate values, among others by fulfilling the fair operations aspect in its operational activities and maintain relationships with stakeholders in supporting the sustainability of the Company.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATIONS

Perlindungan Terhadap Karya dan Hak Cipta atas Karya Inovasi dan Produk Ciptaan

Protection of Works and Copyrights for Innovation Work and Creative Product

Indonesia Power melindungi kekayaan intelektual atas karya inovasi dan produk ciptaan di Perusahaan dengan mendaftarkan karya inovasi untuk mendapatkan hak paten atau hak cipta pada Direktorat Jendral Hak Aatas Kekayaan Intelektual. Perusahaan mengawal mulai proses pendaftaran hingga selesai maupun yang telah mendapatkan hak cipta, merk dan hak paten. Sampai dengan tahun 2021, Indonesia Power telah mendapatkan 27 Hak Kekayaan Intelektual dalam bentuk 22 Hak Cipta (Ciptaan: 14 Hak Cipta Buku, 7 Hak Cipta Program Komputer, 1 Motif Batik), 1 Merk dan 4 Hak Paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dibuktikan dengan telah terbitnya Surat Pendaftaran Ciptaan dan Sertifikat Paten. Selain itu, masih terdapat beberapa pengajuan hak paten yang sedang dalam pengajuan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia.

As a measure to protect the intellectual property of the innovation works and creative products of the Company, Indonesia Power register them to the Directorate of Intellectual Property Right to obtain patents or copyrights. The Company oversees this process from end to end. To this day, Indonesia Power has obtained 27 Intellectual Property Rights items in the forms of 22 Copyrights (Products: 14 Books, 7 Computer Programs, 1 Batik Pattern), 1 Brand, and 4 Patents granted by the Directorate General of Intellectual Property as evidenced by the issuance of Work Registration Letters and Patent Certificates. PT Indonesia Power is also applying for several Patents with the Directorate General of Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Pencegahan Korupsi (Program Anti Korupsi)

Corruption Prevention (Anti-Corruption Program)

Indonesia Power secara konsisten mendukung Program Anti Korupsi dan berupaya mencegah tindakan korupsi, gratifikasi dan pencucian uang dengan kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman anti korupsi melalui sosialisasi anti korupsi kepada Agen Perubahan, sosialisasi Gerakan Tolak Gratifikasi kepada seluruh Insan Indonesia Power (seluruh pegawai dan TKWT) dan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada seluruh Eksekutif, Eksekutif Senior dan Eksekutif Utama di seluruh Unit Kerja Perusahaan.
2. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi melalui penyusunan Laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi dari seluruh unit kerja Perusahaan.
3. Pengelolaan Pelaporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
4. Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
5. Penyelenggaraan *Vendor Gathering* untuk membangun komunikasi kebijakan anti korupsi perusahaan dengan pemasok dan penandatanganan komitmen pengendalian gratifikasi dan komitmen sistem manajemen anti penyuapan oleh seluruh pemasok yang hadir.

Uraian lebih jelas terkait Program Anti Korupsi Indonesia Power dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Ini.

Indonesia Power through the Anti-Corruption Program consistently seeks to prevent corruption, gratification, and money laundering through the following activities:

1. Improving awareness of anti-corruption through dissemination on anti-corruption to the Agents of Change, dissemination on gratification control movement “Gerakan Tolak Gratifikasi” (Say No to Gratification) to all Indonesia Power Personnel (all employees and fixed-term employees), and dissemination on State Official Wealth Report to all Executives, Senior Executives, and Chief Executives at all units.
2. Managing Gratification Control with the preparation of Gratification Receipt and Refusal report from all work units.
3. Managing State Officials Wealth Report (LHKPN).
4. Managing Anti-Bribery Management System (SMAP)
5. Organizing Vendor Gathering to communicate the Company’s anti-corruption policy to the suppliers and signing the commitment to gratification control and anti-bribery management system by all attending suppliers.

The description of Indonesia Power’s Anti-Corruption Program is further elaborated in the Corporate Governance section.

Kepatuhan atas Kode Etik Terkait Keterlibatan Politik.

Compliance with Code of Conduct in Terms of Political Involvement.

Indonesia Power menjaga kepatuhan atas implementasi Kode Etik Perusahaan terkait keterlibatan yang bertanggung jawab dalam politik setiap unsur di lingkungan Perusahaan sebagai pemenuhan atas tanggung jawab Perusahaan terkait aspek operasi yang adil. Indonesia Power menjamin seluruh Insan Perusahaan agar dapat melaksanakan hak untuk menyalurkan aspirasi politiknya sesuai dengan kode etik Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Indonesia Power tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berafiliasi ke partai politik manapun.

Indonesia Power maintains compliance with its Code of Conduct, specifically on responsible political involvement within the Company as a manifestation of fair operations. It also protects the rights of its personnel to voice their political aspiration pursuant to the Company's Code of Conduct. In conducting business, Indonesia Power refrains from involvement in practical politics and affiliation with any political parties.

Integrasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Kegiatan Pengadaan.

Integration of CSR into Procurement Practices.

Integrasi tanggung jawab sosial Perusahaan dalam rantai pasok Indonesia Power tercermin dari kebijakan Perusahaan terkait pendayagunaan produk dalam negeri. Sepanjang tahun 2021, Indonesia Power bekerja sama dengan 1.697 Penyedia Nasional (98,82% dari total Penyedia) dengan nilai pengadaan Penyedia Nasional sebesar Rp 17.727.743,56 juta (88,57% dari total nilai pengadaan). Selain itu, kegiatan pengadaan yang dijalankan Indonesia Power dilakukan secara transparan dan wajar sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan Perusahaan. Indonesia Power juga melakukan pembinaan terhadap pemasok untuk memenuhi standar kesehatan, keselamaatan dan lingkungan barang dan jasa dalam menopang kegiatan operasional Perusahaan salah satunya melalui *vendor gathering* yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2021. Dalam rangka peningkatan kegiatan pengadaan, Indonesia Power melaksanakan Survei Perilaku Etis untuk melihat persepsi pemasok terhadap Indonesia Power atas etika dan kepuasan dari aspek perencanaan pengadaan, proses pengadaan, implementasi kontrak dan pembayaran yang dilakukan secara tahunan oleh Perusahaan dilakukan.

The integration of CSR into the Company's supply chain is reflected from its policy on domestic product utilization. Throughout 2021, Indonesia Power cooperated with 1,697 National Suppliers (98.82% of the total Supplier), making up the National Supplier procurement value of Rp17,727,743.56 million (88.57% of the total procurement value). Furthermore, Indonesia Power also maintains the transparency and fairness in the procurement process as required by taking into account the Company's requirements. In addition to that, the Company also nurtures the suppliers to meet the health, safety, and environmental standards of the goods and services. For this means of supporting the Company's operational activities, a vendor gathering was held on December 23, 2021. To improve the procurement, Indonesia Power conducts Ethical Behavior Survey annually. It aims to comprehend the perception of the suppliers on Indonesia Power regarding the degree of ethics and satisfaction of such a practice, including the planning, process, contract implementation, and payment.

Indonesia Power memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjadi mitra atau pemasok Perusahaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Ketentuan pengadaan, informasi pengadaan dan registrasi pemasok secara umum dapat di akses melaui *website* Perusahaan. Selain itu, telah dilakukan mengembangkan *e-procurement* dan market place untuk meningkatkan aksesbilitas dalam proses pengadaan barang jasa. Uraian lebih lanjut terkait Pengadaan Barang dan Jasa telah dijelaskan pada bagian Tata Kelola Perusahaan.

The Company opens up the opportunity for all parties to become partners or suppliers of the Company in accordance with the terms and conditions applicable in the Company. The terms, schedule, and registration for the procurement is available in the Company website. In addition, the Company has provided e-procurement and marketplace to increase the accessibility to the procurement. Further details related to Procurement of Goods and Services are elaborated in the Corporate Governance section.

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT OPERASI YANG ADIL
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATIONS

Dukungan Manajemen, Pegawai dan *Stakeholders* Relevan pada Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Operasi yang Adil

Support of Management, Employees, and Relevant Stakeholders to Company Responsibilities for Fair Operations

Direksi beserta jajaran manajemen terkait senantiasa terlibat mulai dari perumusan rencana kerja, pelaksanaan program kerja tanggung jawab Perusahaan dan memastikan pelaksanaannya memenuhi aspek operasi yang adil. Indonesia Power juga melibatakan *stakeholder* relevan dalam perumusan program kerja dan rangkaian kegiatan program terkait tanggung jawab Perusahaan terkait operasi yang adil. Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan mendorong *stakeholders* untuk pencegahan penyimpangan pada aspek operasi yang adil. Unit-unit terkait dalam Perusahaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing turut serta dalam mere*view* dan meningkatkan keredibilitas inisiatif dan laporan tanggung jawab sosial Perusahaan khususnya terkait operasi yang adil.

The Board of Directors and the Management are always involved, from the formulation of the work plans to the implementation of the Corporate responsibility work program while ensuring that their implementation promotes fair operations. Indonesia Power also engages relevant stakeholders in the formulation of work programs and a series of program activities related to the Company's responsibilities related to fair operations. With its influence, Indonesia Power encourages stakeholders to prevent fraud as a representation of fair operations. The related units in the Company in accordance with their respective areas of duties and responsibilities participate in reviewing and increasing the transparency of CSR initiatives and reports, especially related to fair operations.

Manfaat Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Operasi yang Adil Bagi Perusahaan, *Stakeholders* serta Upaya Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Benefits of Corporate Responsibility for Fair Operations for Company and Stakeholders, along with the Support for Sustainable Development

Inisiatif yang telah dilakukan oleh Indonesia Power selama tahun 2021 terkait operasi yang adil diharapkan dapat memberikan manfaat bersama bagi *stakeholdes*. Bagi Indonesia Power dalam jangka pangjang untuk menjaga keberlanjutan Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham serta secara khusus atas pelaksanaan kegiatan operasional yang memperhatikan aspek operasi yang adil. Manfaat kegiatan tanggung jawab Perusahaan terkait operasi yang adil diantaranya sebagai berikut:

1. Memotivasi pegawai untuk menciptakan karya inovasi dalam rangka mendukung pengembangan Perusahaan.
2. Meningkatkan kepuasan dan engangement pegawai terhadap Perusahaan.
3. Menekan potensi munculnya tindakan korupsi kolusi dan nepotisme.
4. Mencegah tindak pelangaran kode etik dan permasalahan hukum yang dapat menggangu kinerja Perusahaan
5. Pemberdayaan produk lokal dalam kegiatan pengadaan.
6. Meningkatkan kualitas pemenuhan standar kesehatan, keselamatan dan lingkungan dalam pengadaan barang dan jasa.

Throughout 2021, Indonesia Power carried out initiatives on fair operations with the expectation of mutual benefit for stakeholders. Indonesia Power aims to maintain the Company's sustainability as a form of accountability to the Shareholders in the long term, and also specifically for operational activities relating to the aspect of fair operations. The benefits of the Company's responsibility activities related to fair operations include the following:

1. Motivating employees to create innovative work in order to support the development of the Company.
2. Increasing employee satisfaction and engagement with the Company.
3. Reducing the potential for collusion and nepotism to arise.
4. Preventing violation against the code of conduct and legal disputes that may disrupt business activities
5. Utilizing local products in the procurement.
6. Improving the quality of health, safety, and environmental standards fulfillment in goods and services procurement.

Selain itu, kegiatan tanggung jawab Perusahaan terkait operasi yang adil diharapkan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan, pekerjaan yang layak serta produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

In addition, CSR activities related to fair operations are expected to have direct and indirect positive impacts on sustainable development through partnerships, decent work, and responsible as well as sustainable production.

Sertifikasi dan Penghargaan Terkait Operasi yang Adil

Certifications and Awards Related to Fair Operations

Sepanjang tahun 2021, sertifikasi dan penghargaan tanggung jawab Perusahaan terkait operasi yang adil yang diperoleh Indonesia Power adalah sebagai berikut:

1. Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berlaku sampai dengan tahun 2023.
2. Sertifikasi ISO 28000:2007/ SNI ISO 28000:2009 Sistem Manajemen Keamanan Pada Rantai Pasokan yang berlaku sampai dengan tahun 2023.
3. Penghargaan TOP *Leader The Most Committed* GRC *Leader* 2021 di ajang TOP GRC *Awards* 2021.
4. Penghargaan *The High Performing Board of Commissioners on* GRC 2021 di ajang TOP GRC *Awards* 2021.
5. Penghargaan *Special Appreciation on Applications to support* GRC *Implementation* di ajang TOP GRC Awards 2021.

Throughout 2021, the certifications and awards for the Company's responsibilities related to fair operations brought home by Indonesia Power are as follows:

1. ISO 37001:2016 Certification for Anti-Bribery Management System, valid until 2023.
2. ISO 28000:2007/SNI ISO 28000:2009 Certification for Supply Chain Security Management System, valid until 2023.
3. TOP Leader The Most Committed GRC Leader 2021 award received in TOP GRC Awards 2021.
4. The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021 award received in TOP GRC Awards 2021.
5. Special Appreciation on Applications to support GRC Implementation award received in TOP GRC Awards 2021.



TANGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR HUMAN RIGHTS

Indonesia Power mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satu aspeknya terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, Indonesia Power menjalankan tanggung jawab sosial berlandaskan ISO 26000 dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan melalui kinerja sosial. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu dimensi penerapan tanggung jawab sosial berbasis ISO 26000. Indonesia Power menghormati HAM dan mendorong kesadaran seluruh insan Perusahaan untuk menghormati HAM dalam berinteraksi antar sesama individu, masyarakat maupun *stakeholder* lainnya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain itu, penghormatan HAM merupakan bagian dari kepatuhan insan Perusahaan terhadap Pedoman Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*).

Promoting human rights as a part of sustainable development goals, Indonesia Power develops CSR initiatives with ISO 26000 certification to improve Company performance through social aspect. The certification represent human rights-based CSR implementation. Not only acknowledging these rights, the Company encourages all its personnel to develop their awareness in upholding human rights in their interaction with each other, public, or other stakeholders on day-to-day basis. In addition, respect for human rights is a part of the corporate compliance to the Company's Code of Conduct.

Komitmen dan Kebijakan

Commitments and Policies

Tanggung jawab Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan komitmen Indonesia Power untuk mematuhi segala peraturan perundangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia menacu pada ISO 26000, ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Komitmen Perusahaan terhadap Hak Azasi Manusia menjadi bagian dalam penerapan nilai-nilai dan budaya perusahaan yang sejalan dengan kebijakan internal Perusahaan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2020-2021.
2. Pedoman Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*);
3. Surat Keputusan Direksi No. 48.K/010/IP/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Cuti Tahunan dan Cuti Besar;
4. Surat Keputusan Direksi No. 49.K/010/IP/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Cuti Sakit, Cuti Haid dan Cuti Bersalin;
5. Surat Dana Pensiun PLN Nomor 522/1.1/II/2015/PLN dan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 0149.K/DIR/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Iuran Pemberi Kerja;
6. Surat Keputusan Direksi No. 162.K/010/IP/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Tambahan Tunjangan Posisi (TTP);
7. Surat Keputusan Direksi No. 71.K/010/IP/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 162.K/010/IP/2016 tentang Tambahan Tunjangan Posisi (TTP);

CSR with respect to Human Rights is Indonesia Power's commitment to adhering to all Human Rights regulations. The implementation is based on ISO 26000 and complies with the provisions set out in Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 26 of 2000 on Human Rights Court, and Law No. 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination. The Company's commitment to Human Rights serves as a part of corporate values and culture that resonates with the Company's internal policies below:

1. 2020-2021 Collective Labor Agreement (CLA)
2. Code of Conduct,
3. Decree of the Board of Directors No. 48.K/010/IP/2010 dated May 19, 2010 on Annual Leave and Long Leave;
4. Decree of the Board of Directors No. 49.K/010/IP/2010 dated May 19, 2010 on Sick Leave, Menstrual Leave, and Maternity Leave;
5. Letter on Retirement Fund of PLN No. 522/1.1/II/2015/PLN and Decree of the Board of Directors No. 0149.K/DIR/2015 dated July 7, 2015 on Employer Contribution;
6. Decree of the Board of Directors No. 162.K/010/IP/2016 dated August 01, 2016 on Functional Allowance Supplement;
7. Decree of the Board of Directors No. 71.K/010/IP/2020 dated May 20, 2020 on Amendment to the Board of Directors Decree No. 162.K/010/IP/2016 on Functional Allowance Supplement;

Perumusan dan Perencanaan Lingkup Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

The Company's Formulation and Scope Planning of Corporate Responsibility for Human Rights

Perumusan tanggung jawab sosial perusahaan terkait Hak Asasi Manusia melalui tahapan uji tuntas dengan melakukan *review*, identifikasi dan *update* terhadap seluruh peraturan terkait Hak Asasi Manusia secara berkala dalam memastikan kecukupan kebijakan dan penerapan tanggung jawab Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia, *social mapping* untuk merumuskan dan mengenali isu penting, *stakeholder*, dampak dan risiko yang timbul dari aktivitas Perusahaan terkait Hak Asasi Manusia. Indonesia Power juga mempersipakan mekanisme penanganan keluhan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan berjalan efektif.

The formulation of corporate social responsibility for human rights is conducted through due diligence. It covers reviewing, identifying, and updating all regulations on human rights regularly to ensure the adequacy of policy and implementation of such a principle. To pursue similar purpose, social mapping is also carried out to formulate and identify key issues, stakeholders, impacts, and risks that may arise from the corporate activity in relation to human rights. Indonesia power also prepares the complaint handling mechanism for an effective CSR.

Isu Penting, Dampak dan Resiko Kegiatan dan Keputusan Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Key Issues, Activity Impacts and Risks, and Stakeholder Expectations of the Company Related to Human Rights

Isu-isu penting terkait Hak Asasi Manusia yang relevan dengan bisnis perusahaan secara umum meliputi tindakan diskriminasi, kebebasan berpendapat, remunerasi dan kelestarian lingkungan. Isu tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi *stakeholders*, dampak dan resiko dari kegiatan operasional terkait Hak Asasi Manusia yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan sebagai berikut :

Key issues on human rights relevant to the company's business in general include discrimination, freedom of expression, remuneration, and environmental sustainability. They are analyzed to identify the stakeholders, also impacts and risks of the Company's operation in connection with human rights, directly and indirectly connected to the Company as elaborated below:

Analisis Dampak, Risiko dan Tindakan Penanggulangan
Analysis of Impacts, Risks, and Countermeasures

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Tindakan diskriminasi Discrimination	• Pelanggaran kode etik Perusahaan. • Permasalahan hukum. • Menurunnya motivasi kerja. • Violation against the Code of Conduct. • Legal Issues. • Decreasing work motivation.	• Penyusun dan sosialisasi Kebijakan dan program untuk mencegak tindakan diskriminasi meliputi kode etik perusahaan; sistem palporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dan lain-lain. • Penandatanganan kepatuhan atas kode etik Perusahaan. • Penegakan dan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik Perusahaan terkait diskriminasi. • Formulating and disseminating policies and programs to prevent discrimination, among others code of conducts and whistleblowing system. • Signing of compliance with the code of conduct. • Enforcement and sanctioning for violations of the code of conduct in relation to discrimination.

TANGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR HUMAN RIGHTS

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Tidak ada kesempatan atau ruang berpendapat No opportunity or room to express opinions	• Tidak tersampaikannya aspirasi *satakeholders*. • Menurunnya motivasi kerja. • Menurunnya tingkat kepuasan stakeholder dan reputasi Perusahaan. • Undelivered stakeholder aspirations • Decreasing work motivation. • Declining stakeholder satisfaction and the Company's reputation.	• Penyediaan forum diskusi bagi *stakeholder*. • Pemanfaatan media sosial untuk penyampaian aspirasi. • Lembaga Kerjasama Bipartit. • Provision of a discussion forum for stakeholders. • Utilization of social media for conveying aspirations. • Establishment of Bipartite Cooperation Institution.
Tidak terdapat kompensasi atas hak Pegawai No compensation for personnel rights	• Menurunnya motivasi kerja. • Menurunnya kinerja dan tingkat kepuasan Pegawai. • Decreasing work motivation. • Decreasing performance and employee satisfaction levels.	• *Review* kebijakan remunerasi secara berkala. • Pemberian kompensasi yang sesuai. • Regular review of remuneration policy. • Provision of appropriate compensation.
Pencemaran Lingkungan Environmental pollution	• Menurunnya tingak kesehatan dan keselamatan *stakeholders*. • Kerusakan ekomsistem lingkungan. • Decreasing health and safety of stakeholders. • Environmental degradation.	• Pemenuhan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). • Program konservasi dan restorasi berkelanjutan. • Compliance with environmental impact assessment (EIA). • Sustainable conservation and restoration programs.

Ekspektasi dan Jangkauan Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Expectation and Scope of the Company's Influence on Human Rights

Sebagai bagian dari perumusan tanggung jawab sosial terkait Hak Asasi Manusia, Indonesia Power melakukan upaya pelibatan *stakeholders* berdasarkan lingkup pengaruh Perusahaan terkait isu Hak Asasi Manusia sebagai pengembangan dari hasil analisis isu terkait Hak Asasi Manusia. Indonesia Power melakukan identifikasi *stakeholder* penting dan harapan terhadap Perusahaan dalam menangani isu Hak Asasi Manusia tersebut sebagai berikut:

In formulating CSR practice related to this subject, Indonesia Power engages stakeholders based on the scope of Company's influence in terms of human rights after developing the analysis of this issue. Indonesia Power identifies the following key stakeholders and expectation about the Company in dealing with this issue:

Analisis *Stakholder* Penting, Ekspektasi serta Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder*

Important Stakeholder Analysis, Expectations and Handling of Issues and Stakeholder Involvement

Stakeholder Penting Key Stakeholder	Harapan Expectation	Langkah Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder* Measures in Handling Issues and Engagement of Stakeholders
Pegawai Employees	• Peningkatan kesejahteraan karyawan berupa pemenuhan hak-hak pekerja. • Peningkatkan pemberian fasilitas. • Kepedulian terhadap pegawai. • Lebih terbuka tentang informasi yang ada. • Improvement of employee welfare through fulfillment of worker's rights • Increased provision of facilities. • Concern for employees. • Improved transparency on existing information.	• Melakukan survei kepuasan Pegawai. • Melaksanakan kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit. • Mengadakan forum diskusi Pegawai seperti *Coffee Morning* dan *Team Briefing*. • Memanfaatkan media sosial dalam menjaring aspirasi. • Carrying out employee satisfaction survey. • Conducting Bipartite Cooperation Institution activities. • Holding employee discussions, such as Morning Coffee session and Team Briefing. • Utilization of social media to collect aspirations.

Stakeholder Penting Key Stakeholder	Harapan Expectation	Langkah Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder* Measures in Handling Issues and Engagement of Stakeholders
Masyarakat Community	• Bebas dari pencemaran lingkungan. • Informasi mengenai Proses pembangkitan listrik serta dampaknya terhadap lingkungan. • Siaga dan Tanggap Kondisi Darurat Bencana. • Free from environmental pollution. • Information on power generation process and its impact on environment. • Emergency Preparedness and Disaster Response.	• Mengadakan forum diskusi bagi masyarakat. • Memanfaatkan media sosial dalam menjaring aspirasi dan memberikan informasi kepada publik. • Memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan terdampak pandemi covid. • Holding a community discussion forum. • Utilizing social media as a means to collect aspirations and circulate information to the public. • Delivering aids for natural disaster victims and people impacted by the pandemic.
Pemerintah Government	• Ketaatan atau kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan terkait HAM. • Compliance with or conformance to policies and regulations on human rights	• Mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait HAM. • Compliance with human rights regulations.

Perencanaan Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Planning of Corporate Responsibility for Human Rights

Kegiatan tanggung jawab Perusahaan diharapkan mampu menciptakan manfaat bersama bagi *Stakeholder* dan Perusahaan khususnya terkait aspek Hak Asasi Manusia. Indonesia Power berupaya meminimalisir dampak operasional Perusahaan terhadap pelanggaran atas Hak Asasi Manusia melalui pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan yang dilaksanakan Perusahaan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program tanggung jawab Perusahaan, Indonesia Power turut melibatkan *stakeholder* untuk mendorong pemenuhan Hak Asasi Manusia. Indonesia Power dengan pengaruh perusahaan juga berupaya melibatkan para pihak terkait untuk mencegah segala bentuk pelanggaran terkait Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terkait aspek operasi yang adil juga menjadi sarana untuk menciptakan manfaat bersama bagi Perusahaan dan *stakeholder*. Rencana Perusahaan terkait penerapan tanggung jawab sosial terkait HAM adalah sebagai berikut:

1. Praktik Anti Diskriminasi
2. Tunjangan Posisi dan Cuti Pegawai
3. Keterbukaan Informasi
4. Pemenuhan AMDAL
5. Kebebasan Berserikat

Corporate responsibility activities are expected to create mutual benefit for the stakeholders and the Company, especially on human rights. Indonesia Power seeks to reduce the impacts of its business on human rights to minimum through CSR activities. In planning and executing these activities, the Company engages stakeholders in support of the cause. With its influence, Indonesia Power also involves related parties to prevent any violations of human rights. CSR practice on fair operations serves as a means to create mutual benefits for the Company and stakeholders. The Corporate plan regarding the implementation of social responsibility for human rights is stated below:

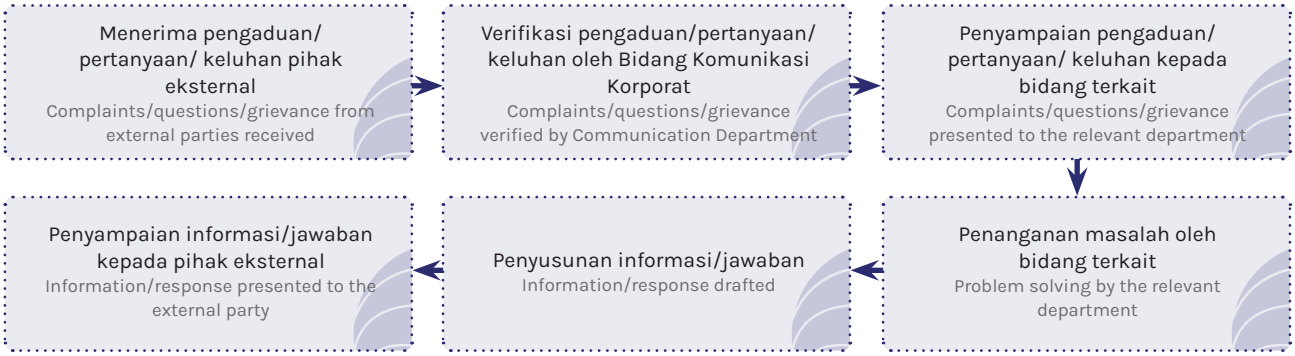
1. Anti-Discriminatory Practice
2. Functional Allowance and Employee Leave
3. Transparency of Information
4. Environmental Impact Assessment Compliance
5. Freedom of Association

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Konflik Terkait Hak Asasi Manusia

Complaint and Conflict Handling Mechanism Related to Human Rights

Indonesia Power memastikan pelaksanaan upaya pemenuhan atas Hak Asasi Manusia dengan menyediakan sarana pengaduan terhadap pelanggaran dan kinflik terkait Hak Asasi Manusia timbul berkaitan dengan kegiatan operasional Perusahaan. Pengaduan pelangaran tersebut dapat disampaikan berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan bidang terkait seperti masalah lingkungan, ketenagakerjaan, sosial kemasyarakatan, atau melalui saluran *Whistle Blowing System* (WBS). Secara umum mekanisme penanganan pengaduan dan konflik terkait Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Indonesia Power ensures the human rights are respected by providing a means for the tipping-off of violation against and conflict of human rights relating to Company's operations. Any tip-off can be submitted in accordance with proper mechanism in the related field, such as environment, employment, social, or through the Whistleblowing System (WBS). In general, the complaint and conflict handling mechanism related to this matter is outlined as follows:



Biaya Tanggung Jawab Perusahaan terkait Hak Asasi Manusia

Total Spending for CSR Programs Related to Human Rights

Biaya taggung jawab Perusahaa terkait Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Indonesia Power selama tahun 2021, mencakup Tambahan Tunjangan Posisi dan Cuti Pegawai adalah sebesar Rp 70.351,71 Juta.

Throughout 2021, the expense for CSR for human rights amounts to Rp70,351.71 million, allocated for Functional Allowance Supplement and Employee Leave.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia

Implementation of Corporate Responsibility for Human Rights

inisiatif tanggung jawab Perusahaan terkait Hak Asasi Manusia merupakan bagain dari komitmen pelaksanaan *Code of Conduct* (CoC) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Indonesia Power menuntut Insan Perusahaan untuk menerapkan prilaku yang beretika sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan salah satunya dengan menghormati Hak Asasi Manusia dalam kegiatan operasional serta interaksi dan menjaga hubungan dengan *stakeholders*.

Implementation of Corporate responsibility for human rights is a part of the commitment to implementing the Code of Conduct and Collective Labor Agreement. Indonesia Power requires its personnels to conduct ethically according to the Company values, among others by respecting human rights in every operation and interaction as well as maintaining relationship with stakeholders.

Praktik Anti Diskriminasi
Anti-Discriminatory Practice

Indonesia Power berupaya menghindari segala bentuk diskriminasi dengan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkarir, mengembangkan diri dan berkontribusi dalam membangun Indonesia Power dan penyediaan fasilitas khusus bagi difable. Selain itu, Indonesia Power juga mendukung partisipasi kerja kaum Perempuan dengan menjadikan porsi bagi kaum perempuan sebagai salah satu target kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia; menyediakan ruang laktasi bagi Ibu menyusui juga Cuti Bersalin dan Cuti Haid. Pemenuhan hak pegawai atas pekerjaan yang adil dan layak serta menghormati Hak Asasi Manusia dilaksanakan melalui program ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan Kerja. Praktik anti diskriminasi secara lebih jelas diuraikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Indonesia Power strives to avoid any kind of discrimination by creating opportunity for individuals to build their career, develop, and contribute to building the Company, also by making available special facilities for the disabled people. Moreover, Indonesia Power promotes women empowerment by taking into consideration women proportion as a performance target for human capital management and providing lactation room, maternal leave, and menstrual leave. To satisfy the rights of employees to fair and proper employment as well as to honor human rights, the Company designs employment, health, and safety programs. In terms of anti-discriminatory practice, a more elaborated explanation is presented in the Corporate Social Responsibility for Employment and Occupational Health and Safety section.

Keterbukaan Informasi
Transparency of Information

Pemenuhan hak dan kebebasan berpendapat baik bagi internal maupun pihak eksternal Perusahaan dilaksanakan melalui forum diskusi baik formal maupun informal. Indonesia Power menyediakan media komunikasi sebagai sarana diskusi antara Pegawai dengan manajemen yaitu melalui *Coffee Morning* dan *Team Briefing*. Forum Diskusi juga menjadi sarana dalam menginternalisasikan nilai-nilai Perusahaan. Selain itu, Indonesia Power juga menyadiakan akses informasi bagi publik untuk memperoleh infomasi yang bermanfaat bagi *stakeholder* baik internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan Perusahaan. Indonesia Power menyediakan akses informasi berupa *Website* Perusahaan, sosial media, Inpower Magz, Siaran Pers serta Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Statistik dan Laporan Keuangan.

Discussion forums, either formal or informal, are held to fulfill and respect the right and freedom of speech, both for internal and external parties. For instance, communication channels are introduced for discussion between employees and the Management Board, i.e. Morning Coffee session and Team Briefing. These fora also represent the internalization of Corporate Values. Furthermore, Indonesia Power provides information access for public to gain beneficial information for internal and external stakeholders in accordance with the Company's provision. The Company opens access to information through Company website, social media, Inpower Magz, press release, annual reports, sustainability reports, statistic reports, and financial reports.

Tambahan Tunjangan Posisi dan Cuti Pegawai
Functional Allowance Supplement and Employee Leave

Indonesia Power memenuhi hak pegawai atas waktu di luar jam kerja yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan dengan memberikan kompensasi apabila dalam keadaan tertentu menuntut pegawai untuk bekerja melebihi atau di luar jam kerja yang telah ditentukan dalam bentuk tambahan tunjangan posisi lembur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 162.K/010/IP/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Tambahan Tunjangan Posisi (TTP) dan Surat Keputusan Direksi

Indonesia Power respects it employee's right for time off outside their work hours. Therefore, the Company provides compensation if, in certain circumstances, an employee is required to work overtime outside the predetermined work hour. It is provided as overtime functional allowance supplement as regulated in the Decree of the Board of Directors No. 162.K/010/IP/2016 dated August 01, 2016 on Functional Allowance Supplement and Decree of the Board of Directors No. 71.K/010/IP/2020 dated May 20, 2020

TANGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR HUMAN RIGHTS

No. 71.K/010/IP/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 162.K/010/IP/2016 tentang Tambahan Tunjangan Posisi (TTP). Perusahaan juga memberikan cuti pegawai mencakup cuti tahunan dan cuti lainnya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 48.K/010/IP/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Cuti Tahunan dan Cuti Besar serta Surat Keputusan Direksi No. 49.K/010/IP/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Cuti Sakit, Cuti Haid dan Cuti Bersalin.

on Amendment to the Board of Directors Decree No. 162.K/010/IP/2016 on Functional Allowance Supplement. The Company also provides leave for employees, including annual leave and other leave as stipulated in the Board of Director's Decree No. 48.K/010/IP/2010 dated May 19, 2010 on Annual Leave and Long Leave and Decree of the Board of Directors No. 49.K/010/IP/2010 dated May 19, 2010 on Sick Leave, Menstrual Leave, and Maternity Leave.

Pemenuhan AMDAL
Environmental Impact Assessment Compliance

Indonesia Power memastikan kegiatan operasional yang aman bagi pegawai dan masyarakat disekitar wilayah pembangkit untuk menghormati hak atas kehidupan yang layak serta lingkungan yang bersih. Perusahaan berupaya melengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari kegiatan usaha yang dijalankan. Indonesia Power juga melakukan analisis SWOT untuk mengidentifikasi dampak dan tindakan penanggulangan atas potensi kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan Perusahaan.

Indonesia Power ensures safe operational activities for employees and communities surrounding the power plant to respect the right to proper living and clean environment. This is confirmed by the Environmental Impact Assessment (EIA) document which the Company strives to complement the business with. Also, Indonesia Power carries out SWOT analysis to identify the impacts and countermeasures of potential environmental damage from its business activities.

Kebebasan Berserikat
Freedom of Association

Indonesia Power menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat bagi para Pegawai. Kebebasan berserikat bagi Pegawai merupakan implementasi atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28 E ayat 3 dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ILO Convention 87 yang menjamin kebebasan semua Pegawai untuk masuk dalam organisasi pekerja yang dikelola secara professional. Dukungan kegiatan Pekerja dalam berserikat salam satunya dengan membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yaitu Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) sebagai sarana bagi pegawai untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya serta perlindungan kepada pegawai terkait Hubungan Industrial. Uraian terkait Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) secara lebih jelas diuraikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Indonesia Power ensures the freedom of association, assembly, and expression for the employees. Freedom of association is the manifestation of 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28 E paragraph 3, Law No. 13 of 2003 on Employment, and ILO Convention 87 which ensures the freedom of all employees to join a trade union. This support is among others reflected by the establishment of bipartite cooperation institution, i.e. Employee Association of PT Indonesia Power (PP IP). This is to facilitate the employees to organize and share their aspiration and to protect them concerning Industrial Relations. PP IP is further elaborated in the Corporate Social Responsibility for Employment and Occupational Health and Safety section.

Dukungan Manajemen, Pegawai dan *Stakeholders* Relevan pada Tanggung Jawab Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Support from Management, Employee, and Stakeholders for Corporate Responsibility for Human Rights

Direksi beserta jajaran manajemen terkait senantiasa terlibat mulai dari perumusan rencana kerja, pelaksanaan program kerja tanggung jawab Perusahaan dan memastikan pelaksanaannya menghormati Hak Asasi Manusia. Indonesia Power juga melibatakan *stakeholder* relevan dalam perumusan program kerja dan rangkaian kegiatan program terkait tanggung jawab Perusahaan untuk menghormati hak azasi manusia. Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan mendorong *stakeholders* untuk menghormati dan mencegah segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Unit-unit terkait dalam Perusahaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing turut serta dalam mereview dan meningkatkan keredibilitas inisiatif dan laporan tanggung jawab sosial Perusahaan khususnya terkait Hak Asasi Manusia.

The Board of Directors and the Management always engage in every existing process, from work plan formulation to implementation of Corporate responsibility work programs, and ensure that the implementation respects human rights. Additionally, Indonesia Power involves relevant stakeholders in work program formulation and a series of activities related to Corporate responsibility to respect human rights. By taking into account its influence, Indonesia Power encourages stakeholders to respect human rights and prevent any human rights violation. Relevant units within the Company, with their respective duties and responsibilities, also participate in reviewing and improving the credibility of CSR initiatives and reports, especially concerning human rights.

Manfaat Tangguang Jawab Perusahaan Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Perusahaan, *Stakeholder* serta Upaya Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Benefits of Corporate Responsibility for Human Rights for the Company, Stakeholders, and Support for Sustainable Development

Inisiatif yang telah dilakukan oleh Indonesia Power terkait Hak Asasi Manusia diharapkan memberikan manfaat bersama bagi stakeholdes. Bagi Indonesia Power dalam jangka panjang dapat menjaga keberlanjutan Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham serta secara khusus atas pelaksanaan kegiatan operasional yang memperhatikan dan menghormati Hak Asasi Manusia. Manfaat kegiatan tanggung jawab Perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatakan reputasi Perusahan di mata para pemangku kepentingan.
2. Mengurangi beban biaya sebagai hasil dari pencegahan kemungkinan terjadinya risiko terkait Hak Asasi Manusia, baik internal maupun eksternal Perusahaan.
3. Meningkatkan motivasi dan engangement Pegawai di lingkungan kerja.

Indonesia Power expects that its initiatives on human rights can present mutual benefit for stakeholders. In a long term, Indonesia Power looks forward to maintaining the Company's sustainability as its accountability to the Shareholders, especially through the implementation of operational activities that address and respect human rights. Below are the benefits of Corporate responsibility for human rights:

1. Improving the Company reputation before the stakeholders.
2. Reducing cost due to the prevention of risks related to human rights, both internally and externally.
3. Increasing employee motivation and engagement in work environment.

TANGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERKAIT HAK ASASI MANUSIA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR HUMAN RIGHTS

Selain itu, kegiatan tanggung jawab Perusahaan terkait HAM diharapkan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan berkelanjutan melalui produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Furthermore, the CSR activities related to human rights are expected to have both direct and indirect positive impacts for sustainable development through responsible and sustainable production.



Penghargaan Terkait Hak Asasi Manusia
Human Rights Award

Sepanjang tahun 2021, penghargaan terkait tanggung jawab Perusahaan terkait HAM yang diperoleh Indonesia Power diantaranya:

1. Penghargaan Indonesia *Sustainable Development Goals Award* (ISDA) 2021 Kategori *Gold* untuk pencapaian SDG's 3.3 – Bali PGU.
2. Penghargaan Indonesia *Sustainable Development Goals Award* (ISDA) 2021 Kategori *Gold* untuk pencapaian SDG's 11.7 – Priok POMU.

Throughout 2021, Indonesia Power received the following awards on corporate responsibility for human rights.

1. Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2021 in Gold Category for SDG's 3.3 Achievement – Bali PGU.
2. Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2021 in Gold Category for SDG's 11.7 Achievement – Priok POMU.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

Terjaganya kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi tantangan bagi Indonesia Power dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dalam menjaga keberlangsungan jangka panjang (*sustainable*) kegiatan usaha yang dijalankan dan memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*, mendorong Indonesia Power untuk terus membangun bisnis yang ramah lingkungan dan menjalankan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sebagai dukungan atas upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan menjadi bagian dari *Strategic Initiatives* (SI) yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang 2020 – 2024. Hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab Indonesia Power kepada *stakeholders* untuk menjaga dan membangun pondasi dalam mencipatakan manfaat bersama di masa depan.

Maintaining good environmental quality has been a challenge for Indonesia Power in conducting business activities. With awareness of the importance of environmental sustainability to ensure sustainability of current business activities and give added value to stakeholders, Indonesia Power aims to continuously grow an environmentally friendly business and carry out CSR for environment to conserve nature. Thus, CSR for environment is part of the Strategic Initiatives (SI) outlined in the Company's 2020-2024 Long Term Plan. This action demonstrates Indonesia Power's responsibility to stakeholders for protecting and building foundation for mutual benefits in the future.

Komitmen dan Kebijakan

Commitments and Policies

Indonesia Power telah mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan sesuai standar nasional dan internasional (SNI ISO 14001:2015) serta mematuhi peraturan dan ketentuan Rencana Pengelolaan/ Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL/RPL) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi dan Daerah yang harus dipenuhi oleh masing-masing Unit dalam kegiatan operasional yang dijalankan. Perusahaan juga telah memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan izin-izin pengelolaan lingkungan. Hal tersebut merupakan wujud komitmen Indonesia Power terhadap penurunan dampak kerusakan dan risiko lingkungan, penghematan pemakaian sumber daya energi dan sumber daya alam lainnya serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

At Indonesia Power, each unit has implemented environmental management system according to national and international standards (SNI ISO 14001:2015) and complied with Environment Management/Monitoring Plan (RKL/RPL) developed by the Ministry of Environment (KLH) as well as Provincial and Regional Environmental Office (DLH) in its operational activities. Also, the Company has prepared environmental impact analysis (EIA) document and secured environmental management licenses. They are the embodiment of Indonesia Power's commitment to mitigating the impacts of environmental damage and risks, saving energy resources and other natural resources, as well as improving environmental quality in a sustainable manner.

Landasan tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan hidup atas dampak dari kegiatan operasional Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indonesia Power juga telah menetapkan kebijakan internal Perusahaan terkait tanggung jawab sosial Perusahaan bidang lingkungan hidup yang diatur dalam:

1. Keputusan Direksi Nomor 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power.

The Company takes responsibility for the environment against the impacts of its operations on the basis of Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 on the Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 22 of 2021 on Implementation of Environmental Protection and Management. Indonesia Power has also specified its internal policies on CSR for environment as regulated in:

1. Decree of the Board of Directors No. 41.K/010/IP/2012 on Occupational and Environmental Safety and Health Policy in PT Indonesia Power.

2. Keputusan Direksi Nomor 152.K/010/IP/2014 tentang Pengelolaan Limbah di Lingkungan Perusahaan.
3. Keputusan Direksi Nomor 249.K/010/IP/2015 tentang Pedoman Penerapan Green Power Plant di Lingkungan PT Indonesia Power.
4. Keputusan Direksi Nomor 73.K/010/IP/2016 tentang Pengelolaan Limbah Unit Jasa Pembangkitan PLTU Batubara FTP-1 Jawa.
5. Keputusan Direksi Nomor 211.K/010/IP/2016 tentang Komitmen Menjaga Ekosistem dan Pelestarian dalam Menjaga Keberlanjutan Planet di PT Indonesia Power.
6. Keputusan Direksi Nomor 224.K/010/IP/2017 tentang Pengelolaan Sedimen Di Lingkungan PT Indonesia Power.
7. Keputusan Direksi Nomor 191.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Limbah di Lingkungan PT Indonesia Power.
8. Keputusan Direksi Nomor 55.K/020/IP/2019 tentang Tim Percepatan perolehan Ijin Pemanfaatan Limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) di PT Indonesia Power.
9. Edaran Dieksi Nomor 10.E/012/IP/2021 tentang Pedoman Manajemen Efisiensi Listrik Pembangkit *Thermal* di Lingkungan PT Indonesia Power.
10. Kebijakan *Integrated Management System* (IMS) PT Indonesia Power tahun 2020.

2. Decree of the Board of Directors No. 152.K/010/IP/2014 on Waste Management in PT Indonesia Power.
3. Decree of the Board of Directors No. 249.K/010/IP/2015 on Green Power Plant Implementation Guideline in PT Indonesia Power.
4. Decree of the Board of Directors No. 73.K/010/IP/2016 on Waste Management in Coal-Fired SPP FTP-1 Java OMU.
5. Decree of the Board of Directors No. 211.K/010/IP/2016 on the Commitment to Preserving Ecosystem and Environment to Maintain the Planet's Sustainability in PT Indonesia Power.
6. Decree of the Board of Directors No. 224.K/010/IP/2017 on Sediment Management in PT Indonesia Power.
7. Decree of the Board of Directors No. 191.K/010/IP/2019 on Waste Management in PT Indonesia Power.
8. Decree of the Board of Directors No. 55.K/020/IP/2019 on the Team for Accelerated License Acquisition for Fly Ash and Bottom Ash (FABA) Utilization in PT Indonesia Power.
9. Circular Letter of the Board of Directors No. 10.E/012/IP/2021 on Guideline for Management of Thermal Power Plant Electricity Efficiency in PT Indonesia Power.
10. 2020 Integrated Management System (IMS) policy of PT Indonesia Power.

Perumusan dan Rencana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup

Formulation and Plan of Corporate Social Responsibility for Environment

Indonesia Power telah melakukan pemetaan sosial untuk mengenali dan merumuskan *stakeholder* penting dan tanggung jawab sosial Perusahaan bidang lingkungan hidup serta menetapkan strategi Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan analisis SWOT yaitu meningkatkan ketersediaan, keandalan dan efisiensi thermal pembangkit yang dikelola dan ramah lingkungan (*Green Power Plant*). Selian itu, perumusan tanggung jawab sosial Indonesia Power terhadap lingkungan juga melalui uji tuntas dengan melakukan *review*, identifikasi dan update terhadap seluruh peraturan terkait lingkungan; analisis isu penting, dampak dan risiko dari kegiatan Perusahaan; ekspektasi *stakholders* yang terkait dengan aspek lingkungan yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun dalam memastikan kecukupan kebijakan dan penerapan tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan. Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan terhadap *stakeholders* juga melibatakan *stakeholder* relevan dalam perumusan program kerja terkait tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan.

Indonesia Power has performed social mapping to identify and formulate key stakeholders and CSR for environment as well as prepared Company's strategies for environmental management based on SWOT analysis, i.e increasing thermal availability, reliability and efficiency of the Green Power Plant. Furthermore, Indonesia Power has exercised due diligence in formulating social responsibility for environment by reviewing, identifying and updating all environmental regulations; analysis of key issues, impacts and risks of Company's activities; expectations of the stakeholders related to environmental aspects reviewed annually to ensure the adequacy of the Company's policies and responsibility for the environment. Taking into account its influence over the stakeholders, Indonesia Power also engages relevant stakeholders in the formulation of work programs related to the corporate responsibilities for the environment.

Isu Penting, Dampak dan Resiko Kegiatan dan Keputusan Perusahaan Terhadap Lingkungan yang Terkait Secara Langsung atau Tidak Langsung dengan Perusahaan

Key Issues, Impacts, and Risks of Corporate Activities and Decisions towards the Environment Directly and Indirectly Related to the Company

Isu-isu penting terkait lingkungan yang relevan dengan bisnis perusahaan secara umum meliputi pencemaran udara, pemcemaran air, pencemaran limbah B3 dan non B3 serta keanekaragaman hayati. Isu tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi dampak dan resiko dari kegiatan operasional terhadap lingkungan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan diantaranya pembakaran bahan bakar fosil pembangkit, operasional siklus uap air pembangkit, penggunaan B3 untuk pengendalian operasional pembangkit, timbulan limbah non B3 dari operasional dan perkantoran, serta pembuangan air pendingin kondensor ke laut sebagai berikut :

In general, key environmental issues relevant to the Company's business comprise air pollution, water pollution, hazardous and toxic waste pollution, non-hazardous and non-toxic waste pollution, and biodiversity. They are analyzed to identify the impact and risks of the Company's operation to the environment, either directly or indirectly related to the Company, including combustion of fossil fuel by power plants, the use of hazardous and toxic materials for power plant operation control, non-hazardous and non-toxic waste generation from business operations and office building, as well as disposal of condenser-cooling water at sea. This analysis involves;

Analisis Dampak, Risiko dan Tindakan Penanggulangan

Analysis of Impacts, Risks, and Countermeasures

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Pencemaran Udara Air Pollution	• Perubahan dan pencemaran Kualitas Udara Ambient. • Gangguan kesehatan masyarakat dan tenaga kerja di lingkungan pembangkit. • Pemanasan Global. • Ambient Air Quality change and pollution. • Community and employee health issue at the power plant environment. • Global Warming.	• Pengendalian operasi dan pengendalian baku mutu emisi. • Pemantauan emisi gas buang secara *continue* melalui CEMS (*Continuous Emission Monitoring System*) dan periodik melalui pemantauan laboratorium akreditasi. • Pengendalian kualitas bahan baku/bahan bakar batubara yang masuk ke dalam pembakaran boiler melalui proses pencampuran/*mixing*/*blending* batubara. • Kajian perencanaan investasi dan pemasangan alat pengendali emisi terhadap unit yang memiliki potensi ketidaktaatan dalam pemenuhan baku mutu emisi. • Peningkatan peluang inovasi pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pengembangan teknologi yang menghasilkan efisiensi energi secara continue di seluruh Unit. • Operation and emission quality standard controls. • Continuous monitoring of exhaust gas emission via CEMS (Continuous Emission Monitoring System) and periodic monitoring through laboratory accreditation monitoring. • Controlling the quality of coal in coal mixing/blending to be used as raw material/fuel in boiler combustion. • Review of investment plan and installation of emission control technology in units with potential negligence in meeting emission quality standards. • Increase in innovation opportunities for development of New & Renewable Energy Power Plants and technologies that promotes continuous energy efficiency in all Units.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Pencemaran Air Water Pollution	• Berkurangnya ketersediaan air bersih. • Perubahan kualitas air dan Kerusakan ekosistem air. • Gangguan kesehatan masyarakat dan tenaga kerja di lingkungan pembangkit. • Lack of clean water. • Changes in water quality and aquatic ecosystem damage. • Community and employee health issue at the power plant environment.	• Pengendalian operasi dan pengelolaan limbah cair. • Pemantauan secara rutin baku mutu limbah cair. • Operation control and liquid waste management. • Regular monitoring of liquid waste quality standard.
Pencemaran Limbah B3 Hazardous and Toxic Waste Pollution	• Kerusakan ekositem dan pencemaran di lingkungan pembangkit. • Gangguan kesehatan masyarakat dan tenaga kerja di lingkungan pembangkit. • Ecosystem damage in the power plant environment. • Community and employee health issue at the power plant environment.	• Pengelolaan limbah B3 sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalam izin maupun sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Upaya 3R limbah B3 dilakukan melalui pengurangan limbah B3 yang dihasilkan . • Management of hazardous and toxic waste pursuant to the terms and conditions in the license or to the applicable regulations. • Efforts to reduce, reuse and recycle (3R) hazardous and toxic waste through waste reduction.
Tidak terkelolanya Limbah Non B3 Unmanaged non-hazardous and non-toxic waste	• *House keeping*/ kebersihan tidak terjaga. • Ketidaksesuaian pengelolaan Limbah Non B3. • Failure to maintain housekeeping/cleanliness. • Inconsistency in Non-Hazardous and Non-Toxic Waste Management	• Upaya pengelolaan dan 3R Limbah Non B3 kerjasama dengan lembaga dan masyarakat sekitar. • Management and 3R of non-hazardous and non-toxic waste in collaboration with other institutions and local community.
Pencemaran habitat sekitar Pollution in surrounding areas	• Kerusakan ekosistem laut dan habitat terumbu karang. • Damage to marine ecosystem and coral reef habitat	• Pengendalian temperatur operasional. • Pemantauan dan pengukuran secara rutin sesuai pemenuhan baku mutu. • Konservasi mangrove dan terumbu karang. • Control over operating temperature. • Regular monitoring and measurement according to quality standard. • Conservation of mangrove and coral reef.
Keanekaragaman Hayati Biodiversity	• Berkurangnya populasi yang mengancam kepunahan spesies tertentu. • Kerusakan ekositem di lingkungan pembangkit. • Declining population of certain species that may lead to their extinction. • Ecosystem damage in the power plant environment.	• Program konservasi dan restorasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Unit Pembangkit bekerjasama dengan Balai Konservasi, Taman Nasional, Dinas Lingkungan Hidup atau instansi setempat. • Continuous conservation and restoration program conducted by Power Generation Units in collaboration with Conservation Centers, National Parks, Environmental Offices, or local institutions.

Ekspektasi dan Jangkauan Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Isu Bidang Lingkungan pada *Stakeholder*

Expectation and Scope of Company's Influence Related to Environmental Issues on Stakeholders

Sebagai bagian dari perumusan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, Indonesia Power melakukan upaya pelibatan berdasarkan lingkup pengaruh Perusahaan terkait isu bidang lingkungan sebagai pengembangan dari hasil analisis isu terkait lingkungan. Indonesia Power melakukan identifikasi *stakeholder* penting dan harapan terhadap Perusahaan dalam menangani isu lingkungan tersebut sebagai berikut:

In formulation of CSR practice for the environment, Indonesia Power engages stakeholders based on the Company's scope of influence in terms of environmental issues after developing the analysis as mentioned above. Indonesia Power identifies key stakeholders as well as their expectations in dealing with these environmental issues:

Analisis Dampak, Risiko dan Tindakan Penanggulangan

Analysis of Key Stakeholders, Expectations, Handling of Issues, and Engagement of Stakeholders

Stakeholder Penting Key Stakeholder	Harapan Expectation	Langkah Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder* Measures in Handling Issues and Engagement of Stakeholders
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ministry of Environment and Forestry (KLHK)	• Ketaatan pemenuhan Laporan dan Peraturan. • Pengajuan dan perpanjangan Izin-izin pengelolaan Lingkungan. • Compliance with reporting obligation and regulations. • Application and renewal of environmental management license.	• Melakukan kerjasama, sosialisasi dan diskusi ketentuan teknis pengelolaan Lingkungan untuk memenuhi kewajiban pengelolaan Lingkungan dan Pelaporan rutin pengelolaan Lingkungan. • Cooperation, outreach program, and discussion on technical provisions for environmental management to comply with environmental management obligations and regular environmental management reporting.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten dan Provinsi District and Provincial Environmental and Forestry Office (DLHK)	• Ketaatan pemenuhan Laporan dan Peraturan. • Pengajuan dan perpanjangan Izin-izin pengelolaan Lingkungan. • Compliance with reporting obligation and regulations. • Application and renewal of environmental management license.	• Kerjasama dalam pengukuran dan pemantauan lingkungan guna pemenuhan Pelaporan rutin pengelolaan Lingkungan. • Cooperation on environmental measurement and monitoring for regular environmental management reporting.
Masyarakat Community	• Operasional Pembangkit tidak mencemari Lingkungan dan tidak mengganggu masyarakat. • Safe plant operations for environment and community.	• Pemberdayaan masyarakat sekitar melalui program CSR dan COMDEV. • Kerjasama *project* dan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan atau pengelolaan sampah (3R sampah). • Empowerment of local community through CSR and COMDEV programs. • Project collaboration and community engagement in waste utilization or management (3R/Reduce, Reuse, Recycle).
Vendor	• Hubungan kerjasama yang Berkelanjutan. • Keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk memenuhi standar lingkungan dalam kegiatan Pengadaan • Ongoing collaboration. • Openness and accessibility of information to meet environmental standards for Procurement activities	• Pembatasan parameter bahan bakar untuk mengendalikan dan menurunkan Emisi. • Program penggantian bahan bakar Minyak menjadi Gas untuk menurunkan Emisi pembangkit. • Memberikan informasi yang jelas dan transparan dalam proses pengadaan terkait dengan pemenuhan standar lingkungan hidup. • Restriction of fuel parameters to control and reduce emissions. • Replacement of fuel oil with gas to reduce plant emissions. • Provision of clear and transparent information in the procurement process in relation to fulfillment of environmental standards.

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial terkait Lingkungan Hidup

Action Plan of Corporate Social Responsibility for Environment

Rencana kegiatan tanggung jawab sosial terkait lingkungan disusun berdasarkan hasil analisis isu, dampak dan risiko serta pendekatan dan pelibatan *stakeholder* dalam perumusan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup. Indonesia Power berupaya menurunkan dampak pada lingkungan salah satunya melalui kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan yang dilaksanakan Perusahaan. Sehingga kegiatan kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan diharapkan mampu menciptakan manfaat bersama bagi *Stakeholder* dan Perusahaan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program tanggung jawab Perusahaan, Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan berupaya melibatkan dan mendorong pemasok, pelanggan dan pihak terkait untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan dalam mencegah penurunan dan melakukan perbaikan lingkungan hidup. Rencana program kerja tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan terdiri dari pemeliharaan lingkungan, dokumentasi lingkungan, pemantauan lingkungan, pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan instalasi/ alat pengelolaan lingkungan yang mencakup program kepatuhan pengelolaan lingkungan meliputi monitoring dan pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi, capacity building dan evaluasi kepatuhan regulasi, *monitoring* PROPER *beyond compliance, capacity building* dan evaluasi *beyond compliance,* digitalisasi *monitoring* pengelolaan dan ketaatan lingkungan seluruh unit serta sentralisasi data base pengelolaan lingkungan korporat dan implementasi program pengelolaan lingkungan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengelolaan Emisi Udara,
2. Implementasi Pengelolaan Limbah,
3. Implementasi Konservasi Air,
4. Implementasi Efisiensi Energi,
5. Implementasi Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan (*Green Power Plant*),
6. Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML),
7. Implementasi Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Program Penghijauan,
8. Implementasi Penilaian Daur Hidup / *Life Cycle Analysis* (LCA), dan
9. Implementasi Program Lingkungan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs).

The action plan for CSR for environment is prepared by taking into account the analysis result of the issues, impacts and risks, as well as approach to and engagement of the stakeholders in the formulation of CSR for environment. Indonesia Power seeks to reduce impacts on environment. One of which is through CSR activities, which is expected to offer mutual benefits for the Stakeholders and the Company. In the preparation of the plan and implementation of this program, Indonesia Power, by taking into account its influence, seeks to engage suppliers, customers and relevant parties to promote effective implementation of CSR for environment in preventing reduction and restoring the environment. To fulfill its environmental responsibility, the Company's work plan for 2021 comprised environmental preservation/maintenance, environmental documentation, environmental monitoring, environmental management and maintenance of environmental management installations/ tools which include environmental management compliance programs including monitoring and compliance with regulations, capacity building and evaluation of regulatory compliance, PROPER beyond compliance monitoring, capacity building and beyond compliance evaluation, digitalization of monitoring of environmental management and compliance in all units as well as centralization of the Company's environmental management database. In addition, there are also activities conducted related to the implementation of environmental management programs which include:

1. Implementation of Air Emission Management,
2. Implementation of Waste Management,
3. Implementation of Water Conservation,
4. Implementation of Energy Efficiency,
5. Implementation of Green Power Plant,
6. Implementation of Environmental Management System (SML),
7. Implementation of Biodiversity Conservation and Greening Program,
8. Implementation of Life Cycle Analysis (LCA), and
9. Implementation of Environmental Program for Sustainable Development Goals (SDGs).

Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan

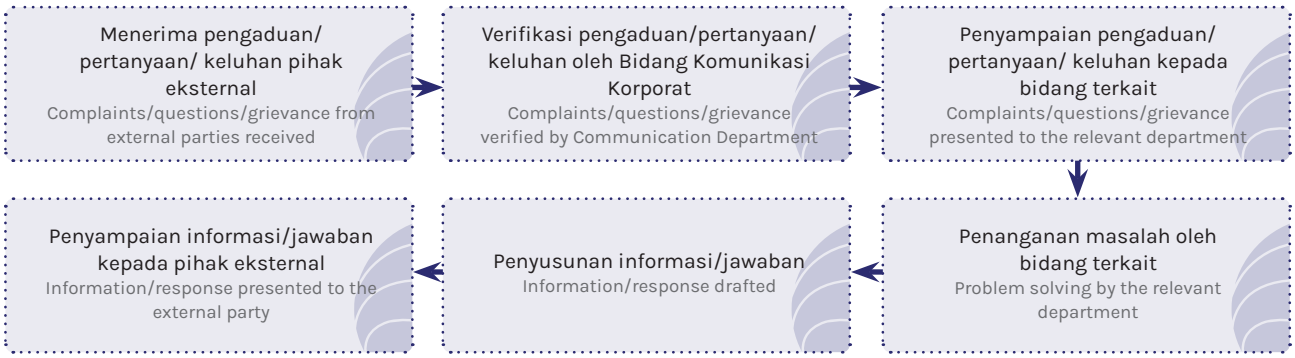
Mechanism of Complaint about Environmental Issue

Indonesia Power menyiapkan perangkat penunjang pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan dengan menyediakan mekanisme pelaporan pengaduan dan penanganan konflik terkait

To support implementation of Company's responsibility program, Indonesia Power prepares mechanisms to report complaints and handle conflicts related to the environment that may arise as a

lingkungan yang mungkin timbul sebagai dampak dari kegiatan operasional Perusahaan. Pengaduan masalah lingkungan tersebut disampaikan kepada Unit Pembangkit terkait yang ditujukan kepada General Manager masing-masing unit.

result of the Company's operational activities. Complaints can be filed to the corresponding Power Plants and addressed to the General manager of the unit.



Biaya Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Expense

Biaya pengelolaan lingkungan Indonesia Power tahun 2021 adalah Rp93.317,94 juta dengan rincian sebagai berikut:

In 2021, Indonesia Power spent Rp93,317.94 million for environmental management as detailed below:

Biaya Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan
Environmental Management and Preservation Expense

Program Pengelolaan Management Program	Biaya (Rp. Juta) Expense (Million Rp)
Pemeliharaan Lingkungan Environmental Maintenance	7.150,22
Dokumentasi Lingkungan Environmental Documentation	5.139,40
Pemantauan Lingkungan Environmental Monitoring	16.972,01
Pengelolaan Lingkungan Environmental Management	47.939,71
Pemeliharaan Instalasi/ Alat Pengelolaan Lingkungan Maintenance of Environmental Management Installations/Tools	16.116,60

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup
Realization of Corporate Social Responsibility for Environment

Kinerja lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi dan wujud kesungguhan Perusahaan untuk berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut menjadi perhatian Direksi sebagai manajemen puncak tidak hanya terkait aspek kepatuhan namun juga dalam rangka menjaga keberlanjutan Perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang lingkungan tidak

Corporate environmental performance is critical not only to show compliance with the regulations but also to demonstrate Company's commitment to take an active role in preserving the environment. This is certainly a concern to the Board of Directors as top management, both in achieving these performance indicators and maintaining the Company's sustainability. In the implementation of environmental CSR program, employees also

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

terlepas dari peran pegawai untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu memenuhi harapan *stakeholder* khususnya terkait lingkungan. Selain itu, Indonesia Power melibatkan *stakeholder* penting untuk mendukung efektifitas pelaksanaan program pengelolaan lingkungan.

play a significant role in ensuring that all activities are conducted while meeting stakeholders' expectations, particularly related to the environmental aspect. In addition, Indonesia Power engages key stakeholders to improve the effectiveness of environmental management program implementation.

Program Kepatuhan Pengelolaan Lingkungan
Environmental Management Compliance Program

Program Kepatuhan terhadap pengelolaan lingkungan merupakan kegiatan pendampingan dan pemantauan secara rutin untuk memastikan kepatuhan Indonesia Power terhadap pengelolaan lingkungan melalui:

This is a regular assisting and monitoring program to ensure Indonesia Power's compliance with environmental management through:

Program Kegiatan Program	Realisasi Kegiatan	Realization
Monitoring dan Pemenuhan Kepatuhan terhadap Regulasi Monitoring and Compliance with Regulations	• *Video Conference* progres kemajuan Penaatan Pengelolaan Lingkungan dan PROPER Biru setiap bulan. • Pendampingan dan implementasi integrasi *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) ke SISPEK KLHK.	• Monthly Video Conference to report progress made in Structuring the Environmental Management as well as Meeting Blue PROPER Qualifications. • Providing assistance during and implementation of Continuous Emission Monitoring System (CEMS) and SISPEK KLKH integration.
Capacity Building dan Evaluasi Kepatuhan Regulasi Capacity Building and Regulatory Compliance Evaluation	• *Review*, Verifikasi Dokumen dan *Self Assessment* Lapangan PROPER Biru. • Pelatihan dan Sertifikasi Lingkungan. • *Forum Group Discussion* (FGD) isu lingkungan.	• Review and Verification of Documents as well as Field Self-Assessment for obtaining Blue PROPER rating. • Environmental Training & Certification. • Forum Group Discussion (FGD) on environmental issues.
Monitoring PROPER *Beyond Compliance*	• *Video Conference* progres kemajuan PROPER Hijau dan Emas setiap bulan.	• Monthly Video Conference to report progress made in the achievement of Green and Gold PROPER.
Capacity Building dan Evaluasi *Beyond Compliance* Capacity Building dan Evaluasi Beyond Compliance	• *Workshop* evaluasi serta penyusunan dokumen LCA dan dokumen PROPER *Beyond Complience*. • Penyusunan Buku ISBN Data Kinerja Pengelolaan Lingkungan.	• Workshop to evaluate and draft LCA documents and PROPER Beyond Compliance documents. • Drafting a Book that comes complete with its ISBN about Data on Environmental Management Performance.
Digitalisasi monitoring Pengelolaan dan Ketaatan Lingkungan Seluruh Unit serta Sentralisasi data base pengelolaan Lingkungan Korporat. Digitalization of the monitoring of Environmental Management and Compliance in All Units as well as Centralization of Corporate Environmental management database.	• Pembuatan Aplikasi "*Environment Data Monitoring System* (EDMOS)" untuk *monitoring* data dan dokumen lingkungan.	• Development of "Environment Data Monitoring System (EDMOS)" Application to monitor data and documents about the environment.

Implementasi Pengelolaan Emisi Udara

Implementation of Air Emission Management

Indonesia Power melakukan pemantauan dan pengukuran serta pengendalian proses agar seluruh emisi gas buang yang dikeluarkan oleh Unit Pembangkitan yang dikelola memenuhi baku mutu Lingkungan. Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan emisi udara oleh indonesia Power selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Indonesia Power monitors, measures, and controls every process so that the exhaust gas emissions of all its Power Generation Units meet the Environmental quality standards. To manage air emission, Indonesia Power engaged in the following activities throughout 2021:

Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Inventory of Greenhouse Gas Emissions (GGE)

Indonesia Power melakukan penghitungan inventarisasi emisi gas rumah kaca dalam rangka memenuhi kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional serta ketentuan baku mutu emisi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. Inventarisasi emisi gas rumah kaca dilakukan secara rutin, meliputi seluruh emisi CO_2, CH_4, dan N_2O dari sumber konsumsi bahan bakar operasional pembangkit, bahan bakar kendaraan operasional, dan konsumsi listrik eksternal.

Indonesia Power inventories greenhouse gas emissions to comply with Presidential Regulation Number 61 of 2011 dated September 20, 2011 on the National Action Plan of Greenhouse Gas Emissions Reduction, Presidential Regulation Number 71 of 2011 dated October 5, 2011 on the Compilation of Inventory of the National Greenhouse Gas Emissions as well as emission quality standard provision in accordance with the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 on Emissions Standard of Thermal Power Plants. This inventory is compiled regularly, and it includes all emissions of CO_2, CH_4, and N_2O from the consumption of fuel for the generators and operational vehicles, as well as external power consumption.

Hasil penghitungan inventarisasi gas rumah kaca pada tahun 2021 adalah 62.357.877,69 ton CO_2e atau meningkat 4,35% dibanding tahun 2020 sebesar 59.760.183,98 ton CO_2e. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya produksi dari PLTU batubara serta adanya peningkatan penggunaan HSD di PLTGU Priok, Grati dan Semarang.

The greenhouse gas emission of 2021 was measured at 62,357,877.69 tons CO_2e or 4.35% higher than that of 2020, i.e. 59,760,183.98 tons CO_2e. This increase is due to an increased production in coal-fired SPPs as well as an increasing use of HSD at CCPP Priok, Grati, and Semarang.

Program Verifikasi dan Sertifikasi Data *Base Line* Emisi GRK

GGE Base Line Data Verification and Certification Program

Program Verifikasi dan Sertifikasi Data Base Line Emisi GRK dilakukan dengan menghitung rasio intensitas emisi GRK menggunakan denominator total produksi bruto pembangkit thermal sebagai faktor yang paling relevan dan menggunakan tahun 2012 sebagai tahun dasar perhitungannya. Intensitas emisi GRK yang merupakan parameter untuk mengetahui total beban emisi GRK untuk setiap produksi tenaga listrik, agar diketahui tingkat reduksi emisi GRK. Rasio intensitas emisi GRK Perusahaan tahun 2021 sebesar 0,86 kg CO_2e/kWh, meningkat 3,35% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,83 kg CO_2e/kWh. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya produksi dari PLTU batubara serta adanya peningkatan penggunaan HSD di PLTGU Priok, Grati dan Semarang.

This program is conducted by calculating the intensity ratio of GGE using the denominator of total gross production of all thermal power plants as the most relevant factor with 2012 as the base year of calculation. GGE intensity is a parameter used to show the total GGE for every power generation, allowing the Company to keep track of GGE reduction levels. The Company' GGE intensity ratio in 2021 was 0.86 kg CO_2e/kWh, increasing by 3.35% from 0.83 kg CO_2e/kWh in 2020. This increase is due to an increased production in coal-fired SPPs as well as an increasing use of HSD at CCPP Priok, Grati, and Semarang.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

Inventarisasi dan Intensitas Emisi Gas Buang
Inventory and Intensity of Exhaust Gas Emissions

Indonesia Power secara konsisten melakukan monitoring pengendalian emisi melalui pemasangan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS) yang terintegrasi ke Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Inventarisasi Emisi Gas Buang merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban penghitungan beban emisi gas buang yang dihasilkan oleh cerobong pembangkit sebagai bentuk kepatuhan terhadap penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal. Emisi gas buang yang dihasilkan Indonesia Power pada tahun 2021 adalah sebesar 329.796.878,26 kg/tahun, meningkat 104,26% dibandingkan tahun 2020 sebesar 161.458.798,07 kg/tahun.

Indonesia Power consistently monitors emission control by installing Continuous Emission Monitoring System (CEMS) integrated into the Continuous Industrial Emission Monitoring Information System (SISPEK) of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Making Exhaust Gas Emissions Inventory is one of the Company's obligations to measure load of exhaust gas emissions discharged through the plants' flue as mandated by the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 on Quality Standard of Thermal Power Plant Emission. In 2021, Indonesia Power emitted 329,796,878.26 kg/year of exhaust gas, increasing by 104.26% from 161,458,798.07 kg/year in 2020.

Indonesia Power juga melakukan penghitungan intensitas beban emisi gas buang untuk melihat tingkat kontribusi beban emisi gas buang yang dihasilkan dari pembangkit Perusahaa. Penghitungan intensitas beban emisi gas buang menggunakan denominator jumlah produksi listrik bruto seluruh pembangkit thermal sebagai faktor yang paling relevan. Jenis emisi yang termasuk dalam perhitungan terdiri dari CO, SO_2, NO, NO_x dan NO_2. Rasio intensitas beban emisi gas buang Perusahaan tahun 2021 adalah sebesar 0,0045 kg/kWh, meningkat 102,31% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,0022 kg/kWh.

In addition, Indonesia Power also measures the intensity of exhaust gas emission load in order to observe the contribution of such emission from the generator units. For the measurement, gross electricity production of all thermal plants is considered as the most relevant factor to be used as denominator. The emissions measured consist of CO, SO2, NO, NOX and NO2. The Company's intensity ratio of exhaust gas emission in 2021 was 0.0045 kg/kWh, indicating a 102.31% increase from 0.0022 kg/kWh in 2020.

Kenaikan ini dikarenakan adanya normalisasi dan perbaikan CEMS di Unit PLTU Palabuhan Ratu, PLTU Suralaya, PLTGU Priok dan PLTGU Grati yang menyebabkan ketersediaan Data Emisi lebih lengkap dan perhitungan Beban Emisi menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Upaya perbaikan CEMS seluruh Unit ini dilakukan sebagai persiapan Kewajiban Integrasi CEMS ke SISPEK KLHK di tahun 2021.

This increase is due to normalization and maintenance of CEMS at SPP Palabuhan Ratu, SPP Suralaya, CCPP Priok and CCPP Grati which allow more Emission Data to be available, making Emission Load higher than it was a year before. CEMS maintenance in all Units is part of the preparation for fulfilling CEMS-SISPEK KLHK Integration Obligation in 2021.

Program Inisiatif Penurunan Emisi dan Bahan Perusak Ozon
Emission and Ozone-Depleting Substance (ODS) Reduction Initiative

Selama tahun 2021, Indonesia Power melaksanakan program inisiatif penurunan emisi dan berhasil mencatatkan penurunan pencemaran udara sebesar 9.766.618,91 ton Co_2e meningkat 88,30% dari tahun 2020 yaitu sebesar 5.186.782,73 ton Co_2e. Hal tersebut merupakan hasil program inisiatif penurunan emisi sebagai berikut:

- Memprioritaskan pengembangan energi baru dan terbarukan;
- Pemanfaatan bahan bakar biomassa sebagai sumber energi;
- Menggunakan teknologi rendah karbon dan lebih efisien;
- Pemasangan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS);

Throughout 2021, Indonesia Power successfully implemented emission reduction initiative programs and recorded a 9,766,618.91 ton decrease in air pollution (Co_2e), 88.30% higher than that in 2020 (5,186,782.73 ton of Co_2e). Such reduction results from the implementation of emission reduction initiative, which includes;

- New and renewable energy development as a priority;
- Utilization of biomass fuel as energy source;
- Adoption of low-carbon and more efficient technologies;
- Installation of Continuous Emission Monitoring System (CEMS);

- *Retrofit Digital Electro Hydraulic Control* (DEHC) di Unit PLTP Gunung Salak yang mampu mengurangi emisi sebesar 4,5 juta ton CO2 di tahun 2021;
- Optimalisasi *service hour* dengan meminimalisir EFOR di Unit PLTU Lontar;
- Rehabilitasi *Boiler* dan *Uprating* Turbin Unit 1&2 PLTU Suralaya;
- Program penggantian Bahan Bakar Minyak (HSD) dengan Gas (Gasifikasi) di PLTGU Tambak Lorok Semarang;
- Modifikasi sistem pembakaran *auxiliary boiler* dengan menggunakan bahan Bakar Bio HSD di PLTU Banten 1 Suralaya; dan
- Program inovasi penurunan emisi lainnya.

Selain itu, Indonesia Power mendukung komitmen Pemerintah Indonesia dalam Protokol *Montreal* untuk melakukan perlindungan lapisan ozon (penghapusan BPO) dengan melakukan upaya dalam mengurangi emisi Bahan Perusak Ozon (BPO) antara lain :

- Tidak menggunakan bahan yang mengandung BPO/ODP pada *chiller* dengan menggunakan alternatif bahan Non CFC dan mengganti *refrigerant* AC dari R-22 yang memiliki ODP dan GWP tinggi menjadi R-32 yang lebih ramah lingkungan.
- Penetapan kebijakan dalam kontrak kerjasama dengan vendor untuk pemakaian pendingin ruangan dengan tidak menggunakan bahan *refrigerant* dan AC yang mengandung BPO.

- Application of Retrofit Digital Electro Hydraulic Control (DEHC) at GPP Gunung Salak, allowing CO2 emission to decline by 4.5 million tons in 2021;
- Service hour optimization by minimizing EFOR at SPP Lontar;
- Boiler and Uprating Turbine rehabilitation in Unit 1 & 2 of SPP Suralaya;
- Gasification program to replace High Speed Diesel (HSD) with Gas at CCPP Tambak Lorok Semarang;
- The use of Bio HSD in auxiliary boiler combustion system at SPP Banten 1 Suralaya; and
- Other emission reduction innovation programs.

Moreover, to support the commitment of the Government of Indonesia to the Montreal Protocol which aims to protect the ozone layer (phasing out ODS), Indonesia Power performs several actions such as:

- Avoiding the use of ODS in its chiller and replacing it with alternative Non-CFC substances, and switching its AC refrigerant from R-22, which is high in ODS and GWP, to R-32, which is greener.
- Inserting terms and conditions that prevent the use air conditioner with refrigerant and ODS in vendor contracts.

Mekanisme Pembangunan Bersih
Clean Development Mechanism (CDM)

Mekanisme Pembangunan Bersih atau *Clean Development Mechanism* (CDM) untuk menghasilkan proyek yang dapat menurunkan emisi gas rumah kaca merupakan salah satu upaya Perusahaan dalam mereduksi emisi gas rumah kaca (GRK). Mekanisme CDM pada dasarnya merupakan perdagangan karbon, dimana negara berkembang dapat menjual kredit penurunan emisi kepada negara yang memiliki kewajiban untuk menurunkan emisi.

Clean Development Mechanism (CDM) aims at reducing greenhouse gas emissions (GGE) by setting up projects that can reduce emissions of the gas. Basically, CDM is a carbon trade, where developing countries can sell emission reduction credits to countries having the obligation to reduce emissions.

Sebanyak dua unit pembangkit listrik PLTP Gunung Salak mulai beroperasi dengan kapasitas 2 x 55 MW pada tahun 1994. Tiga tahun kemudian satu unit tambahan lagi dapat dioperasikan dengan kapasitas yang sama. Pada tahun 2004 kapasitas pembangkit dinaikkan menjadi 3 x 60 MW melalui program *Capacity Upgrade*, sehingga produk yang dihasilkan berupa energi listrik disalurkan ke sistem ketenagalistrikan Jawa Bali Madura dengan kapasitas total kapasitas 180 MW.

Two power generation units at GPP Gunung Salak began operating with the capacity of 2 x 55 MW in 1994. Three years afterwards, another unit with the similar capacity was added into operation. In 2004, the capacity of the plant was increased to 3 x 60 MW through the Capacity Upgrade program. By this means, the electricity produced was then tapped into the Java-Bali-Madura electricity system, resulting in a total capacity of 180 MW.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

Proyek *capacity upgrade Unit* PLTP Gunung Salak ini diikutsertakan dalam proyek CDM melalui metode VCS (*Voluntary Carbon Standard*). Verifikasi dan validasi Proyek ini selesai pada tahun 2009 dan hingga sekarang Unit PLTP Gunung Salak telah menghasilkan reduksi emisi karbon sebesar 1.603.457,00 ton VCUs.

This upgrade program was incorporated into CDM project through VCS (Voluntary Carbon Standard) method. The verification and validation of this project was completed in 2009 and to date, GPP Gunung Salak has reduced carbon emission of 1,603,457.00 tons VCUs.

Emisi GRK yang Dijual/ Dilelang/ Diberikan Melalui Skema CDM di Unit Gunung Salak
GGE Sold/Auctioned/Given through CDM Scheme at Gunung Salak Unit

Tahun Year	*Verified Emission Reduction* (VER) (Ton VCUs)		
	Verified	*Sold*	*Remain*
2009	281.802,00	2.500,00	279.302,00
2010	-		258.727,28
2011	261.713,00	21.574,72	361.461,35
2012	203.735,00	158.978,93	453.827,35
2013	-		359.591,35
2014	118.760,00	111.369,00	478.256,58
2015	-	-	478.256,58
2016	301.933,00	94.236,00	478.256,58
2017	131.498,00	94,77	478.256,58
2018	-	-	478.256,58
2019	304.016,00	352.255,00	478.256,58
2020	-	-	478.256,58
2021	-	-	478.256,58
Total	1.603.457,00	741.008,42	

Catatan : Update *Invoice* 20 Desember 2018 (14 Januari 2019).
Note: Invoice Update December 20, 2018 (January 14, 2019).

Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Implementation of Water Resources Management

Pengelolaan sumber daya air dan limbah buangan hasil produksi Indonesia Power dilakukan menggunakan sistem prosedur dan teknologi yang andal. Setiap unit melakukan upaya untuk konservasi air dengan mendaur ulang air yang telah dipakai untuk keperluan lain serta mendaur ulang air limbah dengan instalasi pengolah air agar hasilnya dapat dipakai kembali ke dalam proses. *Monitoring* penggunaan air dilakukan dengan memantau langsung *flow meter* pemakaian air setiap bulannya dan dimasukkan dalam laporan bulanan ke Kantor Pusat.

To manage water resources and post-production waste, Indonesia Power implements a reliable procedural system and technology. Each unit takes part in conserving water by recycling used water for other purposes and recycling waste water with water treatment facility to be reused in various processes. The water use is monitored directly by overseeing the flow meter of water consumption each month. The data is then recorded in the monthly report to the Head Office.

Selama tahun 2021, total penggunaan air Perusahaan sebanyak 8.241.406,90 m3, meningkat 2,61% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 8.031.548,45 m3. Selain itu, rasio intensitas air Perusahaan pada tahun 2020 sebesar 0,000113 m3/kWh, meningkat 1,63% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,000111 m3/kWh. Peningkatan produksi/volume air limbah terjadi karena terdapat peningkatan operasional di Unit PLTU Lontar dan PLTGU Priok. Peningkatan produksi listrik PLTGU Priok hingga 84% meningkatkan volume secara keseluruhan air limbah di unit tersebut.

Throughout 2021, the Company consumed 8,241,406.90 m3 of water, showing a 2.61% increase from 8,031,548.45 m3 in 2020. Furthermore, in 2021, the Company's water intensity ratio increased by 1.63% from 0.000111 m3/kWh in 2020 to 0.000113 m3/kWh. This higher amount of waste water production/volume is due to an increase in operations at SPP Lontar and CCPP Priok. An 84-percent increase in power generation at CCPP Priok has led to an increase in total waste water volume in the unit.

Indonesia Power melakukan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air yang dilakukan Indonesia Power yaitu melalui pemanfaatan limbah cair dengan sistem RO (*Reverse Osmosis*) dan *Reusing* limbah cair PLTU batubara untuk penyiraman *stock pile.* Selama tahun 2021, Indonesia Power telah melakukan konservasi air sebanyak 698.479,73 m^3 dengan rincian sebanyak 689.964,45 m^3 untuk proses produksi dan 8.515,28 m^3 untuk kebutuhan domestik.

To improve water utilization efficiency, Indonesia Power applies Reverse Osmosis system to utilize liquid waste and reuses the liquid waste from coal-fired SPP to spray the stock pile. In 2021, Indonesia Power conserved 698,479.73 m3 of water, of which 689,964.45 m3 were used for production process and 8.515,28 m3 for domestic demand.

Indonesia Power juga melakukan pengujian atas pengelolaan air sesuai dengan standar baku mutu yang berlaku untuk kegiatan produksi dan domestik. Pengujian dilakukan secara rutin setiap satu/tiga bulan sekali sesuai dengan ketentuan pada RKL RPL dan dianalisa melalui laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada tahun 2021, hasil pengujian kualitas air Indonesia Power telah taat 100% karena berada di bawah baku mutu yang telah ditetapkan.

The Company also tested the water management in accordance with quality standard applicable to production and domestic activities. The test was conducted every month/quarterly in accordance with the provisions in RKL/RPL and analyzed in a National Accreditation Committee (KAN)-accredited laboratory. In 2021, the test proved 100% compliance with the established quality standard.

Implementasi Pengelolaan Limbah
Implementation of Waste Management

Produk sampingan dari kegiatan produksi Indonesia Power diantaranya berupa limbah dari pembangkit yang memiliki potensi dampak pencemaran lingkungan. Indonesia Power mengkategorikan limbah yang ditimbulkan dari kegiatan pembangkit menjadi tiga, yaitu limbah B3 (limbah bahan dan berbahaya), limbah non-B3 (non-bahan beracun berbahaya) dan limbah cair. Limbah tersebut kemudian dikelola dengan menerapkan sistem 3R (*Reuse, Reduce* dan *Recycle*).

Indonesia Power's generators produce waste that potentially pollutes the environment. This waste is categorized into hazardous and toxic waste, non-hazardous and non-toxic waste, and liquid waste. They are managed through 3R (Reuse, Reduce and Recycle) system.

Pengelolaan limbah B3
Hazardous and Toxic (B3) Waste Management

Kegiatan produksi listrik dan pemeliharaan pembangkit menghasilkan limbah B3 yang terdiri dari *Fly Ash, Bottom Ash,* pelumas bekas, aki bekas, *sludge* IPAL, resin bekas, limbah terkontaminasi B3, majun bekas dan Limbah B3 lainnya (*sludge oil,* kemasan bekas B3, filter Oil bekas, Bahan Kimia kadaluarsa, Lampu TL Bekas, Limbah Klinis). Proses dan waktu penyimpanan

Power generation activities and maintenance of the generators produce hazardous and toxic (B3) waste including Fly Ash, Bottom Ash,used lubricants, used battery, installation of sludge wastewater treatment (IPAL), used resins, B3 contaminated waste, used cotton waste and other B3 waste (sludge oil, B3 containers or packaging, used Oil filter, expired Chemical

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

Limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan izin yang dimiliki oleh masing-masing unit. Pengangkutan Limbah B3 bekerja sama dengan pihak ketiga pengangkut Limbah B3 yang lengkap memiliki izin, kerjasama dan sesuai ketentuan. Limbah B3 dikirim ke pemanfaat limbah B3 yang memiliki izin dan kerjasama. Sampai dengan tahun 2021, Indonesia Power memiliki program pemanfaatan limbah B3 yaitu FABA yang dilakukan secara internal terhadap Unit yang telah memiliki Izin Pemanfaatan limbah B3. Untuk Unit yang tidak memiliki Izin, limbah B3 dikirim ke pemanfaat limbah B3 yang memiliki izin dan kerjasama. Namun pada akhir tahun 2021, dilakukan proses pengajuan Dokumen Rincian Teknis untuk merubah Pengelolaan Limbah FABA menjadi Limbah Non B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang keluar pada Bulan Februari 2021.

Selama tahun 2021, jumlah limbah B3 Indonesia Power yang diangkut dari tempat penyimpanan Perusahaan menuju lokasi pengelola (pihak ketiga) sebanyak 890.540,17 ton mengalami penurunan 26,61% dari tahun 2020 dan tidak terdapat limbah B3 yang diimpor/diekspor maupun dikirim secara internasional.

Untuk limbah B3 yang tidak dapat dimanfaatkan sendiri, dikeluarkan dari Unit Pembangkit dengan dikirim atau diangkut kepada pihak ketiga pengumpul atau pemanfaat limbah B3 yang memiliki izin dari KLHK. Sisa limbah B3 yang belum terangkut atau dikeluarkan, disimpan di TPS limbah B3 dengan batas waktu penyimpanan sesuai ketentuan. Limbah B3 yang telah dikelola oleh pengumpul atau pemanfaat eksternal, tidak masuk dalam lingkup pemantauan Perusahaan terhadap jenis dan operasional pengolahannya.

Sampai dengan tahun 2021, Unit PLTU Indonesia Power yang telah memiliki izin pemanfaatan limbah FABA yaitu PLTU Suralaya, PLTU Labuan, PLTU Barru, PLTU Lontar, PLTU Adipala, PLTU Jeranjang, PLTU Suralaya 8 dan PLTU Palabuan Ratu. Limbah FABA dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang dapat digunakan kembali seperti batako, *paving block*, tiang panel, bata ringan, pagar panel, *kansteen*, balok pemecah ombak dan *eco park,* dengan total limbah B3 yang dimanfaatkan sebanyak 91.306,41 ton atau 10,25% dari total limbah B3 yang dihasilkan. Selain itu, pada tanggal 17 Juni 2021 Indonesia Power meresmikan Indonesia Power FABA *Information Centre* pertama di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mendorong pemanfaatan FABA secara massif serta untuk mendorong penghasil FABA lainnya untuk ikut memproduksi turunan FABA sebagai upaya *reduce, reuse* and *recycle* FABA.

Substances, Used Tube Lamp,Clinical Waste). How B3 waste is processed and how long it is stored depend on the regulations and licenses of each unit. To transport this type of waste, the Company works with a third party, a licensed waste transporter that can comply with the cooperative terms and conditions. The waste is sent to a licensed party undertaking the activity of utilizing B3 waste. Until 2021, Indonesia Power implemented a program to B3 waste, particularly Fly Ash and Bottom Ash (FABA), in its internal Units possessing B3 Waste Utilization License. For Units with no license, B3 waste is sent to a licensed party with which the Company cooperates. At the end of 2021, the Company submitted a Technical Specification Document to process FABA waste into non-hazardous and non-toxic waste pursuant to the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 22 of 2021 on Protection and Management of the Environment issued in February 2021.

Throughout 2021, 890,540.17 tons of B3 waste were transported from Indonesia Power's storage to the third party's sites, and this amount decreased by 26.61% from that in 2020, with no B3 waste being imported/exported or sent internationally.

If unable to be utilized internally, B3 waste is discharged from the Plant Units to be sent to or collected by a third party who possesses licenses from KLHK. The remaining waste is kept in Temporary Disposal Area (TPS) for B3 waste for a period of time pursuant to the regulations. After transfer to the collector or other external parties, the Company has no obligations to monitor what and how B3 waste is processed.

Until 2021, some SPPs obtained FABA waste utilization license, and they included SPP Suralaya, SPP Labuan, SPP Barru, SPP Lontar, SPP Adipala, SPP Jeranjang, SPP Suralaya 8 and SPP Palabuhan Ratu. FABA waste is recycled into other products such as brick, paving block, column, lightweight brick, panel fence, kansteen, concrete wave breaker and ecopark, and a total of 91,306.41 tons or 10.25% of B3 waste has recycled. In addition, on June 17, 2021, Indonesia Power inaugurated the first Indonesia Power FABA Information Center in Indonesia to promote massive utilization of FABA waste and to encourage other FABA producer to not only reduce and reuse FABA waste but also recycle it into derivative products.

Indonesia Power telah melakukan beberapa inisiatif dalam menekan limbah B3 yang dihasilkan melalui :

1. Penyaringan ulang terhadap pelumas (*oil purifier*) dalam operasional dan pemeliharaan Pembangkit;
2. Pembelian bahan kimia secara refill untuk mencegah timbulnya kemasan bekas B3;
3. Penggantian Lampu TL dengan lampu LED yang tidak mengandung LB3; dan
4. Pengisian ulang *catridge printer* untuk mencegah timbulan limbah *catridge*.

Indonesia Power has undertaken several initiatives to reduce hazardous and toxic waste by:

1. Purifying lubricant as part of Plants' operation and maintenance;
2. Refilling chemical substances to prevent unnecessary B3 packaging from piling up;
3. Replacing TL lamp with LED lamp that contains no B3 waste; and
4. Refilling all ink cartridge to prevent cartridge waste.

Pengelolaan Limbah Non B3

Non-Hazardous and Non-Toxic (Non-B3) Waste Management

Kegiatan operasional Perusahaan juga menghasilkan limbah non B3 meliputi sampah organik dan non-organik. Indonesia Power melakukan pemisahan sampah organik dan non-organik, dimana sampah organik akan dilanjutkan ke proses pengomposan dan sampah non organik dikirim ke pihak ketiga atau mitra Perusahaan untuk diolah menjadi cinderamata atau kerajinan tangan yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Untuk limbah non B3 yang sudah tidak dapat diolah atau dimanfaatkan, selanjutnya dikelola melalui kerjasama dengan Dinas Kebersihan setempat untuk di buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

In its operational activities, Indonesia Power also produces non-hazardous and non-toxic (non-B3) waste, including organic and inorganic waste. Indonesia Power separates organic waste from inorganic one and sends the organic waste for composting process and the inorganic waste to the third party or partners to be recycled into souvenirs or handcraft that offer economic benefits for the community. On the other hand, non-B3 residual waste that is difficult to be processed or utilized is managed together with the local Sanitary Agency before being disposed in the Final Processing Place (TPA).

Limbah non B3 yang dihasilkan dan dikelola Perusahaan selama tahun 2021 sebanyak 3.463,72 ton, menurun 33,44% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 5.203,86 ton. Dari limbah yang dihasilkan tersebut, Indonesia Power berhasil melakukan daur ulang sampah organik untuk pembuatan kompos sebanyak 73,95 ton atau 2,13% dari total limbah non B3.

In 2021, the Company produced and managed up to 3,463.72 tons of non-B3 waste, down by 33.44% compared to 5,203.86 tons in 2020. Indonesia Power also successfully recycled 73.95 tons or 2.13% of total organic waste produced into compost.

Indonesia Power telah melakukan beberapa inisiatif dalam menekan limbah non B3 yang dihasilkan melalui :

1. Pengembangan kompos organik dan daur ulang sampah plastik melalui program Hijaunesia Power dan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS), Jeranjang Olah Sampah Setempat (JOSS), *Biomass Operating System of Saguling* (BOSS);
2. Pemanfaatan limbah koran dan kaleng/botol bekas untuk dijadikan berbagai produk-produk *eco brick*, instrumen perkusi dan *handycraft*;
3. Pemanfaatan aplikasi online untuk menggantikan keperluan pencetakan (*reduce* limbah kertas);
4. Pemanfaatan limbah kopi menjadi produk turunan berupa sabun, *hand sanitizer*, disinfektan, pupuk, teh cascara;
5. Pemanfaatan limbah serasah mangrove untuk memproduksi batik;

Indonesia Power has undertaken several initiatives to reduce non-hazardous and non-toxic waste by:

1. Making organic compost and recycling plastic waste through Hijaunesia Power and Local Waste Processing Area (TOSS), Jeranjang Local Waste Processing (JOSS), Biomass Operating System of Saguling (BOSS);
2. Utilizing newspaper waste and used cans/bottles into ecobricks, percussion instruments and handcraft;
3. Utilizing an online application to minimize printing (less paper waste);
4. Turning coffee waste into derivative products such as soap, hand sanitizer, disinfectant, fertilizer, and cascara tea;
5. Utilizing mangrove litterfall to produce batik;

6. Pemanfaatan limbah biji durian menjadi olahan makanan seperti kue bolu, brownies, molen dan lain-lain; dan
7. Pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel. Biodiesel yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar yang dapat digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah - *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R).

6. Turning durian seeds into snacks such as sponge cake, brownies, fritters and many more; and
7. Utilizing waste cooking oil to make biodiesel. The biodiesel is then used as an alternative fuel source replacing diesel fuel to operate the waste processing machines in the Waste Processing Area - Reduce Reuse Recycle (TPS3R).

Pengelolaan Limbah Cair
Liquid Waste Management

Limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan produksi dianalisa secara periodik untuk pemenuhan ketaatan terhadap baku mutu pengelolaan limbah cair sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga *Thermal*. Pada tahun 2021, hasil pengukuran kualitas air limbah Indonesia Power dinyatakan bahwa seluruh unit 100% telah "taat" kualitas air limbahnya dari seluruh parameter yang diukur. Ketaatan Indonesia Power terhadap baku mutu dari libah cair yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

The liquid waste from production activities is periodically analyzed to ensure compliance with the quality standard of liquid waste management as stipulated in the Regulation of the Minister of Environment Number 8 of 2009 on Waste Water Quality Standard for Business or Thermal Power Plants. In 2021, assessment results showed that all of the Company's units were within the parameters of measurement, and were therefore declared "compliant" in the maintenance of wastewater quality. The Company's compliance with the quality standard of liquid waste is outlined as follows:

Pengukuran Kualitas Air Limbah Tahun 2021
Measurement of Liquid Waste Quality 2021

	Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality Standard	Rata-rata Korporat Corporate Average	Ketaatan Compliance
Outlet Waste Water Treatment Plant	pH	mg/L	6-9	7.82	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Zat padat tersuspensi (TSS) Total Suspended Solid (TSS)	mg/L	80	15.17	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Besi (Fe)	mg/L	10	0.26	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Phosphat (PO_4-)	mg/L	8	0.54	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Klorin Bebas (Cl_2) Free Chlorine (Cl_2)	mg/L	0.5	0.04	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Minyak & Lemak Oil & fat	mg/L	8	1.97	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Seng (Zn) Zinc (Zn)	mg/L	1	0.05	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Tembaga (Cu) Copper (Cu)	mg/L	1	0.03	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Kromium Total (Cr) Total Chromium (Cr)	mg/L	0.5	0.03	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	BOD5	mg/L	30	18.75	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	COD	mg/L	100	61.43	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Total Coliform	mg/L	3000	130.31	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard

	Parameter	Satuan Unit	Baku Mutu Quality Standard	Rata-rata Korporat Corporate Average	Ketaatan Compliance
Outlet Condensor (Air Bahang)	Temperatur Temperature	°C	40	33.72	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Klorin Bebas (Cl_2) Free Chlorine (Cl_2)	mg/L	0.5	0.05	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
Outlet Basin Cooling Tower ke Reinjeksi Outlet Basin Cooling Tower ke Reinjeksi	pH	C	6 - 9	7.28	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Klorin Bebas Free Chlorine	mg/L	1	0.01	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Zinc	mg/L	1	0.02	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard
	Phospat	mg/L	10	0.19	Memenuhi baku mutu Meeting quality standard

Implementasi Efisiensi Energi
Implementation of Energy Efficiency

Kegiatan produksi Indonesia Power menggunakan energi primer sebagai bahan baku (material) yang berasal dari energi fosil dan energi baru terbarukan. Indonesia Power melakukan peningkatan efisiensi energi dari proses produksi dan utilitas pendukung, proses yang lebih ramah lingkungan, efisiensi dari mesin-mesin pembangkit, dan efisiensi dari bangunan. Selain itu, penggunaan energi secara efisien juga dapat berkontribusi pada pengurangan emisi dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Kegiatan efisiensi energi yang dilakukan oleh Indonesia power adalah dengan mengurangi pemakaian listrik agar tercapainya penghematan listrik untuk pemakaian sendiri.

Indonesia Power's production activities make use of primary energy as the raw material which sources from fossil fuel and new & renewable energy. The Company drives the improvement of energy efficiency, i.e. through its production processes and supporting utilities, more environmental-friendly processes, power plants, and buildings. It also lowers power consumption to save electricity in its premises, thus contribute to reduced emissions and greener environment.

Pengelolaan Energi
Energy Management

Kegiatan produksi listrik mecakup proses mengelolaan energi primer baik energi fosil maupun energi terbarukan. Energi fosil terdiri dari batubara, *High Speed Diesel* (HSD), *Marine Fuel Oil* (MFO) dan dan gas alam, adapun energi terbarukan terdiri dari Panas Bumi, Air, Biofame dan Biomass.

Selama tahun 2021, Jumlah konsumsi energi fosil sebesar 463.600.156 Gigajoule yang mengalami peningkatan 14,91 % dari tahun 2020 yaitu sebesar 403.460.373 Gigajoule. Sedangkan jumlah konsumsi energi terbarukan di tahun 2021 adalah sebesar 23.724.292 Gigajoule yang mengalami peningkatan 4,43% dari tahun sebelumnya 22.717.616 Gigajoule.

Electricity generation activity involves a process of managing primary energy, either fossil fuel or renewable energy. Fossil fuel consists of coal, High Speed Diesel (HSD), Marine Fuel Oil (MFO) and natural gas. Whereas, renewable energy comprises geothermal, water, biofame and biomass.

During 2021, the total consumption of fossil fuel was 463,600,156 Gigajoule, increasing 14.91% from 403,460,373 Gigajoule in 2020. The total consumption of renewable energy in 2021 was 23,724,292 Gigajoule, increasing 4.43% from 22,717,616 Gigajoule in the previous year.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

Selain itu, Indonesia Power juga menghitung intensitas energi yang bertujuan untuk melihat tingkat efisiensi penggunaan energi Perusahaan. Rasio intensitas energi Perusahaan menggunakan denominator jumlah produksi listrik bruto pembangkit unit eksisting dan pembelian tenaga listrik sebagai faktor yang paling relevan. Pada tahun 2021, rasio intensitas energi Perusahaan sebesar 12.421,98 GJ/GWh, meningkat 1,35% dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 12.256,52 GJ/GWh.

Indonesia Power also measures energy intensity to assess the Company's energy efficiency. For the denominator of energy intensity ratio, the Company takes the total gross electricity production of the existing generation units and electrical energy purchase as the most relevant factors. In 2021, the Company's energy intensity ratio stood at 12,421.98 GJ/GWh, increasing 1.35% from 12,256.52 GJ/GWh in 2020.

Pengembangan Pembangkit Energi Baru Terbarukan
New & Renewable Energy Power Plant Development

Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan *green energy* yang bersumber dari air, panas bumi, tenaga surya, gelombang air laut, biomassa, biofuel, hingga yang berasal dari sampah, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi energi listrik. Sejak tahun 1995, Indonesia Power telah memiliki pembangkit-pembangkit bertenaga EBT. Sampai dengan tahun 2021, terdapat tiga jenis pembangkit yang menggunakan EBT sebagai sumber energi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagai berikut:

New & renewable energy is a green energy originating from water, geothermal, solar energy, sea waves, biomass, biofuel, up to trash. They have the potential to be turned into electricity. Therefore, since 1995, Indonesia Power has managed new & renewable energy-sourced power plants. Until 2021, three types of this plant were operational, namely Hydro Power Plants (HPP), Mini Hydro Power Plants (MHPP), and Geothermal Power Plants (GPP).

Pembangkit Energi Baru Terbarukan yang Telah Beroperasi
New and Renewable Energy-Sourced Power Plant in Operation

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location	Kapasitas Capacity
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hydro Power Plant (HPP)	PLTA Panglima Besar Soedirman dan Sub Unit PLTA di Mrica HPP Panglima Besar Soedirman and Sub-Unit HPP Mrica PGU	306,19 MW
	PLTA Saguling dan Sub Unit (Saguling PGU) HPP Saguling dan Sub-Unit (Saguling PGU)	797,36 MW
	PLTA Rajamandala HPP Rajamandala	47,00 MW
Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Mini Hydro Power Plant (MHPP)	PLTM Tapen MHPP Tapen	0,75 MW
	PLTM Siteki MHPP Siteki	1,20 MW
	PLTM Plumbungan MHPP Plumbungan	1,60 MW
	PLTM Gunung Wugul* MHPP Gunung Wugul*	3,00 MW
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geothermal Power Plant (GPP)	PLTP Kamojang GPP Kamojang	142,00 MW
	PLTP Darajat GPP Darajat	55,00 MW
	PLTP Gunung Salak GPP Gunung Salak	180,00 MW
	O&M PLTP Ulumbu (Milik PLN) GPP Ulumbu O&M (PLN-owned)	10,00 MW
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Power Plant (SoPP)	PLTS *Landbase* Grati* SoPP Landbase Grati*	1,5 MWp

* Telah COD di tahun 2021 COD in 2021

Pada tahun 2021 Indonesia Power telah melakukan pengembangan pembangkit EBT dari sumber EBT yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik *Hybrid* dengan rincian sebagai berikut:

In 2021, Indonesia Power developed new and renewable energy (NRE) power plants using NRE sources. They include Hydro Power Plant (MHPP), Mini Hydro Power Plant (MHPP), Solar Power Plant (SoPP), and Hybrid Power Plant as detailed below:

Jenis Pembangkit Type of Power Plant	Lokasi Location	Lokasi Location	Kapasitas Capacity
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hydro Power Plant (HPP)	PLTA Poigar 2 HPP Poigar 2	Sulawesi Utara North Sulawesi	2x15 MW
Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Mini Hydro Power Plant (MHPP)	PLTM Harjosari HPP Harjosari	Jawa Tengah Central Java	3x3,3 MW
	PLTM Cileunca HPP Cileunca	Jawa Barat West Java	2x0,5 MW
	PLTM Gunung Wugul* HPP Gunung Wugul*	Jawa Tengah Central Java	2x1,5 MW
	HPP PLTM Lambur Lambur	Jawa Tengah Central Java	2x4,0 MW
Pembangkit Listrik Hybrid Hybrid Power Plant	PLT Hybrid Nusa Penida Hybrid PP Nusa Penida	Bali	3,5 MW
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Power Plant (SoPP)	PLTS *Landbase* Grati* SoPP Landbase Grati*	Jawa Timur East Java	1,5 MWp

* Telah COD di tahun 2021 COD in 2021

Program Peningkatan dan Pembudayaan Manajemen Efisiensi Energi (PPME)

Energy Efficiency Management Improvement and Fostering (PPME) Program

Efisiensi energi di seluruh Unit Pembangkit merupakan implemetasi atas Program *Performance Based Regulatory* (PBR) yang diberlakukan oleh pemerintah mulai tahun 2017. Program tersebut yang bertujuan untuk mengurangi kontribusi Perusahaan terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) sehingga dapat menciptakan proses pembangkitan yang lebih ramah lingkungan. Indonesia Power telah melakukan efisiensi energi melalui program PPME. Program PPME atau *Program Enhanching and Embedding Energy Efficiency Excellence* (5E) dirancang untuk meningkatkan dan membudayakan *Energy Efficiency Excellence* yang diintegrasikan ke dalam IP *Transformation Strategy* di seluruh Unit Pembangkit Perusahaan. Inisiatif efisiensi energi pada program ini diantaranya yaitu menaikan *speed air pre heater* (*mode high speed)* ketika *outlet flue gas temp* tinggi, purifikasi minyak pelumas menghilangkan *bubbling*, optimasi pengaturan beban berdasarkan *heat rate unit*, pemasangan *blade* LP *turbine*, mengurangi sudut kemiringan *Blade Fan Cooling Tower* PLTP Kamojang, dan program lainnya. Selama tahun 2021, Indonesia Power berhasil melakukan efisiensi energi melalui Program PPME sebesar 86.802.597,62 GJ, dan berhasil menghemat biaya sebesar Rp654.171,32 juta/tahun.

To implement Performance Based Regulatory (PBR) Program initiated by the government since 2017, the Company promotes energy efficiency in all Power Plant Units. Implementing this program, the Company aims at minimizing its greenhouse gas emission (GGE) for environmentally-friendly generation process. To promote energy efficiency, Indonesia Power has implemented PPME Program. PPME Program or Enhancing and Embedding Energy Efficiency Excellence (5E) Program was designed to increase and nurture Energy Efficiency Excellence integrated into the Company's Transformation Strategy across its Power Plant Units. The measures include increasing pre-heater air speed (high speed mode) during high outlet flue gas temp, purifying lubricant oil by removing bubbling, installing LP turbine blade, narrowing the tilt angle of Blade Fan Cooling Tower in GPP Kamojang, and many others. In 2021, Indonesia Power managed to achieve energy efficiency of 86,802,597.62 GJ and cut Rp654,171.32 million/year of cost through PPME.

Implementasi Pengembangan Pembangkit Ramah Lingkungan (*Green Power Plant*)

Implementation of Green Power Plant Program

Program strategis Indonesia Power untuk mendukung Perusahaan dalam beroperasi secara andal, aman dan ramah lingkungan yang berhasil meningkatkan benefit, baik terhadap ekonomi, sosial maupun lingkungan guna mendukung keberlanjutan usaha secara jangka panjang salah satunya dengan *Green Power Plant.*

Selama tahun 2021, program yang telah dilakukan dalam mewujudkan *Green Power Plant* adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan, pemeriksaan, evaluasi dan pembinaan pengelolaan lingkungan untuk seluruh PGU, OMU dan Kantor Pusat;
2. Pendampingan, pemeriksaan dan koordinasi dalam penyusunan Dokumen *Comply Regulation* dan *Beyond Compliance;*
3. Melakukan upaya peningkatan kompetensi personil lingkungan dengan pelatihan dan sertifikasi bidang lingkungan;
4. Melakukan penghijauan di lingkungan Unit Pembangkit dengan menanam berbagai jenis pohon endemik yang berdampak untuk mereduksi emisi dan meningkatkan indeks keanekaragaman hayati;
5. Memberikan penghargaan prestasi pengelolaan lingkungan pada Unit yang telah berhasil dalam pencapaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan; dan
6. Melakukan kunjungan dan koordinasi kepada pihak eksternal terkait bidang lingkungan.

Indonesia Power develops Green Power Plant program to operate reliably, safely, and environmentally friendly to gain economic, social, or environmental benefits for its long-term business sustainability.

Over the course of 2021, it was manifested through:

1. Monitoring, inspecting, evaluating and coaching environmental management for all PGUs, OMUs, and Head Office.
2. Assisting, inspecting and coordinating the preparation of Comply Regulation and Beyond Compliance documents;
3. Improving the competence of environmental personnels by providing environmental trainings and certifications;
4. Executing greening program in the Power Plant environment by planting endemic trees to reduce emissions and promote biodiversity;
5. Rewarding Units succeeding in achieving Environmental Management Performance; and
6. Visiting and coordinating with external parties concerning the environment.

Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

Implementation of Environmental Management System (SML)

Indonesia Power mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan sebagai upaya menigkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. Selama tahun 2021, Indonesia Power telah melaksanakan program pelestarian lingkungan dalam Sistem Manajemen Lingkungan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan dan persyaratan pelanggan serta standar nasional dan internasional yang berlaku serta berkaitan dengan proses bisnis Perusahaan;
2. Menerapkan dan melaksanakan secara konsisten serta sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan sesuai dengan standar ISO 14001:2015;
3. Melakukan *monitoring*, evaluasi dan audit internal Sistem Manajemen Lingkungan secara periodik;

Indonesia Power implements environmental management system to improve environmental management performance. In 2021, it was demonstrated by carrying out environmental conservation measures through the following activities:

1. Complying with the regulations on environment and customer requirements, as well as the applicable national and international standards related to the Company's business processes;
2. Consistently applying, implementing, and acquiring certification of Environment Management System in accordance with ISO 14001:2015 standards;
3. Monitoring, evaluating, and internally auditing the Environment Management System on a regular basis;

4. Menjadikan kebijakan lingkungan sebagai dasar dalam menetapkan tujuan dan sasaran dalam melakukan pengelolaan lingkungan;
5. Mencegah pencemaran terhadap air, tanah dan udara, mendorong adanya sistem pengelolaan lingkungan yang efektif dengan mengutamakan konsep *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), mendorong program kepedulian dan pengembangan masyarakat sekitar (*Community Development*/CSR) dan melakukan upaya perlindungan keanekaragaman hayati;
6. Memberikan pemahaman/kepedulian dan pelatihan mengenai lingkungan secara terus menerus kepada seluruh pegawai baik organik maupun mitra kerja;
7. Meningkatkan peran aktif dan menanamkan kepedulian pegawai terhadap lingkungan;
8. Memelihara dan mendokumentasikan dokumen-dokumen terkait Sistem Manajemen Lingkungan;
9. Mengkomunikasikan kebijakan lingkungan kepada seluruh kontraktor/supplier atau mitra kerja untuk dapat mengikuti kebijakan serta mengkomunikasikan kepada masyarakat setempat; dan
10. Melakukan perbaikan berkelanjutan, penyempurnaan dan peningkatan secara terus menerus terhadap sasaran organisasi pada setiap proses bisnis masing-masing bidang.

4. Setting environment policies as the ground for determining goals and objectives of environmental management;
5. Preventing water, land and air pollution, promoting effective environmental management which focuses on Reduce, Reuse, Recycle (3R) concept, promoting community development/ CSR program and protecting biodiversity;
6. Continuously sharing knowledge/awareness of and giving trainings on environment to all employees and work partners;
7. Increasing employee's active participation and awareness of the environment;
8. Maintaining and archiving documents on Environment Management System;
9. Communicating environmental policies to all contractors/ suppliers or partners to ensure compliance with the policies, as well as communicating with local community; and
10. Creating continuous improvement towards the organization's objectives in every business process of each area.

Pelestarian Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati

Preservation of the Environment and Biodiversity

Kegiatan bisnis Indonesia Power berpotensi menimbulkan dampak bagi kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem di sekitar unit bisnis Perusahaan. Indonesia Power melalui departemen Kepatuhan K3 dan Lingkungan bekerjasama dengan Bidang Komunikasi Korporat melakukan beberapa program diantaranya *Eco Office*, program Hijaunesia Power dan program Kawan Hijaunesia Power dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Program tersebut diharapkan akan berdampak pada penambahan keanekaragaman hayati dan kembalinya fauna langka di lingkungan sekitar pembangkit.

Indonesia Power's business activities have a potential impact on sustainability of the environment and ecosystem around the Company's business units. Through its EH&S Compliance and Environment Department and together with Corporate Communication Division, Indonesia Power holds various biodiversity conservation programs, namely Eco Office, Hijaunesia Power, and Kawan Hijaunesia Power. They are expected to enrich biodiversity and restore the population of rare animals in the surrounding area of the plant.

Eco Office

Eco Office

Sistem Manajemen Lingkungan (SML) salah satunya diimplementasikan melalui Program *Eco Office* atau kantor peduli lingkungan merupakan bagian dalam penerapan sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Kegiatan *Eco Office* Indonesia Power antara lain pengelolaan sampah, penggunaan aplikasi untuk penghematan kertas, pemasangan *eco-sign* pada saklar lampu, keran air, lokasi strategis dan ruang publik lainnya di sekitar lingkungan dan Unit Pembangkitan.

Eco Office is an environmentally-friendly office program aiming at creating a clean, comfortable working environment as a part of the Environmental Management System (SML) implementation. The activities include such as waste management, use of digital applications to save papers, eco-sign installation on light switches, water taps, strategic locations and other public spaces around the office and Power Generation Units.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

Implementasi *Eco-office* di Unit Pembangkit
Implementation of Eco Office at Power Generation Units

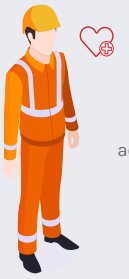
Pengelolahan sampah yang terpilih sesuai dengan jenis sampahnya.
Management of waste categorized based on its type.



3R mengklasifikasi strategi pengelolaan sampah menurut apa yang sesuai
3R classifies the waste management strategy based on its appropriateness



Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang baik mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan
Implementation of good OHS to prevent any work accident, work disease and environmental pollution



Sistem Manajemen Lingkungan (SML) salah satunya diimplementasikan melalui Program *Eco Office* atau kantor peduli lingkungan merupakan bagian dalam penerapan sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman. Kegiatan *Eco Office* Indonesia Power antara lain pengelolaan sampah, penggunaan aplikasi untuk penghematan kertas, pemasangan *eco-sign* pada saklar lampu, keran air, lokasi strategis dan ruang publik lainnya di sekitar lingkungan dan Unit Pembangkitan.

This initiative aims to increase awareness of the environment and educate employees about carbon footprints through intensive dissemination and mass carbon footprint calculation using carbon calculator. It aligns with the sustainable development goal, i.e. to prevent the impact of climate change and to ensure sustainable production and consumption patterns.

Hijaunesia Power
Hijaunesia Power

Kegiatan kampanye Indonesia Power dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia salah satunya dengan Program Hijaunesia Power yang dilaksanakan oleh Unit Pembangkit bersama dengan Balai Konservasi, Taman Nasional, Dinas Lingkungan Hidup atau instansi setempat dan terkait dalam melakukan konservasi dan restorasi untuk menjaga populasi flora dan fauna yang dilindungi.

Hijaunesia Power is the Indonesia Power's campaign to promote biodiversity conservation in Indonesia. This program is organized by the Power Plant Units in collaboration with Conservation Offices, National Park, Environmental Agencies, or local and relevant conservation and restoration institutions to maintain the population of protected flora and fauna.

Terdapat tiga unit bisnis Perusahaan yang berdekatan dengan kawasan lindung atau kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, yaitu PLTP Gunung Salak - Kamojang POMU, PLTG Gilimanuk - Bali PGU dan PLTU Labuan OMU. Sampai dengan tahun 2021, kegiatan konservasi dan restorasi yang telah dilakukan oleh Indonesia Power bersama Unit adalah sebagai berikut:

There are three Company's business units located around areas of conservation or areas rich in biodiversity, and these units include GPP Gunung Salak - Kamojang POMU, GTPP Gilimanuk - Bali PGU and SPP Labuan OMU. The conservation and restoration programs implemented in 2021 were listed below:

Unit	Lokasi Location	Kegiatan Konservasi dan Restorasi Conservation and Restoration Activities
PLTP Gunung Salak – Kamojang POMU GPP Gunung Salak - Kamojang POMU	Taman Nasional Gunung Halimun Salak Mount Halimun Salak National Park	*Monitoring* dan evaluasi Konservasi serta pelepasliaran satu ekor Elang Jawa. Monitoring and evaluating the conservation and releasing one Javan hawk-eagle.
		Melakukan penanaman dengan total 500 pohon endemik. Planting 500 endemic trees.
PLTG Gilimanuk - Bali PGU GTPP Gilimanuk - Bali PGU	Kawasan Taman Nasional Bali Barat West Bali National Park Area	Penambahan konservasi menjadi 771 ekor, Perbaikan lahan kawasan ekosistem satwa endemik untuk meningkatkan jumlah spesies burung Jalak Bali. Increased conservation capacity up to 771 animals, improvement of the endemic animal ecosystem area to increase the number Bali myna species.
	Lingkungan pembangkit Power plant area	Penambahan Konservasi menjadi 521 ekor, Peningkatan Jumlah *Lovebird* bersama Rumah Burung Mandiri. Increased conservation capacity up to 521 animals, increasing the number of Lovebird species together with Rumah Burung Mandiri.
PLTG Pesanggaran - Bali PGU GTPP Pesanggaran - Bali PGU	Lingkungan Unit Unit Area	Penanaman 6.682 pohon Mangrove. Planting 6,682 Mangrove trees.
	Taman Wisata Lembu Putih, Gianyar Lembu Putih Tourism Park, Gianyar	Konservasi 47 Ekor Sapi Putih Taro. Conservation of 47 Taro White Cattle.
PLTG Pemaron – Bali PGU GTPP Pemaron – Bali PGU	Lingkungan Unit Unit Area	Penanaman 150 Pohon Cemara Geseng. Planting 150 Mountain Ru Trees.
		Konservasi 3.500 Ekor Tukik (Penyu Hijau dan Penyu Lekang). Conserving 3,500 Sea Turtles (Green Sea Turtles and Olive Ridley Sea Turtle)
Grati POMU	Lingkungan Unit Unit Area	Penangkaran 11 ekor Rusa Timor. Breeding of 11 Javan Rusa.
		Konservasi mangrove 1000 pohon. Conservation of 1,000 Mangrove trees
Semarang PGU	Lingkungan Unit Unit Area	Konservasi dan penanaman Mangrove dengan total 1000 pohon. Mangrove conservation and planting of 1,000 trees.
		Konservasi dan penanaman tanaman langka (Cemara Udang, Anggrek Darat, Melati, Lamtana Bunga Kuning, Palem Kipas dan Ponik, Anggrek Kirai, Palem Phoenik, Asam, Palem Putri). dengan total 325 pohon. Rare plants (Shrimp Fir, Land Orchid, Jasmine, Yellow Flower Lamtana, Fan and Ponic Palm, Kirai Orchid, Phoenic Palm, Tamarind, Putri Palm) conservation and planting of 325 trees.
Labuan OMU	Taman Nasional Ujung Kulon Ujung Kulon National Park	Konservasi 75 Badak Jawa. Conservation of 75 Javan Rhinoceros.
	Lingkungan Unit (Taman Kehati) Unit Area (Biodiversity Park)	10 pohon kokoleceran (*Vatica bantamensis*). 10 kokoleceran (Vatica bantamensis) trees.
Banten 1 Suralaya OMU	Lingkungan Unit (Kebun Raya Mini) Unit area (Mini Botanical Garden)	Program revitalisasi dan pembangunan hutan kota Cilegon dengan 1.873 Batang Pohon. The revitalization program and establishment of Cilegon urban forest with 1,873 trees.

Selama tahun 2021, Indonesia Power telah menyelenggarakan program konservasi lingkungan dengan melakukan penghijauan melalui penanaman pohon sebanyak 53.312 pohon dengan rincian jumlah penanaman pohon pada masing-masing Unit sebagai berikut:

Throughout 2021, Indonesia Power successfully promoted greening program as part of environmental conservation by planting 53,312 trees across units with details as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

Jumlah Penanaman Pohon Indonesia Power
Number of Trees Planted by Indonesia Power

Unit	2021
Suralaya PGU	525
Priok POMU	156
Saguling POMU	6.090
Kamojang POMU	4.300
Kamojang POMU - Unit Gunung salak Kamojang POMU - Gunung Salak Unit	450
Mrica PGU	17.270
Semarang PGU - Unit Tambak Lorok Semarang PGU - Tambak Lorok Unit	475
Grati POMU	1.925
Bali PGU - Unit Pesanggaran Bali PGU - Pesanggaran Unit	7.004
Bali PGU - Unit Gilimanuk Bali PGU - Gilimanuk Unit	15
Bali PGU - Unit Pemaron Bali PGU - Pemaron Unit	70
PLTU SPP Banten 1 Suralaya OMU	486
PLTU SPP Banten 2 Labuan OMU	5.012
PLTU SPP Banten 3 Lontar OMU	1.735
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU	162
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU	2.244
PLTGU CCPP Cilegon OMU	3.502
PLTU SPP Pangkalan Susu OMU	838
PLTU SPP Barru OMU	92
PLTU SPP Jeranjang OMU	489
PLTU SPP Sanggau OMU	207
PLTU SPP Sintang OMU	123
PLTU SPP Berau OMU	142
Jumlah Penanaman Pohon Total Trees Planted	**53.312**

Penilaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup (PROPER)
Performance Assessment on Environment (PROPER)

Informasi peringkat PROPER oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang diterima Indonesia Power dalam lima tahun terakhir dapat dilihat secara detail pada tabel berikut ini:

The table below outlines the Ministry of Environment's PROPER rating for Indonesia Power's units in the past five years:

Unit	Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (Masa Berlaku) Environmental Management System Certification (Validity Period)	Peringkat Rating									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Suralaya PGU	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
Priok POMU	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
Semarang Tambak Lorok PGU	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
PLTG GTPP Sunyaragi	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
Grati POMU	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
PLTG GTPP Pesanggaran	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
PLTG GTPP Gilimanuk	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
PLTG GTPP Pemaron	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
Kamojang-Darajat POMU	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
PLTP GPP Gunung Salak	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
Labuan OMU (BLB) *	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
Lontar OMU (BLT) *	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
Suralaya 8 OMU (BSR) *	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
Pelabuhan Ratu OMU (JPR) *	ISO 14001:2015 (13 Februari 2020) (February 13, 2020)										
Cilegon OMU(CLG) *											
PLTA HPP Saguling (SGL)											
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU (ADP) SPP Central Java 2 Adipala OMU (ADP)											

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

Unit	Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (Masa Berlaku) Environmental Management System Certification (Validity Period)	Peringkat Rating									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PLTA HPP Mrica (MRC)											
Mrica PGU - Sub Unit Wonogiri (WNG)											
PLTU SPP Jeranjang OMU (JRJ)											
PLTU SPP Barru											

*) Pengelolaan UJP diatas sebagai asset manager dimulai pada tahun 2016 sebelumnya dilakukan oleh Unit Pembangkitan Jawa Bali (UPJB) PT PLN (Persero)
*) The OMU management above as asset manager was started in 2016, while previously carried out by Java-Bali Power Generation Unit (UPJB) of PT PLN (Persero)

- Hijau Green
- Biru Blue
- Emas Gold
- Belum Not yet
- Sudah tidak terdaftar No longer registered

Dukungan Manajemen, Pegawai dan *Stakeholders* Relevan pada Kegiatan CSR Bidang Lingkungan

Support of Management, Employee and Relevant Stakeholders in CSR for the Environment

Pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi terkait lingkungan serta pengelolaan dampak lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan. Direksi beserta jajaran manajemen terkait senantiasa terlibat mulai dari perumusan rencana kerja, pelaksanaan program kerja tanggung jawab terhadap lingkungan. Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan terhadap *stakeholders* juga melibatakan *stakeholder* relevan dalam perumusan program kerja dan rangkaian kegiatan program terkait tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan diantarnya sebagai berikut:

Compliance with environmental regulations and management of environmental impacts is one of critical aspects to the Company's sustainability. The Board of Directors and the corresponding management always engage in every existing process, from work plan formulation to implementation of Corporate responsibility for the environment. Taking into account its influence over the stakeholders, Indonesia Power also engages relevant stakeholders in the formulation of work programs and a series of program activities related to the Company's responsibilities related to environment. Below is the details:

Stakeholders	Program dan Pencegahan Perbaikan Kualitas Lingkungan	Programs and Prevention Measures Related to Environmental Quality
Pemasok Bahan Bakar Fuel Suppliers	• Pembatasan parameter bahan bakar untuk mengendalikan dan menurunkan Emisi. • Program penggantian bahan bakar Minyak menjadi Gas untuk menurunkan Emisi pembangkit.	• Restriction of fuel parameters to control and reduce emissions. • Replacement of fuel oil with gas to reduce plant emissions.
Masyarakat dan Instansi Terkait Public and Related Institutions	• Program konservasi keanekaragaman hayati dengan melibatkan lembaga atau pengelola balai konservasi. • Program bersih-bersih Sungai Ciliwung untuk memperbaiki kualitas Air sungai. • Program Citarum harum untuk memperbaiki kualitas Kualitas Air sungai DAS Citarum.	• Biodiversity conservation program in collaboration with institutions or Conservation Offices. • Bersih-bersih Sungai Ciliwung (Cleaning Ciliwung River) program to improve water quality of the river. • Citarum Harum program to improve water quality of Citarum watershed.

Unit kerja terkait dalam Perusahaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing turut serta dalam mengkaji dan meningkatkan keredibilitas inisiatif dan laporan CSR khususnya terkait Pelanggan setiap triwulan yang termuat dalam laporan manajemen.

The related units in the Company in accordance with their respective areas of duties and responsibilities participate in reviewing and increasing the credibility of CSR initiatives and quarterly reports, especially related to Customers, as contained in the management report.

Manfaat Pengelolaan Lingkungan bagi *Stakeholder*, Perusahaan dan Pembangunan Berkelanjutan

Environmental Management Benefits for Stakeholders, Company, and Sustainable Development

Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan merupakan salah satu upaya dalam menciptakan manfaat bersama bagi *Stakeholders* dan Perusahaan serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

1. Manfaat Pengelolaan Lingkungan untuk Perusahaan
   - Seluruh Unit terpantau progres pemenuhan Penaatan Lingkungan dan Pemenuhan PROPER Biru.
   - Unit yang telah terpasang CEMS terintegrasi ke SISPEK KLHK sesuai pemenuhan peraturan Permen LHK No.P.15 tahun 2019.
   - Kewajiban Kompetensi Lingkungan 100% terpenuhi sesuai ketentuan dan regulasi.
   - Isu terbaru pemenuhan penaatan dalam pengelolaan lingkungan teridentifikasi dan dilakukan mitigasi.
   - 100% unit peserta PROPER masuk menjadi Calon Kandidat PROPER Hijau dan 13 Unit berhasil memperoleh penghargaan PROPER Hijau serta 4 Unit berhasil memperoleh penghargaan PROPER Emas.

Corporate social responsibility for environment serves as a means to create mutual benefits for stakeholders and the Company, and support sustainable development.

1. Benefits of Environmental Management for the Company
   - Ability to monitor progress of all units in Managing the Environment and Obtaining PROPER Blue.
   - Integration between units installing CEMS and SISPEK KLHK as mandated by the Minister of Environment Regulation No.P.15 of 2019.
   - Ability to fully fulfill the Company's Environmental Competence Obligations in accordance with the provisions and regulations.
   - Ability to identify and mitigate latest environmental management issues.
   - Eligibility of all units participating in PROPER program to obtain Green PROPER rating with 13 Units obtaining Green PROPER rating and 4 Units earning Gold PROPER rating.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

- Peningkatan nilai Dokumen Hijau unit peserta PROPER.
- Ketidaksesuaian data dan dokumen Lingkungan teridentifikasi lebih mudah dan dapat dilakukan perbaikan sebelum penilaian PROPER.
- Melalui pengelolaan Lingkungan yang benar dan efektif, secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap peningkatan program efisiensi perusahaan.
- Tidak terdapat pengaduan atau keluhan dari pihak eksternal yang berkaitan dengan masalah pengelolaan lingkungan selama tahun 2021.

2. Manfaat Pengelolaan Lingkungan bagi *Stakeholders*
   - Pemanfaatan limbah serasah mangrove oleh masyarakat sebagai alternatif pewarna batik.
   - Pemanfaatan limbah koran dari kantor Indonesia Power untuk dijadikan berbagai produk-produk *handycraft* oleh masyarakat untuk meningkatkan kreatifitas dan kemandirian masyarakat.
   - Pengembangan kompos organik dan daur ulang sampah plastik di area pembangkit melalui program Hijaunesia Power dan TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) untuk menambah pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
3. Manfaat Pengelolaan Lingkungan pada Pembangunan Keberlanjutan
   - Program Efisiensi Energi melalui implementasi PPME dan penggunaan EBT sebagai upaya Peningkatan Manajemen Energi untuk mendukung SDGs No.7 (energi bersih), No.8 (pekerjaan layak) dan No.13 (perubahan Iklim).
   - Pengurangan Emisi dengan Uji coba Biomassa, konversi bahan bakar, penggantian bahan perusak ozon dan program CDM mendukung dalam mengatasi dampak perubahan iklim sesuai SDGs No.13 (perubahan Iklim) dan SDGs No.3 (Kesehatan yang baik).
   - Upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya air melalui program 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk melindungi sumberdaya air sesuai SDGs No.6 (Akses Air bersih).
   - Pengelolaan Limbah Cair, Limbah B3 dan Limbah Non B3 melalui program pemanfaatan atau 3R merupakan langkah mitigasi terhadap dampak pencemaran ekosistem Air (SDGs No.14), pencemaran ekosistem darat (SDGs No.15) kesehatan dan keselamatan (SDGs No.3).
   - Program perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati melalui program Kawan Hijaunesia Power, konservasi flora dan fauna endemik, memberikan manfaat dalam melindungi serta meningkatkan ekosistem Air (SDGs No.14) dan Ekosistem Darat (SDGs No.15).

- An increase in Green Document scores.
- Ability to identify inaccuracy of environmental data and documents more easily and solve them prior to PROPER assessment.
- Improvement in the Company's efficiency due to proper and effective environmental management, either directly or indirectly.
- Zero complaints or grievance from external parties regarding environmental management during 2021.

2. Benefits of Environmental Management for Stakeholders
   - The utilization of mangrove litterfall by the community as an alternative coloring agent to create batik.
   - The utilization of newspaper waste from Indonesia Power office by the community to create various handicraft products to stimulate their creativity and empower the society.
   - Creating compost and recycling plastic waste at the power generation unit area through Hijaunesia Power and TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat/Local Waste Management Site) to generate extra income and improve the well-being of the surrounding community.
3. Benefits of Environmental Management for Sustainability Development
   - Energy Efficiency Program through implementation of PPME and utilization of new & renewable energy sources aims at Improving Management of Energy and promoting SDGs No.7 (clean energy), No.8 (decent work) and No.13 (climate change).
   - Reduced Emission through Biomass trial, fuel conversion, replacement of ODS and implementation of CDM program to help tackle climate change impacts in accordance with SDGs No. 13 (Climate Change) and SDGs No.3 (Good Health and Well-being).
   - Water resources management and conservation through 3R (reduce, reuse, recycle) program to protect water resources in accordance with SDGs No.6 (Access to Clean Water).
   - Liquid Waste, B3 Waste and Non-B3 Waste Management through utilization or 3R program to mitigate the impacts of pollution in the aquatic ecosystem (SDGs No.14) and land ecosystem (SDGs No.15), and ensure health and safety (SDGs No.3).
   - Biodiversity protection and conservation program through Kawan Hijaunesia Power and conservation of endemic plants and animals to protect and improve Aquatic Ecosystem (SDGs No.14) and Land Ecosystem (SDGs No.15).

Sertifikasi dan Penghargaan di Bidang Lingkungan

Certification and Awards in Environment

Indonesia Power telah melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan yaitu ISO 14001:2015 dan telah diintegrasikan ke dalam *Integrated Management System* (IMS).

Selain itu, Indonesia Power meraih kinerja positif dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) selama tahun 2021. Sebanyak 20 Unit yang terdaftar dalam PROPER seluruhnya (100%) taat dalam pengelolaan Lingkungan. Tidak terdapat temuan dan Sanksi Administrasi dari KLHK. Indonesia Power meraih 4 PROPER Emas oleh Priok POMU, Grati POMU, PLTG Pesanggaran, Kamojang-Darajat POMU dan 13 PROPER Hijau oleh Suralaya PGU, Semarang Tambak Lorok PGU, PLTG Gilimanuk, PLTG Pemaron, PLTP Gunung Salak, Labuan OMU (BLB), Lontar OMU (BLT), Suralaya 8 OMU (BSR), Pelabuhan Ratu OMU (JPR), Cilegon OMU(CLG), PLTA Mrica (MRC), Mrica PGU - SUB UNIT Wonogriri (WNG), PLTU Jeranjang OMU (JRJ) serta 3 PROPER Biru oleh PLTA Saguling POMU (SGL), PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU (ADP), PLTU Barru.

Indonesia Power juga meraih beberapa penghargaan dalam ajang Subroto Award tahun 2021, sebagai berikut :

1. Gedung Kantor Indonesia Power Bali PGU, Juara 3 Kategori B Manajemen Energi di Gedung dan Industri sub kategori Gedung Kecil dan Menengah;
2. Indonesia Power Priok POMU, Juara 2 Kategori B Manajemen Energi di Gedung dan Industri sub kategori Industri Pertambangan dan Energi;
3. Indonesia Power Semarang PGU, Penghargaan Inovasi Khusus Kategori B Manajemen Energi di Gedung dan Industri;
4. Indonesia Power Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU, Penghargaan Inovasi Khusus Kategori B Manajemen Energi di Gedung dan Industri;
5. Indonesia Power PLTU Labuan Unit 1, Juara 1 Kategori C Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik sub Kategori Seller untuk PLTU Non MT 100-400 MW;
6. Indonesia Power PLTU Suralaya Unit 2, Juara 2 Kategori C Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik sub Kategori Seller untuk PLTU Non MT 100-400 MW;
7. Indonesia Power PLTU Jawa Tengah 2 Adipala, Juara 1 Kategori C Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik sub Kategori Buyer untuk PLTU Non MT diatas 400 MW;
8. Indonesia Power PLTU Suralaya Unit 8, Juara 2 Kategori C Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik sub Kategori Buyer untuk PLTU Non MT diatas 400 MW;

In terms of Environmental Management System, Indonesia Power currently holds ISO 14001:2015 which has been integrated into Integrated Management System (IMS).

In addition, throughout 2021, Indonesia Power displayed solid performance in managing the environment (PROPER). All 20 units listed in PROPER (100%) fulfilled its environmental management obligations. Also, no case was filed and zero administrative sanction was imposed by KLHK. Of all units managed by the Company, four units were given PROPER Gold rating (Priok POMU, Grati POMU, GTPP Pesanggaran, Kamojang-Darajat POMU), 13 units received PROPER Green rating (Suralaya PGU, Semarang Tambak Lorok PGU, GTPP Gilimanuk, GTPP Pemaron, GPP Gunung Salak, Labuan OMU (BLB), Lontar OMU (BLT), Suralaya 8 OMU (BSR), Pelabuhan Ratu OMU (JPR), Cilegon OMU(CLG), HPP Mrica (MRC), Mrica PGU - SUB-UNIT Wonogiri (WNG), SPP Jeranjang OMU (JRJ)), and 3 units obtained PROPER Blue rating (HPP Saguling POMU (SGL), SPP Central Java 2 Adipala OMU (ADP), SPP Barru).

Indonesia Power also received awards at the 2021 Subroto Award, which include:

1. Bali PGU Office, Third Place in Category B i.e. Energy Management in Building and Industry under Small and Medium-Sized Building sub-category;
2. Priok POMU, Second Place in Category B i.e. Energy Management in Building and Industry under Mining and Energy Industry sub-category;
3. Semarang PGU, Special Innovation Award in Category B i.e. Energy Management in Building and Industry;
4. West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU, Special Innovation Award in Category B, i.e. Energy Management in Building and Industry;
5. SPP Labuan Unit 1, First Place in Category C i.e. Reduction and Trading of Carbon Emissions in Power Generation Sector under Seller for SPP Non-MT 100-400MW sub-category;
6. SPP Suralaya Unit 2, Second Place in Category C i.e. Reduction and Trading of Carbon Emissions in Power Generation Sector under Seller for SPP Non-MT 100-400MW sub-category;
7. SPP Central Java 2 Adipala, First Place in Category C i.e. Reduction and Trading of Carbon Emissions in Power Generation Sector under Buyer for SPP Non-MT above 400MW sub-category;
8. SPP Suralaya Unit 8, Second Place in Category C i.e. Reduction and Trading of Carbon Emissions in Power Generation Sector under Buyer for SPP Non-MT above 400MW sub-category;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENT

9. Indonesia Power PLTU Pelabuhan Ratu Unit 2, Juara 1 Kategori C Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik sub Kategori *Buyer* PLTU Non MT 100-400 MW;

10. Indonesia Power PLTU Banten 3 Lontar Unit 1, Juara 3 Kategori C Penurunan dan Perdagangan Emisi di Sektor Pembangkit Listrik sub Kategori *Buyer* PLTU Non MT 100-400 MW.

9. SPP Palabuhan Ratu Unit 2, First Place in Category C i.e. Reduction and Trading of Carbon Emissions in Power Generation Sector under Buyer of SPP Non-MT 100-400MW sub-category;
10. SPP Banten 3 Lontar Unit 1, Third Place in Category C i.e. Reduction and Trading of Carbon Emissions in Power Generation Sector under Buyer of SPP Non-MT 100-400MW sub-category.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Aspek ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3) merupakan komponen penting dalam menunjang kinerja Perusahaan. Bagi Indonesia Power, pegawai merupakan *Strategic Business Partner* untuk berkembang dan menciptakan nilai bersama secara berkelanjutan. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan regulasi lainnya terkait ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3) senantiasa dipenuhi dalam rangka menjaga hak pegawai. Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terkait ketenagakerjaan dan K3 menjadi bagian dari upaya Indonesia Power dalam memenuhi hak pegawai serta mengelola risiko dari aktivitas operasional Perusahaan. Implementasi tanggug jawab sosial Perusahaan bidang ketenagakerjaan dan K3 dibagi ke dalam dua lingkup, yaitu tanggung Jawab Perusahaan terkait Ketenagakerjaan dan tanggung jawab sosial Perusahaan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Employment and occupational health and safety (OHS) are important factors to support the Company's performance. For Indonesia Power, employees are a Strategic Business Partner to develop and bring mutual value on an ongoing basis. The compliance with the law and other regulations on employment and OHS is always fulfilled in order to respect the employees' right. It also serves as a risk management measure of the Company's business operation. In this matter, employment and OHS are two separated elements of CSR under this theme.

Perumusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Formulation of Corporate Social Responsibility for Employment and Occupational Health and Safety

Indonesia Power melakukan pemetaan sosial untuk mengenali dan merumuskan *stakeholder* penting dan tanggung jawab sosial Perusahaan bidang ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, perumusan tanggung jawab sosial Indonesia Power terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja melalui uji tuntas dengan melakukan *review*, identifikasi dan update terhadap seluruh peraturan terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, analisis isu penting, dampak dan risiko dari kegiatan Perusahaan; ekspektasi *stakeholders* yang terkait dengan aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang secara rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam memastikan kecukupan kebijakan dan penerapan tanggung jawab Perusahaan terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Indonesia Power mempersiapkan mekanisme penanganan keluhan, keadaan darurat terkait keselamatan kerja dan konflik bidang ketenagakerjaan agar pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan berjalan efektif.

Indonesia Power has performed social mapping to recognize and formulate key stakeholders and social responsibility for employment and OHS. Indonesia Power has also exercised due diligence in formulating social responsibility for employment and occupational health and safety by updating, identifying and reviewing all regulations on employment and occupational health and safety; analysis of key issues, impacts and risks of Company's activities; scope and expectations of the stakeholders related to employment and occupational health and safety aspect reviewed annually to ensure the adequacy of the Company's policies and responsibility for employment and occupational health and safety. Indonesia Power has prepared complaints handling mechanism, emergencies related occupational safety, and employment dispute for effective corporate social responsibility.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Isu Penting, Dampak dan Risiko Kegiatan Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Key Issues, Impacts, and Risks of Company's Activities Related to Employment and Occupational Health and Safety

Isu-isu penting bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang relevan dengan bisnis Perusahaan secara umum meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, kompetensi dan kesejahteraan tenaga kerja serta kesehatan dan keselamatan kerja. Isu tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi dampak dan resiko dari kegiatan operasional Indonesia Power terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan sebagai berikut :

Key issues related to Employment and OHS relevant to the Company's business generally include compliance with applicable regulations of law, occupational competence and well-being, and occupational health and safety. These matters are analyzed to identify the following impacts and risks of Indonesia Power's operation on employment and occupational health and safety directly or indirectly related to the Company:

Analisis Dampak, Risiko dan Tindakan Penanggulangan

Analysis of Impacts, Risks, and Countermeasures

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku Compliance with the applicable regulations of law	• Pelanggaran terhadap Hubungan Industrial. • Peralatan K3 yang belum memenuhi standar. • Terjadi kecelakaan kerja. • Gangguan kesehatan tenaga kerja di lingkungan pembangkit. • Violation against Industrial Relations • Substandard Occupational Health and Safety Equipments. • Occupational accident. • Workforce health issue in power plant environment.	• Melaksanakan dan memutakhirkan PKB secara berkala dan mendaftarkanya pada Kementerian Ketenagakerjaan serta kebijakan turunannya. • Memenuhi standar Kesehatan dan Keselamatan kerja dan mengevaluasi secara berkala terhadap infrastruktur kerja. • Pelaksanaan audit sistem manajemen K3 setiap tahun. • Sosialisasi Kebijakan K3 secara berkala. • Memenuhi standar emisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Penyediaan fasilitas tata kelola kesehatan bagi Pegawai serta pelaksanaan MCU secara berkala bagi Pegawai. • Exercising and renewing collective labor agreement (CLA) regularly and registering the agreement to the Ministry of Manpower and its derivative policies. • Satisfying OHS standards and evaluating work infrastructure periodically. • Auditing the OHS management system annually • Disseminating OHS policies regularly. • Fulfilling the emission standard according to the applicable provisions. • Providing employees with health facilities and regular medical check up.

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Kinerja Perusahaan tidak Optimal Suboptimal Company Performance	• Kompetensi SDM Perusahaan belum memenuhi standar *best practice*. • Kebutuhan human capital belum memenuhi formasi jabatan. • Sikap dan perilaku Pegawai yang menyimpang • Human capital competency below best practice standards. • Human capital qualification mismatch. • Deviant workplace behavior	• Melaksanakan program pengembangan kompetensi secara rutin. • Melakukan rekrutmen, promosi dan mutasi jabatan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan berdasarkan perencanaan karir dan tenaga kerja. • Penyediaan infrastruktur kebijakan Disiplin Pegawai • Executing competence development program regularly. • Recruiting, promoting, and rotating employees according to the required qualification by taking into account career planning and workforce. • Establishing policy on workplace disciplinary
Kesejahteraan tenaga kerja Occupational well-being	• Diskriminasi terkait kesempatan untuk menempati jabatan tertentu. • Tenaga kerja tidak mendapatkan program jaminan sosial dan pensiun. • Tenaga kerja tidak mendapatkan remunerasi yang layak. • Employment opportunity discrimination. • No coverage of social and retirement security plans for workforce. • Inadequate remuneration.	• Melaksanakan dan memutakhirkan PKB secara berkala dan mendaftarkannya di Kementrian Ketenagakerjaan. • Melaksanakan kebijakan secara konsisten dan menyusun *talent pool*. • Mengikut sertakan tenaga kerja pada Program Jaminan Sosial. • Melaksanakan survei kepuasan pegawai dan menindaklanjuti aspek-aspek yang dirasa kurang. • Adanya fungsi audit internal dalam struktur organisasi guna memastikan kebijakan-kebijakan terkait ketenagakerjaan berjalan secara konsisten. • Performing and renewing collective labor agreement (CLA) regularly and registering the agreement to the Ministry of Manpower. • Carrying out policies consistently and building a talent pool. • Registering workforce in a social security program. • Conducting employee satisfaction survey and following up on aspects requiring improvement • Establishing an internal audit function in the organizational structure to ensure consistent adoption of employment policies.
Kesehatan dan Keselamatan kerja Occupational Health and Safety	• Terjadi kecelakaan kerja. • Gangguan kesehatan tenaga kerja di lingkungan pembangkit. • Occupational accident. • Workforce health issue in power plant environment.	• Memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja dan mengevaluasi secara berkala. • *Review* dan sosialisasi Kebijakan K3 secara berkala. • Memenuhi standar lingkungan kerja dan emisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Penyediaan, pemutakhiran serta inspeksi kesiapan peralatan dan infrastruktur perlatan kerja yang memenuhi standar K3 secara berkala. • Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan untuk melayani seluruh pegawai. • Satisfying and regularly evaluating OHS standards. • Regular dissemination of OHS policies. • Fulfilling the emission standard according to the applicable provisions. • Providing, updating, and regularly inspecting the readiness of work equipments and infrastructure according to the OHS standards. • Providing health facilities and infrastructure for employees at the units.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Ekspektasi dan Jangkauan Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Isu Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada *Stakeholder*

Expectations and Scope of Company's Influence Related to Employment and Occupational Health and Safety for Stakeholders

Sebagai bagian dari perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Indonesia Power melakukan upaya pelibatan *stakeholders* berdasarkan lingkup pengaruh Perusahaan terkait isu bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja sebagai pengembangan dari hasil analisis isu terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Indonesia Power melakukan identifikasi *stakeholder* penting dan harapan terhadap Perusahaan dalam menangani isu terkait aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja tersebut sebagai berikut :

In formulating CSR practice related to this subject, Indonesia Power engages stakeholders based on the scope of Company's influence in terms of employment and OHS after developing the analysis of this issue. Indonesia Power identifies key stakeholders as well as expectations of the Company in dealing with issues on employment and OHS as follows:

Analisis *Stakholder* Penting, Ekspektasi serta Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder*

Analysis of Key Stakeholders, Expectations, Handling of Issues, and Engagement of Stakeholders

Stakeholder Penting Key Stakeholder	Harapan Expectation	Langkah Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder* Measures in Handling Issues and Engagement of Stakeholders
Pegawai Employees	• Peningkatan kepuasan dan kesejahteraan pegawai. • Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja yang berstandar. • Sarana dan prasarana K3 yang andal. • Siaga dan tanggap kondisi darurat/ bencana. • Pemenuhan kompetensi dan ketrampilan aspek K3. • Increased employee satisfaction and well-being. • Management of health and standardized occupational health and safety. • Reliable OHS facilities and infrastructure. • Emergency preparedness and disaster response. • Compliance of OHS competency and skills.	• Survei HRSE (*Human Resources Satisfaction and Engagement*) dan Budaya K3. • Pelaporan *nearmiss, unsafe action, unsafe condition, personal accident, property damage/lost, environmental damage, security,* penyimpangan higienis, keluhan K3 dalam Aplikasi *Nearmiss*. • Simulasi Tanggap Darurat minimal setahun sekali. • Pelaksanaan diklat K3 secara berkesinambungan. • Carrying out a survey on HRSE (Human Resource Satisfaction and Engagement) and OHS culture. • Reporting nearmiss, unsafe action, unsafe condition, personal accident, property damage/ lost, environmental damage, security, hygienic deviations, K3 complaints through Nearmiss Application. • Simulation of Emergency Response at least once a year. • Continuous OHS education and training.
Pemegang Saham Shareholders	• Keberlanjutan bisnis Perusahaan. • Sustainability of the Company's business.	• Komitmen K3. • Commitment to OHS.
Pemerintah dan Regulator Government and Regulatory Agency	• Pemenuhan ketaatan perusahaan terhadap peraturan. • Compliance with the regulations.	• Audit Sistem K3 (Internal dan Eksternal) • OHS System Audit (Internal and External)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan
Corporate Social Responsibility for Employment

Komitmen dan Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan
Commitment to and Policy on Employment

Komitmen inisiatif program tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan Indonesia Power memperhatikan aspek kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, dukungan atas partisipasi kerja kaum perempuan serta pemenuhan hak pegawai atas fasilitas sosial khusus. Tanggung jawab Perusahaan terhadap ketenagakerjaan sebagai dampak dari kegiatan operasional Indonesia Power mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Indonesia Power menetapkan kebijakan internal Perusahaan terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan terkait ketenagakerjaan yang diatur dalam:

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2020-2021.
2. Keputusan Direksi Nomor 22.K/010/IP/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Sistem Pembinaan Gaji Dasar Sebagai Dasar Perhitungan Penghasilan Dasar Pensiun.
3. Keputusan Direksi Nomor 38.K/010/IP/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK).
4. Keputusan Direksi Nomor 63.K/010/IP/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Sistem Penghargaan Pegawai.
5. Surat Keputusan Direksi No. 49.K/010/IP/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Cuti Sakit, Cuti Haid dan Cuti Bersalin.
6. Keputusan Direksi Nomor 103.K/010/IP/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Jabatan Binaan Pegawai Tugas Karya dan Pegawai Tugas Belajar Penuh Waktu.
7. Keputusan Direksi Nomor 85.K/010/IP/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang Sistem Rekrutmen Pegawai.
8. Keputusan Direksi Nomor 150.K.010/IP/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Pegawai.
9. Keputusan Direksi Nomor 186.K/010/IP/2012 tanggal tentang Perubahan atas Keputusan Direksi No. 38.K/010/IP/2009 tanggal tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK).
10. Keputusan Direksi Nomor 151.K/010/IP/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Program Pendidikan Formal.
11. Keputusan Direksi Nomor 04.K/010/IP/2014 tanggal 6 Januari 2014tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No. 60.K/010/IP/2004 tentang Ketentuan Tenaga Kerja Waktu Tertentu.

Commitment of Indonesia Power to CSR for employment takes into account the compliance with the law and regulations, equal opportunity and non-discrimination, women's employment, and special social facilities for employees. The Company's CSR for employment is based on the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2013 on Employment. Indonesia Power specifies its internal policy on CSR for employment as regulated in:

1. 2020-2021 Collective Labor Agreement (CLA)
2. Decree of the Board of Directors Number 22.K/010/IP/2009 dated February 26, 2009 on Base Salary as the Basis for Calculation of Basic Retirement Pay.
3. Decree of the Board of Directors Number 38.K/010/IP/2009 dated May 07, 2009 on Competence-Based Human Capital Management System.
4. Decree of the Board of Directors Number 63.K/010/IP/2009 dated June 30, 2009 on Employee Reward Program.
5. Decree of the Board of Directors No. 49.K/010/IP/2010 dated May 19, 2010 on Sick Leave, Menstrual Leave, and Maternity Leave.
6. Decree of the Board of Directors No. 103.K/010/IP/2011 dated September 09, 2011 on Positions of Secondee and Employees on Full-Time Study Permit.
7. Decree of the Board of Directors Number 85.K/010/IP/2012 dated June 19, 2012 on Employee Recruitment System.
8. Decree of the Board of Directors Number 150.K.010/010/IP/2012 dated September 03, 2012 on Employee Competence Certification.
9. Decree of the Board of Directors No. 186.K/010/IP/2012 on the Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 38.K/010/IP/2009 on Competence-Based Human Capital Management System.
10. Decree of the Board of Directors Number 151.K/010/IP/2013 dated September 16, 2013 on Formal Education Program.
11. Decree of the Board of Directors No. 04.K/010/IP/2014 dated January 06, 2014 on the Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 60.K/010/IP/2004 on Terms for Contingent Workers.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

12. Keputusan Direksi Nomor 28.E/012/IP/2014 tanggal 3 Desember 2014 tentang Uji Portofolio Kompetensi.
13. Keputusan Direksi Nomor 116.K/010/IP/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Masa Persiapan Pensiun.
14. Keputusan Direksi Nomor 111.K/010/IP/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Diklat Prajabatan.
15. Keputusan Direksi Nomor 144.K/010/IP/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai.
16. Keputusan Direksi Nomor 145.K/010/IP/2018 17 tanggal September 2018 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai.
17. Keputusan Direksi Nomor 147.K/010/IP/2018 17 tanggal September 2018 tentang Sistem Tugas Karya.
18. Keputusan Direksi Nomor 017.K/010/IP/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Sistem Expertise Operasi, Pemeliharaan dan Enjiniring.
19. Keputusan Direksi Nomor 048.K/010/IP/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Struktur Profesi di Lingkungan PT Indonesia Power.
20. Keputusan Direksi Nomor 051.K/010/IP/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Jalur Karir.
21. Keputusan Direksi Nomor 054.K/010/IP/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Sistem Jabatan.
22. Keputusan Direksi Nomor 062.K/010/IP/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Direktori Kompetensi Bidang dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan.
23. Keputusan Direksi Nomor 066.K/010/IP/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perencanaan Tenaga Kerja.
24. Keputusan Direksi Nomor 231.K/010/IP/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Sistem Manajemen Talenta.
25. Keputusan Direksi Nomor 146.K/010/IP/2020 tanggal 1 Juni 2020 tentang Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti.
26. Keputusan Direksi Nomor 77.K/010/IP/2020 tanggal 8 Juni 2020 tentang Direktori Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan Kompetensi Utama dan Kompetensi Peran.
27. Keputusan Direksi Nomor 146.K/010/IP/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti.
28. Keputusan Direksi Nomor 024.K/010/IP/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pejabat Pengganti Sementara.
29. Keputusan Direksi Nomor 026.K/010/IP/2020 tanggal 19 Februari 2020 tentang Uji Kompetensi Bidang Untuk Penempatan Jabatan Ahli Muda.
30. Keputusan Direksi Nomor 33.E/012/IP/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Cuti Bersama Bagi Pegawai yang Melaksanakan Kerja Bergilir atau Tugas Piket.
31. Keputusan Direksi Nomor 71.K/010/IP/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi PT Indonesia Power Nomor 162.K/010/IP/2016 tentang tambahan Tunjangan Posisi (TTP).

12. Decree of the Board of Directors Number 28.E/012/IP/2014 dated December 03, 2014 on Competence Portfolio Test.
13. Decree of the Board of Directors Number 116.K/010/IP/2016 dated May 26, 2016 on Retirement Preparation Period;
14. Decree of the Board of Directors Number 111.K/010/IP/2017 dated June 02, 2017 on Pre-Service Education and Training,
15. Decree of the Board of Directors Number 144.K/010/IP/2018 dated September 14, 2018 on Competency and Career Development System.
16. Decree of the Board of Directors Number 145.K/010/IP/2018 dated September 17, 2018 on Employee Performance Management System.
17. Decree of the Board of Directors Number 147.K/010/IP/2018 dated September 17, 2018 on Secondment.
18. Decree of the Board of Directors Number 017.K/010/IP/2019 dated February 11, 2019 on Operation, Maintenance, and Engineering Expertise System.
19. Decree of the Board of Directors No. 048.K/010/IP/2019 dated May 02, 2019 on Profession Structure at PT Indonesia Power.
20. Decree of the Board of Directors Number 051.K/010/IP/2019 dated May 09, 2019 on Career Path,
21. Decree of the Board of Directors Number 054.K/010/IP/2019 dated May 28, 2019 on Position System.
22. Decree of the Board of Directors No. 062.K/010/IP/2019 dated May 28, 2019 on the Directory of Expertise Competence and Position Competence Requirement.
23. Decree of the Board of Directors Number 066.K/010/IP/2019 dated May 29, 2019 on Workforce Planning.
24. Decree of the Board of Directors Number 231.K/010/IP/2019 dated December 03, 2019 on Talent Management System.
25. Decree of the Board of Directors Number 146.K/010/IP/2020 dated June 01, 2020 on Post-Retirement Preparation Education and Training
26. Decree of the Board of Directors Number 77.K/010/IP/2020 dated June 08, 2020 on Competency Directory and Job Competency Requirements, Main Competencies and Role Competencies,
27. Decree of the Board of Directors Number 146.K/010/IP/2020 dated November 05, 2020 concerning Education and Training for Post-Employment Support.
28. Decree of the Board of Directors No. 024.K/010/IP/2020 dated February 17, 2020 on Acting Officials.
29. Decree of the Board of Directors No. 026.K/010/IP/2020 dated February 19, 2020 on Area Competency Test for Placement of Associates.
30. Decree of the Board of Directors No. 33.E/012/IP/2020 dated May 15, 2020 on Collective Leave for Employees Working on Shifts or Patrols.
31. Decree of the Board of Directors No. 71.K/010/IP/2020 dated May 20, 2020 on Amendment to Decree of the PT Indonesia Powers' Board of Directors No. 162.K/010/IP/2016 on Functional Allowance Supplement.

32. Keputusan Direksi Nomor 151.K/010/IP/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Honorarium Bagi Tenaga Pengajar, Tenaga Penyusun Materi Diklat dan Asesor Sertifikasi Kompetensi.
33. Keputusan Direksi Nomor 025.K/010/IP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Penilaian *Human Capital Readiness* (HCR) dan *Organization Capital Readines* (OCR).
34. Keputusan Direksi Nomor 050.K/010/IP/2021 tanggal 07 Juni 2021 tentang Asessment Kompetensi.
35. Keputusan Direksi Nomor 119.K/010/IP/2021 tanggal 07 Desember 2021 tentang Tenaga Kerja Non Pegawai.
36. Keputusan Direksi Nomor 128.K/010/IP/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 63.K/010/IP/2009 tentang Sistem Penghargaa Pegawai.

32. Decree of the Board of Directors No. 151.K/010/IP/2020 dated December 30, 2020 on honorarium for Teachers, Education and Training Material Preparation Staffs, and Competence Certification Assessor.
33. Decree of the Board of Directors No. 025.K/010/IP/2021 dated March 30, 2021 on Guidelines for Assessment of Human Capital Readiness (HCR) and Organization Capital Readiness (OCR).
34. Decree of the Board of Directors Number 050.K/010/IP/2021 dated June 07, 2021 on Competence Assessment.
35. Decree of the Board of Directors Number 119.K/010/IP/2021 dated December 07, 2021 on Non-Employee Workers.
36. Decree of the Board of Directors No. 128.K/010/IP/2021 dated December 15, 2021 on Amendment to Decree of the Board of Directors No. 63.K/010/IP/2009 on Employee Reward System.

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan

Action Plan of Corporate Social Responsibility for Employment

Rencana kegiatan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan disusun berdasarkan hasil analisis isu, dampak dan risiko serta pendekatan dan pelibatan *stakeholder* dalam perumusan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan. Indonesia Power berupaya menurunkan dampak kegiatan dan keputusan Perusahaan terkait ketenagakerjaan salah satunya melalui kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan. Sehingga kegiatan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan diharapkan mampu menciptakan manfaat bersama bagi Pegawai, *Stakeholder* lain dan Perusahaan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program tanggung jawab Perusahaan, Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan berupaya melibatkan dan mendorong pemasok, pelanggan dan pihak terkait lainnya untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tanggung jawab sosial serta pemenuhan aspek ketenagakerjaan. Rencana program kerja tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kompetensi Pegawai.
2. Program Budaya Perusahaan.
3. Perlindungan Terhadap Pegawai (Hubungan Industrial).

In preparing the Action Plan of Corporate Social Responsibility for Employment, Indonesia Power takes into account the analysis result of the issues, impacts, risks, and approach to and engagement of the stakeholders. Indonesia Power aims to reduce the impact of and decisions made by the Company related to employment, among others through CSR activities. These activities are expected to be capable of creating mutual benefits for employees, other Stakeholders, and the Company itself. In the preparation of the plan and implementation of this program, Indonesia Power, by taking into account its influence, seeks to engage suppliers, customers and relevant parties to promote effective implementation of CSR and meet any aspects of employment. Below is the CSR work plan for 2021 in terms of employment:

1. Employee Competency Development.
2. Corporate Culture Program.
3. Protection for Employees (Industrial Relations).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Mekanisme dan Prosedur Pengaduan dan Konflik Terkait Ketenagakerjaan

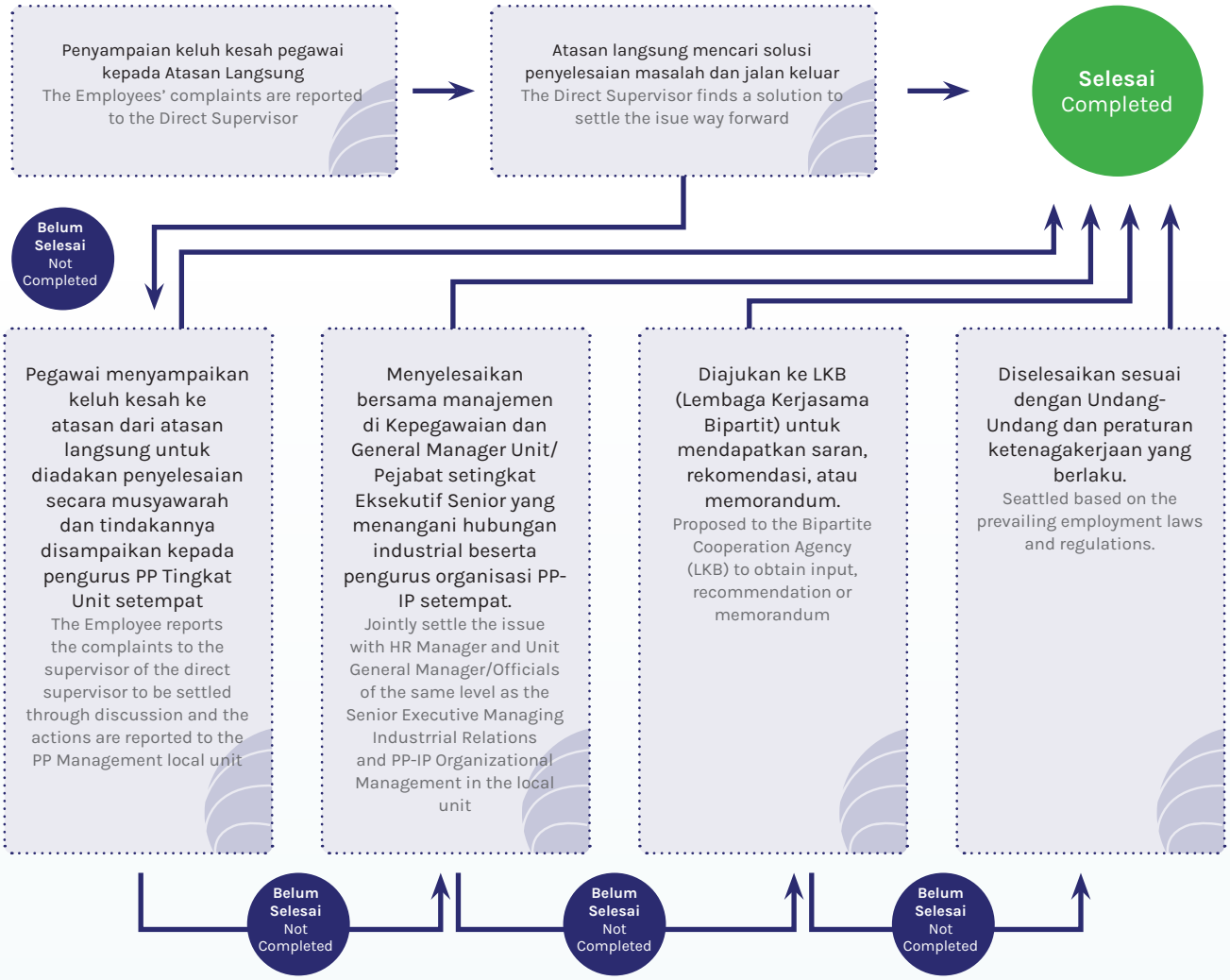
Mechanism and Procedures of Complaint and Conflict Reporting Related to Employment

Indonesia Power menyiapkan perangkat penunjang pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan dengan menyediakan mekanisme penanganan keluhan, keadaan darurat terkait keselamatan kerja dan konflik bidang ketenagakerjaan yang menyimpang dari aturan yang berlaku guna memberikan perlindungan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

To fulfill its obligations, Indonesia Power prepares mechanisms to handle complaints, respond to occupational safety-related emergencies, and resolve employment conflicts to protect employees in carrying out their duties and responsibilities effectively.

Mekanisme penanganan keluhan, keadaan darurat terkait keselamatan kerja dan konflik pegawai, sejalan dengan PKB Bab VIII Hubungan Industrial Pasal 133 tentang Keluh Kesah Pegawai dan Pasal 134 tentang Penyelesaian Keluh Kesah Pegawai. Mekanisme penyampaian keluhan pegawai dapat dilihat pada Flow chart sebagai berikut:

These mechanisms are based on the CLA, Chapter VIII of Industrial Relations, article 133 on employee complaints and article 134 on complaints resolution. The following flow chart outlines the mechanism of complaints resolution:



Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Ketenagakerjaan
Total spending for Employment activities

Biaya pengelolaan ketenagakerjaan Indonesia Power selama tahun 2021, diluar gaji, *Pay For Performance* (P3), dan Bonus/ Insentif adalah sebagai berikut:

Below is Indonesia Power's spending for employment management during 2021, excluding salary, Pay for Performance (P3), and Bonus/Incentive:

Uraian Description	Biaya (Rp. Juta) Total Expense (Rp million)
Kompensasi Pegawai Employee Compensations	138.905,41
Manfaat Pegawai Employee Benefits	904.798,11
Diklat dan Lainnya Education and Training and Others	31.507,14

Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan
Action Plan Implementation of Corporate Social Responsibility for Employment

Pemenuhan atas aspek ketenagakerjaan menjadi perhatian Direksi sebagai manajemen puncak tidak hanya untuk menencapai indikator kinerja tersebut namun dalam rangka menjaga keberlanjutan Perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan tidak terlepas dari peran pegawai untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu memenuhi harapan *stakeholder* khususnya dan dapat menunjang kinerja Perusahaan. Selain itu, Indonesia Power melibatkan *stakeholder* penting dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan program terkait ketenagakerjaan.

Employment is a concern to the Board of Directors as top management, not only in achieving the performance indicators, but also in the context of maintaining the Company's sustainability. In the implementation of CSR for employment, employees also play a significant role in ensuring that all of the activities meet the stakeholders' expectations, particularly related to customers, and support the Company's performance. In addition, Indonesia Power engages key stakeholders to improve the effectiveness of program implementation related to employment.

Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development

Indonesia Power melaksanakan berbagai program pendidikan, pelatihan, sertifikasi maupun bentuk pengembangan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan, sebagai upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta produktivitas sumber daya manusia.

Indonesia Power hold various education, training, and certification programs as well as other development programs adapted to the Company's needs to develop and improve human capital quality and productivity.

Selama tahun 2021, program pengembangan bagi pegawai Indonesia Power dikelola IP Academy melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pembelajaran Prajabatan
   Program Pembelajaran Prajabatan merupakan kegiatan proses seleksi untuk mengevaluasi kesesuaian karakter dan Kompetensi Peserta dengan KKJ, serta untuk memberikan pengenalan dan pemahaman kepada peserta mengenai bisnis inti Perusahaan dan Kompetensi standar kelistrikan.
   Program Pembelajaran Prajabatan dapat terdiri atas :
   a. Pembinaan Sikap Mental Disiplin;
   b. Orientasi Perusahaan;

Below are the programs for the employees managed by IP Academy, delivered throughout 2021.

1. Pre-Service Learning Program
   This is a selection process to evaluate the character compatibility and competency of the participants with the job competency requirements (JCR), also to introduce and elaborate the Company's core business and electricity standard competency.
   This program may consist of:
   a. Discipline coaching;
   b. Company Orientation;

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

c. Pembidangan;
d. *On the Job Training* (OJT).

2. Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi;
Program Pembelajaran Profesi dan sertifikasi diselenggarakan sebagai bagian dari proses pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Bidang untuk memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ) Bidang yang dipersyaratkan pada Jabatan dan sesuai dengan struktur profesi yang berlaku di Perusahaan. Materi Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi mengacu pada standar KKJ dan/atau standar Profesi yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan bisnis Perusahaan. Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan untuk pegawai berupa sertifikasi mandatori, sertifikasi ekspertise dan sertifikasi keahlian.
   a. Sertifikasi Ekspertise : sertifikasi keahlian bidang pembangkitan listrik yang hanya diakui internal Indonesia Power, namu dalam perkembangan nya sertifikasi untuk ekspertise ini juga mengakomodasi sertifikasi kompetensi baik nasional maupun international dari asosiasi/pabrikan sesuai dengan bidang Ekspertise.
   b. Sertifikasi Keahlian : sertifikasi keahlian bidang secara umum dan pengakuan oleh lembaga sertifikasi intenational/nasional misal sertifikasi vibrasi oleh mobius international, infrared thermography oleh asosiasi *infrared thermography, certified refractory personnel* oleh *American Petroleum Institute* (API) dll.
   c. *Community of Expertise* (ComEt) yang merupakan sebuah komunitas keahlian pembangkitan.
3. Program Pembelajaran Kepemimpinan;
Program Pembelajaran Kepemimpinan adalah diklat kepemimpinan yang diselenggarakan Perusahaan sebagai bagian dari proses pengembangan Kompetensi dan pembinaan karir Pegawai untuk memenuhi Kompetensi Utama, Kompetensi Peran dan Kompetensi Bidang yang dipersyaratkan pada setiap Jenjang Jabatan sesuai tuntutan jalur karir yang diproyeksikan bagi Pegawai. Program Pembelajaran Kepemimpinan terdiri atas:
   a. *Executive Education*
   Executive Education (EE), yaitu Pembelajaran untuk memenuhi Kompetensi Utama dan Peran, serta Kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada Jenjang Jabatan fungsional;
   b. *Strategic Specialist Education*
   Strategic Specialist Education (SSE), yaitu Pembelajaran untuk memenuhi Kompetensi Utama dan Peran, serta Kompetensi bidang yang dipersyaratkan pada Jenjang Jabatan fungsional;
   c. *Leadership Development Program Series*
   Leadership Development Program (LDP) Series, yaitu Pembelajaran untuk menyiapkan pemimpin yang mampu bersaing pada level BUMN.

c. Job Classification;
d. On-the-Job Training (OJT).

2. Professional and Certification Learning Program;
This program is a part of the coaching process and Area Competency Development to meet the JCR of the corresponding position and to conform the current professional structure in the Company. The material refers to the JCR standards or applicable national or international professional standards relevant to the Company's business. The certification comprises mandatory certification, expertise certification, and skill certification.
   a. Expertise certification: certification of expertise on electricity acknowledged internally in Indonesia Power. However, it also accommodates the national or international competency certification issued by the relevant association/manufacturer according to the field of expertise.
   b. Skill Certification: skill certification in general and recognition by international/national certification boards, e.g. on vibration by Mobius International, on infrared thermography by the infrared thermography association, certified refractory personnel by American Petroleum Institute (API), etc.
   c. Community of expertise (ComEt), that is a power generation expertise community.
3. Leadership Learning Program;
This takes form as a leadership training held by the Company for employee competency and career development. This program aims at meeting the Main Competency, Role Competency, and Area Competency required for each Position Level according to the career expected for the relevant employees. It consists of:
   a. Executive Education
   Aiming at meeting Main, Role, and Area Competencies required for functional Position Level;
   b. Strategic Specialist Education
   Aiming at meeting Main, Role, and Area Competencies required for functional Position Level.
   c. Leadership Development Program Series
   Aiming at preparing competitive leaders at the level of SOEs.

4. Program Pembelajaran Inisiatif Stratejik Korporat;
   Program Pembelajaran Inisiatif Strategik Korporat merupakan program Pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja Unit/Korporat dalam jangka pendek maupun jangka panjang atau berbasis *Business Issue/Performance* dan *Business Concern.*
5. Program Pembelajaran Penunjang;
   Pembelajaran Penunjang adalah pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh Perusahaan di luar Program Pembelajaran Profesi dan Sertifikasi, maupun Program Pembelajaran Kepemimpinan. Pembelajaran Penunjang tidak bersifat wajib, dan dilaksanakan sesuai kebutuhan Perusahaan. Pembelajaran Penunjang meliputi :
   a. Pendidikan Formal;
   b. *Workshop*/Lokakarya/Seminar;
   c. *Knowledge Management.*
6. Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti
   Diklat Pembekalan Masa Purna Bakti diselenggarakan Perusahaan untuk memberikan pembekalan dan persiapan bagi Pegawai dalam menghadapi Masa Purna Bakti yang memuat materi penyiapan sikap, mental, perilaku Pegawai dan isteri/suami dalam masa pensiun. Peserta Program Pembekalan Masa Purna Bakti adalah Pegawai yang memiliki sisa masa kerja maksimum 5 (lima) tahun sebelum Usia Pensiun Normal atau Pegawai yang berhak mendapat Program Pembekalan akibat terbitnya suatu kebijakan Direksi dengan ketentuan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin Pegawai atau tidak sedang menjalani sanksi disiplin.

Uraian lebih rinci terkait pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai dijelaskan dalam Bab Profil Perusahaaan Sub Bagian Profil Pegawai Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

4. Corporate Strategic Initiative Learning Program;
   This is a program to improve short- and long-term performance of the Units/Company based on Business Issue/ Performance and Business Concern.

5. Supporting Learning Program;
   This program provides education and training courses beyond the Professional and Certification Programs and Leadership Learning Program. It is an optional program held following the needs of the Company. Supporting learning program includes:
   a. Formal Education;
   b. Workshop/Seminar;
   c. Knowledge Management.

6. Post-Employment Preparation Education and Training
   This program is provided by the Company for retiring employees to prepare and plan their mindset, mental outlook, and conducts for them and their spouse during their retirement. It is arranged for employees with at most remaining 5 (five) years of service term prior to the Normal Retirement Age or employees entitled to the program as specified by the policy issued by the Board of Directors so long as the corresponding employees are not under investigation of or sanctioned for disciplinary violation.

Detailed information on the execution of employee competency development programs is elaborated on Company Profile section, particularly in Company Employee Profile subsection.

Program Budaya Perusahaan
Corporate Culture Program

Program Budaya Perusahaan menjadi sarana dalam menginternalisasikan nilai-nilai Perusahaan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang senantiasa menjunjung nilai-nilai luhur dengan semangat memajukan Perusahaan untuk mengabdi bagi Bangsa Indonesia. Program Budaya Perusahaan di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Internalisasi *Core Values* AKHLAK;
2. *Leadership Quality Feedback* (LIQUID) Internal;
3. Program *Leader* Sapa Budaya;
4. *Briefing Code of Conduct* (CoC);
5. Program Budaya Spesifik: DAYA CERIA;
6. Program Budaya Inti: PLN123;
7. Semesta Budaya IP (Semangat Bersama Impelementasi Budaya Indonesia Power); dan
8. *Change Agent /Ranger.*

Corporate Culture Program is a means of internalizing the Company's values to create human capital that always upholds the noble values in the spirit of promoting the Company and serving the nation. The 2021 Corporate Culture Program is listed as follows:

1. Core Values Internalization of AKHLAK
2. Internal Leadership Quality Feedback (LIQUID);
3. Sapa Budaya Leadership Program;
4. Code of Conduct (CoC) Briefing;
5. Specific Culture Program: DAYA CERIA;
6. Core Culture Program: PLN123;
7. Semesta Budaya IP (Semangat Bersama Implementasi Budaya Indonesia Power/Indonesia Power's Collective Spirit of Cultural Implementation); and
8. Change Agent/Ranger.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Kegiatan terkait dengan Program Budaya Perusahaan di tahun 2021 diuraikan lebih jelas pada Bab Profil Perusahaaan dalam Laporan Tahunan ini.

Activities related to the Corporate Culture Program in 2021 are detailed in the Company Profile section.

Perlindungan Terhadap Pegawai (Hubungan Industrial)
Protection for Employees (Industrial Relations)

Perlindungan bagi pegawai sesuai dengan undang-undang diantaranya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa pemberlakukan pembedaan terhadap ras, jenis dan kelamin; pemberlakuan hal yang sama terhadap penyandang cacat; pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur; kebebasan untuk berserikat serta kewajiban pemberian hak yang berwujud perlindungan hukum terhadap pegawai. Indonesia Power memberikan kebebasan bagi pegawai untuk membentuk Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) sebagai sarana bagi pegawai untuk berorganisasi dan menyalurkan aspirasinya. Hal tersebut wujud kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28 E ayat 3. Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) telah resmi terdaftar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.KEP 413/M/BW/1999 tanggal 5 November 1999 dan telah dicatatkan ulang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP 16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001 dengan nomor bukti pencatatan Nomor 165/V/P/X/2001 tanggal 09 Oktober 2001 di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kota Madya Jakarta Selatan. Selanjutnya antara Indonesia Power dengan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Indonesia Power telah menyusun PKB periode 2020-2021 yang disahkan melalui Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia c.q Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 014/PHIJSK-PK/PKB/I/2020 tanggal 15 Januari 2020. Ketentuan yang diatur dalam PKB mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hubungan kerja;
2. Pembinaan dan Pengembangan Pegawai;
3. Pemberhentian Pegawai;
4. Penghargaan;
5. Perlindungan (Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan dan Kesehatan); dan
6. Hubungan Industrial.

In accordance with the law, protection of employees comprises fair and proper employment without racial and gender discriminations; equal rights for people with disabilities; limitation of work time, break time, leaves, and holidays; freedom of association and legal protection. There is an Employee Association of PT Indonesia Power (PP IP) for the employee to assemble and voice their aspiration. It also represents the Company's compliance with the 1945 Constitution, article 28 E paragraph 3. Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) is officially registered at the Ministry of Manpower and Transmigration under the Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. KEP 413/M/BW/1999 dated November 05, 1999 and has been re-registered under the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. KEP 16/MEN/2001 dated October 15, 2001 under registration number 165/V/P/X/2001 dated October, 2001 at the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, South Jakarta Municipality. Furthermore, Indonesia Power and PP IP have entered into Collective Labor Agreement (CLA). CLA for the period of 2020-2021 has been ratified under the Decree of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia c.q. Directorate General for Industrial Relations and Social Security Number: 014/PHIJSK-PK/PKB/I/2020 dated January 15, 2020. The provisions set out in the CLA comprise the following aspects:

1. Employment relationship;
2. Employee Coaching and Development;
3. Employee termination;
4. Awards;
5. Protection (Employment and Health Security); and
6. Industrial Relations.

Indonesia Power melaporkan setiap tahun mengenai ketenagakerjaan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia merujuk pada Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. Laporan memuat keterangan identitas perusahaan dan keadaaan ketenagakerjaan yang meliputi waktu kerja,

Annually, Indonesia Power prepares a report on employment to the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia with reference to article 6 paragraph 2 of the Law No. 7 of 1981 on the Company's Compulsory Employment Report. The report contains the description of corporate identity and employment consisting of work hours, production waste status, remuneration, company

keadaan limbah produksi, pengupahan, fasilitas perusahaan, jaminan perlindungan ketenagakerjaan, hubungan industrial, perencanaan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja. Perusahaan telah melaporkan Wajib Lapor Tenaga Kerja tahun 2021 pada tanggal 9 Juli 2021.

facilities, social security, industrial relations, planning and development of manpower competence. The Company has submitted such a report for 2021 on July 9, 2021.

Realisasi kegiatan Hubungan Industrial antara Manajemen dengan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) dilaksanakan melalui pertemuan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit) dan Pertemuan Periodik. LKS Bipartit diselenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali, sedangkan Pertemuan Periodik antara Manajemen dan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. Sepanjang tahun 2021, Indonesia Power telah berpartisipasi dalam melaksanakan hubungan industrial melalui kegiatan pertemuan koordinasi antara Manajemen dengan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP) yang diselenggarakan pada:

The industrial relation between the Management and PP IP is realized through the Bipartite Cooperation Institution meeting (held at least every month) and regular meetings (held half-yearly). Throughout 2021, Indonesia Power has fostered the industrial relation through the following coordination meetings between the management and PP IP:

1. Pertemuan LKS Bipartit Januari 2021 dengan agenda sharing knowledge tentang Donor Plasma Konvalesen oleh Dr. Amalia, B.Med. SC., MKK dan laporan kegiatan *Virtual Competition.*
2. Pertemuan Direksi dan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat pada tanggal 23 Februari 2021.
3. Pertemuan LKS Bipartit Maret 2021 dengan agenda antisipasi pola kerja pegawai *Head Office* selama masa pandemi pada tanggal 29 April 2021.
4. Pertemuan Direksi dan Persatuan Pegawai PT Indonesia Power Tingkat Pusat pada tanggal 6 Mei 2021.
5. Pembahasan *draft* Surat Keputusan Asesmen Kompetensi serta diskusi dan *feedback* atas kejadian risiko serta kendala implementasi Surat Keputusan Sistem Manajemen Talenta, Surat Keputusan Pejabat Pengganti Sementara, dan Surat Keputusan Uji Kompetensi Bidang untuk Penempatan Jabatan Ahli Muda pada tanggal 2 Juni 2021.
6. LKS Bipartit Agustus 2021 pada tanggal 13 Agustus 2021.
7. Pembahasan *draft* Surat Keputusan Tugas Karya pada tanggal 6 Oktober 2021.
8. Pembahasan Permasalahan Unit (Pertemuan Periodik) pada tanggal 20 Desember 2021.
9. Pembahasan Kesepakatan PKB 2022-2023 pada tanggal 21 Desember 2021.
10. Penandatanganan PKB PT Indonesia Power Tahun 2022-2023 pada tanggal 28 Desember 2021.

1. Bipartite Cooperation Institution meeting in January 2021 with the agenda of knowledge sharing on convalescent plasma donors with Dr. Amalia, B.Med. SC., MKK as the speaker and Virtual Competition activity report.
2. Meeting between the Board of Directors and Central PP IP on February 23, 2021.
3. Bipartite Cooperation Institution March Meeting on April 29, 2021 with the agenda of anticipating Head Office employee's work setup during the pandemic.
4. Meeting between the Board of Directors and Central PP IP on May 06, 2021.
5. Discussion on Competency Assessment Decree draft and discussion and feedback on the risks and constraint from the implementation of Talent Management System Decree, Temporary Acting Officer Decree, and Area Competency Test Decree for the Placement of Associates on June 02, 2021.
6. 2021 Bipartite Cooperation Institution on August 13, 2021.
7. Discussion of Secondment Decree on October 06, 2021.
8. Discussion of Issues in Units (Periodic Meeting) on December 20, 2021.
9. Discussion of 2022-2023 CLA on December 21, 2021.
10. Signing of 2022-2023 CLA of PT Indonesia Power on December 28, 2021.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Remunerasi Pegawai
Employee Remuneration

Indonesia Power berupaya mendorong nilai tambah bagi pegawai dengan memberikan standar remunerasi yang kompetitif sesuai nilai pekerjaannya secara internal dan eksternal. Remunerasi yang diberikan Indonesia Power berupa kompensasi dan manfaat pegawai. Kebijakan terkait sistem remunerasi Indonesia Power telah tercantum di dalam PKB tahun 2020-2021 Bab VI Pasal 55 tentang Dasar Penghargaan.

Indonesia Power seeks to promote added value for employees by providing competitive remuneration standards according to their job value internally and externally. This remuneration consists of compensations and benefits. Related policy on remuneration system of Indonesia Power is set out in 2020-2021 CLA, Chapter VI Article 55 on the Basis of Reward.

Remunerasi melalui Kompensasi Remuneration through Compensation	Remunerasi melalui Employee Benefit Remuneration through Employee Benefits
Gaji: *Pay for Person* (P1) dan *Pay for Position* (P2) Salary: Pay for Person (P1) and Pay for Position (P2)	Fasilitas : Rumah Jabatan, Kendaraan Dinas, Perjalanan Dinas, Sarana Kerja. Facilities: Official residence, official vehicles, business travel, work facilities.
Tunjangan lainnya yaitu Tunjangan tetap yang terdiri dari Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Cuti Tahunan, Tunjangan Cuti Besar, Tunjangan Winduan. Fixed allowance comprising annual festive allowance, annual leave allowance, long service allowance, octennial service allowance.	Benefit : Tunjangan Hari Tua, Pemeliharaan Kesehatan, Tunjangan Kecelakaan Kerja, Uang Pelepasan bagi Pegawai yang berhenti bekerja atau pensiun, Bantuan Pemakaman dan Duka Cita, Pakaian Kerja, Pakaian Dinas, dan Pakaian Olah Raga, Pendidikan dan Pelatihan, Family dan/atau Employee Gathering Benefits: Old age benefit, Healthcare benefit, Occupational injuries benefit, Retirement gratuity, Bereavement Allowance, Work Uniforms, Official Uniforms, Sport Uniforms, Education and Training, Family and/or Employee Gathering.
Pay for Performance (P3) atau imbalan kerja. Pay for Performance (P3) or job rewards.	

Pemberian komponen remunerasi bagi pegawai selain berdasarkan nilai pekerjaannya secara internal dan eksternal, juga berdasarkan pada status kepegawaian yang tetap dan tidak tetap. Namun demikian, Indonesia Power memastikan bahwa hak-hak pegawai tidak tetap telah sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku.

Remuneration is given to employees based on their job value (internally and externally) and employment status (permanent and non-permanent). Nevertheless, Indonesia Power always ensures that the rights of non-permanent employees conforms to the existing standard of regulations.

Perbedaan Komponen Remunerasi Berdasarkan Status Kepegawaian
Remuneration Component by Employment Status

Kebijakan Policy	Benefit	Status Kepegawaian Status Personnel		
		Pegawai Tetap Employees Permanent	TKWT Contract Employee	Alih Daya Outsourcing
Remunerasi Remuneration	Gaji/Imbalan Salary/wage	√	√	√
	Kompensasi Lembur Overtime Compensation	√ (tertentu) (specific)	-	√
	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	√	√	√
	Tunjangan Cuti Tahunan Annual Leave Allowance	√	-	√
	Uang Pelepasan Severance Pay	√	-	√
	Tunjangan Hari Tua Old Age Allowance	√	-	√
Benefit	Tunjangan Kecelakaan Kerja Occupational Accident Benefit	√	√	√
	Jaminan Kesehatan Health Social Security	√	√	-
	Bantuan Pemakaman dan Dukacita Bereavement Allowance	√	-	-
	Pinjaman Lunak Soft loans	√	-	-
	Bantuan Bencana Alam Natural Disaster Relief	√	-	-
Kebijakan Lainnya Other Policies	Bantuan Fasilitas Sewa Rumah (BFSR) Home Rental Assistant (BFSR)	√ (tertentu) (specific)	-	-
	Bantuan Fasilitas Kendaraan Operasional (BFKO) Operational Vehicle Assistance (BFKO)	√ (tertentu) (specific)	-	-
	Pendidikan Formal Formal Education	√	-	-
	Pelatihan Training	√	-	√

Indonesia Power juga berupaya memenuhi kepatuhan terhadap upah minimum dimana rata-rata rasio gaji pegawai baru dibandingkan upah minimum sebesar 2,33.

Indonesia Power also strives to comply with the minimum pay policy by maintaining the average ratio of new employee's salary to minimum wage at 2.33.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Unit	Provinsi Province	Rasio Gaji Pegawai Baru Dibandingkan Upah Minimum Ratio of New Employee's Salary to Minimum Wage
Head Office	DKI Jakarta	1.30
Suralaya PGU	Banten	2.27
Priok POMU	DKI Jakarta	2.27
Saguling POMU	Jawa Barat West Java	3.08
Kamojang POMU	Jawa Barat West Java	3.09
Semarang PGU	Jawa Tengah Central Java	3.11
Mrica PGU	Jawa Tengah Central Java	3.05
Grati POMU	Jawa Timur East Java	2.99
Bali PGU	Bali	2.23
MSU	DKI Jakarta	1.27
PLTU Banten 1 Suralaya OMU SPP Banten 1 Suralaya OMU	Banten	2.36
PLTU Banten 2 Labuan OMU SPP Banten 2 Labuan OMU	Banten	2.12
PLTU Banten 3 Lontar OMU SPP Banten 3 Lontar OMU	Banten	2.32
PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU SPP Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU	Jawa Barat West Java	2.88
PLTU Jawa Tengah 2 Adipala OMU SPP Jawa Tengah 2 Adipala OMU	Jawa Tengah Central Java	2.67
PLTU Pangkalan Susu OMU SPP Pangkalan Susu OMU	Sumatera Utara North Sumatra	2.29
PLTGU Cilegon OMU CCPP Cilegon OMU	Banten	2.36
PLTU Barru OMU SPP Barru OMU	Sulawesi Selatan South Sulawesi	1.86
PLTU Jeranjang OMU SPP Jeranjang OMU	Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara	2.70
Project Unit	DKI Jakarta	1.26
Rata-rata Average		2.33

Indonesia Power juga berupaya melindungi hak pegawai atas jaminan sosial dengan mengikut sertakan setiap pegawai organik dalam Program Jaminan Sosial baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan. Selain itu, Indonesia Power juga melaksanakan Program Pensiun meliputi Program Pensiun Iuran Pasti dan Program Pensiun Manfaat Pasti.

Indonesia Power strives to protect worker's right to social security by registering every permanent employee to both Employment and Health Social Security Programs. In addition, Indonesia Power provides Pension Plan which covers Defined Contribution Retirement Plan and Defined Benefit Retirement Plan.

Tingkat *Turnover* Pegawai
Employee Turnover Rate

Tingkat *turnover* pegawai tahun 2021 sebesar 1,75% yaitu sebanyak 74 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu 124. Berikut adalah tabel *turnover* pegawai Indonesia Power dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

The Company's turnover rate of 2021 was 1.75% or 74 people, declining from 124 people in 2020. The following table outlines the turnover details in the past three years:

Penyebab Reason	2019	2020	2021
Pensiun Retired	135	101	58
Meninggal Dunia Passed away	6	10	9
Diberhentikan Dismissed	0	1	0
Mengundurkan Diri Resigned	10	12	7
Jumlah Turnover Number of Leaving Employees	**151**	**124**	**74**
Total Pegawai Total Employee	**4.320**	**4.216**	**4.221**
Persentasi *Turnover* Turnover Percentage	**3,50%**	**2,94%**	**1,75%**

Penurunan tingkat *turnover* dari tahun sebelumnya disebabkan oleh menurunnya seluruh jumlah turnover untuk masing-masing penyebab khususnya pensiun dengan kontirbusi penurunan terbesar. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan aspek ketenagakerjaan di lingkungan Indonesia Power cukup baik sebagai dampak dari upaya Perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan.

This lower total rate of turnover roots from declining number of turnover of each cause, where the largest number is due to retirement. From this statistics, Indonesia Power is considered capable of meeting its corporate social responsibility for employment.

Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja
Gender Equality and Employment Opportunity

Indonesia Power berupaya menghindari segala bentuk diskriminasi dalam praktik ketenagakerjaan dengan menerapkan prinsip keberagaman baik dari aspek suku, ras, agama, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang sosial dan difable. Indonesia Power juga menerapkan prinsip kesetaraan mulai dari tahap rekrutmen, program pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir, sampai dengan pemberian remunerasi dan kesejahteraan kepada pegawai tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama, dan faktor keberagaman lainnya.

Indonesia Power seeks to avoid all forms of discrimination in employment by holding the principle of diversity on various aspects, such as ethnicity, race, religion, gender, education, social background, and disability. Indonesia Power also applies the principle of equality in the employment steps, from recruitment, competency development, performance assessment, career development, to remuneration and compensation provision, regardless of gender, religion, and other diversity factors.

Selama tahun 2021, tidak terdapat laporan mengenai insiden diskriminasi yang berlandaskan pada suku, ras, warna kulit, gender, agama, opini politik, asal usul sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal di seluruh operasional Perusahaan.

During 2021, there had been no reports of discriminatory incidents involving the Company's stakeholders.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Fasilitas Sosial Khusus dan Mendukung Partisipasi Kerja Kaum Perempuan

Special Social Facilities and Support for Women's Participation

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2020-2021 pasal 92 terkait sarana pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ruang laktasi bagi Ibu menyusui serta pasal 100 terkait alat rehabilitasi diantaranya berupa alat bantu dengar, alat penyangga cacat tubuh, kacamata dan alat pengganti penunjang fungsi anggota badan manusia (Prothesa) merupakan wujud komitmen Indonesia Power dalam memenuhi hak Pegawai atas fasilitas sosial khusus.

Indonesia Power respects employee's rights to special social facilities as regulated in 2020-2021 Collective Labor Agreement (CLA), article 92 on health care facilities, including providing nursing rooms, and article 100 on rehabilitation equipments, such as hearing aid, assistive devices, spectacles, and prosthesis.

Selain itu, Indonesia Power memberikan dukungan atas partisipasi kerja kaum perempuan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2020-2021, Pasal 82 terkait Cuti Bersalin, Pasal 84 terkait Cuti Haid dan Pasal 86 tentang Ijin Karena Kepentingan. Selain itu, diperkuat juga dengan Surat Keputusan Direksi No. 49.K/010/IP/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Cuti Sakit, Cuti Haid dan Cuti Bersalin. Realisasi cuti melahirkan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

The Agreement also represents Indonesia Power's support for women's participation as regulated in article 82 on Maternity Leave, article 84 on menstrual leave, and article 86 on personal leave. This is also reinforced by the Decree of the Board of Directors No. 49.K/010/IP/2010 dated May 19, 2010 on Sick Leave, Menstrual Leave, and Maternity Leave. The table below presents the data on employee's maternity leave in 2021:

Pegawai Employees	Wanita Female	Pria* Male*
Jumlah pegawai yang berhak mendapatkan cuti melahirkan Number of employees entitled to the maternity leave	20	288
Jumlah pegawai yang mengambil cuti melahirkan Number of employees taking maternity leave	20	288
Jumlah pegawai yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir Number of employees returning to work after maternity leave	20	288
Jumlah pegawai yang kembali bekerja setelah cuti melahirkan berakhir, yang masih dipekerjakan kembali 12 bulan setelah kembali bekerja Number of employees returning to work after maternity leave and reemployed 12 months following their return to work	20	288
Tingkat pegawai yang mengambil cuti melahirkan yang kembali bekerja Rate of employees returning to work after maternity leave	100,00%	100,00%
Tingkat pegawai yang kembali setelah masa cuti berakhir, yang masih dipekerjakan kembali 12 bulan setelah kembali bekerja Number of employees returning to work after leave and reemployed 12 months following their return to work	100,00%	100,00%

*Pegawai Pria yang mengambil ijin mendampingi istri melahirkan
*Male employees taking paternity leave

Penanganan Pengaduan dan Konflik Terkait Ketenagakerjaan

Handling of Complaints and Conflicts Related to Employment

Selama tahun 2021, tidak terdapat pengaduan terkait pelanggaran praktik ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia termasuk insiden diskriminasi, insiden pelanggaran maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat dan insiden kerja paksa yang dialami pegawai Perusahaan yang diajukan pegawai kepada Perusahaan.

During 2021, no complaints were filed on employment and human rights, such as discrimination, violation against freedom of association, and forced labor, by the employee to the Company.

Kategori Pengaduan Konflik Complaints Filed in 2021	Pria* Male*
Pengaduan terkait pelanggaran praktik ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Violations against employment and human rights.	0
Insiden pelanggaran maupun pengaduan terkait kebebasan berserikat. Violations against freedom of association.	0
Insiden kerja paksa yang dialami pegawai Perusahaan. Forced labor.	0

Engagement Pegawai
Employee Engagement

Pengukuran *Employee Engangement Index* (EEI) di tahun 2021 menggunakan *framework* yang bisa diperbandingkan dengan Indonesia *Norms* dan BUMN *Norms*. Dengan penggunaan framework yang berbeda dengan tahun lalu, hasil menunjukkan nilai engagement sudah cukup tinggi dibandingkan dengan Indonesia *Norms* dan BUMN *Norms*, namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan pengukuran menggunakan *framework* yang sama terjadi penurunan. Hasil survei menunjukan bahwa skor EEI sebesar 88,00, mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan skor 90,00. Penurunan *engagement* pegawai salah satunya terkait dengan keberlangsungan/prospek perusahaan ke depan yang dipengaruhi oleh isu Holdingisasi bidang Ketenagalistrikan dan perluasan bisnis Perusahaan ke arah *Beyond* kWh.

To measure Employee Engagement Index (EEI) in 2021, the Company applied a framework comparable to Indonesia Norms and SOEs Norms. With the new framework for this year, the engagement value is significantly high with such comparisons. However, the number decreases when measured with the framework used in the previous year. The survey result indicates that the EEI score for 2021 is 88.00, dropping from 90.00 in 2020. This decline roots from, among others, the Company's sustainability/prospect which is influenced by the issue of Holdingization of electricity sector and the Company's expansion towards Beyond kWh.

Hasil Survei HRSE, kemudian ditindaklanjuti Indonesia Power dengan melaksanakan *workshop* FGD (*Focus Group Discussion*) konfirmatori hasil survei HRSE pada tanggal 27 - 28 Oktober 2021, dengan tujuan untuk memvalidasi hasil yang diperoleh dari Survei HRSE 2021 dan melakukan penelusuran/*inquiry* yang lebih mendalam mengenai latar belakang dari temuan yang diperoleh melalui Survei HRSE 2021. Berdasarkan hasil survei HRSE dan konfirmatori melalui FGD, kemudian ditindaklanjuti dengan *Workshop* Penyusunan *Action Plan* Survei HRSE 2021 pada tanggal 24 - 25 November 2021, untuk mendapatkan *Action Plan* Survei HRSE 2022 yang tepat dan komprehensif serta sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

The Company then followed up this finding by holding a Focus Group Discussion (FGD) on October 27-28, 2021. The purpose is to validate the results from 2021 HRSE Survey and conducting an in-depth tracking/inquiry of findings from the survey. Based on the HRSE survey result and the FGD, workshop on the development of HRSE Survey 2021 Action Plan was then held on November 24-25, 2021 to formulate an accurate and comprehensive Action Plan for 2022 HRSE Survey, which meets the Company's needs.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Corporate Social Responsibility for Occupational Health and Safety

Komitmen dan Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Commitment and Policy on Occupational Health and Safety (OHS)

Inisiatif program tanggung jawab sosial bidang kesehatan dan keselamatan kerja Indonesia Power merupakan bentuk komitmen dalam membangun budaya K3 demi terwujudnya *zero accident*, membangun kesiagaan tanggap bencana di seluruh unit pembangkit, menciptakan unit kerja (pembangkit dan non-pembangkit) yang bersih guna mengurangi potensi kecelakaan kerja serta patuh terhadap hukum dan regulasi.

Tanggung jawab Perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai dampak dari kegiatan operasional Indonesia Power mengacu pada peraturan perundangan diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Selain itu, Indonesia Power juga menetapkan kebijakan internal Perusahaan yang selaras dan mengacu pada peraturan perundangan serta menyesuaikan praktik K3 di industri pembangkitan listrik sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2020-2021.
2. Keputusan Direksi Nomor 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power.
3. Keputusan Direksi Nomor 165.K/010/IP/2016 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PLTU Batubara di PT Indonesia Power.
4. Keputusan Direksi Nomor 02.K/010/IP/2017 tentang Kawasan Dilarang Merokok.
5. Surat Edaran Direksi Nomor 14.E/012/IP/2017 tentang Petunjuk Warna Cat Lantai pada Unit Pembangkitan.

CSR for OHS is a commitment of Indonesia Power to establishing OHS culture to achieve zero accident, developing disaster response in all plants, establishing clean work units (plants and non-plants) to minimize occupational accident potential, and complying with legal and regulatory requirements.

Indonesia Power's corporate responsibility for OHS in relation to its operation refers to the following regulations:

1. 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 Paragraph 2.
2. Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1970 on Work Safety.
3. Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 on Employment.
4. Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2009 on Electricity.
5. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 of 2012 on the Implementation of Occupational Health and Safety Management System.

In addition, Indonesia Power has also stipulated the following internal policies aligning with and based on the regulations of law and the OHS practices in the power plant industry as follows:

1. 2020-2021 Collective Labor Agreement (CLA)
2. Decree of the Board of Directors No. 41.K/010/IP/2012 on Occupational and Environmental Safety and Health Policy in PT Indonesia Power.
3. Decree of the Board of Directors No. 165.K/010/IP/2016 on Occupational and Environmental Safety and Health Policy in coal-fired SPPs of PT Indonesia Power.
4. Decree of the Board of Directors Number 02.K/010/IP/2017 on Non-Smoking Area.
5. Decree of the Board of Directors Number 14.E/012/IP/2017 on Floor Paint Color Guide in Power Generation Units.

6. Surat Edaran Direksi Nomor 45.E/012/IP/2019 tentang Pedoman Penggunaan Alat Pelindung Diri dalam bentuk *Safety Helmet* dan *Wearpack* di Lingkungan Unit Kerja PT Indonesia Power.
7. Keputusan Direksi Nomor Nomor 115.K/010/IP/2021 tentang Implementasi Industrial Cleaning di PT Indonesia Power.
8. Kebijakan Direksi Nomor 141.K/010/IP/2021 tentang Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractor Safety Management System*/CSMS).

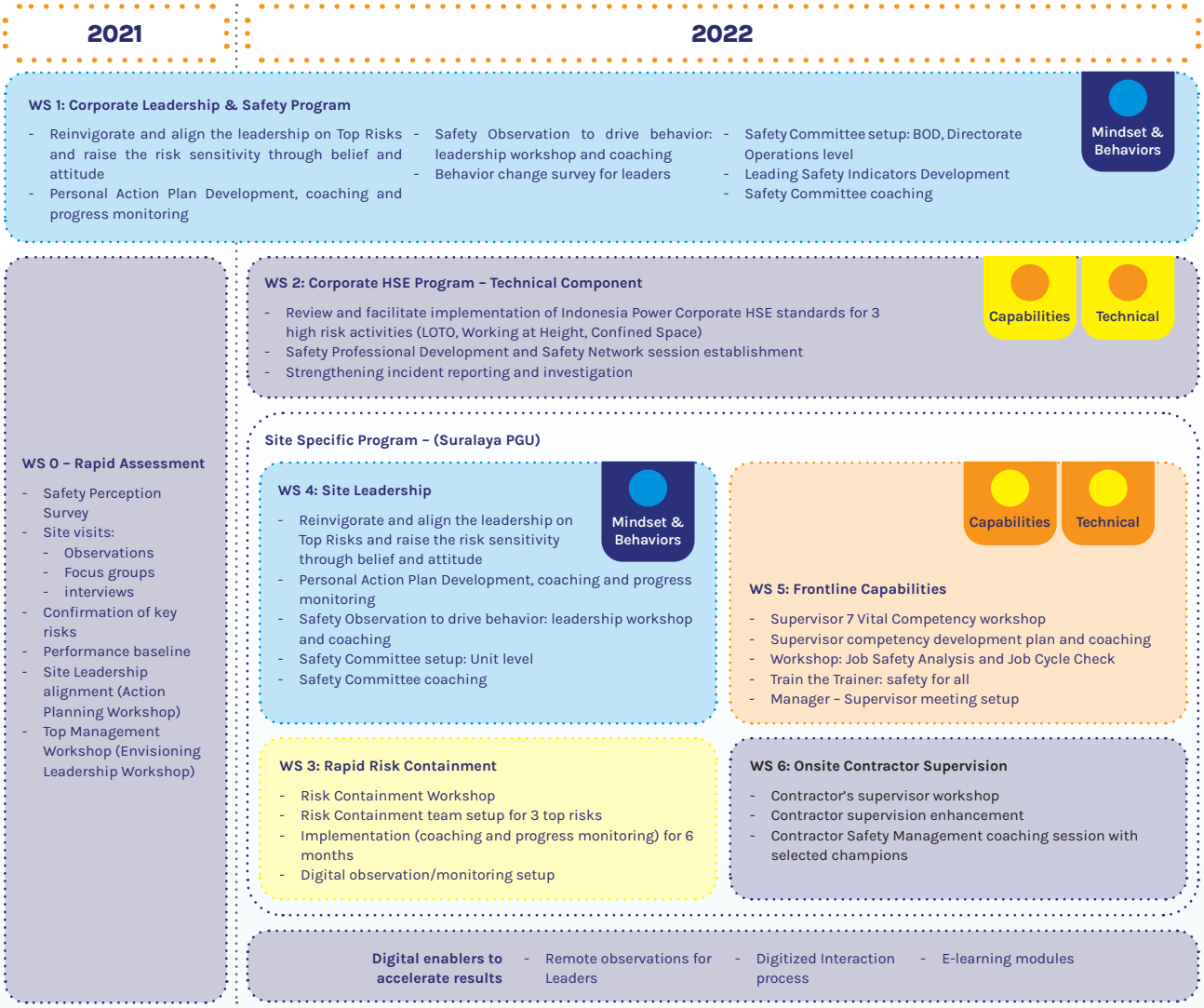
Indonesia Power telah menyusun *Roadmap* K3 untuk tahun 2019 – 2023 sebagai tahapan strategi penerapan kegiatan K3 secara berkelanjutan. Indonesia Power menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pegawai melalui penyediaan lingkungan kerja yang aman, nyaman, produktif serta bebas dari kecelakaan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja.

6. Circular of the Board of Directors issue Number 45.E/012/IP/2019 on Instruction for Use of Safety Helmets and Wearpacks as Personal Protective Equipments in the Work Unit Environment of PT Indonesia Power.
7. Decree of the Board of Directors No. 115.K/010/IP/2021 on the implementation of industrial cleaning at PT Indonesia Power.
8. Policy of the Board of Directors No. 141.K/010/IP/2021 on the implementation of Contractor Safety Management System (CSMS).

Indonesia Power has also developed OHS Roadmap of 2019-2023 as a strategy of continuous OHS activity implementation. Indonesia Power ensures the safety and health of all employees by providing a safe, comfortable, and productive work environment free from accident, fire, environmental pollution, and occupational disease.

Roadmap Transformasi Budaya K3 Indonesia Power

Roadmap of Indonesia Power's OHS Cultural Transformation



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Action Plan of Corporate Responsibility for Occupational Health and Safety

Rencana kegiatan tanggung jawab sosial bidang kesehatan dan keselamatan kerja disusun berdasarkan hasil analisis isu, dampak dan risiko serta pendekatan dan pelibatan *stakeholder* dalam perumusan tanggung jawab sosial terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Indonesia Power berupaya menurunkan dampak kegiatan dan keputusan Perusahaan terkait kesehatan dan keselamatan kerja salah satunya melalui kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan. Sehingga kegiatan tanggung jawab sosial terkait kesehatan dan keselamatan kerja diharapkan mampu menciptakan manfaat bersama bagi Pegawai, *Stakeholder* lain dan Perusahaan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program tanggung jawab Perusahaan, Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan berupaya melibatkan para pihak terkait untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tanggung jawab sosial serta pemenuhan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Rencana program kerja tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab bidang kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Program strategis kesehatan dan keselamatan kerja.
2. Program rutin kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Program peningkatan keselamatan kerja.
4. Program peningkatan kesehatan kerja.

The Action Plan of Corporate Social Responsibility for OHS is prepared based on the analysis result of the issues, impacts, risks, and approach to and engagement of the stakeholders. Indonesia Power aims to reduce the impact of and decisions made by the Company related to OHS, among others through CSR activities. These activities are expected to be capable of creating mutual benefits for employees, other Stakeholders, and the Company itself. In the preparation of the plan and implementation of this program, Indonesia Power, by taking into account its influence, seeks to engage relevant parties to promote effective implementation of CSR and meet any aspects of OHS. Below is the CSR work plan for 2021 in terms of employment:

1. Strategic program on occupational health and safety.
2. Regular program on occupational health and safety.
3. Occupational safety improvement program.
4. Occupational health improvement program.

Mekanisme dan Prosedur Pengaduan dan Konflik Terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja

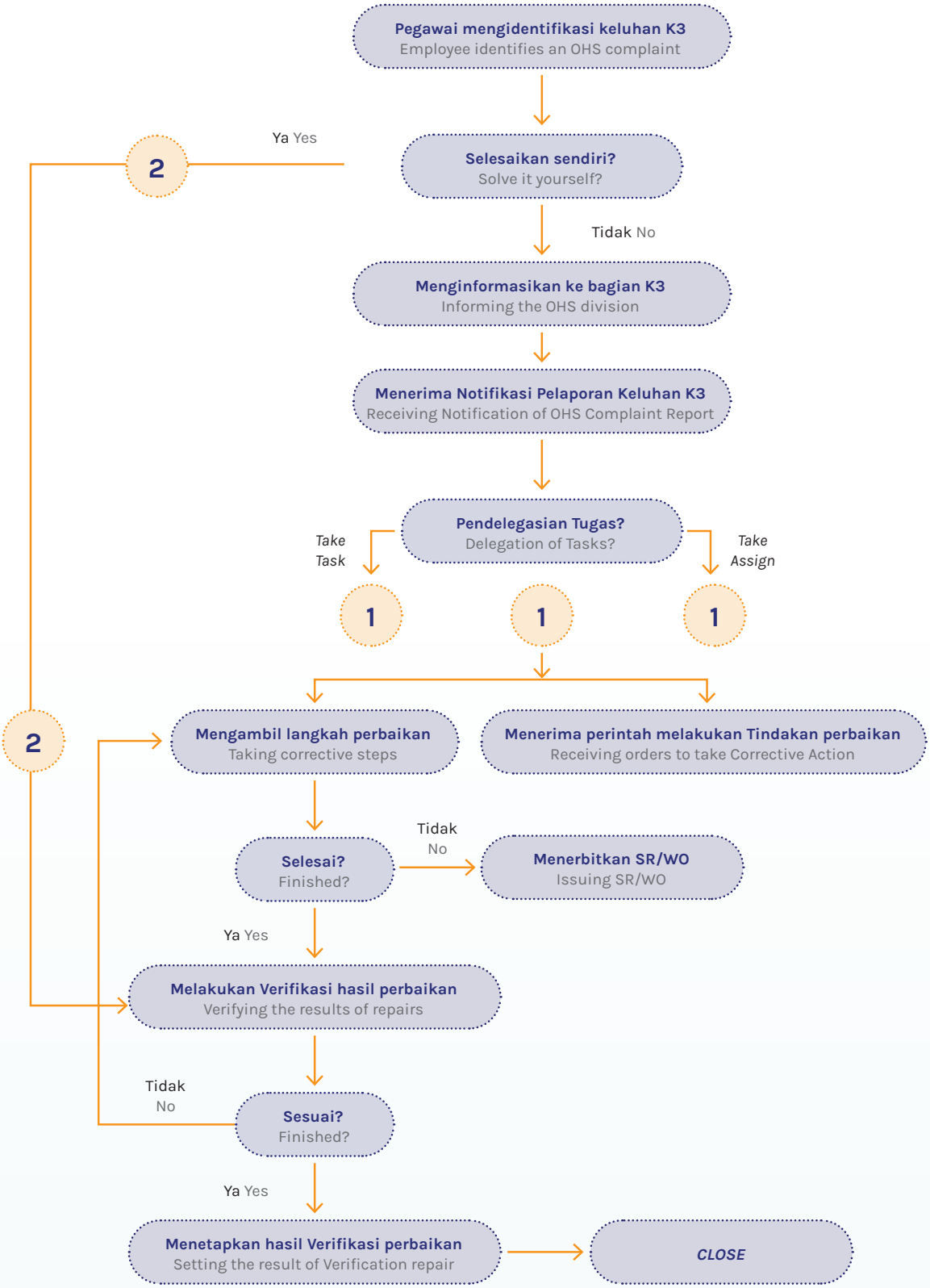
Mechanism and Procedures of Complaints and Conflict Handling Related to OHS

Indonesia Power menyiapkan perangkat penunjang pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan dengan menyediakan mekanisme penanganan keluhan, keadaan darurat dan konflik terkait kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan perlindungan bagi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

To carry out the Company's responsibilities, Indonesia Power prepares a mechanism for handling complaints, emergencies, and social conflicts related to OHS in accordance with the applicable provisions to protect the staffs in carrying out their duties and responsibilities effectively.

Mekanisme Penanganan Keluhan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja

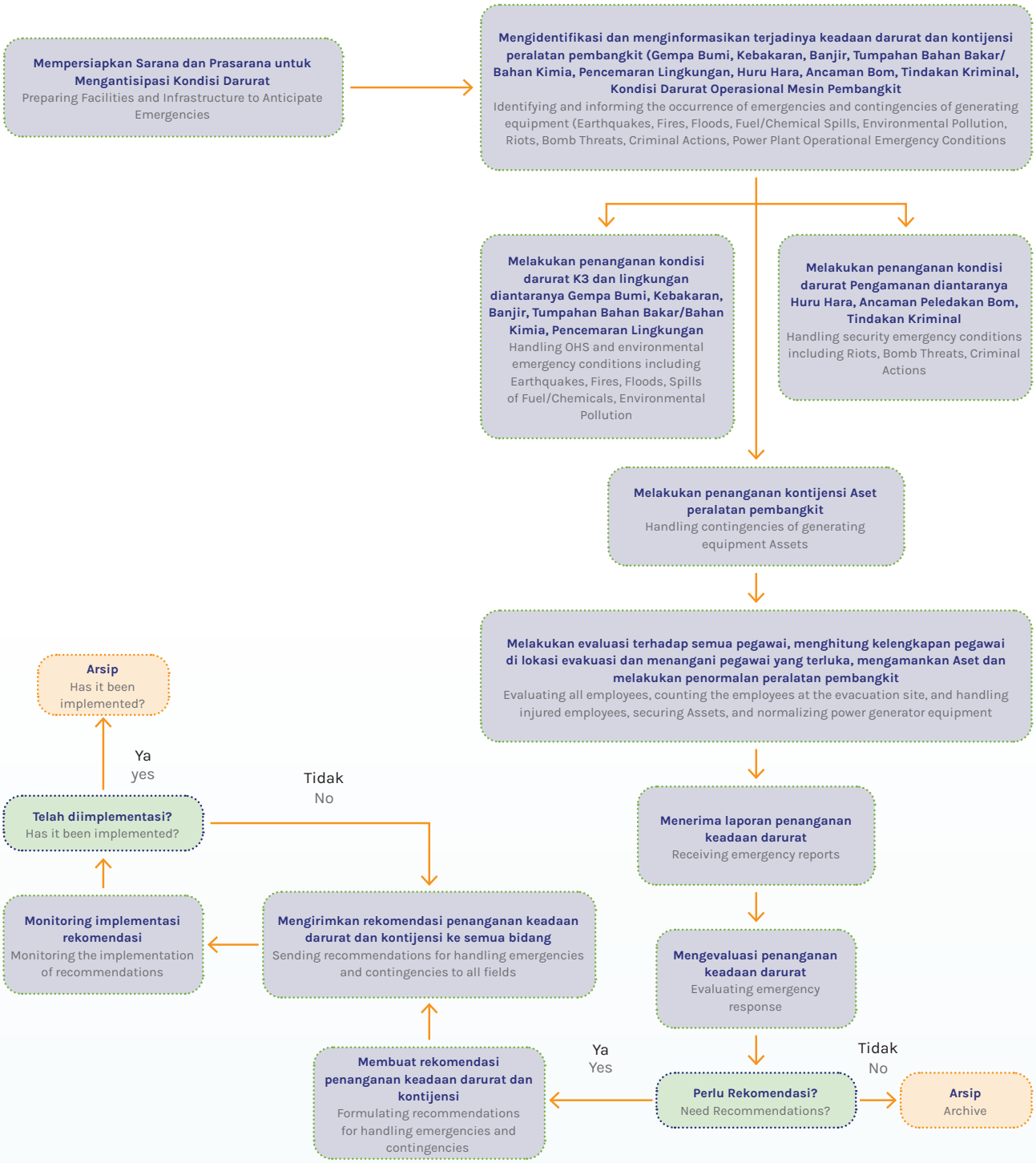
Mekanisme Penanganan Keluhan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Mekanisme Penanganan Keadaan Darurat terkait Keselamatan Kerja dan Konflik

Emergencies Handling Mechanism related to Occupational Safety and Conflicts



Biaya Kegiatan Terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Cost of Corporate Social Responsibility for Occupational Health and Safety

Perusahaan telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program kesehatan dan keselamatan kerja. Biaya pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja Indonesia Power secara korporat selama tahun 2021 adalah sebesar Rp52.480,40 Juta.

The Company allocates budget to support OHS programs and had spent Rp52,480.40 million throughout 2021 for OHS management expense.

Pelaksanaan kegiatan Perusahaan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Implementation of Corporate Social Responsibility for Occupational Health and Safety

Pemenuhan atas aspek kesehatan dan keselamatan kerja menjadi perhatian Direksi sebagai manajemen puncak tidak hanya untuk menencapai indikator kinerja tersebut namun dalam rangka menjaga keberlanjutan Perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang kesehatan dan keselamatan kerja tidak terlepas dari peran pegawai untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu memenuhi harapan *stakeholder* khususnya dan dapat menunjang kinerja Perusahaan. Selain itu, Indonesia Power melibatkan *stakeholder* penting dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan program terkait kesehatan dan keselamatan kerja.

OHS is a concern to the Board of Directors as top management, not only in achieving the performance indicators, but also in the context of maintaining the Company's sustainability. In the implementation of CSR for OHS, employees also play a significant role in ensuring that all of the activities meet the stakeholders' expectations, particularly related to customers, and support the Company's performance. In addition, Indonesia Power engages key stakeholders to improve the effectiveness of OHS programs.

Program Strategis Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Strategic Program on Occupational Health and Safety.

Program Strategis Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan inisiatif program dalam meningkatkan kinerja pengelolaan aspek kesehatan dan keselamatan kerja tahun 2021 melalui kegiatan sebagai berikut:

Strategic program on occupational health and safety is an initiative to improve the Company's performance throughout 2021 related to OHS. It is manifested into the following activities:

Program Pengelolaan K3 Indonesia Power Tahun 2021
Indonesia Power's OHS Management Program in 2021

***Review* Kebijakan K3 Korporat** Corporate OHS Policy Review	- **Tanggal Pelaksanaan**: Setiap Semester - **Deskripsi Program**: Melakukan *review* prosedur-prosedur K3 sesuai dengan Proses Bisnis IP yang ter*update*	- **Date:** Every semester - **Program Description:** Reviewing OHS procedures in accordance with the updated IP Business Processes
Pengembangan Maximo HSE Maximo HSE Development	- **Tanggal Pelaksanaan**: *Progress meeting* dua minggu sekali - **Deskripsi Program**: Digitalisasi Manajemen & Proses Kerja K3 melingkupi Modul *Risk Identification & Mitigation Control* (RITMIC), *Safety and Health Occupational Plans* (SHOP), *Incident & Accident Investigation* (INAVEST) dan *Predictive Maintenance Safety Tools* (PREMIST)	- **Date:** Progress meeting every two weeks - **Program Description:** Digitalization of OHS Management and Work Processes includes Risk Identification & Mitigation Control (RITMIC), Safety and Health Occupational Plans (SHOP), Incident & Accident Investigation (INAVEST), and Predictive Maintenance Safety Tools (PREMIST) Modules

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Pengadaan Cinderamata *Zero Accident* Zero Accident Souvenir Procurement	- **Tanggal Pelaksanaan**: Setiap Tahun - **Deskripsi Program**: Pengadaan Cinderamata dilaksanakan sebagai apresiasi kepada unit pembangkit yang sudah meraih *Zero Accident*	- **Date:** Annually - **Program Description:** The procurement of souvenirs is carried out as an appreciation to the generating unit that has achieved Zero Accident
Pembuatan Pedoman *Industrial Cleaning* Korporat dan *Monitoring* Kegiatan Formulation of Corporate Industrial Cleaning Guidelines and Monitoring of the Activities	- **Tanggal Pelaksanaan**: 30 November 2021 - **Deskripsi Program**: Kebijakan Direksi terkait Implementasi *Industrial Cleaning Service* di lingkungan Perusahaan dan Kantor Pusat memonitor pencapaian kinerja *Industrial Cleaning Service* berdasarkan *Service Level Agreement* (SLA) yang telah disepakati	- **Date:** 30 November 2021 - **Program Description:** The Board of Directors' policies regarding the Industrial Cleaning Service within the Company's environment, and the Head Office monitors the achievement of Industrial Cleaning Service performance based on the agreed Service Level Agreement (SLA)
Pengadaan Peralatan APD dan Material Tanggap Darurat Procurement of PPE Equipment and Emergency Response Materials	- **Tanggal Pelaksanaan**: Setiap Tahun - **Deskripsi Program**: Pengadaan APD bagi pegawai berdasarkan standar K3	- **Date:** Annually - **Program Description:** Procurement of PPE for employees based on OHS standards
Rangkaian Kegiatan Bulan K3 Series of Activities during OHS Month	- **Tanggal Pelaksanaan**: 12 Januari - 12 Februari 2021 - **Deskripsi Program**: Berisi kegiatan-kegiatan K3 dalam rangka memperingati bulan K3 meliputi Apel, Sosialisasi, Perlombaan, Aksi Sosial dan lain-lain	- **Date:** 12 January - 12 February 2021 - **Program Description:** The program contains activities to commemorate OHS month, such as Appeal, Dissemination, Competitions, Social Assistance, etc.
Survei Budaya K3 OHS Culture Survey	- **Tanggal Pelaksanaan**: Desember 2021 - **Deskripsi Program**: Survei berisi pertanyaan-pertanyaan guna mengukur tingkat kepedulian pegawai terhadap aspek K3	- **Date**: Desember 2021 - **Program Description**: The survey contains questions to assess the level of employee concern in terms of OHS aspects
Pelatihan/Simulasi Tanggap Darurat Emergency Response Training/Simulation	- **Tanggal Pelaksanaan**: Minimal sekali dalam setahun - **Deskripsi Program**: Pelatihan/Simulasi diikuti oleh seluruh pegawai dalam unit terkait. Tema simulasi berdasarkan analisa risiko keadaan darurat masing-masing unit kerja	- **Date**: At least once a year - **Program Description**: The Training/ Simulation is attended by all employees in the related unit. Simulation theme is based on emergency risk analysis of each work unit
Pengukuran *Indoor Air Quality* dan Nilai Ambang Batas (NAB) Lingkungan Kerja Assessment of Indoor Air Quality and Threshold Limit Value (TLV) of the Working Environment	- **Tanggal Pelaksanaan**: Minimal sekali dalam setahun - **Deskripsi Program**: Pengukuran dilaksanakan bertujuan untuk memastikan indikator pada *Indoor Air Quality* dan NAB lingkungan kerja aman dan sehat bagi pegawai	- **Date**: At least once a year - **Program Description**: The assessment has the objective to ensure indicators of Indoor Air Quality and the Environment TLV are safe and healthy for employees
Sosialisasi Pengelolaan *Hygiene* Kantin Mess Hall Hygiene Management Socialization	- **Tanggal Pelaksanaan**: Minimal sekali dalam setahun - **Deskripsi Program**: Sosialisasi dilaksanakan bertujuan agara pengelola kantin perusahaan paham dan mematuhi standard Hygiene yang ditetapkan	- **Date**: At least once a year - **Program Description**: The socialization is carried out with the objective to ensure that the company's mess hall managers understand and comply with the established Hygiene standards
Inspeksi Tempat Kerja Workplace Inspection	- **Tanggal Pelaksanaan**: Setiap Bulan - **Deskripsi Program**: Melakukan inspeksi di area kerja termasuk kantin untuk melihat kesesuaian lingkungan kerja dengan persyaratan yang ada	- **Date**: Monthly - **Program Description**:Inspecting working area including the mess hall to understand the suitability of the working environment with prevailing requirements

Program *Anti Fire Anti Explotion* (AFAE) Anti-Fire Anti-Explosion (AFAE) Program	- **Tanggal Pelaksanaan**: Setiap Bulan - **Deskripsi Program**: Peningkatan kinerja *Industrial Cleaning Service* melalui perbaikan/rekondisi peralatan *Coal Handling*, penyiapan infrastruktur pendukung, penyusunan standar kerja/metode kerja, monitoring kebersihan unit kerja oleh Kantor Pusat secara mingguan	- **Date**: Monthly - **Program Description**: Improved Industrial Cleaning Service performance by the repair/ reconditioning of Coal Handling equipment, preparation of supporting infrastructure, formulation of work standards/methods, weekly monitoring of work unit cleanliness by the Head Office
Forum K3 OHS Forum	- **Tanggal Pelaksanaan**: Setiap Tahun - **Deskripsi Program**: Forum dalam rangka membahas isu-isu K3 korporat selama setahun. Selain itu diadakan pula *capacity building* kepada pengelola K3 seluruh unit kerja yang hadir dalam bentuk seminar oleh narasumber yang kompeten	- **Date**: Annually - **Program Description**: Forum to discuss corporate OHS issues for a year. In addition, capacity building was also held for OHS managers of all work units that were present by providing seminars with competent speakers
***Video Conference* K3** OHS Video Conference	- **Tanggal Pelaksanaan**: Setiap Bulan - **Deskripsi Program**: Vicon K3 membahas isu-isu terkini, *Lesson Learn* Kecelakaan, Kebijakan K3 yang baru, dll	- **Date**: Monthly - **Program Description**: OHS video conference discusses current issues, Lesson Learned from Accidents, new OHS Policies, etc.
Audit SMK3 OHSMS audit	- **Tanggal Pelaksanaan**: dua kali setahun (internal dan eksternal) - **Deskripsi Program**: Audit dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan SMK3 di unit kerja	- **Date**: twice a year (internal and external) - **Program Description**: The audit is carried out with regards to monitoring and evaluating the OHSH implementation in the working unit
Rangkaian Diklat K3 OHS Training Series	- **Tanggal Pelaksanaan**: Sesuai Jadwal Rendiklat - **Deskripsi Program**: Melaksanakan *training* dan sertifikasi K3 bagi pegawai IP sesuai dengan kebutuhan kompetensi bidangnya	- **Date**: In accordance with the Planning, Education, and Training Schedule - **Program Description**: Conducting OHS training and certification for IP employees in accordance with their field competency needs
Assessment* Kebersihan Unit Pembangkit dan Kesiapan *Fire Protection System Power Plant Unit Cleanliness Assessment and Fire Protection System Readiness	- **Tanggal Pelaksanaan**: Setiap Tahun - **Deskripsi Program**: Melakukan penilaian kebersihan di unit pembangkit dan kesiapan *Fire Fighting System* dengan kriteria yang kriteria yang telah ditetapkan sebagai upaya tercapainya unit pembangkit yang bersih, sehat dan aman.	- **Date**: Annually - **Program Description**: Conducting an assessment of cleanliness in the generating unit and the readiness of firefighting system with the criteria that have been set as an effort to achieve a clean, healthy, and safe generating unit.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Program Peningkatan Keselamatan Kerja
Occupational Safety Improvement Program

- *Safety Briefing*	- Safety Briefing
- *Safety Patrol*	- Safety Patrol
- *Management Walktrough*	- Management Walktrough
- *Review* Prosedur dan Instruksi Kerja	- Review of Procedures and Work Instructions
- Sosialisasi, Pelatihan dan Sertifikasi K3	- OHS Socialization, Training, and Certification
- Inspeksi Rutin Peralatan	- Equipment Regular Inspection
- Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan *Fire Fighting* dan Alat Pelindung Diri (APD)	- Provision and Maintenance of Firefighting Equipment and Personal Protective Equipment (PPE)
- Simulasi Tanggap Darurat	- Emergency Response Simulation
- Identifikasi Risiko yang Timbul beserta Mitigasinya	- Identification of Risks that may Arise and their Mitigation
- *Awareness* dan Kampanye Budaya K3 dan Sadar *Safety* kepada Seluruh Pegawai	- OHS Awareness and Culture, and Safety Awareness Campaign to All Employees
- Audit SMK3	- OHSMS audit
- Implementasi ISRS 7	- ISRS 7 implementation
- Implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS)	- Implementation of the Contractor Safety Management System (CSMS)
- Implementasi *Industrial Cleaning*	- Industrial Cleaning
- Pembangunan *Safety Control Center*	- Construction of Safety Control Center;
- *Upgrade* Infrastruktur K3	- OHS Infrastructure Upgrade
- *Assessment* Kebersihan	- Cleanliness Assessment
- Pelaporan *unsafe action, unsafe condition* dan *nearmiss* melalui Aplikasi *Nearmiss* yang dapat diakses oleh seluruh pegawai	- Reporting on unsafe actions, unsafe conditions, and near misses through the Nearmiss Application accessible by all employees

Program Peningkatan Kesehatan Kerja
Occupational Health Improvement Program

- *Medical check up* secara berkala	- Regular medical check-up
- Melakukan *Risk Assessment* di masing-masing area kerja sesuai potensi bahayanya terhadap kesehatan	- Performing Risk Assessment in each working area in line with the health potential hazards
- Memastikan ketersediaan dan penggunaan APD yang benar dan standar	- Ensuring the availability, appropriate use, and standard PPE
- Pengaturan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) selama pandemi Covid-19 baik di *Head Office* maupun Unit	- Work From Office (WFO) and Work From Home (WFH) arrangements during the Covid-19 pandemic both at the Head Office and Units
- Sertifikasi *hygiene* kantin	- Canteen hygiene certification
- Adanya himbauan kepada seluruh unit dalam penempatan pegawai mempertimbangkan faktor fisik dan mental pegawai yang dinyatakan sehat dalam bekerja berdasarkan riwayat kesehatan pegawai	- Appeal to all units in employees' placement to consider the physical and mental factors of such employee who are declared healthy to work, based on the employee's medical history
- Memberikan *extra fooding*	- Provision of extra fooding
- Memberikan sosialisasi/ penyuluhan kesehatan kerja, khususnya terkait Covid-19	- Providing socialization/ counseling on occupational health, especially related to Covid-19
- Penyediaan Unit Pelayanan Kesehatan Kerja (UPKK) dan kunjungan dokter Perusahaan ke pegawai	- Provision of Occupational Health Service Units (OHSU) and company doctor's visit to employees
- Pengukuran lingkungan kerja secara berkala	- Regular measurement of the work environment
- Program olahraga dan menyediakan *fitness center*	- Sports programs and fitness center provision
- Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 seluruh pegawai dan keluarga dan tenaga alih daya	- Covid-19 vaccination for all employees and their families and outsourced employees
- Sertifikasi Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	- First Aid (P3K) Certification
- Menyediakan kotak dan isi P3K sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Providing first aid kits and contents in accordance with prevailing laws and regulations

Sertifikasi dan Pelatihan K3

OHS Certification and Training

Indonesia Power melaksanakan sertifikasi dan pelatihan bagi pegawai dalam rangka pemenuhan gap kompetensi pegawai K3. Program sertifikasi, pelatihan dan workshop dan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Indonesia organized certification and training program for employees to close the OHS competency gap among employees. The following certifications, trainings, and workshops were held in 2021:

Sertifikasi K3 Tahun 2021

OHS Certification in 2021

9-10 Februari 2021
9-10 February 2021

Sertifikasi *Port Facility Security Officer* (PFSO)
Port Facility Security Officer (PFSO) Certification

2 orang
2 people

9-10 Februari 2011
9-10 February 2011

Sertifikasi Auditor SMK3
OHSMS Auditor Certification

1 orang
1 people

15-24 Maret 2021
15-24 March 2021

Sertifikasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U)
General Occupational Health and Safety Expert (AK3U) Certification

8 orang
8 people

19-22 April 2021
19-22 April 2021

Sertifikasi Pembinaan Dan Sertifikasi Teknisi K3 Bekerja Pada Bangunan Tinggi Tk. 2
Training Certification and Certification of OHS Technicians Working on High Level Building 2

14 orang
14 people

2-9 Juni 2021
2-9 June 2021

Sertifikasi Damkar C
C Firefighter Certification

11 orang
11 people

15-17 Juni 2021
15-17 June 2021

Sertifikasi *Operator Forklift* Kelas II
Class II Forklift Operator Certification

2 orang
2 people

16-18 Juni 2021
16-18 June 2021

Sertifikasi *Operator Overhead Crane* Kelas III
Class III Overhead Crane Operator Certification

11 orang
11 people

13-21 September 2021
13-21 September 2021

Sertifikasi Petugas P3K
First Aid Officer Certification

3 orang
3 people

14-16 September 2021
14-16 September 2021

Sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tingkat Tinggi 2 (TKBT 2)
High Level Building 2 Construction Workforce Certification (TKBT 2)

5 orang
5 people

4-28 Oktober 2021
4-28 October 2021

Sertifikasi Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik (AK3L)
Electrical Occupational Health and Safety Expert (AK3L) Certification

1 orang
1 people

11-13 Oktober 2021
11-13 October 2021

Sertifikasi Damkar D
D Firefighter Certification

7 orang
7 people

11-16 Oktober 2021
11-16 October 2021

Sertifikasi Petugas K3 Kimia
OHS Chemistry Officer Certification

4 orang
4 people

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Pelatihan K3 Tahun 2021
OHS Training in 2021

12 Januari 2021
12 January 2021

Forum K3 dan Mini Seminar Dalam Rangka Bulan K3
OHS Forum and Mini Seminar in the OHS Month

100 orang
100 people

12 Januari 2021
12 January 2021

***Talkshow* Kesehatan "Efektivitas Vaksin Covid-19 dan Donor Plasma Darah Konvalesen Dalam Menekan Laju Pandemi Covid-19"**
Health Talkshow "Effectiveness of the Covid-19 Vaccine and Convalescent Blood Plasma Donor in Suppressing the Covid-19 Pandemic Rate"

Seluruh Pegawai IP
All IP's Employees

25 Februari 2021
25 February 2021

***Training* Maximo HSE Modul HIRADC, PMK3 dan Inavest**
Maximo HSE Training of HIRADC, PMK3, and Inavest Module

30 orang
30 people

4 Maret 2021
4 March 2021

IHT Pengelolaan Material Radioaktif dari Aspek Perizinan & Teknis dan Aspek Legal & Pidana
IHT Management of Radioactive Materials in terms of Licensing & Technical and Legal & Criminal Aspects

60 orang
60 people

19 - 21 Mei 2021
19-21 May 2021

IHT HAZOP
IHT HAZOP

36 orang
36 people

21 – 24 Juni 2021
21-24 June 2021

Training Manajemen Kebencanaan BNPB Batch 1
BNPB Natural Disaster Management Training Batch 1

30 orang
30 people

26 - 29 Juli 2021
26-29 July 2021

Training Manajemen Kebencanaan BNPB Batch 2
BNPB Natural Disaster Management Training Batch 2

30 orang
30 people

5 - 6 Juli 2021
5-6 July 2021

Pelatihan *Contractor Safety Management System* (CSMS) Batch 1
Contractor Safety Management System (CSMS) Training Batch 1

42 orang
42 people

11 - 12 November 2021
11 - 12 November 2021

Pelatihan *Contractor Safety Management System* (CSMS) *Batch* 2
Contractor Safety Management System (CSMS) Training Batch 2

42 orang
42 people

12 - 13 Juli 2021
12-13 July 2021

Pelatihan *Contractor Safety Management System* (CSMS) *Batch* 3
Contractor Safety Management System (CSMS) Training Batch 3

41 orang
41 people

7 Mei 2021
7 May 2021

Pelatihan dan Simulasi Tanggap Darurat Pemadam Kebakaran *Head Office*
Head Office Firefighter Emergency Drill Training and Simulation

Seluruh Pegawai IP
All IP's Employees

4 - 5 November 2021
4 - 5 November 2021

Pelatihan *Safety Leadership Batch* 1
Safety Leadership Training Batch 1

29 orang
29 people

11 - 12 November 2021
11 - 12 November 2021

Pelatihan *Safety Leadership Batch* 2
Safety Leadership Training Batch 2

30 orang
30 people

15 - 16 November 2021
15 - 16 November 2021

Pelatihan *Safety Leadership Batch* 3
Safety Leadership Training Batch 3

30 orang
30 people

18 - 19 November 2021
18 - 19 November 2021

Pelatihan *Safety Leadership Batch* 4
Safety Leadership Training Batch 4

30 orang
30 people

25 - 26 November 2021
25 - 26 November 2021

Pelatihan *Safety Leadership Batch* 5
Safety Leadership Training Batch 5

30 orang
30 people

29 - 30 November 2021
29 - 30 November 2021

Pelatihan *Safety Leadership Batch* 6
Safety Leadership Training Batch 6

30 orang
30 people

28 September 2021
28 September 2021

Refreshment Safety Plan Batch 1
Safety Plan Refreshment Batch 1

24 orang
24 people

29 September 2021
29 September 2021

Refreshment Safety Plan Batch 2 dan 3
Safety Plan Refreshment Batch 2

42 orang
42 people

2 November 2021
2 November 2021

Refreshment AED *Batch* 1 dan 2
AED Refreshment Batch 1 and 2

76 orang
76 people

3 November 2021
3 November 2021

Refreshment AED *Batch* 3 dan 4
AED Refreshment Batch 3 amd 4

76 orang
76 people

Sarana dan Keselamatan Kerja
Occupational Health Equipments

Indonesia Power telah melengkapi seluruh kantor operasionalnya dengan berbagai perangkat keselamatan kerja untuk menjamin efektivitas penerapan keselamatan kerja. Sarana keselamatan kerja yang di miliki oleh Indonesia Power adalah sebagai berikut:

Indonesia Power has equipped its entire operational offices with a wide range of occupational safety equipments to ensure effective occupational safety. The following equipments are provided by the Company:

Sarana dan keselamatan kerja Occupational health equipments	Kegunaan sarana dan keselamatan kerja Use of occupational health equipments	Tempat penggunaan Place of use
Alat Pelindung Diri (APD) Personal Protective Equipment (PPE)	Melindungi sebagian atau seluruh badan personil dari potensi bahaya yang jenisnya disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada di area kerjanya. Protects parts or entire body of the personnels from potential hazards, which type is adjusted with potential hazards in the corresponding work area.	Sebagian atau seluruh bagian tubuh personil. Part or entire body of the personnel.
Rambu-Rambu K3 (*Safety Sign*) OHS Signs (Safety Signs)	Menunjukkan adanya potensi bahaya di area kerja. mengingatkan personil untuk berperilaku aman. menunjukkan lokasi peralatan pemadam dan tanggap darurat. dan memberikan arahan/petunjuk saat keadaan darurat. Indicates potential hazards in the work area, warns personnels to operate safely, indicates the location of fire extinguishers and emergency response, and provides direction/guidance for emergencies.	Ditempatkan di area yang strategis/mudah terlihat dan sesuai risiko yang ditimbulkan Conveniently located/ clearly visible and corresponding to the potential risk

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Sarana dan keselamatan kerja Occupational health equipments	Kegunaan sarana dan keselamatan kerja Use of occupational health equipments	Tempat penggunaan Place of use
Sistem Proteksi Kebakaran (Manual & Automatis): Fire Protection System (Manual & Automatic):		
1) APAR Fire Extinguishers	Untuk mengendalikan potensi bahaya kebakaran yang dapat terjadi di area pembangkit listrik. To control potential fire hazard that may occur in the power generation unit.	Seluruh area pembangkit All power generation areas
2) *Hydrant*		
3) APAT Conventional Firefighting Equipment		
4) Mobil Damkar Firefighting Vehicles		
5) Pompa *Fire Fighting* Fire Fighting Pump		
6) *Deluge Sprinkler System*		
7) *Fire Alarm System*		
8) *Low Pressure CO_2 System*		
9) *Foam System*		
10) *Wet sprinkler system*		
Fasilitas tanggap darurat: Emergency response facilities:		
1) Tim Tanggap darurat Fast Respons Team	Tersedianya perlengkapan tanggap darurat pada kondisi *emergency*. Availability of emergency response equipments in emergency situations.	Area evakuasi Evacuation area
2) *Ambulance*		
3) Kotak P3K First Aid Kit		
4) Perlengkapan tanggap darurat lainnya (Tandu, Breathing Apparatus, dll) 4) Other emergency response equipment (Stretcher, Breathing Apparatus, etc.)		
Peralatan *industrial cleaning service*	Mesin penunjang untuk memudahkan pekerjaan *industrial cleaning*. Mesin penunjang untuk memudahkan pekerjaan industrial cleaning.	Area operasional unit pembangkit Area operasional unit pembangkit

Tingkat Kecelakaan Kerja
Occupational Accident Rate

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 41.K/010/IP/2012 tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di PT Indonesia Power pasal 24 kecelakaan kerja didefinisikan yaitu kecelakaan yang terjadi berkaitan langsung dengan waktu jam kerja sesuai bidang tugas pekerjaan, kewajiban dan tanggung jawab sehari-hari yang pelaksanaan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Terdapat 1 (satu) kasus kecelakaan kerja selama tahun 2021, dimana kejadian tersebut menyebabkan 1 (satu) orang korban jiwa. Sesuai aturan yang berlaku kecelakaan kerja yang terjadi sudah diinvestigasi oleh Kantor Pusat dan Unit Kerja terkait untuk mencari penyebab dari kecelakaan kerja serta guna merumuskan rekomendasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

In the Decree of the Board of Directors No. 41.K/010/IP/2012 on Occupational and Environmental Safety and Health Policy in PT Indonesia Power, article 24 defines occupational accident as accidents related directly to work hours and the corresponding day-to-day job, duty, and responsibility which performance has conformed with the applicable procedures. One occupational accident took place during 2021, resulting life casualty. In accordance with the existing regulation on occupational accident, this case had been investigated by the Head Office and the related Work Unit to identify the cause and come up with recommendations to prevent similar misfortune.

Dukungan Manajemen, Pegawai dan *Stakeholder* Relevan pada Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Support from Management, Employee, and Stakeholders for Corporate Responsibility for Employment and Occupational Health and Safety

Pelaksanaan tanggung jawan sosial perusahaan khususnya bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja tidak terlepas dari peran Direksi, pegawai dan *stakeholder*. Direksi beserta jajaran manajemen terkait senantiasa terlibat mulai dari Perumusan, Pelaksanaan, Pengawasan, serta evaluasi program ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dengan harapan keterlibatan level Direksi dan manajemen dapat menjadi *role model* penerapan budaya K3 kepada jajaran dibawahnya hingga ke level pelaksana dalam rangka mendorong kepatuhan Perusahaan terkait aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta *engagement* pegawai. Indonesia Power juga melibatkan *stakeholder* terkait seperti PT PLN (Persero) dalam perumusan program kerja dan rangkaian kegiatan program terkait tanggung jawab Perusahaan dalam bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu, Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan mendorong pemasok yang bermitra dengan Perusahaan untuk memenuhi standar material baik barang maupun jasa untuk memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. Unit-unit kerja dalam Perusahaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing turut serta dalam mereview, meningkatkan kredibilitas inisiatif dan melaporkan aktivitas kegiatan yang terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja setiap triwulan yang termuat dalam laporan manajemen.

The successful implementation of CSR for employment and OHS is impossible to accomplish without the role of the board of directors, employees and stakeholders. The board of directors and related management are constantly engaged in the formulation, execution, supervision, and evaluation of the employment and OHS programs. They are expected to perform as the role model of OHS culture for their subordinates up to the implementing personnels to promote compliance and employee engagement. Indonesia Power also engages relevant stakeholders, such as PT PLN (Persero), in formulating work programs and activities concerning corporate responsibility for employment and OHS. In addition, Indonesia Power encourages partnering suppliers to meet the standards for both goods and services to satisfy OHS provisions. The work units in the Company in accordance with their respective areas of duties and responsibilities participate in reviewing, enhancing initiative credibility, and preparation of activity report on employment and OHS. This is disclosed in the quarterly management report.

Manfaat Tanggung Jawab Perusahaan Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Perusahaan, *Stakeholder* serta Upaya Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Benefits of Corporate Responsibility for Employment and Occupational Health and Safety and Support for Sustainable Development

Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu upaya dalam menciptakan manfaat bersama bagi Perusahaan, pegawai dan *stakeholder* lainnya. Bagi Indonesia Power dalam jangka panjang dapat menjaga keberlanjutan Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

The responsibility for employment and OHS is a means of the Indonesia Power to create a mutual benefit for the Company, employees, and other stakeholders. In the long run, Indonesia Power expects to be capable of maintaining the Company's sustainability as its accountability to shareholders, complying with the terms of employment and OHS, and improving

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Pemegang Saham dan kepatuhan pada aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja serta efisiensi dengan penurunan biaya pengelolaan ketenagakerjaan. Manfaat kegiatan tanggung jawab perusahaan terhadap Ketenagakerjaan dan K3 diantaranya sebagai berikut:

1. Penurunan tingkat *turnover* pegawai Indonesia Power dari tahun sebelumnya.
2. Pelaporan menjadi real time, lebih terukur, terlacak, cepat, seragam di seluruh unit di *unit project* (100%).
3. Tidak ada peningkatan kasus kecelakaan kerja di unit Indonesia Power.
4. Meningkatnya kesadaran pegawai dalam penerapan dan pembudayaan penggunaan Aplikasi Nearmiss dengan jumlah laporan sebanyak 1.389 total laporan.
5. Rata-rata persentase Kesiapsiagaan Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia seluruh unit berdasarkan Laporan Bulanan K3 yang dikirimkan sudah mencapai 100%.
6. Pelaksanaan *Industrial Cleaning Service* yang lebih sistematis dan sesuai standard baku baik dari sisi *Man, Method, Material*, maupun Machine serta penetapan *Service Level Agreement* (SLA) untuk semua unit pembangkit terimplementasi 100%.
7. Implementasi CSMS di 5 unit *pilot project* (Pangkalan Susu, Pelabuhan Ratu, Priok, Semarang, *Head Office*) terealisasi 100% sesuai ruang lingkup.
8. Memetakan dan memenuhi formasi dan gap kompetensi personil K3.
9. Memastikan sarana dan prasarana K3 senantiasa andal dan siap digunakan.
10. Memastikan SOP dan IK K3 selalu update dan dipahami oleh seluruh pekerja.
11. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerapan K3 di Lingkungan Perusahaan.

Selain itu, kegiatan tanggung jawab Perusahaan terhadap bidang ketenagakerjaan dan K3 diharapkan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan berkelanjutan melalui produksi yang bertanggung jawab, kesetaraan *gender* dan lapangan pekerjaan yang layak.

efficiency by reducing cost for employment management. These are the comprehensive benefits of corporate responsibility for employment and OHS:

1. Declining turnover rate compared to the previous year.
2. A more real-time, measurable, traceable, accelerated, and uniform reporting across units in the project units (100%).
3. No increase in occupational accidents in Indonesia Power units.
4. Increasing employee awareness in the implementation and familiarization of Nearmiss app with 1,389 reports in total.
5. 100%-ready facilities, infrastructure, and human resource in all units, based on the submitted OHS monthly report.
6. Complete implementation of a more systematic Industrial Cleaning Service that complies with the quality standard from the point of view of Man, Method, Material, or Machine, and the establishment of Service Level Agreement (SLA) for all units of power generation units.
7. Full implementation of CSMS in 5 pilot project units (Pangkalan Susu, Pelabuhan Ratu, Priok, Semarang, Head Office).
8. Mapping and addressing the needs of the OHS personnels and closing competency gap among them.
9. Ensuring the reliability and availability of OHS equipments and facilities.
10. Ensuring that the SOP and Work Instructions for OHS remain updated and comprehended by all employees.
11. Complying with the regulations of law in implementing OHS at the Company.

Furthermore, the CSR activities related to employment and OHS are expected to have both direct and indirect positive impacts for sustainable development through responsible production, gender equality, and decent work.

Penghargaan dan Sertifikasi Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Awards and Certifications on Employment and Occupational Health and Safety

Penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Indonesia Power dalam bidang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja selama tahun 2021 adalah sebagai barikut:

1. Penghargaan kecelakaan Nihil (*Zero Accident Award*) kepada Suralaya PGU, Priok POMU, Kamojang POMU, Kamojang – Drajat, Kamojang - Gunung Salak, Saguling POMU, Semarang PGU, Grati POMU, Mrica PGU, Bali PGU, MSU, PLTGU Cilegon OMU, PLTU Banten 1 Suralaya OMU, PLTU Banten 2 Labuan OMU, PLTU Banten 3 Lontar OMU, PLTU Jateng 2 Adipala OMU, PLTU Jabar 2 Palabuhan Ratu OMU, PLTU Pangkalan Susu OMU, PLTU Barru OMU dan PLTU Jeranjang OMU dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diberikan pada tanggal 28 April 2021.
2. Penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3) kepada Priok POMU, Mrica PGU, MSU dan PLTGU Cilegon OMU dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diberikan pada tanggal 28 April 2021.
3. Penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV (P2-HIV) kepada Saguling POMU, Grati POMU, Mrica PGU, Bali PGU, PLTU Banten 1 Suralaya OMU, PLTU Jateng 2 Adipala OMU, PLTU Jabar 2 Palabuhan Ratu OMU dan PLTU Pangkalan Susu OMU dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diberikan pada tanggal 28 April 2021.
4. Penghargaan P2COVID kepada Suralaya PGU, Priok POMU, Kamojang POMU, Saguling POMU, Mrica PGU, Bali PGU, PLTGU Cilegon OMU, PLTU Banten 3 Lontar OMU, PLTU Jateng 2 Adipala OMU, PLTU Jabar 2 Palabuhan Ratu OMU, PLTU Pangkalan Susu OMU, PLTU Barru OMU dan PLTU Jeranjang OMU dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diberikan pada tanggal 28 April 2021.
5. Sertifikasi ISO 45001:2018 untuk Suralaya PGU, Priok POMU, Kamojang POMU, Saguling POMU, Semarang PGU, Grati POMU, Mrica PGU, Bali PGU, MSU, PLTGU Cilegon OMU, PLTU Banten 1 Suralaya OMU, PLTU Banten 2 Labuan OMU, PLTU Banten 3 Lontar OMU, PLTU Jateng 2 Adipala OMU dan PLTU Jabar 2 Palabuhan Ratu OMU dari Sucofindo.

In 2021, Indonesia Power earned the following awards and certifications related to employment and OHS:

1. Zero Accident Award from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia on April 28, 2021 to Suralaya PGU, Priok POMU, Kamojang POMU, Kamojang – Darajat, Kamojang - Gunung Salak, Saguling POMU, Semarang PGU, Grati POMU, Mrica PGU, Bali PGU, MSU, CCPP Cilegon OMU, SPP Banten 1 Suralaya OMU, SPP Banten 2 Labuan OMU, SPP Banten 3 Lontar OMU SPP Central Java 2 Adipala OMU, SPP West Java 2 Palabuhan Ratu OMU, SPP Pangkalan Susu OMU, SPP Barru OMU, and SPP Jeranjang OMU.
2. OHS Management System (SMK3) Award from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia on April 28, 2021 to Priok POMU, Mrica PGU, MSU, and CCPP Cilegon OMU.
3. HIV Prevention and Countermeasure Program Award from the Ministry of Manpower on April 28, 2021 to Saguling POMU, Grati POMU, Mrica PGU, Bali PGU, SPP Banten 1 Suralaya OMU, SPP Central Java Adipala OMU, SPP West Java 2 Palabuhan Ratu OMU; and SPP Pangkalan Susu OMU.
4. P2COVID award from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia on April 28, 2021 to Suralaya PGU, Priok POMU, Kamojang POMU, Saguling POMU, Mrica PGU, Bali PGU, CCPP Cilegon OMU, SPP Banten 3 Lontar OMU, SPP Central Java 2 Adipala OMU, SPP West Java 2 Palabuhan Ratu OMU, SPP Pangkalan Susu OMU, SPP Barru OMU, and SPP Jeranjang OMU.
5. ISO 45001:2018 Certification for Suralaya PGU, Priok POMU, Kamojang POMU, Saguling POMU, Semarang PGU, Grati POMU, Mrica PGU, Bali PGU, MSU, CCPP Cilegon OMU, SPP Banten 1 Suralaya OMU, SPP Banten 2 Labuan OMU, SPP Banten 3 Lontar OMU, SPP Central Java 2 Adipala OMU, and SPP West Java 2 Palabuhan Ratu OMU from Sucofindo.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CUSTOMERS

Kualitas produk dan pelayanan merupakan aspek utama dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan mendukung kinerja Indonesia Power. Energi listrik yang dihasilkan Indonesia Power pada dasarnya tidak disalurkan secara langsung kepada pelanggan, melainkan melalui jaringan transmisi kepada PT PLN (Persero). Sehingga dapat dikatakan bahwa PT PLN (Persero) merupakan pembeli tunggal daya listrik yang diproduksi oleh Indonesia Power. Oleh karena itu, risiko keselamatan dan kesehatan bagi pelanggan Indonesia Power relatif kecil. Selain itu, kegiatan produksi dan pelayanan di lingkungan Indonesia Power dijalankan sesuai prosedur operasi standar keselamatan dan kesehatan pelanggan.

Product and service qualities are paramount for Indonesia Power to maintain customer's trust and support the Company's performance. Basically, the electricity that Indonesia Power generates does not channel directly to the customer, but goes through the transmission lines of PT PLN (Persero). In other words, PT PLN (Persero) is the sole buyer of the power the Company produces, thus the risks to customers' safety and health are relatively low. Besides, production and service activities in Indonesia Power are performed pursuant to the standard operating procedures for customers' safety and health.

Komitmen, Kebijakan dan Lingkup Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pelanggan

Commitment, Policy, and Activity Scope of Corporate Social Responsibility Related to Customers

Inisiatif program tanggung jawab sosial bidang pelanggan merupakan komitmen Indonesia Power dalam mengimplementasikan kebijakan fokus pelanggan serta upaya dalam mendukung PT PLN (Persero) untuk menjaga kualitas pelayanan serta meningkatkan *engagement* dan *value* bagi Pelanggan. Sebagai salah satu upaya dalam mendukung komitmen tersebut, Indonesia Power telah merumuskan kebijakan internal Perusahaan terkait pelanggan antara lain:

1. Keputusan Direksi Nomor 053.K/010/IP/2021 tentang Kebijakan Fokus Pelanggan PT Indonesia Power.
2. *Code of Conduct* tentang Pelanggan
3. Prosedur IPM.06.07 Manajemen Komplain.
4. Prosedur IPM.06.08 Penetapan Kepuasan, Ketidak Puasan dan Keterikatan Pelanggan.
5. Prosedur IPM.06.13 Penyusunan *Action Plan* Tindak Lanjut OFI Kepuasan Pelanggan.
6. Prosedur IPM.06.17 *Monitoring Action Plan* OFI Pelanggan.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, lingkup kegiatan Indonesia Power terkait tanggung jawab sosial bidang pelanggan mencakup upaya mendengarkan suara pelanggan di unit pembangkit serta memenuhi ekspektasi pelanggan.

CSR related to customers is a commitment of Indonesia Power to implementing of the Company's customer-focused policy and an attempt to support PT PLN (Persero) in maintaining service quality and promoting customer engagement and value. For this, Indonesia Power has formulated the following policies:

1. Decree of the Board of Directors No. 053.K/010/IP/2021 on Customer-Focused Policy of PT Indonesia Power.
2. Code of Conduct on Customers
3. Complaint Management Procedure (Procedure IPM.06.07).
4. Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement Scoring (Procedure IPM.06.08).
5. Action Planning of OFI Follow-Ups for Customer Satisfaction (Procedure IPM.06.13).
6. Customer's OFI Action Plan Monitoring Procedure (Procedure IPM.06.17).

Based on these policies, the scope of Indonesia Power's activity on CSR related to customers includes listening to the voice and meeting the expectation of customers at the power generation unit.

Perumusan dan Rencana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pelanggan

Formulation and Planning of Corporate Social Responsibility Related to Customers

Indonesia Power melakukan pemetaan sosial untuk mengenali dan merumuskan *stakeholder* penting dan tanggung jawab sosial Perusahaan bidang pelanggan. Selain itu, perumusan tanggung jawab sosial Indonesia Power juga melalui uji tuntas dengan melakukan *review*, identifikasi dan update terhadap seluruh peraturan terkait pelanggan; analisis isu penting, dampak dan risiko dari kegiatan Perusahaan; ekspektasi *stakeholders* yang terkait dengan aspek pelanggan yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun dalam memastikan kecukupan kebijakan dan penerapan tanggung jawab Perusahaan terhadap pelanggan.

Indonesia Power conducts social mapping to recognize and formulate the key stakeholders and CSR related to customers. Furthermore, Indonesia Power has exercised due diligence in such a formulation by reviewing, identifying and updating all environmental regulations; analysis of key issues, impacts and risks of Company's activities; expectations of the stakeholders related to customers reviewed annually to ensure the adequacy of the Company's policies and responsibility for the customers.

Isu Penting, Dampak dan Risiko Kegiatan dan Keputusan Perusahaan Terhadap Pelanggan yang Terkait Secara Langsung atau Tidak Langsung dengan Perusahaan

Key Issues, Impacts, and Risks of Corporate Activities and Decisions Directly and Indirectly Related to the Company on Customers

Isu-isu penting bidang pelanggan yang relevan dengan bisnis Perusahaan secara umum meliputi ketersediaan produk dan layanan (tenaga listrik dan jasa Operation & Maintenance), sosialisasi layanan dan produk, kualitas produk dan layanannya serta kemudahan dalam memperoleh bantuan dan layanan. Isu tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi dampak dan resiko dari kegiatan operasional Indonesia Power terhadap pelanggan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan sebagai berikut :

Key issues on customers regarding the Company's business generally cover the availability, information distribution, quality, and facilitation of the products and services (electricity and operation & maintenance). They are analyzed to identify the impact and risk of the Company's operation toward customers directly and indirectly related to the Company as elaborated below:

Analisis Dampak, Risiko dan Tindakan Penanggulangan

Analysis of Impacts, Risks, and Countermeasures

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Dampak Kesehatan dan Keselamatan Health and Safety Impact	• Gangguan kesehatan masyarakat dan tenaga kerja di lingkungan pembangkit. • Penurunan tingkat kepuasan pelanggan. • Community and employee health issue at the power plant environment. • Decline in customer satisfaction.	• Pengendalian operasi dan Pengendalian baku mutu emisi. • Penerapan standar keselamatan pelanggan secara konsisten. • Operation and emission quality standard controls. • Consistent implementation of customer health standard.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CUSTOMERS

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Penurunan Kualitas Produk dan Layanan Decline in product and service quality	• Penurunan tingkat kepuasan pelanggan. • Meningkatnya keluhan pelanggan. • Penurunan penerimaan dan keuntungan Perusahaan. • Decline in customer satisfaction. • Increase in customer complaints. • Decline in Company's income and profit.	• Evaluasi dan Tindak lanjut hasil evaluasi survei kepuasan pelanggan dan keluhan pelanggan. • Diskusi peningkatan pelayanan Pelanggan. • Menerapkan kebijakan fokus pelanggan dan standar mutu secara konsisten. • Evaluation and follow-ups on customer satisfaction survey and complaints. • Discussion on customer service improvement. • Consistently implementing customer-focused operation and quality standard.
Minimnya Informasi terkait Produk dan Layanan Lack of information regarding products and services.	• Kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas. • Penerimaan dan keuntungan Perusahaan rendah. • Difficulty in market expansion. • Lower income and profit.	• Pemanfaatan media sosial dan saluran informasi lain dalam memberikan Informasi terkait Produk dan Layanan. • Forum Komunikasi Pelanggan / *Customer Gathering*/Forum Sharing Pembangkit. • Utilizing social media and other information channel in distributing information about products and services. • Communication/gathering/sharing forum for customers around the power generation unit.
Akses yang Sulit atas Produk dan Layanan Difficult access to products and services	• Kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas. • Penurunan tingkat kepuasan pelanggan. • Penerimaan dan keuntungan Perusahaan rendah. • Difficulty in market expansion. • Decline in customer satisfaction. • Lower income and profit.	• Diskusi peningkatan pelayanan Pelanggan • Evaluasi dan Tindak lanjut hasil evaluasi survei kepuasan pelanggan dan keluhan pelanggan. • Discussion on customer service improvement • Evaluation and follow-ups on customer satisfaction survey and complaints. .

Ekspektasi dan Jangkauan Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Isu Bidang Pelanggan pada *Stakeholder*

Stakeholders' Expectation and Scope of Company's Influence Related to Customers

Sebagai bagian dari perumusan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan, Indonesia Power melakukan upaya pelibatan *stakeholders* berdasarkan lingkup pengaruh Perusahaan terkait isu bidang pelanggan sebagai pengembangan dari hasil analisis isu terkait pelanggan. Indonesia Power melakukan identifikasi *stakeholder* penting dan harapan terhadap Perusahaan dalam menangani isu terkait aspek pelanggan tersebut sebagai berikut:

In formulation of CSR practice related to this subject, Indonesia Power engages stakeholders based on the Company's scope of influence in terms of customers after developing the analysis of this issue. The key stakeholders and their expectations in dealing with this issue are outlined as follows:

Stakeholder Penting Key Stakeholder	Harapan Expectation	Langkah Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder* Measures in Handling Issues and Engagement of Stakeholders
Pelanggan Customers	• Keandalan. • Kesiapan Pembangkit. • Ketepatan Jadwal Pemeliharaan. • Harga yang Ekonomis • Kontinuitas Pasokan. • Kesehatan dan keselamatan pelanggan. • Pemenuhan deployment sebagai persyaratan dalam menjalankan O&M pembangkit. • Pemenuhan kinerja pembangkit sesuai kontrak (keandalan dan ketepatan waktu). • Reliability. • Power Plant Readiness. • Timeliness of Maintenance Schedule. • Economical Price • Supply Continuity. • Customer health and safety. • Meeting deployment as a condition for conducting power plant O&M. • Meeting contractual requirement regarding generator performance (reliability and timeliness).	• Mendengarkan Suara Pelanggan melalui media komunikasi perusahaan (Email, Telepon, *Official Letter,* SMS, dll) . • Rapat Alokasi Energi (RAE). • Kunjungan Pelanggan. • Aplikasi HDKP/HDKS. • Rapat Koordinasi Sistem Jawa Bali. • Survei Kepuasan Pelanggan. • Forum Komunikasi Pelanggan / *Customer* Gathering. • WhatsApp Chat/Group dengan Pelanggan. • Forum *Sharing* Pembangkit. • Listening to Customers' Aspiration through corporate communication media (emails, phone calls, official letters, text messages, etc.) • Energy Allocation Meeting. • Customer Visit. • HDKP/HDKS application. • Java-Bali System Coordination Meeting. • Customer satisfaction survey. • Customer Gathering. • Communicating with customers via WhatsApp Chat/ Group Chat. • Sharing forum on power generation unit.
Pemerintah Government	• Dukungan terhadap program Pemerintah. • Support to Government's Programs.	• Bekerja sama dalam program penugasan Pemerintah dalam memenuhi ketersediaan energi listrik secara efektif dan tepat waktu. • Cooperation in programs assigned by Government to fulfill the electricity availability in an effective and timely manner.
Pemasok Suppliers	• Kejelasan Informasi mengenai standar material serta keselamatan dan keselamatan pelanggan mitra kerja. • The clarity of information on material standards and safety of customers and work partners.	• Memberikan informasi yang jelas dalam kegiatan pengadaan dan mengedukasi pemasok terkait standar mutu serta keselamatan dan keselamatan pelanggan. • Providing clear information about procurement and education about quality standards and customer safety.

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pelanggan

Action Plan of Corporate Social Responsibility Related to Customers

Rencana kegiatan tanggung jawab sosial terkait pelanggan disusun berdasarkan hasil analisis isu, dampak dan risiko serta pendekatan dan pelibatan *stakeholder* dalam perumusan tanggung jawab sosial terkait pelanggan. Indonesia Power berupaya menurunkan dampak pada pelanggan salah satunya melalui kegiatan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan Perusahaan. Sehingga kegiatan tanggung jawab sosial terkait pelanggan diharapkan mampu menciptakan manfaat bersama bagi Pelanggan, *Stakeholder* lain dan Perusahaan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program tanggung jawab Perusahaan, Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan berupaya melibatkan dan mendorong pemasok, pelanggan dan pihak terkait lainnya untuk mendukung efektifitas pelaksanaan

The action plan for CSR related to customers is prepared by taking into account the analysis result of the issues, impacts and risks, as well as approach to and engagement of the stakeholders in the formulation of CSR related to customers. Indonesia Power seeks to reduce impacts on customers. One of which is through CSR activities, which are expected to create mutual benefits for customers, other Stakeholders, and the Company itself. In the preparation of the plan and implementation of this program, Indonesia Power, by taking into account its influence, seeks to engage suppliers, customers and relevant parties to promote effective implementation of CSR and protection to customers. Below is the work plan for 2021 in terms of CSR related to customers:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CUSTOMERS

tanggung jawab sosial serta melindungi Pelanggan. Rencana program kerja tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab terhadap pelanggan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi hasil survei kepuasan pelanggan tahun 2020 dan menyusun action plan OFI kepuasan pelanggan 2021 (*workshop* manajemen komplain pelanggan 2021).
2. Program mendengarkan suara pelanggan di unit pembangkit (*customer gathering* dan Forum *Sharing* Pembangkit).
3. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan tahun 2021.
4. *Workshop* Pemahaman Metode Survei dan Pengelolaan Hasil Survei Pelanggan Tahun 2021.
5. Pengembangan dan Inovasi Produk dan Layanan terkait Pelayanan Pelanggan.
6. Kegiatan pendukung lainnya diantaranya terkait kesehatan dan keselamatan Pelanggan; informasi produk; sarana komunikasi dan penanggulangan pengaduan Pelanggan; upaya Perusahaan dalam memenuhi hak dan harapan Pelanggan, inovasi serta pengembangan Produk dan Layanan.

1. Evaluation of 2020 customer satisfaction survey results and preparation of OFI action plan for 2021 customer satisfaction (2021 customer complaint management workshop).
2. Program to collect the aspirations of customers surrounding the power generation unit (customer gathering and sharing forum).
3. Implementation of 2021 customer satisfaction survey.
4. Workshop on Comprehension on Survey Methods and Management of 2021 Customer Satisfaction Survey.
5. Development and Innovation of Products and Services related to Customer Service
6. Other supporting activities include those of relation to customer health and safety; product information; means of communication and handling mechanisms for customer complaints; the Company's action in fulfilling the rights and expectations of customers, product and service innovation and development.



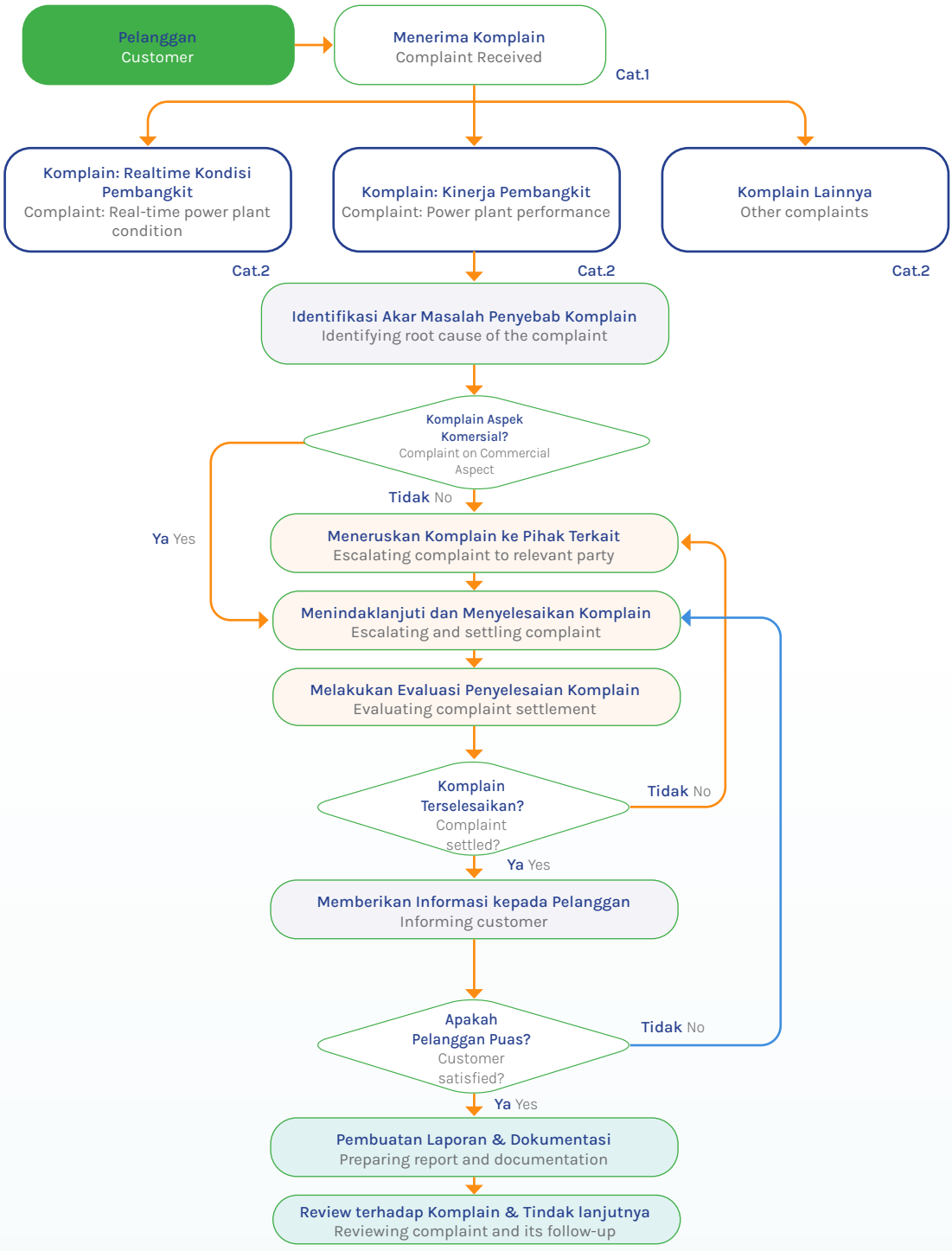
Mekanisme dan Prosedur Penanganan Pengaduan dan Konflik Terkait Pelanggan

Mechanism and Procedures of Complaints and Conflict Handling Related to Customers

Indonesia Power menyiapkan perangkat penunjang pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan dengan menyediakan mekanisme penanganan keluhan, keadaan darurat terkait keselamatan dan konflik bidang pelanggan guna memberikan perlindungan bagi pelanggan sebagaimana diatur dalam IPM.06.07 Manajemen Komplain.

To fulfill its obligations, Indonesia Power prepares mechanisms to handle complaints, respond to OHS-related emergencies, and resolve conflicts about customers to protect them as regulated in IPM.06.07 Complaint Management.

Mekanisme Pengelolaan Keluhan Pelanggan
Customer Complaint Management Mechanism



Gambar. IPM.06.07 Majamen Komplain Image. IPM.06.07 Complaint Management

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CUSTOMERS

Biaya Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pelanggan

Cost of Corporate Social Responsibility Related to Customers

Biaya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan melalui rangkaian kegiatan Survei Pelanggan mulai dari evaluasi, pelaksanaan, tindak lanjut yang telah dikeluarkan oleh Indonesia Power selama tahun 2021 adalah sebesar Rp 678,27 Juta.

In 2021, Indonesia Power has spent Rp678.27 million for corporate social responsibility related to customers through a series of Customer Survey activities ranging from evaluation, implementation, to follow-up.

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pelanggan serta Dampak Kegiatan

Realization of Corporate Social Responsibility Activities to Customers and Their Impacts

Fokus Pelanggan menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung kinerja Perusahaan. Hal tersebut tentu menjadi perhatian Direksi sebagai manajemen puncak tidak hanya untuk menencapai indikator kinerja tersebut namun dalam rangka menjaga keberlanjutan Perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang pelanggan tidak terlepas dari peran pegawai untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu memenuhi harapan *stakeholder* khususnya pelanggan dan dapat menunjang kinerja Perusahaan. Selain itu, Indonesia Power melibatkan *stakeholder* penting salah satunya pemasok yang bermitra dengan Perusahaan dalam rangka memenuhi standar material baik barang maupun jasa sesuai ketentuan keselamatan dan kesehatan pelanggan serta mendukung program Pemerintah dalam memenuhi ketersediaan energi listrik secara efektif dan tepat waktu. Program kerja tanggung jawab terhadap pelanggan Indonesia Power telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan selama tahun 2021.

Customer Focus is an important indicator in supporting the Company's performance. It is certainly a concern to the Board of Directors as top management, not only in achieving the performance indicators, but also in the context of maintaining the Company's sustainability. In the implementation of CSR for customer, employees also play a significant role in ensuring that all of the activities meet the stakeholders' expectations, particularly related to customers, and support the Company's performance. In addition, Indonesia Power engages key stakeholders, among others suppliers working in partnership with the Company, to meet material standards for goods and services. This means is performed in accordance with the customer health and safety requirements and to support the Government's program in ensuring effective and timely availability of electrical energy in the future. The programs under this matter have been carried out according to the plan for 2021.

Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2020 dan Menyusun *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan 2021.

Evaluation of 2020 Customer Satisfaction Survey Results and Preparation of OFI Action Plan for 2021 Customer Satisfaction.

Indonesia Power melakukan evaluasi atas hasil Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 Maret Tahun 2021 secara *virtual* dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2020.
2. Penyusunan *Action Plan Opportunity for Improvement* (OFI) Kepuasan Pelanggan 2021 oleh masing-masing Unit terhadap prioritas perbaikan.

Indonesia Power has conducted virtual evaluation on 2020 Customer Satisfaction Survey Results on March 8-10, 2021 with the following conclusions:

1. Evaluation of 2020 Customer Satisfaction Survey Results.
2. Preparation of the OFI Action Plan for 2021 Customer Satisfaction by each Unit towards priority of improvements.

3. Informasi dari pelanggan terhadap performasi Indonesia Power dalam Pembangkitan.
4. Penandatanganan Komitmen bersama *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan Tahun 2021 oleh perwakilan Unit Pembangkit, Divisi di *Head Office* yang terkait, dan pihak Pelanggan.

3. Information from customers regarding Indonesia Power's performance in terms of power generation.
4. Signing of the Joint Commitment on OFI Action Plan for 2021 Customer Satisfaction by representatives from the Units, relevant Divisions at the Head Office, and Customers.

Program Mendengarkan Suara Pelanggan di Unit Pembangkit (*Customer Gathering* dan *Forum Sharing* Pembangkit)

Program to collect the aspirations of customers surrounding the power generation unit (customer gathering and sharing forum).

Sebagai upaya memenuhi harapan pelanggan serta meningkatkan nilai engagement pelanggan, Indonesia Power melakukan program mendengarkan suara pelanggan di unit pembangkit (*Customer Gathering* dan *Forum Sharing Pembangkit*) yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. *Forum Sharing* Pembangkit, yang diselenggarakan secara *virtual* oleh beberapa Unit Indonesia Power diantaranya :
   a. Semarang PGU dengan PLN UP2B Jawa Tengah & DIY tanggal 30 Maret 2021, 30 Juni 2021, 5 Agustus 2021 dan 23 November 2021;
   b. PLTGU Cilegon OMU dengan PLN UIP2B JAMALI tanggal 9 April 2021 dan PLN UP2B Jakarta & Banten tanggal 6 Agustus 2021;
   c. Surayala PGU dengan PLN UIP2B JAMALI tanggal 12 April 2021;
   d. Grati POMU dengan PLN UIP2B JAMALI dan PLN UP2B Jawa Timur tanggal 29 Juni 2021 dan 30 Desember 2021.
2. *Customer Gathering*, yang diselenggarakan oleh PLTU Jeranjang OMU pada tanggal 14 Agustus 2021 dengan mengusung tema "*Fun Bike* bersama Pelanggan".

As a means to satisfy customer expectations and increase customer engagement, Indonesia Power has presented a program to collect feedbacks from customers neighboring the Power Generation Unit (customer gathering and sharing forum) through several activities as follows:

1. Forum Sharing Pembangkit, held virtually by several Power Generation Units:
   a. Semarang PGU with PLN UP2B Central Java & Yogyakarta Special Region on March 30, 2021, June 30, 2021, August 05, 2021 and November 23, 2021;
   b. CCPP Cilegon OMU with PLN UIP2B JAMALI on April 09, 2021 and PLN UP2B Jakarta & Banten on August 06, 2021;
   c. Surayala PGU with PLN UIP2B JAMALI on April 12, 2021;
   d. Grati POMU with PLN UIP2B Java, Madura & Bali and PLN UP2B East Java on June 29, 2021 and December 30, 2021.
2. Customer Gathering, organized by SPP Jeranjang OMU on August 14, 2021 under the theme of "Fun Bike with Customers".

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2021

Implementation of 2021 Customer Satisfaction Survey

Indonesia Power mengukur tingkat kepuasan, ketidakpuasan dan keterikatan pelanggan terhadap layanan yang diberikan Perusahaan secara berkala. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2021 telah dilakukan pada tanggal 10 Agustus - 12 November 2021 kepada seluruh pelanggan Indonesia Power. Survei Kepuasan Pelanggan dilakukan dengan 2 (dua) metode Survei, yaitu:

1. Metode Kuantitatif, melalui kuesioner yang sifatnya close dan *open question.*
2. Metode Kualitatif, melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Indepth Interview.*

On a regular basis, Indonesia Power measures the level of customer satisfaction, dissatisfaction, and engagement on the services it provides. In 2021, the Customer Satisfaction Survey has been conducted from August 10 to November 12, 2021, with all Indonesia Power customers as the participants. The survey was completed using 2 (two) methods, namely:

1. Quantitative Method, through a questionnaire comprising closed- and open-ended questions.
2. Qualitative Method, through Focus Group Discussion (FGD) and In-Depth Interview.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CUSTOMERS

Pada tahun 2021, diperoleh nilai indeks kepuasan pelanggan untuk pembangkit eksisting sebesar 86,58% meningkat 1,74% dari tahun sebelumnya dengan nilai indeks sebesar 84,84%. Sedangkan untuk nilai indeks kepuasan pelanggan untuk pembangkit Jasa O&M sebesar 84,84% meningkat 2,79% dari tahun sebelumnya dengan nilai indeks sebesar 82,05%. Nilai Kepuasan Pelanggan baik pelanggan eksisting maupun jasa O&M, keduanya termasuk dalam kategori sangat memuaskan.

As the result, the employee satisfaction index (ESI) stood at 86.58%, increasing by 1.74% from 84.84% in the previous year. As for O&M services power plant, the employee satisfaction index (ESI) was 84.84%, increasing by 2.79% from previously 82.05%. Those indexes fall under the category of 'very good'.

Peningkatan nilai kepuasan pelanggan ini tidak lepas dari meningkatnya pelayanan prima atas produk dan jasa yang diberikan kepada pelanggan, sehingga pelanggan merasa lebih puas dan *engage* dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, kami akan tetap terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan prima atas produk dan jasa kepada pelanggan sehingga mampu melampaui harapan pelanggan.

This improvement indicates better service for the products and services provided to customers. Indonesia Power will continue to maintain and improve the service for customers so as to exceed their expectations.

Workshop Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2021
Workshop on Presentation of 2021 Customer Satisfaction Survey Results

Indonesia Power mengadakan Workshop Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pelanggan tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2021 secara *Virtual Conference* (Vicon) melalui *Microsoft Teams*, dengan kegiatan antara lain:

1. Penyampaian materi terkait Metode Survei Pelanggan.
2. Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Pelanggan Eksisting, Jasa O&M dan MSU.
3. Diskusi terkait Hasil Survei dan saran pelanggan untuk perbaikan.

The Company held an online Workshop on Presentation of 2020 Customer Satisfaction Survey Results on November 02-2021, 2020 via Microsoft Teams Meeting, with the following agenda:

1. Presentation of Materials on Customer Survey Methods.
2. Presentation of Existing Customer Satisfaction Survey Result, O&M Services, and MSU.
3. Discussions regarding the Survey Results and suggestions for improvements.

Kegiatan Lainnya
Other Activities

Indonesia Power juga melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pelanggan mencakup hal-hal sebagai berikut:

Indonesia Power also carried out CSR related to customers covering the following matters:

Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
Customer Health and Safety

Indonesia Power selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan pelanggan dan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dengan memastikan segala sesuatunya sesuai dengan rangkaian prosedur operasi standar keselamatan dan kesehatan pelanggan sebagai upaya dalam memenuhi tanggung jawab Perushaan terhadap pelanggan.

Other than always prioritizing customer safety and health, Indonesia Power strives to provide the best service by ensuring compliance with a series of standard operating procedures for customer safety and health to fulfill the Company's responsibilities to customers.

Selama tahun 2021, tidak terdapat insiden ketidakpatuhan tentang dampak keselamatan dan kesehatan dalam pendistribusian energi listrik kepada pelanggan dan pengaduan mengenai ketidaknyamanan pelanggan.

Throughout 2021, there were no incidents of non-compliance regarding the safety and health impacts in power distribution to customers nor complaints about customer inconvenience.

Informasi Produk
Product Information

Informasi Produk dapat diakses melalui website Indonesia Power dengan alamat www.indonesiapower.co.id dan laporan tahunan. Indonesia Power secara berkala memastikan ketersediaan dan kemudahan akses informasi terkait produk Indonesia Power.

Product information is available in the Indonesia Power website at and annual report. The content is updated periodically to ensure the availability and accessibility of product-related information.

Sarana Komunikasi dan Penanggulangan atas Pengaduan Pelanggan
Means of Communication and Customer Complaints Handling

Sarana komunikasi hubungan dengan pelanggan disediakan sebagai bagian dari upaya menangani keluhan dan pertanyaan mengenai produk. Pelanggan dapat berinteraksi secara langsung untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan, saran/masukan dan tingkat kepuasan terhadap produk dan layanan yang diberikan oleh Indonesia Power. Media komunikasi hubungan dengan pelanggan yang digunakan oleh Indonesia Power adalah sebagai berikut :

Means of communication are provided to maintain communication with customer, among others to handle complaints and product-related questions. Customers can interact directly to submit any complaints, questions, suggestions/input and remark of satisfaction on products and services provided by Indonesia Power. Below are the customer relations communication media used by Indonesia Power:

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Customer Support Requirement Determination Process	Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Requirement Dissemination to Workforce
PLN melalui PLN UI P2B (Energi Listrik 500kV dan 150kV) PLN via PLN UI P2B (500 kV and 150 kV electricity)		
Telepon/*WhatsApp* - 021-526 7666 - 0811 937 740 (HP/*WhatsApp* ETMC) - Ext. 2222/3333 : Operasional *Realtime* (ETMC) - Ext. 2222/3333 : Realisasi Kinerja Pembangkit Phone/WhatsApp - 021-526 7666 - 0811 937 740 (HP/WhatsApp ETMC) - Ext. 2222/3333: Real-time Operations (ETMC) - Ext. 2222/3333: Power Plant Performance realization HDKP (Harian Deklarasi Ketidaksiapan Pembangkit) - WA *Group*-ROM P2B-IP: komunikasi ROM - Telepon *Direct* ETMC (021-522 9813) : Kondisi Pembangkit - *Handphone* ETMC 0811 937 740 : Kondisi Pembangkit dan Operasional - *Hotline* Unit Pembangkit : Naik turun beban, *Start-Stop* Pembangkit, Kondisi Pembangkit HDKP (Power Plant Unreadiness Daily Declaration) - WA Group-ROM P2B-IP: ROM communication - Direct call to ETMC (021-522 9813): Power Plant Condition - ETMC cellular phone 0811937740: Power Plant Condition and Operations - Power Generation Unit Hotline: Load fluctuation, power plant start-stop, plant conditions	- Menetapkan PIC untuk telepon. - Menetapkan respon *time*. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for phone calls - Setting up response time - Establishing etiquette to receive and answer calls - Evaluating information and media effectiveness for improvement	- Menetapkan instruksi kerja (IPM, IK). - Melakukan sosialiasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction (IPM, IK) - Disseminating relevant information to the related employees

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CUSTOMERS

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Customer Support Requirement Determination Process	Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Requirement Dissemination to Workforce
Website - Aplikasi HDKS (Rapsodi) : Naik turun beban dan *Start-Stop* Pembangkit. - Aplikasi HDKP IKP : Ketidaksiapan Pembangkit. - Aplikasi GAIS : Kinerja Pembangkit. - Aplikasi JBOS Plan : Perencanaan Pembangkit. - Aplikasi ProNIA: Kondisi *Realtime* Sistem Pembangkitan. - Aplikasi Neraca Energi : kWh Energi. - HDKS (Rapsodi) app: Load fluctuation, Plant Start-Stop - HDKP IKP app: Power plant unreadiness - GAIS app: Power plant Performance - JBOS Plan app: Power Plant Planning - ProNIA app: Real-time Condition Of The Power Plant System - Neraca Energi app: Energy kWh	- Menetapkan PIC untuk aplikasi sesuai dengan Tupoksi. - Menetapkan respon time mengacu pada Protap. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for every application in line with job descriptions - Determining response time referring to procedures - Evaluating information and media effectiveness for improvement	- Menetapkan instruksi kerja (IPM, IK). - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction (IPM, IK) - Disseminating relevant information to related employees
E-mail etmc@indonesiapower.co.id Perencanaan Operasi, Operasional *Realtime* Operation Plan, Real-time Operations	- Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM, dan ROH). - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining plant readiness (ROB, ROM, and ROH) - Evaluating information and media effectiveness for improvement	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction - Disseminating relevant information to related employees
Surat Mail PT Indonesia Power Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, 12950 *Settlement*/Kontrak Settlement/Contract	- Menetapkan kontrak *Single Price*. - Menetapkan JTF. - Menetapkan perencanaan penjualan. - Menetapkan kondisi status pembangkit. - Determining Single Price contract - Determining JTF - Determining sales plan - Determining power plant status	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction - Disseminating relevant information to related employees
Rapat Rapat Alokasi Energi (RAE) serta Rapat pembahasan Kontrak dan *Settlement* Meeting Energy Allocation Meeting (RAE) and discussing Contract and Settlement	- Menetapkan hasil evaluasi energi bulan yang lalu dan perencanaan bulan depan - Evaluasi informasi dan efektifitas media untuk perbaikan - Determining the results of preceding months' energy evaluation and planning for the next months - Evaluating information and media effectiveness for improvement	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction - Disseminating relevant information to related employees
PLN melalui PLN Distribusi (energi listrik ≤20kV) PLN Via PLN Distribusi (electricity ≤20 kV)		
Telepon/*WhatsApp* - 021-526 7666 - *Handphone/WhatsApp* ETMC : 0811 937 740 - Telepon *direct* ETMC : 021-522 9813 Phone/ WhatsApp - 021-526 7666 - ETMC Cellular Phone/ WhatsApp: 0811 937 740 - Direct call to ETMC: 021-522 9813	- Menetapkan PIC untuk telepon. - Menetapkan *respon time*. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Determining PIC for phone calls - Setting up response time - Establishing etiquette to receive and answer calls	- Menetapkan instruksi kerja - Melakukan rapat internal Jasa O&M - Determining work instruction - Conducting internal O&M Services meeting

Media Komunikasi Utama Main Communication Media	Proses Menetapkan Persyaratan Dukungan Pelanggan Customer Support Requirement Determination Process	Proses Menyebarluaskan Persyaratan ke Internal Tenaga Kerja Requirement Dissemination to Workforce
E-mail E-mail kepada DIV CST I/ personal *E-mail: Settlement*/kontrak E-mail to DIV CST I/personal e-mail: Settlement/Contract	Menetapkan kesiapan pembangkit Determining plant readiness	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction - Disseminating relevant information to related employees
Surat Mail PT Indonesia Power Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, 12950 *Settlement*/Kontrak Settlement/Contract	- Menetapkan kontrak Single Price. - Menetapkan JTF. - Menetapkan kondisi status pembangkit. - Determining Single Price contract - Determining JTF - Determining power plant status.	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction - Disseminating relevant information to related employees
Rapat Rapat pembahasan kontrak dan *settlement* Meeting Meeting to discuss contract and settlement	Menetapkan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kontrak/settlement Determining planning and evaluation of contract/settlement implementation	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. - Determining work instruction - Disseminating relevant information to related employees
PLN Pelanggan Jasa O&M PLN via O&M Service Customers		
Telepon/*WhatsApp* - 021-526 7666 : Koordinasi, Progres, Kajian - 0811 937 740 (*Handphone* /*WhatsApp* ETMC) - Telepon personal : Koordinasi, Progres, Kajian Phone/WhatsApp - 021-526 7666: Coordination, Progress, Review - 0811 937 740 (Cellular Phone/ WhatsApp ETMC) - Personal phone: Coordination, Progress, Review	- Menetapkan PIC untuk telepon. - Menetapkan respon time. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Determining PIC for phone calls - Setting up response time - Establishing etiquette to receive and answer calls	- Menetapkan instruksi kerja - Melakukan rapat internal Jasa O&M - Determining work instruction - Conducting internal O&M Services meeting
E-mail ke PST II/ *personal e-mail* E-mail to PST II/personal e-mail	Menetapkan kesiapan pembangkit (ROB, ROM, dan ROH) Determining power plant readiness (ROB, ROM, and ROH)	- Menetapkan instruksi kerja - Melakukan rapat internal Jasa O&M - Determining work instruction - Conducting internal O&M Services meeting
Rapat Alokasi Energi (RAE) dan Rapat Rekonsiliasi Jasa O&M (Kontrak dan *Settlement*) Energy Allocation Meeting (RAE) and O&M Services Reconciliation Meeting (Contract and Settlement)	Melakukan hasil evaluasi kontrak yang masih berjalan Conducting evaluation of ongoing contract	- Menetapkan instruksi kerja. - Melakukan rapat internal Jasa O&M - Determining work instruction - Holding internal O&M Service meeting

Selama tahun 2021, tidak terdapat pengaduan pelanggan baik dari segi aspek kesehatan dan keselamatan maupun aspek Ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dengan penyediaan informasi produk dan komunikasi pemasaran.

Throughout 2021, no customer complaints were filed, either about health and safety or non-compliance with regulations on provision of product information and marketing communication.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CUSTOMERS

Jumlah Pengaduan Dari Pelanggan Tahun 2021
Number of Customer Complaints in 2021

Aspek Aspect	Jumlah pengaduan Total complaints
Kesehatan dan keselamatan terkait dengan pendistribusian listrik kepada pelanggan dan pengaduan mengenai privasi pelanggan Health and safety related to power distribution to customers and complaints about their privacy	0 (Tidak ada pengaduan dari pelanggan) (Zero complaint)
Ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dengan penyediaan informasi produk dan komunikasi pemasaran Non-compliance with relevant regulations on provision of product information and marketing communications	0 (Tidak ada pengaduan dari pelanggan) (Zero complaint)

Penanganan pengaduan pelanggan dikelola dan dilaksanakan oleh Divisi di *Head Office* Indonesia Power, yaitu Division of Commerce and Customer Relation I (DIVCST I) untuk Pelanggan Unit Pembangkit dibawah Direktorat Operasi I dan Division of Primary Energy and Settlement II (DIVPST II) untuk Pelanggan Unit Pembangkit dibawah Direktorat Operasi II, serta dimonitor secara otomatis dalam Aplikasi Harian Deklarasi Ketidaksiapan Pembangkit (HDKP) oleh operator ETMC. Hasilnya dikompilasi dan dievaluasi oleh Vice President of Commerce and Customer Relation I (VP CST I) dan Unit/Divisi terkait untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi dan kemudian ditindaklanjuti (sesuai dengan IPM.06.07 Manajemen Komplain).

At the Head Office, customer complaints are handled by the Division of Commerce and Customer Relation I (DIVCST I) for Generation Unit Customers under Operation Directorate I and the Division of Primary Energy and Settlement II (DIVPST II) for Generation Unit Customers under Operation Directorate I. They are automatically monitored by Power Plant Unreadiness Daily Declaration (HDKP) application by ETMC operator. The result would then be compiled and evaluated by the Vice President of Commerce and Customer Relation I (VP CST I), as well as relevant Units/Divisions, for solutions to the situations on hand and follow-up actions (in accordance with IPM.06.07 Complaint Management).



Upaya Perusahaan dalam Memenuhi Hak dan Harapan Pelanggan

Company's Measure in Ensuring Customers' Rights and Meeting Their Expectations

Sebagai bagian dari upaya memenuhi ekspektasi serta hak-hak pelanggan, Indonesia Power telah menyusun langkah-langkah terkait dukungan pelanggan sebagai berikut:

As part of the measure to satisfy customer's expectations and rights, Indonesia Power has established the following steps to support customers:

Uraian Description			Proses Memenuhi Dukungan Pelanggan Process of Fulfilling Customer's Support	Proses Menyebarluaskan Persyaratan Dukungan Pelanggan ke Pihak Terkait Process of Disseminating Terms of Customer's Support to Related Parties
Energi Listrik Electrical Energy	Grid (550 kV dan 150 kV) Grid (550 kV and 150 kV)	Kesiapan 24 Jam Operator Control Room dan ETMC 24 Hours Readiness of Control Room Operator and ETMC	- Menetapkan PIC. - Menetapkan durasi kesiapan. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan - Determining PIC. - Determining duration of readiness. - Determining etiquette of receiving and answering phone calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
		Optimalisasi penggunaan aplikasi realtime kesiapan pembangkit Optimization of application utillization on generator's realtime readiness	- Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi. - Menetapkan response time mengacu pada Protap. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for each application in accordance with their job description. - Determining Response Time accordingly to Standard Operation Procedure. - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait Protap Conducting socialization toward employees regarding Standard Operating Procedure
	Embedded (20 kV) Embedded (20 kV)	Kesiapan *Operator Control Room* Readiness of Control Room Operator	- Menetapkan PIC. - Menetapkan durasi kesiapan. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan - Determining PIC. - Determining duration of readiness. - Determining etiquette of receiving and answering phone calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Controlt
Jasa O&M O&M Service		Kesiapan *Operator Control Room* dan ETMC Readiness of Control Room Operator and ETMC	- Menetapkan PIC. - Menetapkan durasi kesiapan. - Menetapkan tata cara menerima dan menjawab telepon. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan - Determining PIC. - Determining duration of readiness. - Determining etiquette of receiving and answering phone calls. - Evaluating information and media effectiveness for improvement.	Membuat dan menetapkan prosedur terkait Pengendalian Niaga Formulating and determining procedure regarding Commerce Control
		Optimalisasi penggunaan aplikasi *realtime* kesiapan pembangkit Optimization of application utillization on generator's realtime readiness	- Menetapkan PIC untuk setiap aplikasi sesuai dengan Tupoksi. - Menetapkan response time mengacu pada Protap. - Evaluasi informasi dan efektivitas media untuk perbaikan. - Determining PIC for each application in accordance with their job description. - Determining Response Time accordingly to Standard Operation Procedure. - Evaluating information and media effectiveness for improvement	Melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait Protap Conducting socialization toward employees regarding Standard Operating Procedure

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CUSTOMERS

Pengembangan dan Inovasi Produk dan Layanan di Tahun 2021 terkait Pelayanan Pelanggan

Development and Innovation of Products and Services related to Customer Service in 2021

Pengembangan dan inovasi produk dan layanan terkait pelayanan pelanggan yang dilakukan Indonesia Power pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Menambahkan media komunikasi pelanggan dengan Aplikasi *Messenger* sebagai media Komunikasi privat dengan Pelanggan serta sarana untuk menginformasikan laporan-laporan terkait kinerja unit pembangkit listrik perusahaan secara rutin.
2. Menambahkan media Komunikasi berupa JWOT sebagai sarana Komunikasi dengan Pelanggan yang dapat merekam suara pembicaraan yang terjadi saat itu.
3. Menambahkan Aplikasi Niaga sebagai sarana untuk monitoring kinerja pembangkit Perusahaan secara realtime yang dapat di akses oleh Pelanggan berbasis web bases.
4. Membuat Aplikasi Pengelolaan Pelanggan yang menyimpan *database* Pelanggan Indonesia Power.

Development and innovation of product and service related to customer service by Indonesia Power in 2021 comprise:

1. Addition of Messenger Application as a private communication medium with customers as well as a means to inform reports on the performance of the Company's power plant units on a regular basis.
2. Adding JWOT communication medium as a means of communication with customers. This service features voice recording of ongoing conversations.
3. Adding a web-based Commercial Application for real-time monitoring of the Company's power plants.
4. Creating Customer Management Application containing database of Indonesia Power's customers.

Dukungan Manajemen, Pegawai dan *Stakeholders* Relevan pada Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan Bidang Pelanggan

Management, Employee, and Stakeholders Support in Corporate Responsibility Related to Customers

Pelaksanaan tanggung jawan sosial perusahaan khususnya bidang pelanggan tidak terlepas dari peran Direksi, pegawai dan *stakeholders*. Direksi beserta jajaran manajemen terkait senantiasa terlibat mulai dari perumusan rencana kerja, pelaksanaan program kerja tanggung jawab terhadap pelanggan yang merupakan rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka mendorong kepuasan Pelanggan terhadap produk dan layanan Perusahaan. Indonesia Power juga melibatakan *stakeholder* relevan dalam perumusan program kerja dan rangkaian kegiatan program terkait tanggung jawab Perusahaan terhadap pelanggan. Unit-unit terkait dalam Perusahaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing turut serta dalam mereview dan meningkatkan keredibilitas inisiatif dan laporan khususnya terkait Pelanggan setiap triwulan yang termuat dalam laporan manajemen.

The successful implementation of CSR related to customers is impossible to accomplish without the role of the board of directors, employees and stakeholders. The board of directors and the management always take a hands-on approach in every stage, starting from the formulation of work plan to the implementation of work program, as their responsibility for customers. It is a series of interrelated activities that helps increasing customer satisfaction with the Company's products and services. Indonesia Power also engages relevant stakeholders in the formulation of work programs and a series of program activities related to the Company's responsibilities related to customers. The related units in the Company in accordance with their respective areas of duties and responsibilities participate in reviewing and increasing the transparency of initiatives and quarterly reports, especially related to Customers, as contained in the Management Report.

Dukungan Manajemen, Pegawai dan *Stakeholders* Relevan pada Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan Bidang Pelanggan

Corporate Responsibility Related to Customers and the Benefits for Company, Stakeholders, and Support for Sustainable Development

Tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pelanggan merupakan salah satu upaya dalam menciptakan manfaat bersama bagi *Stakeholders* dan Perusahaan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Indonesia Power berupaya memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan berkelanjutan melalui produksi yang bertanggung jawab serta upaya dalam memastikan akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan dan berkelanjutan.

Bagi Indonesia Power dalam jangka panjang, pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan diharapkan dapat menjaga keberlanjutan Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham serta secara khusus atas program kerja terkait indikator kinerja Fokus Pelanggan. Manfaat kegiatan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya Tindak Lanjut *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan Tahun 2021.
2. Komitmen bersama *Action Plan* OFI Kepuasan Pelanggan Tahun 2021 dari semua pihak, baik Indonesia Power maupun *stakeholder*.
3. Adanya saran dan diskusi bersama untuk perbaikan kedepan.
4. Meningkatkan sinergi dengan Pelanggan Indonesia Power.
5. Mempererat hubungan dan komunikasi dengan Pelanggan Indonesia Power.
6. Mengetahui Nilai Kepuasan, Ketidakpuasan, dan Keterikatan Pelanggan selama periode 2021.
7. Mendapat masukan (*feedback*) untuk perbaikan tahun 2022.
8. Setiap Unit Indonesia Power mengetahui tingkat Kepuasan Pelanggan tahun 2021, dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
9. Memecahkan masalah terkait keluhan pelanggan yang masuk.
10. Mendapat solusi dan kesepakatan bersama untuk perbaikan kedepan dalam hal hubungan pelanggan.

CSR related to customers is a means to create mutual benefits for the Stakeholders and the Company, as well as supporting sustainable development goals. Indonesia Power strives to present direct and indirect positive impacts on sustainable development through responsible production and efforts to ensure access to affordable, reliable, and sustainable energy.

Through this measure, Indonesia Power aims to maintain the Company's sustainability as an accountability to the Shareholders in the long term, and also specifically to work program relating to Customer Focus performance indicator. The benefits of corporate responsibility activities to customers include the following:

1. Follow-ups on OFI Action Plan for 2021 Customer Satisfaction.
2. Joint commitment on OFI Action Plan for 2021 Customer Satisfaction from all parties, both Indonesia Power and its stakeholders.
3. Suggestions and discussions for future improvements.
4. Improved synergy with Customers.
5. Strengthened communication and relationship with Customers.
6. Customer Satisfaction, Dissatisfaction, and Engagement scores for 2021.
7. Feedback for improvement in 2022.
8. Each Indonesia Power Unit identifies the level of Customer Satisfaction in 2021, which can be compared to that of the previous year.
9. Problem solving for incoming customer complaints.
10. Solutions and mutual agreement for future improvements to customer relations

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PELANGGAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO CUSTOMERS

Sertifikasi dan Uji Kelayakan serta Penghargaan Kegiatan Bidang Pelanggan

Certification and Due Diligence and Award for Customer-related Activities

Customer Focus merupakan salah satu aspek utama dalam Sistem Manajemen Mutu. Indonesia Power telah memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai bentuk komitmen Perusahaan terhadap pelanggan. Selain itu, juga dilakukan uji kelayakan, *review* dan identifikasi kegiatan Perusahaan menjadi bagian dari tanggung jawab sosial pelanggan guna memenuhi standar baku penerapan yang merupakan bagian dalam perumusan program.

Selama tahun 2021, Indonesia Power mendapatkan sertifikat terkait dengan hasil indeks kepuasan Pelanggan/*Customer Satisfaction Index* (CSI) dimana mendapat predikat Sangat Memuaskan yang diberikan oleh PT SUCOFINDO (Persero).

Focus on Customer is one of the primary aspects in Quality Management System. Indonesia Power has obtained ISO 9001:2015 as a Quality Management System Certification which represents the Company's commitment to customers. In addition, due diligence, review, and identification of Corporate activities have all become part of the Company's social responsibility for customers in order to meet the implementation standards that constitute a part of the program formulation.

In 2021, Indonesia Power was granted Very Satisfactory predicate by PT SUCOFINDO (Persero) for its customer satisfaction index score.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Kegiatan produksi Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan akan energi listrik tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat khususnya yang berada disekitar wilayah operasional Perusahaan. Indonesia Power menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat bukan hanya untuk membangun reputasi dan meningkatkan kinerja keuangan, namun juga didasari oleh dorongan agar dapat memberikan nilai yang lebih luas di masa depan untuk tumbuh berkelanjutan bersama masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia Power menyusun program tanggung jawab sosial yang mampu mengembangkan modal sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan menjadi bagian dari kepatuhan Indonesia Power terhadap regulasi yang berlaku serta mendukung program Pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

The Company's production activities to fulfill the need for electricity in no doubt go hand in hand with the community, specifically within the vicinity of the Company's operational areas. Indonesia Power recognizes the importance of maintaining good relations with the community not only to build reputation and improve financial performance, but also motivated by the drive to bring extended values for future sustainable growth along with the community. Therefore, Indonesia Power establishes a social responsibility program that enables the development of social capital in order to improve the living standards of the community. In addition, the CSR activities are part of Indonesia Power's compliance with applicable regulations and support of the Government's program to achieve sustainable development goals.

Komitmen dan Kebijakan Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Commitments and Policies on Social and Community Development

Inisiatif program tanggung jawab sosial merupakan wujud komitmen Indonesia Power terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan, melaksanakan target program pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat sekitar, meningkatkan efektivitas program pelibatan dan pengembangan komunitas untuk mendukung pencapaian kemandirian masyarakat, meningkatkan pendapatan dan peluang usaha masyarakat serta mengembangkan pendayagunaan produksi dalam negeri untuk kebutuhan yang masuk kategori *leverage* dan *critical*.

Landasan pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan Indonesia Power mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Indonesia Power menetapkan kebijakan internal Perusahaan terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang diatur dalam:

1. Keputusan Direksi No.25.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan tanggal 11 Februari 2014.
2. Keputusan Direksi No.26.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan InPower CARE di Lingkungan PT Indonesia Power tanggal 11 Februari 2014.
3. Keputusan Direksi Nomor 218.K/010/IP/2016 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Indonesia Power Bab VIII Pendayagunaan Produk dalam Negeri.
4. Keputusan Direksi No No 180.K/010/IP/2018 tentang Komitmen Community Development melalui Program Inspirasi Perempuan, tanggal 22 November 2018.
5. Keputusan Direksi 56.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Program Unggulan *Community Development* di Lingkungan PT Indonesia Power, tanggal 28 Mei 2019.

The social responsibility program initiative is an embodiment of Indonesia Power's commitment to social and community development as well as the realization of its aims to build power generation infrastructure and develop infrastructures for the surrounding community. It also aspires to increase the effectiveness of community engagement and development programs to nurture self-sufficiency of the community. Furthermore, the Company intends to increase income and business opportunities for the community as well as develop domestic production utilization for leverage and critical needs.

The implementation of CSR for social and community development refers to the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility. Indonesia Power establishes the following internal policies on this matter as regulated in:

1. Decree of the Board of Directors No. 25.K/010/IP/2014 on the Guideline for Corporate Social and Environmental Responsibility, dated February 11, 2014.
2. Decree of the Board of Directors No.26.K/010/IP/2014 on the Guideline for InPower CARE Implementation at PT Indonesia Power, dated February 11, 2014.
3. Decree of the Board of Directors No. 218.K/010/IP/2016 regarding Goods/Service Procurement Guideline of PT Indonesia Power, Chapter VIII about Domestic Product Utilization.
4. Decree of the Board of Directors No. 180.K/010/IP/2018 on Commitment to Community Development through Inspirasi Perempuan (Women's Inspiration) Program, dated November 22, 2018.
5. Decree of the Board of Directors No. 56.K/010/IP/2019 on the Management of Community Development Flagship Program at PT Indonesia Power, dated May 28, 2019.

Perumusan dan Rencana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Formulation and Plan of Corporate Social Responsibility (CSR) for Social and Community Development

Indonesia Power melakukan pemetaan sosial untuk mengenali dan merumuskan *stakeholder* penting dan tanggung jawab sosial Perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, perumusan tanggung jawab sosial Perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan juga melalui uji tuntas dengan melakukan *review*, identifikasi dan *update* terhadap seluruh peraturan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan; analisis isu penting, dampak dan risiko dari kegiatan Perusahaan; ekspektasi *stakeholders* yang terkait dengan aspek pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun dalam memastikan kecukupan kebijakan dan penerapan tanggung jawab Perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

Indonesia Power carries out social mapping to identify and formulate the key stakeholders and CSR for social and community development. In relation to this matter, Indonesia Power also conducts due diligence by reviewing, identifying, and updating all regulations on social and community development; analyzing key issues, impacts, and risks of Corporate activities; and examining the expectation of the stakeholders corresponding to the aspects of social and community development. The due diligence is performed annually to ensure the adequate policies and secure CSR implementation on such subject.

Isu Penting, Dampak dan Risiko Sosial yang Terkait Secara Langsung atau Tidak Langsung dengan Perusahaan

Social Key Issues, Impacts, and Risks Directly and Indirectly Related to the Company

Isu-isu penting terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang relevan dengan bisnis Perusahaan secara umum meliputi kesejahteraan masyarakat termasuk ketersediaan lapangan kerja, masalah lingkungan, akses pendidikan, kesehatan masyarakat dan bantuan sosial. Isu tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi dampak dan risiko dari kegiatan operasional Indonesia Power terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan sebagai berikut :

Key issues related to social and community development relevant to the Company's overall business include community welfare, including job opportunities, environmental issues, access to education, community health, and social aid. They are analyzed to identify the impact and risk of the Company's operation toward social and community development directly and indirectly related to the Company as elaborated below:

Analisis Dampak, Risiko dan Tindakan Penanggulangan

Analysis of Impacts, Risks, and Countermeasures

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Sedikitnya Lapangan Pekerjaan Lack of Job Opportunities	• Kemiskinan • Pengangguran • Meningkatnya tindak kejahatan • Poverty • Unemployment • Crime rise	• Membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program Kemitraan. • Meningkatkan mitra kerja dengan tenaga kerja lokal. • Assisting and developing Micro, Small, and Medium Business through the Partnership Program. • Consolidating partnership with local manpower.

Potensi dampak teridentifikasi Identified potential impact	Potensi Risiko Potential Risk	Tindakan Penanggulangan Countermeasure
Kerusakan Lingkungan Environmental Damage	• Berkurangnya ketersediaan air bersih. • Menghilangnya sumber mata pencaharian masyarakat. • Gangguan kesehatan masyarakat dan tenaga kerja di lingkungan pembangkit. • Bencana Alam • Lack of clean water. • Loss of people's livelihoods. • Community and employee health issue at the power plant environment. • Natural Disaster	• Pengendalian operasi dan pengelolaan limbah cair. • Pengendalian operasi dan Pengendalian baku mutu emisi. • Pemantauan emisi gas buang secara continue melalui CEMS (*Continuous Emission Monitoring System*) dan periodik melalui pemantauan laboratorium. • Operation control and liquid waste management. • Operation and emission quality standard controls. • Exhaust gas emission monitoring continuously via CEMS (Continuous Emission Monitoring System) and periodically through lab monitoring.
Minimnya Akses dan Infrastruktur Pendidikan Lack of Access to Education and Its Infrastructure	• Meningkatnya anak putus sekolah. • Rendahnya mutu pendidikan. • Rendahnya kompetensi masyarakat. • Meningkatnya pengangguran. • Rising dropout rate. • Poor education quality. • Poor community competency. • Rising unemployment.	• Bantuan dan Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. • Program kerja sama bidang pendidikan. • Bantuan Biaya Pendidikan. • Educational facilities and infrastructures aid and renovation. • Cooperation programs on education. • Educational Financial aid.
Kesehatan, Sosial dan Keagamaan Health, Social, and Religion	• Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat. • Hilangnya kearifan lokal. • Tempat tinggal tidak layak • Sarana ibadah tidak layak. • Poor public health quality. • Loss of local wisdom. • Inadequate housing • Inadequate place of worship.	• Bantuan pemeriksaan dan pengobatan gratis. • Bantuan sosial bencana alam dan non alam. • Partisipasi peringatan hari besar dan kegiatan adat. • Bantuan renovasi rumah. • Bantuan perbaikan sarana ibadah. • Free medical check up and medication. • Natural and non-natural disasters social relief. • Participation in the celebration of festive days and cultural activities. • Home renovation aid. • Place of worship renovation aid.
Hubungan dengan *Stakeholder* Stakeholder relations	• Kredibilitas Perusahaan • Perilaku Menyimpang • Corporate Credibility • Deviant Behaviors	• Komitmen pada penerapan pedoman etika Perusahaan. • Forum diskusi dengan *stakeholders*. • Commitment to the implementation of the Company's code of ethics. • Discussion forum with the stakeholders.

Ekspektasi dan Jangkauan Lingkup Pengaruh Perusahaan Terkait Isu Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Expectation and Scope of Company's Influence Related to Social and Community Development

Sebagai bagian dari perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui uji tuntas juga mencakup upaya pelibatan stakeholders sebagai tindak lanjut dari hasil analisis isu terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Indonesia Power melakukan identifikasi *stakeholder* penting dan harapan terhadap Perusahaan dalam menangani isu pengembangan sosial dan kemasyarakatan sebagai berikut:

The formulation for CSR related to social and community development through due diligence also includes the engagement of stakeholders as the follow-up of issues analysis results on such subject. Indonesia Power identifies the key stakeholders and Company's expectation in dealing with those issues, as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Analisis *Stakeholder* Penting, Ekspektasi serta Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder*
Analysis of Key Stakeholders, Expectations, Handling of Issues, and Engagement of Stakeholders

Stakeholder Penting Key Stakeholder	Harapan Expectation	Langkah Penanganan Isu dan Pelibatan *Stakeholder* Measures in Handling Issues and Engagement of Stakeholders
Pegawai Employees	• Peningkatan kepuasan dan kesejahteraan pegawai. • Keberlanjutan bisnis Perusahaan. • Keselamatan dan Kesehatan Kerja. • Siaga dan Tanggap Kondisi Darurat Bencana. • Increased employee satisfaction and well-being. • Sustainability of the Company's business. • Occupational Safety and Health. • Emergency Preparedness and Disaster Response.	• *Coffee morning* • Pertemuan periodik • *Employee* dan *Family Gathering* • Perayaan Hari Ulang Tahun Perusahaan • Survei HRSE • Simulasi Tanggap Darurat Bencana • Coffee morning • Regular meeting • Employee and Family Gathering • Company Anniversary Celebration • HRSE (Human Resource Satisfaction & Engagement) Survey • Disaster Emergency Response Simulation
Pemerintah Government	• Ketaatan pemenuhan Laporan dan Peraturan. • Pengajuan dan perpanjangan Izin-izin pengelolaan Lingkungan. • Compliance with reporting obligation and regulations. • Application and renewal of environmental management license.	• *Review* kebijakan peraturan dan prosedur yang berlaku. • *Knoweldge sharing* antar institusi pemerintah. • Reviewing the applicable policies and procedures. • Knowledge-sharing with government institutions.
Komunitas Penduduk Sekitar Pembangkit: - Masyarakat di Wilayah Binaan - LSM Lokal dan Internasional - Tokoh Masyarakat - Institusi/ Lembaga Profesi - Media Residents Community around the Power Plant: - Community in the Foster Areas - Local and International NGOs - Public Figures - Professional Association/ Institutions - Media	• Dukungan Perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan). • Bebas dari pencemaran lingkungan. • Informasi mengenai Proses pembangkitan listrik serta dampaknya terhadap lingkungan. • Informasi mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan. • Kebijakan peraturan dan prosedur yang berlaku. • Kerja sama antar institusi. • Knowledge sharing antar institusi • Company's support for community empowerment (economy, education, health, and security). • Free from environmental pollution. • Information on power generation process and its impact on environment. • Information on good corporate governance and CSR. • Applicable policies and procedures. • Cooperation among institutions. • Knowledge-sharing among institutions.	• Forum Kemitraan Polisi Masyarakat. • Program CSR yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. • Kegiatan CSR (*Charity*). • Forum Warga. • Community Police Partnership Forum. • CSR program focused on community empowerment. • CSR activity (Charity). • Community Members' Forum.
Vendor	• Hubungan kerjasama yang Berkelanjutan. • Keterbukaan dan kemudahan akses informasi untuk memenuhi standar kesehatan dan lingkungan dalam kegiatan Pengadaan. • Ongoing collaboration. • Openness and accessibility of information to meet health and environmental standards during procurement activities.	• Memberikan informasi yang jelas dan transparan dalam proses pengadaan terkait dengan pemenuhan standar kesehatan dan lingkungan hidup. • Program IP PINTAR, meningkatkan kompetensi siswa SMK. • Provision of clear and transparent information in the procurement process related to the compliance with health and environmental standards. • IP PINTAR program, improving the competency of vocational school students.

Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Plans of CSR Activities for Social and Community Development

Rencana kegiatan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan disusun berdasarkan hasil analisis isu, dampak dan risiko serta pendekatan dan pelibatan stakeholder dalam perumusan tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Indonesia Power berupaya menurunkan dampak sosial perusahaan, membangun modal sosial dan kemandirian masyarakat salah satunya melalui kegiatan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang dilaksanakan Perusahaan. Sehingga kegiatan kegiatan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan diharapkan mampu menciptakan manfaat bersama bagi *Stakeholder* dan Perusahaan. Dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program tanggung jawab Perusahaan, Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan berupaya melibatkan dan mendorong pemasok, pelanggan dan mitra serta pihak terkait lainnya untuk berkolaborasi mendukung efektifitas pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

CSR action plan for social and community development is prepared by taking into account the analysis result of the issues, impacts and risks, as well as approach to and engagement of the stakeholders in such a preparation. Indonesia Power seeks to reduce the social impact of the company and build a social capital along with self-sufficiency of the community. One of which is through CSR activities for social and community development carried out by the Company. These activities are therefore expected to bring in mutual benefits for both the Stakeholders and Company. In the preparation of the plan and implementation of this program, Indonesia Power, by taking into account its influence, seeks to engage suppliers, customers, partners and relevant parties to collaborate for effective implementation of CSR and meeting any aspects of social and community development.

Tanggung jawab sosial Perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilaksanakan salah satunya melalui Program InPower CARE. Program tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat baik dari aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lingkungan dengan lingkup kegiatan antara lain Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

The CSR for this subject is performed through InPower CARE Program, among others. This program is a means to improve the living standards of the community in the aspect of economy, health, education, and environment through Community Service, Community Relation, and Community Empowerment.

Pelayanan masyarakat, yaitu pelayanan Perusahaan untuk memenuhi kepentingan komunitas, berdasarkan kebutuhan maupun permintaan komunitas setempat sebagai dukungan terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat, dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Bantuan Sarana dan Prasarana.
2. Bantuan Pelayanan Kesehatan.
3. Bantuan Pelayanan Pendidikan.
4. Bantuan bencana alam.

Community service is a service by the Company to meet the needs of the community. It is based on the necessity and demands of the local community as a support for the development activities by them and the local governments, conducted through the following activities:

1. Facilities and Infrastructures Aid.
2. Healthcare Services Aid.
3. Educational Service Aid.
4. Natural disaster relief.

Pembinaan Hubungan, yaitu kegiatan Komunikasi dua arah yang dilakukan untuk memfasilitasi tumbuhnya pemahaman bersama dan mewujudkan komitmen bersama di antara para skateholder untuk mencapai tujuan bersama; mendorong lahirnya sikap positif komunitas terhadap Perusahaan serta memperbaiki dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang kondusif terhadap keberlangsungan bisnis Perusahaan, dilaksanakan melalui kegiatan:

Community relation is a program that promotes two-way communication to facilitate mutual understanding and commitment among stakeholders to achieve shared goals, foster positive viewpoint towards the Company, and develop and encourage conducive public policies that support the Company's business sustainability. This program is executed through the activities as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

1. Komunikasi Sosial.
2. Partisipasi Peringatan Hari Besar.
3. Partisipasi Kegiatan Masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat, yaitu program yang berkaitan dengan usaha memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat setempat untuk menunjang kemandiriannya.

1. Bantuan Pengembangan dan Modal Usaha.
2. Bantuan Peningkatan Keterampilan.
3. Bantuan Pemasaran Produk.
4. Riset dan Pengembangan.

1. Social Communications.
2. Participation in Festive Day Celebration.
3. Participation in Community Activities.

Community Empowerment is a program that provides wider access to local communities for the sake of their self-sufficiency.

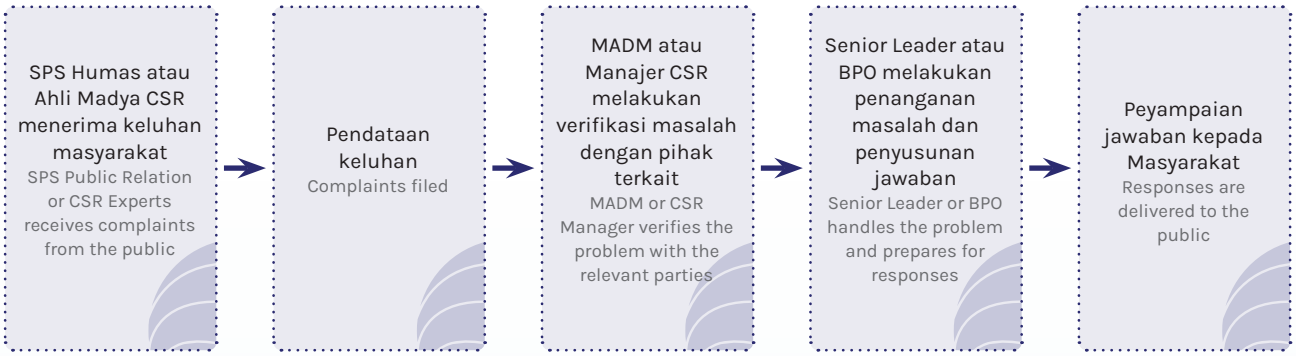
1. Business Development and Capital Aid.
2. Skills Improvement Support.
3. Product Marketing Support.
4. Research and Development.

Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Konflik Sosial Kemasyarakatan

Mechanisms for Complaint Handling and Social Conflict

Indonesia Power menyiapkan perangkat penunjang pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan dengan menyediakan mekanisme penanganan keluhan, keadaan darurat dan konflik sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap dampak kegiatan operasional Perusahaan.

To carry out the Company's responsibilities, Indonesia Power prepares mechanisms for handling complaints, emergencies, and social conflicts in accordance with the applicable provisions to protect the community against the impact of the Company's operational activities.



Biaya Program Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Spending for Program on Social and Community Development

Indonesia Power telah merealisasikan anggaran kegiatan InPower-Care sebesar Rp37.447,20 juta dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Indonesia Power has spent Rp37,447.20 million for InPower CARE activities with the following details:

Program	Biaya (Rp juta) Expense (Million Rp)
Bakti Pelayanan Masyarakat Community Service	11.276,67
Bakti Pembinaan Hubungan Community Relation	8.852,53
Bakti Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment	17.318,00
Total	**37.447,20**

Realisasi Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Realization of CSR Activities for Social and Community Development

Pengembangan sosial dan kemasyarakatan menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi dan wujud kesungguhan Perusahaan untuk berperan dalam program pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi perhatian Direksi sebagai manajemen puncak tidak hanya terkait aspek kepatuhan namun juga dalam rangka menjaga keberlanjutan Perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan tidak terlepas dari peran pegawai untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu memenuhi harapan *stakeholder* khususnya terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, Indonesia Power melibatkan stakeholder penting untuk mendukung efektifitas pelaksanaan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan melalui Program InPower CARE (Indonesia Power – *Community Assistance, Relation and Empowerment*) mencakup tiga pilar utama, yaitu Pelayanan Masyarakat (*Community Assistance*), Pembinaan Hubungan (*Community Relation*) dan Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*).

Social and community development is one of the important aspects to comply with regulations and reflects the Company's sincerity to participate in sustainable development programs. This is certainly a concern to the Board of Directors as top management, both in achieving these performance indicators and maintaining the Company's sustainability. In the implementation of environmental CSR program, employees also play a significant role in ensuring that all activities are conducted while meeting stakeholders' expectations, particularly related to social and community development. In addition, Indonesia Power engages the key stakeholders to support the effectiveness of the implementation of social and community development programs through the InPower CARE (Indonesia Power – Community Assistance, Relations and Empowerment) Program. This program comprises three main pillars, namely Community Assistance, Community Relation, and Community Empowerment.

Bakti Pelayanan Masyarakat (*Community Assistance*)

Community Service

Merupakan dukungan Indonesia Power terhadap pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat, melalui kegiatan :

1. Bantuan Sarana dan Prasarana.
   - Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah di seluruh unit kerja Indonesia Power.
   - Bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat di wilayah unit kerja Banten 1 Suralaya OMU, Mrica PGU, Kamojang POMU, Pangkalan Susu OMU, Priok POMU, Bali PGU, dan MSU.

It is a support from Indonesia Power for the development of the local community and local government, through the following activities:

1. Facilities and Infrastructures Aid.
   - House of Worship Construction Aid across all work units of Indonesia Power.
   - Inhabitable Housing Renovation Aid for the Community in the work unit areas of Banten 1 Suralaya OMU, Mrica PGU, Kamojang POMU, Pangkalan Susu OMU, Priok POMU, Bali PGU, and MSU.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

- Bantuan Pembangunan/Perbaikan Sarana Pendidikan tingkat Sekolah Dasar sampai Dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk mendudukung sarapa pendidikan yang layak dan berkualitas di wilayah unit kerja Saguling OMU dan Kamojang POMU.
- Bantuan Pembangunan/Perbaikan Fasilitas Umum seperti pos kamling, posyandu, lapangan olahraga, gedung serbaguna, jembatan, jalan umum di wilayah unit kerja Saguling POMU, Suralaya PGU, Cilegon OMU, Mrica PGU, Kamojang POMU, Pangkalan Susu OMU, Grati POMU, Priok POMU, Banten 1 Suralaya OMU, Jeranjang OMU dan Sintang OMU.

2. Pelayanan Kesehatan
   - Bantuan Jambanisasi bagi Warga di wilayah unit kerja Adipala OMU, Kamojang POMU, Grati POMU, dan Banten 1 Suralaya OMU.
   - Bantuan Kegiatan Pengobatan Gratis bagi warga masyarakat di wilayah unit kerja Suralaya PGU, Kamojang POMU, Pangkalan Susu OMU, Labuan OMU dan Semarang PGU yang bekerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas setempat.
   - Bantuan kegiatan Posyandu dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita dan Lansia sebagai program Pengentasan Stunting di wilayah unit kerja Kamojang POMU, MSU, Grati POMU, Adipala OMU, Banten 1 Suralaya OMU, Mrica PGU, Semarang PGU dan Lontar OMU.
   - Bantuan kegiatan donor darah di masa pandemi yang dilaksanakan bagi pegawai di unit kerja MSU, Priok POMU, Labuan OMU, Semarang PGU, Sintang OMU dan Lontar OMU bekerjasama dengan PMI wilayah setempat.
   - Bantuan Kegiatan Sunatan Massal bagi dalam rangka program pelayanan masyarakat di wilayah unit kerja Priok POMU, Saguling POMU, Adipala OMU, Grati POMU, Semarang PGU dan Kantor Pusat.
   - Bantuan Kolaborasi Vaksinasi Covid-19 dosis 1 dan 2 bagi Masyarakat di seluruh wilayah unit kerja Indonesia Power.
   - Bantuan Pemberian *Emergency Ventilator* bagi Pasien RSUD Palabuhanratu dan RSUD Majenang Cilacap wilayah unit kerja Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu OMU & Adipala OMU.
   - Bantuan Pemberian Tabung Oksigen bagi fasilitas kesehatan penanganan pandemi Covid di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.
   - Memberikan Bantuan Oksigen yang dihasilkan dari *Oxygen Plant* di PLTGU Priok POMU sesuai standar oksigen medis bagi fasilitas kesehatan penanganan pandemi Covid di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.

- Educational Facilities Construction/Renovation Aid for Elementary School to High School level in order to provide proper and quality educational facilities in the work unit areas of Saguling OMU and Kamojang POMU.
- Public Facilities Construction/Renovation Aid, such as neighborhood security posts, community clinics, sports fields, main halls, bridges, public roadways in the work unit areas of Saguling POMU, Suralaya PGU, Cilegon OMU, Mrica PGU, Kamojang POMU, Pangkalan Susu OMU, Grati POMU, Priok POMU, Banten 1 Suralaya OMU, Jeranjang OMU, and Sintang OMU.

2. Healthcare Services
   - Sanitation Aid for the community members in the work unit areas of Adipala OMU, Kamojang POMU, Grati POMU, and Banten 1 Suralaya OMU.
   - Free Medication Aid for the community members in the work unit areas of Suralaya PGU, Kamojang POMU, Pangkalan Susu OMU, Labuan OMU, and Semarang PGU, in cooperation with local hospitals and community health center.
   - Assistance in the Community Clinic activities and the Supplementary Feeding Program for Toddlers and Elderly as a part of Stunting Alleviation program in the work unit areas of Kamojang POMU, MSU, Grati POMU, Adipala OMU, Banten 1 Suralaya OMU, Mrica PGU, Semarang PGU, and Lontar OMU.
   - Organizing blood donation during the pandemic for the employees in the work units of MSU, Priok POMU, Labuan OMU, Semarang PGU, Sintang OMU, and Lontar OMU, in cooperation with the local Indonesian Red Cross Society.
   - Organizing Mass Circumcision in support of community service program in the work unit areas of Priok POMU, Saguling POMU, Adipala OMU, Grati POMU, Semarang PGU, and Head Office.
   - Collaboration on The First and Second Dose of COVID-19 Vaccination Program for the Communities across all work units of Indonesia Power.
   - Emergency Ventilator Aid for the patients in RSUD Palabuhanratu and RSUD Majenang Cilacap, in the work unit areas of West Java 2 Pelabuhan Ratu OMU & Adipala OMU.
   - Oxygen Tanks Supply Aid for the appointed health facilities caring for COVID patients in South and North Jakarta areas.
   - Oxygen Supply Aid from the Oxygen Plant at CCPP Priok POMU in accordance with medical oxygen standard for the appointed health facilities caring for COVID patients in

- Bantuan Pemberian APD, vitamin, obat-obatan dan makanan bagi warga terdampak pandemi Covid di seluruh wilayah unit kerja Indonesia Power.

3. Pelayanan Pendidikan
   - Bantuan biaya pendidikan kepada siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Mahasiswa Perguruan Tinggi di wilayah unit kerja Mrica PGU, Grati POMU, Semarang PGU dan Lontar OMU.
   - Bantuan sarana perlengkapan pendidikan bagi sekolah di wilayah seluruh unit kerja Indonesia Power.
   - Bantuan kegiatan belajar mengajar di wilayah unit kerja Saguling OMU dan Lontar OMU.
4. Bencana Alam
   - Bantuan Bencana Alam Banjir Bandang Nusa Tenggara Barat (NTB) bagi Warga terdampak siklon seroja berupa bantuan pelayanan kesehatan, kegiatan trauma *healing*, pembangunan jembatan campa dan bantuan sembako bekerja sama dengan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga, Yayasan Pendidikan Kesejahteraan, Persatuan Pegawai dan LAZ An-Nur Indonesia Power.
   - Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi Sulawesi Barat bagi Warga Mamuju dan Majene oleh Indonesia Power Head Office bekerjasama dengan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga, PLN UIKL Sulawesi Barat dan LAZ An-Nur Indonesia Power berupa pelayanan kesehatan dan kegiatan trauma healing bagi anak-anak di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat.
   - Bantuan Bencana Alam Banjir Bandang Kalimantan Selatan bagi Warga Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura oleh Indonesia Power *Head Office* bekerjasama dengan Yayasan Baitul Maal PT PLN UIKL Kalimantan Selatan berupa kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, makanan balita, obat-obatan, dan pakaian layak pakai, selimut dll. di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kalimantan Selatan.
   - Bantuan Bencana Alam Gempa Bumi Bali bagi Warga Desa Ban Kecamatan Kubu Karangasem Bali berupa kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, masker dan sembako.
   - Bantuan Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru bagi masyarakat terdampak di Lumajang, Jawa Timur bekerjasama dengan BPBD Lumajang, Persatuan Pegawai dan LAZ An-Nur Indonesia Power berupa layanan kesehatan, kegiatan *trauma healing*, konsumsi dan bantuan genset.

South and North Jakarta areas.

- PPE Supply Aid, vitamins, medications and food supply for the people affected by the COVID pandemic across all work units of Indonesia Power.

3. Educational Service
   - Educational financial aid for elementary school, junior high school, high school, and university students in the work unit areas of Mrica PGU, Grati POMU, Semarang PGU, and Lontar OMU.
   - Educational facilities aid for schools across all work units of Indonesia Power.
   - Assistance in school teaching activities in the work unit areas of Saguling OMU and Lontar OMU.
4. Natural Disaster
   - Natural Disaster Relief of Nusa Tenggara Barat (NTB) Flash Flood for the people affected by Cyclone Seroja. The relief was provided in the form of healthcare services and trauma healing activities, Campa Bridge Construction and groceries given in cooperation with Ksatria Airlangga Floating Hospital, Welfare Education Foundation, Employee Association dan LAZ An-Nur Indonesia Power.
   - Natural Disaster Relief of West Sulawesi Earthquake for the residents of Mamuju and Majene from Indonesia Power Head Office in cooperation with Ksatria Airlangga Floating Hospital, PLN UIKL West Sulawesi and LAZ An-Nur Indonesia Power. The relief was provided in the form of healthcare services and trauma healing activities for children in Mamuju and Majene, West Sulawesi.
   - Natural Disaster Relief of South Kalimantan Flash Flood for the residents of Labuan Tabu Village, Martapura Sub-district from Indonesia Power Head Office in cooperation with Yayasan Baitul Maal PT PLN UIKL South Kalimantan. The relief was provided in the form of basic necessities, such as instant food, food for toddlers, medicines, clothes, blankets, etc. in Labuan Tabu Village, Martapura Sub-district, South Kalimantan.
   - Natural Disaster Relief of Bali Earthquake for the residents of Ban Village, Kubu Karangasem Sub-district, Bali in the form of basic necessities, such as instant food, masks, and groceries.
   - Natural Disaster Relief of Mount Semeru Eruption for the affected residents in Lumajang, East Java, in cooperation with BPBD Lumajang, Employee Association and LAZ An-Nur Indonesia Power. The relief was provided in the form of healthcare services, trauma healing activities, foods, and power generator.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Bakti Pembinaan Hubungan (*Community Assistance*)

Community Assistance

Merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang dilakukan untuk memfasilitasi tumbuhnya pemahaman bersama dan mewujudkan komitmen bersama di antara para stakeholders untuk mencapai tujuan bersama, mendorong lahirnya sikap positif komunitas terhadap Perusahaan serta memperbaiki dan mendorong lahirnya kebijakan publik yang kondusif terhadap keberlangsungan bisnis Perusahaan. Dilaksanakan dalam bentuk:

1. Komunikasi Sosial
   - Kegiatan Forum Warga bagi masyarakat sekitar dan mitra binaan yang diadakan rutin oleh seluruh unit kerja dalam rangka menyusun program kerja selama 1 tahun kedepan serta evaluasinya.
2. Partisipasi Hari Besar
   - Partisipasi bantuan kegiatan bakti sosial ramadhan bagi masyarakat di seluruh wilayah unit kerja Indonesia Power.
   - Partisipasi dalam kegiatan Dharma Canti Tahun Baru Caka 1943, Peringatan Hari Raya Nyepi 2021 di wilayah unit kerja Bali PGU dan Kantor Pusat Indonesia Power bekerja sama dengan BKK Hindu PLN.
   - Partisipasi dalam kegiatan Perayaan Natal di Sektor Kementerian ESDM Tahun 2021 oleh Kantor Pusat Indonesia Power.
3. Partisipasi Kegiatan Masyarakat
   - Partisipasi dalam Kemaslahatan Umat Forum Betawi Rempug G.0321 Macan Kuningan oleh Kantor Pusat Indonesia Power bekerjasama dengan Forum Betawi Rempug di Jakarta.
   - Bantuan partisipasi kegiatan *knowledge sharing* ide kreatif penanganan limbah B3 dan non B3 SMKN 1 Grati oleh Grati POMU.
4. Publikasi
   - Pemberian informasi satu arah antara Perusahaan dan masyarakat serta pemerintah daerah setempat, misalnya publikasi melalui media massa baik cetak atau elektronik maupun media umum, buku, video. Pembuatan Video Program Pemberdayaan Masyarakat di Unit Priok POMU, Kamojang POMU, Bali PGU, Grati POMU, Suralaya PGU, PLTGU Cilegon, Semarang PGU, dan Jeranjang OMU yang diunggah di *Youtube Channel* Indonesia Power. Penerbitan Buku pemberdayaan masyarakat tahun 2021 bekerjasama dengan IP Publishing dapat diunduh melalui link https://issuu.com/asta-nindya/docs/csr_indonesia_power_2021.

It is a program that promotes two-way communication to facilitate mutual understanding and commitment among stakeholders to achieve shared goals, foster positive viewpoint towards the Company, and develop and encourage conducive public policies that support the Company's business sustainability. This program is actualized into:

1. Social Communications
   - Community Members' Forum Activity for local community members and foster partners. It is held regularly by all work units to plan work program over the next 1 year and evaluation.
2. Festive Day Participation
   - Participation in the community's Ramadan social services across all work units of Indonesia Power.
   - Participation in the Dharma Canti of Caka New Year 1943, Celebration of 2021 Seclusion Day in cooperation with the BKK Hindu PLN in the work unit areas Bali PGU and Indonesia Power Head Office.
   - Participation in the Christmas Celebration in the Sector of the Ministry of Energy and Mineral Resources of 2021 by the Head Office of Indonesia Power.
3. Participation in Community Activities
   - Participation in the Community Prosperity of Forum Betawi Rempug G.0321 Macan Kuningan by the Head Office of Indonesia Power in cooperation with Forum Betawi Rempug in Jakarta.
   - Participation in knowledge-sharing activity of creative ideas discussion about the management of hazardous and toxic waste (B3) waste and non-hazardous and non-toxic waste of SMKN 1 Grati by Grati POMU.
4. Publication
   - Providing one-way information from the Company to local communities and local governments. For example, publication through mass media either printed or electronic or the general media, books, videos. Making of Video about Community Empowerment Program at the Unit of Priok POMU, Kamojang POMU, Bali PGU, Grati POMU, Suralaya PGU, CCPP Cilegon, Semarang PGU, and Jeranjang OMU, uploaded to the Indonesia Power's Youtube Channel. Published community empowerment book in 2021, in cooperation with IP Publishing, and can be downloaded via link https://issuu.com/asta-nindya/docs/csr_indonesia_power_2021.

Bakti Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)

Community Empowerment

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait diantaranya pemerintah setempat dan para pihak yang terlibat langsung. Adapun beberapa Program Pemberdayaan Masyarakat tahun 2021 diantaranya:

1. Bantuan Pengembangan dan Modal Usaha
   - Pengembangan Rumah Produksi Program Kopi Kamojang bagi Kelompok Tani Gunung Kamojang berupa bantuan modal usaha, pembangunan rumah pengolahan kopi pasca panen dan mesin pendukung (pulper) di Dusun Kamojang wilayah unit kerja Kamojang POMU.
   - Bantuan Renovasi Dapur POKLAHSAR Mina Lestari Batu Lumbang, Mitra Binaan Bali PGU yang memproduksi makanan dan minuman olahan berbahan dasar mangrove.
   - Pembuatan *Website* untuk Inclusive Learning Centre untuk Pengembangan PAUD Inklusi Kids Club dan 3 Replika PAUD (Melati Budi Insani, Hikmatul Barakah, dan Bunga Cempaka) Mitra Binaan Priok POMU.
   - Bantuan pembangunan Outlet Omah Karya Laut di Desa Tambak Lekok yang merupakan Mitra Binaan Grati POMU.
   - Bantuan Rumah Bibit, Sarana Prasarana Pembibitan pada Program Pembibitan Tanaman Indigo untuk mendukung Produk Batik Pewarna Alam Malon di Gunungpati yang merupakan Mitra Binaan Semarang PGU.
   - Bantuan pembuatan Kandang Ternak Bebek Terpadu, Pusat Pelayanan Gangguan Jiwa yang merupakan Mitra Binaan Suralaya PGU.
2. Bantuan Peningkatan Keterampilan
   - Bantuan Peningkatan Keterampilan melalui Pelatihan Budidaya & Pengolahan Kopi di Balittri bagi Anggota Kelompok Tani Gunung Kamojang, Mitra Binaan Kamojang POMU.
   - Bantuan Peningkatan Keterampilan melalui Pelatihan Pengolahan Mangrove menjadi Produk Makanan dan Minuman bagi Anggota POKLAHSAR Mina Lestari Batu Lumbang Mitra Binaan Bali PGU.
   - Bantuan Peningkatan Keterampilan bagi Pengajar PAUD Inklusi *Kids Club* berupa Sosialisasi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) inklusi untuk 3 PAUD replika modul dari 19 PAUD terimplementasi modul pembelajaran berbasis lingkungan di PAUD Inklusi Kids Club, Jakarta Utara wilayah unit kerja Priok POMU.
   - Bantuan Peningkatan Keterampilan melalui Pelatihan Pengolahan Hasil Laut bagi Anggota Kelompok Omah Karya Laut Mitra Binaan Grati PGU.

The implementation of CSR program for social and community development is adapted to the condition of each area and coordinated with relevant parties, including local government and parties with direct involvement with the CSR program. There are a number of community Empowerment Programs in 2021, including:

1. Business Development and Capital Aid
   - Assistance in the Production House of Kamojang Coffee Program for the Kamojang Mountain Farmers Association in the form of business capital. The aid was used to open a post-harvest coffee processing center and to purchase a supporting machine (pulper) in Kamojang Sub-village in the work unit area of Kamojang POMU.
   - Kitchen Renovation Aid at POKLAHSAR Mina Lestari Batu Lumbang, the Foster Partner of Bali PGU that produces foods and beverages made from mangroves.
   - Inclusive Learning Center Website Building for the Development of Kids Club Inclusive Early Childhood Education (PAUD) and 3 Model PAUD (Melati Budi Insani, Hikmatul Barakah, and Bunga Cempaka) which are the Foster Partners of Priok POMU.
   - Omah Karya Laut Outlet construction aid in Tambak Lekok Village, which is the Foster Partner of Grati POMU.
   - Plant Nursery Facilities and Infrastructure Aid for True Indigo Plant Nursery Program to support Malon's Batik Products made from Natural Dyes in Gunungpati (the Foster Partner of Semarang PGU).
   - Construction Aid of Integrated Duck Cage, Service Centers for People with Mental Disabilities, which is the Foster Partner of Suralaya PGU.
2. Skills Improvement Support
   - Skills Improvement Support through Coffee Farming & Processing Training in Balittri for the Members of Kamojang Mountain Farmers Association, the Foster Partner of Kamojang POMU.
   - Skills Improvement Support through the Training on Producing Foods and Beverages from Mangroves for the Members of POKLAHSAR Mina Lestari Batu Lumbang, the Foster Partner of Bali PGU.
   - Skills Improvement Support for Kids Club Inclusive PAUD Teachers through Socialization of inclusive Education Unit Level Curriculum (KTSP) for 3 model PAUD of 19 implemented PAUD of environment-based learning modules on the Kids Club Inclusive PAUD, North Jakarta, in the work unit area of Priok POMU.
   - Skills Improvement Support through Marine Products Processing Training for the Members of Omah Karya Laut, the Foster Partner of Grati PGU.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

- Bantuan Peningkatan Keterampilan melalui Pelatihan Budidaya Indigo pada Program Pembibitan Tanaman Indigo untuk Produk Batik Pewarna Alam Malon Mitra Binaan Semarang PGU.
- Bantuan Peningkatan Keterampilan melalui Pelatihan Ternak Bebek bagi Anggota Satya Gawa Mitra Binaan Suralaya PGU.

3. Bantuan Pemasaran Produk
   - Bantuan Pemasaran Produk Pelagio Cafe Mitra Binaan Kamojang POMU diantaranya Kopi Pelag, Kopi Wanaka, Laux Leutix, Aneka Olahan Jamur (Keripik dan Bakso) pada Acara Internal dan Eksternal Perusahaan dengan *Stakeholders*.
   - Bantuan Pemasaran Produk Mitra Binaan Priok POMU berupa Minuman JOSS dan Wornas, *Snack Box Hand Sanitizer*, Sabun Cuci Tangan, dan Produk Kreatif (Pouch, Maker) pada Acara Internal dan Eksternal dengan *Stakeholders*.
   - Bantuan Pemasaran Produk Mrica Corner Binaan Mrica PGU diantaranya Kopi Sengkuyung, Aneka Keripik dan Camilan, Kain Batik, dan Produk Kerajinan pada Acara Internal dan Eksternal dengan *Stakeholders*.
   - Bantuan Pemasaran Produk Mitra Binaan Semarang PGU yaitu Koperasi Prima Indo Sutera, UKM Batik Alam Karya Bunda Mandiri dalam Pameran Investasi Perdagangan dan Pariwisata di Semarang.
4. Riset dan Pengembangan
   - Penyusunan kajian terkait pengembangan masyarakat di wilayah terdampak: *Social mapping, stakeholder engagement*, Inovasi Sosial, *Social Return On Investment* (SROI), *Social Licence to Operate* (SLO) di PLTGU Grati, PLTP Kamojang, PLTGU Priok, PLTDG Pesanggaran, PLTU Labuan, PLTG Pemaron, PLTG Gilimanuk, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU BSLA, PLTU Suralaya, PLTGU Cilegon oleh Indonesia Power *Head Office* bekerjasama dengan Tri Eka Daya Unggul, Fisipol UGM, Enviro Indonesia, Social Investment Indonesia dan Spectrum Solution.

- Skills Improvement Support through True Indigo Farming Training within the True Indigo Plant Nursery Program for Malon's Batik Products made from Natural Dyes, the Foster Partner of Semarang PGU.
- Skills Improvement Support through Duck Farming Training for the Members of Satya Gawa, the Foster Partner of Suralaya PGU.

3. Product Marketing Support
   - Marketing Support for the Products of Pelagio Cafe, the Foster Partner of Kamojang POMU, such as Pelag Coffee, Wanaka Coffee, Laux Leutix, Various Mushroom-based Food Products (Chips and Meatballs) at the Company's both Internal and External Events attended by Stakeholders.
   - Marketing Support for the Products of the Foster Partner of Priok POMU, including JOSS and Wornas Beverages, Snack Box Hand Sanitizer, Hand Soaps, and Creative Products (Pouches, Masks) at both Internal and External Events attended by Stakeholders.
   - Marketing Support for the Products of the Foster Partner of Mrica PGU, such as Sengkuyung Coffee, Various Chips and Snacks, Batik Fabric, and Handicraft Products at both Internal and External Events attended by Stakeholders.
   - Marketing Support for the Products of the Foster Partner of Semarang PGU, including Prima Indo Sutera Co-operative, the SMB of Karya Bunda Mandiri Natural Batik at the Trade and Tourism Investment Exhibition in Semarang.
4. Research and Development
   - The formulation of community development related studies in the affected areas: Social mapping, stakeholders agreement, Social Innovation, Social Return on Investment (SROI), Social License to Operate (SLO) at CCPP Grati, GPP Kamojang, CCPP Priok, DGPP Pesanggaran, SPP Labuan, GTPP Pemaron, GTPP Gilimanuk, SPP Pelabuhan Ratu, SPP Lontar, SPP BSLA, SPP Suralaya, CCPP Cilegon by the Head Office of Indonesia Power in cooperation with Tri Eka Daya Unggul, University of Gadjah Mada's Faculty of Social and Political Sciences (Fisipol UGM), Enviro Indonesia, Social Investment Indonesia, and Spectral Solution.

Selain itu, masing-masing Unit Kerja telah melaksanakan program unggulan Pemberdayaan Masyarakat sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

In addition to this, each Work Unit has implemented the flagship program of Community Empowerment over the year 2021 as follows:

No.	Unit Kerja Work Unit	Program
1.	Suralaya PGU	Omah Kreteg Anggana Omah Kreteg Anggana (Anggana Kreteg House)
		Pemberdayaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Empowerment of People with Mental Disabilities
		Sekolah peduli lingkungan menuju sekolah Adiwiyata Green school
		Program pemberdayaan berbasis budaya dan lingkungan Cultural and environmental empowerment program

No.	Unit Kerja Work Unit	Program
2.	Priok POMU	PAUD Inklusi Inclusive Early Childhood Education (PAUD)
		Taman Hatinya Sunter Taman Hatinya Sunter
		Kampung Sehat HIjaunesiaPower Kampung Sehat (Healthy Kampong) Hijaunesia Power
		Rumah Kreatif & Inovasi Anak Muda Creative & Youth Innovation Center
3.	Kamojang POMU	Budidaya Kopi Kamojang Kamojang Coffee Farming
		Budidaya Jangkrik Cricket Farming
		Galery Lapasan Sabilulungan Lapasan Sabilulungan Gallery
		Program Bank Sampah Waste Bank Program
		Program Budidaya Ikan Nila Nile Tilapia Farming Program
		Program Budidaya dan Pengolahan Kopi Pelag Pelag Coffee Farming and Production Program
4	PLTP Gunung Salak GPP Gunung Salak	Kelompok Tani UMKM PANCAR BAKTI - Beras Glikemik Farmer Group of PANCAR BAKTI MSME - Glycemic Rice
		Kelompok Domba/Kambing Sumber Jaya Sumber Jaya Sheep/Goat Farmer Group
		Kelompok Ternak Mekar Tani Mekar Tani Farmer Group
		Pemberdayaan Perempuan Insan Mandiri Independent Women Empowerment
5.	Pangkalan Susu OMU	Rumah Jahit PKK Tanjung Pasir Sewing Center of Tanjung Pasir's Family Welfare Empowerment Group (PKK)
		Pembuatan Terasi Khas Pulau 9 Production of Pulau 9's Traditional Shrimp Paste
		Budidaya Ikan Siakap Barramundi Farming
		Budidaya kepiting Asoka Soft-shell crab farming
6.	Banten 1 Suralaya OMU	Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Community-based Integrated Waste Management
		Kelompok Perempuan Olahan Pangan Ringan (jenis makanan ringan seperti keripik dll) Women's Group for Snack Production (chips, etc.)
		Kelompok Nelayan terdampak Desa Salira dan Istri Nelayan dalam pengolahan hasil tangkap ikan Fish processing for the Affected Fisher People of Salira Village and Fishermen's Wives group
		Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat Community-based Integrated Waste Management
7.	Banten 2 Labuan OMU	Pemberdayaan Sektor Terpadu "Lestari" Empowerment of Integrated Sector "Lestari"
		Pengelolaan produk sarang burung walet "*Bird Nest* Caringin" Birds' nest products management "Caringin Bird Nest"
		Pendampingan Karang Taruna Mutiara Putih Desa Cigondang Mentoring of Cigondang Village's Youth Organization of Mutiara Putih
		Pengelolaan kelompok perikanan "Margasana Unggul" Management of fisheries group "Margasana Unggul"
8.	Banten 3 Lontar OMU	Budidaya Bandeng dan Udang Milkfish and Shrimp Farming
		Pengolahan TPST 3R Pemuda Berkarya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Integrated Waste Management Site "Pemuda Berkarya"
		Budidaya Bebek Petelur Laying Ducks Farming
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tambak Processing and Marketing of Fish Farming Products
		Pemberdayaan Kelompok Pembatik Kembang Mayang Empowerment of Kembang Mayang Batik Artists Group
		Pengolahan Makanan Hasil Tani & Hasil Tambak Food Production from Crops and Fish Farming Products

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

No.	Unit Kerja Work Unit	Program
		Budidaya Labu Madu Butternut Squash Farming
9.	Saguling POMU	Pengembangan Ternak Domba Mandiri Development of Self-sufficiency Sheep Farming
		Pengembangan Ternak Itik Sawargi Development of Sawargi Duck Farming
		Pengolahan Makanan Khas Jawa Barat West Java's Traditional Food Processing
		Kerajian Bambu Bambaray Bambaray Bamboo Crafting
		Budidaya Kopi Plengan Plengan Coffee Farming
		Pemanfaatan Limbah Sampah Organik Sebagai Pakan Ikan Organic Waste Utilization for Fish Feed
10.	Mrica PGU	Pengembangan kampung kopi konservasi desa Pegundungan. Coffee conservation development in Pegundungan village.
		Pengembangan ternak kambing Goat farming development
		Optimalisasi Pengembangan Mrica Corner Optimization of Mrica Corner Development
		Pemasaran kopi bagi para petani kopi Coffee marketing for coffee farmers
11.	Semarang PGU	Program Olahan Ikan dan PangananProgram Batik Alam Malon Processed Fish and Snacks Program, Malon Natural-Dyed Batik Program
		Pemberdayaan UMKM Pengolahan Produk Makanan Khas Pessisir Prima Indo Sutera MSMEs Empowerment of Prima Indo Sutera's Semarang Coast Traditional Food Production
		Pengolahan produk olahan ikan Putri Laut Putri Laut's fish-based food production
		Program Bank Sampah Kemijen Kemijen Waste Bank Program
		Program Konservasi Mangrove Pesisir Semarang Semarang's Coastal Mangrove Conservation Program
		Program olahan makanan berbahan dasar tepung pongge durian Durian seed flour-based food production program
		Pengolah dan pemasar olahan dari ikan asap menjadi aneka olahan khas Semarang Bandar Sejahtera Bandar Sejahtera produces and markets various traditional food products of Semarang made from smoked fish
		Program pemanfaatan lahan pekarangan yang sempit untuk menanam sayuran, cabai, dll Small space farming program
12.	Grati POMU	Rumah kerajinan batik "Bungkoh Batik" Desa Pasinan "Bungkoh Batik" batik craft center in Pasinan Village
		Rumah pupuk kompos "*Power Green*" Desa Ranuklindungan "Power Green" compost center in Ranuklindungan Village
		Pengolahan produk susu Balunganyar Dairy product processing in Balunganyar
		Pengelolaan Pusat Oleh - Oleh Sentra Bahari Jatirejo Management of Sentra Bahari Jatirejo Local Products Center

No.	Unit Kerja Work Unit	Program
13.	Bali PGU	Ekowisata Tukik Saba Asri Saba Asri Baby Sea Turtle Ecotourism
		Ekowisata Lembu Putih Taro Taro White Cattle Ecotourism
		Program Pemberdayaan Wanita Pengrajin Banten Banten Women Artisan Empowerment Program
		Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah 3R Nangun Resik Desa Paksebali Development of Nangun Resik 3R Waste Management Site in Paksebali Village
		Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Werdhi Guna Development of Werdhi Guna Waste Management Site
		Ekowisata Mangrove Segara Guna Batu Lumbang Segara Guna Mangrove Ecotourism in Batu Lumbang
		Kelompok Dukungan Sebaya ODHA Peer Support Group for People Living with HIV/AIDS (PLWHA)
		Pengembangan produk olahan makanan mangrove Development of mangrove-based food products
14.	Barru OMU	Pengolahan makanan ringan Snack production
15.	Jeranjang OMU	Jeranjang Olah Sampah Setempat Jeranjang Local Waste Management
		Pengolahan makanan/agroindustri Food production/industrial agriculture
		Pengembangan kain tenun lombok Development of Lombok traditional woven fabric
		Program Taman Laut Pandanan Pandanan Marine Park Program
16.	Palabuhan Ratu OMU	Bahari Power Bahari Power (Maritime Power)
		Bank Sampah Cipta Madani Cipta Madani Waste Bank
		Handcraft Pesantren Handcrafts made by Islamic Boarding School Students
		Karang Taruna Pantai Wisata Palabuhanratu Youth Organization of Palabuhanratu Recreational Beach
		Surfing School Power Battle
		TAMPOMAS Desa Jayanti TAMPOMAS Jayanti Village
		BUMDES Desa Loji Loji Village-owned Business Enterprises
		Panganir Cai Desa Cidadap Shinto Lestari Panganir Cai Cidadap Village Shinto Lestari
17.	Adipala OMU	Pengembangan Batik Seloka Adipala Seloka Batik Development in Adipala
		Pengembangan Batik Praja Adipala Praja Batik Development in Adipala
		KWT PI Sidamegar Adipala PI Sidamegar Adipala Women Farmers Group
		KWT Sekar Kamboja Sekar Kamboja Women Farmers Group
18.	Cilegon OMU	Pengembangan ternak bibit domba Development of sheep yearling breeding
		Pengelolaan bank sampah dan produk makanan Management of waste banks and food products
		Pengembangan olahan kacang (peyek, kue kacang dan snack box) Development of peanut-based foods (peanut fried crackers, peanut cake, and snack box)
		Pengembangan proklim dan produk makanan Development of climate-conscious village program and food products
19.	*Maintenance Services Unit*	Program Green House di area Banjir Kanal Barat Sungai Ciliwung Green House Program in the Flood area of Ciliwung River's West Canal
		Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Domestic Waste Management Program

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Sehat-IP
Sehat-IP (IP Healthy)

Sehat IP merupakan program kegiatan Inovasi Perusahaan dalam rangka mendukung peningkatan kesehatan dan kesempatan masyarakat dengan kebutuhan khusus terintegrasi dengan pendidikan, lingkungan dan perekonomian. Program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan: pelayanan kesehatan melalui Klinik Bakti Indonesia Power, pusat layanan bagi orang dengan gangguan jiwa, pemberian makanan tambahan bagi balita dengan berat badan dibawah garis merah, pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi, renovasi rumah menjadi layak huni, kegiatan donor darah, khitan massal, bantuan penanganan pandemi Covid-19, vaksinasi massal dan lain-lain.

Sehat-IP is a program of Company Innovation in order to support the improvement of public health and opportunities for community members with special needs which are integrated with education, environment and economy. It is implemented through various activities, e.g. healthcare services through Klinik Bakti Indonesia Power (Indonesia Power Service Clinic), service centers for people with mental disabilities, supplementary feeding program for severely underweight toddlers, free medical checkup and medication, sanitation facilities construction and renovation, home renovation, blood donation, mass circumcision, COVID-19 patient care, mass vaccination program, etc.

KDS Sekar Jempiring (Pemberdayaan Kelompok Wanita ODHA)
Sekar Jempiring Peer Support Group (Group Empowerment for Women Living with HIV/AIDS)

Sebagai langkah mitigasi risiko untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS di perusahaan, PT Indonesia Power Bali Power Generation Unit rutin melaksanakan kegiatan penyuluhan dan edukasi seputar HIV/AIDS bekerjasama dengan puskesmas Denpasar Selatan IV. Selain mengedukasi pegawai perusahaan PT Indonesia Power Bali PGU juga hadir di masyarakat, perusahaan membuat program pemberdayaan masyarakat untuk merangkul Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) di Bali.

Program tersebut diberi nama Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Sekar Jempiring. Tujuan dari dibentuknya kelompok ini yaitu sebagai tempat untuk memberikan dukungan bagi sesama ODHA dan perlahan mengajak anggota keluarga mereka (OHIDHA) untuk ikut terlibat dan memberikan dukungan kepada keluarganya. Selain itu, kelompok ini juga aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan minat mereka dan diberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka yang difasilitasi dalam Rumah Kreatif Sekar Jempiring diantaranya adalah pembuatan *face shield* dan masker selama masa pandemi, pembuatan jajanan sengait, pengembangan UFO (Urban Farming ODHA) melalui Budikdamber, dan pembuatan kompos cair. Untuk pengelolaan keuangan kelompok ini juga membentuk koperasi Sekar Jempiring. Berikut hasil pencapaian kegiatan KDS Sekar Jempiring tahun 2021 berdasarkan Analisis *Compass Sustainability:*

As a risk mitigation measure to prevent the spread of HIV/AIDS virus in the company, Bali Power Generation Unit of PT Indonesia Power regularly conducts counseling and education sessions on HIV/AIDS in cooperation with the Southern Denpasar community health center IV. Other than education programs, the employees of PT Indonesia Power in Bali PGU also jump right in the community. The Company set up a community empowerment program to support PLWHA in Bali.

The program is named Sekar Jempiring Peer Support Group. The objective of this group is to provide support for PLWHA and to slowly engage their family members to provide support to their families. Besides that, the group also actively runs business activities according to their interest and is given training in accordance with their needs. Facilitated by Sekar Jempiring Creative Center, those activities include making face shields and masks during this pandemic, making Bali traditional snack called sengait, UFO (Urban Farms by PLWHA) development through At-home fish farming in buckets, and making liquid compost. For its financial management, the group also formed Sekar Jempiring co-operative. Below are the achievement of Sekar Jempiring Peer Support Group activities in 2021 based on Compass Sustainability Analysis:

1. Penambahan 30 anggota KDS Sekar Jempiring.

2. 42 orang anggota sudah hidup berdamai dengan sakit yang dialami, mereka sudah mampu kembali menjalani hidup di lingkungan masyarakat dengan adanya program KDS Sekar Jempiring.
3. Budidaya 10 jenis tanaman obat, sayur dan tanaman hias.

4. Menghasilkan 4.000 mililiter pupuk organik cair per bulan.

5. Budidaya 7.000 bibit ikan dan 126 paket sayur.
6. Peningkatan keuangan Koperasi Sekar Jempiring dari Rp2,7 juta pada tahun 2019 menjadi Rp46,1 Juta.
7. 1 kelompok ODHA (KDS Sekar Jempiring) mulai terbuka dan berani bersosialisasi dengan masyarakat.
8. Terciptanya kemitraan sosial
   - Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Bali, Dinas Sosial Kota Denpasar, PKK Kabupaten Gianyar, KPA Kota Denpasar, Puskesmas Denpasar Selatan IV.
   - Lembaga Swasta Usadha Puri Damai.
   - Masyarakat KDS Sekar Jempiring.

1. The addition of 30 members of Sekar Jempiring Peer Support Group.
2. A total of 42 members have made peace with their health condition. They are now able to blend in community, thanks to the program of Sekar Jempiring Peer Support Group.

3. Farming of 10 types of medicinal plants, vegetables and ornamental plants.
4. Produces 4,000 milliliters of liquid organic fertilizer per month.
5. 7,000 fish seed farming and 126 vegetable packages.
6. The financial growth of Sekar Jempiring co-operative climbs from Rp2.7 million in 2019 to Rp46.1 million.
7. 1 PLWHA group (of Sekar Jempiring Peer Support Group) began to open up and socialize with the community.
8. Social partnerships were established with
   - Governmental Institutions, i.e. Bali Provincial Social Office, Denpasar City Social Office, Family Welfare Empowerment Group (PKK) of Gianyar District, AIDS Commission of Denpasar City, Southern Denpasar Community Health Center IV.
   - Private Institution, i.e. Usadha Puri Damai.
   - Community, i.e. Sekar Jempiring Peer Support Group.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

IPreneur
IPreneur

IPreneur merupakan program pelibatan dan pengembangan komunitas untuk mendukung pencapaian kemandirian masyarakat khususnya dari segi ekonomi melalui Pengembangan UKM. Penamaan program IPreneur mengacu pada kegiatan ekonomi kerakyatan yang menjadi sarana bagi masyarakat binaan Indonesia Power untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, menggali pengetahuan dan keahlian sekaligus mengentaskan kemiskinan.

IPreneur is a community development and engagement program to support the community's self-sufficiency, particularly in the economic aspect through SMB Development. It takes form in community-based economic activities to facilitate foster community of Indonesia Power so that they can participate and create innovations in sustainable economic development, gain knowledge and expertise, as well as eradicate poverty.

Program Pemberdayaan Kelompok Ternak dan Penyebaran Bibit Unggul Domba Garut "Serba Maju" (Sentra Ternak Sukamaju)
Empowerment Program of Farming Association and Distribution of Top Quality Garut Sheep Yearlings, "Serba Maju" (Sukamaju Farming Center)



Latar belakang Program Unggulan Program Pemberdayaan Kelompok Ternak dan Penyebaran Bibit Unggul Domba Garut "Serba Maju" (Sentra Ternak Sukamaju) mengacu pada data tahun 2016 saat hari raya idul adha, Banten mengalami kekurangan domba kurban sebanyak 15.352 ekor. Selain itu, Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Bidang Peternakan di Kabupaten Serang tahun 2018 terdapat kekurangan *supply*

The background of this Flagship Program is based on the data from 2016, when Banten Province suffered a shortage of 15,352 sheep for sacrifice during Eid al-Adha. Not only that, based on data from the Department of Agriculture for Livestock and Animal Health of Serang District in 2018, there was also a shortage of 37,476 sheep supply per year which could not be provided by the farmers of Serang District. Indonesia Power through CCPP Cilegon

domba per tahun sekitar 37.476 ekor yang tidak bisa disediakan oleh peternak Kabupaten Serang. Indonesia Power melalui PLTGU Cilegon OMU telah melakukan program pemberdayaan ternak kambing di area ring 1 (Desa Margasari). Selanjutnya melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dinas Pertanian Kabupaten Serang Tahun 2018, tentang kendala dan potensi ternak domba. Hasil FGD menunjukan masih sedikitnya Domba bibit unggul di Kabupaten Serang dan Banten. Kemudian Tim CSR PLTGU Cilegon OMU melakukan *Rapid Assesment* ke desa Sukamaju Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang tahun 2018.

OMU has conducted a program to empower goat farming in ring 1 area (Margasari Village). Focus Group Discussions (FGD) with the Department of Agriculture of Serang District in 2018 were then held to discuss about the problem and potential of sheep farming. Focus Group Discussion (FGD) showed that there were not many top quality sheep yearlings in Serang and Banten Districts. Afterwards, CCPP Cilegon OMU CSR team conducted Rapid Assessment in Sukamaju village, Cikeusal Sub-district, Serang District in 2018.

Tujuan Program Program Pemberdayaan Kelompok Ternak dan Penyebaran Bibit Unggul Domba Garut "Serba Maju" adalah untuk meningkatnya Peternak dan Peternakan Domba di Kabupaten Serang dan Banten, sehingga Meningkatkan Populasi Domba Khususnya domba bibit unggul; memperluas jangkauan, kemitraan dan penerima manfaat penyebaran bibit unggul domba; Sentra Ternak Sukamaju (SERBA MAJU) menjadi sarana *transfer knowledge* / pusat penelitian dan pengembangan bibit domba melalui pelatihan, penelitian dan studi banding bekerjasama dengan Dinas Pertanian; pengembangan kapasitas peternak dan kesadaran kolektif antar stakeholder (Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat); terciptanya *Best Practice* dalam pengelolaan domba bibit unggul serta pengelolaan domba modern dan bersahabat dengan lingkungan (*zero waste*).

The objectives of this Program are to increase the numbers of sheep farmers and farms in Serang and Banten Districts, thereby increasing the population of sheep and specifically the top quality yearlings; to expand the reach, partnership, and beneficiaries of the distribution of top quality yearlings; to utilize Sukamaju Farming Center (SERBA MAJU) as the means to transfer knowledge/ as a R&D center of sheep yearlings through training, research, and comparative studies in cooperation with the Department of Agriculture; to improve the farmers' capacity and collective awareness among the stakeholders (Government, Company, and Community); to establish the Best Practices in managing top quality sheep yearlings as well as modern and environmentally-friendly sheep farming (zero waste).

Sampai dengan saat ini, jumlah ternak bertambah menjadi 95 ekor dan membuat peternak-peternak domba lain yang ada di Desa Sukamaju ingin menerapkan pola-pola ternak yang sama dengan pola peternak binaan. Modern Farm SERBA MAJU adalah sebuah program peternakan kolektif yang terintegrasi dan berkelanjutan di Desa Sukamaju serta menjadi tempat belajar dan studi banding, menjadi tempat penelitian domba. Pengurus bertambah menjadi 6 orang dan mitra lainnya menjadi 18 orang. Terdapat penambahan alat timbangan, alat cukur, mesin pencacah. Peternakan melakukan pemanfaatan limbah ternak (*Zero Waste*) dan menerapkan *knowledge core* Bisnis Perusahaan *(Solar Cell* dan Aplikasi). Selain itu, dampak yang dirasakan peternak binaan dari program yang dijalankan diantaranya:

1. Sosial dan Masyarakat
   - Meningkatkan gotong royong antar masyarakat.
   - Meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.
   - Terbentuknya pola peternakan baru.
2. Ekonomi
   - Peningkatan Pendapatan kelompok ternak.
   - Peningkatan Ekonomi Kelompok ternak.
   - Peningkatan ekonomi peternak lainnya.
   - Peningkatan pendapatan petani sekitar.

To this date, the number of cattle has increased to 95, driving other sheep farmers in Sukamaju Village to implement the same farming patterns through the Company's foster partner program. SERBA MAJU Modern Farm is a well-integrated and sustainable collective farm program in Sukamaju Village. It becomes a learning center, a subject of comparative studies, and a research site for sheep farming. The number of staff grows to 6 and to 18 for other partners. There are additions of a weight scale, shaver, and chopper machine. The farming process applies zero waste principle and implements the Company's Business knowledge core (Solar Cell and Application). In addition, the farmers under the foster of this ongoing program are able to see the impacts it brings on each of the below aspects:

1. Social and Community
   - Improvement in community cooperation.
   - Improvement in good relations with the community, government and company.
   - Establishment of a new farming pattern.
2. Economy
   - Increased income of farming groups.
   - Improvement in the farming groups' economy.
   - Improvement in other farmers' economy.
   - Increased income of the surrounding crop farmers.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

- Penguatan Pangan untuk masyarakat.
- Terbukanya lapangan pekerjaan.

3. Kesejahteraan
   - Meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait peternakan.
   - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi yang diaplikasikan di peternakan.
   - Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
   - Meningkatnya kualitas hidup dengan lingkungan yang lebih baik.
4. Lingkungan
   - Budidaya Ekosistem darat berupa Domba Bibit Unggul.
   - Budidaya Pakan Unggul (Rumput Odot, indigovera,dll).
   - Mengubah Lahan Kering/tandus menjadi lahan Hijau dan gembur.
   - Pemanfaat Limbah ternak untuk kesuburan tanah dan tanaman pakan serta pertanian sekitar.
   - Pemanfaatan Energi terbarukan ramah lingkungan (Solar Cell).
   - Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

- Strengthening of the community food security.
- Job opportunities openings.

3. Well-being
   - Increased public knowledge of farm-related topics.
   - Increased public knowledge of technologies applied in farms.
   - Increased community satisfaction and well-being.
   - Improved quality of life with better environments.
4. Environment
   - Land ecosystem cultivation can include top quality sheep yearlings.
   - Top quality feeds cultivation (Napier Grass, true indigo, etc.).
   - Turning a dry/desolate land into a Green and fertile land.
   - “Animal Waste” utilization for the fertility of soil and crops and agriculture around the area.
   - Utilization of renewable energy (Solar Cell).
   - Reduction of Greenhouse Gas Emissions (GGE).

TPST 3R Nangun Resik Paksebali

Nangun Resik TPST 3R in Paksebali

Bali PGU-PLTDG Pesanggaran bersama Yayasan Lengis Hijau Bali melakukan sebuah inovasi pengelolaan sampah di TOSS. Tempat pengolahan sampah ini tidak hanya mengolah sampah organik dan sampah anorganik tetapi juga mengolah sampah B3. Inovasi pengolahan sampah ini sesuai dengan *core competency* perusahaan dan juga konsep *Life Cycle Assessment* (LCA) sebagai strategi dan pengembangan proses bisnis Perusahaan.

Pengolahan limbah B3 yang sedang dikembangkan oleh Bali PGU-PLTDG Pesanggaran di Desa Paksebali memanfaatkan limbah B3 rumah tangga berupa minyak jelantah. Minyak jelantah yang diperoleh dari rumah tangga maupun dari pelaku UMKM di Desa Paksebali ini diolah menjadi biodiesel. Biodiesel yang dihasilkan kemudian dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar yang dapat digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin pengolahan sampah di Tempat Pengolahan Sampah-*Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R) Nangun Resik, Desa Paksebali. Rencana pengembangan ke depan, ketika produksi sudah besar, hasil dari pengolahan minyak jelantah ini dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 20 persen dan solar 80 persen, atau dikenal dengan B20 di lingkungan pembangkitan Indonesia Power Bali Power Generation Unit.

Bali PGU-DGPP Pesanggaran works hand in hand with Yayasan Lengis Hijau Bali to deliver innovations on waste management in Local Waste Management Site (TOSS). This waste management site not only processes organic waste and inorganic waste, but also B3 waste. It is based on the company’s core competency as well as the concept of Life Cycle Assessment (LCA) as the Company’s strategy and business process development.

The B3 waste management system developed by Bali PGU-DGPP Pesanggaran in Paksebali Village makes use of household B3 waste, i.e. used cooking oil (UCO). UCO from household and MSMEs in Paksebali Village are processed into biodiesel. Then, biodiesel produced is used as an alternative fuel to replace diesel. It can be used to power the waste management machines in Nangun Resik Waste Management Site-Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Paksebali Village. When production rate has grown big, the future development plan is that the processed UCO can be distributed to meet 20 percent of the needs for biodiesel and 80 percent for diesel. This aspiration is known as B20 in the power plant environment of Bali Power Generation Unit of Indonesia Power.



Minyak jelantah yang berhasil dikumpulkan di Desa Paksebali sebanyak 40 liter per bulan atau sekitar 10 liter per minggu. Proses pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel di Desa Paksebali cukup sederhana dan hanya memerlukan sedikit zat aditif sebagai campuran yang mudah ditemukan dengan harga terjangkau. Setiap satu liter minyak jelantah dicampur dengan satu mililiter zat aditif. Kemudian diaduk selama dua jam tanpa henti. Setelah proses pengadukan, minyak jelantah yang telah tercampur tersebut didiamkan selama 48 jam atau dua hari. Setelah itu, minyak jelantah telah berubah menjadi biodiesel dan siap untuk digunakan pada mesin-mesin operasi pengolahan sampah menjadi pellet. Selama satu bulan uji coba mesin pengolahan sampah menggunakan biodiesel hasil dari daur ulang minyak jelantah, mesin beroperasi dengan baik dan justru tidak mengeluarkan asap hitam tebal seperti Ketika mesin dioperasikan menggunakan solar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa biodiesel dari minyak jelantah dapat digunakan dan berdampak baik bagi lingkungan. Saat ini, biodiesel minyak jelantah sedang diuji di laboratorium untuk mengetahui apa saja yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut dilakukan guna melakukan perbaikan pada proses produksi agar karakter dan kandungannya lebih sesuai dengan kebutuhan industri di lingkungan PT Indonesia Power dan dapat

A total of 40 liters of UCO are collected in Paksebali Village per month, or about 10 liters per week. The process of recycling UCO into biodiesel in Paksebali Village is simple and only requires little amount of additive as a mixture. It's very easy to find and available at affordable prices. Every one liter of UCO is mixed with one milliliter of additive. Then, continuously stir the mixture for two hours. After stirring, leave the UCO mixture for 48 hours or two days. UCO has now been recycled into biodiesel and is ready for use in machines that process waste into pallets. During one-month trial test of using the recycled biodiesel to power the waste management machines, they operated smoothly and did not produce thick black smokes as such when powered by diesel. This indicates that biodiesel recycled from UCO can be used and has a good environmental impact. Currently, UCO biodiesel is being tested in the laboratory to figure out what substances it contains. This is to improve the production process so that its nature and content can be adjusted to cater to industry needs in PT Indonesia Power's environment and can be well-utilized and implemented in other villages to fulfill the needs of the Company. Based on Compass Sustainability Analysis, the benefits of the Nangun Resik TPST 3R Program – Paksebali 2021 are as follows:

termanfaatkan dengan baik serta dapat diimplementasikan di desa-desa lainnya untuk memenuhi kebutuhan Perusahaan. Manfaat yang dirasakan dari Program TPST3R Nangun Resik – Paksebali 2021 berdasarkan Analisis *Compass Sustainability* adalah sebagai berikut:

1. Sosial dan Masyarakat
   - 2 kelompok masyarakat sadar lingkungan (Werdhi Guna Desa Gunaksa dan Nangun Resik Desa Paksebali).
   - Terciptanya kemitraan social:
     - Pemerintah Kabupaten Klungkung, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung, Dinas Pendidikan Klungkung, Pemerintah Desa Paksebali, Bum Desa Paksebali;
     - Lembaga Swasta Yayasan Lengis Hijau;
     - Akademisi Institut Teknologi PLN;
     - Masyarakat Kelompok TOSS Werdhi Guna, KSM Nangun Resik;
     - Media Bali Travel News.
2. Ekonomi
   - Peningkatan pendapatan ekonomi kelompok menjadi Rp 1.350.000/bulan/orang.
   - Penghematan biaya produksi UMKM di Desa Paksebali sebesar Rp 14.000/bulan.
3. Kesejahteraan
   - 3 orang dari 169 orang warga miskin telah terentaskan dari kemiskinan (1,78%).
   - Penurunan 61% kasus demam berdarah di kecamatan Dawan.
   - 310 kepala keluarga sudah melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan melakukan pengumpulan minyak jelantah.
4. Lingkungan
   - Mengolah timbulan sampah sebesar 10,5 ton/minggu/desa.
   - Kabupaten Klungkung tidak terjadi bencana banjir.
   - Pengurangan limbah cair minyak jelantah sebesar 21 liter/minggu.
   - Pengurangan emisi gas buangan CO_2 sebesar 2.760 g/kWh dan SO_2 sebesar 1007,4 ppm dari inovasi seminyak.

1. Social and Community
   - 2 environment-conscious communities (Werdhi Guna of Gunaksa Village and Nangun Resik of Paksebali Village) were established.
   - Social partnerships were established with:
     - Governmental Institutions, i.e. Department of Environmental Services of Klungkung District, Klungkung Department of Education, Local Government of Paksebali Village, Village-Owned Enterprises in Paksebali Village;
     - Private Institution, i.e. Yayasan Lengis Hijau;
     - Academic Institution, i.e. PLN Institute of Technology;
     - Communities of Werdhi Guna TOSS, Nangun Resik Non-Governmental Group (KSM);
     - Media, i.e. Bali Travel News.
2. Economy
   - Increased monthly income of Rp1,350,000 for each community member.
   - MSMEs production cost savings in Paksebali Village of Rp14,000/month.
3. Well-being
   - 3 of 169 people have been lifted out of poverty (1.78%).
   - A 61% decline in Dawan sub-district's dengue fever cases.
   - A total of 310 family heads have sorted their household waste and collected their UCO.
4. Environment
   - 10.5 tons of waste are processed per week for each village.
   - No more floods in Klungkung District.
   - Decreased liquid waste of UCO by 21 liters/week.
   - Reduction of CO_2 gas waste emissions by 2,760 g/kWh and 1007.4 ppm of SO_2 from Seminyak innovation.

Inspirasi Perempuan

Inspirasi Perempuan (Women's Inspiration)

Inspirasi Perempuan adalah kegiatan pengembangan masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi budaya yang lebih baik untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ruang lingkup kegiatan ini meliputi kegiatankegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi untuk kaum wanita di lingkungan area pembangkit; kesehatan ibu dan anak di lingkungan area pembangkit; dan program keterampilan untuk perempuan mandiri.

Inspirasi Perempuan is a community development activity to achieve a better socio-cultural and economic condition in order to attain gender equality and justice in family and community life. The scope of this activity includes activities related to economic empowerment for women in the power plant area; mother and child health in the power plant area; and skills improvement program that aims for women's independence.

Program Pemberdayaan Wanita "Omah Kreteg Anggana"

Women's Empowerment Program "Omah Kreteg Anggana"



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Terletak di bagian utara Kecamatan Pulomerak, Kelurahan Suralaya memiliki luas wilayah 5,75 kilometer persegi. Tidak hanya berbatasan langsung dengan Selat Sunda, bentang alam di Kelurahan Suralaya juga didominasi oleh wilayah perbukitan. Sebagai bagian dari Kota Cilegon, Kelurahan Suralaya memiliki beberapa kearifan lokal yang bisa dijadikan potensi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Sambal krétég salah satunya. Sebagai bagian dari upaya pelestarian kearifan lokal, PT Indonesia Power Suralaya *Power Generation Unit* (PGU) berkomitmen melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan produk sambal krétég melalui Omah Krétég Anggana.

Located in the northern part of Pulomerak Sub-district, Suralaya Ward has an area of 5.75 square kilometers. Not only is it directly adjacent to the Sunda Strait, the landscape in Suralaya Ward is also dominated by hilly areas. As part of Cilegon City, Suralaya Ward has a number of potential local wisdoms to be integrated for the community empowerment programs. Sambal krétég is one of them. As part of the effort to preserve local wisdoms, Suralaya Power Generation Unit (PGU) of PT Indonesia Power is committed to provide assistance and guidance in the development of sambal krétég products through Omah Krétég Anggana.

Secara umum, sambal krétég yang diproduksi oleh Omah Krétég Anggana terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti bawang merah, cabai rawit atau cengek, serta garam. Dalam proses menghasilkan rasa pedas dan gurih, bawang merah dan cengek akan digoreng dan dikeringkan dengan mesin *spinner* untuk mengeringkan minyak agar lebih tahan lama. Tidak hanya itu, Omah Krétég Anggana juga memiliki varian rasa original, teri, terasi dan ebi yang kemudian dikemas dalam tingkat kepedasan antara level satu hingga lima. Hingga saat ini, setidaknya Omah Krétég Anggana telah memberikan dampak positif dalam peningkatan kapasitas delapan perempuan di Kelurahan Suralaya. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan cengek yang dibeli langsung dari petani lokal pun turut serta memberikan dampak positif kepada para petani. Setidaknya dalam satu bulan, Omah Krétég Anggana membutuhkan 10 hingga 30 kg cengek.

Generally, sambal krétég produced by Omah Krétég Anggana is made of simple ingredients, such as shallots, chillies, and salt. To make it spicy and savory, shallots and chillies are fried and the oil is dried with a spinner machine so that it stays fresh longer. Other than the original flavor, Omah Krétég Anggana also offers various flavors, such as anchovies, shrimp paste, dried shrimps. They come in packages of different spiciness levels, ranging from level one to five. To this day, Omah Krétég Anggana has at least presented a positive impact in empowering eight women in Suralaya Ward. On the other hand, resourcing chilies directly from local farmers has also brought nothing but positive impact on the farmers. At least in one month, Omah Krétég Anggana needs 10 to 30 kg of chillies.

Keberadaan Omah Krétég Anggana yang telah berdampak pada peningkatan pendapatan anggota kelompok serta pelestarian kearifan lokal khas Suralaya telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Pada tahun 2019, Omah Krétég Anggana meraih Juara 1 Kategori Kuliner Tingkat Kecamatan Pulomerak dan Juara 3 Kategori Kuliner Tingkat Kota Cilegon dalam acara Entrepreneur Awards 2019 yang diadakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil Kota Cilegon. Selanjutnya, pada tahun 2020 di acara yang sama, Omah Krétég Anggana memenangkan Juara 1 Kategori Kuliner Tingkat Kecamatan Pulomerak dan Juara 3 Kategori Kuliner Tingkat Kota Cilegon.

Omah Krétég Anggana's influence in the increased income of the community members as well as in the preservation of Suralaya's local wisdom has been recognized by the government. In 2019, Omah Krétég Anggana won the first place in the Culinary Category at Pulomerak Sub-District level and the third place in the Culinary Category at Cilegon City level at the 2019 Entrepreneur Awards held by the SMB Co-operative Department of Cilegon City. Furthermore, in 2020, Omah Krétég Anggana won the first place in the Culinary Category at Pulomerak Sub-district level and the third place in the Culinary Category at Cilegon City level.

Sebagai upaya untuk meningkatkan eksistensi sambal krétég, Omah Krétég Anggana bersama PT Indonesia Power-Suralaya PGU melakukan inovasi produk. Sambal krétég yang pada awalnya hanya menjadi teman makan nasi, selanjutnya dapat menjadi bumbu makanan ringan setelah melalui proses ekstraksi, yang diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar. Saat ini, Omah Krétég Anggana telah memproduksi keripik kentang berlabel Anggana Kriuk Kentang sebagai salah satu bentuk inovasi produk.

As an attempt to promote the brand awareness of sambal krétég, Omah Krétég Anggana along with PT Indonesia Power-Suralaya PGU made some innovations on the products. Initially serves only as a condiment to full meals, sambal krétég now also serves as snacks seasoning through the extraction process. The market reach was expected to expand with this innovation. Presently, Omah Krétég Anggana produces potato chips labeled as Anggana Kriuk Kentang (Anggana Potato Chips) as one of the forms of product innovation.

Tidak hanya itu, limbah kulit bawang merah yang dihasilkan dari proses produksi juga digunakan sebagai bahan baku pembuatan antiseptik alami. Hal ini dilakukan setelah adanya kajian dari SMK Kimia PGRI Kota Serang yang menunjukkan bahwa kulit bawang merah memiliki kandungan yang efektif menghambat perkembangan bahkan membunuh kuman, bakteri dan virus. Pemanfaatan kulit bawang merah sebagai antiseptik alami selanjutnya dilakukan oleh para anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Pandan Lestari sebagai kelompok binaan baru dari program pemberdayaan masyarakat Suralaya PGU.

Selain kulit bawang merah, KWT Pandan Lestari juga menambahkan daun kelor sebagai bahan campuran agar antiseptik alami yang dihasilkan lebih efektif. Produk antiseptik alami ini menjadi sebuah solusi untuk mengurangi penggunaan bahan kimia yang dapat berdampak negatif pada kulit apabila digunakan secara terus-menerus. Keberadaan inovasi produk, inovasi alat, pemanfaatan limbah, hingga munculnya kelompok binaan baru, dapat dikatakan bahwa program ini telah menghasilkan perubahan rantai nilai dalam sebuah sistem.

Produk antiseptik ini dapat dijadikan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan antiseptik di masa pandemi Covid-19 saat ini. Itu artinya keberadaan Omah Krétég Anggana sebagai salah satu dari kelompok-kelompok binaan Suralaya PGU diharapkan tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, kesehatan, maupun lingkungan. Di saat kehidupan masyarakat Indonesia sedang pahit akibat pandemi penyakit menular, pemberdayaan masyarakat oleh Suralaya PGU justru kian pedas.

Manfaat yang dirasakan oleh kelompok Omah Kreteg Anggana sesuai *Compass Sustainability* diantaranya adalah :

1. Sosial dan Masyarakat
   - Menguatnya modal sosial 11 orang penerima manfaat.
   - Berkembangnya jaringan mitra bisnis:
     - *Reseller* : 12 Orang;
     - Petani Lokal : 13 Orang.
2. Ekonomi
   - Peningkatan omset kelompok
     - Tahun 2020 : Rp76.200.000;
     - Tahun 2021 : Rp102.000.000.
   - Penghematan biaya produksi Rp 10.360.000.
3. Kesejahteraan
   - Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan limbah sebagai penerapan zero waste.
   - Pengembangan spesialisasi kerja:
     - 5 orang produksi sambel kreteg dan keripik;
     - 3 orang produksi jahe serbuk;
     - 3 orang pengolah limbah produksi.

Not only that, the shallot peel waste from the production is also used as the raw material to produce natural antiseptic. This waste management started after the study from PGRI Chemistry Vocational High School in Serang City was conducted and showed that shallot peel contains an effective substance to prevent the infection of, and even kill, germs, bacteria, and viruses. Furthermore, the utilization of shallot peel as natural antiseptic is now carried out by the members of Women Farmers Association (KWT) Pandan Lestari, a new foster group of Suralaya PGU community empowerment program.

In addition to the shallot peel, KWT Pandan Lestari also adds moringa leaves to produce a more effective natural antiseptic. This natural antiseptic product comes into the light as a solution to issues related to negative effects the chemicals might have on the skin when used continuously. With product innovation, equipment innovation, waste utilization, and addition of new foster groups, it's safe to say that the program has brought changes in a system's value chain.

The antiseptic product can be used as an alternative to fulfill the need for antiseptic during this COVID-19 pandemic. It means that the existence of Omah Krétég Anggana as one of the Suralaya PGU foster groups is expected to have not only economic impact, but also social, health, and environmental impact. Even during this trying time, the community empowerment by Suralaya PGU makes its headway.

Based on Compass Sustainability, the benefits for the members of Omah Kreteg Anggana are as follows:

1. Social and Community
   - Rising social capital to 11 beneficiaries.
   - Development of business partner networks:
     - Reseller: 12 Persons;
     - Local Farmer: 13 Persons.
2. Economy
   - Increased group turnover
     - 2020: Rp76,200,000;
     - 2021: Rp102,000,000.
   - Cost savings amounting Rp10,360,000.
3. Well-being
   - Extended knowledge of waste management as the implementation of zero waste principle.
   - Work specialization development:
     - 5 persons on sambal kreteg and chips production;
     - 3 persons on the ginger powder production;
     - 3 persons on the production waste management.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

4. Lingkungan
   - Limbah minyak jadi sabun.
     - Tahun 2020 : 33 Liter.
     - Tahun 2021 : 48 Liter.
   - Limbah kulit bawang merah jadi antiseptik alami sebanyak 36 kg/tahun.

4. Environment
   - The waste oil is recycled into soaps.
     - 2020: 33 Liters.
     - 2021: 48 Liters.
   - A total of 36 kg shallot peel waste are recycled into natural antiseptic per year.

Program Pemberdayaan Wanita POKLAHSAR Mina Bantu Lumbang
POKLAHSAR Mina Batu Lumbang Women's Empowerment Program



Kawasan Hutan Mangrove Segara Guna Batu Lumbang memiliki berbagai hasil hutan bukan kayu yang tidak termanfaatkan. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan memberikan keuntungan ekonomi tambahan. Selain itu rencana pengembangan kawasan Hutan Mangrove Segara Guna Batu Lumbang menjadi ekowisata berbasis silvofishery membutuhkan peran berbagai pihak.

Segara Guna Mangrove Forest Area in Batu Lumbang has many non-timber forest products which are yet to be utilized. Therefore, it is necessary to develop a plan to utilize them to deliver added-value products and to provide additional economic benefits. In addition, its development plan into silvofishery-based ecotourism requires the participation of various parties.

Salah satu pihak yang dapat dilibatkan dalam pengelolaan ini yaitu kelompok ibu-ibu istri nelayan untuk mengolah dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu tersebut diolah menjadi sirup mangrove, kopi mangrove, teh mangrove, sabun, kue, dodol, dll. Ibu-ibu istri nelayan ini tergabung dalam Kelompok Wanita Tani Mina Segara Guna Batu Lumbang.Kelompok ini baru dibentuk pada 2021 dan merupakan kelompok mandiri diluar Kelompok Usaha Bersama (KUB) Segara Guna Batu Lumbang. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok binaan baru yang proses berdirinya didampingi oleh PT Indonesia Power Bali *Power Generation Unit* (PGU). Meskipun seluruh anggota KUB Segara Guna Batu Lumbang berjumlah 52 orang namun dalam Kelompok Pengolah dan Pemasar Mina Lestari Batu Lumbang belum semua istri nelayan tergabung di dalamnya tetapi baru 31 orang yang tergabung dalam kelompok.

Program dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang sudah dibuat. Kelompok ini juga sudah diresmikan sebagai kelompok yang berdiri sendiri dan disaksikan oleh stakeholders terkait di Batu Lumbang seperti dari PT Indonesia Power Bali PGU, Dinas Perikanan, Tahura Ngurah Rai, Perbekel dan Bendesa Adat Desa Pemogan, dll. Adapun manfaat yang didapat oleh kelompok berdasarkan *Compass sustainability* sebagai berikut :

1. Sosial dan Masyarakat
   Terciptanya kemitraan sosial:
   - Pemerintah: UPT Tahura Ngurah Rai, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Pemerintah Desa Pemogan;
   - Lembaga/Swasta: Rumah Mangrove Bali dan Bank BRI;
   - Akademisi: Universitas Gadjah Mada dan Universitas Warmadewa;
   - Masyarakat: KUB Segara Guna Batu Lumbang dan Poklahsar Mina Lestari Batu Lumbang.
2. Ekonomi
   - Menambah pendapat kelompok ibu-ibu sebesar Rp 7.361.000 hingga bulan Desember 2021 dari penjualan produk olahan mangrove.
3. Kesejahteraan
   - Terbentuknya 1 Kelompok wanita (Poklahsar Mina Lestari Batu Lumbang).
   - 1 Kelompok masyarakat berperan aktif dalam pelestarian mangrove.
4. Lingkungan
   - Terjaganya keanekaragaman hayati di area Tahura Ngurah Rai.

One of the parties that can be engaged in this management to process and utilize non-timber forest products is the group of fishermen's wives. The non-timber forest products are processed into mangrove syrup, mangrove coffee, mangrove tea, soaps, cakes, dodol, etc. The group of fishermen's wives are part of KWT Mina Segara Guna in Batu Lumbang. The group was recently formed in 2021 and is an independent group outside the Community Business Group (KUB) of Segara Guna in Batu Lumbang. This group is one of the new foster groups of which the founding process was under the lead of Bali Power Generation Unit of PT Indonesia Power. Although this KUB records a total of 52 members, not all the fishermen's wives have joined the Production and Marketing group of Mina Lestari Batu Lumbang. There are only 31 people in the group.

The program was carried out in accordance with the work plan. The group has also been inaugurated as a stand-alone group in the presence of the witness, i.e. the corresponding stakeholders in Batu Lumbang, such as PT Indonesia Power - Bali PGU, Department of Fishery, Ngurah Rai Forest Park, Perbekel, and Bendesa Adat of Pemogan Village, etc. Based on Compass Sustainability, the benefits for the group are as follows:

1. Social and Community
   Social partnerships were established with:
   - Governmental Institutions: Ngurah Rai Forest Park Technical Implementation Unit, Department of Fisheries and Food Security for Denpasar City, Local Government of Pemogan Village;
   - Private Institutions: Rumah Mangrove Bali (Bali Mangrove Forest) and BRI Bank;
   - Academic Institutions: Gadjah Mada University and Warmadewa University;
   - Community: KUB Segara Guna in Batu Lumbang and Poklahsar Mina Lestari in Batu Lumbang.
2. Economy
   - Increased income of the fishermen's wives group of Rp7,361,000 up to December 2021 from the sales of mangrove products.
3. Well-being
   - 1 Women's group (Poklahsar Mina Lestari Batu Lumbang) was formed.
   - 1 Community group played an active role in mangrove preservation.
4. Environment
   - Maintained biodiversity in the area of Ngurah Rai Forest Park.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Adi Pertiwi
Adi Pertiwi

Program AdIPertiwi mengacu pada kegiatan seni-budaya yang berkarakteristik keindahan asli Nusantara AdIPertiwi merepresentasi segala sesuatu yang diciptakan atau dilestarikan oleh komunitas binaan CSR berkenaan cara hidup yang berkembang pada suatu komunitas, yang memiliki unsur keindahan secara turun temurun, dari generasi ke generasi. Dalam implementasinya Program ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya lokal namun juga meningkatkan ekonomi para anggotanya.

The AdIPertiwi Program refers to the arts and cultural activities with original and unique characteristics of the Indonesian archipelago. AdIPertiwi represents anything created or preserved by the CSR foster community regarding the way of life that develops in a community and has beauty elements throughout generations. The implementation of this program is not only aimed to preserve local cultures, but also to enhance the economy of its members.

Program Perkusi *Face Camp* (ROJALI - Program Kesejahteraan Masyarakat Lingkungan dan Seni)
Face Camp Percussion Program (ROJALI - Environmental and Art Society Welfare Program)

Rojali di Ancol, merupakan mitra binaan Indonesia Power Priok POMU yang berjalan sejak tahun 2019. Berlokasi di RW 04 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan wilayah Administrasi Kota Jakarta Utara. Kawasan di wilayah Kelurahan ancol khususnya di RW 04 merupakan pemukiman yang padat penduduk dan identik dengan kata kumuh. Mayoritas masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merupakan pendatang, atau warga asli yang tergusur oleh pembangunan infrastruktur kota. Wilayah RW 04 Kelurahan Ancol atau yang biasa disebut kampung muka, menampilkan potret kampung khas Jakarta. Padat dengan rumah-rumah yang jauh dari kata mewah, gang-gang sempit yang menyerupai labirin dan kesan berantakan yang akan tercipta ketika melihat wilayah tersebut.

Rojali in Ancol is a foster partner of the Indonesia Power's Priok POMU since 2019. It's located in RW 04 Ancol Ward Pademangan Sub-district in North Jakarta Administrative City. Ancol Ward area, specifically in RW 04, is very crowded and often identified as a slum. The majority of people living in that area are not originally from Jakarta or originally from Jakarta, but evicted due to the city infrastructure construction. RW 04 of Ancol Ward or commonly called Kampung Muka, presents a portrait of typical Jakarta kampong. Crowded with houses far from what one describes as luxury, narrow labyrinth-like alleys, and the word 'shabby' will come into your mind upon viewing that area.

Anak-anak muda adalah harapan yang dapat merubah wajah kampung muka menjadi wilayah yang lebih produktif, melalui kreatifitas mereka mampu mengubah barang bekas seperti ember, kaleng bekas dan peralatan rumah tangga yang tidak terpakai untuk dimanfaatkan sebagai media alat perkusi. Tujuan dari adanya kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan para pemuda pemudi yang produktif dan kreatif sehingga dapat menghidupkan serta menciptakan kegiatan positif bagi pemuda, serta memberikan kesan positif bahwa wilayah kumuh tidak selalu identik dengan hal hal negatif melainkan memberikan warna baru ditengah peradaban Ibukota.

The future generation is a glimmer of hope that can change that kampong into a more productive area. Through creativity, they can change waste products, such as buckets, old cans, and unused domestic materials, to percussion instruments. The activity aims to create productive and creative youth who take part in a lively and positive activity, in hopes that it will build a positive impression that slums are not always synonymous with negative things. Instead, it provides new colors to the capital city's civilization dynamics.

Salah satu kegiatan Rojali (Program Kesejahteraan Lingkungan dan Seni) di Ancol adalah melalui kegiatan perkusi yang dikemas dengan pemanfaatan barang barang bekas yang ada di sekitar

One of the activities of Rojali (Environmental and Art Welfare Program) in Ancol is carried out through percussion activity by utilizing used goods in RW 04 of Ancol Ward as an instrument or

wilayah RW 04 Kelurahan Ancol untuk dijadikan instrumen atau media dalam kegiatan Face camp Percussion. Berjalannya kegiatan perkusi ini dilakukan oleh 10 anggota yang merupakan karang taruna di RW 04 Kelurahan Ancol. Menggunakan konsep betawi sebagai ciri khas wilayah DKI Jakarta sebagai kostum yang digunakan oleh anggota *Face Camp Percussion* ini. Pemanfaatan barang bekas ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan.

media in Face Camp Percussion activity. This percussion activity engages 10 persons who are also the members of (Male) Youth Organization in RW 04 of Ancol Ward. They wear Betawi-themed costumes to reflect the characteristic of Special Capital Region of Jakarta. Waste products are used to reduce the impact of environmental pollution.



Indonesia Power melalui Unit Priok POMU berupaya mendorong kreatifitas para pemuda di RW 04 Kelurahan Ancol dengan menggandeng Karang Taruni atau remaja putri dengan jumlah anggota 19 orang. Tarian yang mendukung alunan perkusi yakni dengan Tari Sirih Kuning khas Tarian Betawi, Tari Nandak yang merupakan tarian khas Betawi serta Tari Zaipin yang merupakan Tarian khas Riau.

Indonesia Power through the Unit of Priok POMU encourages the youth creativity in RW 04 of Ancol Ward by partnering with (Female) Youth Organization comprises of 19 members. To accompany the percussions, they bring out dances performances, namely Sirih Kuning and Nandak Dances, which are traditional Betawi dances, along with Zapin Dance (a traditional Riau dance).

Kegiatan *Face camp Percussion* menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat yang berbasis lingkungan, dari alat – alat atau media yang digunakan oleh kelompok dengan memanfaatkan limbah padat yang tidak digunakan. Melalui forum yang ada, pemberdayaan untuk kelompok ibu – ibu juga dilakukan dengan dengan mengumpulkan sampah plastik yang dijadikan inovasi sebagai kostum atau rompi anggota perkusi dan tari dalam berkegiatan. Adapun manfaat yang dihasilkan dari program tersebut adalah sebagai berikut :

Face Camp Percussion's activities emphasize the empowerment of community based on the group use of tools or media of unused solid waste. Through the same existing program, empowerment for groups of wives are also actualized by collecting plastic waste. They will be made into costumes or vests for the percussions and dance groups. The benefits of the program are as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

1. Sosial dan Masyarakat
   - Terbentuk kelompok perkusi 10 orang, Terbentuknya kelompok Tari 19 orang, Terbentuknya kelompok menjahit 5 orang.
2. Ekonomi
   - Rp57,25 juta/tahun pemasukan kelompok, Membuka 3 kesempatan kerja/ peningkatan ekonomi.
3. Kesejahteraan
   - Kemampuan kelompok dalam pengolahan limbah atau barang bekas.
4. Lingkungan
   - 50 kg/3bulan pemanfaatan barang bekas untuk dijadikan instrumen perkusi, 20kg/bulan limbah plastik untuk pembuatan rompi.

1. Social and Community
   - A 10-member percussion group, a 19-member dance group, a 5-member sewing group were formed.
2. Economy
   - Group income amounting Rp57.25 million/year, providing 3 job opportunities/economic improvement.
3. Well-being
   - Group's capability to manage waste or unused items.
4. Environment
   - Every 3 months, a total of 50 kg of unused items are utilized as percussion instruments. Each month, a total of 20 kg of plastic waste are recycled for vest production.

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal
Local Manpower Utilization

Indonesia Power memberikan kesempatan kepada putra-putri Indonesia untuk berkontribusi membangun Perusahaan termasuk bagi tenaga kerja lokal yang kompeten melalui Anak Perusahaan yaitu PT Cogindo DayaBersama sebagai eksekutor dalam merekrut tenaga kerja tersebut. Rekrutmen tenaga kerja lokal merupakan bagian dari kelanjutan atas program IP PINTAR. Program IP PINTAR merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan tenaga kerja lokal yang kompeten dalam hal pembangkitan dan ketenagalistrikan. Dengan kegiatan tersebut, para lulusan IP PINTAR diharapkan memiliki nilai lebih untuk memasuki industri ketenagalistrikan. Pada tahun 2021, tidak terdapat penerimaan tenaga lokal dikarenakan *freeze* rekrutmen yang diberlakukan di PT Cogindo DayaBersama.

Sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, PT CogindoDaya Bersama berkomitmen untuk senantiasa memberikan gaji tenaga kerja lokal yang menempati posisi jabatan Operator sampai dengan Manager Unit di atas ketentuan upah minimum di masing-masing wilayah unit bisnis Perusahaan.

Indonesia Power provides the opportunity for local people to work for the Company, including for the competent manpower, through its subsidiary, PT Cogindo DayaBersama as the recruitment agency. Local manpower recruitment is part of the continuation of IP PINTAR programs. IP PINTAR is a program to create local manpower competent in power generation and electricity. The graduates are expected to have an added value when they work in power industry. In 2021, there was no acceptance of local manpower due to the recruitment freeze adopted at PT Cogindo DayaBersama.

Pursuant to the Law No. 13 of 2013 on Employment and Law Number 78 of 2015 on Remuneration, PT Cogindo DayaBersama is committed to provide wages for local manpower in the position of Operator up to Unit Manager above the minimum wages in each business unit of the Company.

Benefit yang Diterima Tenaga Kerja Lokal
Benefits Received by Local Manpower

Posisi Position	Operator	Teknisi Technician	Staf	Supervisor	Manager Unit
Jaminan Kesehatan Health Insurance	√	√	√	√	√
Kompensasi Lembur Overtime Compensation	√	√	√	√	√
Tunjangan Kecelakaan Kerja Occupational Accident Benefit	√	√	√	√	√
Pelatihan Trainings	√	√	√	√	√
Pendidikan Formal Formal Education	√	√	√	√	√
Tunjangan Hari Tua Old-Age Benefit	√	√	√	√	√
Uang Pelepasan Retirement Gratuity	√	√	√	√	√
Kendaraan Dinas Office Vehicle	-	-	-	-	√
Kendaraan Operasional Operational Vehicle	√	√	√	√	√
Perjalanan Dinas Business Trip	√	√	√	√	√
Alat Komunikasi Communication Device	-	-	-	√	√
Alat Penunjang Supporting Device	tergantung kebutuhan need-based	tergantung kebutuhan need-based	√	√	√
Rumah Jabatan Official House	tergantung kebutuhan need-based	tergantung kebutuhan need-based	tergantung kebutuhan need-based	tergantung kebutuhan need-based	√
Pakaian Kerja/OR Work Uniform/OR	√	√	√	√	√
Bantuan Pemakaman dan Dukacita Bereavement Support	√	√	√	√	√
Bantuan Fasilitas Sewa Rumah (BFSR) Residential Rent Support	-	-	-	-	√
Pinjaman Lunak Soft Loan	-	-	-	-	-
Bantuan Bencana Alam Natural Disaster Relief	√	√	√	√	√
Family Gathering	√	√	√	√	√

IP Bersih - Sosialisasi Kebijakan Anti Korupsi/Gratifikasi

IP Bersih (Clean IP) - Dissemination of Anti-Corruption/Gratification Policy

Upaya pemberantasan Korupsi merupakan salah satu tanggung jawab sosial Indonesia Power kepada masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik KKN agar kegiatan usaha dan penciptaan nilai ekonomi bagi Perusahaan dan masyarakat berjalan efektif dan efisien. Seluruh insan Indonesia Power dihimbau untuk tidak melakukan tindakan korupsi, pencegahan pencucian uang dan tidak

Corruption eradication effort is one of the social responsibility of Indonesia Power to the public in order to create an environment free from corruption practices. That way, business activities and the creation of economic values for the Company and the community can run effectively and efficiently. All personnel of Indonesia Power are advised to keep away from corruption, money laundry, and gratification in any form. The Company has

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Perusahaan telah menetapkan Keputusan Direksi No. 161.K/020/IP/2014 tentang Pedoman Indonesia Power Bersih dan Keputusan Direksi No. 39.K/010/IP/2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi sedangkan himbauan larangan menerima hadiah/imbalan dan gratifikasi tertuang dalam Edaran Direksi No. 15.E/012/IP/2018 tentang Larangan Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi. Pedoman IP Bersih dan Pengendalian Gratifikasi diterbitkan untuk dipergunakan oleh seluruh elemen Indonesia Power, mulai dari Direksi, Pejabat, Pegawai hingga para Pemangku Kepentingan di lingkungan Indonesia Power. Pedoman tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh *stakeholder* melalui pemasangan banner tentang anti korupsi/gratifikasi baik di Kantor Pusat maupun di unit pembangkit dan pemuatan himbauan larangan gratifikasi dalam majalah.

established Decree of the Board of Directors No. 161.K/020/IP/2014 on Clean Indonesia Power (IP Bersih) Guideline and Decree of the Board of Directors No. 39.K/010/IP/2018 on Gratification Control Guideline and the prohibition against receiving gifts/ rewards and gratification is contained in the Circular of Board of Directors No. 15.E/012/IP/2018 on Prohibition to Grant and Receive Gratification. IP Bersih and Gratification Control Guidelines are established for all personnels of Indonesia Power, from Board of Directors, Officers, to Stakeholders. They have been communicated to all stakeholders through banners on anti-corruption/gratification at the Head Office, generator units, and magazine.

Indonesia Power Bersih (IP Bersih) menjadi salah satu wujud komitmen dan tindakan nyata dukungan Indonesia Power dalam upaya pemberantasan Korupsi di Indonesia. IP Bersih diimplementasikan dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi dan pencucian uang serta didukung dengan pengelolaan gratifikasi yang memadai. Program IP Bersih diantaranya direalisasikan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman anti korupsi melalui sosialisasi anti korupsi kepada Agen Perubahan, sosialisasi Gerakan Tolak Gratifikasi kepada seluruh Insan IP (seluruh pegawai dan TKWT) dan sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada seluruh Eksekutif, Eksekutif Senior dan Eksekutif Utama di seluruh Unit Kerja Perusahaan.
2. Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi melalui penyusunan Laporan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi dari seluruh unit kerja Perusahaan.
3. Pengelolaan Pelaporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada pegawai tingkat eksekutif, eksekutif senior dan eksekutif utama yang menjadi wajib Lapor.
4. Penyelenggaraan *Vendor Meeting* untuk membangun komunikasi kebijakan anti korupsi Perusahaan dengan mitra kerja.

Clean Indonesia Power (IP Bersih) becomes one of the embodiments of commitment and realization to reflect the support of Indonesia Power in the fight against Corruption eradication in Indonesia. IP Bersih is implemented in order to build a work environment free from corrupt and money laundering practices, and supported by adequate gratuity management. IP Bersih program is put into actions through the following activities:

1. Improving awareness of anti-corruption through dissemination on anti-corruption to the Agents of Change, dissemination on gratification control movement "Gerakan Tolak Gratifikasi" (Say No to Gratification) to all Indonesia Power's Personnel (all employees and fixed-term employees), and dissemination on State Official Wealth Report to all Executives, Senior Executives, and Chief Executives at all units.
2. Managing Gratification Control with the preparation of Gratification Receipt and Refusal report from all work units.
3. Managing State Officials Wealth Report (LHKPN) Submission for executives, senior executives, chief executives as compulsory reporters.
4. Organizing Vendor Meetings to establish communication regarding anti-corruption policy with the vendors.

Informasi tambahan terkait IP Bersih - Sosialisasi Kebijakan Anti Korupsi/Gratifikasi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Ini.

Additional information regarding IP Bersih - Dissemination of Anti-Corruption/Gratification Policy can be found in the Corporate Governance Chapter herein.

Dukungan Manajemen, Pegawai dan *Stakeholders* Relevan pada Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Management, Employee and Stakeholder Support in Relation to CSR Activities for Social and Community Development

Guna mendorong efektifitas dan memperluas jangkauan pengaruh Perusahaan serta manfaat yang dihasilkan dari tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan, Indonesia Power mendorong peran serta setiap komponen perusahaan serta *stakeholder* dalam mendukung program yang dijalankan. Direksi beserta jajaran manajemen senantiasa terlibat mulai dari perumusan rencana kerja, pelaksanaan program kerja tanggung jawab terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan masyarakat. Indonesia Power dengan pengaruh Perusahaan terhadap *stakeholders* juga melibatakan stakeholder relevan dalam perumusan program kerja dan rangkaian kegiatan program terkait tanggung jawab Perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan diantaranya sebagai berikut:

To promote effectiveness and to expand the reach of the Company's influence and the benefits gained from CSR on such subject, Indonesia Power encourages the participation of each of the company's components as well as stakeholders in supporting the ongoing programs. The Board of Directors and the Management are constantly engaged, from the formulation of the work plan to the implementation of the CSR for social and community development. Taking into account its influence, Indonesia Power also engages relevant stakeholders in the formulation of work programs and a series of program activities related to this subject of CSR as follows:

Stakeholders	Pelibatan *Stakeholder* Engagement of stakeholders
Pemasok Jasa O&M dan Lembaga Pendidikan O&M Services Supplier and Education Institution	• Program IP PINTAR, meningkatkan kompetensi siswa SMK. • IP PINTAR program, improving the competency of vocational school students.
Penduduk Sekitar Pembangkit: • Masyarakat di Wilayah Binaan • Instansi Pemerintah • LSM Lokal dan Internasional • Tokoh Masyarakat • Institusi/ Lembaga Profesi • Media • Lembaga Pendidikan Residents around the Power Plant: • Community in the Foster Areas • Governmental Institutions • Local and International NGOs • Public Figures • Professional Association/Institutions • Media • Educational Institutions	• Program Ciliwung Bersih untuk memperbaiki kualitas air sungai. • Program Citarum Harum untuk memperbaiki kualitas air sungai Citarum. • Program pengelolaan sampah TOSS, BOSS, JOSS untuk mengubah sampah menjadi sumber energi. • Program pemberdayaan masyarakat rentan Orang dengan HIV AIDs (ODHA). • Ciliwung Bersih (Clean Ciliwung) program to improve the river water quality. • Citarum Harum program to improve Citarum river water quality. • TOSS, BOSS, JOSS waste management programs to transform waste into energy source. • Community empowerment program for the vulnerable community members (PLWHA).

Unit-unit terkait dalam Perusahaan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing turut serta dalam mereview dan meningkatkan kredibilitas inisiatif dan laporan CSR khususnya terkait terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan setiap triwulan yang termuat dalam laporan manajemen.

The related units in the Company in accordance with their respective areas of duties and responsibilities participate in reviewing and increasing the transparency of CSR initiatives and quarterly reports, especially related to social and community development, as contained in the management report.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) FOR SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Manfaat Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Bagi Perusahaan, Stakeholder serta Upaya Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Benefits of CSR Activities for Social and Community Development for the Company and Stakeholders and Sustainable Development Supporting Efforts

Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan merupakan salah satu upaya dalam menciptakan manfaat bersama bagi Stakeholders dan Perusahaan. Bagi Indonesia Power dalam jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham serta secara khusus atas pelaksanaan program kerja terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Manfaat program pengembangan sosial dan kemasyarakatan untuk Perusahaan diantaranya menjaga reputasi *brand image* Perusahaan, mendapatkan *Social License to Operate*, mereduksi biaya dan risiko Perusahaan, memperbaiki hubungan dengan *stakeholder*, indeks kepuasan masyarakat untuk unit-unit yang ada di Indonesia Power berada pada kategori baik dan sangat baik dan mendapatkan penghargaan di bidang CSR. Selain itu, manfaat program pengembangan sosial dan kemasyarakatan untuk masyarakat dan Stakeholders diantaranya mendukung program Desa Sehat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan keterampilan dan perekonomian masyarakat, mendorong pembangunan infrastruktur nasional, meningkatkan keswadayaan dalam menciptakan tempat tinggal yang layak, meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana ibadah.

The implementation of CSR for social and community development is one of many attempts to create a mutual benefit to the Stakeholders and Company. Indonesia Power aims to maintain the Company's sustainability as an accountability to the Shareholders in the long term, and also specifically for work program relating to social and community development. The benefits of social and community development program for the Company include maintaining its brand image reputation, obtaining Social License to operate, reduction of the Company's cost and risk, improving the relations with stakeholders, maintaining the good and very good categories it falls under in the community satisfaction index for the existing units in Indonesia Power, and receiving recognition in CSR field. Besides that, the benefits also extends to the community and stakeholders. They include supporting Healthy Village program, improving the quality of public health, improving the community skills and economy, driving the development of national infrastructures, improving our self-sufficiency in having decent housings, enhancing the quality of education facilities, and improving the quality of the place of worship facilities.

Selain itu, kegiatan tanggung jawab Perusahaan terhadap bidang terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan diharapkan memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, Air bersih dan sanitasi layak, Berkurangnya kesenjangan serta penanganan perubahan iklim.

In addition, the CSR activities for social and community development are expected to have a positive impact, both directly and indirectly, for sustainable development in the efforts to eradicate poverty, achieve food security and nutrition improvement, and promote sustainable agriculture, attain gender equality and women empowerment, improve access to clean water and proper sanitation, reduce the social gap, and manage climate change.

Penghargaan Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Awards on Social and Community Development

Penghargaan tanggung jawab Perusahaan bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang diperoleh Indonesia Power Sepanjang tahun 2021, adalah sebagai berikut:

1. Penghargaan TOP CSR *Awards* 2021 Program CSR Kategori Khusus Program CSR Bidang Ekonomi & Lingkungan TOP CSR Awards 2021.
2. Penghargaan Indonesia *Sustainable Development Goals Award* (ISDA) 2021 Kategori *Gold* untuk pencapaian SDG's 15.3 – Kamojang POMU.
3. Penghargaan Indonesia *Sustainable Development Goals Award* (ISDA) 2021 Kategori Gold untuk pencapaian SDG's 3.3 – Bali PGU.
4. Penghargaan Indonesia *Sustainable Development Goals Award* (ISDA) 2021 Kategori Gold untuk pencapaian SDG's 11.7 – Priok POMU.
5. Juara 2 PLN TJSL Award 2021 untuk Program Pemberdayaan Masyarakat "Serba Maju" PLTGU Cilegon.
6. Meraih 4 (empat) penghargaan PROPER Emas, 13 (Tiga belas) PROPER Hijau dan 3 (Tiga) PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Below are Corporate Responsibility Awards on social and community development received by Indonesia Power throughout 2021:

1. TOP CSR Awards 2021 in the Special Category of CSR Program on Economy & Environment OF TOP CSR Awards 2021.
2. Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2021 in Gold Category for SDG's 15.3 achievement – Kamojang POMU.
3. Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2021 in Gold Category for SDG's 3.3 achievement – Bali PGU.
4. Indonesia Sustainable Development Goals Award (ISDA) 2021 in Gold Category for SDG's 11.7 achievement – Priok POMU.
5. Runner-up of PLN TJSL Award 2021 for Community Empowerment Program "Serba Maju" CCPP Cilegon.
6. Received 4 (four) Gold PROPER awards, 13 (thirteen) Green PROPER awards, and 3 (three) Blue PROPER awards from the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia.







LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN AUDITED 2021

Audited Financial Statements 2021

PT INDONESIA POWER
DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

31 DESEMBER 2021 DAN 2020/
31 DECEMBER 2021 AND 2020

INDONESIA POWER
Indonesia Power Head Office
Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia
T (021) 5267666 F (021) 5252623 W www.indonesiapower.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPOSIBILITY ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2021 AND 2020 AND FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 2020

Kami yang bertandatangan dibawah ini/ *We, the undersigned:*

1. Nama/ *Name* : M. Ahsin Sidqi
   Alamat kantor/ *Office address* : Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, 12950
   Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Jl. Jaidi No. 1 RT 008/RW 011, Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan
   Nomor telepon/*Phone number* : 08118699002
   Jabatan/ *Position* : Direktur Utama/ *President Director*

2. Nama/ *Name* : Endang Astharanti
   Alamat kantor/ *Office address* : Jl. Jend.Gatot Subroto Kav.18, Jakarta Selatan, 12950
   Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/ *Domicile as stated in ID Card* : Jl. AMD VIII No. 17, RT 010/RW 001, Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan
   Nomor telepon/*Phone number* : 08158063410
   Jabatan/ *Position* : Direktur Keuangan/ *Director of Finance*

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan Keuangan Konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

state that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements;*
2. *The Consolidated Financial Statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information contained in the Consolidated Financial statements is complete and correct;*
   b. *The Consolidated Financial Statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;*
4. *We are responsible for the internal control system of the Company and subsidiaries.*

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 31 Maret/*March* 2022



M. Ahsin Sidqi
Direktur Utama/
President Director

Endang Astharanti
Direktur Keuangan/
Finance Director

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT INDONESIA POWER

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Indonesia Power dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Indonesia Power and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2021, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00479/2.1025/AU.1/02/0241-2/1/III/2022

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Indonesia Power dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Indonesia Power and its subsidiaries as at 31 December 2021, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA
31 Maret/*March* 2022

Yanto, S.E., Ak., M.Ak., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 0241

00479/2.1025/AU.1/02/0241-2/1/III/2022

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/1 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ *Notes*	2020	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	2,766,128	13	2,650,785	*Cash and cash equivalents*
Piutang usaha		15		*Trade receivables*
Pihak berelasi	27,248,591		30,741,055	*Related parties*
Pihak ketiga	91,423		34,501	*Third parties*
Piutang lain-lain	28,861	16	26,180	*Other receivables*
Persediaan	1,385,768	17	1,461,003	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	566,327	18	649,771	*Prepaid taxes*
Biaya dibayar di muka dan uang muka	66,638	19	11,343	*Prepaid expenses and advances*
Aset keuangan dari konsesi jasa jatuh tempo dalam satu tahun	2,019,485	9	1,538,433	*Current maturities of financial assets of service concession*
Piutang pihak berelasi	59,011	11	76,673	*Receivables from related parties*
Jumlah Aset Lancar	**34,232,232**		**37,189,744**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap	107,729,655	6	109,098,467	*Property, plant and equipment*
Aset hak guna	3,307,776	7	3,904,393	*Right-of-use assets*
Properti investasi	143,969	8	139,452	*Investment properties*
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	4,321,545	10	3,232,658	*Investments in associates and joint ventures*
Aset pajak tangguhan	19,493	33	912,713	*Deferred tax assets*
Pajak dibayar di muka	1,242,799	18	805,204	*Prepaid taxes*
Piutang pihak berelasi	468,080	11	512,157	*Receivables from related parties*
Piutang lain-lain	48,115	16	41,229	*Other receivables*
Biaya dibayar di muka dan uang muka	41,411	19	43,962	*Prepaid expenses and advances*
Aset keuangan dari konsesi jasa - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	41,771,897	9	43,791,382	*Financial assets of service concession - net of current portion*
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	1,117	14	-	*Restricted cash in banks*
Aset tidak lancar lain	385,705	12	339,902	*Other non-current assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar	**159,481,562**		**162,821,519**	***Total Non-current Assets***
JUMLAH ASET	**193,713,794**		**200,011,263**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 1/2 *Schedule*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ *Notes*	2020*)	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha		22		*Trade payables*
Pihak berelasi	1,268,661		2,096,432	*Related parties*
Pihak ketiga	2,340,280		2,884,934	*Third parties*
Utang pajak	346,773	24	362,874	*Taxes payable*
Utang pajak penghasilan badan	3,098		32,429	*Corporate income tax payables*
Beban yang masih harus dibayar	319,998	25	288,416	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				*Current maturities of long-term liabilities*
Liabilitas sewa	670,239	23	605,038	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	254,347	36	248,891	*Loans from a shareholder*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	691,250	35	795,248	*Short-term employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**5,894,646**		**7,314,262**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas pajak tangguhan	1,776,220	33	945,199	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				*Long-term liabilities - net of current portion*
Liabilitas sewa	2,884,932	23	3,430,755	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	1,292,375	36	794,456	*Loans from a shareholder*
Liabilitas imbalan kerja	3,463,984	35	3,582,923	*Employee benefits liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**9,417,511**		**8,753,333**	***Total Non-current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS	**15,312,157**		**16,067,595**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham Modal dasar - 20.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.215.647.600 saham	2,607,824	20	2,607,824	*Capital stock - par value of Rp500 (full amount) per share Authorised - 20,000,000,000 shares Subscribed and paid-up - 5,215,647,600 shares*
Tambahan modal disetor	5,513,843	21	5,513,843	*Additional paid-in capital*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	2,122,213		2,122,213	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	28,844,407		35,035,494	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	139,227,406		138,581,169	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	178,315,693		183,860,543	*Equity attributable to owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	85,944		83,125	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS	**178,401,637**		**183,943,668**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**193,713,794**		**200,011,263**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 41

*) *As reclassified, see Note 41*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/1 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ *Notes*	2020*)	
PENDAPATAN USAHA				***REVENUE***
Penjualan tenaga listrik	19,907,755	26	21,011,210	*Sales of electricity*
Pendapatan dari konsesi jasa	14,656,755	9	14,259,159	*Revenue from service concession*
Pendapatan jasa	3,955,349	27	3,470,080	*Service revenue*
Jumlah pendapatan usaha	38,519,859		38,740,449	*Total revenue*
BEBAN USAHA				***OPERATING EXPENSES***
Konsesi jasa	11,784,157	9	9,747,752	*Service concession*
Bahan bakar dan pelumas	10,897,344	28	7,796,125	*Fuel and lubricants*
Perbaikan dan pemeliharaan	3,172,566	29	2,792,776	*Repairs and maintenance*
Penyusutan aset tetap	2,919,112	6	2,871,186	*Property, plant and equipment depreciation*
Kepegawaian	2,253,410	30	2,352,770	*Employee costs*
Penyusutan aset hak guna	725,525	7	712,096	*Right-of-use assets depreciation*
Pembelian tenaga listrik	208,311	31	238,329	*Purchased electricity*
Sewa	58,283	23	52,825	*Rental*
Lain-lain	410,826		320,411	*Others*
Jumlah beban usaha	32,429,534		26,884,270	*Total operating expenses*
LABA USAHA	**6,090,325**		**11,856,179**	***OPERATING INCOME***
Penghasilan keuangan	82,196		53,889	*Finance income*
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing - bersih	21,025		(9,553)	*Gains/(losses) on foreign exchange - net*
Beban keuangan	(467,733)		(162,694)	*Finance costs*
Bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama	445,809	10	203,915	*Share in net income of associates and joint ventures*
Keuntungan penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	5,444	6	1,062,610	*Gain on sale of assets not used in operations*
Beban lain-lain - bersih	(267,755)	32	(230,988)	*Other expenses - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	**5,909,311**		**12,773,358**	***PROFIT BEFORE INCOME TAX***
Beban pajak penghasilan	(1,878,157)	33	(2,549,287)	*Income tax expense*
LABA TAHUN BERJALAN	**4,031,154**		**10,224,071**	***PROFIT FOR THE YEAR***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 41

*) *As reclassified, see Note 41*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 2/2 *Schedule*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ *Notes*	2020	
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain tahun berjalan				***Other comprehensive income/ (loss) for the year***
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that may be reclassified subsequently to profit or loss:*
Bagian penghasilan/(beban) komprehensif lain dari entitas ventura bersama	604,963	10	(189,152)	*Share in other comprehensive income/(expense) from joint ventures*
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Items that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali atas kewajiban manfaat karyawan	535,984	35	(110,940)	*Remeasurements of employee benefit obligations*
Revaluasi atas aset tetap	(483,069)	6	(746,540)	*Revaluation of property, plant and equipment*
(Beban)/manfaat pajak terkait	(11,641)	33b	188,257	*Related (loss)/income tax benefits*
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	**646,237**		**(858,375)**	***Other comprehensive income/(loss) for the year, net of tax***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**4,677,391**		**9,365,696**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Profit for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk	4,027,169		10,218,256	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	3,985		5,815	*Non-controlling interests*
Jumlah	**4,031,154**		**10,224,071**	***Total***
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan diatribusikan kepada:				*Total comprehensive income for the year attributable to:*
Pemilik entitas induk	4,673,406		9,359,881	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali	3,985		5,815	*Non-controlling interests*
Jumlah	**4,677,391**		**9,365,696**	***Total***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 3 *Schedule*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ *Attributable to owners of the parent entity*											
				Saldo laba/*Retained earnings*		Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain/ *Other comprehensive income/(loss)*							
		Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Subscribed and paid-up capital stock*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Surplus revaluasi *aset tetap/ Property plant and equipment revaluation surplus*	Pengukuran kembali atas kewajiban manfaat karyawan/ *Remeasurement of employee benefit obligations*	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama/ *Share in other comprehensive income from associates and joint ventures*	Jumlah penghasilan komprehensif lain/ *Total other comprehensive income*	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk/ *Equity attributable to owners of the parent*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interests*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		2,607,824	5,513,843	2,122,213	32,231,693	139,760,858	(335,730)	14,416	139,439,544	181,915,117	78,082	181,993,199	*Balance as at 31 December 2019*
Penyesuaian saldo awal atas Penerapan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"		-	-	-	(7,702)	-	-	-	-	(7,702)	-	(7,702)	*Opening balance adjustment for adoption of SFAS No. 71, "Financial Instrument"*
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak Pelanggan"		-	-	-	(41,464)	-	-	-	-	(41,464)	-	(41,464)	*Opening balance adjustment for adoption of SFAS No. 72, "Revenue from Contract with Customers"*
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020		2,607,824	5,513,843	2,122,213	32,182,527	139,760,858	(335,730)	14,416	139,439,544	181,865,951	78,082	181,944,033	*Balance as at 1 January 2020*
Dividen	34	-	-	-	(7,365,289)	-	-	-	-	(7,365,289)	(772)	(7,366,061)	*Dividends*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	10,218,256	(582,301)	(86,922)	(189,152)	(858,375)	9,359,881	5,815	9,365,696	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		**2,607,824**	**5,513,843**	**2,122,213**	**35,035,494**	**139,178,557**	**(422,652)**	**(174,736)**	**138,581,169**	**183,860,543**	**83,125**	**183,943,668**	***Balance as at 31 December 2020***
Dividen	34	-	-	-	(10,218,256)	-	-	-	-	(10,218,256)	(1,166)	(10,219,422)	*Dividends*
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	-	-	4,027,169	(376,794)	418,068	604,963	646,237	4,673,406	3,985	4,677,391	*Total comprehensive income for the year*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021		**2,607,824**	**5,513,843**	**2,122,213**	**28,844,407**	**138,801,763**	**(4,584)**	**430,227**	**139,227,406**	**178,315,693**	**85,944**	**178,401,637**	***Balance as at 31 December 2021***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 4 Schedule

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			***CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2021 AND 2020*** *(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)*
	2021	**2020**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	27,285,066	20,791,572	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(24,163,539)	(15,611,962)	*Cash paid to suppliers and employees*
Penerimaan bunga	82,196	206,547	*Interest received*
Pembayaran bunga	(478,769)	(279,780)	*Interest paid*
Penerimaan restitusi pajak	463,109	531,820	*Tax restitution received*
Pembayaran pajak penghasilan	(508,841)	(389,950)	*Income tax paid*
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	**2,679,222**	**5,248,247**	***Net cash provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan aset tetap	(2,580,801)	(4,090,045)	*Additions of property, plant and equipment*
Hasil penjualan aset tidak digunakan dalam operasi	5,444	1,901,218	*Proceeds from sale of assets not used in operations*
Penyertaan modal pada entitas ventura bersama	(38,115)	(1,901,280)	*Capital subscription in joint ventures*
Penerimaan investasi efek beragunan aset	95,000	85,000	*Receipts of investment in asset-backed securities*
Penerimaan piutang pihak berelasi	97,474	-	*Receipts of receivables from related parties*
Perolehan dividen dari entitas asosiasi	-	1,241	*Proceeds from dividends of associate*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(2,420,998)**	**(4,003,866)**	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Pembayaran liabilitas sewa	(637,138)	(1,107,984)	*Payments of lease liabilities*
Penerimaan pinjaman dari pemegang saham	739,395	1,043,356	*Proceeds from loan from a shareholder*
Pembayaran pinjaman dari pemegang saham	(252,848)	(60,293)	*Loan repayments from a shareholder*
Pembayaran dividen kepada pihak non-pengendali	-	(772)	*Payments of dividends to non-controlling parties*
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(150,591)**	**(125,693)**	***Net cash used in financing activities***
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**107,633**	**1,118,688**	***NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	7,710	13,995	*Effect of changes in foreign currency*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**2,650,785**	**1,518,102**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**2,766,128**	**2,650,785**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR***

Lihat Catatan 40 untuk penyajian informasi arus kas Grup.

Refer to Note 40 for the presentation of the Group's cash flow information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of the consolidated financial statements.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Indonesia Power ("Perusahaan") didirikan di Jakarta berdasarkan akta No. 15 tanggal 3 Oktober 1995 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-12496. HT.01.01.Th.95 tanggal 3 Oktober 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 9249 tanggal 7 November 1995, Tambahan No. 89.

Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 54 tanggal 23 Desember 2019 dari Notaris Lenny Janis Ishak S.H., dalam rangka penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan KBLI 2017. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-0005319.AH.01.02. TAHUN 2020 tertanggal 21 Januari 2020.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor atau satuan-satuan usaha yang tersebar di wilayah Indonesia. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Indonesia Power Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas serta melaksanakan penugasan dari Pemegang Saham Mayoritas dalam rangka mendukung kegiatan usaha Pemegang Saham dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan kepatutan serta etika bisnis pada Perseroan Terbatas, yang mencakup kegiatan usaha sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Indonesia Power ("the Company") was established in Jakarta based on notarial deed No. 15 dated 3 October 1995 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in his decision letter No. C2-12496. HT.01.01.Th.95 dated 3 October 1995, and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 9249 dated 7 November 1995, Supplement No.89.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by notarial deed No. 54 dated 23 December 2019 of Lenny Janis Ishak S.H., Notary in Jakarta to conform with KBLI 2017. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his decision letter No. AHU-0005319.AH.01.02. TAHUN 2020 dated 21 January 2020.

The Company is domiciled in Jakarta, with offices or business units spread all over Indonesia. The Company's head office is located in Gedung Indonesia Power Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's scope of activities is to conduct electricity business based on sound industrial and commercial principles by applying the principles of a Limited Liability Company and carrying out the assignment of the Majority Shareholder in order to support the business activities of the Shareholders by applying the principles of good corporate governance and propriety and business ethics in limited liability companies, which include the following business activities:

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

i. Pembangkitan tenaga listrik

ii. Usaha yang berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik yang meliputi:
- Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis;
- Jasa investigasi, desain, operasi, dan pemeliharaan serta persewaan peralatan pembangkitan;
- Konstruksi bangunan elektrikal;
- Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- Pendidikan teknik swasta;
- Produksi, perbaikan dan perdagangan peralatan tenaga listrik;
- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas;
- Pertambangan batubara;
- Industri produk dari batubara;
- Produksi pengolahan, pengangkutan, dan perdagangan gambut, biomas dan gas alam;
- Pengusahaan tenaga panas bumi;
- Kogenerasi;
- Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air;

iii. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud diatas, Perusahaan dapat melakukan perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, termasuk memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN") suatu perusahaan yang berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2021 and 2020, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anaknya (secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup") masing-masing sebanyak 7.004 (tidak diaudit) dan 6.533 (tidak diaudit).

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and general information** (continued)*

i. Electric power generation

ii. Business related to supply of electricity which includes the following:
- *Engineering and technical consultation activities;*
- *Investigation, design, operation and maintenance services as well as the generation of equipment rental;*
- *Electrical building construction;*
- *Installation of industrial machines and equipment;*
- *Private engineering education;*
- *Production, repairs, and trade of electric power equipment;*
- *Large-scale trade in solid, liquid and gas fuels products;*
- *Coal mining;*
- *Coal products industry;*
- *Production of processing, transportation, and trade in peat, biomass and natural gas;*
- *Exploitation of geothermal power;*
- *Cogeneration;*
- *Construction of water resources infrastructure buildings.*

iii. In addition to the business activities referred to above, the Company can conduct trading and/or supporting business activities in the context of optimising the use of resources owned by the Company, including assigning Subsidiaries.

The Company is one of the group of companies owned by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara ("PLN"), a company domiciled in Jakarta, Indonesia.

As at 31 December 2021 and 2020, the Company and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") had a total of 7,004 (unaudited) and 6,533 (unaudited) employees, respectively.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/3 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

b. Susunan pengurus dan informasi lain / *b. Management and other information*

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2021 and 2020, the composition of the Company's management was as follows:

	2021	2020	
Komisaris Utama	Mohamad Oemar	Mohamad Oemar	*President Commissioner*
Komisaris	Djoko Siswanto	F. X. Sutijastoto	*Commissioner*
Komisaris	Miftahul Jannah	Miftahul Jannah	*Commissioner*
Komisaris	Munir Ahmad	Munir Ahmad	*Commissioner*
Komisaris	Iskandar Simorangkir	-	*Commissioner*
Komisaris Independen	Ulil Abshar Hadrawi	Ulil Abshar Hadrawi	*Independent Commissioner*
Direktur Utama	M. Ahsin Sidqi	M. Ahsin Sidqi	*President Director*
Direktur Operasional I	Hanafi Nur Rifai	Hanafi Nur Rifai	*Operational Director I*
Direktur Operasional II	R. Bambang Anggono	R. Bambang Anggono	*Operational Director II*
Direktur Sumber Daya Manusia	Bagus Setiawan	Bagus Setiawan	*Human Resource Development and*
Direktur Pengembangan dan Niaga	Harlen	Harlen	*Commercial Director*
Direktur Keuangan	Endang Astharanti	Khusnul Mubien	*Finance Director*

2. ENTITAS ANAK / *2. SUBSIDIARIES*

Perusahaan memiliki saham entitas anak baik langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

The Company has ownership interests, directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas anak/ *Subsidiaries*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership* 2021	2020	Tahun operasi komersial/ *Year of commercial operations*	Jumlah aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 2021	2020
PT Cogindo Daya Bersama (CDB)	Jakarta	Cogeneration, pemasok energi, jasa pelayanan energi dan manajemen/ *Cogeneration, energy distribution, energy services and management*	99.99	99.99	1999	1,203,567	1,285,763
PT Artha Daya Coalindo (ADC)	Jakarta	Perdagangan dan jasa pengangkutan batu bara/*Trade and coal transportation services*	80.00	80.00	1998	896,222	494,407
PT Indo Ridlatama Power (IRP)	Kutai	Pembangkitan tenaga listrik/ *Power generation*	90.00	90.00	2018	1,502,811	1,623,619
PT Putra Indotenaga (PIT) dan entitas anak */and its subsidiaries*	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/*Electricity and energy*	99.99	99.99	2016	4,536,290	3,445,078
PT Indo Tenaga Hijau (ITH) **)	Jakarta	Pengembangan energi baru dan terbarukan/*Development of new and renewable energy*	95.45	95.45	*)	85,734	84,288
PT Suralaya Indo Tenaga (SIT) dan entitas anak */and its subsidiary* **)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/*Electricity and energy*	99.99	99.99	-	3,292,970	2,426,435
PT Putra Suralaya Indotenaga (PSI) **)	Jakarta	Ketenagalistrikan dan energi/*Electricity and energy*	99.99	99.99	-	3,292,921	2,426,385

*) Dalam tahap pengembangan/*Under development stage*
**) Pemilikan tidak langsung/*Indirect ownership*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/4 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU, AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN TAHUNAN, SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK")

Penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan:

- PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf"
- Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis - Definisi Bisnis"
- Amendemen PSAK No. 71, Amendemen PSAK No. 55, Amendemen PSAK No. 60, Amendemen PSAK No. 62 dan Amendemen PSAK No. 73 tentang "Reformasi Acuan Suku Bunga 2"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 110, "Akuntansi Sukuk"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 111, "Akuntansi Wa'd"
- Amandemen PSAK 73, "COVID-19 Terkait Konsesi Rental"
- Penyesuaian tahunan atas PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK No. 13, "Properti Investasi", PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset", PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama" dan Interpretasi Standard Akuntansi Keuangan ("ISAK") No. 16, "Pengaturan Jasa Konsesi"

Sehubungan dengan amandemen PSAK No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 dan No. 73, Grup saat ini memiliki pinjaman dari pemegang saham yang mengacu pada US Dollar London Interbank Offered Rate ("LIBOR") dan diperpanjang setelah tahun 2022. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, suku bunga acuan alternatif belum ditentukan.

Standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- Revisi PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Klasifikasi Liabilitas Lancar atau tidak lancar"
- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap - Hasil Penggunaan yang Diintensifkan"
- Amendemen PSAK No. 22, "Bisnis Kombinasi Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"

3. NEW, AMENDMENTS AND ANNUAL IMPROVEMENTS STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS") AND INTERPRETATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("IFAS")

The adoption of the following new standards, amendments and annual improvements to accounting standards which were effective from 1 January 2021 did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the consolidated financial statements for the year:

- *SFAS No. 112, "Accounting for Endowments"*
- *Amendment SFAS No. 22, "Business Combinations - Business Definition"*
- *Amendment to SFAS No. 71, Amendment to SFAS No. 55, Amendment SFAS No. 60, Amendment SFAS No. 62 and Amendment to SFAS No. 73 regarding "Interest Rate Benchmark Reform II"*
- *Annual improvement to SFAS No. 110, "Sukuk Accounting"*
- *Annual improvement to SFAS No. 111, "Wa'd Accounting"*
- *Amendment to SFAS No. 73, "COVID-19 related Rent Concessions"*
- *Annual improvements to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements", SFAS No. 13, "Investment Property", SFAS No. 48, "Impairment of Assets", SFAS No. 66, "Joint Arrangements" and Interpretation of Statement of Financial Accounting Standard ("ISFAS") No. 16, "Service Concession Arrangements"*

With respect to the amendments to SFAS No. 71, No. 55, No. 60, No. 62 and No. 73, the Group currently has loans from shareholders which refer to US Dollar London Interbank Offered Rate ("LIBOR") and extend beyond 2022. As at 31 December 2021, the alternative benchmark had not yet been determined.

New standards, amendments, revision and annual improvements issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 are as follows:

- *Revision of SFAS No. 107, "Ijarah Accounting"*
- *Amendment of SFAS No. 1, "Presentation of financial statements - Classification of Liabilities as Current or Non-Current"*
- *Amendment to SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements - Disclosure of Accounting Policies"*
- *Amendment of SFAS No. 16, "Fixed Assets - Proceeds before Intended Use"*
- *Amendment of SFAS No. 22, "Business Combinations - References to the Conceptual Framework for Financial Reporting"*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/5 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") BARU, AMANDEMEN DAN PENYESUAIAN TAHUNAN, SERTA INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan - Definisi Estimasi Akuntansi"
- Amandemen PSAK No. 46, " Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan terkait Aset dan Kewajiban yang Timbul dari Satu Transaksi"
- Amandemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 69, "Agrikultur"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 73, "Sewa"
- PSAK No. 74, Kontrak Asuransi
- Pengesahan amandemen PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK No. 74 dan PSAK No. 71 - Informasi Komparatif"

Standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali Amandemen PSAK No. 1, Amandemen PSAK No. 16, Amandemen PSAK No. 25, Amandemen PSAK No. 46, dan Revisi PSAK No. 107 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 dan PSAK No. 74 dan Amandemen PSAK No. 74 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, tetapi penerapan dini diperkenankan.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen, revisi dan penyesuaian tahunan pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

3. NEW, AMENDMENTS AND ANNUAL IMPROVEMENTS STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD ("SFAS") AND INTERPRETATION OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("IFAS") *(continued)*

New standards, amendments and annual improvements issued but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2021 are as follows: (continued)

- *Amendment to SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates"*
- *Amendment to SFAS No. 46, "Income Taxes - Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction"*
- *Amendment to SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets - Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract"*
- *Annual improvement to SFAS No. 69, "Agriculture"*
- *Annual improvement to SFAS No. 71, "Financial Instruments"*
- *Annual improvement to SFAS No. 73, "Leases"*
- *SFAS No. 74, "Insurance Contracts"*
- *Amendment to SFAS No. 74, "Insurance Contract relating to Initial Applicarion of SFAS No. 74 and SFAS No. 71 - Comparative Information"*

The above new standards, amendments, revision and annual improvements are effective beginning 1 January 2022, except for Amendments to SFAS No. 1, Amendment to SFAS No. 16, Amendment to SFAS No. 25, Amendment to SFAS No. 46, and Revision of SFAS No. 107 which are effective beginning 1 January 2023, and SFAS No. 74 and Amendment to SFAS No. 74, which are effective beginning 1 January 2025, but early adoption is permitted.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments, revision and annual improvements on the Group's consolidated financial statements.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all of the years presented, unless otherwise stated.

a. Compliance with the Financial Accounting Standards ("FAS")

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/6 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian adalah dasar akrual. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan dengan pengukuran nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, diungkapkan di Catatan 5.

c. Prinsip-prinsip konsolidasian

i. Entitas anak

i.1. Konsolidasi

Entitas anak merupakan semua entitas (termasuk entitas bertujuan khusus), dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan, dan beban intra kelompok usaha dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra kelompok usaha yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on the accrual basis of accounting. The preparation and presentation of the consolidated financial statements are based on going concern assumption and the measurement basis is historical cost, except for certain accounts that have been measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows have been prepared using the direct method by classifying the cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements, are disclosed in Note 5.

c. Principles of consolidation

i. Subsidiaries

i.1. Consolidation

Subsidiaries are all entities (including structured entities), over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date control is transferred to the Group and are de-consolidated from the date on which that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognised in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/7 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat setiap kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk mengakuisisi entitas anak adalah nilai wajar seluruh aset yang dialihkan, liabilitas yang diakui oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik sebelumnya dari entitas yang diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup.

Imbalan yang dialihkan termasuk nilai wajar setiap aset dan liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontinjensi. Aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjensi yang diambil alih, yang diperoleh dalam kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Grup mengakui kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Jika kombinasi bisnis diperoleh secara bertahap, Grup akan mengukur kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki pada pihak yang diakuisisi sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan, jika ada, dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang masih harus dialihkan oleh Grup diakui sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan selanjutnya atas nilai wajar imbalan kontinjensi yang diakui sebagai aset atau liabilitas dan dicatat dalam laba rugi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

i. Subsidiaries *(continued)*

i.2. Acquisition

The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred to the former owners of the acquired entity and the equity interests issued by the Group.

The consideration transferred is the fair value of any asset or liability resulting from a contingent consideration arrangement. Identifiable assets acquired, liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values as at the acquisition date.

The Group recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by-acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Non-controlling interests are reported as equity in the consolidated statements of financial position, separate from the owners of the parent entity.

Acquisition-related costs are expensed as incurred.

If the business combination is achieved in stages, the Group will remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its fair value at its acquisition date and recognise the resulting gain or loss, if any, in profit or loss. Any contingent consideration to be transferred by the Group is recognised at its fair value as at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed to be an asset or a liability are recognised in profit or loss. A contingent consideration that is classified as equity is not remeasured, and its subsequent settlement is accounted for within equity.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/8 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

i.2. Akuisisi (lanjutan)

Selisih lebih antara imbalan yang dialihkan, jumlah setiap kepentingan non-pengendali dalam pihak yang diakuisisi, dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepemilikan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi, dibandingkan dengan nilai wajar bagian Grup atas aset bersih teridentifikasi yang diakuisisi, dicatat sebagai *goodwill*. Jika jumlah tersebut lebih kecil dari nilai wajar atas aset bersih teridentifikasi entitas anak yang diakuisisi dan pengukuran atas seluruh jumlah tersebut telah ditelaah, dalam hal pembelian dengan diskon, selisih tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi.

ii. Perubahan kepemilikan atas entitas anak tanpa kehilangan pengendalian

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagiannya atas jumlah tercatat aset neto yang diperoleh dicatat dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

iii. Pelepasan entitas anak

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya ketika pengendalian hilang. Jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain juga direklasifikasi ke laba rugi atau dialihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain.

Sisa investasi pada entitas anak terdahulu diakui sebesar nilai wajarnya. Setiap perbedaan antara nilai tercatat sisa investasi pada tanggal hilangnya pengendalian dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

i. Subsidiaries *(continued)*

i.2. Acquisition *(continued)*

The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interests in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair value of the net identifiable assets of the subsidiary acquired and the measurement of all amounts has been reviewed, in the case of a bargain purchase, the difference is recognised directly in profit or loss.

ii. Changes in ownership interest in subsidiaries without loss of control

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying amount of net assets of the subsidiary is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

iii. Disposal of subsidiaries

When the Group loses control of a subsidiary, the Group derecognises the assets (including any goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts as at the date on which control is lost. Amounts previously recognised in other comprehensive income are also reclassified to profit or loss, or transferred directly to retained earnings if required under other SFAS.

Any investment retained in the former subsidiary is recognised at its fair value. The difference between the carrying amount of the investment retained at the date when the control is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/9 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan, dan biasanya Grup memiliki 20% atau lebih hak suara, tetapi tidak melebihi 50% hak suara. Investasi pada entitas asosiasi dicatat pada laporan keuangan konsolidasian menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama antara beberapa pihak yang melakukan kesepakatan pengendalian bersama yang memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Ventura bersama ini menggunakan metode ekuitas dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

- **Akuisisi**

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan, instrumen ekuitas yang diterbitkan atau liabilitas yang timbul atau diambil alih pada tanggal akuisisi, ditambah biaya yang berhubungan langsung dengan akuisisi.

Goodwill pada akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama merupakan selisih lebih yang terkait dengan biaya perolehan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dengan bagian Grup atas nilai wajar neto aset teridentifikasi dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan dimasukkan dalam jumlah tercatat investasi.

- **Metode ekuitas**

Dalam menerapkan metode ekuitas, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama setelah perolehan diakui dalam laba rugi, dan bagian Grup atas penghasilan komprehensif lain setelah tanggal perolehan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures

An associate is an entity over which the Group has significant influence, but not control, generally accompanied by a shareholding giving rise to voting rights of 20% or greater but not exceeding 50%. Investments in associates are accounted for in the consolidated financial statements using the equity method less impairment losses, if any.

A joint venture is a joint arrangement in which the parties that share joint control have rights to the net assets of the arrangement. Joint ventures are accounted for using the equity method less impairment losses, if any.

- ***Acquisitions***

Investment in an associate or a joint venture is initially recognised at cost. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the assets transferred, equity instruments issued or liabilities incurred or assumed as at the date of exchange, plus costs directly attributable to the acquisition.

Goodwill on acquisition of an associate or a joint venture represents the excess of the cost of acquisition of the associate or joint venture over the Group's share of the fair value of the identifiable net assets of the associate or joint venture and is included in the carrying amount of the investment.

- ***Equity method of accounting***

In applying the equity method of accounting, the Group's share of its associate's or joint venture's post-acquisition profit or loss is recognised in profit or loss and its share of post-acquisition other comprehensive income is recognised in other comprehensive income.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/10 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- Metode ekuitas (lanjutan)

Perubahan dan penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama setelah tanggal perolehan disesuaikan terhadap nilai tercatat investasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi atau ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi atau ventura bersama, termasuk piutang tidak lancar tanpa jaminan, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut, kecuali Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau telah melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama dieliminasi sebesar bagian Grup dalam entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti penurunan nilai atas aset yang ditransfer. Kebijakan akuntansi entitas asosiasi atau ventura bersama akan disesuaikan, apabila diperlukan, agar konsisten dengan kebijakan akuntansi Grup.

Dividen yang akan diterima dari entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jika bukti tersebut ada, maka Grup menghitung besarnya penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah yang terpulihkan dan nilai tercatat atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dan mengakui selisih tersebut pada laba rugi.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- Equity method of accounting *(continued)*

These post-acquisition movements and distributions received from an associate or a joint venture are adjusted against the carrying amounts of the investment.

When the Group's share of the losses of an associate or a joint venture equals or exceeds its interest in the associate or joint venture, including any other unsecured non-current receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has obligations to make or has made payments on behalf of the associate or joint venture.

Unrealised gains on transactions between the Group and its associate or joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate or joint venture. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of impairment of the asset being transferred. The accounting policies of the associate or joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the accounting policies adopted by the Group.

Dividend receivables from an associate or a joint venture are recognised as reductions in the carrying amounts of the investment.

At each reporting date, the Group determines whether there is any objective evidence that the investment in an associate or joint venture is impaired. If any such evidence exists, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate or the joint venture and its carrying amount and recognises the amount in profit or loss.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/11 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)

iv. Akuntansi atas entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

- Pelepasan

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dihentikan pengakuannya apabila Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan. Grup mengukur investasi yang tersisa sebesar nilai wajar. Selisih antara jumlah tercatat investasi yang tersisa pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajarnya diakui dalam laba rugi.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan sebagian atau dilusi yang timbul pada investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama dimana pengaruh signifikan masih dipertahankan diakui dalam laba rugi dan hanya suatu bagian proporsional atas jumlah yang telah diakui sebelumnya pada penghasilan komprehensif lain yang direklasifikasi ke laba rugi.

d. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi ("mata uang fungsional").

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rp" atau "IDR"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan penyajian Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Principles of consolidation *(continued)*

iv. Accounting for associates and joint ventures *(continued)*

- Disposal

An investment in an associate or a joint venture is derecognised when the Group loses significant influence and any retained equity interest in the entity is remeasured at its fair value. The difference between the carrying amount of the retained interest at the date when significant influence is lost and its fair value is recognised in profit or loss.

Gains and losses arising from the partial disposal or dilution of an investment in an associate or joint venture in which significant influence is retained are recognised in profit or loss, and only a proportionate share of the amount previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss, where appropriate.

d. Foreign currency translation

i. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of each of the Group's entities are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the "functional currency").

The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rp" or "IDR"), which is the Company's functional currency and the Group's presentation currency.

ii. Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing as at the date of the transactions.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/12 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

ii. Transaksi dan saldo (lanjutan)

Pada tanggal pelaporan, setiap aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pelaporan diakui dalam laba rugi.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut:

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Foreign currency translation *(continued)*

ii. Transactions and balances *(continued)*

As at the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to reflect the prevailing exchange rates at such date. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

As at the consolidated statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows:

	2021 Kurs tengah/ *Middle rate*)*	2020 Kurs tengah/ *Middle rate*)*	
Yen Jepang (JPY)	124	136	*Japanese Yen (JPY)*
Dolar Amerika (US$)	14,269	14,105	*US Dollars (US$)*
Euro (EUR)	16,126	17,330	*Euro (EUR)*
Dolar Kuwait (KWD)	47,146	46,185	*Kuwait Dollars (KWD)*

*) dalam jumlah penuh

*in full amount *)*

iii. Entitas dalam Grup

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari seluruh entitas anak Grup (tidak ada yang mata uang fungsionalnya mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi) yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajian Perusahaan sebagai berikut:

(a) Aset dan liabilitas yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dijabarkan pada kurs penutup tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tersebut;

iii. Group companies

The results of the operations and financial position of all of the Group's subsidiaries (none of which has the currency of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the Company's presentation currency are translated into the Company's presentation currency as follows:

(a) The assets and liabilities presented in the consolidated statement of financial position are translated at the closing rate at the date of the consolidated statement of financial position;

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/13 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

iii. Entitas dalam Grup (lanjutan)

Hasil usaha operasi dan posisi keuangan dari seluruh entitas anak Grup (tidak ada yang mata uang fungsionalnya mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi) yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Perusahaan, ditranslasikan dalam mata uang penyajian Perusahaan sebagai berikut: (lanjutan)

(b) Penghasilan dan beban untuk setiap laba rugi dijabarkan menggunakan kurs rata-rata (kecuali jika rata-rata tersebut bukan perkiraan wajar efek kumulatif dari kurs yang berlaku pada tanggal transaksi, maka penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs tanggal transaksi);

(c) Seluruh selisih kurs yang timbul diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Pada konsolidasi, selisih kurs yang timbul dari penjabaran setiap investasi neto pada entitas asing dan instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan sebagai lindung nilai atas investasi tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi dijual, selisih kurs terkait direklasifikasi ke laba rugi.

e. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut:

(a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
(i). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
(ii). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor;
(iii). Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

d. Foreign currency translation *(continued)*

iii. Group companies *(continued)*

The results of the operations and financial position of all of the Group's subsidiaries (none of which has the currency of a hyperinflationary economy) that have a functional currency different from the Company's presentation currency are translated into the Company's presentation currency as follows: (continued)

(b) The income and expenses for each item of profit or loss are translated at the average exchange rates (unless this average is not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which case the income and expenses are translated at the rates in force on the dates of the transactions);

(c) All of the resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

On consolidation, exchange differences arising from the translation of any net investments in foreign entities and other financial instruments designated as hedges of such investments are recognised in other comprehensive income. When the investment is sold, the associated exchange differences are reclassified to profit or loss.

e. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 7, "Related Party Disclosures", as follows:

(a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
(i). Has control or joint control over the reporting entity;
(ii). Has significant influence over the reporting entity;
(iii). Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/14 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sesuai yang didefinisikan oleh PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" sebagai berikut: (lanjutan)

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

(i). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
(ii). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
(iii). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
(v). Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
(vi). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
(vii). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

e. Transactions with related parties *(continued)*

The Group has transactions with related parties as defined under SFAS No. 7, "Related Party Disclosures", as follows: (continued)

(b) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions apply:

(i). The entity and the reporting entity are members of the same Group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
(ii). One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Group of which the other entity is a member);
(iii). Both entities are joint ventures of the same third party;
(iv). One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
(v). The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
(vi). The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
(vii). A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

A Government related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government. Government refers to Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/15 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

f. Aset keuangan

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:
- aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi);
- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas apakah penentuan arus kas tersebut semata dari pembayaran pokok dan pinjaman.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

Grup mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

e. Transactions with related parties *(continued)*

Government related entities include entities which are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments being the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Ministry of State-Owned Enterprises ("SOE") as shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

f. Financial assets

i. Classification, recognition and measurement

The Group classifies its financial assets in the following measurement categories:
- *those to be measured at fair value (either through other comprehensive income, or through profit or loss);*
- *those to be measured at amortised cost.*

The classification depends on the entity's business model for managing the financial assets and whether the contractual terms of the cash flows are solely payment of principle and interest.

For assets measured at fair value, gains and losses will either be recorded in profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Group has made an irrevocable election at the time of initial recognition to account for the equity investment at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/16 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

Debt instruments

The subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows where those cash flows represent solely payments of principal and interest is measured at amortised cost. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at amortised cost and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss when the asset is derecognised or impaired. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method.*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/17 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya: (lanjutan)

- FVOCI: Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan, di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam penghasilan/ (beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing - bersih dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.

- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui dalam laba rugi.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

Debt instruments (continued)

The subsequent measurement of debt instruments depends on the Group's business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Group classifies its debt instruments: (continued)

- *FVOCI: Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where the assets' cash flows represent solely payments of principal and interest, are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through other comprehensive income, except for the recognition of impairment gains or losses, interest revenue and foreign exchange gains and losses which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expense). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses are presented in other gains or losses on foreign exchange - net and impairment expenses in other expenses.*

- *Fair value through profit or loss: Assets that do not meet the criteria for amortised cost or FVOCI are measured at fair value through profit or loss. A gain or loss on a debt investment that is subsequently measured at fair value through profit or loss and is not part of a hedging relationship is recognised in profit or loss.*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/18 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

i. Klasifikasi, pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain, tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut.

Instrumen ekuitas

Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan/(kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

ii. Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari investasi tersebut telah jatuh tempo atau telah ditransfer dan Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset.

iii. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrument keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

i. Classification, recognition and measurement *(continued)*

Debt instruments (continued)

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in other comprehensive income, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment.

Equity instruments

Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established.

Changes in the fair value of financial assets at fair value through profit or loss are recognised in other gain/(losses) in the statement of profit or loss as applicable. Impairment losses (and reversal of impairment losses) on equity investments measured at FVOCI are not reported separately from other changes in fair value.

ii. Derecognition

Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the investments have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all the risks and rewards of ownership.

iii. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/19 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset keuangan (lanjutan)

iii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat période pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Grup menerapkan "pendekatan yang disederhanakan" untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh saldo piutang usaha, dan piutang lain-lain dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan dan "pendekatan umum" untuk aset keuangan lainnya. Pendekatan umum termasuk penelahaan perubahan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Penelaahan kerugian kredit ekspektasian termasuk asumsi mengenai risiko gagal bayar dan tingkat kerugian ekspektasian. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa, terkecuali kepada piutang-piutang yang dapat dinilai sendiri kerugian kredit ekspektasiannya.

iv. Saling hapus antar instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Financial assets *(continued)*

iii. Impairment of financial assets *(continued)*

To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and considers reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

The Group applies the "simplified approach" to measuring expected credit losses which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables, other receivables and contract assets without significant financing components and the "general approach" for other financial assets. The general approach incorporates a review for any significant increase in counterparty credit risk since initial recognition. The expected credit loss reviews include assumptions about the risk of default and expected loss rates. To measure the expected credit losses, trade receivables have been grouped based on similar credit risk characteristics and the days past due, with the exception of the receivables which can be assessed at their own rating of expected credit losses.

iv. Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/20 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset tetap

Grup menganalisis fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis tanah dan hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing tanah dan hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomis yang mendasarinya. Jika tanah dan hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Grup, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Grup menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika tanah dan hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Grup menerapkan PSAK No. 16, "Aset tetap" yaitu tanah dan hak atas tanah diakui sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Kelas-kelas aset berikut ini yang diukur menggunakan metode revaluasi:
- Tanah dan hak atas tanah;
- Bangunan umum, waduk dan prasarana;
- Instalasi dan mesin pembangkit;
- Perlengkapan transmisi;
- Perlengkapan distribusi;
- Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik;
- Material cadangan utama.

Kelas aset di atas, disajikan sebesar nilai wajar dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Tanah tidak disusutkan. Tanah dan hak atas tanah tidak didepresiasi. Penilaian terhadap aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"). Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Property, plant and equipment

The Group analyses the facts and circumstances for each type of land and land rights in determining the accounting for each of its land rights so that it accurately represents an underlying economic event or transaction. If the land and land rights do not transfer control of the underlying assets to the Group, but give the right to use the underlying assets, the Group applies the accounting treatment of these transactions as leases under SFAS No. 73, "Leases". If the land and land rights are substantially similar to land purchases, the Group applies SFAS No. 16, "Property, plant and equipment" under which land and land rights are recognised at cost and not depreciated.

Property, plant and equipment are initially recognised at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable to bringing the assets to the location and condition necessary for them to be capable of operating in the manner intended by management.

When applicable, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

The following classes of assets are measured using the revaluation method:
- *Land and land rights;*
- *Buildings, reservoir and infrastructure;*
- *Installations and power plant;*
- *Transmission equipment;*
- *Distribution equipment;*
- *Telecommunication and data processing equipment used for electricity supply;*
- *Major spare parts.*

The classes of asset above are shown at fair value less subsequent depreciation and impairment losses. Land and land rights are not depreciated. Valuation of those assets is performed by external independent valuers which are registered with the Financial Services Authority ("OJK"). Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/21 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset tetap (lanjutan)

Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi aset tetap yang menggunakan model revaluasi dikreditkan pada "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penurunan yang menghapus nilai kenaikan sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "surplus revaluasi aset" sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain termasuk aset yang ditransfer ke asset tidak digunakan dalam operasi; penurunan lainnya dibebankan pada laba rugi.

Aset tetap disusutkan hingga mencapai estimasi nilai sisa dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya sebagai berikut:

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

g. Property, plant and equipment *(continued)*

Assets that do not change significantly in fair value must be re-evaluated at least every 3 (three) years. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset and the net amount is restated to the revalued amount of the property, plant and equipment.

Increases in the carrying amount arising on revaluation of property, plant and equipment that use the revaluation model are credited to "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income. Decreases that offset previous increases of the same asset are debited against "asset revaluation surplus" as part of other comprehensive income including the assets that are transferred to assets not used in operations; all other decreases are charged to profit or loss.

Property, plant and equipment are depreciated to their residual value using the straight-line method over their expected useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan umum, waduk, dan prasarana	10 - 50	*Buildings, reservoir, and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	12 - 40	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	40	*Transmissions equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	10	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	5	*General equipment*
Kendaraan bermotor	5	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	10 - 50	*Major spare parts*

Masa manfaat ekonomis, nilai sisa dan metode penyusutan aset tetap ditelaah, jika diperlukan, setidaknya disesuaikan, pada setiap akhir tahun buku. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laba rugi, ketika perubahan terjadi.

The useful lives, residual values and depreciation methods of property, plant and equipment are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each financial year. The effects of any revisions are recognised in profit or loss when the changes arise.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah yang dapat dipulihkan (Catatan 4h).

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount (Note 4h).

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/22 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset tetap (lanjutan)

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap diakui sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut diakui dalam laba rugi.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset tidak digunakan dalam operasi terdiri dari aset tetap yang belum dimanfaatkan, aset tetap yang akan direlokasi/ditransfer dan aset tetap yang sedang diperbaiki. Aset tetap yang belum dimanfaatkan berasal dari aset pekerjaan dalam pelaksanaan yang telah selesai, namun belum dioperasikan dikarenakan menunggu kelengkapan administrasi.

Aset dalam pembangunan merupakan biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan pembangunan aset tetap. Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan, termasuk biaya pinjaman selama masa pembangunan dari pinjaman yang digunakan untuk pembangunan, beban penyusutan aset tetap yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan dan biaya pengujian ketika aset dapat berfungsi setelah dikurangi penjualan listrik ketika masa uji coba. Aset dalam pembangunan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

g. *Property, plant and equipment* *(continued)*

The costs of repairs and maintenance are charged to profit or loss as incurred. Subsequent costs incurred to add, replace part of, or service an item of property, plant and equipment are recognised as assets if and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

For property, plant and equipment that can no longer be utilised or sold, the carrying amounts are eliminated from the group of property, plant and equipment. The resulting gains or losses on disposals of property, plant and equipment are recognised in profit or loss.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

Assets not used in operations consist of property, plant and equipment that have not been utilised, property, plant and equipment that will be relocated/ transferred, and property, plant and equipment that will be repaired. Property, plant and equipment that have not been utilised come from assets of construction in progress that have been completed but not yet operated due to administrative completeness.

Construction in progress represents the costs that are directly attributable to the construction of property, plant and equipment. Construction in progress is stated at cost, which includes borrowing costs during construction on debts incurred to finance the construction, the depreciation of property, plant and equipment that is used in the construction and the cost of testing whether the asset is functioning properly after deducting sales of electricity during the commissioning period. Construction in progress is transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use. Depreciation is charged from the date on which the assets are ready for use in the manner intended by management.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/23 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya *goodwill*, tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi diuji ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi. Aset non-keuangan selain goodwill yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

Pemulihan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill, diakui jika dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali dilakukan. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi. Pembalikan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset melebihi biaya perolehan disusutkan sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dibalik lagi.

i. Sewa

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka diklasifikasikan sebagai merupakan sewa operasi.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

h. Impairment of non-financial assets

Assets that have an indefinite useful life - for example, goodwill - are not subject to amortisation but are tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value-in-use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Non-financial assets other than goodwill that suffer impairment are reviewed for a possible reversal of the impairment at each reporting date.

Reversal of impairment losses for assets other than goodwill would be recognised, if and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal of impairment losses will be immediately recognised in profit or loss. The reversal should not result in the carrying amount of an asset exceeding what the depreciated cost would have been had the impairment not been recognised as the date of which the imparment was reversed. Impairment losses relating to goodwill would not be reversed.

i. Leases

The Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is classified as an operating lease.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/24 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

Pendapatan sewa dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi saat mendapatkan sewa operasi ditambahkan pada nilai tercatat aset pendasar dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan basis yang sama dengan pendapatan sewa. Aset terkait yang disewakan ditampilkan di laporan posisi keuangan berdasarkan sifatnya.

Grup sebagai penyewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa aset tetap tertentu, yang kontrak sewanya dibuat untuk periode tetap dari dua hingga 20 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi. Kontrak dapat berisi komponen sewa dan non sewa berdasarkan harga relatif yang berdiri sendiri.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- Pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu
- Harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut
- Pembayaran penalti karena penghentian awal sewa, kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

i. Leases *(continued)*

The Group as a lessor *(continued)*

Lease income from operating leases where the Group is a lessor is recognised in income on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating lease are added the carrying amount of the underlying asset and recognised as expense over the lease term on the same basis as lease income. The respective leased assets are included in the statement of financial statements based on their nature.

The Group as a lessee

Determination of whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Group leases certain property, plant and equipment, for which the rental contracts are typically made for fixed periods of two to 20 years but may have extension options. A contract may contain both lease and non lease components based on their relative stand-alone prices.

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date on which the leased asset is available for use by the Group.

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- *Fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable*
- *Variable lease payments that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date*
- *Amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees*
- *The exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option*
- *Payment of penalties for early termination of the lease, unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/25 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Grup, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan, Grup:

- jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal, disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima;
- menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit untuk sewa yang dimiliki oleh Grup, yang tidak memiliki pembiayaan pihak ketiga baru-baru ini;
- membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Group, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

To determine the incremental borrowing rate, the Group:

- *where possible, uses recent third-party financing received by the individual lessee as a starting point, adjusted to reflect changes in financing conditions since third party financing was received;*
- *uses a build-up approach that starts with a risk-free interest rate adjusted for credit risk for leases held by Group, which does not have recent third-party financing;*
- *makes adjustments specific to the lease, e.g. term, country, currency and security.*

The Group is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset.

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/26 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima;
- Biaya langsung awal;
- Biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Aset hak-guna juga mengalami penurunan nilai (Catatan 4h).

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang. Aset bernilai rendah terdiri dari peralatan umum.

Opsi perpanjangan dan terminasi

Opsi perpanjangan dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi perpanjangan dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan nilai residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Leases *(continued)*

The Group as a lessee *(continued)*

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- *The amount of the initial measurement of lease liability;*
- *Any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received;*
- *Any initial direct costs;*
- *Restoration costs.*

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Group is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

The right-of-use assets are also subject to impairment (Note 4h).

Payments associated with short-term leases and leases of low-value assets are recognised on a straight-line basis as an expense in profit or loss. Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets comprise general equipment.

Extension and termination options

Extension and termination options are included in a number of property and equipment leases across the Group. These terms are used to maximise operational flexibility in terms of managing contracts. The majority of the extension and termination options that are held are exercisable only by the Group and not by the respective lessor.

Residual value guarantees

To optimise lease costs during the contract period, the Group sometimes provides residual value guarantees in relation to equipment leases

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/27 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Biaya pinjaman

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

k. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif.

Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

j. Borrowing costs

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

k. Borrowings

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method.

Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pinjaman (lanjutan)

Biaya pinjaman akan dihentikan pengakuannya dari laporan posisi keuangan ketika kewajiban yang tertulis pada kontrak dibatalkan, atau sudah tidak berlaku. Selisih antara nilai tercatat dari liabilitas keuangan yang sudah berakhir atau dialihkan ke pihak lain dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset non kas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, dialui dalam laba rugi sebagai pendapatan lain-lain atau biaya keuangan.

Ketika liabilitas keuangan dinegosiasikan kembali dan entitas mengeluarkan instrumen ekuitas kepada kreditor untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian liabilitas (*debt for equity swap*), keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi yang dicatat sebagai selisih antara jumlah tercatat dari liabilitas keuangan.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek kecuali Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menunda pembayaran liabilitas selama paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

l. Properti investasi

Properti investasi adalah properti (tanah dan hak atas tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Borrowings *(continued)*

Borrowings are removed from the statement of financial position when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred to another party and the consideration paid, including any non-cash assets transferred or liabilities assumed, is recognised in profit or loss as other income or finance costs.

Where the terms of a financial liability are renegotiated and the entity issues equity instruments to a creditor to extinguish all or part of the liability (debt for equity swap), a gain or loss is recognised in profit or loss, which is measured as the difference between the carrying amount of the financial liability and the fair value of the equity instruments issued.

Loans are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer payment of the liability for at least 12 months after the reporting date.

l. Investment properties

Investment properties are properties (land and land rights or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

Investment property is recognised as an asset when, and only when, it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/29 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. **Properti investasi** (lanjutan)

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan (pada tanggal penerima mendapatkan kontrol) atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan. Dalam menentukan nilai pertimbangan dari pelepasan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari variabel pertimbangan, adanya komponen pembiayaan yang signifikan, dan pertimbangan utang ke pembeli (jika ada).

Pengalihan dilaksanakan ke (atau dari) properti investasi hanya ketika adanya perubahan pemakaian. Untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang ditempati pemilik, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan pemakaian tersebut. Jika properti yang ditempati pemilik menjadi properti investasi, Grup mengakui properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum pada aset tetap sampai tanggal perubahaan pemakaian.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Investment properties *(continued)*

An investment property shall be measured initially at its cost, comprising its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group chooses to use the fair value model and measure all of its investment property at fair value. Any gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognised in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on an annual valuation by an independent valuer who holds a recognised and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property, the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/30 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset takberwujud

Piranti lunak komputer

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian overhead yang relevan. Biaya pengembangan piranti lunak komputer diakui sebagai aset yang diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya.

Biaya legal terkait pembaruan tanah dan hak atas tanah

Biaya legal terkait dengan pembaruan tanah dan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum tanah dan hak atas tanah.

n. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

o. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank, dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

p. Persediaan

Persediaan suku cadang, bahan bakar, minyak pelumas, perlengkapan dan bahan pendukung dinilai dengan harga perolehan dikurangi dengan provisi persediaan usang dan bergerak lambat. Harga perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Provisi persediaan usang dan bergerak lambat ditentukan berdasarkan estimasi penggunaan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada masa mendatang. Persediaan bahan pemeliharaan dibebankan ke beban operasi pada periode penggunaan bahan tersebut.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

m. Intangible assets

Computer software

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets. Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads. Computer software development costs recognised as assets are amortised using the straight-line method over their estimated useful lives.

Legal costs to renew land and land rights

Legal costs related to renewal of land and land rights are recognised as intangible assets and amortised over the period of the land and land rights.

n. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods benefited using the straight-line method.

o. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

p. Inventories

Spare parts, fuel, lubricants, tools and supplies are valued at cost less a provision for obsolete and slow moving inventory. Cost is determined based on the moving average method. A provision for obsolete and slow moving inventory is determined on the basis of estimated future usage or sale of individual inventory items. Supplies of maintenance materials are charged to operating expense in the period in which they are used.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/31 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban

Pengakuan pendapatan

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;

ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;

v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

***4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

q. Revenue and expense recognition

Revenue recognition

Revenue from contracts with customers

Revenue recognition has to fulfil 5 (five) steps of assessment as follows:

i. Identify contract(s) with a customer;

ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

iii. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;

iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct good or service promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin;

v. Recognise revenue when the performance obligation is satisfied by transferring the promised good or service to the customer (which is when the customer obtains control of that good or service).

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/32 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pengakuan pendapatan (lanjutan)

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- Pada waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Dalam hal kontrak harga tetap, pelanggan membayar jumlah tetap berdasarkan jadwal pembayaran. Jika jasa yang diberikan oleh Grup melebihi pembayaran, maka aset kontrak diakui. Jika pembayaran melebihi jasa yang diberikan, liabilitas kontrak diakui.

Penjualan tenaga listrik

Pendapatan penjualan listrik diakui berdasarkan pemakaian energi listrik (kWh) yang dipasok kepada PLN dengan menggunakan formula tarif yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu ketika listrik dikonsumsi oleh PLN.

Pendapatan listrik termasuk estimasi nilai listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan dari tanggal pembacaan meter terakhir mereka dan periode pelaporan. Pendapatan yang belum ditagih yang masih harus dibayar diakui sebagai aset kontrak dan dicadangkan pada bulan berikutnya ketika penagihan aktual terjadi. Pendapatan diakui berdasarkan jasa aktual yang diberikan sampai akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total jasa yang akan diberikan karena pelanggan menerima dan mengkonsumsi manfaatnya secara bersamaan.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

q. *Revenue and expense recognition* *(continued)*

Revenue recognition *(continued)*

Revenue from contracts with customers (continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:
- *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

In the case of fixed-price contracts, the customer pays the fixed amount based on a payment schedule. If the services rendered by the Group exceed the payment, a contract asset is recognised. If the payments exceed the services rendered, a contract liability is recognised.

Sale of electricity

Revenue from the sale of electricity is recognised based on electricity usage (kWh) to PLN using the tariff formula stipulated in the power purchase agreements.

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time when electricity is consumed by PLN.

Electricity revenue includes an estimated value of the electricity consumed by customer from the date of their last meter reading and the reporting period. Accrued billed revenues are recognised as contract assets and are reserved in the following month when actual biiling occurs. Revenue is recognised based on the actual service provided to the end of the reporting period as a proportion of the total services to be provided because the customers receive and consume the benefits simultaneously.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/33 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Aset keuangan dari konsesi jasa

Perusahaan mengadakan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBTL") dengan PLN. PJBTL antara PLN dan Grup memenuhi definisi perjanjian konsesi jasa dimana PLN bertindak sebagai pemberi dan Grup bertindak sebagai operator. Grup setuju untuk merancang, membiayai, membangun, memiliki dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik ("infrastruktur") dan menyerahkan listrik yang dihasilkan kepada PLN dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam PJBTL. Infrastruktur digunakan selama masa manfaatnya untuk tujuan pengaturan konsesi jasa. Grup tidak mengakui infrastruktur sebagai aset tetap tetapi mengakuinya sebagai aset keuangan, karena Grup memiliki hak tanpa syarat untuk menerima uang tunai dari PLN melalui pembayaran kapasitas berdasarkan PJBTL. Aset keuangan dicatat sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi" sesuai dengan PSAK No. 71.

Pendapatan jasa pemeliharaan dan operasi dan pembangunan pembangkit tenaga listrik.

Grup mengakui pendapatan atas kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dalam sepanjang waktu hanya jika Grup dapat mengukur dengan andal atas penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tertentu, Grup mungkin tidak dapat mengukur hasil atas kewajiban pelaksanaan secara wajar, tetapi Grup berekspektasi untuk memulihkan biaya yang timbul dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan. Dalam keadaan tersebut, Grup mengakui pendapatan hanya sebatas biaya yang timbul sampai saat yang dapat mengukur hasil kewajiban pelaksanaan secara wajar.

Pendapatan jasa diakui atas dasar pekerjaan yang diselesaikan dalam sepanjang waktu pada saat jasa tersebut diberikan kepada pelanggan.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

q. Revenue and expense recognition *(continued)*

Financial assets from service concession

The Company entered into Power Purchase Agreement ("PPA") with PLN. The PPA between PLN and the Group meets the definition of a service concession arrangement where PLN acts as a grantor and the Group acts as the operator. The Group agrees to design, finance, construct, own and operate a power generation facility ("infrastructure") and to deliver the generated electricity to PLN in accordance with terms and conditions as agreed in the PPA. The infrastructure is used for its entire useful life for the purpose of the service concession arrangement. Under service concession accounting, the Group does not recognise the infrastructure as property, plant and equipment but recognises it as a financial asset, as the Group has an unconditional right to receive cash from PLN through the capacity payments under the PPA. The financial asset is accounted for as "financial assets held at amortised cost" in accordance with SFAS No. 71.

Rendering of services on maintenance and operation and power plant construction.

The Group recognises revenue for a performance obligation satisfied over time only if the Group can reasonably measure its progress towards the complete satisfaction of the performance obligation. In some circumstances, the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation, but the Group expects to recover the costs that have been incurred in satisfying the performance obligation. In those circumstances, the Group recognises revenue only to the extent of the costs that have been incurred until such a time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Revenue from services is recognised on the basis of the work completed over time as the services are rendered to the customers.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Komponen pembiayaan

Grup tidak memperkirakan adanya kontrak di mana jangka waktu antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan pembayaran oleh pelanggan melebihi satu tahun. Akibatnya, Grup tidak menyesuaikan harga transaksi apa pun dengan nilai waktu uang.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

r. Penghasilan bunga

Pendapatan bunga dari aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari pendapatan lain.

Penghasilan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Ketika pinjaman atau piutang mengalami penurunan nilai, Grup mengurangi nilai tercatat pinjaman dan piutang tersebut menjadi jumlah terpulihkannya, yakni estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan berdasarkan suku bunga efektif awal dari instrumen tersebut, dan terus mengamortisasi diskonto sebagai penghasilan keuangan. Penghasilan bunga atas pinjaman yang diberikan dan piutang yang mengalami penurunan nilai diakui menggunakan suku bunga efektif awal.

Pendapatan bunga disajikan sebagai pendapatan keuangan yang diperoleh dari aset keuangan yang dimiliki untuk tujuan pengelolaan kas. Pendapatan bunga lainnya dimasukkan ke dalam pendapatan lain.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

q. Revenue and expense recognition *(continued)*

Financing component

The Group does not expect to have any contracts where the period between the transfer of the promised goods or services to the customer and payment by the customer exceeds one year. As a consequence, the Group does not adjust any of the transaction prices for the time value of money.

Expense recognition

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

r. Interest income

Interest income on financial assets at amortised cost calculated using the effective interest method is recognised in the statement of profit or loss as part of other income.

Interest income is recognised using the effective interest method. When a loan or receivable is impaired, the Group reduces the carrying amount to its recoverable amount, being the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate of the instrument, and continues to amortise the discount as finance income. Interest income on impaired loans and receivables is recognised using the original effective interest rate.

Interest income is presented as finance income where it is earned from financial assets that are held for cash management purposes. Any other interest income is included in other income.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja

Imbalan pascakerja

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi dari syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program pensiun yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Grup harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja") (sebelum 1 Januari 2021: Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU Ketenagakerjaan")) atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program imbalan pasti.

Sehubungan dengan program imbalan pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian setara dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Imbalan pascakerja terdiri dari imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

s. *Employee benefits*

Post-employment benefits

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Group pays fixed contributions into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan. Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive upon retirement, which is usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with Law No. 11/2020 on Job Creation (the "Job Creation Law") (before 1 January 2021: Labour Law No. 13/2003 (the "Labour Law")), or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA"), whichever is higher. Since the Job Creation Law or Labour Law or the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Job Creation Law or Labour Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is equivalent to the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting year less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Post-employment benefits consist of severance benefits and employment award.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/36 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi Pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui pada saat kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada tahun dimana beban tersebut terjadi. Akumulasi saldo pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Untuk program iuran pasti, Grup membayar iuran kepada dana pensiun yang dikelola oleh publik atau swasta, dengan dasar wajib, kontraktual dan sukarela. Grup tidak memiliki kewajiban membayar lebih lanjut jika iuran tersebut telah dibayarkan. Iuran tersebut diakui sebagai beban imbalan kerja ketika jatuh tempo. Iuran dibayar dimuka diakui sebagai aset sepanjang pengembalian dana atau pengurangan pembayaran masa depan dimungkinkan.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan imbalan pascakerja lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja. Nilai imbalan yang diberikan didasari pada PKB Grup.

Cuti besar diberikan kepada karyawan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun terus menerus.Tunjangan kecelakaan dinas diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan dinas. Bantuan kematian diberikan kepada ahli waris apabila karyawan meninggal dunia bukan karena kecelakaan dinas. Penghargaan kesetiaan kerja diberikan setiap delapan tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 16 tahun terus menerus.

4. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

s. Employee benefits *(continued)*

Post-employment benefits (continued)

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of high quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating the terms of the related pension obligations. When there is no deep market for such bonds, the market rates of Government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss. Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised when the curtailment or settlement occurs.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in the statement of other comprehensive income in the year in which they arise. The accumulated remeasurements balance is reported in retained earnings.

For defined contribution plans, the Group pays contributions to public or private pension plans on a mandatory, contractual or voluntary basis. The Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are recognised as employee benefit expenses when they become due. Prepaid contributions are recognised as an asset to the extent that a cash refund or reduction in the future payments is available.

Other long-term benefits

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefit, death benefit and loyalty benefit. The benefit is paid based on the Group's CLA.

Long leave allowance is given to employees who have worked for at least six years continuously. Disability benefit is provided to employees who have a work accident. Death benefit is provided to the heirs whether or not the employee passes away as a result of a work accident. Loyalty benefit is given every eight years for employees who have worked for 16 years continuously.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/37 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti.

Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja dibayarkan ketika pekerja diberhentikan, atau ketika pekerja menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih dahulu dari: (i) ketika Grup tidak bisa lagi membatalkan penawaran pesangon; dan (ii) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam lingkup PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" dan melibatkan pembayaran pesangon pemutusan kontrak kerja. Dalam hal penawaran pengunduran diri secara sukarela, pesangon pemutusan kontrak kerja diukur berdasarkan ekspektasi jumlah karyawan yang menerima penawaran tersebut. Pesangon pemutusan kontrak kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

t. Utang usaha

Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (atau dalam siklus operasi normal, jika lebih lama). Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Employee benefits *(continued)*

Other long-term benefits (continued)

Long-term benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. The long-term employee benefits liabilities recognised in the consolidated statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation.

Termination benefits

Termination benefits are payable when employment is terminated by the Group before the normal retirement date, or when an employee accepts voluntary redundancy in exchange for certain benefits. The Group recognises termination benefits at the earlier of the following dates: (i) when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and (ii) when the Group recognises costs for a restructuring that are within the scope of SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" and involve the payment of termination benefits. In the case of an offer made to encourage voluntary redundancy, the termination benefits are measured based on the number of employees expected to accept the offer. Benefits falling due more than 12 months after the reporting date are discounted to their present value.

t. Trade payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Accounts payable are classified as current liabilities if payment is due within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer). If not, they are presented as non-current liabilities

Trade payables are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/38 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi diukur pada nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat diskonto sebelum pajak, yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan liabilitas tersebut. Peningkatan provisi sehubungan dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan.

Jika sebagaian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, maka penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti akan diterima jika entitas menyelesaikan kewajiban. Penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi.

v. Pajak penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laba rugi, kecuali jika pajak itu terkait dengan kejadian atau transaksi yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, beban pajak tersebut masing-masing diakui pada penghasilan komprehensif lain atau secara langsung dicatat ke ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan dan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi atas peraturan pajak yang berlaku. Jika perlu, manajemen menentukan provisi dibentuk berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar pada otoritas pajak.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

u. Provisions

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event and it is probable that the Group will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The provision is measured at the present value of the management's best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognised as interest expense.

Where some or all of the expenditure required to settle a provision is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recognised when, and only when, it is virtually certain that reimbursement will be received if the entity settles the obligation. The reimbursement shall be treated as a separate asset. The amount recognised for the reimbursement shall not exceed the amount of the provision.

v. Income tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax expense is recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws that have been enacted as at the reporting date and computed using the prevailing tax rates. Management periodically evaluates the positions taken in Annual Tax Returns with respect to situations in which the applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes a provision where appropriate on the basis of the amounts expected to be paid to the tax authorities.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/39 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Pajak penghasilan (lanjutan)

Untuk pendapatan yang menjadi subjek pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan akuntansi yang diakui dan disajikan dalam sebagai bagian dari akun beban operasional pada tahun berjalan dikarenakan pajak tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai pajak penghasilan.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika timbul dari pengakuan awal *goodwill*; atau pada saat pengakuan awal suatu aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi maupun laba rugi kena pajak. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada akhir tahun pelaporan dan diharapkan diterapkan jika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasikan atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat digunakan.

Liabilitas pajak tangguhan tidak diakui untuk perbedaan temporer antara nilai tercatat dan dasar pengenaan pajak dari investasi pada operasi asing ketika perusahaan bisa mengontrol periode pengembalian dari perbedaan temporer dan ada kemungkinan bahwa perbedaan itu tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus jika terdapat hak yang berkekuatan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini.

w. Distribusi dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dalam periode ketika pembagian dividen telah diumumkan.

4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Income tax *(continued)*

For income which is subject to final tax, tax expenses are recognised proportionally with the accounting revenue recognised and presented as part of the operating expenses account in the current year as such tax does not satisfy the criteria of income tax.

Deferred income tax is recognised using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill; deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined using the tax rate that has been enacted or substantially enacted at the end of the reporting year and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the temporary differences can be utilised.

Deferred tax liabilities and assets are not recognised for temporary differences between the carrying amount and tax bases of investments in foreign operations where the company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that the differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities.

w. Dividend distributions

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as liabilities in the consolidated financial statements in the period when the dividends are declared.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/40 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal pelaporan, serta jumlah pendapatan dan beban selama tahun pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan peristiwa di masa datang yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Grup telah mengidentifikasi hal-hal berikut dimana diperlukan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut jika menggunakan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan konsolidasian Grup yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 4, Grup telah menentukan hal-hal berikut yang memerlukan pertimbangan signifikan:

Penentuan umur sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Umur sewa dinilai kembali ketika opsi sebenarnya diambil (atau tidak diambil) atau Grup menjadi berkewajiban untuk mengambil (atau tidak mengambil) opsi tersebut. Penilaian kepastian yang wajar hanya direvisi ketika peristiwa signifikan atau perubahan signifikan terjadi, yang mempengaruhi penilaian ini, dan hal tersebut dalam pengendalian penyewa.

5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make estimates, judgements and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the reporting date and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting year. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

The Group has identified the following matters under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the consolidated financial results or financial position of the Group as reported in future years.

Critical judgements in applying accounting policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 4, the Group has identified the following matters under which significant judgments are made:

Determining lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

In determining the lease term, the Group considers all of the facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not to exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

The lease term is reassessed if an option is actually exercised (or not exercised) or the Group becomes obliged to exercise (or not exercise) it. The assessment of reasonable certainty is only revised if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment, and that is within the control of the lessee.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/41 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Kepentingan dalam pengaturan bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Grup memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Grup menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Grup untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut. Secara khusus, Grup mempertimbangkan:

- Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Grup juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
  - bentuk legal dari kendaraan terpisah;
  - persyaratan dari perjanjian kontraktual;
  - fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan. Kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah suatu pengaturan adalah sebuah operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Grup memiliki pengaturan bersama yang terstruktur melalui ventura bersama, lihat Catatan 10 untuk daftar ventura bersama tersebut. Struktur dan persyaratan dari perjanjian kontraktual mengindikasikan bahwa Grup memiliki hak atas aset bersih dari pengaturan bersama tersebut. Grup menilai fakta dan kondisi lain yang berkaitan dengan pengaturan ini dan kesimpulan final dari penilaian yang dilakukan adalah pengaturan tersebut merupakan ventura bersama.

5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Critical judgments in applying accounting policies *(continued)*

Interest in joint arrangements

Judgement is required to determine when the Group has joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Group has determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Group to assess its rights and obligations arising from the arrangement. Specifically, it considers:

- *The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle;*
- *When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Group also considers the rights and obligations arising from:*
  - *the legal form of the separate vehicle;*
  - *the terms of the contractual arrangement;*
  - *other facts and circumstances (when relevant).*

This assessment often requires significant judgement. A different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture may materially impact the consolidated financial statements.

The Group has joint arrangements which are structured through joint ventures, see Note 10 for the list of joint ventures. These structures and the terms of the contractual arrangements indicate that the Group has rights to the net assets of the arrangements. The Group also assessed the other facts and circumstances relating to these arrangements and concluded final conclusions were that the arrangements are joint ventures.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/42 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Provisi atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha dan aset keuangan lainnya

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian piutang usaha. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa (misalnya berdasarkan geografi, tipe produk, tipe dan/atau peringkat pelanggan, dan bentuk lain).

Matriks provisi pada mulanya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis Grup yang diobservasi. Grup akan memperbaharui matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan infomasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika perkiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, perkiraan atas kondisi ekonomi dan kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah kerugian kredit ekspektasian paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Provision for ECL Expected Losses trade receivables and other financial assets

The Group uses a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics (e.g. by geography, product type, customer type and/or rating and other matters).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates and forecast economic conditions and expected credit losses is a significant estimate. The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of a customer's actual default in the future.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/43 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap

Masa manfaat setiap aset tetap, Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan nilai tercatat aset tetap.

Nilai wajar aset tetap dan properti investasi yang menggunakan model revaluasi

Dalam proses penilaian, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Grup dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap dan properti investasi diungkapkan masing-masing dalam Catatan 6 dan 8.

5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Estimated useful lifes of property, plant and equipment

The useful life of each item of the Group's property, plant, and equipment is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment would affect the recorded depreciation expense and the carrying values of property, plant and equipment.

Fair value of property, plant and equipment and investment properties that use the revaluation model

Management, with the assistance of the independent public valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses valuation methods and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Group's data and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use the revaluation model.

Details of the valuation approach and significant data input used in the revaluation of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 6 and 8, respectively.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/44 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Imbalan pascakerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

Pajak penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP"). Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

5. *CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES* *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Post-employment benefits

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and the expected remaining service periods of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions.

Income taxes

The calculations of income tax expense for the Group requires judgements and assumptions in determining the deductibility of certain expenses during the estimation process. All judgements and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxation ("DGT"). As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax positions taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities, can take several years to complete and in some cases it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/45 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Sumber ketidakpastian estimasi (lanjutan)

Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal dan perbedaan temporer, diakui apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat penjualan dan biaya-biaya terkait yang terdapat risiko ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi tersebut akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Sewa – estimasi suku bunga pinjaman inkremental

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan estimasi untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

5. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES *(continued)*

Sources of estimation uncertainty *(continued)*

Income taxes *(continued)*

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward and temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. The assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by the level of sales and the associated costs which are subject to risk and uncertainty and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

Leases – estimating the incremental borrowing rate

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need estimation in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining the incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/46 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP / *6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT*

	2021						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Selisih penilaian kembali/ *Difference arising on revaluation*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan							***At cost***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Tanah	17,237,100	285	-	2,288	143,478	17,383,151	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	7,334,945	6,747	(3,398)	180,379	(551,998)	6,966,675	*Buildings, reservoirs and infrastructures*
Instalasi dan mesin pembangkit	80,742,046	78,388	(368,451)	693,536	(8,830,033)	72,315,486	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	3,126,931	1,971	(3,332)	228,495	949,153	4,303,218	*Transmission equipments*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	140,461	-	-	(5,193)	(40,776)	94,492	*Telecommunication and data processing equipments*
Perlengkapan umum	915,835	25,996	-	2,018	-	943,849	*General equipments*
Kendaraan bermotor	52,975	-	-	-	-	52,975	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	458,435	16,462	-	(145,585)	(78,185)	251,127	*Major spare parts*
Subjumlah	110,008,728	129,849	(375,181)	955,938	(8,408,361)	102,310,973	*Subtotal*
Aset dalam pembangunan	5,071,481	2,072,085	-	(1,209,942)	-	5,933,624	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,822,017	-	(634,207)	112,541	(17,970)	1,282,381	*Assets not used in operation*
Jumlah	116,902,226	2,201,934	(1,009,388)	(141,463)	(8,426,331)	109,526,978	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	582,811	264,854	(3,398)	14,586	(858,853)	-	*Buildings, reservoir and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	4,870,210	2,409,983	(368,451)	115,704	(7,027,446)	-	*Installation and power plants*
Perlengkapan transmisi	183,042	121,980	(3,332)	70,767	(372,457)	-	*Transmission equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	32,002	17,643	-	(1,588)	(48,057)	-	*Telecommunication and data processing equipment*
Perlengkapan umum	512,439	83,010	-	4,555	-	600,004	*General equipment*
Kendaraan bermotor	28,417	8,179	-	(296)	-	36,300	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	26,835	13,463	-	(11,127)	(29,171)	-	*Major spare parts*
Subjumlah	6,235,756	2,919,112	(375,181)	192,601	(8,335,984)	636,304	*Subtotal*
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,564,384	105,780	(634,207)	132,345	(17,970)	1,150,332	*Assets not used in operation*
Jumlah	7,800,140	3,024,892	(1,009,388)	324,946	(8,353,954)	1,786,636	*Total*
Penurunan untuk provisi	3,619	-	-	-	7,068	10,687	*Impairment for provision*
Jumlah tercatat	**109,098,467**					**107,729,655**	***Net carrying value***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/47 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan) / 6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (continued)*

	2020						
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penyesuaian sehubungan penerapan PSAK No. 73/ *Adjustments upon implementation of SFAS No. 73*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan							***At cost***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Tanah	17,163,834	-	33,022	-	40,244	17,237,100	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	7,108,791	-	2,964	-	223,190	7,334,945	*Buildings, reservoirs and infrastructures*
Instalasi dan mesin pembangkit	78,319,821	-	106,133	-	2,316,092	80,742,046	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	2,877,243	-	8,222	-	241,466	3,126,931	*Transmissions equipments*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	107,164	-	7,457	-	25,840	140,461	*Telecommunications and data processing equipments*
Perlengkapan umum	794,624	-	48,089	-	73,122	915,835	*General equipments*
Kendaraan bermotor	41,177	-	11,626	-	172	52,975	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	273,129	-	10,396	-	174,910	458,435	*Major spare parts*
Subjumlah	106,685,783	-	227,909	-	3,095,036	110,008,728	*Subtotal*
Aset sewaan							*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	21,414	(21,414)	-	-	-	-	*Installation and power plants*
Aset dalam pembangunan	4,909,020	-	4,091,097	-	(3,928,636)	5,071,481	*Construction in progress*
Aset tidak digunakan dalam operasi	2,537,714	-	-	(866,136)	150,439	1,822,017	*Assets not used in operation*
Jumlah	114,153,931	(21,414)	4,319,006	(866,136)	(683,161)	116,902,226	*Total*
Akumulasi penyusutan							***Accumulated depreciation***
Pemilikan langsung							*Direct acquisitions*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	325,055	-	256,893	-	863	582,811	*Buildings, reservoirs and infrastructures*
Instalasi dan mesin pembangkit	2,579,134	-	2,373,374	-	(82,298)	4,870,210	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	119,536	-	121,453	-	(57,947)	183,042	*Transmissions equipments*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	16,146	-	16,500	-	(644)	32,002	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	420,515	-	87,092	-	4,832	512,439	*General equipments*
Kendaraan bermotor	23,072	-	6,115	-	(770)	28,417	*Motor vehicles*
Material cadangan utama	8,493	-	9,759	-	8,583	26,835	*Major spare parts*
Subjumlah	3,491,951	-	2,871,186	-	(127,381)	6,235,756	*Subtotal*
Aset sewaan							*Leased assets*
Instalasi dan mesin pembangkit	312	(312)	-	-	-	-	*Installation and power plants*
Aset tidak digunakan dalam operasi	1,319,112	-	35,468	(27,528)	237,332	1,564,384	*Assets not used in operation*
Jumlah	4,811,375	(312)	2,906,654	(27,528)	109,951	7,800,140	*Total*
Penurunan untuk provisi	3,619	-	-	-	-	3,619	*Impairment for provision*
Jumlah tercatat	**109,338,937**					**109,098,467**	***Net carrying value***

Sebagai dampak penerapan awal PSAK No. 73, "Sewa", Grup mereklasifikasikan aset sewaan ke aset hak guna pada 1 Januari 2020 dengan nilai perolehan sebesar Rp21.414 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp312 (Catatan 7).

As a result of the initial implementation of SFAS No. 73, "Leases", the Group reclassified leased assets to right-of-use assets on 1 January 2020 amounting to Rp21,414 and accumulated depreciation amounting to Rp312 (Note 7).

Beban penyusutan disajikan sebagai bagian dari beban usaha dan (beban)/pendapatan lain-lain - bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian masing-masing sebesar Rp2.919.112 dan Rp105.780 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (2020: Rp2.871.186 dan Rp35.468).

Depreciation expense was presented as part of operating expenses and other (expenses)/income - net in the consolidated statement of profit or loss and amounted to Rp2,919,112 and Rp105,780 for the year ended 31 December 2021 (2020: Rp2,871,186 and Rp35,468).

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/48 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Grup memiliki beberapa bidang tanah dengan hak legal berupa Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan ("HGB"). Hak Pakai tidak mempunyai jangka waktu sedangkan HGB Grup jatuh tempo antara tahun 2022 sampai dengan 2047, tetapi dapat diperpanjang. Grup juga mempunyai beberapa bidang tanah yang sedang dalam proses perpanjangan HGB dan pengurusan balik nama menjadi atas nama Grup.

Instalasi mesin pembangkit serta perlengkapan transmisi diasuransikan kepada beberapa perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("AJI"), pihak berelasi dan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama terhadap risiko kebakaran dan kemungkinan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar US$5.168.046.209 (setara dengan Rp73.742.903) pada tanggal 31 Desember 2021 (2020: US$5.043.943.390 atau setara dengan Rp71.145.620). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Aset sewaan merupakan pipa penyaluran gas dan operasi pemeliharaan *gas compresor package (GCP)* 1 dan 2 Pesanggaran berdasarkan perjanjian dengan PT Perta Daya Gas dalam bentuk sewa pembiayaan. Berdasarkan PSAK No. 73 "Sewa" yang berlaku mulai 1 Januari 2020, maka aset sewaan tersebut direklas ke Aset Hak Guna adalah sebesar Rp21.102 (Catatan 7).

Pada tahun 2021 dan 2020, manajemen mengkategorikan beberapa aset tetap menjadi aset tidak digunakan dalam operasi berdasarkan pertimbangan tingkat efisiensi dan keekonomisan aset tersebut. Nilai aset tersebut telah disesuaikan ke nilai terpulihkan. Penyesuaian tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan mengurangi jumlah akumulasi surplus revaluasi dalam ekuitas.

Pada tanggal 31 Desember 2021, manajemen melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") dalam laporan No. 00112/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, penilai Independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

***6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT** (continued)*

The Group owns several pieces of land with Rights to Use and Building Use Rights ("HGB"). Rights to Use have no expiration date while HGB will expire from 2022 to 2047, but they are renewable by the Group. The Group also has several pieces of land which are still in an extension process and in the process of transfer of certificate to the name of the Group.

Power plant installations and transmission equipment were insured with several insurance companies against fire and other possible risks with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("AJI"), a related party and PT Asuransi Tugu Kresna Pratama with insurance coverage of US$5,168,046,209 (equivalent to Rp73,742,903) as at 31 December 2021 (2020: US$5,043,943,390 equivalent to Rp71,145,620). Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured.

Leased assets represents gas pipelines and maintenance operations of gas compressor package (GCP) 1 and 2 Pesanggaran based on an agreement with PT Perta Daya Gas which were accounted for as lease liabilities. Based on SFAS No. 73 "Leases", that is effective from 1 January 2020, the leased asset is reclassified to Right-of-Use Assets amounting to Rp21,102 (Note 7).

In 2021 and 2020, management categorised several items of property, plant and equipment into assets not used in operations based on the consideration of the efficiency and the economy of the assets. The amount of the assets is adjusted to their recoverable amount. The adjustment is recognised in other comprehensive income and reduces the amount of accumulated surplus revaluation in the equity.

On 31 December 2021, the Group performed a revaluation of the fair value of its property, plant and equipment which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Partners ("KJPP RHR"), an independent valuer registered in the Ministry of Finance and OJK, in report No. 00112/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 dated 30 March 2022.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/49 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel di bawah ini menganalisis aset tetap yang dicatat pada nilai wajar berdasarkan hirarki nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 68 berdasarkan valuasi tanggal 31 Desember 2021. Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

The table below analyses the fixed assets that have been recorded at fair value, based on the fair value hierarchy in SFAS No. 68 based on valuation as at 31 December 2021. The different levels of fair value are defined as follows:

	Tingkat pengukuran nilai wajar 31 Desember 2021 menggunakan/ *Fair value measurement at 31 December 2021 by level*				
	Tingkat 1/ *Level 1*	Tingkat 2/ *Level 2*	Tingkat 3/ *Level 3*	Jumlah/ *Total*	
Pengukuran nilai wajar berulang					***Recurring fair value measurement***
Tanah	-	189,192	17,193,959	17,383,151	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	-	76,234	6,890,441	6,966,675	*Buildings, reservoirs and infrastructures*
Instalasi dan mesin pembangkit	-	-	72,315,486	72,315,486	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	-	-	4,303,218	4,303,218	*Transmissions equipments*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	-	94,492	94,492	*Telecommunications and data processing equipments*
Material cadang utama	-	-	251,127	251,127	*Major spare parts*
Jumlah	**-**	**265,426**	**101,048,723**	**101,314,149**	***Total***

Perbedaan tingkatan nilai wajar dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2);
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

The different levels of fair value are defined as follows:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2);*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

Tidak terdapat aset tetap yang bisa digolongkan ke dalam nilai wajar Tingkat 1.

There were no fixed assets which could be classified as Level 1 fair value.

Tidak terdapat transfer antara Tingkat 1 dan Tingkat 2 selama tahun berjalan.

There were no transfers between Levels 1 and 2 during the years.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/50 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dan hak atas tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan, sedangkan untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:

a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto dan kapitalisasi;
e. Biaya pembuatan baru per meter persegi;
f. Tingkat depresiasi;
g. Biaya operasional;
h. Keuntungan pengembangan;
i. Indeks kemahalan konstruksi.

Rekonsiliasi atas saldo awal terhadap saldo akhir dari pengukuran nilai wajar dengan menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

The Level 2 fair value of land and land rights is calculated using the market approach and income approach, while building value is calculated using the cost approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of the following:

a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount and capitalisation rate;
e. Replacement cost new per square metre;
f. Depreciation rate;
g. Operational expense;
h. Developers margin;
i. Construction cost index.

Reconciliation of the beginning balances to the closing balances of the fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) is as follows:

	1 Januari/ *January* 2021	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Jumlah yang diakui dalam laba rugi/ *Amount recognised in profit or loss*		Keuntungan/ (kerugian) yang diakui pada penghasilan komprehensif lain/ *Gain/(losses) recognised in other comprehensive income*	31 Desember 2021/ *31 December 2021*	
				Depresiasi/ *Depreciation*	*Penurunan nilai/ Impairment*			
Tanah	17,047,312	285	1,960	-	-	144,402	17,193,959	*Land*
Bangunan umum, waduk dan prasarana	6,690,758	6,747	141,950	(264,854)	(25)	315,865	6,890,441	*Building, reservoirs and infrastructures*
Instalasi dan mesin pembangkit	75,871,836	78,388	578,579	(2,409,983)	(747)	(1,802,587)	72,315,486	*Installations and power plants*
Perlengkapan transmisi	2,943,889	1,971	158,639	(121,980)	(911)	1,321,610	4,303,218	*Transmissions equipment*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	108,268	-	(3,413)	(17,643)	-	7,280	94,492	*Telecommunications and data processing equipments*
Material cadangan utama	431,600	16,462	(130,502)	(13,463)	(3,956)	(49,014)	251,127	*Major spare parts*
Jumlah	**103,093,663**	**103,853**	**747,213**	**(2,827,923)**	**(5,639)**	**(62,444)**	**101,048,723**	***Total***

Nilai wajar Tingkat 3 dihitung dengan menerapkan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya dengan menggunakan input yang tidak dapat diobservasi.

Selain menggunakan input yang berasal dari pasar, KJPP RHR juga menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dari pasar dan menggunakan asumsi khusus terkait dengan jenis aset yang tergolong sebagai properti khusus, seperti pembangkit listrik, dan lainnya.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, kapasitas, usia, lokasi, bentuk dan spesifikasi, hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

The Level 3 fair value is calculated through the market approach, income approach, and cost approach by using unobservable inputs.

Other than the data inputs observed from the market, KJPP RHR also used unobservable market data inputs and used special assumptions related to the assets classified as specialised property, such as power plants and others.

Adjustments were made based on size, capacity, age, location, shapes and specifications, land rights and other comparison elements.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/51 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

Informasi mengenai pengukuran nilai wajar yang menggunakan informasi signifikan yang tidak dapat diobservasi (Tingkat 3) adalah sebagai berikut:

Information about fair value measurements using significant unobservable inputs (Level 3) are as follows:

	Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2021/ *Fair value as at 31 December 2021*	Teknik penilaian/ *Valuation technique*	Informasi yang tidak dapat diobservasi/ *Unobservable inputs*	Kisaran input yang tidak dapat diobservasi/ *Range of unobservable inputs*	Hubungan informasi yang tidak dapat diobservasi terhadap nilai wajar/ *Relationship of unobservable inputs to fair value*	
Tanah	17,193,959	Pendekatan pendapatan dengan metode pengembangan lahan/ *The income approach with the land development method*	- Penyesuaian parameter pengembangan/ *Adjustment of parameter development*	60.00% - 80.00%*	-Semakin tinggi koefisien luas bangunan ("KLB") maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher KLB, the higher fair value*	***Land***
			- Data luas dan aspek legal/ *Land area and legal aspects*		-Tanah bersertifikat akan memiliki nilai wajar lebih tinggi/ *Certified land will have higher fair value*	
			- Perubahan peruntukan/ *Zoning changes*		-Peruntukan tanah sekitar mengindikasikan nilai wajar yang lebih tinggi/ *Zoning of neighboring land might have higher fair value*	
Bangunan						***Buildings***
Bangunan umum	2,452,643	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	0.45 - 5.46	-Semakin besar indeks koefisien maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*General buildings*
			- Volume bangunan/ *Building volumes*	60.00% - 70.00%*	-Semakin besar volume maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher building volumes, the higher fair value*	
Waduk dan prasarana	4,402,813	Trending/ *Trending*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	1.00 - 2.27	-Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*Reservoirs and infrastructures*
Jalan dan sepur samping	34,985	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Indeks koefisien/ *Index coefficient*	1.00 - 2.35	-Semakin besar tingkat indeks maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher index coefficient, the higher fair value*	*Roads and rails side*
Instalasi dan mesin pembangkit	72,315,486	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat kemunduran fungsional/ *Functional obsolescence rate*	1.00% - 30.00%	-Semakin besar tingkat penyusutan maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher depreciation rate, the lower fair value*	***Installations and power plants***
			-Tingkat kemunduran ekonomis/ *Economical obsolescence rate*	1.00% - 3.00%	-Semakin besar tingkat penyusutan maka semakin rendah nilai wajar/ *The higher depreciation rate, the lower fair value*	
			- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 2.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	
Perlengkapan transmisi	4,303,218	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	-Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Transmissions equipments***
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	94,492	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.01 - 1.02	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Telecommunications and data processing equipments***
Material cadang utama	251,127	Pendekatan biaya/ *Cost approach*	- Tingkat indeks PPI/ *PPI index rate*	1.00 - 3.00	-Semakin besar tingkat indeks PPI maka semakin tinggi nilai wajar/ *The higher PPI index rate, the higher fair value*	***Major spare parts***

*) kisaran bobot dari input yang tidak dapat diobservasi/*the range of weights of the unobservable input*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/52 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Surplus revaluasi, dikurangi dengan penghasilan final dan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, telah dikreditkan pada penghasilan komprehensif lain dan disajikan sebagai surplus revaluasi aset tetap pada laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Mutasi surplus revaluasi aset tetap yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian adalah sebagai berikut:

6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

The revaluation surplus, less final income and related deferred tax income, has been credited to other comprehensive income and is presented as a revaluation surplus of property, plant and equipment in the consolidation statements of changes in equity.

The movements of property, plant and equipment revaluation surplus which are presented in the consolidated statements of changes in equity are as follows:

	2021	2020	
Saldo awal tahun	139,178,557	139,760,858	*Balance at beginning of year*
Penurunan surplus revaluasi	(79,445)	-	*Decrease on revaluation surplus*
Reklasifikasi surplus revaluasi ke saldo laba atas aset tetap yang telah dijual	(403,624)	(746,540)	*Reclassification of revaluation surplus to retained earnings from disposals of property, plant, and equipment*
	(483,069)	(746,540)	
Manfaat pajak terkait	106,275	164,239	*Related income tax benefit*
Saldo akhir tahun	**138,801,763**	**139,178,557**	***Balance at end of year***

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap dengan nilai tercatatnya, selain aset yang menggunakan model revaluasi.

There is no significant difference between the fair value and carrying value of fixed assets other than assets that have applied the revaluation model.

Aset dalam pembangunan

Akun ini merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pembangunan sarana kelistrikan dan perbaikan/renovasi utama pembangkit-pembangkit, sebagai berikut:

Construction in progress

This account represents costs incurred in relation to the construction of power supply facilities and major repairs/renovation, as follows:

	2021	2020	
Pembangkit tenaga:			*Power plants:*
Gas/uap	4,204,196	3,732,312	*Gas/steam power*
Gas	876,509	480,235	*Gas power*
Air	494,747	535,461	*Hydro power*
Panas bumi	131,363	103,758	*Geothermal power*
Uap	98,553	125,374	*Steam power*
Diesel	50,775	11,937	*Diesel power*
Lain-lain	77,481	82,404	*Other*
Jumlah	**5,933,624**	**5,071,481**	***Total***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/53 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam pembangunan (lanjutan)

Setelah penyelesaian suatu proyek, masih perlu dilakukan sejumlah pengujian-pengujian sebelum proyek pekerjaan dalam pelaksanaan menerima sertifikat laik operasi.

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

6. *PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT* *(continued)*

Construction in progress *(continued)*

After completion of a project, there are still a number of tests that need to be performed during the commissioning phase before the projects are certified for operations.

Borrowing costs which were capitalised to construction in progress are as follows:

	2021	2020	
Bunga pinjaman	13,008	9,033	*Interest expense*
Keuntungan/(kerugian) kurs mata uang asing	16	(337)	*Gains/(losses) on foreign exchange*
Jumlah	**13,024**	**8,696**	***Total***

Biaya pinjaman dikapitalisasi pada tingkat bunga rata-rata tertimbang dari pinjaman umum adalah sebesar 0,87% pada tahun 2021 (2020: 1,30%).

Borrowing costs were capitalised at the weighted average rate of general borrowings of 0.87% in 2021 (2020: 1.30%).

Aset tidak digunakan dalam operasi

Aset tidak digunakan dalam operasi meliputi aset tetap yang akan direlokasi, yang sementara belum digunakan dalam operasi, dan aset tetap akan diperbaiki.

Aset tertentu yang tidak digunakan dalam operasi dijual dengan harga setelah pajak Rp5.444 pada tahun 2021 dan Rp1.901.218 pada tahun 2020 dengan keuntungan penjualan aset tersebut sebesar Rp5.444 setelah pajak dan Rp1.062.610 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Berdasarkan penelaahan manajemen, kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan aset tetap Grup adalah cukup untuk mencerminkan jumlah terpulihkannya.

Assets not used in operations

Assets not used in operations comprised property, plant and equipment to be relocated, those temporarily not in used in operations and assets to be repaired.

Certain assets not used in operations were sold with a selling price after tax of Rp5,444 in 2021 and Rp1,901,218 in 2020 with gain on sales of assets which amounted to Rp5,444 after tax and Rp1,062,610 for the years ended 31 December 2021 and 2020, respectively.

Based on management's assessment, the impairment loss recognised in the consolidated financial statements in respect of the Group's property, plant and equipment is adequate to reflect its recoverable amount.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/54 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET HAK GUNA / *7. RIGHT-OF-USE ASSETS*

	2021				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan					***At cost***
Tanah	769,440	-	-	769,440	*Land*
Bangunan umum waduk Dan prasarana	26,136	90,190	(21,291)	95,035	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	3,668,652	-	-	3,668,652	*Installations and power plants*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	1,582	-	(1,582)	-	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	2,924	-	-	2,924	*General equipment*
Kendaraan bermotor	152,122	66,326	(74,475)	143,973	*Motor vehicles*
Jumlah	4,620,856	156,516	(97,348)	4,680,024	*Total*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Tanah	21,145	21,145	-	42,290	*Land*
Bangunan umum waduk Dan prasarana	15,999	28,028	(23,118)	20,909	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	618,117	617,492	(312)	1,235,297	*Installations and power plants*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	1,267	317	(1,584)	-	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	747	748	-	1,495	*General equipment*
Kendaraan bermotor	59,188	57,795	(44,726)	72,257	*Motor vehicles*
Jumlah	716,463	725,525	(69,740)	1,372,248	*Total*
Jumlah tercatat	**3,904,393**			**3,307,776**	***Net carrying value***

	2020					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Dampak penyesuaian atas penerapan awal PSAK 73/ *Adjustment upon initial application of SFAS No. 73*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Biaya perolehan						***At cost***
Tanah	-	1,042,200	161,602	(434,362)	769,440	*Land*
Bangunan umum waduk dan prasarana	-	25,264	872	-	26,136	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	21,414	2,837,340	908,465	(98,567)	3,668,652	*Installations and power plants*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	1,790	-	(208)	1,582	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	-	3,603	-	(679)	2,924	*General equipment*
Kendaraan bermotor	-	133,923	36,859	(18,660)	152,122	*Motor vehicles*
Jumlah	21,414	4,044,120	1,107,798	(552,476)	4,620,856	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Tanah	-	21,145	-	-	21,145	*Land*
Bangunan umum waduk dan prasarana	-	15,871	128	-	15,999	*Buildings, reservoirs and infrastructure*
Instalasi dan mesin pembangkit	312	617,805	-	-	618,117	*Installations and power plants*
Perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi	-	1,267	-	-	1,267	*Telecommunications and data processing equipment*
Perlengkapan umum	-	747	-	-	747	*General equipment*
Kendaraan bermotor	-	55,261	3,927	-	59,188	*Motor vehicles*
Jumlah	312	712,096	4,055	-	716,463	*Total*
Jumlah tercatat	**21,102**				**3,904,393**	***Net carrying value***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/55 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. ASET HAK GUNA (lanjutan)

Pada 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 73 "Sewa" dengan mengakui aset hak guna sebesar Rp 4.044.120. Grup juga melakukan reklasifikasi aset tetap dengan harga perolehan sebesar Rp21.414 dengan akumulasi depresiasinya sebesar Rp312 ke Aset Hak Guna (Catatan 6).

Beban penyusutan untuk aset hak guna disajikan sebagai bagian dari beban usaha dalam laporan laba rugi konsolidasian sebesar Rp725.525 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 (2020: Rp712.096)

Berdasarkan penelahaan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai Aset Hak Guna secara siginifikan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

***7. RIGHT-OF-USE ASSETS** (continued)*

On 1 January 2020, the Group implemented SFAS No. 73 "Leases" by recognising the right-of-use asset of Rp4,044,120. Further the Group also reclassified property, plant and equipment with cost of assets amounting to Rp21,414 and its accumulated depreciation amounting to Rp312 to right-of-use assets (Note 6).

Depreciation expense for right-of-use assets was presented as part of operating expenses in the consolidated statement of profit or loss amounted to Rp725,525 for the year ended 31 December 2021 (2020: Rp712,096).

Based on management's assessment, there were no events or changes in circumstances that may significantly impair the value of Right-of-Use assets as at 31 December 2021 and 2020.

8. PROPERTI INVESTASI

Akun ini merupakan tanah milik Perusahaan yang terletak di Pemaron, Pesanggaran – Bali, Ngesrep – Semarang, Pasuruan – Jawa Timur dengan hak legal berupa HGB, jatuh tempo antara tahun 2024 sampai dengan 2043. Pada tanggal 31 Desember 2021, tanah tersebut akan disewakan kepada pihak ketiga atau akan digunakan untuk tujuan kenaikan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR") dalam laporan No. 00112/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 tanggal 30 Maret 2022, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dan OJK.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup melakukan penilaian kembali atas nilai wajar properti investasi, yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan ("KJPP MBPRU") No. 0015/MBPRU-JKT/E/MTQ/I/2021 tanggal 15 Maret 2021, penilai independen yang telah terdaftar di Kementerian Keuangan dengan nomor izin ijin usaha No. 2.09.0027 dan OJK.

Nilai wajar properti investasi seluruhnya diklasifikasikan sebagai Tingkat 2 dalam hierarki nilai wajar.

Nilai wajar Tingkat 2 dari tanah dihitung dengan menggunakan pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan. Input yang diperoleh dari pendekatan pasar yaitu:
a. Harga jual atau harga sewa per meter persegi;
b. Tingkat hunian;
c. Tingkat pertumbuhan;
d. Tingkat diskonto; dan
e. Keuntungan pengembang.

8. INVESTMENT PROPERTIES

This account pertains to pieces of land owned by the Company, located in Pemaron, Pesanggaran – Bali, Ngesrep - Semarang, Pasuruan - East Java with HGB which will expire from 2024 to 2043. As at 31 December 2021, the land will be leased to a third party or be held for capital appreciation purposes.

As at 31 December 2021, the Group performed revaluation of the fair value of its investment property which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid & Rekan ("KJPP RHR"), an independent valuer registered in the Ministry of Finance and OJK, in report No. 00112/2.0012-00/PI/02/0006/1/III/2022 dated 30 March 2022.

As at 31 December 2020, the Group performed revaluation of the fair value of its investment property which was performed by Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun and Partners in the report No. 0015/MBPRU-JKT/E/MTQ/I/2021 dated 15 March 2021, an independent valuer registered in the Ministry of Finance, with license permit No. 2.09.0027 and OJK.

The fair values of all investment properties are within Level 2 of the fair value hierarchy.

The Level 2 fair value of land is calculated using the market approach and income approach. Data inputs were obtained from the market approach that consists of the following:
a. Sale or rental price per square metre;
b. Occupancy rate;
c. Growth rate;
d. Discount rate; and
e. Developer margin .

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/56 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Penyesuaian dilakukan berdasarkan ukuran, lokasi, bentuk dan spesifikasi, tanah dan hak atas tanah dan elemen perbandingan lainnya.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp143.969 dan Rp139.452. Grup juga mencatat perubahan nilai wajar masing-masing sebesar Rp4.517 dan Rp5.631 yang disajikan sebagai bagian dari beban lain-lain-bersih dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 December 2021 dan 2020.

Berdasarkan penilaian manajemen Grup, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Grup tidak memiliki pinjaman bank yang dijaminkan dengan properti investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Grup tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk perbaikan dan perawatan di masa depan yang tidak di provisikan.

***8. INVESTMENT PROPERTIES** (continued)*

Adjustments were made based on size, location, shapes and specifications, land and land rights and other comparison elements.

The fair value of the investment properties as at 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp143,969 and Rp139,452, respectively. The Group also recorded the changes in fair value amounting to Rp4,517 and Rp5,631 which were presented as part of other expenses - net in the consolidated statements of profit or loss for the years ended 31 December 2021 and 2020, respectively.

Based on the assessment of the Group, there are no events or changes in circumstances that indicate any impairment in the value of investment properties as at 31 December 2021 and 2020.

The Group does not have any bank loans secured on investment property.

As at 31 December 2021 and 2020, the Group does not have any contractual obligations for future repairs and maintenance.

9. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA

Akun ini merupakan tagihan jangka panjang dari PLN sehubungan dengan pembayaran kapasitas minimum di masa depan yang ditetapkan dalam PJBTL yang telah diklasifikasikan sebagai aset keuangan sebagai akibat dari adopsi ISAK No.16.

9. FINANCIAL ASSETS OF SERVICE CONCESSION

This account represents long-term receivables from PLN in relation to the future minimum capacity payments set forth in PPA that have been classified as financial assets as a result of adoption of ISFAS No. 16.

	2021	2020	
Pembayaran minimum kapasitas di masa depan			*Future minimum capacity payments*
Tidak lebih dari satu tahun	4,371,948	4,022,499	*Not later than one year*
Antara lebih dari satu tahun sampai lima tahun	12,749,879	17,101,185	*Later than a year but not later than five years*
Lebih dari lima tahun	60,891,275	60,891,275	*Later than five years*
Jumlah pembayaran minimum kapasitas di masa depan	78,013,102	82,014,959	*Total future minimum capacity payments*
Dikurangi: penghasilan keuangan yang belum diterima	(34,221,720)	(36,685,144)	*Less: unearned financial revenue*
Nilai kini pembayaran minimum kapasitas di masa depan	43,791,382	45,329,815	*Present value of future capacity payments*
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	**(2,019,485)**	**(1,538,433)**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**41,771,897**	**43,791,382**	***Non-current portion***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/57 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA (lanjutan)

a. Perusahaan

Pada tanggal 10 Maret 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik ("PJBTL") atas pembangkit listrik tenaga uap Suralaya ("SLA") unit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jangka waktu perjanjian adalah lima tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017. Pada tanggal 22 Agustus 2017, perjanjian tersebut telah diamandemen dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. Amandemen tersebut terutama mencakup perubahan atas jangka waktu perjanjian menjadi 30 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2046. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, manajemen berpendapat bahwa PJBTL sesuai dengan kriteria perjanjian konsesi jasa dan melakukan reklasifikasi aset tetap SLA unit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dengan jumlah tercatat sebesar Rp52.909.454 sebagai aset keuangan dari konsesi jasa.

Pada tanggal 25 April 2017, Perusahaan melakukan perjanjian Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa Indonesia Power 1 – Piutang Usaha ("KIK-DIPP1") dengan PT Danareksa Investment Management ("DIM") bertindak sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") bertindak sebagai Bank Kustodian. KIK-DIPP1 dibentuk berdasarkan Akta Notaris No. 78, tanggal 25 April 2017 dengan Akta Notaris yang kemudian diubah dengan perubahan terakhir tanggal 14 September 2017 No. 31 oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan syarat dan ketentuan tertentu.

Pada tanggal 11 September 2017, berdasarkan surat pernyataan persetujuan pengalihan piutang Komponen A dalam PJBTL, PLN, pemegang saham, menyetujui Perusahaan, untuk mengalihkan piutang yang timbul atas kewajiban pembayaran tunai Komponen A SLA unit 1, 2, 3 dan 4 atas PJBTL pusat pembangkit listrik tenaga uap SLA unit 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Piutang tersebut dialihkan kepada pihak ketiga dalam rangka KIK-DIPP1, maksimal sebesar Rp5.000.000.

9. FINANCIAL ASSETS OF SERVICE CONCESSION *(continued)*

a. The Company

On 10 March 2017, the Company entered into a Power Purchase Agreement ("PPA") for Suralaya steam power plant ("SLA") units 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The term of the agreement is five years, effective from 1 January 2017. On 22 August 2017, the agreement was amended and applied retroactively since 1 January 2017. The amendment primarily covers changes to the terms of the agreement to 30 years, effective from 1 January 2017 until 31 December 2046. Based on the agreement, management believes that PPA meets the criterias of service concession arrangement and reclassified its property, plant and equipment SLA unit 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 with carrying value of Rp52,909,454 as financial assets of service concession.

On 25 April 2017, the Company entered into agreement of Kontrak Investasi Kolektif Asset Backed Securities with Danareksa Indonesia Power 1 – Piutang Usaha ("KIK-DIPP1") with PT Danareksa Investment Management ("DIM") acting as an Investment Manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") acting as a Custodian Bank. KIK-DIPP1 was estalished based on Notarial Deed No. 78, dated 25 April 2017 with Notarial Deed which was later amended with the latest amendment on 14 September 2017 No. 31 by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H., Notary in Jakarta regarding the amendment of certain terms and conditions.

On 11 September 2017, based on the statement of approval for the transfer of receivables of Component A under the PPA, PLN, a shareholder, approved the Company to transfer the receivables arising from the cash payment obligations of Component A SLA steam power plant units 1, 2, 3 and 4 of PPA SLA units 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The receivables are transferred to third party in KIK-DIPP1, with a maximum value of Rp5,000,000.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/58 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA (lanjutan)

a. Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 14 September 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian jual beli piutang usaha No. 206.PJ/061/IP/2017 dengan PLN, yang telah diaktakan dengan Akta No. 32 oleh Akta Notaris dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H., Notaris di Jakarta. Dalam perjanjian ini, Perusahaan setuju untuk menjual piutang usaha sebesar Rp4.932.107 dengan harga sebesar Rp4.000.000.

Berdasarkan Akta *"Cessie"* piutang usaha tanggal 19 September 2017 yang telah diaktakan dengan Akta No. 51 oleh Akta Notaris dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H., Notaris di Jakarta, penerimaan atas piutang usaha dari PLN diterima oleh manajer investasi yang mewakili kepentingan pemegang Efek Beragun Aset ("EBA") untuk menerima dana hasil koleksi piutang usaha yang bertindak untuk dan atas nama KIK-DIPP1.

Pada tanggal 15 September 2017, DIM bersama dengan BRI melakukan penawaran umum KIK-DIPP1 sebesar Rp4.000.000 dengan tingkat pengembalian pokok dan hasil Investasi dilakukan dengan angsuran tetap ("anuitas") berdasarkan dari nilai investasi dan yield 8,25%. Tanggal akhir pelunasan investasi adalah 19 September 2022. KIK-DIPP1 merupakan investasi dengan peringkat idAAA berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Berdasarkan KIK-DIPP1, EBA diterbitkan oleh Bank Kustodian dalam 2 (dua) kelas yaitu sebagai berikut:

1. EBA Kelas A ditawarkan melalui Penawaran Umum kepada Publik dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan total nilai sebesar Rp3.688.000 mewakili 92,20% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA Kelas A memiliki hak untuk menerima arus kas tetap setiap 3 (tiga) bulan sekali yang terdiri dari pelunasan bertahap pokok investasi dan pembagian hasil investasi EBA Kelas A.

9. FINANCIAL ASSETS OF SERVICE CONCESSION *(continued)*

a. The Company *(continued)*

On September 14, 2017, the Company signed a trade receivable sale and purchase agreement No. 206.PJ/061/IP/2017 with PLN, which has been notarized by Deed No. 32 by Notarial Deed of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H., Notary in Jakarta. In this agreement, the Company agreed to sell the trade receivables amounting to Rp4,932,107 at a price of Rp4,000,000.

Based on the Deed of "Cessie" trade receivables dated 19 September 2017, which has been notarized by Deed No. 51 by Notarial Deed of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S. H., Notary in Jakarta, the receipt of trade receivables from PLN is received by the investment manager representing the interests of the holders of Asset Backed Securities ("EBA") to receive the proceeds from the collection of trade receivables acting for and on behalf of KIK-DIPP1 .

On 15 September 2017, DIM together with BRI initiated a public offering of KIK-DIPP1 which amounted to Rp4,000,000 with a principal rate of return and investment proceeds settled with fixed instalment ("annuity") based on investment value and 8.25% yield. The final date of settlement of the investment is 19 September 2022. The KIK-DIPP1 is an investment with idAAA rating based on the rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia.

Based on KIK-DIPP1, ABS is issued by Custodian Bank in 2 (two) classes, which are as follows:

1. *Class A ABS is offered to the public through Initial Offering and is listed in the Indonesian Stock Exchange with a total amount of Rp3,688,000, which represents 92.20% of total financial assets. Class A ABS holders have the right to receive a fixed cash flows every 3 (three) months consisting of principal gradual settlement and investment return of Class A ABS.*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/59 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA (lanjutan)

a. Perusahaan (lanjutan)

2. EBA Kelas B merupakan instrument ekuitas dan dimiliki sepenuhnya oleh Perusahaan dengan total nilai sebesar Rp312.000 mewakili 7,80% dari keseluruhan aset keuangan. Pemegang EBA Kelas B memiliki hak untuk menerima arus kas tidak tetap pada setiap tanggal pelunasan bertahap dan tanggal pembagian hasil investasi EBA Kelas B.

Semua pembayaran atas EBA semata-mata bersumber dari PLN atas piutang usaha milik Perusahaan yang disekuritisasi. Pemegang EBA Kelas A mempunyai hak untuk dibayar mendahului pemegang EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B akan menerima pembayaran pelunasan bertahap dan hasil investasi EBA Kelas B setelah dilakukan pembayaran penuh atas EBA K elas A menurut tata urutan pembayaran (*payment waterfall)*.

Saldo pinjaman EBA Kelas A dan B pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp636.973 dan Rp95.000 (2020: Rp1.526.949 dan Rp190.000), yang disajikan sebagai pengurang aset keuangan dari konsesi jasa.

b. IRP

Pada tanggal 30 Oktober 2007, IRP mengadakan PJBTL dengan PLN untuk jangka waktu 30 tahun setelah tanggal operasi komersial yaitu pada tanggal 30 November 2018. Dalam PJBTL tersebut PLN akan membayar pasokan tenaga listrik yang akan disediakan oleh IRP sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup beberapa komponen yaitu biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam PJBTL.

Manajemen berpendapat bahwa PJBTL sesuai dengan kriteria perjanjian konsesi jasa.

9. FINANCIAL ASSETS OF SERVICE CONCESSION *(continued)*

a. The Company *(continued)*

2. Class B ABS is an equity instrument and is fully owned by the Company with a total amount of Rp312,000, which represents 7.80% of total financial assets. Class B ABS holders have the right to receive the variable non-fixed cash flows on each date of the principal gradual settlement and investment return of ABS Class B.

All ABS payments are solely derived from PLN on the Company's securitised trade receivables. Class A ABS holders have the privilege to be paid before Class B ABS holders. Class B ABS holders will receive the gradual settlements and ABS Class B investment returns after full payments of Class A ABS in accordance with the payment waterfall.

The outstanding balances of the Class A and B ABS loans as at 31 December 2021 amounted to Rp636,973 and Rp95,000, respectively, (2020: Rp1,526,949 and Rp190,000) which are presented as a deduction from financial assets of service concessions.

b. IRP

On 30 October 2007, IRP entered into a PPA with PLN for a period of 30 years after the Commercial Operation Date ("COD") on 30 November 2018. Based on the PPA, PLN will pay the power supply electricity to be provided by IRP with the amount that is determined by the formula of payment. The payments cover several components, that is capacity, energy, operational and maintenance costs depending on the energy supply level and other variables specified in the PPA.

Management believes that PPA meets the criterium of service concession arrangements.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/60 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET KEUANGAN DARI KONSESI JASA (lanjutan)

Grup mengakui pendapatan dari konsesi jasa sebagai berikut:

	2021	2020	
Bahan bakar dan pemeliharaan	12,076,244	10,351,727	*Fuel and maintenance*
Pendapatan keuangan	2,580,511	3,907,432	*Finance income*
Jumlah	**14,656,755**	**14,259,159**	***Total***

Beban konsesi jasa yang diakui pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Bahan bakar dan pemeliharaan	**11,784,157**	**9,747,752**	*Fuel and maintenance*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian tidak material sehingga penyisihan dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

9. FINANCIAL ASSETS OF SERVICE CONCESSION *(continued)*

The Group recognised revenue of service concession as follows:

Service concession expenses recognised during the years were as follows:

The Group's management opinion is that the provision for expected credit losses is not material, therefore, it is considered not necessary as at 31 December 2021 and 2020.

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

Rincian bagian partisipasi dalam asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES

Details of interests in associates and joint ventures are as follows:

Entitas/*Entity*	Domisili/ *Domicile*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Tahun operasi/ *Commercial Operations*	Persentase penyertaan/ *Percentage of ownership* 2021	2020
Entitas asosiasi/*Associates*					
PT Indo Pusaka Berau ("IPB")	Berau	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2005	46.53	46.53
PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang ("PLN SC")	Jakarta	Perdagangan barang dan jasa, enjinering supply chain dan konsultasi di bidang ketenagalistrikan/ *Operation and services trading, engineering supply chain and consultation in the electricity sector*	2018	49.00	49.00
Ventura Bersama/*Joint ventures*					
PT Rajamandala Electric Power ("REP")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2019	51.00	51.00
PT Perta Daya Gas ("PDG")	Jakarta	Transportasi, penyimpanan dan regasifikasi LNG/ *Transportation, storage and regasification of LNG*	2015	35.00	35.00
PT GCL Indotenaga ("GCL")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	2021	35.00	35.00
PT Indo Raya Tenaga ("IRT")	Jakarta	Pembangkit tenaga listrik/ *Electricity supplier*	*)	51.00	51.00
PT Maxpower Cogindo Batam ("MCB")	Batam	Pembangkit tenaga listrik, aktivitas penunjang kelistrikan, perdagangan mesin, suku cadang dan perlengkapannya/ *Electricity supplier, electrical support activities, sale of machinery, spare parts and accessories*	*)	30.00	30.00

*) Dalam tahap pengembangan

*) *In development stage*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/61 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan)

Seluruh entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat oleh Grup dengan menggunakan metode ekuitas. Seluruh entitas adalah entitas tertutup dan tidak terdapat harga pasar kuotasian yang tersedia untuk sahamnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada asosiasi dan ventura bersama.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

***10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES** (continued)*

All associates and joint ventures are recorded by the Group using the equity method. They are private entities and there is no quoted market price available for their shares.

As at 31 December 2021 and 2020, management believes that there is no significant restriction and risk regarding the investments in associates and joint ventures.

The movements in investments in associates and joint ventures were as follows:

	2021						
	Jumlah Tercatat 1 Januari 2021/ *Carrying amount 1 January 2021*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba *bersih/ Share in net income*	Bagian atas penghasilan komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive Income*	Jumlah tercatat 31 Desember 2021/ *Carrying amount 31 December 2021*	
Asosiasi							***Associates***
IPB	115,644	-	-	6,309	-	121,953	*IPB*
PLNSC	101,327	-	-	1,996	-	103,323	*PLNSC*
Subjumlah	216,971	-	-	8,305	-	225,276	*Subtotal*
Ventura bersama							***Joint ventures***
REP	120,311	-	-	3,932	1,384	125,627	*REP*
PDG	40,341	-	-	15,613	-	55,954	*PDG*
GCL	420,463	38,115	-	155,002	-	613,580	*GCL*
IRT	2,426,336	-	-	262,957	603,579	3,292,872	*IRT*
MCB	8,236	-	-	-	-	8,236	*MCB*
Subjumlah	3,015,687	38,115	-	437,504	604,963	4,096,269	*Subtotal*
Jumlah	**3,232,658**	**38,115**	**-**	**445,809**	**604,963**	**4,321,545**	***Total***

	2020						
	Jumlah Tercatat 1 Januari 2020/ *Carrying amount 1 January 2020*	Penambahan/ *Additions*	Dividen/ *Dividends*	Bagian atas laba/(rugi) *bersih/ Share in net income/ (loss)*	Bagian atas penghasilan/ (kerugian) komprehensif lainnya/ *Share of other comprehensive Income/(loss)*	Jumlah tercatat 31 Desember 2020/ *Carrying amount 31 December 2020*	
Asosiasi							***Associates***
IPB	112,270	-	(1,241)	4,615	-	115,644	*IPB*
PLNSC	84,776	-	-	16,551	-	101,327	*PLNSC*
Subjumlah	197,046	-	(1,241)	21,166	-	216,971	*Subtotal*
Ventura bersama							***Joint ventures***
REP	125,215	-	-	(5,948)	1,044	120,311	*REP*
PDG	38,332	-	-	(250)	2,259	40,341	*PDG*
GCL	426,857	-	-	(6,394)	-	420,463	*GCL*
IRT	522,170	1,901,280	-	195,341	(192,455)	2,426,336	*IRT*
MCB	-	8,236	-	-	-	8,236	*MCB*
Subjumlah	1,112,574	1,909,516	-	182,749	(189,152)	3,015,687	*Subtotal*
Jumlah	**1,309,620**	**1,909,516**	**(1,241)**	**203,915**	**(189,152)**	**3,232,658**	***Total***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/62 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)*

Entitas Asosiasi / *Associates*

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi dan ventura bersama pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

The following tables contain the summarised financial information for associates and joint ventures accounted for using the equity method as at 31 December 2021 and 2020:

	31 Desember/*December 2021*			
	IPB	**PLNSC**	**Total**	
Kas dan setara kas	12,800	98,767	111,567	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	35,640	205,251	240,891	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	48,440	304,018	352,458	*Total current assets*
Aset tidak lancar	284,492	30,165	314,657	*Non-current assets*
Utang usaha	17,379	57,229	74,608	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	13,707	64,007	77,714	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	31,086	121,236	152,322	*Total current liabilities*
Liabilitas keuangan	7,238	-	7,238	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	32,513	2,084	34,597	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	39,751	2,084	41,835	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	262,095	210,863	472,958	*Net assets*
% kepemilikan	46.53%	49.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	**121,953**	**103,323**	**225,276**	***The Group's share of the net assets of associates***
Pendapatan	106,812	262,344	369,156	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	-	(209,414)	(209,414)	*Cost of revenue*
Beban operasi	(88,633)	(31,049)	(119,682)	*Operating expenses*
Penghasilan keuangan	164	921	1,085	*Finance income*
Beban keuangan	(865)	-	(865)	*Finance costs*
Beban lain-lain, bersih	(94)	(3,566)	(3,660)	*Other expenses, net*
Beban pajak penghasilan	(3,825)	(4,232)	(8,057)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	13,559	15,004	28,563	*Profit for the year*
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi	6,309	7,352	13,661	*Share in net income of associates*
Penyesuaian laba/(rugi)	-	(5,356)	(5,356)	*Profit/(loss) adjustments*
Bagian laba bersih dari entitas asosiasi, setelah penyesuaian	**6,309**	**1,996**	**8,305**	***Share in net income of associates, after adjustments***

	31 Desember/*December 2020*			
	IPB	**PLNSC**	**Total**	
Kas dan setara kas	5,769	30,417	36,186	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	14,790	392,284	407,074	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	20,559	422,701	443,260	*Total current assets*
Aset tidak lancar	290,845	3,667	294,512	*Non-current assets*
Utang usaha	5,611	112,838	118,449	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	17,589	106,740	124,329	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	23,200	219,578	242,778	*Total current liabilities*
Liabilitas keuangan	7,238	-	7,238	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	32,430	-	32,430	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	39,668	-	39,668	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	248,536	206,790	455,326	*Net assets*
% kepemilikan	46.53%	49.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih asosiasi	**115,644**	**101,327**	**216,971**	***The Group's share of the net assets of associates***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/63 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)*

Entitas Asosiasi (lanjutan) / *Associates (continued)*

	31 Desember/*December* 2020			
	IPB	PLNSC	Total	
Pendapatan	103,880	356,523	460,403	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(58,323)	(288,013)	(346,336)	*Cost of revenue*
Beban operasi	(29,940)	(25,871)	(55,811)	*Operating expenses*
Penghasilan keuangan	58	1,067	1,125	*Finance income*
Beban keuangan	(26)	-	(26)	*Finance costs*
Beban lain-lain, bersih	(2,816)	(9,929)	(12,745)	*Other expenses, net*
Beban pajak penghasilan	(2,915)	-	(2,915)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	9,918	33,777	43,695	*Profit for the year*
Bagian atas laba bersih dari entitas asosiasi Grup	**4,615**	**16,551**	**21,166**	***The Group's share in net income of associates***
Dividen yang diterima dari entitas asosiasi	**1,241**	**-**	**1,241**	***Dividends received from associates***

Ventura bersama / *Joint ventures*

	31 Desember/*December* 2021						
	REP	PDG	GCL	IRT	MCB	Total	
Kas dan setara kas	45,326	21,902	627,368	190,433	2,584	887,613	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	88,141	88,950	437,712	123,443	14,527	752,773	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	133,467	110,852	1,065,080	313,876	17,111	1,640,386	*Total current assets*
Aset tidak lancar	2,249,531	406,866	4,978,774	16,176,156	379,614	24,190,941	*Non-current assets*
Utang usaha	509	115,752	97,892	138,193	2,632	354,978	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	103,364	38,753	119,487	839,298	1,494	1,102,396	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	103,873	154,505	217,379	977,491	4,126	1,457,374	*Total current liabilities*
Liabilitas keuangan	1,670,377	196,257	3,595,314	8,580,033	254,009	14,295,990	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	362,420	7,088	478,074	475,897	111,137	1,434,616	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	2,032,797	203,345	4,073,388	9,055,930	365,146	15,730,606	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	246,328	159,868	1,753,087	6,456,611	27,453	8,643,347	*Net assets*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	**125,627**	**55,954**	**613,580**	**3,292,872**	**8,236**	**4,096,269**	***The Group's share in the net assets of joint ventures***
Pendapatan	194,360	193,901	1,014,625	4,665,015	-	6,067,901	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	(4,713)	(66,659)	(552,177)	(3,579,708)	-	(4,203,257)	*Cost of revenue*
Beban operasi	(39,512)	(47,313)	(38,075)	(24,049)	-	(148,949)	*Operating expenses*
Penghasilan keuangan	-	1,075	-	51	-	1,126	*Finance income*
Beban keuangan	(125,738)	(22,779)	-	(405,850)	-	(554,367)	*Finance costs*
Pendapatan (beban) lain-lain, bersih	427	10,805	18,491	(30,248)	-	(525)	*Other income/(expenses), net*
Beban pajak penghasilan	(17,114)	(24,421)	-	(109,609)	-	(151,144)	*Income tax expense*
Laba tahun berjalan	7,710	44,609	442,864	515,602	-	1,010,785	*Profit for the year*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama	**3,932**	**15,613**	**155,002**	**262,957**	**-**	**437,504**	***The Group's share in income of joint ventures***
Laba komprehensif lainnya	2,714	-	-	1,183,488	-	1,186,202	*Other comprehensive income*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba komprehensif lainnya ventura bersama	**1,384**	**-**	**-**	**603,579**	**-**	**604,963**	***The Group's share of other comprehensive income of joint ventures***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/64 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA (lanjutan) / *10. INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES (continued)*

Ventura bersama (lanjutan) / ***Joint ventures** (continued)*

	31 Desember/*December* 2020						
	REP	PDG	GCL	IRT	MCB	Total	
Kas dan setara kas	58,636	91,606	732,611	104,067	8,208	995,128	*Cash and cash equivalents*
Aset lancar lainnya (tidak termasuk kas)	255,687	84,982	1,426	2,602	8	344,705	*Other current assets (excluding cash)*
Jumlah aset lancar	314,323	176,588	734,037	106,669	8,216	1,339,833	*Total current assets*
Aset tidak lancar	2,086,246	451,948	4,301,685	10,667,878	19,237	17,526,994	*Non-current assets*
Utang usaha	5,784	-	-	15,139	-	20,923	*Trade payables*
Liabilitas lancar lainnya	106,292	198,547	4,892	2,920,621	-	3,230,352	*Other current liabilities*
Jumlah liabilitas lancar	112,076	198,547	4,892	2,935,760	-	3,251,275	*Total current liabilities*
Liabilitas keuangan	1,752,417	312,580	3,829,507	2,549,735	-	8,444,239	*Financial liabilities*
Liabilitas tidak lancar lainnya	300,172	2,149	-	531,531	-	833,852	*Other non-current liabilities*
Jumlah liabilitas tidak lancar	2,052,589	314,729	3,829,507	3,081,266	-	9,278,091	*Total non-current liabilities*
Aset bersih	235,904	115,260	1,201,323	4,757,521	27,453	6,337,461	*Net assets*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas aset bersih ventura bersama	**120,311**	**40,341**	**420,463**	**2,426,336**	**8,236**	**3,015,687**	***The Group's share of the net assets of joint ventures***
Pendapatan	200,374	99,492	-	5,744,783	-	6,044,649	*Revenue*
Beban pokok pendapatan	-	(48,767)	-	(5,103,141)	-	(5,151,908)	*Cost of revenue*
Beban operasi	(34,947)	(38,541)	(16,938)	(18,610)	-	(109,036)	*Operating expenses*
Penghasilan keuangan	-	9,414	4	2,958	-	12,376	*Finance income*
Beban keuangan	(165,521)	(28,301)	(320)	(114,966)	-	(309,108)	*Finance costs*
Pendapatan lain-lain,bersih	3,420	7,849	-	5,529	-	16,798	*Other income,net*
Beban pajak penghasilan	(14,989)	(1,861)	-	(134,532)	-	(151,382)	*Income tax expense*
Laba/(rugi) tahun berjalan	(11,663)	(715)	(17,254)	382,021	-	352,389	*Profit for the year*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba bersih ventura bersama	(5,948)	(250)	(6,039)	194,831	-	182,594	*The Group's share in income of joint ventures*
Penyesuaian laba/(rugi)	-	-	(355)	510	-	155	*Profit/(loss) adjustments*
Bagian Grup atas laba/ (rugi) bersih ventura bersama, setelah penyesuaian	**(5,948)**	**(250)**	**(6,394)**	**195,341**	**-**	**182,749**	***The Group's share in net income/(loss) of joint ventures, after adjustments***
Laba/(rugi) komprehensif lainnya	2,047	6,454	-	(377,363)	-	(368,862)	*Other comprehensive income/(loss)*
% kepemilikan	51.00%	35.00%	35.00%	51.00%	30.00%	-	*% of ownership*
Bagian Grup atas laba/(rugi) komprehensif lainnya ventura bersama	**1,044**	**2,259**	**-**	**(192,455)**	**-**	**(189,152)**	***The Group's share of other comprehensive income/ (loss) of joint ventures***

Investasi pada entitas di atas diperoleh terutama untuk tujuan potensi pertumbuhan jangka panjang, karena seluruh entitas tersebut bergerak dalam industri ketenagalistrikan yang sama dengan industri Grup. Manajemen meyakini bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai.

The investments in the above entities are held primarily for long-term growth potential, since these entities are engaged in the same electricity industry as the Group. Management believes that there is no indication of impairment.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/65 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG PIHAK BERELASI / *11. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES*

	2021	2020	
PT Rajamandala Electric Power	358,699	333,984	*PT Rajamandala Electric Power*
PT Perta Daya Gas	114,012	179,464	*PT Perta Daya Gas*
Lain-lain	54,380	75,382	*Others*
Jumlah	527,091	588,830	*Total*
Dikurangi: bagian jangka pendek	**(59,011)**	**(76,673)**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**468,080**	**512,157**	***Long-term portion***

PT Rajamandala Electric Power ("REP")

Pada tanggal 4 Juli 2014, Perusahaan memberikan pinjaman jangka panjang sebesar US$9.399.962 kepada REP untuk membiayai proyek 46,6 Megawatt di Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") Sungai Citarum di Cianjur, Jawa Barat. Pinjaman ini dikenakan bunga 10% per tahun dengan jangka waktu 17,5 tahun setelah grace period selama pembangunan. Tanggal operasi komersial PLTA telah diamandemen, terakhir kali melalui Amandemen Pertama atas PJBTL tertanggal 10 Agustus 2017, menjadi 57 bulan setelah tanggal pendanaan. Pada tanggal 12 Mei 2019, PLTA Rajamandala 1 x 47 MW telah beroperasi secara komersial berdasarkan sertifikat tanggal operasi komersial No. 188.BA/159/REP/2019. Pokok pinjaman akan ditagihkan dan terutang setiap enam bulan sejak tanggal operasi komersial.

PT Rajamandala Electric Power ("REP")

On 4 July 2014, the Company provided a long-term loan of US$9,399,962 to REP for the financing of the 46.6 Megawatt project in Hydroelectric Power Plant ("HPP") Citarum River at Cianjur, West Java. This loan bears interest of 10% per annum with a 17.5 years terms of repayment after a grace period during construction. The COD has been amended, most recently through the First Amendment of PPA dated 10 August 2017, 57 months after financial close date. On 12 May 2019, the Rajamandala 1 x 47 MW HPP was commercially operated based on COD certificate No. 188.BA/159/REP/2019. The principal shall be invoiced and due every six months starting on COD.

Pada tanggal 23 November 2016, Perusahaan memberikan tambahan pinjaman sebesar US$5.724.490 kepada REP dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pinjaman sebelumnya.

On 23 November 2016, the Company provided additional loans of US$5,724,490 to REP with similar terms and conditions to the previous loan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pokok pinjaman Perusahaan kepada REP masing-masing adalah sebesar US$15.124.452 (setara dengan Rp215.811) dan US$15.124.452 (setara dengan Rp213.330) dan piutang bunga masing-masing sebesar US$9.947.670 (setara dengan Rp142.329) dan US$8.462.224 (setara dengan Rp119.360). Piutang lainnya sebesar Rp559 (2020: Rp1.294) merupakan biaya relokasi pegawai dan pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan.

As at 31 December 2021 and 2020, the Company's principal outstanding loan balance to REP was US$15,124,452 (equivalent to Rp215,811) and US$15,124,452 (equivalent to Rp213,330), respectively, and interest receivables amounted to US$9,947,670 (equivalent to Rp142,329) and US$8,462,224 (equivalent to Rp119,360) respectively. Other receivables of Rp559 (2020: Rp1,294) represents costs of employee relocation and operation and maintenance services revenue.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/66 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Rajamandala Electric Power ("REP") (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 penghasilan bunga masing-masing adalah sebesar US$1.512.445 (setara dengan Rp21.685) dan US$Rp1.516.589 (setara dengan Rp22.184) yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak ada pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga yang dibayarkan oleh REP. Perusahaan tidak berhak untuk meminta pembayaran kembali atas pokok pinjaman yang diberikan kepada REP sebelum Tanggal Pembebasan Fasilitas Senior, namun untuk pembayaran bunga yang dilakukan oleh REP harus memenuhi syarat dan kondisi yang tertuang dalam perjanjian pemegang saham sebagai berikut:

- Uang yang ada pada kredit dari Rekening Distribusi; atau
- Sumber - sumber lain yang dapat disetujui secara tertulis oleh Agen Antar Kreditur.

PT Perta Daya Gas ("PDG")

Pada tanggal 12 Juni 2013, Perusahaan memberikan pinjaman jangka panjang kepada PDG, ventura bersama, sebesar US$18.837.112 untuk membiayai Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tambak Lorok, Semarang. Pada tanggal 30 November 2015, perjanjian ini telah diamandemen yang merubah jumlah pinjaman menjadi US$18.191.529 sesuai dengan jumlah seluruh pencairan dana sampai dengan tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal jatuh tempo pinjaman ini adalah 1 Desember 2023. Pemberian pinjaman ini dikenakan bunga 6,50% per tahun.

Jumlah bunga atas pokok pinjaman terutang selama masa pembangunan proyek dihitung sejak tanggal pencairan dana sampai tanggal 30 Mei 2014 dan dibayarkan secara penuh pada tanggal 1 Juni 2016. Pokok pinjaman akan ditagihkan setiap 6 bulan dari tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Desember 2023.

11. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES *(continued)*

PT Rajamandala Electric Power ("REP") (continued)

As at 31 December 2021 and 2020 interest income amounted to US$1,512,445 (equivalent to Rp21,685) and US$1,516,589 (equivalent to Rp22,184) which is presented in the consolidated statements of profit or loss.

As at 31 December 2021 and 2020, there was no repayment of the loan principal and interest paid by REP. The Company is not entitled to request repayment of principal loan provided to REP before the Senior Facility Release Date, while interest paid by REP should fulfil several terms and conditions as stated in the shareholder agreement as follows:

- *The monies standing to the credit of the Distribution Accounts; or*
- *Other sources as may be approved in writing by the Intercreditor Agent.*

PT Perta Daya Gas ("PDG")

On 12 June 2013, the Company provided a long-term loan to PDG, a joint venture, amounted to US$18,837,112, for financing the Tambak Lorok Steam Power Plant, Semarang. On 30 November 2015, this agreement has been amended which resulted in the revision of the total loan provided by the Company became to US$18,191,529, in accordance with the funds transferred up to 9 January 2014 and the maturity date of the loan is 1 December 2023. This loan bears interest rate of 6.50% per annum.

The total interest on the principal during the construction of the project (Interest During Construction) is effective from the date of cash withdrawal until 30 May 2014 and paid in full on 1 June 2016. The principal shall be collected every six months from 1 June 2016 until 1 December 2023.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/67 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PIUTANG PIHAK BERELASI (lanjutan)

11. RECEIVABLES FROM RELATED PARTIES *(continued)*

PT Perta Daya Gas ("PDG") (lanjutan)

Pada tahun 2021, PDG melakukan pembayaran atas pinjaman ini sebesar US$5.489.093 atau setara dengan Rp78.324 (2020: nihil).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo piutang masing-masing terdiri dari pokok dan bunga sebesar US$7.704.827 (setara dengan Rp109.940) dan US$12.618.091 (setara dengan Rp177.979). Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, piutang lainnya sebesar Rp4.072 dan Rp1.485, merupakan piutang bunga dan biaya pegawai.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang pihak berelasi tidak material, sehingga penyisihan dianggap tidak diperlukan.

PT Perta Daya Gas ("PDG") (continued)

In 2021, PDG has made payment on this loan amounting to US$5,489,093 or equivalent to Rp78,324 (2020: nil).

As at 31 December 2021 and 2020, the outstanding principal and accrued interest of the receivables amounted to US$7,704,827 (equivalent to Rp109,940) and US$12,618,091 (equivalent to Rp177,979). As at 31 December 2021 and 2020, other receivables amounting to Rp4,072 and Rp1,485, respectively, represent interest receivables and employee costs.

As at 31 December 2021 and 2020, the Group's management is of the opinion that the provision for expected credit losses of receivables from related parties is not material, therefore, it is considered not to be necessary.

12. ASET TIDAK LANCAR LAIN

12. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	2021	2020	
Pengembangan proyek	251,617	94,803	*Projects development*
Investasi EBA	95,000	190,000	*Investments in ABS*
Aset tak berwujud			*Intangible assets*
Perangkat lunak	17,161	35,380	*Software*
Biaya pengurusan tanah	10,714	11,403	*Legal costs on land rights*
Lain-lain	11,213	8,316	*Others*
Jumlah	**385,705**	**339,902**	***Total***

Amortisasi aset tak berwujud

Beban amortisasi aset tak berwujud tahun 2021 dan 2020, masing-masing sebesar Rp23.100 dan Rp43.706 disajikan sebagai bagian dari beban usaha - lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

Manajemen Grup berpendapat bahwa aset tersebut dapat dipulihkan.

Amortisation of intangible assets

Amortisation of intangible assets in 2021 and 2020, amounted to Rp23,100 and Rp43,706 respectively, and are presented as part of operating expenses - others in the consolidated statements of profit or loss during the years.

The management of the Group is of the opinion that the above assets can be recoverable.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/68 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. KAS DAN SETARA KAS / *13. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	2021	2020	
Kas	35	86	*Cash on hand*
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi (Catatan 36)			*Related parties (Note 36)*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")			*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*
Rupiah	1,233,769	943,444	*Rupiah*
USD	661,461	661,004	*USD*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")			*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")*
USD	110,053	118,818	*USD*
Rupiah	107,260	219,009	*Rupiah*
EUR	15,719	26,762	*EUR*
JPY	26	81	*JPY*
BRI			*BRI*
Rupiah	88,922	141,821	*Rupiah*
Subjumlah	2,217,210	2,110,939	*Subtotal*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")			*PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")*
USD	1,506	1,613	*USD*
Rupiah	43	46	*Rupiah*
The National Bank of Kuwait			*The National Bank of Kuwait*
KWD	8	-	*KWD*
PT Bank Bukopin Tbk ("Bukopin")			*PT Bank Bukopin Tbk ("Bukopin")*
Rupiah	-	1	*Rupiah*
Subjumlah	1,557	1,660	*Subtotal*
	2,218,802	2,112,685	
Setara kas - deposito berjangka			*Cash equivalents - time deposits*
Pihak berelasi (Catatan 36)			*Related parties (Note 36)*
BNI	467,459	485,000	*BNI*
Bank Mandiri	79,767	53,000	*Bank Mandiri*
BRI	100	100	*BRI*
Subjumlah	547,326	538,100	*Subtotal*
Jumlah	**2,766,128**	**2,650,785**	***Total***
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	2.75% - 3.25%	3.25% - 3.75%	*Interest rates per annum on time deposits*

14. REKENING BANK DIBATASI PENGGUNAANNYA / *14. RESTRICTED CASH IN BANKS*

	2021	2020	
Bank			*Cash in banks*
Pihak berelasi (Catatan 36)			*Related party (Note 36)*
BNI			*BNI*
Rupiah	**1,117**	-	*Rupiah*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/69 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. PIUTANG USAHA / *15. TRADE RECEIVABLES*

	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 36)	27,248,591	30,741,055	*Related parties (Note 36)*
Pihak ketiga	136,474	78,152	*Third parties*
	27,385,065	30,819,207	
Cadangan kerugian kredit ekspektasian	(45,051)	(43,651)	*Allowance for expected credit losses*
Bersih	**27,340,014**	**30,775,556**	***Net***

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut: / *The aging analysis of trade receivables is as follows:*

	2021	2020	
Belum jatuh tempo	3,517,804	3,562,704	*Not yet due*
Sudah jatuh tempo			*Past Due*
1 s/d 30 hari	3,042,927	3,572,739	*1 to 30 days*
31 s/d 60 hari	3,208,829	3,074,254	*31 to 60 days*
61 s/d 90 hari	1,012,287	2,334,633	*61 to 90 days*
91 s/d 120 hari	3,078,952	2,618,446	*91 to 120 days*
> 120 hari	13,524,266	15,656,431	*> 120 days*
Jumlah	**27,385,065**	**30,819,207**	***Total***

Pergerakan cadangan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut: / *The movement of the allowance for expected credit losses is as follows:*

	2021	2020	
Saldo awal tahun	43,651	19,611	*Balance at beginning of year*
Penyesuaian saldo awal atas penerapan PSAK No. 71	-	7,702	*Opening balance adjustments upon initial application of SFAS No. 71*
Penambahan	1,400	16,338	*Additions*
Saldo akhir tahun	**45,051**	**43,651**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa cadangan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah cukup untuk menutupi kerugian kredit ekspektasian nilai dari piutang usaha.

Management believes that the allowance for expected credit losses as at 31 December 2021 and 2020 is sufficient to cover the expected credit loss of trade receivables.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/70 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

16. PIUTANG LAIN-LAIN / *16. OTHER RECEIVABLES*

	2021	2020	
Karyawan	48,249	41,386	*Employees*
Lain-lain	28,727	26,023	*Others*
Jumlah	76,976	67,409	*Total*
Dikurangi: bagian jangka pendek	**(28,861)**	**(26,180)**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**48,115**	**41,229**	***Long-term portion***

Piutang karyawan merupakan pinjaman kepemilikan rumah. Pelunasan piutang dilakukan melalui pemotongan gaji.

Receivables from employees represents housing loans, which are paid monthly through salary deduction.

Manajemen Grup berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian kredit ekspektasian atas piutang lain-lain tidak material, sehingga cadangan atas kerugian kredit ekspektasian dianggap tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Management of the Group believes that a provision for expected credit losses of other receivables is not material, therefore, an allowance for expected credit losses is not considered necessary as at 31 December 2021 and 2020.

17. PERSEDIAAN / *17. INVENTORIES*

	2021	2020	
Bahan bakar dan pelumas	1,348,058	1,308,586	*Fuel and lubricants*
Suku cadang	162,400	168,948	*Spare parts*
Jumlah	1,510,458	1,477,534	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	(124,690)	(16,531)	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Jumlah, bersih	**1,385,768**	**1,461,003**	***Total, net***

Pergerakan cadangan kerugian penurunan nilai dan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movement of the allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence is as follows:

	2021	2020	
Saldo awal tahun	16,531	20,206	*Balance at beginning of year*
Penambahan	108,159	-	*Additions*
Pembalikan	-	(3,675)	*Reversals*
Saldo akhir tahun	**124,690**	**16,531**	***Balance at end of year***

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan yang ditetapkan memadai untuk menutup risiko penurunan nilai persediaan dan persediaan usang pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses on decline in value of inventories and inventory obsolescence as at 31 December 2021 and 2020.

Grup tidak mengasuransikan persediaan untuk menutup risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul pada persediaan.

The Group does not have any insurance coverage to cover the possible losses in inventories.

Jumlah pemakaian persediaan yang diakui sebagai beban usaha dalam laporan laba rugi konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah masing-masing sebesar Rp10.897.344 dan Rp7.796.125 (Catatan 28).

The total amount of inventories used recognised as operating expenses in the consolidated statements of profit or loss for the years ended 31 December 2021 and 2020 amounted to Rp10,897,344 and Rp7,796,125, respectively (Note 28).

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/71 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

18. PAJAK DIBAYAR DIMUKA / *18. PREPAID TAXES*

	2021	2020	
Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan") lebih bayar			*Overpayments of Corporate Income Tax ("CIT")*
2021	313,953	-	*2021*
2020	298,375	312,217	*2020*
2019	-	316,148	*2019*
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	588,035	336,908	*Value-Added Tax ("VAT")*
Pembayaran dimuka atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Catatan 33c)	608,763	489,702	*Prepayment of Tax Assessment Letters of Underpayment (Note 33c)*
Jumlah	1,809,126	1,454,975	*Total*
Dikurangi: bagian lancar	**(566,327)**	**(649,771)**	***Less: current portion***
Bagian tidak lancar	**1,242,799**	**805,204**	***Non-current portion***

19. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA / *19. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES*

	2021	2020	
Biaya dibayar dimuka:			*Prepaid expenses:*
Asuransi	30,504	8,382	*Insurance*
Sewa	6,175	7,550	*Rental*
Lain-lain	64,201	38,566	*Others*
Subjumlah	100,880	54,498	*Subtotal*
Uang muka:			*Advances:*
Pembelian material	6,365	2	*Material purchase*
Uang muka pembangunan pembangkit listrik	804	805	*Advances for power plants construction*
Subjumlah	7,169	807	*Subtotal*
Jumlah	108,049	55,305	*Total*
Dikurangi: bagian jangka pendek	**(66,638)**	**(11,343)**	***Less: current portion***
Bagian jangka panjang	**41,411**	**43,962**	***Long-term portion***

20. MODAL SAHAM / *20. CAPITAL STOCK*

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholders as at 31 December 2021 and 2020 were as follows:

Pemegang saham/ *Stockholder*	Jumlah Saham/ *Number of Shares*)*	Persentase pemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah modal disetor/ *Total paid-in capital*
PLN	5,215,647,599	100%	2,607,824
Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN ("YPK PLN")	1	-	-
Jumlah/*Total*	**5,215,647,600**	**100%**	**2,607,824**

*) Dalam jumlah penuh/*In full amount*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/72 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *21. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Tambahan modal disetor berasal dari nilai pengalihan aset tetap, aset tidak lancar lainnya dan material cadang sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 yang diterima dari PLN, pemegang saham.

Additional paid-in capital represents property, plant and equipment, non-current assets and spare parts transferred by PLN, a shareholder, to the Company during 1996 to 2000.

22. UTANG USAHA / *22. TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan utang pembelian tenaga listrik, bahan bakar, barang dan jasa lainnya.

This account represents payables arising from purchases of electricity, fuel, other goods and services.

Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

Details of trade payables are as follows:

	2021	2020	
Pihak berelasi (Catatan 36)	1,268,661	2,096,432	*Related parties (Note 36)*
Pihak ketiga	2,340,280	2,884,934	*Third parties*
Jumlah	**3,608,941**	**4,981,366**	***Total***

23. LIABILITAS SEWA / *23. LEASE LIABILITIES*

Nilai tunai pembayaran minimum atas liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The present value of minimum lease payments for the lease liabilities as at 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020	
Pembayaran jatuh tempo dalam waktu:			*Minimum lease payments due:*
Tidak lebih dari 1 tahun	973,952	963,013	*Not later than a year*
Antara lebih dari 1 sampai 5 tahun	2,411,840	2,683,353	*Between one to five years*
Lebih dari 5 tahun	2,832,724	3,396,208	*More than five years*
Jumlah pembayaran minimum sewa	6,218,516	7,042,574	*Total minimum lease payments*
Dikurangi bunga	(2,663,345)	(3,006,781)	*Less interest*
Nilai tunai pembayaran minimum sewa pembiayaan masa datang	3,555,171	4,035,793	*Present value of future minimum lease payments*
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	**(670,239)**	**(605,038)**	***Less: current maturities***
Bagian jangka panjang	**2,884,932**	**3,430,755**	***Long-term maturities***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/73 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS SEWA (lanjutan) / *23. LEASE LIABILITIES (continued)*

Arus kas keluar untuk seluruh sewa pada tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.064.207 dan Rp1.438.720.

The cash outflows for all leases in 2021 and 2020 were Rp1,064,207 and Rp1,438,720, respectively.

Laporan laba rugi konsolidasi grup termasuk menyajikan jumlah berkaitan dengan sewa:

The Group's consolidated statements of profit or loss include the following amounts related to leases:

	2021	2020	
Biaya bunga (disajikan sebagai bagian dari biaya keuangan)	368,786	277,911	*Interest expense (presented as part of finance costs)*
Biaya yang berkaitan dengan pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam kewajiban sewa (disajikan sebagai bagian dari beban usaha)	2,728	2,203	*Expenses related to variable leases which are not included as leases liabilities (presented as part of operating expenses)*
Biaya terkait sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban usaha)	39,866	35,535	*Expenses related to short-term leases (presented as part of operating expenses)*
Biaya yang berkaitan dengan sewa aset bernilai rendah yang bukan merupakan sewa jangka pendek (disajikan sebagai bagian dari beban usaha)	15,689	15,087	*Expenses related to low value assets which are not classified as short-term leases (presented as part of operating expenses)*

24. UTANG PAJAK / *24. TAXES PAYABLE*

	2021	2020	
PPN	142,072	155,870	*VAT*
Pajak penghasilan ("PPh"):			*Income taxes :*
Pasal 21	145,997	155,136	*Article 21*
Pasal 22	28,783	17,950	*Article 22*
Pasal 23 dan 26	15,913	15,343	*Article 23 and 26*
Pasal 4 (2)	13,389	17,998	*Article 4 (2)*
Pasal 15	619	577	*Article 15*
Jumlah	**346,773**	**362,874**	***Total***

25. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *25. ACCRUED EXPENSES*

	2021	2020*	
Penyisihan atas tuntutan hukum	87,446	-	*Provision for legal claims*
Bunga	87,306	85,318	*Interest*
Pembelian listrik	43,295	36,856	*Purchase of electricity*
Kepegawaian	24,738	24,786	*Personnel*
Sewa	15,574	15,776	*Lease*
Pendapatan diterima dimuka	10,597	9,625	*Unearned revenue*
Asuransi	9,516	-	*Insurance*
Perbaikan dan pemeliharaan	1,551	1,106	*Repairs and maintenance*
Pendidikan dan pelatihan	1,142	2,542	*Learning and development*
Bahan bakar	-	51,874	*Fuel*
Lain-lain	38,833	60,533	*Others*
Jumlah	**319,998**	**288,416**	***Total***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 41

*) *As reclassified, see Note 41*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/74 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. PENJUALAN TENAGA LISTRIK / *SALES OF ELECTRICITY*

Akun ini merupakan penjualan tenaga listrik kepada PLN, pemegang saham (Catatan 36).

This account represents electricity sales to PLN, to a shareholder (Note 36).

27. PENDAPATAN JASA / *SERVICE REVENUE*

Akun ini terutama merupakan pendapatan sewa pembangkit tenaga listrik dan pendapatan jasa operasi dan pemeliharaan yang diperoleh dari PLN, pemegang saham (Catatan 36).

This account mainly consists of rental income from power plants and revenue from operation and maintenance services obtained from PLN, a shareholder (Note 36).

28. BEBAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS / *FUEL AND LUBRICANTS EXPENSES*

	2021	2020*	
Bahan bakar minyak			*Fuel*
Solar High Speed Diesel	932,035	216,879	*Solar High Speed Diesel*
Residu	148,782	109,233	*Residue*
Subjumlah	1,080,817	326,112	*Subtotal*
Bahan bakar non-minyak			*Non fuel*
Gas alam	7,059,661	4,961,193	*Natural gas*
Panas bumi	2,492,360	2,417,353	*Geothermal*
Air	50,528	41,868	*Water*
Batu bara	186,920	22,610	*Coal*
Subjumlah	9,789,469	7,443,024	*Subtotal*
Minyak pelumas dan lain-lain	27,058	26,989	*Lubricants and others*
Jumlah	**10,897,344**	**7,796,125**	***Total***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 41

*) *As reclassified, please see Note 41*

29. BEBAN PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN / *REPAIRS AND MAINTENANCE EXPENSES*

	2021	2020	
Jasa kontraktor	2,614,257	2,253,122	*Contractor services*
Pemakaian suku cadang	558,309	539,654	*Spare parts used*
Jumlah	**3,172,566**	**2,792,776**	***Total***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/75 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. BEBAN KEPEGAWAIAN / 30. *EMPLOYEE COSTS*

	2021	2020	
Tunjangan karyawan	1,230,693	1,145,963	*Employee allowances*
Penyisihan imbalan kerja (Catatan 35)	487,136	697,188	*Provision for employee benefits (Note 35)*
Gaji	467,928	455,863	*Salaries*
Tunjangan kesehatan	67,653	53,756	*Medical allowances*
Jumlah	**2,253,410**	**2,352,770**	***Total***

31. BEBAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK / 31. *PURCHASE OF ELECTRICITY*

Akun ini merupakan biaya pemakaian tenaga listrik untuk *auxiliary equipment* mesin pembangkit.

This account represents the cost of using electricity for auxiliary equipment of generating machineries.

32. BEBAN LAIN-LAIN - BERSIH / 32. *OTHER EXPENSES - NET*

	2021	2020	
Beban penelitian dan pengembangan	89,630	59,850	*Research and development expense*
Program pemberdayaan lingkungan	39,116	33,935	*Community development programmes*
Denda pajak	28,253	9,696	*Tax penalties*
Lain-lain	110,756	127,507	*Others*
Jumlah	**267,755**	**230,988**	***Total***

33. PAJAK PENGHASILAN / 33. *INCOME TAX*

	2021	2020	
Beban pajak kini:			*Current tax expense:*
Perusahaan	81,662	-	*The Company*
Entitas anak	83,895	76,509	*Subsidiaries*
Beban pajak tangguhan:			*Deferred tax expense:*
Perusahaan	1,714,764	2,456,387	*The Company*
Entitas anak	(2,164)	16,391	*Subsidiaries*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**1,878,157**	**2,549,287**	***Consolidated income tax expense***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/76 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) / *33. INCOME TAX (continued)*

a. Pajak kini / *a. Current tax*

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak penghasilan dan hasil perkaitan laba sebelum pajak dengan tarif pajak efektif adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total income tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to the profit before tax is as follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	5,909,311	12,773,358	*Profit before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income*
Beban pajak menggunakan tarif pajak yang berlaku 22%	1,300,048	2,810,139	*Income tax expense calculated at the prevailing tax rate of 22%*
Kesejahteraan karyawan	56,882	15,199	*Employee benefits*
Bagian laba bersih asosiasi dan ventura bersama	(98,078)	(113,909)	*Share in net income of associates and joint ventures*
Beban lain yang tidak dapat dikurangkan	37,393	82,861	*Other non-deductible expenses*
Pemanfaatan rugi pajak tahun berjalan	(64,036)	-	*Utilisation of tax loss carry forward in current year*
Pajak tangguhan atas rugi pajak ke depan yang belum diakui	21,569	(422,084)	*Unrecognised deferred tax on tax losses carry forward*
Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak	632,352	193,447	*Adjustments due to change in tax rate*
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(7,973)	(16,366)	*Finance income subject to final tax*
Beban pajak penghasilan konsolidasian	**1,878,157**	**2,549,287**	***Consolidated income tax expense***

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PPh Badan.

The taxable income resulting from the reconciliation will become the basis for filing the Annual Tax Return.

b. Pajak tangguhan / *b. Deferred tax*

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut:

The details of the Group deferred tax assets and liabilities are as follows:

	2021						
	1 Januari/ *1 January 2021*	Dampak penyesuaian tarif pajak pada laporan laba rugi/ *Impact of adjustments due to changes in tax rates to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income*	Ditransfer ke/dari aset/ (liabilitas) pajak tangguhan/ *Transfer to/ from deferred tax assets/ (liabilities)*	31 Desember/ *31 December 2021*	
Aset pajak tangguhan							***Deferred tax assets***
Liabilitas imbalan kerja	767,835	399	4,698	(37)	(759,927)	12,968	*Employee benefits liabilities*
Bonus	121,252	2,452	(5,253)	-	(104,595)	13,856	*Bonus*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	4,238	421	306	-	-	4,965	*Allowance for expected credit loss of trade receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	3,307	2	1	-	(3,292)	18	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Aset tetap	(29,493)	177	(104)	-	16,956	(12,464)	*Property, plant and equipment*
Akumulasi rugi fiskal	15,753	-	-	-	(15,753)	-	*Accumulated tax losses*
Liabilitas sewa	29,821	(174)	174	-	(29,671)	150	*Lease liabilities*
Aset pajak tangguhan-akhir tahun	**912,713**	**3,277**	**(178)**	**(37)**	**(896,282)**	**19,493**	***Deferred tax assets at the end of the year***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/77 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) / ***33. INCOME TAX*** *(continued)*

b. Pajak tangguhan (lanjutan) / ***b. Deferred tax*** *(continued)*

Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Grup adalah sebagai berikut: / *The details of the Group's deferred tax assets and liabilities are as follows:*

	2021						
	1 Januari/ *1 January 2021*	Dampak penyesuaian tarif pajak pada laporan laba rugi/ *Impact of adjustments due to changes in tax rates to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income*	Ditransfer ke/dari aset/ (liabilitas) pajak tangguhan/ *Transfer to/ from deferred tax assets/ (liabilities)*	31 Desember/ *31 December 2021*	
Liabilitas pajak tangguhan							***Deferred tax liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	-	71,665	65,942	(117,879)	759,927	779,655	*Employee benefits liabilities*
Bonus	-	-	3,076	-	104,595	107,671	*Bonus*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	-	328	23,792	-	3,292	27,412	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Aset tetap	(31,477)	(1,087,743)	(1,355,695)	106,275	(728,506)	(3,097,146)	*Property, plant and equipment*
Aset keuangan dari konsesi jasa	(913,722)	380,159	157,346	-	727,303	351,086	*Financial assets of service concession*
Liabilitas sewa	-	(38)	25,469	-	29,671	55,102	*Lease liabilities*
Liabllitas pajak tangguhan akhir tahun	**(945,199)**	**(635,629)**	**(1,080,070)**	**(11,604)**	**896,282**	**(1,776,220)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
Beban pajak tangguhan		**(632,352)**	**(1,080,248)**	**(11,641)**	**-**		***Deferred tax expense***

	2020						
	1 Januari/ *1 January 2020*	Dampak penyesuaian tarif pajak pada laporan laba rugi/ *Impact of adjustments due to changes in tax rates to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income*	Dampak penyesuaian tarif pajak pada laporan ekuitas/ *Impact of adjustment due to changes in tax rates to equity*	31 Desember/ *31 December 2020*	
Aset pajak tangguhan							***Deferred tax assets***
Liabilitas imbalan kerja	793,811	(159,386)	109,392	24,517	(499)	767,835	*Employee benefits liabilities*
Bonus	121,808	(13,077)	12,521	-	-	121,252	*Bonus*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	683	201	3,354	-	-	4,238	*Allowance for expected credit loss of trade receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	4,993	(878)	(808)	-	-	3,307	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Aset tetap	(583,131)	(112,782)	502,181	164,239	-	(29,493)	*Property, plant and equipment*
Akumulasi rugi fiskal	1,906,323	5,344	(1,895,914)	-	-	15,753	*Accumulated tax losses*
Liabilitas sewa	22,028	(22,581)	30,374	-	-	29,821	*Lease liabilities*
Aset pajak tangguhan-akhir tahun	**2,266,515**	**(303,159)**	**(1,238,900)**	**188,756**	**(499)**	**912,713**	***Deferred tax assets at the end of the year***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/78 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan) / ***33. INCOME TAX** (continued)*

b. Pajak tangguhan (lanjutan) / ***b. Deferred tax** (continued)*

	2020						
	1 Januari/ *1 January 2020*	Dampak penyesuaian tarif pajak pada laporan laba rugi/ *Impact of adjustments due to changes in tax rates to profit or loss*	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited/ (charged) to profit or loss*	Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/ *Credited to other comprehensive income*	Dampak penyesuaian tarif pajak pada laporan ekuitas/ *Impact of adjustment due to changes in tax rates to equity*	31 Desember/ *31 December 2020*	
Liabilitas pajak tangguhan							***Deferred tax liabilities***
Liabilitas imbalan kerja	9,534	(9,534)	-	-	-	-	*Employee benefits liabilities*
Bonus	1,740	(1,740)	-	-	-	-	*Bonus*
Cadangan kerugian kredit ekspektasian piutang usaha	14	(14)	-	-	-	-	*Allowance for expected credit loss of trade receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dan persediaan usang	59	(59)	-	-	-	-	*Allowance for decline in value of inventories and inventory obsolescence*
Aset tetap	(12,738)	(12,050)	(6,689)	-	-	(31,477)	*Property, plant and equipment*
Akumulasi rugi fiskal	(10,294)	10,294	-	-	-	-	*Accumulated tax losses*
Aset keuangan dari konsesi jasa	(3,584)	123,604	(1,033,742)	-	-	(913,722)	*Financial assets of service concession*
Liabilitas sewa	789	(789)	-	-	-	-	*Lease liabilities*
Liabilitas pajak tangguhan akhir tahun	**(14,480)**	**109,712**	**(1,040,431)**	**-**	**-**	**(945,199)**	***Deferred tax liabilities at the end of the year***
Beban pajak tangguhan		**(193,447)**	**(2,279,331)**	**188,756**	**(499)**		***Deferred tax expense***

Pajak penghasilan sehubungan dengan penghasilan/(kerugian) komprehensif lain selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The income tax relating to other comprehensive income/(loss) during the year was as follows:

	2021			2020			
	Sebelum pajak/ *Before tax*	**Kredit/ (beban) pajak/ *Tax credit/ (charge)***	**Setelah pajak/ *After tax***	**Sebelum pajak/ *Before tax***	**Kredit pajak/ *Tax credit***	**Setelah pajak/ *After tax***	
Pengukuran kembali atas kewajiban manfaat karyawan	535,984	(117,916)	418,068	(110,940)	24,018	(86,922)	*Remeasurements of employee benefits obligations*
Revaluasi aset tetap	(483,069)	106,275	(376,794)	(746,540)	164,239	(582,301)	*Revaluation of property, plant and equipment*
Total	**52,915**	**(11,641)**	**41,274**	**(857,480)**	**188,257**	**(669,223)**	***Total***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/79 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

***33. INCOME TAX** (continued)*

c. Surat ketetapan pajak

Tabel dibawah ini menunjukkan Surat Ketetapan Pajak Grup yang masih dalam proses keberatan dan/atau banding:

c. Tax assessment letters

The below table shows the tax assessment letters which are still in the process of objection and/or appeal:

Jenis pajak/*Tax type*	Tahun pajak/ *Fiscal year*	Surat ketetapan pajak/ *Tax assessment letter*	2021	2020	Status
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	161,344	161,344	Banding/*Appeal*
PPh 23/*Income Tax Art 23*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	75,775	75,775	Banding/*Appeal*
Pajak Penghasilan Badan/*CIT*	2016	Kurang bayar/*Underpayment*	16,094	-	Keberatan/*Objection*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2017	Kurang bayar/*Underpayment*	46,372	46,372	Banding/*Appeal*
PPh 21/*Income Tax Art 21*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	-	1,967	Keberatan/*Objection*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	35,750	36,014	Banding/*Appeal*
PPh 23/*Income Tax Art 23*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	19,925	19,925	Banding/*Appeal*
PPh 26/*Income Tax Art 26*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	60	147	Banding/*Appeal*
PPN Dalam Negeri/VAT Collector	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	116	12,087	Banding/*Appeal*
PPh 4 ayat (2)/*Income Tax Art 4 (2)*	2018	Kurang bayar/*Underpayment*	136,071	136,071	Banding/*Appeal*
PPh 22/*Income Tax Art 22*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	108,289	-	Keberatan/*Objection*
PPN Pemungut/*VAT Collector*	2019	Kurang bayar/*Underpayment*	8,967	-	Keberatan/*Objection*
			608,763	**489,702**	

d. Tarif pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19") dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 antara lain menetapkan penyesuaian tarif PPh Badan menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020-2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

d. Tax rates

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020, on State Finances and the Stability of Financial System Policies for the Mitigation of the Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19") Pandemic and/or to Deal with Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System, which was approved by the House of Representatives ("DPR") on 16 May 2020 as Law No. 2 of 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the CIT rate to 22% which applies in fiscal years 2020-2021 and to 20% which starts to apply in fiscal year 2022.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/80 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

33. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

d. Tarif pajak (lanjutan)

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah disahkan. UU HPP antara lain menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 dan 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, dengan demikian tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun pajak 2022 tetap sebesar 22%, Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022, serta pengenaan pajak karbon mulai 1 Juli 2022 dengan tarif minimal sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

e. Administrasi

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan-perusahaan di dalam Grup yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

***33. INCOME TAX** (continued)*

***d. Tax rates** (continued)*

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonisation of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from 1 April 2022 and to 12% at the latest by 1 Januari 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Tax Payers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%, Taxpayer Voluntary Disclosure Programme which starts from January 1 – 30 June 2022, and imposition of a carbon tax which starts from 1 July 2022 at a minimum rate of Rp30 per kilogram of carbon dioxide equivalent to carbon emissions that have a negative impact on the environment.

e. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, companies within the Group which are domiciled in Indonesia calculate and pay tax on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

34. DIVIDEN

- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 23 Juni 2020, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2019 untuk dividen sebesar Rp7.365.289. Pada tanggal 31 Desember 2020, pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan cara saling hapus terhadap piutang usaha dari PLN.

- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Juni 2021, pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih tahun 2020 untuk dividen sebesar Rp10.218.256. Pada tanggal 31 Desember 2021, pembayaran dividen kepada PLN dilakukan dengan cara saling hapus terhadap piutang usaha dari PLN.

34. DIVIDENDS

- *Based on Annual General Shareholder' Meeting dated 23 June 2020, the shareholder agreed to distribute the 2019 net income amounting to Rp7,365,289 as dividends. On 31 December 2020, the dividends payments to PLN were made through offsetting against the trade receivables from PLN.*

- *Based on Annual General Shareholder' Meeting dated 29 June 2021 the shareholder agreed to distribute the 2020 net income amounting to Rp10,218,256 as dividends. On 31 December 2021, the dividends payment to PLN was offsetted against the trade receivables from PLN.*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/81 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *35. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2021	2020*	
Liabilitas diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian:			***Liabilites recognised in the consolidated statements of financial position:***
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun manfaat pasti	113,443	124,774	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	1,562,976	1,376,537	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	1,787,090	2,199,234	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	139,323	118,947	*Other long-term benefits*
Jumlah	3,602,832	3,819,492	*Total*
Jumlah bagian jangka panjang	**(3,463,984)**	**(3,582,923)**	***Total non-current portion***
Bagian jangka pendek:			*Current portion:*
Gaji dan upah	552,402	558,679	*Salaries and wages*
Liabilitas imbalan kerja	138,848	236,569	*Employee benefits*
Jumlah bagian jangka pendek	**691,250**	**795,248**	***Total current portion***

*) Direklasifikasikan kembali, lihat Catatan 41 / *) *As reclassified, please see Note 41*

	2021	2020	
Beban diakui di laba rugi: (Catatan 30)			***Expenses recognised in profit or loss: (Note 30)***
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun manfaat pasti	19,886	19,104	*Defined benefit pension programme*
Imbalan pascakerja lainnya	207,785	282,491	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	211,389	358,352	*Health care benefits*
Imbalan jangka panjang lainnya	48,076	37,241	*Other long-term benefits*
Jumlah	**487,136**	**697,188**	***Total***
Pengukuran kembali program imbalan pasti diakui di penghasilan komprehensif lain:			***Remeasurement on defined benefit recognised in other comprehensive income:***
Imbalan pascakerja			*Post-employment benefits*
Program pensiun manfaat pasti	(16,026)	95,479	*Defined benefit pension programme*
Imbalan pascakerja lainnya	51,725	(45,601)	*Other post-employment benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	(571,683)	61,062	*Health care benefits*
Jumlah	**(535,984)**	**110,940**	***Total***

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan

Program pensiun manfaat pasti

Dana Pensiun - Perusahaan Listrik Negara ("DP-PLN") telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. KEP-20/NB.1/2017 tanggal 26 April 2017 atas peningkatan imbalan pasti pensiun yang disediakan Grup dalam program dana pensiun.

Pendanaan DP-PLN terutama berasal dari iuran karyawan dan pemberi kerja masing-masing sebesar 6,00% dan 16,20% dari penghasilan dasar pensiun.

Imbalan pemeliharaan kesehatan

Selain program pensiun yang dikelola oleh DP-PLN, Grup menyediakan imbalan program kesehatan tanpa pendanaan bagi pensiunan dan tanggungannya yang memenuhi persyaratan.

Post-employment benefits obligations

Defined benefit pension programme

Dana Pensiun - Perusahaan Listrik Negara ("DP-PLN") has obtained an approval from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. KEP-20/NB.1/2017 dated 26 April 2017 in relation to the increase in pension benefits provided by the Group's pension plan.

DP-PLN is mainly funded by contributions from both the employees and the employer, which are 6.00% and 16.20% from basic pension income, respectively.

Health care benefits

In addition to the pension plan managed by DP-PLN, the Group also provides unfunded healthcare benefit plans for its pensioners and their eligible dependents.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/82 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

Imbalan jangka panjang lainnya

Selain dari imbalan pensiun dan imbalan pemeliharaan kesehatan, Grup menyediakan imbalan pesangon dan penghargaan purna jabatan tanpa pendanaan bagi pegawai yang memenuhi syarat.

Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti uang cuti besar, tunjangan kecelakaan dinas, bantuan kematian dan penghargaan kesetiaan kerja.

Perhitungan aktuaria atas imbalan pensiun, imbalan pascakerja lainnya, imbalan pemeliharaan kesehatan dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dihitung oleh kantor konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan dalam laporannya masing-masing tertanggal 22 Maret 2022 dan 31 Maret 2021.

Asumsi akturial utama yang digunakan dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja

35. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES* *(continued)*

Post-employment benefits obligations *(continued)*

Other long-term benefits

In addition to the pension benefits and healthcare benefits, the Group also provides unfunded severance benefits and completion of employment awards for eligible employees.

The Group provides other long-term employee benefits such as long leave allowance, disability benefits, death benefits and loyalty benefits.

The actuarial calculations of pension benefits, other post-employment benefits, healthcare benefits and other long-term benefits for the years ended 31 December 2021 and 2020 were calculated by a registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan based on its reports dated 22 March 2022 and 31 March 2021, respectively.

The principal actuarial assumptions used in the calculations of post employment benefits obligations

Tabel mortalita	CSO-58	*Mortality table*
Tingkat pengunduran diri		*Resignation rate*
Usia 18 - 49 tahun	0.30%	*Age 18 - 49 years old*
Usia 50 - 55 tahun	0.58%	*Age 50 - 55 years old*
Usia pensiun normal	56 tahun/ *Years old*	*Normal retirement age*

Asumsi yang berhubungan dengan pengalaman mortalitas masa depan ditentukan berdasarkan saran aktuaris menurut statistik yang telah diterbitkan dan pengalaman setiap wilayah. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah tabel mortalita CSO-58 yang diterapkan dalam penghitungan liabilitas kerja jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tahun 2020, Grup melakukan studi untuk melihat tabel mortalitas mana yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup. Dalam melakukan kajian, Grup telah mempertimbangkan CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011 dan TMI-2019. Dari studi tersebut, Grup memutuskan bahwa tabel mortalitas yang paling sesuai dengan profil mortalitas pegawai dan pensiunan Grup adalah CSO-58.

Assumptions regarding future mortality experience are set based on actuarial advice in accordance with published statistics and experience by the Company and its subsidiaries. The mortality assumptions used are based on the CSO-58 mortality table which is applied in calculating the other long-term benefits liability recognised in the consolidated statements of financial position.

In 2020, the Group conducted a study to determine which mortality tables best suited with the Group's employees' and pensioners' mortality profile. In conducting the study, the Group considered CSO-58, GAM-71, ANN-49, GAM-83, TMI-2011 and TMI-2019. Based on the study, the Group decided that the mortality table that best suited the mortality profile of the Group employees and pensioners was CSO-58.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/83 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *35. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefits obligations*** *(continued)*

i. Program pensiun manfaat pasti / ***i. Defined benefit pension program***

Jumlah liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

The liabilities recognised in the consolidated statements of financial position as at 31 December 2021 and 2020 were determined as follows:

	2021	2020	
Nilai kini kewajiban yang didanai	955,794	911,219	*Present value of funded obligations*
Nilai wajar aset program	(842,351)	(786,445)	*Fair value of plan assets*
Defisit program yang didanai	113,443	124,774	*Deficit of funded plans*
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	-	-	*Present value of unfunded obligations*
Liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian	**113,443**	**124,774**	***Liability in the consolidated statement of financial position***

Mutasi kewajiban program pensiun manfaat pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the defined benefit pension programme during the years were as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	911,219	818,744	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	16,595	21,724	*Current service cost*
Biaya bunga	65,836	68,752	*Interest expense*
Keuntungan aktuarial dari:			*Actuarial gains from changes in:*
Perubahan asumsi demografik	-	(698)	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	19,405	4,402	*Financial assumptions*
Asumsi lainnya	-	15,537	*Other assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	7,201	43,365	*Experience adjustments*
Pembayaran manfaat	(64,462)	(60,607)	*Benefit payments*
Saldo akhir	**955,794**	**911,219**	***Ending balance***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	6.90%	7.49%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5.00%	5.00%	*Salary increase rate per annum*

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements of fair value of plan assets during the years were as follows:

	2021	2020	
Pada awal tahun	786,445	794,718	*At beginning of the year*
Imbal hasil atas aset program	57,257	65,935	*Return on plan assets*
Iuran pemberi kerja	15,191	14,334	*Employer's contributions*
Iuran pekerja	5,288	5,437	*Employees' contributions*
Pembayaran manfaat	(64,462)	(60,607)	*Benefit payments*
Keuntungan/(kerugian) aktuarial pada aset program	42,632	(33,372)	*Actuarial gains/(losses) on plan assets*
Pada akhir tahun	**842,351**	**786,445**	***At the end of the year***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/84 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan)

i. Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Aset program terdiri dari:

35. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES *(continued)*

Post-employment benefits obligations *(continued)*

i. Defined benefit pension program *(continued)*

Plan assets comprise the following:

	2021		2020		
	Jumlah/ *Total*	%	Jumlah/ *Total*	%	
Instrumen utang	446,941	53.05	340,607	20.71	*Debt instruments*
Instrumen ekuitas	147,710	17.53	164,044	43.00	*Equity instruments*
Properti	104,069	12.36	84,179	10.63	*Properties*
Kas dan setara kas	40,192	4.78	80,601	10.18	*Cash and cash equivalents*
Lain-lain	103,439	12.28	117,014	15.48	*Other*
Jumlah	**842,351**	**100.00**	**786,445**	**100.00**	***Total***

Sensitivitas dari kewajiban program pensiun manfaat pasti untuk program pensiun terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit pension programme obligations to changes in the main actuarial assumptions is as follows:

	Dampak atas kewajiban program pensiun manfaat pasti/ *Impact on defined benefit pension programme obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(22,468)	25,100	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	25,365	(22,860)	*Salary increase rate*

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas program pensiun manfaat pasti atas asumsi aktuaria utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti kesehatan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir tahun) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban manfaat pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit pension programme to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined medical benefit obligation calculated with the Projected Unit Credit method at the end of the reporting year) has been applied as when calculating the pension benefits liabilities recognised within the consolidated statement of financial position.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/85 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***35. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

Liabilitas imbalan pascakerja karyawan (lanjutan) / ***Post-employment benefits obligations*** *(continued)*

ii. Imbalan pascakerja lainnya / ***ii. Other post-employment benefits***

Mutasi kewajiban imbalan pasti selama tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *The movements in the defined benefit obligation during the years were as follows:*

	2021	2020	
Saldo awal	1,376,538	1,258,137	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa lalu-*vested*	6,203	61,247	*Past service cost-vested*
Biaya jasa kini	69	26	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	103,971	117,370	*Past service cost*
Biaya bunga	97,542	103,848	*Interest expense*
	207,785	282,491	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charge to other comprehensive income:*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gains)/losses from changes in:*
Perubahan asumsi demografik	(7)	142	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	49,726	47,618	*Financial assumptions*
Asumsi lainnya	3,666	(2,541)	*Other assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(1,660)	(90,820)	*Experience adjustments*
	51,725	(45,601)	
Pembayaran manfaat	(73,072)	(118,490)	*Benefit payments*
Saldo akhir	**1,562,976**	**1,376,537**	***Ending balance***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut: / *The principal actuarial assumptions used were as follows:*

	2021	2020	
Tingkat diskonto	7.45% - 7.59%	7.15% - 7.82%.	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	7.02% - 7.20%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut: / *The sensitivity of the other post-employment benefits to changes in the weighted principal assumptions is as follows:*

	Dampak atas kewajiban imbalan pascakerja lainnya/ *Impact on other post-employment benefits obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(138,296)	724,936	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	1%	225,617	(596,438)	*Salary increase rate*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/86 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *35. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

iii. Imbalan pemeliharaan kesehatan / *iii. Healthcare benefits*

Grup memiliki beberapa skema imbalan pemeliharaan kesehatan pascakerja. Metode akuntansi, asumsi dan frekuensi penilaian adalah sama dengan yang digunakan dalam skema imbalan pensiun.

The Group has several healthcare benefit schemes. The method of accounting, assumptions and the frequency of valuations are similar to those used for pension benefit schemes.

Mutasi kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Movements of healthcare benefits obligations during the years were as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	2,199,234	1,831,819	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya bunga atas kewajiban	162,781	158,102	*Interest expense on liabilities*
Biaya jasa kini	48,608	89,334	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	110,916	*Past service cost*
	211,389	358,352	
Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain:			*Charge to Other comprehensive income*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gains)/losses from changes in:*
Perubahan asumsi keuangan	(494,349)	93,394	*Financial assumptions*
Asumsi lainnya	2,028	(927)	*Other assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(79,362)	(31,405)	*Experience adjustments*
	(571,683)	61,062	
Pembayaran manfaat	(51,850)	(51,999)	*Benefit payments*
Saldo akhir	**1,787,090**	**2,199,234**	***Ending balance***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	7.60%	7.49%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan jangka panjang	5.35%	7.00%	*Long-term increase rate in health cost*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan untuk pemeliharaan kesehatan terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the healthcare benefit obligations to changes in the weighted principal assumptions was as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan pemeliharaan kesehatan/ *Impact on healthcare benefit obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(266,654)	332,656	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya	1%	336,038	(273,194)	*Increase rate*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/87 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***35. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*** *(continued)*

iv. Imbalan kerja jangka panjang lainnya / ***iv. Other long-term benefits***

Mutasi kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the other long-term benefit obligations during the year were as follows:

	2021	2020	
Saldo awal	118,947	99,363	*Beginning balance*
Dibebankan ke laba rugi:			*Charged to profit or loss:*
Biaya jasa kini	33,367	31,275	*Current service cost*
Biaya bunga	7,599	7,043	*Interest expense*
(Keuntungan)/kerugian aktuarial dari:			*Actuarial (gains)/losses from changes in:*
Perubahan asumsi demografik	-	(448)	*Demographic assumptions*
Perubahan asumsi keuangan	7,426	1,761	*Financial assumptions*
Asumsi lainnya	22	(25)	*Other assumptions*
Penyesuaian atas pengalaman	(338)	(2,365)	*Experience adjustments*
	48,076	37,241	
Pembayaran manfaat	(27,700)	(17,657)	*Benefit payments*
Saldo akhir	**139,323**	**118,947**	***Ending balance***

Asumsi aktuarial utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used were as follows:

	2021	2020	
Tingkat diskonto	4.82 - 4.92%	7.15% - 7.23%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7.12%	7.02% - 7.20%	*Salary increase rate per annum*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long-term benefit obligations to changes in the weighted principal assumptions was as follows:

	Dampak atas kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya/ *Impact on other long-term benefit obligations*			
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	Kenaikan asumsi/ *Increase in assumption*	Penurunan asumsi/ *Decrease in assumption*	
Tingkat diskonto	1%	(3,532)	3,753	*Discount rate*
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	1%	4,382	(3,798)	*Health care increase rate*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/88 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Grup terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti dan program kesehatan pascakerja. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

Volatilitas aset

Kewajiban dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada *Zero Coupon Bond* dari *Indonesia Government Securities Yield Curve* ("IGSYC"). Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

Grup menempatkan investasi aset program pada beragam jenis aset investasi agar dapat terdiversifikasi dengan baik sehingga dapat meminimalisir dampak kinerja buruk dari satu aset terhadap seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen ekuitas, meskipun Grup juga berinvestasi pada properti, obligasi, reksadana dan kas. Grup meyakini bahwa instrumen ekuitas memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima.

Harapan umur hidup

Sebagian besar dari kewajiban manfaat pasti menyediakan manfaat seumur hidup, sehingga kenaikan harapan umur hidup akan mengakibatkan kenaikan liabilitas manfaat karyawan.

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 23 tahun.

Manajemen Grup berpendapat bahwa liabilitas imbalan pasca kerja cukup untuk menutupi semua imbalan yang diatur dalam UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

35. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES* *(continued)*

The Group is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans and healthscare benefits. The most significant risks are as follows:

Assets volatility

The liabilities are calculated using a discount rate set with reference to the Zero Coupon Bond from Indonesia Government Securities Yield Curve ("IGSYC"). If plan assets underperform this yield, this will create a deficit.

The Group places its investment plan assets in various types of investment assets so that it can be properly diversified to minimise the impact of the bad performance of one asset on all asset groups. The largest proportion of assets is invested in equities, although the Group also invests in property, bonds, mutual funds and cash. The Group believes that equities offer the best returns over the long term with an acceptable level of risk.

Life expectancy

The majority of the defined benefits obligations are to provide benefits for the life of the members, so increases in life expectancy will result in an increase in the employee benefit liabilities.

The weighted average duration of the defined benefits obligation is 23 years.

The management of the Group believes that the estimated liability provided for post-employment benefits is adequate to cover the requirements of the Job Creation Law or Labour Law.

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long-term benefits is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ *Less than a year*	1 - 2 tahun/ *Between 1 - 2 years*	2 - 5 tahun/ *Between 2 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	Jumlah/*Total*	
Program pensiun manfaat pasti	67,076	67,076	211,968	699,695	1,045,815	*Defined benefit pension program*
Imbalan pascakerja lainnya	71,941	96,789	532,947	16,270,411	16,972,088	*Other long-term benefits*
Imbalan pemeliharaan kesehatan	99,226	106,698	372,628	26,020,870	26,599,422	*Health care benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	34,687	66,128	106,686	130,161	337,662	*Other long-term benefits*
Jumlah	**272,930**	**336,691**	**1,224,229**	**43,121,137**	**44,954,987**	***Total***

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/89 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI / *36. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Transaksi pihak berelasi / ***Transactions with related parties***

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
PLN	Pemegang saham Perusahaan/ *Shareholder of the Company*	Transaksi pembelian tenaga listrik/ *Purchase of electricity*
YPK PLN	Pemegang saham Perusahaan/ *Shareholder of the Company*	Penyertaan modal/ *Paid-in capital*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Direktur dan Komisaris grup/ *Directors and Commissioners of the Group*	Pembayaran gaji dan tunjangan/ *Payment of salaries and allowances*
BRI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents and short-term investment*
Bank Mandiri	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents and short-term investment*
BNI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Penempatan kas dan setara kas, dan investasi jangka pendek/ *Placement of cash and cash equivalents and short-term investment*
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar dan minyak pelumas/ *Purchase of fuels and lubricants*
PT Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ("PGN")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Nusantara Regas ("NR")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*
PT Hutama Karya (Persero) ("HK")	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Transaksi jasa konstruksi/ *Construction services*
AJI	Pengendalian melalui Pemerintah Republik Indonesia/ *Control through the Government of the Republic of Indonesia*	Asuransi bangunan, instalasi dan mesin pembangkit, perlengkapan transmisi milik Perusahaan/ *Insurance services for Company's buildings, installation and power plant, and transmission equipment*
REP, GCL dan/and PDG	Assosiasi dan ventura bersama/ *Associates and joint ventures*	Investasi, pemberian pinjaman, perdagangan batu bara, jasa pemeliharaan dan pengelolaan/ *Investment, issuance of loan, trade of coals, operations and maintenance services*
IPB, PLN SC, IRT dan/*and* MCB	Asosiasi dan ventura bersama/ Associates and joint ventures	Investasi pada asosiasi dan ventura bersama/ *Investment in associates and joint ventures*
PT Pembangkit Jawa Bali ("PJB")	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi lain-lain/ *Other transactions*
PT Haleyora Power ("Haleyora")	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi penyediaan tenaga kerja/ *Transfer of labour transaction*
PT Indonesia Comnet Plus (ICON+)	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi penyedia layanan internet/ *Internet service provider transaction*
PT PLN Batubara ("PLN B")	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi pembelian bahan bakar/ *Purchase of fuels*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/90 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

36. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi pihak berelasi (lanjutan)

***Transactions with related parties** (continued)*

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan: (lanjutan)

Below is the list of related parties with which the Company has transactions: (continued)

Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat transaksi/ *Nature of transaction*
DP - PLN	Pihak berelasi lainnya/ *Other related parties*	Pengelola dana pensiun/ *Pension fund manager*
PT Prima Layanan Nasional Enjiniring ("PLNE")	Entitas anak dari PLN / *Subsidiary of PLN*	Transaksi jasa profesional/ *Professional services transaction*
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAG")	Entitas anak dari PLN/ *Subsidiary of PLN*	Transaksi jasa transportasi bahan bakar dan batubara/ *Fuels and coal transportation services transaction*

Saldo dengan pihak berelasi

Balances with related parties

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2021 % *)	2020 Rp	2020 % *)	
Piutang pihak berelasi	11					***Receivables from related parties***
REP		358,699	0.19%	333,984	0.17%	*REP*
PDG		114,012	0.06%	179,464	0.09%	*PDG*
Lain-lain		54,380	0.03%	75,382	0.04%	*Others*
Jumlah		527,091	0.28%	588,830	0.30%	*Total*
Kas dan setara kas	13					***Cash and cash equivalents***
BNI		2,362,689	1.22%	2,089,448	1.04%	*BNI*
Bank Mandiri		312,825	0.16%	417,670	0.21%	*Bank Mandiri*
BRI		89,022	0.05%	141,921	0.07%	*BRI*
Jumlah		2,764,536	1.43%	2,649,039	1.32%	*Total*
Rekening yang dibatasi penggunaannya	14					***Restricted cash***
BNI		1,117	0.00%	-	0.00%	*BRI*
Aset keuangan dari konsesi jasa	9					***Financial assets of service concession***
PLN		43,791,382	22.61%	45,329,815	22.66%	*PLN*
Piutang usaha	15					***Trade receivables***
PLN		27,083,532	13.98%	30,741,055	15.37%	*PLN*
GCL		165,059	0.09%	-	0.00%	*GCL*
Jumlah		27,248,591	14.07%	30,741,055	15.37%	*Total*
Utang usaha	22					***Trade payables***
Pertamina		754,489	4.93%	171,541	1.07%	*Pertamina*
PLN B		102,182	0.67%	231,874	1.44%	*PLN B*
PTBA		94,198	0.62%	444,845	2.77%	*PTBA*
BAG		61,944	0.40%	226,021	1.41%	*BAG*
HK		193	0.00%	259,126	1.61%	*HK*
PGN		-	0.00%	166,819	1.04%	
NR		-	0.00%	13,673	0.09%	*NR*
Lain-lain		255,655	1.67%	582,533	3.63%	*Other*
Jumlah		1,268,661	8.29%	2,096,432	13.06%	*Total*
Pinjaman dari pemegang saham						***Loans from a shareholder***
PLN		1,546,722	10.10%	1,043,347	6.49%	*PLN*
Liabilitas sewa						***Lease liabilities***
PDG		9,431	0.06%	14,754	0.09%	*PDG*

*) Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/beban yang bersangkutan.

*) *Percentage of related total assets/liabilities/revenues/ expenses.*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/91 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

36. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

	Catatan/ Notes	2021 Rp	2021 % *)	2020 Rp	2020 % *)	
Penjualan tenaga listrik	26					***Sales of electricity***
PLN		19,907,755	51.68%	21,011,210	54.24%	*PLN*
Pendapatan konsesi jasa	9					***Revenue of service concession***
PLN		14,656,755	38.05%	14,259,159	36.81%	*PLN*
Pendapatan jasa	27					***Service revenue***
PLN		3,479,304	9.03%	3,248,553	8.39%	*PLN*
GCL		253,382	0.66%	24,192	0.06%	*GCL*
PJB		15,962	0.04%	40,994	0.11%	*PJB*
REP		1,364	0.00%	1,533	0.00%	*REP*
Jumlah		3,750,012	9.73%	3,315,272	8.56%	*Total*
Beban usaha						***Operating and expenses***
PTBA		2,975,154	9.17%	3,278,332	12.19%	*PTBA*
Pertamina		2,783,330	8.58%	997,293	3.71%	*Pertamina*
PGN		2,207,102	6.81%	1,492,380	5.55%	*PGN*
PLN B		477,157	1.47%	1,382,461	5.14%	*PLN B*
NR		442,203	1.36%	32,564	0.12%	*NR*
Haleyora		114,869	0.35%	33,625	0.13%	*PT Haleyora Power*
BAG		305,313	0.94%	336,295	1.25%	*BAG*
PJB		30,219	0.09%	1,291	0.00%	*PJB*
AJI		36,303	0.11%	79,923	0.30%	*AJI*
ICON +		15,684	0.05%	15,670	0.06%	*ICON+*
PLNE		12,769	0.04%	8,870	0.03%	*PLNE*
Lain-lain		26,559	0.08%	48,876	0.18%	*Other*
Jumlah		9,426,662	29.05%	7,707,580	28.66%	*Total*

*) **Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/pendapatan/ beban yang bersangkutan.**

*) ***Percentage of related total assets/liabilities/revenues/ expenses.***

a. Pinjaman kepada pemegang saham

Pada tanggal 12 November 2018, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PLN sebesar US$213.901.481 dengan tingkat bunga LIBOR dengan margin 0,7% per tahun. Pinjaman ini digunakan untuk mendanai proyek PLTGU Tambak Lorok Blok III. Jangka waktu perjanjian efektif sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan akan berakhir pada saat semua kewajiban pokok maupun bunga telah dibayar penuh oleh Perusahaan.

Saldo pinjaman ini pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.546.722 (setara USD$108.397.372) (2020: Rp 1.043.347 (setara $74.149.569).

a. Loans from a shareholder

On 12 November 2018, the Company entered into a loan agreement with PLN amounting to US$213,901,481 with an annual interest rate of LIBOR with a margin of 0.7% per annum. This loan will be used to fund the add-on project of PLTGU Tambak Lorok Blok III. The term of this agreement was effective when the loan was signed and ends when all the outstanding principle and interest has been fully paid by the Company.

The outstanding balance of these loans as at 31 December 2021 amounted to Rp1,546,722 (equivalent to US$108,397,372) (2020: Rp1,043,347 (equivalent to US$74,149,569).

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/92 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Kompensasi manajemen kunci

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perusahaan tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp65.507 dan Rp61.992. Seluruh kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan tersebut merupakan imbalan kerja jangka pendek.

36. THE BALANCE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

b. Key management compensation

Total remuneration paid to the Company's Boards of Commissioners and Directors in 2021 and 2020 amounted to Rp65,507 and Rp61,992, respectively. All the compensation to the Company's Boards of Commissioners and Directors represents short-term employee benefits.

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup memiliki perikatan penting dan kontinjensi sebagai berikut:

a. PJBTL

Grup memiliki sejumlah PJBTL dengan PLN. Dalam perjanjian tersebut, PLN membayar pasokan tenaga listrik yang disediakan oleh Grup sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan formula pembayaran. Pembayaran tersebut mencakup komponen biaya kapasitas, energi, operasional dan pemeliharaan yang tergantung pada tingkat pasokan energi serta variabel lain yang ditentukan dalam perjanjian.

b. Perjanjian pengadaan bahan bakar

(i). Gas

37. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

As at 31 December 2021, the Group has significant commitments and contingencies, as follows:

a. PPA

The Group has various PPAs with PLN. Under those agreements, PLN will pay the Group for the supply of electricity at an amount determined in accordance with the payment formula. Such payment formula includes cost of capacity, energy, as well as operations and maintenance components which depends on the level of energy supplied and other variables stipulated in the agreement.

b. Fuel supply agreements

(i). Gas

Sektor/ *Sector*	Pemasok/ *Suppliers*	No. Perjanjian/ *Agreement no.*	Periode/ *Duration*	Satuan/ *Unit of measure*	Jumlah yang disepakati/ *Agreed quantity*)*
Tanjung Priok	PGN	0556.PJ/EPI.01.02/010000/2019	2019 - 2030	BBTUD	s.d. 38,16(TOP 31,8)
	NR	273.PJ/041/DIR/2012	2012 - 2022	BBTUD	s.d 250
Grati	Medco Energi Sampang Pty Ltd; Singapore Petroleum Sampang Ltd; Cue Sampang Pty Ltd	Perjanjian penjualan gas/ *Gas Sales Agreement*	2004 - 2022	BBTUD	16,9 -19,1(TOP 95%)
	Medco Energi Sampang Pty Ltd; Singapore Petroleum Sampang Ltd; Cue Sampang Pty Ltd	115.PJ/061/IP/2010	2011 - 2022	BBTUD	17,1-22,7(TOP 95%)
	Kangean Energy Indonesia Ltd	462.Pj AMD II/040/DIR/2010	2012 - 2028	BBTUD	20 - 50 (TOP 90%)
	PT Pertamina Gas	0056-1.Pj/040/DIR/2014	2014 - 2033	MMSCFD	s.d 100 (TOP 80)
	PT Enviromate Technology International (CNG)	002.PJ/061/IP/2013	2012 - 2023	MMSCFD	15 (TAP)
	PT Inti Alasindo Energy	403.PJ/061/IP/2021	2021 - 2022	BBTUD	0 - 40
Tambak Lorok	PT Sumber Petrindo Perkasa	97.PJ/061/IP/2007	2010 - 2029	BBTUD	50 - 54,5 (TOP 40)
	PDG	87.PJ/061/IP/2013	2013 - 2029	BBTUD	17
	Pertamina	1670.Pj/EPI01.02/DIRUT/2017	2021 - 2035	BBTUD	100 (TOP 90%)
Bali	PT Pelindo Energi Logistik	307.PJ/061/IP/2017	2017 - 2023	BBTUD	40(TOP 32)
	PT Benoa Gas Terminal (FSRU)	045.PJ/061/IP/2019	2019 - 2033	MMSCFD	s.d 50
	Pertamina	1265.PJ/EPI.01.02/DITDAN/2018	2018 - 2022	BBTUD	*Confirmation Notice*
Sorong	PT Malamoi Olom Wobok	331.PJ/061/IP/2020	2021 - 2025	BBTUD	7,2 - 8,8
	PDG	339.PJ/061/IP/2020	2021 - 2040	MMSCFD	7,2 - 8,8

*) Dalam angka penuh

**) In full amount *)*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/93 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

(ii). Batubara

Pemasok/ *Suppliers*	No. Kontrak/ *Contract No.*	Jumlah dalam metrik ton/ *Total in metric tons *)*	Periode/ *Period*
PTBA	12.PJ/061/IP/2013	3,450,000	2013 - 2025
PT Oktasan Baruna Persada	406.PJ/061/IP/2018	1,800,000	2019 - 2026
PT Berau Coal	84.PJ/061/IP/2008	1,642,000	2009 - 2022
PT Adaro Indonesia	117.PJ/061/IP/2014	1,572,000	2014 - 2023
ADC	159.PJ/061/IP/2017	2,263,500	2017 - 2027
PLN B	170.PJ/061/IP/2020	2,046,000	2020 - 2040

*) Dalam angka penuh

Harga pembelian batubara berkisar antara Rp820.397 (angka penuh) dan Rp895.607 (angka penuh) per ton sebelum penyesuaian spesifikasi batubara (2020: Rp703.862 - Rp785.234 (angka penuh)).

Pada tanggal 2 November 2020, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Poin utama peraturan tersebut yang berkaitan dengan Grup adalah hasil pertambangan batubara termasuk dalam jenis barang yang dikenai PPN, maka seluruh pembelian batubara dikenakan PPN terhitung mulai tanggal tersebut.

(iii). Bahan Bakar Minyak

Perusahaan melalui PLN dan Pertamina mengadakan Perjanjian Payung Jual Beli Bahan Bakar Minyak No. 071.PJ/060/DIR/2001 tanggal 8 Oktober 2001. Perjanjian ini telah diadendum tanggal 16 Mei 2007 dimana Perusahaan dan Pertamina menyepakati antara lain: (i) penggunaan harga bahan bakar bulanan ditetapkan oleh Pertamina untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 April 2007 dan harga bahan bakar 109,5% dari *Mean Oil Platts Singapore* (MOPS) ditambah PPN untuk periode 1 Mei 2007 sampai dengan 31 Desember 2007; (ii) harga bahan bakar setelah tanggal 31 Desember 2007 akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setiap tahun; (iii) jangka waktu pembayaran berikut pengenaan denda keterlambatan pembayaran sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia bulanan ditambah 1,3%; Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3%, sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2007;

37. SIGNIFICANTS AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

c. Fuel supply agreements *(continued)*

(ii). Coal

*In full amount *)*

The purchase price of coal ranges from Rp820,397 (full amount) to Rp895,607 (full amount) per ton, which is adjusted against coal specification (2020: Rp703,862 - Rp785,234 (full amount)).

On 2 November 2020, the Minister of Law and Human Rights issued Law No. 11 year 2020 on Job Creation Law. The main point of the law relating to the Group relates to the inclusion of coal mining products in the types of goods subject to VAT, and therefore all purchases of coal are subject to VAT from that date.

(iii). Fuel

The Company, through PLN and Pertamina, entered into a Fuel Sale and Purchase Agreement No. 071.PJ/060/DIR/2001 dated 8 October 2001. This agreement was amended on 16 May 2007, whereby the Company and Pertamina agreed among others, that: (i) the monthly fuel price to be used for the period 1 January until 30 April 2007 is determined by Pertamina and the fuel price of 109.5% from Mean Oil Platts Singapore (MOPS) plus VAT for the period 1 May 2007 until 31 December 2007; (ii) the fuel price subsequent to 31 December 2007 will be determined by both parties every year; (iii) the terms of payment and penalty charges on late payment with a rate of monthly Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%;

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/94 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

(iii). Bahan Bakar Minyak (lanjutan)

(iv) efektif mulai 1 Mei 2007, saldo utang yang belum dibayar atas pembelian bahan bakar sampai dengan 30 April 2007 dikenakan bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia per tahun ditambah 1,3% sampai diselesaikan dengan menerbitkan obligasi PLN paling lambat 31 Agustus 2007; (v) utang kepada Pertamina, termasuk obligasi yang akan diterbitkan maksimum sebesar Rp18 triliun; (vi) perjanjian ini berlaku untuk lima tahun sejak 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011. Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Mei 2007, PT Sucofindo (Persero) ditunjuk sebagai surveyor independen.

Perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Addendum VIII tertanggal 17 Desember 2021, kesepakatan harga jual beli bahan bakar minyak (HSD dan MFO) sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2023 antara Pertamina dan Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Selama masa negosiasi, formula harga baru untuk periode tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, menggunakan formula harga sementara yang telah disepakati pada addendum untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
b. Bersamaan dengan hal tersebut, akan disepakati formula harga baru untuk periode terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, estimasi liabilitas atas pembelian bahan bakar dari Pertamina masing-masing Rp754.489 dan Rp171.541 yang disajikan sebagai utang usaha dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Fuel supply agreements *(continued)*

(iii). Fuel (continued)

(iv) effective on 1 May 2007, the unpaid balance of payable for the purchases of fuel until 30 April 2007 will bear interest with a rate per annum of Certificate of Bank Indonesia plus 1.3%, until settled by issuance of PLN bonds, which is no later than 31 August 2007; (v) the maximum payable to Pertamina includes bonds which will be issued amounting to Rp18 trillion; and (vi) this agreement is valid for five years from 1 January 2007 until 31 December 2011. Based on the Joint Deal Letter dated 16 May 2007, PT Sucofindo (Persero) is assigned as an independent surveyor.

The agreement has been amended several times. Based on Amendment VIII dated 17 Desember 2021, the agreement on the sale and purchase price of fuel oil (HSD and MFO) from 1 January 2021 to 31 December 2023 between Pertamina and the Company is as follows:

a. During the negotiation period, the new price formula for the period of 1 January 2021 to 31 December 2021, using the provisional price formula agreed in the amendment for the period of 1 January 2018 to 31 December 2020.

b. At the moment, a new price formula will be agreed for the period starting from 1 January 2022 to 31 December 2023.

As at 31 December 2021 and 2020, estimated liabilities for purchase of fuel from Pertamina amounted to Rp754,489 and Rp171,541, respectively, which are presented as trade payables in the consolidated statements of financial position.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/95 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b. Perjanjian pengadaan bahan bakar (lanjutan)

(iv). Uap panas bumi

Melalui PLN, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Pertamina untuk pengadaan uap panas bumi untuk daerah Kamojang selama 30 tahun yang berakhir tahun 2012 dan telah melalui Amandemen I Surat Perjanjian antara Pertamina dan PLN PLTP Unit 1,2,3 di Kamojang. Sampai tahun 2015, perjanjian masih menggunakan Amandemen V Perjanjian Interim antara PT Pertamina Geothermal Energy, PLN dan IP. Pada tanggal 11 Februari 2016, dilakukan amandemen secara keseluruhan dan pernyataan kembali atas perjanjian induk, yang berlaku mulai 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Desember 2040. Untuk PLTP Gunung Salak dan Darajat perjanjian selama masa 30 tahun yang berakhir tahun 2030.

c. Lainnya

Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Fasilitas Penyimpanan *Liquid Natural Gas* ("LNG") dan Perjanjian Terminal LNG untuk PLTDG Pesanggaran

Pada tanggal 8 Desember 2015, Perusahaan dan PT Pelindo Energi Logistik menandatangani masing-masing Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Fasilitas Penyimpanan LNG dan Perjanjian Terminal LNG untuk PLTDG Pesanggaran.

Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan dan Perjanjian Jasa Fasilitas LNG berlaku selama 7 tahun berdasarkan kontrak No. 187.PJ/061/IP/2015 dan 188.PJ/061/IP/2015, sedangkan Perjanjian Jasa Terminal LNG berlaku selama 5 tahun berdasarkan kontrak No. 189.PJ/061/IP/2015.

Pada tanggal 27 Desember 2017, Perusahaan dan PT Pelindo Energi Logistik menandatangani adendum perjanjian atas Perjanjian Jasa Pengurusan Pengapalan, Perjanjian Jasa Fasilitas Penyimpanan LNG dan Perjanjian Jasa Terminal LNG melalui Perjanjian Jasa Fasilitas Midstream LNG Benoa Bali No. 307.PJ/061/IP/2017 ("Perjanjian Unifikasi") yang berlaku sampai dengan 28 Februari 2023.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

b. Fuel supply agreements *(continued)*

(iv). Geothermal steam

The Company, through PLN, entered into a geothermal procurement agreement with Pertamina to purchase Geothermal Steam for Kamojang area for 30 years until 2012 and the agreement has been amended under amendment I between Pertamina and PLN PLTP Unit 1,2,3 in Kamojang. Until 2015, the agreement was still using the Fifth amendment of the Interim Agreement between PT Pertamina Geothermal Energy, PLN and IP. On 11 February 2016, the main agreement was wholly amended and restated, which is valid from 1 August 2012 to 31 December 2040. For PLTP Gunung Salak and Darajat, the agreement is valid for 30 years until 2030.

c. Others

Agreement of Shipping Management Services, Agreement of Liquid Natural Gas ("LNG") Storage Facilities and Agreement of LNG Terminal for PLTDG Pesanggaran

On 8 December 2015, the Company and PT Pelindo Energi Logistik signed an agreement for Shipping Management Services, LNG Storage Facility Services and LNG Terminal Services for PLTDG Pesanggaran.

The shipping management services agreement and LNG Storage agreement are effective for seven years based on contract No. 187.PJ/061/IP/2015 and 188.PJ/061/IP/2015 respectively, while the LNG Terminal Agreement is effective for five years based on contract No. 189.PJ/061/IP/2015.

On 27 December 2017, the Company and PT Pelindo Energi Logistik signed an addendum of the Shipping Management Agreement, LNG Storage Facility Service Agreement and LNG Terminal Services Agreement through Midstream LNG Facility Agreement Benoa Bali No. 307.PJ/061/IP/2017 ("Unification Agreement"), which is valid until 28 February 2023.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/96 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c. Lainnya (lanjutan)

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan PT Pelindo Energi Logistik menandatangani Addendum Kedua Perjanjian Unifikasi terkait pengurangan ruang lingkup jasa fasilitas penyimpanan LNG, perubahan single tarif tanpa lingkup penyimpanan dari 3,8 USD/MMBTU menjadi 2,7531 USD/MMBTU, pengurangan residual losses dari 3,56% menjadi 2,12% dan penambahan klausul ketidaksiapan fasilitas.

d. Komitmen

Stand by Letter of Credit ("SBLC")

Perusahaan memliki fasilitas Non Cash Loan berupa SBLC dengan Bank Rakyat Indonesia yang digunakan sebagai jaminan jual beli gas dari:

- Perjanjian jual beli gas dengan Medco Energi Sampang Pty Ltd dengan nominal sebesar US$10.253.469 (nilai penuh) atau setara dengan Rp146.307 dengan jangka waktu sampai dengan 30 Agustus 2022 berlokasi di Lapangan Minyak dan Gas Oyong, Jawa Timur.
- Perjanjian jual beli gas dengan Medco Energi Sampang Pty Ltd dengan nominal sebesar US$12.013.575 (nilai penuh) atau setara dengan Rp169.451 dengan jangka waktu sampai dengan 24 Januari 2022 berlokasi di Lapangan Minyak dan Gas Wortel, Jawa Timur.
- Perjanjian jual beli gas dengan PT Malamoi Olom Wobok dengan nominal US$3.431.970 (nilai penuh) atau setara dengan Rp48.408 dengan jangka waktu sampai dengan 14 Januari 2022.

e. Litigasi

Pada tanggal 31 Mei 2018, Konsorsium Kinarya Liman Margaseta ("KKLM") mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase terhadap Perusahaan dan PGN kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Perselisihan ini disebabkan permintaan pengakhiran perjanjian sewa fasilitas penyaluran bahan bakar gas untuk PLTGU Priok oleh Perusahaan. Pada tanggal 16 Juli 2019, BANI memutuskan bahwa Perusahaan harus membayar ganti rugi kepada KKLM sebesar Rp172.273. Pada tanggal 11 September 2019, Perusahaan mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase dari BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 17 Desember 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan amar putusan berupa membatalkan putusan BANI. Pada tanggal 9 Januari 2020, KKLM mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan putusan arbitrase tersebut ke Mahkamah Agung.

37. *SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES* *(continued)*

c. Others *(lanjutan)*

On 30 September 2021, the Company and PT Pelindo Energi Logistik signed the Second Amendment to the Unification Agreement related to reducing the scope of services for LNG storage facilities, changing the single tariff without storage scope from 3.8 USD/MMBTU to 2.7531 USD/MMBTU, reducing residual losses from 3.56% to 2.12% and including the addition of a facility unpreparedness clause.

d. Commitments

Stand by Letter of Credit ("SBLC")

The Company has a Non Cash Loan facility of SBLC with Bank Rakyat Indonesia, which is used as a gas purchase guarantee from:

- *Gas sales and purchase agreement with Medco Energi Sampang Pty Ltd amounted to US$10,253,469 (full amount) or equivalent to Rp146,307 with a maturity date of 30 August 2022 located in Oyong Oil and Gas Field, East Java.*
- *Gas sales and purchase guarantee with Medco Energi Sampang Pty Ltd amounted to US$12,013,575 (full amount) or equivalent to Rp169,451 with a maturity date of 24 January 2022 located in Wortel Oil and Gas Field, East Java.*
- *Gas sales and purchase guarantee with PT Malamoi Olom Wobok amounted to US$3,431,970 (full amount) or equivalent to Rp48,408 with a maturity date of 14 January 2022.*

e. Litigation

On 31 May 2018, Consortium Kinarya Liman Margaseta ("KKLM") filed an arbitration request for dispute settlement against the Company and PGN to Indonesian National Arbitrage Agency ("BANI"). The dispute was caused by the termination of the lease of gas fuel distribution facility agreement for PLTGU Priok by the Company. On 16 July 2019, BANI ruled in favor of KKLM and required the Company to pay compensation to KKLM amounting to Rp172,273. On 11 September 2019, the Company submitted a petition to annul the BANI arbitration verdict to the District Court of South Jakarta. On 17 December 2019, the District Court of South Jakarta granted the petition by annulling the arbitration verdict from BANI. On 9 January 2020, KKLM submitted an appeal against the District Court of South Jakarta decision annulling the arbitration verdict to the Supreme Court.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/97 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

e. Litigasi (lanjutan)

Pada tanggal 12 Mei 2020, perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menguatkan Putusan BANI. Pada tanggal 12 Oktober 2020, Perusahaan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

KKLM juga mengajukan Sita Eksekusi dalam rangka eksekusi putusan BANI tanggal 16 Juli 2019, yang kemudian diterbitkan Keputusan Penetapan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 55/ Eks.ARB/ 2020 /PN.Jkt/Sel, tanggal 1 Juli 2021 dan Berita Acara No. 55/Eks.ARB/2020/PN.Jkt/Sel tanggal 29 Juli 2021 oleh Pengadilan Negeri terhadap kepemilikan saham Perusahaan di CDB (entitas anak Perusahaan) dan juga pemblokiran salah satu rekening bank milik Perusahaan. Perusahaan mengajukan Gugatan Perlawanan/Verzet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Penetapan Sita Eksekusi tersebut dengan perkara No. 669/ Pdt.Plw/2021/PN Jkt.Sel. Proses sidang terakhir masih dalam tahap pembuktian.

Pada tanggal 10 Agustus 2021, KKLM mengajukan tuntutan pailit melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register perkara No. 35/Pdt. Sus-Pailit/ 2021/ PN.Niaga. Jkt.Pst kepada Perusahaan atas putusan BANI tanggal 16 Juli 2019 yang terdiri atas pengalihan tagihan kepada PT Baloi 128 sebesar Rp5.000 dan KKLM sebesar Rp167.273. Pada tanggal 1 November 2021, Majelis Hakim telah memutuskan untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh KKLM.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, hasil litigasi di atas tidak dapat diestimasi secara andal atau Grup memiliki alasan yang kuat untuk mendukung kasus tersebut, oleh karena itu, Grup berpendapat bahwa keputusan yang merugikan dalam setiap proses hukum yang tertunda atau terancam atau bahwa setiap jumlah yang mungkin harus dibayar dengan alasan tersebut tidak mungkin memiliki dampak material yang merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasinya.

37. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES *(continued)*

e. Litigation *(continued)*

On 12 May 2020, the Supreme Court has decided to annul the verdict from the District Court of South Jakarta and strengthen the arbitration verdict from BANI. On 12 October 2020, the Company submitted a Civil Case Review in the Supreme Court.

KKLM also filed for Execution Seizure in relation to the execution BANI's decision dated 16 July 2019, which was issued as Execution Seizure Decision No. 55/Eks.ARB /2020/PN.Jkt/Sel, dated 1 July 2021 and Minutes No. 55/Eks.ARB/2020/PN.Jkt/Sel dated 29 July 2021 by District Court, South Jakarta, on the Company's share ownership in CDB (a subsidiary of the Company) and also blocking one of the Company's bank account. The Company filed a Countersuit/Verzet in the South Jakarta District Court against the Execution Seizure Decision with case No. 669/Pdt.Plw/2021/PN Jkt.Sel. The final trial process is still in the evidentiary stage.

On 10 August 2021, KKLM filed a bankruptcy claim through the Commercial Court at the Central Jakarta District Court under case No. 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.NiagaJkt. Pst, against the Company on the decision of BANI dated 16 July 2019 which was consists of the transfer of claims to PT Baloi 128 amounting Rp5,000 and KKLM amounting to Rp167,273. On 1 November 2021, the Panel of Judges has decided to reject the petition for a declaration of bankruptcy submitted by KKLM.

Up to the completion date of these consolidated financial statements, the result of the above litigation cannot be reliably estimated or the Group has strong grounds supporting the case, therefore, the Group is of the opinion that adverse decisions in any pending or threatened proceeding or that any amount it may required to pay by reason thereof is unlikely to have a material adverse effect on its financial condition or the resulting operations.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/98 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL

38. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT

a. Kategori dan klasifikasi instrumen keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi dan aset keuangan dari konsesi jasa sebesar Rp 74.502.708 (2020: Rp 79.412.395) sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup mengklasifikasikan utang usaha, pinjaman dari pemegang saham, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas sewa, sebesar Rp9.030.832 (2020: Rp 10.348.922) sebagai kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

a. Categories and classes of financial instruments

As at 31 December 2021, the Group classified its cash and cash equivalents, restricted cash in bank, trade receivables, receivables from related parties and financial assets of service concession amounting to Rp74,502,708 (2020: Rp79,412,395) as financial assets at amortised cost.

As at 31 December 2021, the Group classified its trade payables, loans from a shareholder, accrued expenses and lease liabilities amounting to Rp9,030,832 (2020: Rp 10,348,922) as financial liabilities carried at amortised cost.

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko keuangan, antara lain risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Grup membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan ("DIVMRK") yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perusahaan. Divisi ini juga bertugas untuk memfasilitasi penyusunan profil risiko yang bersifat strategis sebagai himbauan awal kepada manajemen Grup. DIVMRK bertanggung jawab kepada Direktur Perencanaan Korporat ("DIRREN").

Grup telah menetapkan taksonomi risiko dengan membagi risiko menjadi lima kelompok yaitu risiko strategis, risiko keuangan, risiko operasional, risiko proyek, dan risiko kepatuhan. Risiko keuangan diantaranya adalah risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko, Grup mempertimbangkan skala prioritas yang didasarkan pada tingkat risikonya. Tingkat risiko ditentukan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya dan skala dampak yang ditimbulkan.

b. Financial risk management objectives and policies

The Group's overall financial risk management and policies aim to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, while managing their exposure to financial risk, which are market risk (including foreign currency risk and interest rate risk) credit risk and liquidity risks. The Group operates within defined policies that are approved by the Board of Directors.

In managing those risks, the Group established a Risk Management and Compliance Division ("DIVMRK") which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Company's environment. The division is also established to facilitate a strategic risk profile as an early warning to the Group's management. DIVMRK is accountable to the Corporate Planning Director ("DIRREN").

The Group has established risk taxonomy by dividing risk into five categories, which are strategic risk, financial risk, operational risk, project risk and compliance risk. Financial risk includes market risk (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. In managing those risks, the Group considers prioritisation based on risk level. Risk level is determined by the level of possibility and scale of potential impact.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/99 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

Dalam kaitannya dengan risiko keuangan, manajemen menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Grup menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian risiko keuangan terhadap kinerja keuangan Grup. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:

i. Manajemen risiko mata uang asing

Grup melakukan sejumlah transaksi dalam mata uang asing. Akibatnya, timbul eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Kebijakan Grup adalah untuk menjaga risiko mata uang asing dalam batas yang dapat diterima. Grup mencadangkan jumlah mata uang asing pada saat nilai tukar rupiah menguat dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Sensitivitas mata uang asing

Tabel di bawah ini memaparkan rincian sensitivitas Grup untuk setiap 10% kenaikan dan penurunan Rupiah terhadap mata uang asing yang relevan. 10% kenaikan dan penurunan menggambarkan penilaian manajemen terhadap perubahan yang rasional pada nilai tukar setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini. Analisis sensitivitas ini hanya mencakup saldo item moneter setelah pajak dalam mata uang asing dan menyesuaikan translasi pada akhir tahun untuk 10% perubahan dalam nilai tukar mata uang asing.

Analisa sensitivitas ini tidak memperhitungkan dampak dan perubahan kurs mata uang asing yang dapat dikapitalisasi sebagai aset pekerjaan dalam penyelesaian sesuai dengan PSAK No. 26, "Biaya Pinjaman".

38. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

Related to the financial risk, management evaluates and establishes policies for managing each of these risks. The Group applies the financial risk management policies to minimise the impact of the unpredictability of financial risks on the Group's financial performance. The summary of the financial risk management policies is as follows:

i. Foreign currency risk management

The Group undertakes many transactions denominated in foreign currencies. Consequently, there are exposures to exchange rate fluctuations. The Group's policy is to maintain foreign currency exposure within acceptable limits. The Group reserves the foreign currency amount at times the Rupiah strengthens, with amounts as needed.

Foreign currency sensitivity

The following table details the Group's sensitivity to a 10% increase and decrease in the Rupiah against the relevant foreign currencies. 10% increase or decrease represents the management's assessment of the reasonable possible change in foreign exchange rates after considering the current economic conditions. The sensitivity analysis only includes after-tax outstanding foreign denominated monetary items and adjusts their translation at the end of the year for a 10% change in foreign currency rates.

This sensitivity analysis does not consider the potential changes to the amount of foreign exchange differences that can be capitalised as construction in progress assets in accordance with SFAS No. 26, "Borrowing Costs".

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/100 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

38. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT (continued)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

b. Financial risk management objectives and policies (continued)

i. Manajemen risiko mata uang asing (lanjutan)

i. Foreign currency risk management (continued)

Sensitivitas mata uang asing (lanjutan)

***Foreign currency sensitivity** (continued)*

	Dampak terhadap laba setelah pajak/*Effect on profit after tax* 31 Desember/*31 December 2021*						
	US$		EUR		Other		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas dan setara kas	60,295	(60,295)	1,226	(1,226)	3	(3)	*Cash and cash equivalent*
Piutang pihak berelasi	36,510	(36,510)	-	-	-	-	*Receivable from related parties*
Subjumlah	96,805	(96,805)	1,226	(1,226)	3	(3)	*Subtotal*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Utang usaha	10,106	(10,106)	1,843	(1,843)	566	(566)	*Trade payables*
Pinjaman pemegang saham	120,644	(120,644)	-	-	-	-	*Loans from shareholders*
Subjumlah	130,750	(130,750)	1,843	(1,843)	566	(566)	*Subtotal*
Jumlah	**(33,945)**	**33,945**	**(617)**	**617**	**(563)**	**563**	***Total***

	Dampak terhadap laba setelah pajak/*Effect on profit after tax* 31 Desember/*31 December 2020*						
	US$		EUR		Other		
	10%	-10%	10%	-10%	10%	-10%	
Aset Keuangan							***Financial Assets***
Kas dan setara kas	60,952	(60,952)	2,087	(2,087)	6	(6)	*Cash and cash equivalent*
Piutang pihak berelasi	39,832	(39,832)	-	-	-	-	*Receivable from related parties*
Subjumlah	100,784	(100,784)	2,087	(2,087)	6	(6)	*Subtotal*
Liabilitas Keuangan							***Financial Liabilities***
Utang usaha	24,119	(24,119)	1,809	(1,809)	662	(662)	*Trade payables*
Pinjaman pemegang saham	81,381	(81,381)	-	-	-	-	*Loans from shareholders*
Subjumlah	105,500	(105,500)	1,809	(1,809)	662	(662)	*Subtotal*
Jumlah	**(4,716)**	**4,716**	**278**	**(278)**	**(656)**	**656**	***Total***

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga

Grup memiliki transaksi pinjaman pada tingkat suku bunga mengambang. Tingkat suku bunga dari kas di bank dan deposito berjangka tidak signifikan dan semua instrumen keuangan lainnya tidak dikenakan suku bunga. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga mengambang mengekspos Grup terhadap risiko tingkat suku bunga. Grup menganalisis eksposur dari risiko bunga secara dinamis. Beberapa skenario disimulasikan dengan beberapa pertimbangan seperti pembiayaan kembali, memperbaharui dari kondisi yang ada dan alternatif lain pembiayaan.

ii. Interest rate risk management

The Group has loan transactions at floating interest rates. The interest rate risk from cash in banks and time deposits is not significant and all of the financial instruments are not interest bearing. Borrowings issued at floating rates expose the Group to interest rate risk. The Group analyses its interest rate exposure on a dynamic basis. Various scenarios are simulated taking into consideration the refinancing, renewal of existing positions and alternative financing.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/101 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

ii. Manajemen risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Analisis sensitivitas berikut telah ditentukan berdasarkan eksposur Grup terhadap tingkat suku bunga untuk saldo instrumen keuangan terutang setelah pajak pada tanggal pelaporan. Analisis ini disusun dengan mengasumsikan jumlah saldo aset dan liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan, terutang sepanjang tahun.

Sensitivitas tingkat suku bunga

Analisis sensitivitas ini menggunakan asumsi kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin pada tingkat suku bunga yang relevan dengan variable lainnya dianggap konstan. Kenaikan dan penurunan sebesar 50 basis poin merupakan penilaian manajemen atas kemungkinan perubahan yang rasional terhadap tingkat suku bunga setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jika tingkat suku bunga mengalami kenaikan/penurunan 50 basis poin dengan semua variabel lainnya tetap, maka laba setelah pajak untuk tahun berjalan lebih tinggi/rendah masing-masing Rp6.581 dan Rp7.795.

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit timbul dari risiko kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kontraktual yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan kepada Grup. Eksposur risiko kredit Grup timbul terutama atas piutang usaha dari pelanggan. Untuk aset keuangan lainnya seperti kas di bank dan deposito berjangka, Grup mengelola rekening pada beberapa bank dengan reputasi baik dengan tujuan meminimalkan risiko kredit dan untuk menghindari konsentrasi kas yang signifikan dengan satu institusi. Grup menempatkan dana pada beberapa Bank yang kredibel (Catatan 13).

38. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

ii. Interest rate risk management *(continued)*

The sensitivity analysis below has been determined based on the Group's exposure to interest rates for financial instruments after tax at the reporting date. The analysis is prepared assuming the amount of assets and liabilities outstanding at the reporting period end date was outstanding for the whole year.

Interest rate sensitivity

The sensitivity analysis uses an assumption of 50 basis point increase and decrease in the relevant interest rates with all other variables held constant. 50 basis points increase or decrease represents the management's assessment of reasonably possible change in interest rates after considering the current economic conditions.

As at 31 December 2021 and 2020, if interest rate increased/decreased by 50 basis points, with all other variables constant, the profit after tax for the current year would increase/decrease by Rp6,581 and Rp7,795, respectively.

iii. Credit risk management

Credit risk arises from the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Group. The Group exposures to credit risk mainly arise from receivables from its customers. For other financial assets such as cash in banks and time deposits, in order to minimise the credit risk and to avoid significant concentration of cash with one institution, the Group places the funds in several credible banks (Note 13).

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/102 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian mencerminkan eksposur Grup terhadap risiko kredit. Pada tanggal 31 Desember 2021, total maksimum eksposur dari risiko kredit adalah Rp 74.502.673 (2020: Rp 79.412.309) yang terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, rekening bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, piutang pihak berelasi dan aset keuangan dari konsesi jasa.

Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang dapat terjadi karena meningkatnya eksposur risiko kredit.

Pelanggan Grup adalah PLN. Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020, PLN memberikan kontribusi 100% dari jumlah penjualan bersih. Manajemen berkeyakinan bahwa risiko kredit terbatas karena risiko kegagalan kredit PLN rendah dimana Grup telah secara legal terikat dalam perjanjian dengan PLN untuk penjualan listrik dan pelaksanaan jasa lainnya.

Aset keuangan tertentu dinilai secara individu untuk penurunan nilai dan jika ditemukan terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diterapkan secara individu.

Kualitas kredit aset keuangan Grup dinilai dan dikelola berdasarkan peringkat internal. Kualitas kredit dimonitor dengan menggunakan Sistem Peringkat Grup. Sistem peringkat dinilai dan diperbarui secara berkala untuk menjaga akurasi dan konsistensi peringkat risiko. Kualitas kredit dan Sistem Peringkat Grup dinilai sebagai berikut:

38. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iii. Credit risk management *(continued)*

The carrying amount of financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for expected credit losses, represents the Group's exposure to credit risk. As at 31 December 2021, the total maximum exposure from credit risk was Rp 74,502,673 (2020: Rp 79,412,309), which consists of cash in banks, time deposits, restricted cash, trade receivables, other receivables, receivables from related parties and financial asset of service concession.

The Group's objective is to seek continual revenue growth while minimising losses incurred due to increase of credit risk exposure.

The Group's customer is PLN. For the years ended 31 December 2021 and 2020, the sales from PLN make up 100% of the total net revenues. Management believes that the credit risk is limited because the credit default of PLN is low, since the Group has a legally binding agreement with PLN for electricity sales transactions and other services.

Certain financial assets are individually assessed for impairment and, if found to be impaired, the impairment loss should be applied individually.

The credit quality of the Group's financial assets is assessed and managed using internal ratings. The credit quality is monitored using the Group Rating System. The rating system is assessed and updated regularly to maintain accurate and consistent risk rating. The credit quality and the Group Rating System are as follows:

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/103 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iii. Manajemen risiko kredit (lanjutan)

- Tingkat tinggi

  Aset keuangan tingkat tinggi meliputi kas dan setara kas kepada pihak ketiga atau bank yang memiliki kualitas kredit yang baik. Oleh sebab itu, risiko kredit adalah minimal. Untuk piutang usaha, pelanggan maupun pihak berelasi dapat diberi peringkat tingkat tinggi jika tidak memiliki kesulitan keuangan, tidak terjadi pelanggaran kontrak, tidak ada pemberian keringanan dan memiliki kelangsungan usaha.

- Tingkat rendah

  Aset keuangan peringkat rendah termasuk piutang usaha yang tidak diklasifikasikan sebagai tingkat tinggi. Untuk piutang usaha, pelanggan dapat diberi peringkat rendah jika pelanggan memiliki kesulitan keuangan, melakukan pelanggaran kontrak, menerima pemberian keringanan, dan tidak memiliki kelangsungan usaha.

Per 31 Desember 2021, kualitas kredit semua aset keuangan Grup berada dalam klasifikasi tingkat tinggi.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko bahwa Grup akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban terkait dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan lainnya. Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada Dewan Direksi, yang telah membangun kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Grup. Grup mendapatkan fasilitas *non-cash loan* dari beberapa bank khususnya untuk pembukaan L/C dan Bank Garansi.

38. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iii. Credit risk management *(continued)*

- *High grade*

  High grade financial assets include cash and cash equivalents to counterparties with good credit ratings or bank standing. Consequently, credit risk is minimal. For trade receivables, a customer or a related party is given a high grade rating if it does not have any financial difficulty, no breach of contract, no waivers and will be able to continue as a going concern.

- *Low grade*

  Low grade financial assets include trade receivables that are not classified as high grade. For trade receivables, a customer is given a low grade rating if it is deemed to have financial difficulty, there is a breach of contract, waivers and it will not be able to continue as going concern.

As at 31 December 2021, all the Group's financial assets are classified as high grade.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk is defined as the risk that the Group will encounter difficulty in meeting its obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial assets. The ultimate responsibility for liquidity risk management is in the Board of Directors, which has built an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group's short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. The Group obtained non-cash loan facilities from several banks, in particular for opening L/C and Bank Guarantee.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/104 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan (lanjutan)

iv. Manajemen risiko likuiditas (lanjutan)

Selanjutnya Grup juga memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja berkelangsungan dengan cara mempertahankan kecukupan jumlah kas dan setara kas yang mudah dikonversi menjadi uang tunai ketika mengalami gangguan yang tak terduga dari penagihan kas.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Tabel tersebut telah disusun berdasarkan arus kas liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan berdasarkan tanggal paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar. Untuk arus bunga dengan tingkat suku bunga mengambang, nilai arus kas yang tidak terdiskonto diperoleh dari kurva tingkat suku bunga pada akhir periode. Untuk liabilitas keuangan yang didenominasi dengan mata uang asing, jumlah yang tidak didiskontokan ditranslasi dengan kurva nilai tukar *forward* yang relevan pada akhir periode pelaporan. Tanggal jatuh tempo kontraktual berdasarkan pada tanggal paling awal dimana Grup diwajibkan untuk membayar. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan termasuk estimasi pembayaran bunga:

38. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

b. Financial risk management objectives and policies *(continued)*

iv. Liquidity risk management *(continued)*

Furthermore, the Group maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital needs by maintaining adequate amounts of cash and cash equivalents that can be easily converted into cash when experiencing unexpected disruptions from cash collection.

The following table details the Group's remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment periods as at 31 December 2021 and 2020. The table has been drawn up based on the undiscounted cash flow of financial liabilities based on the earliest date on which the Group is required to pay. To the extend that interest flows are floating rate, the undiscounted cashflow is derived from interest rate curves at the end of the reporting period. For foreign currency denominated financial liabilities, the undiscounted amortisation is translated using the relevant forwards exchange curve at the end of the reporting period. The contractual maturity is based on the earliest date on which the Group may be required to pay. The amounts disclosed in the table represent contractual undiscounted cashflows including estimated interest payments:

	31 Desember/*31 December* 2021					
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/*Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha	3,608,941	-	-	-	3,608,941	*Trade payables*
Beban yang masih harus dibayar	319,998	-	-	-	319,998	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	973,952	2,015,075	396,765	2,832,724	6,218,516	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	267,779	418,619	273,181	662,387	1,621,966	*Loan from a shareholder*
	5,170,670	**2,433,694**	**669,946**	**3,495,111**	**11,769,421**	

	31 Desember/*31 December* 2020					
	Dalam satu tahun/ *Within one year*	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ *Over one year but not longer than three years*	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ *Over three years but not longer than five years*	Lebih dari lima tahun/*Over five years*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas						***Liabilities***
Utang usaha	4,981,366	-	-	-	4,981,366	*Trade payables*
Beban yang masih harus dibayar	288,416	-	-	-	288,416	*Accrued expenses*
Liabilitas sewa	963,013	2,242,048	441,456	3,396,208	7,042,725	*Lease liabilities*
Pinjaman dari pemegang saham	257,899	237,474	154,752	447,214	1,097,339	*Loan from a shareholder*
	6,490,694	**2,479,522**	**596,208**	**3,843,422**	**13,409,846**	

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/105 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

c. Manajemen modal

Grup mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan usaha dan untuk memastikan pemenuhan batasan rasio kecukupan modal. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba.

Dewan Direksi Grup secara berkala melakukan tinjauan struktur permodalan. Sebagai bagian dari tinjauan ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

Grup berusaha untuk meminimalkan biaya modal sehingga dapat memaksimalkan nilai Perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan Grup dalam mencari pendanaan akan selalu memperhitungkan risiko keuangan yang mungkin timbul di masa depan.

d. Estimasi nilai wajar

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

PSAK No. 68, "Pengukuran nilai wajar", mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga kuotasian dari pasar yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga) (Tingkat 2);
- Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

38. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

c. Capital management

The Group manages capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern and to ensure compliance with covenants of capital adequacy ratio. The Company capital structure consists of equity shareholders that consist of capital stock, additional paid-in capital and retained earnings.

The Board of Directors of the Group periodically reviews capital structure. As part of this review, the Board of Directors considers the cost of capital and related risks.

The Group seeks to minimise the cost of capital, in order to maximise its value. Therefore, the Group's policy is to seek funding that will always take into account the financial risk that may arise in the future.

d. Fair value estimation

The fair value of financial assets and liabilities is estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

The fair value is the amount for which an asset could be exchanged or a liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

SFAS No. 68, "Fair value measurement", requires disclosure of fair value measurements through the following fair value measurement hierarchy:

- *Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);*
- *Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2);*
- *Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable inputs) (Level 3).*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/106 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

d. Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

1. Kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang pihak berelasi merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

2. Utang usaha dan beban yang masih harus dibayar merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

3. Nilai wajar aset keuangan dari konsesi jasa menggunakan arus kas yang didiskontokan berdasarkan tingkat suku bunga terakhir dari aset keuangan dari proyek konsesi. Pengungkapan nilai wajar aset keuangan dari proyek konsesi jasa dihitung dengan menggunakan input Level 3.

4. Pinjaman dari pemegang saham merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga mengambang, nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut berkisar menunjukkan nilai wajarnya berdasarkan tingkat bunga pasar pada saat tanggal pengakuan awal.

38. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND CAPITAL MANAGEMENT *(continued)*

d. Fair value estimation *(continued)*

As at 31 December 2021 and 2020, the carrying amounts of financial assets and liabilities approximate their fair values as follows:

1. Cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and receivables from related parties that are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.

2. Trade payables and accrued expenses that are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.

3. The fair value of financial assets of service concession is measured using discounted cash flows based on the interest rate of the latest financial assets of concession projects. Fair value disclosure of financial assets from service concession projects is calculated using Level 3 inputs.

4. Loans from a shareholder are liabilities with floating interest rates where carrying values of the financial liabilities approximate their fair values based on market rates on initial recognition date.

39. INFORMASI LAINNYA

Sejak awal tahun 2020, telah terjadi wabah penyakit COVID-19 di seluruh dunia, yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia ("WHO") sebagai pandemi. Pandemi sangat mempengaruhi, antara lain, permintaan global untuk produk dan jasa dan rantai pasokan.

39. OTHER INFORMATION

Since early 2020, there has been an outbreak of COVID-19 around the world, which the World Health Organisation ("WHO") has declared a pandemic. The pandemic may severely affect, among others, global demand for products and services and supply chains.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/107 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

Di saat yang sulit ini, Grup terus berupaya mempertahankan kegiatan operasional dan terus berfokus untuk tetap efisien serta melindungi kesehatan dan keselamatan para karyawan. Tim kesehatan, keselamatan dan lingkungan ("K3LH") di lapangan dan di Jakarta telah menerapkan langkah-langkah pencegahan maupun prosedur kesehatan yang harus dipatuhi setiap karyawan, termasuk peningkatan perilaku higienis, larangan perjalanan non esensial, penerapan jarak fisik di tempat kerja, identifikasi kelompok risiko tinggi di Grup, dan sedapat mungkin bekerja dari rumah untuk para karyawan yang tidak terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Setiap unit bisnis telah menyiapkan rencana manajemen krisis dan menyiapkan tindakan pencegahan yang diperlukan.

Prioritas pertama adalah kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan pemasok Grup. Beberapa kegiatan utama yang telah Grup lakukan pada masa pandemi ini, meliputi antara lain:

a. Menjalankan program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif guna memastikan kesehatan karyawan.
b. Memberikan arahan dan dukungan kepada karyawan.
c. Memantau dengan cermat kapasitas infrastruktur dan keamanan kegiatan operasional.
d. Mengikuti arahan dari Pemerintah dan organisasi kesehatan.
e. Senantiasa melayani dan melibatkan pelanggan dan pemasok.
f. Mengembangkan rencana Grup sebagaimana diperlukan.

Grup telah melakukan penilaian atas dampak kejadian ini terhadap rencana operasi dan bisnis Grup. Berdasarkan penilaian yang dilakukan di atas, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap bisnis dan operasional Grup sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian. Manajemen akan terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan dampaknya terhadap bisnis, posisi keuangan dan hasil operasi Grup.

39. OTHER INFORMATION *(continued)*

In this challenging time, the Group continues to strive to maintain its operational activities and continues to focus on staying efficient and protecting the health and safety of its employees. The health, safety and environment ("K3LH") teams in the site and in Jakarta have implemented preventive measures and health procedures that every employee must comply with, including improvement of the hygienic behaviour, the prohibition of non-essential travel, implementation of physical distancing in the workplace, identification of high risk groups in the Group and wherever possible to work from home for employees who are not directly involved in production activities. Each business unit has prepared a crisis management plan and prepared the necessary preventive measures.

The first priority continues to be the health, safety and well-being of the employees, customers and suppliers. Some of the key activities that the Group has carried out during this pandemic:

a. Conducting promotional, preventive, curative and rehabilitative programmes, to ensure the health of the employees.
b. Providing guidance and support to employees.
c. Closely monitoring infrastructure capacity and the security of the operational activities.
d. Following guidance from the Government and health organisations.
e. Continuing to serve and engage with customers and vendors.
f. Evolving the Group plans as necessary.

The Group has assessed the effects of the event on the Group's operations and business plan. Based on the assessment, management does not foresee any material uncertainty that may have a significant adverse impact on the Group's business and operations up to the completion date of these consolidated financial statements. Management will closely monitor the developments of the COVID-19 pandemic and take necessary actions in relation to its impact on the business, the financial position and operating results of the Group.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/108 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. INFORMASI ARUS KAS / *40. CASH FLOW INFORMATION*

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Grup yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas konsolidasian Grup sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

The table below details changes in the Group liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes. Liabilities arising from financing activities are those for which cash flows were, or future cash flows will be, classified in the Group consolidated statement of cash flows as cash flows from financing activities.

a. Transaksi non-kas / *a. Non-cash transactions*

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi non-kas Grup selama tahun berjalan sebagai berikut:

The table below shows the Group's non-cash transactions during the years as follows:

	2021	2020	
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas:			***Non-cash activities:***
Pembayaran dividen melalui pengurangan piutang usaha dari pihak berelasi	10,218,256	7,365,289	*Dividend payments through deducting trade receivables from related parties*
Pengurangan piutang usaha melalui utang usaha	5,989,112	4,705,767	*Decrease of trade receivables from deduction trade payables*
Perolehan aset hak guna melalui liabilitas sewa	156,516	1,107,798	*Additions of right-of-use assets through lease liabilities*
Perolehan aset tetap melalui utang usaha	120,497	512,388	*Additions of property, plant and equipment through to trade payables*
Penambahan piutang pihak berelasi dari kapitalisasi bunga	35,735	32,696	*Additions of receivables from related parties through interest capitalisation*
Penambahan aset tetap dari kapitalisasi bunga pinjaman	13,024	8,696	*Additional property, plant and equipment from loan interest capitalisation*
Kenaikan nilai properti investasi dari hasil revaluasi	4,517	5,631	*Increment of investment properties from revaluation*
Penambahan investasi pada ventura bersama melalui utang usaha	-	8,236	*Additions of investments in joint ventures through trade payables*
Penyesuaian atas pendapatan dari konsesi jasa akibat dari transaksi KIK EBA	-	1,485,505	*Adjustments of service concession revenue related to KIK ABS transactions*
Penyesuaian asset keuangan dari konsesi jasa yang saling hapus dengan transaksi KIK EBA	-	1,374,581	*Adjustments of financial assets of service concession offset by KIK ABS transactions*
Penyesuaian penghasilan keuangan yang saling hapus dengan beban keuangan transaksi KIK EBA	-	227,740	*Adjustments of finance income offset by finance costs from KIK ABS transactions*
Penyesuaian beban keuangan atas transaksi KIK EBA	-	117,086	*Adjustments of finance costs related to KIK ABS transactions*

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/109 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. INFORMASI ARUS KAS (lanjutan) / *CASH FLOW INFORMATION (continued)*

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

The below tables set out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2021 and 2020 are as follows:

	Saldo awal/ Beginning balance	Arus kas/ Cash flows	Perubahan transaksi non kas/ Non-cash changes: Sewa baru/ New leases*	Perubahan lainnya/ Other changes	Jumlah/ Total	
2021						***2021***
Pinjaman dari pemegang saham	1,043,347	486,547	-	16,828	1,546,722	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	4,035,793	(637,138)	156,516	-	3,555,171	*Lease liabilities*
2020						***2020***
Pinjaman dari pemegang saham	60,284	983,063	-	-	1,043,347	*Loans from a shareholder*
Liabilitas sewa	19,183	(1,107,984)	5,124,594*	-	4,035,793	*Lease liabilities*

*Termasuk penyesuaian atas penerapan awal PSAK No. 73

**Including adjustments upon initial application of SFAS No. 73*

41. REKLASIFIKASI AKUN / *RECLASSIFICATIONS OF ACCOUNTS*

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 telah direklasifikasi agar konsisten dengan presentasi laporan posisi keuangan konsolidasian 2021. Rincian akun-akun yang direklasifikasi adalah sebagai berikut:

The consolidated statements of financial position as at 31 December 2020 have been reclassified to be consistent with the presentation of the 2020 consolidated statements of financial position. The details of the accounts that have been reclassified are as follows:

	2020			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Setelah reklasifikasi/ *After reclassification*	
Liabilitas jangka pendek				***Current liabilities***
Beban yang masih harus dibayarkan	843,976	(555,560)	288,416	*Accrued expenses*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	236,569	558,679	795,248	*Short-term employee benefits liabilities*
Pinjaman pemegang saham	-	248,891	248,891	*Loans from a shareholder*
Liabilitas jangka Panjang				***Non-current liabilities***
Pinjaman dari pemegang saham	1,046,466	(252,010)	794,456	*Loans from a shareholder*
Beban usaha				***Operating expenses***
Bahan bakar dan pelumas	8,266,042	(469,917)	7,796,125	*Fuel and lubricants*
Penyusutan aset hak guna	242,179	469,917	712,096	*Right-of-use assets depreciation*

Grup tidak menyajikan tambahan laporan posisi keuangan konsolidasi pada awal periode sajian paling awal karena reklasifikasi tersebut tidak memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian tahun sebelumnya.

The Group did not present an additional consolidated statement of financial position at the beginning of the earliest period presented because the reclassification did not have a material impact on the previous year's consolidated financial statements.

PT INDONESIA POWER DAN ENTITAS ANAKNYA/*AND ITS SUBSIDIARIES*

Lampiran 5/110 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada 31 Maret 2022.

42. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were responsibilities of the management and were approved by the Directors and authorised for issue on 31 March 2022.





REFERENSI KRITERIA *ANNUAL REPORT AWARD*

Reference for Annual Report Award Criteria

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*

CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
I	**Umum** General		
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris. The annual report is presented in proper and correct Bahasa Indonesia and is recommended to be presented in English as well		√
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca. The annual report is printed in fine quality, with easy-to-read font types and sizes.		√
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. The annual report presents clear identity of the company.		√
4	Nama perusahaan dan tahun *Annual Report*. Company's name and the year of Annual Report.	Nama perusahaan dan tahun *annual report* ditampilkan di: Company's name and the year of Annual Report are shown in: 1. Sampul muka; Front cover; 2. Samping; Side margin; 3. Sampul belakang; dan Back cover; and 4. Setiap halaman. Every page.	√
5	Laporan tahunan ditampilkan di *website* perusahaan. The annual report is available on the company's website.	Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. Includes the current annual report and at the very least the last 4 years.	√
II	**Ikhtisar Data Keuangan Penting** Important Financial Data Highlights		
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information on the Company's operational results with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan: a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan 4. Laba (rugi) per saham. **Catatan:** Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total. The information contains, among others: 1. Sales/revenues; 2. Profit (loss): a. Attributable to the owner of the parent entity; and b. Attributable to the non-controlling interest; 3. Comprehensive income for the period: a. Attributable to the owner of the parent entity; and b. Attributable to the non-controlling interest; and 4. Profit (loss) per share. **Remark:** If the company does not have any subsidiary, the company presents profit (loss) and comprehensive income for the period in total.	14-31

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Information on the Company's financial position with comparisons of 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. The information contains, among others: 1. Total investments in associates; 2. Total assets; 3. Total liabilities; and 4. Total equity.	14-17
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun. Financial ratios in the form of comparisons throughout 3 (three) fiscal years or since the establishment of the company if the business activities have run for less than 3 (three) years.	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. The information encloses 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the company's industry.	21-25
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Information on stock price in tables and charts.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan. The information contains, among others: 1. Number of outstanding shares; 2. The information in tables covers: a. Market capitalization based on the Stock Exchange price where the shares were listed; b. The highest, lowest, and closing price of shares based on the Stock Exchange where the shares were listed; and c. Share trading volume on the Stock Exchange where the shares were listed. 3. Information in charts contains at least: a. The closing price of shares based on the Stock Exchange where the shares were listed; and b. Share trading volume on the Stock Exchange where the shares were listed for every quarter in the last 2 (two) years. **Remark:** if the company does not have market capitalization, information on shares price, and share trading volume, explanation shall be given.	30

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
5	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Information on outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds of the last 2 (two) fiscal years.	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan. The information covers: 1. Number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds; 2. Interest rate/yield; 3. Maturity date; and 4. Bonds/sukuk rating in 2020-2021. **Remark:** if the company does not have bonds/sukuk/convertible bonds, explanation shall be given.	31
III	**Laporan Dewan Komisaris dan Direksi** **Reports of the Board of Commissioners and Board of Directors**		
1	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan *whistleblowing system* (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya. Contains the following: 1. Assessment on the Board of Directors' performance on the company's management and the basis for the assessment; 2. Perspective on the company's business prospects set by Board of Directors and its basic consideration; 3. Assessment on the whistleblowing system (WBS) implementation/management in the company, and the Board of Commissioners' role in the WBS; and 4. Changes in the Board of Commissioners' composition and the reason behind the change (if any).	42-53
2	Laporan Direksi Board of Directors' Report	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: a. Kebijakan strategis; b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan c. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; 2. Analisis tentang prospek usaha; 3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan 4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	56-73

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
		Contains the following: 1. Analysis of the company's performance, which among others covers: a. Strategic policies; b. Comparisons between realizations and targets; and c. Challenges faced by the company, and the steps for solving them; 2. Analysis of business prospects; 3. Development of good corporate governance implementation on the fiscal year; and 4. Changes in Board of Directors' composition and the reason behind the change (if any).	
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Signatures of members of Board Of Commissioners and Board of Directors	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. Contains the following: 1. Signatures are given on separate sheets; 2. Statement on full accountability by the Board of Commissioners and Board of Directors on the truthfulness of the Annual Report's contents; 3. Signed by all members of Board of Commissioners and Board of Directors by stating names and positions; and 4. Written explanation in separate letter from the person(s) concerned in the event that a member of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or written explanation in separate letter from the other member(s) in the event that the person(s) concerned fails to provide a written explanation.	76-77
IV	**Profil Perusahaan** **Company Profile**		
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan Name and complete address of the company	Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, *email*, dan *website*. The information contains, among others: name and address, postcode, telephone number, facsimile number, email, and website.	80-81
2	Riwayat singkat perusahaan Company's brief history	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. **Catatan:** apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. Includes, among others: date/year of establishment, name, changes in the company's name and the effective date of changes on the company's name (if any). **Remark:** explanation shall be given in the event that the entity has never conducted name changes	82-85

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
3	Bidang usaha Business sector	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut Anggaran Dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. Description of, among others: 1. Company's business activities in accordance with the updated Articles of Association; 2. Business activities conducted; and 3. The outcome of products and/or services.	110-115
4	Struktur Organisasi Organizational Structure	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi. In the form of chart, consists of names and positions, at least until the position reporting directly to the Board of Directors.	118-119
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, and Corporate Culture	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. Includes: 1. Corporate vision; 2. Corporate mission; 3. Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors/Board of Commissioners in the fiscal year; and 4. Statement on the Company's corporate culture.	101-109
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris Identity and brief CV of members of Board of Commissioners	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. 1. Name; 2. Position and tenure (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Tenure); and 7. Appointment history (period and tenure) as the member of Board Of Commissioners in the Company since first appointed.	120-125

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
7	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Identity and brief CV of members of the Board of Directors	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. The information contains, among others: 1. Name; 2. Position and tenure (including position in the company or other institutions); 3. Age; 4. Domicile; 5. Educations (Field of Study and Educational Institution); 6. Work experience (Position, Institution, and Tenure); and 7. Appointment history (period and tenure) as the member of Board Of Directors in the Company since first appointed.	126-131
8	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi. Total number of employees (2 years' comparison) and description of competency development which reflects the opportunity for each level of organization.	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. The information contains, among others: 1. Number of employees on each organizational level; 2. Number of employees on each educational level; 3. Number of employees by employment status; 4. Data of employee competence development conducted on the fiscal year, which includes the employee (position) attended training, type of training, and the purposes of training; and 5. Incurred costs for employee competency development on the fiscal year.	138-158

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
9	Komposisi Pemegang Saham. Shareholders Composition.	Mencakup antara lain: 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: a. Nama Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. **Catatan:** apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Detailed name of shareholders comprises of 20 largest shareholders and their shareholding percentage; 2. Details of shareholders and their shareholding percentage include: a. Name of shareholders with 5% or more percent of shares; and b. Community shareholding groups with their respective shareholding of less than 5%. 3. Name of Director and Commissioner as well as their shareholding percentage, directly or indirectly. **Remark:** if Director and Commissioner do not have direct and indirect share, explanation shall be given.	116-117
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi. List of subsidiaries and/or associates.	Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain: 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). In the form of table, covers information: 1. Name of subsidiaries and/or associates; 2. Shareholding percentage; 3. Explanation on the subsidiaries and/or associates' field of business; and 4. Explanation of the operational status of the subsidiaries and/or associates (in operation or has not yet operate).	164-181
11	Struktur grup perusahaan. Company's group structure.	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, *joint venture*, dan *special purpose vehicle* (SPV). Company's group structure in the form of chart, describing the parent entity, subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPVs).	159-163

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk *private placement*) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronologies of shares issuance (including private placement) and/or listing of shares from the issuance date until the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Year of share issuance, number of shares, shares' nominal value, and shares price for each corporate action; 2. Shares number listed after each corporate action; and 3. Name of stock exchange where the shares are listed. **Remark:** if the company does not have share listing chronologies, explanation shall be given.	188
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku. Chronologies of issuance and/or listing of other securities from the issuance date until the end of fiscal year.	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. **Catatan:** apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Name of other securities, year of other securities issuance, interest rate/exchange for other securities, and other securities maturity date; 2. Offer value of other securities; 3. Name of stock exchange where the other securities are listed; and 4. Other securities rating. **Remark:** if the company does not have other securities issuance and listing chronologies, explanation shall be given.	189
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang. Names and addresses of supporting institutions and/or professions.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. The information contains, among others: 1. Name and address of Securities Administration Bureau (BAE)/ parties administrating company's securities; 2. Name and address of Public Accounting Firm; and 3. Name and address of rating agency.	185-188
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional. Awards received in the current fiscal year and/or certification that is still valid in the current fiscal year, both national and international scale.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). The information contains, among others: 1. Name of the award and/or certification; 2. Year of the achievement of awards and/or certification; 3. The agency appreciator and/or certificates; and 4. Validity period (for certification).	86-100

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
16	Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Name and address for subsidiaries and/ or branch offices or representative office (if any).	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan. The information encloses, among others: 1. Names and addresses of subsidiaries; and 2. Names and addresses of branch/representative offices. Remark: explanation shall be given in the event that the company does not have any subsidiaries/branches/representatives.	164-169 184-185
17	Informasi pada *Website* Perusahaan. Information on the Company's Website.	Meliputi paling kurang: 1. Informasi Pemegang Saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Covers at least: 1. Information on Shareholders to last individual owner; 2. Code of Conducts; 3. Information on General Meeting of Shareholders (GMS) at least covers the agenda discussed in the GMS, Minutes of GMS, and important dates, i.e. announcement of GMS date, summoning date for GMS, date of GMS, date of announcement for Minutes of GMS; 4. Separate annual financial statements (the last 5 years); 5. Board Of Commissioners and Board of Directors' Profile; and 6. Charters of Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	194

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
18	Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal. Education and/or training for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.	Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti): 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal, yang diikuti pada tahun buku. **Catatan:** apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan Covers at least information (type and party relevant in attending): 1. Education and/or training for Board of Commissioners; 2. Education and/or training for the Board of Directors; 3. Education and/or training for Audit Committee; 4. Education and/or training for Nomination and Remuneration Committee; 5. Education and/or training for other Committee; 6. Education and/or training for Corporate Secretary; and 7. Education and/or training for Internal Audit Unit, attended on the fiscal year. **Remark:** if there is no education and/or training on the fiscal year, explanation shall be given.	134-137
V	**Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan** **Management Discussion and Analysis of Company's Performance**		
1	Tinjauan operasi per segmen usaha. Operational review per business segment.	Memuat uraian mengenai: 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: a. Produksi; b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; c. Penjualan/pendapatan usaha; dan d. Profitabilitas. Contains descriptions of: 1. Explanation of each business segment. 2. Performance of each business segment, among others: a. Productions; b. Increase/decrease in productions capacity; c. Sales/revenues; and d. Profitability.	264-295
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Description of the company's financial performance.	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan 5. Arus kas.	295-317

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
		Analysis of financial performance containing comparisons between current financial performance and previous year's financial performance and causes for the increase/decrease (in narration and tables), among others concerning: 1. Current assets, non-current assets, and total assets; 2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities; 3. Equity; 4. Sales/revenues, expenses, profit (loss), other comprehensive incomes, and total comprehensive profit of the current period; and 5. Cash flow.	
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan. Discussion and analysis of the company's solvency and liquidity by presenting ratios that are relevant to the company's industry.	Penjelasan tentang: 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. Explanation on: 1. Solvency for short-term and long-term debts; and 2. Collectability Level of Receivables.	318-327
4	Bahasan tentang struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policy*). Discussion on capital structure and capital structure policy.	Penjelasan atas: 1. Rincian struktur modal (*capital structure*) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure policies*); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. Explanation on: 1. Capital structure, consists of interest/sukuk-based debt and equity; and 2. Management policy on capital structure policies; and 3. The management basis for the capital structure policy chosen.	327-329
5	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir. Discussion on material commitments for capital investments (not funding investment) in the current fiscal year.	Penjelasan tentang: 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. **Catatan:** apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan. Explanation on: 1. Name of the party involved in the commitments; 2. The purpose of the commitments; 3. Sources of funds expected to meet these commitments; 4. Currency used; and 5. Planned measures to protect the company from risks arising from relevant currency. **Remark:** explanation shall be given in the event that the company does not have any commitments relating to capital investments in the current fiscal year.	347-353

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
6	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir. Discussion on capital expenditures realized in the current fiscal year.	Penjelasan tentang: 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan. Explanation on: 1. Type of capital expenditure; 2. Purposes of the capital expenditures; and 3. Investment value of capital expenditures spent in the current fiscal year. **Remark:** explanation shall be given in the event that there were no capital expenditures realizations.	354-356
7	Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan. Information on comparisons between the fiscal year's targets and realizations, and expected targets or projection for the coming year relating to revenue, profit, capital structure, and other matters considered important to the company.	Informasi memuat antara lain: 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. The information contains, among others: 1. Comparisons between the fiscal year's targets and realizations; and 2. Expected targets or projection for the coming year.	331-345
8	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Material fact and information after the accounting reporting date.	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. **Catatan:** apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan. Material information and facts occurring after the date of the accountant's report and its impact on future performance and business risks. **Remark:** explanation shall be given in the event that there were no significant events after	367
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Description of company's business prospect.	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. Description of business prospect related to the industry and economy in general, followed by quantitative supporting data from reliable sources.	379-383
10	Uraian tentang aspek pemasaran. Description of marketing aspects.	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. Description of marketing aspect on company products and/or services, among other marketing strategies and market share.	263-264

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per sahamdan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. Description of dividend policy and amount of cash dividends per share and amount of dividends per year announced or paid for the last 2 (two) fiscal years.	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. *Payout ratio*; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. **Catatan:** apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. Contains descriptions of: 1. Policy on distribution of dividends; 2. Total dividends distributed; 3. Amount of cash dividends per share; 4. Payout ratio; and 5. Date of announcement and payment of cash dividends for each year. **Remark:** explanation shall be given in the event that any distribution of dividends is nonexistent.	346-347
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku. Employee and/or Management Stock Ownership Plan (ESOP/MSOP) carried out by the company until the fiscal year.	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga *exercise*. **Catatan:** apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Total ESOP/MSOP shares and its realization; 2. Term; 3. Requirements for entitled employees and/or management; and 4. Exercise price. **Remark:** explanation shall be given in the event that there is no program concerned.	367
13	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana). Realization of the use of proceeds from public offering (in the event that the company still has the obligation to report the proceed use realization).	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). **Catatan:** apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Total proceeds; 2. Planned use of the proceeds; 3. Detailed use of the proceeds; 4. Balance of proceeds; and 5. Date of GMS/GMB approval on changes in the use of proceeds (if any). **Remark:** If there is no information on realization of the use of proceeds from public offering, explanation shall be given.	367

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
14	Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi. Information on material transactions with conflict of interest and/or transactions with affiliated or related parties.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme *review* atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. **Catatan:** apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. Name of affiliates and the nature of affiliation; 2. Explanation of the fairness of transaction; 3. Reason behind the transaction; 4. Realization of transactions in the current fiscal year; 5. Company policy relating to review mechanism on transactions; and 6. Compliance with relevant regulations and provisions. **Remark:** explanation shall be given in the event that there is no transaction concerned.	357-362
15	Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir. Description of regulatory changes having significant impact on the company in the current fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. **Catatan:** apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Name of the law changed; and 2. Its impacts (quantitative and/or qualitative) on the company (if significant) or statement that the impact was not significant. **Remark:** explanation shall be given in the event that there was no regulatory change on the current fiscal year.	370-374
16	Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir. Description of changes in accounting policies applied by the company in the current fiscal year.	Uraian memuat antara lain: 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. **Catatan:** apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Amendment to accountancy policy; 2. The reasons for the amendment; and 3. Its impact quantitatively towards financial statement. **Remark:** explanation shall be given in the event that there are no changes in accounting policies.	368-370

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
17	Informasi kelangsungan usaha. Business continuity information.	Pengungkapan informasi mengenai: 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. *Assessment* manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan *assessment*. Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir. Disclosure of information includes: 1. Potential matters that may significantly affect the business continuity on the current fiscal year; 2. Management assessment on matters in point 1; and 3. Management assumption in carrying out the assessment. Remark: if there were no issues that would affect Company's business continuity in the current fiscal year, the Management's assumption as the base to ensure that there were no potential issues that would significantly affect the business continuity on the current fiscal year shall be disclosed.	378
VI.	***Good Corporate Governence***		
1	Uraian Dewan Komisaris. Board of Commissioners' description.	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai *Board Charter* (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). The descriptions contain, among others: 1. Description of responsibilities of the Board of Commissioners; 2. Assessment on performance of each committee reporting directly to the Board of Commissioners and the basis of assessment; and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct of the Board of Commissioners).	409-419
2	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris). Independent Commissioners (the number is minimum 30% from the total of Board of Commissioners).	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. Includes, among others: 1. The criteria of Independent Commissioner appointment; and 2. Statement of independence from each Independent Commissioner.	414-417
3	Uraian Direksi. Board of Directors' descriptions.	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). The descriptions contain, among others: 1. Scopes of work and responsibilities of each Board of Directors' member; 2. Assessment on performance of committees reporting directly to the Board of Directors (if available); and 3. Disclosure of the Board Charter (guidelines and codes of conduct of Board of Directors).	420-429

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
4	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2020 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Assessment on GCG Implementation for the fiscal year of 2020 consisting of the very least aspects on the Board of Commissioners and Directors.	Memuat uraian mengenai: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. **Catatan:** apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2020, agar diungkapkan. Contains descriptions of: 1. The criteria utilized in assessment; 2. Assessing party; 3. Assessment score on each criterion; 4. Assessment result recommendation; and 5. Reasons on why recommendations are not/have not yet implemented. **Remark:** If there is no assessment on GCG implementation for the fiscal year of 2020, it shall be disclosed.	395-398 450-453
5	Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Description of remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors.	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). **Catatan:** apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Disclosure of remuneration procedure, from nomination to determination of remuneration for Board of Commissioners; 2. Disclosure of remuneration procedure, from nomination to determination of remuneration for Board of Directors; 3. Remuneration structure that indicates components of remuneration and nominal amount of each component for each Board of Commissioners' member; 4. Remuneration structure that indicates components of remuneration and nominal amount of each component for each Board of Directors' member; 5. Disclosure of indicators for the determination of Board of Directors' remuneration; and 6. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or stock option that are received by each Board of Commissioners and Directors' member (if available). **Remark:** If there is no performance bonus, non-performance bonus, and/or stock option that are received by each Board of Commissioners and Directors' member, it shall be disclosed.	454-458

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
6	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan). Frequency and Meeting Attendance Rate that is attended by the majority of members on Board of Commissioners' meeting (at least once in two months), Board of Directors' meeting (at least once in a month), and Joint Meeting between Board of Commissioners and Directors (at least once in four months).	Informasi memuat antara lain: 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan. The information contains, among others: 1. Meeting Date; 2. Meeting Participants; and 3. Meeting Agenda. for each meeting of Board of Commissioners, Board of Directors, and Joint Meetings.	433-449
7	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Information on major and controlling shareholders, both directly and indirectly, to individual holders.	Informasi dimuat dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan Pemegang Saham utama dengan pemegang saham pengendali. **Catatan:** yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali. Informal education must be disclosed in the form of a scheme or diagram that separates major Shareholders from controlling shareholders. **Remark:** what referred to as major shareholders are the party that, both directly and indirectly, has at least 20% (twenty percent) of voting right from the total of shares that are published by a company, but is not the controlling shareholders.	403
8	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. Disclosure of affiliations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Major and/or Controlling Shareholders.	Mencakup antara lain: 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali. **Catatan:** apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Affiliate relationship between fellow members of the Board of Directors; 2. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; 3. Affiliate relationship between members of the Board of Directors and the Major and/or Controlling Shareholders; 4. Affiliation between fellow members of Board of Commissioners; and 5. Affiliation between fellow members of the Board of Commissioners and the Major and/or Controlling Shareholders. **Remark:** If there is no aforementioned affiliation, it shall be disclosed.	431-432

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
9	Komite Audit. Audit Committee.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. Includes, among others: 1. The name, position, and work period of audit committee members; 2. Education history (field of study and education institution) and work experience (position, institution, and work period) of audit committee members; 3. Independence of audit committee members; 4. Description of duties and responsibilities; 5. Description of audit committee activities implementation on the fiscal year; and 6. Meeting frequency and attendance of audit committee.	463-472
10	Komite Nominasi dan/atau Remunerasi. Nomination and/or Remuneration Committee.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/atau remunerasi pada tahun buku; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi direksi. Includes, among others: 1. Names, positions, and brief life history of nomination and/or remuneration committee members; 2. Independence of nomination and/or remuneration committee; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of nomination and/or remuneration committee activities implementation on the fiscal year; 5. Meeting frequency and attendance of nomination and/or remuneration committee; 6. Statements about the existence of guidelines for nomination and/or remuneration committee; and 7. Policy relating to the board of directors' succession.	480-484
11	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh Perusahaan. Other committees reporting directly to the Board of Commissioners that are owned by Company.	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. Includes, among others: 1. Names, positions, and brief life history of other committee members; 2. Independence of other committee; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of other committee activities implementation on the fiscal year; and 5. Meeting frequency and attendance of others committee.	473-480

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
12	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. Description of duties and functions of Corporate Secretary.	Mencakup antara lain: 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. Includes, among others: 1. Name, and brief CV of corporate secretary; 2. Domicile; 3. Description of duties and responsibilities; and 4. Description of corporate secretary's duties implementation on the fiscal year.	487-497
13	Uraian mengenai unit audit internal. Description of internal audit unit.	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. Includes, among others: 1. Name of head of internal audit unit; 2. The number of employee (internal auditor) on internal audit unit; 3. Certification as internal audit profession; 4. The position of internal audit unit within organizational structure; 5. Description of internal audit unit activities implementation on the fiscal year; and 6. Parties appointing and discharging head of internal audit unit.	497-517
14	Akuntan Publik. Public Accountant.	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya *fee* untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan. The information contains, among others: 1. The name and year of public accountant that performs audit on annual financial statements for the past 5 years; 2. The name and year of Public Accountants Firm that performs audit on annual financial statements for the past 5 years; 3. The amount of fee for each type of service that is provided by Public Accountants Firm on the last fiscal year; and 4. Other service provided by Public Accountants Firm and public accountant other than auditing service on annual financial statement on the current fiscal year. **Remark:** explanation shall be given in the event that there is no service aforementioned.	550-553

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
15	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Description of the company's risk management.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Includes, among others: 1. Explanation of risk management system implemented by the company; 2. Explanation of review result carried out over risk management system on the fiscal year; 3. Explanation of risks experienced by the company; and 4. Efforts implemented in managing those risks.	526-549
16	Uraian mengenai sistem pengendalian intern. Description of internal control system.	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – *internal control framework*); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. Includes, among others: 1. Brief explanation of internal control system, among them are financial and operational control. 2. Explanation of compliance between applied internal control system and regulated framework that is acknowledged internationally (COSO-internal control framework); and 3. Explanation of review result carried out over internal control system implementation on the fiscal year.	518-525

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
17	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Description of corporate social responsibility that is related to social responsibilities.	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial. 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup *due diligent* terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan. 3. Informasi tentang *stakeholder* penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan. 4. Informasi tentang isu-isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan. 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakankan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban. 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya *stakeholders engagement* dan meningkatkan *value* untuk *stakeholder* dan *shareholder*. 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijlaankan. 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial. Includes information on: 1. Information on commitment to social responsibility 2. Information on methods and scope of due diligence on social, economic, and environmental impacts of the company activities 3. Information on important stakeholders affected or influenced by the impact of company activities 4. Information on important socio-economic and environmental issues related to the impact of company activities 5. Information on the scope of corporate social responsibility that is both an obligation or more than obligation 6. Information on the company's strategies and work programs in handling social, economic, and environmental issues in stakeholders' engagement, and increasing value for stakeholders and shareholders 7. Information on various programs that exceed the company's minimum responsibilities that are relevant to the business implementation 8. Information about financing and budgets of social responsibility	618-639

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
18	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait *core subject* Hak Azasi Manusia Description of corporate social responsibility related to the core subject of Human Rights	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia. 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia. 3. Informasi tentang perencanaan *corporate social responsibility* bidang Hak Azasi Manusia. 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia. 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia. Includes information on: 1. Information on the commitment and policies of the core subject of social responsibility, i.e. Human Rights 2. Information on the formulation on the core subject of social responsibility, i.e. Human Rights 3. Information on the planning of the core subject of social responsibility, in Human Rights 4. Information on the CSR initiatives implementation in Human Rights 5. Information on the CSR awards and achievement in Human Rights	650-658
19	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait *core subject* Operasi yang adil. Description of corporate social responsibility related to the core subject, i.e. fair operations	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil. 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil. 3. Informasi tentang perencanaan *corporate social responsibility* bidang operasi yang adil. 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil. Includes information on: 1. Information on the commitment and policies of the core subject of social responsibility, i.e. fair operations 2. Information on the formulation on the core subject of social responsibility, i.e. fair operations 3. Information on the planning of the core subject of social responsibility, in fair operations 4. Information on the CSR initiatives implementation in fair operations 5. Information on the CSR awards and achievement in fair operations	640-649

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
20.	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup. Description of corporate social responsibility related to environment.	Mencakup antara lain: 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan. 2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen. 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. 5. Informasi tentang pelaksanaan inisitaif CSR terkait lingkungan hidup. 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. Includes, among others: 1. Information on environmental commitments and policies 2. Information on important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company 3. Information about the target/plan of activities in 2020 set forth by management; 4. Information about activities carried out in relation to the environmental programs related to the company's operational activities 5. Information on CSR initiatives related to environment 6. Information related to the quantitative impacts of such programs; and material utilization that is environment-friendly and recyclable, company's waste processing system, environmental issues complaint mechanism, considerations on credit grants to customer related to environmental aspects, etc. 7. Certification acquired in the environmental field.	659-688
21	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Description of corporate social responsibility that is related to employment, health, and work safety	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subjeck ketenagakerjaan. 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan. 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut. 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan *gender* dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat *turnover* karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Corporate social responsibility commitment and policies related to employment 2. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of employment 3. Information about the target/plan of activities in 2020 set forth by management; and 4. Activities that have been carried out and quantitative effects out of those activities	689-723

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
		5. Information related to employment, occupational health, and safety practices, such as gender equality and equal work opportunity, occupational facilities and safety, employee turnover rate, workplace accidents, remuneration, whistleblowing mechanism on employment, etc.	
22	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen. Description of corporate social responsibility that is related to responsibilities to consumers.	Mencakup antara lain: 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2020 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Goals/activity plan in the year 2020 that was established by management; and 2. Activities that have been carried out and effects from those activities 3. Related to product responsibility, such as consumer's health and safety, product information, facilities, number and response on customers' complaints, etc.	724-740
23	Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Description of corporate social responsibility that is related to social and community development	Mencakup antara lain: 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan kemasyarakatan. 2. Informasi tentang isu isu sosial yang relevan dengan perusahaan. 3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan. 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen. 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan. 8. Terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. Includes, among others: 1. Core corporate social responsibility policies and commitments, the core subject of social and community development 2. Information on social issues that are relevant to the company 3. Information about social risks managed by the company 4. Information on the scope and formulation of social responsibility in the field of social and community development 5. Goals/activity plan in the year 2020 that was established by management; 6. Activities that have been carried out and effects from those activities; and 7. Expenditure 8. Related to social and community development, such as the use of local workforce, empowerment of surrounding communities, reparation of social facilities and infrastructure, other forms of donations, dissemination on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, etc.	740-775

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
24	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan. Significant cases currently faced by the company, subsidiaries, Board of Directors and/or Board of Commissioners member(s) serving during the period of the annual report	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/ gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). **Catatan:** dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan. Includes, among others: 1. Principle case/lawsuit; 2. Dispute/lawsuit settlement status; 3. Risks faced by the company and nominal value of dispute/ lawsuit; and 4. Administrative sanctions imposed to Entity, Board of Commissioners and Board of Directors members, by relevant authorities (capital market, banking, and others) on the current fiscal year (or statement confirming no imposition of administrative sanction exists). **Remark:** explanation shall be given in the event that the company, subsidiaries, or member of the Board of Commissioners and Board of Directors do not have any disputes.	572-575
25	Akses informasi dan data perusahaan. Access to information and corporate data.	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website* (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, *mailing list*, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya. Description of the availability of company information and data to the public, such as through website (in Bahasa Indonesia and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst meeting, etc.	576-586
26	Bahasan mengenai kode etik. Discussion on code of ethics.	Memuat uraian antara lain: 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. **Catatan:** apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. The descriptions contain, among others: 1. Code of ethics basis; 2. Disclosure that the code of ethics applies to all levels of organization; 3. Dissemination of the code of ethics; 4. Sanctions on each type of violations that are regulated on the code of ethics (normative); and 5. Number of code of ethics violation with the sanctions given on current fiscal year. **Remark:** explanation shall be given in the event that there is no code of ethics violation in the current fiscal year.	564-571

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
27	Pengungkapan mengenai *whistleblowing system*. Disclosure on whistleblowing system.	Memuat uraian tentang mekanisme *whistleblowing system* antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi *whistleblower*; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. **Catatan:** apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan. Consists of the description of whistleblowing system, i.e.: 1. Submission of violation reports; 2. Whistleblower protection; 3. Handling of complaints; 4. Parties handling the complaints; and 5. Number of complaints received and processed in the current fiscal year; and 6. Sanctions/follow up on the complaints when the process is finished on fiscal year. **Remark:** Explanation shall be given in the event that there are no complaints received and processed until finish on the current fiscal year.	554-563
28	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Diversity policy for the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors.	Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. **Catatan:** apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya. Description of Company's policy on composition diversity of Board of Commissioners and Board of Directors by education (field of study), work experience, age, and gender. **Remark:** explanation and consideration shall be given in the event that concerned policy is nonexistent.	459-463
VII	**Informasi Keuangan** **Financial Information**		
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Statements from the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Accountability of Financial Statements.	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan. Compliance with related regulations on the Accountability of Financial Statements.	779
2	Opini auditor independen atas laporan keuangan. Independent auditor's opinion on financial statements.		781
3	Deskripsi Auditor Independen di Opini. Independent auditor's description of the opinion.	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama dan tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor izin KAP dan nomor izin Akuntan Publik. The description consists of: 1. Names and signatures; 2. Dates of audit report; and 3. Public Accountants Firm's and Public Accountant's license numbers.	780-781

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
4	Laporan keuangan yang lengkap. Comprehensive Financial Statements.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). Consists comprehensively of elements of financial statements: 1. Statements of financial position; 2. Statements of profit or loss and other comprehensive income; 3. Statements of changes in equity; 4. Statements of cash flows; 5. Notes on financial statements; 6. Comparative information regarding previous period; and 7. Statements of financial position at the beginning of comparative period presented when an entity applies an accounting policy retrospectively or makes statements of post-financial statements, or when an entity reclarifies posts in the financial statements (if relevant).	778-897
5	Perbandingan tingkat profitabilitas. Comparison of profitability level.	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Comparison of performance/profit (loss) between current year and previous year.	784-785
6	Laporan Arus Kas. Statements of Cash Flow.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (*direct method*) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Fulfills the following regulations: 1. Classification in three categories of activity: operation, investment, and funding; 2. The use of direct method in cash flow reporting from operational activities; 3. Separation of presentation between cash receipts and/or cash expenses for the current year in operation, investment, and funding activities; and 4. Disclosure of non-cash transaction must be included in the notes to the financial statements.	787 895-896

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
7	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Accountancy Policy Highlights.	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. Consists at least: 1. Statement of compliance with Financial Accounting Standards (SAK); 2. Basis for the measurement and preparation of financial statements; 3. Income tax; 4. Employee benefits; and 5. Financial instruments.	792-826
8	Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Disclosure of transactions with related parties.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. Matters to be disclosed are as follows: 1. Names of related parties and the nature of relationship with these parties; 2. Transactional value and its percentage against total revenue and relevant expenses; and 3. Total balance and its percentage against total assets or liabilities related.	876-879
9	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan. Disclosure of matters relating to taxation.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. Matters to be disclosed: 1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation; 2. Explanation of relationship between tax expense (income) and accounting profit; 3. Statement acknowledging that Taxable Profits (LKP) from the reconciliation serves as the basis for Corporate Income Tax's Annual Tax Returns (SPT) year 2020; 4. Details of assets and deferred tax liabilities recognized in the financial position statement for each presenting period, and the amount of deferred tax (income) expenses recognized in the income statements if the amount is not visible in the total assets or liabilities of deferred tax recognized in the statements of financial position; and 5. Disclosure of any tax disputes.	862-867

KRITERIA PENILAIAN *ANNUAL REPORT AWARD*
CRITERIA ASSESSMENT OF ANNUAL REPORT AWARD

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
10	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Disclosure of matters relating to fixed assets.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. Matters to be disclosed: 1. Depreciation method used; 2. Description of accounting policy selected, either revaluation or cost model; 3. Methods and significant assumptions used to estimate fixed assets' fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets' fair value (for cost model); and 4. Reconciliation of the gross carrying amount and accumulated depreciation of fixed assets at the beginning and the end of period by presenting: addition, reduction, and reclassification.	833-840
11	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi. Disclosure of matters relating to operational segment.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. Matters to be disclosed: 1. General information covering the factors used to identify unreported segment; 2. Information regarding profit and loss, assets, and liabilities of the reported segment; 3. Reconciliation of total revenue, profit and loss, assets, liabilities of the reported segment, and material elements of the other segments against relevant amount in the entity; and 4. Disclosure at the level of entity, covering information on products and/or services, geographical area, and main customer.	861

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Halaman Page
12	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan. Disclosure related to financial instruments.	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. Matters to be disclosed: 1. Details on financial instruments that are owned along with the classifications; 2. Fair value of each group of financial instruments; 3. Explanation on risks related to financial instruments; market risk, credit risk, and liquidity risk; 4. Risk management policy; and 5. Quantitative risk analysis relating to financial instruments.	885-893
13	Penerbitan laporan keuangan. Publication of financial statements.	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Matters to be disclosed are as follows: 1. Authorization date of publication of the financial statements; and 2. Party responsible for authorizing financial statements.	779 897

2021

Laporan Tahunan

Annual Report

RAISING FUTURE ENERGY, STRENGTHENING SUSTAINABILITY

INDONESIA POWER

PT INDONESIA POWER
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

(62-21) 5267666 (hunting)
(62-21) 525 1923, 525 2623

www.indonesiapower.co.id